

MEMPERKOKOH FONDASI SEBAGAI PREFERENSI UTAMA AKSESIBILITAS FINANSIAL UMKM

STRENGTHENING THE FOUNDATION AS THE PREFERRED
FINANCIAL ACCESSIBILITY FOR MSMEs



PENJELASAN TEMA

THEME EXPLANATION



Memperkokoh Fondasi sebagai Preferensi Utama Aksesibilitas Finansial UMKM

Strengthening The Foundation As The Preferred Financial Accessibility for MSMEs

Di tengah dinamika ekonomi dan kompleksitas industri pembiayaan, PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo hadir bukan sekadar sebagai pelengkap dalam sistem keuangan nasional, melainkan sebagai pilar strategis yang menghubungkan lembaga keuangan dengan para pelaku usaha kecil. Melalui jaringan kemitraan yang luas, ragam produk penjaminan yang relevan, dan kapabilitas manajemen risiko yang solid, Jamkrindo telah menjadi mitra utama bagi lembaga keuangan dalam mengelola risiko pembiayaan kepada sektor UMKM.

Fondasi kelembagaan ini terus dikembangkan melalui serangkaian inisiatif strategis, mulai dari transformasi digital dalam layanan penjaminan, program pemeringkatan dan pembinaan UMKM, hingga penguatan skema penjaminan yang berpihak pada sektor-sektor produktif dan inklusif. Peran Jamkrindo tidak hanya terlihat dalam implementasi program pemerintah seperti KUR dan PEN, tetapi juga dalam pengembangan portofolio penjaminan komersial dan syariah yang kian berkembang.

Selaras dengan mandatnya, Jamkrindo menempatkan perluasan akses keuangan sebagai elemen penting dalam keberlanjutan UMKM, dan secara berkelanjutan bertransformasi menjadi mitra yang tangkas, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan lanskap usaha. Dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan kualitas layanan yang prima, Perusahaan terus mempertegas posisinya sebagai lembaga penjaminan yang dapat diandalkan oleh lembaga keuangan, pemerintah, dan pelaku usaha.

Melalui berbagai langkah tersebut, Jamkrindo tidak hanya mengukuhkan peranannya sebagai pemimpin pasar, tetapi juga merepresentasikan keberpihakan yang terukur terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Preferensi pasar yang telah terbentuk merupakan hasil dari konsistensi, integritas, dan keteguhan dalam membangun fondasi usaha yang kokoh demi mendukung inklusi keuangan nasional.

In the midst of economic dynamics and the complexity of the financing industry, PT Jaminan Kredit Indonesia or Jamkrindo is present not just as a complement in the national financial system, but as a strategic pillar that connects financial institutions with small business actors. Through an extensive partnership network, a variety of relevant guarantee products, and solid risk management capabilities, Jamkrindo has become a key partner for financial institutions in managing financing risks to the MSME sector.

This institutional foundation continues to be developed through a series of strategic initiatives, ranging from digital transformation in guarantee services, MSME rating and fostering programs, to strengthening guarantee schemes that favor productive and inclusive sectors. Jamkrindo's role is not only evident in the implementation of government programs such as KUR and PEN, but also in the development of a growing commercial and sharia guarantee portfolio.

In line with its mandate, Jamkrindo places the expansion of access to finance as an important element in the sustainability of MSMEs, and continuously transforms into an agile, innovative, and adaptive partner to the changing business landscape. By upholding the principles of prudence, good governance, and excellent service quality, the Company continues to emphasize its position as a reliable guarantee institution for financial institutions, government, and businesses.

Through these various steps, Jamkrindo not only strengthens its role as a market leader, but also represents a measurable alignment towards strengthening the people's economy. The market preference that has been formed is the result of consistency, integrity, and determination in building a solid business foundation to support national financial inclusion.

KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY



Menavigasi Transformasi Untuk Tumbuh Berkelanjutan

Jamkrindo senantiasa melakukan inovasi dan transformasi untuk meraih pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya transformasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia (SDM), sistem teknologi informasi, proses bisnis dan operasional, tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan, hingga pengelolaan keuangan. Seluruh aspek tersebut diarahkan untuk memperkuat kinerja perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan.

Dalam transformasi bisnis, Jamkrindo menitikberatkan pada diversifikasi pendapatan. Dalam tata kelola risiko dan kepatuhan dilakukan penguatan three line of defense serta four eyes principle. Jamkrindo juga melakukan penguatan di bidang teknologi dan sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan layanan penjaminan yang inovatif, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan UMKM

Navigating Transformation for Sustainable Growth

Jamkrindo continues to innovate and transform to achieve sustainable growth. Various transformations continue to be carried out both in terms of transformation in the organizational structure, management of Human Resources (HR), technology systems, business and operations, risk management governance and compliance as well as finance to strengthen the company's performance in a sustainable manner.

In business transformation, Jamkrindo focuses on revenue diversification. In risk governance and compliance, three lines of defense and four eyes principle are strengthened. Jamkrindo also strengthened its technology and human resources. This aims to provide guarantee services that are innovative, competitive, and relevant to the needs of MSMEs.



Inovasi untuk Tumbuh Berkelanjutan

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional, Jamkrindo terus melakukan inovasi baik dalam pengembangan produk maupun layanan agar dapat mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang telah terbukti dapat menjadi pilar perekonomian masyarakat Indonesia.

Inovasi yang dilakukan Jamkrindo merupakan wujud dari komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan penjaminan yang terbaik bagi UMKM dan Koperasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan nasional. Langkah tersebut juga merupakan strategi Perusahaan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Innovation for Sustainable Growth

In line with the improvement in national economic growth, Jamkrindo continues to innovate, both in product and service development, so that it can support the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives which have been proven to be pillars of the Indonesian economy.

The innovations conducted by Jamkrindo are a manifestation of the Company's commitment to provide the best guarantee services for MSMEs and Cooperatives so that they can make a greater contribution to national development. This step is also the Company's strategy to achieve sustainable business growth.

PENCAPAIAN TERBAIK 2024

BEST ACHIEVEMENT IN 2024

Pendapatan Penjaminan
Guarantee Income

Rp6,92 Triliun

IDR 6.92 Trillion

Tumbuh 8,93% dibanding tahun sebelumnya Rp6,35 Triliun.
Increasing 8.93% from the previous year's IDR 6.35 Trillion.

Imbal Jasa Penjaminan KUR
KUR Guarantee Fee

Rp4,64 Triliun

IDR 4.64 Trillion

Tumbuh 10,08% dari tahun 2023 Rp4,21 Triliun
Increasing 10.08% from 2023 IDR 4.21 Trillion

Imbal Jasa Penjaminan
Guarantee Service Fee

Rp7,73 Triliun

IDR 7.73 Trillion

Tumbuh 14,76% dibanding tahun 2023 Rp6,74 Triliun.
Increasing 14.76% compared to IDR 6.74 Trillion in 2023.

Aset
Assets

Rp32,36 Triliun

IDR 32.36 Trillion

Tumbuh 0,39% dari tahun sebelumnya Rp32,23 Triliun.
Increasing 0.39% from the previous year's IDR 32.23 Trillion.

Imbal Jasa Penjaminan
Produktif
Productive Guarantee Fee

Rp2,46 Triliun

IDR 2.46 Trillion

Meningkat signifikan 74,86% dibanding tahun 2023 Rp1,41 Triliun.
Significant increase of 74.86% compared to 2023 IDR 1.41 Trillion.



JEJAK LANGKAH JAMKRINDO

JAMKRINDO'S MILESTONES

1970-1981

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) **Penjaminan Kredit Program Usaha Nasional Tani Rakyat Intensifikasi (UNTRI), Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk.**

Cooperative Credit Guarantee Institution (LJKK)
National People's Farming Intensification (UNTRI),
Program Credit Guarantee, Palawija Rice Credit,
Fertilizer Procurement Credit

1981-2000

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Penjaminan Kredit Program untuk Koperasi, seperti TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT.

Program Credit Guarantee for Cooperatives, such as: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Dairy Cow Credit, Palawija Rice Clove Credit, Fertilizer Procurement Credit, KUT.

2000-2008

Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana)

Penjaminan Kredit dengan Business Oriented untuk pengembangan UMKM, pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah.

Business Oriented Credit Guarantee for the development of MSMEs, provision of Profit-Sharing Loans, launch of Sharia Guarantee Products

2008-2020

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan Surety Bond dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes, namely general credit, micro credit, construction credit, guarantees for guarantee bank, distribution guarantees, program guarantees and Surety Bonds and guarantees in the context of SOE synergy

2020-Sekarang
2020- present

PT Jaminan Kredit Indonesia
Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan Surety Bond dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

PT Jaminan Kredit Indonesia

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes, namely general credit, micro credit, construction credit, guarantees for guarantee bank, distribution guarantees, program guarantees and Surety Bonds and guarantees in the context of SOE synergy.

2020

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan Surety Bond dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes, namely general credit, micro credit, construction credit, guarantees for guarantee bank, distribution guarantees, program guarantees and Surety Bonds and guarantees in the context of SOE synergy.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

2	Penjelasan Tema Theme Explanation
4	Kesinambungan Tema Theme Continuity
6	Pencapaian Terbaik 2024 Best Achievement in 2024
7	Jejak Langkah Jamkrindo Jamkrindo's Milestones
8	Daftar Isi Table of Content
01	IKHTISAR KINERJA PERFORMANCE HIGHLIGHT
12	Ikhtisar Data Keuangan Penting Highlight of Important Financial Data
17	Ikhtisar Bisnis Business Highlights
18	Ikhtisar Organisasi Organizational Highlights
19	Ikhtisar Saham Share Highlights
20	Informasi Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi, Serta Informasi Pendanaan Lainnya Information Regarding Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds, and Other Financing Information
21	Peristiwa Penting Event Highlights
02	LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT
34	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report
48	Laporan Direksi Board of Directors Report
62	Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Annual Report Statement of Responsibility
63	Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Annual Report Statement of Responsibility

03	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE
66	Informasi Umum dan Identitas Perusahaan General Information and Company Identity
68	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company
71	Bidang Usaha Serta Produk dan Jasa Line of Business, Products, and Services
77	Kompetensi Inti Core Competencies
78	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture
80	Makna Logo Meaning of Logo
82	Struktur Organisasi Organizational Structure
84	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
91	Profil Direksi Profile of the Board of Directors
98	Profil Pejabat Eksekutif Profiles of Executive Officers
109	Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi Sdm Employee Demographics and Human Capital Competency Development
134	Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders
138	Struktur Bisnis Structure of Business Groups
139	Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV) List of Subsidiaries and Associates/ Joint Venture (JV)/Special Purpose Vehicle (SPV)
141	Kronologis Penerbitan Saham dan Penerbitan Efek Lainnya Chronology of Share Issuance and Other Securities Issuance
141	Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professions
142	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
144	Keanggotaan Asosiasi Association Membership

146	Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan List of Addresses of Subsidiaries and Branches/Representative Offices
153	Informasi pada Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website
04	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
156	Tinjauan Ekonomi dan Industri Economic and Industrial Review
162	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Review by Business Segment
176	Kinerja Entitas Anak, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Performance of Subsidiary, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
179	Aspek Pemasaran Marketing Aspects
182	Tinjauan Keuangan Financial Review
204	Kemampuan Membayar Utang Ability to Pay Debt
206	Tingkat Kolektibilitas Piutang Collectability of Receivables
207	Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal Capital Structure and Capital Structure Policy
209	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Good Investment
210	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts that Occur After the Date of the Accountant's Report
211	Pencapaian Target Tahun 2024 2024 Target Achievement
214	Prospek Usaha dan Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2025 Business Prospects and Company Performance Projections in 2025
218	Kebijakan Dividen dan Pembagiannya Dividend Policy and Its Distribution
219	Perpajakan: Kontribusi Kepada Negara Taxation: Contribution to the State

220	Informasi Tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen Information regarding Employees and/or Management Share Ownership Program
220	Informasi Tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Information Regarding the Use of Public Offering Funds
221	Informasi Material (jika ada), Antara Lain Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal, Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang Terjadi pada Tahun Buku Material Information (if any), Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring, Material Transactions, Affiliated Transactions, and Conflict-of-Interest Transactions that Occurred During the Fiscal Year
232	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdampak Terhadap Perusahaan Changes in Laws and Regulations that Impact the Company
246	Perubahan Kebijakan Akuntansi Change in Accounting Policy
247	Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's Soundness Level
248	Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information
250	Rencana Jangka Panjang Long-Term Plan
05	TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
254	Prinsip Umum General Principles
257	Prinsip Tata Kelola dan Komitmen Penerapannya Oleh Jamkrindo Governance Principles and Commitment to the Implementation by Jamkrindo
268	Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Development of Good Corporate Governance Implementation
273	Struktur dan Proses Tata Kelola Governance Structure and Governance Process

278	Assessment Penerapan Tata Kelola Perusahaan Assessment of Corporate Governance Implementation
295	Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)
307	Direksi Board of Directors
318	Dewan Komisaris Board of Commissioners
342	Komisaris Independen Independent Commissioner
344	Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi Information Disclosure Regarding the Board of Commissioners and the Board of Directors
358	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Commissioners and the Board of Directors Meetings
369	Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Disclosure of Affiliated Relationships Between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders
373	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners
420	Organ Pendukung Direksi Supporting Organs of the Board of Directors
494	Akuntan Publik Public Accountant
499	Manajemen Risiko Risk Management
507	Perkara Penting dan Permasalahan Hukum Important Cases and Legal Issues
508	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data
522	Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance
544	Kode Etik Code of Conduct

556	Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Performance-Based Long-Term Compensation
557	Komitmen Terhadap Anti Korupsi Commitment to Anti-Corruption
559	Kebijakan Terkait Insider Trading Policies Related to Insider Trading
560	Whistleblowing System Whistleblowing System
564	Report of Assets of State Administrators
566	Transparansi Praktik Bad Corporate Governance Transparency of Bad Corporate Governance Practices
06	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
570	Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Governance of Corporate Social Responsibility
573	Prinsip dan Landasan Hukum TJSL di Perusahaan Principles and Legal Foundations of TJSL in the Company
575	Struktur Organisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Organizational Structure of Corporate Social Responsibility
576	Visi dan Misi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Vision and Mission of Corporate Social Responsibility
577	Realisasi dana dan Program Kegiatan TJSL 2024 Realization of the 2024 TJSL Program Funds and Activities
586	Pendanaan Usaha Mikro & Usaha Kecil (PUMK) Micro & Small Enterprise Funding (PUMK)
588	Pengawasan dan Publikasi Program TJSL Monitoring and Publication of the TJSL Program
07	LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS

01

IKHTISAR KINERJA PERFORMANCE HIGHLIGHT

Jamkrindo mencatat kinerja keuangan yang solid sepanjang 2024, ditopang oleh pendapatan penjaminan dan investasi yang tumbuh stabil. Ketahanan ini tercermin dari struktur permodalan yang sehat dan likuiditas yang melampaui ketentuan regulator.

Jamkrindo recorded a solid financial performance throughout 2024, supported by stable growth in guarantee and investment income. This resilience is reflected in a healthy capital structure and liquidity levels exceeding regulatory requirements.



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

HIGHLIGHT OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Tabel Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian
Table of Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

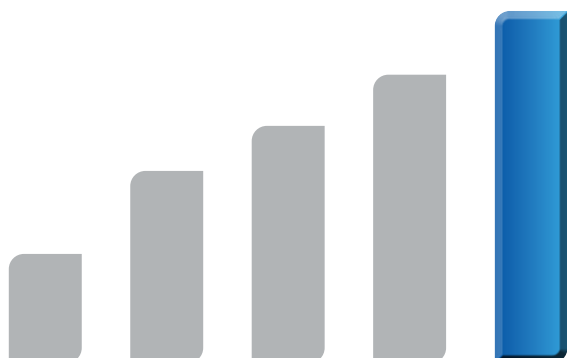
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In IDR millions, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023*	2022	2021	2020
Pendapatan Penjaminan - Bersih Guarantee Income - Net	6.922.049	6.354.728	5.275.810	4.293.841	2.633.393
Beban Penjaminan - Bersih Guarantee Expenses - Net	5.019.391	3.577.322	3.309.233	2.737.761	1.830.400
Pendapatan Penjaminan - Bersih Guarantee Income - Net	1.902.658	2.777.396	1.966.577	1.556.080	802.993
Komisi - Bersih Commission - Net	127.317	61.313	9.279	6.791	(27.195)
Pendapatan Investasi - Bersih Investment Income - Net	1.458.916	1.204.178	844.995	735.428	799.211
Beban Usaha Operating Expenses	(2.041.533)	(2.266.001)	(1.206.253)	(977.748)	(903.670)
Pendapatan Lain-Lain Bersih Net Other Income	7.566	15.099	61.671	16.820	51.130
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	1.287.051	1.638.962	1.580.617	1.224.193	604.162
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefits/(Expenses)	(125.557)	(202.113)	(300.460)	(158.185)	(148.029)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	1.161.494	1.436.849	1.280.157	1.066.008	456.133
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(93.519)	57.517	(152.675)	(87.826)	89.480
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit for the Year	1.067.975	1.494.366	1.127.482	978.182	545.613
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Profit for the Year Attributable to					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	1.161.456	1.437.013	1.279.835	1.065.822	456.312
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	38	(164)	322	186	1
Jumlah Total Total	1.161.494	1.436.849	1.280.157	1.066.008	456.313
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Comprehensive Profit for the Year Attributable to					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	1.067.938	1.494.520	1.127.174	977.992	545.612
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	37	(154)	308	190	1
Jumlah Total Total	1.067.975	1.494.366	1.127.482	978.182	545.613

*Reklasifikasi
*Reclassification

Pendapatan Penjaminan (Rp Juta)
Guarantee Income (IDR-Million)

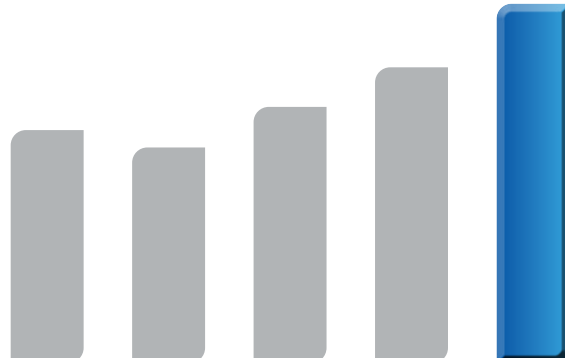
2.633.393 4.293.841 5.275.810 6.354.728 **6.922.049**



2020 2021 2022 2023 **2024**

Pendapatan Investasi Bersih (Rp Juta)
Investment Income Net (Rp-Million)

799.211 735.428 844.995 1.204.178 **1.458.916**



2020 2021 2022 2023 **2024**

Laba Tahun Berjalan (Rp Juta)
Profit for the Year (IDR-Million)

456.133 1.066.008 1.280.157 1.436.849 **1.161.494**



2020 2021 2022 2023 **2024**

Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp Juta)
Profit of the Year Attributable to Owner of the Parent Entity (IDR-Million)

456.312 1.065.822 1.279.835 1.437.013 **1.161.456**



2020 2021 2022 2023 **2024**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statement of Financial Position

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Financial Position

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In IDR millions, unless stated otherwise)

Uraian Description	2024	2023*	2022	2021	2020
Aset Assets					
Kas dan Kas di Bank Cash and Cash in Bank	235.074	185.130	236.997	175.418	101.105
Deposito Wajib dan Berjangka Statutory and Time Deposits	3.960.252	7.233.120	5.451.788	6.740.379	6.496.349
Efek-Efek Marketable Securities	17.633.481	14.745.121	11.981.785	9.474.069	4.632.456
Piutang IJP Guarantee Fee Receivables	1.820.100	2.737.976	3.474.500	2.938.957	2.584.461

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Financial Position

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In IDR millions, unless stated otherwise)

Uraian Description	2024	2023*	2022	2021	2020
Piutang Penjaminan Ulang Re-Guarantee Receivables	572.966	582.178	242.025	257.220	492.611
Aset Estimasi Estimated Asset	1.414.594	791.644	1.023.425	616.704	456.203
Piutang Lain-Lain Other Receivables	259.444	270.755	214.121	106.378	68.739
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Tax	119.514	50.415	0	0	0
Premi dan Fee Dibayar di Muka Prepaid Premiums and Fees	1.786.227	1.243.081	846.200	1.142.599	1.590.461
Beban Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	45.980	66.152	49.223	48.078	16.578
Aset Tetap Fixed Assets	721.504	626.808	513.359	350.236	320.934
Aset Tak Berwujud Intangible Asset	101.268	68.202	34.452	37.076	38.633
Aset Hak Guna Sewa Leasehold Assets	71.270	64.507	42.122	56.004	52.363
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	1.883.252	1.925.862	1.831.441	1.496.967	1.151.643
Aset Lain-Lain Other Assets	5.361	4.282	39.026	4.487	10.145
Jumlah Aset Total Assets	32.358.328	32.231.220	28.009.567	25.351.207	19.122.829
Liabilitas Liabilities					
Hutang Klaim Claim Payables	299.226	81.372	58.074	121.576	4.247
Hutang Pajak Tax Payables	6.352	129.408	441.221	412.310	143.075
Hutang Penjaminan Ulang Re-Guarantee Receivables	1.005.112	633.300	221.100	267.252	246.645
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	40.122	46.098	25.168	30.456	36.066
Pendapatan Ditangguhkan Deferred Income	9.972.831	9.614.359	5.972.691	5.113.451	4.573.289
Cadangan Klaim Claims Reserve	6.316.552	6.956.599	7.571.385	5.662.186	4.180.763
Hutang Lain-Lain Other Payables	1.363.004	1.399.060	809.515	854.404	1.034.001
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post-Employment Benefits Liabilities	81.558	82.437	90.882	85.717	84.929
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	19.014.093	18.877.198	15.190.034	12.516.659	10.266.950
Ekuitas Equity					
Penyertaan Modal Pemerintah Government Equity Participation	10.638.733	10.638.733	10.638.733	10.638.733	7.638.733
Cadangan-Cadangan Reserves	1.921.543	1.562.289	1.242.330	861.845	861.843
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Components	(360.984)	(284.861)	(342.365)	(188.676)	(100.846)
Hak Non Pengendali Non-Controlling Interest	883	1.012	1.000	692	15
Saldo Laba Retained Earnings	1.161.456	1.436.850	1.279.835	1.521.955	456.133

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Financial Position

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In IDR millions, unless stated otherwise)

Uraian Description	2024	2023*	2022	2021	2020
Jumlah Ekuitas Total Equity	13.344.235	13.354.022	12.819.533	12.834.548	8.855.879

*Reklasifikasi
*Reclassification

Jumlah Aset (Rp Juta)
Total Asset (IDR-Million)

19.122.829 25.351.207 28.009.567 32.231.220 **32.358.328**



Jumlah Liabilitas (Rp Juta)
Total Liability (IDR-Million)

10.266.950 12.516.659 15.190.034 18.877.198 **19.014.093**



Jumlah Ekuitas (Rp Juta)
Total Equity (IDR-Million)

8.855.879 12.834.548 12.819.533 13.354.022 **13.344.235**



Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flow

Tabel Arus Kas Konsolidasian
Table of Consolidated Cash Flow

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(In IDR millions, unless stated otherwise)

Uraian Description	2024	2023*	2022	2021	2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flow from Operating Activities	(635.771)	4.237.557	2.185.486	1.664.670	528.040
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flow from Investment Activities	462.690	(3.625.035)	(2.224.011)	(4.590.357)	(115.549)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flow from Funding Activities	(1.133.289)	(1.005.570)	(1.141.466)	3.000.000	(400.000)
Kenaikan/Penurunan (Bersih) Kas dan Setara Kas (Net) Increase/Decrease in Cash and Cash Equivalents	(1.306.370)	(393.048)	(1.179.991)	74.313	12.491
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Start of the Year	6.052.920	6.445.968	7.625.959	101.105	88.614
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	4.746.550	6.052.920	6.445.968	175.418	101.105

*Reklasifikasi
*Reclassification

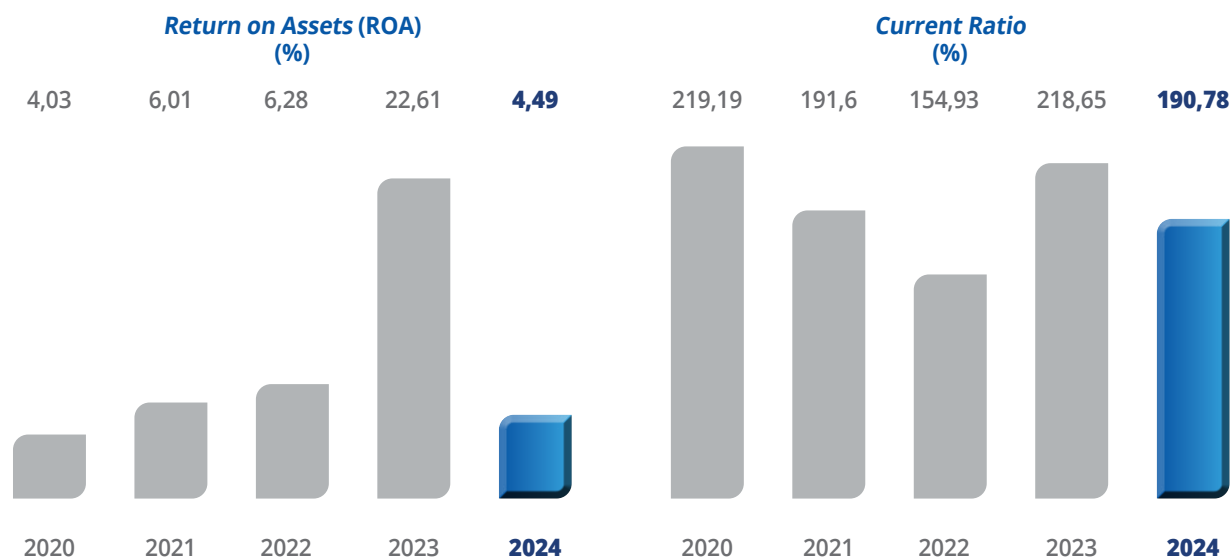
Rasio Keuangan

Financial Ratios

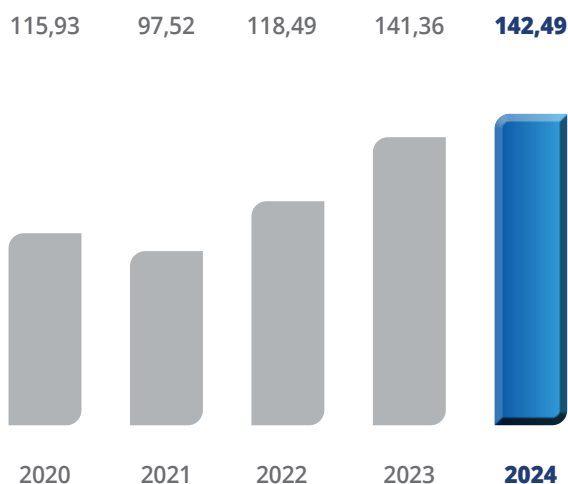
Tabel Rasio Keuangan
Table of Financial Ratios

(Dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)
(In percentages, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Rasio Rentabilitas Profitability Ratio					
Net Profit Margin	14,38	22.61	22.69	24.44	16.14
Profit Margin on Sales	21,02	21.32	24.26	24.34	17.60
Return on Equity (ROE)	8,49	5.83	9.99	9.83	5.20
Return on Assets (ROA)	4,49	22.61	6.28	6.01	4.03
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Current Ratio	190,78	218.65	154.93	191.60	219.19
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Debt to Equity Ratio (DER)	142,49	141.36	118.49	97.52	115.93



Debt to Equity Ratio (DER) (%)



IKHTISAR BISNIS BUSINESS HIGHLIGHTS

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Guarantee Fee Income					
Jumlah IJP KUR Total People's Business Credit (KUR) Guarantee Service Fee (IJP)	4.639.364	4.197.798	3.857.941	2.933.290	1.957.907
Jumlah IJP Non KUR Total Non-People's Business Credit (Non KUR) Guarantee Service Fee (IJP)	3.428.257	2.924.725	1.765.847	2.200.914	1.228.782
Pendapatan Bunga Interest Income					
Bunga Deposito Deposit Interest	418.704	373.267	228.502	295.970	382.815
Bunga Obligasi Bond Interest	699.506	710.447	551.470	313.589	215.437
Pendapatan Sukuk Sukuk Income	255.164	49.355	33.084	16.981	15.704
Pendapatan Reksadana Mutual Fund Income	72.928	51.515	18.616	68.640	180.236
Dividen Dividend	11.378	16.839	8.239	3.686	6.067
Pendapatan <i>Capital Gain</i> Capital Gain Income	19.472	6.544	37.522	53.526	14.078
Efek Beragun Aset Asset-backed Securities	133	298	1.051	2.140	4.929



IKHTISAR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL HIGHLIGHTS

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Health Level					
Nilai Bobot Weight Value	AA+	AA+	93	87.00	81.95
Kriteria Criteria	Sangat Sehat Very Healthy	Sangat Sehat Very Healthy	Sehat "AA" "AA" Healthy	Sehat "AA" "AA" Healthy	Sehat "AA" "AA" Healthy
Kontrak Manajemen Management Contract					
Capaian Key Performance Indicator (KPI) Key Performance Indicator (KPI) Performance	85,35	101.55	100.11	103.11	104.99
Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance					
Skor Assessment GCG GCG Assessment Score	92,99	96,268	94,443	96,316	96,810
Predikat Hasil Assessment GCG GCG Assessment Predicate	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"
Ketenagakerjaan Employment					
Jumlah Karyawan (orang) Total Employees (people)	1.150	1.075	1.025	1.951	1.743
Investasi Pendidikan dan Pelatihan (Rp-juta) Education and Training Investment (IDR-million)	36.612	27.599	23.381	20.360	19.110

IKHTISAR SAHAM

SHARE HIGHLIGHTS

Informasi Saham dan Pemegang Saham

Jumlah saham Jamkrindo sebanyak 10.638.733 lembar saham, dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1 lembar saham Seri A, yang setara dengan 0,01%, dan oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebanyak 10.638.732 lembar saham Seri B, yang setara dengan 99,99%. Hingga akhir tahun 2024, Jamkrindo tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, harga saham penutupan, dan volume perdagangan saham Perseroan. Selain itu, Perseroan juga tidak menyajikan informasi terkait pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, penurunan nilai nominal saham, penghentian sementara perdagangan saham dan penghapusan pencatatan saham.

Informasi Aksi Korporasi

Sepanjang tahun 2023 dan 2024, Jamkrindo tidak melaksanakan aksi korporasi seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), pembagian saham bonus, maupun penyesuaian nilai nominal saham.

Dividen Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku 2023 yang digelar pada 8 Juli 2024 pemegang saham menetapkan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Jamkrindo sebesar Rp1.437,01 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1.078 miliar atau 75% dari laba tahun berjalan yang menjadi hak pemilik entitas induk dibagikan sebagai dividen tunai.

Adapun pembagian Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2023 serta pembagian Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Dividen Saham Share Dividends	2024 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2023) (for the Operating Results of the 2023 Fiscal Year)	2023 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2022) (for the Operating Results of the 2022 Fiscal Year)
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk di Tahun Sebelumnya (Rp-juta) Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity in the Previous Year (IDR-million)	1.437.013	1.279.835
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-juta) Distributed Cash Dividends (IDR-million)	1.077.760	959.876

Information Regarding Shares and Shareholders

The total number of Jamkrindo shares is 10,638,733 shares, with share ownership by the Republic of Indonesia of 1 Series A share, equivalent to 0.01%, and by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) of 10,638,732 Series B shares, equivalent to 99.99%. Until the end of 2024, Jamkrindo has not list its shares on any stock exchange either in Indonesia or abroad. Therefore, the Company does not present information related to the total number of outstanding shares, market capitalization, highest share price, lowest share price, closing share price, and trading volume of the Company's shares. Moreover, the Company also has not presented any information related to stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares, decrease in par value of shares, temporary suspension of stock trading, and delisting of shares.

Information Regarding Corporate Actions

Throughout 2023 and 2024, Jamkrindo did not conduct any corporate actions such as stock splits, reverse stock, bonus shares, or the adjustment of the par value of stocks.

Share Dividend

Based on the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2023 fiscal year that was held on July 8, 2024, the shareholders determined that the net profit for the year attributable to owners of the parent entity Jamkrindo amounted to IDR 1,436.85 billion. Of this amount, IDR 1,078 billion or 75% of the profit for the year that belongs to the owners of the parent entity was distributed as cash dividends.

The distribution of Share Dividends for the business results of the 2023 fiscal year and the distribution of Share Dividends for the business results of the 2022 fiscal year, is summarized in the following table:

Dividen Saham Share Dividends	2024 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2023) (for the Operating Results of the 2023 Fiscal Year)	2023 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2022) (for the Operating Results of the 2022 Fiscal Year)
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	75	75
Tanggal Pengumuman Announcement Date	8 Juli 2024	27 Juni 2023 June 27, 2023
Tanggal Pembayaran Payment Date	28 Oktober 2024	14 Agustus 2023 August 14, 2023

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA INFORMASI PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION REGARDING BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE BONDS, AND OTHER FINANCING INFORMATION

Sampai dengan 31 Desember 2024, Jamkrindo tidak menerbitkan surat utang obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun instrumen efek lainnya yang dapat dimiliki oleh perorangan/badan hukum tertentu. Oleh karena itu, tidak tersedia informasi mengenai jumlah obligasi, sukuk, atau obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga atau imbalan, tanggal jatuh tempo, serta peringkat efek tersebut. Selain itu, Jamkrindo juga tidak menerbitkan surat utang untuk pendanaan lainnya, seperti Surat Berjangka Menengah atau *Medium Term Notes*.

Until December 31, 2024, Jamkrindo has not issued any bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities instruments that can be owned by certain individuals/legal entities. Therefore, there is no information available on the total number of bonds, sukuk, or convertible bonds outstanding, interest or reward rates, maturity dates, and ratings of these securities. Moreover, Jamkrindo also has not issued any debt securities for other funding, such as *Medium-Term Notes*.

PERISTIWA PENTING

EVENT HIGHLIGHTS

5 Januari 2024

January 5, 2024



Perkuat Pelayanan, Jamkrindo Resmikan Gedung Kantor Baru di Padang
Jamkrindo Inaugurates a New Office Building in Padang to Strengthen Services

6 Januari 2024

January 6, 2024



Jamin Kredit Alsintan, Jamkrindo Tekan Perjanjian Kerja Sama dengan 4 Bank Daerah
Jamkrindo Signs Cooperation Agreements with 4 Regional Banks in relation to Guaranteeing the Agricultural Machinery Business Credit (Kredit Usaha Alsintan/KUA)

10 Januari 2024

January 10, 2024



Perkuat Pelayanan, Jamkrindo Resmikan Gedung Kantor Baru di Cirebon
Jamkrindo Inaugurates a New Office Building in Cirebon to Strengthen Services

22 Januari 2024

January 22, 2024



Prospek Stabil, Jamkrindo Kembali Raih Peringkat idAA+ dari Pefindo
Jamkrindo Reaches idAA+ Rating from Pefindo, Indicating a Stable Outlook

26 Januari 2024

January 26, 2024



Jamkrindo Teken Kerja Sama Penjaminan KUR dengan BCA

Jamkrindo Signs a People's Business Credit Guarantee (KUR) Cooperation with Bank Central Asia (BCA)

31 Januari 2024

January 31, 2024



Digitalisasi Proses Penjaminan, Jamkrindo Meluncurkan Aplikasi J@De

Jamkrindo Launches J@De Application to Begin the Digitalization of Guarantee Process

7 Februari 2024

February 7, 2024



Pemegang Saham mengangkat kembali Ari Wahyuni sebagai Komisaris Jamkrindo

Shareholders reappoint Ari Wahyuni as Commissioner of Jamkrindo

21 Februari 2024

February 21, 2024



Jamkrindo sediakan Reverse vending machine (RVM) untuk tingkatan keterlibatan karyawan dalam ESG

Jamkrindo provides Reverse vending machine (RVM) for employee engagement level in ESG

22 Februari 2024

February 22, 2024



Dorong UMKM Naik Kelas, Jamkrindo Gelar *Workshop* Literasi Keuangan Bagi UMKM
Jamkrindo Holds Financial Literacy Workshops for MSMEs to Advocate the Promotion of MSMEs

1 Maret 2024

March 1, 2024



Presiden Joko Widodo Kunjungi *Booth* Jamkrindo di Pameran INACRAFT
President Joko Widodo Visits Jamkrindo Booth at INACRAFT Exhibition

7 Maret 2024

March 7, 2024



Cegah Perundungan di Sekolah, Jamkrindo Raih Penghargaan di Ajang BCOMSS
Jamkrindo Receives an Award at BCOMSS Event for Preventing Bullying in Schools

19 Maret 2024

March 19, 2024



Gelar Safari Ramadan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Tarakan
Jamkrindo Conducts Various Social Activities in Tarakan by Organizing a Safari Ramadan

19 Maret 2024

March 19, 2024



Gelar Safari Ramadan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Pekanbaru

Jamkrindo Conducts Various Social Activities in Pekanbaru by Organizing a Safari Ramadan

19 Maret 2024

March 19, 2024



Gelar Safari Ramadan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Ternate

Jamkrindo Conducts Various Social Activities in Ternate by Organizing a Safari Ramadan

21 Maret 2024

March 21, 2024



Gelar Safari Ramadan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Tangerang

Jamkrindo Conducts Various Social Activities in Tangerang by Organizing a Safari Ramadan

21 Maret 2024

March 21, 2024



Jamkrindo Teken Kerja Sama Penjaminan KUR dengan Bank Nobu

Jamkrindo Signs the People's Business Credit (KUR) Guarantee Cooperation with Nobu Bank

22 Maret 2024

March 22, 2024



Gelar Safari Ramadan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Solo

Jamkrindo Conducts Various Social Activities in Solo by Organizing a Safari Ramadan

4 April 2024

April 4, 2024



Gelar Safari Ramadan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Pekanbaru

Jamkrindo Conducts Various Social Activities in Pekanbaru by Organizing a Safari Ramadan

4 April 2024

April 4, 2024



Jamkrindo Kolaborasi Program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024

Jamkrindo Collaborates with SOEs on the 2024 Fun Homecoming (Mudik) Program

2 Mei 2024

May 2, 2024



Jamkrindo Kerja Sama Penjaminan Bank Garansi dengan Bank SulutGo

Jamkrindo Collaborates with Bank SulutGo Regarding Bank Guarantees

11 Mei 2024

May 11, 2024



Jamkrindo Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Bencana Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat
Jamkrindo Distributes Emergency Response Assistance for the Cold Lava Floods in West Sumatera

16 Mei 2024

May 16, 2024



Jamkrindo Teken Nota Kesepahaman Kolaborasi BUMN dengan Perum LKBN Antara
Jamkrindo Signs a Memorandum of Understanding with Perum LKBN Antara Regarding SOE Collaborations

3 Juni 2024

June 3, 2024



Sambut Perayaan HUT, Jamkrindo Lakukan Berbagai Kegiatan Sosial
Jamkrindo Conducts Various Social Activities for its Anniversary Celebration.

1 Juli 2024

July 1, 2024



HUT ke-54, Jamkrindo Berkomitmen Tingkatkan Kontribusi kepada Negara
For its 54th Anniversary, Jamkrindo is Committed to Increase Contribution to the State

4 Juli 2024

July 4, 2024



Jamkrindo Dorong Peningkatan Kualitas Pelajar Indramayu
Jamkrindo Advocates for Quality Improvement for the Student of Indramayu

4 Juli 2024

July 4, 2024



Jamkrindo Dorong Digitalisasi dan Transformasi Bisnis UMKM di Sumbawa
Jamkrindo Advocates the Digitalization and Business Transformation of MSMEs in Sumbawa

5 Juli 2024

July 5, 2024



Jamkrindo Berbagi Pengalaman dengan Perusahaan Penjaminan Kamboja
Jamkrindo Shares Insights with Guarantee Companies in Cambodia

8 Juli 2024

July 8, 2024



Jamkrindo Berbagi Pengalaman Penjaminan kepada Asosiasi Keuangan Malaysia
Jamkrindo Shares Guarantee Insights with Finance Associations in Malaysia

11 Juli 2024

July 11, 2024



Jamkrindo Tekan Nota Kesepahaman Jasa *Surety Bond* dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang

Jamkrindo Signs a Memorandum of Understanding with the Pinrang Regency Government Regarding Surety Bond Services

24 Juli 2024

July 24, 2024



Hari Anak Nasional, Jamkrindo Gelar Edukasi Kesehatan Mental

Jamkrindo Holds a Mental Health Education Event on National Children's Day

23 Agustus 2024

August 23, 2024



Jamkrindo Lakukan Kegiatan Media Gathering

Jamkrindo Conducts Media Gathering Activities

27 Agustus 2024

August 27, 2024



Dukung Peta Jalan Industri Penjaminan, Jamkrindo Tanda Tangan MoU dengan Seluruh Jamkrida

Jamkrindo Signs a Memorandum of Understanding with All Jamkridas to Advocate the Guarantee Industry Roadmap

31 Agustus 2024

August 31, 2024



Jamkrindo Sebarkan Semangat Nasionalisme di Kolong Jalan Tol Rawamangun

Jamkrindo Ignites National Pride Under Rawamangun Toll Road

8 Oktober 2024

October 8, 2024



Jamkrindo Dorong Industri Kreatif Tanah Air

Jamkrindo Advocates the Country's Creative Industry

16 Oktober 2024

October 16, 2024



PNM dan JAMKRINDO Latih Perempuan Disabilitas Jadi Wirausaha Batik

PNM and JAMKRINDO Trains Women with Disabilities to Become Batik Entrepreneurs

22 Oktober 2024

October 22, 2024



Jamkrindo Selenggarakan *Workshop* Literasi Keuangan Digital di 10 Kota

Jamkrindo Organizes a Digital Financial Literacy Workshop in 10 Cities

22 Oktober 2024

October 22, 2024



Pemegang Saham Angkat Kembali M. Muchlas Rowi Sebagai Komisaris Independen Jamkrindo
Shareholders Reappoint M. Muchlas Rowi as Independent Commissioner of Jamkrindo

4 November 2024

November 4, 2024



Jamkrindo Beri Bantuan Beasiswa untuk Putra Putri TNI dan Polri
Jamkrindo Provides Scholarships for Children of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and National Police (Polri)

31 Desember 2024

December 31, 2024



Jamkrindo Rilis Program Pemberdayaan untuk Warga Binaan di Lapas Tangerang
Jamkrindo Launches the Empowerment Program for Prisoners in the Tangerang Correctional Facility



02

LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

Sebagai bagian dari IFG, Jamkrindo terus memperkuat sinergi antar BUMN keuangan dan menegaskan peran strategisnya dalam memperluas akses pembiayaan UMKM. Kontribusi ini menjadikan Jamkrindo sebagai mitra utama lembaga keuangan dalam menjaga kelangsungan sektor produktif.

As part of IFG, Jamkrindo continues to strengthen synergies among state-owned financial institutions while reinforcing its strategic role in expanding access to MSME financing. This contribution positions Jamkrindo as a key partner for financial institutions in sustaining the country's productive sectors.





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT



Krisna Wijaya

Komisaris Utama/Independen
President/Independent
Commissioner

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami, Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan sepanjang tahun 2024. Laporan ini kami sampaikan sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjalankan amanah secara transparan, sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kami senantiasa berupaya mendukung penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG) secara konsisten dan berkesinambungan di setiap lini organisasi.

Sebagai organ perusahaan, Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam memastikan bahwa Perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan secara kolektif, kami senantiasa mengawasi jalannya pengelolaan Perusahaan, memberikan nasihat strategis kepada Direksi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan. Dalam menjalankan peran ini, Dewan Komisaris tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas, dengan bertanggung jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dear Shareholders and Stakeholders,

With gratitude to God Almighty, we, the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia, herewith submit our report on the implementation of monitoring duties throughout 2024. We submit this report as part of our commitment to fulfilling our mandate with transparency, and as a form of accountability to the Shareholders and all other stakeholders. We remain committed to consistently and continuously supporting the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles across all levels of the organization.

As a company organ, the Board of Commissioners performs a vital role in ensuring that the Company operates in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles. In conducting our duties and responsibilities collectively, we continuously monitor the Company's management, provide strategic guidance to the Board of Directors, and ensure that every policy and decision aligns with the Company's long-term interests. In performing this role, the Board of Commissioners upholds the principle of accountability and assumes full responsibility to the General Meeting of Shareholders (GMS).

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Kondisi Perekonomian dan Industri Penjaminan Tahun 2024

Memasuki tahun 2024, Dewan Komisaris memandang bahwa perekonomian global berada dalam fase stabilisasi yang penuh kehati-hatian. Di tengah pemulihan yang terus berlanjut pasca-pandemi, dunia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, hingga volatilitas pasar keuangan. Kami mencermati bahwa kebijakan moneter ketat yang diterapkan secara luas berhasil menurunkan tekanan inflasi global, namun juga meningkatkan risiko pembiayaan bagi negara-negara berkembang. Di sisi lain, pergeseran rantai pasok global dan akselerasi transisi energi membuka peluang strategis baru, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Dalam konteks nasional, Dewan Komisaris menyambut baik capaian ekonomi Indonesia yang tetap solid di tengah dinamika global tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,1% menunjukkan ketahanan struktural yang kuat, didukung oleh konsumsi domestik yang stabil, investasi yang membaik, serta pengelolaan fiskal dan moneter yang prudent. Stabilitas inflasi yang terjaga dan keberlanjutan reformasi struktural memberikan fondasi kokoh bagi penguatan sektor riil, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Sejalan dengan itu, industri penjaminan di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang positif. Peran strategis sektor ini semakin vital dalam memperluas akses pembiayaan, terutama bagi UMKM, melalui penyediaan jaminan yang mendukung penyaluran kredit oleh lembaga keuangan. Kami memandang bahwa sinergi erat antara pemerintah, otoritas keuangan, perbankan, dan lembaga penjaminan menjadi kunci dalam mengakselerasi inklusi keuangan dan mendukung

The Board of Commissioners' View on the Economic Landscape and Guarantee Industry in 2024

Entering 2024, the Board of Commissioners observes that the global economy is entering a phase of cautious stabilization. Amid the ongoing post-pandemic recovery, the world continues to face a range of challenges, including geopolitical tensions, slowing international trade, and financial market volatility. We observe that the broadly implemented tight monetary policy has succeeded in reducing global inflationary pressures, but also increased financing risks for developing countries. On the other hand, shifts in global supply chains and the acceleration of the energy transition present new strategic opportunities, particularly for countries in the Asian region, including Indonesia.

In the national context, the Board of Commissioners welcomed the achievements of the Indonesian economy, which has remained solid amidst these global dynamics. An economic growth rate of 5.1% reflects strong structural resilience, supported by stable domestic consumption, improving investment, and prudent fiscal and monetary management. The maintained stability of inflation, along with the ongoing structural reforms, provides a strong foundation for strengthening the real sector, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which serve as the backbone of the national economy.

In this regard, the guarantee industry in Indonesia is also experiencing positive growth. The strategic role of this sector is increasingly vital in expanding access to financing, especially for MSMEs, through the provision of collateral that supports lending by financial institutions. We believe that strong synergy among the government, financial authorities, banks, and guarantee institutions is essential to accelerating financial inclusion and promoting inclusive economic growth. The policy

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan penguatan regulasi dan tata kelola yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri penjaminan ke depan.

Dalam lanskap industri yang terus berkembang ini, Perusahaan berhasil menegaskan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan kontribusi volume penjaminan yang dominan, yakni lebih dari 70% pangsa nasional. Kami memandang bahwa pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas operasional dan kekuatan finansial Jamkrindo, tetapi juga menunjukkan peran strategis Perusahaan dalam mendukung pembiayaan UMKM dan pembangunan ekonomi nasional. Dengan daya saing yang terus diperkuat, tata kelola yang solid, dan komitmen terhadap transformasi yang berkelanjutan, Jamkrindo berada pada posisi yang kuat untuk terus mengukir kinerja unggul di masa mendatang.

Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2024

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi Perusahaan sepanjang tahun 2024 dengan mengacu pada Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi, serta Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan. Penilaian ini dilakukan secara menyeluruh oleh masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab, dengan mengacu pada lima perspektif utama dalam KPI Perusahaan.

Kelima perspektif yang menjadi tolok ukur kinerja Direksi mencakup: Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Financial, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, serta Pengembangan Talenta. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan strategis sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan kinerja yang baik dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian skor KPI Perusahaan tercatat sebesar 85,35 dari bobot 100 yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan strategi bisnis, keberhasilan dalam mendorong inovasi, transformasi digital, serta penguatan kontribusi Perusahaan dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM nasional. Dewan Komisaris juga mencatat kemajuan yang signifikan dalam hal pengembangan sumber daya manusia, di mana Direksi berhasil menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan kompetensi dan produktivitas karyawan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja Direksi yang dinilai telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, dengan tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta memitigasi risiko di tengah dinamika industri penjaminan yang terus berkembang.

of strengthening regulation and governance implemented by the Financial Services Authority (OJK) also serves as a critical foundation for ensuring the stability and sustainability of the guarantee industry going forward.

Amid this evolving industry landscape, the Company has successfully reinforced its position as a market leader, contributing over 70% of the national guarantee volume. We believe this achievement reflects not only Jamkrindo's operating capacity and financial strength, but also highlights the Company's strategic role in supporting MSME financing and contributing to national economic development. With its continually strengthened competitiveness, strong governance, and unwavering commitment to sustainable transformation, Jamkrindo is well-positioned to maintain superior performance in the future.

Performance Assessment of the Board of Directors in 2024

The Board of Commissioners assessed the performance of the Company's Board of Directors throughout 2024, by referring to the Key Performance Indicators (KPIs) established in accordance with the provisions outlined in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-11/MBU/11/2020, concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for the Board of Directors, as well as the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-10/MBU/2014, which pertains to Indicators for Assessing the Soundness Level of Financial Services SOEs in the Insurance and Guarantee Services Sector. This assessment is conducted thoroughly by each responsible work unit, referencing the five key perspectives outlined in the Company's KPIs.

The five perspectives used to assess the performance of the Board of Directors include: Economic and Social Value for Indonesia Financial, Business Model Innovation, Technology Leadership, Increased Investment, as well as Talent Development. Based on the evaluation of the work programs and strategic activities executed throughout 2024, the Board of Commissioners deems that the Board of Directors has demonstrated strong performance in achieving the established targets.

The Company's KPI score achievement was recorded at 85.35 out of 100, reflecting the effectiveness of its business strategy implementation, success in fostering innovation and digital transformation, as well as the Company's strengthened contribution to advancing financial inclusion and supporting the growth of national MSMEs. The Board of Commissioners also noted significant progress in human capital development, as the Board of Directors succeeded in fostering a work environment that promotes enhanced employee competence and productivity.

Overall, the Board of Commissioners appreciates the performance of the Board of Directors, which is deemed to have performed its duties and responsibilities effectively, while upholding good corporate governance and proactively mitigating risks amid the evolving dynamics of the guarantee industry.

Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perumusan dan Implementasi Strategi

Sebagai organ Perusahaan yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris senantiasa berperan aktif dalam memastikan bahwa perumusan dan implementasi strategi Perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan selaras dengan tujuan Perusahaan. Pengawasan ini dilaksanakan secara berkelanjutan melalui forum rapat Dewan Komisaris yang rutin diselenggarakan, baik dalam bentuk rapat internal, rapat bersama Direksi, maupun dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat-rapat tersebut menjadi sarana strategis bagi Dewan Komisaris untuk melakukan tinjauan atas kinerja bulanan Perusahaan, memahami dinamika kondisi aktual yang dihadapi, serta memberikan arahan, nasihat, dan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka penguatan pelaksanaan strategi. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, tugas pokok Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, yang dijabarkan dalam 14 kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 huruf b Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.K.N Nomor 07 tanggal 7 Oktober 2022.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris juga berkomunikasi secara aktif dengan para pemangku kepentingan, termasuk Direksi, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B (Holding), maupun pihak lain yang relevan, melalui surat-surat resmi yang mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara akuntabel.

Selain itu, sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Dewan Komisaris juga secara intensif melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut permasalahan strategis yang dihadapi Perusahaan. Melalui rapat bulanan, berbagai isu penting dibahas secara mendalam untuk memastikan bahwa setiap tantangan yang muncul dapat diselesaikan secara tepat dengan dukungan saran dan masukan konstruktif dari Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun berjalan, Dewan Komisaris turut memantau sejumlah agenda strategis yang dilaporkan kepada Pemegang Saham, termasuk Kementerian BUMN dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain: penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), proses Penyertaan Modal Negara, evaluasi pelaksanaan audit tahun 2023 beserta usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan tahun buku 2024, penghapusan dan pemindahtanganan aset bergerak, monitoring investasi Perusahaan, penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, hingga pemutakhiran data dan informasi terkait pemetaan talenta BOD-1.

The Board of Commissioners' Monitoring in Strategy Formulation and Implementation

As an organ of the Company responsible for monitoring and advisory functions, the Board of Commissioners consistently performs an active role in ensuring that the formulation and implementation of the Company's strategy align with the principles of good corporate governance and are in line with the Company's objectives. This monitoring is conducted on an ongoing basis through regular meetings of the Board of Commissioners, including internal meetings, joint meetings with the Board of Directors, as well as forums such as the General Meeting of Shareholders (GMS).

These meetings serve as a strategic platform for the Board of Commissioners to review the Company's monthly performance, gain insights into the actual conditions being faced, and provide guidance, advice, and recommendations to the Board of Directors to strengthen the implementation of strategies. In accordance with the Company's Articles of Association, the primary duties of the Board of Commissioners are to monitor and provide advice to the Board of Directors. These responsibilities are detailed in 14 specific obligations as stipulated in Article 15, paragraph 2, letter b of Notarial Deed No. 07 dated October 7, 2022, issued by Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.K.N.

In performing its monitoring duties, the Board of Commissioners also maintains active communication with stakeholders, including the Board of Directors, the Minister of SOEs as the Series A Dwiwarna Shareholder, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as the Series B Shareholder (Holding), and other relevant parties. This is conducted through official correspondence that reflects the implementation of the monitoring function in an accountable manner.

Moreover, as part of its responsibilities, the Board of Commissioners actively monitors and evaluates the follow-up actions on strategic issues faced by the Company. Through monthly meetings, various key issues are discussed in detail to ensure that emerging challenges are addressed effectively, with the support of constructive advice and input from the Board of Commissioners.

Throughout the year, the Board of Commissioners also monitored several strategic agendas which were reported to shareholders, including the Ministry of SOEs and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Some of the strategic issues of focus included the preparation and ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the State Capital Participation process, the evaluation of the 2023 audit implementation, and the proposal for the appointment of a Public Accounting Firm for the 2024 financial statements audit. Other matters included the write-off and transfer of movable assets, monitoring of the Company's investments, preparation of the Company's Long-Term Work Plan (RJPP) for 2025-2029, approval of the audited annual financial statements, and updates on data and information related to BOD-1 talent mapping.

Dengan pelaksanaan pengawasan yang konsisten, Dewan Komisaris memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang dirumuskan dan dijalankan oleh Direksi sejalan dengan visi misi Perusahaan, mendukung keberlanjutan bisnis, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Mekanisme dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Dalam rangka menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris menerapkan mekanisme yang terstruktur sebagaimana diatur dalam Board Manual Perusahaan. Dokumen ini menjadi pedoman hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, dengan berlandaskan pada ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui mekanisme ini, Dewan Komisaris menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan oleh Direksi berlangsung secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi yang mencakup pertemuan formal maupun informal, komunikasi tertulis dan lisan, serta pelaporan berkala dan khusus. Aspek-aspek ini diatur secara jelas dalam Board Manual, yang meliputi:

- Pertemuan formal dan informal
- Komunikasi formal dan informal
- Laporan berkala
- Pelaporan khusus
- Surat-menyurat atau memorandum
- Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan resmi perusahaan
- Pengaturan benturan kepentingan

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, atau rata-rata satu kali setiap bulan. Frekuensi ini mencerminkan komitmen Dewan Komisaris dalam memberikan arahan yang berkelanjutan serta memastikan setiap langkah strategis Perusahaan mendapat pengawasan dan masukan yang memadai. Selain melalui rapat gabungan, pemberian nasihat juga dilakukan secara intensif melalui komunikasi informal, surat-surat resmi, dan berbagai forum diskusi yang diselenggarakan sepanjang tahun.

Dengan mekanisme yang sistematis dan frekuensi yang terjaga, Dewan Komisaris berperan aktif dalam mengawal arah kebijakan dan operasional Perusahaan agar senantiasa berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, serta mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan.

Through consistent monitoring, the Board of Commissioners ensures that every strategic policy formulated and implemented by the Board of Directors aligns with the Company's vision and mission, supports business sustainability, and delivers added value for all stakeholders.

Mechanism and Frequency of Providing Advice

To fulfill its monitoring and advisory role, the Board of Commissioners follows a structured mechanism as outlined in the Company's Board Manual. This document outlines the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations. Through this mechanism, the Board of Commissioners fulfills its duties to ensure that the Company's management by the Board of Directors is effective, accountable, and aligned with the interests of all stakeholders.

Advisory functions of the Board of Commissioners are done through various forms of communication, including formal and informal meetings, written and verbal communication, as well as periodic and special reporting. These aspects are clearly outlined in the Board Manual, which includes the following:

- Formal and informal meetings
- Formal and informal communication
- Periodic reports
- Special reporting
- Correspondence or Memorandum
- Notification of the implementation of official Company activities
- Conflict of interest

Throughout 2024, the Board of Commissioners consistently held joint meetings with the Board of Directors a total of 12 (twelve) times, averaging one meeting per month. This frequency reflects the Board of Commissioners' commitment to providing continuous guidance and ensuring that each of the Company's strategic measures receives proper oversight and input. In addition to joint meetings, the Board of Commissioners also provides guidance through intensive informal communications, official correspondence, and various discussion forums held throughout the year.

Through a systematic mechanism and consistent frequency, the Board of Commissioners actively monitors the direction of the Company's policy and operations to ensure alignment with good governance principles and the effective implementation of established strategies.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat secara aktif kepada Direksi guna memastikan tercapainya tujuan strategis Perusahaan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris tercatat telah menggelar 12 (dua belas) kali Rapat Internal, 12 (dua belas) kali Rapat dengan mengundang Direksi, serta berpartisipasi dalam 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melalui forum-forum tersebut, Dewan Komisaris secara rutin mengevaluasi kinerja Perusahaan, membahas isu-isu strategis, dan menyampaikan arahan serta rekomendasi kepada manajemen.

Sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang lebih komprehensif atas kondisi operasional di lapangan, Dewan Komisaris juga melaksanakan 5 kali kunjungan lapangan selama tahun 2024. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk melihat langsung pelaksanaan program kerja, sekaligus menampung masukan dari jajaran di lini operasional guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan strategis.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris juga secara aktif menyampaikan surat-surat resmi yang mencerminkan peran pengawasan yang dijalankan. Sepanjang tahun 2024, surat-surat tersebut mencakup antara lain:

- Tanggapan, pendapat, dan saran atas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
- Evaluasi dan pemantauan atas kinerja Direksi, termasuk telaahan usulan remunerasi dan pelaporan kepada pemegang saham.
- Laporan berkala pelaksanaan tugas pengawasan.
- Proses pengusulan dan penunjukan auditor eksternal.
- Saran atas tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, seperti perubahan pejabat, penyertaan modal, transaksi aset, dan kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance.
- Tanggapan terkait pelaksanaan audit eksternal dan internal, penelaahan pengaduan, serta kepatuhan hukum dan kontrak perusahaan.
- Kegiatan penjangkaran, pengusulan bakal calon Direksi, dan penunjukan Pelaksana Tugas Direksi di Perusahaan maupun anak usaha.
- Persetujuan cuti Direksi dan saran atas penyelesaian berbagai permasalahan penting di Perusahaan.
- Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, kunjungan lapangan, serta keputusan-keputusan lainnya yang mendukung kelancaran operasional Perusahaan.

Implementation of the Board of Commissioners' Duties in 2024

Throughout the year, the Board of Commissioners has actively fulfilled its monitoring and advisory roles to the Board of Directors, ensuring that the Company's strategic objectives are achieved in alignment with good governance principles. In the execution of its duties, the Board of Commissioners held 12 (twelve) Internal Meetings, 12 (twelve) Joint Meetings with the Board of Directors, and participated in 2 (two) General Meetings of Shareholders (GMS). Through these forums, the Board of Commissioners consistently evaluates the Company's performance, addresses strategic issues, and provides guidance and recommendations to the management.

As part of its efforts to gain a more comprehensive understanding of operating conditions on the field, the Board of Commissioners conducted five field visits throughout 2024. This activity provides the Board of Commissioners with the opportunity to directly observe the implementation of work programs, while also gathering input from on-field personnel to enhance the effectiveness of monitoring and strategic decision-making.

In conducting its duties, the Board of Commissioners also actively submits official letters that reflect its monitoring role. Throughout 2024, the letters include:

- Feedback, opinions, and suggestions on the preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the Company's Long Term Plan (RJPP).
- Evaluation and monitoring of the performance of the Board of Directors, including review of remuneration proposals and reporting to shareholders.
- Periodic reports on the implementation of monitoring duties.
- The process of nominating and appointing an external auditor.
- Recommendations on actions by the Board of Directors that require the approval of the Board of Commissioners, including changes in executives, capital investments, asset transactions, and compliance to Good Corporate Governance principles.
- Feedback on the outcomes of external and internal audits, the review of complaints, and the compliance to legal requirements and company agreements.
- Screening activities, nomination of candidates for the Board of Directors, and the appointment of Acting Board of Directors members within the Company and its subsidiaries.
- Approval of the Directors' leave and providing advice on resolving various important issues within the Company.
- The implementation of business trip activities, field visits, and other decisions that support the successful operation of the Company.

Selain menjalankan tugas formal pengawasan, Dewan Komisaris juga berperan aktif dalam membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Untuk meningkatkan sinergi di lingkungan Perusahaan, Dewan Komisaris turut hadir dalam berbagai kegiatan seperti Rapat Kerja Nasional Jamkrindo, peringatan Hari Jadi Perusahaan, acara bulan Ramadan dan Halal bi Halal, kegiatan benchmarking, dan sesi sharing bersama mitra strategis.

Pandangan Dewan Komisaris atas Prospek Usaha

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi untuk tahun-tahun mendatang disusun dengan pertimbangan yang matang dan selaras dengan perkembangan industri penjaminan serta arah kebijakan pemerintah. Dewan Komisaris menilai bahwa strategi yang diusulkan mencerminkan respons yang adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global, termasuk perubahan regulasi, tantangan pasar, dan peluang yang muncul dari program-program prioritas pemerintah, seperti peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.

Sebagai organ pengawas, Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam merancang proyeksi bisnis yang realistis namun tetap ambisius, dengan mengedepankan pertumbuhan yang sehat, penguatan tata kelola, serta peningkatan peran Perusahaan sebagai lembaga penjaminan yang strategis bagi perekonomian nasional. Dalam pandangan Dewan Komisaris, rencana usaha tersebut menunjukkan arah yang positif, dengan fokus pada pengembangan produk yang inovatif, ekspansi pasar yang selektif, digitalisasi proses bisnis, dan penguatan manajemen risiko untuk menjaga keberlanjutan usaha.

Dewan Komisaris juga memberikan catatan agar Direksi senantiasa menjaga fleksibilitas dalam implementasi strategi, mengingat potensi volatilitas kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian target-target usaha. Selain itu, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan portofolio penjaminan, serta memperluas kolaborasi dengan mitra strategis demi memperkuat daya saing Perusahaan.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris meyakini bahwa dengan pelaksanaan strategi yang disiplin dan mitigasi risiko yang memadai, prospek usaha Perusahaan ke depan akan tetap tumbuh secara berkelanjutan, sekaligus mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Other than conducting formal monitoring duties, the Board of Commissioners also performs an active role in building harmonious relationships with all stakeholders, both internal and external. To enhance synergy within the Company, the Board of Commissioners participated in various activities, including the Jamkrindo National Work Meeting, the Company Anniversary, Ramadan and Halal bi Halal events, benchmarking activities, and sharing sessions with strategic partners.

The Board of Commissioners' View on Business Prospects

The Board of Commissioners is of the view that the business outlook prepared by the Board of Directors for the coming years has been formulated with careful consideration and is aligned with developments in the guarantee industry as well as the direction of government policy. The Board of Commissioners views the proposed strategy as an adaptive response to both national and global economic dynamics, encompassing regulatory changes, market challenges, and emerging opportunities driven by the government's priority programs, such as enhancing access to financing for MSMEs.

As the supervisory organ, the Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of Directors in formulating a business projection that is both realistic and ambitious, prioritizing healthy growth, strengthened governance, and the enhanced role of the Company as a strategic guarantee institution for the national economy. In the view of the Board of Commissioners, the business plan demonstrates a positive direction, with a focus on developing innovative products, selective market expansion, business process digitalization, and strengthening risk management to ensure business sustainability.

The Board of Commissioners also emphasizes the importance of the Board of Directors maintaining strategic flexibility, recognizing that external conditions may remain volatile and could significantly impact the achievement of business objectives. Furthermore, the Board of Commissioners encouraged the Board of Directors to consistently enhance operational efficiency, optimize the underwriting portfolio, and broaden collaboration with strategic partners to reinforce the Company's competitiveness.

Overall, the Board of Commissioners believes that through disciplined strategy execution and effective risk mitigation, the Company's future business prospects will sustain continuous growth while delivering optimal added value to all stakeholders.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Penerapan dan Perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan GCG di lingkup Perusahaan terus menunjukkan perkembangan yang positif dan menjadi fondasi penting dalam menjaga daya tahan, reputasi, serta kinerja Perusahaan di tengah dinamika industri penjaminan yang semakin kompleks. Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga berperan strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik kepercayaan investor, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen Direksi yang secara konsisten memastikan bahwa seluruh kebijakan dan aktivitas Perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham, mitra kerja, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Dewan Komisaris juga melihat bahwa perkembangan GCG di Jamkrindo terus disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan dunia usaha masa kini, antara lain melalui penyempurnaan sistem pengawasan, pengendalian internal yang lebih kuat, penerapan etika kerja yang tinggi, pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab, serta pengelolaan risiko yang semakin efektif. Selain itu, integritas dalam pelaporan keuangan dan hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholders tetap menjadi perhatian utama.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, Dewan Komisaris mendukung langkah evaluasi berkala yang dilakukan Perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh prinsip GCG diterapkan secara menyeluruh dan konsisten di setiap lini organisasi. Evaluasi ini menjadi alat penting dalam menjaga standar tata kelola yang berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan regulasi maupun dinamika industri.

Sebagai BUMN yang tunduk pada ketentuan Kementerian BUMN, Jamkrindo juga telah memastikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Dewan Komisaris menilai bahwa kepatuhan ini semakin memperkuat posisi Jamkrindo sebagai Perusahaan yang berkomitmen pada hukum, etika bisnis, dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

The Board of Commissioners' View on the Implementation and Development of Good Corporate Governance

The Board of Commissioners views that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the Company continues to demonstrate positive progress and serves as a crucial foundation for maintaining the Company's resilience, reputation, and performance amidst the increasingly complex dynamics of the guarantee industry. The Board of Commissioners believes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is not merely a normative obligation but also serves a strategic role in fostering a healthy business environment, building investor confidence, and supporting sustainable economic development.

In performing its duties, the Board of Commissioners appreciates the Board of Directors for their steadfast commitment to consistently ensuring that all Company policies and activities are conducted in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. These efforts not only improve operational efficiency, but also create added value for shareholders, partners, and all other stakeholders.

The Board of Commissioners also observes that the development of GCG at Jamkrindo is continuously adapted to the challenges and demands of today's business environment, including through the enhancement of the monitoring system, strengthening of internal controls, adherence to high work ethics, more responsible decision-making, as well as more effective risk management. Moreover, maintaining integrity in financial reporting and nurturing harmonious relationships with all stakeholders continue to be main priorities.

As part of its ongoing efforts, the Board of Commissioners supports the Company's regular evaluation initiatives to ensure that Good Corporate Governance (GCG) principles are thoroughly and consistently implemented across all levels of the organization. This evaluation serves as a vital instrument in upholding governance standards that are both competitive and responsive to regulatory changes and evolving industry dynamics.

As a SOE subject to the provisions of the Ministry of SOEs, Jamkrindo has also ensured full compliance with the latest applicable regulations, including SOE Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. The Board of Commissioners believes that this compliance further solidifies Jamkrindo's position as a Company committed to legal compliance, business ethics, and long-term business sustainability.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris memandang bahwa sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal merupakan dua pilar penting dalam memastikan ketahanan dan keberlanjutan usaha Perusahaan di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks. Dalam pandangan Dewan Komisaris, pelaksanaan kedua sistem ini di Jamkrindo terus mengalami perbaikan yang sejalan dengan perkembangan praktik terbaik, peraturan yang berlaku, dan kebutuhan Perusahaan dalam menghadapi tantangan yang terus berubah.

Dewan Komisaris mencermati bahwa Direksi bersama unit terkait telah membangun kerangka manajemen risiko yang komprehensif, mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara menyeluruh di setiap lini usaha. Implementasi sistem ini telah membantu Perusahaan dalam menjaga eksposur risiko pada tingkat yang dapat diterima, sekaligus memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih cermat dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, sistem pengendalian internal yang diterapkan dinilai telah berjalan efektif dalam mendukung integritas laporan keuangan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris menilai bahwa peran fungsi audit internal dalam melakukan penilaian secara independen terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga tata kelola yang sehat di lingkungan Perusahaan.

Sebagai organ pengawas, Dewan Komisaris menjalankan peran strategis dalam memastikan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal diterapkan secara konsisten dan efektif. Dewan Komisaris secara rutin melakukan pemantauan, baik melalui rapat-rapat dengan Direksi maupun melalui pembahasan laporan hasil audit dan pemantauan risiko yang disampaikan oleh unit terkait. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan masukan dan rekomendasi strategis kepada Direksi untuk terus menyempurnakan kerangka kerja risiko dan pengendalian internal agar adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis maupun regulasi.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Penerapan Whistleblowing System serta Peran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* atau WBS) Jamkrindo merupakan elemen penting dalam memperkuat budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh lingkungan Perusahaan. Sebagai mekanisme yang memungkinkan setiap individu untuk melaporkan potensi pelanggaran secara aman dan bertanggung jawab, WBS telah berkontribusi nyata dalam mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai tindakan yang berisiko merugikan Perusahaan.

The Board of Commissioners' View on the Implementation of Risk Management System and Internal Control System

The Board of Commissioners views the risk management and internal control systems as two critical pillars in ensuring the Company's resilience and long-term sustainability, particularly amid increasingly complex and dynamic business environments. In the view of the Board of Commissioners, the implementation of these two systems at Jamkrindo continues to progress in alignment with evolving best practices, applicable regulations, and the Company's needs in addressing ever-changing challenges.

The Board of Commissioners observed that the Board of Directors and relevant units have established a comprehensive risk management framework, encompassing the processes of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks across all lines of business. The implementation of this system has helped the Company to keep its risk exposure within acceptable thresholds, while also establishing a strong foundation for more informed, prudent, and accountable decision-making.

Accordingly, the internal control system in place is regarded as effective in supporting the integrity of financial reporting, enhancing operational efficiency, and ensuring compliance with prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners believes that the internal audit function's independent evaluation of the adequacy and effectiveness of internal controls has significantly contributed to upholding sound governance within the Company.

As the supervisory organ, the Board of Commissioners performs a strategic role in ensuring that risk management and internal control systems are consistently and effectively implemented. The Board of Commissioners routinely conducts monitoring, both through meetings with the Board of Directors and through discussion of audit reports and risk monitoring submitted by relevant units. Furthermore, the Board of Commissioners provides strategic input and recommendations to the Board of Directors to continuously enhance the risk management and internal control framework, ensuring adaptability to evolving business and regulatory environments.

The Board of Commissioners' View on the Implementation of the Whistleblowing System and their Role in It

The Board of Commissioners recognizes that the implementation of Jamkrindo's Whistleblowing System (WBS) is a vital component in fostering a culture of integrity, transparency, and accountability across the Company. As a mechanism enabling individuals to report potential violations safely and responsibly, the WBS has played a significant role in supporting prevention and early detection efforts against actions that could jeopardize the Company.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris mencatat bahwa sistem WBS Jamkrindo telah disusun secara komprehensif, dengan ruang lingkup pengaduan yang mencakup tindakan kecurangan, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, penyimpangan aset, benturan kepentingan, pelanggaran kode etik, hingga pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dengan berbagai saluran pelaporan yang mudah diakses, seperti surat tertulis, layanan SMS/Whatsapp, serta email khusus, WBS memberikan alternatif yang inklusif bagi pelapor untuk menyampaikan aduan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas.

Sebagai bagian dari perannya, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi WBS, termasuk memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran yang masuk ditindaklanjuti secara independen, adil, dan profesional. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk terus menyempurnakan mekanisme pelaporan, pengelolaan aduan, serta perlindungan terhadap pelapor agar kepercayaan terhadap sistem ini tetap terjaga.

Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan WBS yang kuat akan membantu Perusahaan dalam memitigasi risiko reputasi dan operasional, serta menjaga kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus mendorong penguatan sistem ini melalui pemantauan rutin, pemberian arahan strategis, serta mendukung pengembangan kapasitas aparat pengelola WBS agar selalu selaras dengan praktik terbaik dan dinamika regulasi yang berlaku.

Penilaian Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa seluruh komite di bawah pengawasannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional Perusahaan. Untuk itu, Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja terhadap masing-masing komite secara berkala melalui mekanisme self-assessment yang terstruktur dan berbasis sistem penilaian yang telah ditetapkan.

- **Komite Audit**
Penilaian terhadap kinerja Komite Audit dilakukan dengan pendekatan self-assessment yang mencakup penilaian baik secara individu maupun kolektif. Setiap aktivitas yang tercantum dalam Program Kerja Komite Audit telah dirumuskan dengan indikator kuantitatif yang jelas, serta diberikan bobot tertentu sebagai tolok ukur pencapaian. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Audit berhasil meraih skor kinerja sebesar 112,5, yang mencerminkan komitmen kuat komite dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam aspek pelaporan.
- **Komite Nominasi dan Remunerasi**
Evaluasi terhadap kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi juga dilaksanakan melalui mekanisme self-assessment yang mengacu pada sistem yang dirancang oleh Dewan Komisaris. Setiap kegiatan dalam Program Kerja komite ini diberikan bobot penilaian tertentu untuk memastikan

In its implementation, the Board of Commissioners noted that Jamkrindo's Whistleblowing System (WBS) is comprehensively structured, covering complaints related to fraud, abuse of authority, gratuities, asset misappropriation, conflicts of interest, violations of the code of ethics, and breaches of laws and regulations. With a variety of easily accessible reporting channels, such as written letters, SMS/WhatsApp services, and dedicated emails, the WBS provides whistleblowers with inclusive options to submit complaints while ensuring confidentiality of their identity.

As part of its role, the Board of Commissioners monitors the implementation of the WBS, ensuring that all reports of violations are handled with independence, fairness, and professionalism. The Board of Commissioners also encourages the Board of Directors to continuously enhance the reporting mechanisms, complaint handling processes, and whistleblower protection measures to ensure sustained trust in the system.

The Board of Commissioners believes that implementing a dependable Whistleblowing System (WBS) will help the Company mitigate reputational and operational risks, while also maintaining stakeholder trust. Therefore, the Board of Commissioners is committed to continuously promoting the strengthening of this system through regular monitoring, strategic guidance, as well as support for capacity building of the WBS management team, ensuring alignment with best practices and evolving regulatory requirements.

Assessment of Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners consistently ensures that all committees under its monitoring perform their duties and responsibilities effectively in supporting the monitoring function over the Company's operations. For this reason, the Board of Commissioners periodically evaluates the performance of each committee through a structured self-assessment mechanism based on a predetermined scoring system.

- **Audit Committee**
The Audit Committee's performance is assessed through a structured self-assessment process, covering both individual contributions and the committee's overall effectiveness. Each activity listed in the Audit Committee Work Program is defined with clear quantitative indicators and assigned a specific weight to serve as a benchmark for performance achievement. Based on the evaluation results, the Audit Committee achieved a performance score of 112.5, which reflects its strong commitment to fulfilling its monitoring responsibilities, particularly in the area of reporting.
- **Nomination and Remuneration Committee**
The performance evaluation of the Nomination and Remuneration Committee is likewise conducted through a self-assessment process, following the framework established by the Board of Commissioners. Each activity in this committee's Work Program is given a specific

pengukuran yang objektif terhadap capaian kinerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendukung kebijakan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sistem remunerasi, serta proses nominasi yang transparan dan akuntabel.

- Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko dinilai melalui metode self-assessment yang mengedepankan tolok ukur kuantitatif berbobot, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Komite Pemantau Risiko memperoleh skor sebesar 100,5, yang menunjukkan pelaksanaan tugas pemantauan dan pengendalian risiko telah berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan manajemen risiko Perusahaan. Komite ini secara konsisten memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan sistem mitigasi risiko, terutama dalam menghadapi dinamika bisnis yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kontribusi ketiga komite dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris juga mendorong setiap komite untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

assessment weight to ensure objective measurement of performance achievements. The evaluation results show that the Nomination and Remuneration Committee has performed its duties well in supporting human capital development policies, remuneration system management, and transparent and accountable nomination processes.

- Risk Monitoring Committee
The Risk Monitoring Committee's performance is evaluated through a self-assessment process that focuses on weighted quantitative benchmarks, as established by the Board of Commissioners. Based on the performance evaluation results, the Risk Monitoring Committee obtained a score of 100.5, indicating that the implementation of risk monitoring and control tasks has been effective and in line with the Company's risk management policies. This committee consistently provides strategic recommendations to strengthen the risk mitigation system, particularly in facing increasingly complex business dynamics.

Overall, the Board of Commissioners appreciates the contribution of the three committees in supporting the effectiveness of the monitoring function and good corporate governance. The Board of Commissioners also encourages each committee to continuously improve the quality of its work to support sustainable growth and create added value for all stakeholders.

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2024 berjumlah 6 (enam) Dewan Komisaris yang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen di mana salah satunya adalah Komisaris Utama.

Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2024, there were no changes made to the composition of the Company's Board of Commissioners. Therefore, as of December 31, 2024, the Company's Board of Commissioners is comprised of 6 (six) members: 3 (three) Commissioners and 3 (three) Independent Commissioners, which includes the President Commissioner.

Susunan Dewan Komisaris Jamkrindo per 31 Desember 2024
Jamkrindo's Board of Commissioners Composition as of December 31, 2024

Nama	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Tenure
Krisna Wijaya	Komisaris Utama/ Independen President/Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-243/MBU/10/2022 dan No. 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-243/MBU/10/2022 and No. 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027 October 27, 2022 until the GMS which will be held in 2027	Ke-1 1st
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	- Keputusan Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia No. SK-241/MBU/10/2019; jo. Decree of the Minister of SOEs as the Government Representative as the Capital Owner of the General Company of Indonesia Credit Guarantee No. SK-241/MBU/10/2019; jo. - Keputusan Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-51/MBU/02/2020 Decree of the Minister of SOEs as the Government Representative for the Establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia Company No. SK-51/MBU/02/2020	17 Oktober 2019 s.d 17 Oktober 2024 October 17, 2019 - October 17, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-227/MBU/10/2024 dan No. 17/KepSir-PS/BPUI/X/2024 - Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-227/MBU/10/2024 and No. 17/KepSir-PS/BPUI/X/2024	18 Oktober 2024 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029 October 18, 2024 until the GMS which will be held in 2029	Ke-2 2nd
Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-19/MBU/01/2021 dan No. 02/SK-DIR/RUPS/AP/BPUI/I/2021 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-19/MBU/01/2021 and No. 02/SK-DIR/RUPS/AP/BPUI/I/2021	18 Januari 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 January 18, 2021 to GMS to be held in 2026	Ke-1 1st
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	- Keputusan Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia No. SK-02/MBU/01/2019; jo. Decree of the Minister of SOEs as the Government Representative as the Capital Owner of General Company of Indonesia Credit Guarantee No. SK-02/MBU/01/2019; jo. - Keputusan Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-51/MBU/02/2020 Decree of the Minister of SOEs as the Government Representative for the Establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia Company No. SK-51/MBU/02/2020	3 Januari 2019 s.d 3 Januari 2024 January 3, 2019-January 3, 2024	Ke-1 1st
		Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-35/MBU/02/2024 dan No. 3/KepSir-PS/BPUI/II/2024 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-35/MBU/02/2024 and No. 3/ KepSir-PS/BPUI/II/2024	7 Februari 2024 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2029 February 7, 2024 until the GMS which will be held in 2029	Ke-2 2nd

Susunan Dewan Komisaris Jamkrindo per 31 Desember 2024
Jamkrindo's Board of Commissioners Composition as of December 31, 2024

Nama	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Tenure
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-182/MBU/06/2021 dan No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-182/MBU/06/2021 and No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021	2 Juni 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 June 2, 2021 until the GMS which will be held in 2026	Ke-1 1st
Angger P. Yuwono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-217/MBU/07/2023 dan 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia No. SK-217/MBU/07/2023 and 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023.	31 Juli 2023 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 July 31, 2023 until the GMS which will be held in 2028	Ke-1 1st

Apresiasi dan Penutup

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas kerja keras, dedikasi, dan komitmen yang telah ditunjukkan sepanjang tahun. Di tengah tantangan dan dinamika yang dihadapi, Perusahaan tetap mampu menjaga kinerja yang solid, mengimplementasikan tata kelola yang baik, serta terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemegang saham, mitra usaha, regulator, dan pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada Perusahaan. Sinergi yang terjalin dengan baik ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan pertumbuhan dan pencapaian tujuan Perusahaan ke depan.

Ke depan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara optimal, guna memastikan Perusahaan tetap berada di jalur pertumbuhan yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan tata kelola yang kuat, Dewan Komisaris yakin bahwa Perusahaan mampu menghadapi tantangan yang ada dan meraih peluang pertumbuhan yang lebih besar di masa mendatang.

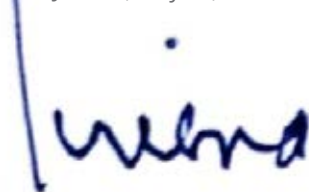
Appreciation and Closing

The Board of Commissioners extends its highest appreciation to the Board of Directors, management, and all employees for their hard work, dedication, and unwavering commitment throughout the year. Despite the challenges and dynamic environment, the Company has successfully maintained strong performance, upheld good governance practices, and continued to innovate in delivering the best service to its stakeholders.

The Board of Commissioners also extends its sincere gratitude to all shareholders, business partners, regulators, and stakeholders for their ongoing support and trust in the Company. This strong synergy serves as a valuable asset in driving the Company's continued growth and the achievement of its future goals.

Going forward, the Board of Commissioners remains committed to performing its monitoring and advisory functions optimally to ensure that the Company stays on a path of sound, competitive, and sustainable growth. With a spirit of collaboration and strong governance, the Board of Commissioners is confident that the Company is well-positioned to overcome future challenges and capitalize on greater growth opportunities.

Jakarta, 26 Mei 2025
Jakarta, May 26, 2025



Krisna Wijaya
Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner



LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS REPORT



Abdul Bari

Plt Direktur Utama
Acting President Director

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan penuh rasa syukur, kami atas nama Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo, menyampaikan Laporan Tahunan 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Perusahaan selama tahun berjalan. Laporan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Jamkrindo dalam memperkuat peran strategis, menjaga kinerja yang solid, dan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta praktik bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2024, di tengah tren pertumbuhan industri penjaminan yang positif, Jamkrindo terus menegaskan posisinya sebagai entitas utama dalam ekosistem pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan kontribusi volume penjaminan mencapai Rp300 triliun, setara lebih dari 70% pangsa pasar nasional, Jamkrindo berhasil mempertahankan kepercayaan tinggi dari mitra lembaga keuangan dan pelaku usaha. Pencapaian ini mencerminkan kapasitas, integritas, dan tata kelola yang andal sebagai lembaga penjaminan terdepan.

Kinerja keuangan Perseroan pun menunjukkan hasil yang kuat, tercermin dari pendapatan penjaminan bersih sebesar Rp6,92 triliun dan pendapatan investasi sebesar Rp1,46 triliun. Hal ini menegaskan daya saing finansial Jamkrindo yang ditopang oleh efisiensi operasional, penerapan prinsip kehati-hatian, serta manajemen risiko yang kokoh dalam pengelolaan aset.

Kami meyakini bahwa fondasi kinerja yang telah dibangun selama tahun ini akan menjadi pendorong utama dalam memperkuat peran Jamkrindo dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dear Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia or Jamkrindo, we are pleased to present the 2024 Annual Report as a reflection of our commitment to transparency and accountability in the Company's management throughout the year. This report reflects Jamkrindo's ongoing commitment to strengthening its strategic role, maintaining strong performance, and upholding the principles of transparency, accountability, and sustainable business practices that prioritize the interests of all stakeholders.

Throughout 2024, amid the positive growth trend of the guarantee industry, Jamkrindo consistently reinforced its position as a key player in Indonesia's financing ecosystem for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). With a guarantee volume contribution reaching IDR 300 trillion, or equivalent to over 70% of the national market share, Jamkrindo successfully maintained strong trust from financial institution partners, and business actors. This achievement reflects our capacity, integrity, and sound governance as a leading guarantee institution in Indonesia.

The Company's financial performance also demonstrated solid results, as reflected in a net guarantee income of IDR 6.92 trillion and investment income of IDR 1.46 trillion. This affirms Jamkrindo's financial competitiveness, driven by operational efficiency, adherence to prudential principles, and robust risk management in asset administration.

We believe that the performance foundation established over the past year will serve as a key driver in reinforcing Jamkrindo's role in supporting MSME growth and contributing to sustainable national economic development.

Tinjauan Ekonomi Global dan Nasional

Sepanjang tahun 2024, perekonomian global terus mengalami pemulihan secara bertahap, meskipun masih dibayangi tantangan struktural dan ketidakpastian geopolitik. Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) Oktober 2024 yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia tercatat sebesar 3,0%, menandai fase stabilisasi pasca-pandemi. Inflasi global mulai terkendali, didorong oleh normalisasi harga komoditas dan kebijakan moneter ketat di berbagai negara, meskipun masih berada di atas target jangka menengah sebagian besar bank sentral.

Namun demikian, pasar keuangan global tetap diliputi volatilitas tinggi. Kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh bank sentral utama, seperti The Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa, mendorong penguatan dolar AS dan menambah beban pembiayaan eksternal bagi negara berkembang. Tekanan ini berdampak pada arus modal, nilai tukar, serta stabilitas keuangan global. Pertumbuhan perdagangan internasional pun melambat akibat fragmentasi geopolitik, kebijakan proteksionis, dan perubahan rantai pasok. Meski begitu, kawasan Asia, termasuk Indonesia, masih memiliki peluang strategis sebagai basis baru produksi dan investasi.

Isu transisi energi dan perubahan iklim juga semakin mengemuka. Investasi global dalam energi terbarukan meningkat tajam seiring dengan komitmen terhadap target net-zero emission. Namun, fenomena cuaca ekstrem seperti El Niño membawa risiko baru terhadap produksi pangan, harga komoditas, dan ketahanan pangan global. Secara umum, Direksi memandang tahun 2024 sebagai masa stabilisasi global yang

Global and National Economic Review

Throughout 2024, the global economy continues to experience a gradual recovery, despite structural challenges and geopolitical uncertainties. According to the October 2024 World Economic Outlook (WEO) published by the International Monetary Fund (IMF), global economic growth was recorded at 3.0%, signaling a phase of post-pandemic stabilization. Global inflation has begun to stabilize, supported by the normalization of commodity prices and the implementation of tight monetary policies across various countries. However, inflation levels remain above the medium-term targets set by most central banks.

However, global financial markets remain marked by high volatility. High interest rate policies implemented by major central banks, such as the Federal Reserve and the European Central Bank, have driven-up the value of the US dollar, increasing the external financing burden on developing countries. These pressures affect capital flows, exchange rates, and overall global financial stability. The growth of international trade has slowed due to geopolitical fragmentation, protectionist policies, and shifts in supply chains. Nevertheless, the Asian region, including Indonesia, continues to hold strategic opportunities as an emerging hub for production and investment.

The issues of energy transition and climate change are also becoming increasingly prominent. Global investment in renewable energy is rising sharply, driven by growing commitments to achieve net-zero emissions. However, extreme weather events like El Niño pose escalating risks to food production, commodity prices, and global food security. In general, the Board of Directors views 2024 as a year of global

tetap sarat risiko, mulai dari perlambatan pertumbuhan di negara maju hingga eskalasi ketegangan geopolitik.

Di tengah tantangan global tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,1% secara tahunan, sedikit di atas proyeksi IMF, Indonesia berhasil mencatatkan kinerja yang solid. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, peningkatan investasi, serta kontribusi ekspor nonmigas, meskipun harga komoditas mengalami koreksi. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan inflasi yang berhasil ditekan pada kisaran 2,8%, memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif.

Dari sisi fiskal, defisit anggaran dijaga pada level 2,3% terhadap PDB, mencerminkan kesinambungan kebijakan yang prudent. Alokasi pembiayaan APBN yang difokuskan pada sektor produktif—seperti penguatan UMKM, pengembangan infrastruktur digital, dan transisi menuju ekonomi hijau—menjadi motor utama pertumbuhan. Di sisi lain, reformasi struktural seperti implementasi UU Cipta Kerja dan penguatan kelembagaan penjaminan turut memberi dampak positif bagi dunia usaha, terutama sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Direksi memandang bahwa ketahanan ekonomi domestik yang terjaga di tengah gejolak global menjadi landasan penting bagi Perusahaan dalam menjalankan peran strategisnya. Jamkrindo meyakini bahwa momentum pertumbuhan yang positif ini akan terus mendorong penguatan ekosistem penjaminan dan pembiayaan UMKM, sejalan dengan komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pandangan Direksi terhadap Industri Penjaminan dan Posisi Jamkrindo

Sepanjang tahun 2024, industri penjaminan Indonesia terus menunjukkan peran strategis dalam memperkuat ekosistem pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha UMKM. Berada dalam ekosistem sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor ini tumbuh stabil seiring dengan meningkatnya kebutuhan jaminan atas kredit UMKM serta dukungan kuat dari kebijakan pemerintah. Di tengah berbagai upaya mendorong inklusi keuangan, sinergi antara perbankan, perusahaan penjaminan, dan lembaga pembiayaan terus diperkuat untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih merata.

Aset industri PPDP yang mencapai Rp1.133,87 triliun per Desember 2024, mencerminkan tren positif yang juga berdampak terhadap sektor penjaminan secara keseluruhan. Peningkatan ini tak lepas dari kepercayaan pasar terhadap peran lembaga penjaminan sebagai penyokong aktivitas pembiayaan, terutama di tengah stabilitas ekonomi nasional yang terjaga. Keberhasilan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% serta inflasi yang rendah turut menciptakan iklim usaha

stabilization, yet one still marked by significant risks, including slowing growth in developed countries and rising geopolitical tensions.

Amidst these global challenges, the Indonesian economy has demonstrated remarkable resilience. Indonesia achieved a solid performance with Gross Domestic Product (GDP) growth of 5.1% on an annualized basis, slightly surpassing IMF projections. This growth was supported by continued high household consumption, increased investment, as well as the contribution of non-oil and gas exports, despite the correction in commodity prices. Macroeconomic stability was preserved, with inflation held steady at 2.8%, allowing for a more accommodative monetary policy.

On the fiscal side, the budget deficit was maintained at 2.3% of GDP, reflecting the ongoing commitment to prudent fiscal management. The state budget allocation prioritized productive sectors such as empowering MSMEs, advancing digital infrastructure, and driving the transition to a green economy, which served as the primary engines of growth. Meanwhile, structural reforms such as the implementation of the Job Creation Law and the strengthening of guarantee institutions, have positively impacted the business landscape, particularly benefiting the MSME sector, which serves as the backbone of the national economy.

The Board of Directors views the maintained resilience of the domestic economy amid global turmoil as a crucial foundation for the Company to fulfill its strategic role. Jamkrindo believes that this positive growth momentum will continue to drive the strengthening of the MSME guarantee and financing ecosystem, in line with the Company's commitment to supporting inclusive and sustainable national economic development.

The Board of Directors' View on the Guarantee Industry and Jamkrindo's Position

Throughout 2024, Indonesia's guarantee industry continues to perform a strategic role in strengthening the financing ecosystem, especially for MSME businesses. Positioned within the Insurance, Guarantee, and Pension Fund (PPDP) ecosystem under the monitoring of the Financial Services Authority (OJK), the sector continues to grow steadily, driven by rising demand for MSME loan guarantees and strong backing from government policies. Amid ongoing efforts to promote financial inclusion, synergy among banks, guarantee companies, as well as financing institutions continues to be strengthened to broaden and equalize access to financing across all segments of society.

Assets of PPDP industry, which reached IDR 1,133.87 trillion as of December 2024, reflects a positive trend that also contributes to the overall strengthening of the guarantee sector. This growth is closely tied to market confidence in the role of guarantee institutions as key enablers of financing activities, particularly amid the sustained stability of the national economy. The government's success in maintaining economic growth at 5.03% alongside low inflation has fostered a conducive business

yang kondusif bagi ekspansi pembiayaan dan penjaminan di tahun berjalan.

OJK juga memainkan peran penting dalam memperkuat fondasi industri penjaminan melalui reformasi regulasi, penguatan tata kelola, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap prinsip kehati-hatian serta permodalan. Sejalan dengan arah penguatan infrastruktur keuangan ini, prospek industri penjaminan ke depan semakin solid, terutama dalam mendukung agenda strategis pemerintah terkait pemberdayaan UMKM, transformasi digital sektor keuangan, dan peningkatan inklusi keuangan nasional.

Di tengah dinamika tersebut, Jamkrindo berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar sekaligus motor penggerak utama dalam industri penjaminan nasional. Dengan kontribusi volume penjaminan yang mencapai Rp300 triliun dari total outstanding penjaminan nasional sebesar Rp415,57 triliun per Juni 2024, Jamkrindo menguasai lebih dari 70% pangsa pasar. Capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan mitra lembaga keuangan serta pelaku usaha terhadap kapasitas, integritas, dan tata kelola perusahaan.

Direksi meyakini bahwa keberhasilan ini tidak semata tercermin dari skala volume, namun juga dari kinerja keuangan yang solid. Pendapatan penjaminan bersih Jamkrindo yang mencapai Rp6,92 triliun serta pendapatan investasi sebesar Rp1,46 triliun menegaskan efisiensi operasional dan ketepatan strategi pengelolaan aset yang prudent. Dengan struktur keuangan yang kuat, Jamkrindo mampu menjaga daya saing dan meningkatkan ketahanan Perusahaan dalam menghadapi tantangan industri.

Selain itu, jangkauan layanan Jamkrindo yang luas, mencakup seluruh wilayah Indonesia hingga daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), menjadi kekuatan tersendiri dalam mendukung pemerataan akses pembiayaan UMKM. Perusahaan juga aktif membangun kolaborasi dengan bank, fintech lending, koperasi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya, sehingga mampu memperkuat ekosistem pembiayaan inklusif yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Sebagai pelopor dalam transformasi digital sektor penjaminan, Jamkrindo terus mengembangkan sistem informasi terintegrasi dan platform digital yang mempermudah mitra dan nasabah dalam mengakses layanan penjaminan. Direksi memandang langkah ini sebagai kunci dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan layanan, sekaligus mendukung implementasi roadmap OJK dalam penguatan industri penjaminan ke depan.

Dengan posisi sebagai pemimpin pasar yang kokoh, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik, inovasi berkelanjutan, dan kontribusi nyata bagi pertumbuhan UMKM, Direksi meyakini bahwa Jamkrindo berada pada jalur yang tepat untuk terus memperluas perannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sebagai role model dalam industri penjaminan nasional.

climate, supporting the expansion of financing and guarantee activities throughout the year.

The Financial Services Authority (OJK) also plays a vital role in reinforcing the foundation of the guarantee industry through regulatory reforms, enhanced governance, and stricter monitoring of prudential principles and capital adequacy. Aligned with efforts to strengthen financial infrastructure, the outlook for the guarantee industry is increasingly solid, particularly in supporting the government's strategic agenda on MSME empowerment, digital transformation of the financial sector, and the advancement of national financial inclusion.

Amid these dynamic developments, Jamkrindo successfully reinforced its position as both the market leader and a key driving force in the national guarantee industry. With a guarantee volume contribution reaching IDR 300 trillion out of the total national guarantee outstanding of IDR 415.57 trillion as of June 2024, Jamkrindo commands over 70% of the market share. This achievement reflects the strong trust that financial institution partners and business stakeholders place in the Company's capacity, integrity, and governance.

The Board of Directors believes that this success is evident not only in the scale of volume but also in the Company's strong financial performance. Jamkrindo's net guarantee income of IDR 6.92 trillion and investment income of IDR 1.46 trillion highlights its commitment to operational efficiency and prudent asset management strategies. With a strong financial structure, Jamkrindo is able to maintain competitiveness and enhance the Company's resilience in facing industry challenges.

In addition, Jamkrindo's extensive service coverage across all regions of Indonesia, including the 3T areas (underdeveloped, frontier, and outermost), is a key strength in promoting equitable access to MSME financing. The Company also actively builds collaborations with banks, fintech lenders, cooperatives, and other non-bank financial institutions, so as to strengthen an inclusive financing ecosystem that is more adaptive to evolving market needs.

As a pioneer in the digital transformation of the guarantee sector, Jamkrindo continues to develop integrated information systems and digital platforms that simplify access to guarantee services for partners and customers alike. The Board of Directors views this initiative as crucial for enhancing efficiency, transparency, and service convenience, while also supporting the implementation of OJK's roadmap to strengthen the guarantee industry moving forward.

With a solid market leadership position, as well as a commitment to good governance, continuous innovation, and tangible contributions to the growth of MSMEs, the Board of Directors believes that Jamkrindo is on track to continue expanding its role, both quantitatively and qualitatively, as a role model in the national guarantee industry.

Strategi dan Kebijakan Strategis

Memasuki tahun 2024, Jamkrindo menetapkan arah strategis yang terfokus melalui tema Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024, yakni "1st Preferred Company in SME's Financial Accessibility". Tema ini mencerminkan komitmen kuat Jamkrindo untuk memperkuat perannya sebagai institusi utama dalam membuka akses keuangan bagi pelaku UMKM, sekaligus mendukung pembangunan inklusi keuangan nasional secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Jamkrindo menyusun serangkaian strategi dan inisiatif strategis yang terstruktur, adaptif, dan selaras dengan dinamika eksternal. Strategi utama pertama adalah peningkatan pangsa pasar melalui kolaborasi yang intensif dengan anak perusahaan dalam Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan, serta sinergi strategis dengan BUMN lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas cakupan layanan melalui program pemasaran terpadu, optimalisasi bunga deposito, efisiensi biaya transaksi, dan pengelolaan layanan bersama yang lebih terintegrasi.

Selaras dengan perkembangan teknologi yang semakin dinamis, Jamkrindo juga fokus melakukan transformasi digital melalui pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Penguatan arsitektur teknologi ini bertujuan menyederhanakan proses bisnis, menghilangkan tumpang tindih data, serta mempercepat layanan kepada mitra dan nasabah, sehingga meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam pengelolaan bisnis penjaminan.

Sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan UMKM, Jamkrindo secara aktif menginisiasi program pemeringkatan dan pembinaan UMKMK. Dengan membangun database yang solid serta merancang alat bantu scoring UMKM, Jamkrindo tidak hanya berperan sebagai penjamin kredit, namun juga sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM. Inisiatif ini turut didukung melalui pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk program-program pembinaan UMKMK secara langsung.

Di sisi layanan, Jamkrindo terus menjaga standar tinggi dalam memberikan pelayanan penjaminan dan klaim yang sesuai dengan Service Level Agreement (SLA). Kualitas layanan yang prima dan hubungan yang harmonis dengan mitra lembaga keuangan menjadi fondasi utama dalam mempertahankan kepercayaan dan loyalitas mitra.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas strategis. Melalui asesmen rutin, pelatihan berkelanjutan, dan implementasi manpower planning, Jamkrindo menargetkan optimalisasi jumlah karyawan hingga 1.150 orang, guna memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki SDM yang andal, kompeten, dan adaptif dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.

Lebih lanjut, Jamkrindo menegaskan komitmennya terhadap penerapan manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh proses bisnis. Dengan memperkuat kerja sama dengan instansi seperti

Strategies and Strategic Policies

Entering 2024, Jamkrindo sets a focused strategic direction under the theme of the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), namely "1st Preferred Company in SME's Financial Accessibility". This theme reflects Jamkrindo's firm commitment to reinforcing its role as the leading institution in expanding financial access for MSMEs, while actively supporting the sustainable advancement of national financial inclusion.

To realize this vision, Jamkrindo has developed a series of strategies and strategic policies that are structured, adaptive, and in line with external dynamics. The first key strategy is to increase market share through intensive collaboration with subsidiaries in the Insurance and Guarantee SOE Holding, as well as strategic synergies with other SOEs. This collaboration not only improves operational efficiency, but also expands service coverage through integrated marketing programs, deposit interest optimization, transaction cost efficiency, and more integrated shared service management.

Aligned with technological advancements, Jamkrindo is also prioritizing digital transformation by developing an integrated information technology system. The enhancement of this technology architecture is aimed at streamlining business processes, eliminating data redundancies, and accelerating service delivery to partners and customers, ultimately improving the effectiveness and precision of guarantee business management.

As a form of commitment to the development of MSMEs, Jamkrindo actively initiated the ranking and coaching program for MSMEs. By developing a solid database and designing MSME scoring tools, Jamkrindo positions itself not only as a credit guarantor but also as a strategic partner in enhancing the capacity and long-term sustainability of MSME businesses. This initiative is further supported by the use of Social and Environmental Responsibility (TJSL) funds to implement direct coaching programs for MSMEs.

On the service front, Jamkrindo consistently upholds high standards in delivering guarantee and claim services, ensuring compliance with the established Service Level Agreement (SLA). Excellent service quality and harmonious relationships with financial institution partners serve as the main foundation in maintaining trust and loyalty of partners.

Increasing the competence of human capital (HC) is also a strategic priority. Through regular assessments, continuous training, and strategic manpower planning, Jamkrindo aims to optimize its workforce to 1,150 employees, ensuring that every unit is supported by reliable, competent, and adaptive human capital capable of navigating dynamic business challenges.

Furthermore, Jamkrindo reinforces its commitment to implementing integrated risk management across all business processes. By strengthening collaboration with institutions

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Infobank, dan Pefindo Biro Kredit (PBK), Perusahaan memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara prudent dan berbasis tata kelola perusahaan yang baik (GCG), demi menjaga keberlanjutan usaha secara jangka panjang.

Sejalan dengan tema besar tahun ini, inisiatif strategis Jamkrindo juga difokuskan pada ekspansi ke pasar baru, transformasi model bisnis serta inovasi produk, penguatan sinergi untuk meningkatkan pangsa pasar, serta penguatan operational excellence guna menghadirkan layanan yang semakin cepat, akurat, dan terpercaya.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional Perusahaan, Direksi Jamkrindo memainkan peranan sentral dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis yang menjadi fondasi arah pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang Perusahaan. Setiap langkah yang diambil oleh Direksi senantiasa diarahkan untuk sejalan dengan aspirasi Pemegang Saham dan mendukung misi besar Jamkrindo dalam memperkuat perannya di ekosistem keuangan nasional.

Dalam proses penyusunan strategi dan kebijakan strategis, Direksi secara cermat mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika bisnis Perusahaan. Direksi bertugas untuk menetapkan arahan strategis serta target-target utama yang dituangkan dalam dokumen RKAP. Target dan kebijakan strategis ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan aktivitasnya secara terarah dan terukur.

Untuk memastikan implementasi yang konsisten, Direksi menugaskan setiap unit kerja untuk menerjemahkan target RKAP ke dalam rencana operasional yang lebih rinci. Usulan dari unit-unit tersebut dikompilasi dan dibahas dalam forum Rapat Direksi untuk mendapatkan reviu kolektif. Forum ini menjadi ruang konsolidasi guna memastikan konsistensi antara rencana tahunan (RKAP) dan arah strategis jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Setelah proses harmonisasi internal selesai, strategi dan target tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh masukan dan persetujuan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik dan proses pengambilan keputusan yang partisipatif, Direksi Jamkrindo mengadakan rapat secara rutin setiap bulan. Sepanjang tahun 2024, Direksi telah melaksanakan 20 (dua puluh) kali Rapat Direksi dan menghadiri 12 (dua belas) kali Rapat bersama Dewan Komisaris. Dalam rapat-rapat ini, berbagai agenda strategis dibahas secara mendalam, antara lain: pembahasan rencana perpanjangan kerja sama reasuransi KUR dan non-KUR Tahun 2024, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Wilayah (RKAW) Tahun 2024, penguatan bisnis penjaminan melalui sinergi dengan ekosistem perbankan,

such as the Population and Civil Registration Office (Dukcapil), Infobank, and Pefindo Biro Kredit (PBK), the Company ensures that risk management is conducted prudently and in accordance with the principles of good corporate governance (GCG), supporting the long-term sustainability of its business.

In line with this year's theme, Jamkrindo's strategic initiatives concentrate on expanding into new markets, transforming business models and innovating products, enhancing synergies to boost market share, as well as strengthening operational excellence to deliver faster, more accurate, and more reliable services.

The Role of the Board of Directors in Formulating Strategies and Strategic Policies

As the organ responsible for the Company's operational management, Jamkrindo's Board of Directors performs a pivotal role in formulating strategies and strategic policies that serve as the foundation for the Company's short and long term development directions. Every decision made by the Board of Directors is carefully aligned with the aspirations of Shareholders and supports Jamkrindo's vital mission to strengthen its role within the national financial ecosystem.

In formulating strategies and strategic policies, the Board of Directors carefully evaluates a range of internal and external factors influencing the Company's business dynamics. The Board of Directors is responsible for establishing the strategic direction and key targets as detailed in the RKAP document. These strategic targets and policies serve as clear guidelines for all work units, enabling them to conduct their activities in a focused and measurable way.

To ensure consistent execution, the Board of Directors has tasked each work unit with translating the RKAP targets into detailed operational plans. The proposals from these units are compiled and reviewed collectively during the Board of Directors Meeting. This forum serves as a platform for consolidation, ensuring alignment between the annual plan (RKAP) and the long-term strategic direction outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP). After the internal harmonization process is complete, the strategies and targets are submitted to the Board of Commissioners for review and approval, in accordance with the principles of good corporate governance.

As part of its commitment to good governance and a participatory decision-making process, Jamkrindo's Board of Directors held regular monthly meetings. Throughout 2024, the Board of Directors held 20 (twenty) Board of Directors' Meetings and participated in 12 (twelve) joint meetings with the Board of Commissioners. These meetings covered a range of strategic agendas in depth, including: the extension of KUR and non-KUR reinsurance cooperation for 2024, preparation of the 2024 Regional Work Plan and Budget (RKAW), strengthening the guarantee business through synergies with the banking ecosystem, government and ministry institutions, and the SOE

ekosistem pemerintahan/kementerian, dan ekosistem BUMN, hingga pembahasan RJPP PT Jamkrindo Tahun Buku 2025-2029 serta Business Performance Review (BPR) dan revisi RKAP Tahun 2024.

Proses Direksi dalam Memastikan Implementasi Strategi dan Langkah Monitoring

Sebagai penanggung jawab utama atas pelaksanaan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan, Direksi menjalankan peran aktif dalam memastikan bahwa setiap inisiatif yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif dan selaras dengan target yang telah ditetapkan. Direksi bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa strategi Perusahaan tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga berjalan sesuai rencana dan menghasilkan kinerja yang optimal.

Untuk itu, Direksi secara konsisten memantau dan mengawasi perkembangan pengelolaan Perusahaan di seluruh aspek, mulai dari pemasaran, keuangan, perpajakan, sumber daya manusia, hingga kegiatan operasional lainnya. Pengawasan ini dilakukan melalui forum rapat monitoring dan evaluasi kinerja yang diselenggarakan secara periodik. Dalam forum tersebut, Direksi mendapatkan laporan terkini dari setiap unit kerja terkait pencapaian target, pelaksanaan inisiatif strategis, serta tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi.

Melalui rapat-rapat monitoring ini, Direksi tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengarah yang memberikan solusi dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Proses evaluasi yang rutin ini memungkinkan Direksi untuk secara dini mengidentifikasi deviasi dari rencana, melakukan koreksi, serta memastikan seluruh bagian organisasi bergerak seirama menuju pencapaian tujuan Perusahaan. Hal tersebut untuk menjaga agar implementasi strategi Perusahaan berjalan secara terkontrol, terukur, dan adaptif terhadap dinamika yang berkembang.

Kinerja Perusahaan Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, PT Jamkrindo mencatatkan kinerja keuangan dan operasional yang positif, mencerminkan efektivitas strategi yang dijalankan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan industri penjaminan. Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit menunjukkan pertumbuhan aset, peningkatan pendapatan penjaminan, serta laba komprehensif yang tetap solid, memperkuat posisi Jamkrindo sebagai pilar utama penjaminan kredit di Indonesia.

Per 31 Desember 2024, total aset Perusahaan tercatat sebesar Rp32,36 triliun, meningkat 0,39% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32,23 triliun. Dari sisi liabilitas, terdapat kenaikan sebesar 0,72% menjadi Rp19,01 triliun. Sementara itu, total ekuitas sedikit terkoreksi menjadi Rp13,34 triliun, dibandingkan Rp13,35 triliun pada tahun 2023.

ecosystem, as well as discussions on PT Jamkrindo's Long-Term Plan (RJPP) for the 2025–2029 Fiscal Year, the Business Performance Review (BPR), and revisions to the 2024 RKAP.

The Board of Directors' Process for Ensuring Strategy Implementation and Monitoring Measures

As the primary body responsible for executing the Company's strategic policies, the Board of Directors plays an active role in ensuring that each formulated initiative is effectively implemented and aligned with established targets. The Board of Directors is fully responsible for ensuring that the Company's strategy progresses beyond the planning phase, is executed as intended, and delivers optimal performance outcomes.

Therefore, the Board of Directors consistently monitors and supervises the Company's management across all areas, including marketing, finance, taxation, human capital, and other operational activities. This monitoring is conducted through periodic performance monitoring and evaluation meetings. During these forums, the Board of Directors receives update reports from each work unit detailing target achievements, progress on strategic initiatives, and challenges encountered during implementation.

Through these monitoring meetings, the Board of Directors serves not only as a monitor but also as a proactive decision-maker, offering solutions and making strategic adjustments when necessary. This regular evaluation process allows the Board of Directors to promptly identify deviations from the plan, implement corrective actions, and ensure that all parts of the organization work in harmony toward achieving the Company's goals. This ensures that the Company's strategy is implemented in a controlled, measurable, and adaptable manner, responsive to evolving dynamics.

Company Performance in 2024

Throughout 2024, PT Jamkrindo recorded positive financial and operational performance, reflecting the effectiveness of the strategies implemented amid evolving economic conditions and developments within the guarantee industry. The audited consolidated financial statements reveal asset growth, increased guarantee income, and solid comprehensive income, reinforcing Jamkrindo's position as the primary pillar of credit guarantees in Indonesia.

As of December 31, 2024, the Company's total assets were recorded at IDR 32.36 trillion, an increase of 0.39% compared to the previous year's figure of IDR 32.23 trillion. In terms of liabilities, there was an increase of 0.72%, becoming IDR 19.01 trillion. Meanwhile, total equity experienced a slight correction to IDR 13.34 trillion, compared to the previous year's figure of IDR 13.35 trillion.

Volume penjaminan yang berhasil dibukukan mencapai Rp300,3 triliun dengan total penerima manfaat sebanyak 7,8 juta debitur UMKM-K di seluruh Indonesia. Kinerja ini tidak hanya mencerminkan skala bisnis yang luas, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja yang diperkirakan mencapai 14,4 juta orang. Hal ini mempertegas peran strategis Jamkrindo sebagai katalisator perluasan akses pembiayaan UMKM-K.

Dari sisi pendapatan, pendapatan penjaminan bersih meningkat 8,93% menjadi Rp6,92 triliun, dibandingkan Rp6,35 triliun pada tahun 2023. Pendapatan investasi bersih juga mencatat kenaikan menjadi Rp1,46 triliun dari sebelumnya Rp1,20 triliun. Namun demikian, laba bersih tahun berjalan tercatat sebesar Rp1,16 triliun, mengalami penurunan dari Rp1,44 triliun pada tahun lalu. Meski demikian, laba komprehensif tahun berjalan tetap terjaga pada level Rp1,07 triliun, mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam menjaga kinerja yang sehat di tengah tekanan eksternal dan peningkatan pencadangan klaim.

Capaian ini merupakan hasil dari sinergi seluruh insan Jamkrindo dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi usaha dan pengelolaan risiko yang prudent. Tidak hanya dari sisi pertumbuhan finansial, kinerja 2024 juga memperlihatkan dampak sosial-ekonomi yang kuat, sejalan dengan visi Perusahaan sebagai Perusahaan pilihan pertama dalam aksesibilitas keuangan UKM.

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan Perusahaan

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RKAP, Jamkrindo juga mencatatkan sejumlah capaian yang secara umum menunjukkan hasil yang positif, meskipun di beberapa indikator utama masih terdapat deviasi dari target yang telah ditetapkan. Total aset Perusahaan pada akhir tahun tercatat sebesar Rp32,36 triliun, sedikit di bawah target sebesar Rp36,50 triliun, namun tetap mencerminkan pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika pasar.

Pendapatan penjaminan bersih mencapai Rp6,92 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan target awal sebesar Rp7,01 triliun, yang mencerminkan kinerja operasional yang stabil. Di sisi lain, pendapatan investasi juga menunjukkan tren positif dengan realisasi sebesar Rp1,46 triliun, melampaui ekspektasi yang ditetapkan sebesar Rp1,36 triliun, didorong oleh strategi pengelolaan portofolio yang prudent dan responsif terhadap perubahan pasar.

Namun demikian, laba tahun berjalan terealisasi sebesar Rp1,16 triliun, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebesar Rp1,35 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan beban klaim dan perlunya pencadangan tambahan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi risiko di tengah ketidakpastian ekonomi. Meskipun demikian, struktur keuangan Perusahaan tetap terjaga dengan baik, tercermin dari ekuitas sebesar Rp13,34 triliun yang berada relatif stabil dibandingkan proyeksi.

The volume of guarantees successfully recorded reached IDR 300.3 trillion, benefiting a total of 7.8 million UMKM-K debtors across Indonesia. This performance not only reflects the vast scale of the business, but also shows a real contribution to the national economy, especially in job creation which is estimated to reach 14.4 million people. This emphasizes Jamkrindo's strategic role as a catalyst in expanding access to MSME-K financing.

In terms of revenue, net guarantee income increased by 8.93% to IDR 6.92 trillion, compared to the previous year's figure of IDR 6.35 trillion. Net investment income also increased to IDR 1.46 trillion, up from IDR 1.20 trillion previously. However, net profit for the year reached IDR 1.16 trillion, declining from IDR 1.44 trillion the previous year. Nevertheless, comprehensive income for the year remained steady at IDR 1.07 trillion, demonstrating the Company's resilience in maintaining solid performance despite external pressures and higher claims provisioning.

This achievement reflects the collective synergy of all Jamkrindo employees in balancing business growth with prudent risk management. Beyond financial growth, the 2024 performance also demonstrates a significant socio-economic impact, aligning with the Company's vision to be the 1st preferred Company in SME's financial accessibility.

Comparison Between Achieved Results and Company Targets

Compared to the targets outlined in the RKAP, Jamkrindo recorded several achievements that generally reflected positive outcomes, although some key indicators still showed deviations from the established targets. The Company's total assets at the end of the year stood at IDR 32.36 trillion, slightly below the target of IDR 36.50 trillion, yet still demonstrating steady growth amid market fluctuations.

Net guarantee income reached IDR 6.92 trillion, lower than the initial target of IDR 7.01 trillion, reflecting stable operational performance. On the other hand, investment income also showed a positive trend with a realization of IDR 1.46 trillion, surpassing the expectations set at IDR 1.36 trillion, driven by a prudent portfolio management strategy and responsive to market dynamics.

However, the profit for the year was realized at IDR 1.16 trillion, falling short of the projected IDR 1.35 trillion. This decline was primarily driven by higher claim expenses and the necessity for increased provisioning to mitigate potential risks amid ongoing economic uncertainties. Nonetheless, the Company's financial structure remains sound, reflected by its equity of IDR 13.34 trillion which is relatively stable compared to the projections.

Pada sisi operasional, volume penjaminan yang dibukukan sepanjang tahun 2024 mencapai Rp300,3 triliun dari target sebesar Rp414,81 triliun, dengan jumlah debitur penerima manfaat sebanyak 7,8 juta UMKM-K. Capaian ini memperkuat posisi Jamkrindo sebagai pelaku utama dalam mendukung akses pembiayaan UMKM di Indonesia.

Dengan demikian, meskipun tidak seluruh indikator mencapai target secara penuh, capaian kinerja tahun 2024 mencerminkan daya tahan dan ketangguhan Perusahaan dalam merespons berbagai tantangan. Direksi terus melakukan evaluasi atas penyimpangan yang terjadi, serta mengambil langkah korektif dan penyesuaian strategi agar pencapaian di tahun-tahun mendatang semakin optimal dan berkelanjutan.

Kendala dan atau Tantangan yang Dihadapi

Kinerja positif tahun 2024 dicapai di tengah sejumlah tantangan eksternal dan internal yang memerlukan penyesuaian strategi secara dinamis. Dari sisi eksternal, gejolak ekonomi global, kenaikan suku bunga, fluktuasi nilai tukar, serta tekanan inflasi menjadi faktor yang memengaruhi daya serap kredit dan pembiayaan nasional, yang berdampak langsung pada volume bisnis penjaminan. Selain itu, peningkatan risiko kredit di tengah ketidakpastian ekonomi juga mendorong perlunya pencadangan yang lebih besar, yang turut memengaruhi penurunan laba bersih tahun berjalan.

Sementara dari sisi internal, Perusahaan dihadapkan pada kebutuhan untuk memperkuat kapabilitas teknologi informasi dan digitalisasi proses bisnis guna meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Di sisi lain, ekspansi ekosistem penjaminan melalui kolaborasi lintas sektor menuntut adanya penyelarasan strategi serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjawab kompleksitas dan ekspektasi para mitra.

Direksi memandang bahwa tantangan-tantangan ini justru menjadi momentum untuk terus memperkuat resiliensi dan daya saing institusional, sekaligus menegaskan komitmen Jamkrindo dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambaran Prospek Usaha

Perusahaan menyambut tahun 2025 dengan keyakinan atas peluang pertumbuhan yang menjanjikan di tengah stabilisasi kondisi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di kisaran 5%, ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi, serta stimulus pemerintah yang terus diarahkan pada sektor-sektor produktif.

Iklim usaha di sektor keuangan juga diperkirakan membaik seiring dengan tren penurunan suku bunga dan stabilitas nilai tukar, yang mendorong peningkatan penyaluran kredit, khususnya kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai pelaku utama di industri penjaminan, Jamkrindo berada pada posisi yang strategis untuk menangkap peluang

On the operational side, the volume of guarantees recorded in 2024 reached IDR 300.3 trillion, approaching the target of IDR 414.81 trillion. The number of beneficiary debtors totaled 7.8 million UMKM-K. This achievement further solidifies Jamkrindo's position as a major player in supporting access to MSME financing in Indonesia.

Thus, even though not all indicators met their targets, the 2024 performance demonstrates the Company's resilience and ability to adapt in the face of various challenges. The Board of Directors continues to evaluate the deviations that have occurred, taking corrective measures and adjusting strategies to ensure more optimal and sustainable achievements in the years to come.

Obstacles and/or Challenges Faced

The positive performance in 2024 was achieved despite various external and internal challenges, which demanded agile and adaptive strategic responses. From the external side, global economic volatility, rising interest rates, currency fluctuations, and inflationary pressures have influenced the absorption of national credit and financing, directly impacting the volume of Jamkrindo's guarantee business. Moreover, heightened credit risk amid ongoing economic uncertainty necessitated increased provisioning, which in turn contributed to the decline in net profit for the year.

Internally, the Company is faced with the need to strengthen its information technology capabilities and digitize business processes to improve efficiency and service quality. On the other hand, the expansion of the guarantee ecosystem through cross-sector collaboration requires aligning strategies and the strengthening of human capital capabilities to effectively respond to increasing complexity and partner expectations.

The Board of Directors views these challenges as a momentum to further strengthen institutional resilience and competitiveness, while reaffirming Jamkrindo's commitment to advancing inclusive and sustainable MSME growth.

Overview of Business Prospects

The Company enters 2025 with confidence, anticipating promising growth opportunities amid the stabilization of global economic conditions. Indonesia's economic growth is projected to reach around 5%, driven by strong domestic consumption, rising investment, and sustained government stimulus directed toward productive sectors.

The business climate in the financial sector is also expected to improve, supported by a downward trend in interest rates and stable exchange rates, which are anticipated to boost lending, especially to the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector. As a major player in the guarantee industry, Jamkrindo is in a strategic position to capture these opportunities by

tersebut melalui penguatan perannya dalam mendukung akses pembiayaan bagi UMKM, baik melalui penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun produk penjaminan lainnya.

Dari sisi industri, sektor penjaminan diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan dorongan pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan serta upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional. Perluasan skema-skema penjaminan baru, baik di sektor produktif maupun sektor-sektor prioritas lainnya, membuka ruang bagi Jamkrindo untuk memperluas portofolio bisnis.

Untuk memanfaatkan momentum positif ini, Jamkrindo akan terus memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan, pemerintah, dan BUMN, serta mengakselerasi transformasi digital guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Jamkrindo optimistis dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Perkembangan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Dalam menghadapi dinamika dan tantangan dunia usaha yang terus berkembang, Perusahaan terus meningkatkan kualitas GCG sebagai kebutuhan strategis yang tak terpisahkan dari pengelolaan bisnis yang berkelanjutan. Penerapan GCG di Jamkrindo senantiasa diselaraskan dengan perkembangan prinsip-prinsip tata kelola terkini, yang mencakup penyempurnaan sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan etika kerja yang tinggi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

Komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola diwujudkan dalam berbagai aspek pengelolaan, mulai dari transparansi pelaporan keuangan, efektivitas manajemen risiko, hingga relasi yang etis dan konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip tata kelola ini tidak hanya menjadi fondasi tata kelola, tetapi juga mendorong inovasi dan penguatan daya saing Jamkrindo sebagai pemimpin industri penjaminan.

Dalam pelaksanaannya, Jamkrindo secara rutin melakukan evaluasi berkala untuk memastikan penerapan GCG berjalan secara menyeluruh dan konsisten di seluruh lini Perusahaan. Evaluasi ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu self-assessment yang dilakukan oleh tim internal, serta penilaian independen oleh pihak eksternal yang berkompeten. Pada tahun buku 2024, pelaksanaan assessment terhadap penerapan GCG dilakukan oleh tim asesor internal Perusahaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 04/SP/1/1/2025 tanggal 14 Januari 2025. Hasilnya, Jamkrindo berhasil meraih skor total sebesar 92,99 dengan kualifikasi "SANGAT BAIK", yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang telah berjalan optimal.

strengthening its role in supporting access to financing for MSMEs, both through the People's Business Credit (KUR) guarantee and other guarantee products.

In terms of the industry, the guarantee sector is projected to maintain steady growth, supported by the government's drive to broaden financial inclusion and strengthen the MSME sector's role in the national economy. The expansion of new guarantee schemes, both in the productive sector and other priority sectors, creates opportunities for Jamkrindo to broaden its business portfolio.

To capitalize on this positive momentum, Jamkrindo will continue to strengthen synergies with financial institutions, government bodies, and state-owned enterprises, while accelerating its digital transformation to enhance operational efficiency and service quality. With these strategic measures, Jamkrindo remains optimistic that it can continue to grow sustainably.

Development of Good Corporate Governance (GCG) Implementation

In facing the dynamics and challenges of the evolving business landscape, the Company continues to improve the quality of Good Corporate Governance (GCG) as a strategic necessity that is integral to sustainable business management. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) at Jamkrindo is continuously aligned with the latest developments in governance principles, including strengthening internal monitoring and control systems, upholding high ethical standards, and ensuring responsible decision-making.

Commitment to governance principles is reflected across all management aspects, from transparent financial reporting and effective risk management to maintaining ethical and constructive relationships with all stakeholders. These governance principles are not only the foundation of governance, but also encourage innovation and strengthen Jamkrindo's competitiveness as a leader in the guarantee industry.

In its implementation, Jamkrindo routinely conducts periodic evaluations to ensure the implementation of GCG is thorough and consistently applied throughout the Company. This evaluation is conducted through two main approaches, namely self-assessments conducted by the internal team and independent assessments performed by qualified external parties. During the 2024 fiscal year, the assessment of the implementation of GCG was conducted by the Company's internal assessor team, based on Assignment Letter Number: 04/SP/1/1/2025 dated January 14, 2025. As a result, Jamkrindo achieved a total score of 92.99 with the qualification "VERY GOOD", reflecting the optimal implementation of governance principles across the organization.

Implementasi Manajemen Risiko dan Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perusahaan secara konsisten menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk memastikan keberlangsungan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Proses manajemen risiko di Jamkrindo dijalankan melalui dua pendekatan utama, yakni kegiatan periodik dan kegiatan insidental, yang secara bersama-sama membentuk sistem pengelolaan risiko yang kokoh dan adaptif terhadap dinamika bisnis.

Pada kegiatan periodik, manajemen risiko dilaksanakan melalui empat tahapan inti yang meliputi: identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko, serta monitoring dan evaluasi risiko. Tahapan ini diawali dengan proses Identifikasi dan Penilaian Risiko Inheren yang bertujuan untuk memetakan potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan. Hasil dari proses ini kemudian dievaluasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijak.

Sementara itu, kegiatan insidental dilaksanakan secara selektif sesuai dengan ketentuan dalam Standard Operating Procedure (SOP) bisnis berbasis risiko. Dalam pelaksanaannya, Divisi Manajemen Risiko berperan aktif memberikan opini atas isu-isu strategis yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan Perusahaan. Opini tersebut diberikan dalam berbagai konteks, antara lain untuk pengembangan produk atau aktivitas baru, pelaksanaan transaksi bernilai besar, kebijakan penghapusbukuan piutang, penyusunan SOP, penyusunan RJPP dan RKAP, implementasi aplikasi baru, hingga penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi.

Dalam upaya memastikan efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan, Jamkrindo melakukan evaluasi berkala melalui pengukuran Risk Maturity Index (RMI). Pengukuran ini berfungsi sebagai alat evaluasi penting untuk menilai sejauh mana sistem manajemen risiko didesain dan diimplementasikan secara efektif dalam rangka melindungi dan meningkatkan nilai perusahaan, sejalan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan BUMN. Proses penilaian RMI ini mengacu pada Petunjuk Teknis Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Penilaian Indeks Kematangan Risiko di Lingkungan BUMN.

Penilaian RMI bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan manajemen risiko sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan yang relevan. Penilaian ini mencakup dua aspek utama, yakni dimensi dan kinerja, yang bersama-sama memberikan gambaran komprehensif terhadap tingkat kematangan dan efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan. Pada aspek dimensi, penilaian meliputi lima komponen penting, yaitu:

1. Budaya dan Kapabilitas Risiko
2. Organisasi dan Tata Kelola Risiko
3. Kerangka Risiko dan Kepatuhan
4. Proses dan Kontrol Risiko
5. Model, Data, dan Teknologi Risiko

Implementation of Risk Management and Evaluation of Risk Management System Effectiveness

The Company consistently implements comprehensive risk management to ensure sound and sustainable business continuity. The risk management process at Jamkrindo is conducted through two main approaches, namely periodic and incidental activities, which together establish a solid risk management system that is adaptive to business dynamics.

Periodic risk management activities are conducted through four core stages: risk identification, risk assessment, risk mitigation, and risk monitoring and evaluation. This stage begins with the Inherent Risk Identification and Assessment process, which aims to map potential risks that could impact the achievement of the Company's objectives. The results of this process are then thoroughly evaluated to enhance the quality of risk management and enable wiser decision-making.

Meanwhile, incidental activities are conducted selectively in accordance with the provisions outlined in the risk-based business Standard Operating Procedures (SOP). In its implementation, the Risk Management Division performs an active role by providing insights and opinions on strategic issues that could have a significant impact on the Company's sustainability. These opinions are provided in various contexts, including the development of new products or activities, execution of large-value transactions, policies for receivables write-offs, preparation of SOPs, formulation of the RJPP and RKAP, implementation of new applications, and the selection of new banks for deposit placements and investments.

To ensure the effectiveness of its risk management system, Jamkrindo regularly conducts evaluations through the measurement of the Risk Maturity Index (RMI). This measurement serves as a key evaluation tool to assess how effectively the risk management system is designed and implemented to protect and enhance the Company's value, in accordance with prevailing regulations within the State-Owned Enterprises (SOE) environment. The RMI assessment process refers to Technical Guidelines No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning the Risk Maturity Index Assessment in the State-Owned Enterprise (SOE) environment.

The RMI assessment aims to identify gaps in the implementation of risk management while developing relevant corrective measures. This assessment covers two main aspects, namely dimensions and performance, which together provide a comprehensive picture of the maturity level and effectiveness of the Company's risk management system. On the dimensional aspect, the assessment includes five important components, namely:

1. Risk Culture and Capability;
2. Organization and Risk Governance
3. Risk and Compliance Framework
4. Risk Process and Control
5. Risk Models, Data and Technology

Komitmen Penerapan Whistleblowing System

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan GCG, Perusahaan secara konsisten menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem ini dirancang untuk memberikan ruang bagi seluruh insan Jamkrindo maupun pihak eksternal untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan perusahaan, baik secara finansial maupun non-finansial, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor.

Penerapan WBS di Jamkrindo didasarkan pada Peraturan Direksi No. 31/Per-Dir/1/XII/2020 serta diselaraskan dengan kebijakan WBS Terintegrasi dalam lingkungan holding IFG yang terbaru. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendorong budaya kepatuhan, serta menjaga reputasi dan aset Perusahaan dari risiko yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Jamkrindo menempatkan pelaksanaan WBS sebagai prioritas strategis, dengan tanggung jawab yang berada langsung di bawah pengawasan Direksi dan pemantauan Dewan Komisaris. Melalui sinergi ini, Perusahaan memastikan bahwa setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan profesional, termasuk penanganan melalui jalur hukum jika diperlukan.

Sejak diterapkannya sistem ini, Satuan Pengawasan Intern (SPI) aktif melakukan sosialisasi selama pelaksanaan audit umum, guna memastikan setiap insan Perusahaan memahami hak dan kewajibannya dalam pelaporan pelanggaran. Jamkrindo juga menjamin perlindungan yang kuat bagi pelapor, baik dari pihak internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa mereka tidak akan mengalami perlakuan yang merugikan sebagai akibat dari itikad baik dalam menyampaikan laporan.

Lebih dari sekadar mekanisme pengaduan, WBS Jamkrindo berfungsi sebagai *early warning system* yang efektif dalam mendeteksi potensi masalah sejak dini, sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi area kritis dan kelemahan dalam pengendalian internal. Informasi yang disampaikan melalui sistem ini membantu manajemen dalam merancang tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memperkuat proses bisnis.

Commitment to Implementation of the Whistleblowing System

As part of the commitment to realize GCG, the Company consistently implements the Whistleblowing System (WBS) as an effective, transparent, and accountable mechanism for reporting violations. This system is designed to provide a secure channel for all Jamkrindo employees and external parties to report any suspected violations that could potentially harm the Company, whether financially or non-financially, while strictly upholding the principles of confidentiality and protection for the whistleblower.

The implementation of WBS in Jamkrindo is based on the Board of Directors Regulation No. 31/Per-Dir/1/XII/2020 and aligned with the Integrated WBS policy in the latest IFG holding environment. This policy aims to create a conducive work environment, encourage a culture of compliance, and safeguard the Company's reputation and assets from the risks posed by violations. Jamkrindo places the implementation of WBS as a strategic priority, with the responsibility falling directly under the monitoring of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Through this synergy, the Company ensures that every incoming report can be followed up quickly, precisely and professionally, including handling through legal channels if necessary.

Since the implementation of this system, the Internal Audit Unit (SPI) has actively conducted dissemination during the implementation of general audits, to ensure that every employee of the Company understands their rights and obligations in reporting violations. Jamkrindo also ensures solid protection for whistleblowers, whether from internal or external parties, safeguarding them from any form of retaliation or adverse treatment when reporting in good faith.

More than merely a complaint mechanism, Jamkrindo's Whistleblowing System (WBS) functions as an effective early warning system to detect potential issues at an early stage, as well as a valuable evaluation tool for identifying critical areas and weaknesses within internal controls. The information delivered through this system assists management in designing corrective actions needed to strengthen business processes.

Komposisi dan Susunan Direksi

Selama tahun 2024, komposisi anggota Direksi Perusahaan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian komposisi Direksi per 31 Desember 2024 berjumlah 6 (enam) Direksi.

Composition of the Board of Directors

Throughout 2024, there were no changes made to the composition of the Company's Board of Directors. Therefore, as of December 31, 2024, the Company's Board of Directors is comprised of 6 (six) Directors

Susunan Direksi Jamkrindo per 31 Desember 2024
Jamkrindo's Board of Directors Composition as of December 31, 2024

Nama	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Tenure
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	SK-21/MBU/07/2023 – 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023 - 24 Maret 2025 July 31, 2023 - March 24, 2025	Ke-1 1st
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022-27 Oktober 2027 October 27, 2022 - October 27, 2027	Ke-1 1st
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of Human Capital Management, General Affairs, and Risk Management	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022-27 Oktober 2027 October 27, 2022 - October 27, 2027	Ke-1 1st
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan & Layanan Director of Institutional & Services	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022-27 Oktober 2027 October 27, 2022 - October 27, 2027	Ke-1 1st
Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023-21 Maret 2026 July 31, 2023 - March 21, 2026	Ke-1 1st
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023-31 Juli 2028 July 31, 2023 - July 31, 2028	Ke-1 1st

Apresiasi dan Penutup

Mengakhiri laporan ini, Direksi Perusahaan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan sepanjang tahun. Kepada seluruh insan Jamkrindo, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, integritas, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus mendorong pertumbuhan.

Kami juga menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dewan Komisaris atas arahan, pengawasan, dan dukungan strategis yang terus memperkuat langkah Perusahaan dalam mencapai tujuan. Sinergi yang terjalin antara Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, serta seluruh mitra kerja menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan Jamkrindo di masa depan.

Ke depan, Direksi berkomitmen untuk terus memperkuat peran strategis Jamkrindo dalam mendukung sektor usaha, terutama pelaku UMKM, melalui inovasi layanan, dan penguatan tata kelola. Dengan semangat kolaborasi dan prinsip kehati-hatian, kami optimistis Jamkrindo akan mampu terus tumbuh, menciptakan nilai tambah, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

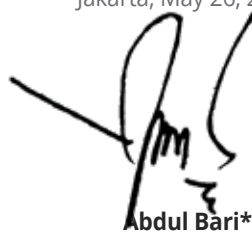
Appreciation and Closing

To conclude this report, the Board of Directors of the Company expresses its highest appreciation to all stakeholders for their trust, support and cooperation throughout the year. To all personnel of Jamkrindo, we sincerely thank you for your dedication, integrity, and unwavering spirit in overcoming challenges and driving our growth forward.

We would also like to express our deepest appreciation to the Board of Commissioners for their strategic guidance, vigilant oversight, and unwavering support that continually strengthen the Company's journey toward achieving its goals. The synergy between the Board of Commissioners, Board of Directors, employees, and all partners is an important foundation in ensuring the sustainability and success of Jamkrindo in the future.

Going forward, the Board of Directors remains committed to enhancing Jamkrindo's strategic role in supporting the business sector, particularly MSMEs, through innovative services and strengthened governance. Guided by a spirit of collaboration and prudence, we are confident that Jamkrindo will continue to grow, deliver added value, and make a meaningful contribution to the national economy.

Jakarta, 26 Mei 2025
Jakarta, May 26, 2025



Abdul Bari*
Plt Direktur Utama
Acting President Director

*Menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia sejak 25 Maret 2025, berdasarkan penugasan seiring dengan berakhirnya masa tugas Bapak Akhmad Purwakajaya selaku Direktur Utama

*Served as Acting President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia since March 25, 2025, based on assignment in line with the expiration of Mr. Akhmad Purwakajaya's term as President Director.

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT STATEMENT OF RESPONSIBILITY

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jaminan Kredit Indonesia tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Statement of Responsibility from the members of Board of Directors and Board of Commissioners on the correctness of the content of PT Jamkrindo's Annual Report in 2024

We, the undersigned, state that all information in the Annual Report of PT Jaminan Kredit Indonesia of 2024 contains complete information and we are fully responsible for the correctness of the content of the Company's Annual Report. This statement is made truthfully and consciously.

Jakarta, 26 Mei 2025

Jakarta, May 26, 2025

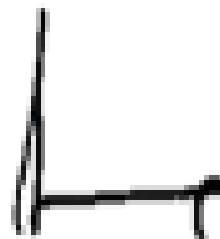
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



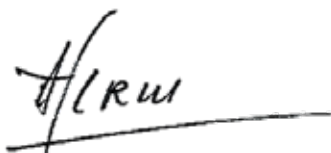
Krisna Wijaya
Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner



Desty Arlaini
Komisaris
Commissioner



Ari Wahyuni
Komisaris
Commissioner



Hernita Alius
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Muhammad Muchlas Rowi
Komisaris Independen
Independent Commissioner

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT STATEMENT OF RESPONSIBILITY

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jaminan Kredit Indonesia tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Statement of Responsibility from the members of Board of Directors and Board of Commissioners on the correctness of the content of PT Jamkrindo's Annual Report in 2024

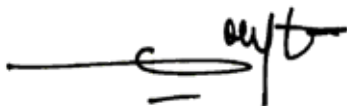
We, the undersigned, state that all information in the Annual Report of PT Jaminan Kredit Indonesia of 2024 contains complete information and we are fully responsible for the correctness of the content of the Company's Annual Report. This statement is made truthfully and consciously.

Jakarta, 26 Mei 2025
Jakarta, May 26, 2025

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS



Abdul Bari*
Plt Direktur Utama
Acting President Director



Suwarsito
Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operations and Network



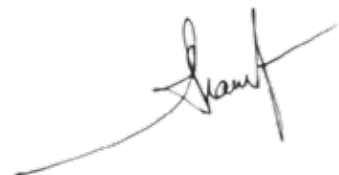
Achmad Ivan S Soeparno
Direktur Manajemen SDM, Umum, dan
Manajemen Risiko
Director of HC Management, General
Affairs, and Risk Management



Henry Panjaitan
Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Guarantee Business



Abdul Bari
Direktur Kelembagaan dan Layanan
Director of Service and Institutions



Alia Nur Fitri
Direktur Keuangan dan Investasi
Director of Finance and Investment

*Menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia sejak 25 Maret 2025, berdasarkan penugasan seiring dengan berakhirnya masa tugas Bapak Akhmad Purwakajaya selaku Direktur Utama

*Served as Acting President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia since March 25, 2025, based on assignment in line with the expiration of Mr. Akhmad Purwakajaya's term as President Director.

03

PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

Perusahaan secara konsisten merumuskan strategi pengembangan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

The Company consistently formulates organizational development strategies that are tailored to the needs and challenges faced.





INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY



Nama Perusahaan Company Name	:	PT Jaminan Kredit Indonesia, atau disingkat Jamkrindo PT Jaminan Kredit Indonesia, or Jamkrindo for short
Bentuk dan Status Badan Usaha Form and Status of Business Entity	:	Perseroan Terbatas (PT) Limited Liability Company (LLC)
Dasar Hukum Pendirian Date of Establishment	:	1 Juli 1970 July 1, 1970

Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0011484.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 07 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.KN., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075624.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022. Deed of Establishment Number 25 dated February 24, 2020 made before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notary in Jakarta and has obtained approval of the Establishment of a Limited Liability Company from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU- 0011484.AH.01.01 of 2020 dated February 24, 2020 and last amended by Deed Number 07 dated October 07, 2022 made before Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.KN., Notary in Jakarta and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0075624.AH.01.02. Year 2022 on October 19, 2022.	
Bidang Usaha Line of Business	Kredit Usaha Rakyat (KUR), KBG dan Suretyship, Produktif, dan Konsumtif. People's Business Credit (KUR), KBG and Suretyship, Productive, and Consumptive.	
Jaringan Usaha Business Network	9 (sembilan) Kantor Wilayah, 1 (satu) Kantor Cabang Khusus, 53 (lima puluh tiga) Kantor Cabang, 17 (tujuh belas) Kantor Unit Pelayanan (KUP), serta 12 (dua belas) Digital Business Unit (DBU). 9 (nine) Regional Offices, 1 (one) Special Branch Office, 53 (fifty-three) Branch Offices, 17 (seventeen) Service Unit Offices, and 12 (twelve) Digital Business Units (DBU).	
Kepemilikan Ownership	Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia (0,000009%) Saham Seri B PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (99,999991%) Series A Dwiwarna Shares Government of the Republic of Indonesia (0.000009%) Series B Shares PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Liability Company) (99.999991%)	
Penyertaan Modal Negara Addition of State Capital	Rp10.638.733.000.000 (sepuluh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) IDR 10,638,733,000.000 (ten trillion six hundred thirty-eight billion seven hundred thirty-three million rupiah)	
Karyawan Tetap Permanent Employees	1.150 orang pada tahun 2024 1,150 employees in 2024	
Alamat dan Informasi Perusahaan Address and Company Information	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia Telepon: +62 21 6540335 Faksimili: +62 21 6540344, 6540348 Email: contact@jamkrindo.co.id Situs Web: www.jamkrindo.co.id	Jamkrindo Building Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Central Jakarta 10610, Indonesia Phone: +62 21 6540335 Facsimile: +62 21 6540344, 6540348 Email: contact@jamkrindo.co.id Website: www.jamkrindo.co.id
Media Sosial Social Media	X @pt_jamkrindo Instagram @pt_jamkrindo Facebook PT Jamkrindo YouTube PT Jamkrindo	



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

Sekilas tentang Jamkrindo

PT Jaminan Kredit Indonesia, yang selanjutnya disebut juga dengan Jamkrindo atau Perusahaan, merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha penjaminan guna mendukung kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK). Keberadaan Perusahaan diawali dengan berdirinya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor 99/Kpts/MENTRANSKOP/1970 tertanggal 1 Juli 1970 untuk mendukung perkembangan koperasi di Indonesia melalui penjaminan kredit yang disalurkan oleh koperasi.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 tentang Pendirian Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), pemerintah melebur dan menggabungkan LJKK ke dalam Perum PKK. Dalam perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000, tanggal 7 November 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha, maka Perum PKK berganti nama menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, maka Perum Sarana Pengembangan Usaha diubah namanya menjadi Perum Jamkrindo. Perubahan nama tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK.

Pada tahun 2008 pula Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.

Dalam perkembangannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan

Jamkrindo at A Glance

PT Jaminan Kredit Indonesia, hereinafter referred to as Jamkrindo or the Company, is the only State-Owned Enterprise (SOE) engaged in the guarantee business to support the progress of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK). The Company's existence began with the establishment of the Cooperative Credit Guarantee Agency (LJKK) based on the Decree of the Minister of Transmigration and Cooperatives Number 99/Kpts/MENTRANSKOP/1970 dated July 1, 1970 to support the development of cooperatives in Indonesia through credit guarantees channeled by cooperatives.

Subsequently, based on Government Regulation No. 51 of 1981 dated December 23, 1981 concerning the Establishment of the Cooperative Financial Development Corporation (Perum PKK), the government merged and consolidated LJKK into Perum PKK. In its development, in accordance with Government Regulation No. 95 of 2000, dated November 7, 2000 concerning Public Company (Perum) Sarana Pengembangan Usaha, Perum PKK changed its name to Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Furthermore, based on Government Regulation No. 41 of 2008 dated May 19, 2008 on Public Company (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Perum Sarana Pengembangan Usaha was renamed as Perum Jamkrindo. The name change is related to the change in the company's business which no longer provides loans directly to MSMEs through profit-sharing patterns, but only focuses on the MSME credit guarantee business.

In 2008, the Government also issued Presidential Regulation No. 2 dated January 26, 2008 on Guarantee Institutions. To implement the Presidential Regulation, the Government, in this case the Ministry of Finance, issued Minister of Finance Regulation No. 222/PMK.010/2008 dated December 16, 2008 concerning Credit Guarantee Companies and Credit Re-Guarantee Companies. With this regulation, Perum Jamkrindo is required to have a business license as a Credit Guarantee Company. To follow up on the regulation, the Minister of Finance issued Decree No. KEP-77/KM.10/2009 dated April 22, 2009 which established Perum Jamkrindo's business license as a Credit Guarantee Company.

During the development, the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo officially changed the legal entity of the Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia or Perum Jamkrindo into a Limited Liability Company through Government Regulation No. 11 of 2020 dated February 14, 2020 concerning Changes in the Legal Entity Form of Perusahaan Umum Jaminan

Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Jamkrindo (Persero). Akta pendirian Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia merubah status badan hukum PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menjadi Jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari holding BUMN Asuransi dan Penjaminan. Beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam BUMN *Holding* Perasuransian dan Penjaminan tersebut adalah:

1. Anggota *Holding* Pasar Modal dan Jasa Keuangan
 - a. PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), bergerak di bidang manajemen investasi;
 - b. PT Bahana Sekuritas, bergerak dibidang penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek;
 - c. PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), yang bergerak di bidang pembiayaan modal ventura dan bertugas membina sektor UMKM di Indonesia;
 - d. PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), bergerak dalam bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (*advisory*);
 - e. PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU"), bergerak di bidang pemilikan, pengelolaan, dan penyewaan Gedung.
2. Anggota *Holding* Asuransi Umum dan Penjaminan
 - a. PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askindo") yang melaksanakan usaha di bidang jasa asuransi kredit dan asuransi umum;
 - b. PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") yang melayani penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada bank ataupun non-bank;
 - c. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ("Jasa Raharja") bergerak di bidang asuransi sosial;
 - d. PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") bergerak di bidang asuransi umum.
3. Anggota *Holding* Asuransi Jiwa dan Kesehatan
 - a. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa.

Riwayat Perubahan Nama Perusahaan

Sejak berdiri pada tahun 1970 hingga saat ini, Jamkrindo telah mengalami beberapa kali perubahan nama sebagai berikut:

1. Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985;

Kredit Indonesia (PERUM) into a Company (Persero) which was disseminated on February 17, 2020. This decision was confirmed by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 of 2020 concerning the Ratification of the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as Jamkrindo (Persero). The deed of establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed at the Ministry of SOEs Building, Jakarta on February 24, 2020.

Based on Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Addition of State Participation Equity of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia changed the legal entity status of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) to Jamkrindo and officially became a subsidiary of the SOE Insurance Holding and Guarantee company. The companies that are members of the SOE Insurance Holdings and Guarantee are:

1. Holding Members of Capital Market and Financial Services
 - a. PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), which is engaged in investment management;
 - b. PT Bahana Sekuritas, which is engaged in securities underwriting and securities trading brokerage;
 - c. PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), which is engaged in venture capital financing and is tasked with fostering the MSME sector in Indonesia;
 - d. PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), which is engaged in investment and financial advisory services;
 - e. PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU"), which is engaged in the ownership, management, and leasing of buildings.
2. Holding Members of General Insurance and Guarantee
 - a. PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askindo") which conducts business in credit insurance and general insurance services;
 - b. PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") which provides guarantees, either directly or indirectly, to banks and non-bank entities;
 - c. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ("Jasa Raharja"), which is engaged in social insurance;
 - d. PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo"), which is engaged in general insurance.
3. Holding Member of Life and Health Insurance
 - a. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), which is engaged in life insurance.

The History of The Company's Name Changes

Since its establishment in 1970 until present, Jamkrindo has undergone several name changes as follows:

1. The Company was originally established under the name of the Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No. 51 of 1981 which was a merger of the Cooperative Credit Guarantee Agency (LJKK) which was formed in 1970. The Government Regulation was later refined through Government Regulation No. 27 of 1985;

2. Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000;
 3. Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008;
 4. Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perum Jamkrindo dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilakukan penandatanganan akta pendirian PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) yaitu Akta No. 25 tanggal 24 Februari 2020 di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Jamkrindo (Persero);
 5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 Tanggal 9 April 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028854.AH.01.02.Tahun 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* Asuransi dan Penjaminan dengan nama PT Jaminan Kredit Indonesia disingkat Jamkrindo.
2. The Company's name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No. 95 of 2000;
 3. The name of the Company was again changed, becoming the Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) based on Government Regulation No. 41 of 2008;
 4. To change the legal form of Perum Jamkrindo from Public Company (PERUM) to Limited Liability Company (LLC), the Government issued Government Regulation No. 11/2020 which was disseminated on February 17, 2020. To fulfill the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the deed of establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed, namely Deed No. 25 dated February 24, 2020 at the Ministry of SOEs building, Jakarta on February 24, 2020 and has been legalized based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 Year 2020 Regarding the Ratification of the Establishment of Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as Jamkrindo (Persero);
 5. Based on Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia and Deed of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.2020. 2 Dated April 9, 2020 which was legalized based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0028854.AH.01.02. Year 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee holding company under the name PT Jaminan Kredit Indonesia abbreviated as Jamkrindo.

2008-2020

2020

2020-Sekarang 2020-Present

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah, antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond*, dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes, includes general credits, micro, construction, bank guarantees, distribution guarantees, program guarantees and *Surety Bonds*, as well as guarantees in the framework of SOE synergies.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah, antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond*, dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes, includes general credits, micro, construction, bank guarantees, distribution guarantees, program guarantees and *Surety Bonds*, as well as guarantees in the framework of SOE synergies.

PT Jaminan Kredit Indonesia

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah, antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond*, dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes, includes general credit, micro, construction, bank guarantees, distribution guarantees, program guarantees and *Surety Bonds*, as well as guarantees in the framework of SOE synergies.

BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

LINE OF BUSINESS, PRODUCTS, AND SERVICES

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 8 Maret 2021 mengenai Perubahan Anggaran Dasar, pada Pasal 3 disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber dana Perseroan berdasarkan prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan dan Kesesuaiannya dengan Anggaran Dasar Perusahaan

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, Perusahaan menjalankan berbagai kegiatan usaha dan menerapkan kebijakan pengembangan usaha yang bertujuan mendukung upaya pembiayaan secara optimal. Langkah-langkah ini dirancang untuk memperkuat peran Perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui layanan penjaminan yang inovatif dan berkelanjutan.

Berikut adalah rincian pelaksanaan kegiatan usaha serta kebijakan pengembangan usaha yang telah diimplementasikan:

Business Activities Based on Articles of Association

Based on Deed No. 10 dated March 8, 2021 concerning Amendments to the Articles of Association, Article 3 states that the purpose, objectives, and the business activities of the Company are to conduct business activities guarantees for Micro, Small and Medium Enterprises as well as Cooperatives, Guarantees for State-Owned Enterprises, Warehouse Receipt System Guarantees, and other Guarantees as well as optimizing the utilization of the Company's fund resources based on the principles of good corporate governance.

Implemented Business Activities and Their Compliance with the Company's Articles of Association

To achieve the goals and objectives that have been set, the Company conducts various business activities and implements business development policies aimed at supporting optimal financing efforts. These measures are designed to strengthen the Company's role in supporting economic growth through innovative and sustainable guarantee services

The following are details of the implementation of business activities and business development policies that have been implemented:

No.	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Executed/Not Executed	Keterangan Description
1	Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Credit, financing, or Sharia Principles-based financing guarantees provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises as well as Cooperatives.	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Umum, Penjaminan Kredit Mikro, Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Penjaminan Program PEN. Available in General Credit Guarantee, Micro Credit Guarantee, People's Business Credit Guarantee. Assurance for PEN Program.
2	Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya. Loan guarantees distributed by savings and loan cooperatives or cooperatives that have savings and loan business units to its members.	√	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna KKLK. Available in KKLK Multipurpose Credit Guarantee products.
3	Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan. Credit guarantees and/or partnership programs loans disbursed by state-owned enterprises in the framework of partnership and community development programs.	√	Penyaluran program kemitraan. Distribution of partnership programs.
4	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Guarantee of debt securities to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.	x	Belum/Tidak dijalankan. Not yet implemented.

No.	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Executed/Not Executed	Keterangan Description
5	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Guarantee of the purchase of goods in installments made to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO. Available in OTO Credit Guarantee products.
6	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Guarantee of debt securities to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.	N/A	Tidak ada None
7	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Guarantee of the purchase of goods in installments conducted to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO. Available in OTO Credit Guarantee product.
8	Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Guarantee of trade transactions made to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Distribusi Barang Available in the Goods Distribution Guarantee product.
9	Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa <i>surety bond</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Guarantee of the procurement of goods and/or services <i>surety bonds</i> made to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.	✓	Terdapat pada produk <i>Surety Bond</i> , <i>Surety Bond Co-Guarantee</i> , Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa. Available in <i>Surety Bond</i> , <i>Surety Bond Co-Guarantee</i> , <i>Construction Credit Guarantee</i> , and <i>Goods/Services Procurement products</i> .
10	Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Guarantee of bank guarantees (bank counter-guarantees) made to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi, Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi <i>Co-Guarantee</i> . Available in the <i>Credit Guarantee of Counter Bank Guarantee</i> , <i>Co-Guarantee Counter Bank Guarantee</i>
11	Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives	x	Belum dijalankan. Not yet implemented.
12	Penjaminan <i>letter of credit</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Letter of credits guarantee for Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.	x	Belum dijalankan. Not yet implemented.
13	Penjaminan kepabeanan (<i>Custom Bond</i>) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Customs guarantee (<i>Custom Bond</i>) carried out on Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.	✓	Terdapat pada <i>Customs Bond</i> . Available on <i>Customs Bond</i> .
14	Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Excise guarantees carried out on Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperative	✓	Terdapat pada produk <i>Customs Bond</i> . Available in <i>Customs Bond products</i> .
15	Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (<i>start up business</i>) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro Business, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	✓	Terdapat pada produk penjaminan Kredit Umum, dan Penjaminan Kredit Mikro. Available in <i>General Credit Guarantee</i> , and <i>Micro Credit Guarantee products</i> .
16	Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi. The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives.	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Mikro. Available in <i>Micro Credit Guarantee products</i> .
17	Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perseroan dengan badan usaha milik negara lain. Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises.	✓	Terdapat dalam produk <i>Surety Bond</i> , Penjaminan Bersama KUR, Penjaminan Pembiayaan <i>Invoice</i> . Available in <i>Surety Bond products</i> , <i>Joint KUR Guarantee</i> , <i>Invoice Financing Guarantee</i> .

No.	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Executed/Not Executed	Keterangan Description
18	Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals in accordance with the purposes and objectives of the Company.	x	Tidak dijalankan karena dialihkan seluruhnya kepada PT Jamsyar. Not executed due to it being transferred entirely to PT Jamsyar.
19	Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan. Providing management consulting services related to Guarantee business activities.	√	Terdapat di Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan II. Available in the Institutional Business Relations Division II.
20	Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi. Ranking, management consulting, management services, mentoring/empowerment, as well as other services for Micro, Small, and Medium Enterprises as well as Cooperatives.	√	Terdapat di Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan II. Available in the Institutional Business Relations Division II.
21	Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or relevant agencies in accordance with their authority.	N/A	Tidak ada. None.

Kegiatan usaha utama Perusahaan dapat dilaksanakan dalam bentuk Penjaminan Bersama (*co-guarantee*), kecuali untuk kegiatan yang terkait dengan pemberian jasa konsultasi manajemen. Kegiatan ini meliputi konsultasi manajemen terkait usaha penjaminan dan pemeringkatan, jasa manajemen, pendampingan atau pemberdayaan, serta layanan lainnya yang ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi.

The Company's main business activities can be implemented in the form of co-guarantee, except for activities related to the provision of management consulting services. These activities include management consultations related to guarantee and rating businesses, management services, mentoring or empowerment, as well as other services aimed at Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as Cooperatives.

Produk dan Jasa yang Dijalankan Perusahaan

Berikut adalah daftar produk dan jasa yang dijalankan oleh Jamkrindo hingga 31 Desember 2024.

Products and Services Offered by the Company

The following is a list of products and services offered by Jamkrindo until December 31st 2024.

Jenis Produk Product Type	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) People's Business Credit (KUR) Guarantee	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif. Venture Capital Credit/Financing and/or investment to MSMEs in a productive and feasible, but not yet bankable business field which is guaranteed by the Guarantee Company. KUR distribution is expected to help develop productive businesses.
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP KPR Sejahtera Guarantee Housing Financing Liquidity Facility (FLPP)	Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Guarantee on housing loan disbursement which is a collaboration program between the Bank and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia. This guarantee is given with low-interest rates and mild and fixed installments throughout the period of credit and is intended for low-income communities.
Penjaminan Sistem Resi Gudang Warehouse Receipt System Guarantee	Kegiatan pemberian jaminan kepada Pengelola Gudang atas Kewajibannya kepada petani dalam melakukan pengelolaan barang komoditas. Activities of providing guarantee to warehouse managers for their obligations to farmers in managing commodity goods.

Jenis Produk Product Type	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Umum General Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus). Guarantee of credit/financing provided by the Guarantee Beneficiary to the Guaranteed for the purposes of additional Working capital and/or Investment in order to increase and develop the Guaranteed business (The guarantee process is conducted on a case-by-case basis).
Penjaminan Kredit Mikro Microcredit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha mikro dan Kecil, untuk keperluan modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah <i>plafond</i> kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan yang proses penjaminan dilakukan secara otomatis Bersyarat (Conditional Automatic Cover/CAC). Guarantee of credit/financing given by the Recipient of Guarantee to the Guaranteed Micro and Small Entrepreneurs, for Working Capital needs and/or investment in the framework of increasing and developing productive businesses, in which the credit limit is in accordance with the microcredit provisions in the Guarantee Recipient. The guarantee process of which is a Conditional Automatic Cover/CAC.
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Guarantee of Construction Credit & Procurement of Goods/ Services	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan <i>Bouwheer</i> (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional. Guarantee of credit/financing provided by the Guarantee Recipient to the Guaranteed for additional working capital for the construction and procurement of goods/services in accordance with the employment contract between the Guaranteed and Bowheer (the project owner), the source of which is from the State/Regional Budget, or State-owned Enterprises, or national private expenditure
Penjaminan Kredit Multiguna Guarantee of Multipurpose Credit	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan lainnya (Non Bank) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/ instansi Pemerintah) baik yang penyalurnya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lain, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif. Guarantee of credit/financing provided by the Guarantee Recipient of Other (Non-bank) Financial Institutions to the Guaranteed individuals (permanent employees of a Company/Government agency) whose distribution is conducted directly or through other institutions, and the source of return is deducted from guaranteed wages. The guarantee application process is done collectively.
Penjaminan Distribusi Barang Guarantee of the Distribution of Goods	Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan pabrik (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (analisa penjaminan dilakukan dengan case by case). Credit guarantees for credit/financing of distribution which is provided by manufacturing companies to distributors who distribute goods. (Guarantee analysis is done on a case by case basis).
Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi Guarantee of Bank Guarantees/Counter-Guarantees	Penjaminan yang diberikan Penjamin (Perum Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan <i>Obligee</i> ketika Terjamin wanprestasi. A guarantee given by the Guarantor (Jamkrindo) to the Guarantee Recipient (Bank) that is unconditional and the Guarantor will pay compensation to the Guarantee Recipient for the Bank Guarantee (BG) disbursement claim submitted by the Oblige when the Guaranteed has defaulted.
Surety Bond	Suatu perjanjian 3 pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada <i>Obligee</i> bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i>, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut. A 3-party agreement between the Guarantor and the Guaranteed on the basis of confidence jointly pledged to the Oblige that if due to any circumstances the Guaranteed has become negligent or fail to conduct tasks in accordance with the Oblige's demand, the Guarantor will be responsible to the Oblige to settle the Guaranteed's obligations.
Payment Bond	Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan. Guarantee issued by the Guarantor to guarantee the Guaranteed's payment to the Guarantee Recipient for the bailout facility given to the Guaranteed Recipients whose funding source is from the Guarantee Receiver or other funding source designated by the Guarantee Receiver.

Jenis Produk Product Type	Keterangan Description
Customs Bond	Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang & impor dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada <i>Obligee</i> (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin (importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya. Guarantee on customs facilities, facilities for suspension/exemption of goods import duty and collection of other goods import duty to the <i>Obligee</i> (Directorate General of Customs and Excise) if the Guaranteed (importer/producer of exporters) does not complete its obligations.
Penjaminan Keagenan Kargo Cargo Agencies Guarantee	Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/<i>Obligee</i> (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/<i>Principal</i> (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/<i>Obligee</i>. A guarantee that is given to the Recipient of Guarantee/<i>Obligee</i> (The Transportation Service Provider) for guaranteed obligations/principal (Cargo Agent) in making payment of freight costs to the Recipient of Guarantee/<i>Obligee</i>.
Penjaminan Invoice Financing Guarantee of Invoice Financing	Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada <i>invoice</i> yang diterbitkan oleh penerima jaminan. Guarantee to guarantee the Guaranteed payment obligations based on invoices issued by Guarantee Recipients.
Penjaminan Supply Chain Financing Guarantee of Supply Chain Financing	Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka pengerjaan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari PERUSAHAAN INTI tertentu berupa KMK <i>pre Financing</i>, KMK <i>Post Financing</i> dan KMK Distributor. Guarantee on Credit given by the Guarantee Recipient to the Guaranteed in the context of Workmanship/project completion, acquisition of receivables/bills, procurement of goods and/or services, purchase of goods and/or services, based on contracts or similar documents from certain CORE COMPANIES in the form of KMK Pre Financing, KMK Post Financing, and KMK Distributor.
Penjaminan Kemaritiman/Jaring Maritime Activities/Fisheries Guarantee	Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan. Guarantee on financing for working capital and investment used for activities in the field of Marine and Fisheries.
Penjaminan Pembiayaan Otomotif Automotive Financing Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna. Guarantee of credit/financing to own motorized vehicles provided by other financial institutions for the purpose of working capital and/or investment or multipurpose.
Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang Credit Guarantee of Warehouse Receipt Subsidy Scheme	Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya. The act of giving guarantee with the Warehouse Receipt Subsidy Scheme credit facilities to the guaranteed (such as Farmers, Farmer Groups, Combined Farmer Groups, and Cooperatives) which is distributed by recipients of guarantee (Executing Banks/Non-Bank Financial Institutions Providing Credit) with warehouse receipts issued through the Warehouse Receipt System as a collateral. This is in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments.
Penjaminan Kredit Resi Gudang Warehouse Receipts Credit Guarantee	Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan: Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang (<i>Collateral Management Agreement/ CMA</i>). Guarantee of Warehouse Receipt Credit given to the Guaranteed channeled by the Guarantee Recipient with warehouse receipt issued: through the Warehouse Receipt System (SRG) as collateral in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments. This type of guarantee can also be given by the Collateral Manager through a collateral management agreement (CMA) between Guaranteed, Guarantee Recipient, and Warehouse Management.
Penjaminan Fintech Guarantee on Fintech	Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh lender melalui penyelenggara (<i>peer to peer lending</i>) kepada <i>borrower</i>. Guarantee on information technology-based money lending services that are channeled by lenders through the organizer (<i>peer to peer lending</i>) to the borrower.

Jenis Produk Product Type	Keterangan Description
Penjaminan KPR Guarantee of Home Ownership Credit (KPR)	Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (Non Bank) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko. Guarantee of the Home Ownership Credit given by Other (Non-Bank) Financial Institutions Guarantee Recipient to the Guaranteed whose financing facilities are used to buy houses, flats/apartments, home offices, shop houses or other consumptive needs with collateral in the form of houses, apartment, home office, or shophouses.
Penjaminan <i>Capital Management Guarantee</i> (CMG) Guarantee of Capital Management Guarantee (CMG)	Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) coverage penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank. Guarantee on the loan portfolio in 1 (one) guarantee coverage as one of the Bank's Credit Risk Mitigation.



KOMPETENSI INTI

CORE COMPETENCIES

Untuk mencapai tujuan perusahaan, tidak cukup hanya mengandalkan strategi yang baik. Diperlukan juga pendekatan efektif untuk mengoptimalkan kemampuan perusahaan agar mampu melampaui para kompetitor. Pendekatan ini dikenal sebagai kompetensi inti. Dengan memanfaatkan dan mengembangkan *core competency* secara maksimal, perusahaan dapat menyelaraskan nilai-nilai inti bisnis dengan kompetensi utama yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, memperkuat posisinya di pasar, dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan.

To achieve company goals, it is not enough to rely on a good strategy. It also requires an effective approach to optimize the company's ability to surpass competitors. This approach is known as core competencies. By optimizing the core competency, the Company is able to connect the values of its core business with its main business competencies. As a result, the Company will have a sustainable competitive advantage, strengthen its position in the market, and will be ready to face future business challenges.

Kriteria Identifikasi Identification Criteria	Accessibility	Perluasan pasar melalui kolaborasi BUMN dan peningkatan efisiensi melalui kolaborasi Holding Market expansion through the collaboration of SOEs and increased efficiency through the collaboration of Holding
	Unique/Rare	Satu-satunya BUMN yang bergerak dibidang penjaminan khususnya untuk UMKM The only State-Owned Enterprise engaged in special guarantees for MSMEs
	Value Creation	Mengoptimalkan reputasi dan citra terpercaya sebagai anggota Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan untuk membentuk <i>brand preference</i> di mata pelanggan Optimizing reputation and trusted image as a member of SOE's Holding in Insurance and Guarantee to establish brand preference in the eyes of customers
Risiko Risks	1. Target bisnis tidak tercapai; 2. Kualitas layanan yang dinilai kurang baik oleh pelanggan/mitra seperti layanan penjaminan dan klaim yang melebihi SLA; 3. Pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak efisien; 4. Implementasi IT kurang sesuai dengan persyaratan <i>best practice</i> IT yang berlaku. 1. Business targets not achieved; 2. Service quality that is considered poor by customers/partners, such as guarantee and claims services that exceed the SLA; 3. Inefficient implementation of operational activities; 4. IT implementation that is not in accordance with applicable IT best practice requirements.	
Kendala Challenges	1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM Terjamin; 2. Keterbatasan ekspansi produk-produk yang profitable sebagai dampak dari pandemi COVID-19; 3. Persaingan usaha yang semakin ketat. 1. The impact of the COVID-19 pandemic on the business sustainability of Guaranteed MSME debtors; 2. Limited expansion of profitable products as a result of the COVID-19 pandemic; 3. Increasingly fierce business competition.	

Berdasarkan kriteria identifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya serta hasil pengembangan model bisnis perusahaan, berikut adalah kompetensi inti yang dimiliki oleh Perusahaan:

1. Perusahaan Penjaminan terbesar di Indonesia;
2. Kapasitas penjaminan untuk UMKM sangat besar;
3. Jamkrindo lebih memahami UMKM;
4. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik di bidang penjaminan kredit UMKMK, kecepatan pembayaran klaim jaminan kredit, dan Melayani produk sesuai kebutuhan mitra (*customized product*);
5. Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari pemerintah;
6. Sistem informasi yang terintegrasi secara internal dan eksternal dengan mitra bisnis;
7. Memperkuat model bisnis dengan bergabung dalam Asuransi dan Penjaminan Holding.

In accordance with the above identification criteria and the results of the development of the Company's business model, the Company's core competencies are as follows:

1. The largest Guarantee Company in Indonesia;
2. The guarantee capacity for MSMEs is very large;
3. Jamkrindo understands MSMEs better;
4. Having good expertise and reputation in the field of MSMEs and Cooperatives credit guarantee, speed of payment of credit guarantee claims, and serving products according to the needs of partners (*customized products*);
5. Having a large capital and the full support from the Government;
6. Information systems that are integrated both internally and externally with business partners;
7. Strengthening the business model by joining to the Insurance and Holding Guarantee.

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang profesional, berdasarkan Risalah Rapat No. B.002/EKT/DIRUT/RUPS/1/2022 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020–2024, Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

To ensure the implementation of professional business activities based on the Minutes of Meeting No. B.002/ EKT/DIRUT/ RUPS/1/2022 concerning the Ratification of the Company's Long-Term Plan (RJPP) from 2020 to 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors shall determine the Vision, Mission and Corporate Culture as follows:

Visi

Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

To become the first choice of business actors in guarantee services to support growth and equity of the national economy.

Misi

Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Improving the financial accessibility of MSMEs and Cooperatives through the provision of innovative, competitive guarantees with professional, effective, and efficient services on a sustainable basis.



Kredo Perusahaan

Kredo perusahaan Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir, sebagai berikut:

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan;
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis;
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan;
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan;
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasan pelanggan.

Budaya Perusahaan

Mengacu pada arahan Menteri BUMN kepada seluruh Perusahaan BUMN, Jamkrindo mengadopsi budaya perusahaan yang terdiri dari enam nilai utama yang terangkum dalam budaya "AKHLAK."

Amanah Trustworthy	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Uphold the trust given
Kompeten Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continuously learn and develop capabilities
Harmonis Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan Care to each other and respect differences
Loyal Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Prioritize dedication for the Nation and Country
Adaptif Adaptive	Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan Continuously innovate to respond and make change
Kolaboratif Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis Build strategic alliance

Company Credo

There are five points in the Credo of Jamkrindo, which are:

1. Trusted in conducting guarantee business;
2. Responsive to changes in the business environment;
3. Excellency and Professionalism in service;
4. Sound corporate governance;
5. Leading in providing customer satisfaction.

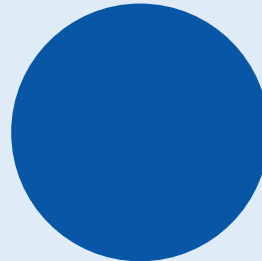
Corporate Culture

In accordance with the direction of the Minister of SOEs to all state-owned enterprises, Jamkrindo's corporate culture consists of 6 (six) items of cultural values embraced by the Company, namely the culture of "AKHLAK".

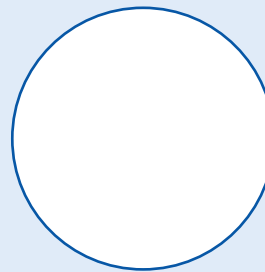


MAKNA LOGO

MEANING OF LOGO



Warna Biru
Blue Color



Warna Putih
White Color

Jamkrindo
J a m i n a n K r e d i t I n d o n e s i a

Akronim Perusahaan

The Company's Acronyms

Akronim Perusahaan yaitu "Jamkrindo" merupakan singkatan dari Jaminan Kredit Indonesia. Akronim ini terucap sangat familiar, dengan tujuan membangun "*Brand Awareness*" dan identitas melalui pengucapannya, yang secara psikologis akan terekam dalam otak manusia dan memungkinkan adanya pengucapan berulang-ulang. Pemilihan huruf yang tegas, jelas, kokoh, namun sederhana dan dinamis didasari pada visi Perusahaan, yang melambangkan kepemimpinan dengan ketangguhan dan ketegasan. Jenis *bold* atau cetak tebal bertujuan untuk memperkuat makna simbolisasi nama Perusahaan dan konotasi yang

The Company's acronym, "Jamkrindo" stands for 'Jaminan Kredit Indonesia' (Credit Guarantee Corporation of Indonesia). This acronym sounds very familiar, which is appropriate with the aim of building "*Brand Awareness*" and identity through its pronunciation. The expectation of using this acronym is that it psychologically will be recorded in the human brain and allow for repeated pronunciation. The choice of letters that are firm, clear, sturdy, yet simple and dynamic is based on the Company's vision, which symbolizes leadership with strength and firmness. Bold type lettering aims to strengthen the meaning of the company name and the connotations relevant to the core competency of the Company.

Warna

Color

Warna Biru melambangkan konsentrasi, ketenangan, bekerja sama, dapat menerima segala masukan, peka, cerdas, dan bersatu. Hal ini sejalan dengan bidang usaha Perusahaan, yaitu pelayanan dan kemitraan. Putih merupakan lambang kesucian, kebersihan, dan ketepatan dari Perusahaan untuk mewujudkan visinya. Komposisi kedua warna tersebut memberikan nuansa ketenangan dan kematangan jasa pelayanan yang terbentuk karena keteguhan memegang budaya Perusahaan.

The color Blue symbolizes concentration, calmness, cooperation, the ability to receive all input, sensitivity, smart, and unity. This is in line with the Company's business sector, namely service and partnership. The color White is symbol of holiness, cleanliness, and accuracy of the Company to realize its vision. The composition of the two colors provides a nuance of calm and maturity in the service that is established because of the firmness in holding on to the Company's culture.

A member of **IFG**

Logo Holding

Logo of Holding

Jamkrindo merupakan bagian dari holding Indonesia Financial Group (IFG) atau Holding Asuransi, Penjaminan, dan Investasi yang saat ini memiliki 11 (sebelas) anggota holding, yang terdiri dari 5 (lima) anggota holding yang bergerak di bidang asuransi dan penjaminan dan 5 (lima) anggota holding yang bergerak di bidang keuangan dan pasar modal, serta 1 (satu) anggota holding di bidang non keuangan.

Jamkrindo is part of the Indonesia Financial Group (IFG) or Insurance, Guarantee, and Investment Holding Company, which currently has 11 (eleven) holding members, consisting of 5 (five) holding members engaged in insurance and guarantee, 5 (five) holding members engaged in finance and capital markets, and 1 (one) holding member in the non-financial sector.



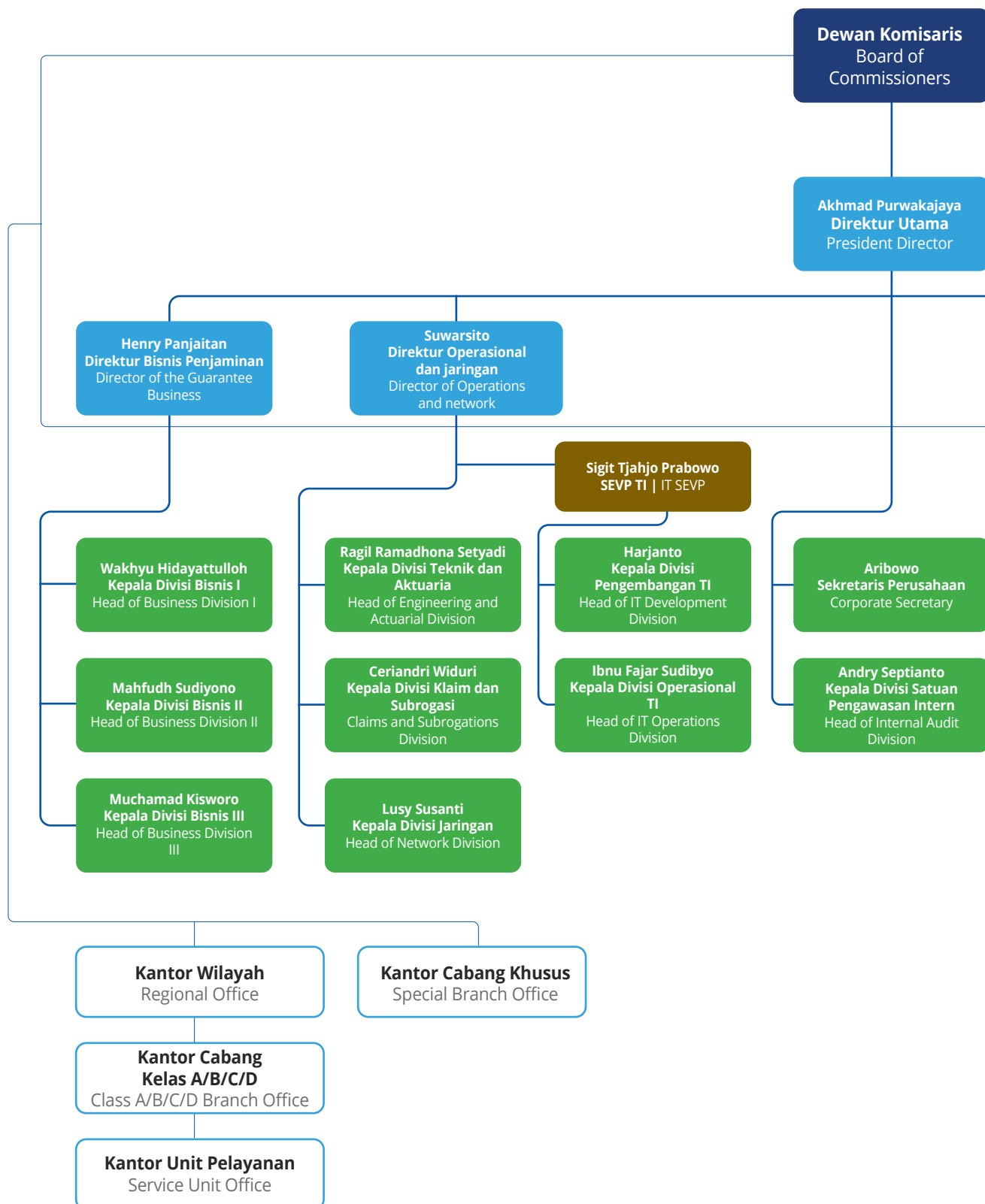
Jamkrindo

J a m i n a n K r e d i t I n d o n e s i a

A member of **IFG**

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

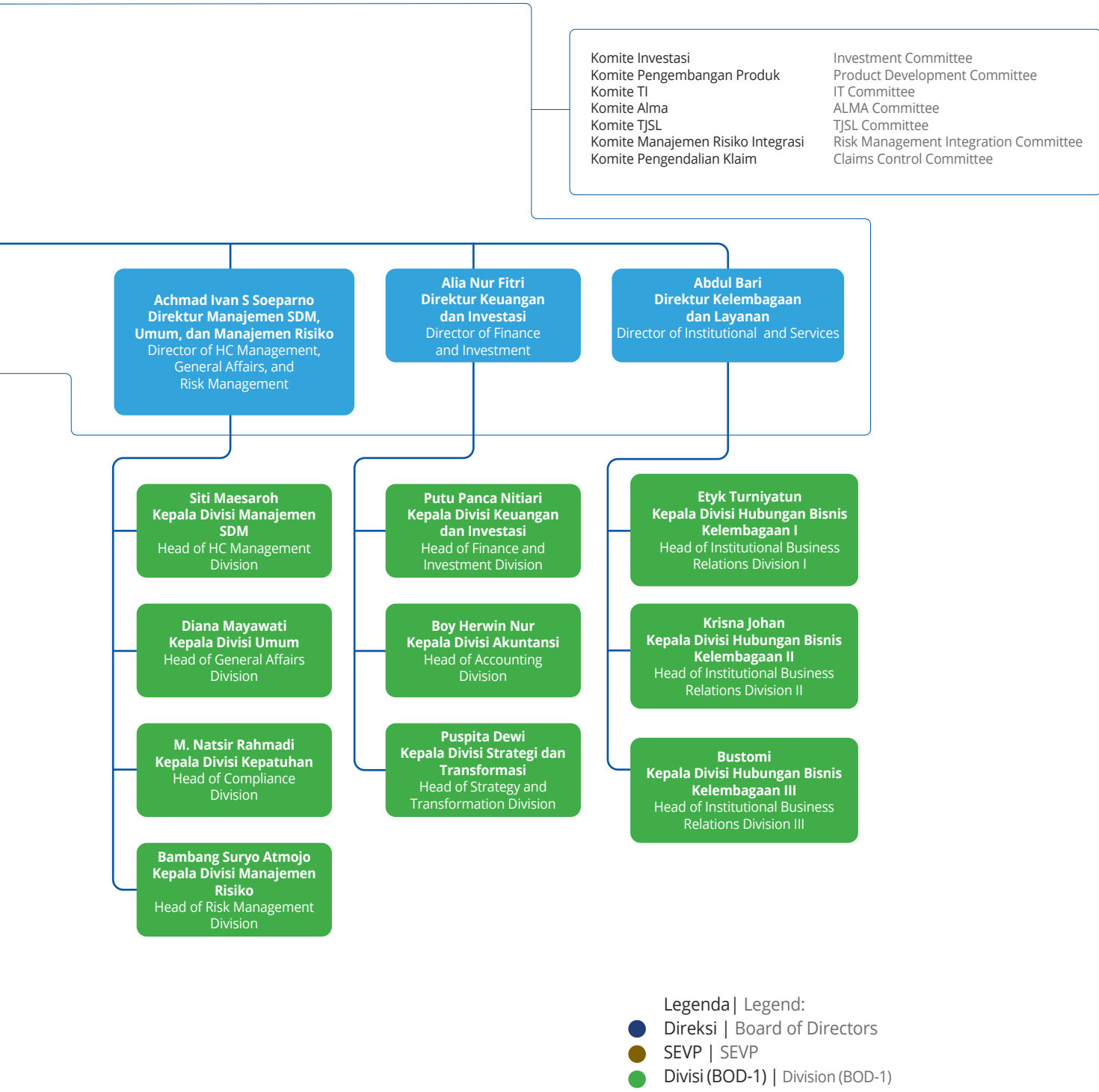


Bagi Perusahaan, salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan operasional adalah memiliki strategi yang tepat dalam mengembangkan dan merancang struktur organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Perusahaan secara konsisten merumuskan strategi pengembangan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Fokus utama pengembangan ini adalah membangun organisasi yang sesuai dengan fungsi saat ini sekaligus mempersiapkannya untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya ini, Perusahaan telah menetapkan kebijakan terkait penyesuaian Struktur Organisasi melalui Ketetapan Direksi Nomor 01/KD/5/1/2024 tentang Struktur Organisasi Jamkrindo, yang ditetapkan sebagai berikut:

For the Company, one of the most important factors in successful operational management is how to have a strategy in developing and designing their organizational structure so that it is effective and efficient. The Company consistently formulates organizational development strategies that are tailored to the needs and challenges faced. The development conducted by the Company focuses on building the organization according to its current function and adapting it to achieve sustainable goals.

As part of this effort, the Company has established policies related to the adjustment of the Organizational Structure through the Decree of the Board of Directors Number 01/KD/5/1/2024 concerning the Organizational Structure of Jamkrindo, which is stipulated as follows:



PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Selama tahun 2024, komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2024 berjumlah 6 (enam) Dewan Komisaris yang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen di mana salah satunya adalah Komisaris Utama. Berikut adalah profil Dewan Komisaris per 31 Desember tahun 2024:

Throughout 2024, there were no changes made to the composition of the Company's Board of Commissioners. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2024 is 6 (six) members, consisting of 3 (three) Commissioners and 3 (three) Independent Commissioners, one of whom is the President Commissioner. The following are the profiles of the members of the Board Commissioners as of December 31, 2024:



Krisna Wijaya
Komisaris Utama/Independen | President Commissioner/Independent
Periode Jabatan | Term of Office
2022-2027, Periode Pertama | 1st Period

Warga negara
Citizenship : Indonesia

Usia
Age : 69 tahun
69 years old

Kelahiran
Date of Birth : Jakarta, 22 Juli 1955
Jakarta, July 22, 1955

Domisili
Domicile : Jakarta Selatan, DKI Jakarta
South Jakarta, DKI Jakarta

Pendidikan
Education :

- Program Doktor Studi Antar Bidang, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (2009)
- Jurusan Ilmu-ilmu Sosial, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (1990)
- Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (1980)

Short Course

- Harvard Business School, Corporate Social Responsibility Program (2011)
- Stanford School of Business and Chicago Booth, Chicago, AS Director's Program (2012)
- Wharton Business School, Pennsylvania, AS, Program Strategic Decision Making (2013)
- Cambridge University Business School, London, Program Strategic Decision Making (2014)
- Doctoral Program in Interdisciplinary Studies, Graduate Faculty, Gadjah Mada University (2009)
- Department of Social Sciences, Master of Management Study Program, Gadjah Mada University (1990)
- Department of Agricultural Social Economics, Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University (1980)

Short Course

- Harvard Business School, Corporate Social Responsibility Program (2011)
- Stanford School of Business and Chicago Booth, Chicago, USA Director's Program (2012)
- Wharton Business School, Pennsylvania, USA, Strategic Decision-Making Program (2013)
- Cambridge University Business School, London, Strategic Decision-Making Program (2014)

Riwayat Penunjukan History of Appointment	: SK-243/MBU/10/2022 DAN 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	: Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-7/KDK.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-7/KDK.05/2023 dated February 27, 2023
Riwayat Profesi Professional History	: Anggota Tim Penilaian Klarifikasi/ Presentasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bidang Perbankan OJK (2022-sekarang), Komisaris Utama/Independen PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (2020-2022), Komisaris Utama PT Danareksa (Persero) (Mei 2020-Oktober 2020), Komisaris Utama PT Brilian Indah Gemilang (2018-sekarang), Komisaris Independen PT Adira Finance (Tbk) (2016-sekarang), Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) (2016-2022), Komisaris Utama/Independen PT BNI Life (2015-2018), Anggota Dewan Pengawas Yayasan Adaro Membangun Negeri (2014-sekarang), Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Tbk) (2010-2015), Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Chub Syariah Insurance (2009-sekarang), Komisaris PT Bank Danamon (Tbk) (2008-2010), Kepala Eksekutif/Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2005-2007), Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) (Juli 2005-September 2005), Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) (2000-2005). Member of the OJK Banking Fit and Proper Test Team (2022-present), President Commissioner/Independent of PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (2020-2022), President Commissioner of PT Danareksa (Persero) (May 2020-October 2020), President Commissioner of PT Brilian Indah Gemilang (2018-present), Independent Commissioner of PT Adira Finance (Tbk) (2016-present), Director of the Indonesian Banking Development Institute (LPPI) (2016-2022), President Commissioner/Independent of PT BNI Life (2015-2018), Member of the Supervisory Board of Adaro Foundation Membangun Negeri (2014-present), Independent Commissioner of PT Bank Mandiri (Tbk) (2010-2015), Member of the Syariah Supervisory Board of PT Chub Syariah Insurance (2009-present), Commissioner of PT Bank Danamon (Tbk) (2008-2010), Chief Executive Officer/Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation (LPS) (2005-2007), Independent Commissioner of PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) (July 2005-September 2005), Director of PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) (2000-2005).
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	: Krisna Wijaya memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. 1. Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Chub Syariah Insurance (2009 sd Sekarang). 2. Anggota Dewan Pengawas Yayasan Adaro Membangun Negeri (2014 sd 2023) sudah selesai Nov 2023. 3. Komisaris Independen PT Adira Finance (Tbk) (2016 sd Sekarang) 4. Komisaris Utama/Independen PT Brilian Indah Gemilang (2018 sd sekarang). 5. Anggota Tim Penilaian Klarifikasi/Presentasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bidang Perbankan, OJK (2015 sd sekarang). 6. Honorable Faculty Lembaga Pengembangan Perkembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 2023 sd sekarang. Krisna Wijaya holds multiple concurrent positions at other companies/institutions. 1. Member of Sharia Supervisory Board of PT Chub Syariah Insurance (2009-present). 2. Member of the Supervisory Board of Adaro Membangun Negeri (2014-2023) has finished Nov 2023. 3. Independent Commissioner of PT Adira Finance (Tbk) (2016-present) 4. President Commissioner/Independent Commissioner of PT Brilian Indah Gemilang (2018-present). 5. Member of the Assessment Team for Clarification/Presentation of Capability and Appropriateness Assessment for Banking, OJK (2015-present). 6. Honorable Faculty of the Indonesian Banking Development Institute (LPPI) (2023-present).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	: Krisna Wijaya tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama. Krisna Wijaya has no affiliations with any other members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, or with majority shareholders
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	: Manajemen Risiko Level I, II, III, 3rd Level of International Risk Management, Level IV, Level V, Key Risk Management Challenges, dan Sertifikasi Profesi Penjaminan. Risk Management Level I, II, III, 3rd Level of International Risk Management, Level IV, Level V, Key Risk Management Challenges, and Guarantee Professional Certification.



Muhammad Muchlas Rowi
Komisaris Independen | Independent Commissioner
Periode Jabatan | Term of Office
18 Oktober 2024-18 Oktober 2029. Periode Kedua
October 18, 2024-October 18, 2029, Second Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	52 tahun 52 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Garut, 31 Agustus 1972 Garut, August 31, 1972
Domisili Domicile	:	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	(S3) Doktoral Hukum di UNTAG Jakarta (2023) (S3) Doktoral Manajemen di STAI Surabaya (2022) (S2) Magister Manajemen di STIE IBMT Surabaya (2019) (S1) Sarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (1998) (S1) Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha (2020) - Doctoral Degree in Law, UNTAG Jakarta (2023) - Doctoral Degree in Management, STAI Surabaya (2022) - Master's Degree in Management, STIE IBMT Surabaya (2019) - Bachelor's Degree in Philosophy, Gadjah Mada University (1998) - Bachelor's Degree in Law, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha (2020)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Jamkrindo berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-241/MBU/010/2019 tanggal 17 Oktober 2019 jo. No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020. Selanjutnya sebagaimana Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT BPUI (Persero) selaku Para Pemegang Saham PT Jamkrindo No. SK-227/MBU/10/2024 dan No. 17/KepSir-PS/BPUI/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 telah mengangkat (kembali) Muhammad Muchlas Rowi sebagai Komisaris Independen PT Jamkrindo (periode kedua). Appointed as Independent Commissioner of PT Jamkrindo based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-241/MBU/010/2019 dated October 17, 2019 jo. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020. Furthermore, in accordance with the Decree of the Minister of SOEs and the President Director of PT BPUI (Persero) as the Shareholders of PT Jamkrindo No. SK-227/MBU/10/2024 and No. 17/KepSir-PS/BPUI/X/2024 dated October 18, 2024, Muhammad Muchlas Rowi was (reappointed) as Independent Commissioner of PT Jamkrindo (second period).
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-9/KDK.05/2020 tanggal 6 Mei 2020 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-9/KDK.05/2020 dated May 06, 2020
Riwayat Profesi Professional History	:	Dosen Institut Bisnis Muhammadiyah, Bekasi (2020-sekarang), Komisaris PT Semen Indonesia Beton (2020-2023), Bendahara Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Bandung (2021-sekarang), Pemilik PT Monami garment Sukabumi (2021-sekarang), Pimpinan Umum Monday Media Group (2015-sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014-sekarang), General Manager Marketing PT Intan Sejati Klaten (2016-2018). Lecturer at the Muhammadiyah Business Institute, Bekasi (2020-present), Commissioner of PT Semen Indonesia Beton (2020-2023), Treasurer of the Executive Board (BPH) of Universitas Muhammadiyah Bandung (2021-present), Owner of PT Monami garment Sukabumi (2021-present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014-present), General Manager of Marketing of PT Intan Sejati Klaten (2016-2018).
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	:	- Komisaris PT Fantasi Megah Bersama - Staf Khusus Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. - Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama - Special Staff for Digital Transformation and Artificial Intelligence, Ministry of Primary and Secondary Education
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	:	Muhammad Muchlas Rowi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama. Muhammad Muchlas Rowi has no affiliations with any other members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, or majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	:	GRCEE (Governance, Risk, and Compliance Certified Executive) GRCEE (Governance, Risk, and Compliance Certified Executive)



Hernita Alius
Komisaris Independen | Independent Commissioner
Periode Jabatan | Term of Office
18 Januari 2021-17 Januari 2026, Periode Pertama
 January 18, 2021-January 17, 2026, 1st Period

Warga negara Citizenship	: Indonesia
Usia Age	: 65 tahun 65 years old
Kelahiran Date of Birth	: Jakarta, 13 Oktober 1959 Jakarta, October 13, 1959
Domisili Domicile	: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	: • (S2) Magister Sains, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2006) • (S2) Magister Manajemen Universitas Bhayangkara (2004) • (S1) Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (1986) • (DIII) Diploma dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1981) • Master's Degree in Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (2006) • Master's Degree in Management, Bhayangkara University (2004) • Bachelor's Degree in Economics from Faculty of Economics, Krisnadwipayana University (1986) • Associate's Degree from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1981)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	: Jabatan Komisaris Independen diemban sejak 18 Januari 2021 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Jamkrindo, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para Pemegang Saham PT Jamkrindo No. SK-19/MBU/01/2021 dan No. 02/SK-DIR/ RUPS-AP/BPU/II/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Komisaris Independen ini merupakan periode pertama, sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Perusahaan. Hernita Alius has held the position of Independent Commissioner since January 18, 2021, through the resolution of shareholders of PT Jamkrindo, the Decree of the Minister of SOEs and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the capital owner of PT Jamkrindo No. SK-19/MBU/01/2021 No. SK-19/MBU/01/2021 and No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPU/II/2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia. This position is her first period as the Independent Commissioner, previously she had never served in the Supervisory Board/ Board of Commissioners of the Company.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	: Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-17/KDK.05/2021 tanggal 20 April 2021 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-17/KDK.05/2021 dated April 20, 2021
Riwayat Profesi Professional History	: Direktur PT Indobagus Investama (2018), Kepala di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2016-2017), Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu (2012- 2016), Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2009-2012), Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang (2006-2009), dan Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang (2000-2006). Director of PT Indobagus Investama (2018), Head of Jakarta Pajak Pratama Tax Office, Cilandak (2016- 2017), Supervisor of Tax Inspector at Jakarta Pajak Pratama Tax Office, Pasar Minggu (2012-2016), Supervisor of Tax Inspector at Jakarta Pajak Pratama Tax Office, Cilandak (2009-2012), Supervisor of Tax Inspector at Tangerang Madya Tax Office (2006-2009), Supervisor of Tax Inspector at Tangerang Tax Inspection and Investigation Office (2000-2006).
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	: Hernita Alius tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Hernita Alius has no concurrent positions in other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	: Hernita Alius tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Hernita Alius has no affiliations with any other members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or the Board of Directors.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	: Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level 1



Ari Wahyuni
Komisaris | Commissioner
Periode Jabatan | Term of Office
07 Februari 2024 - 07 Februari 2029. Periode Kedua
February 7, 2024 - February 7, 2029, Second Period

Warga negara Citizenship	: Indonesia
Usia Age	: 58 tahun 58 years old
Kelahiran Date of Birth	: Surabaya, 9 November 1966 Surabaya, November 9, 1966
Domisili Domicile	: Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Pendidikan Education	: • (S2) Master of Public Management Carnegie- Mellon University (1994) • (S1) Ilmu Hukum (keperdataan) Universitas Diponegoro (1990) • Master's Degree in Public Management, Carnegie Mellon University (1994) • Bachelor's Degree in Law (civil affairs) Diponegoro University (1990)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	: Melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019, Ari Wahyuni bergabung dalam jajaran Dewan Komisaris PT Jamkrindo. Selanjutnya sebagaimana Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT BPUI (Persero) selaku Para Pemegang Saham PT Jamkrindo No. SK-35/MBU/02/2024 dan No. 3/KepSir-PS/BPUI/II2024 tanggal 07 Februari 2024 telah mengangkat (kembali) Ari Wahyuni sebagai Komisaris PT Jamkrindo (periode kedua). Through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019, Ari Wahyuni joined the Board of Commissioners of PT Jamkrindo. Furthermore, according to the Decree of the Minister of SOEs and President Director of PT BPUI (Persero) as Shareholders of PT Jamkrindo No. SK-35/MBU/02/2024 and No. 3/KepSir-PS/BPUI/II2024 dated February 07, 2024, Ari Wahyuni was re-appointed as Commissioner of PT Jamkrindo (second period).
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	: Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-66/KDK.05/2019 tanggal 6 Agustus 2019. OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-66/KDK.05/2019 dated August 6, 2019.
Riwayat Profesi Professional History	: Berkarir di Bapepam sejak tahun 1999 dimulai sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Perundangan-undangan dan Bantuan Hukum, dan pada tahun 2008 menjabat Kepala Pusdiklat Keuangan Umum BPPK. Tahun 2009 sampai saat ini telah menduduki beberapa jabatan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diantaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Sebelum diangkat sebagai Dewan Komisaris PT Jamkrindo, juga pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas RS Harapan Kita kemudian Komisaris di PT PANN, dan terakhir sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). Her career at Bapepam began in 1999 as Head of the Legal Assistance Section, Bureau of Legislation and Legal Assistance, and in 2008 served as Head of the BPPK General Finance Training Center. From 2009 until present, she has held several positions in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, including Secretary of the Directorate General of Budget, Director of Investment Management System, Director of Public Service Agency Financial Management, and currently serves as Head of Organization and Management Bureau, Secretariat General of the Ministry of Finance. Prior to her appointment as the Board of Commissioners of PT Jamkrindo, she also served as the Board of Supervisors of Harapan Kita Hospital, then as Commissioner of PT PANN, and finally as the Board of Supervisors of the General Company for Printing Money of the Republic of Indonesia (PERURI).
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	: Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Desember 2021-sekarang). Head of the Organization and Management Bureau, Secretariat General of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (December 2021-present).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	: Ari Wahyuni tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Ari Wahyuni memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian Keuangan. Ari Wahyuni has no affiliations with any other members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or the Board of Directors. Ari Wahyuni is affiliated with a major shareholder through her concurrent position at the Ministry of Finance.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	: Enterprise Risk Management



Desty Arlaini
Komisaris | Commissioner
Periode Jabatan | Term of Office
2 Juni 2021-2 Juni 2026, Periode Pertama
 June 2, 2021-June 2, 2026, 1st Period

Warga negara Citizenship	: Indonesia
Usia Age	: 48 tahun 48 years old
Kelahiran Date of Birth	: Palembang, 4 Desember 1976 Palembang, December 4, 1976
Domisili Domicile	: Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Pendidikan Education	: (S2) Magister jurusan Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (2006) (S1) Sarjana jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI (2000) (D3) Ahli Madya jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997) - Master's degree in Management Science, University of Indonesia (2006) - Bachelor's degree in Accounting, YAI College of Economics (2000) - Associate's Degree in Accounting in Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	: Jabatan Komisaris diemban sejak 2 Juni 2021 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-182/MBU/06/2021 dan Keputusan Direktur Utama PT BPUI (Persero) No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan dalam Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. Desty Arlaini has held the position of Member of the Board Commissioners since June 2, 2021, through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-182/MBU/06/2021 and the Decree of President Director of PT BPUI (Persero) No. SK-182/MBU/06/2021 and the Decree of President Director of PT BPUI (Persero) No. 05/SK-DIR/ RUPS-AP/BPUINI/2021 dated June 2, 2021 concerning the Dismissal and Appointment Board of Commissioners Member of PT Jaminan Kredit Indonesia. This position is her first period as a member of the Board of Commissioners.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	: Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-50/KDK.05/2021 tanggal 10 September 2021. OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-50/KDK.05/2021 dated September 10, 2021.
Riwayat Profesi Professional History	: - Riwayat Profesi di Kementerian BUMN Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (14 Maret 2021-sekarang), Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN (29 Mei 2020-25 April 2021), Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I Kementerian BUMN (8 Januari 2018-20 Juni 2019), Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia Kementerian BUMN (7 Juli 2017-8 Juni 2020), Kepala Sub Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ila-2 Kementerian BUMN (22 Oktober 2015-21 Oktober 2015), Kepala Sub Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Ila Kementerian BUMN (9 Mei 2014-21 Oktober 2015), Sub Bidang Usaha Industri Primer Ila1 Kementerian BUMN (19 September 2013-8 Mei 2014), Kepala Sub Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ila1 Kementerian BUMN (3 September 2012-18 September 2013), Kepala Sub Bidang Usaha Industri Primer Ila2 Kementerian BUMN (8 Oktober 2010-2 September 2012), Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Penunjang Pertanian Kementerian BUMN (21 Mei 2008-7 Oktober 2010) - Riwayat Profesi di BUMN Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia (2 Juni 2021-sekarang), Komisaris PT Perkebunan Nusantara VI (9 Juni 2020-3 Juni 2021), Komisaris PT Perkebunan Nusantara II (19 Maret 2018- 9 Juni 2020), Sekretaris Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (1 Oktober 2013-2 Juli 2018), Sekretaris Dewan Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (28 November 2011-26 Februari 2014) - Professional History in the Ministry of SOEs Assistant Deputy for Logistics Services of the Ministry of SOEs (March 14, 2021-present), Assistant Deputy for Plantation and Forestry of the Ministry of SOEs (May 29, 2020-April 25, 2021), Assistant Deputy for Agro and Pharmaceutical Industry Business I of the Ministry of SOEs (January 8, 2018-June 20, 2019), Head of Agro and Pharmaceutical Industry Business Ia of the Ministry of SOEs (July 7, 2017- June 8, 2020), Head of Construction and Transportation Infrastructure Ila-2 of the Ministry of SOEs (October 22, 2015- October 21, 2015), Head of Sub Division of Transportation Facilities and Infrastructure Ila of the Ministry of SOEs (May 9, 2014-21 October 2015), Sub Division of Primary Industry Ila1 of the Ministry of SOEs (September 19, 2013-8 May 2014), Head of Sub Division of Infrastructure and Logistics Ila1 of the Ministry of SOEs (September 3, 2012-18 September 2013), Head of Sub Division of Primary Industry Ila2 of the Ministry of SOEs (October 8, 2010- September 2, 2012), Head of Sub Division of Governance and Risk Management of Agriculture Support Business of the Ministry of SOEs (May 21, 2008-October 7, 2010) - Professional History in SOEs Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia (June 2, 2021-present), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara VI (June 9, 2020-June 3, 2021), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara II (March 19, 2018-June 9, 2020), Secretary of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (October 1, 2013-July 2, 2018), Secretary of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (November 28, 2011-February 26, 2014)
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	: - Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (2021-sekarang) - Assistant Deputy for Logistics Services at the Ministry of SOEs (2021-present)
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	: Desty Arlaini tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Desty Arlaini memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham seri A melalui rangkap jabatannya di Kementerian BUMN. Desty Arlaini has no affiliations with any other members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or the Board of Directors. Desty Arlaini has an affiliation with a series A shareholder through her concurrent position at the Ministry of SOEs.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	: - Certified Risk Management Professional (CRMP) - Certified Risk Management Officer (CRMO)



Angger P. Yuwono
Komisaris | Commissioner
Periode Jabatan | Term of Office
31 Juli 2023–31 Juli 2028, Periode Pertama
July 31, 2023-July 31, 2028, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	65 tahun 65 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Magelang, 17 November 1959 Magelang, November 17, 1959
Domisili Domicile	:	Indonesia
Pendidikan Education	:	(S1) Matematika, Institut Teknologi Bandung (ITB) (1985) Bachelor's Degree in Mathematics, Bandung Institute of Technology (ITB) (1985)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Bergabung dalam jajaran Dewan Komisaris PT Jamkrindo, melalui Surat Keputusan Para Pemegang No. SK-217/MBU/07/2023 dan No. 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023. Jabatan dalam Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. Angger P. Yuwono joined the Board of Commissioners of PT Jamkrindo, through the Decree of the Holders No. SK-217/MBU/07/2023 and No. 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 dated July 31, 2023. This position is his first period as a member of the Board of Commissioners.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Keadilan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	:	Masih Dalam Proses Penilaian Kemampuan dan Keadilan. Still Undergoing the Fit and Proper Assessment Process.
Riwayat Profesi Professional History	:	Beliau mengawali karir sebagai Dosen di beberapa Universitas di Jakarta pada tahun 1985-1987, selanjutnya menjabat sebagai Manager Aktuaria & IT pada PT Asuransi Intan Life tahun 1987-1990, Direktur & Aktuaris Cigna Life Indonesia pada tahun 1990-1999, Direktur PT AIA Indonesia (AIG Group) pada tahun 1999-2001. Beliau juga pernah menjabat Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri pada tahun 2001-2004, dan sejak Juni 2021 diangkat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam bidang organisasi industri perasuransian beliau pernah menjadi Ketua Bidang Asuransi Jiwa pada Dewan Asuransi Indonesia (DAI) pada tahun 1999-2002 dan Pendiri & Ketua Umum Pertama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) tahun 2002-2004. Angger P. Yuwono started his career as a Lecturer at several Universities in Jakarta in 1985-1987, then served as Actuarial & IT Manager at PT Asuransi Intan Life in 1987-1990, Director & Actuary of Cigna Life Indonesia in 1990-1999, Director of PT AIA Indonesia (AIG Group) in 1999-2001. He also served as President Director of PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri in 2001-2004, and since June 2021 has been appointed as President Director of PT Asuransi Jiwasraya (Persero). In the field of insurance industry organizations, he was Chairman of the Life Insurance Division at the Indonesian Insurance Council (DAI) in 1999-2002 and Founder & First Chairman of the Indonesian Life Insurance Association (AAJI) in 2002-2004.
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	:	Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2021-Desember 2023 President Director of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2021-December 2023
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	:	Angger P. Yuwono tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Angger P Yuwono memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham melalui rangkap jabatannya di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Angger P. Yuwono has no affiliations with any other members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or the Board of Directors. Angger P Yuwono has an affiliation with Shareholders through his concurrent position at PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	:	- Fellow of the Society of Actuary of Indonesia (FSAI) - Chartered Financial Consultant (ChFC) - Certified In Risk Governance Professional (CRGP)

PROFIL DIREKSI

PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Selama tahun 2024, komposisi anggota Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian komposisi Direksi Perseroan per 31 Desember 2024 berjumlah 6 (enam) Direksi. Berikut adalah profil Direksi per 31 Desember tahun 2024:

Throughout 2024, there were no changes made to the composition of the Company's Board of Directors. Therefore, the composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2024 is 6 (six) Directors. The following is the profile of the Board of Directors as of December 31, 2024:



Akhmad Purwakajaya
Direktur Utama | President Director
Periode Jabatan | Term of Office
31 Juli 2023–31 Juli 2028 Periode Pertama
 July 31, 2023–July 31, 2028, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	54 tahun 54 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Lampung, 26 April 1971 Lampung, April 26, 1971
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	(S1) Ekonomi Akuntansi Universitas Gadjah Mada (1998) Bachelor's Degree in Economics (Accounting) Gadjah Mada University (1998)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 31 Juli 2023 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-21/MBU/07/2023–17/Kep-Sir-PS/BPUI/ VIII/2023 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia. Akhmad Purwakajaya has held the position of Commissioner since July 31, 2023, through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-21/MBU/07/2023-17/Kep-Sir-PS/BPUI/ VIII/2023 concerning the Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-3/KDK.05/2024 tanggal 12 Januari 2024. OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-3/KDK.05/2024 dated January 12, 2024.

Riwayat Profesi Professional History	Direktur Utama PT Jamkrindo ((31 Juli 2023-24 Maret 2025), Pengalaman Kerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Regional CEO Office Jakarta 1 (2022-2023), Pemimpin Cabang Khusus (2021- 2022) Executive Vice President, Kepala Divisi SOE 2 (2020-2021), Kepala Divisi Institution 2 (2017-2020), Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu (Juni-Agustus 2017), Pemimpin Cabang Tegal (2016-2017), Group Head Divisi BUMN 1 (2014-2016), Group Head Divisi BUMN 2 (2012-2016), Pemimpin Cabang Sengkang (2010-2011). President Director of PT Jamkrindo (July 31, 2023-March 24, 2025), CEO of Regional Office of Jakarta 1 Region of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022-2023), Special Branch Leader (2021-2022), Executive Vice President, Head of SOEs Division 2 (2020-2021), Head of Institutional Division 2 (2017-2020), Head of Jakarta Pasar Minggu Branch (June-August 2017), Head of Tegal Branch (2016-2017), Group Head of SOEs Division 1 (2014-2016), Group Head of SOEs Division 2 (2012-2016), Head of Sengkang Branch Office (2010-2011)
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	Akhmad Purwakajaya tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Akhmad Purwakajaya has no concurrent positions in other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	Akhmad Purwakajaya tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. Akhmad Purwakajaya has no affiliations with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	• Sertifikasi Kompetensi Penjaminan Sub Bidang Pengelolaan, LSP Penjaminan, 2023 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, BNSP, 2019 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, BNSP, 2019 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level I, Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2011 • Sertifikasi Sub Branch Manager Training, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2008 • Sertifikasi Training Profil Bisnis (Link & Match), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2007 • Sertifikasi Program Total Image, Lembaga Pendidikan Duta Bangsa, 2006 • Sertifikasi Pelatihan Dasar-Dasar Manajemen Risiko, Sentra Pendidikan Surabaya, 2006 • Sertifikasi Devisa MP, Bank BRI, 2005 • Sertifikasi Pelatihan "Achieving Target Through Negotiation Skills & Motivation Building", Multi Training Center, 2003 • Sertifikasi Training Credit Risk Management (CRM), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2003 • Sertifikasi International Trade Finance Training, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2002 • Sertifikasi Pendidikan Refreshing AO Ritel Komersial, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2002 • Sertifikasi Pendidikan AO Ritel Se-Sumatera, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2000 • Assurance Competency Certification, Subject of Management, LSP Guarantee, 2023 • Risk Management Certification, Level 4, BNSP, 2019 • Risk Management Certification, Level 3, BNSP, 2019 • Level I Risk Management Certification, Indonesian Bankers Association (IBI), 2011 • Sub Branch Manager Training Certification, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2008 • Business Profile Training Certification (Link & Match), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2007 • Total Image Certification Program, Duta Bangsa Education Institute, 2006 • Risk Management Fundamentals Training Certification, Surabaya Education Center, 2006 • MP Foreign Exchange Certification, Bank BRI, 2005 • Training Certification "Achieving Target Through Negotiation Skills & Motivation Building", Multi Training Center, 2003 • Credit Risk Management (CRM) Training Certification, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2003 • International Trade Finance Training Certification, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2002 • Commercial Retail AO Refreshing Education Certification, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2002 • Retail AO Education Certification- Sumatera region, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2000



Suwarsito
Direktur Operasional dan Jaringan | Director of Operations and Network
Periode Jabatan | Term of Office
31 Juli 2023 – 21 Maret 2026, Periode Pertama
 July 31, 2023 - March 21, 2026, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	52 tahun 52 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Sragen, 28 Februari 1972 Sragen, February 28, 1972
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	(S2) Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin Makassar (2007) (S1) Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Ekonomi (1996) - Master's Degree in Management at Hasanuddin University Makassar (2007) - Bachelor's Degree in Economics at Diponegoro University Semarang (1996)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur Operasional & Jaringan diemban sejak 31 Juli 2023 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-21/MBU/07/2023-17/Kep-Sir-PS/BPUI/VIII/2023 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Suwarsito has held the position of Director of Operations & Network since July 31, 2023 through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-21/MBU/07/2023 - 17/Kep-Sir-PS/BPUI/VIII/2023 concerning the Dismissal, Transfer of Position, and Appointment of Members of Board of Director of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-40/KDK.05/2021 tanggal 19 Agustus 2021 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-40/KDK.05/2021 dated August 19, 2021
Riwayat Profesi Professional History	:	Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Direktur Bisnis Penjaminan (22 Maret 2021-31 Juli 2023), Kepala Divisi Bisnis PT Jamkrindo (2018-2021), Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank (2016-2018), Kepala Kantor Wilayah III Jakarta PT Jamkrindo (April 2016-Agustus 2016), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Jakarta (2013- 2016), Kepala Divisi Umum PT Jamkrindo (2012-2013), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Bandung (Januari 2012-Desember 2012), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Pekanbaru (2011-2012), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Banjarmasin (2010-2011). Some of the positions that he have held, includes Director of Business Guarantee (March 22, 2021-July 31, 2023), Head of Business Division of PT Jamkrindo (2018-2021), Head of Bank Guarantee Business Division (2016-2018), Head of Regional Office III Jakarta of PT Jamkrindo (April 2016-August 2016), Head of Jakarta Branch Office of PT Jamkrindo (2013-2016), Head of General Affairs Division of PT Jamkrindo (2012-2013), Head of Bandung Branch Office of PT Jamkrindo (January 2012-December 2012), Head of Pekanbaru Branch Office of PT Jamkrindo (2011-2012), Head of Banjarmasin Branch Office of PT Jamkrindo (2010-2011).
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	:	Suwarsito tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Suwarsito has no concurrent positions in other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	:	Suwarsito tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. Suwarsito has no affiliations with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	:	- Qualified Risk Governance Professional (QRGP), LPK-MKS, CRMS, 2024 - Sertifikasi Uji Kompetensi Skema Direktur Bisnis, LSP Penjaminan, 2024 - Wealth Management-3, Wealth Management, 2019 - Banking Risk Management-3, LSP Banking, 2019 - Banking Risk Management-2, LSP Banking, 2019 - Banking Risk Management-1, LSP Banking, 2018 - Qualified Risk Governance Professional (QRGP), LPK-MKS, CRMS, 2024 - Business Director Scheme Competency Test Certification, LSP Guarantee, 2024 - Wealth Management-3, Wealth Management, 2019 - Banking Risk Management-3, LSP Banking, 2019 - Banking Risk Management-2, LSP Banking, 2019 - Banking Risk Management-1, LSP Banking, 2018



Henry Panjaitan
Direktur Bisnis Penjaminan | Director of Business Guarantee
Periode Jabatan | Term of Office
27 Oktober 2022–26 Oktober 2027, Periode Pertama
October 27, 2022–October 26, 2027, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	55 tahun 55 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Jakarta, 7 Juli 1969 Jakarta, July 7, 1969
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	(S2) Manajemen Keuangan di Universitas Indonesia (2003) (S2) Banking di University of New South Wales (2002) (S1) Manajemen di Universitas Padjadjaran (1991) - Master's Degree in Financial Management at University of Indonesia (2003) - Master's Degree in Banking at the University of New South Wales (2002) - Bachelor's Degree in Management at Padjadjaran University (1991)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 27 Oktober 2022 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/ MBU/10/2022-014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia. Henry Panjaitan has held the position of Commissioner since October 27, 2022, through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-244/ MBU/10/2022-014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 concerning the Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-8/KDK.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-8/KDK.05/2023 dated February 27, 2023.
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo (27 Oktober 2022–Sekarang), Direktur Treasury dan International PT Bank BNI (2020–2022), Pemimpin Wilayah Bank BNI Jakarta Senayan (Juli–September 2020), Pemimpin Wilayah Bank BNI Jakarta BSD (2019–2020), Pemimpin Divisi BIN Bank BNI Kantor Pusat (2016–2017), Head of Business & Banking Bank BNI Wilayah Jakarta Senayan (2015–2016), General Manager Bank BNI Kantor Cabang Hong Kong (2010–2015), Deputy General Manager Bank BNI Cabang Hong Kong (2009–2010), Pemimpin Kelompok Pemasaran & Advisory Trade Finance Divisi International Bank BNI Kantor Pusat (2009), Pemimpin Kelompok Trade Finance Divisi International Bank BNI Kantor Pusat (2008–2009), Manager Personal Asisten Direksi Divisi KMP Bank BNI Kantor Pusat (2007–2008), Relationship Manager Divisi Korporasi Bank BNI Kantor Pusat (2006–2007), Pengelola Pemasaran Bisnis Divisi Korporasi Dua Bank BNI Kantor Pusat (2004–2005), Pengelola Analisis Kredit Divisi Korporasi Dua bank BNI Kantor Pusat (2004), Pengelola Advisory & Sekuritas Divisi Investasi & Jasa Keuangan Bank BNI Kantor Pusat (2003–2004). Director of Business Guarantee of PT Jamkrindo (October 27, 2022-present), Director of Treasury and International of PT Bank BNI (2020–2022), Regional Head of Bank BNI Jakarta Senayan (July–September 2020), Regional Head of Bank BNI Jakarta BSD (2019–2020), Head of BIN Division of Bank BNI Head Office (2016–2017), Head of Business & Banking of Bank BNI Jakarta Senayan Region (2015–2016), General Manager of Bank BNI Hong Kong Branch Office (2010–2015), Deputy General Manager of Bank BNI Hong Kong Branch (2009–2010), Head of the Marketing & Advisory Trade Finance Group, International Division of Bank BNI, Head Office (2009), Head of the Trade Finance Group, International Division of Bank BNI, Head Office (2008–2009), Personal Manager, Assistant Director, KMP Division, Bank BNI, Head Office (2007–2008), Relationship Manager, Corporate Division of Bank BNI Head Office (2006–2007), Business Marketing Manager of Corporate Division II of Bank BNI Head Office (2004–2005), Credit Analysis Manager of Corporate Division II of Bank BNI Head Office (2004), Advisory Manager & Securities Investment & Financial Services Division of Bank BNI Head Office (2003–2004).
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	:	Henry Panjaitan tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Henry Panjaitan has no concurrent positions in other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	:	Henry Panjaitan tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. Henry Panjaitan has no affiliations with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	:	- Sertifikasi Kompetensi Penjaminan Sub Bidang Pengelolaan Guarantee Sub-Area Management, 2022 - Manajemen Risiko Perbankan, Level 5, 17 September 2020/BSMR - Continual Mandatory Learning, Program (CMPL) 3 Industri, Perbankan di tengah Disrupsi, Digital dan Era Pandemic Covid, BNI, 2020 - Continual Mandatory Learning Program (CMPL) 2 Prospek Ekonomi 2021 dan Kebijakan Pasar Modal dalam Merespon Dampak Pandemi dan dalam Menghadapi Kondisi Politik di Indonesia, BNI, 2020 - Continual Mandatory Learning Program (CMPL) 1 Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Bisnis dan Perbankan, BNI, 2020 - Sertifikasi Dealer Level Advance, LSPP, 2020 - Certification of Competence in Guarantee Sub-Area Management, 2022 - Banking Risk Management, Level 5, September 17, 2020/BSMR - Continual Mandatory Learning, Program (CMPL) 3 Industry, Banking in the midst of Disruption, Digital and Covid Pandemic Era, BNI, 2020 - Continual Mandatory Learning Program (CMPL) 2 Economic Outlook 2021 and Capital Market Policy in Responding to the Impact of the Pandemic and in Facing Political Conditions in Indonesia, BNI, 2020 - Continual Mandatory Learning Program (CMPL) 1 Socialization of the Job Creation Law and its Impact on Business and Banking, BNI, 2020 - Advance Level Dealer Certification, LSPP, 2020



Achmad Ivan S Soeparno

Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko | Director of Human Capital Management (HCM), General affairs, and Risk Management

Periode Jabatan | Term of Office

27 Oktober 2022–26 Oktober 2027, Periode Pertama

October 27, 2022–October 26, 2027, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	58 tahun 58 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Jakarta, 11 Agustus 1966 Jakarta, August 11, 1966
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	(S2) Master of Business Administration–Banking and Finance di Curtin University (Perth–Western Australia) (1998) (S1) Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran (1991) - Master's Degree in Business Administration–Banking and Finance at Curtin University (Perth–Western Australia) (1998) - Bachelor's Degree in International Relations at Padjadjaran University (1991)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 27 Oktober 2022 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/ MBU/10/2022–014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota–Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia. Achmad Ivan S Soeparno has held the position of Commissioner since October 27, 2022, through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-244/ MBU/10/2022–014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 concerning the Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-2/KDK.05/2023 tanggal 30 Januari 2023. OJK Board of Commissioners Decree No. Kep-2/KDK.05/2023 dated January 30, 2023.
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko PT Jamkrindo (27 Oktober 2022–Sekarang), Direktur Utama PT Jamkrindo Jakarta (2021–2022), Direktur Utama PT Braja Mukti Cakra (BMC) (2014–2021), Direktur Keuangan & Marketing PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (2013–2014), General Manager Risk Management & Investment PT Bakrie Steel Industries (2012–2013), Vice President, Area Lending Head Bank Pundi Indonesia (2011–2012), Division Head for The Credit Program Division (2000–2011), Account Manager PT Bank Panin (1994–1996), Account Officer PT Lippo Bank (1993–1994). Director of Human Capital Management (HCM), General affairs, and Risk Management of PT Jamkrindo (October 27, 2022–Present), President Director of PT Jamkrindo Jakarta (2021–2022), President Director of PT Braja Mukti Cakra (BMC) (2014–2021), Director of Finance & Marketing of PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (2013–2014), General Manager of Risk Management & Investment of PT Bakrie Steel Industries (2012–2013), Vice President, Lending Head Division, Bank Pundi Indonesia (2011–2012), Division Head for The Credit Program Division (2000–2011), Account Manager of PT Bank Panin (1994–1996), Account Officer of PT Lippo Bank (1993–1994).
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	:	Achmad Ivan S Soeparno tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Achmad Ivan S Soeparno has no concurrent positions in other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	:	Achmad Ivan S Soeparno tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. Achmad Ivan S Soeparno has no affiliations with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	:	- Sertifikasi Risk Beyond 2023 - Into The Unknown : Charting the Future Agenda, ERMA, 2023 - Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Direktur Investasi (Okupasi), 23 Agustus 2022 BJS - LSP Penjaminan, LSP, 2022 - LSPMR, Manajemen Risiko, 2021 - Branch Office Management Program Angkatan Ke-2, Bank Pundi, 2012 - Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I (Satu), Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Global Association of Risk Professionals (GARP), 2011 - Training of Trainers–Sistem Informasi Manajemen Pemasaran Pengendalian Intern Peraturan dan Pengawasan Ekstern, Certif–Sertifikasi Profesional untuk Lembaga Keuangan Mikro, 2004 - Pelatihan Pengawasan BPR, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero–BI, 2004 - Pelatihan Pembiayaan Syariah, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Tazkia Institute (Syariah Finance & Management), 2002 - Pelatihan Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero–BI, 2001 - Risk Certification Beyond 2023 - Into The Unknown: Charting the Future Agenda, ERMA, 2023 - Investment Director Guarantee Business Professional Certification (Occupational), 23 August 2022 BJS - LSP Guarantee, LSP, 2022 - LSPMR, Risk Management, 2021 - Branch Office Management Program 2nd Batch, Bank Pundi, 2012 - Risk Management Certification Level I (One), Risk Management Certification Body Global Association of Risk Professionals (GARP), 2011 - Training of Trainers–Marketing Management Information System Regulatory Internal Control and External Supervision, Certif–Certification of Professionals for Microfinance Institutions, 2004 - BPR Supervision Training, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero–BI, 2004 - Sharia Financing Training, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Tazkia Institute (Sharia Finance & Management), 2002 - Training on Rural Bank Management, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero–BI, 2001



Abdul Bari
Direktur Kelembagaan & Layanan | Director of Institutional & Services
Periode Jabatan | Term of Office
27 Oktober 2022–26 Oktober 2027, Periode Pertama
October 27, 2022–October 26, 2027, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	49 tahun 49 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Subang, 29 September 1975 Subang, September 29, 1975
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	(S3) Doctor Human Resource Management di Universitas Negeri Jakarta (2014) (S2) Magister Manajemen SDM di ST Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia (2004) (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2002) - Doctoral Degree in Human Resource Management at State University of Jakarta (2014) - Master's Degree in Human Capital Management at Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia (2004) - Bachelor's Degree in Public Health Science at Muhammadiyah University Jakarta (2002)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 27 Oktober 2022 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/ MBU/10/2022–014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia. Abdul Bari has held the position of Commissioner since October 27, 2022, through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-244/ MBU/10/2022–014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 concerning the Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-9/KDK.05/2023 tanggal 27 Februari 2023. OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-9/KDK.05/2023 dated February 27, 2023.
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur Kelembagaan dan Layanan (27 Oktober 2022 –Sekarang), Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo (2016-2022), Pranata Utama Direktorat Operasional & Jaringan PT Jamkrindo (2016), Pejabat Pranata Utama Direktorat Utama PT Jamkrindo (2015), Pranata Madya Sekretaris Utama (2015), Tim Project BPJS University BPJS Kesehatan (2014 –2015), Dewan Komisaris Prima Multi Terminal Subsidiary Pelindo 1 PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan (2014-2015), Direktur Keuangan Pusat Studi Sumber Daya Manusia (PSSDM) UNJ (2013 –2015), General Manager PT AXA Assistance Indonesia (AXA Group) (2001 –2014), Inhouse Medical Services/24 Alarm Center Dr.Tedjo & Associates (1998 –2000), Inhouse Medical Services/24 Alarm Center Dr. Damiyanti & Associates (1994 –1996). Director of Institutional and Services (October 27, 2022-present), Corporate Secretary of PT Jamkrindo (2016-2022), Principal Officer of the Operational & Network Directorate of PT Jamkrindo (2016), Principal Officer of the Main Directorate of PT Jamkrindo (2015), Intermediate Principal Secretary (2015), Project Team of BPJS University of BPJS (2014-2015), Board of Commissioners of Prima Multi Terminal Subsidiary Pelindo 1 of PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan (2014-2015), Finance Director of the Center for Human Capital Studies (PSSDM) UNJ (2013 – 2015), General Manager of PT AXA Assistance Indonesia (AXA Group) (2001-2014), Inhouse Medical Services/24 Alarm Center of Dr. Tedjo & Associates (1998- 2000), Inhouse Medical Services/24 Alarm Center of Dr. Damiyanti & Associates (1994 -1996).
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	:	Abdul Bari tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Abdul Bari has no concurrent positions in other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	:	Abdul Bari tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. Abdul Bari has no affiliations with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	:	- Certified CSR Leader- Sentul Innovation Center, 2024 - Certificated of Continuing Professional Development: #Risk London 2024, GRC World Forums, 2024 - Certified in Enterprise Risk Governance (CERG), ERMA, 2024 - Risk Governance & Leadership Masterclass, LSP MKS, 2024 - Strategic Decision Making, Michigan Ross, 2023 - Manajemen Risiko Perbankan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2022 - Strategic Public Relations, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2022 - ERMA: Certified in Enterprise Risk Governance, ERMA, 2021 - LSP MKS: Qualified Risk Governance Professional, LSP MKS, 2021 - Executives Public Relations, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2021 - Qualified Risk Governance Professional, LSP MKS, 2021 - Certified CSR Leader- Sentul Innovation Center, 2024 - Certificated of Continuing Professional Development: #Risk London 2024, GRC World Forums, 2024 - Certified in Enterprise Risk Governance (CERG), ERMA, 2024 - Risk Governance & Leadership Masterclass, LSP MKS, 2024 - Strategic Decision Making, Michigan Ross, 2023 - Manajemen Risiko Perbankan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2022 - Strategic Public Relations, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2022 - ERMA: Certified in Enterprise Risk Governance, ERMA, 2021 - LSP MKS: Qualified Risk Governance Professional, LSP MKS, 2021 - Executives Public Relations, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2021 - Qualified Risk Governance Professional, LSP MKS, 2021



Alia Nur Fitri
Direktur Keuangan dan Investasi
Periode Jabatan
31 Juli 2023–31 Juli 2028, Periode Pertama
 Director of Finance and Investment
 Term of Office
 July 31, 2023-July 31, 2028, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	54 tahun 54 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Malang, 29 November 1971 Malang, November 29, 1971
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	(S2) Magister Manajemen Pemasaran di Universitas Gadjah Mada (1997) (S1) Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di Universitas Gadjah Mada (1994) - Master's Degree in Marketing Management at Gadjah Mada University (1997) - Bachelor's Degree in Agricultural Product Processing Technology at Gadjah Mada University (1994)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 31 Juli 2023 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-21/MBU/07/2023–17/Kep-Sir-PS/BPUI/VIII/2023 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Alia Nur Fitri has held the position of Commissioner since July 31, 2023, through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-21/MBU/07/2023 – 17/Kep-Sir-PS/BPUI/VIII/2023 concerning the Dismissal, Transfer of Position, and Appointment of Members of Board of Director of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Passed the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-14/KDK.05/2024 tanggal 7 Februari 2024 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-14/KDK.05/2024 dated February 07, 2024
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur Keuangan dan Investasi (31 Juli 2023–Sekarang), Kepala Divisi Transformasi PT Jamkrindo (Januari-Juli 2023), Kepala Divisi Perencanaan Strategis (2017-2023), Kepala Divisi Manajemen Risiko (2016-2017), Pranata Utama Direktorat Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko (April–Agustus 2016), Kepala Bagian Investasi (Januari–April 2016), Kepala Seksi Analisis Investasi (September–November 2016), Analis Kredit Korporasi PT BNI (Persero) Tbk (1998-2009). Director of Finance and Investment (July 31, 2023-present), Head of Transformation Division of PT Jamkrindo (January-July 2023), Head of Strategic Planning Division (2017-2023), Head of Risk Management Division (2016-2017), Main Officer of the Directorate of Finance, Investment, and Risk Management (April-August 2016), Head of Investment Section (January-April 2016), Head of Investment Analysis Section (September-November 2016), Corporate Credit Analyst of PT BNI (Persero) Tbk (1998- 2009).
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	:	Alia Nur Fitri tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Alia Nur Fitri has no concurrent positions in other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	:	Alia Nur Fitri tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. Alia Nur Fitri has no affiliations with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	:	- Certified Wealth Manager Program, Certified Wealth Managers Association (CWMA), 2024 - Sertifikasi Kompetensi Penjaminan Sub Bidang Pengelolaan Guarantee Sub-Area Management, 2023 - Sertifikasi Manajemen Risiko Level II LSPP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2019 - Sertifikasi Manajemen Risiko Level I LSPP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2018 - Certified Financial Modelling, International Academy of Business and Financial Management (IABFM), 2014 - Certified Wealth Manager Program, Certified Wealth Managers Association (CWMA), 2024 - Certification of Competence in Guarantee Sub-Area Management, 2023 - LSPP Level II Risk Management Certification, National Professional Certification Agency (BNSP), 2019 - Level I Risk Management Certification LSPP, National Professional Certification Agency (BNSP), 2018 - Certified Financial Modeling, International Academy of Business and Financial Management (IABFM), 2014

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

PROFILES OF EXECUTIVE OFFICERS



Sigit Tjahjo Prabowo

Senior Executive Vice President Teknologi Informasi

Senior Executive Vice President of Information Technology

Menjabat Sejak

Has Served Since

: 1 November 2021
November 1, 2021

Tempat/Tanggal Lahir

Place/Date of Birth

: Surakarta, 6 September 1970
Surakarta, September 6, 1970

Usia

Age

: 54 tahun
54 years old

Domisili

Domicile

: Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Tebet, South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir

Latest Educational Background

: S2 Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada
Master's Degree in Management, Gadjah Mada University

Sekilas Jabatan di Jamkrindo

Position Overview at Jamkrindo

- Senior Executive Vice President TI (01 April 2022-31 Desember 2024)
- Prohire-Senior Executive Vice President (01 November 2021-31 Maret 2022)
- Senior Executive Vice President IT (April 01, 2022-December 31, 2024)
- Prohire-Senior Executive Vice President (November 01, 2021-March 31, 2022)



Aribowo

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Menjabat Sejak

Has served Since

: 12 Juli 2023
July 12, 2023

Tempat/Tanggal Lahir

Place/Date of Birth

: Probolinggo, 6 Juni 1966
Probolinggo, June 6, 1966

Usia

Age

: 58 tahun
58 years old

Domisili

Domicile

: Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Kemayoran, Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir

Latest Educational Background

: S2 Ekonomi, Universitas Andalas
Master's Degree in Economics, Andalas University

Sekilas Jabatan di Jamkrindo

Position Overview at Jamkrindo

- Sekretaris Perusahaan (12 Juli 2023-31 Desember 2024)
- Kepala Divisi Keuangan dan Investasi (01 Agustus 2016-16 Juli 2023)
- Kepala Kantor Wilayah II Palembang (22 April 2016-31 Juli 2016)
- Kepala Kantor Wilayah 1 Jakarta (10 Desember 2015-21 April 2016)
- Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta (03 September 2014-09 Desember 2015)
- Corporate Secretary (July 12, 2023-December 31, 2024)
- Head of Finance and Investment Division (August 01, 2016-July 16, 2023)
- Head of Regional Office II Palembang (April 22, 2016 - July 31, 2016)
- Head of Regional Office 1 Jakarta (December 10, 2015-April 21, 2016)
- Head of Jakarta Special Branch Office (September 03, 2014 - December 09, 2015)



Andry Septianto
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit

Menjabat Sejak Has served Since	: 1 Desember 2020 December 1, 2020
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Sawit Seberang, 22 September 1978 Sawit Seberang, September 22, 1978
Usia Age	: 46 tahun 46 years old
Domisili Domicile	: Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia Kemayoran, Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	: S2 Manajemen, Universitas Gadjah Mada Master's Degree In Management, Gadjah Mada University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Position Overview at Jamkrindo	: - Kepala Satuan Pengawasan Intern (1 Desember 2020-31 Desember 2024) - Wakil Kepala Satuan Pengawasan Intern (5 Oktober 2020-30 November 2020) - Pemimpin Cabang Bandung (31 Agustus 2018-4 Oktober 2020) - Kepala Kantor Cabang Kupang (3 Februari 2017-30 Agustus 2018) - Kepala Kantor Cabang Pekanbaru (22 April 2016-2 Februari 2017) - Head of Internal Audit (December 1, 2020-December 31, 2024) - Deputy Head of Internal Audit (October 5, 2020-November 30, 2020) - Head of Bandung Branch Office (August 31, 2018-October 4, 2020) - Head of Kupang Branch Office (February 3, 2017-August 30, 2018) - Head of Pekanbaru Branch Office (April 22, 2016-February 2, 2017)



Wakhyu Hidayattulloh
Kepala Divisi Bisnis I
Head of Business Division I

Menjabat Sejak Has served Since	: 22 Maret 2021 March 22, 2021
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Banjar, 5 Oktober 1974 Banjar, October 5, 1974
Usia Age	: 50 tahun 50 years old
Domisili Domicile	: Cibinong, Jawa Barat, Indonesia Cibinong, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	: S1 Manajemen Bisnis, STIE Dewantara Bachelor's Degree in Business Management, STIE Dewantara
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Position Overview at Jamkrindo	: - Kepala Divisi Bisnis 1 (22 Maret 2021-31 Desember 2024) - Pemimpin Wilayah V Semarang (31 Agustus 2018-21 Maret 2021) - Kepala Kantor Wilayah II Palembang (1 Agustus 2016-30 Agustus 2018) - Head of Business Division 1 (March 22, 2021-December 31, 2024) - Head of Semarang Region V (August 31, 2018-March 21, 2021) - Head of Palembang Regional Office II (August 1, 2016-August 30, 2018)



Mahfudh Sudiyono
Kepala Divisi Bisnis II
Head of Business Division II

Menjabat Sejak
Has served Since : 11 April 2022
April 11, 2022

Tempat/Tanggal Lahir
Place/Date of Birth : Jombang, 17 Maret 1973
Jombang, March 17, 1973

Usia
Age : 51 tahun
51 years old

Domisili
Domicile : Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir
Latest Educational Background : S1 Manajemen, Universitas Brawijaya
Bachelor's Degree in Management, Brawijaya University

Sekilas Jabatan di Jamkrindo
Position Overview at Jamkrindo

- Kepala Divisi Bisnis II (11 April 2022-31 Desember 2024)
- Kepala Divisi Teknik & Administrasi Bisnis (31 Agustus 2018-10 April 2022)
- Kepala Divisi Teknik & Administrasi Penjaminan (10 Desember 2015-30 Agustus 2018)
- Kepala Divisi Teknik Penjaminan Bank (3 September 2014-9 Desember 2015)
- Kepala Kantor Cabang Palembang (27 Juni 2013-2 September 2014)
- Head of Business Division II (April 11, 2022-December 31, 2024)
- Head of Engineering & Business Administration Division (August 31, 2018-April 10, 2022)
- Head of Engineering & Administration of Guarantee Division (December 10, 2015-August 30, 2018)
- Head of Bank Guarantee Engineering Division (September 3, 2014 - December 9, 2015)
- Head of Palembang Branch Office (June 27, 2013 - September 2, 2014)



Muchamad Kisworo
Kepala Divisi Bisnis III
Head of Business Division III

Menjabat Sejak
Has served Since : 12 Agustus 2024
August 12, 2024

Tempat/Tanggal Lahir
Place/Date of Birth : Pekalongan, 24 Februari 1974
Pekalongan, February 24, 1974

Usia
Age : 49 tahun
49 years old

Domisili
Domicile : Bandung, Jawa Barat
Bandung, West Java

Pendidikan Terakhir
Latest Educational Background : S2 Manajemen, Universitas Sumatera Utara
Master's Degree in Management, North Sumatera University

Sekilas Jabatan di Jamkrindo
Position Overview at Jamkrindo

- Kepala Divisi Bisnis III - 12 Agustus 2024 s.d 31 Desember 2024
- Pemimpin Wilayah Bandung - 11 April 2022 s.d 11 Agustus 2024
- Kepala Divisi Bisnis II - 22 Maret 2021 s.d 10 April 2022
- Kepala Divisi Bisnis III - 31 Agustus 2018 s.d 21 Maret 2021
- Head of Business Division III - August 12, 2024 to December 31, 2024
- Regional Leader Bandung - April 11, 2022 to August 11, 2024
- Head of Business Division II - March 22, 2021 to April 10, 2022
- Head of Business Division III - August 31, 2018 to March 21, 2021



Bambang Suryo Atmojo
Kepala Divisi Manajemen Risiko
 Head of Risk Management Division

Menjabat Sejak Has served Since	:	12 Agustus 2024 August 12, 2024
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Gresik, 29 April 1985 Gresik, April 29, 1985
Usia Age	:	40 tahun 40 years old
Domisili Domicile	:	Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia Sidoarjo, East Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Bachelor's Degree in Accounting, Muhammadiyah Sidoarjo University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Position Overview at Jamkrindo	:	- Kepala Divisi Manajemen Risiko (12 Agustus 2024-31 Desember 2024) - Kepala Divisi Bisnis III (23 Oktober 2023-12 Agustus 2024) - Pemimpin Wilayah Medan (22 Maret 2021-22 Oktober 2023) - Pemimpin Cabang Padang (02 Mei 2019-21 Maret 2021) - Pemimpin Cabang Malang (27 Januari 2016-01 Mei 2019) - Kepala Seksi Penjaminan Non Bank-Kanca Surabaya (29 Mei 2015-26 Januari 2016) - Head of Risk Management Division (August 12, 2024-December 31, 2024) - Head of Business Division III (October 23, 2023-August 12, 2024) - Head of Medan Region (March 22, 2021-October 22, 2023) - Head of Padang Branch Office (May 02, 2019-March 21, 2021) - Head of Malang Branch Office (January 27, 2016-May 01, 2019) - Head of Non-Bank Guarantee Section Kanca Surabaya (May 29, 2015 - January 26, 2016)



Ragil Ramadhona Setyadi
Kepala Divisi Teknik dan Aktuaria
 Head of Engineering and Actuarial Division

Menjabat Sejak Has served Since	:	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Depok, 21 Mei 1987 Depok, May 21, 1987
Usia Age	:	37 tahun 37 years old
Domisili Domicile	:	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Manajemen, STIE Dharma Bumiputera Bachelor's Degree in Management, STIE Dharma Bumiputera
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Position Overview at Jamkrindo	:	- Kepala Divisi Teknik dan Aktuaria (1 Oktober 2021-31 Desember 2024) - Prohire-Bidang Aktuaria Perusahaan (1 Juni 2021-30 September 2021) - Head of Engineering and Actuarial Division (October 1, 2021- December 31, 2024) - Prohire-Corporate Actuarial Field (June 1, 2021-September 30, 2021)



Ceriandri Widuri

Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi

Head of Claims and Subrogation Division

Menjabat Sejak Has served Since	:	1 Januari 2023 January 1, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Semarang, 13 Maret 1972 Semarang, March 13, 1972
Usia Age	:	52 tahun 52 years old
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Manajemen Strategik, Universitas Gadjah Mada Master's Degree in Strategic Management, Gadjah Mada University

Sekilas Jabatan di Jamkrindo

Position Overview at Jamkrindo

- Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi (01 Januari 2023–31 Desember 2024)
- Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Pemeringkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Konsultasi Manajemen (PUKM) (31 Agustus 2018–31 Desember 2022)
- Kepala Divisi Manajemen Risiko (19 September 2017–30 Agustus 2018)
- Kepala Divisi Penjaminan Syariah (10 Maret 2014–18 September 2017)
- Head of Claims and Subrogation Division (January 01, 2023–December 31, 2024)
- Head of Risk Management and Rating Division of Micro, Small, Medium Enterprises, Management Consulting (PUKM) (August 31, 2018–December 31, 2022)
- Head of Risk Management Division (September 19, 2017–August 30, 2018)
- Head of Sharia Guarantee Division (March 10, 2014 - September 18, 2017)



Lusy Susanti

Kepala Divisi Jaringan

Head of Network Division

Menjabat Sejak Has served Since	:	22 Maret 2021 March 22, 2021
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Batusangkar, 8 Januari 1977 Batusangkar, January 8, 1977
Usia Age	:	48 tahun 48 years old
Domisili Domicile	:	Pekanbaru, Riau, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Akuntansi, Universitas Andalas Bachelor's Degree in Accounting, Andalas University

Sekilas Jabatan di Jamkrindo

Position Overview at Jamkrindo

- Kepala Divisi Jaringan dan Layanan (22 Maret 2021–31 Desember 2024)
- Kepala Divisi Umum (2 Mei 2019–21 Maret 2021)
- Kepala Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang (31 Agustus 2018–1 Mei 2019)
- Head of Network and Services Division (March 22, 2021–December 31, 2024)
- Head of General Affairs Division (May 2, 2019–March 21, 2021)
- Head of Warehouse Receipt System Guarantee Desk (August 31, 2018–May 1, 2019)



Harjanto
Kepala Divisi Pengembangan Teknologi Informasi
 Head of Information Technology Development Division

Menjabat Sejak Has served Since	:	25 Januari 2022 January 25, 2022
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Wonogiri, 25 Juni 1982 Wonogiri, June 25, 1982
Usia Age	:	42 tahun 42 years old
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Innovation Creativity and Entrepreneurship, University of New Castle Master's Degree in Innovation Creativity and Entrepreneurship, University of New Castle
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Position Overview at Jamkrindo	:	- Kepala Divisi Pengembangan TI (25 Januari 2022-31 Desember 2024) - Kepala Bagian Sistem Manajemen dan Pengembangan Organisasi, Divisi Perencanaan Strategis (31 Januari 2019-24 Januari 2022) - Head of IT Development Division (January 25, 2022-December 31, 2024) - Head of Management System and Organization Development Section, Strategic Planning Division (31 January 2019-24 January 2022)



Ibnu Fajar Sudibyo
Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi
 Head of Information Technology Operations Division

Menjabat Sejak Has served Since	:	15 Oktober 2024 October 15, 2024
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Jakarta, 2 April 1984 Jakarta, April 2, 1984
Usia Age	:	40 tahun 40 years old
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Teknologi Informasi, Universitas Bina Nusantara Bachelor's Degree in Information Technology, Bina Nusantara University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Position Overview at Jamkrindo	:	Kepala Divisi Operasional TI (15 Oktober 2024 s.d 31 Desember 2024) Head of Information Technology Operations Division (October 15, 2024 - December 31, 2024)



Siti Maesaroh
Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Head of Human Capital Management Division

Menjabat Sejak Served Since	:	22 Maret 2021 March 22, 2021
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Magelang, 26 Mei 1971 Magelang, May 26, 1971
Usia Age	:	54 tahun 54 years old
Domisili Domicile	:	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Manajemen, Universitas Negeri Jakarta Master's Degree in Management, State University of Jakarta
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Position Overview at Jamkrindo	:	- Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (22 Maret 2021-31 Desember 2024) - Kepala Bagian Kebijakan dan Pengembangan SDM Divisi MSDM (1 Oktober 2018-21 Maret 2021) - Kepala Bagian Operasional dan Pengelolaan SDM Divisi MSDM (13 Maret 2017-30 September 2018) - Head of Human Capital Management Division (March 22, 2021-December 31, 2024) - Head of HC Policy and Development Division HCM Division (October 1, 2018-March 21, 2021) - Head of Operations and HC Management of Human Capital Division (March 13, 2017-September 30, 2018)



M. Natsir Rahmadi
Kepala Divisi Kepatuhan
Head of Compliance Division

Menjabat Sejak Has served Since	:	1 Agustus 2016 August 1, 2016
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Pasuruan, 25 Mei 1972 Pasuruan, May 25, 1972
Usia Age	:	53 tahun 53 years old
Domisili Domicile	:	Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Hukum, Universitas Brawijaya Bachelor's Degree in Law, Brawijaya University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Position Overview at Jamkrindo	:	- Kepala Divisi Kepatuhan (1 Agustus 2016-31 Desember 2024) - Sekretaris Perusahaan (10 Desember 2015-31 Juli 2016) - Head of Compliance Division (August 1, 2016-December 31, 2024) - Corporate Secretary (December 10, 2015-July 31, 2016)



Boy Herwin Nur
Kepala Divisi Akuntansi
Head of Accounting Division

Menjabat Sejak
Has served Since : 12 Agustus 2024
August 12, 2024

Tempat/Tanggal Lahir
Place/Date of Birth : Padang, 16 Februari 1973
Padang, February 16, 1973

Usia
Age : 51 tahun
51 years old

Domisili
Domicile : Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir
Latest Educational Background : S2 Manajemen, Universitas Tanjungpura
Master's Degree in Management, Tanjungpura University

Sekilas Jabatan di Jamkrindo
Position Overview at Jamkrindo

- Kepala Divisi Akuntansi (12 Agustus 2023-31 Desember 2024)
- Kepala Divisi Manajemen Risiko (1 Januari 2023-12 Agustus 2023)
- Wakil Kepala Divisi Akuntansi (11 April 2022-31 Desember 2022)
- Pemimpin Cabang Pontianak (31 Agustus 2018-10 April 2022)
- Kepala Kantor Cabang Tarakan (26 Juli 2017-30 Agustus 2018)
- Kepala Kantor Cabang Pangkal Pinang (22 April 2016-25 Juli 2017)
- Head of Accounting Division (August 12, 2023-December 31, 2024)
- Head of Risk Management Division (January 1, 2023-August 12, 2023)
- Deputy Head of Accounting Division (April 11, 2022-December 31, 2022)
- Head of Pontianak Branch Office (August 31, 2018-April 10, 2022)
- Head of Tarakan Branch Office (July 26, 2017-August 30, 2018)
- Head of Pangkal Pinang Branch Office (April 22, 2016 - July 25, 2017)



Putu Panca Nitiari
Kepala Divisi Keuangan dan Investasi
Head of Finance and Investment Division

Menjabat Sejak
Has served Since : 12 Juli 2023
July 12, 2023

Tempat/Tanggal Lahir
Place/Date of Birth : Gianyar, 22 Desember 1979
Gianyar, December 22, 1979

Usia
Age : 45 tahun
45 years old

Domisili
Domicile : Gianyar, Bali, Indonesia

Pendidikan Terakhir
Latest Educational Background : S1 Akuntansi, Universitas Udayana
Bachelor's Degree in Accounting, Udayana University

Sekilas Jabatan di Jamkrindo
Position Overview at Jamkrindo

- Kepala Divisi Keuangan dan Investasi (12 Juli 2023-31 Desember 2024)
- Wakil Kepala Divisi Keuangan dan Investasi (21 April 2021-12 Juli 2023)
- Pemimpin Cabang Madiun (2 Mei 2020-20 April 2021)
- Kepala Bagian Operasional Kantor Wilayah VII Denpasar (13 Maret 2017-1 Mei 2019)
- Head of Finance and Investment Division (July 12, 2023-December 31, 2024)
- Deputy Head of Finance and Investment Division (April 21, 2021-July 12, 2023)
- Head of Madiun Branch Office (May 2, 2020-April 20, 2021)
- Head of Operations, Denpasar Regional Office VII (March 13, 2017-May 1, 2019)



Diana Mayawati
Kepala Divisi Umum
Head of General Affairs Division

Menjabat Sejak
Has served Since : 12 Agustus 2024
August 12, 2024

Tempat/Tanggal Lahir
Place/Date of Birth : Jakarta, 19 Oktober 1975
Jakarta, October 19, 1975

Usia
Age : 49 tahun
49 years old

Domisili
Domicile : Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir
Latest Educational Background : S1 Akuntansi, Universitas Trisakti
Bachelor's Degree in Accounting, Trisakti University

Sekilas Jabatan di Jamkrindo
Position Overview at Jamkrindo :

- Kepala Divisi Umum (12 Agustus 2023–31 Desember 2024)
- Kepala Divisi Akuntansi (31 Agustus 2018–12 Agustus 2023)
- Kepala Divisi Akuntansi & PKBL (10 Desember 2015–30 Agustus 2018)
- Head of General Affairs Division (August 12, 2023–December 31, 2024)
- Head of Accounting Division (August 31, 2018–August 12, 2023)
- Head of Accounting & PKBL Division (December 10, 2015–August 30, 2018)



Puspita Dewi
Kepala Divisi Strategi dan Transformasi
Head of Strategy and Transformation Division

Menjabat Sejak
Has served Since : 1 Januari 2023
January 1, 2023

Tempat/Tanggal Lahir
Place/Date of Birth : Cilacap, 23 Juni 1976
Cilacap, June 23, 1976

Usia
Age : 48 tahun
48 years old

Domisili
Domicile : Depok, Jawa Barat, Indonesia
Depok, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir
Latest Educational Background :

- S2 Manajemen, Universitas Gadjah Mada
- S1 Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada
- Master's Degree In Management, Gadjah Mada University
- Bachelor's Degree in Agricultural Technology, Gadjah Mada University

Sekilas Jabatan di Jamkrindo
Position Overview at Jamkrindo :

- Kepala Divisi Strategi dan Tranformasi (01 Januari 2023–31 Desember 2024)
- Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi (11 April 2022–31 Desember 2022)
- Pemimpin Wilayah VI Surabaya (22 Maret 2021–10 April 2022)
- Pemimpin Cabang Surabaya (31 Agustus 2018–21 Maret 2021)
- Kepala Kantor Cabang Jambi (3 Februari 2017–30 Agustus 2018)
- Head of Strategy and Transformation Division (January 01, 2023–December 31, 2024)
- Head of Claims and Subrogation Division (April 11, 2022–December 31, 2022)
- Head of Surabaya Region VI (March 22, 2021–April 10, 2022)
- Head of Surabaya Branch Office (August 31, 2018–March 21, 2021)
- Head of Jambi Branch Office (February 3, 2017–August 30, 2018)



Etyk Turniyatun
Kepala Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan I
 Head of Institutional Business Relations Division I

Menjabat Sejak
 Has served Since : 26 Januari 2024
 January 26, 2024

Tempat/Tanggal Lahir
 Place/Date of Birth : Surakarta, 24 April 1970
 Surakarta, April 24, 1970

Usia
 Age : 55 tahun
 55 years old

Domisili
 Domicile : Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
 Makassar, South Sulawesi, Indonesia

Pendidikan Terakhir
 Latest Educational Background : S1 Hukum, Universitas Slamet Ri
 Bachelor's Degree in Law, Slamet Ri University

Sekilas Jabatan di Jamkrindo
 Position Overview at Jamkrindo :

- Kepala Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan I (26 Januari 2024 - 31 Desember 2024)
- Kepala Divisi Pengembangan Bisnis (22 Maret 2021-26 Januari 2024)
- Pemimpin Cabang Makassar (2 Mei 2020-21 Maret 2021)
- Plt. Pemimpin Cabang Makassar (2 Mei 2019-1 Mei 2020)
- Pemimpin Cabang Gorontalo (31 Agustus 2018-1 Mei 2019)
- Head of Institutional Business Relations Division I (January 26, 2024 - December 31, 2024)
- Head of Business Development Division (March 22, 2021-January 26, 2024)
- Makassar Branch Manager (May 2, 2020-March 21, 2021)
- Acting. Makassar Branch Manager (May 2, 2019-May 1, 2020)
- Gorontalo Branch Manager (August 31, 2018-May 1, 2019)



Krisna Johan
Kepala Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan II
 Head of Institutional Business Relations Division II

Menjabat Sejak
 Has served Since : 1 Januari 2023
 January 1, 2023

Tempat/Tanggal Lahir
 Place/Date of Birth : Sumenep, 5 Juli 1971
 Sumenep, July 5, 1971

Usia
 Age : 53 tahun
 53 years old

Domisili
 Domicile : Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
 East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir
 Latest Educational Background : S2 Manajemen Risiko, Universitas Indonesia
 Master's Degree in Risk Management, University of Indonesia

Sekilas Jabatan di Jamkrindo
 Position Overview at Jamkrindo :

- Kepala Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan II (1 Januari 2023-31 Desember 2024)
- Pemimpin Wilayah VIII Banjarmasin (31 Agustus 2018-31 Desember 2022)
- Kepala Kantor Wilayah III Jakarta (30 Agustus 2016-30 Agustus 2018)
- Head of Institutional Business Relations Division II (January 1, 2023-December 31, 2024)
- Head of Banjarmasin Region VIII (August 31, 2018-December 31, 2022)
- Head of Jakarta Regional Office III (August 30, 2016-August 30, 2018)



Bustomi
Kepala Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan III
Head of Institutional Business Relations Division III

Menjabat Sejak Has served Since	:	12 Agustus 2024 August 12, 2024
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Jakarta, 29 Januari 1967 Jakarta, January 29, 1967
Usia Age	:	57 tahun 57 years old
Domisili Domicile	:	Jakarta
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Agribisnis Institut Pertanian Bogor Master's Degree in Agribusiness, Bogor Agricultural University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Position Overview at Jamkrindo	:	- Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan III – 12 Agustus 2024 s.d 31 Desember 2024 - Team Leader Transformasi – 06 Mei 2024 s.d 11 Agustus 2024 - Head of Institutional Relations Division III - August 12, 2024 to December 31, 2024 - Transformation Team Leader - May 06, 2024 to August 11, 2024

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND HUMAN
CAPITAL COMPETENCY DEVELOPMENT

Demografi Karyawan

Employee Demographics



"2.152 karyawan organik dan non organik yang bekerja di Jamkrindo berkomitmen untuk mendukung dunia UMKM dan Koperasi melalui 9 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 53 Kantor Cabang, 17 Kantor Unit Pelayanan (KUP), serta 12 Digital Business Unit (DBU) yang tersebar di seluruh Indonesia."

"2,152 direct-hires and non direct-hires employees working at Jamkrindo dedicate themselves to the MSMEs and Cooperatives sector through 9 (nine) Regional Offices, 1 (one) Special Branch Office, 53 (fifty-three) Branch Offices, 17 (seventeen) Service Unit Offices, and 12 (twelve) Digital Business Units (DBU) spread throughout Indonesia."

Jamkrindo memiliki sumber daya manusia dengan budaya kerja unggul yang menjadi aset paling berharga dalam menyediakan produk dan layanan jasa penjaminan kredit. Hingga akhir tahun 2024, Jamkrindo mencatat jumlah karyawan sebanyak 2.152 orang, (termasuk karyawan tidak tetap), meningkat sebesar 1,51% dibandingkan dengan jumlah karyawan per 31 Desember 2023, yang sebanyak 2.120 orang.

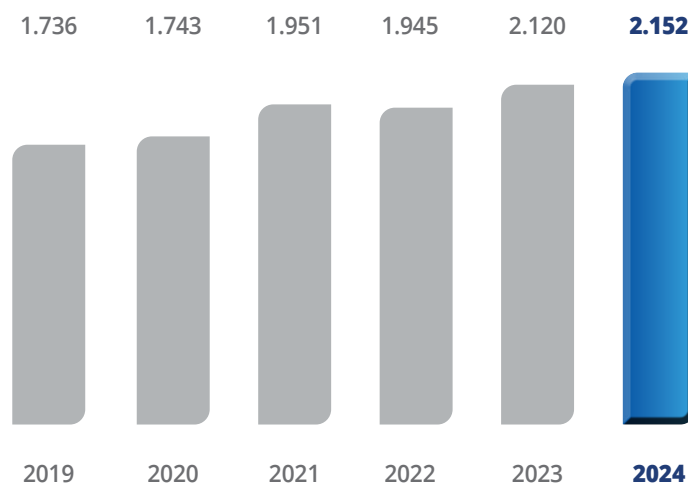
Adapun profil demografi karyawan Jamkrindo dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut:

Jamkrindo has human capital with a superior work culture that is the most valuable asset in providing credit guarantee products and services. Until the end of 2024, Jamkrindo has 2,152 Employees (including non permanent employees), which increased by 1.51 % compared to the number of employees as of December 31, 2023, which was 2,120 employees.

The demographic profile of Jamkrindo employees is shown in the following tables and charts:

Pergerakan Jumlah Keseluruhan Karyawan dalam 6 (Enam) Tahun Terakhir 2019-2024

Growth of the Total Number of Employees in the Last 6 (Six) Years 2019-2024



Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Level Organisasi (orang)
Demographic of Permanent Employees by Organizational Level (people)

Level Organisasi Organizational Level	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total (1)	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total (2)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total (3=1-2)	Persentase Percentage (%) (3/2)
Senior Executive Vice President	1	0	1	0,09%	1	0	1	0,09%	0	0,00%
Kepala Divisi Head of Division	11	7	18	1,57%	11	7	18	1,67%	0	0,00%
Wakil Kepala Divisi Head Deputy of Division	1	1	2	0,17%	1	0	1	0,09%	1	100,00%
Kepala Kantor Wilayah Head of Regional Office	9	0	9	0,78%	9	0	9	0,84%	0	0,00%
Deputy Head of Regional Office	2	0	2	0,17%	2	0	2	0,19%	0	0,00%
Kepala Kantor Cabang Head of Branch Office	50	4	54	4,70%	48	6	54	5,02%	0	0,00%
Kepala Bagian Division Head	191	66	257	22,35%	179	65	244	22,70%	13	5,33%
Kepala Seksi & Kepala KUP Head of Section & Head of KUP	17	0	17	1,48%	16	0	16	1,49%	1	6,25%
Fungsional Functional	39	22	61	5,30%	41	22	63	5,86%	(2)	(3,17) %
Staf* Staff*	252	307	559	48,61%	256*	285*	541*	50,33*	18	3,33%
Calon Karyawan Prospective Employees	77	93	170	14,78%	46	80	126	11,72%	75	6,98%
Jumlah Total	650	500	1.150	100,00%	610	465	1075	100%	0	0,00%

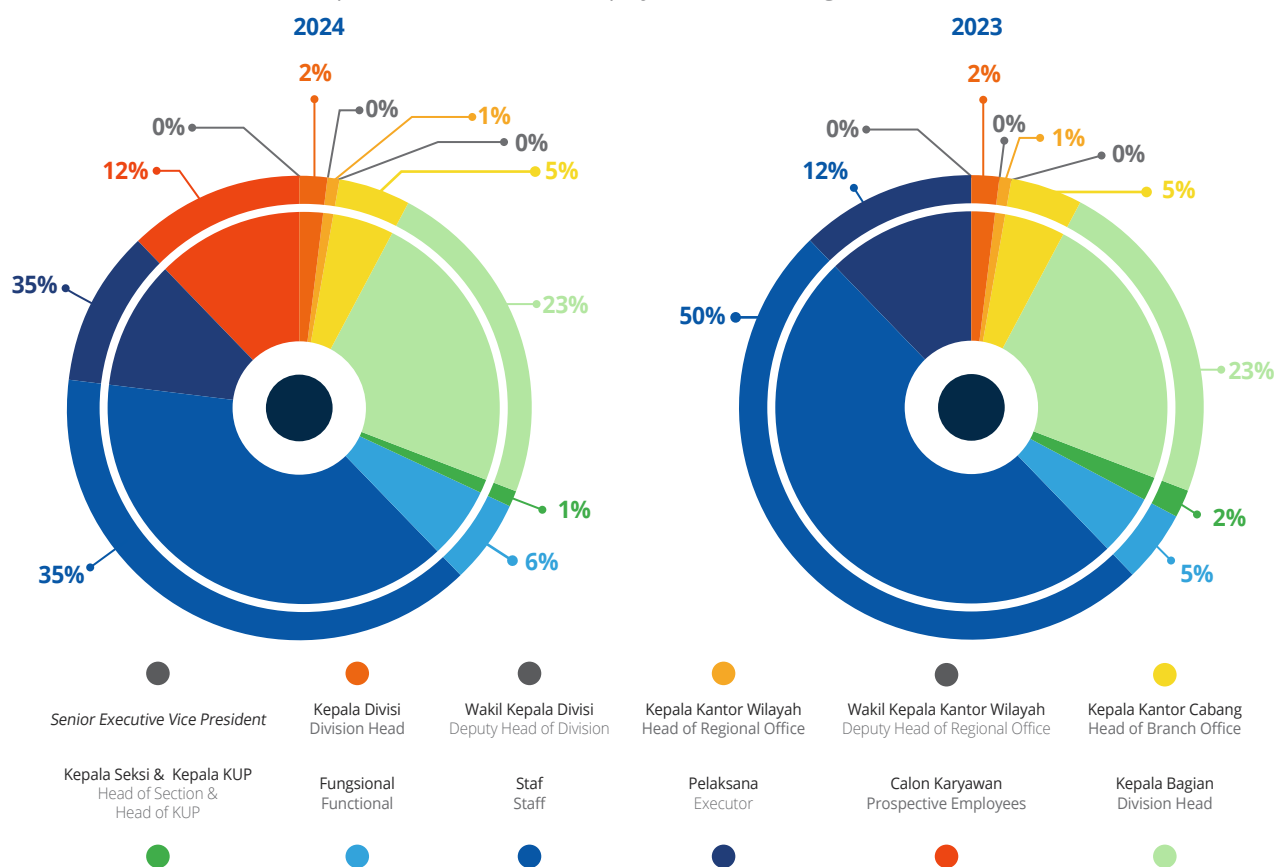
*) disajikan kembali / restated

L = Laki-laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Level Organisasi

Composition of Permanent Employees Based on Organizational Level



Berdasarkan level organisasi, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh level staf (termasuk pelaksana).

Based on organizational level, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by staff (including executive staff).

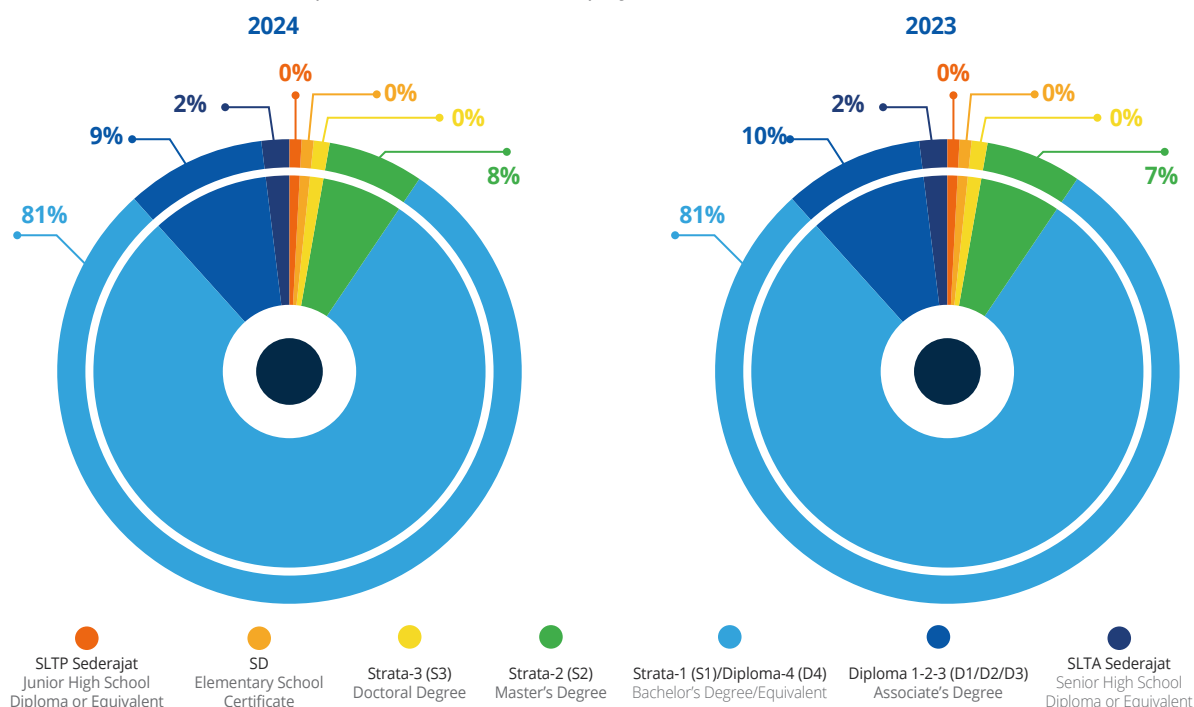
Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)

Permanent Employee Demographics based on Education Level (people)

Jenjang Pendidikan Education Level	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total (1)	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total (2)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total (3=1-2)	Persentase Percentage (%) (3/2)
Strata-3 (S3) Doctoral Degree	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Strata-2 (S2) Master's Degree	55	33	88	7,65%	50	27	77	7,16%	11	14,29%
Strata-1 (S1)/Diploma-4 (D4) Bachelor's Degree/ Equivalent	534	401	935	81,30%	495	376	871	81,02%	64	7,35%
Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3) Associate's Degree	43	60	103	8,96%	45	56	101	9,40%	2	1,98%
SLTA Sederajat Senior High School Diploma or Equivalent	14	6	20	1,74%	16	6	22	2,05%	(2)	(9,09) %
SLTP Sederajat Junior High School Diploma or Equivalent	4	0	4	0,35%	4	0	4	0,37%	0	0,00%
SD Elementary School Certificate	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah Total	650	500	1.150	100,00%	610	465	1.075	100,00%	75	6,98%

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan Composition of Permanent Employees Based on Education Level



Dilihat dari jenjang pendidikan, mayoritas karyawan tetap Jamkrindo memiliki latar belakang pendidikan sarjana strata-1 dan/atau diploma-4.

In terms of education level, the majority of Jamkrindo's permanent employees have a bachelor's degree and/or diploma-4 education background.

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang) Demographic of Permanent Employees Based on Employment Status (people)

Status Kepegawaian Employment Status	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total (1)	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total (2)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total (3=1-2)	Persentase Percentage (%) (3/2)
Tetap Permanent										
Permanen (PKWTT) Permanent (PKWTT)	644	497	1.141	53,02%	603	462	1.065	50,24%	76	7,14%
Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah Assigned to a subsidiary, PT Jamkrindo Syariah	5	2	7	0,33%	6	2	8	0,38%	(1)	(12,50) %
Penugasan PT LSPP Assigned to PT LSPP	1	1	2	0,09%	1	1	2	0,09%	0	0,00%
Sub Jumlah Tetap Subtotal of Permanent Employees	650	500	1.150	53,44%	610	465	1.075	50,71%	75	6,98%
Tidak Tetap Non-Permanent										
Kontrak Outsourcing Outsourcing Contracts	585	246	831	38,62%	585	246	831	39,20%	0	0,00%
Magang Bersertifikasi Certified Internship	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Prohire Prohire	13	7	20	0,93%	15	5	20	0,94%	0	0,00%
KKWT Specific Time Work Agreement (KKWT)	81	70	151	7,02%	97	97	194	9,15%	(43)	(22,16) %

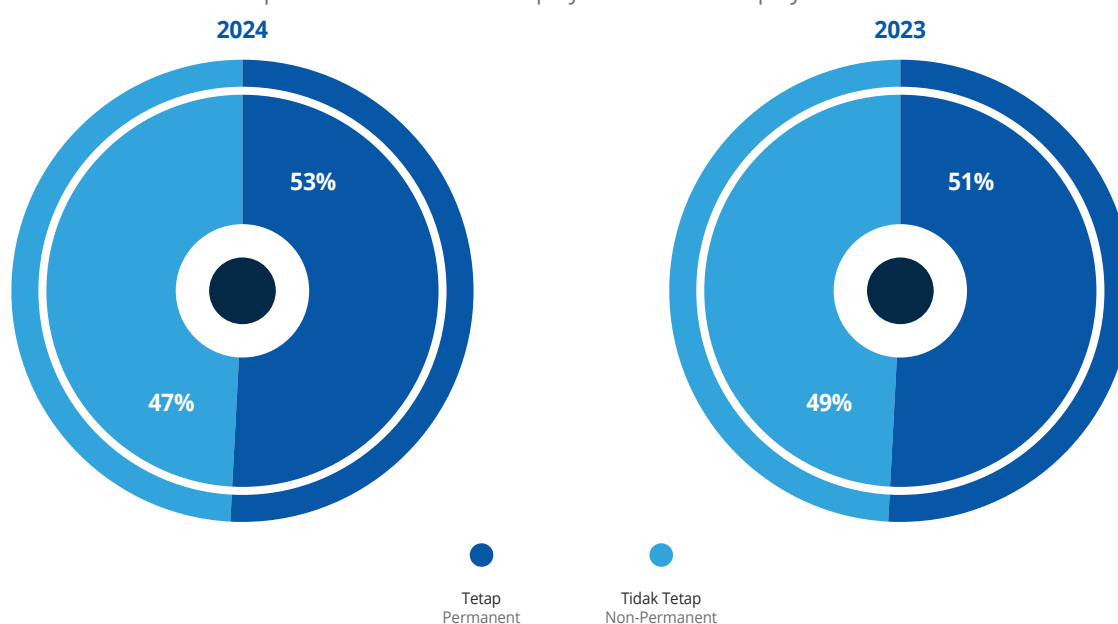
Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Demographic of Permanent Employees Based on Employment Status (people)

Status Kepegawaian Employment Status	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total (1)	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total (2)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total (3=1-2)	Persentase Percentage (%) (3/2)
Sub Jumlah Tidak Tetap Subtotal of Non-Permanent Employees	679	323	1.002	46,56%	697	348	1.045	49,29%	(43)	(4,11) %
Jumlah Total	1.329	823	2.152	100,00%	1307	813	2120	100,00%	32	1,51%

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Status Kepegawaian

Composition of Permanent Employees Based on Employment Status



Berdasarkan status kepegawaian, jumlah karyawan tetap Jamkrindo lebih dominan dibandingkan dengan karyawan tidak tetap dengan selisih yang tidak begitu jauh.

Based on employment status, the total number of Jamkrindo's permanent employees is more dominant compared to non-permanent employees by a small difference.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Penempatan/Wilayah Kerja (orang)

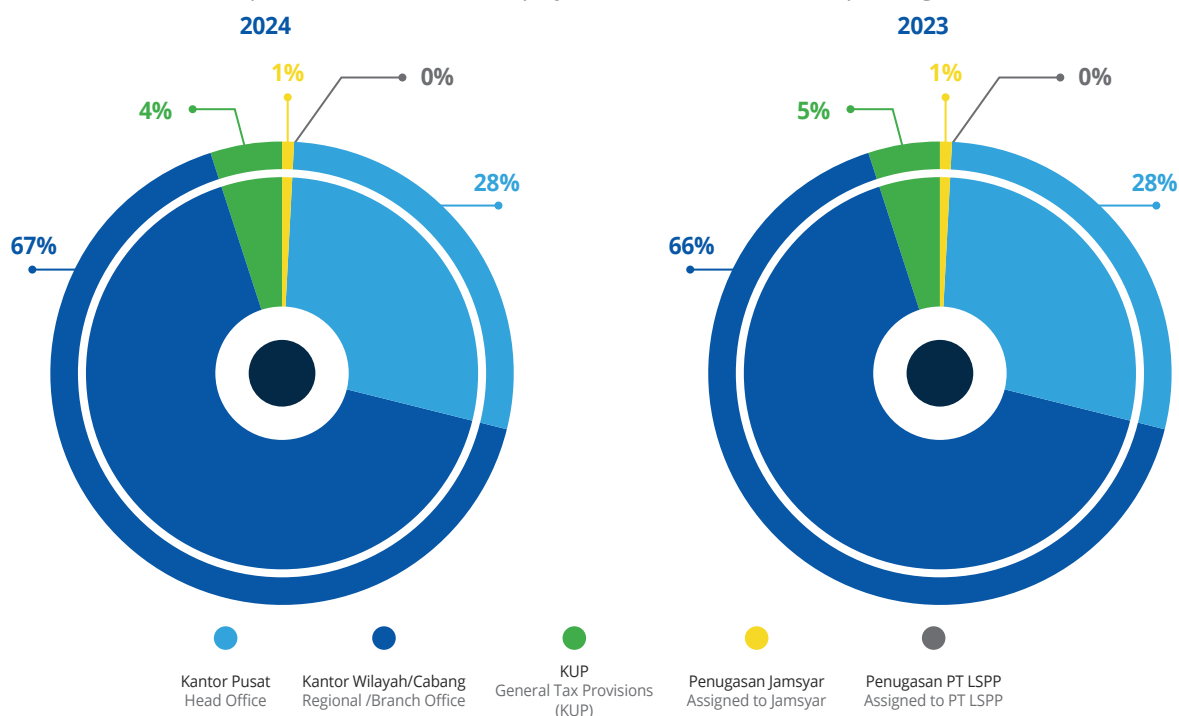
Permanent Employee Demographics Based on Placement/Operating Area (people)

Penempatan/ Wilayah Kerja Placement/Operating Area	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total (1)	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total (2)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total (3=1-2)	Persentase Percentage (%) (3/2)
Kantor Pusat Head Office	174	150	324	28,17%	161	145	306	28,47%	18	5,88%
Kantor Wilayah/Cabang Regional /Branch Office	440	325	765	66,52%	413	298	711	66,14%	54	7,59%
KUP General Tax Provisions (KUP)	30	22	52	4,52%	29	19	48	4,47%	4	8,33%
Penugasan Jamsyar Assigned to Jamsyar	5	2	7	0,61%	6	2	8	0,74%	(1)	(12,50) %
Penugasan PT LSPP Assigned to PT LSPP	1	1	2	0,17%	1	1	2	0,19%	0	0,00%
Jumlah Total	650	500	1.150	100,00%	610	465	1075	100,00%	75	6,98%

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Penempatan/Wilayah Kerja

Composition of Permanent Employees Based on Placement/Operating Area



Dilihat dari penempatan wilayah kerja, mayoritas karyawan tetap Jamkrindo bertugas di Kantor Wilayah atau Kantor Cabang.

Based on the placement of operating areas, the majority of Jamkrindo's permanent employees are assigned to Regional Offices or Branch Offices.

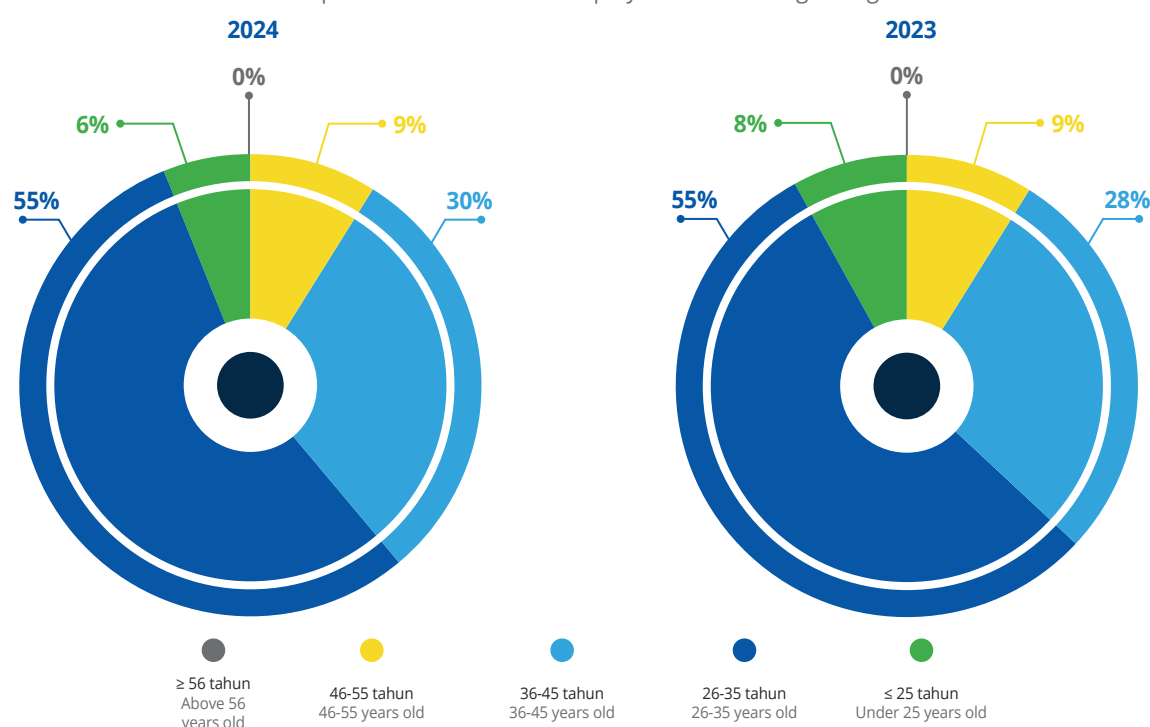
Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Rentang Usia (orang)

Demographic of Permanent Employees Based on Age Range (people)

Rentang Usia Age Range	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total (1)	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total (2)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total (3=1-2)	Persentase Percentage (%) (3/2)
≥ 56 tahun Above 56 years old	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
46-55 tahun 46-55 years old	66	35	101	8,78%	61	34	95	8,84%	6	6,32%
36-45 tahun 36-45 years old	241	109	350	30,43%	198	100	298	27,72%	52	17,45%
26-35 tahun 26-35 years old	320	313	633	55,04%	329	268	597	55,53%	36	6,03%
≤ 25 tahun Under 25 years old	23	43	66	5,74%	22	63	85	7,91%	(19)	(22,35) %
Jumlah Total	650	500	1.150	100,00%	610	465	1075	100,00%	75	6,98%

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Rentang Usia Composition of Permanent Employees Based on Age Range



Berdasarkan kelompok usia, mayoritas karyawan tetap di Jamkrindo berasal dari kelompok usia 26-35 tahun. Hal ini mencerminkan dinamika tenaga kerja yang didominasi oleh generasi muda produktif, dengan potensi besar untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.

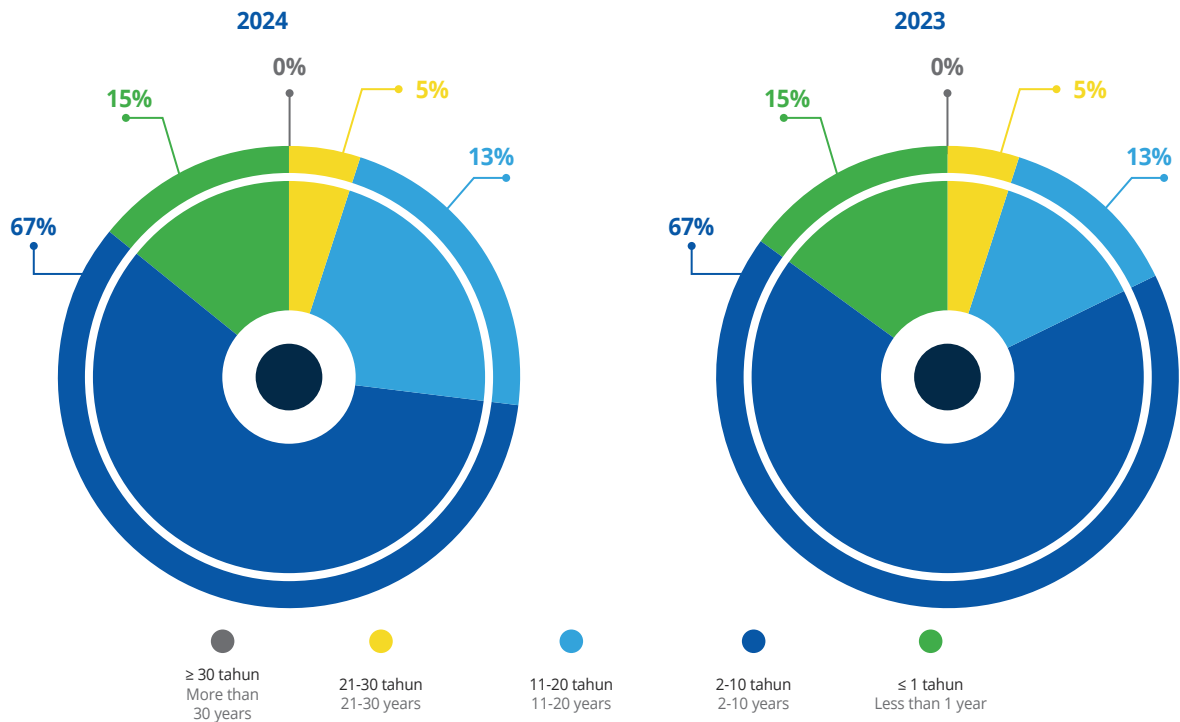
Based on the age range, the majority of permanent employees at Jamkrindo is of the 26-35 years old age range. This reflects the dynamic workforce dominated by productive young people, with great potential to support the company's innovation and growth in the future.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Masa Kerja (orang) Demographic of Permanent Employee Based on Length of Service (people)

Masa Kerja Length of Service	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
≥ 30 tahun More than 30 years	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
21-30 tahun 21-30 years	35	28	63	5,48%	30	22	52	4,84%	11	21,15%
11-20 tahun 11-20 years	156	94	250	21,74%	86	59	145	13,49%	105	72,41%
2-10 tahun 2-10 years	387	291	678	58,96%	437	284	721	67,07%	(43)	(5,96) %
≤ 1 tahun Less than 1 year	72	87	159	13,83%	57	100	157	14,60%	2	1,27%
Jumlah Total	650	500	1.150	100,00%	610	465	1075	100,00%	75	6,98%

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Masa Kerja
 Composition of Permanent Employees based on Length of Service



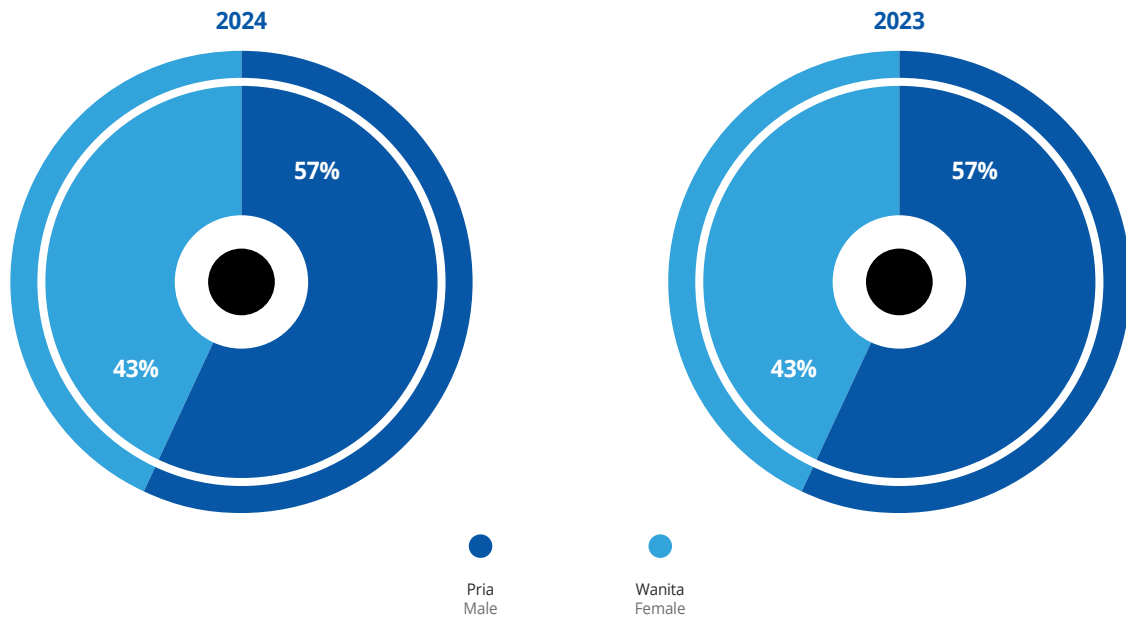
Berdasarkan masa kerja, mayoritas karyawan tetap di Jamkrindo memiliki masa kerja antara 2-10 tahun.

Based on length of service, the majority of permanent employees at Jamkrindo have between 2-10 years of service.

Demographic of Permanent Employees Based on Gender (people)
 Demographic of Permanent Employees Based on Gender (people)

Gender	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total (1)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total (2)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total (3=1-2)	Persentase Percentage (%) (3/2)
Pria Male	650	56,52%	610	56,74%	40	6,56%
Wanita Female	500	43,48%	465	43,26%	35	7,53%
Jumlah Total	1.150	100,00%	1075	100,00%	75	6,98%

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Gender Composition of Permanent Employees Based on Gender



Mayoritas karyawan tetap di Jamkrindo merupakan laki-laki.

The majority of permanent employees at Jamkrindo are male employees.

Pengembangan Kompetensi

Pengelolaan sumber daya manusia secara profesional menjadi salah satu prioritas utama Jamkrindo dalam menyediakan produk dan layanan jasa penjaminan kredit berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut, perencanaan dan strategi pengembangan SDM dilakukan secara terarah, memastikan ketersediaan SDM yang kompeten untuk mengisi berbagai posisi, jabatan, dan tanggung jawab sesuai kebutuhan pada waktu yang tepat.

Adapun perencanaan dan strategi pengembangan SDM bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam Perusahaan;
2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan dapat terselesaikan;
3. Menghindari terjadinya *miss management* dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat;
5. Menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrutmen, pengembangan, kompensasi, penilaian kinerja, manajemen karir, dan kedisiplinan hingga pensiun/pemberhentian karyawan.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi karyawan merupakan prioritas utama bagi Jamkrindo dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan secara berkala menyelenggarakan program pengembangan kompetensi karyawan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Program-program tersebut diselenggarakan berlandaskan prinsip kesetaraan, terbuka bagi seluruh karyawan tanpa

Competency Development

Professional human capital management is one of Jamkrindo's top priorities in providing quality credit guarantee products and services. To support this, HC planning and development strategies are conducted in a directed manner, ensuring the availability of competent human capital to fill various positions and responsibilities as needed at the right time.

The HC development planning and strategy aims to:

1. To improve the quality and quantity of employees who will fill all positions in the Company;
2. To ensure the availability of current and future labor, so that every work can be completed;
3. To prevent the occurrence of mismanagement and overlap in the execution of duties;
4. To facilitate coordination, integration, and synchronization to increase work productivity;
5. To serve as a guideline in establishing recruitment, development, compensation, performance assessment, career management, and discipline until the retirement/dismissal of employees.

Increasing employee capacity and competence is a top priority for Jamkrindo in realizing a sustainable business. Thus, the Company regularly organizes employee competency development programs through various education and training. These programs are held based on the principle of equality, open to all employees regardless of gender. During the year 2024, the Company has conducted 272 education and training

membedakan jenis kelamin. Selama tahun 2024, Perusahaan telah melakukan pendidikan dan pelatihan sebanyak 272 kali, yang diikuti oleh 7.766 karyawan. Jenis pengembangan kompetensi karyawan terdiri dari *hard skill* maupun *soft skill*. Rekapitulasi pengembangan karyawan selama tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

programs, which were attended by 7,766 employees. The types of employee competency development consisted of hard skills and soft skills. A recapitulation of employee development during 2024 is presented in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai Finished Date	Penyelenggara Organizer
1	Program Pelatihan Business Acumen and Innovation Business Acumen and Innovation Training Program	1	15 Oct 24 October 15, 2024	16 Oct 24 October 16, 2024	IFG Corporate University
2	Ambidextrous Leadership (Shaping a Future With Effective and Sustainable Growth)	5	16 Oct 24 October 16, 2024	17 Oct 24 October 17, 2024	Kubik Leadership
3	Indonesia Human Capital Beyond Summit 2024	6	13 Nov 24 November 13, 2024	15 Nov 24 November 15, 2024	IHCBS
4	Program LEAD-2 - Group Coaching 1 LEAD-2 Program - Group Coaching 1	2	12 Sep 24 September 12, 2024	12 Sep 24 September 12, 2024	IFG Corporate University
5	Program LEAD-2 - Group Coaching 2 LEAD-2 Program - Group Coaching 2	2	2 Oct 24 October 02, 2024	2 Oct 24 October 02, 2024	IFG Corporate University
6	Program LEAD-2 - Phase 1A: Kesamaptaan dan Bintalsik LEAD-2 Program - Phase 1A: Fitness and Mental and Attitude Development	2	29 Jul 24 July 29, 2024	2 Aug 24 August 02, 2024	IFG Corporate University
7	Program LEAD-2 - Phase 1B: Personal Leadership Journey LEAD-2 Program - Phase 1B: Personal Leadership Journey	2	9 Aug 24 August 09, 2024	10 Aug 24 August 10, 2024	IFG Corporate University
8	Program LEAD-2 - Phase 1C: Social Culture Program LEAD-2 Program - Phase 1C: Social Culture Program	2	14 Aug 24 August 14, 2024	14 Aug 24 August 14, 2024	IFG Corporate University
9	Program LEAD-2 - Phase 3 LEAD-2 Program - Phase 3	2	18 Oct 24 October 18, 2024	19 Oct 24 October 19, 2024	IFG Corporate University
10	Program LEAD-2 - Phase 3 : Group Coaching 3 LEAD-2 Program - Phase 3: Group Coaching 3	2	18 Oct 24 October 18, 2024	6 Nov 24 November 06, 2024	IFG Corporate University
11	Program LEAD-2 - Phase 4 LEAD-2 Program - Phase 4	2	22 Nov 24 November 22, 2024	23 Nov 24 November 23, 2024	IFG Corporate University
12	Program LEAD-3 Phase 3 LEAD-3 Program Phase 3	2	25 Oct 24 October 25, 2024	26 Oct 24 October 26, 2024	IFG Corporate University
13	Program LEAD-3 sesi Pitstop 2 LEAD-3 program Pitstop 2 session	1	7 Nov 24 November 07, 2024	7 Nov 24 November 07, 2024	Daya Dimensi Indonesia
14	1000 Manusia Bercerita dan BUMN Fun Run 1000 People Tell Their Stories and SOE Fun Run	3	19 Jul 24 July 19, 2024	20 Jul 24 July 20, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
15	7th Indonesian Actuaries Summit 2024	1	20 Aug 24 August 20, 2024	22 Aug 24 August 22, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Indonesian Actuarial Association (PAI)
16	Ai4 - The Forefront of Artificial Intelligence Innovation	2	12 Aug 24 August 12, 2024	14 Aug 24 August 14, 2024	Fora Group
17	APAC Regional Experience at Knowledge 2024	1	20 May 24 May 20, 2024	30 May 24 May 30, 2024	Servicenow
18	Asian Actuarial Conference 2024 - Exploring the Future of Insurance and Beyond: Innovation, International Hubs and Hong Kong	1	22 Oct 24 October 22, 2024	25 Oct 24 October 25, 2024	Asian Actuarial Conference 2024

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date		Tanggal Selesai Finished Date		Penyelenggara Organizer
19	Awareness & Requirement Training Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001 : 2016 PT Jamkrindo Tahun 2024 Awareness & Requirement Training SMAP Certification SNI ISO 37001: 2016 PT Jamkrindo of 2024	95	21 Mar 24	March 21, 2024	21 Mar 24	March 21, 2024	Cevral Consulting
20	Bakti Diaspora untuk Indonesia Tahun 2024 Diaspora Devotion for Indonesia in 2024	1	9 Jun 24	June 09, 2024	14 Jun 24	June 14, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
21	Batch 1 - Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Batch 1 - Level 4 Risk Management Certification Debriefing	19	24 Aug 24	August 24, 2024	31 Aug 24	August 31, 2024	EfektifPro
22	Batch 2 - Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Batch 2 - Level 4 Risk Management Certification Debriefing	13	7 Sep 24	September 07, 2024	14 Sep 24	September 14, 2024	EfektifPro
23	Benchmarking Visit Program SESPIBANK Angkatan 79 Benchmarking Visit of SESPIBANK Program Batch 79	1	24 Oct 24	October 24, 2024	2 Nov 24	November 02, 2024	LPPI
24	Branch Manager Development Program (BMDP) - Graduation Prgoram Igniting Future Visionaries	25	30 May 24	May 30, 2024	30 May 24	May 30, 2024	Duage Manajemen
25	Branch Manager Development Program (BMDP) - Project Presentation	25	10 Jan 24	January 10, 2024	26 Feb 24	February 26, 2024	PPM Manajemen
26	BUMN Muda Leadership Day Leading Through Turbulence Strategies for Success in Crisis	1	26 Apr 24	April 26, 2024	26 Apr 24	April 26, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
27	Business Essential Batch III - Innovation & Digital Disruption	1	3 Oct 24	October 03, 2024	3 Oct 24	October 03, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
28	Business Essential Batch III - Managing Organization Transformation	2	3 Oct 24	October 03, 2024	3 Oct 24	October 03, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
29	Business Essential Batch III - Strategic Management	1	3 Oct 24	October 03, 2024	3 Oct 24	October 03, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
30	Certification In Audit Committee Practices (CACP) 2024	1	23 Jan 24	January 23, 2024	29 Jan 24	January 29, 2024	Ikatan Komite Audit (IKAI) Audit Committee Association (IKAI)
31	Certified Corporate Learning Technologist : Modul 1 Certified Corporate Learning Technologist: Module 1	2	6 Mar 24	March 06, 2024	8 Mar 24	March 08, 2024	Wahana Tatar Wirakelola
32	Certified Corporate Learning Technologist : Modul 2 Certified Corporate Learning Technologist: Module 2	2	24 Apr 24	April 24, 2024	26 Apr 24	April 26, 2024	Wahana Tatar Wirakelola
33	Certified Corporate Learning Technologist : Modul 3 Certified Corporate Learning Technologist: Module 3	2	27 Jun 24	June 27, 2024	28 Jun 24	June 28, 2024	Wahana Tatar Wirakelola
34	Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	1	18 Nov 24	November 18, 2024	30 Nov 24	November 30, 2024	YPIA
35	CHRO Masterclass Innovation Workplace : Work Less Produce More	2	18 Jan 24	January 18, 2024	18 Jan 24	January 18, 2024	BUMN School of Excellence
36	COSO-2013 Internal Control Framework (COSO)	3	1 Feb 24	February 01, 2024	2 Feb 24	February 02, 2024	YPIA
37	CRMO (Certified Risk Management Officer)	3	27 May 24	May 27, 2024	6 Jun 24	June 06, 2024	PT Jasindo Bangun Insani
38	CSR Leader Bootcamp 2024 Smart Village 4.0 Platform	3	12 Dec 24	December 12, 2024	14 Dec 24	December 14, 2024	Sentul Innovation Centre
39	CTO Masterclass Modern AI - How Can Indonesia Compete with Leveraging AI?	1	29 May 24	May 29, 2024	29 May 24	May 29, 2024	BUMN School of Excellence
40	Data for Executive Decision Making	1	12 Sep 24	September 12, 2024	13 Sep 24	September 13, 2024	UQ Executive Education

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai Finished Date	Penyelenggara Organizer
41	Digitalization & Strategies for Dealing with Cybercrime Threats In Financial Sector	6	22 Oct 24 October 22, 2024	22 Oct 24 October 22, 2024	The Finance
42	Emerging Tech Meetup : Machine Learning-Powered Predictive Maintenance for Industrial Equipment	2	12 Jun 24 June 12, 2024	12 Jun 24 June 12, 2024	Fordigi BUMN dan SISI Fordigi BUMN and SISI
43	Employee & Industrial Relations Conference 2024	1	19 Sep 24 September 19, 2024	20 Sep 24 September 20, 2024	FHCI
44	End User Training Implementasi ERP Oracle EBS (JStream) Batch 1 End User Training Oracle EBS ERP Implementation (JStream) Batch 1	54	10 Sep 24 September 10, 2024	14 Sep 24 September 14, 2024	PT Jamkrindo
45	End User Training Implementasi ERP Oracle EBS (JStream) Batch 2 End User Training Oracle EBS ERP Implementation (JStream) Batch 2	37	17 Sep 24 September 17, 2024	21 Sep 24 September 21, 2024	PT Jamkrindo
46	End User Training Implementasi ERP Oracle EBS (JStream) Batch 3 End User Training Oracle EBS ERP Implementation (JStream) Batch 3	43	24 Sep 24 September 24, 2024	28 Sep 24 September 28, 2024	PT Jamkrindo
47	ERM Fundamental with (ERMAP Certification)	3	9 Dec 24 December 09, 2024	9 Dec 24 December 09, 2024	CRMS
48	EUT Jamkrindo Guarantee System (JaGuarS) Suretyship Batch 1	93	16 Dec 24 December 16, 2024	17 Dec 24 December 17, 2024	Jamkrindo
49	Excel For Data Analysis level Basic	15	18 Oct 24 October 18, 2024	16 Dec 24 December 16, 2024	Edspert For Corporation
50	Executive Refreshment for Top Level Management (Series 2)	21	13 Sep 24 September 13, 2024	13 Sep 24 September 13, 2024	LPPI
51	Executive Risk Management Refresher Program Batch 5 ESG & Business Sustainability	1	23 Feb 24 February 23, 2024	3 Mar 24 March 03, 2024	LPPI
52	Expansive Leadership Program	6	5 Sep 24 September 05, 2024	6 Sep 24 September 06, 2024	CLDI MSE
53	Final Pitching dan Awarding J-Neration 2023	15	27 Mar 24 March 27, 2024	28 Mar 24 March 28, 2024	PT Telekomunikasi Indonesia
54	Final Presentation - First Line Leader Development Program	19	26 Aug 24 August 26, 2024	26 Aug 24 August 26, 2024	PT Jamkrindo
55	Final Presentation Middle Manager Development Program (MMDP)	25	15 Jan 24 January 15, 2024	15 Jan 24 January 15, 2024	PT Jamkrindo
56	Focus Group Discussion AKHLAK Culture Journey 2023	9	23 Apr 24 April 23, 2024	23 Apr 24 April 23, 2024	Jamkrindo
57	Focus Group Discussion dan Halal Bihalal Harmonisasi Dana Pensiun Focus Group Discussion and Halal Bihalal Harmonization of Pension Funds	1	16 May 24 May 16, 2024	16 May 24 May 16, 2024	AKKAI
58	Global Executive CWM & CPD Program 2024	1	18 Jul 24 July 18, 2024	20 Jul 24 July 20, 2024	CWMA
59	Global Internal Audit Standards With Local Perspectives : A Deep Dive Into Internal Audit Practices	31	3 Feb 24 February 03, 2024	3 Feb 24 February 03, 2024	YPIA
60	GRC World Forums #RISK London	2	9 Oct 24 October 09, 2024	10 Oct 24 October 10, 2024	GRC World Forums
61	Grup Coaching - First Line Leader Development Program	19	2 Aug 24 August 02, 2024	16 Aug 24 August 16, 2024	PT Jamkrindo
62	Guardian Mastery : RM Skill Builder Batch 4	29	7 Nov 24 November 07, 2024	8 Nov 24 November 08, 2024	LPPI
63	Hands-on Training Nginx CDT	5	8 Mar 24 March 08, 2024	9 Mar 24 March 09, 2024	Central Data Technology
64	HR Business Partner	3	18 Sep 24 September 18, 2024	19 Sep 24 September 19, 2024	PPM Manajemen

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date		Tanggal Selesai Finished Date		Penyelenggara Organizer
65	In House Training Corporate Secretary IFG Corporate University	2	20 Jun 24	June 20, 2024	21 Jun 24	June 21, 2024	IFG Corporate University
66	Indonesian Actuarial Conference 2024	2	20 Nov 24	November 20, 2024	20 Nov 24	November 20, 2024	PAI
67	Infobank Leadership Mastery Class Series The Art of Execution	1	5 Mar 24	March 05, 2024	5 Mar 24	March 05, 2024	Infobank
68	Internal Auditing for Beginners	2	28 Aug 24	August 28, 2024	30 Aug 24	August 30, 2024	YPIA
69	International Benchmarking and Master Class on ESGRC	2	22 Sep 24	September 22, 2024	29 Sep 24	September 29, 2024	CRMS
70	J-Neration 2023 Workshop How Create Pitch Deck & Powerful Pitching	15	9 Jan 24	January 09, 2024	9 Jan 24	January 09, 2024	PT Jamkrindo
71	Jamtizen-Beraksi: Live In Social Project - Desa Osing Kemiren Jamtizen- in Action: Live In Social Project - Osing Kemiren Village	25	12 Aug 24	August 12, 2024	12 Aug 24	August 12, 2024	Maxima
72	Jamtizen-Beraksi: Workshop Design Thinking Jamtizen- in Action: Design Thinking Workshop	25	12 Aug 24	August 12, 2024	12 Aug 24	August 12, 2024	Maxima
73	Joint Regional Seminar 2024 - Opportunities and Risks for Asian Actuaries	3	28 May 24	May 28, 2024	5 Jun 24	June 05, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuarial Association
74	JURNAL : "Mid-Year Momentum : Boost Your Performance to Achieve Excellence" JOURNAL: "Mid-Year Momentum: Boost Your Performance to Achieve Excellence"	409	4 Jul 24	July 04, 2024	4 Jul 24	July 04, 2024	PT Jamkrindo
75	JURNAL: "Refreshment Analisa Kredit" Part 1 JOURNAL: "Credit Analysis Refreshment" Part 1	409	11 Sep 24	September 11, 2024	11 Sep 24	September 11, 2024	PT Jamkrindo
76	JURNAL: "Refreshment Analisa Kredit" Part 2 JOURNAL: "Credit Analysis Refreshment" Part 2	117	18 Sep 24	September 18, 2024	18 Sep 24	September 18, 2024	PT Jamkrindo
77	Key User Training Implementasi ERP Oracle EBS Key User Training for Oracle EBS ERP Implementation	40	15 Jul 24	July 15, 2024	26 Jul 24	July 26, 2024	PT Jamkrindo
78	Kick Off Meeting Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001 : 2016 PT Jamkrindo Tahun 2024 Kick Off Meeting SMAP Certification SNI ISO 37001: 2016 PT Jamkrindo of 2024	77	21 Mar 24	March 21, 2024	21 Mar 24	March 21, 2024	Cevral Consulting
79	Kick Off Program Jamkrindo Empowered Women for Excellence (JEWEL)	21	4 Oct 24	October 04, 2024	4 Oct 24	October 04, 2024	AMBIZ
80	Kindness to Progress 2024 - Design Thinking Workshop	4	17 Jun 24	June 17, 2024	18 Jun 24	June 18, 2024	IFG Corporate University
81	Kindness to Progress 2024 - Live In Desa Lembang	4	6 Aug 24	August 06, 2024	9 Aug 24	August 09, 2024	IFG Corporate University
82	KRISTAL Inspiration II - Mentoring Capture & Create Video	28	27 Jun 24	June 27, 2024	27 Jun 24	June 27, 2024	Inspigo
83	KRISTAL Inspiration II - Workshop Capture & Create	28	25 Jun 24	June 25, 2024	25 Jun 24	June 25, 2024	Inspigo
84	Launching Buku Saku dan Apresiasi Kinerja Terbaik bagi RM Handbook Launching and Best Performance Appreciation for RMs	23	20 Sep 24	September 20, 2024	20 Sep 24	September 20, 2024	PT Jamkrindo
85	LEAD-1 Batch 2 Phase 3	1	8 Mar 24	March 08, 2024	9 Mar 24	March 09, 2024	IFG Corporate University

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai Finished Date	Penyelenggara Organizer
86	Leader SPARK (Sharing Perspectives and Resources for Key Insight)	696	22 Oct 24 October 22, 2024	22 Oct 24 October 22, 2024	LPPI
87	Leaders Spark Series 2 : Core Values for Business Continuity and Accelerated Performance	140	26 Nov 24 November 26, 2024	26 Nov 24 November 26, 2024	LPPI
88	Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) Batch 2 Phase 1C – Sesi 1: Design Thinking	1	10 Jan 24 January 10, 2024	10 Jan 24 January 10, 2024	IFG Corporate University
89	Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) Batch 2 Phase 1C – Sesi 2: Live in and Social Project	1	18 Jan 24 January 18, 2024	21 Jan 24 January 21, 2024	IFG Corporate University
90	Leadership Excellence Acceleration and Development (LEAD-1) Batch 2 Phase 2	1	1 Feb 23 February 01, 2023	3 Feb 23 February 03, 2023	IFG Corporate University
91	Leadership Mastery Class - The Art of Execution By Elia Massa Manik	1	5 Mar 24 March 05, 2024	5 Mar 24 March 05, 2024	Info Bank
92	Learning Design & Development	4	21 May 24 May 21, 2024	22 May 24 May 22, 2024	KelasHR
93	Master Class - Resilient Leadership	3	4 Dec 24 December 04, 2024	4 Dec 24 December 04, 2024	CRMS
94	Materi Persiapan untuk Sertifikasi Tableau Preparation Materials for Tableau Certification	5	6 Mar 24 March 06, 2024	6 Mar 24 March 06, 2024	Metrodata
95	Onboarding Directorship Program Angkatan 7 Tahun 2024 Onboarding Directorship Program Batch 7 of 2024	1	12 Jan 24 January 12, 2024	14 Jan 24 January 14, 2024	BUMN school of excellence
96	Onboarding Induction Fundamentals Batch 2 Tahun 2024 Onboarding Induction Fundamentals Batch 2 of 2024	29	17 Jul 24 July 17, 2024	27 Jul 24 July 27, 2024	PT Jamkrindo dan Smartperonality PT Jamkrindo and Smartperonality
97	Onboarding Induction Fundamentals Bela Negara Batch 2 Tahun 2024 Onboarding Induction Fundamentals Batch 2 of 2024	44	17 Jul 24 July 17, 2024	19 Jul 24 July 19, 2024	Yayasan Raksa Bhumi Samudera Raksa Bhumi Samudera Foundation
98	Onboarding Induction Fundamentals: Professional Communication at Work - Mentoring 1	26	12 Jun 24 June 12, 2024	12 Jun 24 June 12, 2024	Jamkrindo
99	Onboarding Induction Fundamentals: Professional Communication at Work - Mentoring 2	23	21 Jun 24 June 21, 2024	21 Jun 24 June 21, 2024	Jamkrindo
100	Onboarding Induction Fundamentals: Professional Communication at Work - Mentoring 3	19	28 Jun 24 June 28, 2024	28 Jun 24 June 28, 2024	Jamkrindo
101	Panel Discussion on Credit Insurance after POJK 20/2023	1	6 Mar 24 March 06, 2024	6 Mar 24 March 06, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuarial Association
102	Pelatihan Aktuaria (Training ASAI A10 Matematika Keuangan) Actuarial Training (ASAI A10 Financial Mathematics Training)	2	13 May 24 May 13, 2024	12 Jun 24 June 12, 2024	MIB & REKAN Konsultan Aktuaria
103	Pelatihan Aktuaria (Training ASAI A20 Probabilitas dan Statistika) Actuarial Training (ASAI A10 Financial Mathematics Training)	1	13 May 24 May 13, 2024	12 Jun 24 June 12, 2024	MIB & REKAN Konsultan Aktuaria
104	Pelatihan Awareness Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 1 Personal Data Protection Law Awareness Training 1	34	22 Aug 24 August 22, 2024	22 Aug 24 August 22, 2024	PT Jamkrindo

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date		Tanggal Selesai Finished Date		Penyelenggara Organizer
105	Pelatihan Awareness Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2 Personal Data Protection Law Awareness Training 2	1	23 Aug 24	August 23, 2024	23 Aug 24	August 23, 2024	PT Jamkrindo
106	Pelatihan Business Analyst IT IT Business Analyst Training	4	3 Dec 24	December 03, 2024	6 Dec 24	December 06, 2024	IFG Corporate University
107	Pelatihan Communication & Negotiation Communication & Negotiation Training	7	28 Nov 24	November 28, 2024	2 Nov 24	November 02, 2024	IFG Corporate University
108	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 2 Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 2 Training and Certification	2	27 May 24	May 27, 2024	30 May 24	May 30, 2024	IFG Corporate University
109	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 3 Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 3 Training and Certification	1	3 Jun 24	June 03, 2024	6 Jun 24	June 06, 2024	IFG Corporate University
110	Pelatihan dan Sertifikasi Compliance Management Fundamentals Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 3 Training and Certification	2	27 Feb 24	February 27, 2024	1 Mar 24	March 01, 2024	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
111	Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan Banking Law Consultant Training and Certification	1	31 Jul 24	July 31, 2024	3 Aug 24	August 03, 2024	Justitia Training Center
112	Pelatihan Data Science dan Data Analytics Data Science and Data Analytics Training	2	23 Jul 24	July 23, 2024	24 Jul 24	July 24, 2024	IFG Corporate University
113	Pelatihan Digitalisasi Proses Klaim Claims Process Digitalization Training	63	31 Jan 24	January 31, 2024	2 Feb 24	February 02, 2024	PT Jamkrindo
114	Pelatihan Functional Automation Testing using Katalon (customized) Training on Functional Automation Testing using Katalon (customized)	4	26 Jul 24	July 26, 2024	27 Jul 24	July 27, 2024	I3 (Inovasi Informatika Indonesia)
115	Pelatihan Fundamental IT Audit Fundamental IT Audit Training	4	21 Oct 24	October 21, 2024	22 Oct 24	October 22, 2024	YPIA
116	Pelatihan Human Resource Business Partner Human Resource Business Partner Training	3	18 Sep 24	September 18, 2024	19 Sep 24	September 19, 2024	PPM Management
117	Pelatihan Implementasi ITSM Tools Incident Management & Sharing awareness keamanan informasi 1 ITSM Tools Incident Management Implementation Training & Information Security Awareness Sharing 1	67	5 Aug 24	August 05, 2024	6 Aug 24	August 06, 2024	PT Jamkrindo
118	Pelatihan Implementasi ITSM Tools Incident Management & Sharing awareness keamanan informasi 2 ITSM Tools Incident Management Implementation Training & Information Security Awareness Sharing 2	6	6 Aug 24	August 06, 2024	7 Aug 24	August 07, 2024	PT Jamkrindo
119	Pelatihan Life Cycle Assessment (LCA) and Carbon Reduction Strategy Life Cycle Assessment (LCA) and Carbon Reduction Strategy Training	9	25 Jul 24	July 25, 2024	26 Jul 24	July 26, 2024	LSPMR
120	Pelatihan Onboarding Induction Fundamentals - Bela Negara Batch 1 Onboarding Induction Fundamentals Training - State Defense Batch 1	29	29 May 24	May 29, 2024	31 May 24	May 31, 2024	Yayasan Raksa Bhumi Samudra Raksa Bhumi Samudera Foundation

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date		Tanggal Selesai Finished Date		Penyelenggara Organizer
121	Pelatihan Onboarding Induction Fundamentals - Core Business Competency	28	3 Jun 24	June 03, 2024	5 Jun 24	June 05, 2024	PT Jamkrindo
	Onboarding Induction Fundamentals - Core Business Competency Training						
122	Pelatihan Onboarding Induction Fundamentals - Professional Communication at Work	29	6 Jun 24	June 06, 2024	8 Jun 24	June 08, 2024	PT Jamkrindo bersama smartpersonality
	Onboarding Induction Fundamentals Training - Professional Communication at Work						
123	Pelatihan Pengelolaan Protokol Perusahaan Corporate Protocol Management Training	2	29 Aug 24	August 29, 2024	30 Aug 24	August 30, 2024	IFG Corporate University
124	Pelatihan Pengelolaan Subrogasi Subrogation Management Training	6	3 Sep 24	September 03, 2024	3 Sep 24	September 03, 2024	IFG Corporate University
125	Pelatihan Penilai Risk Maturity Index Risk Maturity Index Assessor Training	4	8 Mar 24	March 08, 2024	8 Mar 24	March 08, 2024	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
126	Pelatihan Professional Communication at Work Risk Maturity Index Assessor Training	3	25 Jul 24	July 25, 2024	27 Jul 24	July 27, 2024	smartpersonality
127	Pelatihan Standards & Code of Ethics for Professional Internal Audit (SACEP) Standards & Code of Ethics for Professional Internal Audit (SACEP) Training	1	18 Apr 24	April 18, 2024	19 Apr 24	April 19, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Raksa Bhumi Samudera Foundation
128	Pelatihan Strategi Pengelolaan Produk Suretyship Suretyship Product Management Strategy Training	3	22 Aug 24	August 22, 2024	22 Aug 24	August 22, 2024	IFG Corporate University
129	Pelatihan Talent Big Data Platforms Big Data Platforms Talent Training	26	29 Jul 24	July 29, 2024	30 Jul 24	July 30, 2024	Artha Solutions
130	Peluang dan tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital Opportunities and challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era	24	6 Jun 24	June 06, 2024	6 Jun 24	June 06, 2024	OJK
131	Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restruturisasi Kredit Credit Growth Opportunities Following the End of Credit Restructuring Policies	22	22 May 24	May 22, 2024	22 May 24	May 22, 2024	OJK
132	Pemahaman ESG (Environment, Social, Govenance) Understanding of ESG (Environment, Social, Govenance)	5	2 Dec 24	December 02, 2024	4 Dec 24	December 04, 2024	IFG Corporate University
133	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Debriefing and Level 4 Risk Management Certification Exam	1	10 Jul 24	July 10, 2024	11 Jul 24	July 11, 2024	EfektifPro
134	Pembekalan Sertifikasi Kemenaker Ahli K3 Umum Debriefing of Ministry of Manpower Certification for General OHS Experts	4	4 Nov 24	November 04, 2024	16 Nov 24	November 16, 2024	3S Learning Center
135	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification Debriefing	7	13 May 24	May 13, 2024	14 May 24	May 14, 2024	efektifPro
136	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification Debriefing	4	14 Oct 24	October 14, 2024	15 Oct 24	October 15, 2024	EfektifPro

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai Finished Date	Penyelenggara Organizer
137	Pembekalan Sertifikasi Skema Analisis Penjaminan Batch 1 Tahun 2024 Certification Debriefing of Quality Assurance Analyst Scheme Batch 1 of 2024	21	2 May 24 May 02, 2024	3 May 24 May 03, 2024	PT Bintang Cahaya Gempita
138	Pembekalan Sertifikasi Skema Analisis Penjaminan Batch 2 Tahun 2024 Certification Debriefing of Quality Assurance Analyst Scheme Batch 2 of 2024	30	12 Aug 24 August 12, 2024	13 Aug 24 August 13, 2024	PT Bintang Cahaya Gempita
139	Pembekalan Sertifikasi Skema Analisis Penjaminan Batch 1 Tahun 2024 Certification Debriefing of Assurance Analyst Scheme Batch 1 of 2024	25	20 May 24 May 20, 2024	21 May 24 May 21, 2024	Bintang Cahaya Gempita
140	Pembekalan Sertifikasi Skema Analisis Penjaminan Batch 2 Tahun 2024 Certification Debriefing of Assurance Analyst Scheme Batch 2 of 2024	48	3 Jun 24 June 03, 2024	4 Jun 24 June 04, 2024	Bintang Cahaya Gempita
141	Pengelolaan Reputasi dan Optimalisasi Branding perusahaan Reputation Management and Optimization of Company Branding	20	6 Mar 24 March 06, 2024	6 Mar 24 March 06, 2024	PT Jamkrindo
142	Penguatan Product Knowledge Suretyship Strengthening Suretyship Product Knowledge	28	19 Jan 24 January 19, 2024	19 Jan 24 January 19, 2024	PT Jamkrindo
143	PensionWell : Preparing for Life Beyond Work - Batch I	25	17 Jul 24 July 17, 2024	20 Jul 24 July 20, 2024	Yutha Edukasi Solusindo
144	Phase 3 - Sesi 2 : Live In and Social Project (FEMALE)	4	29 Feb 24 February 29, 2024	3 Mar 24 March 03, 2024	IFG Corporate University
145	Phase 4: Group Coaching 4	2	5 Dec 24 December 05, 2024	5 Dec 24 December 05, 2024	IFG Corporate University
146	Praktik Underwriting Asuransi Umum General Insurance Underwriting Practices	5	20 May 24 May 20, 2024	21 May 24 May 21, 2024	IFG Corporate University
147	Praktik Underwriting Asuransi Umum Batch 2 General Insurance Underwriting Practices Batch 2	1	20 Jun 24 June 20, 2024	21 Jun 24 June 21, 2024	IFG Corporate University
148	Praktik Underwriting Asuransi Umum Batch 3 General Insurance Underwriting Practices Batch 3	1	20 Jun 24 June 20, 2024	21 Jun 24 June 21, 2024	IFG Corporate University
149	Praktik Underwriting Asuransi Umum Batch 4 General Insurance Underwriting Practices Batch 4	1	20 Jun 24 June 20, 2024	21 Jun 24 June 21, 2024	IFG Corporate University
150	Praktik Underwriting Asuransi Umum Batch 5 General Insurance Underwriting Practices Batch 5	1	20 Jun 24 June 20, 2024	21 Jun 24 June 21, 2024	IFG Corporate University
151	Praktik Underwriting Asuransi Umum Batch 6 General Insurance Underwriting Practices Batch 6	1	20 Jun 24 June 20, 2024	21 Jun 24 June 21, 2024	IFG Corporate University
152	Professional Recognition Program (PRP) for Qualified Government Internal Auditor (QGIA)	1	15 Nov 24 November 15, 2024	16 Nov 24 November 16, 2024	YPIA
153	Program Business Essential Batch II Business Essential Batch II Program	1	4 Sep 24 September 04, 2024	5 Sep 24 September 05, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
154	Program Business Essential Batch IV Tahun 2024 Business Essential Program Batch IV of 2024	3	29 Nov 24 November 29, 2024	29 Nov 24 November 29, 2024	KBUMN Ministry of SOEs

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date		Tanggal Selesai Finished Date		Penyelenggara Organizer
155	Program Executive Refreshment for Top Level Management Executive Refreshment Program for Top Level Management	20	26 Jul 24	July 26, 2024	26 Jul 24	July 26, 2024	LPPI
156	Program Guardian Mastery : RM Skill Builder Batch 1 Guardian Mastery Program: RM Skill Builder Batch 1	29	18 Sep 24	September 18, 2024	19 Sep 24	September 19, 2024	PT Jamkrindo
157	Program Guardian Mastery : RM Skill Builder Batch 2 Guardian Mastery Program: RM Skill Builder Batch 2	27	10 Oct 24	October 10, 2024	11 Oct 24	October 11, 2024	LPPI
158	Program Guardian Mastery : RM Skill Builder Batch 3 Guardian Mastery Program: RM Skill Builder Batch 3	31	17 Oct 24	October 17, 2024	18 Oct 24	October 18, 2024	LPPI
159	Program Inklusif dan Berdaya Bersama Pelaku UMKM Pariwisata di Labuan Bajo Inclusive and Empowering Program with Tourism MSME Players in Labuan Bajo	1	9 Sep 24	September 09, 2024	13 Sep 24	September 13, 2024	IFG Corporate University
160	Program JEWEL : 3 Days Offline Workshop JEWEL Program: 3 Days Offline Workshop	19	23 Oct 24	October 23, 2024	25 Oct 24	October 25, 2024	AMBIZ
161	Program Kegiatan IFG Disability Community Hari Disabilitas Internasional Tahun 2024 IFG Disability Community Activity Program International Day of Disability 2024	7	5 Dec 24	December 05, 2024	6 Dec 24	December 06, 2024	IFG Corporate University
162	Program LEAD-1 Batch 2 Phase 4 LEAD-1 Batch 2 Phase 4 Program	3	30 May 24	May 30, 2024	1 Jun 24	June 01, 2024	IFG Corporate University
163	Program LEAD-1 Batch 2 Sesi Leaders Cafe 2 LEAD-1 Batch 2 Leaders Cafe 2 Session Program	1	22 Feb 24	February 22, 2024	22 Feb 24	February 22, 2024	IFG Corporate University
164	Program LEAD-1 Batch 2 Sesi Leaders Cafe 3 LEAD-1 Batch 2 Leaders Cafe Session 3 Program	1	24 Apr 24	April 24, 2024	24 Apr 24	April 24, 2024	IFG Corporate University
165	Program LEAD-1 Batch 2 Leaders Cafe4 LEAD-1 Batch2 Leaders Cafe 4 Program	1	19 Jun 24	June 19, 2024	19 Jun 24	June 19, 2024	IFG Corporate University
166	Program LEAD-2 - Social Culture Program LEAD-2 Program - Social Culture Program	1	12 Dec 24	December 12, 2024	15 Dec 24	December 15, 2024	IFG Corporate University
167	Program LEAD-3 sesi Pitstop 1 LEAD-3 program Pitstop 1 session	2	10 Oct 24	October 10, 2024	10 Oct 24	October 10, 2024	Daya Dimensi Indonesia
168	Program LEAD-3 sesi Pitstop 2 LEAD-3 program Pitstop 2 session	1	7 Nov 24	November 07, 2024	7 Nov 24	November 07, 2024	Daya Dimensi Indonesia
169	Program Leadership Excellence and Development (LEAD-3) Diklat Kesamaptaan dan Bintalsik Leadership Excellence and Development Program (LEAD-3) Fitness Training and Mental and Attitude Development	2	3 Sep 24	September 03, 2024	7 Sep 24	September 07, 2024	IFG Corporate University
170	Program Leadership Excellence and Development (LEAD-3) Phase 2 Leadership Excellence and Development Program (LEAD-3) Phase 2	2	23 Sep 24	September 23, 2024	27 Sep 24	September 27, 2024	IFG Corporate University
171	Program Leadership Excellence and Development (LEAD-3) sesi Kick Off Leadership Excellence and Development Program (LEAD-3) Kick Off session	2	15 Aug 24	August 15, 2024	15 Aug 24	August 15, 2024	IFG Corporate University

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai Finished Date	Penyelenggara Organizer
172	Program Pelatihan Business Acumen and Innovation Business Acumen and Innovation Training Program	2	15 Oct 24 October 15, 2024	16 Oct 24 October 16, 2024	IFG Corporate University
173	Program Pelatihan Creative Thinking Creative Thinking Training Program	2	31 Oct 24 October 31, 2024	31 Oct 24 October 31, 2024	Excellence Asia
174	Program Pelatihan Internal Control Testing Internal Control Testing Training Program	2	17 Sep 24 September 17, 2024	18 Sep 24 September 18, 2024	IFG Corporate University
175	Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Strengthening of National Values Program at the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia	3	22 Jul 24 July 22, 2024	28 Jul 24 July 28, 2024	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan Smandel Jakarta Business Network
176	Qualified Internal Auditor (QIA)	1	14 Oct 24 October 14, 2024	26 Oct 24 October 26, 2024	YPIA
177	Qualified Internal Audit (QIA) Dasar Qualified Internal Audit (QIA) Basic Regular	6	4 Nov 24 November 04, 2024	16 Nov 24 November 16, 2024	YPIA
178	Quiz Online AKHLAK dan Meaningful Work 2024 AKHLAK and Meaningful Work 2024 Online Quiz	602	15 Mar 24 March 15, 2024	16 Mar 24 March 16, 2024	PT Jamkrindo
179	Quiz Online Topik "Juklak Penjaminan Kredit Mikro" Online Quiz on "Micro Credit Guarantee Guidelines"	248	7 Jun 24 June 07, 2024	9 Jun 24 June 09, 2024	PT Jamkrindo
180	Quiz Online Topik "Penjaminan Tidak Langsung" Online Quiz on the Topic "Indirect Guarantee"	294	17 May 24 May 17, 2024	19 May 24 May 19, 2024	PT Jamkrindo
181	Quiz Online Topik "SE JUKLAK KUR" Online Quiz with Topic "Circular Letter Title and Guidelines for KUR"	269	26 Apr 24 April 26, 2024	28 Apr 24 April 28, 2024	PT Jamkrindo
182	Quiz Online Topik SMAP, Gratifikasi, dan BWS Online Quiz on SMAP, Gratuity, and BWS Topics	1246	21 Jun 24 June 21, 2024	26 Jun 24 June 26, 2024	Jamkrindo
183	Risk Beyond 2024 - Sustainable Symphony: Echoes of Change	3	5 Dec 24 December 05, 2024	6 Dec 24 December 06, 2024	CRMS
184	RISKHub International Webinar ESG Intergration in Risk Management A Practical Exploration	1	13 Mar 24 March 13, 2024	13 Mar 24 March 13, 2024	ERM Akademi Indonesia
185	Seminar & Masterclass GRC Summit: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs GRC Summit Seminar & Masterclass: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, SDGs	3	22 Aug 24 August 22, 2024	23 Aug 24 August 23, 2024	GRC Summit
186	Seminar 7th Indonesian Actuaries Summit 7th Indonesian Actuaries Summit Seminar	1	20 Aug 24 August 20, 2024	22 Aug 24 August 22, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Indonesian Actuarial Association (PAI)

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date		Tanggal Selesai Finished Date		Penyelenggara Organizer
187	Seminar dengan tema Global Internal Audit Standards (GIAS) With Local Perspective a Deep Dive into Internal Audit Practices Seminar with the theme Global Internal Audit Standards (GIAS) With Local Perspective a Deep Dive into Internal Audit Practices	4	11 May 24	May 11, 2024	11 May 24	May 11, 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit Raksa Bhumi Samudera Foundation
188	Seminar Indonesia Cyber Risk 2024 : "Mitigating Cyber Risk and Building a Trust" Indonesia Cyber Risk 2024 Seminar: "Mitigating Cyber Risk and Building a Trust"	4	27 Jun 24	June 27, 2024	27 Jun 24	June 27, 2024	LPPI
189	Seminar Nasional Bertumbuh Dalam Pengaturan UU P2SK National Seminar on Growing in the Arrangement of the P2SK Law	1	8 Mar 24	March 08, 2024	8 Mar 24	March 08, 2024	APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) APPI (Indonesian Financing Companies Association)
190	Sertifikasi ISEB-ISTQB International Certified Software Testing Foundation Level - Mastering Series (CTFL) + Exam ISEB-ISTQB International Certified Software Testing Foundation Level - Mastering Series (CTFL) + Exam Certification	1	19 Jan 24	January 19, 2024	19 Jan 24	January 19, 2024	Andalan Nusantara Teknologi
191	Sertifikasi Kompetensi Okupasi Skema Komisaris Occupational Competency Certification Commissioner Scheme	1	28 Feb 24	February 28, 2024	28 Feb 24	February 28, 2024	LSP Penjaminan
192	Sertifikasi Kompetensi Okupasi Skema Komisaris Occupational Competency Certification Commissioner Scheme	1	3 Apr 24	April 03, 2024	3 Apr 24	April 03, 2024	LSP Penjaminan
193	Sertifikasi Penjaminan Skema Komisaris Commissioner Scheme Assurance Certification	1	28 Nov 24	November 28, 2024	28 Nov 24	November 28, 2024	LSP Penjaminan
194	Sertifikasi Penjaminan Skema Tenaga Ahli Penjaminan Assurance Certification Scheme for Assurance Experts	1	19 Jul 24	July 19, 2024	19 Jul 24	July 19, 2024	LSP Penjaminan
195	Sertifikasi QRG QRGP Certification	1	10 Dec 24	December 10, 2024	10 Dec 24	December 10, 2024	CRMS
196	Sesi 1: Training Jira dan Confluence Role Administrator Session 1: Jira and Confluence Role Administrator Training	4	29 Apr 24	April 29, 2024	29 Apr 24	April 29, 2024	PT Aims Progrez
197	Sesi 2: Training Jira dan Confluence Role User Session 2: Jira and Confluence Role User Training	20	30 Apr 24	April 30, 2024	30 Apr 24	April 30, 2024	PT Aims Progrez
198	Sharing Session Relationship Manager "Tantangan Dalam Menjawab Era Penjaminan" Sharing Session Relationship Manager "Challenges in Answering the Era of Guarantee	21	12 Jul 24	July 12, 2024	12 Jul 24	July 12, 2024	PT Jamkrindo
199	Social Impact Bootcamp Vol.2	1	7 Oct 24	October 07, 2024	13 Oct 24	October 13, 2024	Social Impact.id

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

Table of Employee Competency Development in 2024							
No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date		Tanggal Selesai Finished Date		Penyelenggara Organizer
200	SOE Srikandi Leadership Program (SSLP)	1	28 May 24	May 28, 2024	30 May 24	May 30, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
201	Structured Finance and Syndication Loan: Financing for Construction Services and Toll Road Development	5	2 Sep 24	September 02, 2024	3 Sep 24	September 03, 2024	Infobank
202	Superior Session Program LEAD-2	2	10 Oct 24	October 10, 2024	10 Oct 24	October 10, 2024	IFG Corporate University
203	Sustainability for Organizational Resilience and Competitive Advantage	2	12 Dec 24	December 12, 2024	13 Dec 24	December 13, 2024	LSPMR
204	Swift International Banker's Operation Seminar (SIBOS) 2024	3	21 Oct 24	October 21, 2024	24 Oct 24	October 24, 2024	Swift
205	The 8th Indonesia Risk Management Outlook 2025	1	20 Nov 24	November 20, 2024	20 Nov 24	November 20, 2024	LPPI
206	The International Conference on Neuromanagement and Leadership	5	14 May 24	May 14, 2024	15 May 24	May 15, 2024	IARF Conference
207	Training Certified Data Management Professionals (CDMP) Certified Data Management Professionals (CDMP) Training	2	27 Feb 24	February 27, 2024	1 Mar 24	March 01, 2024	PT Jamkrindo
208	Training dan Awareness Teknologi Informasi : Implikasi Artificial Intelligence di Lembaga Keuangan Information Technology Training and Awareness: Implications of Artificial Intelligence in Financial Institutions	246	5 Mar 24	March 05, 2024	5 Mar 24	March 05, 2024	PT Jamkrindo
209	Training dan Sertifikasi COMPTIA Security+ COMPTIA Security+ Training and Certification	4	23 Sep 24	September 23, 2024	27 Sep 24	September 27, 2024	Multimatics
210	Training dan Sertifikasi ITIL v4 Foundation ITIL V4 Foundation Training and Certification	7	25 Mar 24	March 25, 2024	27 Mar 24	March 27, 2024	Multimatics
211	Training dan Workshop Business Continuity Management System (BCMS) Awareness Business Continuity Management System (BCMS) Awareness Training and Workshop	116	6 Feb 24	February 06, 2024	6 Feb 24	February 06, 2024	PT Jamkrindo
212	Training ERM Fundamental with (ERMAP Certification) ERM Fundamental Training with (ERMAP Certification)	3	2 Dec 24	December 02, 2024	4 Dec 24	December 04, 2024	CRMS
213	Training Financial Risk Management Financial Risk Management Training	2	26 Aug 24	August 26, 2024	28 Aug 24	August 28, 2024	Ganesha Inti Persada
214	Training IDEA Data Analysis Level 1 IDEA Data Analysis Level 1 Training	2	20 Nov 24	November 20, 2024	21 Nov 24	November 21, 2024	PT Insight Consulting
215	Training IDEA Data Analysis Level 2 IDEA Data Analysis Level 2 Training	2	28 Nov 24	November 28, 2024	29 Nov 24	November 29, 2024	PT Insight Consulting
216	Training Implementing GRC (Certification by LSP GRK and OCEG)	2	10 Dec 24	December 10, 2024	12 Dec 24	December 12, 2024	CRMS
217	Training of Trainers (ToT) BCMS Batch 2 BCMS Training of Trainers (ToT) Batch 2	22	7 Mar 24	March 07, 2024	8 Mar 24	March 08, 2024	PT Jamkrindo
218	Training of Trainers (ToT) BCMS Batch 3 BCMS Training of Trainers (ToT) Batch 3	33	13 May 24	May 13, 2024	14 May 24	May 14, 2024	PT Jamkrindo
219	Training of Trainers (ToT) Business Continuity Management System (BCMS) Batch 1	24	21 Feb 24	February 21, 2024	22 Feb 24	February 22, 2024	PT Jamkrindo

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date		Tanggal Selesai Finished Date		Penyelenggara Organizer
220	Training Risk Management & Wallet Sizing Risk Management & Wallet Sizing Training	57	23 Feb 24	February 23, 2024	23 Feb 24	February 23, 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)
221	Training Tableau Desktop Basic Tableau Desktop Basic Training	9	27 Feb 24	February 27, 2024	27 Feb 24	February 27, 2024	Metrodata
222	Uji Sertifikasi Penjaminan Skema Direktur Bisnis Business Director Scheme Assurance Certification Test	1	20 Dec 24	December 20, 2024	20 Dec 24	December 20, 2024	LSP Penjaminan
223	Uji Sertifikasi Skema Analisis Penjaminan Batch 1 Tahun 2024 Business Director Scheme Assurance Certification Test	21	3 May 24	May 03, 2024	4 May 34	May 04, 2024	LSP Penjaminan
224	Uji Sertifikasi Skema Analisis Penjaminan Batch 2 Tahun 2024 Business Director Scheme Assurance Certification Test	30	13 Aug 24	August 13, 2024	14 Aug 24	August 14, 2024	LSP Penjaminan
225	Uji Sertifikasi Skema Tenaga Ahli Penjaminan Batch 1 Tahun 2024 Certification Test for Assurance Expert Scheme Batch 1 of 2024	25	21 May 24	May 21, 2024	22 May 24	May 22, 2024	LSP Penjaminan
226	Uji Sertifikasi Skema Tenaga Ahli Penjaminan Batch 2 Tahun 2024 Certification Test for Assurance Expert Scheme Batch 2 of 2024	25	5 Jun 24	June 05, 2024	5 Jun 24	June 05, 2024	LSP Penjaminan
227	Ujian Implementing GRC (Certification by LSP GRK and OCEG) Implementing GRC Exam (Certification by LSP GRK and OCEG)	2	13 Dec 24	December 13, 2024	13 Dec 24	December 13, 2024	CRMS
228	Ujian Sertifikasi Aktuaria Actuarial Certification Exam	1	21 Oct 24	October 21, 2024	21 Oct 24	October 21, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuarial Association
229	Ujian Sertifikasi Aktuaria Actuarial Certification Exam	1	22 Oct 24	October 22, 2024	22 Oct 24	October 22, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Indonesian Actuarial Association
230	Ujian Sertifikasi Kemenaker Ahli K3 Umum Actuarial Certification Exam Ministry of Labor Certification Examination for General OHS Expert	4	22 Nov 24	November 22, 2024	23 Nov 24	November 23, 2024	3S Learning Center
231	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Level 4 Risk Management Certification Exam	42	12 Jun 24	June 12, 2024	1 Nov 24	November 01, 2024	BSMR dan LSP BSMR and LSP
232	Webinar Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management Webinar on Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	29	11 Jun 24	June 11, 2024	11 Jun 24	June 11, 2024	OJK Institute
233	Webinar Insight (IT Maturity Networking Session and Highlight) Webinar on Insight (IT Maturity Networking Session and Highlight)	8	11 Jun 24	June 11, 2024	11 Jun 24	June 11, 2024	Fordigi
234	Webinar Internal Auditors Readiness in Facing Cyber Attacks Webinar on Internal Auditors Readiness in Facing Cyber Attacks	33	6 Jul 24	July 06, 2024	6 Jul 24	July 06, 2024	Yayasan Pendidikan Internal audit Raksa Bhumi Samudera Foundation

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date	Tanggal Selesai Finished Date	Penyelenggara Organizer
235	Webinar OJK - Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management OJK Webinar - Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	28	11 Jun 24 June 11, 2024	11 Jun 24 June 11, 2024	OJK Institute
236	Webinar OJK - How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance OJK Webinar - How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	34	16 May 24 May 16, 2024	16 May 24 May 16, 2024	OJK Institute
237	Webinar OJK - Navigating The Half-Year: Roadmap to Success OJK Webinar - Navigating The Half-Year: Roadmap to Success	17	20 Jun 24 June 20, 2024	20 Jun 24 June 20, 2024	OJK
238	Webinar OJK - Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan OJK Webinar - The Role of Innovative Credit Scoring (ICS) in Improving Access to Funding	32	27 Jun 24 June 27, 2024	27 Jun 24 June 27, 2024	OJK Institute
239	Webinar Strategi Pemasaran Digital di Era Digital Digital Marketing Strategy Webinar in the Digital Age	9	5 Jun 24 June 20, 2024	5 Jun 24 June 20, 2024	OJK Institute
240	Workshop Busines Impact Analysis Business Impact Analysis Workshop	43	26 Jun 24 June 27, 2024	26 Jun 24 June 27, 2024	PT Robere Manajemen Indonesia
241	Workshop Governance Risk Management, and Compliance dan Sosialisasi Anti Fraud dan Risiko Penyuapan Workshop on Governance Risk Management, and Compliance and Dissemination of Anti Fraud and Bribery Risks	139	6 Jun 24 June 06, 2024	6 Jun 24 June 06, 2024	PT Robere & Associates Indonesia
242	Workshop Influencer BUMN Jawa Barat SOE Influencer Workshop in West Java	3	18 Jul 24 July 18, 2024	20 Jul 24 July 20, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
243	Workshop Influencer BUMN Kalimantan SOE Influencer Workshop in Kalimantan	3	26 Feb 24 February 26, 2024	28 Feb 24 February 28, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
244	Workshop Influencer BUMN Malang SOE Influencer Workshop in Malang	1	25 Jan 24 January 25, 2024	27 Jan 24 January 27, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
245	Workshop Influencer BUMN Sulawesi SOE Influencer Workshop in Sulawesi	3	20 Jun 24 June 20, 2024	22 Jun 24 June 22, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
246	Workshop Influencer BUMN Yogyakarta SOE Influencer Workshop in Yogyakarta	1	11 Jan 24 January 11, 2024	13 Jan 24 January 13, 2024	KBUMN Ministry of SOEs
247	Workshop Influencer Sulawesi Influencer Workshop in Sulawesi	3	20 Jun 24 June 20, 2024	22 Jun 24 June 22, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
248	Workshop Influencer Sumatera Selatan Influencer Workshop in South Sumatera	3	4 Oct 24 October 04, 2024	6 Oct 24 October 06, 2024	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
249	Workshop Kementerian BUMN - Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability Ministry of SOE Workshop - Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability	2	19 Jan 24 January 19, 2024	19 Jan 24 January 19, 2024	KBUMN Ministry of SOEs

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date		Tanggal Selesai Finished Date		Penyelenggara Organizer
250	Workshop Ketenagakerjaan Nasional : Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan atas Aksi Korporasi Perusahaan serta Dampaknya terhadap Masa Depan Karyawan National Employment Workshop: Legal Perspectives on Corporate Actions and Their Impact on the Future of Employees	5	28 Feb 24	February 28, 2024	29 Feb 24	February 29, 2024	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Informasi Publik (P3IP) Center for Public Information Assessment and Development (P3IP)
251	Workshop Nasional: Impelementasi Kepnaker No. 76 Tahun 2024 dalam Pedoman Hubungan Industrial yang Berkeadilan Berbasis Pancasila National Workshop: Implementation of Manpower Decree No. 76 of 2024 in Guiding Fair Industrial Relations Based on Pancasila	2	12 Jun 24	June 12, 2024	13 Jun 24	June 13, 2024	Lembaga P3IP Center for Public Information Assessment and Development (P3IP)
252	Workshop Pembuatan Kamus Kompetensi Perusahaan Workshop on the Creation of Company Competency Dictionary	1	7 Mar 24	March 07, 2024	8 Mar 24	March 08, 2024	Kelas HR HR Class
253	Workshop SROI: Social Return On Invesment Batch 2 SROI Workshop: Social Return On Invesment Batch 2	2	16 Oct 24	October 16, 2024	17 Oct 24	October 17, 2024	LPPI
254	Workshop Tata Cara Hapus Buku dan Pindah Tangan Aset Tetap BUMN dan Anak Perusahaan SROI Workshop: Social Return On Invesment Batch 2	3	2 Feb 24	February 02, 2024	2 Feb 24	February 02, 2024	Koran BUMN
255	Workshop The 6 Critical Practices for Leading a Team (First Line Leader Development Program) The 6 Critical Practices for Leading a Team (First Line Leader Development Program) Workshop	19	19 Jul 24	July 19, 2024	20 Jul 24	July 20, 2024	PT Jamkrindo
256	Workshop The Future of Finance Foresight for Sustainable Strategies The Future of Finance Foresight for Sustainable Strategies Workshop	4	17 Sep 24	September 17, 2024	18 Sep 24	September 18, 2024	Prasmul-eli
257	YLDP Basic Competency Analisa Penjaminan YLDP Basic Competency Guarantee Analysis	14	21 Oct 24	October 21, 2024	22 Oct 24	October 22, 2024	BCG
258	YLDP Basic Competency Culture Compass - Navigating Change through Corporate Culture	14	7 Oct 24	October 07, 2024	8 Oct 24	October 08, 2024	Maxima
259	YLDP Basic Competency Financial Report & Credit Analysis	14	9 Oct 24	October 09, 2024	16 Oct 24	October 16, 2024	LPPI
260	YLDP Basic Competency Manajemen Risiko Penjaminan YLDP Basic Competency Guarantee Risk Management	14	23 Oct 24	October 23, 2024	24 Oct 24	October 24, 2024	Jamkrindo
261	YLDP Basic Competency Marketing & Selling Technique	14	25 Oct 24	October 25, 2024	26 Oct 24	October 26, 2024	LPPI
262	YLDP Basic Competency Rules Proficiency, Product Knowledge, & Business Process	14	19 Nov 24	November 19, 2024	21 Nov 24	November 21, 2024	Jamkrindo
263	YLDP Branch Experience	14	9 Dec 24	December 09, 2024	7 Mar 25	March 07, 2025	Jamkrindo
264	YLDP Business Perspective	14	28 Oct 24	October 28, 2024	1 Nov 24	November 01, 2024	PPM

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development in 2024

No	Topik Pelatihan Training Topics	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Mulai Start Date		Tanggal Selesai Finished Date		Penyelenggara Organizer
265	YLDP Character Building Mindset Shifting - Shaping Tomorrow's Resilient Leaders through Character Building	14	1 Oct 24	October 01, 2024	4 Oct 24	October 04, 2024	Markplus
266	YLDP Digital Mindset Cybersecurity	14	18 Nov 24	November 18, 2024	18 Nov 24	November 18, 2024	Jamkrindo
267	YLDP Digital Mindset Digital Mindset & Data Analytics	14	11 Nov 24	November 11, 2024	15 Nov 24	November 15, 2024	Dibimbing
268	YLDP Innovation Bootcamp	14	22 Nov 24	November 22, 2024	27 Nov 24	November 27, 2024	Metranet
269	YLDP Personal Appearance	14	4 Nov 24	November 04, 2024	6 Nov 24	November 06, 2024	Markplus
270	YLDP Self Leadership	14	7 Nov 24	November 07, 2024	8 Nov 24	November 08, 2024	Josh Lie

Biaya Pengembangan Kompetensi

Secara keseluruhan, anggaran untuk Pembelajaran dan Pengembangan SDM yang telah digunakan Jamkrindo hingga Desember 2024 mencapai Rp36,6 miliar atau 121% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 30,3 miliar.

Competency Development Costs

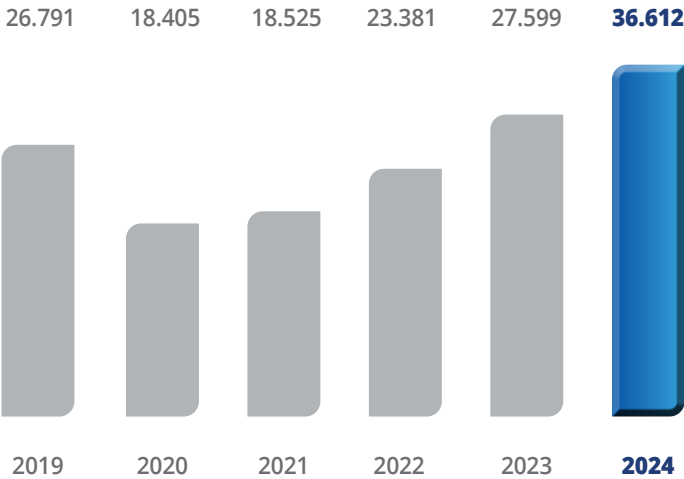
Overall, the budget for HC Learning and Development that Jamkrindo has used until December 2024 reached IDR 36.6 billion or 121% of the total budget set at IDR 30.3 billion.

	Realisasi 2024 (Rp-juta) 2024 Realization (IDR-million)	Anggaran 2024 (Rp-juta) 2024 Budget (IDR-million)	Realisasi 2023 (Rp-juta) 2023 Realization (IDR-million)	Realisasi 2024 terhadap Anggaran 2024 2024 Realization in comparison to 2024 Budget (%)	Realisasi 2024 terhadap Realisasi 2023 2024 Realization in comparison to 2023 Realization (%)
	(1)	(2)	(3)	(1:2)	(1:3)
Biaya Pengembangan Kompetensi Competency Development Costs	36.312	30.355	27.599	121%	133%

Berdasarkan data realisasi anggaran Pembelajaran dan Pengembangan SDM dari tahun 2019 hingga 2024, terdapat peningkatan anggaran sebesar 16,29% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Adapun total biaya pengembangan kompetensi karyawan dapat dilihat pada grafik berikut:

Based on the data on the realization of the HC Learning and Development budget from 2019 to 2024, there was a budget increase of 16.29% from 2023 to 2024. The total cost of employee competency development is presented in the following graph:

Grafik Realisasi Anggaran Pembelajaran dan Pengembangan SDM
Realization Chart of HC Learning and Development Budget



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Struktur Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N nomor 07 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran dasar PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) tanggal 19 Oktober 2022, dijelaskan bahwa pemegang saham Jamkrindo adalah sebagai berikut:

1. Saham Seri A sebanyak 1 (satu) lembar milik Negara Republik Indonesia; dan
2. Saham Seri B sebanyak 10.638.732 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

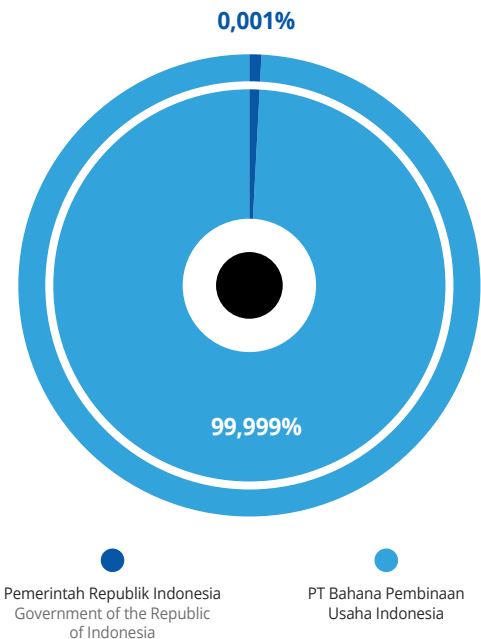
Structure of Shareholders

Based on the Deed of Notary by Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N number 07 dated October 07, 2022 concerning the Amendments to the Articles of Association of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dated October 19, 2022, the shareholders of Jamkrindo consists of:

1. Series A Shares as much as 1 (one) share owned by the Republic of Indonesia; and
2. Series B shares amounting to 10,638,732 (ten million six hundred thirty-eight thousand seven hundred thirty-two) shares owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid-up Capital (IDR)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1	1.365.160	0,000012832%
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	10.638.732	10.638.732.000.000	99,99998717%
Jumlah Total	10.638.733	10.638.733.000.000	100,00%

Komposisi Pemegang Saham Jamkrindo per 31 Desember 2024
Composition of Shareholders of Jamkrindo as of December 31, 2024



Informasi tentang Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Kelompok Pemegang Saham Masing-Masing di Bawah 5 (Lima) Persen

Hingga 31 Desember 2024, Jamkrindo belum menerapkan kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*) maupun Program Kepemilikan Saham Manajemen (*Management Stock Ownership Program/MSOP*). Selain itu, perusahaan juga belum melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang dapat membuka kesempatan bagi publik untuk memiliki saham Perusahaan. Dengan demikian, seluruh kepemilikan saham Perusahaan hanya sesuai dengan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, tanpa ada pejabat atau karyawan yang memiliki saham di perusahaan.

Information Regarding Share Ownership by Management and Shareholder Groups of Less than 5 (Five) Percent

As of December 31, 2024, Jamkrindo has not implemented Employee Stock Ownership Program (ESOP) or Management Stock Ownership Program (MSOP) policies. Likewise, the Company has not conducted an Initial Public Offering (IPO) which could open up opportunities for the public to own the Company's shares. Thus, all of the Company's shareholdings are as described above, with no officers or employees owning shares in the company.

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali hingga Entitas Pemilik Akhir

Information Regarding Majority/Controlling Shareholders as well as Ultimate Owner Entities

"Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham akhir dari Jamkrindo dengan kepemilikan sebesar 100%, yang terdiri dari kepemilikan langsung sebesar 0,000012832% dan sisanya, yaitu 99,99998717%, dimiliki secara tidak langsung melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)."

"The Government of the Republic of Indonesia is the ultimate shareholder of Jamkrindo with 100% ownership, consisting of direct ownership of 0.000012832% and the remaining 99.99998717% indirect ownership through PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)."

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, serta Akta Perubahan Anggaran Dasar nomor 07 tanggal 7 Oktober 2022 mengenai perubahan anggaran dasar PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) tertanggal 19 Oktober 2022, Jamkrindo secara resmi menjadi anak perusahaan dari holding Asuransi dan Penjaminan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI). Dengan demikian, BPUI bertindak sebagai entitas induk Jamkrindo.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; kuasa pemegang saham utama atau pengendali perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, Kementerian BUMN bertindak sebagai pemegang saham utama dan pengendali perusahaan sekaligus entitas pemilik akhir PT Jamkrindo.

As described above, based on Government Regulation No. 20 of 2020 issued on March 16, 2020 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, as well as Deed of Amendment to Articles of Association number 07 dated October 7, 2022 concerning amendments to the articles of association of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dated October 19, 2022, Jamkrindo officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee holding company PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI). Thus, BPUI acts as Jamkrindo's parent entity.

In accordance with Government Regulation No. 41 of 2003 concerning the Delegation of the Position, Duties, and Authority of the Minister of Finance to the Limited Liability Company (Persero), Public Company (PERUM), and Service Company (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises along with the State Gazette of the Republic of Indonesia; the power of the majority/controlling shareholder of the Company is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs). Therefore, the Ministry of SOEs acts as the majority/controlling shareholder of the Company as well as the ultimate owner entity of PT Jamkrindo.

Entitas Induk Parent Entity		
Nama Name	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Bentuk dan Status Badan Usaha Form and Status of Business Entity	:	Perseroan Terbatas (PT); Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Limited Liability Company (PT); State-Owned Enterprise (SOE)
Entitas Induk Parent Entity		
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	:	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional. Government Regulation No. 18 of 1973 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia for The Establishment of The Company in the National Private Business Development Sector as amended by Government Regulation No. 15 of 2020 concerning the Amendment to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the Field of National Private Business Development.
Tanggal Pendirian Date of Establishment	:	17 April 1973 April 17, 1973
Bidang Usaha Line of Business	:	Bidang asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasehat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya termasuk pada usaha pengelolaan gedung perkantoran. Insurance, guarantees, venture capital, securities, investment managers, investment advisors, financial consultants, and management consultants, as well as other financial service businesses which includes office building management business.
Kepemilikan Ownership	:	Pemerintah Republik Indonesia 100,00% Government of the Republic of Indonesia 100.00%
Modal Dasar Authorized Capital	:	Rp240.000.000.000.000 IDR 240.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital	:	Rp90.163.537.000.000 IDR 90.163.537.000.000
Alamat Address	:	Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT. 5/RW. 3, Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor Jl. General Sudirman Kav. 58 RT. 5/RW. 3, Senayan, Kebayoran Baru South Jakarta City, DKI Jakarta 12190
Telepon Phone	:	(+62 21) 50890929
Email Email	:	cs@ifg.id
Situs Web Website	:	https://ifg.id
Manajemen Management	:	- Dewan Komisaris - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Fauzi Ichsan - Komisaris Independen, Hotbonar Sinaga - Komisaris, Masyita Crystallin - Komisaris, Sumiyati - Komisaris, Nasrudin - Komisaris, Wahyu Setyawan - Direksi - Direktur Utama, Hexana Tri Sasongko - Wakil Direktur Utama, Haru Koesmahargyo - Direktur SDM, Rizal Ariansyah - Direktur Teknik selaku Plt. Direktur Bisnis, Rianto Ahmadi - Direktur Keuangan, Heru Handayanto - Board of Commissioners - President Commissioner and concurrent Independent Commissioner, Fauzi Ichsan - Independent Commissioner, Hotbonar Sinaga - Commissioner, Masyita Crystallin - Commissioner, Sumiyati - Commissioner, Nasrudin - Commissioner, Wahyu Setyawan - Board of Directors - President Director, Hexana Tri Sasongko - Vice President Director, Haru Koesmahargyo - Director of Human Capital, Rizal Ariansyah - Technical Director as Acting Director of Business, Rianto Ahmadi - Director of Finance, Heru Handayanto

Pemegang Saham Utama/Pengendali sekaligus Entitas Pemilik Akhir Majority/Controlling Shareholder as well as Ultimate Owner Entity		
Pemerintah Republik Indonesia/Kepresidenan Government of the Republic of Indonesia/Presidency	Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No. 3 RT. 2/RW. 3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Indonesia	State Palace Jl. Medan Merdeka Utara No. 3 RT. 2/RW. 3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Central Jakarta City DKI Jakarta 10110, Indonesia
	Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 3845627 www.setneg.go.id	Office of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Central Jakarta 10110 DKI Jakarta, Indonesia Phone. +62 21 3845627 www.setneg.go.id
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs)	Kantor Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 www.bumn.go.id	Office of the Ministry of SOEs Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Central Jakarta 10110 DKI Jakarta, Indonesia Tel. +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 www.bumn.go.id

STRUCTURE OF BUSINESS GROUPS

STRUCTURE OF BUSINESS GROUPS



Negara Republik Indonesia
Republic of Indonesia

100% →



PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
(Persero)

0,01% →



A member of **IFG**

← 99,99%



PT Jamkrindo Syariah



Entitas Pemilik Akhir
Ultimate Entity



Entitas Induk
Parent Entity



Entitas Anak
Subsidiaries Entity

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI/JOINT VENTURE (JV)/ SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES/JOINT VENTURE (JV)/SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

Hingga 31 Desember 2024, Jamkrindo memiliki satu entitas anak perusahaan, yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar), yang berfokus pada penyediaan jasa penjaminan syariah.

As of December 31, 2024, Jamkrindo has one subsidiary, which is PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar), which focuses on providing sharia guarantee services.

Entitas Anak Subsidiary	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Year of Operation	Kepemilikan Saham Shareholding (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (IDR-million)		Status Operasi Operation Status
					2024	2023	2024	2023	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Services	Jakarta	2014	2014	99,929%	99,929%	2.408.935	2452095	Beroperasi In-Operation

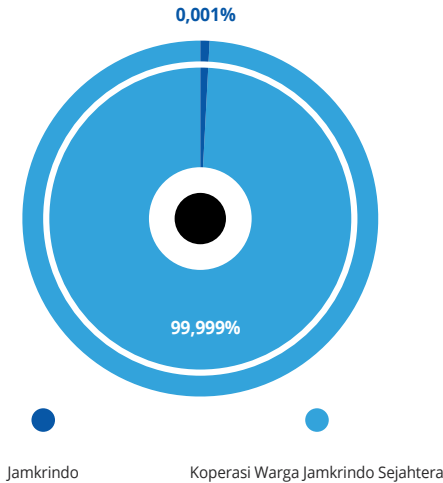
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar)



PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No. 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan hAm Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan hAm No. AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014, kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung *tagline* "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, Responsif, dan Inovatif". Perusahaan memiliki 99,929% saham Jamsyar, sementara sisanya sebesar 0,0710% dimiliki oleh Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") was established on September 16, 2014 and obtained its operational license on November 7, 2014. Jamsyar was established through Notarial Deed No. 68 by Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014 which was registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-26462.40.10.2014 concerning the Ratification of the Establishment of Limited Liability Company PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dated September 24, 2014, then obtained an operating license from the Financial Services Authority (OJK) through letter No. KEP-134/d.05/2014 dated November 7, 2014 concerning the Granting of a Sharia Guarantee Company Business License to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar is engaged in the business of Sharia Guarantee Service Business, with the tagline "Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative". The Company owns 99.929% of Jamsyar shares, while the remaining 0.0710% is owned by Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

Kepemilikan Jamsyar
 Shareholding of Jamsyar



	2024 (Rp-juta) 2024 (IDR-million)	2023 (Rp-juta) 2023 (IDR-million)
Pendapatan Income	254.185	333437
Beban Usaha Operating Expenses	200.838	128258
Laba Bersih Net Profit	54.105	33889
Laba Komprehensif Comprehensive Profit	51.390	48296
Aset Assets	2.408.935	2452095
Liabilitas Liabilities	1.163.425	1257974
Ekuitas Equity	1.245.509	1194121

Manajemen Kunci Jamsyar per 31 Desember 2024
 Key Management of Jamsyar as of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Independen Independent Commissioner	Edy Utomo
Komisaris Commissioner	Alie Basya Syamsudin
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Hari Purnomo
Direktur Operasional & Plt. Direktur Keuangan, SDM dan Umum Director of Operations, and Concurrent Director of Finance, Human Capital, and General Affairs	Loesdarwanto
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.
Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	Ir. H. Muhammad Syakir Sula, A.A.I.J, F.I.I.S.
Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	Dr. H. Abdul Aziem, S.H., M.H., M.Pd.

KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM DAN PENERBITAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND OTHER SECURITIES ISSUANCE

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan tidak melakukan perdagangan saham kepada publik, baik di bursa efek yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, dan tidak melakukan pencatatan saham di bursa efek manapun. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait dengan perdagangan saham, termasuk tahun penerbitan saham, jumlah saham yang diterbitkan, nilai nominal saham, serta harga penawaran saham pada setiap langkah tindakan korporasi (*corporate action*). Selain itu, tidak terdapat data mengenai jumlah saham yang tercatat setelah masing-masing *corporate action*, maupun nama bursa tempat saham tersebut tercatat.

Perusahaan juga tidak menerbitkan efek lainnya sepanjang tahun 2024. Dengan demikian, tidak ada informasi terkait dengan nama efek lainnya, tahun penerbitan efek tersebut, tingkat bunga atau imbalan yang ditawarkan, serta tanggal jatuh tempo efek lainnya. Informasi terkait nilai penawaran efek lainnya, nama bursa tempat efek tersebut tercatat, dan peringkat efek juga tidak tersedia.

Throughout 2024, the Company did not trade shares to the public, either on stock exchanges in Indonesia or abroad, and did not list its shares on any stock exchange. Therefore, there is no information related to share trading, including the year of share issuance, number of shares issued, par value of shares, and share offering price at each *corporate action*. Furthermore, there is no data on the number of shares listed after each *corporate action*, nor the name of the exchange where the shares are listed.

The Company also have not issued any other securities during 2024. As such, there is no information relating to the name of the other securities, the year of issue of the securities, the interest rate or reward offered, and the maturity date of the other securities. Information related to the offering value of other securities, the name of the exchange where the securities are listed, and the rating of the securities is also not available.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

Nama dan Alamat Kontak Lengkap Full Name and Address		Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Services	Biaya Cost	Periode Penugasan Assignment Period
Pemeringkat Perusahaan Rating Agency	PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Equity Tower Lantai 30, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Financial Rating	Rp. 125.000.000 (belum termasuk pajak)	15 April 2025 s.d. 15 April 2026
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (KAP AAJ). Plaza Asia Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190	Audit	Rp. 972.400.000 (belum termasuk pajak)	31 Desember 2024 s.d. 30 April 2025
Konsultan Aktuaria Actuarial Consultant	-	-	-	-
Konsultan Hukum Legal Consultant	ANPN Law Firm Attorneys At Law Menara Cakrawala 12 Th Floor Unit 1205 A Jl. M. H. Thamrin No. 9 Jakarta Pusat 10340	Pelayanan Jasa Hukum Rutin	Rp30.000.000/bulan (belum termasuk pajak)	31 Mei 2024 s.d. Tanggal 31 Mei 2025
	M&D Law Office. Centennial Tower Lantai 37, Jalan Gatot Subroto Kav. 24 – 25 Kuningan, Jakarta Selatan 12950	Pelayanan Jasa Hukum Rutin	Rp25.000.000/bulan (belum termasuk pajak)	22 Desember 2024 s.d 22 Desember 2025
Jasa Penilaian Rating Services	-	-	-	-

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan di tahun 2024

Awards in 2024



Marketeers Editor's Choice Award 2024:
Digital Guarantee Program for SME of the Year (J@de)



Jawa Pos 7 Most Popular Brand of the Year 2024 :
Kategori Keuangan - Jasa Keuangan Lainnya non Perbankan
Jawa Pos. 7 Most Popular Brand of 2024:
Finance Category - Other Non-Banking Financial Services



BCOMMS 2024 : Kategori Sustainability Community
Involvement and Development (CID) Kesehatan
BCOMMS 2024 : Category of Sustainability Community
Involvement and Development (CID) in Healthcare



GRC & Performance Excellence Award 2024 : The Best GRC
for Corporate Finance 2024 (Guarantee Services)



GRC & Performance Excellence Award 2024 : The Best GRC for Corporate Risk Management 2024 (Guarantee Services)



IMACO 2024 : Outstanding Financial Accessibility Expansion through Strategic Collaboration kategori Credit Guarantee
IMACO 2024 : Credit Guarantee Category - Outstanding Financial Accessibility Expansion through Strategic Collaboration



Indonesia Most Reputable Companies 2024 : kategori Guarantee Company dengan predikat Very Good
Indonesia Most Reputable Companies 2024 : Guarantee Company Category with a predicate of Very Good



Markplus Institute Learning Excellence Award : Excellence in Learning Experience

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2024

Certifications Still Valid in 2024

Tanggal Date	Deskripsi Description	Berlaku Hingga Valid Until	Diberikan oleh Organizer
29 April 2019 April 29, 201	Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001 : 2013 Information Security Management System SNI ISO 27001: 2013	28 April 2025 April 28, 2025	BSI (British Standards Institution)
28 Januari 2023 January 28, 2023	Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi SNI ISO 20000 : 2018 Information Technology Service Management System SNI ISO 20000: 2018	27 Januari 2026 January 27, 2026	BSI (British Standards Institution)
29 Agustus 2023 August 29, 2023	Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System	29 Agustus 2023 - 28 Agustus 2026 August 29, 2023 - August 28, 2026	Intertek SAI Global
1 November 2023 November 1, 2023	Business Continuity Management System SNI ISO 22301	1 November 2024 November 1, 2024	BSI Group
7 Mei 2024 May 7, 2024	Sertifikat Pemeringkatan dengan peringkat idA+/Stable (Single A Plus; Stable Outlook) Atas PT Jamkrindo Syariah Certificate of Rating with idA+/Stable (Single A Plus; Stable Outlook) on PT Jamkrindo Syariah	1 Mei 2025 May 1, 2025	Pefindo

KEANGGOTAAN ASOSIASI

ASSOCIATION MEMBERSHIP

Untuk memperkuat kinerja bisnisnya, Jamkrindo telah bergabung dengan beberapa organisasi sebagai anggota, sebagai berikut:

To strengthen its business performance, Jamkrindo has joined several organizations as a member, in the following organizations:

Nama Organisasi/Asosiasi Name of Organization/Association	Ruang Lingkup Scope	Posisi Keikutsertaan Position
ASIPPINDO (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia) ASIPPINDO (Association of Indonesian Guarantee Companies)	Nasional National	Anggota Member



DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK DAN KANTOR CABANG/KANTOR PERWAKILAN

LIST OF ADDRESSES OF SUBSIDIARIES AND
BRANCHES/REPRESENTATIVE OFFICES



 **Kantor Cabang**
Branch Offices

 **Kanwil I Medan**
Reg. Offices I Medan

 **Kanwil IV Bandung**
Reg. Offices IV Bandung

 **Kanwil VII Denpasar**
Reg. Offices VII Denpasar

 **Kanwil II Palembang**
Reg. Offices II Palembang

 **Kanwil V Semarang**
Reg. Offices V Semarang

 **Kanwil VIII Banjarmasin**
Reg. Offices VIII Banjarmasin

 **Kanwil III Jakarta**
Reg. Offices III Jakarta

 **Kanwil VI Surabaya**
Reg. Offices VI Surabaya

 **Kanwil IX Makassar**
Reg. Offices IX Makassar



Kantor Pusat PT Jamkrindo Head Office of PT Jamkrindo	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia Telp: +62 21 6540335 Fax: +62 21 6540344, 6540348 Website: www.jamkrindo.co.id Email: contact@jamkrindo.com	Jamkrindo Building Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Central Jakarta 10610, Indonesia Phone: +62 21 6540335 Fax: +62 21 6540344, 6540348 Website: www.jamkrindo.co.id Email: contact@jamkrindo.com
Entitas Anak Subsidiary		
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Gedung Jamsyar Jl. Letjend Suprpto No.20 Blok A II/4 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat 10510 Telp: +62 21 6540386 Fax: +62 21 6540389 Website: www.jamkrindosyariah.com Email: info@jamkrindosyariah.com	Jamsyar Building Jl. Letjend Suprpto No.20 Blok A II/4 Cempaka Putih Timur Central Jakarta 10510 Phone: +62 21 6540386 Fax: +62 21 6540389 Website: www.jamkrindosyariah.com Email: info@jamkrindosyariah.com

Kantor Wilayah
Regional Offices

Kanwil Regional Office	Alamat Address
I Medan	Jl. Ir. H. Juanda No. 48 Medan-20111; Telp: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192 Jl. Ir. H. Juanda No. 48 Medan-20111; Phone: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192
II Palembang	Jl. H Residen Abdul Rozak No.188-189, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, 30114, Sumatera Selatan; Telp: 0711-5261019 Jl. H Residen Abdul Rozak No.188-189, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, 30114, South Sumatera; Phone: 0711-5261019
III Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru-Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp (021) 6540335 Fax (021) 6540387 Jamkrindo Building Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru-Bandar Kemayoran, Central Jakarta 10610, DKI Jakarta; Phone (021) 6540335 Fax (021) 6540387
IV Bandung	Jl. Soekarno Hatta No 774 RT 06 RW 07 Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung 40293 ; Telp : (022) 87357777 Fax: (022) 87357777 Jl. Soekarno Hatta No. 774 RT 06 RW 07 Cisaranten Endah, Arcamanik Subdistrict, Bandung City 40293; Phone: (022) 87357777 Fax: (022) 87357777
V Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang, Jawa Tengah; Telp: 024-7614136 Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang, Central Java; Phone: 024-7614136
VI Surabaya	Gedung Jamkrindo, Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2-3 Surabaya; Telp: (031) 8673827 Jamkrindo Building, Jl. Raya Juanda Airport Km. 2-3 Surabaya; Phone: (031) 8673827
VII Denpasar	Jl. Diponegoro no. 196, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, Bali 80119; Telp: (0361) 286854; Fax: (0361) 286267 Jl. Diponegoro no. 196, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, Bali 80119; Phone: (0361) 286854; Fax: (0361) 286267
VIII Banjarmasin	Jl. A.Yani Km 3,5 No.210B, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin 70234; Telp: (0511) 6744706; Fax: (0511) 3273435 Jl. A.Yani Km 3,5 No.210B, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin City 70234; Phone: (0511) 6744706; Fax: (0511) 3273435
IX Makassar	Jl. Lamaddukelleng No.25B, Losari, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113 Telp: 0411-875836 Fax: (0411) 8099005 Jl. Lamaddukelleng No.25B, Losari, Kec. Ujung Pandang, Makassar City, South Sulawesi 90113 Phone: 0411-875836 Fax: (0411) 8099005

Kantor Cabang Khusus
Special Branch Office

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	Alamat Address
Jakarta Special Branch Office	Lippo Kuningan Building Lt. 10, Jl. Haji R. Rasuna Said Kav. B12 RT 6 RW 7 Karet Kuningan South Jakarta 12920

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
Medan	1 Medan	Jl. Sei Serayu No. 40 Medan, Sumatera Utara; Telp: (061) 4152827/4155767 Fax: (061) 4156775 Jl. Sei Serayu No. 40 Medan, North Sumatra; Phone: (061) 4152827/4155767 Fax: (061) 4156775
	2 Pekanbaru	Jl. Jendral Sudirman No. 349, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru Telp : 0761-854311 Jl. Jendral Sudirman No. 349, Sumahilang Subdistrict, Pekanbaru District, Pekanbaru City Phone: 0761-854311
	3 Padang	Jl. Rasuna Said No. 89, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat; Telp: 0751-4670006 Jl. Rasuna Said No. 89, Rimbo Kaluang Subdistrict, West Padang District; Phone: 0751-4670006
	4 Tanjung Pinang	Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji NO. 6 Telp : (0771) 316919 Pamedan Shophouse Complex Jl. Raja Ali Haji No. 6 Phone: (0771) 316919
	5 Batam	Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No.9 Jl Raja Ali Haji Fisabilillah, Batam Center, Batam Telp (0778) 7495993 Fax (0778)469019 Mahkota Raya Shophouse Complex Block G No.9 Jl Raja Ali Haji Fisabilillah, Batam Center, Batam Phone (0778) 7495993 Fax (0778)469019
	6 Balige	Jl. Patuan Nagari No. 30, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara Telp: 0632-8002002 Jl. Patuan Nagari No. 30, Balige, Kabupaten Toba, North Sumatera Phone: 0632-8002002
Palembang	7 Palembang	Jl. Residen Abdul Rozak No. 188-189 Kelurahan Kalidoni Palembang; Telp: 0711-5265123 Jl. Resident Abdul Rozak No. 188-189 Kalidoni Village, Palembang; 0711-5265123
	8 Jambi	Jln. Slamet Riyadi No. 77B, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi 36122 Telp: 0741-5781870 Jln. Slamet Riyadi No. 77B, Sungai Putri Subdistrict, Danau Sipin District, Jambi City 36122 Phone: 0741-5781870
	9 Bengkulu	Jl. Jendral. Sudirman No. 1125, Ps. Melintang, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38115; Telp: 0736-8050011 Jl. Jendral. Sudirman No. 1125, Ps. Melintang, Kec. Tlk. Segara, Bengkulu City, Bengkulu 38115; Phone: 0736-8050011
	10 Lampung	Jl. Jend Sudirman No.128 RT.001 RW 001, Rawa Laut, Enggal. Bandar Lampung; Telp: (0721) 778511 Fax: (0721) 778513 Jl. Jend Sudirman No.128 RT.001 RW 001, Rawa Laut, Enggal. Bandar Lampung; Phone: (0721) 778511 Fax: (0721) 778513
	11 Pangkal Pinang	Jl. A Yani No. 11 H Pangkal Pinang-33136; Telp: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816 Jl. A Yani No. 11 H Pangkal Pinang-33136; Phone: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816
Jakarta	12 Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru-Bandar Kemayoran Jakarta Pusat-10610 Telp: (021) 6540409 Jamkrindo Building Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru-Bandar Kemayoran Central Jakarta-10610 Phone: (021) 6540409
	13 Pontianak	Jl. Moch. Solor No 4. RT/RW 004/007, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78121; Telp: (0561) 749095, Fax: (0561) 7461468 Jl. Moch. Solor No. 4. RT/RW 004/007, Akcaya Village, South Pontianak, West Kalimantan 78121; Phone: (0561) 749095, Fax: (0561) 7461468
	14 Serang	Ruko Secang Blok A11-12, Jl. KH. Abdul Latif No. 8 Cimuncang, Kota Serang Secang Shophouse Blok A11-12, Jl. KH. Abdul Latif No. 8 Cimuncang, Serang City
	15 Tangerang	Foresta Business Loft 1, Jl. BSD Raya Utama No.5, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15339 Foresta Business Loft 1, Jl. BSD Raya Utama No.5, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Tangerang Regency, Banten 15339

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office		Alamat Address
Bandung	16	Bandung	Jl. Soekarno Hatta No 774 RT 06 RW 07 Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung 40293 Telp: 022-87359999 Jl. Soekarno Hatta No. 774 RT 06 RW 07 Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Bandung City 40293 Phone: 022-87359999
	17	Cirebon	Komplek Cirebon Super Block Mall (CSB) Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 26 Office Park Kav. No.15 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon 4513; Telp: (0231) 8336851 Fax: (0231) 8336850 Cirebon Super Block Mall (CSB) Complex Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 26 Office Park Kav. No.15 Kel. Pekiringan Kec. Kesamb, Cirebon City 45131; Phone: (0231) 8336851 Fax: (0231) 8336850
	18	Purwakarta	Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No.6 RT/RW 01/01 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa Barat; Telp: (0264) 8304002 Fax: (0264) 8304002 Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No.6 RT/RW 01/01 Purwamekar Village, Purwakarta Subdistrict, Purwakarta Regency, West Java; Phone: (0264) 8304002 Fax: (0264) 8304002
	19	Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No.90 Rt.05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi 43113; Telp: (0266) 6223811 Fax: (022) 6223868 Bounty Shophouse Complex Jl. Siliwangi Blok E No.90 Rt.05/02 Cikole Village, Cikole Subdistrict, Sukabumi City 43113; Phone: (0266) 6223811 Fax: (022) 6223868
	20	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 52 Kel. Empangsari, Kec.Tawang, Kota Tasikmalaya Telp : (0265) 235 4445 Jl. Sutisna Senjaya No. 52 Empangsari Village, Tawang Subdistrict, Tasikmalaya City Phone: (0265) 235 4445
Semarang	21	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang; Telp: (024) 7614136/ 7610129 Fax: (024) 7614138 Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang; Phone: (024) 7614136/ 7610129 Fax: (024) 7614138
	22	Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.161 A, Tegalrejo Kota Yogyakarta-55244; Telp: (0274) 5012288/5012323 Fax: (0274) 5012545 Jl. HOS Cokroaminoto No.161 A, Tegalrejo, Yogyakarta-55244; Phone: (0274) 5012288/5012323 Fax: (0274) 5012545
	23	Solo	Jl. Brigjend Slamet Riyadi Nomor 333, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, 57142 Telp: 0271-7471299 Jl. Brigjend Slamet Riyadi Nomor 333, Purwosari Subdistrict, Laweyan District, Surakarta City, 57142 Phone: 0271-7471299
	24	Purwokerto	Jl. Jenderal Sudirman No. 196 B, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas Jawa Tengah 53115 Telp: (0281) 6572555 Fax: (0281) 6574755 Jl. Jenderal Sudirman No. 196 B, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas Central Java 53115; Phone: (0281) 6572555 Fax: (0281) 6574755
	25	Kudus	Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12-14 Kel. Nganguk, Kec Kota Kudus. Jawa Tengah-59312; Telp: (0291) 430757 Fax: (0291) 430758 Jl. Jend. Sudirman, Sudirman Square Shophouse No. 12-14 Kel. Nganguk, Kudus City District. Central Java-59312; Phone: (0291) 430757 Fax: (0291) 430758
	26	Tegal	Jl. Gajah Mada No.21, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah 52121; Telp: 0283-4539777 Jl. Gajah Mada No.21, Mintaragen Village, Tegal Timur Subdistrict, Tegal City, Central Java Province 52121; Phone: 0283-4539777
Surabaya	27	Surabaya	Jl. Mayjend Sungkono No.38 RT 01 RW 01, Kel. Pakis, Kec. Sawahan, Kota Surabaya 60225, Telp: (031) 35934071 Jl. Mayjend Sungkono No.38 RT 01 RW 01, Kel. Pakis, Kec. Sawahan, Surabaya City 60225, Phone: (031) 35934071
	28	Kediri	Jl. Kilisuci No.85 Kota Kediri; Telp: (0354) 7418826 Fax: (0354) 680881 Jl. Kilisuci No.85 Kediri City; Phone: (0354) 7418826 Fax: (0354) 680881
	29	Banyuwangi	Jl. Brawijaya No. 08 Kel. Sobo Kec. Banyuwangi Kab, Banyuwangi, Jawa Timur; Telp: (0333) 418140 Fax: (0333) 425804 Jl. Brawijaya No. 08 Kel. Sobo Kec. Banyuwangi Regency, Banyuwangi, East Java; Phone: (0333) 418140 Fax: (0333) 425804
	30	Malang	Jl. Semeru No.66, Kel. Oro-oro Dowo, Kec Klojen. Kota Malang 65112 Tlp (0341) 3018571 Fax (0341) 3019116 Jl. Semeru No.66, Kel. Oro-oro Dowo, Klojen Subdistrict. Malang City 65112 Phone (0341) 3018571 Fax (0341) 3019116
	31	Madiun	Jl. Thamrin No. 38, Madiun-63117; Telp: (0351) 4472250 Fax: (0351) 4472249 Jl. Thamrin No. 38, Madiun-63117; Phone: (0351) 4472250 Fax: (0351) 4472249

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office		Alamat Address
Denpasar	32	Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76 Denpasar Telp : (0361) 286854 Jl. Hang Tuah No. 76, Denpasar, Phone: (0361) 286854
	33	Mataram	Jl. Sriwijaya Ruko 4 No. 179, Mataram; Telp: (0370) 644573/ 644747 Fax: (0370) 644572 Jl. Sriwijaya Ruko 4 No. 179, Mataram; Phone: (0370) 644573/ 644747 Fax: (0370) 644572
	34	Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82 kec. Sumbawa Besar NTB, Telp : (0371) 24524 Jl. Hasanuddin No. 82 Sumbawa Besar Subdistrict, WNT (West Nusa Tenggara), Phone: (0371) 24524
	35	Kupang	Jl. Jenderal Soeharto No.110 Blok.A, RT 20, RW 008, Kel Naikolan, Kec Maulafa, Kota Kupang-NTT 85111; Telp: 085339200726 Jl. General Soeharto No.110 Blok.A, RT 20, RW 008, Naikolan Village, Maulafa Subdistrict, Kupang City-ENT (East Nusa Tenggara) 85111; Phone: 085339200726
Banjarmasin	36	Samarinda	Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117; Telp: (0541) 747608 Fax: (0541) 206578 Jl. A Yani No. 37 Sungai Pinang Subdistrict, Sungai Pinang Dalam Village, Samarinda, East Kalimantan 75117; Phone: (0541) 747608 Fax: (0541) 206578
	37	Banjarmasin	Jl. A. Yani Km. 2,2 No. 137 Kel. Kuripan Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin 70236; Telp: (0511) 3273345 Fax: (0511) 3273435 Jl. A. Yani Km. 2,2 No. 137 Kel. Kuripan Kec Banjarmasin Timur, Banjarmasin City 70236; Phone: (0511) 3273345 Fax: (0511) 3273435
	38	Palangkaraya	Jl. Yos Sudarso No. 6 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 73112 Telp/fax : 0536-4264369 Jl. Yos Sudarso No. 6 Palangkaraya City, Central Kalimantan Province 73112 Phone/fax : 0536-4264369
	39	Tarakan	Jl. Jend Sudirman RT.04 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan-77113; Telp: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494 Jl. Jend Sudirman RT.04 Pamusian Village, Tarakan Tengah Subdistrict, Tarakan-77113; Phone: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494
	40	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.11. Balikpapan-76114; Telp: (0542) 8504032 Fax: (0542) 8504033 Jl. Jend. Sudirman No.11. Balikpapan-76114; Phone: (0542) 8504032 Fax: (0542) 8504033
Makassar	41	Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Telp : (0411)873031 Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Phone: (0411)873031
	42	Gorontalo	Jl. Prof. Dr. H.B. Jassin Ruko No.3, Tomulabutao, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, Gorontalo 96139 Telp (0435) 828003 Fax: (0435) 828002 Jl. Prof. Dr. H.B. Jassin Ruko No.3, Tomulabutao, Dungingi District, Gorontalo City, Gorontalo 96139 Phone (0435) 828003 Fax: (0435) 828002
	43	Mamuju	Jl. Urip Sumoharjo No.55 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91515 Telp : 0426-2336666 Jl. Urip Sumoharjo No.55 Karema Village, Mamuju Subdistrict, West Sulawesi Province 91515 Phone : 0426-2336666
	44	Ambon	Jl Philip Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126; Telp: (0911) 351770 Jl Philip Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126; Phone: (0911) 351770
	45	Ternate	Jl. Kapitan Pattimura No.15, Stadion, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara 97722, Telp: 0921-3122793 Jl. Kapitan Pattimura No.15, Stadion, Central Ternate District, Ternate City, North Maluku 97722, Phone: 0921-3122793
	46	Jayapura	Jl Raya Abepura Entrop, Kec Jayapura Selatan Kelurahan Entrop, Kota Jayapura, Papua 99224, Telp/ Fax : 0967-5161140 Jl Raya Abepura Entrop, South Jayapura District, Entrop Village, Jayapura City, Papua 99224, Phone/ Fax : 0967-5161140
	47	Manokwari	Jl. Trikora, Wosi, Manokwari Papua Barat Telp : (0986)214184 Jl. Trikora, Wosi, Manokwari West Papua Phone: (0986)214184
	48	Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C Palu-Sulteng 94121 Telp : (0451) 4131812 Jl. Dewi Sartika No. 58 C Palu-Sulteng 94121 Phone: (0451) 4131812
	49	Kendari	Jl. Brigjend M. Yoenoes, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari 93461, Telp : 0401-3421928 Jl. Brigjend M. Yoenoes, Bende Subdistrict, Kadia District, Kendari City 93461, Phone: 0401-3421928
	50	Manado	Jl. Piere Tendean No.99, Boulevard, Kelurahan Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, Telp : (62-431) 865194/865198 Jl. Piere Tendean No.99, Boulevard, North Sario Subdistrict, Sario District, Manado City, North Sulawesi, Phone: (62-431) 865194/865198
	51	Pare-pare	Jl. Andi mappatola no 30 c parepare, sulawesi selatan Telp : 0421-2914592 Jl. Andi mappatola no 30 c parepare, south sulawesi, Phone: 0421-2914592
	52	Palopo	Jl. Sungai Rongkong Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan 91911; Telp: (0471) 23006 Fax: (0471) 326925 Jl. Sungai Rongkong Salobulo Subdistrict North Wara District Palopo City, South Sulawesi Province 91911; Phone: (0471) 23006 Fax: (0471) 326925
	53	Sorong	Jl. Basuki Rahmat KM 9 Sorong (Samping BLKI)-Papua Barat Telp: (0951)329081 Jl. Basuki Rahmat KM 9 Sorong (beside BLKI)- West Papua Phone: (0951)329081

Kantor Unit Pelayanan (KUP)

Service Unit Office (KUP) **Memperkokoh Fondasi Sebagai Preferensi Utama Aksesibilitas Finansial UMKM**
Strengthening the Foundation as the Preferred Financial Accessibility for MSMEs

Kanwil Regional Office	KUP KUP	Alamat Address
Medan	1 Dumai	Jl Jendral Sudirman No.391 Dumai Kota Telp: (0765) 439037 Jl Jendral Sudirman No.391 Dumai Kota Phone: (0765) 439037
	2 Rantau Prapat	Jl. Ahmad Yani No.169 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu; Telp: 0624-326333 Fax: 0624-326222 Jl. Ahmad Yani No.169 Kartini Subdistrict North Rantau District Labuhan Batu Regency; Phone: 0624-326333 Fax: 0624-326222
	3 Padangsidempuan	Jl. Serma Lion Kosong No. 1 (Komplek Ruko Grand Place Sudirman) Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara; Telp: 0634-3551008 Jl. Serma Lion Kosong No. 1 (Ruko Grand Place Sudirman Complex) Padangsidempuan City, North Sumatera ; Phone: 0634-3551008
Palembang	4 Lubuk Linggau	Jalan Yos Sudarso RT 001 No.366 Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan Telp : 0733 3281182 Jalan Yos Sudarso RT 001 No.366 Majapahit Village, Lubuk Linggau Timur 1 Subdistrict, South Sumatra Phone: 0733 3281182
Jakarta	5 Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor Telp : (0251) 7564211 Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor, Phone: (0251) 7564211
	6 Cibinong	Ruko Cibinong City Center Jalan Tegar Beriman 1 Blok A No. 29 Cibinong Kab Bogor Telp : (021) 29335250 Cibinong City Center Shophouse, Jalan Tegar Beriman 1 Blok A No. 29, Cibinong, Bogor Regency, Phone: (021) 29335250
	7 Bekasi	Ruko Perkantoran Jl.Jend A Yani Marga Jaya Bekasi Selatan 17148 Telp: (021) 82691292 Office Shophouse Jl.Jend A Yani Marga Jaya South Bekasi 17148 Phone: (021) 82691292
Bandung	8 Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi Telp/Fax : (022) 20661506/(022) 20661522 Jl. Amir Mahmud No. 572B-C RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi Phone/Fax: (022) 20661506/(022) 20661522
Semarang	9 Magelang	Jl. Sriwijaya No. 31 Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56111; Telp: (0293) 3201767 Fax: (0293) 3201770 Jl. Sriwijaya No. 31 North Rejowinangun, Central Magelang, Magelang City, Central Java 56111; Phone: (0293) 3201767 Fax: (0293) 3201770
	10 Cilacap	Jl Jend. Sudirman No 17, Cilacap, Telp: (0282) 531194/ 532010 Fax: (0282) 531115 Jl Jend. Sudirman No 17, Cilacap, Phone: (0282) 531194/ 532010 Fax: (0282) 531115
Surabaya	11 Surabaya Kota Surabaya City	Ruko Central Merr, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.360 B, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298 Telp (031) 87858114 Fax (031) 87858114 Central Merr Shophouse, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.360 B, Kedung Baruk, Rungkut District, Surabaya, East Java 60298 Phone (031) 87858114 Fax (031) 87858114
	12 Pamekasan	Jl. Jokotole No.62, Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69321, Telp : 0324-3510118 Jl. Jokotole No.62, East Barurambat, Pademawu District, Pamekasan Regency, East Java 69321, Phone: 0324-3510118
	13 Jember	Jl. KH Wahid Hasyim No. 12B, Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Jawa Timur Kode pos 68137 Telp & Fax : 0331-4431044 Jl. KH Wahid Hasyim No. 12B, Kepatihan Village, Kaliwates Subdistrict, Jember Regency, East Java, Postal code 68137 Phone & Fax: 0331-4431044
	14 Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.15, Bojonegoro-62111; Telp: (0353) 2898420 Fax: (0353) 2899525 Jl. WR. Supratman No.15, Bojonegoro-62111; Phone: (0353) 2898420 Fax: (0353) 2899525
Banjarmasin	15 Pangkalan Bun	Jl. Iskandar Kec.Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113 Jl. Iskandar Arut Selatan Subdistrict, West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan 74113
Makassar	16 Watampone	Jalan Ahmad Yani No 29 B Kel. Macanang, Kec. Tanete. Provinsi Sulawesi Selatan Telp :0481 2921375 Jalan Ahmad Yani No 29 B Macanang Village, Tanete Subdistrict. South Sulawesi Province, Phone: 0481 2921375
	17 Pekalongan	Jl. KH. Mansyur No. 64 B, Bendan Kergon, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119; Telp : 0285-8359006 Jl. KH. Mansyur No. 64 B, Bendan Kergon, West Pekalongan District, Pekalongan City, Central Java 51119; Phone: 0285-8359006

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE

Situs web menjadi salah satu media utama untuk memenuhi kebutuhan keterbukaan informasi yang diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat umum, sejalan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik. Perusahaan mengoperasikan situs web resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id, yang dirancang secara komunikatif dan dapat diakses secara terbuka. Situs ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

Situs resmi Perusahaan menyediakan berbagai informasi penting, termasuk profil umum Perusahaan, informasi khusus bagi pemodal atau investor seperti Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, serta data terkait Tata Kelola Perusahaan. Selain itu, situs web ini juga menyajikan informasi lainnya, seperti kegiatan Perusahaan, produk, dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Situs web Perusahaan telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, khususnya bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, dengan rincian sebagai berikut:

This Website is a means of fulfilling the information disclosure required by all stakeholders and the general public in accordance with the principles of transparency and openness of information to the public. The Company has an official website at www.jamkrindo.co.id, which is communicatively designed and openly accessible. This site aims to present complete and easy-to-understand information about the Company to a wide audience.

The Company's official website provides a variety of important information, which includes the Company's general profile, specialized information for financiers or investors such as Financial Statements and Annual Reports, as well as data related to Corporate Governance. In addition, this website also presents other information, such as the Company's activities, products, and services offered by the Company.

The Company's website has been designed to meet the information needs of the public, especially for shareholders and stakeholders, with the following details:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Shareholder information including the individual ultimate owner	V	https://www.jamkrindo.co.id/sejarah-perusahaan
Isi Kode Etik Code of Conduct	V	https://jamkrindo.co.id/code-of-conduct
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information regarding the General Meeting of Shareholders (GMS) shall at least include the agenda materials discussed at the GMS, summary of the minutes of the GMS, and important date information, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the invitation to the GMS, the date of the GMS, the date of release of the summary of the minutes of the GMS	X	n/a
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) Separate annual financial statements (last 5 years)	V	https://www.jamkrindo.co.id/dokumen/laporan_keuangan
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors	V	https://www.jamkrindo.co.id/manajemen
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	V	https://jamkrindo.co.id/board-manual

v = tersedia pada situs web Jamkrindo | x = belum tersedia pada situs web Jamkrindo
v = available on the jamkrindo website | x = not yet available on the jamkrindo website

04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Di tengah meningkatnya kompleksitas risiko penjaminan, Jamkrindo tetap konsisten menjalankan strategi berbasis mitigasi dan efisiensi. Keseimbangan antara ekspansi bisnis, penguatan manajemen risiko, dan pertumbuhan investasi menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan kinerja sepanjang tahun.

Amid rising complexity in guarantee risk, Jamkrindo remained consistent in executing mitigation- and efficiency-based strategies. The balance between business expansion, strengthened risk management, and investment growth served as the key to maintaining sustainable performance throughout the year.





TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

Analisis Ekonomi Global 2024

Sepanjang tahun 2024, pemulihan ekonomi global terus berlangsung secara bertahap di tengah berbagai tantangan struktural dan ketegangan geopolitik yang belum mereda. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2024 yang diterbitkan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai 3,0%, mencerminkan stabilisasi setelah periode penuh ketidakpastian pasca-pandemi.

Inflasi global mulai menunjukkan tren menurun seiring dengan normalisasi harga komoditas dan berlanjutnya kebijakan moneter ketat di banyak negara. Rata-rata inflasi tercatat sebesar 3,4% di negara maju dan 5,8% di negara berkembang, meskipun masih di atas target jangka menengah sebagian besar bank sentral. Harga energi yang lebih stabil dan perbaikan rantai pasok menjadi faktor utama meredanya tekanan inflasi.

Pasar keuangan global tetap diliputi volatilitas. Bank sentral utama, termasuk The Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa (ECB), mempertahankan suku bunga acuan pada level tinggi untuk menjaga kredibilitas pengendalian inflasi. Hal ini menyebabkan peningkatan imbal hasil obligasi dan penguatan dolar AS, yang berdampak pada meningkatnya beban pembiayaan eksternal bagi negara berkembang. Tekanan terhadap arus modal keluar serta pelemahan nilai tukar menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas keuangan global.

Pertumbuhan perdagangan internasional juga mengalami perlambatan, dengan volume perdagangan barang dan jasa global hanya meningkat sekitar 2,4%. Fragmentasi geopolitik, kebijakan proteksionis, serta realokasi rantai pasok ke negara-negara sekutu (*friendshoring*) menjadi faktor penghambat. Namun, negara berkembang di kawasan Asia, termasuk Indonesia, berpeluang untuk memanfaatkan dinamika ini sebagai basis produksi dan investasi baru.

Selain itu, perhatian global semakin tertuju pada isu transisi energi dan perubahan iklim. Investasi pada energi terbarukan meningkat signifikan, didorong oleh target net-zero emission dan agenda pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, fenomena cuaca ekstrem seperti El Niño juga memengaruhi produksi pangan dan harga komoditas, serta memperbesar risiko terhadap ketahanan pangan global.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi global pada 2024 berada dalam fase stabilisasi, namun tetap dibayangi oleh berbagai risiko, antara lain perlambatan ekonomi di negara maju, volatilitas sektor keuangan, konflik geopolitik, dan ketegangan perdagangan lintas kawasan.

2024 Global Economic Analysis

Throughout 2024, the global economic recovery continues to progress gradually amidst structural challenges and unrelieved geopolitical tensions. Based on the October 2024 *World Economic Outlook* (WEO) published by the International Monetary Fund (IMF), world economic growth is expected to reach 3.0%, reflecting stabilization after a period of post-pandemic uncertainty.

Global inflation has started to show a downward trend driven with the normalization of commodity prices and the ongoing implementation of tight monetary policies across many countries. Average inflation was recorded at 3.4% in advanced economies and 5.8% in emerging economies, but still above the medium-term targets of most central banks. More stable energy prices and improved supply chains were the main factors in the easing of inflationary pressures.

Global financial markets remain rife with volatility. Major central banks, including The Federal Reserve and the European Central Bank (ECB), have maintained high benchmark interest rates to uphold their inflation-fighting credibility. This stance has driven up bond yields and strengthened the US dollar, consequently raising external financing costs for developing countries. The resulting pressures on capital outflows and currency exchange rate depreciation present ongoing challenges to global financial stability.

International trade growth has also slowed, with the volume of global trade in goods and services rising by only around 2.4%. Contributing factors to this slowdown include geopolitical fragmentation, protectionist policies, and reallocation of supply chains to allied nations (*friendshoring*). Nevertheless, developing countries in Asia, including Indonesia, are well-positioned to benefit from these shifts by emerging as a new hub for production and investment.

Furthermore, global attention is increasingly focused on the issues of energy transition and climate change. Investment in renewable energy have risen significantly, driven by net-zero emission commitments and the broader sustainable development agenda. At the same time, extreme weather phenomena, such as El Niño, continue to disrupt food production and impact commodity prices, heightening risks to global food security.

Overall, global economic conditions in 2024 are entering a phase of stabilization, yet remain clouded by various risks, including economic slowdown in developed countries, financial sector volatility, geopolitical conflicts, and rising cross-regional trade tensions.

Referensi:

1. International Monetary Fund. (October 2024). *World Economic Outlook: Navigating Global Divergences*.
2. World Bank. (January 2024). *Global Economic Prospects: Balancing Risks in a Fragile Recovery*.

Analisis Ekonomi Nasional 2024

Di tengah dinamika global tersebut, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2024 mencapai 5,1% (yoy), sejalan dengan proyeksi pemerintah dan sedikit di atas proyeksi IMF sebesar 5,0%. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, kinerja investasi yang membaik, serta kontribusi ekspor nonmigas yang tetap positif meski harga komoditas cenderung menurun.

Stabilitas ekonomi nasional juga diperkuat oleh pengendalian inflasi yang efektif. Sepanjang tahun 2024, tingkat inflasi berhasil dijaga dalam kisaran 2,8%, berada dalam target sasaran yang ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini turut memberikan ruang bagi kebijakan moneter untuk lebih adaptif dalam mendorong pertumbuhan kredit dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dari sisi fiskal, Pemerintah berhasil mempertahankan defisit anggaran dalam batas aman, yakni sekitar 2,3% terhadap PDB, mencerminkan kesinambungan kebijakan fiskal yang pruden. Pembiayaan APBN juga semakin diarahkan untuk mendukung program-program produktif, termasuk penguatan UMKM, peningkatan daya saing industri, serta pembangunan infrastruktur digital dan hijau.

Perbaikan iklim investasi dan keberlanjutan reformasi struktural turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah melanjutkan implementasi agenda reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, penyederhanaan perizinan, serta penguatan lembaga penjaminan dan pembiayaan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap dunia usaha, khususnya sektor UMKM yang merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi nasional.

Referensi:

1. Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV dan Tahun 2024*.
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN KiTa: Kinerja dan Fakta APBN Desember 2024*.

References:

1. International Monetary Fund. (October 2024). *World Economic Outlook: Navigating Global Divergences*.
2. World Bank. (January 2024). *Global Economic Prospects: Balancing Risks in a Fragile Recovery*.

2024 National Economic Analysis

In the midst of global uncertainties, the Indonesian economy has demonstrated strong resilience. According to data from the Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) grew by 5.1% (yoy) in 2024, aligning with government projections and slightly surpassing the IMF's projection of 5.0%. This growth was primarily driven by robust household consumption, improved investment performance, and continued positive contributions from non-oil and gas exports, despite a decline in global commodity prices.

National economic stability was further strengthened by effective inflation management. Throughout 2024, the inflation rate was maintained at 2.8%, well within Bank Indonesia's target range. This stability created room for more adaptive monetary policy, supporting credit growth, and helping to maintain the stability of the IDR exchange rate.

On the fiscal front, the Government successfully maintained the budget deficit at a safe level of around 2.3% of GDP, reflecting the continued implementation of prudent fiscal policies. State budget financing is also increasingly focused on supporting productive programs, including empowering MSMEs, enhancing industrial competitiveness, and advancing digital and green infrastructure development.

Improvements in the investment climate, along with the sustainability of structural reforms, have further supported domestic economic growth. The government remains committed to its reform agenda through the implementation of Job Creation Law, the simplification of licensing processes, and the strengthening of guarantee and financing institutions. These efforts have had a positive impact on the business environment, especially for MSMEs, which plays a vital role in the national economic ecosystem.

References:

1. Statistics Indonesia (BPS). (2025). *Indonesia's Economic Growth in the Fourth Quarter and in 2024*.
2. Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. (2025). *APBN KiTa: State Budget Performance and Facts December 2024*.

Analisis Industri Penjaminan 2024

Industri penjaminan di Indonesia pada tahun 2024 berada dalam ekosistem sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Industri ini memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui penyediaan jaminan atas kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan.

Sepanjang tahun 2024, sektor PPDP secara keseluruhan mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Aset industri asuransi (termasuk penjaminan) mencapai Rp1.133,87 triliun per Desember 2024, tumbuh 2,03% secara tahunan. Walaupun data terpisah khusus sektor penjaminan masih terbatas dalam publikasi agregat, namun peningkatan aset secara keseluruhan mencerminkan tren pertumbuhan yang turut berdampak pada sektor penjaminan, termasuk Jamkrindo.

Di sisi lain, peningkatan kebutuhan penjaminan, khususnya untuk kredit UMKM dan program-program Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini. Dalam rangka memperluas akses pembiayaan dan inklusi keuangan, pemerintah terus mendorong sinergi antara perbankan, perusahaan penjaminan, dan lembaga penyalur kredit.

OJK juga terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap sektor penjaminan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini mencakup penegakan prinsip kehati-hatian, peningkatan tata kelola, serta penguatan permodalan lembaga penjaminan. Seiring dengan itu, reformasi menyeluruh di sektor perasuransian dan dana pensiun yang dicanangkan OJK pada tahun 2024 juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap penguatan sektor penjaminan.

Faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja industri penjaminan adalah kondisi makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat suku bunga, dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil sebesar 5,03% pada 2024, serta inflasi yang rendah (1,57%) memberikan iklim usaha yang relatif kondusif bagi peningkatan aktivitas pembiayaan dan penjaminan.

Dengan demikian, prospek industri penjaminan ke depan masih cukup menjanjikan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendukung pembiayaan UMKM, transformasi digital sektor keuangan, dan penguatan infrastruktur regulasi oleh OJK.

Referensi:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Snapshot Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Desember 2024*.
2. Siaran Pers OJK - Rountable Reformasi Industri Asuransi dan Dana Pensiun, Yogyakarta, Juli 2024
3. Badan Pusat Statistik (BPS). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024*.

2024 Guarantee Industry Analysis

In 2024, the guarantee industry in Indonesia operates within the broader Insurance, Surety, and Pension Fund (PPDP) ecosystem, under the supervision of the Financial Services Authority (OJK). This industry plays a vital role in supporting financing, especially for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), by providing guarantees that serve as collateral for credit or financing distributed by financial institutions.

Throughout 2024, the PPDP sector demonstrated steady growth. As of December 2024, total assets of the insurance industry (including guarantees) reached IDR 1,133.87 trillion, making a year-on-year increase of 2.03%. Eventhough separate data for the guarantee sector remains limited in public reporting, the overall asset growth reflects a positive trend that also extends the guarantee sector, including Jamkrindo.

On the other hand, the rising demand for guarantees, particularly for MSME loans and government initiatives such as the People's Business Credit (KUR), has become a key driver of growth in this sector. To broaden access to financing and financial inclusion, the government continues to encourage synergy between banks, guarantee companies, and credit-disbursing institutions.

The Financial Services Authority (OJK) also continues to enhance regulation and monitoring of the guarantee sector as part of its broader efforts to safeguard financial system stability. This includes reinforcing prudential principles, improving governance practices, and enhancing the capital strength of guarantee institutions. In parallel, the comprehensive reforms introduced by OJK in 2024 for the insurance and pension fund sectors are also expected to have a positive impact on the guarantee sector.

Other factors that influence the performance of the guarantee industry include macroeconomic conditions such as national economic growth, interest rates, and inflation. Indonesia's stable economic growth of 5.03% in 2024, as well as low inflation of 1.57%, provide a relatively conducive business climate for the growth of financing and guarantee activities.

Thus, the outlook for the guarantee industry going forwards remains promising, in line with the direction of government policies in supporting MSME financing, digital transformation of the financial sector, and strengthening regulatory infrastructure through the initiatives of the OJK.

References:

1. Financial Services Authority (OJK) . Financial Services Sector Development Snapshot as of December 2024.
2. OJK Press Release - Insurance and Pension Fund Industry Reform Roundtable, Yogyakarta, July 2024
3. Statistics Indonesia (BPS). Indonesia's Economic Growth in 2024.

Analisis Posisi Jamkrindo dalam Industri

Di tengah tren pertumbuhan industri yang positif, Jamkrindo terus menunjukkan kinerja yang kuat baik dari sisi volume penjaminan, peran strategis, maupun kontribusi terhadap penguatan ekosistem pembiayaan UMKM di Indonesia.

Berdasarkan data industri, total *outstanding* penjaminan per Juni 2024 mencapai Rp415,57 triliun. Dari angka tersebut, kontribusi Jamkrindo sangat signifikan, dengan volume penjaminan mencapai Rp300 triliun, yang berarti Jamkrindo menguasai lebih dari 70% pangsa pasar penjaminan nasional. Hal ini menunjukkan kepercayaan tinggi dari mitra lembaga keuangan serta pelaku usaha terhadap kapasitas, integritas, dan tata kelola Jamkrindo sebagai lembaga penjaminan.

Selain itu, pendapatan penjaminan bersih Jamkrindo yang mencapai Rp6,92 triliun dan pendapatan investasi sebesar Rp1,46 triliun, turut memperkuat daya saing keuangan perusahaan. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan efisiensi operasional, tetapi juga pengelolaan aset yang prudent dan berbasis risiko.

Jamkrindo juga unggul dalam aspek jangkauan dan cakupan layanan. Dengan jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, Jamkrindo menjadi ujung tombak dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dalam mendukung ekosistem pembiayaan inklusif, Jamkrindo aktif berkolaborasi dengan bank, fintech lending, koperasi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya.

Dalam konteks transformasi industri, Jamkrindo juga menjadi pelopor dalam penerapan digitalisasi proses penjaminan, termasuk pengembangan sistem informasi terintegrasi dan platform digital yang memudahkan mitra dan nasabah dalam mengakses layanan penjaminan.

Dengan latar belakang tersebut, Jamkrindo tidak hanya berperan sebagai pemimpin pasar secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif sebagai role model dalam penerapan tata kelola, inovasi digital, dan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan UMKM nasional. Posisi ini sejalan dengan arahan OJK dalam *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan 2024–2028*, yang menekankan pentingnya peran lembaga penjaminan dalam memperkuat inklusi keuangan dan ketahanan sektor UMKM.

Referensi:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perusahaan Penjaminan Bulan Maret 2024*;
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024–2028*;

Analysis of Jamkrindo's Position in the Industry

Amidst the positive growth trends within the industry, Jamkrindo continues to demonstrate strong performance through its guarantee volume, strategic roles, and contributions toward strengthening Indonesia's MSME financing ecosystem.

Based on industry data, total outstanding guarantees as of June 2024 stood at IDR 415.57 trillion. Jamkrindo's contributed significantly to this figure, with a guarantee volume reaching IDR 300 trillion, which means Jamkrindo controls more than 70% of the national guarantee market share. This dominant position reflects the strong trust placed in Jamkrindo by financial institution partners and business actors alike, emphasizing Jamkrindo's capacity, integrity, and governance as a guarantee institution.

Furthermore, Jamkrindo's net guarantee income, which reached IDR 6.92 trillion and investment income of IDR 1.46 trillion, also further reinforced the Company's financial competitiveness. This achievement not only demonstrates operational efficiency, but also prudent and risk-based asset management.

Jamkrindo also excels in terms of service reach and coverage. With a widespread network throughout Indonesia, Jamkrindo is at the forefront of expanding access to financing for MSMEs, including in the 3T (underdeveloped, frontier, and outermost regions) areas. As part of its commitment to building an inclusive financing ecosystem, Jamkrindo actively collaborates with banks, fintech lenders, cooperatives, and other non-bank financial institutions.

In the context of industry transformation, Jamkrindo is also a pioneer in digitizing the guarantee process. This includes the development of integrated information systems and digital platforms that enhance accessibility and convenience for both partners and customers in obtaining guarantee services.

With this background, Jamkrindo serves not only as a quantitative market leader, but also as a qualitative role model in the implementation of governance, digital innovation, and meaningful contribution to the development of national MSMEs. This is in line with the direction established by the OJK in the 2024–2028 Guarantee Industry Development Roadmap, which emphasizes the vital role of guarantee institutions in enhancing financial inclusion and the resilience of the MSME sector.

References:

1. Financial Services Authority (OJK), *Guarantee Company Statistics March 2024*;
2. Financial Services Authority (OJK), *Roadmap for the Development and Strengthening of the Indonesian Guarantee Industry 2024–2028*;

Strategi dan Inisiatif Strategis 2024

Strategi dan inisiatif strategis Jamkrindo tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. Dengan mengusung tema RKAP, yaitu "1st Preferred Company in SME's Financial Accessibility", di tahun 2024 ini Jamkrindo menetapkan arah dan tujuan perusahaan yang berfokus pada penguatan peran Jamkrindo dalam ekosistem keuangan nasional.

Untuk mendukung pencapaian tema tersebut, Jamkrindo menyusun berbagai strategi dan inisiatif strategis, antara lain:

1. Meningkatkan *Market Share* Melalui Kolaborasi antar Anak Perusahaan Holding dan BUMN

Jamkrindo bergabung dalam Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan dengan harapan terdapat *guidelines* mengenai *playing field* antar sesama anggota Holding terkait dengan penetrasi produk. Pembentukan Holding diharapkan dapat menciptakan kolaborasi dan efisiensi bagi seluruh anggota dan induk. Kolaborasi dan efisiensi yang diharapkan terjadi dengan adanya Holding dan kerja sama dengan anak perusahaan meliputi: peningkatan bunga deposito, efisiensi biaya transaksi, efisiensi dari *integrated marketing program*, efisiensi pengadaan, efisiensi dengan *shared services*, efisiensi beban depresiasi dan sewa, efisiensi beban klaim.

2. Melakukan Pengembangan Sistem TI yang Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas Proses Bisnis Perusahaan

Proses bisnis Perusahaan, terutama *core business process*, masih belum terintegrasi secara menyeluruh. Beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh Perusahaan masih tergantung pada penginputan data di masing-masing aplikasi sehingga berpotensi adanya perbedaan di beberapa proses bisnis yang menyebabkan data tumpang tindih. Saat ini Perusahaan sedang mengembangkan arsitektur teknologi. Dalam pengembangan arsitektur teknologi terdapat fokus permasalahan terkait *integrated service management* yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber informasi baik secara internal maupun eksternal. Adanya pengembangan tersebut diharapkan mendorong percepatan dan simplifikasi proses bisnis yang ada.

3. Melakukan Pemeringkatan dan Pembinaan UMKMK

Jamkrindo sudah menginisiasi pengumpulan database, pemeringkatan dan pembinaan UMKMK melalui kerja sama dengan berbagai universitas. Jamkrindo juga tengah merancang alat bantu untuk melakukan scoring UMKMK. Selain itu, Jamkrindo dapat menggunakan dana TJSL yang dimilikinya untuk mendukung kegiatan pembinaan UMKMK.

4. Meningkatkan Kualitas Layanan serta Membina Hubungan Baik dengan Mitra

Jamkrindo selalu berusaha memberikan layanan penjaminan dan klaim yang sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA). Kemampuan Jamkrindo dalam memberikan layanan yang baik ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi mitra untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh Jamkrindo.

2024 Strategies and Strategic Initiatives

Jamkrindo's strategies and strategic initiatives for 2024 are outlined in the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP). Adopting the RKAP theme "1st Preferred Company in SME's Financial Accessibility", Jamkrindo sets a clear direction and purpose of the Company which focuses on strengthening Jamkrindo's role in the national financial ecosystem.

To support the achievement of the theme, Jamkrindo developed various strategies and strategic initiatives, as listed below:

1. Increasing Market Share Through Collaboration between Holding Subsidiaries and SOEs

Jamkrindo joined the SOEs' Insurance and Guarantee Holding with the hope that there would be guidelines regarding the playing field between fellow Holding members related to product penetration. The formation of the Holding is expected to create collaboration and efficiency for all members and parent entity. Collaboration and efficiency that are expected to occur with Holding and cooperation with subsidiaries include: increased deposit interest, transaction cost efficiency, efficiency from integrated marketing programs, procurement efficiency, efficiency with shared services, efficiency in depreciation and rental expenses, efficiency in claim expenses.

2. Developing an Integrated IT System to Increase the Effectiveness of the Company's Business Processes

The Company's business processes, especially core business processes, are still not fully integrated. Several applications developed by the Company still depend on inputting data in each application, so there is the potential for differences in several business processes that cause data to overlap. Currently the Company is developing a technology architecture. In developing technology architecture there is a focus on issues related to integrated service management, namely the ability to integrate data from various information sources both internally and externally. It is hoped that this development will encourage the acceleration and simplification of existing business processes.

3. Carrying out ranking and development of MSMEs

Jamkrindo has initiated database collection, ranking and development of MSMEs through collaboration with various universities. Jamkrindo is also designing tools to score MSMEs. In addition, Jamkrindo can use its TJSL funds to support MSME development activities.

4. Improving Service Quality and Building Good Relations with Partners

Jamkrindo always tries to provide guarantee and claims services in accordance with the Service Level Agreement (SLA). Jamkrindo's ability to provide good service is one of the factors that influences partners to use the products offered by Jamkrindo.

5. Meningkatkan Kompetensi SDM Terutama pada Pengetahuan dan Kompetensi Kunci

Guna memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga meningkatkan produktivitas Perusahaan, maka Divisi MSDM telah melakukan asesmen pejabat dan pengembangan karyawan secara terus menerus untuk dapat mendukung proses bisnis di seluruh unit kerja yang membutuhkan. Divisi MSDM telah melakukan Pendidikan dan pelatihan baik dengan pihak internal maupun eksternal untuk meningkatkan kompetensi SDM, serta melaksanakan asesmen mingguan yang diikuti oleh seluruh karyawan secara konsisten. Untuk tahun 2024 mendatang Divisi MSDM memiliki program terkait *Manpower Planning* dengan target karyawan sebanyak 1.150 orang dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja.

6. Melaksanakan Manajemen Risiko yang Terintegrasi di Seluruh Proses Bisnis

Adanya penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) membuat penyelenggaraan bisnis penjaminan harus memperhatikan risiko/*prudent* dalam setiap proses bisnis. Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan mitra dalam rangka pengelolaan risiko Perusahaan. Perumusan strategi untuk mendukung sasaran tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan Dukcapil, Infobank dan Pefindo Biro Kredit (PBK) dalam mendukung proses bisnis penjaminan. Selain itu, peningkatan pemahaman *risk awareness* juga perlu ditingkatkan untuk karyawan dan juga para *owner* (pemegang saham) dalam melakukan tindakan maupun pengambilan keputusan.

Adapun inisiatif strategis yang dilakukan untuk mencapai tema "*1st Preferred Company in SME's Financial Accessibility*", sebagai berikut:

- a. Ekspansi pada pasar baru;
- b. Melakukan transformasi model bisnis dan inovasi produk;
- c. Memperkuat sinergi untuk meningkatkan pangsa pasar dan mengoptimalkan bisnis saat ini;
- d. *Operational excellence*;

5. Increasing HC Competency, Especially in Knowledge and Key Competencies

To strengthen existing Human Capital (HC) to increase the Company's productivity, the HCM Division has implemented continuous assessment of officials and employee development to be able to support business processes in all work units in need. The HCM Division has carried out education and training with both internal and external parties to improve HC competency, as well as having weekly assessments which are attended by all employees consistently. For 2024, the Human Capital Division has a program related to *Manpower Planning* with a target of 1,150 employees with the aim of increasing efficiency and effectiveness at work.

6. Implementing Integrated Risk Management in All Business Processes

The implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) means that the implementation of the guarantee business must pay attention to risk/*prudent* in every business process. The Company has collaborated with partners in the context of managing the Company's risks. Formulating strategies to support these targets can be done by collaborating with Dukcapil (Population and Civil Registration Agency), Infobank, and Pefindo Biro Kredit (PBK) to support the guarantee business process. In addition, there is a need to improve understanding of risk awareness for employees and owners (shareholders) in taking actions and making decisions.

The strategic initiatives undertaken to achieve the theme "*1st Preferred Company in SME's Financial Accessibility*" are as follows:

- a. Expansion into new markets;
- b. Business model transformation and product innovation;
- c. Strengthen synergies to increase market share and optimize current business;
- d. *Operational excellence*;

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

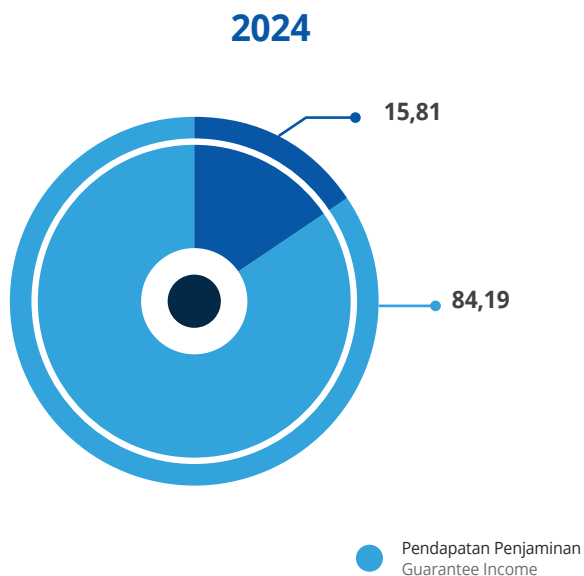
Laporan Keuangan Perusahaan tidak menerapkan PSAK No. 108 tentang Segmen Operasi. Oleh karena itu, penyajian tinjauan operasi per segmen dalam laporan ini disusun berdasarkan klasifikasi internal atas produk dan jenis layanan yang merepresentasikan kegiatan usaha utama serta kontribusinya terhadap pendapatan Perusahaan.

Jamkrindo menjalankan kegiatan usaha di bidang penjaminan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKMK), penjaminan kepada BUMN, penjaminan sistem resi gudang, serta berbagai jenis penjaminan dan layanan pendukung lainnya.

Dalam laporan ini, pembahasan mengenai segmen usaha disajikan berdasarkan sumber utama pendapatan Perusahaan, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

- Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan;
- Penjaminan Non KUR;
- Penjaminan PEN; dan
- Pendapatan Investasi

Adapun komposisi pendapatan pada tahun 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Pada tahun 2024, Pendapatan Perusahaan didominasi oleh penjaminan KUR yang mencapai Rp4,63 triliun atau 57,27% dari total pendapatan, meningkat Rp424,94 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan Non KUR berkontribusi sebesar 38,84% atau Rp3,15 triliun, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, penjaminan PEN berkontribusi sebesar 3,90%, yaitu mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

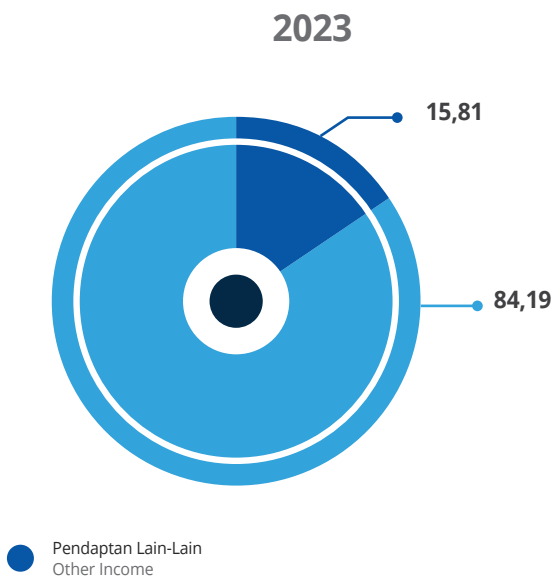
The Company's Financial Statements do not apply PSAK No. 108 concerning Operating Segments. Therefore, the presentation of the operating review by segment in this report is based on the internal classification of products and services, which reflects its primary business activities and their contributions to the Company's revenue.

Jamkrindo engages in business activities focused on providing guarantees for Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives), guarantees to SOEs, warehouse receipt system guarantees, as well as various other types of guarantees and other supporting services.

In this report, the discussion of business segments is presented based on the Company's main sources of revenue, which are grouped into three main categories, namely:

- Guarantee Fee Income;
- Non KUR Guarantee;
- National Economic Recovery (PEN) Guarantee; and
- Investment Income

The composition of revenue in 2024 and 2023 is explained below:



In 2024, the Company's revenue was dominated by KUR guarantees, which amounted to IDR 4.63 trillion or 57.27% of total revenue, an increase of IDR 424.94 billion compared to the previous year's figure. Meanwhile, Non-KUR revenue contributed IDR 3.15 trillion or 38.84%, also reflecting an increase compared to the previous year's figure. In contrast, PEN guarantees accounted for 3.90% of total revenue, a decrease compared to the previous year's figure.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Jamkrindo memberikan layanan penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

Jamkrindo menjalankan kegiatan penjaminan kredit, baik dalam skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non-KUR, yang disalurkan melalui perbankan (penjaminan bank), termasuk bank konvensional dan syariah, serta lembaga non-bank (penjaminan non-bank). Adapun mekanisme penjaminan dilakukan secara *case by case* maupun *conditional automatic cover*.

Dari layanan ini, Perusahaan memperoleh Imbal Jasa Penjaminan (IJP), yang tarifnya ditetapkan dengan mempertimbangkan setidaknya faktor-faktor berikut:

1. Risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan:
 - a. Rasio klaim;
 - b. Jenis kredit atau pembiayaan;
 - c. Cakupan penjaminan; dan
 - d. Jangka waktu penjaminan.
2. Biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran. Berikut ini merupakan jumlah kredit yang dijamin oleh Jamkrindo pada tahun 2023, serta target RKAP dan realisasi tahun 2024:

Guarantee Fee Income

In accordance with Law No. 1/2016 concerning Guarantees, Jamkrindo provides credit guarantee services and financing provided by financial institutions to Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.

Jamkrindo conducts credit guarantee activities, both in the People's Business Credit (KUR) and non-KUR schemes, which are distributed through banks (bank guarantees), including conventional and sharia banks, and non-bank institutions (non-bank guarantees). The guarantee mechanism is executed on a case by case basis and conditional automatic cover.

From this service, the Company earns a Guarantee Fee (IJP), the rate of which is determined by considering at least the following factors:

1. Guaranteed risk, which at least is calculated based on:
 - a. Claim Ratio;
 - b. Type of Credit or Financing;
 - c. Guarantee coverage; and
 - d. Guarantee period.
2. General administrative, operational, and marketing costs. The following is the amount of credit guaranteed by Jamkrindo in 2023, as well as the RKAP target and realization in 2024:

Tabel Jumlah Kredit yang Dijamin Tahun 2023-2024

Table of Total Guaranteed Loans in 2023-2024

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2024 (Rp-Juta) 2024 RKAP (IDR-Million)	Presentase % Percentage %	
	2024 (Rp-Juta) (IDR-Million)	2023 (Rp-Juta) (IDR-Million)		Capaian RKAP 2024 2024 RKAP Achievements	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
KUR People's Business Credit	142.024.355	130.035.520	135.000.000	105,20%	9,22%
PEN National Economic Recovery	-	(956)	-	0,00%	-100,00%
Non KUR Non-People's Business Credit	183.520.512	248.339.646	279.811.248	65,59%	-26,10%
Total Kredit Total Credit	325.544.867	378.374.210	414.811.248	78,48%	-13,96%

KUR
People's Business Credit

Non KUR
Non-People's Business Credit

130.035.520 **142.024.355**

248.338.690 **183.520.512**



2023

2024

Total kredit yang dijamin oleh Perusahaan pada tahun 2024 mencapai Rp325,54 triliun, menurun 13,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp378,37 triliun. Capaian ini belum melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2024 sebesar Rp414,81 triliun, dengan realisasi mencapai 78,48% dari target tersebut.

Dari total kredit yang dijamin pada tahun 2024, Perusahaan memperoleh Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp8,10 triliun, meningkat 13,36% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,15 triliun. Adapun realisasi ini setara dengan 99,48% dari target RKAP yang ditetapkan sebesar Rp8,14 triliun.

In 2024, the total credit guaranteed by the Company reached IDR 325.54 trillion, a decrease of 13.96% compared to the previous year's figure of IDR 378.37 trillion. This performance has not exceeded the target established in the 2024 RKAP of IDR 414.81 trillion, with realization reaching 78.74% of the target.

Of the total credit guaranteed in 2024, the Company earned a Guarantee Fee (IJP) of IDR 8.10 trillion, an increase of 13.36% compared to the previous year's figure of IDR 7.15 trillion. This realization is equivalent to 99.48% of the RKAP target set at IDR 8.14 trillion.

Tabel Imbal Jasa Penjaminan Tahun 2023-2024
Table of Total Guaranteed Loans in 2023-2024

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2024 (Rp-Juta) 2024 RKAP (IDR-Million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	2024 (Rp-Juta) (IDR-Million)	2023 (Rp-Juta) (IDR-Million)		Nominal (Rp-juta) (IDR-million)	Presentase (%) Percentage (%)
KUR People's Business Credit	4.639.364	4.214.420	4.628.220	424.944	10,08%
PEN National Economic Recovery	315.572	816.110	328.820	(500.538)	-61,33%
Non KUR Non-People's Business Credit	3.146.372	2.116.205	3.186.466	1.030.167	48,68%
Total Imbalan Jasa Penjaminan Total Guarantee Fee	8.101.308	7.146.735	8.143.506	954.573	13,36%

KUR People's Business Credit

4.214.420

4.639.364

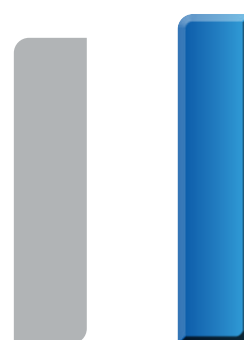


2023

Non KUR Non-People's Business Credit

2.932.315

3.146.372



2024

Penjaminan KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah untuk mendukung UMKM melalui pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu, badan usaha, atau kelompok usaha yang produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum mencukupi.

Adapun program KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif, memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Mengingat peran pentingnya dalam mendukung perekonomian nasional, pemerintah terus mendorong penyaluran KUR dengan meningkatkan plafon kredit dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp142,02 triliun, mengalami peningkatan 9,22% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp130,04 triliun, dengan total penerima sebanyak 2.401.404 debitur.

KUR Guarantee

People's Business Credit (KUR) is a government priority program to support MSMEs through the provision of credit or financing for working capital and/or investment to individual debtors, business entities, or business groups that are productive and feasible, but do not have additional collateral or insufficient additional collateral.

The KUR program aims to improve and expand access to financing for productive businesses, strengthen the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), and encourage economic growth and employment.

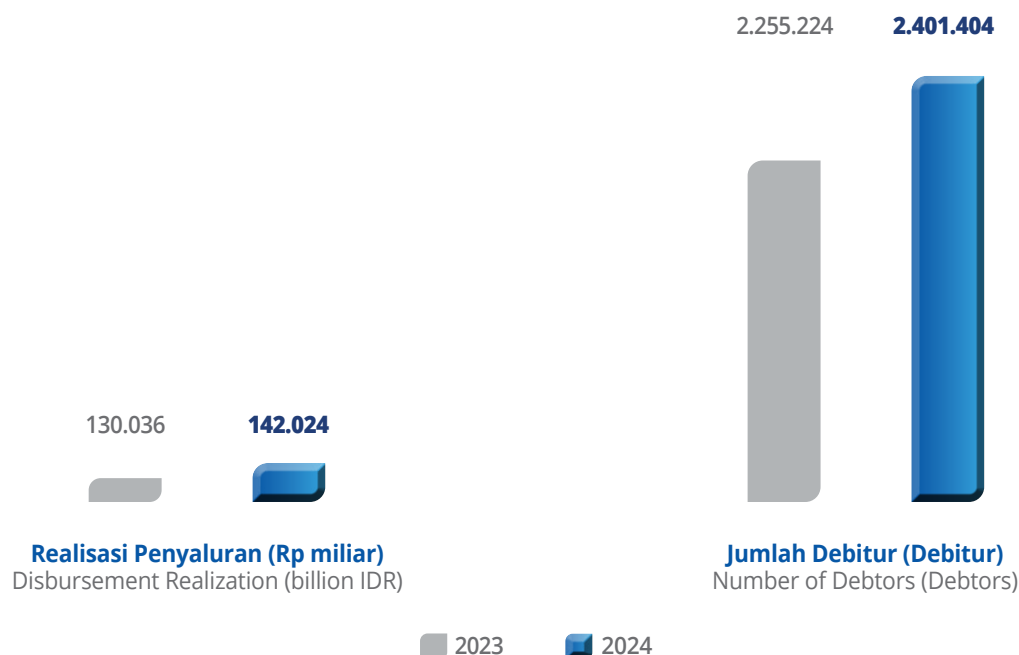
Given its crucial role in supporting the national economy, the government continues to promote KUR disbursement by increasing the credit ceiling from year after year. In 2024, the realization of KUR disbursement reached IDR 142.02 trillion, an increase of 9.22% compared to the previous year's figure of IDR 130.04 trillion, with a total of 2.401.404 debtors.

Tabel Realisasi Penyaluran KUR 2023-2024
Table of KUR Disbursement Realization from 2023 – 2024

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2024 (Rp-Juta) 2024 RKAP (IDR-Million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	2024 (Rp-Juta) (IDR-Million)	2023 (Rp-Juta) (IDR-Million)		Nominal (Rp-juta) (IDR-million)	Presentase (%) Percentage (%)
Realisasi Penyaluran (Rp-miliar/plafond) Realization of Disbursement (IDR-billion/limit)	142.024.355	130.035.520	135.000.000	11.997.012	9,22%
Total Debitur Total Debtors	2.401.404	2.256.224	-	145.188	6,43%

Grafik Realisasi Penyaluran KUR 2023-2024

Graph of KUR Disbursement Realization from 2023 – 2024



Jamkrindo telah menyelenggarakan layanan penjaminan KUR dengan dukungan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sejak tahun 2007. Program ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR. Dalam pelaksanaannya, Jamkrindo bekerja sama dengan berbagai bank, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta Bank BPD, perusahaan multifinance, dan koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.

Penjaminan KUR ditujukan bagi UMKM dengan skema berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat:

- KUR Super Mikro : Maks Rp. 10 juta
- KUR Mikro : > Rp 10 juta sd Rp.100 juta
- KUR Kecil : > Rp.100 sd Rp.500 juta
- KUR Pekerja Migran: Maks. Rp. 100 Juta
- KUR Khusus : Maks Rp 500 juta.

Skema penjaminan ini menggunakan mekanisme Conditional Automatic Cover (CAC), dengan IJP disubsidi bunga oleh pemerintah.

Pendapatan IJP atas penjaminan KUR dicatat sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 13 Imbal Jasa Penjaminan bagi Penjamin KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.

Jamkrindo has been providing KUR guarantee services with the support of State Equity Participation (PMN) funds since 2007. This program is implemented in accordance with Presidential Instruction No. 6 of 2007 and Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia No. 170/2015 concerning Implementing Banks and People's Business Credit Guarantee Companies In its implementation, Jamkrindo cooperates with various banks, including Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, as well as BPD banks, multifinance companies, and cooperatives appointed to distribute KUR.

KUR guarantees are intended for MSMEs with schemes based on the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit:

- KUR Super Micro : Max Rp. 10 million
- KUR Micro: > Rp 10 million to Rp 100 million
- KUR Kecil : > Rp.100 to Rp.500 million
- KUR Migrant Workers: Max. Rp. 100 million
- Special KUR: Max Rp 500 million.

This guarantee scheme uses the Conditional Automatic Cover (CAC) mechanism, with IJP subsidized by the government.

IJP income from KUR guarantees is recorded in accordance with the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit (KUR), Article 13 on Guarantee Service Fees for KUR Guarantors, based on agreements made with KUR Disbursement Partners.

Tantangan Penjaminan KUR

Dalam rangka merealisasikan target RKAP Tahun 2024 dan dalam tahap mendukung pemulihan pasca COVID -19 maka terdapat beberapa tantangan seperti :

1. Ketimpangan Distribusi, Masih banyak UMKM di daerah terpencil yang belum mendapatkan akses dan informasi yang memadai tentang KUR.
2. Rendahnya Literasi Keuangan, Banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara mengelola dana pinjaman dengan baik, yang berisiko terhadap kelangsungan usaha mereka.
3. Keterbatasan Infrastruktur Digital, Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah menghambat pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.
4. Kualitas Kredit, Meskipun KUR telah melampaui target penyaluran pada tahun 2024, rasio kredit macet (Non-Performance Loan/NPL) tetap perlu diperhatikan.
5. Restrukturisasi Kredit, Setelah restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 berakhir, pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali kebijakan tersebut untuk membantu UMKM yang kesulitan membayar cicilan.

Strategi Penjaminan KUR

Dalam rangka mendukung strategi untuk mencapai sasaran pada RKAP 2024, Divisi Bisnis I menetapkan rencana kerja sebagai berikut:

1. Melakukan Kajian Terhadap perkembangan Industri UMKM di Indonesia dan pemerataan ekonomi terhadap produk KUR untuk Memperkuat Portofolio Produk dengan Perbaikan T&C, Pencadangan Klaim yang Kuat, Kolaborasi Holding dan BUMN Berorientasi pada Profitabilitas.
2. Memperluas, standardisasi, simplifikasi digital channeling (e-SP) dengan mitra bank maupun non bank. Dengan menginformasikan kepada mitra untuk pengembangan sistem yang terhubung dengan mitra saat ini guna meningkatkan proses bisnis yang cepat dan efisien. Dalam hal ini pengembangan sistem H2H membutuhkan kolaborasi dua belah pihak dari pihak Bank maupun PT Jamkrindo.
3. Digitalisasi Supervisi RM kepada seluruh mitra guna meningkatkan efektivitas kinerja Perusahaan guna menjaga kualitas kredit sebagai Langkah preventif dan pengendalian penjaminan.
4. Sinergi dengan pihak penyalur KUR atas penerapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2024 tentang Pedoman Relaksasi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat.

Kinerja Penjaminan KUR

Jamkrindo adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas dan berwenang dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang penjaminan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM).

KUR Guarantee Challenges

To realize the 2024 RKAP targets and support the post-COVID-19 recovery phase, several challenges must be addressed as detailed below:

1. Distribution Inequality – A significant number of MSMEs in remote and underdeveloped areas still lack adequate access to and information about the KUR program.
2. Low Financial Literacy – Many MSME actors lack the understanding necessary to manage borrowed funds effectively, posing risks to the sustainability of their businesses.
3. Limited Digital Infrastructure – Inadequate digital infrastructure in certain regions hinders MSMEs from fully leveraging technology to optimize their operations.
4. Credit Quality – Although KUR disbursement targets were exceeded in 2024, the non-performing loan (NPL) ratio remains a critical concern that requires ongoing attention.
5. Credit Restructuring – With the conclusion of loan restructuring measures for COVID-19-affected borrowers, the government is evaluating the possibility of reinstating policies to assist MSMEs facing difficulties in meeting their installment payments.

KUR Guarantee Strategies

To support the strategy for achieving the 2024 RKAP targets, Business Division I has formulated the following work plan:

1. Conduct a study on the development of Indonesia's MSME sector and the economic reach of KUR products to strengthen the product portfolio through improved terms and conditions, solid claims reserves, collaboration with holding companies, and a focus on profitability-oriented SOEs.
2. Expand, standardize, and simplify digital channeling (e-SP) with both bank and non-bank partners by coordinating system development and integration with existing partners to enhance fast and efficient business processes. This includes collaborative development of the H2H system between the Bank and PT Jamkrindo.
3. Digitize RM monitoring for all partners to enhance the Company's operational effectiveness in maintaining credit quality as a preventive measure and guarantee control.
4. Synergize with KUR disbursement partners in implementing the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 13 of 2024 concerning Guidelines for the Relaxation of Restructuring of People's Business Credit (KUR).

KUR Guarantee Performance

Jamkrindo is a State-Owned Enterprise (SOE) which has the duty and authority to conduct business activities in the field of developing Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives).

Tabel Nilai Penjaminan dan IJP KUR Tahun 2023-2024
Table of Guarantee Value and KUR Guarantee Fee from 2023-2024

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2024 (Rp-juta) 2024 RKAP (IDR-Million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	2024 (Rp-Juta) (IDR-Million)	2023 (Rp-Juta) (IDR-Million)		Nominal (Rp-juta) (IDR-million)	Presentase(%) Percentage (%)
Penjaminan KUR KUR Guarantee	142.024.355	130.035.520	135.000.000	11.997.012	9,22%
IJP KUR KUR Guarantee Fee	4.639.364	4.214.420	4.628.220	424.944	10,08%

Pada tahun 2024, realisasi penjaminan KUR mencapai Rp142,02 triliun atau 105,20% dari anggaran dalam RKAP 2024 yang ditetapkan sebesar Rp135,00 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2023, angka ini mengalami peningkatan sebesar 9,22%, di mana pada tahun sebelumnya realisasi penjaminan KUR mencapai Rp130,04 triliun.

In 2024, the realization of KUR guarantees reached IDR 142.02 trillion, or equivalent to 105.20% of the target set in the 2024 RKAP of IDR 135.00 trillion. This represents a 9,22% increase compared to the previous year's figure of IDR 130.04 trillion.

Sementara itu, pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,64 triliun atau 100,24% dari target RKAP 2024 yang ditetapkan sebesar Rp4,63 triliun. Pendapatan IJP KUR tahun ini mengalami peningkatan sebesar 10,08% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,21 triliun.

Meanwhile, revenue from KUR Guarantee Fees (IJP) in 2024 reached IDR 4.64 trillion, or equivalent to 100.24% of the target set in the 2024 RKAP of IDR 4.63 trillion. This represents a 10.08% increase compared to the previous year's figure of IDR 4.21 trillion.

Tabel Laba Rugi Penjaminan KUR Tahun 2023-2024
Table of Profit and Loss of KUR Guarantee for 2023-2024

Uraian Description	Realisasi Realization		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	2024 (Rp-Juta) (IDR-Million)	2023 (Rp-Juta) (IDR-Million)	Nominal (Rp-juta) (IDR-million)	Presentase (%) Percentage (%)
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net Guarantee Fee	3.944.446	3.742.081	202.365	5,41%
Beban Klaim Claim Expenses	2.262.358	3.490.090	(1.227.732)	-35,18%
Penjaminan Bersih Net Guarantee	1.682.088	251.991	1.430.097	567,52%
Pendapatan Investasi Investment Income	706.441	654.175	52.266	7,99%
Beban Usaha Operating Expenses	(1.288.456)	(1.523.469)	235.013	-15,43%
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	3.677	3.105	572	18,42%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	1.103.750	(545.382)	1.649.132	-302,38%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(232.029)	(8.189)	240.218	2733,42%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	871.720	(537.192)	1.408.912	-262,27%

Pada tahun 2024, Perusahaan memperoleh Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Bersih dari penjaminan KUR sebesar Rp3,94 triliun, meningkat Rp202,37 miliar atau 5,41% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp3,74 triliun. Beban klaim yang dicatatkan Perusahaan sebesar Rp2,26 Triliun, mengalami penurunan mencapai Rp1,22 triliun atau 35,18% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,50 triliun. Dengan demikian, penjaminan bersih yang dicatatkan Perusahaan naik menjadi Rp1,68 triliun atau 567,52% bila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp252 juta.

In 2024, the Company obtained a Net Guarantee Fee (IJP) from KUR guarantees of IDR 3.94 trillion, an increase of IDR 202.37 billion or 5.41% compared to the previous year's figure of IDR 3.74 trillion. The claim expense recorded by the Company amounted to IDR 2.26 trillion, a decrease of IDR 1.22 trillion or 35.18% from the previous year's figure of IDR 3.50 trillion. Thus, the net guarantee recorded by the Company increased to IDR 1.68 million or 567.72% when compared to the previous year's figure of IDR 252 million.

Pada tahun yang sama, beban usaha Perusahaan tercatat sebesar Rp1,29 triliun, menurun Rp235,01 miliar atau 15,43% bila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp1,52 triliun. Selain itu, Perusahaan juga mencatat beban pendapatan lain-lain sebesar Rp3,68 miliar, yang menunjukkan kenaikan mencapai Rp572 juta atau 18,42% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,11 miliar. Sementara laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp1,65 triliun dari minus Rp545,38 miliar di tahun 2023 menjadi Rp1,10 miliar di tahun 2024.

Perusahaan mencatatkan beban pajak penghasilan sebesar Rp232,03 miliar yang mengalami kenaikan mencapai Rp223,84 miliar atau 2733,42% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8,19 miliar. Di sisi lain, Perusahaan juga memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp871 miliar, meningkat Rp1,41 triliun atau 262,27% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp537,19 miliar.

Penjaminan Non KUR

Selain penjaminan KUR, Jamkrindo juga menawarkan berbagai produk penjaminan lainnya, termasuk penjaminan distribusi barang, FLPP, keagenan kargo, konstruksi, kontra bank garansi, KPR, kredit mikro, kredit otomotif, kredit umum, surety bond, payment bond, pembiayaan invoice, kredit super mikro, Resi Gudang, Capital Management Guarantee (CMG), dan lainnya.

Beberapa produk yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja penjaminan Non KUR meliputi penjaminan FLPP, Kredit Multiguna, kredit mikro, dan surety bond.

Tantangan Penjaminan Non KUR

Tantangan dalam melakukan penjaminan Suretyship ini diantaranya banyaknya pesaing yang ada dengan memberikan penawaran-penawaran yang menarik dalam sisi tarif dan metode pembayaran, sehingga PT Jamkrindo harus memiliki cara yang lebih baik lagi untuk tetap mempertahankan mitra-mitra kerjanya. Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan *Plafond Guarantee* terlebih dahulu kepada Terjamin agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pengajuan penjaminan saat dibutuhkan.

PT Jamkrindo harus melakukan uji kelayakan principal dengan menggunakan prinsip 5C diantaranya: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition guna melihat apakah Terjamin tersebut layak mendapatkan penjaminan. Selain prinsip 5C tersebut, tantangan selanjutnya adalah saat ini PT Jamkrindo harus mengutamakan *Know Your Customer* yang berguna untuk membantu Mitigasi Risiko hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu *Know Your Customer* sangat diperlukan dan menjadi tantangan dalam penjaminan ini dikarenakan bertemu dan mengenal dengan *Obligee dan Principal* bukan lah hal yang mudah. Kita harus mengenal dan memulai hubungan baik terlebih dahulu dengan *obligee dan Principal* tersebut sehingga kita bisa mendapat kepercayaan dari mereka dan prosepek bisnis lainnya.

In the same year, the Company's operating expenses amounted to IDR 1.29 trillion, a decrease of IDR 235.01 billion or 15.43% compared to the previous year's figure of IDR 1.52 trillion. The Company also recorded other income expense of IDR 3.68 billion, an increase of IDR 572 million or 18.42% compared to the previous year's figure of IDR 3.11 billion. Meanwhile, profit before tax increased by IDR 1.65 trillion from minus IDR 545.38 billion in 2023 to IDR 1.10 billion in 2024.

The Company recorded an income tax expense of IDR 232.03 billion, an increase of IDR 223.84 billion or 2,733.42% compared to the previous year's figure of IDR 8.19 billion. On the other hand, the Company also earned a profit for the year of IDR 871 billion, an increase of IDR 1.41 trillion or 262.27% compared to the previous year's figure of IDR 537.19 billion.

Non KUR Guarantee

In addition to KUR guarantee, Jamkrindo also offers various other guarantee products, including goods distribution guarantee, Housing Finance Liquidity Facility (FLPP), cargo agency, construction, counter bank guarantee, mortgage (KPR), micro credit, automotive credit, general credit, surety bond, payment bond, invoice financing, super micro credit, warehouse receipt, Capital Management Guarantee (CMG), and others.

Several products that contributed significantly to the performance of Non KUR guarantees include FLPP guarantees, Multipurpose Loans, micro loans, and surety bonds.

Non-KUR Guarantee Challenges

The challenges in conducting Suretyship guarantees include the many competitors that exist by providing attractive offers in terms of rates and payment methods, making PT Jamkrindo must have a better way to retain its partners. This can be done, for instance, by providing a *Plafond Guarantee* in advance to the Guaranteed in order to simplify and speed up the process of applying for a guarantee when needed.

PT Jamkrindo must conduct principal due diligence using the 5C principles including: Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition to see whether the Guaranteed is worthy of a guarantee. Another challenge besides the 5C principle, is that currently PT Jamkrindo must prioritize *Know Your Customer* which is useful to help mitigate the risk of unwanted things. Therefore, *Know Your Customer* is very necessary and a challenge in this guarantee because meeting and getting to know the *Obligee and Principal* is not an easy thing. We must get to know and start a good relationship first with the obligee and Principal so that we can gain trust from them and other business prospects.

Strategi Penjaminan Non KUR

Strategi penjaminan non KUR yang dapat dilakukan agar dapat mencapai target yaitu dengan penambahan jumlah RM, melakukan penetapan target *Relationship Manager* (RM) sesuai potensi bisnis di Wilayah masing-masing, kemudian melakukan pemisahan antara *Relationship Manager* (RM) dengan Tim Administrasi, hal tersebut dilakukan agar masing-masing staf dapat fokus terhadap pekerjaannya dan segala proses penjaminan serta penerbitan Sertifikat Penjaminan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Selain itu, guna menjawab tantangan yang ada, maka PT Jamkrindo menerapkan strategi dengan memberikan fasilitas Plafond Guarantee diawal kepada Terjamin untuk mempermudah atau mempercepat proses Penjaminan saat dibutuhkan. Selain itu, tarif yang ditetapkan oleh PT Jamkrindo adalah tarif yang kompetitif dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.

Kinerja Penjaminan Non KUR

Non-KUR Guarantee Strategies

The non-KUR guarantee strategy that can be used to achieve the target is by increasing the number of RMs, setting Relationship Manager (RM) targets according to business potential in their respective regions, then separating the Relationship Manager (RM) from the Administration Team, it is done so that each staff can focus on their work and all guarantee processes and issuance of Guarantee Certificates can be carried out properly and correctly. In addition, to respond to the existing challenges, PT Jamkrindo implements a strategy by providing an initial Plafond Guarantee facility to the Guaranteed to facilitate or accelerate the Guarantee process when needed. In addition, the rates set by PT Jamkrindo are competitive rates while still paying attention to the applicable regulations.

Non-KUR Guarantee Performance

Kinerja Penjaminan Non KUR Tahun 2023-2024
Non KUR Guarantee Performance in 2023-2024

Uraian Description	RKAP Tahun 2024 (Rp-Juta) 2024 RKAP (IDR-Million)	Realisasi Realization		Capaian RKAP Tahun 2024 (%) 2024 RKAP Achievement (%)	Kenaikan (Penurunan) (%) Increase (Decrease) (%)
		2024 (Rp-Juta) (IDR-Million)	2023 (Rp-Juta) (IDR-Million)		
Distribusi Barang Goods Distribution	-	-	-	0,00%	0,00%
FLPP Housing Finance Liquidity Facility	16.811.701	42.737.514	27.230.256	254,21%	56,95%
Konstruksi Construction	3.942.716	1.712.253	1.548.302	43,43%	10,59%
KPR Mortgage	-	-	-	0,00%	0,00%
Subsidi Resi Gudang Warehouse Receipt Subsidies	113.371	90.471	89.031	79,80%	1,62%
Kredit Mikro Micro Credit	175.918.935	101.321.206	165.969.941	57,60%	-38,95%
Kredit Multiguna Multipurpose Credit	1.050.057	919.340	1.060.678	87,55%	-13,33%
Kredit OTO OTO Credit	-	-	-	0,00%	0,00%
Kredit Super Mikro Super Micro Credit	16.826.044	8.598.441	14.049.080	51,10%	-38,80%
Kredit Umum General Credit	1.395.069	675.215	7.542.057	48,40%	-91,05%
Pembiayaan Invoice General Credit	6.005.271	3.020.293	1.056.584	50,29%	185,85%
Customs Bond	2.344.531	127.981	817.661	5,46%	-84,35%
Keagenan Kargo Cargo Agency	-	-	-	0,00%	0,00%
Kontra Bank Garansi Counter-Bank Guarantee	25.622.963	11.099.644	16.315.670	43,32%	-31,97%
Payment Bond	-	4.800	8.547	0,00%	-43,84%
Surety Bond	19.780.591	5.573.228	12.651.841	28,18%	-55,95%
Grand Total	269.811.248	175.880.386	248.339.646	65,19%	-29,18%

Per 31 Desember 2024, Jamkrindo mencatat nilai penjaminan Non KUR sebesar Rp175,88 triliun, mengalami penurunan mencapai Rp72,46 triliun atau 29,18% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp248,34 triliun. Angka ini juga menunjukkan capaian penjaminan Non KUR sebesar 65,19% dari target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2024. Adapun komponen terbesar dalam penjaminan Non-KUR tahun 2024 berasal dari Kredit Mikro yang mencapai Rp101,32 triliun atau sekitar 57,61% dari total penjaminan Non-KUR.

As of December 31, 2024, Jamkrindo recorded a Non-KUR guarantee value of IDR 175.88 trillion, a decrease of IDR 72.46 trillion or 29.18% compared to the previous year's figure of IDR 248.34 trillion. This realization represents 65.19% of the target determined in the 2024 RKAP. The largest contributor to the Non-KUR guarantee portfolio in 2024 was Microcredit guarantees, amounting to IDR 101.32 trillion or approximately 57.61% of the total Non-KUR guarantees.

Tabel Laba Rugi Penjaminan Non KUR Tahun 2023-2024
Table of Non-KUR Guarantee Profit and Loss for 2023-2024

Uraian Description	Realisasi Realization		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	2024 (Rp-Juta) (IDR-Million)	2023 (Rp-Juta) (IDR-Million)	Nominal (Rp-juta) (IDR-Million)	Presentase (%) Percentage (%)
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net Guarantee Fee	2.676.888	1.921.885	755.003	39,28%
Beban Klaim Claim Expenses	2.645.606	(695.671)	3.341.277	-480,30%
Penjaminan Bersih Net Guarantee	31.282	2.617.556	(2.586.274)	-98,80%
Pendapatan Investasi Investment Income	414.244	30.391	383.853	1263,05%
Beban Usaha Operating Expenses	656.300	558.746	97.554	17,46%
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	18.542	11.647	6.856	58,86%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	(192.232)	2.366.863	(2.559.095)	-108,12%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	40.903	5.027	35.876	713,67%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	(151.329)	2.316.592	(2.467.921)	-106,53%

Pada tahun 2024, Perusahaan mencatat Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Bersih Non KUR sebesar Rp2,68 triliun, tumbuh sebesar 39,28% atau meningkat Rp755,00 miliar dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1,92 triliun. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan volume penjaminan dan/atau efektivitas tarif IJP yang diterapkan selama tahun berjalan.

In 2024, the Company recorded Net Guarantee Fee Income for the Non-KUR segment amounting to Rp2.68 trillion, reflecting an increase of 39.28% or Rp755.00 billion compared to Rp1.92 trillion in 2023. This growth indicates an expansion in guarantee volume and/or improved effectiveness of the guarantee fee rates implemented during the year.

Namun demikian, segmen Non KUR mencatatkan penurunan laba tahun berjalan yang signifikan sebesar Rp2,47 triliun atau minus 106,53%, dari Rp2,32 triliun pada tahun 2023 menjadi rugi Rp151,33 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh lonjakan beban klaim, yang meningkat drastis dari Rp695,67 miliar menjadi Rp2,65 triliun, atau naik sebesar 480,30% secara year-on-year. Peningkatan beban klaim ini berdampak langsung pada penurunan tajam laba penjaminan bersih dari Rp2,62 triliun menjadi Rp31,28 miliar.

Despite this growth, the Non-KUR segment experienced a significant downturn in performance, with Profit for the Year falling by 106.53%, from Rp2.32 trillion in 2023 to a loss of Rp151.33 billion in 2024. The sharp decline was primarily driven by a surge in Claim Expenses, which rose from Rp695.67 billion to Rp2.65 trillion, representing a year-on-year increase of 480.30%. This substantial rise directly impacted the Company's Net Guarantee Result, which dropped from Rp2.62 trillion to Rp31.28 billion.

Di sisi lain, pendapatan investasi meningkat signifikan sebesar 1.263,05% menjadi Rp414,24 miliar, yang turut memberikan kontribusi positif terhadap laba usaha. Namun peningkatan ini tidak cukup untuk mengimbangi tekanan dari sisi klaim dan beban usaha yang juga naik sebesar 17,46%.

On the other hand, Investment Income increased significantly by 1,263.05%, from Rp30.39 billion in 2023 to Rp414.24 billion in 2024, partially supporting the Company's financial performance. However, this gain was not sufficient to offset the pressure from the rise in Operating Expenses, which increased by 17.46%.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan segmen Non KUR pada tahun 2024 mencerminkan tantangan dalam pengelolaan risiko penjaminan di tengah peningkatan volume bisnis, serta pentingnya efisiensi operasional dan optimalisasi portofolio penjaminan yang berkelanjutan.

Penjaminan PEN

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan penjaminan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk menangani pandemi COVID-19 dan/atau mengatasi ancaman yang berpotensi membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, guna mendukung upaya penyelamatan ekonomi nasional.

Tabel Realisasi Penyaluran PEN 2024
Table of 2024 PEN Distribution Realization

Uraian Description	2024
Realisasi Penyaluran (Rp-miliar/plafond) (konvensional+syariah) Distribution Realization (IDR-billion/limit) (conventional+sharia)	(2.730.912.149) Rupiah Penuh/Full IDR
Jumlah Debitur Total Debtors	(30)

Jamkrindo memberikan layanan penjaminan PEN berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 304/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) untuk Melaksanakan Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penjaminan PEN ditujukan bagi pelaku usaha UMKM untuk mendukung operasional mereka. Adapun pendapatan IJP dari penjaminan PEN dicatat berdasarkan ketentuan dalam surat:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-582/MK.08/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal Penetapan Tarif Imbal Jasa Penjaminan atas Penjaminan Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tarif IJP sebesar 7,65% (tujuh koma enam puluh lima perseratus) per tahun;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-80/MK.08/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Penyesuaian Tarif Imbal Jasa Penjaminan atas Penjaminan Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tarif IJP sebesar 6,11% (enam koma sebelas perseratus) per tahun.

Tantangan Penjaminan PEN

Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) PEN berakhir pada 30 November 2022, Jamkrindo terkendala dalam hal update data Outstanding Penjaminan PEN dikarenakan Penerima Jaminan tidak menyampaikan data Outstanding kepada Jamkrindo secara berkala atas debitur yang telah lunas maupun yang kreditnya masih berjalan.

Overall, the 2024 financial performance of the Non-KUR segment reflects challenges in managing guarantee risks amidst expanding business volumes, emphasizing the need for greater operational efficiency and sustainable optimization of the guarantee portfolio.

PEN Guarantee

The National Economic Recovery Program (PEN) is a guarantee provided in accordance with Government Regulations in order to support state financial policies to deal with the COVID-19 pandemic and/or overcome threats that have the potential to endanger the national economy and financial system stability, to support national economic rescue efforts.

Jamkrindo provides PEN guarantee services in accordance with:

1. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 71/PMK.08/2020 concerning Procedures for Government Guarantees through Appointed Guarantee-Owned Business Entities in the context of Implementing the National Economic Recovery Program;
2. Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 304/KMK.08/2020 concerning Assignment to PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) to Implement Government Guarantees in the context of Implementing the National Economic Recovery Program.

PEN guarantee is aimed at MSME businesses to support their operations. IJP income from the PEN guarantee is recorded based on the provisions in the letter:

1. Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S(582)/MK.08/2020 dated July 8, 2020 concerning Stipulation of Rates of Return for Guarantee Fee for Government Guarantees in the National Economic Recovery Program, the Guarantee Fee rate is 7.65% (seven point sixty five percent) per year;
2. Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S(582)/MK.08/2021 dated February 4, 2021 concerning Stipulation of Rates of Return for Guarantee Fee for Government Guarantees in the National Economic Recovery Program, the Guarantee Fee rate is 6.11% (seven point sixty five percent) per year;

PEN Guarantee Challenges

The issuance of the PEN Guarantee Certificate (SP) ends on November 30, 2022, Jamkrindo is constrained in terms of updating the PEN Guarantee Outstanding data because the Guarantee Recipient does not submit Outstanding data to Jamkrindo regularly for debtors who have paid off or whose credit is still running.

Strategi Penjaminan PEN

Divisi Bisnis II menginstruksikan Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang agar dapat melakukan monitoring dan rekonsiliasi data Outstanding Kredit PEN secara berkala atas masing-masing Penerima Jaminan yang selanjutnya untuk dilaporkan kepada Divisi Bisnis II.

Kinerja Penjaminan PEN

Jamkrindo, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertugas dan berwenang menjalankan usaha di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM). Pada tahun 2024, produk KMK PEN tidak ada realisasi penjaminan. Sementara itu, pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) PEN pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp315,57 miliar atau 95,97% dari target RKAP 2024 yang ditetapkan sebesar Rp328,82 miliar.

PEN Guarantee Strategies

Business Division II instructed the Regional Offices and Branch Offices to monitor and reconcile the PEN Credit Outstanding data periodically for each Guarantee Recipient which is then reported to Business Division II.

PEN Guarantee Performance

Jamkrindo, as a State-Owned Enterprise (SOE), is tasked and authorized to operate in the development of Micro, Small, Medium, and Cooperative Enterprises (MSMEs and Cooperatives). In 2024, there were no guarantee realization for the KMK PEN product. Meanwhile, Guarantee Service Fee (IJP) income from PEN in 2024 was recorded at IDR 315.57 billion, reaching 95.97% of the 2024 RKAP target of IDR 328.82 billion.

Tabel Nilai Penjaminan dan IJP Pen Tahun 2024
Table of PEN Guarantee and Guarantee Fee Value of 2024

Uraian Description	Realisasi 2024 (Rp-juta) 2024 Realization (IDR-million)	RKAP Tahun 2024 (Rp-juta) 2024 RKAP (IDR-million)	Capaian RKAP 2024(%) 2024 RKAP Achievements (%)
Penjaminan PEN (konvensional + syariah) PEN guarantee (conventional + sharia)	0	0	0.00%
IJP PEN (Cash Basis) Cash Basis	315.572	328.820	95,97%

Profitabilitas Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Profitability of Return on Guarantee Fee

Kontribusi Imbalan Jasa Penjaminan Terhadap Laba (Rugi) Konsolidasi 2024
Contribution of Guarantee Fees towards the 2023 Consolidated Profit (Loss)

Uraian Description	Konsolidasi (Rp-juta) Consolidated (IDR-million)	Eksisting (Rp-juta) Existing (IDR-million)	KUR (Rp-juta) (IDR-million)	Persentase Kontribusi (%) Contribution Percentage (%)	
				Eksisting Existing	KUR
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net Guarantee Fee	6.922.049	2.977.603	3.944.446	43,02%	56,98%
Beban Klaim Claim Expenses	4.892.074	2.629.716	2.262.358	53,75%	46,25%
Penjaminan Bersih Net Guarantee	2.029.975	347.887	1.682.088	17,14%	82,86%
Pendapatan Investasi Investment Income	1.458.915	752.474	706.441	51,58%	48,42%
Beban Usaha Operating Expenses	(2.041.533)	(753.077)	(1.288.456)	36,89%	63,11%
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	22.297	18.621	3.677	83,48%	16,52%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	1.469.655	365.905	1.103.750	24,90%	75,10%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(308.161)	(76.131)	(232.029)	-48,83%	148,83%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	1.161.494	289.773	871.721	24,95%	75,05%

Per 31 Desember 2024, Imbal Jasa Penjaminan Bersih (IJP) mencatatkan kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Total pendapatan IJP secara konsolidasi mencapai Rp6,92 triliun, dengan produk KUR berkontribusi sebesar Rp 3,94 triliun atau 56,98%, dan Eksisting sebesar Rp2,98 triliun atau 43,02%. Secara kualitas pendapatan, efektivitas produk KUR

As of December 31, 2024, Net Guarantee Fee (IJP) made a significant contribution to the Company's financial performance. Total consolidated IJP revenue reached IDR 6.92 trillion, with KUR products contributing IDR 3.94 trillion (56.98%) and Existing products contributing IDR 2.98 trillion (43.02%). In terms of revenue quality, the effectiveness of KUR products is reflected

terlihat jelas dari kontribusi terhadap penjaminan bersih yang mencapai 82,86% atau sebesar Rp1,68 triliun, jauh melampaui Eksisting yang menyumbang 17,14%.

Dampak kontribusi IJP juga tercermin pada laba sebelum pajak sebesar Rp1,47 triliun, di mana KUR menyumbang Rp1,10 triliun (75,10%) dari total laba konsolidasi, sedangkan Eksisting Rp365,86 miliar (24,90%). Meskipun beban usaha pada KUR lebih besar, yaitu sebesar Rp 1,28 triliun (63,11%), efisiensi margin tetap terjaga. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa laba tahun berjalan berasal 75,05% dari KUR.

Pendapatan Investasi

Perusahaan mengalokasikan investasinya pada berbagai instrumen keuangan yang tersedia di pasar, baik di pasar modal maupun perbankan. Investasi dalam bentuk surat berharga diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan investasi yang tersedia untuk dijual.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan serta memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas. Perusahaan memiliki niat dan kemampuan untuk memegang aset tersebut hingga jatuh tempo, serta tidak mengklasifikasikannya sebagai aset yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau sebagai aset yang tersedia untuk dijual.

Sementara itu, aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset non-derivatif yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak termasuk dalam klasifikasi aset keuangan lainnya.

Tantangan yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2024, dinamika pasar keuangan Indonesia diwarnai oleh tingkat volatilitas yang tinggi. Pergerakan pasar dipengaruhi oleh berbagai sentimen, terutama terkait arah kebijakan suku bunga dan daya beli masyarakat. Dalam konteks tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat koreksi sebesar 2,65%, menjadi penurunan tahunan terdalam sejak masa pandemi pada 2020.

Fluktuasi tajam juga tercermin pada nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Dalam periode yang singkat, Rupiah mengalami penguatan dan pelemahan secara cepat. Sepanjang 2024, posisi terkuat Rupiah tercatat pada 25 September di level Rp15.095 per Dolar AS, sementara posisi terlemah terjadi pada 21 Juni di level Rp16.445 per Dolar AS.

Tahun 2024 juga menjadi fase transisi dan pemulihan bagi Indonesia, setelah melewati ketidakpastian akibat konflik geopolitik global dan dinamika domestik menjelang serta pasca Pemilihan Umum Presiden. Di tengah kondisi tersebut, inflasi tetap terjaga pada level 1,57% (yoy), lebih rendah dari kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5%±1%. Respons kebijakan moneter berupa penyesuaian suku bunga oleh Bank Indonesia, serta sinyal pemangkasan suku bunga oleh The Fed, membuka ruang bagi strategi optimalisasi investasi, khususnya pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi.

in their contribution to net guarantees, which reached 82.86% or IDR 1.68 trillion, substantially higher than the 17.14% contribution from Existing products.

The impact of IJP contributions was also evident in the pre-tax profit of IDR 1.47 trillion, with KUR accounting for IDR 1.10 trillion (75.10%) of the total consolidated profit, while Existing products contributed IDR 365.86 billion (24.90%). Despite KUR's higher operating expenses amounting to IDR 1.28 trillion (63.11%), margin efficiency was maintained. Ultimately, profit for the year was predominantly driven by KUR, contributing 75.05% of the total.

Investment Income

The Company allocates its investments to various financial instruments available in the market, both in the capital market and banks. Investments made in the form of securities are divided into two categories, namely held-to-maturity investments and available-for-sale investments.

Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and clear maturity dates. The Company has the intention and ability to hold these assets to maturity, and has not classified them as assets at fair value through profit or loss or as available-for-sale assets.

Meanwhile, available-for-sale financial assets are non-derivative assets categorized as available-for-sale or not included in other financial asset classifications.

Challenges Faced

Throughout 2024, Indonesia's financial market dynamics were characterized by high levels of volatility. Market movements are influenced by various sentiments, mainly related to the direction of interest rate policy and people's purchasing power. In that context, the Jakarta Composite Index (JCI) recorded a correction of 2.65%, the deepest annual decline since the pandemic in 2020.

Significant fluctuations were also reflected in the IDR exchange rate against the US Dollar. In a short period of time, the IDR experienced rapid strengthening and weakening. Throughout 2024, the strongest position of the IDR was recorded on September 25 at the level of IDR 15,095 per US Dollar, while the weakest position occurred on June 21 at the level of IDR 16,445 per US Dollar.

The year 2024 is also a transition and recovery phase for Indonesia, after passing through uncertainties due to global geopolitical conflicts and domestic dynamics before and after the Presidential Election. Amidst these conditions, inflation was maintained at 1.57% (yoy), lower than Bank Indonesia's target range of 2.5%±1%. Monetary policy responses in the form of interest rate adjustments by Bank Indonesia, as well as signals of interest rate cuts by the Fed, open up space for investment optimization strategies, especially in fixed income instruments such as bonds.

Strategi Investasi

Seluruh pembelian/penempatan investasi baru di tahun 2024 disesuaikan dengan *liability profile* perusahaan. Seluruh pengelolaan investasi dilakukan secara *prudent* dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Beberapa fokus strategi *asset allocation* diantaranya sebagai berikut:

1. Pemilihan deposito diutamakan pada mitra perbankan yang memiliki fundamental yang sehat dengan penawaran suku bunga kompetitif.
2. Pemilihan obligasi negara diutamakan pada seri SBN/SBSN yang menjadi *benchmark* dan/atau seri SBN/SBSN yang sesuai dengan *maturity liability profile* Perusahaan.
3. Pembelian obligasi korporasi akan disesuaikan dengan *bond universe* sesuai dengan kebutuhan *maturity* untuk memenuhi *liability profile* Perusahaan.
4. Preferensi reksadana diutamakan pada reksadana pendapatan tetap yang memiliki *risk appetite konservatif to moderate*

Pada tahun 2024, mayoritas investasi Perusahaan dalam surat berharga masih didominasi oleh Obligasi, yang mencakup 90,97% dari total kepemilikan surat berharga atau sekitar Rp16,14 triliun. Selain itu, Jamkrindo juga memiliki portofolio Reksadana dengan nilai yang signifikan, mencapai Rp1,43 triliun atau setara dengan 0,99% dari total surat berharga Perusahaan.

Investment Strategy

All investment purchases/placements are adjusted to the Company's liability profile. All investment management is done in a prudent manner and prioritizes the principle of prudence. Some of the focuses of the asset allocation strategy include:

1. The selection of deposits is prioritized in banking partners that have healthy fundamentals with competitive interest rate offers.
2. The selection of state bonds is prioritized on Government Securities (SBN)/Sharia Government Securities (SBSN) series that become benchmarks and/or SBN/SBSN series that are in accordance with the Company's maturity liability profile.
3. Corporate bond purchases will be adjusted to the bond universe in accordance with maturity needs to meet the Company's liability profile.
4. Preference for fixed income mutual funds with conservative to moderate risk appetite.

In 2024, the majority of the Company's investment in securities was still dominated by Bonds, which accounted for 90.97% of the total securities holdings or around IDR 16.14 trillion. Furthermore, Jamkrindo also has a portfolio of mutual funds with a significant value, reaching IDR 1.43 trillion or equivalent to 0.99% of the Company's total securities.

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Bunga Deposito Deposit Interest	418.704	373.267	45.437	12,17%
Bunga Obligasi Bond Interest	699.506	710.447	(10.941)	-1,54%
Pendapatan Reksadana Mutual Fund Income	72.928	51.515	21.413	41,57%
Pendapatan Sukuk Sukuk Income	255.164	49.355	205.809	417,00%
Pendapatan Capital Gain Income on Capital Gain	19.472	6.544	12.928	197,56%
Dividen Dividend	11.378	16.839	(5.461)	-32,43%
Efek Beragunan Aset (EBA) Asset-backed Securities (EBA)	133	298	(165)	-55,37%
Jumlah Pendapatan Investasi Total Investment Income	1.477.285	1.208.265	269.020	22,26%
Beban Investasi Investment Expenses	(18.369)	(4.087)	(14.282)	349,45%
Jumlah Pendapatan Investasi Bersih Total Investment Income – Net	1.458.916	1.204.178	254.738	21,15%

*) Disajikan kembali (*restated*) sesuai dengan penyajian dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit.
*) Restated in accordance with the presentation in the audited consolidated financial statements.

Per 31 Desember 2024, Jamkrindo memperoleh pendapatan investasi sebesar Rp1.458,92 miliar, naik 21,15% atau Rp254,74 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp1.204,18 miliar. Hal ini terutama didorong oleh penambahan pembelian aset obligasi dan sukuk yang berasal dari *shifting asset* kelas aset deposito dan optimalisasi dana *idle* serta faktor suku bunga deposito yang mengalami peningkatan.

As of December 31, 2024, Jamkrindo recorded investment income of IDR 1,458.92 billion, marking an increase of 21.15% or IDR 254.74 billion, compared to the previous year's of IDR 1,204.18 billion. This growth was primarily driven by additional purchases of bonds and sukuk assets from shifting deposit asset classes and optimizing idle funds, as well as a rise in deposit interest rates.

KINERJA ENTITAS ANAK, PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

PERFORMANCE OF SUBSIDIARY, PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamkrindo Syariah") terus mencatat kinerja yang positif. Meskipun menghadapi tantangan dalam dinamika ekonomi dan bisnis, Jamkrindo Syariah tetap mampu membukukan pertumbuhan yang solid.

In line with the growth of Indonesia's Islamic financial industry, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamkrindo Syariah") continues to record positive performance. Despite facing challenges in economic and business dynamics, Jamkrindo Syariah was still able to record solid growth.

Laporan Posisi Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah's Financial Position Report

Aset

Assets

Tabel Aset Tahun 2023-2024
Table of Assets for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	315.850	249.007	66.843	26,84%
Investasi Investment	617.120	601.852	15.268	2,54%
Piutang Penjaminan Ulang – Bersih Re-guarantee Receivables - Net	81.689	186.384	(104.695)	-56,17%
Piutang Lain-Lain Bersih Net Other Receivables	761	78	683	875,64%
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	493	3.554	(3.061)	-86,13%
Aset Tetap – Bersih Fixed Assets - Net	89.522	83.497	6.025	7,22%
Aset Tidak Berwujud – Bersih Intangible Assets - Net	3.270	340	2.930	861,76%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	55.366	51.537	3.829	7,43%
Aset Lain-Lain Other Assets	1.244.863	1.275.846	(30.983)	-2,43%
Jumlah Aset Total Assets	2.408.935	2.452.095	(43.160)	-1,76%

Jamkrindo Syariah mencatatkan jumlah aset di tahun 2024 sebesar Rp2,41 triliun, menurun sebesar 1,76% atau setara dengan Rp43,16 miliar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,45 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pos pos Piutang penjaminan ulang (Penerimaan Piutang klaim dari mitra Re dan pembentukan CKPN atas Piutang Mitra Re) dan aset lain lain(Pembentukan CKPN Biaya dibayar di muka atas Mitra Re).

Jamkrindo Syariah recorded total assets in 2024 of IDR 2.41 trillion, decreased by 1.76% or equivalent to IDR 43.16 billion compared to the previous year's figure of IDR 2.45 trillion. This decrease was mainly due to reinsurance receivables (Receipt of claims receivable from re-partners and provision of CKPN on re-partners receivables) and other assets (provision of CKPN on re-partners prepaid expenses).

Liabilitas

Liabilities

Tabel Liabilitas Tahun 2023-2024
Table of Liabilities for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Utang Klaim Claim Payables	1.530	5.110	(3.580)	-70,06%
Utang Pajak Tax Payables	524	4.507	(3.983)	-88,37%
Utang Penjaminan Ulang Re-guarantee Payables	16.916	53.857	(36.941)	-68,59%
Pendapatan Ditangguhkan Deferred Income	747.766	686.139	61.627	8,98%
Cadangan Klaim Claim Reserves	307.561	358.504	(50.943)	-14,21%
Akrual dan Utang Lain-Lain Accruals and Other Payables	82.887	113.147	(30.260)	-26,74%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post-Employment Benefits Liabilities	6.241	6.137	104	1,69%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.163.425	1.257.974	(94.549)	-7,52%

Hingga akhir 2024, jumlah liabilitas Jamkrindo Syariah tercatat sebesar Rp1,16 triliun, yaitu mengalami penurunan sebesar 7,52% atau setara dengan Rp94,55 miliar bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2023 yang mencapai Rp1,26 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pos-pos cadangan klaim (Penurunan sesuai hasil perhitungan aktuaris), Utang Penjaminan Ulang (Penurunan utang ke Mitra Re) dan Akrual dan Utang Lain-Lain (Penurunan jumlah setoran Jaminan).

Until the end of 2024, the total liabilities of Jamkrindo Syariah were recorded at IDR 1.16 trillion, which decreased by 7.52% or equivalent to IDR 94.55 billion when compared to the previous year's of IDR 1.26 trillion. This was mainly influenced by claims reserves (decrease according to the results of actuarial calculations), Reinsurance Payables (decrease in payables to Mitra Re) and Accruals and Other Payables (decrease in the amount of guarantee deposits).

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas Tahun 2023-2024
Table of Equity for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Penyertaan Modal Equity Participation	705.620	705.620	0	0,00%
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja Remeasurement of Post-Employment Benefits	1.179	450	729	162,00%
Kerugian yang belum direalisasikan atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Unrealised losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax	3.914	(468)	4.382	-936,32%
Saldo Laba Retained Earnings				

Tabel Ekuitas Tahun 2023-2024
Table of Equity for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Ditentukan penggunaannya Appropriated retained earnings	488.518	454.630	33.888	7,45%
Tidak ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings	54.105	33.889	20.216	59,65%
Total Ekuitas Total Equity	1.245.509	1.194.121	51.388	4,30%

Total ekuitas Jamkrindo Syariah pada tahun 2024 mencapai Rp1,25 triliun, naik Rp51,39 miliar atau setara dengan 4,30% bila dibandingkan dengan posisi tahun 2023 yang tercatat Rp1,19 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh hasil kinerja perusahaan selama tahun 2024.

Jamkrindo Syariah's total equity in 2024 reached IDR 1.25 trillion, an increase of IDR 51.39 billion or equivalent to 4.30% when compared to the position in 2023 which was recorded at IDR 1.19 trillion. This was influenced by the results of the company's performance during 2024.

Laporan Laba (Rugi)

Profit (Loss) Statement

Tabel Laporan Laba (Rugi) Tahun 2023-2024
Table of Profit (Loss) Statement for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Jumlah Pendapatan Kafalah Total Kafalah Income	254.186	333.437	(79.251)	-23,77%
Jumlah Beban Kafalah Total Kafalah Income	(87.119)	(253.217)	166.098	-65,60%
Pendapatan Kafalah Bersih Net Kafalah Income	167.067	80.220	86.847	108,26%
Pendapatan Investasi Investment Income	93.786	85.822	7.964	9,28%
Beban Usaha Operating Expenses	200.838	(128.258)	329.096	-256,59%
Beban Lain-Lain Bersih Other Expenses - Net	5.885	(9.770)	15.655	-160,24%
Laba Sebelum Zakat dan Pajak Penghasilan Profit Before Zakat and Income Tax	54.130	28.014	26.116	93,22%
Zakat Zakat	(1.353)	(700)	(653)	93,29%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	52.777	27.314	25.463	93,22%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	1.329	6.575	(5.246)	-79,79%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	54.105	33.889	20.216	59,65%

Pada tahun 2024, Jamkrindo Syariah mencatat pendapatan kafalah bersih sebesar Rp167,06 miliar, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp80,22 miliar. Sementara itu, Pendapatan Investasi Bruto naik 9,28% atau setara dengan Rp7,96 miliar dari Rp85,82 miliar di tahun 2023 menjadi Rp93,79 miliar. Dengan demikian, Jamkrindo Syariah membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp54,11 miliar, meningkat sebesar 59,65% atau Rp20,22 miliar bila dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yang mencapai Rp33,89 miliar.

In 2024, Jamkrindo Syariah recorded a net kafalah income of IDR 167.06 billion, a increase compared to the previous year's figure of IDR 80.22 billion. Meanwhile, Gross Investment Income increased by 9.28% or equivalent to IDR 7.96 billion from IDR 85.82 billion in 2023 to IDR 93.79 billion. Thus, Jamkrindo Syariah recorded profit for the year of IDR 54.11 billion, an increase of 59.65% or IDR 20.22 billion compared to the previous year's acquisition of IDR 33.89 billion.

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECTS

Berkaitan dengan aspek pemasaran, Jamkrindo saat ini memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 9 (sembilan) Kantor Wilayah, 1 (satu) Kantor Cabang Khusus, 10 (sepuluh) Kanca tipe A, 7 (tujuh) Kanca tipe B1, 10 (sepuluh) Kanca tipe B2, 7 (tujuh) Kanca tipe C1, 8 (delapan) Kanca tipe C2, 8 (delapan) Kanca tipe C3, dan 3 (tiga) Kanca tipe D, serta 17 (tujuh belas) Kantor Unit Pelayanan dan 12 (dua belas) Digital Business Unit (DBU). Selain itu, Jamkrindo juga memiliki anak perusahaan, yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, yang fokus melayani mitra bisnis berbasis Syariah.

Adapun untuk memperkuat strategi pemasarannya, Jamkrindo terus melakukan pengembangan dengan merumuskan 6 inisiatif strategis yang berfokus pada penguatan bisnis dan pemasaran, antara lain:

Regarding the marketing aspect, Jamkrindo currently has a network consisting of 9 (nine) Regional Offices, 1 (one) Special Branch Office, 10 (ten) Type A Branches, 7 (seven) Type B1 Branches, 10 (ten) Type B2 Branches, 7 (seven) Type C1 Branches, 8 (eight) Type C2 Branches, 8 (eight) Type C3 Branches, and 3 (three) Type D Branches, as well as 17 (seventeen) Service Units and 12 (twelve) Digital Business Units (DBU). Furthermore, Jamkrindo also has a subsidiary, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, which focuses on serving Sharia-based business partners.

As for strengthening its marketing strategy, Jamkrindo continues to develop by formulating 6 strategic initiatives focused on strengthening business and marketing, as listed below:

Inisiatif Strategis Strategic initiatives	Kebijakan Policies
Memperkuat portofolio produk existing, baru, dan kolaborasi Holding dan BUMN berorientasi pada profitabilitas Strengthen existing, new, and collaborative product portfolios of Holding and profitability-oriented SOEs	- Kelompok produk dengan profitabilitas tinggi didorong untuk bertumbuh - Kelompok produk dengan profitabilitas rendah dapat dipertahankan bila secara teknis dapat diperbaiki - Kolaborasi BUMN dilakukan pada produk dengan profitabilitas tinggi pada sektor industri yang potensial - Pengembangan produk mengikuti strategi bisnis Holding dan regulasi yang berlaku - Penyelenggaraan bisnis penjaminan memperhatikan prinsip risiko/<i>prudent</i> - Product groups with high profitability are encouraged to grow - Product groups with low profitability can be maintained if they can be technically improved. - SOE collaboration is carried out on products with high profitability in potential industrial sectors - Product development follows the Holding business strategy and applicable regulations - The implementation of the guarantee business pays attention to the principle of risk / <i>prudent</i>
Memperkuat portofolio usaha dan investasi Strengthen business and investment portfolio	- Diversifikasi usaha harus terkait dengan bisnis inti perusahaan dan strategi bisnis Holding - Pengelolaan portofolio usaha dan investasi memperhatikan prinsip <i>prudent</i> dan efektif - Laba dari anak perusahaan digunakan sepenuhnya untuk memperkuat permodalan perusahaan tersebut sehingga dapat mendukung peningkatan kapasitas penjaminan - Business diversification must be related to the company's core business and Holding's business strategy - Management of business and investment portfolios pay attention to <i>prudent</i> and effective principles - Profits from subsidiaries are fully utilized to strengthen the capital of the company so that it can support the increase in guarantee capacity
Memperkuat & mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar Strengthen & develop partnership network for market penetration & expansion	- Pengembangan jejaring tidak dengan membuka unit kerja baru (milik Jamkrindo) - Pengembangan jejaring menekankan kepada upaya anorganik - Pengembangan jejaring dengan memanfaatkan potensi Holding - Network development is not by opening a new work unit (owned by Jamkrindo) - Network development emphasizes inorganic efforts - Network development by utilizing the potential of Holding

Inisiatif Strategis Strategic initiatives	Kebijakan Policies
Meningkatkan preferensi pelanggan terhadap produk Jamkrindo Increase customer preference for Jamkrindo products	- Upaya peningkatan brand preference ditujukan kepada berbagai stakeholder secara berimbang dengan memperhatikan ketepatan media yang digunakan - Upaya peningkatan brand preference dengan memanfaatkan kekuatan branding Holding - Efforts to increase brand preference are aimed at various stakeholders in a balanced manner by paying attention to the accuracy of the media used - Efforts to increase brand preference by utilizing the strength of Holding branding
Meningkatkan loyalitas pelanggan & mitra melalui CRM Increase customer & partner loyalty through CRM	- Pengelolaan hubungan ditujukan kepada penerima jaminan dan terjamin secara seimbang - Pengelolaan hubungan dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika dan kepatuhan - Relationship management is aimed at guaranteed and guaranteed recipients in a balanced manner - Relationship management is done by paying attention to the principles of ethics and compliance
Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI Improve quality and coverage of IT-based customer services	- Pengembangan aplikasi berdasarkan prinsip business case (manfaat) yang dapat dipertanggungjawabkan - Peningkatan kapabilitas IT bersama Holding - Application development based on the principle of business cases (benefits) that can be accounted for - Increased IT capability with Holding

Pangsa Pasar

Menurut data OJK per Desember 2024, terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang beroperasi di industri penjaminan. Jumlah ini terdiri dari 1 (satu) perusahaan BUMN, yaitu Jamkrindo, 17 (tujuh belas) Perusahaan Penjaminan Daerah (Konvensional), 1 (satu) Perusahaan Penjaminan Daerah Syariah, 2 (dua) Perusahaan Penjaminan Swasta Konvensional, dan 1 (satu) Perusahaan Penjaminan Swasta Syariah.

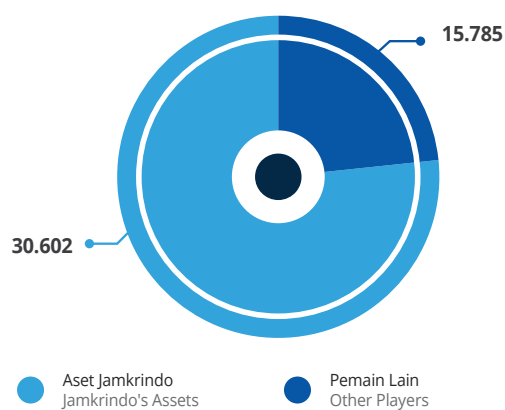
Market Share

According to OJK data as of December 2024, there are 23 (twenty-three) companies operating in the guarantee industry. This number comprises of 1 (one) SOE Company, namely Jamkrindo, 17 (seventeen) Regional Guarantee Companies (Conventional), 1 (one) Sharia Regional Guarantee Company, 2 (two) Conventional Private Guarantee Companies, and 1 (one) Sharia Private Guarantee Company.

Keterangan Description	Jumlah Industri (Unit) Number of Industries (Unit)	Aset (miliar Rp) Assets (IDR-billion)	Liabilitas (miliar Rp) Liabilities (IDR-billion)	Ekuitas (miliar Rp) Equity (IDR-billion)
Perusahaan Penjaminan BUMN (Konvensional) SOE Guarantee Company (Conventional)	1	30.602	17.880	12.722
Perusahaan Penjaminan Daerah (Konvensional) Regional Guarantee Company (Conventional)	17	5.898	3.362	2.537
Perusahaan Penjaminan Daerah Syariah Sharia Regional Guarantee Company	1	54	14	40
Perusahaan Penjaminan Swasta Konvensional Conventional Private Guarantee Company	2	3.606	3.182	424
Perusahaan Penjamin Swasta Syariah Sharia Private Guarantee Company	9	6.227	3.580	2.647
Jumlah Total	23	46.387	28.018	18.369

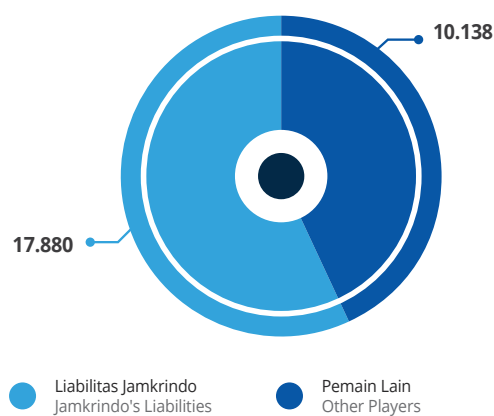
Aset Assets

2024



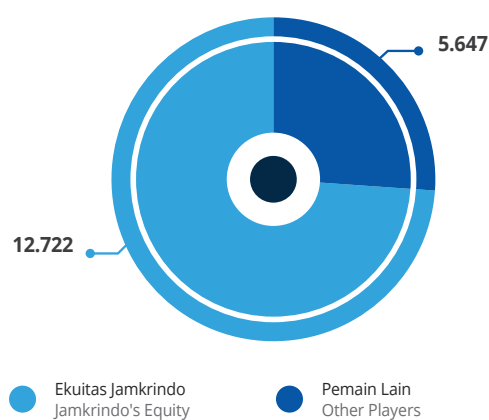
Liabilitas Liabilities

2024



Ekuitas Equity

2024



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Tinjauan keuangan pada Laporan Tahunan ini didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Laporan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan opini wajar tanpa pengecualian. Audit dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia serta revisi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang relevan dengan kegiatan operasional dan berdampak pada laporan keuangan per 31 Desember 2024.

The financial review in this Annual Report is based on the Company's Consolidated Financial Statements for the year ending on December 31, 2024. This report has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) with an unqualified opinion. The audit was conducted in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and revisions issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, which are relevant to the operations and impact the financial statements as of December 31, 2024.

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

Tabel Laporan Posisi Keuangan Tahun 2023-2024
Table of Statement of Financial Position for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Jumlah Aset Total Assets	32.358.328	32.231.220	127.114	0,39%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	19.014.093	18.877.198	136.895	0,73%
Jumlah Ekuitas Total Equity	13.344.235	13.354.022	(9.787)	-0,07%

*Reklasifikasi
*Reclassification

Aset

Assets

Tabel Aset Tahun 2023-2024
Table of Assets for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Kas dan Kas di Bank Cash and Cash in Bank	235.074	185.130	49.944	26,98%
Deposito Wajib dan Berjangka – Bersih Statutory and Time Deposits – Net	3.960.252	7.233.120	(3.272.868)	-45,25%
Deposito Berjangka untuk Tujuan Tertentu – Bersih Time Deposits for Specific Purposes – Net	1.542.272	1.552.271	(9.999)	-0,64%
Efek-Efek – Bersih Securities – Net	17.633.481	14.745.121	2.888.360	19,59%
Piutang Imbal Jasa Penjaminan – Bersih Guarantee Fee Receivables – Net	1.820.100	2.737.976	(917.876)	-33,52%
Piutang Penjaminan Ulang – Bersih Re-guarantee Receivables – Net	572.966	582.178	(9.212)	-1,58%
Piutang Hasil Investasi – Bersih Investment Income Receivables – Net	256.978	224.895	32.083	14,27%

Tabel Aset Tahun 2023-2024
Table of Assets for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Uang Muka Pajak Prepaid Tax	119.514	50.415	69.099	137,06%
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	46.589	65.385	(18.796)	-28,75%
Aset Tetap – Bersih Fixed Assets - Net	721.504	626.808	94.696	15,11%
Aset Tak Berwujud – Bersih Intangible Assets - Net	101.268	68.202	33.066	48,48%
Penjaminan Ulang Dibayar di Muka Prepaid Re-guarantee	1.497.582	936.226	561.356	59,96%
Aset Pengembalian Reimbursement Asset	1.414.594	791.644	622.950	78,69%
Biaya Akuisisi Tangguhan Deferred Acquisition Cost	117.558	147.381	(29.823)	-20,24%
Aset Penjaminan Ulang Re-guarantee Assets	321.817	354.324	(32.507)	-9,17%
Aset Pajak Tangguhan – Bersih Deferred Tax Assets – Net	1.833.252	1.925.862	(92.610)	-4,81%
Aset Lain-Lain – Bersih Other Assets - Net	5.361	4.282	1.079	25,20%
Jumlah Aset Total Assets	32.358.328	32.231.220	127.108	0,39%

*Reklasifikasi
*Reclassification

Per 31 Desember 2024, Jumlah Aset Jamkrindo tercatat sebesar Rp32,36 triliun, mengalami kenaikan 0,39% atau senilai Rp0,13 triliun bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp32,23 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan bisnis yang tercermin dari naiknya kas dan setara kas.

As of December 31, 2024, Jamkrindo's total assets was recorded at IDR 32.36 trillion, reflecting an increase of 0.39% or IDR 0.13 trillion compared to the previous year's figure of IDR 32.23 trillion. This is mainly caused by an increase in business which is reflected in the increase in cash and cash equivalents.

Kas dan Kas di Bank

Cash and Cash in Bank

Tabel Kas Kas dan Kas di Bank Tahun 2023-2024
Table of Cash and Cash in Bank for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Kas Cash	1.464	1.228	236	19,22%
Giro Current Account				
Pihak Berelasi Related Parties	131.541	139.766	(8.225)	-5,88%
Pihak Ketiga Third Parties	102.082	44.140	57.942	131,27%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	(13)	(4)	(9)	225,00%
Jumlah Giro Total Current Account	235.074	185.130	49.944	26,98%

Jamkrindo mencatatkan jumlah kas dan kas di Bank pada tahun 2024 sebesar Rp235,07 miliar, meningkat sebesar Rp49,94 miliar atau setara 26,98% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp185,13 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan Imbal Jasa Penjaminan yang cukup besar pada akhir tahun 2024.

In 2024, Jamkrindo recorded a total cash and cash at banks of IDR 235.07 billion, an increase of IDR 49.94 billion or equivalent to 26.98% compared to the previous year's figure of IDR 185.13 billion. This is due to the receipt of a substantial Guarantee Service Fee at the end of 2024.

Deposito Wajib dan Berjangka

Statutory and Time Deposits

Tabel Deposito Wajib dan Berjangka Tahun 2023-2024
Table of Statutory and Time Deposits for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Deposito Deposits				
Pihak Berelasi Related Parties	3.397.390	6.499.226	(3.101.836)	-47,73%
Pihak Ketiga Third Parties	562.953	734.071	(171.118)	-23,31%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	(91)	(177)	86	-48,59%
Jumlah Deposito Total Deposits	3.960.252	7.233.120	(3.272.868)	-45,25%

Jumlah deposito wajib dan berjangka Jamkrindo tercatat mengalami penurunan sebesar Rp3,27 triliun dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp7,23 triliun menjadi Rp3,96 triliun di tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena adanya shifting aset investasi dari deposito wajib dan berjangka ke aset kelas obligasi yang bertujuan untuk pengelolaan aset investasi dengan tingkat imbal hasil investasi yang lebih optimal.

The amount of Jamkrindo's statutory and time deposits decreased by IDR 3.27 trillion from IDR 7.23 trillion in 2023 to IDR 3.96 trillion in 2024. This decrease occurred due to the shifting of investment assets from mandatory and term deposits to bond class assets aimed at managing investment assets with a more optimal level of investment returns.

Efek-Efek

Securities

Tabel Efek-Efek Tahun 2023-2024
Table of Marketable Securities for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Nilai Wajar Melalui Laba Rugi: Fair Value Through Profit or Loss:				
Reksadana Mutual Fund	1.427.037	1.459.975	(32.938)	-2,26%
Obligasi Bonds	1.524.511	599.641	924.870	154,24%
Sukuk	113.765	10.094	103.671	1.027,06%
Efek Beragun Aset Asset-backed Securities	628	3.063	(2.435)	-79,50%

Tabel Efek-Efek Tahun 2023-2024
Table of Marketable Securities for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain: Fair Value Through Other Comprehensive Income:				
Obligasi Bonds	4.898.169	4.769.589	128.580	2,70%
Sukuk	2.357.489	2.508.432	(150.943)	-6,02%
Saham Shares	175.740	184.154	(8.414)	-4,57%
Biaya Perolehan Diamortisasi: Amortized Cost:				
Obligasi Bonds	5.832.920	3.067.887	2.765.033	90,13%
Sukuk	1.462.393	2.143.677	(681.284)	-31,78%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	(1.005)	(1.391)	386	-27,75%
Jumlah Efek-Efek Total Securities	17.791.647	14.745.121	3.046.526	20,66%

Jumlah efek-efek Jamkrindo per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp17,79 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp3,05 triliun atau 20,66% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp14,75 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pembelian aset investasi baru dari shifting asset kelas aset deposito dan optimalisasi dana idle yang diprioritaskan pada instrumen surat utang seperti obligasi negara dan obligasi korporasi sesuai risk appetite Jamkrindo.

The amount of Jamkrindo's securities as of December 31, 2024 was recorded at Rp17.79 trillion, an increase of Rp3.05 trillion or 20.66% when compared to the previous year which was recorded at Rp14.75 trillion. This increase was due to the purchase of new investment assets from shifting deposit asset classes and optimizing idle funds prioritized in debt instruments such as state bonds and corporate bonds according to Jamkrindo's risk appetite.

Piutang Imbal Jasa Penjaminan

Guarantee Fee Receivables

Tabel Piutang Imbal Jasa Penjaminan Tahun 2023-2024
Table of Guarantee Fee Receivables for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Berdasarkan Pihak: By Parties:				
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1.528.861	1.663.631	(134.770)	-8,10%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.017.358	1.382.499	(365.141)	-26,41%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	877.411	751.421	125.990	16,77%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	361.200	553.208	(192.008)	-34,71%
Berbagai Bank Pembangunan Daerah Various Regional Development Banks	327.647	234.956	92.691	39,45%
Bank swasta Private Banks	32.456	31.587	869	2,75%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	17.799	15.634	2.165	13,85%

Tabel Piutang Imbal Jasa Penjaminan Tahun 2023-2024
Table of Guarantee Fee Receivables for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Lain-Lain Others	23.209	131.765	(108.556)	-82,39%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	(2.365.841)	(2.026.725)	(339.116)	16,73%
Jumlah Piutang Jasa Penjaminan Total Guarantee Fee Receivables	1.820.100	2.737.976	(917.876)	-33,52%

Pada tahun 2024, Jamkrindo mencatatkan jumlah piutang penjaminan ulang sebesar Rp1,82 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp0,92 triliun atau 33,52% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp2,74 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pembayaran imbal jasa penjaminan dari mitra penerima penjaminan.

The amount of Jamkrindo's reguarantee receivables as of December 31, 2024 was recorded at IDR 17.79 trillion, an increase of IDR 3.05 trillion or 33.52% compared to the previous year's figure of IDR 14.74 trillion. This decrease was due to the payment of guarantee fees from the guarantee recipient partners.

Piutang Penjaminan Ulang

Re-guarantee Receivables

Tabel Piutang Penjaminan Ulang Tahun 2023-2024
Table of Re-guarantee Receivables for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Berdasarkan Pihak: By Parties:				
PT Reasuransi Nasional Indonesia	451.040	453.973	(2.933)	-0,65%
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	233.514	209.319	24.195	11,56%
PT Asuransi Syariah Mubarakah	72.705	72.705	-	0,00%
PT Reasuransi Syariah Indonesia	106.094	88.063	18.031	20,48%
PT Heksa Solution Insurance	13.305	16.456	(3.151)	-19,15%
PT BRI Asuransi Indonesia	6.355	6.355	-	0,00%
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	1.290	4.914	(3.624)	-73,75%
PT Tugu Reasuransi Indonesia	-	-	-	0,00%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	(311.337)	(269.607)	(41.730)	15,48%
Jumlah Piutang Penjaminan Ulang Total Re-guarantee Receivables	572.966	582.178	(9.212)	-1,58%

Sepanjang tahun 2024, Jamkrindo mencatatkan jumlah piutang penjaminan ulang senilai Rp572,97 miliar, turun sebesar Rp9,21 miliar atau 1,58% bila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp582,18 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya pembayaran piutang penjaminan ulang dari mitra penjaminan ulang.

Throughout 2024, Jamkrindo recorded a total re-guarantee receivables of IDR 572.97 billion, a decrease of IDR 9.21 billion or 1.58% compared to the previous year of IDR 582.18 billion. This is mainly influenced by payment of re-guarantee receivables from re-guarantee partners.

Piutang Hasil Investasi

Investment Income Receivables

Tabel Piutang Hasil Investasi Tahun 2023-2024
Table of Investment Income Receivables for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Obligasi Bonds	182.351	202.851	(20.500)	-10,11%
Deposito Berjangka Time Deposits	6.301	9.805	(3.504)	-35,74%
Sukuk	68.321	12.298	56.023	455,55%
Efek Beragun Aset Asset-backed Securities	5	22	(17)	-77,27%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	-	(81)	81	-100%
Jumlah Piutang Hasil Investasi Total Investment Income Receivables	256.978	224.895	32.083	14,27%

Per 31 Desember 2024, jumlah piutang hasil investasi yang dicatatkan oleh Jamkrindo sebesar Rp256,98 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp32,08 miliar atau 14,27% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp224,90 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan efek-efek Jamkrindo.

As of December 31, 2024, the total investment income receivables recorded by Jamkrindo was IDR 256.98 billion, an increase of IDR 32.08 billion or 14.27% compared to the previous year of IDR 224.90 billion. This was due to an increase in Jamkrindo's securities.

Aset Tetap

Fixed Assets

Tabel Aset Tetap Tahun 2023-2024
Table of Fixed Assets for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Biaya Perolehan Acquisition Cost				
Kepemilikan Langsung Direct Ownership				
Tanah Land	287.500	256.758	30.742	11,97%
Bangunan Kantor Office Buildings	323.422	254.379	69.043	27,14%
Perumahan Dinas Houses	11.225	10.028	1.197	11,94%
Inventaris Kantor Office Equipment	235.424	209.098	26.326	12,59%
Inventaris Rumah Dinas Official Residence Equipment	7.135	6.052	1.083	17,89%
Kendaraan Bermotor Motorized Vehicles	34.558	36.475	(1.917)	-5,26%
Aset dalam Penyelesaian Assets in Progress	14.634	19.167	(4.533)	-23,65%

Tabel Aset Tetap Tahun 2023-2024
Table of Fixed Assets for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Aset Hak Guna Right-of-use Assets				
Bangunan Kantor Office Buildings	63.274	61.745	1.529	2,48%
Kendaraan Bermotor Motorized Vehicles	88.515	72.665	15.850	21,81%
Inventaris Kantor Office Equipment	159	159	0	0,00%
Jumlah Biaya Perolehan Total Acquisition Cost	1.065.846	926.526	139.320	15,04%
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation				
Bangunan Kantor Office Buildings	(58.869)	(50.492)	(8.377)	16,59%
Perumahan Dinas Houses	(4.161)	(3.657)	(504)	13,78%
Inventaris Kantor Office Equipment	(161.321)	(138.911)	(22.410)	16,13%
Inventaris Rumah Dinas Official Residence Equipment	(5.255)	(4.510)	(745)	16,52%
Kendaraan Bermotor Motorized Vehicles	(34.059)	(236.272)	202.213	-85,58%
Aset Hak Guna Right-of-use Assets				
Bangunan Kantor Office Buildings	(35.142)	(37.444)	2.302	-6,15%
Kendaraan Bermotor Motorized Vehicles	(45.388)	(28.315)	(17.073)	60,30%
Inventaris Kantor Office Equipment	(147)	(117)	(30)	25,64%
Jumlah Akumulasi Penyusutan Total Accumulated Depreciation	(344.342)	(299.718)	(44.624)	14,89%
Jumlah Aset Tetap - Bersih Total Fixed Assets - Net	721.504	626.808	94.713	15,11%

Hingga akhir 2024, jumlah aset tetap Jamkrindo tercatat sebesar Rp721,50 miliar, naik sebesar Rp94,71 miliar atau 15,11% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp626,80 miliar. Adapun peningkatan ini disebabkan oleh adanya pembelian atas aset tetap terutama aset gedung kantor.

Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Jamkrindo tercatat sebesar Rp101,25 miliar pada tahun 2024, angka ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp33,05 miliar atau 48,46% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp68,20 miliar. Hal ini terutama didorong oleh adanya pembelian atas aset- aset terkait teknologi dan informasi (*software* ataupun aplikasi).

Until the end of 2024, Jamkrindo's total fixed assets were recorded at IDR 721.50 billion, an increase of IDR 94.71 billion or 15.11% when compared to the previous year of IDR 626.80 billion. The increase is due to the purchase of fixed assets, especially office building assets.

Intangible Asset

In 2024, Jamkrindo's intangible assets were recorded at IDR 101.25 billion, this figure shows an increase of IDR 33.05 billion or 48.46% compared to the previous year of IDR 68.20 billion. This is mainly driven by purchase of assets related to technology and information (*software* or applications).

Deposito di Bank yang Dibatasi Penggunaannya

Restricted Deposit in Banks

Tabel Deposito di Bank yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2023-2024

Table of Restricted Deposits in Banks for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000	200.000	-	0,00%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	745.139	755.139	(10.000)	-1,32%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	421.000	421.000	-	0,00%
Berbagai Bank Pembangunan Daerah Various Regional Development Banks	47.900	47.900	-	0,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	125.140	125.140	-	0,00%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk – Unit Syariah	3.094	3.094	-	0,00%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	(1)	(2)	1	-50,00%
Jumlah Deposito di Bank yang Dibatasi Penggunaannya Total Restricted Deposit in Banks	1.542.272	1.552.271	(9.999)	-0,64%

Jumlah deposito di bank yang dibatasi penggunaannya Jamkrindo sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1,54 triliun, turun sebesar Rp0,01 triliun atau 0,64% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp1,55 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya penurunan rasio commercial lines.

Jamkrindo's restricted bank deposits as of December 31, 2024 were recorded at IDR 1.54 trillion, a decrease of IDR 0.01 trillion or 0.64% compared to the previous year's figure of IDR 1.55 trillion. This was mainly due to a decrease in the commercial lines ratio.

Penjaminan Ulang Dibayar di Muka

Prepaid Re-guarantee

Penjaminan Ulang Dibayar di Muka Tahun 2023-2024

Table of Prepaid Reguarantee for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Kredit Usaha Rakyat (KUR) People's Business Credit (KUR)	488.655	258.785	229.870	88,83%
Konsumtif Consumptive	244.504	286.869	(42.365)	-14,77%
Produktif Productive	756.917	357.271	399.646	111,86%
PEN	-	20.569	(20.569)	-100,00%
Suretyship	7.506	12.732	(5.226)	-41,05%
Jumlah Penjaminan Ulang Dibayar di Muka Total Prepaid Re-guarantee	1.497.582	936.226	561.356	59,96%

Jamkrindo mencatatkan kenaikan jumlah penjaminan ulang dibayar di muka senilai Rp561,36 miliar atau setara 59,96% dari Rp936,22 miliar di tahun 2023 menjadi Rp1,50 triliun di tahun 2024. Kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan porsi penjaminan ulang sebagai bentuk peningkatan mitigasi risiko.

Jamkrindo recorded an increase in prepaid re-guarantee amounting to IDR 561.36 billion or equivalent to 59.96%, from IDR 936.22 billion in 2023 to IDR 1.50 trillion in 2024. This increase occurred due to an increase in the portion of re-guarantee as a form of increased risk mitigation.

Aset Lain-Lain

Other Assets

Tabel Aset Lain-Lain Tahun 2023-2024
Table of Other Assets from 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Klaim dalam Proses Claim in Process	56.038	56.442	(404)	-0,72%
Piutang Investasi Jatuh Tempo Receivables from Matured Investment	9.428	9.428	-	0,00%
Pinjaman Bagi Hasil Profit Sharing Loan	17.348	17.110	238	1,39%
Aset Lainnya Other Assets	9.392	7.319	2.073	28,32%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	(86.845)	(86.017)	(828)	0,96%
Jumlah Aset Lain-Lain Total Other Assets	5.361	4.282	1.079	25,20%

Per 31 Desember 2024, jumlah aset lain-lain Perusahaan tercatat sebesar Rp5,36 miliar, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp1,08 miliar atau 25,20% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp4,28 miliar. Hal ini terutama didorong oleh adanya kenaikan nilai premium atas pengelolaan investasi.

As of December 31, 2024, the Company's total other assets were recorded at IDR 5.36 billion, this figure shows an increase of IDR 1.08 billion or 25.20% compared to the previous year's figure of IDR 4.28 billion. This is mainly driven by an increase in the premium value of investment management.

Liabilitas

Liabilities

Tabel Liabilitas Tahun 2023-2024
Table of Liabilities for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Utang Penjaminan Ulang Re-guarantee Payables	1.005.112	633.300	371.812	58,71%
Akrual dan Utang Lain-Lain Accruals and Other Payables	1.408.359	1.535.414	(127.055)	-8,27%
Utang Pajak Tax Payables	6.352	129.408	(123.056)	-95,09%
Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan Liabilities for Financial Guarantee Contracts	14.939.747	15.211.466	(271.719)	-1,79%
Pendapatan Komisi Ditangguhkan Deferred Commission Income	246.352	159.158	87.194	54,78%
Estimasi Liabilitas Klaim Estimated Claim Liabilities	307.561	358.504	(50.943)	-14,21%
Imbal Jasa Kafalah Ditangguhkan Deferred Kafalah Fees	719.826	686.139	33.687	4,91%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	81.558	82.437	(879)	-1,07%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	19.014.093	18.877.198	136.895	0,73%

*Reklasifikasi
*Reclassification

Hingga akhir 2024, jumlah liabilitas Jamkrindo sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp19,01 triliun, naik sebesar Rp0,14 triliun atau 0,73% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp18,88 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan utang klaim dikarenakan meningkatnya persetujuan klaim tahun 2024 dibanding tahun 2023.

Utang Klaim

Utang klaim Jamkrindo per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp299,23 miliar, naik sebesar Rp217,85 miliar atau 267,73% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp81,37 miliar. Adapun peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya persetujuan klaim tahun 2024 dibanding tahun 2023.

Utang Penjaminan Ulang

Until the end of 2024, Jamkrindo's total liabilities as of December 31, 2024 were recorded at IDR 19.01 trillion, an increase of IDR 0.14 trillion or 0.73% compared to the previous year's figure of IDR 18.88 trillion. This increase is mainly influenced by the increase in claims payable is due to the increase in claims approval in 2024 compared to 2023.

Claim Payables

Jamkrindo's claim payables as of December 31, 2024, were recorded at IDR 299.23 billion, an increase of IDR 217.85 billion or 267.73% compared to the previous year's figure of IDR 81.37 billion. This increase is due to increased claim approvals in 2024 compared to 2023.

Re-guarantee Payables

Tabel Utang Penjaminan Ulang Tahun 2023-2024
Table of Re-guarantee Payables for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Pihak Berelasi Related Parties	1.005.112	633.300	371.812	58,71%
Pihak Ketiga Third Parties	-	-	-	-
Jumlah Utang Penjaminan Ulang Total of Re-guarantee Payables	1.005.112	633.300	371.812	58,71%

Perusahaan mencatatkan jumlah utang penjaminan ulang sebesar Rp1,01 triliun, meningkat sebesar Rp0,37 triliun atau 58,71% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp633,30 miliar. Hal ini terutama didorong oleh adanya kenaikan porsi penjaminan ulang sebagai bentuk peningkatan mitigasi risiko.

The Company recorded a total re-guarantee payable of IDR 1.01 trillion, an increase of IDR 0.37 trillion or equivalent to 58.71% compared to the previous year's figure of IDR 633.30 billion. This increase is mainly driven by an increase in the portion of re-guarantee as a form of increased risk mitigation.

Akrual dan Utang Lain-Lain

Accruals and Other Payables

Tabel Akrual dan Utang Lain-Lain Tahun 2023-2024
Table of Accruals and Other Payables for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
IJP Belum Teridentifikasi Unidentified Guarantee Fee (IJP)	75.895	936.002	(860.107)	-91,89%
Beban Pegawai Employee Expenses	331.297	306.409	24.888	8,12%
Subrogasi Belum Teridentifikasi Unidentified Subrogation Income	-	-	-	-
Beban Operasional Operating Expenses	5.650	11.406	(5.756)	-50,46%
Beban Sistem dan Teknologi System and Technology Expenses	62.815	67.226	(4.411)	-6,56%
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	46.548	48.713	(2.165)	-4,44%
Beban Administrasi dan Umum Administrative and General Expenses	66.877	83.035	(16.158)	-19,46%

Tabel Akruai dan Utang Lain-Lain Tahun 2023-2024
Table of Accruals and Other Payables for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Fee Bank Bank Fees	11.587	13.477	(1.890)	-14,02%
Lainnya Others	807.690	69.146	738.544	1.068,09%
Jumlah Akruai dan Utang Lain-Lain Total Accruals and Other Payables	1.408.359	1.535.414	(127.055)	-8,27%

Sepanjang tahun 2024, Jamkrindo mencatatkan jumlah akrual dan utang lain-lain sebesar Rp1,41 triliun, angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp0,13 triliun atau 8,27% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1,53 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan identifikasi atas uang masuk untuk pembayaran piutang imbal jasa penjaminan dari mitra penjaminan.

Sepanjang tahun 2024, Jamkrindo mencatatkan jumlah akrual dan utang lain-lain sebesar Rp1,41 triliun, angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp0,13 triliun atau 8,27% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1,53 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan identifikasi atas uang masuk untuk pembayaran piutang imbal jasa penjaminan dari mitra penjaminan.

Utang Pajak

Tax Payables

Tabel Utang Pajak Tahun 2023-2024
Table of Tax Payables for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Entitas Induk Parent Entity	5.828	124.901	(119.073)	-95,33%
Entitas Anak Subsidiary	524	4.507	(3.983)	-88,37%
Jumlah Utang Pajak Total Tax Payables	6.352	129.408	(123.056)	-95,09%

Hingga akhir 2024, jumlah utang pajak Perusahaan mencapai Rp6,35 miliar, turun sebesar Rp123,06 miliar atau 95,09% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp129,41 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh tidak terdapatnya Utang PPh Pasal 29 Tahun 2024.

Until the end of 2024, the Company's tax payables amounted to IDR 6.35 billion, a decrease of IDR 123.06 billion or equivalent to 95.09% compared to the previous year's figure of IDR 129.41 billion. This decrease is primarily influenced by the absence of Income Tax Payable under Article 29 of 2024.

Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan

Liabilities for Financial Guarantee Contracts

Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan Tahun 2023-2024
Table of Liabilities for Financial Guarantee Contracts for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Kredit Usaha Rakyat People's Business Credit	8.616.594	8.944.482	(327.888)	-3,67%
Konsumtif Consumptive	549.626	1.236.876	(687.250)	-55,56%
Produktif Productive	5.588.472	4.527.198	1.061.274	23,44%

Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan Tahun 2023-2024
Table of Liabilities for Financial Guarantee Contracts for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
PEN	147.711	482.352	(334.641)	-69,38%
Suretyship	37.344	20.558	16.786	81,65%
Jumlah Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan Total Liabilities for Financial Guarantee Contracts	14.939.747	15.211.466	(271.719)	-1,79%

Jumlah liabilitas kontrak jaminan keuangan Perusahaan tercatat senilai Rp14,94 triliun, yaitu menurun sebesar Rp0,27 triliun atau setara 1,79% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat Rp15,21 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan outstanding klaim dalam proses tahun 2024 dibanding tahun 2023 yang disebabkan klaim tersebut telah disetujui di tahun 2024 yang tergambar dari meningkatnya beban klaim dari tahun 2023.

The Company's total liabilities for financial guarantee contracts were recorded at IDR 14.94 trillion, a decrease of IDR 0.27 trillion or equivalent to 1.79% compared to the previous year's figure of IDR 15.21 trillion. This is due to a decrease in outstanding claims in process in 2024 compared to 2023 due to the claim being approved in 2024 which is reflected in the increase in claim expenses from 2023.

Liabilitas Imbalan Kerja

Jamkrindo mencatatkan penurunan jumlah liabilitas imbalan kerja senilai Rp0,88 miliar atau setara 1,07% dari Rp82,43 miliar di tahun 2023 menjadi Rp81,56 miliar di tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena perubahan kebijakan batas usia pensiun karyawan dan perubahan komponen perhitungan nilai pesangon.

Employee Benefits Liabilities

Jamkrindo recorded a decrease in employee benefits liabilities amounting to IDR 0.88 billion or equivalent to 1.07%, from IDR 82.43 billion in 2023 to IDR 81.56 billion in 2024. This decrease is caused by the changes in employee retirement age policy and changes in the components of severance pay calculation.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas Tahun 2023-2024
Table of Equity for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent entity				
Modal Saham:				
• Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp1.365.160 (nilai penuh) per lembar saham				
• Seri B - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham				
Share Capital:				
• Series A Dwiwarna - nominal value of Rp1,365,160 (full value) per share				
• Series B - nominal value of Rp1,000,000 (full value) per share				
Modal dasar:				
• Seri A Dwiwarna - 1 saham				
• Seri B - 30.000.000 saham				
Authorized Capital:				
• Series A Dwiwarna - 1 share				
• Series B - 30,000,000 shares				

Tabel Ekuitas Tahun 2023-2024
Tabel of Equity for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Modal ditempatkan dan disetor penuh: Seri A Dwiwarna (1 saham Seri B (10.638.732 saham (2020: 7.638.732 saham) Issued and fully paid-up capital: Series A Dwiwarna - 1 share Series B - 10,638,732 shares (2020: 7,638,732 shares)	10.638.733	10.638.733	0	0,00%
Penyertaan modal negara State equity participation	-	-	-	-
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja Remeasurement of post-employment benefits	(17.396)	(19.859)	2.462	-12,40%
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak Unrealized losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax	(360.984)	(265.002)	(95.977)	36,22%
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya Appropriated retained earnings	1.921.543	1.562.455	359.090	22,98%
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings	1.161.456	1.436.849	(275.393)	-19,17%
	13.343.352	13.353.176	(9.818)	-0,07%
Kepentingan non pengendali Non-controlling Interests	883	846	37	4,37%
Jumlah Ekuitas Total Equity	13.344.235	13.354.022	(9.781)	-0,07%

*Reklasifikasi
*Reclassification

Jumlah ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp13,34 triliun, turun sebesar Rp0,01 triliun atau 0,07% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp13,35 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh laba tahun 2024 lebih kecil dibandingkan laba tahun 2023.

Total equity as of December 31, 2024 were recorded at IDR 13.34 trillion, a decrease of IDR 0.01 trillion or equivalent to 0.07% compared to the previous year's figure of IDR 13.35 trillion. This decrease is mainly influenced by profit in 2024 is smaller than profit in 2023.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2023-2024
Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income				
Imbal Jasa Penjaminan Bruto Gross Guarantee Fee Income	7.733.031	6.738.700	994.331	14,76%
Imbal Jasa Kafalah Bruto Gross Kafalah Fees	368.277	408.035	(39.758)	-9,74%
Kenaikan Imbal Jasa Kafalah belum merupakan Pendapatan Increase in Unearned Kafalah Fees	(22.205)	(24.212)	2.007	-8,29%
Premi Penjaminan Ulang Re-guarantee Premiums	(1.157.054)	(767.795)	(389.259)	-50,70%
Jumlah Pendapatan Penjaminan - Bersih Total Guarantee Income - Net	6.922.049	6.354.728	567.321	8,93%

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2023-2024
Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Beban Penjaminan Guarantee Expenses				
Beban Klaim Claim Expenses	9.129.657	5.957.023	3.172.634	53,26%
Klaim Penjaminan Ulang Re-guarantee Claims	(1.068.761)	(788.483)	(280.278)	-35,55%
Beban Ujrah Ujrah Expenses	11.364	15.386	(4.022)	-26,14%
Biaya Kafalah Lainnya Other Kafalah Expenses	-	762	-	-
Kenaikan Cadangan Klaim Increase in Claim Reserves	(1.101.458)	(529.220)	(572.238)	-108,13%
Pendapatan Subrogasi - Bersih Subrogation Income - Net	(1.940.167)	(1.509.417)	(430.750)	-28,54%
Pendapatan Ujrah Penjaminan Ulang Ujrah Re-guarantee Income	(11.244)	(18.719)	7.475	39,93%
Jumlah Beban Klaim Total Claim Expenses	5.019.391	3.577.332	1.442.059	40,31%
Pendapatan Penjaminan Bersih Net Guarantee Income	1.902.658	2.777.396	(874.738)	-31,49%
Komisi - Bersih Commission - Net	127.317	61.313	66.004	107,65%
Pendapatan Investasi - Bersih Investment Income - Net	1.458.916	1.204.178	254.738	21,15%
Beban Usaha Operating Expenses	(2.041.533)	(2.266.001)	224.468	9,91%
Pendapatan Lain-Lain Other Income	7.566	15.099	(7.533)	-49,89%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	1.119.178	1.485.939	(366.761)	-24,68%
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(167.873)	(153.023)	(14.850)	9,70%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	1.287.051	1.638.962	(351.911)	-21,47%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(125.557)	(202.113)	76.556	-37,88%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	1.161.494	1.436.849	(275.355)	-19,16%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income				
Pos-Pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Items that will not be Reclassified to Profit or Loss:				
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Remeasurement of Post-Employment Benefits	3.158	(670)	3.828	571,34%
Efek Pajak Terkait Related Tax Effects	(695)	135	(830)	-614,81%
	2.463	(535)	2.998	560,37%
Kerugian yang belum Terealisasi Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual Unrealized Losses on Available-for-Sale Financial Assets	(8.413)	(9.473)	1.060	-11,19%

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2023-2024
Consolidated Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: Items that will be Reclassified to Profit or Loss:				
Keuntungan yang Belum Terealisasi Aset Keuangan yang Tersedia untuk Dijual Unrealized Losses on Available-for-Sale Financial Assets	(88.673)	67.368	(156.041)	-231,62%
Efek Pajak Terkait Related Tax Effects	1.104	157	947	603,18%
	(87.569)	67.525	(155.094)	-229,68%
(Kerugian)/Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak Other Comprehensive (Loss)/Income for the Year, After Tax	(93.519)	57.517	(151.036)	-262,59%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	1.067.975	1.494.366	(426.391)	-28,53%
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	1.161.456	1.437.013	(275.557)	-19,18%
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	38	(164)	202	123,17%
	1.161.494	1.436.849	(275.355)	-19,16%
Laba Komprehensif Diatribusikan kepada: Comprehensive Income Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	1.067.938	1.494.520	(426.582)	-28,54%
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	37	(154)	191	124,03%
	1.067.975	1.494.366	(426.391)	-28,53%

*Reklasifikasi
*Reclassification

Secara umum, kinerja keuangan Jamkrindo pada tahun 2024 menunjukkan performa yang tetap solid dan berada dalam kondisi yang baik, mencerminkan ketahanan perusahaan dalam menghadapi dinamika ekonomi serta komitmen terhadap penguatan peran sebagai lembaga penjaminan yang andal.

In general, Jamkrindo's financial performance in 2024 shows solid performance and is in good condition, reflecting the company's resilience in the face of economic dynamics and commitment to strengthening its role as a reliable guarantee institution.

Imbal Jasa (Pendapatan) Penjaminan ("IJP")

Guarantee Fee (IJP)

Imbal Jasa (Pendapatan) Penjaminan ("IJP") Tahun 2023-2024

Table of Guarantee Fee for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Imbal Jasa Penjaminan Guarantee Fee	7.733.031	6.738.700	994.331	14,76%
Imbal Jasa Kafalah Bruto Gross Kafalah Fees	368.277	408.035	(39.758)	-9,74%
Kenaikan Imbal Jasa Kafalah belum merupakan Pendapatan Increase in Unearned Kafalah Fees	(22.205)	(24.212)	2.007	-8,29%
Premi Penjaminan Ulang Re-guarantee Premiums	(1.157.054)	(767.795)	(389.259)	50,70%
Jumlah Imbal Jasa Penjaminan Total Guarantee Fees	6.922.049	6.354.728	567.321	8,93%

Jamkrindo mencatatkan kenaikan jumlah imbal jasa penjaminan senilai Rp567,32 miliar dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp6,35 triliun menjadi Rp6,92 triliun di tahun 2024. Adapun kenaikan ini terjadi karena peningkatan bisnis sehingga berpengaruh pada peningkatan imbal jasa penjaminan.

Jamkrindo recorded an increase in the amount of guarantee fees of IDR 567.32 billion from IDR 6.35 trillion in 2023 to IDR 6.92 trillion in 2024. This increase occurred due to increase in business resulting in an increase in guarantee fees.

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Kredit Usaha Rakyat People's Business Credit	4.639.364	4.214.420	424.944	10,08%
Konsumtif Consumptive	200.759	209.409	(8.650)	-4,13%
Produktif Consumptive	2.461.334	1.407.622	1.053.712	74,86%
PEN	315.572	798.201	(482.629)	-60,46%
Suretyship	116.002	109.048	6.954	6,38%
Jumlah Imbal Jasa Penjaminan Total Guarantee Fees	7.733.031	6.738.700	994.331	14,76%

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) merupakan premi yang diperoleh Perusahaan dari pihak terjamin dalam rangka menjalankan kegiatan usaha penjaminan. Besaran IJP dihitung berdasarkan tarif IJP, plafon kredit, serta jangka waktu kredit. Untuk kredit eksisting, tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain jenis produk penjaminan, tingkat risiko yang dijamin, serta jangka waktu kredit. Pembayaran IJP dilakukan di muka secara sekaligus.

Guarantee Fee Income (IJP) represents premiums obtained by the Company from guaranteed parties in the context of carrying out guarantee business activities. The amount of IJP is calculated based on the IJP rate, credit ceiling, and credit period. For existing loans, the IJP rate is determined by considering various aspects, including the type of guarantee product, the level of risk guaranteed, and the credit period. IJP payments are made in advance in a lump sum.

Sementara itu, tarif IJP untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 mengenai fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang mengatur bahwa IJP KUR dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah, dengan jadwal penagihan pada bulan April dan Oktober.

Meanwhile, the IJP rate for People's Business Credit (KUR) is regulated in Minister of Finance Regulation No. 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008 concerning the People's Business Credit Guarantee facility, as well as Minister of Finance Regulation No. 190/PMK.05/2014 dated October 1, 2014 which stipulates that IJP KUR is paid annually by the Government, with billing schedules in April and October.

Beban Klaim

Claim Expenses

Tabel Beban Klaim Tahun 2023-2024
Table of Claim Expenses for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Kredit Usaha Rakyat People's Business Credit	5.152.758	4.731.429	421.329	8,90%
Konsumtif Consumptive	297.004	245.505	51.499	20,98%
Produktif Consumptive	3.296.141	336.954	2.959.187	878,22%
PEN	286.341	304.915	(18.574)	-6,09%
Suretyship	97.413	338.220	(240.807)	-71,20%
Jumlah Beban Klaim Total Claim Expenses	9.129.657	5.957.023	3.172.634	53,26%

Beban klaim merupakan biaya yang timbul akibat macetnya kredit risiko yang menjadi tanggungan Perusahaan. Jumlah klaim yang dapat dibayarkan kepada Penerima Jaminan mencakup utang pokok, utang bunga, serta denda yang tidak dapat dilunasi oleh terjamin saat kredit jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang lagi, atau sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Adapun Jamkrindo mencatatkan beban klaim per 31 Desember 2024 sebesar Rp9,13 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp3,17 triliun atau 53,26% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5,96 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan persetujuan klaim tahun 2024 dibanding tahun 2023.

Claims expense represents costs incurred due to bad debts of risks that are borne by the Company. The amount of claims that can be paid to the Guarantee Recipient includes principal debt, interest debt, and penalties that cannot be repaid by the guaranteed when the credit is due and cannot be extended again, or before maturity in accordance with the established agreement.

Jamkrindo recorded a claim expense as of December 31, 2024 of IDR 9.13 trillion, an increase of IDR 3.17 trillion or 53.26% compared to the previous year's figure of IDR 5.96 trillion. This increase is due to an increase in claim approvals in 2024 compared to 2023.

Pendapatan Investasi – Bersih

Investment Income– Net

Tabel Pendapatan Investasi – Bersih Tahun 2023-2024
Table of Investment Income – Net for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Pendapatan Bunga: Interest Income:				
Bunga Deposito Deposit Interest	418.704	373.267	45.437	12,17%
Bunga Obligasi Bond Interest	699.506	710.447	(10.941)	-1,54%
Pendapatan Reksadana Mutual Fund Income	72.928	51.515	21.413	41,57%
Pendapatan Sukuk Sukuk Income	255.164	49.355	205.809	417,00%
Dividen Dividend	11.378	16.839	(5.461)	-32,43%
Pendapatan Capital Gain Income on Capital Gain	19.472	6.544	12.928	197,56%
Efek Beragun Aset Asset-backed Securities	133	298	(165)	-55,37%
	1.477.285	1.208.265	269.020	22,26%
Beban Amortasi Amortization Expense	(18.369)	(4.087)	(14.282)	349,45%
Jumlah Pendapatan Investasi Total Investment Income	1.458.916	1.204.178	254.738	21,15%

Sepanjang tahun 2024, Jamkrindo memperoleh pendapatan investasi senilai Rp1,46 triliun, naik sebesar Rp254,74 miliar atau 21,15% bila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp1,20 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penambahan pembelian aset obligasi dan sukuk yang berasal dari shifting asset kelas aset deposito dan optimalisasi dana idle serta faktor suku bunga deposito yang mengalami peningkatan.

Throughout 2024, Jamkrindo obtained investment income amounting to IDR 1.46 trillion, an increase of IDR 254.74 billion or equivalent to 21.15% compared to the previous year's figure of IDR 1.20 trillion. This increase was mainly influenced by additional purchases of bonds and sukuk assets originating from shifting deposit asset classes and optimizing idle funds as well as the factor of deposit interest rates that have increased.

Beban Usaha

Operating Expenses

Tabel Beban Usaha Tahun 2023-2024
Table of Operating Expenses for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Beban Pegawai Employee Expenses	646.721	647.384	(663)	-0,10%
Administrasi dan Umum Administrative and General	225.463	272.887	(47.424)	-17,38%
Pemasaran Marketing	15.134	131.470	(116.336)	-88,49%
Outsourcing Outsourcing	88.534	84.018	4.516	5,38%
Depresiasi Depreciation	82.322	69.272	13.050	18,84%
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Provision for Impairment Losses	613.447	898.640	(285.193)	-31,74%
Teknologi, Sistem dan Pengembangan Usaha Technology, Systems and, Business Development	74.502	64.553	9.949	15,41%
Perjalanan Dinas Business Travel	62.524	39.703	22.821	57,48%
Sewa Lease	19.136	18.830	306	1,63%
Kendaraan Vehicle	22.946	21.654	1.292	5,97%
Sosialisasi dan Rekonsiliasi Dissemination and Reconciliation	20.577	14.792	5.785	39,11%
Beban Bunga Interest Expense	5.074	657	4.417	672,30%
Lainnya Others	28.947	2.141	26.806	1252,03%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	2.041.533	2.266.001	(224.468)	-9,91%

Per 31 Desember 2024, jumlah beban usaha tercatat sebesar Rp2,04 triliun, mengalami penurunan 9,91% atau senilai Rp224,47 miliar bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp2,27 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2024 dibanding tahun 2023.

As of December 31, 2024, total operating expenses were recorded at IDR 2.04 trillion, a decrease of 9.91% or IDR 224.47 billion compared to the previous year's figure of IDR 2.27 trillion. This decrease is mainly caused by a decrease in the provision for impairment losses in 2024 compared to 2023.

Pendapatan (Beban) Lain - Bersih

Other Income (Expenses) - Net

Tabel Pendapatan (Beban) Lain - Bersih Tahun 2023-2024
Table of Other Income (Expenses) - Net for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Pendapatan (Beban) Non-Operasional Non-Operating Income (Expense)	(5.824)	1.108	(6.932)	-625,63%
Pendapatan Jasa Giro Interest Income	7.009	6.838	171	2,50%
Pendapatan Jasa Administrasi Penjaminan Guarantee Administration Service Income	6.381	7.153	(772)	-10,79%
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Total Other Income (Expenses)	7.566	15.099	(7.533)	-49,89%

Perusahaan mencatatkan jumlah pendapatan lain senilai Rp7,57 miliar di Desember 2024, turun 49,89% atau senilai Rp7,57 miliar bila dibandingkan akhir 2023 yang mencapai Rp15,10 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya penurunan akun-akun pendapatan yang belum teridentifikasi ke akun-akun seharusnya.

Laba Sebelum Pajak

Hingga akhir 2024, laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp1,29 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp351,91 miliar atau 21,34% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,64 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan persetujuan klaim tahun 2024 dibanding tahun 2023.

Beban Pajak Final

Per 31 Desember, jumlah beban pajak final Perusahaan tercatat sebesar Rp167,87 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp14,85 miliar atau 9,70% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp153,02 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh beban pajak final merupakan beban atas beban pajak pendapatan investasi, kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan investasi tahun 2024 dibanding tahun 2023.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih tahun berjalan Jamkrindo tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,16 triliun, turun sebesar Rp0,28 triliun atau 19,16% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp1,44 triliun. Adapun laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp1,16 triliun, mengalami penurunan sebesar 19,18% atau setara dengan Rp275,36 miliar dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1,44 triliun. Sementara itu, laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali tercatat sebesar Rp38 juta, mengalami peningkatan 123,17% atau setara dengan Rp202 juta dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp164 juta.

(Kerugian)/Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak

(Kerugian)/Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, setelah pajak sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp93,52 miliar, naik sebesar Rp151,04 miliar atau 262,59% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp57,52 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya perbaikan nilai pasar tahun 2024 dari tahun 2023.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2024, laba komprehensif tahun berjalan Jamkrindo mencapai Rp1,07 triliun, menurun 28,53% atau setara dengan Rp426,39 miliar bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,49 triliun.

Adapun laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp1,07 triliun, mengalami penurunan sebesar 28,54% atau Rp426,58 miliar dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp1,49 triliun.

Sementara itu, laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali mencapai Rp37 juta, mengalami peningkatan sebesar 124,03% atau Rp197 juta dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp154 juta.

The Company recorded total other income amounting to IDR 7.57 billion in December 2024, a decrease of 49.89% or IDR 7.57 billion compared to the previous year's figure of IDR 15.10 billion. This decrease is mainly influenced by reduction in unidentified revenue accounts to their proper accounts.

Profit Before Tax

Until the end of 2024, profit before tax was recorded at IDR 1.29 trillion, a decrease of IDR 351.91 billion or 21.34% compared to the previous year's figure of IDR 1.64 trillion. This decrease is caused by an increase in claim approvals in 2024 compared to 2023.

Final Tax Expenses

As of December 31, the Company's total final tax expense was recorded at IDR 167.87 billion, an increase of IDR 14.85 billion or 9.70% compared to the previous year's figure of IDR 153.02 billion. This increase is due to Final tax expense is an expense on investment income tax expense in 2024 compared to 2023.

Net Profit for the Year

Jamkrindo's net profit for 2024 were recorded at IDR 1.16 trillion, a decrease of IDR 0.28 trillion or 19.16% compared to the previous year's figure of IDR 1.44 trillion. The net profit for the year attributable to owners of the parent entity reached IDR 1.16 trillion, a decrease of 19.18% or equivalent to IDR 275.36 billion compared to the previous year's figure of IDR 1.44 trillion. Meanwhile, net profit for the year attributable to non-controlling interests was recorded at IDR 38 million, an increase of 123.17% or equivalent to IDR 202 million compared to the previous year's figure of IDR 164 million.

Other of Comprehensive Income/(Loss) for the Year, After Tax

Other Comprehensive Income/(Loss) For the Year, after tax until December 31, 2024 was recorded at IDR 93.52 billion, an increase of IDR 151.04 billion or 262.59% compared to the previous year's figure of IDR 57.52 billion. This is mainly due to the improvement in market value in 2024 from 2023.

Comprehensive Profit for the Year

In 2024, Jamkrindo's comprehensive income for the year reached IDR 1.07 trillion, a decrease of 28.53% or equivalent to IDR 426.39 billion compared to the previous year's figure of IDR 1.49 trillion.

The comprehensive income attributable to owners of the parent entity was recorded at IDR 1.07 trillion, a decrease of 28.54% or IDR 426.58 billion compared to the previous year's figure of IDR 1.49 trillion.

Meanwhile, comprehensive income attributable to non-controlling interests reached IDR 37 million, an increase of 124.03% or IDR 197 million compared to the previous year's figure of IDR 154 million.

Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

Tabel Laporan Arus Kas Tahun 2023-2024
Table of Cash Statement for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023* (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	(635.771)	4.237.557	(4.873.328)	-115,00%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	462.690	(3.625.035)	4.087.725	-112,76%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(1.133.289)	(1.005.570)	(127.719)	12,70%
Penurunan Saldo Kas dan Setara Kas Decrease of Balance of Cash and Cash Equivalents	(1.306.370)	(393.048)	(913.322)	232,37%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Increase/(Decrease) of Balance of Cash and Cash Equivalents	6.052.920	6.445.968	(393.048)	-6,10%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	4.746.550	6.052.920	(1.306.370)	-21,58%

*Reklasifikasi
*Reclassification

Jamkrindo mencatatkan jumlah kas dan setara kas akhir tahun 2024 sebesar Rp4,75 triliun, menurun Rp1,31 miliar atau 21,58% bila dibandingkan dengan jumlah kas dan setara kas pada awal tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp6,05 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran klaim kepada mitra penjaminan.

Jamkrindo recorded a total cash and cash equivalents at the end of 2024 of IDR 4.75 trillion, a decrease of IDR 1.31 billion or 21.58% compared to the total cash and cash equivalents at the start of the year which was recorded at IDR 6.05 billion. This is mainly due to an increase in claim payments to guarantee partners.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flow from Operating Activities

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023-2024
Table of Cash Flow from Operating Activities for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Guarantee Fee Income	7.940.891	11.111.588	(3.170.697)	-28,54%
Penerimaan Klaim dari Mitra Co-Guarantee Acceptance of Claims from Co-Guarantee Partners	935.923	515.596	420.327	81,52%
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya Income from other Operating Activities	2.236.508	1.109.244	1.127.264	101,62%
Pembayaran IJP Co-Guarantee Payment of Co-Guarantee Guarantee Fee (IJP)	(1.151.478)	(628.122)	(523.356)	83,32%
Pembayaran Klaim Payment of Claims	(8.811.483)	(5.933.725)	(2.877.758)	48,50%
Pembayaran Biaya Payment of Expenses	(783.578)	(684.996)	(98.582)	14,39%
Pembayaran kepada Karyawan Payment to Employees	(822.238)	(585.647)	(236.591)	40,40%
Pembayaran Pajak Penghasilan Payment of Income Tax	(180.316)	(666.381)	486.065	-72,94%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/(digunakan untuk) Aktivitas Operasi Cash Flow Provided from/(used for) Operating Activities - Net	(635.771)	4.237.557	(4.873.328)	-115,00%

Pada tahun 2024, Arus kas bersih yang diperoleh Jamkrindo dari aktivitas operasi mencapai Rp635,77 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp4,87 triliun atau 115,00% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,24 triliun.

Arus kas masuk diperoleh dari penerimaan imbal jasa penjaminan, penerimaan klaim dari mitra *co-guarantee*, dan penerimaan dari aktivitas operasi lainnya dengan total sebesar Rp11,11 triliun. Di sisi lain, arus kas keluar digunakan untuk pembayaran IJP *co-guarantee*, pembayaran klaim, pembayaran biaya, pembayaran kepada karyawan, serta pembayaran pajak penghasilan dengan total sebesar Rp11,75 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

In 2024, Jamkrindo's net cash flow from operating activities reached IDR 635.77 trillion, a decrease of IDR 4.87 trillion or 115.00% compared to the previous year's figure of IDR 4.24 trillion.

Cash flows were obtained from guarantee fee income, acceptance of claims from co-guarantee partners, and income from other operating activities, amounting to IDR 11.11 trillion. On the other hand, cash outflows were used for payment of co-guarantee's guarantee Fee, payment of claims, payment of expenses, payment to employees, and payment of income tax amounting to IDR 11.75 trillion.

Cash Flow from Investment Activities

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023-2024
Table of Cash Flow from Investment Activities for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Penerimaan Hasil Investasi Return from Investments	1.321.289	1.135.360	185.929	16,38%
Penempatan Investasi Placement of Investment	(5.399.646)	(5.667.989)	268.343	-4,73%
Penjualan Investasi Sales of Investment	4.703.617	1.007.694	3.695.923	366,77%
Pembelian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Purchase of Fixed Assets and Intangible Assets	(163.638)	(100.100)	(63.538)	63,47%
Penjualan Aset Tetap Sale of fixed assets	1.068	-	1.068	100,00%
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari /(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Cash Flow Provided from/(used for) Investment Activities - Net	46.269	(3.625.035)	3.671.304	101,28%

Per 31 Desember 2024, arus kas bersih yang diperoleh Jamkrindo untuk aktivitas investasi mencapai Rp46,27 miliar, meningkat Rp3,67 triliun atau 101,28% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,62 triliun.

Adapun arus kas masuk berasal dari hasil investasi sebesar Rp6,02 triliun, sementara arus kas keluar dialokasikan untuk penempatan investasi serta pembelian aset tetap dan aset tak berwujud dengan total pengeluaran sebesar Rp5,56 triliun.

As of December 31, 2024, Jamkrindo's net cash flow provided from investment activities reached IDR 46,27 billion, an increase of IDR 3.67 trillion or 101.28% compared to the previous year's figure of IDR 3.62 trillion.

The cash inflow came from investment proceeds of IDR 6.02 trillion, while the cash outflow was allocated for investment placement as well as the purchase of fixed assets and intangible assets with a total expenditure of IDR 5.56 trillion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Financing Activities

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023-2024
Table of Cash Flow from Financing Activities for 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (IDR-million)	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Pembayaran Sewa Lease Payment	(55.528)	(45.693)	(9.835)	21,52%
Dividen Dividend	(1.077.761)	(959.877)	(117.884)	12,28%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/(digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flow from (used for) Financing Activities - Net	(1.133.289)	(1.005.570)	(127.719)	12,70%

Hingga akhir 2024, arus kas bersih yang digunakan Jamkrindo untuk aktivitas pendanaan mencapai Rp1,13 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp127,72 miliar atau 12,70% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Jamkrindo memperoleh kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1,00 triliun.

Until the end of 2024, Jamkrindo's net cash flow used for financing activities reached IDR 1.13 trillion, an increase of IDR 127.72 billion or 12.70% compared to the previous year's figure of IDR 1.00 trillion.

Kemampuan Efisiensi dan Profitabilitas

Efficiency and Profitability

Tabel Kemampuan Efisiensi dan Profitabilitas Tahun 2023-2024
Table of Efficiency and Profitability for 2023-2024

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Changes 2023-2024
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	14,38	22,61	(8,23)
Marjin Keuntungan (%) Profit Margin (%)	21,02	21,32	(0,30)
Rasio Laba terhadap Aset (ROA) (%) Return on Asset Ratio (%)	4,49	5,83	(1,34)
Rasio Laba terhadap Ekuitas (ROE) (%) Return on Equity Ratio (%)	8,49	5,83	2,66
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) (%) Debt to Equity Ratio (%)	142,49	141,36	1,13
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%) Operating Expenses to Operating Revenue (BOPO) (%)	17,68	20,37	(2,69)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

ABILITY TO PAY DEBT

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tercermin melalui berbagai rasio kinerja keuangan, termasuk rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

The Company's ability to fulfill its obligations, both short term and long term is reflected in several financial performance ratios, including the liquidity ratio and solvency ratio.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Mengacu pada Peraturan OJK No. 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Lembaga Usaha Penjamin, Pasal 43 ayat (2) menetapkan bahwa rasio likuiditas penjamin minimal 120%.

Ability to Pay Short Term Debt

In accordance with OJK Regulation No. 2/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning implementation of Guarantor Business Institutions Article 43 paragraph (2), the guarantor's liquidity ratio is set at a minimum of 120%.

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Changes 2023-2024
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	190,78	218,65	(27,87)

Rasio lancar mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo secara keseluruhan. Hingga akhir tahun 2024, tercatat sebesar 190,78%. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 218,65%, rasio ini tetap berada jauh di atas ambang batas minimum 120%.

The current ratio reflects the Company's ability to meet short-term obligations or debts that are due immediately as a whole. Until the end of 2024, it was recorded at 190.78%. Despite a decrease compared to 2023 which amounted to 218.65%, this ratio remains well above the minimum threshold of 120%.

Penurunan sebesar 27,87 poin persentase tersebut dapat dipengaruhi oleh peningkatan kewajiban lancar maupun perubahan komposisi aset lancar, yang perlu dicermati sebagai bagian dari dinamika operasional. Meski demikian, tingkat likuiditas perusahaan tetap dalam kondisi sangat sehat, menunjukkan kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek tanpa mengganggu stabilitas operasional.

The decrease of 27.87 percentage points can be influenced by an increase in current liabilities as well as changes in the composition of current assets, which need to be observed as part of operational dynamics. Nevertheless, the company's liquidity level remains in a very healthy condition, showing a good capacity to fulfill all short-term obligations without disrupting operational stability.

Selain itu, Jamkrindo juga menerapkan indikator cash flow to debt ratio untuk memperkuat manajemen likuiditas, dengan mempertimbangkan kecukupan kas dan setara kas terhadap liabilitas setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan. Penerapan pengukuran ganda ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga kehati-hatian finansial, serta mengantisipasi potensi tekanan likuiditas secara proaktif.

Jamkrindo also applies the cash flow to debt ratio indicator to strengthen liquidity management, by considering the adequacy of cash and cash equivalents against liabilities after deducting deferred income. The application of this dual measurement emphasizes the company's commitment to maintaining financial prudence, as well as proactively anticipating potential liquidity pressures.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Untuk menilai tingkat solvabilitas Perusahaan, digunakan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio), yang mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai BUMN yang bergerak di sektor jasa penjaminan, rasio ini juga mencerminkan tingkat kesehatan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 mengenai Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan di Bidang Usaha Asuransi dan Penjaminan.

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 Changes 2023-2024
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) (%) Debt to Equity Ratio (DER) (%)	142,49	141,36	1,13

Per akhir tahun 2024, rasio DER Jamkrindo tercatat sebesar 142,49%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 141,36%. Peningkatan sebesar 1,13 poin persentase ini masih berada dalam batas wajar dan tidak mengindikasikan lonjakan struktur pembiayaan yang signifikan.

Secara keseluruhan, struktur permodalan Jamkrindo tetap dalam kondisi seimbang dan terkelola dengan baik, dengan DER yang mencerminkan fleksibilitas keuangan dalam mendukung pengembangan usaha tanpa menimbulkan eksposur risiko keuangan yang berlebihan.

Ability to Pay Long Term Debt

In measuring the level of solvency of the Company, the debt to-equity ratio is used which shows the Company's ability to pay all of its obligations both short term and long term. As an SOE engaged in the field of guarantee services, this ratio can be seen from the level of soundness of the Company as stipulated in the Minister of BUMN Regulation No PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014 concerning Indicators for Soundness Rating of State-Owned Financial Services Enterprises in the Insurance and Guarantee Services Business Sector.

As of the end of 2024, Jamkrindo's DER ratio was recorded at 142.49%, a slight increase compared to the previous year of 141.36%. This increase of 1.13 percentage points is still within reasonable limits and does not indicate a significant surge in financing structure.

Overall, Jamkrindo's capital structure remains in a balanced and well-managed condition, with a DER that reflects financial flexibility in supporting business development without causing excessive financial risk exposure.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

COLLECTABILITY OF RECEIVABLES

Dalam industri penjaminan, kolektibilitas piutang merujuk pada aging piutang, yaitu lamanya piutang yang belum dilunasi. Berikut ini adalah data mengenai umur dan saldo piutang Kredit Program Pemerintah (KUR dan PEN) per Desember 2024, serta pembayaran piutang sepanjang tahun 2024:

In the guarantee industry, the collectability of receivables refers to the aging of receivables, which is the length of outstanding receivables. The following is data on the age and balance of receivables from the Government Credit Program (KUR and PEN) as of December 2024, along with payment of receivables throughout 2024:

Umur Piutang Accounts Receivables Aging	Outstanding Piutang (Rp-juta) Outstanding Receivables (IDR-million)			Pembayaran Piutang (Rp-juta) Payment of Receivables (IDR-million)		
	KUR Gen 1	KUR Gen 2	PEN	KUR Gen 1	KUR Gen 2	PEN
>60 More than 60 days	1.093.458	155.114	-			
>48 More than 48 days	102.007	205.422	-			
>36 More than 36 days	98.137	279.704	-			
>24 More than 24 days	78.300	326.608	-	-	5.041.098	148.241
0-12 0-12 days	156.832	1.672.644	-			
Total Total	1.528.734	2.639.491	-			

Berikut adalah data umur dan saldo piutang Mitra Mitigasi Risiko per Desember 2024, serta pembayaran piutang sepanjang tahun 2024:

The following is data on the age and balance of Risk Mitigation Partner's receivables as of December 2024, as well as receivable payments throughout 2024:

Kriteria Umur Piutang Accounts Receivables Aging Criteria	Umur Piutang Accounts Receivables Aging					
	PT Asuransi Jiwasraya	PT Heksa Solution Insurance	PT BRI Asuransi Indonesia	PT Reasuransi Indonesia Utama	PT Reasuransi Nasional Indonesia	PT Reasuransi Syariah Indonesia
>60 More than 60 days	1.078	13.134	2.387	68.151		
>48 More than 48 days	-	75	-	49.497		
>36 More than 36 days	-	54	3.931	39.266		
>24 More than 24 days	40	29	-	19.247		27.183
0-12 0-12 days	171	12	36	56.615	451.239	78.910

Pembayaran Piutang Selama Tahun 2024

Payment of Receivables Throughout 2024

No	Mitra Mitigasi Risiko Risk Mitigation Partner	Penggantian Pembayaran Klaim (Rp-juta) Reimbursement of Claim Payments (IDR-million)
1	PT Heksa Solution Insurance	3.242
2	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	-
3	PT Reasuransi Nasional Indonesia	1.040.469
4	PT Reasuransi Indonesia Utama	5.089
5	PT Reasuransi Syariah Indonesia	35.887

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Rincian Struktur Modal

Struktur modal Jamkrindo pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Capital Structure Details

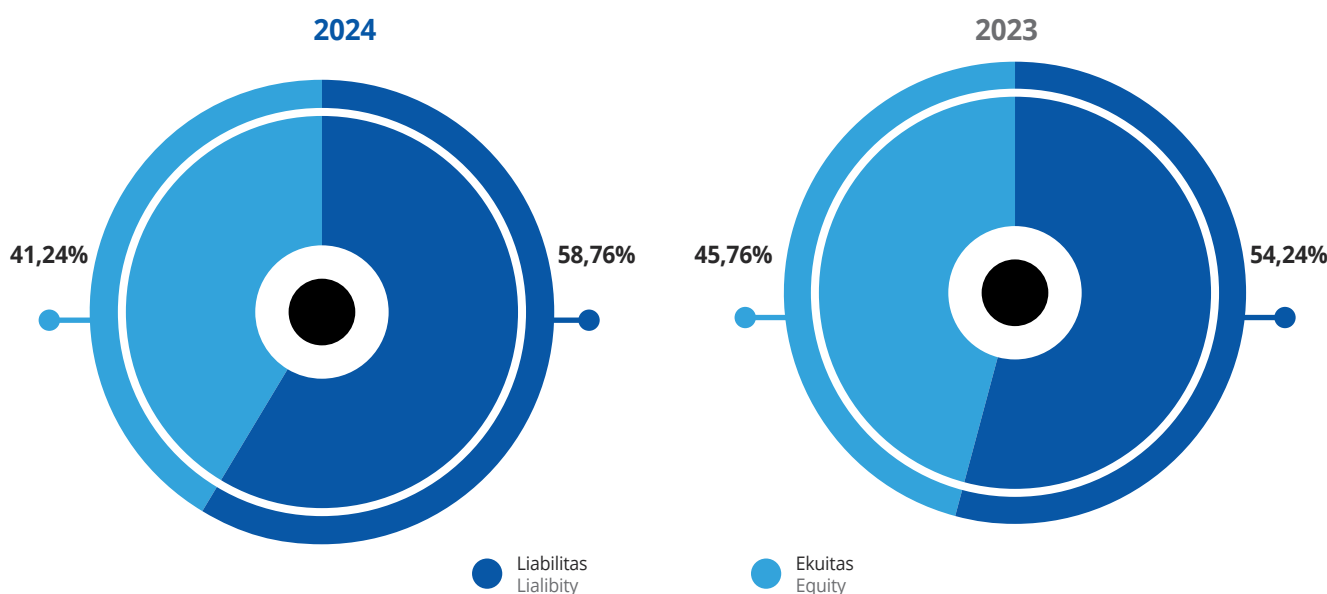
The Company's capital structure in 2024 can be explained in the following table:

Tabel Struktur modal Jamkrindo
Table of Jamkrindo's Capital Structure

Uraian Description	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Rp-juta IDR-million	%	Rp-juta IDR-million	%	Rp-juta IDR-million	%
Liabilitas Liabilities	19.014.093	58,76%	18.877.196	58,57%	136.897	0,73%
Ekuitas Equity	13.344.235	41,24%	13.354.022	41,43%	(9.787)	-0,07%
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds, and Equity	32.358.328	100,00%	32.231.220	100,00%	127.108	0,39%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) Debt to Equity Ratio (DER)		142,49		141,36		0,80%

Komposisi struktur modal Jamkrindo tahun 2024 adalah 58,76% berasal dari liabilitas dan 41,24% berupa ekuitas. Komposisi ini relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2024, Jamkrindo's capital structure consists of 58.76% liabilities and 41.24% equity. This composition has relatively no significant change compared to the previous year.



Kebijakan Manajemen atas Struktur Permodalan

Perusahaan menerapkan kebijakan yang berfokus pada pemanfaatan ekuitas sebagai sumber utama pembiayaan. Pengelolaan ekuitas dilakukan secara efektif dan efisien untuk

Management Policy on Capital Structure

The Company adopts a policy that focuses on utilizing equity as the primary source of financing. Equity management is conducted effectively and efficiently to ensure the continuity

memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan juga mengalokasikan cadangan dari laba ditahan sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keuangan.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Perusahaan secara rutin merencanakan, membahas, dan memantau kebutuhan permodalannya melalui rapat Komite Permodalan, yang didukung oleh analisis data yang komprehensif. Kebijakan terkait struktur modal ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk estimasi ekonomi, potensi pertumbuhan bisnis, risk appetite, dan target rasio permodalan.

Manajemen mengelola struktur modal dengan tujuan menjaga keberlangsungan usaha, sehingga dapat terus memberikan imbal hasil bagi pemegang saham serta manfaat bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, Perusahaan berupaya mempertahankan struktur permodalan yang optimal guna meminimalkan biaya modal.

Dalam kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, Perusahaan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015, yang menetapkan rasio maksimum Debt to Equity (DER) sebesar 4:1 untuk keperluan perpajakan. Pada tahun 2024, DER Perusahaan tercatat sebesar 142,49% yang masih berada dalam kategori yang baik.

of the Company's operations. Therefore, the Company also allocates reserves from retained earnings as a strategic measure in maintaining financial stability.

Basis for Selection of Management Policy on Capital Structure

The Company regularly plans, discusses and monitors its capital requirements through Capital Committee meetings, supported by comprehensive data analysis. Policies related to capital structure are set based on various considerations, including economic estimates, business growth potential, risk appetite, and capital ratio targets.

Management manages the capital structure with the aim of maintaining business sustainability, so that it can continue to provide returns for shareholders and benefits for stakeholders. In addition, the Company seeks to maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital.

In compliance with tax regulations, the Company follows the Minister of Finance Regulation No. 169/PMK.010/2015, which establishes the maximum Debt to Equity (DER) ratio at 4:1 for tax purposes. In 2024, the Company's DER was recorded at 142.49%, which is still in the good category.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOOD INVESTMENT

Hingga 31 Desember 2024, Jamkrindo tidak memiliki ikatan material dengan pihak manapun yang berkaitan dengan investasi barang modal.

As of December 31, 2024, Jamkrindo does not have any ties with any parties related to investment in capital goods.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Investment in Goods Capital

Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku Investment in Capital Goods Realized in the Financial Year

Jenis Investasi Types of Investment	Tujuan Investasi Purpose of Investment	Nilai Investasi (Rp-Juta) Investment Value (IDR-Million)
Tanah Land	Relokasi unit kerja ke tempat yang lebih strategis dan lebih representative Relocation of work units to more strategic and more representative places	287.500
Bangunan Kantor Office Buildings	Optimalisasi aset yang telah dimiliki melalui Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Optimization of assets that have been owned through the Construction and Renovation of Office Buildings	323.422
Perumahan Dinas Official Residence	Penyediaan fasilitas hunian untuk pegawai guna mendukung penugasan dan efektivitas mobilitas operasional Provision of residential facilities for employees to support the assignment and effectiveness of operational mobility	11.225
Inventaris Kantor Office Equipment	Menggantikan aset yang sudah tidak layak pakai/habis masa umur ekonomisnya dan beberapa aset yang belum ada/dimiliki oleh kantor Replacing assets that are no longer suitable for use/have reached the end of their economic life and some assets that do not yet exist/are owned by the office	235.424
Inventaris Rumah Dinas Official Residence Equipment	Menggantikan aset yang sudah tidak layak pakai/habis masa umur ekonomisnya dan beberapa aset yang belum ada/dimiliki oleh rumah dinas Replacing assets that are no longer suitable for use/have reached the end of their economic life and some assets that do not yet exist/are owned by official houses	7.135
Kendaraan Bermotor Motorized Vehicles	Menggantikan aset yang sudah tidak layak pakai/habis masa umur ekonomisnya dan beberapa aset yang belum ada/dimiliki oleh kantor Replacing assets that are no longer suitable for use/beyond their economic lifespan and some assets that do not yet exist/are owned by the office	34.558
Aset dalam Penyelesaian Assets in Progress	Proyek pembangunan atau pengadaan aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian Construction projects or procurement of fixed assets that are still in the completion stage	14.634
Jumlah Investasi Total Investment		913.898

Sepanjang tahun 2024, Jamkrindo merealisasikan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap senilai Rp913,90 miliar. Investasi ini terutama dialokasikan untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan.

Throughout 2024, Jamkrindo realized investment in capital goods in the form of fixed assets amounting to IDR 913.90 billion. This investment is primarily intended to support the Company's operations.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCUR AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

Hingga tanggal penerbitan laporan tahunan ini, tidak terdapat informasi maupun fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan yang dapat memengaruhi secara signifikan posisi keuangan atau hasil usaha Jamkrindo. Dengan demikian, tidak terdapat kejadian setelah tanggal laporan keuangan yang perlu diungkapkan lebih lanjut dalam laporan ini.

As of the date of issuance of this annual report, there is no information or material facts that occurred after the date of the accountant's report that could significantly affect Jamkrindo's financial position or results of operations. Thus, there are no events after the date of the financial statements that need to be further disclosed in this report.



PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2024

2024 TARGET ACHIEVEMENT

Asumsi-Asumsi yang Digunakan serta Proses Perumusan Target Tahun 2024

1. Asumsi Ekonomi Makro
 - a. Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2% per tahun.
 - b. Tingkat inflasi 2,8%.
 - c. Exchange rate 1 USD = Rp15.000,00/USD.
 - d. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun 6,7%
 - e. Harga minyak mentah Indonesia = 82 US dolar/barel
 - f. Lifting minyak mentah 635 ribu barel per hari
 - g. Lifting gas 1.033 ribu barel setara minyak per hari
2. Asumsi Mikro
 - a. Volume penjaminan sebesar Rp415 Triliun.
 - b. Pendapatan IJP accrual tumbuh sebesar 12% atau sebesar Rp8.143 miliar.
 - c. Loss Ratio sebesar 74%.
 - d. Recovery Rate subrogasi sebesar 22,87% dari pendapatan subrogasi sebesar Rp1.187 miliar
 - e. Pendapatan Investasi bersih sebesar Rp1.359 miliar atau dengan tingkat YOI sebesar 6,16%.
 - f. Opex Ratio sebesar 21,95%.
 - g. Tingkat kesehatan dengan skor Double A Plus kategori "Sehat".

The Assumptions Used and the 2024 Target Formulation Process

1. Macroeconomic Assumptions
 - a. Economic growth rate of 5.2% per year.
 - b. Inflation rate of 2.8%.
 - c. Exchange rate 1 USD = IDR 15.000,00/USD.
 - d. 10-year SUN interest rate of 6.7%
 - e. Indonesian crude oil price = 82 US dollars/barrel
 - f. Crude oil lifting 635 thousand barrels per day
 - g. Gas lifting 1,033 thousand barrels of oil equivalent per day
2. Micro Assumptions
 - a. Guarantee volume amounted to IDR 415 Trillion.
 - b. IJP accrual revenue grew by 12% or Rp8,143 billion.
 - c. Loss Ratio of 74%.
 - d. Subrogation Recovery Rate of 22.87% of subrogation income of IDR 1,187 billion
 - e. Net Investment Income of IDR 1,359 billion or with YOI rate of 6.16%.
 - f. Opex Ratio of 21.95%.
 - g. Soundness level receiving a Double A Plus score "Healthy" category.

Pencapaian Target Tahun 2024

Kinerja Jamkrindo sepanjang tahun 2024 menunjukkan hasil yang relatif stabil, dengan sejumlah indikator utama mencatatkan capaian yang mendekati target, meskipun terdapat beberapa deviasi yang menjadi perhatian untuk perbaikan strategi ke depan.

2024 Target Achievement

Jamkrindo's performance throughout 2024 showed relatively stable results, with a number of key indicators recording achievements close to the target, although there are some deviations that are of concern for future strategic improvements.

Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization	Target 2024 2024 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2024 Achievement Realization of 2024 Target
PEMASARAN MARKETING			
Volume Kredit yang Dijamin Guaranteed Credit Volume			
KUR (Rp-juta) KUR (IDR-million)	149.672.661	135.000.000	110,87
PEN (Rp-juta) PEN (IDR-million)	-	-	-
Non KUR (Rp-juta) Non KUR (IDR-million)	175.880.383	279.811.248	62,86
Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-million)	352.553.044	414.811.248	84,99

Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization	Target 2024 2024 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2024 Achievement Realization of 2024 Target
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Imbal Jasa Penjaminan Bersih (Rp-juta) Net Guarantee Fee (IDR-million)	6.922.049	7.013.297	98,70
Beban Klaim (Rp-juta) Claim Expenses (IDR-million)	5.019.391	4.992.989	100,53
Penjaminan Bersih (Rp-juta) Net Guarantee (IDR-million)	1.902.658	2.150.341	88,48
Pendapatan Investasi (Rp-juta) Investment Income (IDR - million)	1.458.916	1.359.353	107,32
Beban Usaha (Rp-juta) Operating Expenses (IDR-million)	(2.041.533)	(1.707.534)	119,56
Pendapatan (Beban) Lain-Lain (Rp-juta) Other Comprehensive Income (Expenses) (IDR-million)	7.566	10.498	72,07
Laba Sebelum Pajak (Rp-juta) Profit Before Tax (IDR-million)	1.287.051	1.812.658	71,00
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (Rp-juta) Income Tax Benefit (Expense) (IDR-million)	(125.557)	(465.869)	26,95
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta) Profit for the Year (IDR-million)	1.161.494	1.346.789	86,24
POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION			
Aset (Rp-juta) Assets (IDR-million)	32.358.328	36.504.218	88,64
Liabilitas (Rp-juta) Assets (IDR-million)	19.014.093	22.879.625	83,10
Ekuitas (Rp-juta) Equity (IDR-million)	13.344.235	13.624.593	97,94
STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE			
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas Liability to Equity Ratio	142,49	167,93	84,85
RASIO-RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS			
Return on Equity (ROE) (%)	8,49	10,45	81,24
Return on Assets (ROA) (%)	4,49	5,20	86,35
Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) (%) Operating Costs Against Operating Income (BOPO) (%)	17,68	19,24	91,89
Rasio Solvabilitas (%) Solvency Ratio (%)	170,18	159,55	106,66
Rasio Likuiditas/Rasio Lancar (%) Liquidity Ratio/Current Ratio (%)	190,78	180,86	105,48

Dari sisi kinerja penjaminan, total volume kredit yang dijamin sepanjang tahun tercatat sebesar Rp352,55 triliun atau 84,99% dari target sebesar Rp414,81 triliun. Kinerja tertinggi dicapai pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang membukukan realisasi sebesar 110,87% dari target, mencerminkan efektivitas kontribusi Jamkrindo dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui program pemerintah. Sebaliknya, penjaminan pada segmen Non-KUR baru mencapai 62,86% dari target, yang menunjukkan perlunya penguatan strategi dan intensifikasi kemitraan pada lini penjaminan komersial.

In terms of guarantee performance, the total volume of loans guaranteed during the year was recorded at IDR 352.55 trillion or 84.99% of the target of IDR 414.81 trillion. The highest performance was achieved in the People's Business Credit (KUR) segment which recorded a realization of 110.87% of the target, reflecting the effectiveness of Jamkrindo's contribution in expanding access to financing for MSME players through government programs. In contrast, guarantees in the Non-KUR segment only reached 62.86% of the target, indicating the need to strengthen strategies and intensify partnerships in the commercial guarantee line.

Pada laporan laba rugi konsolidasian, pendapatan utama dari imbal jasa penjaminan bersih tercatat sebesar Rp6,92 triliun atau 98,70% dari target. Pendapatan investasi menunjukkan kinerja yang sangat positif, mencapai Rp1,46 triliun atau 107,32% dari target, sejalan dengan optimalisasi pengelolaan portofolio keuangan yang prudent. Namun, beban usaha tercatat lebih tinggi dari yang dianggarkan, mencapai 119,56%, yang turut berdampak pada laba sebelum pajak yang hanya mencapai 71,00% dari proyeksi. Laba tahun berjalan terealisasi sebesar Rp1,16 triliun atau 86,24% dari target.

Sementara itu, pada laporan posisi keuangan konsolidasian, total aset per 31 Desember 2024 mencapai Rp32,36 triliun atau 88,64% dari target. Liabilitas tercatat sebesar Rp19,01 triliun (83,10% dari target), sementara ekuitas sebesar Rp13,34 triliun atau 97,94% dari rencana. Rasio liabilitas terhadap ekuitas berada pada level 142,49, yang menunjukkan struktur permodalan tetap dalam batas wajar dan lebih baik dari target rasio sebesar 167,93.

Kinerja rasio keuangan juga menunjukkan efisiensi dan ketahanan. Return on Assets (ROA) mencapai 4,49% (86,35% dari target), sedangkan Return on Equity (ROE) tercatat sebesar 8,49% (81,24% dari target). Rasio BOPO berada pada 17,68%, lebih baik dibandingkan target sebesar 19,24%, mencerminkan efisiensi operasional yang terjaga. Di sisi lain, rasio kehati-hatian menunjukkan hasil yang solid: rasio solvabilitas tercapai sebesar 170,18% dan rasio likuiditas 190,78%, masing-masing melampaui target sebesar 106,66% dan 105,48%.

Secara umum, capaian kinerja tahun 2024 mencerminkan ketangguhan operasional dan keuangan Perusahaan di tengah dinamika sektor keuangan dan pembiayaan nasional. Keberhasilan dalam mendukung program pemerintah dan optimalisasi pendapatan investasi menjadi penopang utama, sementara hasil pada lini penjaminan komersial dan laba operasional menjadi fokus evaluasi untuk penyempurnaan strategi di tahun mendatang.

In the consolidated income statement, the main income from net guarantee fees was recorded at IDR 6.92 trillion or 98.70% of the target. Investment income showed a very positive performance, reaching IDR 1.46 trillion or 107.32% of the target, in line with the optimization of prudent financial portfolio management. However, operating expenses were higher than budgeted, reaching 119.56%, which also impacted profit before tax which only reached 71.00% of the projection. Profit for the year was realized at IDR 1.16 trillion or 86.24% of the target.

Meanwhile, in the consolidated statement of financial position, total assets as of December 31, 2024 reached IDR 32.36 trillion or 88.64% of the target. Liabilities were recorded at IDR 19.01 trillion (83.10% of the target), while equity amounted to IDR 13.34 trillion or 97.94% of the plan. The ratio of liabilities to equity was at 142.49, indicating that the capital structure remained within reasonable limits and better than the target ratio of 167.93.

Financial ratio performance also showed efficiency and resilience. Return on Assets (ROA) reached 4.49% (86.35% of target), while Return on Equity (ROE) was recorded at 8.49% (81.24% of target). The BOPO ratio stood at 17.68%, better than the target of 19.24%, reflecting maintained operational efficiency. On the other hand, prudential ratios showed solid results: the solvency ratio reached 170.18% and the liquidity ratio 190.78%, exceeding the targets of 106.66% and 105.48%, respectively.

In general, the year's performance reflects the Company's operational and financial resilience amidst the dynamics of the national finance and financing sector. Success in supporting government programs and optimizing investment income are the main pillars, while results in the commercial guarantee line and operating profit are the focus of evaluation for strategy improvement in the coming year.

PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025

BUSINESS PROSPECTS AND COMPANY PERFORMANCE PROJECTIONS IN 2025

Prospek Usaha Tahun 2025

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan.

Strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antar daerah. Berdasarkan langkah strategis tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Business Prospects in 2025

Observing the current economic dynamics and challenges ahead, as well as the development agenda to realize the 2045 Golden Indonesia Vision, the fiscal policy design for 2025 is directed at “Accelerating Inclusive and Sustainable Economic Growth.” Fiscal policy in 2025 has strategic value, because it is a policy in the transition period, namely a policy prepared by the current Government and will be implemented by the next Government. Accordingly, the substance of fiscal policy in 2025 is the continuation of various priority programs that are currently running, as well as the strengthening of various flagship programs to support the development agenda towards advanced Indonesia.

The combination of sustainability and strengthening of priority programs is expected to be an effective driving force to accelerate the achievement of the Golden Indonesia Vision 2045. To realize an advanced, sovereign, just and prosperous Indonesia, the Government must work hard with the commitment of all stakeholders, as well as various policy breakthroughs. These policies are expected to be able to realize higher and higher quality economic growth, as well as improve the welfare of a more equitable and fair community.

The 2025 fiscal policy strategy is pursued through 2 main strategies, namely the medium-long term strategy and the short-term strategy. The medium-long term fiscal policy strategy is carried out through strengthening human capital, strengthening downstream and green economic transformation, strengthening inclusiveness, building infrastructure to support economic transformation, strengthening bureaucracy and regulation, strengthening the creative economy and entrepreneurship, strengthening defense, security, and strengthening independence through food and energy security, as well as strengthening nationalism, democracy and human rights (HAM). Meanwhile, the short-term strategy is pursued by maintaining the sustainability of current priority programs as well as strengthening various flagship programs focused on accelerating economic growth, strengthening well-being, and convergence between regions. Based on these strategic steps, the macro-fiscal posture for 2025 is as follows:

Postur Makro Fiskal 2023 - 2025 (%PDB)
Posture Macro Fiscal 2023 - 2025 (%PDB)

Uraian Description	2023 Realisasi Unaudited Unaudited Realization in 2023	2024	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah State Revenue and Grants	13,32	12,27	12,14 – 12,36
1. Penerimaan Perpajakan Tax Revenue	10,31	10,12	10,09 – 10,29
2. PNPB	2,93	2,16	2,05 – 2,07
3. Hibah Grants	0,081	0,002	0,001 – 0,002
B. Belanja Negara State Expenditure	14,94	14,56	14,59 – 15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat Central Government Expenditure	10,72	10,81	10,92 – 11,17
2. Transfer ke Daerah Transfer to Regions	4,22	3,76	3,67 – 4,01
C. Keseimbangan Primer Primary Balance	0,49	(0,11)	(0,30) – (0,61)
D. Defisit Anggaran Budget Deficit	(1,62)	(2,29)	(2,45) – (2,82)
1. Pembiayaan Investasi Investment Financing	(0,43)	(0,77)	(0,30) – (0,50)
2. Rasio Utang Debt Ratio	38,98	38,26	37,98 – 38,71

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025
Source: Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Principles for 2025

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024-2025
Basic Macroeconomic Assumptions for 2024-2025

Indikator Indicator	2024		2025	
	APBN State Budget	Outlook	Pembicaraan Pendahuluan Preliminary Talks	RAPBN Draft State Budget
Pertumbuhan Ekonomi (%) Economic Growth (%)	5,2	5,1	5,1 – 5,3	5,2
Inflasi (%yoy) Inflation (% yoy)	2,8	2,7	1,5 – 3,5	2,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun (% rata-rata) 10 Year Government Bond Interest Rate (% average)	6,7	6,9	6,9 – 7,2	7,1
Nilai Tukar (Rp/US\$, rata-rata) Exchange Rate (IDR/US\$, average)	15.000	16.000	15.300 – 15.900	16.100
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US\$/barel, rata-rata) Indonesia Crude Oil Price/ICP (US\$/barrel, average)	82	82	75 – 85	82
Lifting, Minyak (rbph) Lifting, Oil (rbph)	635	592	580 – 605	600
Lifting Gas (rbsmph) Gas Lifting (rbsmph)	1.033	990	1.003 – 1.047	1.005

Sumber: Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
Source: Book II of the Financial Memorandum and Draft State Budget for Fiscal Year 2025

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai proyeksi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, memengaruhi keputusan pelaku usaha/perusahaan untuk melakukan investasi, serta meningkatkan pembangunan sektoral yang berujung peluang baik untuk industri penjaminan.

The efforts made to achieve these projections are expected to be able to encourage economic growth in a better direction so as to increase people's purchasing power, influence the decision of business people/companies to invest, and increase sectoral development which leads to good opportunities for the guarantee industry.

Proyeksi Kinerja dan Rencana Kerja Perusahaan Tahun 2025

Company Performance Projections and Work Plans for 2025

Proyeksi Tahun 2025 terhadap Realisasi Tahun 2024 Projections for 2025 against the Realization in 2024

Uraian	Realisasi 2024 2024 Realization	Proyeksi 2025 2025 Projection	Perbandingan Proyeksi 2025 Terhadap Realisasi 2024 Comparison of 2025 Projection against the 2024 Realization
	1	2	%
PEMASARAN MARKETING			
Volume Kredit yang Dijamin (Rp-juta) Guaranteed Credit Volume (IDR-million)	325.544.867	348.471.870	107,04
LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Imbal Jasa Penjaminan Bersih (Rp-juta) Net Guarantee Fee (IDR-million)	6.922.049	7.215.686	104,24
Beban Klaim (Rp-juta) Claim Expenses (IDR-million)	5.019.391	6.274.606	125,01
Penjaminan Bersih (Rp-juta) Net Guarantee (IDR-million)	1.902.658	1.081.178	56,82
Pendapatan Investasi (Rp-juta) Investment Income (IDR - million)	1.458.916	1.490.709	102,18
Beban Usaha (Rp-juta) Operating Expenses (IDR-million)	(2.041.533)	(1.832.093)	89,74
Pendapatan (Beban) Lain-Lain (Rp-juta) Other Comprehensive Income (Expenses) (IDR-million)	7.566	14.280	188,74
Laba Sebelum Pajak (Rp-juta) Profit Before Tax (IDR-million)	1.287.051	754.074	58,59
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (Rp-juta) Income Tax Benefit (Expense) (IDR-million)	(125.557)	(192.198)	153,08
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta) Profit for the Year (IDR-million)	1.161.494	561.875	48,38
POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION			
Aset (Rp-juta) Assets (IDR-million)	32.358.328	33.908.044	104,79
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (IDR-million)	19.014.093	19.949.113	104,92
Ekuitas (Rp-juta) Equity (IDR-million)	13.344.328	13.958.931	104,61
STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE			
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) (%) Debt to Equity Ratio (DER) (%)	142,49	142,91	100,29
RASIO-RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS			
Return On Equity (ROE) (%)	8,49	4,25	50,06
Return On Asset (ROA) (%)	4,49	2,28	50,78
Net Profit Margin (NPM) (%)	14,38	6,59	45,83
Rasio Solvabilitas (%) Solvency Ratio (%)	170,18	169,97	99,88

Proyeksi Kebijakan Dividen

Pembagian dividen Perseroan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih, termasuk penetapan dividen, ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dilakukan penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70. Dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan memiliki saldo laba positif, yaitu laba bersih tahun berjalan yang mampu menutup akumulasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam merumuskan kebijakan dividen, manajemen mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti:

- Kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan;
- Kebutuhan pendanaan untuk ekspansi dan penguatan struktur permodalan;
- Kewajiban pemenuhan cadangan sesuai peraturan;
- Dan arahan pemegang saham.

Ke depan, Perseroan akan terus menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham untuk memperoleh dividen dengan kebutuhan internal perusahaan guna mendukung keberlanjutan bisnis. Kebijakan dividen tahun-tahun mendatang akan terus disesuaikan dengan kondisi keuangan dan keputusan RUPS.

Proyeksi Kebijakan Dividen

The Company's dividend distribution policy is based on the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law") and the Company's Articles of Association. In accordance with Article 71 of the Company Law, the allocation of net profit, including the declaration of dividends, is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS), after making the required reserve allocations as stipulated in Article 70. Dividends may only be distributed if the Company has a positive retained earnings balance, meaning the current year's net income is sufficient to offset any accumulated losses from previous years.

In formulating its dividend policy, management takes into account several key factors, such as:

- The Company's financial performance and business outlook;
- Funding needs for expansion and strengthening of capital structure;
- Obligation to fulfill reserves in accordance with applicable regulations;
- And guidance from shareholders.

Going forward, the Company will strive to balance shareholders' expectations for dividend returns with the Company's internal needs to sustain and grow the business. The dividend policy in the coming years will be aligned with the Company's financial performance and subject to the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS).



KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA

DIVIDEND POLICY AND ITS DISTRIBUTION

Kebijakan Dividen

Kebijakan pembagian dividen Perusahaan didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan dengan tetap memperhatikan hak para pemegang saham serta kondisi keuangan Perusahaan.

Keputusan pembagian dividen mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk laba bersih yang diperoleh pada tahun fiskal, kewajiban Perusahaan dalam mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta kondisi keuangan terkini. Selain itu, Perusahaan juga mempertimbangkan prospek pertumbuhan dan rencana ekspansi dalam menentukan kebijakan dividen.

Dividend Policy

The Company's dividend distribution policy is based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which states that dividend distribution is made based on the decision of the Annual GMS while taking into account the rights of shareholders and the Company's financial condition.

Dividend distribution decisions take into account various factors, including net income earned in the fiscal year, the Company's obligation to allocate reserve funds in accordance with applicable regulations, as well as current financial conditions. In addition, the Company also considers growth prospects and expansion plans in determining dividend policy.

Kronologis Pembagian Dividen

Berikut ini adalah ringkasan pembagian dan pembayaran Dividen tunai dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Chronology of Dividend Distribution

The following is a summary of the distribution and payment of cash Dividends in the last 5 (five) years:

Tahun Pembagian Year of Distribution	Tahun Dividen Dividend Year	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pembayaran Payment Date	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Distributed Cash Dividends (IDR)	Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)
2024	2023	8 Juli 2024 July 8, 2024	28 Oktober 2024 October 28, 2024	1.077.760	75%
2023	2022	27 Juni 2023 June 27, 2023	14 Agustus 2023 August 14, 2023	959.876	75%
2022	2021	23 Desember 2022 December 23, 2022	29 Desember 2022 December 29, 2022	799.366	75%
2021	2020	May 18, 2022 18 Mei 2022	23 Juni 2022 June 23, 2022	342.100	75%
2020	2019	15 Juli 2020 July 15, 2020	18 Agust 2020 August 18, 2020	400.000	64%

PERPAJAKAN: KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

TAXATION: CONTRIBUTION TO THE STATE

Selain memberikan dividen, Jamkrindo juga memberikan kontribusi kepada Negara dalam bentuk pajak. Tahun 2024, Jamkrindo telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya dengan rincian dan perbandingannya terhadap tahun 2023 sebagai berikut:

In addition to distributing dividends, Jamkrindo also contributes to the State in the form of taxes. In 2024, Jamkrindo has fulfilled all of its tax obligations with details and comparisons to 2023 as follows:

Jenis Pajak Type of Tax	2024	2023
PPh Pasal 29 Income Tax Article 29	-	94.078
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	94.518	234.706
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	103.531	81.687
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	6.415	5.412
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 section 2	3.179	2.302
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	437	332
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	181	165
Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax	33.131	27.181
Jumlah Total	241.392	445.863

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

INFORMATION REGARDING EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM

Sampai dengan 31 Desember 2024, Jamkrindo tidak melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan (ESOP/MSOP). Oleh karena itu, Laporan Tahunan ini tidak memuat informasi mengenai stock option yang dimiliki oleh pekerja dan manajemen, termasuk jumlah saham, harga exercise, jangka waktu, serta persyaratan bagi pekerja dan/atau manajemen yang berhak.

Until December 31, 2024, Jamkrindo did not implement any employees share ownership program and/or management share ownership program (ESOP/MSOP). Therefore, this Annual Report does not provide information related to stock options held by employees and management, including the number of shares, exercise price, term, and requirements for eligible employees and/or management.

INFORMASI TENTANG PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

INFORMATION REGARDING THE USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS

Jamkrindo tidak melakukan penawaran umum di bursa manapun sepanjang tahun 2024.

Throughout 2024, Jamkrindo did not conduct any public offering on any stock exchange.

INFORMASI MATERIAL (JIKA ADA), ANTARA LAIN MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL, TRANSAKSI MATERIAL, TRANSAKSI AFILIASI, DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN, YANG TERJADI PADA TAHUN BUKU

**MATERIAL INFORMATION (IF ANY), REGARDING INVESTMENT,
EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION,
ACQUISITION, DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING, MATERIAL
TRANSACTIONS, AFFILIATED TRANSACTIONS, AND CONFLICT-OF-
INTEREST TRANSACTIONS THAT OCCURRED DURING THE FISCAL YEAR**

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan pemenuhan prinsip transparansi, Jamkrindo menyajikan ringkasan atas seluruh aksi dan transaksi yang dikategorikan sebagai material selama tahun buku 2024. Penyajian ini mencakup informasi mengenai status pelaksanaan, rujukan catatan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Audited, ringkasan nilai dan objek transaksi, serta penjelasan mengenai kewajaran, kepatuhan terhadap ketentuan, dan pengawasan tata kelola.

Tabel di bawah ini disusun untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami jenis transaksi yang dilakukan Perseroan, termasuk investasi, transaksi afiliasi, serta penilaian atas potensi adanya transaksi material, benturan kepentingan, maupun aksi korporasi seperti ekspansi, divestasi, merger, akuisisi, dan restrukturisasi utang atau modal.

Seluruh transaksi yang dilakukan telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk PSAK yang relevan dan kebijakan internal perusahaan. Prosedur kewajaran (arms-length principle), pelibatan Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta audit internal dan eksternal memastikan bahwa seluruh transaksi dilaksanakan secara akuntabel dan profesional.

Berikut adalah ringkasan informasi aksi dan/atau transaksi material Jamkrindo sepanjang tahun 2024:

As part of its commitment to information disclosure and the principle of transparency, Jamkrindo presents a summary of all actions and transactions categorized as material during the 2024 fiscal year. This presentation includes information on implementation status, references to notes in the Audited Consolidated Financial Statements, a summary of transaction values and objects, as well as explanations regarding fairness, compliance with regulations, and governance monitoring.

The table below is presented to facilitate stakeholders in understanding of the types of transactions conducted by the Company, including investments, affiliated transactions, as well as assessments of potential material transactions, conflicts of interest, and corporate actions such as expansion, divestment, merger, acquisition, and debt or capital restructuring.

All transactions conducted have complied with applicable laws and regulations, including relevant Financial Accounting Standards (PSAK) and the Company's internal policies. The arms-length principle, the involvement of the Board of Commissioners and the Audit Committee, as well as the internal and external audits ensure that all transactions are conducted in an accountable and professional manner.

The following is a summary of information on Jamkrindo's material actions and/or transactions throughout 2024:

Tabel Ringkasan Informasi Mengenai Aksi dan/atau Transaksi yang Material Jamkrindo 2024

Summary Table of Jamkrindo's Material Actions and/or Transactions in 2024

Jenis Transaksi yang Material Types of Material Transactions	Status 2024 Status	Rujukan LK Audited (Catatan) ¹ Reference to Audited Financial Statements (Note) ¹	Tanggal Transaksi Date of Transaction	Ringkasan Nilai & Objek Transaksi ² Summary of Transaction Value and Object ²	Kewajaran, Kepatuhan, dan Proses Pengawasan Fairness, Compliance, and Monitoring Process
Investasi Investment	Ada Present	Cat. 5, Cat. 2.g, Cat. 1, Cat. 11, Cat. 2.k Note 5, Note 2.g, Note 1, Note 11, Note 2.k	Per 31 Desember 2024 As of December 31, 2024	• Deposito wajib & berjangka Rp3,96 Triliun • Portofolio pasar-modal (obligasi, sukuk, RD, saham) Rp17,79 Triliun (cat. 7.a, 7.b, 7.c, 7.d) • Penyertaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (99,929 %) Rp2,41 Triliun • Aset tetap & Teknologi Informasi Rp126 Miliar • Mandatory and Time Deposits of IDR 3.96 trillion • Capital market portfolio (bonds, sukuk, mutual funds, equities) amounting to IDR 17.79 trillion (note) 7.a, 7.b, 7.c, 7.d) • Participation of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (99.929%) amounting to IDR 2.41 trillion • Fixed Assets and Information Technology amounting to IDR 126 billion	• Dilakukan sesuai PSAK 71; • harga pasar/valuasi wajar; • Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. • Implemented in compliance with PSAK 71; • market price/fair valuation; • Audited by a Public Accounting Firm.
Ekspansi Usaha Business Expansion	Tidak ada None	-	-	-	Tidak ada pembukaan lini baru atau pendirian entitas baru yang bersifat material. No new business lines launched or new entities established that were considered material.
Divestasi Divestment	Tidak ada None	-	-	-	Tidak ada pelepasan saham/ aset strategis. No shares/strategic assets were divested.
Penggabungan / Peleburan Usaha Business Merger/ Consolidation	Tidak ada None	-	-	-	Tidak ada merger/peleburan. No mergers/consolidations took place.
Akuisisi Acquisition	Tidak ada None	-	-	-	Tidak ada akuisisi entitas atau aset material. No acquisitions of entities or material assets were made.
Restrukturisasi Utang / Modal Debt / Capital Restructuring	Tidak ada None	-	-	-	Struktur permodalan stabil; tidak ada perubahan modal disetor atau negosiasi utang. The capital structure remained stable; there was no changes in paid-in capital or debt negotiations.
Transaksi Material Material Transactions	Tidak ada None	-	-	-	Tercatat sebagai transaksi operasional biasa. Recorded as an ordinary operational transaction.
Transaksi Benturan Kepentingan Conflict of Interest Transactions	Tidak ada None	Cat. 41 Note 41	-	-	• Audit internal & eksternal menegaskan tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan; • karenanya tidak diperlukan persetujuan pemegang saham independen. • Internal and external audits confirmed that no transactions resulted in a conflict of interest; • therefore, approval from independent shareholders was not required.

Tabel Ringkasan Informasi Mengenai Aksi dan/atau Transaksi yang Material Jamkrindo 2024

Summary Table of Jamkrindo's Material Actions and/or Transactions in 2024

Jenis Transaksi yang Material Types of Material Transactions	Status 2024 2024 Status	Rujukan LK Audited (Catatan) ¹ Reference to Audited Financial Statements (Note) ¹	Tanggal Transaksi Date of Transaction	Ringkasan Nilai & Objek Transaksi ² Summary of Transaction Value and Object ²	Kewajaran, Kepatuhan, dan Proses Pengawasan Fairness, Compliance, and Monitoring Process
Transaksi Afiliasi Affiliated Transactions	Ada (rutin & berulang) Present (routine and recurring)	Cat. 41 Note 41	Per 31 Desember 2024 As of December 31, 2024	• Penempatan reksadana di Manajer Investasi BUMN Rp1,01 Triliun • Kepemilikan sukuk Pegadaian & SBSN Rp2,14 Triliun • Pendapatan komisi & subrogasi bank-BUMN (total efek Rp2 Triliun) • Placement of mutual funds with SOE Investment Managers amounted to IDR 1.01 trillion • Ownership of Pegadaian sukuk and Sovereign Sharia Securities (SBSN) amounted to IDR 2.14 trillion • Commission and subrogation income from state-owned banks (total securities amounted to IDR 2 trillion)	• Arms-length: tarif pasar; • Direksi menerapkan prosedur evaluasi risiko-return; • diawasi Dewan Komisaris & Komite Audit melalui laporan triwulan. • Arms-length: market rates; • The Board of Directors implements risk-return evaluation procedures; • Monitoring is provided by the Board of Commissioners and the Audit Committee through quarterly reports.

Catatan:

¹ Rujukan numerik merujuk pada catatan di Laporan Keuangan Konsolidasian Audited 31 Des 2024 Jamkrindo.

² Nilai disajikan secara ringkas, sementara kelengkapan dapat dilihat di catatan terkait.

Notes:

¹ Numeric references are in accordance with notes in Jamkrindo's Audited Consolidated Financial Statements as of December 31, 2024.

² Values are presented in a summarized form, while full details can be found in the related notes.

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat aksi korporasi berskala besar seperti ekspansi usaha baru, divestasi, merger, akuisisi, atau restrukturisasi utang dan modal yang dilakukan Jamkrindo. Struktur organisasi dan model bisnis tetap terjaga stabil, dengan fokus pada penguatan operasional inti dan optimalisasi aset.

Transaksi material yang tercatat secara signifikan hanya berasal dari aktivitas investasi dan transaksi afiliasi, yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dan strategi pendanaan yang prudent. Aktivitas investasi meliputi penempatan dana di instrumen pasar uang dan pasar modal, serta penyertaan saham pada entitas anak. Sementara itu, transaksi afiliasi dilakukan secara rutin dan berulang dengan entitas BUMN dalam bentuk penempatan dana dan kerja sama operasional, yang mendukung pendapatan usaha secara berkelanjutan.

Seluruh transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan prinsip kewajaran, melalui prosedur internal yang memadai, dan diawasi oleh Dewan Komisaris serta Komite Audit. Dengan demikian, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan maupun transaksi luar biasa lainnya yang berpotensi memengaruhi independensi pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Informasi Material Mengenai Investasi

Semua transaksi material yang berkaitan dengan aktivitas investasi Jamkrindo telah diungkapkan secara lengkap dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Pengungkapan tersebut mencakup nilai, klasifikasi, serta dampak transaksi terhadap posisi keuangan dan kinerja Perseroan, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai signifikansi investasi Jamkrindo secara transparan dan akuntabel.

Throughout 2024, Jamkrindo did not undertake any major corporate actions such as new business expansion, divestment, mergers, acquisitions, or debt and capital restructuring. The organizational structure and business model remained stable, with a focus on strengthening core operations and optimizing assets.

Significant material transactions were limited to investment activities and affiliated transactions, both of which form part of prudent financial management and funding strategies. Investment activities included fund placements in money market and capital market instruments, as well as equity participation in subsidiaries. Meanwhile, affiliated transactions were carried out on a routine and recurring basis with state-owned entities, in the form of fund placements and operational partnerships, supporting sustainable business income.

All transactions were conducted based on the principles of fairness, through adequate internal procedures, and were monitored by the Board of Commissioners and the Audit Committee. Accordingly, there were no conflict-of-interest transactions or other extraordinary transactions that could potentially affect the Company's strategic decision-making independence.

Material Information Regarding Investment

All material transactions related to Jamkrindo's investment activities have been fully disclosed in the Audited Consolidated Financial Statements for the year which ended on December 31, 2024. The disclosure includes the value, classification, and impact of the transactions on the Company's financial position and performance, enabling stakeholders to assess the significance of Jamkrindo's investments in a transparent and accountable manner.

Pada 2024, Jamkrindo berupaya keras mengelola portofolio investasinya secara terukur untuk menjaga likuiditas, mendorong pendapatan non-operasional, dan mendukung agenda transformasi digital. Aktivitas investasi Perseroan mencakup penyertaan strategis pada entitas anak, penempatan dana pada instrumen keuangan yang aman dan likuid, serta pengadaan aset tetap dan aset takberwujud yang memperkuat infrastruktur operasional.

Pilar utama portofolio adalah kepemilikan 99,929 % saham PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, yang bergerak di bidang penjaminan berbasis syariah. Penyertaan ini dikonsolidasikan penuh dan menegaskan komitmen Perseroan memperluas layanan di segmen syariah yang terus tumbuh. Rincian struktur kepemilikan, domisili, dan aktivitas usaha PT Jamkrindo Syariah diungkap dalam Catatan 1, dan juga diungkapkan dalam Bab Profil Perusahaan, halaman 139.

Dana likuid Jamkrindo ditempatkan terutama pada Deposito Wajib dan Berjangka – Bersih sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 5: Deposito Wajib dan Berjangka – Bersih. Penempatan ini mencerminkan kebijakan investasi yang berhati-hati, menjaga stabilitas arus kas, dan menyediakan basis pendapatan bunga yang relatif pasti .

Komposisi instrumen dengan risiko pasar, seperti obligasi, sukuk, reksa dana, dan saham, disajikan dalam Catatan 2.g, yang merinci klasifikasi aset keuangan Jamkrindo sesuai PSAK 71 (FVTPL, FVOCI, dan biaya perolehan diamortisasi). Kendati catatan ini tidak memuat kebijakan akuntansi naratif, ia menampilkan nilai wajar tiap kelompok aset dan mendemonstrasikan diversifikasi portofolio Perseroan.

Pendapatan dari penempatan dana—bunga deposito, kupon obligasi, dan imbal hasil instrumen lainnya—dicatat sebagai Piutang Hasil Investasi – Bersih pada Catatan 10. Pos ini menegaskan kontribusi investasi ke laba perusahaan dalam bentuk arus kas yang dapat diprediksi .

Untuk meningkatkan efisiensi dan kapabilitas layanan, Jamkrindo berinvestasi pada aset tetap (gedung, peralatan, kendaraan, dan infrastruktur TI) yang diuraikan dalam Catatan 11 . Sementara itu, belanja aset takberwujud—terutama perangkat lunak dan sistem informasi—diakui dan diungkap melalui kebijakan serta rincian di Catatan 2.k dan baris “Aset takberwujud” pada laporan posisi keuangan .

Seluruh keputusan investasi dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian, dengan evaluasi risiko pasar, kredit, dan likuiditas yang ketat. Jamkrindo tidak memiliki investasi spekulatif berisiko tinggi yang dapat mengganggu profil risiko keuangan perusahaan. Dengan pendekatan tersebut, Perseroan berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan nilai aset dan kestabilan keuangan, sekaligus mendukung agenda ekspansi layanan penjaminan—baik konvensional maupun syariah—secara berkelanjutan.

In 2024, Jamkrindo strives to manage its investment portfolio in a measured manner to maintain liquidity, boost non-operating income, and support its digital transformation agenda. The Company's investment activities include strategic investments in subsidiaries, placement of funds in safe and liquid financial instruments, and procurement of fixed assets and intangible assets that strengthen operational infrastructure.

The main pillar of the portfolio is a 99.929% ownership stake in PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, which operates in the field of Sharia-based credit guarantee services. This investment is fully consolidated and highlights the Company's commitment to expanding its services in the rapidly growing Sharia segment. Details on the ownership structure, domicile, and business activities of PT Jamkrindo Syariah are disclosed in Note 1, and also presented in the Company Profile chapter on page 139.

Jamkrindo's liquid funds are primarily placed in Statutory and Time Deposits – Net, as detailed in Note 5: Statutory and Time Deposits – Net. These placements reflect a prudent investment policy, aimed at maintaining cash flow stability and providing a relatively stable source of interest income.

The composition of market-risk instruments, such as bonds, sukuk, mutual funds, and equities is presented in Note 2.g, which details Jamkrindo's financial asset classifications in accordance with PSAK 71 (FVTPL, FVOCI, and amortized cost). While the note does not contain narrative accounting policies, it provides the fair value of each asset class and demonstrates the diversification of the Company's portfolio.

Income from fund placements—such as deposit interest, bond coupons, and returns from other instruments—is recorded as Investment Income Receivables – Net in Note 10. This account emphasizes the contribution of investments to the Company's earnings in the form of predictable cash flows.

To enhance service efficiency and capability, Jamkrindo invested in fixed assets, such as buildings, equipment, vehicles, and IT infrastructure as outlined in Note 11. Meanwhile, expenditures on intangible assets—primarily software and information systems—are recognized and disclosed through the accounting policies in Note 2.k and the 'Intangible Assets' line item in the statement of financial position.

All investment decisions are made based on the principles of transparency, accountability, and prudence, supported by rigorous evaluations of market, credit, and liquidity risks. Jamkrindo does not hold any high-risk speculative investments that could disrupt the Company's financial risk profile. Through this approach, the Company has successfully maintained a balance between asset growth and financial stability, while also supporting the sustainable expansion of its guarantee services—both conventional and sharia-based.

Informasi Transaksi Material dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Jamkrindo menjalankan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 224 tentang “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”.

Transaksi dengan pihak berelasi tersebut telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (arms-length principle), menggunakan harga atau persyaratan yang berlaku umum, dan telah melalui prosedur internal yang memadai.

Direksi menyatakan bahwa tidak terdapat kepentingan pribadi dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham pengendali dalam transaksi-transaksi tersebut. Pengungkapan rinci atas transaksi dengan pihak berelasi, termasuk nama pihak terkait, nilai, dan jenis transaksi, telah disajikan secara lengkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2024 — Catatan No. 41: Transaksi dengan Pihak Berelasi.

Perusahaan juga tidak melakukan transaksi afiliasi yang melebihi ambang batas transaksi material, dan oleh karena itu tidak terdapat transaksi yang memerlukan persetujuan RUPS independen.

Pihak Berelasi dan Sifat Hubungan Relasi dengan Perusahaan

Adapun pihak berelasi dan sifat hubungan relasi dengan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) adalah pemegang saham Grup. PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah entitas yang dimiliki dan dikendalikan secara tidak langsung oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Grup memiliki transaksi penjaminan ulang dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama Grup dan Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Syariah, PT Pegadaian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Reasuransi Syariah Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT BRI Asuransi Indonesia, Perum Perumahan Nasional (Persero), PT Bank Raya Indonesia Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pegadaian - Unit Syariah, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Gresik (Persero) Tbk,

Information on Material Transactions with Affiliated/Related Parties

Jamkrindo has transactions with related parties as defined in Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 224 on “Disclosure of Related Parties”.

Transactions with related parties have been carried out based on the arms-length principle, using generally accepted prices or terms, and have gone through adequate internal procedures.

The Board of Directors declares that there are no personal interests of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or controlling shareholders in these transactions. Detailed disclosures of transactions with related parties, including the names of related parties, values, and types of transactions, have been presented in full in the Notes to the Consolidated Financial Statements of 2024 - Note No. 41: Transactions with Related Parties.

The Company also did not conduct any related party transactions that exceeded the threshold of material transactions, and therefore there were no transactions that required independent GMS approval.

Related Parties and the Nature of The Relationship with the Company

The related parties and the nature of the relationship with the Company are as follows:

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) is the Group’s shareholder. PT Reasuransi Nasional Indonesia is an entity that is indirectly owned and controlled by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) The Group has a reinsurance transaction with PT Reasuransi Nasional Indonesia.
2. State-Owned Enterprises (SOEs)
The Government of the Republic of Indonesia The Government of the Republic of Indonesia is the majority shareholder of the Group, State-Owned Enterprises, and Subsidiaries PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Syariah, PT Pegadaian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Reasuransi Syariah Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT BRI Asuransi Indonesia, Perum Perumahan Nasional (Persero), PT Bank Raya Indonesia Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pegadaian - Unit Syariah, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Garuda

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT PP (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Mandiri Tunas Finance, PT BNI Multifinance, PT AXA Mandiri Financial Service, Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera, PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Istaka Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bahana TCW Investment Management, PT Danareksa (Persero), PT PNM Investment Management, PT Danareksa Investment Management, PT PP Presisi Tbk, PT BNI Asset Management, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Perkebunan Nusantara, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Propernas Griya Utama, Koperasi Warga Semen Gresik, PT Propernas Griya Utama dan PT Barata Indonesia (Persero), PT Elnusa Tbk, PT BRI Multifinance, PT Adhi Commuter Properti adalah entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Grup memiliki rekening giro, deposito wajib dan berjangka, surat berharga, deposito berjangka untuk tujuan tertentu, piutang penjaminan, piutang penjaminan ulang, piutang hasil investasi, utang reasuransi, utang klaim, imbal jasa kafalah bruto, premi penjaminan ulang bruto, beban klaim, klaim penjaminan ulang, beban komisi, pendapatan komisi, pendapatan ujah penjaminan ulang, beban ujah, pendapatan subrogasi, pendapatan investasi dan beban investasi di entitas-entitas tersebut. Grup memiliki obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Grup juga memiliki transaksi investasi pada efek-efek, piutang penjaminan, piutang hasil investasi, utang reasuransi, imbal jasa kafalah bruto, premi penjaminan ulang bruto dan pendapatan investasi dengan Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan.

Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT PP (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Mandiri Tunas Finance, PT BNI Multifinance, PT AXA Mandiri Financial Service, Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera, PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Istaka Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bahana TCW Investment Management, PT Danareksa (Persero), PT PNM Investment Management, PT Danareksa Investment Management, PT PP Presisi Tbk, PT BNI Asset Management, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Perkebunan Nusantara, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Propernas Griya Utama, Koperasi Warga Semen Gresik, PT Propernas Griya Utama dan PT Barata Indonesia (Persero), PT Elnusa Tbk, PT BRI Multifinance, PT Adhi Commuter Properti are entities owned by and controlled by the Government of the Republic of Indonesia. Group has current accounts, statutory and time deposits, marketable securities, term deposits for specific purposes, guarantee receivables, reguarantee receivables, Investment income receivables, reinsurance payable, claims payable, gross kafalah fee, claim expenses, reinsurance claims, commission expenses, commission income, ujah reinsurance income, ujah expenses, subrogation income, investment income, and investment expenses in these entities. Group has bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia. Group also has investment transactions in marketable securities, guarantee receivables, investment receivables, reinsurance payables, gross kafalah fees, gross reinsurance premiums and investment income with State-Owned Enterprises and Subsidiaries.

Nilai Transaksi

Transaction Value

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi pada Periode Tahun Buku 2023 dan 2024 Realization of Related Party Balances and Transactions in the 2023 and 2024 Fiscal Year Period

dalam juta Rupiah
in IDR-millions

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Aset Related Party Balances in Assets	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Kas di Bank Cash in Bank	131.541	0,41%	139.766	0,43	(8.225)	-5,88%
Deposito Wajib dan Berjangka Statutory and Time Deposits	3.397.390	10,50%	6.499.226	20,16	(3.101.836)	-47,73%
Deposito Berjangka untuk Tujuan Tertentu Time Deposits for Specific Purposes	1.494.373	4,62%	1.504.373	4,67	(10.000)	-0,66%
Efek Utang Debt Securities	11.219.388	34,67%	8.158.469	25,31	3.060.919	37,52%
Sukuk Sukuk	3.920.663	12,12%	4.639.233	14,39	(718.570)	-15,49%
Reksadana Mutual Funds	1.005.337	3,11%	1.041.223	3,23	(35.886)	-3,45%

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi pada Periode Tahun Buku 2023 dan 2024
Realization of Related Party Balances and Transactions in the 2023 and 2024 Fiscal Year Period

dalam juta Rupiah
in IDR-millions

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Aset Related Party Balances in Assets	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Saham Shares	126.940	0,39%	134.062	0,42	(7.122)	-5,31%
Efek Beragun Aset Asset-backed Securities	628	0,00%	3.063	0,01	(2.435)	-79,50%
Piutang Imbal Jasa Penjaminan Guarantee Fee Receivables	3.802.629	11,75%	4.366.393	13,55	(563.764)	-12,91%
Piutang Penjaminan Ulang Re-guarantee Receivables	798.293	2,47%	762.624	2,37	35.669	4,68%
Piutang Hasil Investasi Investment Income Receivables	234.949	0,73%	221.477	0,69	13.472	6,08%
Jumlah Aset dari Pihak Berelasi Total Assets of Related Parties	26.132.129	80,76%	27.469.909	85,23	(1.337.780)	-4,87%
Total Aset Total Assets	32.358.328		32.231.220		127.108	0,39%

dalam juta Rupiah
in IDR-millions

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Liabilitas Related Party Balances in Liabilities	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Utang Penjaminan Ulang Re-guarantee Payables	1.005.112	5,29%	633.300	3,35	371.812	58,71%
Utang Klaim Claim Payables	299.226	1,57%	79.975	0,42	219.251	274,15%
Jumlah Liabilitas dari Pihak Berelasi Total Liabilities of Related Parties	713.275	3,75%	713.275	3,78	0	0,00%
Total Liabilitas Total Liabilities	19.014.093		18.877.198		136.895	0,73%

dalam juta Rupiah
in IDR-millions

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Kafalah Related Party Balances in Kafalah Income	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	4.021	1,20	17.909	4,40	13.888	77,55%
Jumlah Imbal Jasa Kafalah Bruto dari Pihak Berelasi Total Kafalah Fees from Related Party	4.021	1,20	17.909	4,40	13.888	77,55%
Total Imbal Jasa Kafalah Bruto Total Kafalah Fees - Gross	368.277		408.035		39.758	9,74%

dalam juta Rupiah
in IDR-millions

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Penjaminan Ulang Related Party Balances in Re-guarantee	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Premi Penjaminan Ulang Re-guarantee Premium	1.135.553	98,14	740.166	96,40	395.387	53,42%
Total Premi Penjaminan Ulang dari Pihak Berelasi Total Re-guarantee premium from Related Party	1.135.553	98,14	740.166	96,40	395.387	53,42%
Total Premi Penjaminan Ulang Total Re-guarantee Premium	1.157.054		767.795		389.259	50,70%

dalam juta Rupiah
in IDR-millions

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Klaim Related Party Balances in Claim Expenses	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Beban Klaim Claim Expenses	8.556.010	93,72	5.370.958	90,16	3.185.052	59,30%
Total Beban Klaim dari Pihak-Pihak Berelasi Total Claim Expenses from Related Parties	8.556.010	93,72	5.370.958	90,16	3.185.052	59,30%
Total Beban Klaim Total Claim Expenses	9.129.657		5.957.023		3.172.634	53,26%

dalam juta Rupiah
in IDR-millions

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Klaim Penjaminan Ulang Related Party Balances in Re-guarantee Claims	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Klaim penjaminan ulang Re-guarantee Claims	1.068.761	100,00	787.839	98,98	280.922	35,66%
Total Klaim penjaminan ulang dari Pihak-Pihak Berelasi Total Re-guarantee Claims in Related Parties	1.068.761	100,00	787.839	98,98	280.922	35,66%
Total Klaim Penjaminan ulang Total Re-guarantee Claims	1.068.761		788.483		280.278	35,55%

dalam juta Rupiah
in IDR-millions

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Komisi Related Party Balances in Commission Expenses	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Beban Komisi Commission Expenses	10.336	38,35	2.893	9,23	7.443	257,28%
Total Beban Komisi dari Pihak-Pihak Berelasi Total Commission Expenses from Related Parties	10.336	38,35	2.893	9,23	7.443	257,28%
Total Beban Komisi Total Commission Expenses	26.954		31.338		-4.384	-13,99%

dalam juta Rupiah
in IDR-millions

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Komisi Related Party Balances in Commission Income	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Pendapatan Komisi Commission Income	154.038	99,85	92.030	99,33	62.008	67,38%
Total Beban Komisi dari Pihak-Pihak Berelasi Total Commission Income from Related Parties	154.038	99,85	92.030	99,33	62.008	67,38%
Total Pendapatan komisi Total Commission Income	154.271		92.651		61.620	66,51%

dalam juta Rupiah
in IDR-millions

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Subrogasi Related Party Balances in Subrogation Income	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Pendapatan Subrogasi – Bersih Subrogation Income – Net	1.838.400	94,75	967.267	91,30	871.133	90,06%
Total Pendapatan Subrogasi – Bersih dari Pihak-Pihak Berelasi Total Subrogation Income - Net from Related Parties	1.838.400	94,75	967.267	91,30	871.133	90,06%
Total Pendapatan Subrogasi – Bersih Total Subrogation Income – Net	1.940.167		1.059.417		880.750	83,14%

dalam juta Rupiah
in IDR-millions

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Investasi Related Party Balances in Investment Income	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Pendapatan Investasi Investment Income	1.411.242	95,53	1.109.240	91,80	302.002	27,23%
Total Pendapatan Investasi dari Pihak-Pihak Berelasi Total Investment Income from Related Parties	1.411.242	95,53	1.109.240	91,80	302.002	27,23%
Total Pendapatan Investasi Total Investment Income	1.477.285		1.208.265		269.020	22,26%

Saldo Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Investasi Related Party Balances in Investment Expenses	2024		2023		Peningkatan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Beban Amortisasi Amortization Expense	18.369	100,00	4.087	100,00	14.282	349,45%
Total Beban Amortisasi dari Pihak-Pihak Berelasi Total Amortization Expense from Related Parties	18.369	100,00	4.087	100,00	14.282	349,45%
Total Beban Investasi Total Investment Expense	18.369		4.087		14.282	349,45%

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Jamkrindo menetapkan bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi harus memenuhi prinsip kewajaran (arms-length principle). Untuk menjamin hal tersebut, Perseroan menerapkan serangkaian mekanisme evaluasi internal yang mencakup kajian risiko, analisis imbal hasil terhadap harga pasar, serta pertimbangan aspek hukum dan kepatuhan. Prosedur ini dilakukan oleh unit kerja terkait, kemudian disahkan oleh manajemen sesuai batas kewenangan yang berlaku. Hasil evaluasi ini mendasari penilaian bahwa transaksi dilakukan secara wajar, tidak merugikan perusahaan, dan sejalan dengan praktik bisnis yang umum berlaku.

Explanation of Transaction Fairness

Jamkrindo requires that all transactions with related parties adhere to the arm's-length principle to ensure fairness. To ensure this, the Company implements a series of internal evaluation mechanisms, including risk assessments, return analysis against market pricing, and consideration of legal and compliance aspects. These procedures are conducted by the relevant work units and subsequently approved by management in accordance with the applicable authority limits. The results of this evaluation form the basis for the assessment that the transactions were conducted fairly, did not harm the Company, and were in line with prevailing business practices.

Pemenuhan Ketentuan Terkait Transaksi Berelasi

Jamkrindo memastikan bahwa seluruh transaksi material maupun transaksi afiliasi dilakukan sesuai dengan PSAK 224 mengenai pengungkapan pihak berelasi. Ketentuan internal seperti Pedoman Transaksi Afiliasi dan Batas Kewenangan Direksi juga menjadi acuan utama dalam pelaksanaan dan pengawasan transaksi.

Pernyataan Direksi Mengenai Prosedur yang Memadai

Direksi menyatakan bahwa seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan selama tahun 2024 telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan pelaksanaan transaksi sesuai prinsip kewajaran (arms-length principle). Setiap transaksi telah melalui tahapan identifikasi, evaluasi, dan dokumentasi risiko serta kelayakan komersial, sebagaimana diatur dalam kebijakan internal. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan profesional untuk memastikan bahwa keputusan transaksi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tetapi semata-mata untuk kepentingan bisnis dan kelangsungan usaha Perseroan.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi afiliasi. Komite Audit secara berkala mereviu rencana dan realisasi transaksi dengan pihak berelasi, serta memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan telah mengikuti prosedur internal yang berlaku. Temuan atau rekomendasi hasil reviu dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam rapat triwulanan. Dengan mekanisme ini, Dewan Komisaris berperan aktif dalam menjaga integritas tata kelola dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan transaksi.

Transaksi Afiliasi yang Bersifat Rutin dan Berkelanjutan

Beberapa transaksi afiliasi yang dilakukan Jamkrindo pada tahun 2024 merupakan bagian dari kegiatan usaha inti dan bersifat rutin, berulang, serta berkelanjutan. Contohnya adalah penempatan dana di bank-bank BUMN, pembelian instrumen investasi dari manajer investasi BUMN, serta penerimaan komisi dari kerja sama penjaminan dengan lembaga keuangan. Transaksi-transaksi tersebut merupakan bagian dari kegiatan normal operasional perusahaan yang dijalankan secara berkesinambungan guna menghasilkan pendapatan usaha, dan telah dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian serta kebijakan internal yang berlaku.

Compliance with Regulations Related to Related Party Transactions

Jamkrindo ensures that all material and affiliated transactions are conducted in accordance with PSAK 224 concerning related party disclosures. Internal regulations, such as the Affiliated Transactions Guidelines and the Board of Directors' Authority Limits, also serve as key references in the execution and monitoring of transactions.

The Board of Directors' Statement Regarding the Adequacy of Procedures

The Board of Directors affirms that all affiliated transactions carried out in 2024 were conducted through adequate procedures to ensure they were executed in accordance with the arm's-length principle. Each transaction underwent identification, risk evaluation, and commercial feasibility assessment in accordance with the Company's internal policies. This assessment was conducted objectively and professionally to ensure that transaction decisions were not influenced by personal interests, but were made solely in the interest of the Company's business and long-term sustainability.

The Role of the Board of Commissioners and the Audit Committee

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors the execution of affiliated transactions. The Audit Committee periodically reviews the plan and realization of transactions with related parties, and ensures that the transactions are conducted in accordance with the principles of fairness and have followed the applicable internal procedures. Findings or recommendations from the review are reported to the Board of Commissioners during quarterly meetings. Through this mechanism, the Board of Commissioners plays an active role in upholding governance integrity and ensuring that no abuse of authority or potential conflicts of interest occur in the execution of transactions.

Routine and Ongoing Affiliated Transactions

Several affiliated transactions conducted by Jamkrindo in 2024 were part of the core business activities and are routine, recurring, and ongoing in nature. Examples include fund placements in state-owned banks, purchases of investment instruments from state-owned asset managers, and receipt of commissions from guarantee partnerships with financial institutions. These transactions are part of the Company's normal ongoing operations aimed at generating business income and have been conducted in accordance with prudent principles and applicable internal policies.

Rujukan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Tahunan

Seluruh transaksi afiliasi dan transaksi material yang dilakukan sepanjang tahun 2024 telah diungkapkan secara rinci dalam Catatan 41 Laporan Keuangan Konsolidasian Jamkrindo. Pengungkapan tersebut mencakup nama pihak berelasi, nilai transaksi, sifat hubungan, serta saldo yang masih tercatat pada akhir periode. Selain itu, catatan lainnya seperti Catatan 34 hingga 38 juga merujuk ke transaksi dengan pihak berelasi, memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan.

Persetujuan Pemegang Saham Independen

Sepanjang tahun 2024, Jamkrindo tidak melakukan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen. Dengan demikian, tidak terdapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Tidak Terdapat Transaksi Afiliasi dan/atau Benturan Kepentingan Jamkrindo menegaskan bahwa sepanjang tahun 2024 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan, baik yang dilakukan oleh organ perusahaan maupun oleh pihak berelasi. Seluruh transaksi afiliasi yang terjadi telah dijalankan dengan mekanisme yang wajar dan akuntabel serta tidak menimbulkan konflik kepentingan yang memerlukan eskalasi ke RUPS independen. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjunjung tinggi prinsip integritas dan tata kelola perusahaan yang baik.

Disclosure References in the Annual Financial Report

All affiliated transactions and material transactions conducted throughout 2024 have been disclosed in detail in Note 41 of Jamkrindo's Consolidated Financial Statements. The disclosure includes the names of related parties, transaction values, the nature of the relationships, and the outstanding balances recorded at the end of the period. Additionally, other notes such as Notes 34 through 38 also refer to related party transactions, further enhancing the transparency and openness of the information provided to stakeholders.

Approval of Independent Shareholders

Throughout 2024, Jamkrindo did not engage in any affiliated transactions or conflict of interest transactions that required approval from independent shareholders. Therefore, no General Meeting of Shareholders (GMS) was held for this purpose.

No Affiliated Transactions and/or Conflicts of Interest Occurred Jamkrindo emphasized that throughout 2024, there were no conflicts of interest transactions involving either company officials or related parties. All affiliated transactions conducted were carried out through fair and accountable mechanisms and did not give rise to any conflicts of interest requiring escalation to an independent General Meeting of Shareholders (GMS). This demonstrates the Company's commitment to upholding the principles of integrity and good corporate governance.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERDAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT IMPACT THE COMPANY

Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memengaruhi penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan, antara lain:

Throughout 2024, there were several laws and regulations that impact the implementation of the Company's business activities, as detailed below:

No	Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Pokok Perubahan Key Changes
1	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare in the First Thousand Days of Life Phase	1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. keadilan; c. kesetaraan gender; d. perlindungan; e. kemanfaatan; f. pemberdayaan; g. keterpaduan; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. keberlanjutan; k. kepentingan terbaik bagi Ibu dan Anak; dan l. nondiskriminasi. 1. The Implementation of Maternal and Child Welfare is based on the principles of: a. a. faith and piety to God Almighty; b. b. justice; c. c. gender equality d. d. protection e. e. expediency; f. f. empowerment; g. g. integration h. h. transparency; i. i. accountability j. j. sustainability; k. k. best interests of mothers and children; and l. l. nondiscrimination.
	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare in the First Thousand Days of Life Phase	2. Setiap Ibu berhak mendapatkan: a. pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan; b. jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan; c. pelayanan keluarga berencana; d. pemenuhan kesejahteraan sosial; e. pendampingan dari suami, Keluarga, pendamping profesional, dan/atau pendamping lainnya pada masa kehamilan, keguguran, persalinan, dan pascapersalinan; f. rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya; g. pelayanan konsultasi, layanan psikologi, dan/atau bimbingan keagamaan; h. edukasi, pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan tentang perawatan, pengasuhan, pemberian makan, dan tumbuh kembang Anak; i. perlakuan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana umum; dan j. kesempatan menjadi pendonor air susu ibu bagi Anak yang tidak memungkinkan mendapatkan air susu ibu dari Ibu kandungnya karena kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan 3. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Ibu berhak memberikan air susu ibu eksklusif sejak Anak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun disertai pemberian makanan pendamping. 4. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan: a. melahirkan dengan ketentuan: 1) paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan 2) paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 5. waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran; 6. kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja; a. waktu yang cukup dalam hal diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak; dan/atau b. akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya. 7. Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib diberikan oleh pemberi kerja. 8. Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 meliputi: a. Ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pascapersalinan atau keguguran; dan/ atau b. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi.

	Dampak bagi Perusahaan Impact to the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts

-

Harmonisasi Peraturan Perusahaan
Harmonization of Company Regulations

No	Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Pokok Perubahan Key Changes	
		2. Every mother has the right to receive: a. health services that are in accordance with standards, safe, quality, and affordable in the pre-pregnancy, pregnancy, childbirth, and postpartum periods accompanied by the fulfillment of health insurance in accordance with the provisions of laws and regulations in the health sector; b. nutritional security during pregnancy, childbirth, postpartum until the child is 6 (six) months old; c. family planning services; d. fulfillment of social welfare; e. assistance from husband, family, professional assistants, and/or other assistants during pregnancy, miscarriage, childbirth, and postpartum; f. a sense of security and comfort and protection from all forms of violence, discrimination, neglect, exploitation, degrading treatment and human dignity, human rights violations, and other unlawful treatment; g. consultation services, psychological services, and/or religious guidance; h. education, development of insights, knowledge, and skills on child care, nurturing, feeding, and growth and development; i. special treatment and facilities in public facilities and infrastructure; and j. the opportunity to become a breast milk donor for Children who are unable to obtain breast milk from their biological mothers due to certain conditions in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of Health. 3. In addition to the rights as referred to in paragraph (1), every mother has the right to provide exclusive breast milk from the time the child is born until the child is 6 (six) months old and the provision of breast milk is continued until the child is 2 (two) years old accompanied by complementary food. 4. In addition to the rights as referred to in paragraph (1) and paragraph (2), every working mother is entitled to: a. give birth with the following provisions: 1) at least the first 3 (three) months; and 2) a maximum of the following 3 (three) months if there are special conditions as evidenced by a doctor's certificate. 5. a rest period of 1.5 (one and a half) months or in accordance with a doctor's certificate, obstetrician and gynecologist, or midwife if experiencing a miscarriage; 6. opportunities and proper facilities for health and nutrition services and lactation during working time; a. sufficient time when necessary for the best interests of the child; and/or b. access to childcare that is affordable in terms of distance and cost. 7. Maternity leave as referred to in paragraph (3) letter a must be provided by the employer. 8. Special conditions as referred to in paragraph (3) letter a number 2 include: a. Mothers who experience health problems, health problems, and/or postpartum complications or miscarriages; and/or b. Children who are born experiencing health problems, health problems, and/or complications.	
2	POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan POJK No. 30 of 2024 on Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Holding Companies	Berkaitan dengan Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan IFG Group Relating to the IFG Group Financial Conglomerate Corporate Charter	

	Dampak bagi Perusahaan Impact to the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts

Ketentuan tersebut diperuntukan untuk Perusahaan Induk – holding, hal ini karena Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksu

The provision is intended for holding companies, this is because Controlling Shareholders, hereinafter abbreviated as PSP, are legal entities, individuals, and/or business groups that directly or indirectly own shares or are equivalent to shares in parties that engage in activities in the financial services sector and/or have the ability to exercise control over the party in question.

Melakukan penyesuaian terhadap Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Perusahaan Induk
Adjustments to the Parent Company's Financial Conglomerate Corporate Charter

No	Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Pokok Perubahan Key Changes
3	POJK No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan dan Informasi Keuangan POJK No. 11 of 2024 concerning the Second Amendment to OJK Regulation Number 18/POJK.03/2017 concerning Reporting and Requesting Debtor Information Through the Financial Information and Service System	- Perusahaan belum memiliki kebijakan dan prosedur mengenai: - penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, - permintaan dan penggunaan Informasi Debitur, dan - penyelesaian pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur, hal ini dikarenakan sebelum berlakunya POJK 11/2024, perusahaan penjaminan tidak termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan yang wajib melaporkan informasi debitur ke Sistem Layanan Informasi Keuangan. - Pelaksanaan SLIK OJK oleh Perusahaan harus diaudit minimal 1 kali dalam setahun oleh auditor internal. - Dalam rangka menjamin implementasi SLIK OJK di Perusahaan sesuai dengan ketentuan POJK maupun peraturan pelaksanaannya serta kebijakan dan prosedur internal, maka diperlukan sosialisasi dan/atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman operasionalisasi SLIK OJK dan risk awareness, reminding terhadap kewajiban regulasi serta audit internal secara berkala minimal 1 kali dalam setahun. - Dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perusahaan sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Wajib Lapor ke SLIK OJK, maka atas kegiatan permintaan dan penggunaan Informasi Debitur yang akan dilaporkan (diinput) ke SLIK OJK wajib memperoleh persetujuan Calon Debitur/Terjamin (customer consent) dalam rangka pemberian jasa penjaminan. - Bahwa atas penetapan perusahaan penjaminan sebagai sebagai LJK Wajib Lapor ke SLIK OJK berimplikasi pada penambahan kegiatan baru input informasi Debitur (Terjamin) pada SLIK OJK (dan setiap perubahan datanya) yaitu atas alur proses kegiatan penjaminan, proses klaim dan pengeloaan subrogasi sehingga atas peraturan Perusahaan bidang penjaminan, klaim dan subrogasi perlu dilakukan harmonisasi tidak terbatas hanya penambahan kegiatan input informasi Debitur (Terjamin) juga alur kegiatan yang menunjukkan adanya persetujuan Calon Debitur/Terjamin (customer consent) dalam rangka pemberian jasa penjaminan - The Company does not yet have policies and procedures regarding: - submission of Debtor Report and/or correction of Debtor Report, - request and use of Debtor Information, and - settlement of complaints regarding inaccuracies in Debtor Information, This is because before the enactment of POJK 11/2024, guarantee companies were not included in Financial Services Institutions that were required to report debtor information to the Financial Information Service System. - The implementation of SLIK OJK by the Company must be audited at least once a year by an internal auditor. - In order to ensure the implementation of SLIK OJK in the Company in accordance with the provisions of POJK and its implementing regulations as well as internal policies and procedures, socialization and/or training is required to improve understanding of the operationalization of SLIK OJK and risk awareness, reminders of regulatory obligations and periodic internal audits at least once a year. - In the context of implementing the Company's obligations as a Financial Services Institution (LJK) Required to Report to SLIK OJK, the request and use of Debtor Information that will be reported (inputted) to SLIK OJK must obtain the approval of Prospective Debtors / Guarantors (customer consent) in the context of providing guarantee services. - That the determination of the guarantee company as a Mandatory Reporting Financial Institution to SLIK OJK has implications for the addition of new activities for inputting Debtor (Guaranteed) information in SLIK OJK (and any changes to the data), namely the process flow of guarantee activities, the claim process and the management of subrogation so that the Company's regulations in the field of guarantee, claims and subrogation need to be harmonized not limited to the addition of Debtor (Guaranteed) information input activities as well as the flow of activities that indicate the approval of Prospective Debtors/Guarantees (customer consent) in the context of providing guarantee services.

	Dampak bagi Perusahaan Impact to the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
	1. POJK SLIK berlaku bagi Perusahaan sejak diundangkan POJK No. 11 Tahun 2024 pada tanggal pada 31 Juli 2024. 2. Kewajiban menjadi Pelapor bagi Perusahaan sesuai Pasal 6 POJK 18/2017 dilaksanakan untuk pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK (= untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 31 November 2024) dan paling lama 1 tahun sejak tanggal POJK No. 11 Tahun 2024 atau maksimal tanggal 31 Juli 2025. 1. OJK Regulation on Financial Information Service System (POJK SLIK) applies to the Company since the promulgation of POJK No. 11 of 2024 on July 31, 2024. 2. The obligation to become a reporter for the Company in accordance with Article 6 POJK 18/2017 is implemented for the first time to OJK no later than the 12th of the fourth month from the time it is determined as a reporter by OJK (= for the first time implemented on November 31, 2024) and no later than 1 year from the date of POJK No. 11 of 2024 or a maximum of July 31, 2025.	1. Atas kesimpulan point 8 dan 9, maka Unit kerja pemrakarsa peraturan perlu melakukan kaji ulang atas peraturan bidang bisnis, penjaminan dan klaim yang terdampak pengaturan dalam POJK SLIK dan POJK Pelindungan Konsumen (POJK 22/2023) diantaranya atas peraturan : a. Peraturan Direksi tentang Kebijakan Penjaminan Langsung; b. Peraturan Direksi tentang Kebijakan Penjaminan Tidak Langsung; c. Peraturan Direksi tentang Kebijakan Klaim; d. Peraturan Direksi tentang Kebijakan Subrogasi; e. SE Direksi tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa; f. tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Kredit Umum g. SE Direksi tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat; h. SE Direksi tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 i. SE Direski tentang Prosedur Keputusan Penjaminan Kasus Per Kasus Dan Perjanjian Penjaminan j. SE Direksi tentang Prosedur Penjaminan Bank Garansi; dan k. SE Direksi tentang Prosedur Surety Bond. 2. Seiring dengan adanya kebijakan dan prosedur di atas, Perusahaan menunjuk pelaksana dan/atau pejabat yang bertugas menjalankan fungsi: a. menyampaikan Laporan Debitur; b. melakukan verifikasi Laporan Debitur; c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur; d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor; e. menangani pengaduan Debitur; f. melakukan pengamanan data Informasi Debitur; dan g. melakukan supervisi terhadap permintaan Informasi Debitur. 1. Based on the conclusions of points 8 and 9, the regulation initiating work unit needs to review the regulations in the fields of business, guarantee and claims affected by the regulation in POJK SLIK and POJK Consumer Protection (POJK 22/2023) including the following regulations: a. Board of Directors Regulation on Direct Guarantee Policy; b. Board of Directors Regulation on Indirect Guarantee Policy; c. Board of Directors Regulation on Claims Policy; d. Board of Directors Regulation on Subrogation Policy; e. Board of Directors Regulation on the Implementation Guidelines for Construction Credit Guarantee and Goods/Services Procurement; f. on the Implementation Guideline for General Credit Guarantee g. Circular of the Board of Directors regarding Implementation Guidelines for People's Business Credit Guarantee; h. Circular of the Board of Directors on the Implementation Guidelines for People's Business Credit Guarantees Affected by the Corona Virus Disease Pandemic 2019 i. Director's Circular on Procedures for Case-by-Case Guarantee Decisions and Guarantee Agreements j. Circular of the Board of Directors on Bank Guarantee Procedures; and k. Circular of the Board of Directors on Surety Bond Procedures. 2. Following the above policies and procedures, the Company appoints executors and/or officers in charge of carrying out the following functions: a. submitting the Debtor Report; b. verifying the Debtor's Report c. submitting requests and receiving Debtor Information; d. administering and managing the access rights of SLIK users in the internal Reporter; e. handling Debtor complaints; f. securing Debtor Information data; and g. supervising requests for Debtor Information.

No	Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Pokok Perubahan Key Changes	
4	POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan POJK No. 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti Fraud Strategies for Financial Services Institutions	1. Bagi LJK yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 2. Perusahaan wajib menyampaikan: a. Strategi Anti Fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan b. Laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti Fraud dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud. kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 30 April 2025 3. setelah Perusahaan menyampaikan sebagaimana dimaksud Pasal 11 di atas dan apabila terdapat perubahan maka wajib disampaikan kembali kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan dilakukan 4. Dalam hal terdapat kejadian Fraud berdampak signifikan, LJK wajib menyampaikan laporan kejadian Fraud berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Pedoman Pengisian Laporan Fraud Berdampak Signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diketahui terjadinya Fraud yang berdampak signifikan 5. Perusahaan dengan modal disetor lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau dengan aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), 6. baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, wajib menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti Fraud pertama kali paling lambat 31 Januari 2025 1. Financial Services Institutions performing activities conventionally or based on sharia principles that have obtained a license from the Financial Services Authority shall submit the Anti Fraud Strategy as referred to in Article 10 paragraph (1) letter a to the Financial Services Authority within a maximum period of 6 (six) months as of the enactment of this Financial Services Authority Regulation. 2. The Company shall submit: a. Anti Fraud Strategy as referred to in Article 3 with reference to the Guidelines for Implementation of Anti Fraud Strategy for Financial Services Institutions; and b. Report or correction of the report on the implementation of the Anti Fraud Strategy with reference to the Guidelines for Completing the Report on the Implementation of the Anti Fraud Strategy. to the Financial Services Authority on April 30, 2025 3. after the Company submits as referred to in Article 11 above and if there are changes, it must be submitted again to the OJK no later than 7 (seven) Business Days after the changes are made 4. In the event of a Fraud event with a significant impact, the Financial Services Institution shall submit a report on the occurrence of Fraud with a significant impact to the Financial Services Authority by referring to the Guidelines for Filling in the Fraud Report with a Significant Impact to the Financial Services Authority within a maximum period of 6 (six) business days after the occurrence of Fraud with a significant impact is known. 5. Companies with paid-up capital of more than IDR 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah) or with assets of more than IDR 500,000,000,000.00 (five hundred billion rupiah), 6. both those carrying out activities conventionally and based on sharia principles, must submit a report on the implementation of the Anti Fraud Strategy for the first time no later than January 31, 2025.	

	Dampak bagi Perusahaan Impact to the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
	Dasar : Pasal 20 POJK 12/2024 a. Dampak Non Finansial dan Dampak Finansial LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan b. Selain teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan, paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan c. LJK yang telah dikenai sanksi administratif baik berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas dan denda sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas tetap wajib menyampaikan Strategi Anti Fraud atau perubahannya, laporan atau koreksi laporan penerapan Strategi Anti Fraud dan laporan kejadian Fraud berdampak signifikan atau penyesuaiannya d. Dalam hal LJK telah dikenai sanksi teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf di atas dan/atau sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas dan tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c) di atas, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif kepada LJK berupa: 1) larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; 2) penghentian sementara sebagian kegiatan operasional; 3) pembatasan kegiatan usaha; dan/atau 4) pembekuan kegiatan usaha tertentu e. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, peneraan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c) di atas dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan peneraan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas Basis: Article 20 POJK 12/2024 a. Non-Financial Impact and Financial Impact Financial Services Institutions that violate the provisions referred to in Article 14 shall be subject to administrative sanctions in the form of a written warning or a written warning by the Financial Services Authority. b. In addition to the written reprimand or written warning referred to in letter a above, FSIs that violate the provisions referred to in Article 14 shall be subject to administrative sanctions in the form of a fine of IDR 100,000.00 (one hundred thousand rupiah) per business day of lateness per report, with a maximum of IDR 3,000,000.00 (three million rupiah) per report. c. LJKs that have been subject to administrative sanctions in the form of written warnings or written warnings as referred to in letter a) above and fines as referred to in letter b) above are still required to submit the Anti Fraud Strategy or amendments thereof, reports or corrections to reports on the implementation of the Anti Fraud Strategy and reports on Fraud incidents with significant impact or adjustments thereof. d. In the event that a FSI has been sanctioned with a written warning or written warning as referred to in (a) above and/or a fine as referred to in (b) above and still does not fulfill the obligations as referred to in (c) above, the Financial Services Authority may impose administrative sanctions on the FSI in the form of: 1) prohibition to issue new products or carry out new activities; 2) temporary suspension of some operational activities 3) restriction of business activities; and/or 4) suspension of certain business activities e. In the event that based on the assessment of the Financial Services Authority there is a significant violation that needs to be sanctioned immediately, the imposition of sanctions as referred to in letter c) above may be imposed immediately without being preceded by the imposition of sanctions as referred to in letter a) above.	Peraturan Internal yang terdampak POJK 12/2024 adalah Perdir 56/2020 dan Perdir 9/2024 dimana terdapat beberapa klausul di POJK 12/2024 yang belum di akomodir dalam Perdir 56/2020 dan Perdir 9/2024 sehingga diperlukan harmonisasi Internal regulations affected by POJK 12/2024 are Perdir 56/2020 and Perdir 9/2024 where there are several clauses in POJK 12/2024 that have not been accommodated in Regulation of the Board of Director no. 56/2020 and Regulation of the Board of Director no. 9/2024 so that harmonization is needed.

No	Peraturan Perundang- undangan Laws and Regulations	Pokok Perubahan Key Changes	
5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program Regulation of the Minister of Finance Number 12 of 2024 concerning Guidelines for the Use of the Program Credit Information System	1. Dalam rangka mendapatkan Hak Akses SIKP, calon Pengguna SIKP mengajukan permohonan kepada Pengelola SIKP. 2. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui, Pengelola SIKP memberikan Hak Akses kepada Pengguna SIKP berupa Kode Pengguna dan Kode Akses. 1. In order to obtain Program Credit Information System (SIKP) Access Rights, prospective SIKP Users submit an application to the SIKP Manager. 2. For the application as referred to in paragraph (1) that has been approved, the SIKP Manager grants Access Rights to SIKP Users in the form of User Codes and Access Codes.	
6	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2024 on the Second Amendment to Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 1 of 2022 on Guidelines for the Implementation of People's Business Credit	1. Syarat Calon Penerima KUR super mikro 2. KUR mikro diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR 3. Suku Bunga KUR Mikro 1. Eligibility of super micro KUR recipients 2. KUR micro is given to KUR Recipients with a ceiling amount of more than IDR 10,000,000,00 (ten million rupiah) up to IDR 100,000,000,00 (one hundred million rupiah) for each KUR Recipient. 3. KUR Micro Interest Rate	

	Dampak bagi Perusahaan Impact to the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts

Peraturan Internal yang terdampak Permenkeu 12/2024 adalah Surat Edaran Direksi Nomor 20/SE/2/I/2025 tentang Prosedur Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang belum di akomodir dalam Surat Edaran Direksi Nomor 20/SE/2/I/2025 sehingga diperlukan harmonisasi Internal regulations that are affected by Regulation of Ministry of Finance no. 12/2024 are Circular Letter of the Board of Directors Number 20/SE/2/I/2025 concerning People's Business Credit Guarantee Procedures which have not been accommodated in Circular Letter of the Board of Directors Number 20/SE/2/I/2025 so that harmonization is needed.

No	Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Pokok Perubahan Key Changes	
7	Peraturan Menteri Koordinator Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pedoman Relaksasi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat Coordinating Minister Regulation No. 13/2024 on Guidelines for Relaxation of People's Business Credit Restructuring	Relaksasi restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR Relaxation of People's Business Credit restructuring for People's Business Credit recipients	
8	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.08/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13/SEOJK.08/2024 on the Preparation and Submission of Plan Reports and Realization Reports on Financial Literacy and Financial Inclusion	- PUJK memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan: - laporan Literasi Keuangan; dan - laporan Inklusi Keuangan. - kepada Otoritas Jasa Keuangan - Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: - laporan Literasi Keuangan - laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan - laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. - laporan Inklusi Keuangan - laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan - laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan	- PUJK has the obligation to compile and submit: a. a Financial Literacy report; and b. Financial Inclusion report. - to the Financial Services Authority - The report as referred to in number 1 consists of: - Financial Literacy report - activity plan report to improve Financial Literacy; and - report on the realization of activities to improve Financial Literacy. - Financial Inclusion report - activity plan report to improve Financial Inclusion; and - report on the realization of activities to improve Financial Inclusion.

	Dampak bagi Perusahaan Impact to the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
	-	-
	1. Laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. Apabila tanggal 30 November jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. 2. Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan secara semesteran dan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan realisasi disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. 3. Penyesuaian laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	
	1. Perubahan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) semester dan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan 1. The report on the activity plan to improve Financial Literacy and Financial Inclusion shall be submitted no later than November 30th prior to the year of the activity. If November 30th falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the report on the activity plan to improve Financial Literacy and Financial Inclusion shall be submitted on the next 1 (one) business day. 2. Report on the realization of activities to improve Financial Literacy and Financial Inclusion shall be submitted on a semi-annual basis and no later than 31 July of the current year and 31 January of the following year. If the deadline for submitting reports on the realization of activities to improve Financial Literacy and Financial Inclusion falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the realization report shall be submitted on the next 1 (one) business day. 3. Adjustment of activity plan report to improve Financial Literacy and Financial Inclusion shall be submitted no later than 30 (thirty) days after the date of the request letter from the Financial Services Authority. 4. Changes to the activity plan report to improve Financial Literacy and Financial Inclusion shall be made at most 1 (one) time for 1 (one) semester and submitted no later than 30 (thirty) days prior to the implementation of the activity.	

No	Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Pokok Perubahan Key Changes
9	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2024 Tentang Penilaian Kualitas Atas Tagihan Subrogasi, Kegiatan Penjaminan dan Suretyship Circular Letter of the Financial Services Authority Number 9/SEOJK.05/2024 Regarding Quality Assessment of Subrogation Bills, Guarantee and Suretyship Activities	- Pengajuan klaim dalam asuransi kredit, asuransi pembiayaan syariah, penjaminan kredit, dan penjaminan pembiayaan syariah hanya dapat dilakukan ketika kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah dinyatakan dalam kolektibilitas macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan - Dalam hal terdapat pembayaran kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah setelah Perusahaan melakukan pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan penyesuaian terhadap: - kualitas kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah oleh kreditur; dan - kualitas Tagihan Subrogasi oleh Perusahaan. - Dalam rangka penilaian kualitas Tagihan Subrogasi, Perusahaan melakukan rekonsiliasi data terkait dengan Tagihan Subrogasi dengan kreditur secara bulanan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya bulan berjalan. - Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan tujuan: - validitas data Tagihan Subrogasi; - memastikan kualitas data yang akan dilaporkan; dan - menghindari adanya kemungkinan kesalahan pada saat pelaporan data - Tagihan Subrogasi dicatat sebesar risiko yang ditanggung atau dijamin oleh Perusahaan atas nilai saldo kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah. - Penilaian kualitas Tagihan Subrogasi atas kredit, pembiayaan, atau pembiayaan syariah ditetapkan berdasarkan faktor kemampuan pembayaran Debitur atas Tagihan Subrogasi. - Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 kualitas tagihan ditetapkan menjadi: - lancar; atau - macet. - Penilaian terhadap kemampuan pembayaran Debitur atas Tagihan Subrogasi ditetapkan sebagai berikut: - lancar, yaitu apabila Debitur melakukan pembayaran Tagihan Subrogasi sebesar 100% (seratus persen) dari total tagihan; atau - macet, yaitu apabila Debitur tidak melakukan pembayaran sama sekali atau melakukan pembayaran Tagihan Subrogasi namun tidak melunasi 100% (seratus persen) dari total tagihan. - Perusahaan mengadministrasikan setiap pembayaran Debitur atas Tagihan Subrogasi dan menyampaikan pelaporan melalui sistem layanan informasi keuangan - Submission of claims in credit insurance, sharia financing insurance, credit guarantees, and sharia financing guarantees can only be made when credit, financing, or sharia financing is declared in loss collectibility in accordance with the provisions of laws and regulations. - In the event that there is a payment of credit, financing, or sharia financing after the Company makes a claim payment as referred to in number 2, an adjustment shall be made to: - the quality of credit, financing, or sharia financing by creditors; and - the quality of Subrogation Receivables by the Company. - In order to assess the quality of Subrogation Receivables, the Company shall reconcile data related to Subrogation Receivables with creditors on a monthly basis no later than 5 (five) business days after the end of the current month. - Data reconciliation as referred to in point 7 is conducted with the objectives of: - validity of the Subrogation Receivables data; - ensuring the quality of data to be reported; and - to avoid possible errors during data reporting. - Subrogation Receivables shall be recorded at the amount of risk borne or guaranteed by the Company on the balance value of credit, financing, or sharia financing. - The quality assessment of Subrogation Receivables for credit, financing, or sharia financing is determined based on the Debtor's ability to pay the Subrogation Receivables. - Based on the assessment as referred to in number 1, the quality of the receivables is determined to be: - current; or - loss. - Assessment of the Debtor's ability to pay the Subrogation Bills is determined as follows: - current, if the Debtor makes payment of Subrogation Bills amounting to 100% (one hundred percent) of the total bills; or - loss, if the Debtor does not make any payment at all or makes payment of Subrogation Bills but does not settle 100% (one hundred percent) of the total bills. - The Company administers each Debtor's payment of Subrogation Bills and submits reporting through the financial information service system.

	Dampak bagi Perusahaan Impact to the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
	1. Tagihan Subrogasi dicatat sebesar nilai klaim yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada penerima jaminan atau obligee. 2. Penilaian kualitas Tagihan Subrogasi atas penjaminan dan suretyship ditetapkan berdasarkan faktor kemampuan pembayaran pihak terjamin atau principal atas Tagihan Subrogasi. 3. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 kualitas tagihan ditetapkan menjadi: a. lancar; atau b. macet. 4. Penilaian terhadap kemampuan pembayaran pihak terjamin atau principal atas Tagihan Subrogasi ditetapkan sebagai berikut: a. lancar, yaitu apabila Debitur melakukan pembayaran Tagihan Subrogasi sebesar 100% (seratus persen) dari total tagihan; atau b. macet, yaitu apabila Debitur tidak dapat melakukan pembayaran sama sekali atau melakukan pembayaran Tagihan Subrogasi namun tidak dapat melunasi 100% (seratus persen) dari total tagihan. 5. Perusahaan mengadministrasikan setiap pembayaran Debitur atas Tagihan Subrogasi dan menyampaikan pelaporan melalui sistem layanan informasi keuangan 6. Seluruh pencatatan atas penilaian kualitas terhadap Tagihan Subrogasi, kegiatan penjaminan, dan suretyship pada Perusahaan dicatatkan dalam rekening administratif. 7. Penilaian terhadap transaksi rekening administratif dilakukan terhadap seluruh fasilitas yang disediakan 8. Untuk pelaporan Tagihan Subrogasi saat pertama kali pada sistem layanan informasi keuangan dilakukan untuk Tagihan Subrogasi yang timbul paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan	Harmonisasi Peraturan Perusahaan Harmonization of Company Regulations
	1. Subrogation receivables are recorded at the amount of the claim paid by the Company to the obligee. 2. The quality assessment of Subrogation Receivables for guarantee and suretyship is determined based on the payment ability factor of the guaranteed party or principal for the Subrogation Receivables. 3. Based on the assessment as referred to in number 2, the quality of the receivables is determined to be: a. current; or b. loss. 4. Assessment of the payment capability of the secured party or principal of the Subrogation Receivables is determined as follows: a. current, if the Debtor makes payment of the Subrogation Bill amounting to 100% (one hundred percent) of the total bill; or b. loss, if the Debtor is unable to make any payment at all or makes payment of the Subrogated Receivables but is unable to settle 100% (one hundred percent) of the total receivables. 5. The Company administers each Debtor's payment of the Subrogation Receivables and submits reporting through the financial information service system. 6. All records of quality assessment of Subrogation Receivables, guarantee and suretyship activities in the Company are recorded in the administrative account. 7. Assessment of administrative account transactions is made on all facilities provided. 8. For the first time reporting of Subrogation Bills on the financial information service system is conducted for Subrogation Bills arising at least 5 (five) years before this Circular Letter of the Financial Services Authority is stipulated.	

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

CHANGE IN ACCOUNTING POLICY

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Berikut amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

1. Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik;
2. Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
3. Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
4. Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; dan
5. Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Implementasi amendemen standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Effective January 1, 2024, references to each PSAK and ISAK have been updated in accordance with the pronouncements issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

The following amendments to standards are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024, with early adoption permitted, namely:

1. Amendment to PSAK 116: Leases regarding Lease Liabilities in Sale and Lease-Backs;
2. Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements on the Classification of Liabilities as Current or Non-Current;
3. Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements on Non-Current Liabilities with Covenants;
4. Amendments to PSAK 207: Cash Flow Statements and amendments to PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures regarding Supplier Finance Arrangements; and
5. Revised PSAK 409: Accounting for Zakat, Infaq, and Alms and Revised PSAK 401: Presentation of Sharia Financial Statements.

The implementation of the amendments to these standards did not have a material impact on the amounts reported in the current period or the prior year.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

COMPANY'S SOUNDNESS LEVEL

Evaluasi kinerja Perusahaan tercermin dalam tingkat kesehatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023, Pasal 76 Ayat (1), yang menyatakan bahwa tingkat kesehatan BUMN dinilai berdasarkan pemeringkatan. Pemeringkatan yang digunakan dalam penilaian ini dilakukan oleh PT Pemeringkatan Efek Indonesia (PEFINDO) dan ditetapkan pada 17 April 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- a. a. Peringkat Berdiri Sendiri (Stand Alone Rating): id AA-(sa)
- b. b. Peringkat Akhir (Final Rating): id AA+/Stable

Dengan demikian, tingkat kesehatan PT Jaminan Kredit Indonesia untuk Tahun Buku 2024 dinyatakan dalam kategori **sangat sehat**, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 81.

The evaluation of the Company's performance is reflected in its soundness level as stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, Article 76 Paragraph (1), which states that the soundness level of SOEs is assessed based on ratings. The ranking used in this assessment was conducted by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) and determined on April 17, 2025 with the following results:

- a. Stand Alone Rating: id AA- (sa)
- b. Final Rating: id AA+/Stable

Thus, the health/soundness level of PT Jaminan Kredit Indonesia for Fiscal Year 2024 is declared to be in the **very healthy** category, in accordance with the provisions in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 article 81.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan di Tahun 2024

1. Peningkatan beban klaim dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Gejala geopolitik global dan meningkatnya serangan siber telah menambah tekanan pada perekonomian nasional, termasuk perusahaan-perusahaan di Indonesia.
3. Tingginya intensitas persaingan antar kompetitor menciptakan tantangan tambahan bagi perusahaan.

Assessment Manajemen atas Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

1. Digitalisasi dan streamline end to end business melalui percepatan Penjaminan berbasis online (Host to host).
2. Penguatan kualitas tim marketing Internal (SDM) melalui pengembangan kompetensi bisnis terutama dalam analisa Produk Penjaminan Case By Case.
3. Kolaborasi dengan mitra strategis melalui perluasan kerja sama dengan mitra Penerima Jaminan terutama dalam produk non penugasan.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment atas Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Adapun asumsi makro dalam RKAP tahun buku 2024 di antaranya:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2% per tahun.
2. Tingkat inflasi 2,8%.
3. *Exchange rate* 1 USD = Rp15.000,00/USD.
4. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun 6,7%
5. Harga minyak mentah Indonesia = 82 US dolar/barel
6. *Lifting* minyak mentah 635 ribu barel per hari
7. *Lifting* gas 1.033 ribu barel setara minyak per hari

Sementara asumsi kebijakan mikroekonomi dalam penyusunan RKAP tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

1. Volume penjaminan sebesar Rp415 triliun
Rencana bisnis PT Jamkrindo pada RKAP tahun 2024 memproyeksikan volume penjaminan sebesar Rp414,81 triliun atau naik sebesar 13% dibandingkan dengan prognosa tahun 2023 dengan perincian Per Line of Bussines (LOB) sebagai berikut:

Matters That Have the Potential to Significantly Affect the Continuity of the Company's Business in 2024

1. Increase in claim expenses compared to the previous year.
2. Global geopolitical turmoil and increased cyber-attacks have put additional pressure on the national economy, including companies in Indonesia.
3. The high intensity of competition among competitors created additional challenges for the company.

Management's Assessment of Matters That Potentially Have a Significant Impact on the Continuity of the Company's Business

1. Digitalization and streamline end to end business through accelerated online-based Guarantee (Host to host).
2. Strengthening the quality of the internal marketing team (HC) through business competency development, especially in analyzing Case By Case Guarantee Products.
3. Collaboration with strategic partners through expansion of cooperation with Guarantee Recipient partners, especially in non-assignment products.

Assumptions Used by Management in Conducting Assessments of Potentially Significant Influences on the Continuity of the Company's Business

The macro assumptions for the 2024 fiscal year RKAP are as follows:

1. Economic growth rate of 5.2% per year.
2. Inflation rate of 2.8%.
3. Exchange rate 1 USD = IDR 15.000,00/USD.
4. Interest rate of Indonesia's 10-year Government Bond of 6.7%
5. Indonesian crude oil price = 82 US dollars/barrel
6. Crude oil lifting 635 thousand barrels per day
7. Gas lifting 1,033 thousand barrels of oil equivalent per day

The microeconomic assumptions for the RKAP of the 2023 fiscal year are as follows:

1. Guarantee volume of IDR 415 Trillion
PT Jamkrindo's business plan in the 2024 RKAP projects a guarantee volume of IDR 414.81 trillion or an increase of 13% compared to the 2023 prognosis with details per Line of Business (LOB) as follows:

2. Penjaminan Penugasan
 - a. Penjaminan KUR

Merupakan penjaminan atas Kredit/pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable, yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Target volume penjaminan KUR adalah sebesar Rp145.000 miliar atau meningkat 10% dari prognosa 2023, pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp4.833 miliar dan proyeksi beban klaim sebesar Rp4.137 miliar.
 - b. Penjaminan PEN

Proyeksi penjaminan KMK PEN hanya dari IJP ulang tahun atas penjaminan sebelumnya dimana masuk dalam IJP bruto sebesar Rp329 miliar sedangkan proyeksi beban klaim sebesar Rp255 miliar.
 3. Penjaminan Non Penugasan

Volume Penjaminan Non Penugasan meningkat sebesar 14% dengan peningkatan IJP accrual sebesar 64% dibandingkan dengan prognosa 2023. Dengan rincian target sebagai berikut:

 - a. Penjaminan Produktif

Penjaminan Produktif merupakan penjaminan cash loan yang diberikan kepada UMKM dalam rangka mengembangkan usahanya. Proyeksi volume penjamin produktif meningkat 10% dari target Prognosa 2023 atau sebesar Rp204.201 miliar, pencatatan pendapatan IJP bruto sebesar Rp2.394 miliar sedangkan proyeksi beban klaim sebesar Rp427 miliar.
 - b. Penjaminan Konsumtif

Penjaminan Konsumtif merupakan penjaminan cash loan yang diberikan kepada karyawan yang telah mendapatkan pembiayaan dari Lembaga keuangan maupun non Lembaga keuangan. Proyeksi volume penjamin konsumtif naik 42% dari target Prognosa 2023 atau sebesar Rp17.862 miliar dengan pencatatan pendapatan IJP bruto sebesar Rp254 miliar sedangkan proyeksi beban klaim sebesar Rp260 miliar.
 - c. Penjaminan Suretyship

Penjaminan Suretyship merupakan penjaminan non cash loan yang diberikan kepada UMKM yang mendapatkan proyek/pekerjaan baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Proyeksi volume penjamin suretyship meningkat 25% dari target Prognosa 2023 atau sebesar Rp47.748 miliar dengan pendapatan IJP bruto tercatat sebesar Rp334 miliar sedangkan proyeksi beban klaim sebesar Rp112 miliar.
 4. Pendapatan IJP accrual tumbuh sebesar 12% dari prognosa 2023 atau sebesar Rp8.143 Miliar.
 5. Loss Ratio sebesar 74%.
 6. Recovery Rate subrogasi sebesar 22,87% dari pendapatan subrogasi sebesar Rp1.187 Miliar.
 7. Pendapatan Investasi bersih sebesar Rp1.359 Miliar atau dengan tingkat YOI sebesar 6,16%.
 8. Opex Ratio sebesar 21,95%.
 9. Tingkat kesehatan dengan skor Double A Plus kategori "Sehat".
2. Assignment Guarantee
 - a. KUR Guarantee

This is a guarantee of working capital loans/financing and/or investments to MSMEs in the field of productive and feasible but not yet bankable businesses, guaranteed by the Guarantor Company. The KUR guarantee volume target is IDR 145,000 billion or an increase of 10% from the 2023 projection, guarantee fee income (IJP) of IDR 4,833 billion and a projected claim expense of IDR 4,137 billion.
 - b. PEN Guarantee

KMK PEN's guarantee projection is only from the anniversary IJP of the previous guarantee which is included in the gross IJP of IDR 329 billion while the projected claim burden is IDR 255 billion.
 3. Non-Assignment Guarantee

Non-Assignment Guarantee volume increased by 14% with an increase in IJP accrual of 64% compared to the 2023 prognosis. With the following details:

 - a. Productive Guarantee

Productive Guarantee is a cash loan guarantee given to MSMEs in order to develop their business. The projected volume of productive guarantees increased by 10% from the 2023 Prognosis target or IDR 204,201 billion, recording gross IJP income of IDR 2,394 billion while the projected claim expense amounted to IDR 427 billion.
 - b. Consumptive Guarantee

Consumptive Guarantee is a cash loan guarantee given to employees who have obtained financing from financial institutions and non-financial institutions. The projected volume of consumptive guarantees increased by 42% from the 2023 Prognosis target or IDR 17,862 billion with a gross IJP revenue of IDR 254 billion while the projected claim expense amounted to IDR 260 billion.
 - c. Suretyship Guarantee

Suretyship Guarantee is a non-cash loan guarantee given to MSMEs that get projects/jobs from both government and private institutions. The projected volume of suretyship guarantees increased by 25% from the 2023 Prognosis target or IDR 47,748 billion with gross IJP revenue recorded at IDR 334 billion while the projected claim expense amounted to IDR 112 billion.
 4. IJP accrual revenue grew by 12% from 2023 prognosis or IDR 8,143 billion.
 5. Loss Ratio of 74%.
 6. Recovery Rate of subrogation amounted to 22.87% from subrogation income of IDR 1,187 billion.
 7. Net Investment Income amounted to IDR 1,359 Billion or a YOI rate of 6.16%.
 8. Opex Ratio of 21.95%.
 9. Soundness level with Double A Plus score and a "Healthy" category.

RENCANA JANGKA PANJANG

LONG-TERM PLAN

Untuk mencapai tujuan Perusahaan, maka segala inisiatif dan program kerja yang telah disusun oleh Perusahaan akan dilaksanakan dengan mengendarai sebuah semangat yang tertuang dalam tema strategis. Tema strategis tersebut adalah fokus pengembangan Perusahaan setiap tahunnya selama periode rencana jangka panjang Perusahaan. Tema strategis PT Jamkrindo pada periode 2025-2029 adalah **PRIME**, yang berfokus pada:

1. Penyempurnaan sistem dan implementasi rekrutmen serta pengembangan talenta berdasarkan kebutuhan pengembangan bisnis.
2. Penguatan manajemen risiko dengan data analytics.
3. Peningkatan daya saing melalui pengembangan produk dan pasar baru dengan pendekatan customer-centric.
4. Memaksimalkan profitabilitas melalui kelincahan digital dan inovasi.
5. Pemberdayaan UMKM melalui produk penjaminan bernilai tambah terbaik.

To achieve the Company's goals, all initiatives and work programs that have been prepared by the Company will be implemented by driving a spirit contained in strategic themes. The strategic theme is the focus of the Company's development each year during the Company's long-term plan period. PT Jamkrindo's strategic theme for the period 2025-2029 is **PRIME**, which focuses on:

1. Polishing the system and implementation of recruitment and talent development based on business development needs.
2. Risk management strengthening with data analytics.
3. Increased competitiveness through new product and market development with a customer-centric approach.
4. Maximizing profitability through digital agility and innovation.
5. Empowering MSMEs through the best value-added guarantee products.



05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Melalui penerapan GCG yang konsisten, Jamkrindo tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang.

Through consistent GCG implementation, Jamkrindo not only focuses on short-term results, but also on long-term sustainability.





A member **FG**



PRINSIP UMUM

GENERAL PRINCIPLES

Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis menjadi prioritas utama Jamkrindo dalam menjalankan operasionalnya. Sebagai bagian dari komitmennya, Perusahaan menempatkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG) sebagai elemen strategis dalam setiap proses bisnis. GCG tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Jamkrindo memandang bahwa GCG adalah landasan utama dalam membangun reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan. Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam kebijakan Perusahaan, Jamkrindo berupaya menciptakan kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan berbagai pihak, termasuk pemegang saham, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Hal ini didukung oleh Pedoman GCG yang menjadi rujukan bagi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Tidak hanya menjadi bagian dari pengelolaan internal, penerapan GCG juga berkontribusi pada terciptanya iklim investasi yang sehat. Jamkrindo percaya bahwa tata kelola yang baik dapat menarik minat investor dan membangun kepercayaan di pasar. Dengan begitu, GCG berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat posisi perusahaan di industri penjaminan. Dalam hal ini, praktik tata kelola yang baik juga dipandang sebagai indikator utama untuk menjaga daya tahan Perusahaan di tengah perubahan yang cepat. Dengan memastikan setiap kebijakan dan aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, Jamkrindo terus berupaya meningkatkan efisiensi operasional serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terkait.

Melalui penerapan GCG yang konsisten, Jamkrindo tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang. Prinsip-prinsip ini dijalankan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, sekaligus memperkuat kontribusi Jamkrindo dalam mendukung pembangunan nasional.

Improving competitiveness and business sustainability are Jamkrindo's top priorities in conducting its operations. As part of its commitment, the Company places Good Corporate Governance (GCG) as a strategic element in every business process. GCG is not only interpreted as a formal obligation, but also as an effort to create a transparent, accountable and sustainability-oriented work environment.

Jamkrindo believes that GCG is the main foundation in building the Company's reputation in the eyes of stakeholders. With the implementation of GCG principles stated in the Company's policies, Jamkrindo sought to create trust and strengthen relationships with various parties. Those parties include shareholders, consumers, business partners, and the public. The implementation was supported by the GCG Guidelines which served as a reference for all company personnel in performing their duties and responsibilities.

Aside from being a part of internal management, GCG implementation also contributed to the creation of a healthy investment climate. Jamkrindo believes that good governance can attract investors and build trust in the market. As a result, GCG plays an important role in supporting sustainable economic development and strengthening the Company's position in the guarantee industry. In this regard, good governance practices are also deemed as a key indicator to maintain the Company's resilience amidst rapid changes. By ensuring that every policy and activity of the Company is in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, Jamkrindo continues to improve operational efficiency and create added value for all parties involved.

Through a consistent GCG implementation, Jamkrindo not only focused on short-term results, but also on long-term sustainability. These principles are implemented as a form of corporate responsibility towards society and the environment, while strengthening Jamkrindo's contribution in supporting national development.

Pendekatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Approach to GCG



Peningkatan kualitas tata kelola perusahaan menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan dunia usaha saat ini. Prinsip-prinsip GCG terus berkembang, mencakup penyempurnaan sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, GCG juga menekankan pentingnya integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang efektif, dan hubungan harmonis yang berlandaskan etika antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, perusahaan secara rutin melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan GCG. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan secara menyeluruh dan konsisten, sehingga menciptakan tata kelola yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Improving the quality of corporate governance is an important requirement in facing the challenges of today's business world. GCG principles continue to evolve, which includes an improved monitoring and control systems that support work ethics and responsible decision-making. In addition, GCG also emphasizes the importance of integrity in financial reporting, effective risk management, and harmonious relationships based on ethics between the Company and its stakeholders. In practice, the Company routinely conducts periodic evaluations of GCG implementation. This evaluation aims to ensure that GCG principles are applied thoroughly and consistently, thereby creating competitive and sustainable governance.

Harmonisasi Entitas Usaha dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Harmony between Business Entities, Shareholders, and Stakeholders



Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat memaksimalkan nilai Jamkrindo bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kinerja perusahaan, baik dari segi nilai Perusahaan dalam jangka panjang maupun citra positif di mata publik. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Jamkrindo dalam menghadapi persaingan global dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Lebih dari itu, prinsip-prinsip GCG atau Governance Principles menjadi dasar dalam proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan. Prinsip ini berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mencerminkan praktik dunia usaha yang beretika. Dengan demikian, GCG berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham (shareholders) maupun seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

The implementation of GCG principles was expected to maximize Jamkrindo's value for all stakeholders. This was realized through improving the Company's performance, both in terms of the Company's long-term value and a positive image in the eyes of the public. This measure also strengthened Jamkrindo's position in facing global competition and encouraged sustainable business growth.

Moreover, the principles of GCG or Governance Principles become the basis for the process and mechanism of company management. This principle is based on compliance with laws and regulations and reflects ethical business practices. Thus, GCG plays an important role in maintaining and increasing the trust of all shareholders as well as stakeholders.

PRINSIP TATA KELOLA DAN KOMITMEN PENERAPANNYA OLEH JAMKRINDO

GOVERNANCE PRINCIPLES AND COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION BY JAMKRINDO

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Untuk mencapai keberlanjutan dan keunggulan dalam bisnis, Jamkrindo menempatkan GCG sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitasnya. Lima prinsip utama yang menjadi pedoman adalah Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi acuan untuk menjaga integritas perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan.

Basics of Implementing Good Corporate Governance

To achieve sustainability and excellence in business, Jamkrindo places GCG as the main foundation in every activity. The five main guiding principles are Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. These principles not only serve as a reference for maintaining the integrity of the Company, but also ensure that the interests of the stakeholders become an integral part of decision-making.

Keterbukaan Transparency	Berdikari mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. Independently defines transparency as openness in conducting the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the Company
Akuntabilitas Accountability	Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of the Company's organs so that the management of the Company is carried out effectively.
Pertanggungjawaban Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Conformity in the management of the Company with applicable laws and regulations and sound corporate principles.
Kemandirian Independence	Kemandirian sebagai suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independence is a condition in which the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations as well as sound corporate principles.
Kewajaran Fairness	Kewajaran sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness refers to justice and equality in fulfilling stakeholders rights that arise under agreements, laws, and regulations.

Jamkrindo berkomitmen untuk memperkuat penerapan GCG sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan bisnis yang terus berkembang. Penerapan GCG ini bertujuan untuk menciptakan fondasi organisasi yang kokoh sekaligus mendorong inovasi dalam pengelolaan perusahaan. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Jamkrindo terus membangun kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu menjadi entitas usaha yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Jamkrindo is committed to strengthening GCG implementation as a strategic measure in facing the growing business challenges. The implementation of GCG aims to create a solid organizational foundation while encouraging innovation in company management. By prioritizing the principles of good governance, Jamkrindo continues to build the trust of shareholders and stakeholders, so as to become a highly competitive business entity.

Dalam implementasinya, Jamkrindo mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan perusahaan, meliputi pengaturan hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan kewenangan Direksi serta Dewan Komisaris, hingga pengelolaan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Jamkrindo juga mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, seperti Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip mendasar yang mengatur proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan hukum dan etika bisnis. Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran menjadi landasan utama untuk memastikan keberlanjutan usaha perusahaan. Penerapan GCG yang konsisten juga mendorong peningkatan kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan, sekaligus menjadi pilar penting dalam mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN, penerapan prinsip-prinsip GCG pada entitas usaha BUMN bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Penerapan prinsip GCG oleh Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023. Peraturan tersebut berisi Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, implementasi GCG juga merujuk pada Pedoman Umum GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) berdasarkan prinsip-prinsip TARIF, yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness).

In its implementation, Jamkrindo refers to a number of regulations, including Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOE) and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. These two regulations provide a strong legal basis for the management of the Company. That is including the regulation of the rights and obligations of shareholders, the duties and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, to the management of the Company's relationship with internal and external stakeholders.

As a company owned by the Government of Indonesia, Jamkrindo also complies with regulations set by the Ministry of SOEs, such as SOE Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Determination of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs) as amended by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 which was further updated through the Regulation of the Minister of SOEs number: PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The regulation emphasizes that GCG is the fundamental principles that govern the process and mechanism of managing a company based on law and business ethics. The principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness are the main foundation to ensure the sustainability of the Company's business. Consistent GCG implementation also encourages increased trust from shareholders and stakeholders, as well as being an important pillar in achieving sustainable corporate growth.

Based on the Minister of SOEs Regulation, the implementation of GCG principles in SOE business entities aims to:

1. To optimize the value of SOEs so that the Company has strong competitiveness, both nationally and internationally;
2. To encourage the management of SOEs in a professional, efficient and effective manner, as well as empower functions and increase the independence of corporate organs;
3. To encourage company organs to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of SOEs' social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the SOE;
4. To Increase the contribution of SOE in the national economy; Improve a conducive climate to the development of national investment.

The implementation of GCG principles by the Company refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012, which was later updated through SOE Minister Regulation PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023. The regulation contains Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. In addition, GCG implementation also refers to the GCG General Guidelines prepared by the National Committee on Governance Policy (KNKG) based on the TARIF principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada seluruh organ Perusahaan, termasuk Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Jamkrindo No.01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Saat ini, pedoman tersebut sedang dalam proses harmonisasi dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 23 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang berlaku untuk PT Jaminan Kredit Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

These principles are applied to all organs of the Company, including the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. This is regulated in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of Jamkrindo No.01/SKB/1/XII/2020 - KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance. Currently, the guideline is in the process of harmonization with the Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 23, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which applies to PT Jaminan Kredit Indonesia, with the following details:

Organ GCG GCG Organs	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Principles of Good Corporate Governance				
	Transparansi Transparency	Akuntabilitas Accountability	Pertanggungjawaban Responsibility	Kemandirian Independence	Kewajaran Fairness
Pemegang Saham Shareholders	1. Pengungkapan yang jelas mengenai rencana transaksi luar biasa antara lain merger, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dalam jumlah yang substansial	Pemegang Saham mempunyai tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan dan memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan.	Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Melakukan prosedur yang lazim dalam menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehingga secara objektif didapatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan.	Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris.
	2. Keterbukaan dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.	Shareholders have the responsibility to monitor the implementation of GCG principles in the process of managing the Company and ensure that all management of the Company complies with laws and regulations.	Shareholders are not allowed to interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors in accordance with applicable laws and regulations	Carry out the usual procedures in appointing the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners so as that the right person is obtained objectively according to the qualifications required by the Company.	Shareholders are entitled to obtain information relating to the interests of the Company from the Board of Directors and or the Board of Commissioners.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Clear disclosure of plans for extraordinary transaction, including mergers, acquisitions, sale of the Company's assets in substantial amounts.	1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan strategi Perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas serta pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara efektif.	1. Dewan Komisaris tidak mempunyai komitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya.	1. Melakukan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan.	Dewan Komisaris dalam menjalankan jabatannya akan selalu menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan stakeholders
	2. Disclosure in determining the income of the Board of Directors and Board of Commissioners.	2. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.	2. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.	2. Dewan Komisaris tidak berwenang membuat keputusan manajemen pengelolaan Perusahaan sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerjasama atau kontrak-kontrak yang bersifat rutin	In performing their positions, the Board of Commissioners will always apply the Company's business ethics in order to fulfill the interests of stakeholders
	3. Remunerasi Dewan Komisaris dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan.	3. Pemberdayaan fungsi Dewan Komisaris	3. Dewan Komisaris turut bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan keuangan yang diajukan Direksi kepada Pemegang Saham.	2. Dewan Komisaris tidak berwenang membuat keputusan manajemen pengelolaan Perusahaan sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerjasama atau kontrak-kontrak yang bersifat rutin	
	1. The minutes of meetings of the Board of Commissioners are made to show the dynamics of the meeting in the decision-making process.	1. The Board of Commissioners is responsible for overseeing the implementation of the Company's strategy and requires accountability as well as providing advice to the Board of Directors in the context of management of the Company	1. The Board of Commissioners must have a commitment to comply with laws and regulations related to their duties.	1. Provide objective considerations in solving problems faced by the Company that may contain potential conflicts of interest.	
	2. The attendance of each member of the Board of Commissioners and Implementation of the meeting of the Board of Commissioners are reported in the Company's Annual Report.	2. Empowerment of the function of the Board of Commissioners	2. The Board of Commissioners is responsible for performing its duties to the Shareholders.	2. The Board of Commissioners not authorized to make day-to-day management decisions regarding the management of the Company, such as decisions regarding the appointment and termination of employees or the signing of cooperation or routine contracts	
	3. The Board of Commissioners' is reported in the Company's Annual Report		3. The Board of Commissioners is also responsible for the correctness of the financial statements submitted by the Board of Directors to Shareholders.		

Organ GCG GCG Organs	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Principles of Good Corporate Governance				
	Transparansi Transparency	Akuntabilitas Accountability	Pertanggungjawaban Responsibility	Kemandirian Independence	Kewajaran Fairness
Direksi Board of Directors	- Menyediakan Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan sebagai alat bantu untuk mengungkapkan transaksi keuangan dan kinerja Perusahaan kepada stakeholder secara transparan. - Mengungkapkan informasi dan Laporan Keuangan Perusahaan diantaranya disajikan melalui website Perusahaan. - Mengungkapkan gaji dan penghasilan lain direksi pada Laporan Tahunan	- Direksi harus mampu menempatkan urutan prioritas dalam upaya pemenuhan kepentingan stakeholder. - Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mengamankan aset Perusahaan. - Direksi memberdayakan peran dan fungsi SPI sebagai mitra strategis manajemen. - Direksi harus memastikan bahwa SPI memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya	- Direksi harus mempunyai komitmen untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan. - Direksi bertanggung jawab terhadap materi yang disajikan pada Laporan Keuangan. - Direksi bertanggung jawab terhadap pengungkapan informasi Laporan Keuangan pada media publikasi nasional sehingga dapat diakses oleh stakeholder.	Komposisi Direksi harus memungkinkan direksi dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lainnya The composition of the Board of Directors must enable the Board of Directors to act independently in the that they do not have interests that could interfere with their ability to carry out their duties independently and critically in relation to one another.	- Penerapan sistem reward dan punishment yang memadai agar setiap karyawan memperoleh rasa keadilan dikaitkan dengan keberhasilan dalam pencapaian kinerja. - Menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan stakeholder
	- Provide the Company's Activity and Financial Statements as a tool to transparently disclose financial transactions and the Company's performance to stakeholders. - Disclose information and the Company's Financial Statements, among others, are presented through the Company's website. - Disclose the salaries and other income of the Board of Directors in the Annual Report	- The Board of Directors must be able to place a priority order in an effort to fulfill stakeholder interest. - The Board of Directors builds and establishes an effective Internal Control System so as to safeguard the Company's assets. - The Board of Directors empowers the role and function of SPI as a management strategic partner. - The Board of Directors must ensure that SPI has access to information regarding the Company that is necessary to be able to carry out their duties	- The Board of Directors must have a commitment to comply with the Laws and Regulations related to the Company's operations. - The Board of Directors is responsible for the material presented in the Financial Statements. - The Board of Directors is responsible for disclosing Financial Statement information in national publication media so that it can be accessed by stakeholders.		- Implementation of an adequate reward and punishment system to make every employee gets a sense of justice associated with success in achieving performance. - Implementing the Company's business ethics to fulfill stakeholders interests

Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip governansi korporat yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Prinsip-prinsip tersebut dirangkum dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), yang menekankan 4 (empat) pilar utama tata kelola korporat, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

Selain itu, PUGKI 2021 mencerminkan pengembangan terbaru dari nilai-nilai dasar TARIF, yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness.

Berikut ini adalah penjabaran 4 (empat) pilar governansi korporat yang menjadi fondasi operasional Jamkrindo:

Jamkrindo is committed to implementing the principles of corporate governance developed by the National Committee on Governance Policy (KNKG). These principles are summarized in the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI), which emphasizes 4 (four) main pillars of corporate governance, namely ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability.

In addition, the 2021 PUGKI reflects the latest development of the TARIF core values, which include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

The following is a description of the 4 (four) pillars of corporate governance that form the foundation of Jamkrindo's operations:

Perilaku Beretika Ethical Behavior

Definisi:

Dalam melaksanakan kegiatannya, Korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Definition:

In conducting its activities, the Corporation always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and trust consistently. The Corporation pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and is managed independently so that each organ of the Company does not dominate the other and cannot be intervened by other parties.

Penerapan di Lingkungan Perusahaan:

1. Penerapan "Perilaku Beretika" di Jamkrindo dapat tercermin dari perilaku sebagai berikut:
2. Selalu Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
3. Memenuhi Janji dan Komitmen.
4. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
5. Saling peduli dan menghargai perbedaan.
6. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
7. Selalu menjaga nama baik Perusahaan dan sesama karyawan.
8. Selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.
9. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan & peraturan perusahaan, nilai-nilai dan etika perusahaan.

Implementation in the Company:

1. The implementation of "Ethical Behaviour" in Jamkrindo can be reflected in the following behaviors:
2. Always adhere to moral and ethical values.
3. Fulfilling Promises and Commitments.
4. Responsible for the tasks, decisions, and actions taken.
5. Caring for each other and respecting differences.
6. Obey the leadership as long as it does not conflict with law and ethics.
7. Always maintain the good name of the Company and fellow employees.
8. Always prioritize the interests of the Company and avoid conflicts of interest.
9. Do not commit acts that are contrary to laws and regulations, company policies & regulations, as well as company values and ethics.

Akuntabilitas Accountability

Definisi:

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Definition:

The Corporation can account for its performance in a transparent and fair manner. Therefore, the Corporation must be managed properly, measurably, and in accordance with corporate interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite needed to achieve sustainable performance.

Penerapan di lingkup Perusahaan:

1. Penerapan "Akuntabilitas" di Jamkrindo dapat tercermin melalui:
2. Menetapkan tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
3. Mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan melalui penyampaian laporan keuangan ke publik secara tepat waktu.
4. Melaporkan kepada Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perusahaan serta perubahan dan penambahannya.
5. Melaporkan kepada Pemegang Saham kinerja perusahaan disertai dengan strategi peningkatan kinerja dan pencapaian target perusahaan.

Implementation in the Company:

1. The implementation of "Accountability" in Jamkrindo can be reflected through:
2. Defining the duties and responsibilities of each Company organ and all employees clearly and in line with the Company's vision, mission, values, and strategy.
3. Accountable for Company performance through the submission of financial statements to the public in a timely manner.
4. Reporting to Shareholders regarding the Company's annual Work Plan and Budget as well as changes and additions thereto.
5. Reporting to Shareholders regarding the Company's performance accompanied by a strategy to improve performance and achieve company targets.

Transparansi Transparency

Definisi:

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Definition:

To maintain objectivity in conducting business, the corporation provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understandable by stakeholders. The corporation take the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations, but also important for decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.

Penerapan di lingkup Perusahaan:

Segala informasi bisnis korporasi yang sedang berjalan dan terkini telah dilakukan pemutakhiran secara periodik melalui situs web Perusahaan sehingga bagi para pihak pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses dan memahami isu terkini dari Perusahaan yang sedang terjadi.

Implementation in the Company:

All ongoing and up-to-date corporate business information has been updated periodically through the Company's website so that stakeholders can easily access and understand the current issues from the Company.

Keberlanjutan Sustainability

Definisi:

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Definition:

The Corporation complies with laws and regulations and is committed to conducting its responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development by working with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that is aligned with business interests and the sustainable development agenda.

Penerapan di lingkup Perusahaan:

1. Perusahaan memiliki program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan untuk:
2. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
3. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
4. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Implementation in the Company:

1. The Company has a Social and Environmental Responsibility program that aims to:
2. Providing benefits for economic development, social development, environmental development, as well as legal development and corporate governance.
3. Contributing to the creation of added value for the Company with principles that are integrated, directed, and measurable, as well as accountable.
4. Fostering micro and small businesses to be more resilient and independent as well as the communities around the company.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang berkualitas, Jamkrindo tidak hanya mengacu pada penerapan 4 (empat) pilar tata kelola korporat, tetapi juga mengintegrasikan 8 (delapan) prinsip governansi korporat. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan dan pemenuhan hak-hak pemegang saham serta pemangku kepentingan, pengaturan dasar dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan, hingga aspek penting seperti etika, manajemen risiko, dan transparansi. Delapan prinsip ini kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

- a. Tiga prinsip pertama adalah kelompok prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kelompok prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- c. Kelompok prinsip yang mengatur pemilik sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat.

In its efforts to realize quality corporate governance, Jamkrindo not only refers to the implementation of 4 (four) pillars of corporate governance, but also integrates 8 (eight) principles of corporate governance. These principles cover the protection and fulfillment of shareholders' and stakeholders' rights, basic arrangements for managing and monitoring the Company, as well as important aspects such as ethics, risk management, and transparency. These eight principles are then grouped into three main categories, namely:

- a. The first three principles are a group of principles that regulate the management and monitoring functions of the Corporation, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- b. The group of principles governing the processes and outputs produced by the Board of Directors and Board of Commissioners; and
- c. The third is the group of principles governing resource owners, who will primarily benefit from the implementation of corporate governance.

Terdapat 8 (delapan) prinsip governansi korporat yang menjadi pedoman utama dalam mengelola organisasi secara bertanggung jawab dan transparan. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai aspek operasional Perusahaan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

There are 8 (eight) principles of corporate governance that become the main guidelines in managing the organization responsibly and transparently. These principles are applied in various aspects of the Company's operations, as described below.

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris 1st Principle: Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners

Definisi:

Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Definition:

The Board of Directors and Board of Commissioners conduct their roles and responsibilities independently to create sustainable value for the best long-term best interests of the corporation and shareholders, taking into account the interests of stakeholders.

Penjelasan:

Prinsip 1 berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu Prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Explanation:

The 1st Principle relates to the roles and responsibilities of the Board of Directors in managing the corporation as well as the roles and responsibilities of the Board of Commissioners in monitoring the management of the corporation by the Board of Directors. In addition, this Principle regulates the performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their respective members, the handling of conflicts of interest that occur between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners as well as increasing the competence of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Penerapan di lingkup Perusahaan:

Implementation in the Company:

1. Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
- Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- Memantau dan memastikan bahwa praktik Good Corporate Governance telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance.

1. Board of Commissioners

- Monitoring the management policies, the general management of both the Company and the Company's business conducted by the Board of Directors.
- Providing advice to the Board of Directors including monitoring the implementation of the Company's Long-Term Work Plan, Work Plan and Budget, as well as provisions of applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.
- Monitoring and ensuring that Good Corporate Governance practices have been implemented effectively and sustainably, including by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.

2. Direksi

Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Board of Directors

Conduct all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and represent the Company both inside and outside the court on all matters and all events with restrictions as stipulated in the provisions of laws and regulations, the Articles of Association and/or Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 2nd Principle: Composition and Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners

Definisi:

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris.

Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Definition:

Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are selected and determined in such a way that the composition of the Board of Directors as the management organ and the composition of the Board of Commissioners as the monitoring organ are diverse. Each consists of Directors and Commissioners who have the commitment, knowledge, ability, experience, and expertise needed to fulfilling properly the management role of the Board of Directors and the monitoring role of the Board of Commissioners.

Remuneration is designed to effectively align the interests of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with the long-term interests of the corporation and sustainable value creation.

Penjelasan:

Prinsip 2 mengharuskan pemilihan dan penetapan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, Prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel.

Explanation:

The 2nd Principle requires the selection and appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are conducted in such a way that the Board of Directors and the Board of Commissioners respectively as management and monitoring organs have a composition of members with the knowledge, abilities, and expertise needed in accordance with their respective roles. This Principle emphasizes the importance of remuneration policies to encourage members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to prioritize the long-term interests of the corporation based on the principle of sustainability. Also, requires the disclosure of remuneration policies and information received by the Board of Directors and the Board of Commissioners in a transparent and accountable manner.

Penerapan di lingkup Perusahaan:

Penetapan komposisi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Implementation within the Company:

Shareholders determine the composition and remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris
3rd Principle: Working Relationship between Board of Directors and Board of Commissioners

Definisi:

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.

Definition:

The Board of Directors and Board of Commissioners have a close, open, constructive, professional, and trusting working relationship for the best interest of the corporation.

Penjelasan:

Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya.

Explanation:

The 3rd Principle emphasizes the importance of a close, open, constructive, professional, trusting working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in achieving the best interests of the corporation. This principle also regulates the need for the Board of Commissioners to access complete information and the importance for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to understand the implications of the corporate ownership structure on executing their roles.

Penerapan di lingkup Perusahaan:

Pelaksanaan Rapat Gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris secara periodik dalam tahun berjalan.

Implementation in the Company:

Implementation of Joint Meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically during the current year.

Prinsip 4: Perilaku Beretika
4th Principle: Ethical Behavior

Definisi:

Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.

Definition:

The Corporation has a commitment to act ethically and responsibly, upholding the values and culture of the organization.

Penjelasan:

Prinsip 4 mengharuskan korporasi untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab.

Explanation:

The 4th principle requires the Corporation to periodically make statements regarding corporate commitments. Not only to comply with applicable laws and regulations, but also commitments to act ethically and responsibly.

Penerapan di lingkup Perusahaan:

Adanya penandatanganan code of conduct setiap tahun kepada seluruh karyawan Perusahaan.

Implementation in the Company:

The signing of the code of conduct every year for all employees of the Company.

Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan
5th Principle: Risk Management, Internal Control, and Compliance

Definisi:

Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas.

Definition:

The Corporation implements corporate governance practices that are integrated with the implementation of internal control and risk management systems. Also, integrated with an effective compliance management system in order to support the achievement of corporate goals, vision, mission, goals, and performance targets in operating business with integrity.

Penjelasan:

Prinsip 5 mengharuskan Direksi untuk mengimplementasikan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (responsible business) sebagai warga korporat yang baik (good corporate citizen). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan korporat yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi.

Explanation:

The 5th Principle requires the Board of Directors to implement governance, internal control, and risk management systems. Likewise, it requires an integrated compliance management systems as part of the strategy, management tools, and practices implemented by the Corporation in doing business in a responsible manner as a good corporate citizen. The Board of Commissioners monitors and provides input on the effectiveness of governance implementation, internal control systems, risk management, and corporate compliance management systems which are implemented in an integrated manner by the Board of Directors.

Penerapan di lingkup Perusahaan:

1. Pelaksanaan Audit Tahunan oleh Satuan Pengawasan Intern.
2. Self assessment oleh masing – masing unit kerja terhadap pengelolaan risiko setiap triwulan.
3. Pelaporan hasil self assessment Divisi Manajemen Risiko kepada Direktur yang membidangi.
4. Pelaporan triwulanan Direksi kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan kebijakan manajemen risiko.
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan audit.

Implementation in the Company:

1. Annual Audit Implementation by the Internal Audit Unit.
2. Self assessment by each work unit on risk management every quarterly.
3. Reporting the results of the Risk Management Division's self-assessment to the Director in charge.
4. The Board of Directors quarterly reporting to the Board of Commissioners.
5. The Board of Commissioners conducts active monitoring and provides advice to the Board of Directors on a regular basis regarding the effectiveness of implementing risk management policies.
6. The Board of Commissioners conducts active monitoring and provides advice to the Board of Directors to establish an effective internal control system, as well as monitor and evaluate the follow-up of audit results.

Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi**6th Principle: Disclosure and Transparency****Definisi:**

Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.

Definition:

The Corporation makes accurate and timely disclosures regarding all material matters concerning the Corporation.

Penjelasan:

Prinsip 6 mengharuskan korporasi untuk memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan governansi korporat.

Explanation:

The 6th Principle requires the Corporation to have a governance framework capable of providing assurance that can result in accurate and timely disclosure of all material matters about the corporation. This includes financial condition and performance, ownership of the corporation, and corporate governance.

Penerapan di lingkup Perusahaan:

Informasi kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi dan governansi korporat dapat diakses secara transparansi melalui situs web Perusahaan www.jamkrindo.co.id

Implementation in the Company:

Information on financial performance, ownership of the corporation, and corporate governance can be accessed in a transparent manner through the Company's website www.jamkrindo.co.id

Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham**7th Principle: Rights of Shareholders****Definisi:**

Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

Definition:

The Corporation protects and facilitates the exercise of shareholder rights and ensures fair treatment of shareholders, including minority shareholders. All shareholders have the opportunity to obtain effective compensation for violations of their rights.

Penjelasan:

Prinsip 7 menjelaskan mengenai pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan adil bagi pemegang saham, bagaimana cara kerjasama aktif antara korporasi dengan pemegang sahamnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak pemegang saham secara efektif melalui RUPS.

Explanation:

The 7th Principle explains the fulfillment of shareholder rights and fair treatment for shareholders, how active cooperation between the Corporation and their shareholders and the effective implementation of several shareholder rights through the GMS is executed.

Penerapan di lingkup Perusahaan:

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari masing masing pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Implementation within the Company:

Implementation of the General Meeting of Shareholders involving the Corporation and shareholders.

Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan 8th Principle: Rights of Stakeholders

Definisi:

Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.

Definition:

The Corporation recognizes the rights of stakeholders that is stipulated in applicable laws and regulations or an agreement entered into by the corporation and encourages active cooperation with stakeholders in creating wealth, employment, and financially sound business sustainability.

Penjelasan:

Prinsip 8 menjelaskan peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi.

Explanation:

The 8th Principle explains the roles of the Board of Directors and the Board of Commissioners in integrating sustainability aspects into the corporate business model, implementing stakeholder engagement, and ensuring the protection of stakeholder rights. The Board of Commissioners monitors the integration of all aspects mentioned above by the Board of Directors.

Penerapan di lingkup Perusahaan:

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Implementation within the Company:

The signing of Cooperation Agreements with Partners by taking into account the rights and obligations of each party bound by the cooperation agreement.

Landasan Hukum

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan tidak hanya mengadaptasinya, tetapi juga mematuhi ketentuan hukum yang menjadi landasan utama. Ketentuan ini mencakup regulasi industri dan peraturan terkini terkait perseroan terbatas, yang meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003;
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

Legal Basis

In implementing GCG principles, the Company not only adapts them, but also complies with the legal provisions that serve as the main foundation. These provisions cover industry regulations and current regulations related to limited liability companies, which include:

1. Law of the Republic of Indonesia
 - a. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs);
 - b. Law of the Republic of Indonesia No. 47 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 - c. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 concerning Guarantee;
 - d. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption;
 - e. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 concerning State Administration who are clean and free from Corruption, Collusion, and Nepotism;
 - f. Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003;
 - g. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure;
 - h. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
2. Government Regulations
 - a. Government Regulation No. 35/2018 concerning Perum Jaminan Kredit Indonesia;
 - b. Government Regulation No. 38 of 2008 concerning the Amendment to Government Regulation No. 6 of 2006 concerning the Management of State/Regional Property;
 - c. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Monitoring, and Dissolution of SOEs.

3. Peraturan Menteri BUMN

a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/11/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/12/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Peraturan OJK No.3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.

5. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana terakhir diubah dalam Akta No. 07 Tanggal 07 Oktober 2022.

6. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

3. Regulation of the Minister of SOEs

a. State Minister of SOEs' No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 dated August 1, 2011. PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises which was further updated through the Regulation of the Minister of SOEs number: PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

b. SOEs Minister Regulation Number PER-10/MBU/10/2020 of 2020 concerning the Amendment to SOE Minister Regulation Number PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;

c. State Minister of SOEs' Regulation Number PER-12/MBU/11/2020 of 2020 concerning the Fifth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 concerning the Implementation of the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

d. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-06/MBU/04/2021 of 2021 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/12/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;

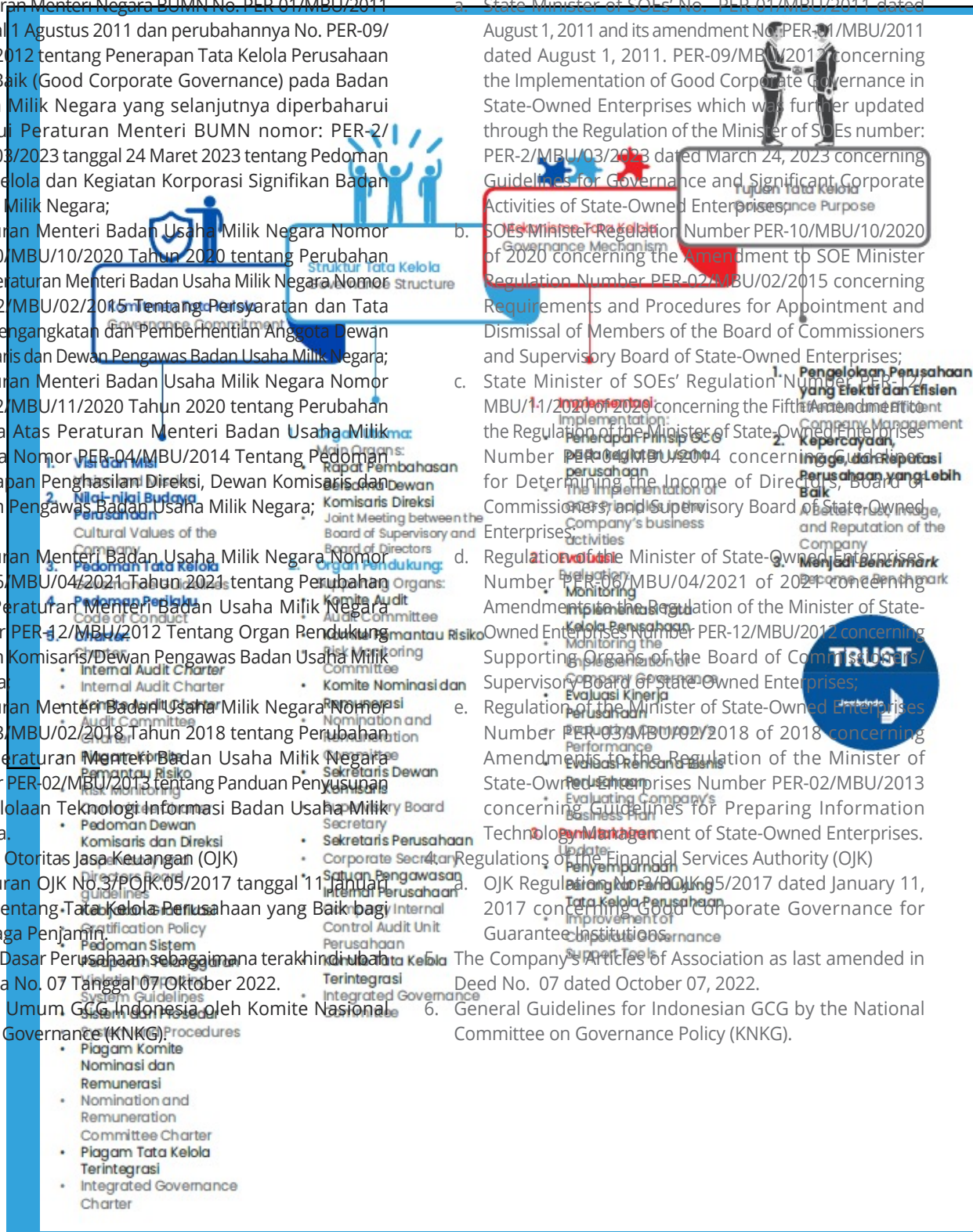
e. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/02/2018 of 2018 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for Preparing Information Technology Management of State-Owned Enterprises.

Regulations of the Financial Services Authority (OJK)

a. OJK Regulation No.3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.

5. The Company's Articles of Association as last amended in Deed No. 07 dated October 07, 2022.

6. General Guidelines for Indonesian GCG by the National Committee on Governance Policy (KNKG).



PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Jamkrindo

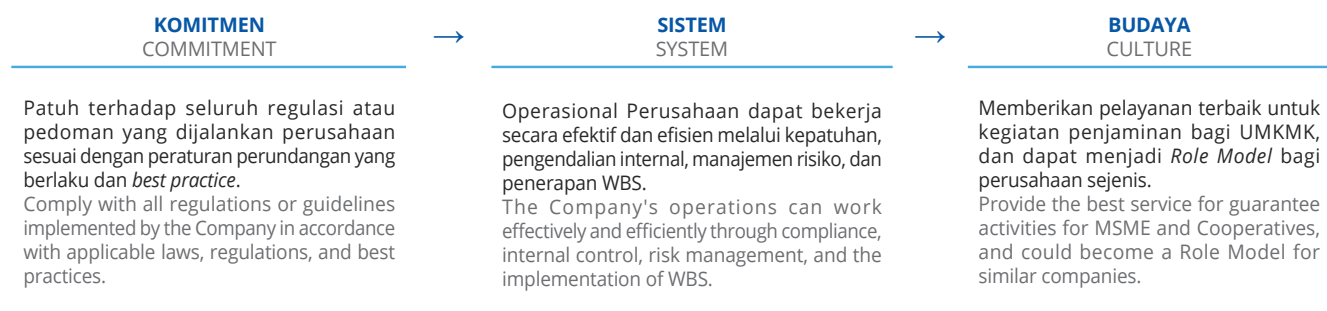
Prinsip-prinsip GCG memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Dengan konsisten menerapkan GCG di setiap level operasional, Jamkrindo dapat membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya memperkuat daya saingnya. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya. Komitmen ini mendorong Perusahaan untuk terus mengikuti perkembangan terbaik dalam praktik GCG yang ada.

Sebagai manifestasi dari komitmen tersebut, Perusahaan telah merancang struktur GCG yang terperinci, bersama dengan sistem dan prosedur yang disusun untuk memastikan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif, dan efisien. Tujuan utama dari penerapan prinsip GCG ini adalah untuk menciptakan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Implementasi prinsip-prinsip GCG ini tercermin dalam Roadmap GCG perusahaan, yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan sebagai Good Corporate Citizen dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Improving the Quality of Jamkrindo's GCG Implementation

GCG principles play an important role in supporting the success and sustainable growth of the Company. By consistently implementing GCG at every operational level, Jamkrindo can build a more transparent and accountable system, which in turn strengthens its competitiveness. Therefore, the Company is committed to implementing GCG in every aspect of its business activities. This commitment encourages the Company to continue to prioritize and adapt the prevailing GCG best practices.

As a manifestation of this commitment, the Company has designed a detailed GCG structure, along with systems and procedures structured to ensure professional, effective, and efficient management of the Company. The main objective of implementing GCG principles is to create optimal added value for all stakeholders. The implementation of GCG principles is reflected in the company's GCG Roadmap, which aims to make the Company into a Good Corporate Citizen with a predetermined mechanism.



1. Komitmen

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.

1. Commitment

In implementing these GCG principles, all Jamkrindo employees are committed to comply with all applicable laws and regulations, as well as those that are generally accepted. Management support plays a major role in determining the direction and purpose of GCG implementation in Jamkrindo. In practice, Jamkrindo's Management sets an example for employees to continue to be committed to sustainable GCG implementation. Jamkrindo will implement GCG principles in every business process and improve GCG supporting tools.

2. Sistem

Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

3. Budaya

Nilai-nilai budaya Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Jamkrindo, maka seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Implementasi GCG di Jamkrindo bertujuan untuk mendukung visi perusahaan, yaitu menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Selain itu, implementasi ini juga bertujuan untuk mendukung misi Jamkrindo, yaitu meningkatkan aksesibilitas finansial bagi UMKMK melalui penyediaan layanan penjaminan yang inovatif, kompetitif, serta disertai pelayanan profesional, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dengan implementasi GCG yang kuat, Jamkrindo tidak hanya bertujuan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga untuk membangun citra positif dan reputasi yang kokoh. Hal ini diharapkan dapat menjadikan Jamkrindo sebagai acuan atau benchmark bagi perusahaan sejenis lainnya, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

2. System

In supporting the ongoing GCG commitments, it is necessary to have a company operational system that can work effectively and efficiently through compliance with applicable laws, an adequate internal control system and good risk management, as well as the implementation of an effective whistleblowing system.

3. Culture

Jamkrindo's cultural values are the foundation for the Company's individuals in working to be clearer and more structured. In the context of implementing Jamkrindo's GCG, all Jamkrindo employees are committed to implementing corporate cultural values that are in line with GCG principles.

The objective of GCG implementation by Jamkrindo is to support the Company's vision, namely to become the main choice of business actors in guarantee services to support the growth and equitable distribution of the national economy. The implementation was conducted by the Company to support Jamkrindo's mission, which is to increase financial accessibility for MSME and Cooperatives through the provision of innovative, competitive guarantees with professional, effective, and efficient services in a sustainable manner.

Overall, with strong GCG implementation, Jamkrindo's objective not only aims to provide optimal benefits for all stakeholders, but to also build a positive image and solid reputation. This is expected to make Jamkrindo a reference or benchmark for other similar companies, as explained below:



Tujuan Tata Kelola Governance Purpose

1. **Pengelolaan Perusahaan yang Efektif dan Efisien**
Effective and Efficient Company Management
2. **Kepercayaan, Image, dan Reputasi Perusahaan yang Lebih Baik**
A Better Trust, Image, and Reputation of the Company
3. **Menjadi Benchmark**
Become a Benchmark



Mekanisme Tata Kelola Governance Mechanism

1. **Implementasi:**
Implementation:
 - Penerapan Prinsip GCG pada kegiatan usaha perusahaan
The implementation of GCG Principles in the Company's business activities
2. **Evaluasi:**
Evaluation:
 - Monitoring Implementasi Tata Kelola Perusahaan
Monitoring the Implementation of Company Governance
 - Evaluasi Kinerja Perusahaan
Evaluating Company's Performance
 - Evaluasi Rencana Bisnis Perusahaan
Evaluating Company's Business Plan
3. **Pemutakhiran:**
Update:
 - Penyempurnaan Perangkat Pendukung Tata Kelola Perusahaan
Improvement of Corporate Governance Support Tools



Struktur Tata Kelola Governance Structure

1. **Organ Utama**
Main Organ
 - Rapat pembahasan bersama dewan komisaris direksi
Joint meeting between the board of supervisory and board of directors
2. **Organ Pendukung:**
Supporting organ
 - Komite Audit
Audit Committee
komite pemantau resiko
Supervisory And Directors Board Guidelines
 - Kebijakan Gratifikasi
Gratification Policy
 - Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
Violation Reporting System Guidelines
 - System Dan Prosedur
System And Procedures
 - Piagam Komite Nominasi Dan Renumerasi
Nomination And Remuneration Committee Charter
 - Piagam Tata Kelola Integrasi
Integrated Governance Charter



Komitmen Tata Kelola Governance Commitment

1. **Visi dan Misi**
Vision and Mission
2. **Nilai-nilai Budaya Perusahaan**
Cultural Values Of The Company
3. **Pedoman Tata Kelola**
Governance Guidelines
4. **Pedoman Perilaku**
Code Of Conduct
5. **Charter**
Charter
 - Internal Audit Charter
Internal Audit Charter
 - Komite Audit Charter
Audit Committee Charter
 - Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi
Supervisory and Directors Board Guidelines
 - Kebijakan Gratifikasi
Gratification Policy
 - Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
Violation Reporting System Guidelines
 - System Dan Prosedur
System and Procedures
 - Piagam Komite Nominasi Dan Renumerasi
Nomination and Remuneration Committee Charter
 - Piagam Tata Kelola Integrasi
Integrated Governance Charter

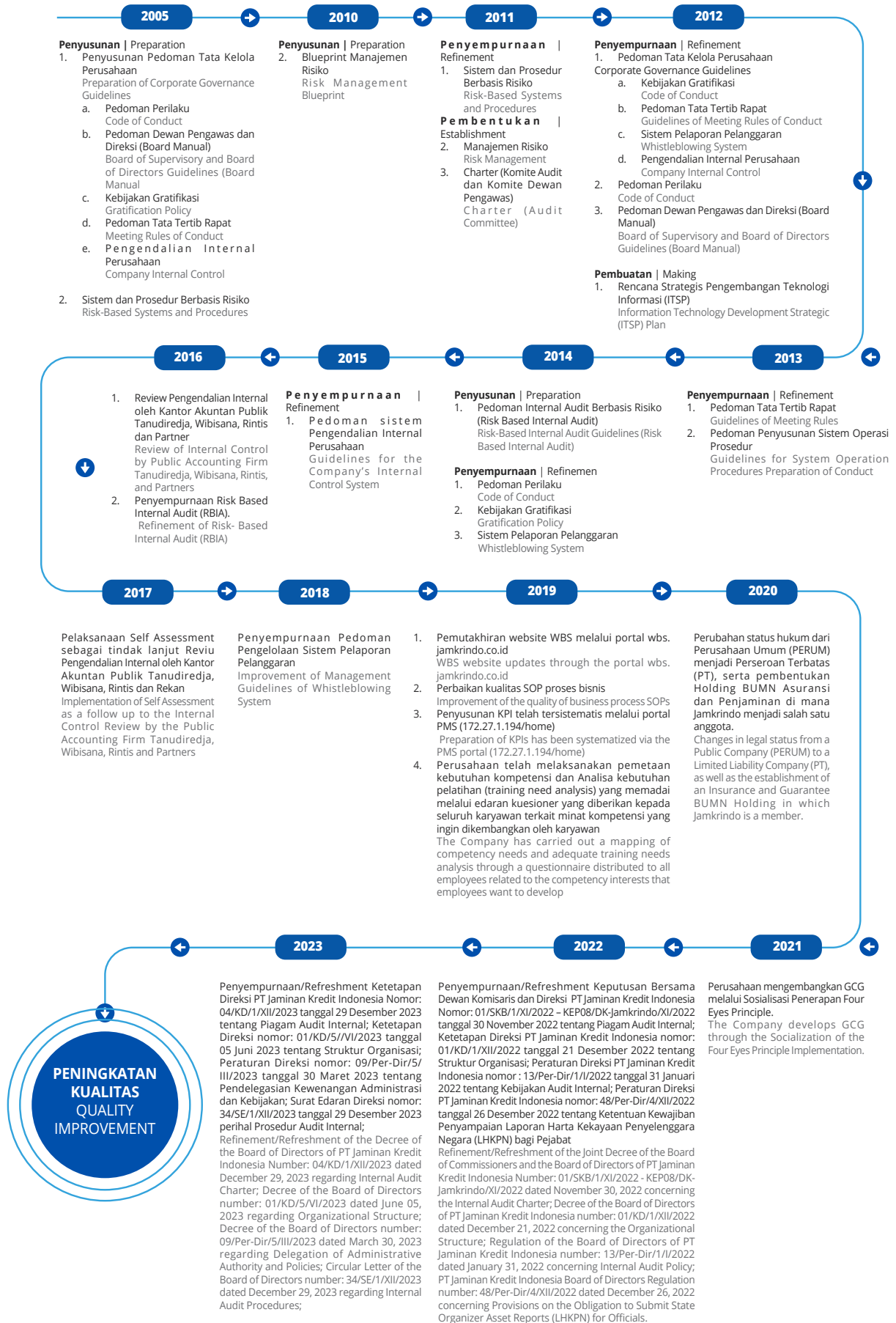
TRUST

Jamkrindo



Rekam Jejak Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Track Record of the Development in the Implementation of Good Corporate Governance



Perkembangan Penerapan GCG di Tahun 2024

Jamkrindo senantiasa berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi Code of Conduct (CoC). Jika terjadi indikasi benturan kepentingan atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mengarah pada tindakan kecurangan di lingkungan Perusahaan, langkah-langkah penanganan akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama tahun 2024, Perusahaan telah melakukan sejumlah inisiatif untuk memperkuat pengawasan GCG, di antaranya:

1. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Assessment atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2024 kepada Menteri BUMN RI melalui Surat Nomor B.510/EKT/DIRUT/SPR/IV/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT. Jamkrindo tahun 2024;
2. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Assessment atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melalui Surat Nomor B.508/EKT/DIRUT/SPI/IV/2024 tanggal 25 April 2025 tentang Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) PT. Jamkrindo tahun 2025;

Assessment penerapan GCG untuk periode tahun ukur 2024 dilakukan melalui Assesor berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/SP/1/I/2025.

Penghargaan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Tahun 2024

Untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, di tahun 2024, Jamkrindo berhasil meraih berbagai penghargaan yang mengapresiasi upaya tersebut. Beberapa penghargaan yang diterima terkait dengan tata kelola perusahaan antara lain:

Nama Penghargaan Award	Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Body	Tanggal Diberikan Received Date
The Best GRC For Corporate Risk Management 2024 (Guarantee Services)	Business News	30 Agustus 2024 August 30, 2024
The Best GRC For Corporate Finance 2024 (Guarantee Services)	Business News	30 Agustus 2024 August 30, 2024

Development of GCG Implementation in 2024

Jamkrindo always strives to create a clean and transparent work environment. One of the efforts made is by conducting regular monitoring of the implementation of the Code of Conduct (CoC). If there are indications of conflict of interest or abuse of authority that could potentially lead to fraud within the Company, handling steps will be taken in accordance with applicable regulations. During the year, the Company has undertaken a number of initiatives to strengthen GCG oversight, which includes:

1. Submission of the 2024 Good Corporate Governance (GCG) Implementation Assessment Report to the Minister of State-Owned Enterprises through Letter No. B.510/EKT/DIRUT/SPR/IV/2025, dated April 25, 2025, concerning the Submission of PT Jamkrindo's 2024 GCG Implementation Report;
2. Submission of Assessment Report on the Implementation of Good Corporate Governance in 2023 to the Financial Services Authority and through Letter Number B.508/EKT/DIRUT/SPI/IV/2024 dated April 25, 2025 concerning Submission of PT. Jamkrindo's Good Corporate Governance Implementation Report in 2025;

The assessment of GCG implementation for the 2024 measurement period was conducted by an independent assessor based on Assignment Letter No. 03/SP/1/I/2025.

Awards for The Implementation Good Corporate Governance in 2024

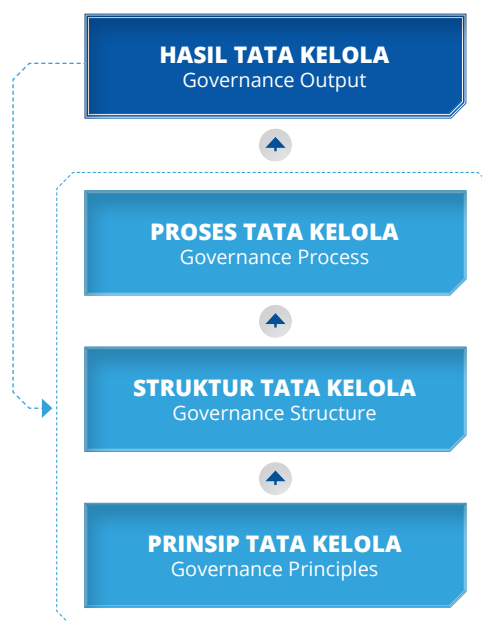
To demonstrate the Company's commitment in implementing GCG principles, in 2024, Jamkrindo won various awards that appreciate these efforts. Some of the awards received related to corporate governance include:

STRUKTUR DAN PROSES TATA KELOLA

GOVERNANCE STRUCTURE AND GOVERNANCE PROCESS

Penerapan GCG merupakan fondasi penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Dalam praktiknya, tata kelola perusahaan dijalankan melalui dua aspek utama: Struktur Tata Kelola (Governance Structure) dan Proses Tata Kelola (Governance Process). Kedua aspek ini saling melengkapi dan berinteraksi secara sinergis, sehingga mampu menghasilkan Hasil Tata Kelola (Governance Outcome) yang sesuai dengan tujuan Perusahaan dan prinsip-prinsip tata kelola yang telah ditetapkan.

GCG implementation is an important foundation for the success of a company. In practice, corporate governance is executed through two main aspects: Governance Structure and Governance Process. These two aspects complement each other and interact synergistically, so as to produce a Governance Outcome that is in accordance with the Company's objectives and established governance principles.



Struktur tata kelola perusahaan memiliki 2 (dua) komponen utama, yaitu Struktur Tata Kelola dan Proses Tata Kelola. Struktur Tata Kelola merujuk pada organ atau perangkat yang ada dalam perusahaan, baik yang dibentuk untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maupun yang terbentuk karena kebutuhan internal untuk meningkatkan penerapan GCG. Sementara itu, Proses Tata Kelola mencakup serangkaian kegiatan, kebiasaan, regulasi, dan institusi yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. Proses ini meliputi peraturan dan undang-undang yang relevan, prosedur tetap, piagam, dokumen, serta berbagai aturan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat di dalam perusahaan.

The corporate governance structure has 2 (two) main components, namely Governance Structure and Governance Process. Governance structure refers to the organs or governing bodies that exist within the Company, both of those components formed to comply with applicable laws and regulations and those components formed due to internal needs to improve the implementation of GCG. Meanwhile, the Governance Process covers a range of activities, habits, regulations, and institutions that influence the overall management of the Company. This process includes relevant laws and regulations, standing procedures, charters, documents, and various rules governing relationships between organs or governing bodies within the Company.

Struktur Tata Kelola: Organ-organ GCG

Tata kelola perusahaan yang efektif sangat bergantung pada berbagai elemen penting yang saling mendukung untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang diinginkan. Dalam kerangka hukum yang diatur oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Governance Structure: GCG Organs

Effective corporate governance relies heavily on various important elements that support each other to ensure the management and monitoring of the Company is properly done in accordance with the desired governance principles. Within the legal framework regulated by Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the organizational structure of a

struktur organisasi sebuah perusahaan terbatas terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ ini memiliki peran yang jelas dan krusial dalam mengarahkan serta mengawasi jalannya perusahaan.

Struktur ini mengadopsi sistem dua tingkat (two-tier system), yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS sebagai forum tertinggi mencerminkan hak-hak Pemegang Saham, sementara Direksi bertanggung jawab untuk pengelolaan operasional perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas terhadap kebijakan dan kinerja Direksi.

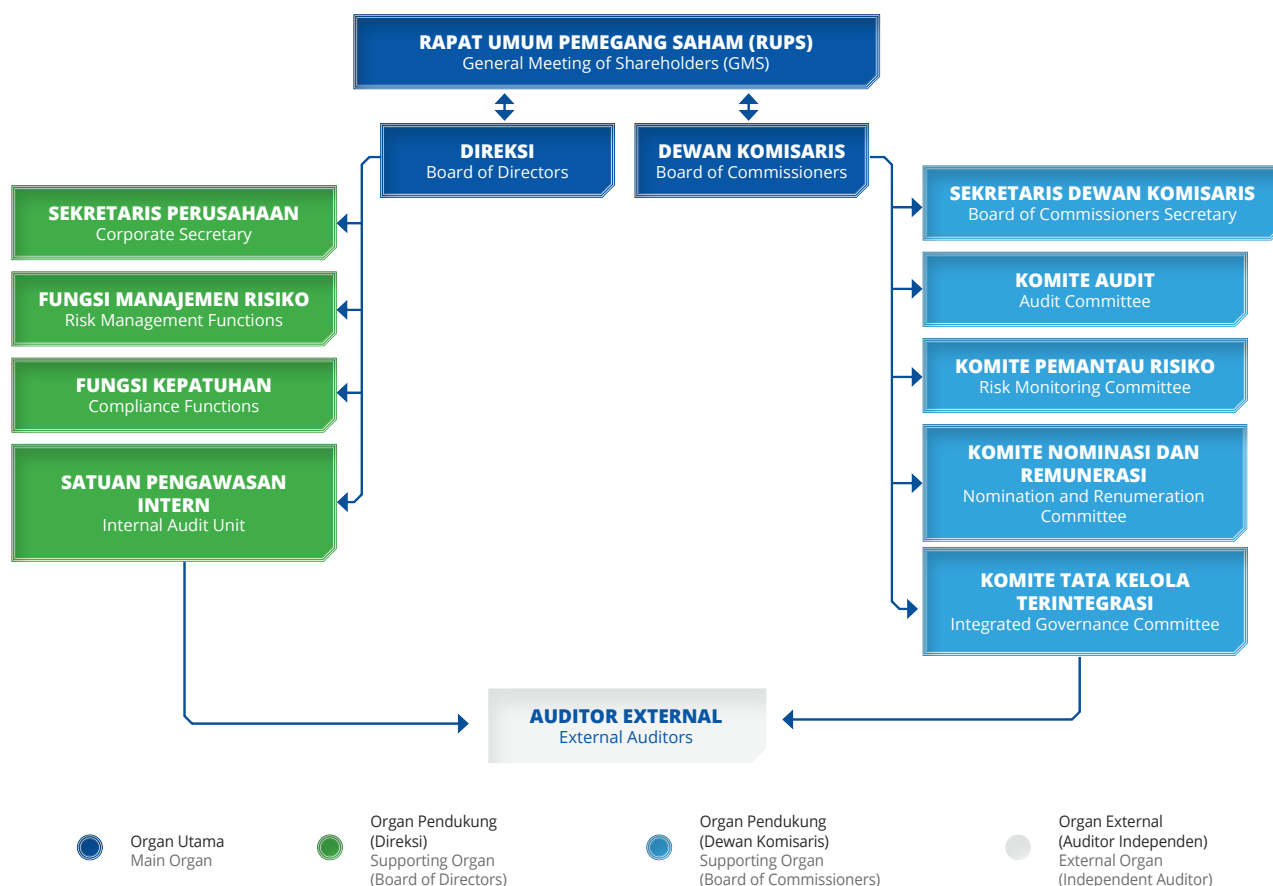
Untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan Perusahaan dalam jangka panjang, hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris dan Direksi sangat penting, terutama dalam memastikan kesamaan visi, misi, serta nilai-nilai inti yang menjadi budaya perusahaan. Selain itu, terdapat pula organ pendukung lainnya, seperti Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan, yang turut berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

limited liability company consists of three main components, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners. Each of these organs have a clear and crucial role in directing and overseeing the management of the Company.

This structure adopts a two-tier system, consisting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with a clear division of authority and responsibility in accordance with the provisions stipulated in the legislation and the Company's Articles of Association. The GMS as the highest forum reflects the rights of Shareholders, while the Board of Directors is responsible for the operational management of the Company, while the Board of Commissioners acts as a supervisor of the policies and performance of the Board of Directors.

To maintain the Company's long-term sustainability and growth, it is essential that the Board of Commissioners and the Board of Directors have a harmonious relationship, especially in ensuring a common vision, mission, and core values that become the corporate culture. Moreover, there are also other supporting organs, such as the Internal Audit and the Corporate Secretary, which play a role in improving the effectiveness of supervision and compliance with applicable regulations.

Struktur Organ GCG Jamkrindo Organ Structure of Jamkrindo's GCG



Dalam RUPS, Pemegang Saham memiliki hak untuk membuat keputusan penting terkait investasi yang telah ditanamkan di Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS bertujuan untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi, meskipun RUPS tetap memiliki haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan posisi yang sejajar, Pemegang Saham akan mempertimbangkan setiap keputusan dengan cermat demi keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Setelah keputusan dibuat, RUPS menyerahkan kewenangan untuk mengawasi dan melaksanakan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola Perusahaan dan melaksanakan setiap keputusan yang dihasilkan dalam RUPS. Sementara itu, Dewan Komisaris memiliki peran dalam melakukan pengawasan serta memberikan nasihat agar tujuan perusahaan dan keputusan RUPS tercapai secara maksimal. Untuk mendukung tugas besar ini, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Penunjang, sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja terkait dalam mekanisme tata kelola yang berlaku.

Proses dan Mekanisme GCG: Pedoman dan Perangkat Kebijakan

Untuk memastikan Struktur Tata Kelola berjalan efektif dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, dibutuhkan Proses Tata Kelola yang meliputi peraturan, perundang-undangan, serta aturan internal yang mendukung terciptanya lingkungan organisasi yang akuntabel dan terkelola dengan baik.

In the GMS, Shareholders have the right to make important decisions related to investments that has been invested in the Company. Decisions made at the GMS are for the benefit of the Company as a whole. Shareholders are not allowed to intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, although the GMS still has its rights in accordance with the Articles of Association and applicable Laws and Regulations.

With an equal position, Shareholders will carefully consider every resolution for the long-term sustainability of the Company. After the resolution is made, the GMS delegates the authority to monitor and implement the decision to the Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations.

The Board of Directors is responsible for managing the Company and implementing any resolutions made at the GMS. Meanwhile, the Board of Commissioners is responsible for supervising and providing advice so that the Company's objectives and GMS resolutions are fully accomplished. To support this tremendous task, the Board of Commissioners is assisted by the Supporting Committee, while the Board of Directors is assisted by the relevant work units within the applicable governance mechanism.

GCG Process and Mechanism: Guidelines and Policy Tools

To ensure that the Governance Structure runs effectively and with a clear division of responsibilities, a Governance Process is needed that includes regulations, legislation, and internal rules that support the creation of an accountable, and well-managed organizational environment.



Aspek perangkat kebijakan GCG yang telah disahkan oleh pihak berwenang mencerminkan ketaatan hukum dan komitmen dalam implementasi GCG, antara lain:

Aspects of GCG policy tools that have been ratified by the relevant authorities as a form of legal compliance and commitment in the implementation of GCG include:

Perangkat Kebijakan Policy Tools	Penetapan dan/atau Pembaruan Designation and/or Renewal
Anggaran Dasar Perusahaan The Company's Articles of Association	Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia No. 10 tanggal 08 Maret 2021 Statement of Shareholders' Resolutions of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 10 dated March 08, 2021
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Guidelines for Good Corporate Governance	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 01/SKB/1/XII/2020-KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 01/SKB/1/XII/2020-KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance
Pedoman Perilaku Code of Conduct	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 02/SKB/1/XII/2020-KEP-09/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 02/SKB/1/XII/2020-KEP-09/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Code of Conduct
Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 03/SKB/1/XII/2020-KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 03/SKB/1/XII/2020-KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning the Work Guidelines of the Board of Commissioners and the Board of Directors (<i>Board Manual</i>)
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Telah disahkan oleh Dewan Komisaris PT Jamkrindo pada tanggal 30 Desember 2020 Ratified by the Board of Commissioners of PT Jamkrindo on December 30, 2020
Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha Investment and Business Risk Committee Charter	Telah disahkan oleh Dewan Komisaris PT Jamkrindo pada tanggal 30 Maret 2021 Ratified by the Board of Commissioners of PT Jamkrindo on March 30, 2021
Piagam Audit Internal Internal Audit Charter	Ketetapan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia nomor: 04/KD/1/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Audit Internal (<i>Internal Audit Charter</i>) Decree of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No: 04/KD/1/XII/2023 dated December 29, 2023 concerning the Internal Audit Charter
Kebijakan Audit Internal Internal Audit Policy	Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 34/Per-Dir/1/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kebijakan Audit Internal PT Jamkrindo's Board of Directors Regulation No. 34/Per-Dir/1/XII/2023 dated December 29, 2023 concerning Internal Audit Policy
Pedoman Strategis Manajemen Risiko Risk Management Strategic Guidelines	Disahkan melalui Peraturan Direksi PT Jamkrindo No. 40/Per-Dir/5/XI/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pedoman Strategis Manajemen Risiko Ratified through the Regulation of the Board of Directors of PT Jamkrindo No. 40/Per-Dir/5/XI/2022 dated November 30, 2022 concerning Risk Management Strategic Guidelines
Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Guidelines for Reporting on the the implementation of Risk Management	Disahkan melalui Peraturan Direksi PT Jamkrindo No. 53/Per-Dir/5/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Ratified through the Regulation of the Board of Directors of PT Jamkrindo No. 53/Per-Dir/5/XII/2020 dated December 30, 2020
Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Guidelines on the Policy of the Procurement of Goods and Services	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi PT Jamkrindo No. 42/Per-Dir/4/XI/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Amended and ratified through the Regulation of the Board of Directors of PT Jamkrindo No. 42/Per-Dir/4/XI/2022 dated November 30, 2022 concerning Policy Guidelines for Procurement of Goods and Services
Pedoman Kebijakan Gratifikasi Guidelines on the Policy of Gratification	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi PT Jamkrindo No. 18/Per-Dir/4/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Amended and ratified through the Regulation of the Board of Directors of PT Jamkrindo No. 18/Per-Dir/4/XII/2020 Dated December 30, 2020 concerning Guidelines for Gratification Control

Perangkat Kebijakan Policy Tools	Penetapan dan/atau Pembaruan Designation and/or Renewal
Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Guidelines for Management of the Whistleblowing System	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 31/PerDir/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) yang selanjutnya diperbaharui kembali dengan Peraturan Direksi Nomor 35/Per-Dir/4/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) Terintegrasi Amended and ratified through the Regulation of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 31/PerDir/1/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines Whistleblowing Systems, which was subsequently updated with the Board of Directors Regulation Number 35/Per-Dir/4/XII/2023 dated December 29, 2023 concerning Integrated Whistleblowing System Policies
Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Guidelines for Submission of State Officials Wealth Report	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 24/Per-Dir/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 Amended and ratified through the Regulation of the Board of Directors of Public Company (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 24/Per-Dir/VI/2017 dated June 14, 2017

Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Jamkrindo berkomitmen kuat untuk menciptakan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan beretika, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Sebagai bagian dari upaya ini, langkah-langkah strategis telah diambil untuk memastikan bahwa nilai-nilai integritas terus dijunjung tinggi di seluruh lini Perusahaan. Salah satu langkah penting dalam mendukung penerapan GCG adalah pengembangan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*). Sistem ini dirancang sebagai alat yang efektif untuk mencegah dan menangani tindakan yang melanggar etika, termasuk korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya.

Jamkrindo telah mengadopsi dan menyosialisasikan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Terintegrasi bernama "IFG Integritas." Kebijakan ini diatur melalui Ketentuan Direksi Nomor 35/Per-Dir/4/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Terintegrasi. Pedoman tersebut disosialisasikan secara rutin setiap tahun kepada seluruh karyawan. Proses sosialisasi ini dilakukan bersamaan dengan pembahasan mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Strategi Anti Fraud, dan kebijakan terkait Gratifikasi, di antaranya:

Dissemination of Good Corporate Governance Policy

Jamkrindo is committed to creating a transparent, accountable, and ethical work culture, in accordance with GCG principles. Strategic measures have been implemented as part of the effort to guarantee that integrity values are maintained throughout company. One of the important measures taken in supporting the implementation of GCG is the development of a Whistleblowing System. The system is designed as an effective tool to prevent and address ethical misconduct, which includes corruption, bribery, and other fraudulent practices.

Jamkrindo has adopted and disseminated the Integrated Whistleblowing System Guidelines named "IFG Integritas." This policy is regulated through Board of Directors Regulation Number 35/Per-Dir/4/XII/2023 dated December 29, 2023 concerning the Integrated Whistle Blowing System Policy. The guidelines are disseminated regularly every year to all employees. This dissemination process was conducted in conjunction with discussions on the Anti-Bribery Management System, Anti-Fraud Strategy, and policies related to Gratuities, namely:

No.	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Committee
1.	Video Conference melalui Zoom Meeting Video Conference via Zoom Meeting	14 Mei 2024 May 14, 2024	Satuan Pengawasan Intern, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan Internal Audit Unit, Risk Management Division, and Compliance Division

ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, Jamkrindo secara rutin melaksanakan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan perusahaan. Evaluasi ini dilakukan melalui 2 (dua) metode utama, yaitu self-assessment yang dikelola oleh tim internal, dan penilaian independen oleh pihak eksternal yang kompeten.

Penilaian ini dirancang sebagai pijakan utama untuk memperkuat implementasi GCG di Jamkrindo. Melalui penerapan GCG yang optimal, perusahaan diharapkan mampu mencapai tata kelola yang lebih terbuka, profesional, dan efisien. Dampaknya, perusahaan dapat meraih performa unggul (high performance), membangun reputasi yang positif (good corporate image), serta memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat luas.

Pelaksanaan evaluasi penerapan GCG di Jamkrindo merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur pedoman tata kelola dan aktivitas signifikan yang berlaku bagi BUMN. Penilaian self-assessment untuk tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang telah ditetapkan, sesuai dengan panduan dalam evaluasi GCG pada BUMN.

As a part of its ongoing efforts to strengthen its good corporate governance, Jamkrindo regularly evaluates the implementation of GCG principles within the Company. This evaluation is conducted through 2 (two) main methods, namely the self-assessment method conducted by the internal team, and the independent assessment conducted by competent external parties.

This assessment is designed as the main foundation to strengthen GCG implementation in Jamkrindo. Through optimal GCG implementation, the Company is expected to achieve more transparent, professional, and efficient governance. As a result, the Company can achieve high performance, build a good corporate image, and strengthen the trust of various parties, including service users, employees, and the wider community.

The evaluation of GCG implementation in Jamkrindo refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023. This regulation regulates the governance guidelines and significant activities applicable to SOEs. The self-assessment for 2024 is conducted using predetermined indicators and parameters, in accordance with the guidelines for GCG evaluation in SOEs.

6 (enam) Aspek Assessment GCG

(sesuai dengan Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.)

The 6 (six) GCG Assessment Aspects

(in accordance with the Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs)

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal
Commitment to Sustainable Shareholders and GMS/ Capital Owners

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Board of Commissioners/Board of Supervisory

Direksi
Board of Directors

Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Information Disclosure and Transparency

Aspek Lainnya
Other Aspects

Penilaian yang dilakukan dengan metode ini menggunakan predikat berdasarkan rentang skor berikut.

The assessment conducted with this method uses predicates based on the following score ranges.

0 - 50: TIDAK BAIK | BAD

50 - 60: KURANG BAIK | POOR

60 - 75: CUKUP BAIK | MODERATE

75 - 85: BAIK | GOOD

85 - 100: SANGAT BAIK | VERY GOOD

Pengukuran dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2024

Self Assessment

Pelaksanaan assessmen penerapan governansi korporat untuk tahun buku 2024 dilakukan oleh tim asesor internal PT Jamkrindo berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 04/SP/1/1/2025 tanggal 14 Januari 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

Measurement and Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance for the 2024 Fiscal Year

Self Assessment

The assessment for the 2024 fiscal year aims to provide recommendations that support continuous improvement in the implementation of GCG in the Company. This assessment process is conducted independently by involving a third party, namely a professional consultant.

Jenis Penilaian Type of Assessment	:	<i>Self Assessment</i>
Assessor/Penilai Assessor	:	Tim asesor internal PT Jamkrindo PT Jamkrindo's internal assessor team
Tahun Ukur Assessment Year	:	2024
Periode Penerapan Implementation Period	:	Januari-April 2025 January-April 2025

Penerapan GCG pada tahun 2024 memperoleh total skor sebesar 92,99 dengan kualifikasi "SANGAT BAIK". Rincian hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

GCG implementation in 2024 achieved a total score of 92,99 with the qualification "VERY GOOD". Details of these results is presented in the table below.

No.	Atribut Attribute	Keterangan Description	(%) 2024	Hasil Skoring 2024 Scoring Results 2024
1	A	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris Implementation of duties and responsibilities by the Board of Directors and the Board of Commissioners	30,00	26,35
2	B	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: • komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau • fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: • the audit committee, for Guarantee Institutions operating at the national or provincial operational level, or with foreign ownership; • or the appointed function supporting the Board of Commissioners in district-level Guarantee Institutions, is responsible for monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system.	5,00	4,79
3	C	Penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal Implementation of compliance functions by internal and external auditors	7,50	6,92
4	D	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi Implementation of risk management, internal control systems, and information technology governance	10,00	7,93

No.	Atribut Attribute	Keterangan Description	(%) 2024	Hasil Skoring 2024 Scoring Results 2024
5	E	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain. Implementation of remuneration and other benefits policies.	2,50	2,50
6	F	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin Transparency of the financial and non-financial status of the Guarantee Institution	15,00	15,00
7	G	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Long-term plan as well as annual work plan and budget	7,50	7,50
8	H	Pengungkapan kepemilikan saham. Disclosure of share ownership	5,00	5,00
9	I	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud meniadat. Disclosure of financial and familial relationships between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or shareholders of the Guarantee Institution, and other members and shareholders of the institution where they are employed.	5,00	5,00
10	J	Pengungkapan hal-hal penting lainnya Disclosure of other important matters	12,50	12,00
Total			100	92,99

Klasifikasi Kualitas Penerapan Assessment

Classification of the Quality of the Implementation of the Assessment

84-100	:	Sangat Baik Very Good
68-83	:	Baik Good
52-67	:	Cukup Baik Moderate
36-51	:	Kurang Baik Poor
20-35	:	Tidak Baik Bad

Area Of Improvement

Tabel di atas menggambarkan hasil penerapan GCG pada Perusahaan tahun 2024. Dari 10 (sepuluh) atribut penilaian GCG, terdapat 3 (tiga) atribut yang memerlukan beberapa improvement, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- Laporan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, diantaranya:
 - Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 kepada IFG, disampaikan tanggal 12 Januari 2024 yang seharusnya disampaikan tanggal 30 Oktober 2023 sesuai dengan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 07 Tanggal 07 Oktober 2022 pada pasal 17.
 - Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2023 kepada KBU MN, disampaikan tanggal 27 Juni 2024 yang seharusnya disampaikan tanggal 31 Mei 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER- 2/MBU/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 21.

Area Of Improvement

The table above presents the results of the implementation of GCG within the Company in 2024. Out of the 10 (ten) GCG assessment attributes, 3 (three) have been identified as requiring improvement, as detailed below:

1. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners

- Reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) were not submitted within the predetermined time limit, as listed below:
 - The 2024 Work Plan and Budget Draft was submitted to IFG on January 12, 2024, although it should have been submitted on October 30, 2023, in accordance with Article 17 of Circular Resolution of PT Jaminan Kredit Indonesia Shareholders Number 07 dated October 7, 2022.
 - Annual Report for the year 2023 to the State-Owned Enterprises Ministry (KBUMN), submitted on June 27, 2024, despite the deadline of May 31, 2024, as per the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, regarding Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Article 21.

- ii. Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Pelanggan dan Customer Engagement PT Jamkrindo tahun 2024 yang menunjukkan Tingkat kepuasan sebesar 89,64. Capaian ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa penjaminan.
 - iii. Keputusan Direksi yang dituangkan kedalam risalah rapat selama tahun 2024 belum mencantumkan perbedaan pendapat (dissenting opinion) secara jelas.
 2. **Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas**

Berdasarkan Ketetapan Direksi Nomor: 01/KD/5/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 Tentang Struktur Organisasi PT Jamkrindo, diketahui bahwa komite audit tidak tergambar dalam struktur organisasi PT Jamkrindo.
 3. **Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Dan Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi**
 - i. Berdasarkan penerapan Business Continuity Management System (BCMS), teridentifikasi bahwa personel tim tanggap darurat di Kantor Pusat belum memiliki keahlian khusus di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), yang seharusnya menjadi keterampilan dasar dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko belum memiliki rencana pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi Tim Tanggap Darurat. Akibatnya, tim tidak memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan prosedur evakuasi, penanganan insiden, serta koordinasi antar unit yang diperlukan dalam situasi darurat. Hal ini dapat menghambat kecepatan dan efektivitas respons tim dalam menghadapi keadaan darurat, sehingga berisiko mengganggu kelancaran operasional dan keselamatan di lingkungan kerja.
 - ii. Selama tahun 2024, Divisi Manajemen Risiko PT Jamkrindo dalam menjalankan fungsinya belum menerapkan sistem integrasi manajemen risiko secara menyeluruh. Pelaksanaan Manajemen Risiko direalisasikan sesuai dengan arahan dari Divisi Manajemen Risiko holding (IFG), pengelolaan risiko dilakukan dengan pendekatan manual melalui identifikasi risiko di masing-masing unit kerja menggunakan tools Risk Control Self Assessment (RCSA) berbasis Excel. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengendalian risiko masih bersifat desentralisasi dan belum terotomatisasi secara sistemik, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pemantauan dan mitigasi risiko secara real time.
 - iii. Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi dan Kesiapan Infrastruktur dalam sistem penjaminan belum menerapkan aspek tata Kelola antara lain:
 - a) Manajemen Risiko Teknologi Informasi (pengelolaan risiko operasional TI belum membahas beberapa aspek yang signifikan antara lain risiko keamanan informasi, risiko kebocoran data, risiko kepatuhan terhadap regulasi, dan standar terkait TI, risiko kegagalan proyek implementasi TI, risiko ketidakselarasan TI dengan tujuan bisnis; Pengelolaan risiko TI terkait identifikasi risiko belum menjadi topik
- ii. Based on the 2024 Customer Satisfaction and Engagement Survey of PT Jamkrindo, the Company achieved a satisfaction score of 89.64. This achievement reflects the Company's commitment to delivering responsive services that are aligned with the needs of its guarantee service users.
 - iii. The decisions of the Board of Directors, as recorded in the minutes of meetings throughout 2024, did not clearly document any dissenting opinions.
 2. **Completion and Implementation of Duties**

In accordance with the Decree of the Board of Directors Number: 01/KD/5/1/2024 dated January 10, 2024, concerning the Organizational Structure of PT Jamkrindo, it is noted that the audit committee is not included in the stated organizational structure.
 3. **Implementation of Risk Management, Internal Control System, and Implementation of Information Technology Governance**
 - i. Based on the implementation of the Business Continuity Management System (BCMS), it was identified that the personnel on the emergency response team at the Head Office lack specific expertise in Occupational Health and Safety (OHS), which is a fundamental skill for managing emergency situations. Additionally, the Risk Management Division does not have a structured, ongoing training plan to enhance the competencies of the Emergency Response Team. As a result, the team lacks the necessary understanding and skills to effectively conduct evacuation procedures, handle incidents, and coordinate across units during emergencies. This deficiency could hinder the team's ability to respond quickly and effectively, potentially disrupting operations and compromising safety in the workplace.
 - ii. Throughout 2024, the Risk Management Division of PT Jamkrindo has not yet implemented a comprehensive and integrated risk management system. The implementation of Risk Management is conducted in accordance with guidance from the holding company's Risk Management Division (IFG), using a manual approach through risk identification in each work unit, utilizing Excel-based Risk Control Self Assessment (RCSA) tools. This indicates that the risk control process remains decentralized and lacks systemic automation, which may hinder the effectiveness of real-time risk monitoring and mitigation.
 - iii. Information Technology Risk Management and Infrastructure Readiness within the guarantee system have not yet incorporated the following key governance aspects:
 - a) IT operational risk management has not adequately addressed several critical aspects, including information security risk, data leakage risk, non-compliance with IT-related regulations and standards, risk of IT project failure, and misalignment between IT implementation and business objectives. Furthermore, IT risk management has not been reflected in the 13 key risks in the Company's risk

yang diidentifikasi pada 13 risiko pada prosedur pengelolaan risiko, dan UU PDP belum menjadi topik yang diidentifikasi pada 13 risiko pada prosedur pengelolaan risiko,

- b) Fungsionalitas Aplikasi & Pengelolaan data pada aktivitas Host to Host (Fitur pada ICPR, Fitur Tracking Online KUR, Fitur Tracking Online PEN).
- c) Aspek Kesiapan Infrastruktur dan Tata Kelola Data Terkait Rencana Penggunaan Akses dan Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SUK) pada operasional sistem penjaminan. (rencana strategis teknologi informasi).
- d) Gap Analysis atas kesiapan pelaporan SUK (Gap Assesment pada coresystem ICPR dan perbaikan data yang harus dilakukan dalam rangka pemenuhan struktur data sesuai SUK.

Rekomendasi

Terhadap kelemahan pelaksanaan GCG di atas dan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja pencapaian praktik terbaik penerapan GCG maka direkomendasikan beberapa hal yang menjadi perhatian Perusahaan untuk menindaklanjutinya, yaitu sebagai berikut:

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- i. Untuk kedepannya, pelaporan pelaksanaan tugas Direksi dan Komisaris kepada RUPS agar disampaikan tepat waktu.
- ii. Perusahaan agar lebih meningkatkan pelayanan kepada pelanggan agar lebih mencapai hasil yang lebih optimal.
- iii. Untuk kedepannya, dalam keputusan Direksi yang telah dituangkan dalam risalah rapat agar dilengkapi dengan perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi secara jelas.

5. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas

Perusahaan agar melakukan harmonisasi struktur organisasi dengan menjabarkan peran dan fungsi Komite Audit.

6. Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi

- i. Perusahaan agar menyusun rencana tindak lanjut dan timeline yang berisikan rencana pemenuhan personel tim tanggap darurat yang belum memiliki K3 dan rencana pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi Tim Tanggap Darurat.
- ii. Perusahaan agar menerapkan Sistem dan Prosedur Pemantauan Risiko Terintegrasi serta perencanaan penggunaannya di tahun 2025.
- iii. Perusahaan agar menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta untuk memastikan perlindungan optimal terhadap data seluruh pemangku kepentingan.
- iv. Perusahaan agar melakukan gap analysis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kesiapan pelaporan serta merumuskan rencana implementasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SUK) pada core system perusahaan.

management procedures, and compliance with the Personal Data Protection (PDP) Law is also not included among the identified risks.

- b) Application Functionality & Data management on Host to Host activities (ICPR, KUR Online Tracking, and PEN Online Tracking Features).
- c) Infrastructure Readiness and Data Governance Aspects Related to the Planned Use of Access to Financial Information Service System (SUK) Data in guarantee system operations. (information technology strategic plan).
- d) Gap Analysis on SUK reporting readiness (A Gap Assessment of the ICPR coresystem and necessary data enhancements to align with the SUK data structure requirements).

Recommendation

Regarding the weaknesses identified in the implementation of GCG outlined above, and in order to improve performance and achieve best practices in GCG implementation, it is recommended that the Company address the following matters:

4. Implementation of Duties and Responsibilities by the Board of Directors and the Board of Commissioners

- i. In the future, reports on the implementation of the duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners should be submitted to the GMS within the designated timeframe.
- ii. The Company should enhance its services to customers in order to achieve more optimal results.
- iii. Moving forward, the decisions of the Board of Directors, as outlined in the minutes of the meeting, should clearly include any dissenting opinions.

5. Completion and Implementation of Duties

The Company should align its organizational structure by clearly defining the roles and functions of the Audit Committee

6. Implementation of Risk Management, Internal Control Systems, and Information Technology Governance

- i. The Company should develop a follow-up plan and timeline outlining the recruitment of emergency response team personnel who lack expertise in Occupational Health and Safety (OHS), along with a structured and ongoing training program to enhance the competencies of the Emergency Response Team.
- ii. The Company should implement the Integrated Risk Monitoring System and Procedures, with a plan for its use in 2025.
- iii. The Company should develop and establish policies governing the implementation of Personal Data Protection (PDP) to ensure compliance with applicable regulations and provide optimal protection for the data of all stakeholders.
- iv. The Company should conduct a comprehensive gap analysis to identify reporting readiness and formulate an implementation plan for the Financial Information Service System (SUK) in the Company's core system.

Assessment

Penilaian pada tahun buku 2024 bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam penerapan GCG di Perusahaan. Proses penilaian ini dilakukan secara independen dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu konsultan profesional.

Assessor/Penilai Assessor	: PT. Cita Negeri Amanah
Metode Penilaian Assessment Method	: Asean CG Scorecard (ACGS)
Tahun Buku Penerapan Year of Implementation	: 1 Januari - 31 Desember 2024 January 1 – December 31, 2024
Periode Pengukuran Assessment Period	: 02 Januari 2025 – 31 Maret 2025 January 2, 2025 – March 31, 2025

Penerapan GCG pada tahun 2024 memperoleh total skor sebesar 92,83 dengan kualifikasi "Sangat Baik". Rincian skor tertimbang untuk masing-masing komponen Scorecard adalah sebagai berikut:

1. Prinsip A - Hak-Hak dan Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham: 6,43.
2. Prinsip B – Keberlanjutan dan Ketahanan: 15,45
3. Prinsip C - Pengungkapan dan Transparansi: 24,14.
4. Prinsip D – Tanggung Jawab Dewan: 40,81

Area of Improvement

Hasil *Area of Improvement* (AOI) atau rekomendasi atas Assessor penerapan GCG yang dilakukan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Assessment

The assessment in the 2024 fiscal year aims to provide recommendations that support continuous improvement in the implementation of GCG in the Company. This assessment process is conducted independently by involving a third party, namely a professional consultant.

GCG implementation in 2024 obtained a total score of 92.83 with a qualification of "Very Good". Details of the weighted scores for each Scorecard component are as follows:

1. Principle A - Rights and Equal Treatment of Shareholders: 6,43.
2. Principle B - Sustainability and Resilience: 15,45
3. Principle C - Disclosure and Transparency: 24,14.
4. Principle D - Board Responsibility: 40,81

Area of Improvement

The results of the Areas of Improvement (AOI) or recommendations from the 2024 GCG implementation assessment are presented in the table below.

No.	Hasil Analisa Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024 Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2024 Fiscal Year	Usulan Rekomendasi Recommendation
Level 1		
A	Prinsip hak-hak dan perlakuan setara terhadap pemegang saham Principles of equal rights and treatment of shareholders	
1.	Perusahaan dinilai masih belum patuh (comply) hanya terhadap praktik tata kelola yang diminta atau disyaratkan pada item penilaian B.8.3 yang meminta adanya kebijakan yang secara eksplisit melarang pemberian fasilitas pinjaman kepada Direktur dan Komisaris atau apabila terdapat kebijakan yang membolehkan praktik tersebut dilakukan, maka perusahaan melalui kebijakan tersebut harus memastikan bahwa praktik pemberian pinjaman kepada Direktur dan Komisaris dilakukan secara wajar dan sesuai dengan tingkat bunga pasar/ yang berlaku umum . Berdasarkan hasil asesmen, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi yang menunjukkan bahwa perusahaan (JAMKRINDO) telah memenuhi atau patuh terhadap indikator penilaian untuk praktik ini. The Company is rated as non-compliant only with the governance practice outlined in assessment item B.8.3, which requires the existence of a policy that explicitly prohibits the provision of loan facilities to members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Alternatively, if such loans are permitted, the policy must ensure that they are granted on reasonable terms and in accordance with prevailing market or generally accepted interest rates. Based on the assessment results, there is no information disclosed indicating that the Company (Jamkrindo) has fulfilled or complied with the assessment indicators related to this governance practice.	Kebijakan RPT agar di review dan memasukkan ketentuan yang mengatur mengenai larangan pinjaman atau memastikan bahwa pemberian pinjaman yang diperbolehkan bagi anggota Komisaris dan Direksi perusahaan dilakukan secara wajar dan sesuai tingkat suku bunga normal/suku bunga pasar The RPT policy should be reviewed to include provisions that prohibit loans, or ensure that any loans granted to members of the Board of Commissioners and Board of Directors are reasonable and aligned with prevailing market interest rates.

No.	Hasil Analisa Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024 Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2024 Fiscal Year	Usulan Rekomendasi Recommendation
2.	Berdasarkan telaah terhadap Laporan Tahunan & Financial Report (Audited) PT Jaminan Kredit Indonesia untuk Tahun Buku 2023, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi yang menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak berelasi seluruhnya dilakukan secara wajar (fair and at arms' length transaction). Based on the review of the Annual Report & Financial Report (Audited) of PT Jaminan Kredit Indonesia for the 2023 Fiscal Year, there is no disclosure of information stating that the transactions carried out by the company with related parties are all conducted on a fair and at arms' length transaction.	Perusahaan disarankan untuk menyusun dan mengungkapkan kebijakan yang mensyaratkan bahwa RPT seharusnya dilakukan secara wajar (fair and arms' length transaction) The Company is advised to establish and disclose a policy requiring that related party transactions (RPT) be conducted fairly and on an arm's length basis.
B Prinsip Keberlanjutan dan Ketangguhan Principles of Sustainability and Resilience		
1.	Perusahaan dinilai masih belum memenuhi atau belum comply hanya pada 1 (satu) butir item penilaian saja, yakni pada item penilaian B.1.6 yang mensyaratkan bahwa Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Perusahaan harus melalui telaah (review) dan/atau telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Organ Dewan Komisaris (yakni Komite), sebelum disampaikan ke publik. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen Sustainability Report, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi yang menunjukkan bahwa Sustainability Report Perusahaan untuk Tahun 2023 telah direview atau mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris/Komite. Dengan demikian, perusahaan dinilai masih belum memenuhi atau belum comply terhadap praktik tata kelola yang diminta pada item penilaian ini. The Company is deemed non-compliant with only one assessment item, namely item B.1.6, which requires that the Company's Sustainability Report be reviewed and/or approved by the Board of Commissioners or a designated Board Committee prior to public disclosure. Based on the review of the Sustainability Report, there is no information disclosed indicating that the Company's 2023 Sustainability Report was reviewed or approved by the Board of Commissioners or its Committee. Therefore, the Company is considered to have not fulfilled or complied with the governance practice required in this assessment item.	Perusahaan perlu memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan ataupun mengenai Tanggung Jawab Sosial harus ditelaah (review) terlebih dahulu dan/atau telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Organ Dewan Komisaris, yakni Komite, sebelum disampaikan ke publik The Company must ensure that the Sustainability Report or Social Responsibility Report is reviewed and/or approved by the Board of Commissioners, or a designated committee thereof, prior to its public disclosure.
2.	Perusahaan belum comply terhadap 1 (satu) item pertanyaan/penilaian di atas, yakni pada item B.6.3 yang meminta pengungkapan adanya kebijakan atau program pemberian kompensasi/remunerasi berbasis kinerja perusahaan yang bersifat jangka panjang. Hingga akhir 2023, JAMKRINDO tidak memiliki/melaksanakan program insentif jangka panjang kepada manajemen dan/atau karyawan, seperti Employee Stock Options Program (ESOP) maupun Management Stock Options Program (MSOP). The Company has not complied with one assessment item, specifically item B.6.3, which requires disclosure of a long-term, performance-based compensation or remuneration policy or program. As of the end of 2023, JAMKRINDO has neither established nor implemented long-term incentive programs for management or employees, such as an Employee Stock Options Program (ESOP) or Management Stock Options Program (MSOP).	Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengadakan program atau kebijakan kompensasi atau reward yang berbasis kinerja dan bersifat jangka Panjang bagi karyawannya (bukan hanya dewan Komisaris dan Direksi) The Company may consider establishing a performance-based and long-term compensation or reward program or policy for its employees (not just the Board of Commissioners and and the Board of Directors).

No.	Hasil Analisa Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024 Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2024 Fiscal Year	Usulan Rekomendasi Recommendation
C	Prinsip Pengungkapan dan Transparansi Principles of Disclosure and Transparency	
1.	Perusahaan (JAMKRINDO) dinilai masih belum patuh (comply) hanya terhadap praktik tata kelola yang diminta atau disyaratkan pada item penilaian C.2.4 yang meminta adanya pengungkapan kebijakan dividen untuk tahun buku 2023 di dalam Laporan Tahunan (Annual Report) perusahaan Tahun 2023. Sementara, informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan perusahaan hanya menyebutkan tentang kebijakan dividen yang telah dilakukan perusahaan untuk periode sebelumnya, yakni untuk tahun buku 2008 s/d 2022 saja (dividend history), namun tidak mengungkapkan target/kebijakan dividen/dividend payout ratio untuk tahun buku 2023 The Company (JAMKRINDO) is assessed as not yet compliant with the governance practice required in assessment item C.2.4, which calls for the disclosure of a dividend policy for the 2023 fiscal year in the Company's 2023 Annual Report. The information presented in the Annual Report only refers to the Company's historical dividend policies from fiscal years 2008 to 2022 (dividend history), without disclosing any target, dividend policy, or dividend payout ratio for the 2023 fiscal year.	Untuk meningkatkan kualitas laporan tahunannya, perusahaan disarankan untuk mengungkapkan secara eksplisit informasi di dalam laporan tahunan mengenai kebijakan pembayaran dividen (c/o: target dividend payout ratio atau dividend per share) untuk tahun buku yang dinilai tersebut (bukan kebijakan dividen untuk tahun buku yang lampau). Kebijakan ini berlaku baik untuk perusahaan yang memutuskan melakukan pembagian dividen maupun tidak kepada para pemegang sahamnya terhadap kinerja operasi perusahaan pada tahun buku yang sedang dinilai. To enhance the quality of the annual report, the Company is advised to explicitly disclose their dividend payout policy for the fiscal year under review, such as the target dividend payout ratio or dividend per share. This disclosure should reflect the current fiscal year's policy, regardless of whether dividends are declared for that period, rather than referring to the previous year's policy.
2.	Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja praktik tata kelola perusahaan untuk ke-4 (empat) indikator penilaian di atas, Perusahaan belum memenuhi hanya pada item penilaian C.3.3 yang mensyaratkan pengungkapan kebijakan remunerasi anggota Direksi yang mencakup tiga hal, yaitu insentif jangka pendek, insentif jangka Panjang, dan insentif yang didasarkan pada ukuran kinerja perusahaan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa perusahaan hanya mengungkapkan kebijakan terkait dengan insentif jangka pendek saja, PT JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO) sementara untuk kebijakan remunerasi yang terkait dengan pemberian insentif jangka panjang dan insentif yang didasarkan pada ukuran kinerja perusahaan belum dipenuhi oleh Perusahaan Based on the assessment of the Company's governance practices across the four evaluation indicators mentioned above, the Company was found non-compliant only with assessment item C.3.3. This item requires the disclosure of a remuneration policy for members of the Board of Directors that includes three components: short-term incentives, long-term incentives, and performance-based incentives. The assessment results show that PT Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) has only disclosed its policy related to short-term incentives. The Company has yet to fulfill the requirements regarding long-term incentives and performance-based incentives within its remuneration policy.	Perusahaan disarankan mengungkapkan kebijakan remunerasi untuk Direksi, termasuk juga Presiden Direktur. Kebijakan remunerasi yang dimaksud mencakup semua jenis tunjangan dan natura, tidak terbatas hanya pemberian insentif jangka pendek saja, namun juga mencakup pemberian insentif jangka panjang maupun insentif yang didasarkan pada kinerja perusahaan. Sehingga, kebijakan/praktik remunerasi anggota Direksi setidaknya merinci terkait gaji pokok, insentif atau bonus yang dibayarkan dalam jangka pendek (annual bonus) dan jangka panjang (dalam bentuk deferred stock). Kinerja pengukuran sebagai basis penetapan bonus (jangka pendek dan jangka panjang), seperti operating margin, free cash flow, atau ROE, dsb, seharusnya diungkapkan. The Company is advised to disclose its remuneration policy for the Board of Directors, including the President Director. The remuneration policy should cover all types of benefits and compensation, not limited to short-term incentives, but also including long-term incentives and performance-based rewards. Accordingly, the remuneration policy or practices for members of the Board of Directors should at least specify base salary, short-term incentives or bonuses (e.g., annual bonuses), and long-term incentives (such as deferred stock). The performance metrics used as the basis for determining these bonuses, such as operating margin, free cash flow, or return on equity (ROE), should also be disclosed.
3.	Perusahaan menginformasikan di dalam website waktu release Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2023 yang dapat diakses oleh publik, yakni tanggal 11 Juli 2024 serta saat Annual Report disetujui/ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Komisaris Perusahaan tertanggal 25 Juni 2024 sebagaimana informasi tersebut tersaji di Annual Report. Dengan dasar informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan tidak memenuhi batas maksimal waktu submit atau release yang disyaratkan pada item penilaian C.8.2, yakni maksimal 120 hari sejak berakhirnya tahun buku. The Company disclosed on its website that the 2023 Annual Report was released to the public on July 11, 2024. The Annual Report was approved and signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners on June 25, 2024, as stated in the report. Based on this information, it can be concluded that the Company did not meet the maximum submission or release deadline as required by assessment item C.8.2, which stipulates a maximum of 120 days from the end of the fiscal year.	Perusahaan agar menyelesaikan perumusan Annual Report lebih awal serta memperhatikan tanggal atau waktu Penyampaian Laporan Tahunan (Annual Report) ke publik agar jangka waktunya tidak lebih dari 120 hari sejak berakhirnya periode tahun buku, serta menginformasikan tanggal penyampaian tersebut secara jelas dan mudah diakses atau diketahui oleh publik The Company is advised to complete the preparation of its Annual Report earlier and ensure that the submission to the public is made within no more than 120 days after the end of the fiscal year. The submission date should also be clearly communicated and made easily accessible or known to the public.

No.	Hasil Analisa Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024 Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2024 Fiscal Year	Usulan Rekomendasi Recommendation
4.	Sumber data untuk setiap item penilaian pada parameter di atas adalah dari website perusahaan, dan untuk item penilaian C.9.6 meminta adanya materi mengenai Anggaran Dasar Perseroan. Materi ini dapat berupa dokumen (word, pdf, teks) yang dapat diunduh. Berdasarkan hasil penelusuran pada situs web perusahaan tidak ditemukan adanya informasi mengenai Anggaran Dasar Perusahaan. untuk itu perusahaan dinilai belum memenuhi atau patuh (comply) terhadap praktik yang diminta pada item penilaian ini. The data source for each assessment item under the above parameters is the Company's website. Assessment item C.9.6 requires the availability of the Company's Articles of Association, which may be provided in a downloadable format such as a Word document, PDF, or text file. Based on a review of the Company's website, no information regarding the Articles of Association was found. Therefore, the Company is considered to have not fulfilled or complied with the governance practice required under this assessment item.	Perusahaan disarankan untuk melengkapi website perusahaan dengan dokumen Anggaran Dasar perusahaan dalam versi bahasa Inggris. Bentuk dokumen ini dapat berupa file teks, pdf atau doc yang dapat diunduh The Company is advised to complete its corporate website by providing the Company's Articles of Association in English. The document may be made available in a downloadable format such as a text file, PDF, or Word document.
D		
	Prinsip Tanggungjawab Dewan Principles of Board Accountability	
1.	Berdasarkan ke-6 (enam) item penilaian/pertanyaan di atas, Perusahaan dinilai hanya belum comply pada item penilaian D.1.2 yang meminta adanya pengungkapan mengenai jenis-jenis keputusan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris perusahaan. Berdasarkan hasil asesmen, meskipun informasi terkait hal tersebut telah terdapat dan diungkapkan dalam Board Manual, namun informasi tersebut hanya tersaji dalam versi Bahasa Indonesia saja. Dengan demikian Perusahaan dinilai masih belum dapat memenuhi praktik yang diminta dalam item penilaian ini Based on the six assessment items/questions above, the Company is considered non-compliant only on assessment item D.1.2, which requires disclosure of the types of Board of Directors' decisions that must first receive approval from the Company's Board of Commissioners. According to the assessment results, although this information is included and disclosed in the Board Manual, it is presented only in the Indonesian language. Therefore, the Company is deemed not yet to have fulfilled the governance practice required under this assessment item	Perusahaan disarankan agar pengungkapan informasi mengenai beberapa jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang telah terdapat dalam Piagam Dewan (<i>Board Manual</i>) disajikan juga dalam versi Bahasa Inggris atau Bilingual The Company was advised to provide disclosures regarding certain types of decisions requiring approval from the Board of Commissioners, as outlined in the Board Manual, in an English version or in a bilingual format.
2.	Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja praktik tata kelola perusahaan untuk ke-24 indikator penilaian di atas, Perusahaan dinilai hanya belum comply pada item penilaian D.2.24 yang mensyaratkan kewajiban utama komite Audit adalah: rekomendasi atas penunjukan dan penggantian auditor eksternal. Namun Perusahaan (JAMKRINDO) hanya menyebutkan adanya kewajiban untuk merekomendasikan penunjukan Auditor Eksternal saja, sementara tidak terdapat pengungkapan mengenai adanya kewajiban untuk merekomendasikan penggantian Auditor Eksternal. Based on the assessment results of the Company's governance practices across the 24 evaluation indicators above, the Company is deemed non-compliant only on assessment item D.2.24, which requires the Audit Committee's primary obligations to include recommendations on both the appointment and replacement of the external auditor. However, the Company (JAMKRINDO) only mentions the obligation to recommend the appointment of the External Auditor, with no disclosure regarding the obligation to recommend the replacement of the External Auditor.	Terkait dengan Komite Audit, disarankan untuk menambahkan peran atau fungsinya, yakni tidak hanya merekomendasikan penunjukan Auditor Eksternal saja, namun juga sampai pada pemberian rekomendasi untuk pemberhentian Auditor Eksternal perusahaan. Peran atau fungsi tersebut seharusnya dapat dituangkan atau ditetapkan secara jelas dalam piagam komite audit. Regarding the Audit Committee, it is recommended to expand its role or function to not only include recommending the appointment of the External Auditor but also to encompass providing recommendations for the dismissal of the Company's External Auditor. This role or function should be clearly articulated and established in the Audit Committee Charter.
3.	Mensyaratkan jadwal rapat Dewan Komisaris dijadwalkan dari jauh-jauh hari, misalnya dilakukan di akhir tahun buku 2022 atau awal tahun 2023. Perusahaan masih belum mengungkapkan informasi terkait penjadwalan rapat tersebut. It is required that the schedule for Board of Commissioners meetings be planned well in advance, for example, at the end of the 2022 fiscal year or the beginning of 2023. The Company has not yet disclosed any information related to the scheduling of these meetings.	Perusahaan sebaiknya menyusun jadwal rapat Komisaris dan Direksi pada awal tahun buku berjalan atau di akhir tahun buku sebelumnya. Tujuannya adalah agar setiap rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan secara efektif dan efisien The Company should prepare the schedule of Board of Commissioners and Board of Directors meetings at the beginning of the current financial year or at the end of the previous financial year. The aim is that each Board of Commissioners meeting can be conducted effectively and efficiently.

No.	Hasil Analisa Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024 Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2024 Fiscal Year	Usulan Rekomendasi Recommendation
4.	Mensyaratkan kuorum 2/3 untuk pengambilan keputusan dalam rapat dewan Komisaris. Sementara informasi yang ada (pada Board Manual menyebutkan bahwa untuk kuorum rapat Dewan Komisaris perusahaan (JAMKRINDO) hanya mensyaratkan minimal lebih dari ½ jumlah anggota dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Selain itu informasi yang terkait dengan hal tersebut hanya tersaji dalam versi Bahasa Indonesia saja. A quorum of two-thirds is required for decision-making in the Board of Commissioners meetings. However, the information available in the Board Manual states that the quorum for the Company's (JAMKRINDO) Board of Commissioners meetings only requires a minimum attendance of more than half of the Board members. Additionally, this information is presented only in the Indonesian language.	Mengajukan usulan untuk mengubah ketentuan mengenai syarat kuorum dalam rapat pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris, dari sebelumnya yang hanya mensyaratkan lebih dari 1/2 anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat menjadi minimal 2/3 A proposal was submitted to amend the quorum requirements for decision-making meetings of the Board of Commissioners, changing from the previous requirement of more than half of the Board members being present to a minimum of two-thirds attendance.
5.	Mensyaratkan materi rapat sudah harus dibagikan kepada anggota dewan Komisaris minimal 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat dewan Komisaris. Berdasarkan hasil asesmen, informasi yang ada (pada Board Manual Perusahaan) hanya mensyaratkan bahwa materi rapat didistribusikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat. Selain itu informasi yang terkait dengan hal tersebut hanya tersaji dalam versi Bahasa Indonesia saja. Dengan demikian, perusahaan dinilai masih belum memenuhi atau patuh (comply) terhadap indikator penilaian untuk praktik ini. It is required that meeting materials be distributed to the members of the Board of Commissioners at least five (5) working days before the Board meeting is held. Based on the assessment results, the information available in the Company's Board Manual only requires that meeting materials be distributed no later than three (3) days before the meeting. Additionally, this information is presented only in the Indonesian language. Therefore, the Company is considered not yet compliant with the assessment indicator for this practice.	Mengajukan usulan untuk mengubah ketentuan mengenai jangka waktu sirkulasi materi rapat yang harus diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum pelaksanaan rapat Dewan Komisaris di dalam Board Manual, yakni dari semula 3 (tiga) hari menjadi paling lambat dalam jangka waktu lima (5) hari (kerja). Disarankan agar <i>Board Manual</i> diungkapkan dalam versi Bahasa Inggris atau Bilingual Submit a proposal to amend the Board Manual provisions regarding the timeline for distributing meeting materials to each member of the Board of Commissioners prior to meetings, extending the period from the current three (3) days to no later than five (5) working days. It is also recommended that the Board Manual be made available in English or in a bilingual format.
6.	Mensyaratkan perusahaan seharusnya memiliki standar pengukuran yang menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja para Direksi dan manajer senior lainnya dengan kepentingan jangka panjang perusahaan (company long-term performance), termasuk provisi clawback (pengembalian sebagian atau seluruh bonus yang sudah diterima) dan pembayaran bonus yang ditangguhkan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki standar pengukuran kinerja dan provisi dimaksud. The Company is required to establish measurement standards that align performance-based remuneration for Directors and senior managers with the company's long-term interests. This should include clawback provisions, allowing for the recovery of all or part of bonuses already paid, and deferred bonus payments. The assessment indicates that the company currently lacks these performance measurement standards and provisions.	Merumuskan kebijakan remunerasi dengan menetapkan standar yang terukur yang mengkaitkan antara kinerja Direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti adanya claw back provision, reward atau deferred bonuses yang menggunakan pengukuran-pengukuran, seperti ROE, Cumulative Free Cash Flow, Operating Profit atau lainnya. Formulate a remuneration policy by establishing measurable standards that link the performance of the Board of Directors to the company's long-term interests, including clawback provisions, rewards, or deferred bonuses based on performance metrics such as ROE, Cumulative Free Cash Flow, Operating Profit, or others.
7.	Item penilaian tersebut meminta pengungkapan informasi mengenai adanya program orientasi yang diperuntukkan bagi anggota Komisaris baru. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen, meskipun praktik tersebut telah diatur dan dilakukan Perusahaan sebagaimana diungkapkan di dalam Board Manual Perusahaan, namun karena pengungkapan informasinya hanya tersaji dalam versi Bahasa Indonesia saja, maka perusahaan dinilai masih belum dapat comply atau memenuhi terhadap praktik yang disyaratkan pada setiap indikator penilaian pada ACGS. This assessment item requires disclosure of information regarding an orientation program intended for new members of the Board of Commissioners. Based on document review, although the Company has regulated and implemented this practice as disclosed in the Company's Board Manual, the information is only available in the Indonesian language version. Therefore, the Company is considered not yet compliant with the practice required by this assessment indicator under the ACGS.	Meskipun perusahaan telah memiliki ketentuan yang mengatur mengenai program orientasi yang diperuntukkan bagi setiap anggota Dewan Komisaris perusahaan yang baru, namun disarankan agar ketentuan tersebut (di dalam <i>Board Manual</i>) diungkapkan dalam versi Bahasa Inggris atau Bilingual Although the Company has established provisions governing the orientation program for new members of the Board of Commissioners, it is recommended that these provisions (as stated in the Board Manual) be disclosed in an English or bilingual version.

No.	Hasil Analisa Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024 Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2024 Fiscal Year	Usulan Rekomendasi Recommendation
Level 2		
1.	Untuk dapat meningkatkan kinerja governansinya di masa mendatang, tentunya selain meniadakan <i>bad practices</i> yang berimplikasi terhadap pengurangan skor (akibat adanya penalti), perusahaan juga perlu memberikan perhatian khusus untuk perolehan bonus poin lewat implementasi GCG sesuai kapabilitas perusahaan. Berikut implementasi GCG yang disarankan untuk mendapatkan bonus poin atau yang dapat mengurangi/meniadakan perolehan poin penalti, To enhance governance performance in the future, the Company must not only eliminate bad practices that result in score penalties but also focus on earning bonus points by implementing Good Corporate Governance (GCG) in accordance with the Company's capabilities. The following GCG implementations are recommended to secure bonus points or to reduce/eliminate penalty point deductions:	Perusahaan agar memperimbangkan pelibatan/penggunaan pihak eksternal/lembaga independent dalam menjamin atau memastikan kualitas dari Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Perusahaan The Company is advised to consider involving or engaging external parties or independent institutions to ensure the quality of the Company's Sustainability Report.
2.		Perusahaan agar mempertimbangkan untuk membentuk unit/divisi/komite khusus yang mengelola atau bertanggung jawab untuk masalah keberlanjutan. Apabila Unit/Divisi/Komite atau sustainability officer setingkat Vice President atau Head of Department, sebaiknya Perusahaan juga memiliki Sustainability Oversight di Level BOC (Komite). Namun, apabila Unit/Divisi/Komite atau sustainability officer setingkat Direksi, maka Perusahaan dapat tidak membentuk Sustainability Oversight di Level BOC The Company should consider establishing a dedicated unit, division, or committee responsible for managing sustainability issues. If this unit, division, committee, or sustainability officer holds a position at the Vice President or Head of Department level, it is advisable for the company to also have a Sustainability Monitoring committee at the Board of Commissioners (BOC) level. However, if the unit, division, committee, or sustainability officer is at the Director level, the Company may forgo establishing Sustainability Monitoring at the BOC level.
3.		Dewan Komisaris perlu menjalankan peran pengawasan terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan, serta melakukan pengungkapan informasi atas kegiatan tersebut. The Board of Commissioners needs to perform monitoring of risks and opportunities related to sustainability and disclose information regarding these activities.
4.		Kebijakan remunerasi yang diterima Direksi agar mempertimbangkan juga komponen/faktor yang terkait dengan capaian kinerja dalam pengelolaan aktivitaskeberlanjutan yang telah dijalankan Perusahaan sebagai indicator pengukurannya. The remuneration policy for the Board of Directors should also consider components or factors related to performance achievements in managing the Company's sustainability activities as part of the measurement indicators.
5.		Perusahaan agar memperimbangkan pelibatan/penggunaan pihak/ lembaga independent dalam pengelolaan sistem WBS, terutama untuk menghindari adanya keberpihakan apabila pengelolaan hanya dilakukan secara internal. The Company should consider involving/ engaging independent parties/ institutions in managing the Whistleblowing System (WBS), especially to prevent any bias that may arise if the system is managed solely internally.
6.		Perusahaan seharusnya dapat mengusahakan untuk merilis Laporan Keuangan (audited) ke publik dalam jangka waktu maksimal 2 bulan (60 hari) setelah berakhirnya tahun buku The Company should strive to release the audited financial statements to the public within a maximum period of 2 months (60 days) after the end of the fiscal year.

No.	Hasil Analisa Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024 Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2024 Fiscal Year	Usulan Rekomendasi Recommendation
7.		Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan penyusunan kebijakan yang secara jelas mengatur mengenai keberagaman komposisi keanggotaan dewan Komisaris perusahaan yang disertai dengan adanya penetapan target serta laporan atas kemajuan (progres) atau pencapaian dari target/tujuan diversitas tersebut. Dengan penjelasan sebagai berikut; • Kebijakan keberagaman meliputi bagaimana diversitas didefinisikan dan ditetapkan serta bagaimana inklusi terdapat pada dewan. Keberagaman tidak saja diartikan dari sisi keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh calon Komisaris, melainkan juga meliputi usia, gender, atau bahkan terkait etnis. • Target ditetapkan menurut pengetahuan atau latar belakang pendidikan, pengalaman, dan gender. Target diversitas gender, misalnya dewan Komisaris dalam 3 tahun ke depan terdiri dari 30% perempuan. Diversitas knowledge dan pengalaman juga harus demikian The Company may consider developing a clear policy that governs the diversity of the Board of Commissioners' composition, accompanied by the establishment of targets as well as reporting on the progress or achievement of these diversity goals. The details are as follows: • The diversity policy should define how diversity is understood and established, as well as how inclusion is implemented within the board. Diversity is not only interpreted in terms of the skills and competencies possessed by prospective Commissioners but also includes factors such as age, gender, and even ethnicity. • Targets are established based on knowledge or educational background, experience, and gender. For example, the gender diversity target could be for the Board of Commissioners to comprise 30% women within the next three years. Similarly, diversity in knowledge and experience should also be established.
8.		Perusahaan dapat memperkuat peran dewan Komisaris lewat pemberdayaan Komite Nominasi dengan komposisi anggota 100 persen independen. Anggota yang independen tidak harus seorang Komisaris Independen, namun dapat berasal dari pihak luar yang memenuhi syarat independens The Company can strengthen the role of the Board of Commissioners by empowering the Nomination Committee with a membership composed entirely of independent members. These independent members do not necessarily have to be Independent Commissioners but may come from qualified external parties who meet the criteria for independence.
9.		Perusahaan melalui Komite Nominasi agar dalam proses identifikasi kandidat Komisaris dapat menyelaraskan proses nominasi dengan strategic map yang ada, dimana identifikasi kandidat Komisaris agar disesuaikan dengan arah atau kebijakan strategis perusahaan. The Company through the Nomination Committee should align the nomination process with the existing strategic map, where the identification of Commissioner candidates should be adjusted to the Company's strategic direction or policy.
10.		Perusahaan mempunyai kemampuan untuk menggunakan Professional search firms tidak saja dalam mendapatkan kandidat Direksi, melainkan juga untuk mendapatkan kandidat Komisaris perusahaan. The Company has the ability to use professional search firms not only to find candidates for the Board of Directors, but also to find candidates for the Board of Commissioners.

No.	Hasil Analisa Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024 Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2024 Fiscal Year	Usulan Rekomendasi Recommendation
11.		Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah Komisaris Independen dalam komposisi keanggotaan Dewan Komisaris perusahaan sehingga memenuhi jumlah mayoritas dari keanggotaan Dewan Komisaris (> 50%) PT JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO) guna memperkuat fungsi pengawasan dan independensi proses pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris serta tetap mempertahankan jabatan Komisaris Utama dipegang oleh seorang Komisaris Independen The Company may consider increasing the number of Independent Commissioners on its Board of Commissioners to constitute a majority (>50%) of the board, similar to the practice at PT JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO). This measure aims to strengthen the board's monitoring function and the independence of its decision-making process while maintaining the position of President Commissioner with an Independent Commissioner.
12.		Perlu dipertimbangkan untuk menyusun kebijakan terkait pelarangan pemberian bonus/tantiem dari perusahaan untuk para Komisaris Independen perusahaan. Pemberian kompensasi dalam bentuk bonus/tantiem merupakan praktik yang kurang baik, karena bonus/tantiem tersebut terkait dengan kinerja perusahaan, yaitu kinerja Direksi. Disarankan agar kompensasi kepada Dewan Komisaris, terutama bagi anggota Komisaris yang independen, tidak diberikan dalam bentuk bonus atau semacam tantiem It is advisable to consider developing a policy that prohibits the granting of bonuses to Independent Commissioners of the Company by providing compensation in the form of bonuses is considered an inappropriate practice, as such rewards are linked to the Company's performance. This is primarily the responsibility of the Board of Directors. Therefore, it is recommended that compensation for the Board of Commissioners, especially for independent members, should not be given in the form of bonuses.

Pengukuran dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2023

Penilaian pada tahun buku 2023 dilakukan dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan GCG Perusahaan.

Measurement and Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance for the 2023 Fiscal Year

The assessment for the 2023 fiscal year was conducted with the aim of providing recommendations for continuous improvement of the Company's GCG implementation.

Penilai Assessor	: Self Assessment
Metode Penilaian Assessment Method	: Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 Indicator/Parameter for Assessment of the Implementation of GCG SK16/S.MBU/2012
Tahun Buku Penerapan Year of Implementation	: 1 Januari - 31 Desember 2023 January 1 - December 31, 2023
Periode Pengukuran Assessment Period	: 2 Januari 2024 - 30 Maret 2024 January 2, 2024 - March 30, 2024

Hasil penilaian penerapan GCG tahun 2023 mencapai total skor sebesar 96,268 dengan kualifikasi "Sangat Baik", yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The results of the 2023 GCG implementation assessment achieved a total score of 96.268 with the qualification "Very Good", which is summarized in the following table.

Aspek Aspects	Bobot Weight	2023	
		Nilai Value	Pencapaian (%) Achievements (%)
	1	2	(2/1 x100)
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance	7.00	6.743	96,330%
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9.00	8.794	97,714%
Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Supervisory Board/Board of Commissioners	35.00	33.673	96,208%
Direksi Board of Directors	35.00	33.803	96,581%
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9.00	8.879	98,656%
Aspek Lainnya Other Aspects	5.00	4.375	87,50%
Skor Keseluruhan Overall Score	100.00	96.268	
Peringkat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Predicate	"SANGAT BAIK" "VERY GOOD"		

Klasifikasi Kualitas Penerapan Assessment

Classifications of the Quality of the Implementation of the Assessment

Nilai di atas 85 Scoring above 85	:	Sangat Baik Very Good
75 < Nilai ≤ 85 Scoring below 85, but above 75	:	Baik Good
60 < Nilai ≤ 75 Scoring below 75, but above 60	:	Cukup Baik Moderate
50 < Nilai ≤ 60 Scoring below 60, but above 50	:	Kurang Baik Poor
Nilai ≤ 50 Scoring below 50	:	Tidak Baik Bad

Rekomendasi atau *Area of Improvement* (AOI) berdasarkan *self assessment* penerapan GCG untuk tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Recommendations or Areas of Improvement (AOI) for the GCG implementation self-assessment conducted for 2023 is explained in the following table.

No.	Hasil Analisa Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2024 Results of GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2024 Fiscal Year	Usulan Rekomendasi Recommendation
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance	
1.	Perusahaan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) melalui Keputusan Bersama Nomor: 01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Namun, Pedoman tersebut belum dilakukan pemutakhiran atas adanya Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-02/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. The Company has established a Good Corporate Governance Code through Joint Decree Number: 01/SKB/1/XII/2020 - KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Good Corporate Governance Implementation Guidelines. However, the Code has not been updated due to the Minister of SOE Regulation number: PER-02/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Minister of SOE Regulation number: PER-03/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.	Direkomendasikan agar Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) Nomor: 01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dilakukan harmonisasi perubahan ketentuan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-02/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. It is recommended that the Good Corporate Governance Code Number: 01/SKB/1/XII/2020 - KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated 30 December 2020 be adjusted to the Minister of SOE Regulation number: PER-02/MBU/03/2023 dated 24 March 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Minister of SOE Regulation number: PER-03/MBU/03/2023 dated 20 March 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	
1.	Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi melalui Keputusan Dewan Pengawas nomor: KEP-05/DP-Jamkrindo/III/2018 tanggal Maret 2018 tentang Kebijakan Dewan Pengawas Terkait Mekanisme Pemberian Persetujuan/Tanggapan/Pendapat terhadap Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Namun, atas kebijakan tersebut belum dilakukan harmonisasi dikarenakan masih menggunakan nama "Perusahaan Umum (Perum)" sebagaimana Akte nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 perihal Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Jamkrindo yang seharusnya menjadi "Perseroan Terbatas (PT)" serta perubahan nomenklatur "Dewan Pengawas" yang seharusnya menjadi "Dewan Komisaris" semenjak perubahan Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (PT). The Board of Commissioners has a policy regarding the mechanism for granting approval/response/opinion to the draft RJPP submitted by the Board of Directors. It is done through the Decree of the Board of Supervisors number: KEP-05/DP-Jamkrindo/III/2018 dated March 2018 regarding the Policy of the Board of Supervisors Regarding the Mechanism for Granting Approval/response/opinion to the Draft of the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP). However, the policy has not been adjusted because it still uses the name "Public Company (Perum)" as stated in Deed number 25 dated February 24, 2020 regarding the Deed of Establishment of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as Jamkrindo which should be a "Limited Liability Company (PT)". Also, changes in the nomenclature of the "Supervisory Board" which should be the "Board of Commissioners" since the Company has changed to a Limited Liability Company (PT).	Direkomendasikan agar Perusahaan melakukan inventarisir terkait kebijakan yang dikelola oleh Dewan Komisaris untuk dilakukan harmonisasi perubahan ketentuan menyesuaikan dengan perubahan status Perusahaan menjadi PT (Perseroan Terbatas) dan nomenklatur yang berlaku. It is recommended that the Company conduct an inventory of the policies managed by the Board of Commissioners to adjust changes in provisions in accordance to the change in the Company's status to PT (Perseroan Terbatas/ Limited Liability Company) and the applicable nomenclature.

Rekomendasi terkait Area of Improvement dalam penerapan GCG di Perusahaan, sebagaimana tercantum pada tabel di atas, menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa poin yang memerlukan perhatian atau tindak lanjut lebih lanjut, secara umum penerapan GCG di Perusahaan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari uraian berikut:

Recommendations related to Areas of Improvement in the implementation of GCG in the Company, as listed in the table above, indicate that although there are several points that require further attention or follow-up, GCG in the Company has been properly implemented. This is shown from the following description:

1. **Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan**

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 6,743 dari bobot sebesar 7,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 96,330%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".

2. **Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal**

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 8,794 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 97,714%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".

3. **Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas**

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 33,673 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 96,208%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".

4. **Aspek Direksi**

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 33,803 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 96,581%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".

5. **Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi**

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 8,879 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 98,656%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".

6. **Aspek Lainnya**

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 4,375 dari bobot sebesar 5,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 87,500%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".

1. **Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance**

Based on the assessment results that was conducted on this aspect, the score achieved is 6,743 out of 7,000 or equivalent to an achievement percentage of 96.330%. This shows that the commitment to implementing GCG continuously in the Company has been "VERY GOOD".

2. **Aspects of Shareholders and GMS/Capital Owners**

Based on the assessment results that was conducted on this aspect, the score achieved is 8,794 out of 9,000 or equivalent to an achievement percentage of 97.714%. This shows that the commitment to implementing GCG in a sustainable in the Company has been "VERY GOOD".

3. **Aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board**

Based on the results of the assessments that was conducted on this aspect, the score achieved is 33,673 out of 35,000 or equivalent to an achievement percentage of 96.208%. This shows that the commitment to implementing GCG in a sustainable manner the Company has been "VERY GOOD".

4. **Aspects of the Board of Directors**

Based on the results of the assessment that was conducted on this aspect, the score achieved is 33,803 out of 35,000 or equivalent to an achievement percentage of 96.581%. This shows that the commitment to implementing GCG in a sustainable manner in the Company has been "VERY GOOD".

5. **Information Disclosure and Transparency Aspects**

Based on the results of the assessment that was conducted on this aspect, the score achieved is 8,879 out of 9,000 or equivalent to an achievement percentage of 98.656%. This shows that the commitment to implementing GCG in a sustainable manner in the Company has been "VERY GOOD".

6. **Other Aspects**

Based on the results of the assessment that was conducted on this aspect, the score achieved is 4,375 out of 5,000 or equivalent to an achievement percentage of 87.500%. This shows that the commitment to implementing GCG in a sustainable manner in the Company has been "VERY GOOD".

Tren Perkembangan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tercatat bahwa sejak dilakukannya assessment GCG pada tahun 2015, hasil atau skor assessment tersebut terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Selain itu, assessment ini juga disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta praktik-praktik terbaik (best practice) dalam penerapan GCG, sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan. Hasil assessment ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa depan.

Development Trend of Good Corporate Governance Implementation Assessment

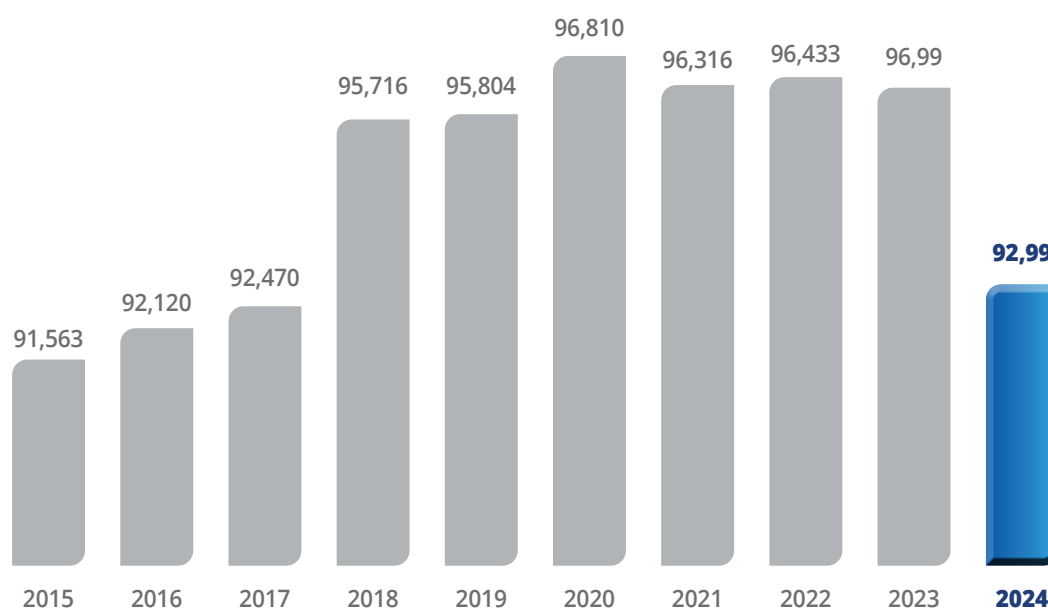
It was evident that since the GCG assessment was conducted in 2015, the assessment results or scores have continued to show improvement. This improvement reflects the Company's commitment in implementing GCG principles in accordance to the recommendations. This assessment is also adjusted to applicable regulations and the best practices in GCG implementation, so as to identify areas that require improvement or refinement. The results of this assessment are valuable inputs for the Company in making future resolutions.

Berikut adalah gambaran singkat mengenai riwayat proses penilaian penerapan GCG di Jamkrindo:

The following is a brief overview of the history of the GCG implementation assessment process in Jamkrindo:

Pengukuran GCG GCG Measurement	Tahun Buku Fiscal Year	Assessor	Skor (%) Score (%)	Kategori Category
Self Assessment	2024	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self-Assessment Team	92,99	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2023	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self-Assessment Team	96,268	Sangat Baik Very Good
Assessment	2022	PT Cita Negeri Amanah	96,433	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2021	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self-Assessment Team	96,316	Sangat Baik Very Good
Assessment	2020	PT Cita Negeri Amanah	96,810	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2019	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self Assessment Team	95,804	Sangat Baik Very Good
Assessment	2018	PT Cita Negeri Amanah	95,716	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2017	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self Assessment Team	92,470	Sangat Baik Very Good
Assessment	2016	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, & Ali	92,120	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2015	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self Assessment Team	91,563	Sangat Baik Very Good

Tren Perkembangan Skor Assessment GCG Jamkrindo, 2015-2024
Jamkrindo GCG Assessment Score Development, 2015-2024



PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Pemegang Saham dan Informasi Terkait Entitas Induk dan Entitas Pemilik Akhir

Berawal dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing badan usaha, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mengubah status hukum Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 yang berlaku sejak 17 Februari 2020. Proses transformasi tersebut resmi dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484.AH.OI.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), dan ditandatangani pada 24 Februari 2020 di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Langkah transformasi ini diperkuat pada 9 April 2020, PT Jamkrindo (Persero) mengalami perubahan status dan nama. Perubahan ini didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 02 tanggal 09 April 2020. Dengan demikian, nama dan status Jamkrindo berubah menjadi PT Jamkrindo.

Pada 8 Maret 2021, dilakukan revisi terhadap Akta Nomor 02 tanggal 9 April 2020 melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 10 tanggal 8 Maret 2021. Revisi ini mencakup penambahan modal dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Melalui akta tersebut, struktur kepemilikan saham PT Jamkrindo juga berubah. Pemegang saham terdiri dari 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.365.160 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah); dan 10.638.732 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.638.732.000.000 (sepuluh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Hak, Kewajiban dan Wewenang Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Saham Seri A Dwiwarna merupakan saham yang memberikan hak-hak istimewa kepada pemegangnya. Saham ini hanya dimiliki secara khusus oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Hak-hak istimewa tersebut mencakup kewenangan untuk memberikan persetujuan dalam Rapat

Shareholders and Information Related To Parent Entities and Ultimate Owner Entities

Starting from the need to improve efficiency and competitiveness of business entities, the government took a strategic measure by changing the legal status of Perum Jamkrindo to become a Limited Liability Company. This change was stipulated through Government Regulation Number 11 of 2020 which took effect on February 17, 2020. This decision was established by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00011484.AH.OI.01 of 2020 concerning the Ratification of the Establishment of a Limited Liability Company of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), and signed on February 24, 2020 at the Ministry of SOE Building, Jakarta.

This transformation measure was strengthened on April 9, 2020, where PT Jamkrindo (Persero) underwent a change in its status and name. This amendment is based on the Deed of Decree of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia regarding the Amendment of Articles of Association No. 02 dated April 09, 2020. Thus, the name and status of Jamkrindo changed to PT Jamkrindo.

On March 8, 2021, a change was made to Deed Number 02 dated April 9, 2020 through the Deed of Resolution of the Shareholders of the Company (Persero) regarding Amendments to the Articles of Association Number 10 dated March 8, 2021. This revision includes a capital increase and a restatement of the Company's Articles of Association.

Through this deed, the shareholding structure of PT Jamkrindo also changed. The shareholders consist of 1 (one) series A Dwiwarna Shares, with a total nominal value of IDR 1,365,160 (one million three hundred sixty five thousand one hundred sixty rupiah); and 10,638,732 (ten million six hundred thirty eight thousand seven hundred thirty two) series B shares, each share with a nominal value of IDR 1,000,000 (one million rupiah), with a total nominal value of IDR 10,638,732,000,000 (ten trillion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty two million rupiah).

Rights, Obligations, and Authorities of Shareholders

Based on the Company's Articles of Association, Series A Dwiwarna Shares are shares that provide special rights to the holder. These shares are exclusively owned by the Republic of Indonesia as the holder of Series A Dwiwarna Shares. The special rights include the authority to give approval in the General Meeting of Shareholders (GMS). The mechanism for exercising

Umum Pemegang Saham (RUPS). Mekanisme penggunaan hak ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait hal-hal berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
2. Persetujuan perubahan Permodalan;
3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
5. Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perusahaan;
6. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Persetujuan penggunaan laba;
10. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu;
11. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
12. Pengusulan agenda Rapat Umum Pemegang Saham;
13. Pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Kecuali Hak-hak istimewa sebagaimana di atas, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan hak tentang penggunaan laba.

RUPS dan Jenis-jenisnya

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi tugas, fungsi, maupun wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, hal ini tidak mengurangi hak RUPS untuk menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Sebagai organ tertinggi Perusahaan, kewenangan RUPS tetap dibatasi oleh ketentuan Undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan RUPS merupakan aspek yang esensial dalam melindungi dan menjalankan hak-hak pemegang saham, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Sebagai salah satu organ utama dalam GCG, RUPS berfungsi sebagai forum bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting. RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. Namun, perlu ditekankan bahwa RUPS maupun pemegang saham tidak diperkenankan mengintervensi tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Komisaris atau Direksi.

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS dibagi menjadi dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya atau RUPS Luar Biasa.

this right is made in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association as well as the prevailing laws and regulations, particularly in relation to the following matters:

1. Approval of amendments to the Articles of Association;
2. Approval of changes in Capital;
3. Approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
4. Approval related to merger, consolidation, acquisition, separation, and dissolution;
5. Request and access to Company data and documents;
6. Approval of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
7. Approval of the transfer of assets based on the Articles of Association requires approval from the General Meeting of Shareholders;
8. Approval regarding the participation and reduction of the percentage of equity participation in other companies, which according to the Articles of Association, require the approval from the General Meeting of Shareholders;
9. Approval of the use of profits;
10. Approval of long-term investments and long-term financing that is deemed important by the Articles of Association;
11. Approval of the General Meeting of Shareholders;
12. Proposing the agenda for the General Meeting of Shareholders;
13. Proposing candidates for members of the Board of Directors and candidates for members of the Board of Commissioners.

With the exception of the above privileges, Series B Shareholders have the same rights with respect to the utilization of profits.

GMS and its Types

The GMS and/or Shareholders do not have the authority to intervene in the duties, functions, or authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors. However, this does not reduce the GMS's rights to exercise its authority as stipulated in the Articles of Association and laws and regulations. As the highest organ of the Company, the authority of the GMS is still limited by the provisions of the Law, as stated in Article 75 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The implementation of the GMS is an essential aspect in protecting and exercising the rights of shareholders, in accordance with GCG principles. As one of the main organs in GCG, the GMS serves as a forum for shareholders to make important resolutions. The GMS has authority that is not possessed by the Board of Directors or the Board of Commissioners. However, it should be emphasized that neither the GMS nor the shareholders are allowed to intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Referring to the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, GMS is divided into two types, namely Annual GMS and Other/Extraordinary GMS.

Jenis-jenis RUPS Types of GMS

RUPS Tahunan

yang diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

Annual GMS

Is held to discuss the Company's annual report and annual calculations and is held no later than 6 (six) months after the fiscal year.

RUPS Lainnya/Luar Biasa

yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

Other/Extraordinary GMS

which can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners or Shareholders to determine matters that are not carried out at the Annual GMS.

Di samping dua jenis RUPS yang telah disebutkan, pemegang saham juga dapat mengambil keputusan melalui mekanisme Keputusan Sirkuler. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham membuat keputusan di luar forum RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Keputusan RUPS, asalkan seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis terhadap usulan yang diajukan. Mekanisme ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Baik RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya, memiliki wewenang tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan. Forum ini juga menjadi wadah bagi pemegang saham untuk melaksanakan hak dan wewenang dalam pengelolaan Perusahaan.

In addition to the two types of GMS mentioned above, shareholders can also make resolutions through the Circular Resolution mechanism. Circular Resolution mechanism allows shareholders to make resolutions outside the GMS forums. A Circular Resolution has the same legal force as a GMS Resolution, provided that all shareholders give their written consent to the proposal. This mechanism is in accordance with the provisions of Article 91 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Both the Annual GMS and Other GMS have the highest authority in the Corporate Governance structure. This forum is also a forum for shareholders to exercise their rights and authorities in the management of the Company.

Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah mengadakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024
2. RUPS Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Implementation of GMS Throughout 2024

Throughout 2024, the Company held a total of 2 (two) GMS, namely:

1. GMS concerning the Ratification of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP)
2. GMS concerning the Annual Report and the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 GMS concerning the Ratification of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP)

Hari/Tanggal Day/Date	:	Selasa, 30 Januari 2024 Tuesday, January 30, 2024
Waktu Time	:	19.00 s.d 19.58 WIB 19.00 to 19.58 Western Indonesian Time
Tempat Location	:	Financial Hall, Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, RT.5/RW 3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 Financial Hall, Graha CIMB Niaga Building 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, RT.5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru Subdistrict, South Jakarta 12190
Peserta yang Hadir Attendees	:	1. Hendrika Nora Osloi Sinaga - Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN Hendrika Nora Osloi Sinaga - Assistant Deputy for Insurance Services and Pension Funds of the Ministry of SOEs 2. Hexana Tri Sasongko - Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Hexana Tri Sasongko - President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) 3. Akhmad Purwakajaya - Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia Akhmad Purwakajaya - President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia 4. Henry Panjaitan - Direktur Bisnis Penjaminan PT Jaminan Kredit Indonesia Henry Panjaitan - Director of Business Guarantee PT Jaminan Kredit Indonesia 5. Suwarsito - Direktur Operasional & Jaringan PT Jaminan Kredit Indonesia Suwarsito - Director of Operations & Network PT Jaminan Kredit Indonesia

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024

GMS concerning the Ratification of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP)

Peserta yang Hadir Attendees

6. Achmad Ivan S Soeparno – Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko PT Jaminan Kredit Indonesia
Achmad Ivan S Soeparno - Director of Human Capital Management, General Affairs, and Risk Management of PT Jaminan Kredit Indonesia
7. Abdul Bari – Direktur Kelembagaan & Layanan PT Jaminan Kredit Indonesia
Abdul Bari - Director of Institutional & Services of PT Jaminan Kredit Indonesia
8. Alia Nur Fitri – Direktur Keuangan dan Investasi PT Jaminan Kredit Indonesia
Alia Nur Fitri - Director of Finance and Investment PT Jaminan Kredit Indonesia
9. Krisna Wijaya – Komisaris Utama PT Jaminan Kredit Indonesia
Krisna Wijaya - President Commissioner of PT Jaminan Kredit Indonesia
10. Desty Arlaini – Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia
Desty Arlaini - Commissioner of PT Jaminan Kredit Indonesia
11. Muhammad Muchlas Rowi – Komisaris Independen PT Jaminan Kredit Indonesia
Muhammad Muchlas Rowi - Independent Commissioner of PT Jaminan Kredit Indonesia
12. Hernita Alius – Komisaris Independen PT Jaminan Kredit Indonesia
Hernita Alius - Independent Commissioner of PT Jaminan Kredit Indonesia
13. Angger P Yuwono – Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia
Angger P Yuwono - Commissioner of PT Jaminan Kredit Indonesia

Pihak Independen yang Melakukan Perhitungan Suara

Independent Parties Conducting Vote
Counts

: Tidak Ada
None

Keputusan yang diambil dalam RUPS telah tercantum dalam Risalah Rapat No. 01/RUPS/DIR/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil melalui musyawarah mufakat. Berikut adalah hasil keputusan RUPS, serta pelaksanaannya dan tindak lanjut oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2024:

The resolutions adopted in the GMS were written down in the Minutes No. 01/RUPS/DIR/I/2024 dated January 30, 2024 concerning the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024. All resolutions in the GMS are made through deliberation and consensus. The following are the GMS resolutions, as well as their implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2024:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow-up on Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 1:

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024

Agenda 1 Resolution:

Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 including the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for 2024

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Neraca)
2. Laporan Laba-Rugi Konsolidasian
3. Arus Kas Konsolidasian
4. Belanja Modal Konsolidasian

Follow-up on Resolutions:

1. Consolidated Statement of Financial Statement (Balance Sheet)
2. Consolidated Income Statement
3. Consolidated Cash Flow
4. Consolidated Capital Expenditure

Keputusan Mata Acara 2:

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2022

Agenda 2 Resolution:

Ratification of the Social and Environmental Responsibility Program-Work Plan and Budget (RKA-TJSL) of 2022

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

1. Program usaha Mikro Kecil (PUMK) Tahun 2024
2. Program Non PUMK Tahun 2024

Follow-up on Resolutions:

1. Micro & Small Business Funding Program (PUMK) of 2024
2. Non PUMK Programs in 2024

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow-up on Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 3:

Penetapan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2024

Agenda 3 Resolution:

Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators) between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders in 2024

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Menetapkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia dengan Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/ MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini.

Follow-up on Resolutions:

Established a Management Contract (Key Performance Indicators) between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2024. Refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-11/ MBU/11/2020 dated November 12, 2020 concerning Management Contracts and The Annual Management Contracts of the Board of Directors of State-Owned Enterprises as attached which is an integral part of the Minutes of this GMS.

Keputusan Mata Acara 4:

Penetapan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2024

Agenda 4 Resolution:

Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators) between the Board of Commissioners and Shareholders in 2024

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Menetapkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) antara Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia dengan Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini

Follow-up on Resolutions:

Established a Management Contract (Key Performance Indicators) between the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia and the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2024 which refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 Number PER-09 / MBU / 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Principles as attached which is an inseparable part of the Minutes of this GMS.

RUPS Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 GMS concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year

Hari/Tanggal
Day/Date

: Senin, 8 Juli 2024
Monday, July 8, 2024

Waktu
Time

: 16.30 – 17.45 WIB
16.30 to 17.45 Western Indonesian Time

Tempat
Location

: Gedung Jamkrindo Lantai 10
Jl. Angkasa Blok B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran
Jamkrindo Building 10th Floor
Jl. Angkasa Block B9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran

Peserta yang Hadir
Attendees

1. Hendrika Nora Oslo Sinaga - Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN
Hendrika Nora Oslo Sinaga - Assistant Deputy for Insurance Services and Pension Funds of the Ministry of SOEs
2. Hexana Tri Sasongko - Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Hexana Tri Sasongko - President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
3. Akhmad Purwakajaya - Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia
Akhmad Purwakajaya - President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia
4. Henry Panjaitan - Direktur Bisnis Penjaminan PT Jaminan Kredit Indonesia
Henry Panjaitan - Director of Business Guarantee PT Jaminan Kredit Indonesia
5. Suwarsito - Direktur Operasional & Jaringan PT Jaminan Kredit Indonesia
Suwarsito - Director of Operations & Network PT Jaminan Kredit Indonesia
6. Achmad Ivan S Soeparno - Direktur Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko PT Jaminan Kredit Indonesia
Achmad Ivan S Soeparno - Director of Human Capital Management, General Affairs, and Risk Management of PT Jaminan Kredit Indonesia
7. Abdul Bari - Direktur Kelembagaan & Layanan PT Jaminan Kredit Indonesia
Abdul Bari - Director of Institutional & Services of PT Jaminan Kredit Indonesia
8. Alia Nur Fitri - Direktur Keuangan dan Investasi PT Jaminan Kredit Indonesia
Alia Nur Fitri - Director of Finance and Investment PT Jaminan Kredit Indonesia

RUPS Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023
GMS concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year

Peserta yang Hadir

Attendees

9. Krisna Wijaya – Komisaris Utama PT Jaminan Kredit Indonesia
Krisna Wijaya - President Commissioner of PT Jaminan Kredit Indonesia
10. Desty Arlaini – Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia
Desty Arlaini - Commissioner of PT Jaminan Kredit Indonesia
11. Muhammad Muchlas Rowi – Komisaris Independen PT Jaminan Kredit Indonesia
Muhammad Muchlas Rowi - Independent Commissioner of PT Jaminan Kredit Indonesia
12. Hernita Alius – Komisaris Independen PT Jaminan Kredit Indonesia
Hernita Alius - Independent Commissioner of PT Jaminan Kredit Indonesia
13. Angger P Yuwono – Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia
Angger P Yuwono - Commissioner of PT Jaminan Kredit Indonesia

Pihak Independen yang Melakukan Perhitungan Suara

Independent Parties Conducting Vote Counts

: Tidak Ada
None

Keputusan yang diambil dalam RUPS telah tercantum dalam Risalah Rapat No. 02/RUPS/DIR/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil melalui musyawarah mufakat. Berikut adalah hasil keputusan RUPS, serta pelaksanaannya dan tindak lanjut oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023:

The resolutions adopted in the GMS are written down in the Minutes No. 02/RUPS/DIR/VII/2024 dated July 8, 2024 concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the 2023 Fiscal Year. All resolutions in the GMS are made through deliberation and consensus. The following are the GMS resolutions, as well as their implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2023:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow-up on the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Agenda 1 Resolution:

Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements of the Fiscal Year, Approval of the Board of Commissioners Monitoring Report, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year, and to release and discharge of all responsibilities to all Board members for the management and monitoring conducted in the 2023 Fiscal Year.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Neraca)
2. Laporan Laba-Rugi Konsolidasian
3. Arus Kas Konsolidasian
4. Belanja Modal Konsolidasian

Follow-up on Resolutions:

1. Consolidated Statement of Financial Position (Balance Sheet)
2. Consolidated Income Statement
3. Consolidated Cash Flow
4. Consolidated Capital Expenditure

Keputusan Mata Acara 2:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023

Resolutions of Agenda 2:

Determination of the Use of the Company's Net Income for the 2023 Fiscal Year

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebesar Rp 1.437.013.882.511,- (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar 75% dari laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau sebesar Rp 1.077.760.411.883,- (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai.

2. Selisih sebesar laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dikurangi dividen tunai, dimasukkan sebagai cadangan.

Follow-up on Resolutions:

Determined the use of profit for the year attributable to owners of the parent entity for the 2023 Fiscal Year amounting to IDR 1,437,013,882,511 (one trillion four hundred thirty-seven billion thirteen million eight hundred eighty-two thousand five hundred eleven rupiah) with the following details:

1. A total of 75% of the profit for the year attributable to owners of the parent entity or IDR 1,077,760,411,883 (one trillion seventy seven billion seven hundred sixty million four hundred eleven thousand eight hundred eighty three rupiah) was distributed as cash dividends.
2. The difference in the total profit for the year attributable to owners of the parent entity minus cash dividends is included as a reserve.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow-up on the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 3:

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Resolutions of Agenda 3:

Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and Other Benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners of the 2024 Fiscal Year, as well as Bonuses/Performance Incentive/Special Incentive for the 2023 Fiscal Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kementerian BUMN selaku institusi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris :
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atau kinerja Tahun Buku 2023; dan
 - b. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B setelah berkonsultasi kepada Kementerian BUMN selaku institusi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi :
 - a. Tantiem/Insentif kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023; dan
 - b. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.

Follow-up on Resolutions:

1. Authorized PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as a Series B Shareholder with prior consultation with the Ministry of SOEs as the institution of Series A Dwiwarna Shareholders to determine the members of the Board of Commissioners:
 - a. Bonuses/Performance Incentive/Special Incentive for Good Performance for the 2023 Fiscal Year; and
 - b. Honorarium, benefits, and facilities for the 2024 Fiscal Year.
2. Authorized the Board of Commissioners of the Company with prior written approval from the Series B Shareholders after consulting with the Ministry of SOEs as the institution of Series A Dwiwarna Shareholders to appoint Members of the Board of Directors:
 - a. Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for Good Performance for the 2023 Fiscal Year; and
 - b. Salary, Benefits, and Facilities for the 2024 Fiscal Year.

Keputusan Mata Acara 4:

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2024

Resolutions of Agenda 4:

Appointment of Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and Non PUMK for the 2024 Fiscal Year

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

1. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024, akan ditetapkan secara tersendiri.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Seri 8 untuk menetapkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan usulan/evaluasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Follow-up on Resolutions:

1. The appointment of a public accounting firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year and the Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report. Meanwhile, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year period will be determined separately.
2. Delegated authority to the Series 8 Shareholders to determine the public accounting firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year and the Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year 2024 by taking into account the proposals/evaluations submitted by the Company's Board of Commissioners and guided by the provisions of the prevailing laws and regulations.
3. Delegated the authority to the Board of Commissioners to determine the amount of audit fees, additional scope other than as stated above, and other terms of appointment that are reasonable for the Public Accounting Firm.

Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2023

Di tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan 2 kali RUPS, yang diuraikan sebagai berikut:

1. RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
2. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023

Implementation of GMS Throughout 2023

Throughout 2023, the Company held 2 GMS, as described below:

1. GMS concerning the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP)
2. GMS concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year

RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
GMS concerning the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP)

Hari/Tanggal Day/Date	: : Senin, 30 Januari 2023 Monday, January 30, 2023
Waktu Time	: : 22.40 WIB s/d 23.24 WIB 22.40 to 23.24 Western Indonesian Time
Tempat Location	: : Offline : Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2 Online : Video Conference Zoom Meeting ID : 851 3077 0703 Password : RUPS 2023 Offline : Financial Hall Graha CIMB Niaga 2nd Floor Online : Video Conference Zoom Meeting ID : 851 3077 0703 Password : GMS of 2023
Peserta yang Hadir Attendees	: : 1. Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi Dan Dana Pensiun Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham seri A 2. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Pemegang Saham seri B 3. Direksi PT Jamkrindo 4. Dewan Komisaris PT Jamkrindo 1. Acting Deputy Assistant for Insurance Services and Retirement Funds of the Ministry of SOEs and concurrent Series A Shareholder 2. President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia and concurrent Series B Shareholder 3. Board of Directors of PT Jamkrindo 4. Board of Commissioners of PT Jamkrindo
Pihak Independen yang Melakukan Perhitungan Suara Independent Parties Conducting Vote Counts	: : Tidak Ada None

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Surat PT Bahana PUI (Persero) No. B.293/EKT/DIRUT/RUPS/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2023. Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The GMS Resolutions have been stated in PT Bahana PUI (Persero) Letter No. 01/DIRUT/RUPS/II/2023 dated January 30, 2023 concerning the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023. All GMS resolutions are made with deliberation and consensus. The following are the results of the GMS resolutions, as well as their implementation and follow-up by the Company's Management up until the end of 2023:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow-up on the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 1:

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023.

Agenda 1 Resolution:

Ratification of the 2022 Company's Work Plan and Budget (RKAP), which includes the Board of Commissioners 2023 Work Plan and Budget

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Neraca)
2. Laporan Laba-Rugi Konsolidasian
3. Arus Kas Konsolidasian
4. Belanja Modal Konsolidasian

Follow-up on Resolutions:

1. Consolidated Statement of Financial Position (Balance Sheet)
2. Consolidated Income Statement
3. Consolidated Cash Flow
4. Consolidated Capital Expenditure

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow-up on the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 2:

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023

Resolutions of Agenda 2:

Ratification of the 2023 Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL)

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

1. Program usaha Mikro Kecil (PUMK) Tahun 2023
2. Program Non PUMK Tahun 2023

Follow-up on Resolutions:

1. 2023 Micro & Small Business Funding Program (PUMK)
2. Non PUMK Programs in 2023

Keputusan Mata Acara 3:

Penetapan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023

Resolutions of Agenda 3:

Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators) between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders in 2023

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Menetapkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia dengan Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini.

Follow-up on Resolutions:

Established a Management Contract (Key Performance Indicators) between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2023, which refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-11/MBU/11/2020 dated November 12, 2020 concerning Management Contracts and The Annual Management Contracts of the Board of Directors of State-Owned Enterprises as attached which is an integral part of the Minutes of this GMS.

Keputusan Mata Acara 4:

Penetapan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023

Resolutions of Agenda 4:

Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators) between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders in 2023

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Menetapkan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) antara Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia dengan Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini.

Follow-up on Resolutions:

Established a Management Contract (Key Performance Indicators) between the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia and the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2023. It refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 in conjunction with Number PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Principles as attached which is an integral part of the Minutes of this GMS.

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023

GMS concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year

Hari/Tanggal

Day/Date

: Selasa, 27 Juni 2023
: Tuesday, June 27, 2023

Waktu

Time

: 08.30 s/d 09.28 WIB
: 08.30 to 09.28 Western Indonesian Time

Tempat

Location

: Financial Hall, Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 2
: Financial Hall, Graha CIMB Niaga Building 2nd Floor

Peserta yang Hadir

Attendees

1. Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi Dan Dana Pensiun Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham seri A
2. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Pemegang Saham seri B
3. Direksi PT Jamkrindo
4. Dewan Komisaris PT Jamkrindo

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023
GMS concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year

Peserta yang Hadir

Attendees

1. Acting Deputy Assistant for Insurance Services and Retirement Funds of the Ministry of SOEs and concurrent Series A Shareholder
2. President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia and concurrent Series B Shareholder
3. Board of Directors of PT Jamkrindo
4. Board of Commissioners of PT Jamkrindo

Pihak Independen yang Melakukan Perhitungan Suara

Independent Parties Conducting Vote Counts

Tidak Ada
None

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Surat Kementerian BUMN No. B.1368/EKT/DIRUT/RUPS/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku.

The GMS Resolution have been stated in the SOE Ministry Letter No. 02/DIRUT/RUPS/VI/2023 dated June 27, 2023 concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year.

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

All GMS resolutions are made with deliberation and consensus. The following are the GMS resolutions, as well as their implementation and follow-up by the Company's Management until the end of 2023:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow-up on the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 1:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022.

Agenda 1 Resolution:

Approval of the Company's Annual Report including the Report on the Implementation of Social and Environmental Responsibility for the 2022 Fiscal Year and the Board of Commissioners' Monitoring Duties Report as well as the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the 2022 Fiscal Year.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

- Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022.
Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan konsolidasian tahun buku 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sesuai laporannya Nomor 00559/2.1025/AU.1/05/0222-3/1/ IV/2023 tanggal 06 April 2023 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Follow-up on Resolutions:

- Approved the Annual Report regarding the condition and operations of the Company during the 2022 fiscal year, including the Board of Commissioners' Monitoring Duties Report for the 2022 fiscal year.
Ratified the consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal year 2022 ended December 31, 2022. This report has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan in accordance with its report Number 00559/2.1025/AU.1 /05/0222-3/1/ IV/2023 dated April 06, 2023 with the opinion of "fair, in all material respects". The consolidated financial position of the Company and Subsidiaries as of December 31, 2022, as well as their consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The Company also granted full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performed during the fiscal year ended on December 31, 2022, as long as these actions do not constitute criminal and/or violating applicable legal provisions and procedures, recorded in the Company's Financial Statement and not in conflict with the provisions of laws and regulations.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat

The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow-up on the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 2:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Perseroan Tahun Buku 2022

Resolutions of Agenda 2:

Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company's Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Fiscal Year

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Menyetujui Laporan Tahunan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sesuai laporannya Nomor 00782/2.1025/AU.2/09/0222-3/1/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, tercatat pada Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Follow-up on Resolutions:

Approved the Annual Report of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 fiscal year and ratified the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program for the 2022 fiscal year. Which have been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Rekan in accordance with the report Number 00782/2.1025/AU.2/09/0222-3/1/IV/2023 dated April 28, 2023 with the opinion of "fair in all material respects". As well as granted release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and monitoring of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 fiscal year, as long as such actions do not constitute a criminal offense and/or violate applicable legal provisions and procedures, are recorded in the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 fiscal year, and do not conflict with the provisions of laws and regulations.

Keputusan Mata Acara 3:

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2022

Resolutions of Agenda 3:

Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators) between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders in 2023

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

1. Menetapkan tantiem/insentif kinerja/insentif khusus kinerja tahun buku 2022 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris, akan ditetapkan secara tersendiri.
2. Wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023, setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Follow-up on Resolutions:

1. Determined bonuses/performance incentives/special performance incentives for the 2022 fiscal year and salary/ honorarium along with facilities and allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2023 fiscal year, which to be determined separately.
2. Authority and power were given to Series B Shareholders to determine the amount of bonuses/performance incentives/special incentives for good performance in 2022. Also, determined salaries/honorariums, allowances, and facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2023, after first consulting with Series A Dwiwarna Shareholder.

Keputusan Mata Acara 4:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022

Resolutions of Agenda 4:

Determine the Use of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022 sebesar Rp1.279.834.944.864,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp959.876.208.648,- (Sembilan ratus lima puluh Sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagikan sebagai dividen tunai.
2. Dividen tunai yang diberikan kepada Pemegang Saham Seri B dapat dipertimbangkan untuk penguatan kapasitas keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dalam rangka penyelesaian penugasan Pemerintah kepada PT BPUI dan tetap menjaga akuntabilitas atas penggunaan dividen tunai tersebut.

Selisih sebesar laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dikurangi dividen tunai, dimasukkan sebagai cadangan.

Follow-up on Resolutions:

Determined the use of profit for the current year attributable to the owner of the parent entity for the 2022 fiscal year amounting to IDR 1,279,834,944,864,- (one trillion two hundred seventy-nine billion eight hundred thirty-four and nine hundred forty-four thousand eight hundred and sixty-four rupiah) with the following details:

1. A total of IDR 959,876,208,648,- (Nine hundred fifty-nine billion eight hundred seventy-six million two hundred eight thousand six hundred and forty-eight rupiah) or 75% (seventy-five percent) of the profit for the year attributable to owners of the parent entity distributed as cash dividends.
2. Cash dividends given to Series B Shareholders can be considered to strengthen the financial capacity of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in the context of completing Government assignments to PT BPUI and maintaining accountability for the use of the cash dividends.

The difference in the amount of profit for the year attributable to the owners of the parent entity minus cash dividends is included as a reserve.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow-up on the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 5:

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Periode Tahun Buku 2023

Resolutions of Agenda 5:

Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators) between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders in 2023

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

1. Penetapan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan PUMK Tahun Buku 2023, akan ditetapkan secara tersendiri
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2023 dan Laporan TJSL, serta Laporan Keuangan PUMK dengan memperhatikan usulan/evaluasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP Pengganti, termasuk menetapkan besaran imbal jasa audit dan menetapkan kondisi serta penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun

Follow-up on Resolutions:

1. Appointed a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statement for the 2023 Fiscal Year and the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Statement for the 2023 Fiscal Year, which to be determined separately
2. Granted authority and power to Series B Shareholders to determine the Public Accounting Firm that will audit the 2023 Consolidated Financial Statement and Corporate Social Responsibility (CSR) Report, as well as the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Statement by considering the proposals/evaluations submitted by the Board of Commissioners and guided by the provisions of the applicable laws and regulations
3. 3Granted authority to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm, including determining the amount of audit fees and determining the conditions and appointment, if the appointed Public Accounting Firm is unable to perform or continue its duties for any reason.

Keputusan Mata Acara 6:

Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN RI

Resolutions of Agenda 6:

Ratification of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Menguatkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor:

1. PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN;
 2. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
 3. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN;
- Beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Follow-up on Resolutions:

Confirmed the implementation of Minister of SOEs' Regulation Number:

1. PER-01/MBU/03/2023 concerning Special Assignments as well as Social and Environmental Responsibility (TJSL) Programs for SOEs;
2. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs;
3. PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of SOEs;

And its future changes.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah organ dalam Perseroan yang bertugas mengelola kegiatan Perseroan demi kepentingan dan pencapaian tujuan Perseroan. Direksi memiliki wewenang serta tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan Perseroan. Secara umum, setiap Direktur dapat menjalankan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tanggung jawab dan wewenang yang telah ditentukan. Direksi bertanggung jawab memastikan pengelolaan Perseroan berjalan optimal untuk menghasilkan keuntungan serta menjaga keberlanjutan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan hukum yang berlaku.

The Board of Directors is an organ of the Company tasked with managing the interests and objectives of the Company. The Board of Directors has joint authority and responsibility in the management of the Company. Generally, each Director is able to execute duties and make decisions in accordance with the distribution of responsibilities and authority that has been determined. The Board of Directors is responsible for ensuring that the management of the Company is properly conducted to generate profits and maintain business sustainability in accordance with the articles of association and applicable legal provisions.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman kerja Direksi disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan secara profesional dan sesuai ketentuan. Pedoman ini ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 03/SKB/1/XII/2020-KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual). Board Manual mencakup pengaturan mengenai hari kerja, jam kerja, cuti, dan izin Direksi, serta mekanisme rapat, pengambilan keputusan, penerapan kode etik, dan peningkatan kompetensi Direksi.

Board of Directors Work Guidelines and Rules

The work guidelines of the Board of Directors are prepared to ensure the execution of duties and responsibilities are done in a professional manner and in accordance with the provisions. This guideline is established through the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 03/SKB/1/XII/2020-KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning the Work Guidelines of the Board of Commissioners and the Board of Directors (*Board Manual*). The Board Manual includes arrangements regarding working days, working hours, leave, and permission of the Board of Directors, as well as meeting mechanisms, decision-making, implementation of the code of ethics, and improvement of the competence of the Board of Directors.

Kriteria Direksi

Penetapan kriteria Direksi di Perusahaan dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, Perusahaan mengikuti panduan yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Board of Directors Criteria

The determination of the Board of Directors criteria in the Company is designed to ensure compliance with applicable regulations. In this regard, the Company follows the guidelines set out in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Directors of State-Owned Enterprises.

Aturan tersebut mencakup ketentuan formal, substansial, serta persyaratan tambahan yang wajib dipenuhi oleh calon Direksi, termasuk:

The rules cover formal, material, and additional requirements that must be met by prospective members of the Board of Director members, as describe below:

Persyaratan Requirements	Uraian Description
Formal Formal	1. Cakap melaksanakan perbuatan hukum
	2. Tidak pernah dinyatakan pailit
	3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
	4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
	1. Capable of executing legal actions
	2. Never been declared bankrupt
	3. Never been a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners/ Monitoring Board who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt
	4. Never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances.

Persyaratan Requirements	Uraian Description
Materil Material	1. Integritas 2. Pengalaman 3. Kemampuan untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional 4. Kemampuan bertindak untuk kepentingan Perusahaan, terjamin, dan/atau penerima jaminan 5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan, Terjamin dan/atau penerima jaminan daripada kepentingan pribadi 6. Kemampuan mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan, Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan 7. Kemampuan menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan 8. Serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Persyaratan lainnya Other Requirements	1. Integrity 2. Experience 3. Ability to act in good faith, honestly, and professionally 4. Ability to act for the interest of the Company, the Guaranteed, and/or the Beneficiary 5. Prioritize the interests of the Company, the Guaranteed, and/or the Beneficiary over personal interests 6. Able to make decisions based on independent and objective assessments for the interest of the Company, the Guaranteed, and/or the Beneficiary 7. Able to avoid abuse of authority to gain undue personal advantage or cause harm to the Company 8. As well as other requirements based on the provisions of laws and regulations
	1. Tidak menjabat anggota Direksi pada BUMN, BUMD, serta Badan usaha milik swasta 2. Tidak menjabat anggota Dewan Komisaris pada BUMN 3. Tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/Lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah 4. Tidak menjabat jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 5. Tidak menjabat jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
	1. Not currently serving as a member of the Board of Directors in SOEs, ROEs, and privately owned enterprises 2. Not currently serving as a member of the Board of Commissioners in SOEs 3. Not currently holding other structural and functional positions in central and/or regional government agencies 4. Not currently holding other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party officials, and/or legislative candidates/members and/or Regional Head/Deputy Regional Head Candidates 5. Not currently holding other positions that may cause a conflict of interest

Ketentuan Masa Jabatan

Masa Jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Term of Office

The term of office for members of the Board of Directors is 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2024

Structure and Composition of the Board of Directors in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Tenure
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	SK-21/MBU/07/2023-17/KepSir-PS/ BPUI/ VIII/2023	31 Juli 2023 – 31 Juli 2028 July 31, 2023 - July 31, 2028	Ke-1 1st
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/ X/2022	27 Oktober 2022 – 27 Oktober 2027 October 27, 2022 - October 27, 2027	Ke-1 1st
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of Human Capital Management, General affairs, and Risk Management	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/ X/2022	27 Oktober 2022 – 27 Oktober 2027 October 27, 2022 - October 27, 2027	Ke-1 1st
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan & Layanan Director of Institutional & Services	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/ X/2022	27 Oktober 2022 – 27 Oktober 2027 October 27, 2022 - October 27, 2027	Ke-1 1st
Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/ BPUI/ VIII/2023	31 Juli 2023 – 21 Maret 2026 July 31, 2023 - March 21, 2026	Ke-1 1st
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/ BPUI/ VIII/2023	31 Juli 2023 – 31 Juli 2028 July 31, 2023 - July 31, 2028	Ke-1 1st

Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan.

A brief profile of each member of the Board of Directors is presented in the Company Profile chapter, specifically in the Profile of the Board of Directors section.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 yang diterbitkan pada 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, pengangkatan Direksi Perusahaan harus melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut ini adalah informasi mengenai status Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi Perusahaan.

Board of Directors Fit and Proper Test

In accordance with OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 dated July 27, 2016 concerning the Fit and Proper Test for Candidates for the Main Parties of Financial Services Institutions, the appointment of the Company's Directors must be followed by a Fit and Proper Test conducted by the Financial Services Authority (OJK). The following is the status of the Company's Board of Directors' Fit and Proper Test.

Nama Name	Jabatan Position	Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan Description of Fit and Proper Test Results
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-3/KDK.05/2024 tanggal 12 Januari 2024 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-3/KDK.05/2024 dated January 12, 2024
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-9/KDK.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-3/KDK.05/2024 dated January 12, 2024 KEP-9/KDK.05/2023 dated February 27, 2023
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of Human Capital Management, General affairs, and Risk Management	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-2/KDK.05/2023 tanggal 30 Januari 2023 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-2/KDK.05/2023 dated January 30, 2023
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan & Layanan Director of Institutional & Services	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-9/KDK.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-9/KDK.05/2023 dated February 27, 2023
Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-40/KDK.05/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-40/KDK.05/2021 dated August 27, 2021
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-14/KDK.05/2024 tanggal 7 Februari 2024 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-14/KDK.05/2024 dated February 07, 2024

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan

Kebijakan mengenai Kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi. Dalam pelaksanaannya, Direktur Utama memiliki hak dan wewenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan. Namun, setiap tindakan Direktur Utama harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Direksi. Apabila Direktur Utama berhalangan dengan alasan apapun, maka salah seorang Direktur akan ditunjuk untuk bertindak atas nama Direksi dengan urutan sebagai berikut:

1. Salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
2. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir (b) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;

Company Management Policy

The Company's Management Policy is determined by the Board of Directors. In conducting the Management of the Company, the President Director has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company provided that all the actions of the President Director have been approved in the Board of Directors Meeting. If the President Director is absent for any reason, then one of the Directors will be appointed to act on behalf of the Board of Directors in the following order:

1. One of the Directors appointed by the President Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors;
2. In the event that the President Director does not make an appointment, one of the Directors appointed by and among the existing members of the Board of Directors is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors;
3. In the event that as referred to in point (b) is not executed, the Director who has served the longest as a member of the Board of Directors is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors;

4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang. Direktur sebagaimana dimaksud pada butir (c) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

4. In the event that the Director who has served the longest as a member of the Board of Directors is more than 1 (one) person. The Director as referred to in point (c) is the oldest in age is given authorization to act for and on behalf of the Board of Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, yang dikenal dengan PT Jamkrindo, sebagaimana tercantum dalam dokumen No. 25 tanggal 24 Februari 2020, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Duties and Responsibilities

Based on the Articles of Association of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), otherwise known as PT Jamkrindo, as stated in document No. 25 dated February 24, 2020, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

Tugas Pokok Main Duties

1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan tersebut
Conducting management of the Company for the interests and objectives of the Company and act as Leaders in such management
2. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan
Represent the Company in and out of court
3. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan
Maintain and manage the Company's assets

Tanggung Jawab Responsibilities

1. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan pengelolaan Perusahaan, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perusahaan dan mewakili Jamkrindo di dalam dan di luar pengadilan
The Board of Directors is responsible for implementing regulations and managing the Company, as well as taking legal action for and on behalf of the Company and representing Jamkrindo in and out of court
2. Secara bersama-sama atau individual, bertanggung jawab segala kerugian yang timbul pada kekayaan Perusahaan akibat tindakan Direksi yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan
Together or individually, be responsible for any losses arising from the Company's assets due to the actions of the Directors who violate or neglect their duties and/or obligations as stipulated in Company Laws and Regulations
3. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap
Ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in a timely and thorough manner
4. Tanggung jawab lain sesuai ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Other responsibilities according to the provisions of the Company and the applicable laws and regulation

Pembagian Lingkup Tugas Antar Direksi

Setiap anggota Direksi memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang telah ditetapkan secara rinci dalam Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor: 13/Per-Dir/5/VI/2023 dengan Ketetapan Direksi SO 2023: 01/KD/5/VI/2023 tentang Deskripsi Pekerjaan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Direksi diberikan peran dan wewenang sebagai berikut:

Division of Duties Between Directors

Each member of the Board of Directors has responsibilities and authorities that have been determined in detail in the Regulation of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia Number: 13/Per-Dir/5/VI/2023. With the Decree of the Board of Directors SO 2023: 01/KD/5/VI/2023 concerning Job Descriptions. In conducting daily tasks/duties, the Board of Directors is given the following duties and authorities:

Akhmad Purwakajaya
(Direktur Utama)
(President Director)

Tugas:

1. Pemimpin Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
2. Pemimpin Pengelolaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan.
3. Pemimpin Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
4. Pemimpin Pengelolaan Kegiatan Pengawasan Internal dan Eksternal.
5. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Perusahaan dan Direktorat Utama.
6. Pemimpin Penyusunan Cetak Biru Transformasi Perusahaan.
7. Pemimpin Pengelolaan Strategi Transformation Office.
8. Pemimpin Pelaksanaan Tata Laksana Perusahaan dan Direktorat Utama.
9. Pemimpin Pengelolaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan dan Direktorat Utama.
10. Pemimpin Pengelolaan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Direktorat Utama.
11. Pemimpin Pengelolaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan dan Direktorat Utama.
12. Pemimpin Pengembangan Kompetensi Karyawan yang berada di bawah kewenangannya minimal satu tingkat di bawahnya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan.
13. Pemimpin Penyusunan dan Penyampaian laporan Pelaksanaan Tugas Perusahaan dan Direktorat Utama secara berkala.
14. Pemimpin pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada RUPS, termasuk melakukan pemanggilan RUPS dan lain-lain sesuai ketentuan UU PT.
15. Pemimpin pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya.

Wewenang:

1. Menetapkan dan memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Utama.
3. Memutuskan kegiatan, coverage dan anggaran berdasarkan pengembangan Direktorat Utama.
4. Menyetujui dan menetapkan dokumen pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik/Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Risiko dan Tata Kelola Teknologi Informasi.
5. Menyetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, Standard Operating Prosedur (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan.
6. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan.
7. Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja dibawah Direktorat Utama.
8. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan (Triwulanan).
9. Menyetujui dan menetapkan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur Utama untuk kegiatan koresponden khusus.
11. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan relationship dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas selaku Direktur Utama.

Duties

1. Leading the Management of the Company's Long-Term Plan.
2. Leading the Management of Public Relations and Corporate Communication Activities
3. Leading the management of Social and Environmental Responsibility Activities
4. Leading the Management of Internal and External Monitoring Activities
5. Leading the Implementation of the Internal Control of the Company and Main Directorate.
6. Leading the Preparation of the Company Transformation Blueprint
7. Leading the Management of the Transformation Office Strategy
8. Leading the Implementation of Governance of the Company and Main Directorate
9. Leading the Management and Implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the Company and Main Directorate.
10. Leading the Management and Implementation of Risk Management within the Company and Main Directorate
11. Leading the Management and Implementation of Good Corporate Governance within the Company and Main Directorate.
12. Leading the Employees Competency Development under their authority at least one level below them to meet the specified competency standards.
13. Leading the preparation and submission of reports concerning the implementation of the Company's and Main Directorate's duties on a regular basis.
14. Leading the accountability for the performance of duties to the GMS. It includes convening the GMS and other meetings in accordance with the provisions of the Company Law.
15. Leading the execution of other duties within its scope.

Authority:

1. Establish and approve the Company's Long-Term Plan as well as Work Plan and Budget.
2. Establish systems, procedures, guidelines, and implementation instructions for the Main Directorate.
3. Determine activities, coverage, and budget based on the development of the Main Directorate.
4. Approve and stipulate the guidelines for Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, as well as Information Technology Governance.
5. Approve and establish with other members of the Board of Directors, formulate and stipulate Regulations/Decrees/Policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company.
6. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge according to authority.
7. Determine the main duties and functions and then coordinate the implementation of the duties of the work units under the Main Directorate.
8. Approve the Management Report, the Company's Annual Report, as well as the Company's Activities and Financial Report (Quarterly).
9. Approve and assign other duties in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations.
10. Approve and sign the President Director's authorization for special correspondent activities.
11. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of duties as President Director.

Direksi
Board of Directors

Tugas dan Wewenang
Duties and Authorities

Henry Panjaitan
(Direktur Bisnis
Penjaminan)
(Director of Guarantee
Business)

Tugas:

1. Pemimpin Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Bisnis Penjaminan
2. Pemimpin Pengelolaan Pengembangan Kerja Sama Bisnis Perusahaan.
3. Pemimpin Pengelolaan Kebijakan Terkait Dengan Bisnis Penjaminan.
4. Pemimpin Pengelolaan Marketing.
5. Pemimpin Pengelolaan Portofolio Bisnis Penjaminan.
6. Pemimpin Pengelolaan Penjualan Bisnis Penjaminan.
7. Pengelolaan Bisnis Hubungan Kelembagaan.
8. Pemimpin Pengelolaan Sarana dan Sistem Informasi yang terhubung secara online pada ruang lingkup Bisnis Penjaminan.
9. Pemimpin Pelaksanaan Pemrosesan Penjaminan.
10. Pemimpin Pengelolaan Pengendalian Penjaminan.
11. Pemimpin Pengelolaan Channel of Marketing
12. Pengelolaan Peningkatan Profitabilitas Produk
13. Pengelolaan Riset dan Pengembangan Produk | Penjaminan Baru
14. Pemimpin Pelaksanaan Tata Laksana Direktorat Bisnis Penjaminan.
15. Pemimpin Pengelolaan Manajemen Kinerja Direktorat Bisnis Penjaminan
16. Pemimpin Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Bisnis Penjaminan.
17. Pemimpin Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Direktorat Bisnis Penjaminan.
18. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Direktorat Bisnis Penjaminan.
19. Pemimpin Pengembangan Kompetensi Karyawan yang berada dibawah kewenangannya minimal satu tingkat di bawahnya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan.
20. Pemimpin Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Secara Berkala.
21. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada RUPS, termasuk melakukan pemanggilan RUPS dan lain-lain sesuai ketentuan UU PT.
22. Pemimpin pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya.
23. Melaksanakan tugas sebagai Direktur pengganti sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan dalam Rapat Direksi.

Wewenang:

1. Memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Bisnis Penjaminan.
3. Menyetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, Standard Operating Prosedur (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan.
4. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan.
5. Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Direktorat Bisnis Penjaminan.
6. Memutuskan bisnis penjaminan, coverage dan plafon berdasarkan produk dan layanan.
7. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Bisnis Penjaminan (Triwulanan).
8. Menyetujui dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur untuk kegiatan koresponden khusus.
10. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan relationship dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas terkait Direktorat Bisnis Penjaminan.

Duties:

1. Leading the Management of the Company's Long Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKA) of the Directorate of Guarantee Business
2. Leading the Management and Development of Corporate Business Cooperation.
3. Leading the Policy Management Related to Guarantee Business.
4. Leading the Marketing Management.
5. Leading the Management of Guarantee Business Portfolio.
6. Leading the Management and Sales of Guarantee Business.
7. Management of Institutional Relations Business
8. Leading the Information Systems and Facilities Management that are connected online in the Guarantee Business scope.
9. Leading the Implementation of Guarantee Processing.
10. Leading the Guarantee Control Management.
11. Leading the Channel of Marketing Management
12. Management of the Improvement of Product Profitability
13. Management of Research and Product Development of New Guarantee
14. Leading the Governance Implementation of the Directorate of Guarantee Business.
15. Leading the Administration of the Directorate of Guarantee Business.
16. Leading the Risk Management of the Directorate of Guarantee Business.
17. Leading the Good Corporate Governance (GCG) of the Directorate of Guarantee Business.
18. Leading the Internal Monitoring of the Directorate of Guarantee Business.
19. Leading the Employee Competency Development under their authority. At least one level below to meet the specified competency standards.
20. Leading the Preparation and Submission of Periodic Reports concerning the Implementation of Duties.
21. Has the accountability to execute their duties to the GMS. It includes convening the GMS and other meetings in accordance with the provisions of the Company Law.
22. Leading the execution of other duties within its scope.
23. Performing the duties as a substitute Director in accordance with the provisions and execute additional duties determined at the Board of Directors Meeting.

Authorities:

1. Provide approval to the Company's Long-Term Plan as well as Work Plan and Budget.
2. Establish systems, procedures, guidelines, and implementation instructions for the Directorate of Guarantee Business.
3. Approve and establish together with other members of the Board of Directors, formulate, and stipulate Regulations/Resolutions/Policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company.
4. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge according to authority.
5. Determine the main duties and functions and coordinate the implementation of duties in the Directorate of Guarantee Business.
6. Decide on the guarantee, coverage, and limit, based on products and services.
7. Approve the Management Report, the Company's Annual Report, and the Guarantee Business Activity Report (Quarterly).
8. Approve and perform other duties according to the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations.
9. Approve and sign the Director's authority for special correspondent activities.
10. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of duties related to the Directorate of Guarantee Business.

Suwarsito
(Direktur Operasional dan Jaringan)
(Director of Operations and Network)

Tugas:

1. Pemimpin Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Operasional dan Jaringan.
2. Pemimpin Pengelolaan Teknik
3. Pemimpin Pelaksanaan Manajemen Klaim Secara Nasional
4. Pemimpin Pengelolaan Subrogasi
5. Pemimpin Pengelolaan Jaringan
6. Pemimpin Pengelolaan Layanan
7. Pemimpin Pengelolaan Kegiatan Aktuaria
8. Pemimpin Pelaksanaan Tata Laksana Direktorat Operasional dan Jaringan.
9. Pemimpin Pengelolaan Manajemen Kinerja Direktorat Operasional dan Jaringan.
10. Pemimpin Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Operasional dan Jaringan.
11. Pemimpin Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Direktorat Operasional dan Jaringan.
12. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Direktorat Operasional dan Jaringan.
13. Pemimpin penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan)/Master Plan Teknologi Informasi Perusahaan.
14. Pemimpin Pengelolaan Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan.
15. Pemimpin Pengelolaan Teknologi Informasi Perusahaan.
16. Pemimpin pengembangan kompetensi karyawan yang berada dibawah kewenangannya minimal satu tingkat di bawahnya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan.
17. Pemimpin penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
18. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada RUPS, termasuk melakukan pemanggilan RUPS dan lain-lain sesuai ketentuan UU PT.
19. Pemimpin pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya
20. Melaksanakan tugas sebagai Direktur pengganti sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan dalam Rapat Direksi.

Wewenang:

1. Memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Operasional dan Jaringan.
2. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Operasional dan Jaringan.
3. Menyetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, Standard Operating Prosedur (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan.
4. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan.
5. Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Direktorat Operasional dan Jaringan.
6. Memutuskan kegiatan, coverage dan plafon berdasarkan pengembangan Operasional dan Layanan dari sisi Teknik Penjaminan, Keputusan dan Pembayaran, Co-Guarantee, Co- Branding, co-asuransi dan Re-Asuransi serta Re-Guarantee.
7. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Operasional dan Jaringan (Triwulanan).
8. Menyetujui dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur untuk kegiatan koresponden khusus.
10. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas terkait Direktorat Operasional dan Jaringan.

Duties:

1. Leading the Preparation of the Company's Long Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKA) of the Directorate of Operations and Networks.
2. Leading Technical Management
3. Leading the Implementation of National Claims Management
4. Leading Subrogation Management
5. Leading Network Management
6. Leading Service Management
7. Leading Actuarial Activity Management
8. Leading the Implementation of Governance of the Directorate of Operations and Network.
9. Leading Performance management of the Directorate of Operations and Network.
10. Leading Implementation of Risk Management of the Directorate of Operations and Networks.
11. Leading the Good Corporate Governance (GCG) of the Operations and Networks Leading the Implementation of Governance of the Directorate of Operations and Network.
12. Leading Internal Monitoring of the Directorate of Operations and Networks.
13. Leading the preparation of the Company's Information Technology Strategic Plan/Master Plan for Information Technology.
14. Leading the Information Technology Governance Management.
15. Leading the Company's Information Technology Management.
16. Leading employee competency development under their authority, at least one level below it to meet the specified competency standards.
17. Leading the preparation and submission of reports concerning the implementation of duties on a regular basis.
18. Has the accountability to perform their duties to the GMS. It includes convening the GMS and other meetings in accordance with the provisions of the Company Law.
19. Leading the execution of other duties within its scopes.
20. Performing the duties as a substitute Director in accordance with the provisions and execute additional duties determined at the Board of Directors Meeting.

Authorities:

1. Provide approval for the Company's Long Term Plan as well as Work Plan and Budget for the Directorate of Operations and Networks.
2. Establish systems, procedures, guidelines, and implementation instructions for the Directorate of Operations and Networks.
3. Approve and establish together with other members of the Board of Directors, formulate and stipulate Regulations/Decrees/Policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company.
4. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge according to authority.
5. Determine the main duties and functions and coordinate the implementation of duties in the Directorate of Operations and Network.
6. Determine activities, coverage, and limit, based on the development of Operational and Service in terms of the Guarantee Technique, Decisions and Payments, Co-Guarantee, Co-Branding, co-insurance, as well as Reinsurance and Re-Guarantee.
7. Approve the Management Report, the Company's Annual Report, as well as the Operational and Network Activity Report (Quarterly).
8. Approve and execute other duties in accordance with the provisions of the Company's regulations and applicable laws and regulations.
9. Approve and sign the Director's authority for special correspondent activities.
10. Represent PT Jamkrindo in establishing relations with third parties regarding the implementation of duties related to the Directorate of Operations and Network.

Direksi
Board of Directors

Tugas dan Wewenang
Duties and Authorities

Achmad Ivan S Soeparno
(Direktur Manajemen SDM,
Umum, dan Manajemen
Risiko)
(Director of Human
Capital Management,
General affairs, and Risk
Management)

Tugas:

1. Pemimpin Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Direktorat Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan.
2. Pemimpin Pengelolaan Siklus Manajemen SDM
3. Pemimpin Pengelolaan Siklus Manajemen Umum
4. Pemimpin Pengelolaan Hukum
5. Pemimpin Pengelolaan Kepatuhan
6. Pemimpin Pengelolaan Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan
7. Pemimpin Pengelolaan Teknologi Informasi Perusahaan
8. Pemimpin Pelaksanaan Tata Laksana Direktorat Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan.
9. Pemimpin Pengelolaan Manajemen Kinerja Direktorat Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan
10. Pemimpin Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan Kepatuhan.
11. Pemimpin Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Direktorat Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan.
12. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Direktorat Direktorat Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan.
13. Pemimpin pengembangan kompetensi karyawan yang berada dibawah kewenangannya minimal satu tingkat di bawahnya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan.
14. Pemimpin Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Secara Berkala.
15. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada RUPS, termasuk melakukan pemanggilan RUPS dan lain-lain sesuai ketentuan UU PT
16. Pemimpin pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya
17. Melaksanakan tugas sebagai Direktur pengganti sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan dalam Rapat Direksi.

Wewenang:

1. Memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan.
2. Memberikan persetujuan pedoman Good Corporate Governance (GG).
3. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan.
4. Memutuskan kegiatan, coverage dan anggaran berdasarkan pengembangan Direktorat Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan.
5. Menyetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, Standard Operating Prosedur (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan.
6. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan.
7. Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Direktorat Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan.
8. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Direktorat Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan (Triwulanan).
9. Menyetujui dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur untuk kegiatan koresponden khusus.
11. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan relationship dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas terkait Direktorat Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan.

Duties:

1. Leading the Company's Long Term Plan (RJPP) and Budget Work Plan (RKA) of the Directorate of HC Management, General Affairs, and Compliance.
2. Leading the HC Management Cycle monitoring.
3. Leading the General Affairs Management Cycle monitoring
4. Leading Legal Management
5. Leading Compliance Management
6. Leading the Company's Information Technology Governance
7. Leading Corporate Information Technology Management
8. Leading the Governance of the Directorate of HC Management, General Affairs, and Compliance.
9. Leading the Administration of Performance Management of the Directorate of HC Management, General Affairs, and Compliance.
10. Leading Risk Management of the Directorate of HC Management, General Affairs, and Compliance.
11. Leading Good Corporate Governance (GCG) implementation of the Directorate of HC Management, General Affairs, and Compliance.
12. Leading the Internal Monitoring of the Directorate of HC Management, General Affairs, and Compliance.
13. Leading employee competency development under their authority and at least one level below them to meet the specified competency standards.
14. Leading the Preparation and Submission of Periodic Reports concerning the Execution of Duties.
15. Has the accountability to perform their duties to the GMS. It includes convening the GMS and other meetings in accordance with the provisions of the Company Law.
16. Leading the implementation of other duties within its scope.
17. Performing the duties as a substitute Director in accordance with the provisions and conduct additional duties determined at the Board of Directors Meeting

Authorities:

1. Provide approval for the Company's Long-Term Plan as well as Work Plan and Budget for the Directorate of HC Management, General Affairs, and Compliance.
2. Provide approval for Good Corporate Governance (GCG) guidelines.
3. Establish systems, procedures, guidelines, implementation instructions for the Directorate of HC Management, General Affairs, and Compliance.
4. Determine activities, coverage, and budget based on the developments of the Directorate of HC Management, General Affairs, and Compliance.
5. Approve and stipulate together with other members of the Board of Directors, formulate and stipulate Regulations/Decrees/Policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company.
6. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge according to authority.
7. Determine the main duties and functions and coordinate the implementation of duties in the Directorate of HC Management, General Affairs and Compliance.
8. Approve the Management Report, the Company's Annual Report, as well as the Activity Report of the Directorate of HC Management, General Affairs, and Compliance (Quarterly).
9. Approve and execute other duties in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations.
10. Approve and sign the Director's authority for special correspondent activities.
11. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of duties related to the Directorate of HC Management, General Affairs, and Compliance.

Abdul Bari
(Direktur Kelembagaan & Layanan)
(Director of Institutional & Services)

Tugas:

1. Pemimpin Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Kelembagaan dan Layanan.
2. Pemimpin Pengelolaan Pengembangan Kerja Sama Bisnis Perusahaan.
3. Pemimpin Pengelolaan Kebijakan Terkait dengan Kelembagaan dan Layanan.
4. Pemimpin Pengelolaan Marketing.
5. Pemimpin Pengelolaan Penjualan Bisnis Penjaminan
6. Pengelolaan Bisnis Direktorat Kelembagaan dan Layanan
7. Pemimpin Pengelolaan Sarana dan Sistem Informasi yang Terhubung secara Online pada Ruang Lingkup Direktorat Kelembagaan dan Layanan
8. Pemimpin Pelaksanaan Pemrosesan Penjaminan.
9. Pemimpin Pengelolaan Saluran Pemasaran (Channel of Marketing).
10. Pemimpin Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan UMKMK.
11. Pemimpin Pelaksanaan Tata Laksana Direktorat a. Kelembagaan dan Layanan.
12. Pemimpin Pengelolaan Manajemen Kinerja Direktorat Kelembagaan dan Layanan.
13. Pemimpin Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Kelembagaan dan Layanan.
14. Pemimpin Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Direktorat Kelembagaan dan Layanan.
15. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Direktorat Kelembagaan dan Layanan.
16. Pemimpin Pengembangan Kompetensi Karyawan yang Berada di Bawah Kewenangannya Minimal Satu Tingkat di Bawahnya sehingga Memenuhi Standar Kompetensi yang Ditentukan.
17. Pemimpin Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas secara Berkala.
18. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugasnya kepada RUPS, Termasuk Melakukan Pemanggilan RUPS dan lain-lain Sesuai Ketentuan Undang-Undang PT.
19. Pemimpin Pelaksanaan Tugas-tugas Lain dalam Lingkup Bidang Tugasnya.
20. Melaksanakan Tugas Sebagai Direktur Pengganti Sesuai dengan Ketentuan dan Melaksanakan Tugas Tambahan yang Ditetapkan dalam Rapat Direksi.

Wewenang:

1. Memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Kelembagaan dan Layanan.
3. Menyetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan peraturan/keputusan/kebijakan, Standard Operating Prosedur (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan.
4. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan.
5. Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Direktorat Kelembagaan dan Layanan.
6. Memutuskan bisnis penjaminan, coverage, dan plafon berdasarkan produk dan layanan.
7. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Bisnis Penjaminan (Triwulanan).
8. Menyetujui dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur untuk kegiatan koresponden khusus.
10. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas terkait Direktorat Kelembagaan dan Layanan.

Duties:

1. Leading the Company's Long Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKA) of the Directorate of Institutional Relations & Services.
2. Leading the Corporate Business Cooperation Development Management.
3. Leading the Policies Management Related to Institutional Relations & Services.
4. Leading Marketing Management
5. Leading Sales Management of Guarantee Business
6. Business Management of the Directorate of Institutional Relations & Services.
7. Leading the Management of Facilities and Information Systems that are Connected Online in the Scope of the Directorate of Institutional Relations & Services.
8. Leading the Guarantee Processing.
9. Leading Channel of Marketing Management.
10. Leading Management of MSMEC Empowerment Activities.
11. Leading Governance of the Directorate of Institutional & Services
12. Leading Performance Management of the Directorate of Institutional Relations & Services
13. Leading the Risk Management of the Directorate of Institutional Relations & Services
14. Leading the Good Corporate Governance (GCG) implementation of the Directorate of Institutional Relations & Services
15. Leading the Internal Monitoring of the Directorate of Institutional Relations & Services
16. Leading the Employees Competency Development under their authority at least one level below them to meet the specified competency standards.
17. Leading the Preparation and Submission of Periodic Reports on the Implementation of Duties.
18. Has the accountability to perform their duties to the GMS. It includes convening for the GMS and other meetings in accordance with the provisions of the Law.
19. Leading the Implementation of Other Duties within its scope.
20. Performing the duties as Substitute Director in accordance with the provisions and conduct additional duties determined at the Board of Directors meeting.

Authorities:

1. Provide approval of the Company's Long-Term Plan as well as Work Plan and Budget.
2. Establish systems, procedures, guidelines, implementation instructions for the Directorate of Institutional Relations & Services.
3. Provide approval and establish together with other members of the Board of Directors, formulate and stipulate regulations/decrees/policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company
4. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge according to authority.
5. Determine the main duties and functions and coordinate the implementation of duties in the Directorate of Institutional and Services.
6. Decide on the guarantee, coverage, and limit based on products and services.
7. Approve the Management Report, the Company's Annual Report, and the Guarantee Business Activity Report (Quarterly).
8. Approve and conduct other duties in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations.
9. Approve and sign the Director's authority for special correspondent activities.
10. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the execution of duties related to the Directorate of Institutional Relations & Services

Direksi
Board of Directors

Tugas dan Wewenang
Duties and Authorities

Alia Nur Fitri
(Direktur Keuangan dan Investasi)
(Director of Finance and Investment)

Tugas:

1. Pemimpin Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko.
2. Pemimpin Pelaksanaan Manajemen Investasi dan Pengelolaan Keuangan Perusahaan
3. Pemimpin Pelaksanaan Manajemen Akuntansi
4. Pemimpin Pengelolaan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Penjaminan
5. Pemimpin Pelaksanaan Tata Laksana Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko.
6. Pemimpin Pengelolaan Manajemen Kinerja Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
7. Pemimpin Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko.
8. Pemimpin Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko.
9. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko.
10. Pemimpin pengembangan kompetensi karyawan yang berada dibawah kewenangannya minimal satu tingkat di bawahnya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan.
11. Pemimpin Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Secara Berkala.
12. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada RUPS, termasuk melakukan pemanggilan RUPS dan lain-lain sesuai ketentuan UU PT.
13. Pemimpin pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya.
14. Melaksanakan Tugas sebagai Direktur pengganti sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan dalam Rapat Direksi.

Wewenang:

1. Memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko.
2. Memberikan persetujuan pedoman Manajemen Risiko.
3. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko.
4. Memutuskan kegiatan, coverage dan anggaran berdasarkan pengembangan Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko.
5. Menyetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, Standard Operating Prosedur (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan.
6. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan.
7. Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko.
8. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko (Triwulanan).
9. Menyetujui dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur untuk kegiatan koresponden khusus
11. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan relationship dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas terkait Direktorat Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko.

Duties:

1. Leading the Preparation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) as well as Work Plan and Budget (RKA) of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management.
2. Leading the Governance implementation of the Company's Investment Management and Financial Management
3. Leading the Implementation of Accounting Management
4. Leading the Implementation of Corporate Risk Management and Guarantee Management
5. Leading the Governance implementation of the Directorate of Finance, Investment, and Risk Management.
6. Leading the Performance Management of the Directorate of Finance, Investment, and Risk Management
7. Leading the Risk Management of the Directorate of Finance, Investment, and Risk Management.
8. Leading the Good Corporate Governance (GCG) implementation of the Directorate of Finance, Investment, and Risk Management.
9. Leading the Internal Monitoring of the Directorate of Finance, Investment, and Risk Management.
10. Leading the employee competency development under their authority of at least one level below to meet the specified competency standards.
11. Leading the Preparation and Submission of Periodic Reports concerning the Implementation of Duties.
12. Has the accountability to perform their duties to the GMS. It includes convening the GMS and other meetings in accordance with the provisions of the Company Law.
13. Leading the execution of other duties within its scope.
14. Performing the duties as a substitute Director in accordance with the provisions and conduct additional duties determined at the Board of Directors Meeting.

Authorities:

1. Provide approval for the Company's Long-Term Plan as well as Work Plan and Budget of the Directorate of Finance, Investment, and Risk Management.
2. Provide approval for Risk Management guidelines.
3. Establish systems, procedures, guidelines, implementation instructions for the Directorate of Finance, Investment, and Risk Management.
4. Determine activities, coverage, and limit based on the development of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management.
5. Approve and stipulate together with other members of the Board of Directors, formulate and stipulate Regulations/Decrees/Policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company.
6. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge according to authority.
7. Determine the main duties and functions and coordinate the implementation of duties in the Directorate of Finance, Investment, and Risk Management.
8. Approve the Management Report, the Company's Annual Report, as well as Report on Activities of the Directorate of Finance, Investment, and Risk Management (Quarterly).
9. Approve and conduct other duties in accordance with the provisions of Company regulations as well as applicable laws and regulations.
10. Approve and sign the Director's authority for special correspondent activities
11. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of duties related to the Directorate of Finance, Investment and Risk Management.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perusahaan melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Fokus pada pengembangan kompetensi Direksi menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan terus diperbarui, guna mendukung kelancaran pengelolaan bisnis Perusahaan. Berikut adalah program peningkatan kompetensi yang dijalankan oleh Direksi Jamkrindo sepanjang tahun 2024:

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating qualified human capital who are able to compete at the global level. As part of this effort, the Company implements various competency development programs for all employees. The focus on developing the competence of the Board of Directors is one of the strategic measures to ensure that knowledge and skills are continuously updated to support the effective management of the Company's business. The following is the competency development program implemented by the Board of Directors of Jamkrindo throughout 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	Hard Skill (HS)	The International Conference on Neuromanagement and Leadership	14 – 15 Mei 2024 May 14 - 15, 2024	IARF Conference
		Soft Skill (SS)	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Hard Skill (HS)	GRC (Governance, Risk Management, Compliance dan Sustainability) Seminar and Masterclass	22 – 23 Agustus 2024 August 22 - 23, 2024	CRMS
		Hard Skill (HS)	Swift International Banke's Operation Seminar Beijing	21 – 24 Oktober 2024 October 21 - 24, 2024	SWIFT and Beijing Authorities
		Soft Skill (SS)	Expansive Leadership Program	6 September 2024 September 6, 2024	CLDI MSE
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur Manajemen SDM, Umum dan Manajemen Risiko Director of Human Capital Management, General affairs, and Risk Management	Hard Skill (HS)	GRC Summit 2024: Leadership for Sustainable Impact -GRC, ESG, and SDGs	22 – 23 Agustus 2024 August 22 - 23, 2024	GRC Summit (CRMS Indonesia)
		Hard Skill (HS)	Masterclass : Leadership for Sustainable Impact GRC, ESG, and SDGs	August 22 - 23, 2024	GRC Summit 2024
		Soft Skill (SS)	Executive Refreshment For Top Level Management Series 2	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Hard Skill (HS)	36th ACSIC Conference	20 – 25 September 2024 September 20 - 25, 2024	ACSIC
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan & Layanan Director of Institutional & Services	Soft Skill (SS)	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Hard Skill (HS)	GRC Summit 2024: Leadership for Sustainable Impact -GRC, ESG, and SDGs	23 Agustus 2024 August 23, 2024	GRC Summit (CRMS Indonesia)
		Hard Skill (HS)	36th ACSIC Conference	20 – 25 September 2024 September 20 - 25, 2024	ACSIC
		Hard Skill (HS)	Certificate of Continuing Professional Development: #Risk London 2024	10 Oktober 2024 October 10, 2024	GRC World Forums
Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Hard Skill (HS)	The International Conference on Neuromanagement and Leadership	15 Mei 2024 May 15, 2024	IARF Conference
		Hard Skill (HS)	Indonesia Cyber Risk 2024 Seminar: "Mitigating Cyber Risk and Building a Trust"	27 Juni 2024 June 27, 2024	LPPI
		Soft Skill (SS)	Expansive Leadership Program	6 September 2024 September 6, 2024	CLDI MSE
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	Hard Skill (HS)	The 10th International Certified Wealth Manager Program	18 – 20 Juli 2024 July 18 - 20, 2024	Certified Wealth Managers Association (CWMA)
		Soft Skill (SS)	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Hard Skill (HS)	International Benchmarking German Swiss ESGRC	22 – 29 September 2024 September 22 - 29, 2024	Center for Risk Management & Sustainability

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS sebagai bentuk akuntabilitas atas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk mengawasi pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi, dengan dasar hukum pengangkatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Board Manual merupakan dokumen yang berfungsi sebagai panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak, dan kewajibannya. *Board Manual* juga memuat pengaturan mengenai hubungan kerja antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Ruang lingkup *Board Manual* mencakup pengaturan dan penjelasan tentang pelaksanaan hubungan kerja antar organ Dewan Komisaris dan Direksi dalam lingkungan perusahaan. Pengaturan ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris sendiri merupakan organ perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan.

Dalam hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, terdapat berbagai aspek yang diatur, di antaranya:

1. Pertemuan formal;
2. Pertemuan informal;
3. Komunikasi formal;
4. Komunikasi Informal;
5. Laporan berkala;
6. Pelaporan khusus;
7. Surat-menyurat/Memorandum;
8. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan resmi Perusahaan;
9. Benturan kepentingan.

The Board of Commissioners is a company organ that is collectively responsible for monitoring, advising the Board of Directors, and ensuring the implementation of GCG principles at all levels of the organization. In performing its duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS as a form of accountability for monitoring the management of the Company. The Board of Commissioners is appointed by the Shareholders to monitor the management conducted by the Board of Directors. With the legal basis for appointment stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

Work Guidelines of the Board of Commissioners

The Board Manual is a document that serves as a guide for the Board of Commissioners and Board of Directors in conducting their duties, authorities, responsibilities, rights, and obligations. The Board Manual also contains arrangements regarding the working relationship between the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders. Which in this case is represented by the Minister of State-Owned Enterprises.

The scope of the Board Manual includes arrangements and explanations regarding the implementation of working relationships between the organs of the Board of Commissioners and the organs of the Board of Directors within the Company. This arrangement is based on the provisions contained in the Company's Articles of Association and/or applicable laws and regulations. The Board of Commissioners is a company organ tasked with monitoring and advising the Board of Directors in conducting the management of the Company.

The management of the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors includes:

1. Formal meeting;
2. Informal meetings;
3. Formal communication;
4. Informal Communication;
5. Periodic reports;
6. Special reporting;
7. Correspondence/Memorandum;
8. Notification of the implementation of official Company activities;
9. Conflict of interest.

Kriteria Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, persyaratan formal dan materil anggota Dewan Komisaris terdiri dari:

Criteria For the Board of Commissioners

Based on the provisions in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023, the formal and material requirements for members of the Board of Commissioners consist of:

Persyaratan Requirement	Uraian Description
Materiil (Pasal 15) Materials (Article 15)	- Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu: - integritas; - dedikasi; - memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; - memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan - dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. - Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan juga harus memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan Anak Perusahaan di mana yang bersangkutan dicalonkan. 1. To be appointed as a member of the Board of Commissioners/Monitoring Board of an SOE, or member of the Board of Commissioners of a Subsidiary, a person must fulfill several material requirements, namely: - Integrity; - Dedication; - Understand company management issues related to one of the management functions; - Have adequate knowledge in the field of business in which the person concerned is appointed to; and - Able provide sufficient time to perform their duties. 2. In addition to meeting the criteria as intended in paragraph (1), members of the Subsidiary's Board of Commissioners must also have a strong will (enthusiasm) to promote and develop the Subsidiary for which they are appointed to.
Syarat Formal (pasal 16) Formal Requirement (Article 16)	Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut: - orang perseorangan; - mampu melaksanakan perbuatan hukum; - tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; - tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Apart from meeting the criteria as intended in Article 15, to be appointed as a member of the Board of Commissioners of an SOE, or member of the Board of Commissioners of a Subsidiary, a person must fulfill the following formal requirements: - Individuals; - Capable of executing legal actions; - Never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment - Never been a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners/Monitoring Board who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt - Never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to nomination

Persyaratan Requirement	Uraian Description
Persyaratan lainnya (Pasal 17) Other Requirements (Article 17)	- Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, selain memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 17, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut: - bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; - bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah; - tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan; - tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode; - tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris; - sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan - memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. - Selain memenuhi kriteria pada ayat (1) di atas, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut: - bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan; dan - bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.
	- To be appointed as a member of the Board of Commissioners/Monitoring Board of an SOE, or member of the Board of Commissioners of a Subsidiary, in addition to fulfilling the material requirements as intended in Article 15 and the formal requirements as intended in Article 16 or Article 17, a person must also fulfill other requirements as follows: - not a political party administrator, legislative candidate, and/or legislative member in the People's Representative Council, Regional Representative Council, Provincial People's Representative Council, and Regency/Municipal Regional People's Representative Council; - not a candidate for regional head and/or deputy regional head, which also includes acting head/deputy regional head; - not currently occupying a position that has the potential to cause a conflict of interest with the relevant SOEs/Subsidiary; - not currently serving as a member of the Board of Commissioners/Monitoring Board of the SOEs or the Board of Commissioners of the Subsidiary concerned for 2 (two) periods; - not currently occupying a position that is prohibited by law from holding the position of a member of the Board of Commissioners; - physically and mentally healthy, who is not suffering from an illness that could hinder the performance of their duties as a member of the Board of Commissioners/Monitoring Board, as proven by a health certificate from the hospital; and - have a Taxpayer Identification Number (TIN) and have fulfilled the obligation to pay taxes for the last 2 (two) years. - Apart from fulfilling the criteria in paragraph (1) above, members of the Board of Commissioners/Monitoring Board of SOE must also fulfill the following requirements: - for prospective candidates from technical ministries or other government agencies, they must be based on a letter of recommendation from the head of the agency concerned; and - Prospective candidates for members of the Board of Commissioners/Monitoring Board who come from State administrators must report the State Administrators' Wealth Reports (LHKPN) for the last 2 (two) years as proven by proof of the LHKPN report to the authorized institution.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir tercantum dalam Pasal 14 Ayat 11 disebutkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun, anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya sebagaimana disebutkan pada Ayat 12.

Term of Office

Based on the Company's Articles of Association which have been amended several times and most recently stated in Article 14 Paragraph 11 states that the term of office for members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office. However, members of the Board of Commissioners can be dismissed at any time based on a resolution of the General Meeting of Shareholders by stating the reasons as stated in Paragraph 12.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2024

Structure and Composition of the Board of Board of Commissioners in 2024

Susunan Dewan Komisaris Jamkrindo per 31 Desember 2024 Jamkrindo's Board of Commissioners Composition as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term of Office
Krisna Wijaya	Komisaris Utama/ Independen President/Independent Commissioner	SK-243/MBU/10/2022 dan 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022 SK-243/ MBU/10/2022 and 013/KepSir PS/ BPUI/X/2022	(17 Oktober 2022) 2022-2027) (October 17, 2022) 2022-2027)	Ke-1 1st
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	- Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 - Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 - Decree of the State Minister of SOEs as Series A Shareholder No. SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019 - Decree of the State Minister of SOEs as A Series Shareholder No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020	17 Oktober 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 October 17, 2019 until the GMS which was held in 2024	Ke-2 2nd
Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. sk-19/mbu/01/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 02/sk-dir/rupsap/bpui/2021 tanggal 18 Januari 2021 Decree of the State Minister of SOEs as a Series A Shareholder No. SK-19/MBU/01/2021 and BPUI Decree as Series B Shareholder No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/ BPUI/2021 dated January 18, 2021	18 Januari 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 January 18, 2021 until the GMS which will be held in 2026	Ke-1 1st
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	- Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 - Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 - Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-35/MBU/02/2024 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 3/KepSir-PS/BPUI/II/2024 tanggal 8 Februari 2024 - Decree of the State Minister of SOEs as a Series A Shareholder No. SK-02/MBU/01/2019 dated January 03, 2019 - Decree of the State Minister of SOEs as a Series A Shareholder No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 - Decree of the State Minister of SOEs as a Series A Shareholder No. SK-35/MBU/02/2024 and Decree of BPUI as a Series B Shareholder No. 3/KepSir-PS/ BPUI/II/2024 dated February 08, 2024	3 Januari 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 January 3, 2019 until the GMS which was held in 2024	Ke-2 2nd
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-182/MBU/06/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 05/ SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/INI/2021 tanggal 2 Juni 2021 Decree of the State Minister of SOEs as a Series A Shareholder No. SK-182/MBU/06/2021 and Decree of BPUI as a Series B Shareholder No. 05/SK- DIR/ RUPS- RUPS/2021 dated June 02, 2021	2 Juni 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 June 2, 2021 until the GMS which will be held in 2026	Ke-1 1st
Angger P. Yuwono	Komisaris Commissioner	SK-217/MBU/07/2023 dan 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 tgl 31 Juli 2023 SK-217/ MBU/07/2023 and 16/KepSir PS/ BPUI/X/2023	31 Juli 2023 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 July 31, 2023 until the GMS which will be held in 2028	Ke-1 1st

Profil singkat masing-masing Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan Organ Perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan, baik secara umum maupun khusus, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas ini dijalankan berdasarkan Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.KN. No. 07, tertanggal 07 Oktober 2022. Dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.KN. No. 07 tanggal 07 Oktober 2022) dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran;
2. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi;
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris;
4. Pengawas tidak boleh berubah menjadi pelaksana tugas eksekutif, kecuali dalam hal seluruh jabatan Direksi Perusahaan lowong dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Pemegang Saham belum mengisi lowong jabatan Direksi tersebut maka untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Komisaris;
5. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara proaktif, mencakup seluruh aspek bisnis dan operasional Perusahaan;
6. Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.
 - a. Umum
 - 1) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
 - 2) Memiliki itikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
 - 5) Memantau dan memastikan bahwa praktik *Good Corporate Governance* telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, antara lain dengan mengadakan

A brief profile of each Board of Commissioners is presented in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Duties, Obligations, and Authorities of The Board of Commissioners

The Board of Commissioners is an organ of the Company that has the responsibility to conduct both general and special monitoring, as well as provide advice to the Board of Directors. These duties are executed based on the Notarial Deed of Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.KN. No. 07, dated October 07, 2022. In conducting monitoring and advising, the Board of Commissioners adheres to the following principles:

1. In conducting monitoring, the Board of Commissioners will always comply with the Company's Articles of Association (Notarial Deed of Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.KN. No. 07 dated October 7, 2022) and provisions of laws and regulations and implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness;
2. Monitoring is conducted by the Board of Commissioners on the management of the Company by the Board of Directors;
3. In conducting monitoring, the Board of Commissioners acts as an assembly and cannot act individually on behalf of the Board of Commissioners;
4. Supervisors may not change to executors of executive duties, except in the event that all positions for the Board of Directors of the Company are vacant and within 30 (thirty) days the Shareholders have not filled the vacant positions for the Board of Directors, then the Company is temporarily managed by the Board of Commissioners;
5. Monitoring is not conducted by simply approving or disapproving actions that require the approval of the Board of Commissioners, but is also done pro-actively, covering all aspects of the Company's business and operations;
6. The Board of Commissioner may utilize independent professional services and/or establish Committees to assist in the duties of the Board of Commissioners.
 - a. General
 - 1) Complying with statutory provisions and/or the Articles of Association;
 - 2) Having good faith, being full of prudence and responsibility in conducting duties for the interests and business of the Company in accordance with the provisions of the laws and regulations;
 - 3) Monitoring the Company's management policies that was conducted by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including regarding the Company's development plans, Long Term Plans, Work Plans, and Company Budget, provisions of the Articles of Association and Shareholders' decisions, and applicable laws and regulations;
 - 4) Performing management actions of the Company in certain circumstances for a certain period of time;
 - 5) Monitoring and ensuring that Good Corporate Governance practices have been implemented effectively and sustainably, including by

- pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*;
- 6) Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya;
 - 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.
- b. Pengawasan
- 1) Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan;
 - 2) Melakukan kunjungan ke unit kerja/kantor wilayah & cabang/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya;
 - 3) Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi;
 - 4) Menugaskan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan tugas-tugas pengawasan.
- c. Pelaksanaan Tugas berkaitan dengan Pemegang Saham
- Dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:
- 1) Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perusahaan serta perubahan dan penambahannya;
 - 2) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
 - 3) Melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - 4) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
 - 5) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Pemegang Saham;
 - 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham;
 - 7) Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada Pemegang Saham yang dilengkapi dengan alasan pencalonan.
- d. Pengelolaan Manajemen Risiko
- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas kebijakan manajemen risiko; perencanaan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi manajemen risiko; serta pelaporan manajemen risiko.
- e. Sistem Pengendalian Internal
- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan audit.
- holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance;
- 6) Preparing a work plan for the Board of Commissioners for the following year;
 - 7) Accountable for the implementation of their duties to Shareholders.
- b. Monitoring
- 1) Request written information from the Board of Directors regarding an issue in the Company;
 - 2) Make visits to certain work units/branch offices/projects, either with (or without) prior notification to the Board of Directors;
 - 3) Provide responses to periodic reports from the Board of Directors;
 - 4) Assign the Audit Committee, Investment and Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee to conduct monitoring duties.
- c. Execution of Duties related to Shareholders
- In relation to Shareholders, the Board of Commissioners has the duty and obligation to:
- 1) Provide opinions and suggestions to Shareholders regarding the Company's annual Work Plan and Budget and their amendments and additions;
 - 2) Follow the development of the Company's activities, provide opinions and suggestions to Shareholders regarding any issues considered important for the management of the Company;
 - 3) Report immediately to the Shareholders if there are symptoms of a decline in the Company's performance accompanied by suggestions regarding the corrective steps that must be taken;
 - 4) Examine, review and sign the Annual Report prepared and submitted by the Board of Directors;
 - 5) Conduct other monitoring duties determined by the Shareholders;
 - 6) Be accountable for the implementation of their duties to Shareholders;
 - 7) Appoint a candidate for External Auditor to the Shareholders accompanied by the reasons for the nomination and the amount of the fee.
- d. Management of Risk Management
- The Board of Commissioners has the obligation to monitor and provide advice to the Board of Directors on a regular basis regarding the effectiveness of risk management policies; risk management planning, implementation, monitoring, and evaluation; and risk management reporting.
- e. Internal Control System
- The Board of Commissioners has the obligation to monitor and provide advice to the Board of Directors in order to establish an effective internal control system, as well as to monitor and evaluate the follow-up of audit results.

f. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

- 1) Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham, dan Instansi/Lembaga Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
- 2) Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga informasi penting yang diperlukan oleh Pemangku Kepentingan.
- 3) Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dan masalah material yang dihadapi.
- 4) Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Etika Berusaha dan Anti Korupsi. Dewan Komisaris tidak diperkenankan memberikan atau menawarkan atau menerima, sesuatu yang berharga kepada atau dari setiap pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

g. Wewenang Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris tercantum dalam Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.KN. No. 07 tanggal 07 Oktober 2022 Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 11 Ayat 8 dan Ayat 10, meliputi:

- 1) perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dan perbuatan-perbuatan Direksi yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana/usulan Direksi dalam hal:
 - Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BTO), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOWT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO), dan kerja sama lainnya dengan nilai dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
 - Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

f. Information Disclosure and Confidentiality

- 1) The Board of Commissioners oversees that the Board of Directors discloses important information in the Company's Annual Report and Financial Statements to Shareholders, and related Government Agencies/ Institutions in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear, and objective manner.
- 2) The Board of Commissioners monitors so that the Board of Directors takes the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations but also important information needed by Stakeholders.
- 3) The Board of Commissioners monitors the Board of Directors to be active in disclosing the implementation of the principles of Good Corporate Governance and material problems encountered.
- 4) The Board of Commissioners is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's information. Confidential information obtained while serving as the Board of Commissioners must remain confidential in accordance with applicable laws and regulations.
- 5) Business Ethics and Anti-Corruption. The Board of Commissioners is not permitted to give or offer or receive anything of value to or from any interested party to influence or as a reward for what has been done and other actions, in accordance with laws and regulations.

g. Authority of the Board of Commissioners

The authority of the Board of Commissioners is listed in the Deed of Notary Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.KN. No. 07 dated October 7, 2022 Article 15 Paragraph 2 and Article 11 Paragraph 8 and Paragraph 10, covering:

- 1) Actions of the Board of Directors that must obtain written approval from the Board of Commissioners, and actions of the Board of Directors that can only be executed by the Directors after obtaining a written response from the Board of Commissioners and the approval of the Shareholders. Commissioners and the approval of the Shareholders. The Board of Commissioners has the authority to approve or reject in writing the plan/suggestion of the Board of Directors in terms of:
 - Establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BTO), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation with a certain value and period determined by the General Meeting of Shareholders;
 - Write off bad debts and dead stock from the books;
 - Release movable fixed assets with an economic age that is generally valid in the industry for up to 5 (five) years;

- Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - Melakukan penyertaan modal dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - Mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist), kecuali pemberian penjaminan yang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan;
 - Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
 - Melepaskan dan menghapuskan aktiva/aset tetap Perusahaan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - Menetapkan cetak biru (blueprint) organisasi Perusahaan;
 - Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
 - Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - Membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan;
 - Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan; dan/atau
 - Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Melakukan investasi dan pembiayaan jangka Panjang;
 - Melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perusahaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan; memasuki pekarangan, gedung dan, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan; meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya yang mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
 - Make equity participation and reduce the percentage of equity participation in other companies that must be approved by Series A Dwiwarna Shareholders;
 - Establish a subsidiary and/or joint venture company;
 - Release equity participation in subsidiaries and/or joint ventures;
 - Conduct merger, consolidation, acquisition, separation, and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;
 - Bind the Company as a guarantor (borg or avalist), except for giving guarantees which are the implementation of the Company's business activities;
 - No longer collect bad debts that have been written off;
 - Releasing and writing of the Company's fixed assets with the usual economic life in the industry, generally more than 5 (five) years, which must be approved by the Shareholders;
 - Establish a company organizational blueprint;
 - Establish and change the Company's logo;
 - Perform other actions that have not been stipulated in the Company's Work Plan and Budget;
 - Establish foundations, organizations and/or associations, either directly or indirectly related to the Company which may have an impact on the Company;
 - Imposition of fixed and routine Company fees for foundations, organizations and/or associations that are directly or indirectly related to the Company; and/or
 - Proposals for representatives from the Company to become candidates for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that make a significant contribution to the Company and/or have strategic value determined by the General Meeting of Shareholders;
 - Make long-term investments and financing;
 - Issuance of bonds and other debt securities by the Company that are not against the provisions of laws and regulations
- 2) Check books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other securities and check the Company's assets; enter the grounds, buildings and offices used by the Company; request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all matters concerning the management of the Company; know all policies and actions that have been and will be carried out by the

mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan Direksi; meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

- 3) Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; membentuk Komite Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu; melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 4) Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan.
- 5) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Board of Directors; request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend Board of Commissioners meetings; attend Board of Directors meetings and provide insight into the matters discussed.

- 3) Appoint and dismiss the secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary. Form other committees besides the Audit Committee, if deemed necessary taking into account the Company's capabilities. Use experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense, if deemed necessary. Execute actions to manage the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association.
- 4) The Board of Commissioners may temporarily dismiss members of the Board of Directors if members of the Board of Directors act in-contrary to the Articles of Association. Or if there are indications of causing losses to the Company, neglecting their obligations, or if there are urgent reasons for the Company to do so;
- 5) Execute other monitoring authorities as long as they do not conflict with the Articles of Association, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and/or provisions of laws and regulations.

Pembagian Lingkup Tugas Antar Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Nomor KEP-04/DK-JAMKRINDO/VIII/2023, pembagian tugas di jajaran Dewan Komisaris mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
1.	Krisna Wijaya	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	Melakukan koordinasi dengan segenap anggota Komisaris maupun perangkat Dewan Komisaris berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris serta khususnya dalam bidang Bisnis Penjaminan, dan Manajemen Risiko Coordinate with all members of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners organs in relation to the duties and authorities of the Board of Commissioners and especially in the field of Guarantee Business and Risk Management
2.	M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Keuangan, dan Operasional. Handle activities related to the duties and authorities of the Board of Commissioners, especially in the field of Finance and Operations
3.	Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Investasi, Manajemen SDM, dan Umum. Handle activities related to the duties and authorities of the Board of Commissioners, especially in the fields of Investment, HC Management, and General Affairs.
4.	Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Jaringan dan Kepatuhan. Handle activities related to the duties and authorities of the Board of Commissioners, especially in the field of Network and Compliance.

Division of Duties Between Board of Commissioners

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo Number KEP-04/DK-JAMKRINDO/VIII/2023, the distribution of duties within the Board of Commissioners refers to the established guidelines. The division of duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners is presented below:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
5.	Desty Airlani	Komisaris Commissioner	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Kelembagaan, dan Layanan. Handle activities related to the duties and authorities of the Board of Commissioners, especially in the field of Institutions and Services.
6.	Angger P. Yuwono	Komisaris Commissioner	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Bisnis Penjaminan. Handle activities related to the duties and authority of the Board of Commissioners, especially in the field of Guarantee Business.

Program Pengembangan Kompetensi

Untuk mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas melalui partisipasi dalam pelatihan, seminar, *workshop*, atau forum ilmiah baik di dalam maupun luar negeri. Berikut adalah program peningkatan kompetensi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Jamkrindo sepanjang tahun 2024:

Competency Development Program

To advocate the development of knowledge, skills and, insights, the Board of Commissioners participate in training, seminars, workshops, or scientific forums both domestic and abroad which focuses on improving quality. The following is the competency Development program implemented by the Board of Directors of Jamkrindo throughout 2024:

No.	Waktu Time	Tempat Location	Topik/Tema Topic/Theme	Peserta Attendees	Penyelenggara Organizers
1	22 Februari 2024 February 22, 2024	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024 Economic and Financial Outlook in 2024	M Muchlas Rowi	OJK Institute
2	06 Maret 2024 March 6, 2024	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Sosialisasi CPD dan Diskusi Panel POJK 20/2023 CPD Dissemination and Panel Discussion regarding POJK 20/2023	Angger P Yuwono	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
3	06 Maret 2024 March 6, 2024	Badung, Bali	Seminar Nasional Bertumbuh Dalam Pengaturan UU P2SK National Seminar: Growing Within the Regulation of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law)	Krisna Wijaya	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Indonesian Finance Services Association (APPI)
4	07 Maret 2024 March 7, 2024	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Artificial Intelligence Changes the Face of Financial Sector	M Muchlas Rowi	OJK Institute
5	13 Maret 2024 March 13, 2024	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Riskhub International Webinar: ESG Integration in Risk Management: A Practical Exploration	Krisna Wijaya	ERMA x IRMAPA x Marsh x CRMS x LSP MKS
6	13 Maret 2024 March 13, 2024	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Strategi Pengembangan SJK melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Conduct Financial Services Development Strategy through Strengthening Islamic Banking and Market Conduct	M Muchlas Rowi	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
7	28 Maret 2024 March 28, 2024	Jakarta	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	Angger P Yuwono	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute
8	08 Mei 2024 May 8, 2024	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Semkain Berkah Pasca Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS) More Blessings After the Spin-Off of Sharia Business Unit (UUS)	Angger P Yuwono	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
9	15 Mei 2024 May 15, 2024	Jakarta	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	M Muchlas Rowi	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute
10	16 Mei 2024 May 16, 2024	Hybrid - Purwokerto	Sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN RI Guna Optimalisasi Pengelolaan BUMN Synergy Between the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and the Ministry of State-Owned Enterprises to Optimize SOE Management	Krisna Wijaya	Universitas Jenderal Soedirman Jenderal Soedirman University

No.	Waktu Time	Tempat Location	Topik/Tema Topic/Theme	Peserta Attendees	Penyelenggara Organizers
11	28 Mei dan 5 Juni 2024 May 28 and June 5, 2024	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Joint Regional Seminar 2024	Angger P Yuwono	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
12	11 Juni 2024 June 11, 2024	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	M Muchlas Rowi	OJK Institute
13	12 Juni 2024 June 12, 2024	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Riskhub International Webinar: Based on ISO 23894 & ISO 42001: Proactive Approaches for Sustainable Innovation	Krisna Wijaya	ERMA x IRMAPA x Marsh x CRMS x LSP MKS
14	27 Juni 2024 June 27, 2024	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan The Role of Innovative Credit Scoring (ICS) in Improving Access to Funding	M Muchlas Rowi	OJK Institute
15	26 Juli 2024 July 26, 2024	Jakarta	Executive Refreshment For Top Level Management	- Krisna Wijaya - Ari Wahyuni - Desty Arlaini - Hernita Alius - M Muchlas Rowi - Angger P Yuwono	LPPI
16	08-09 Agustus 2024 August 8 - 9, 2024	Bandung, Jawa Barat Bandung, West Java	Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Ujian Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (QRGP) Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Ujian Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (QRGP)	Desty Arlaini	CRMS x LPK MKS
17	10-16 Agustus 2024 August 10 - 16, 2024	Las Vegas, Amerika Serikat Las Vegas, United States	Seminar Ai4: "The Forefront of Artificial Intelligence Innovation" Ai4 Seminar: "The Forefront of Artificial Intelligence Innovation"	M Muchlas Rowi	Fora Group
18	20-22 Agustus 2024 August 20 - 22, 2024	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	7th Indonesian Actuaries Summit 2024 "Actuaries, Now and Beyond"	Angger P Yuwono	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
19	13 September 2024 September 13, 2024	Jakarta	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	- Krisna Wijaya - Ari Wahyuni - Desty Arlaini - Hernita Alius - M Muchlas Rowi - Angger P Yuwono	
20	09-10 Oktober 2024 October 9 - 10, 2024	London, United Kingdom	#RISK London 2024	Ari Wahyuni	GRC World Forum
21	24 Oktober - 02 November 2024 October 24 - November 2, 2024	United Kingdom	International Benchmarking Visit To United Kingdom	Krisna Wijaya	LPPI
22	08-13 September 2024 September 8 - 13, 2024	Brisbane, Australia	Data for Executive Decision Making	Hernita Alius	University of Queensland
23	04 Desember 2024 December 4, 2024	Bali, Indonesia	Resilient Leadership: ESG, AI, and GRC in Modern Risk Governance	Krisna Wijaya	ERMA x CRMS x LSP MKS
24	05-06 Desember 2024 December 5 - 6, 2024	Hybrid - Bali, Indonesia	Risk Beyond 2024 : Sustainable Symphony: Echoes of Change	Krisna Wijaya	ERMA
25	31 Desember 2024 December 31, 2024	Jakarta	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	Hernita Alius	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2024

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah mengambil berbagai langkah strategis sepanjang tahun 2024. Adapun sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris pada tahun tersebut antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dalam rangka *review* analisis kinerja bulanan Perusahaan, mengetahui perkembangan kondisi serta masalah-masalah aktual yang dialami perusahaan termasuk pemberian nasihat/saran kepada Direksi. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal, Rapat dengan mengundang Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam kesempatan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris menyampaikan pendapat/tanggapan/masukan kepada Pemegang Saham dan Usulan RKAP serta masalah-masalah penting lainnya yang tertuang dalam Risalah RUPS No. 01/RUPS/DIR/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Juga melalui pengesahan laporan tahunan yang tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jaminan Kredit Indonesia No. 02/RUPS/DIR/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2023.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris tercatat telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat Internal, 12 (dua belas) kali Rapat dengan mengundang Direksi, dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Kunjungan Lapangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan kunjungan ke lapangan guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat/jelas mengenai bidang atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 6 (enam) kali kunjungan.

3. Surat-Surat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris PT Jamkrindo memiliki tugas pokok, yakni melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Komisaris memiliki 14 kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf b Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.K.N No 07 tanggal 07 Oktober 2022. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris juga dapat tergambarkan dari surat-surat Dewan Komisaris, baik yang ditujukan kepada Direksi, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham seri A Dwiwarna, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai Pemegang Saham seri B (*Holding*) dan/atau pihak lain.

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2024

To support the effective execution of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners undertook a series of strategic measures throughout 2024. The activities conducted by the Board during the year included, among others:

1. Board of Commissioners Meeting

Meetings of the Board of Commissioners are held to review the Company's monthly performance analysis, find out the development of conditions and actual problems experienced by the company including providing advice/suggestions to the Board of Directors. Meetings of the Board of Commissioners consist of Internal Meetings, Meetings by inviting the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders (GMS).

During the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners conveyed its opinions, responses, and input to the shareholders, including proposals on the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) as well as other significant matters, as documented in the Minutes of the GMS No. 01/RUPS/DIR/II/2024 dated January 30, 2024, regarding the Approval of the 2024 Corporate Work Plan and Budget. Additionally, this was done through the approval of the annual report as outlined in the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 02/RUPS/DIR/VII/2024 dated July 8, 2024, concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year.

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 12 (twelve) internal meetings, 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors, and 2 (two) General Meetings of Shareholders (GMS).

2. Field Visits by the Board of Commissioners

The Board of Commissioners conducted field visits to obtain clearer and more accurate insights into areas or issues requiring attention. Throughout 2023, the Board conducted a total of 6 (six) such visits.

3. Correspondence from the Board of Commissioners

In accordance with the Company's Articles of Association, the primary duties of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo are to supervise and provide advice. In performing these duties, the Board of Commissioners holds 14 obligations as outlined in Article 15, paragraph 2, point (b) of Notarial Deed No. 07 dated October 7, 2022, by Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.K.N. The execution of these duties and responsibilities is also reflected in the Board's correspondence, addressed to the Board of Directors, the Minister of State-Owned Enterprises as the holder of Series A Dwiwarna shares, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the holder of Series B shares (*Holding*), and/or other relevant parties.

Berikut adalah surat-surat Dewan Komisaris selama tahun 2024 yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris, diantaranya mengenai:

- a. Tanggapan/Pendapat/Saran Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
- b. Tanggapan/Pendapat/Saran Dewan Komisaris terkait pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham, serta penelaahan usulan remunerasi Direksi.
- c. Penyampaian laporan berkala tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- d. Proses pengusulan dan penunjukan auditor eksternal
- e. Tanggapan/Pendapat/Saran terkait transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham misalnya perubahan pejabat, penyertaan modal, Good Corporate Governance, penyewaan asset, dan pelepasan dan penghapusan aktiva tetap.
- f. Tanggapan/Pendapat/Saran terkait efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah pengaduan yang berkaitan dengan BUMN, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga
- g. Penjaringan dan Pengusulan Bakal Calon Direksi serta Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi di Perusahaan dan Anak Perusahaan
- h. Tanggapan/Pendapat/Saran terkait permasalahan Penting di Perusahaan
- i. Persetujuan Cuti Direksi
- j. Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas dan Kunjungan Lapangan; dan
- k. Hal-hal lain; serta
- l. Keputusan Dewan Komisaris

4. Pelatihan/Workshop/Seminar Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan wawasan maka Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan yang diimplementasikan dalam bentuk mengikuti/menghadiri Pelatihan, Seminar, Workshop, Sertifikasi, atau pertemuan ilmiah di dalam atau di luar negeri. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengikuti 25 (dua puluh lima) kegiatan.

5. Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

Dalam rangka meningkatkan sinergitas internal perusahaan dan membangun hubungan yang harmonis dengan *stakeholders* PT Jamkrindo, maka Dewan Komisaris juga melaksanakan kegiatan sosial dan kegiatan lain, diantaranya: Rapat Kerja Nasional PT Jamkrindo, Peringatan Hari Jadi PT Jamkrindo, Acara bulan Ramadhan dan Halal bi Halal, *Benchmarking* atau *Sharing Session*, dan lain-lain.

6. Isu dan Permasalahan Strategis

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan, Dewan Komisaris telah melakukan monitoring tindak lanjut atas masalah-masalah penting di perusahaan, serta berupaya aktif dalam membantu Direksi untuk menyelesaikan

The following are correspondence issued by the Board of Commissioners in 2024 related to the execution of its duties and responsibilities, including matters concerning:

- a. Responses/Opinions/ Recommendations of the Board of Commissioners on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long Term Plan (RJPP).
- b. Responses/Opinions/ Recommendations of the Board of Commissioners related to monitoring the performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders, as well as reviewing the proposed remuneration of the Board of Directors.
- c. Submission of periodic reports on the monitoring duties of the Board of Commissioners.
- d. Process for proposing and appointing external auditors.
- e. Responses/Opinions/ Recommendations related to transactions or actions of the Board of Directors within the authority of the Board of Commissioners or Shareholders, such as changes in officials, capital participation, Good Corporate Governance, asset leasing, as well as the disposal and write-off of fixed assets.
- f. Responses/Opinions/ Recommendations related to the effectiveness of external and internal audits, the review of complaints concerning SOEs, as well as compliance with laws, regulations, and agreements with third parties.
- g. Screening and Nomination of Candidates for the Board of Directors, as well as the Appointment of Acting Directors in the Company and its Subsidiaries.
- h. Responses/Opinions/ Recommendations related to important issues within the Company.
- i. Approval of the Board of Directors' leave.
- j. Implementation of Official Business Travels and Field Visits; and
- k. Other matters; as well as
- l. Decision of the Board of Commissioners

4. Training/Workshop/Seminar for the Board of Commissioners

To enhance knowledge, competence, and insight, the Board of Commissioners participated in various activities such as training, seminars, workshops, certification programs, or academic meetings held both domestically and internationally. Throughout 2024, the Board of Commissioners took part in 25 (twenty-five) such activities.

5. Social Activities and Other Events

To enhance internal synergy within the Company and foster harmonious relationships with PT Jamkrindo's stakeholders, the Board of Commissioners also participated in social and other activities. These included: PT Jamkrindo's National Work Meeting, PT Jamkrindo's Anniversary Celebration, Ramadan and Halal bi Halal events, benchmarking or sharing sessions, and various other engagements.

6. Strategic Issues and Challenges

As part of its monitoring duties, the Board of Commissioners has monitored the follow-up on key issues within the Company and actively supported the Board of Directors in addressing these challenges by providing advice and

setiap masalah yang terjadi dengan memberikan saran dan masukan. Perkembangan tindak lanjut permasalahan strategis dibahas secara intensif dalam kesempatan rapat bulanan Dewan Komisaris.

Beberapa permasalahan strategis di Jamkrindo yang dapat dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham (Kementerian BUMN), dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), antara lain mengenai:

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- b. Penyertaan Modal Negara.
- c. Evaluasi atas Pelaksanaan Audit 2023 dan Usulan Penunjukan KAP Auditor Pelaksana General Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.
- d. Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Bergerak.
- e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Investasi Perusahaan.
- f. Rancangan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 20225-2029.
- g. Laporan Tahunan Audited Tahun Buku 2023.
- h. Penyampaian Update Data dan Informasi terkait Pemetaan Talenta BOD-1.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan informasi yang lebih terperinci, Dewan Komisaris melaksanakan kunjungan langsung ke lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau secara langsung berbagai hal yang memerlukan perhatian khusus. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan 5 (lima) kali kunjungan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Kunjungan Date of Visits	Tempat Tujuan Destination	Perihal Matters	Peserta Attendees
1.	26 Januari 2024 January 26, 2024	Kantor Wilayah VII Denpasar dan mitra bisnis Perbankan Denpasar Regional Office VII and Banking business partners	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah VII Denpasar dan Kantor Cabang Binaan serta diskusi dengan mitra bisnis Perbankan Monitoring and Evaluation of the Performance of the Denpasar Regional Office VII and its Assisted Branch Offices, along with discussions with Banking business partners	1. Krisna Wijaya 2. M Muchlas Rowi 3. Angger P Yuwono 4. Safari Mirza
2.	26 April 2024 April 26, 2024	Kantor Wilayah IV Bandung dan mitra bisnis Perbankan Bandung Regional Office IV and Banking business partners	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah VII Bandung dan Kantor Cabang Binaan serta diskusi dengan mitra bisnis Perbankan Monitoring and Evaluation of the Performance of the Bandung Regional Office VII and its Assisted Branch Offices, along with discussions with Banking business partners	1. M Muchlas Rowi 2. Ari Wahyuni 3. Hernita Alius 4. Angger P Yuwono 5. Safari Mirza 6. Fahrul Ismaeni 7. Lando Simatupang
3.	31 Mei 2024 May 31, 2024	Kantor Wilayah V Semarang dan mitra bisnis Perbankan Semarang Regional Office V and Banking business partners	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah V Semarang dan Kantor Cabang Binaan serta diskusi dengan mitra bisnis Perbankan Monitoring and Evaluation of the Performance of the Semarang Regional Office V and its Assisted Branch Offices, along with discussions with Banking business partners	1. M Muchlas Rowi 2. Ari Wahyuni 3. Hernita Alius 4. Angger P Yuwono 5. Dedit S Utomo 6. Fahrul Ismaeni
4.	30 Agustus 2024 August 30, 2024	Kantor Cabang Batam dan mitra bisnis Perbankan Batam Branch Office and Banking business partners	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah I Medan dan Kantor Cabang Binaan serta diskusi dengan mitra bisnis Perbankan Monitoring and Evaluation of the Performance of Medan Regional Office I and its Assisted Branch Offices, along with discussions with Banking business partners	1. M Muchlas Rowi 2. Ari Wahyuni 3. Hernita Alius 4. Angger P Yuwono 5. Setyo Puji Hartono 6. Dedit S Utomo
5.	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Kantor Cabang Lampung Lampung Branch Office	Monitoring Evaluasi Kinerja Kanwil Palembang dan Kanca Lampung Performance Evaluation Monitoring of Palembang and Kanca Lampung Regional Office	1. Hernita Alius 2. Angger P Yuwono 3. Setyo Puji Hartono 4. Dedit S Utomo

recommendations. The progress on strategic issues is discussed intensively during the Board of Commissioners' monthly meetings.

Several strategic issues at Jamkrindo that may be reported by the Board of Commissioners to the Shareholders (the Ministry of State-Owned Enterprises) and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) include the following:

- a. The Company's Work Plan and Budget (RKAP).
- b. State Equity Participation.
- c. Evaluation of the 2023 Audit Implementation and Proposal for Appointment of the Public Accounting Firm (KAP) to Conduct the General Audit of the 2024 Financial Statements.
- d. Write-off and Transfer of Movable Assets.
- e. Monitoring and Evaluation of the Company's Investment Performance.
- f. Draft of the Company's Long-Term Work Plan (RJPP) for 2025 – 2029.
- g. Audited Annual Report for the 2023 Fiscal Year.
- h. Submission of Updated Data and Information Related to BOD-1 Talent Mapping.

Working Visit of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners conducts field visits to gain a deeper understanding and more detailed information. This activity aims to directly monitor various matters that require special attention. Throughout 2024, the Board of Commissioners has conducted a total of 5 (five) visits, with the following details:

Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Berdasarkan pasal 15 ayat 2 huruf b, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menjalankan 14 kewajiban yang mencakup berbagai aspek pengawasan dan saran strategis. Kinerja Dewan Komisaris dapat dilihat melalui surat-surat resmi yang dikirimkan, baik kepada Direksi, Menteri BUMN sebagai pemegang saham, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku *holding*, maupun pihak terkait lainnya.

Rencana Program Kerja Dewan Komisaris 2025

Dewan Komisaris telah merumuskan rencana program kerja tahun 2025 yang mencakup langkah-langkah strategis untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat

Tugas Dewan Komisaris adalah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat. Adapun pokok-pokok kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025, yaitu:

a. Rapat Internal Dewan Komisaris.

Merupakan rapat rutin bulanan (minimal satu kali dalam sebulan) yang dilaksanakan secara internal Dewan Komisaris dan dihadiri oleh Organ Pendukung (Komite-Komite, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Dewan Komisaris) dengan agenda utamanya adalah pembahasan kinerja bulanan perusahaan baik kinerja keuangan maupun operasional serta isu strategis. Apabila diperlukan, rapat internal Dewan Komisaris juga dapat dilakukan dengan agenda yang diajukan oleh Komite. Dalam rapat internal Dewan Komisaris juga dapat membahas serta memutuskan hal-hal terkait dengan kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar.

b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan rapat Dewan Komisaris yang dalam pelaksanaannya dapat mengundang Direksi untuk meminta penjelasan atas masalah atau capaian kinerja perusahaan, aksi korporasi, dan hal-hal lain yang dianggap menjadi perhatian. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) dilaksanakan rutin setiap bulan (minimal satu kali dalam sebulan).

Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat menyelenggarakan Rapat tematik atas permasalahan/isu strategis tertentu dengan mengundang Direktur Teknis dan/atau Divisi terkait guna memperoleh penjelasan untuk dilakukan pembahasan lebih detail dan spesifik dari agenda rapat.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2025

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2025 dilakukan dalam rangka memperoleh pengesahan dari Pemegang Saham (Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan PT Bahana Pembinaan

The Board of Commissioners has an important role in monitoring and providing guidance to the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association. Based on article 15 paragraph 2 letter b, the Board of Commissioners is required to conduct 14 obligations covering various aspects of monitoring and strategic advice. The performance of the Board of Commissioners can be viewed through official letters sent to the Board of Directors, the Minister of SOEs as the shareholder, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the holding company, and other related parties.

Board of Commissioners Work Program Plan for 2025

The Board of Commissioners has formulated a work program plan for 2025 that includes strategic measures to support the achievement of the Company's goals in a sustainable manner. The measures taken are as follows:

1. Aspects of Monitoring and Providing Advice

The duties of the Board of Commissioners are to conduct monitoring and giving advice. The main activities to be conducted in 2025 are:

a. Board of Commissioners' Internal Meeting.

This activity is a routine monthly meeting (minimum twice a month) held internally by the Board of Commissioners and attended by supporting organs (Committees, Secretary to the Board of Commissioners, and Staff of the Board of Commissioners) with the main agenda being a discussion of the Company's monthly financial and operational performance. If necessary, internal meetings of the Board of Commissioners can also be held every week with an agenda proposed by the Committee. In internal meetings, the Board of Commissioners may also discuss and decide matters related to the authority of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.

b. Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors.

This activity is basically a meeting of the Board of Commissioners, which in practice may invite the Board of Directors to ask for clarification on Company performance issues and other matters deemed important. Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors are held routinely every month (at least once a month).

In addition, the Board of Commissioners may also hold thematic meetings on certain issues by inviting the relevant Technical Director and/or Division to obtain a more detailed and specific explanation and discussion of the proposed agenda.

c. General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2025 RKAP

The 2025 RKAP General Meeting of Shareholders (GMS) is held in order to obtain approval from the Shareholders (the Minister of SOEs as the Series A Dwiwarna Shareholder and PT Bahana Pembinaan

Usaha Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B) atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2025 yang sebelumnya telah dibahas bersama dengan Dewan Komisaris. Pelaksanaan rapat biasanya pada bulan pertama pada tahun buku berjalan.

d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2024 (Audited)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kinerja perusahaan Tahun Buku 2024 (*Audited*) dilakukan dalam rangka memperoleh pengesahan dari Pemegang Saham (Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B) atas hasil kinerja perusahaan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh auditor eksternal independen dan juga telah dibahas bersama dengan Dewan Komisaris. Pelaksanaan rapat biasanya pada semester pertama pada tahun buku berikutnya.

Adapun rapat pembahasan mengenai kegiatan audit dimaksud secara bersama antara Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan Direksi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi sebagai dasar bagi Dewan Komisaris menyusun tanggapan untuk disampaikan kepada Pemegang Saham.

e. Pemberian Saran dan Nasihat kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan

Pemberian saran dan nasihat atau masukan kepada Direksi dapat disampaikan dalam Rapat atau Pertemuan Dewan Komisaris dengan Direksi. Pemberian saran dan masukan tersebut didokumentasikan dalam risalah rapat dan/atau surat tersendiri yang memuat hal-hal terkait dengan permasalahan-permasalahan strategis, antara lain:

1) Pencapaian Kinerja Keuangan dan Operasional

Dewan Komisaris bersama dengan Organ Pendukung melakukan telaah atas laporan berkala dan tahunan yang disampaikan oleh Direksi. Monitoring capaian kinerja juga rutin dilakukan setiap bulan dalam rapat Dewan Komisaris. Evaluasi kinerja keuangan dan operasional dilakukan pada Perusahaan termasuk Anak Perusahaan.

2) Pencapaian Kinerja Unit Kerja Daerah

Monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja di daerah (Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Unit Pelayanan) dapat dilakukan secara berkala baik melalui laporan manajemen triwulan dan/atau tahunan maupun per bulan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Pengawasan kinerja unit kerja di daerah juga bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja pada unit-unit yang telah diagendakan dan/atau dipandang perlu monitoring & evaluasi kinerja dan diselenggarakan melalui diskusi secara langsung.

Usaha Indonesia as the Series B Shareholder) on the proposed Work Plan and Corporate Budget for the 2025 Fiscal Year which previously discussed with the Board of Commissioners. Meetings are usually held in the first month of the current fiscal year.

d. General Meeting of Shareholders (GMS) on the Audited Financial and Operational Performance for the 2024 Fiscal Year

The General Meeting of Shareholders (GMS) for the Company's performance for the 2024 Fiscal Year (Audited) is held in order to obtain approval from the Shareholders (Ministry of BUMN as the Series A Dwiwarna Shareholder and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the Series B Shareholder) for the results of the Company's performance for the 2024 fiscal year which has been audited by an independent external auditor and has also been discussed with the Board of Commissioners. Meetings are usually held in the first semester of the following fiscal year

Meanwhile, joint discussions between the Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners, and the Board of Directors are held at least 1 (one) time a year to obtain explanations and clarifications as a basis for the Board of Commissioners to prepare responses to be submitted to Shareholders.

e. Provision of Advice and Suggestion to the Board of Directors in the Management of the Company

Provision of suggestions and advice or input to the Board of Directors is conveyed in the Board of Commissioners' Meeting with the Board of Directors. The provision of suggestions and input is documented in the minutes of the meeting and/or a separate letter which contains matters related to strategic issues, including:

1) Achievement of financial and operational performance

The Board of Commissioners together with the Supporting Organs reviewed the periodic and annual reports submitted by the Board of Directors. Monitoring of performance achievements is also routinely carried out every month in the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors. Financial and operational performance is carried out at the Company, Subsidiaries, and Branch Offices.

2) Performance Achievement of Regional Work Units

Monitoring and evaluation of the performance of work units in the regions (regional offices, branch offices and service unit offices) is carried out regularly either through quarterly and annual management reports or monthly in the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors. Branch performance monitoring can also be carried out by conducting work visits to work units that have been scheduled and/or deemed necessary for direct evaluation and discussion.

3) Pemenuhan Kepatuhan (*compliance*)

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi beserta jajaran manajemen dalam; menjalankan peraturan perundang-undangan, perjanjian dengan pihak ketiga serta menjalankan pengurusan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP yang telah ditetapkan.

4) Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan Investasi

Dalam rangka optimalisasi kinerja investasi perusahaan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan portofolio investasi serta pelaksanaannya, dan evaluasi capaian kinerja serta apabila diperlukan, memberikan saran dan nasihat perbaikan secara spesifik atas pelaksanaan kegiatan investasi. Pengawasan kegiatan dan kinerja investasi perusahaan atau tindakan pengurusan perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), manajemen risiko yang berkelanjutan, dan ketentuan perundang-undangan termasuk regulator.

5) Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan pemberian saran/masukan/arahan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Berikut hal-hal yang terkait pelaksanaan GCG di Perusahaan, antara lain:

a) Penyusunan RJPP dan RKAP

Dewan Komisaris menjalankan mekanisme untuk memberikan tanggapan atas rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disampaikan oleh Direksi serta menyampaikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Pemegang Saham.

b) Perubahan Lingkungan Bisnis dan Permasalahannya yang Berdampak pada Usaha dan Kinerja Perusahaan

Dewan Komisaris dibantu Komite mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada kegiatan usaha dan/atau kinerja perusahaan. Jika isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya berdampak signifikan, maka Dewan Komisaris akan memberikan respon dan melakukan telaah visi dan misi dikaitkan dengan perubahan lingkungan bisnis tersebut. Dengan demikian, permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan termonitor melalui respon Dewan Komisaris.

3) Fulfillment of Compliance

The Board of Commissioners supervises and monitors the compliance of the Board of Directors in carrying out applicable laws and regulations, agreements with third parties, and in managing the Company according to the RKAP and/or RJPP.

4) Policy and Implementation of Investment management

To optimize the Company's investment performance, the Board of Commissioners monitors investment portfolio management policies and periodically evaluates investment performance achievements as well as provides specific suggestions and recommendations for improvements needed with regard to the monitoring of investment performance. Monitoring of the Company's investment activities and performance, as well as corporate management actions, is carried out in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), sustainable risk management, and applicable laws and regulations, including those set by regulatory authorities.

5) Implementation of Good Corporate Governance

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is tasked with monitoring and providing suggestions/inputs/guidance on management policies and the course of management of the Company, which among other things is contained in letters and/or minutes of meetings. The following are matters related to the implementation of GCG in the Company, including:

a) Preparation of RJPP and RKAP

The Board of Commissioners operates a mechanism to provide approval or response to the draft RKAP and RJPP submitted by the Board of Directors as well as submit written opinions and suggestions to Shareholders.

b) Changes in the Business Environment and the Problems that Impact the Company's Business and Performance

The Board of Commissioners identifies and collects information on the business environment and problems that are expected to impact the Company's business and Company performance. If the issue of changes in the business environment and the problems have a significant impact, the Board of Commissioners will respond and review the vision and mission in relation to the changes in the business environment. Therefore, there are no problems/challenges (threats and opportunities) that occur and have a significant impact on the Company's performance which the Board of Commissioners does not respond to.

c) Respon/Tindak Lanjut atas Saran, Permasalahan atau Keluhan dari *Stakeholder*.

Dewan Komisaris menjalankan mekanisme untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan, atau keluhan dari *stakeholder*, termasuk monitoring dan evaluasi tindak lanjut arahan dari Pemegang Saham, serta menyampaikan kepada Direksi perihal saran penyelesaian.

d) Kebijakan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen risiko bertujuan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi perusahaan yang meliputi; kebijakan; perencanaan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi; serta pelaporan. Dewan Komisaris berperan dalam memberikan arahan dengan tujuan meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan, diantaranya meliputi:

- i) Rencana kerja unit manajemen risiko;
- ii) Hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya;
- iii) Laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan Direksi.

e) Kebijakan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris memberikan saran dan arahan atas kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi yang diterapkan oleh perusahaan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi & yang terjadi.

Selain itu, Dewan Komisaris dibantu Organ Pendukung juga melakukan evaluasi, mengarahkan dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) yang sedikitnya memuat mengenai peran TI terhadap pengembangan bisnis termasuk transformasi digital, organisasi TI, rencana pembiayaan TI, dan peta jalan TI.

f) Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir dan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengelolaan SDM, khususnya manajemen pengembangan SDM dan karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan promosi, mutasi dan demosi serta pelaksanaannya. Termasuk tanggapan atas usulan Direksi berkenaan dengan pemilihan calon Anggota Direksi (perusahaan) kepada Pemegang Saham, dan pemilihan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan, juga *updating* mengenai manajemen talenta termasuk diantaranya meliputi data *talent pool*, *nominated talent* dan *selected talent* kepada Pemegang Saham.

c) Response/Follow-Up on Suggestions, Problems, or Complaints from Stakeholders

The Board of Commissioners operates a mechanism to respond/follow up on suggestions, problems, or complaints from stakeholders, including monitoring and evaluating the follow-up of directives from Shareholders, as well as submitting suggestions to the Board of Directors for resolution.

d) Risk Management Policy

The implementation of risk management aims to protect and create value for the company, encompassing policies, planning, execution, monitoring, evaluation, and reporting. The Board of Commissioners provides guidance on improving the quality of the Company's risk management policies and implementation which include:

- i) Risk management unit work plan;
- ii) Results of risk analysis on the RKAP design and its handling strategy;
- iii) Periodic reports on the implementation of risk management submitted by the Board of Directors.

e) Implementation of Information Technology System Policy

The Company and the Board of Commissioners provide guidance regarding the policies and implementation of information technology systems used by the Company

Furthermore, the Board of Commissioners, with the support of its supporting organs, also evaluates, guides, and monitors the Information Technology (IT) Strategic Plan. This plan includes, at a minimum, the role of IT in business development, including digital transformation, IT organizational structure, IT funding plans, and the IT roadmap.

f) Policy and Implementation of Career Development and Human Capital Management (HCM)

The Board of Commissioners provides guidance regarding HC management policies, particularly HC management and career development in the Company, promotion systems and procedures, transfers and promotions, transfers and demotions, in the Company and their implementation. It includes the Board of Commissioners' response to the Board of Directors' proposal regarding the selection of candidates for members of the Board of Directors (of the Company) to Shareholders, and the selection of candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/Joint venture according to the established policies and selection criteria, as well as updates on talent management, which includes information on the talent pool, nominated talents, and selected talents, to the Shareholders.

- g) **Kebijakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) dan Pelaksanaannya.**

Dewan Komisaris menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Kebijakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan agar senantiasa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) termasuk pelaksanaannya.

- h) **Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaannya**

Dewan Komisaris menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya.

- i) **Kebijakan Mutu dan Pelayanan**

Dewan Komisaris memberikan saran dan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan perusahaan serta pelaksanaannya.

- j) **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga**

Dewan Komisaris menjalankan pengawasan dan memberikan nasihat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. Apabila terdapat pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan tindakan sesuai kewenangannya dan melaporkan kepada Pemegang Saham.

- k) **Transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham**

Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- l) **Efektivitas Pelaksanaan Telaah Pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan**

Dewan Komisaris menjalankan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan telaah pengaduan terkait dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.

- m) **Pemantauan kinerja Direksi dan Pelaporan kepada Pemegang Saham**

Dewan Komisaris menjalankan pemantauan kinerja Direksi berdasarkan telaahan atas kriteria, target, dan indikator kinerja utama sebagaimana tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi. Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi baik kolektif dan/atau individu kepada Pemegang Saham.

- n) **Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Dewan Komisaris melaksanakan pemantauan serta memberikan arahan tentang penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap:

- g) **Accounting Policies and preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK) and its Implementation.**

The Board of Commissioners carries out monitoring and provides advice on Accounting Policies and the preparation of financial reports in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK) and its implementation.

- h) **Goods and Services Procurement Policy and its Implementation**

The Board of Commissioners carries out monitoring and provides advice on goods and services procurement policies and their implementation.

- i) **Quality and Service Policy**

The Board of Commissioners provides guidance regarding the Company's quality and service policies.

- j) **Compliance with Legislation and Agreements with Third Parties**

The Board of Commissioners has done monitoring and provides advice on compliance with laws and regulations and agreements with third parties. If there is a violation by the Board of Directors, the Board of Commissioners takes action according to their authority and reports it to the Shareholders

- k) **Transaction or actions of the Board of Directors within the scope of the authority of the Board of Commissioners or Shareholders**

The Board of Commissioners discusses transactions or actions of the Board of Directors within the scope of the authority of the Board of Commissioners or Shareholders, as stipulated in the Company's Articles of Association and/or determined in the General Meeting of Shareholders

- l) **The effectiveness of the implementation of the review of complaints related to the Company**

The Board of Commissioners monitors the effectiveness of the review of complaints related to the Company received by the Board of Commissioners.

- m) **Monitoring the performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders**

The Board of Commissioners monitors the performance of the Board of Directors by reviewing the criteria, targets, and key performance indicators outlined in the Directors' Management Contract. The Board of Commissioners reports the results of its performance evaluation, whether conducted collectively or individually, to the Shareholders.

- n) **Implementation of Good Corporate Governance Principles**

The Board of Commissioners carries out monitoring and provides guidance regarding the application of the principles of Good Corporate Governance to:

- i) Laporan hasil assessment/review atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut area of improvement hasil assessment GCG oleh Direksi;
- ii) Laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan.
- o) Penelaahan usulan Remunerasi Direksi**
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham setiap tahun pada saat Pengesahan Laporan Tahunan. Usulan remunerasi Direksi ditanggapi oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan penilaian capaian kinerja Direksi.
- p) Pengukuran dan Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris**
Pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara tahunan melalui mekanisme *self assessment*. Pada saat pengesahan RKAP perusahaan, Dewan Komisaris mengajukan usulan *Key Performance Indicators* untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham dan dijadikan salah satu dasar penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pada saat pengesahan Laporan Tahunan perusahaan, Dewan Komisaris menyampaikan hasil pengukuran dan penilaian atas pencapaian *Key Performance Indicators* tersebut kepada Pemegang Saham di dalam laporan tugas pengawasan.
- f. Evaluasi Kinerja Auditor Eksternal**
Kegiatan ini merupakan salah satu program Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara khusus dengan bantuan Komite Audit guna mengevaluasi kinerja auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP). Kegiatan ini dilakukan guna memastikan perusahaan mendapatkan mitra audit yang independen, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal**
Kegiatan ini juga merupakan program Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara khusus dengan bantuan Komite Audit guna mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dalam pengurusan perusahaan. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan bahwa perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan SOP dan ketentuan perundang-undangan.
- h. Pengawasan terhadap Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan Pelaksanaannya**
Kegiatan ini dilaksanakan tidak secara langsung kepada entitas anak perusahaan/perusahaan patungan, melainkan melalui komunikasi dengan Direksi perusahaan induk khususnya dalam forum rapat bulanan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan usaha anak perusahaan/perusahaan patungan.
- i) Report on the results of the assessment/review of the implementation of Good Corporate Governance, GCG code, and other technical policies/provisions, as well as monitoring the follow-up of areas of improvement on the results of the GCG assessment by the Board of Directors;
- i) GCG report which is disclosed in the annual report.
- o) Review of the Board of Directors' remuneration proposal**
The remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined by the Shareholders every year at the ratification of the Annual Report. The Board of Commissioners needs to respond to the Board of Commissioners' remuneration proposal in accordance with applicable regulations and the Board of Directors' performance assessment.
- p) Measurement and Assessment of the Performance of the Board of Commissioners**
Measurement and assessment of the performance of the Board of Commissioners is carried out annually through a self assessment mechanism. At the time of ratification of the Company's RKAP, the Board of Commissioners submits Key Performance Indicators proposals for approval from Shareholders and is used as one of the basis for assessing the performance of the Board of Commissioners. At the time of ratification of the Company's Annual Report, the Board of Commissioners conveys the results of measurement and assessment of the achievement of the Key Performance Indicators to Shareholders in the Monitoring Task Report.
- f. External Auditor Performance Evaluation**
This activity is one of the programs of the Board of Commissioners which is carried out specifically with the assistance of the Audit Committee to evaluate the performance of the external auditor (Public Accountant Office/KAP). This activity is carried out to ensure that the Company gets an audit partner who is independent, credible, and accountable.
- g. Evaluation of the Internal Control System**
This activity is also a program of the Board of Commissioners which is carried out specifically with the assistance of the Audit Committee to evaluate the effectiveness of the implementation of the Internal Control System in managing the Company. This activity is carried out to ensure that the Company carries out its operational activities in accordance with the SOP and applicable laws and regulations.
- h. Monitoring of Subsidiaries/Joint Venture and Their Implementation**
This activity is not directly conducted to the subsidiaries/joint venture, but through communication with the Board of Directors of the parent entity, especially in the monthly meeting forum. This activity is intended to ensure the continuity of the subsidiary/joint venture business.

Dalam pengawasan, Dewan Komisaris juga memberikan arahan tentang kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. Komite melakukan evaluasi terhadap arah pengelolaan dan kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan, serta membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran dan masukan perbaikan kepada Direksi.

2. Aspek Pelaporan

Aspek pelaporan meliputi kegiatan Dewan Komisaris dalam menyusun rencana kerja tahun 2026 dan menyampaikan laporan berkala selama tahun 2025 sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan lainnya, serta beberapa hal lainnya seperti:

- a. Memberikan Tanggapan atau Pendapat Terhadap Hal-Hal yang Memerlukan Persetujuan/Rekomendasi/Keputusan/Tanggapan Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Pengusulan Auditor Eksternal (Akuntan Publik) kepada Pemegang Saham;
 - 2) Penunjukkan Perusahaan Pemeringkat;
 - 3) Pelepasan dan Penghapusan aktiva tetap dengan umur ekonomis yang lazim berlaku;
 - 4) Pengusulan wakil perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - 5) Usulan bakal calon Direksi perusahaan;
 - 6) Perubahan Struktur Organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - 7) Cuti Tahunan Direksi;
 - 8) Perubahan Susunan Organ Dewan Komisaris;
 - 9) Laporan Keuangan dan Kegiatan Perusahaan (triwulanan & tahunan);
 - 10) dan Lainnya.
- b. Menyusun Laporan Berkala Tugas Pengawasan (Triwulanan) Tahun 2025.
- c. Menyusun Laporan Berkala Hasil Evaluasi atas Kinerja Perusahaan Tahun 2025 (Triwulanan).
- d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2026.
- e. Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Dewan Komisaris Tahun 2026.

3. Aspek Dinamis

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2025 adalah:

In its monitoring, the Board of Commissioners also provides guidance regarding policies and management of subsidiaries/joint companies. The Committee evaluates the direction of management and performance of subsidiaries/joint ventures related to the Company's business development vision, as well as assisting the Board of Commissioners in providing suggestions and input for improvements to the Board of Directors.

2. Reporting Aspect

The reporting aspect includes the activities of the Board of Commissioners in preparing the 2026 work plan and submitting periodic reports throughout 2025, in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. It also covers several other matters, such as:

- a. Provide Responses or Opinions on Matters Requiring Approval/Recommendations/Decisions/Responses of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association or other regulations, including:
 - 1) Proposal of External Auditor (Public Accountant) to Shareholders;
 - 2) Appointment of a Rating Agency;
 - 3) Disposal and Write-Off of Fixed Assets with Standard Economic Lifespan;
 - 4) Proposals for representatives from the Company to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint ventures;
 - 5) Proposal for Candidates for the Company's Board of Directors;
 - 6) Changes to the organizational structure one level below the Board of Directors;
 - 7) Directors Leave Permit;
 - 8) Changes in the Composition of the Board of Commissioners' Organs;
 - 9) Company Financial and Activity Reports, both quarterly and annually;
 - 10) And Others.
- b. Prepare 2025 Monitoring Duty Periodic Reports (Quarterly).
- c. Prepare Periodic Reports on the Evaluation Results of the Company's Performance in 2025 (Quarterly).
- d. Prepare the 2025 Board of Commissioners Work Plan and Budget.
- e. Prepare the Performance Achievement Indicators (PAI) for the Board of Commissioners for 2025

3. Dynamic Aspect

Activities to be done by the Board of Commissioners in 2025 are:

a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan/atau Cabang.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan *fact finding* serta mengevaluasi melalui diskusi dengan Direksi dan/atau Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Unit Pelayanan, pejabat lainnya dan karyawan perusahaan mengenai segala tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang dan/atau Kantor Unit Pelayanan serta permasalahan yang dihadapi.

Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dipergunakan Dewan Komisaris untuk didiskusikan dalam rapat Dewan Komisaris dan apabila diperlukan juga disampaikan kepada Direksi agar dilakukan langkah tindak lanjut perbaikan.

b. Seminar/Workshop/Pelatihan/Studi Banding

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, kompetensi dan/atau refreshment bagi anggota-anggota Dewan Komisaris dan Organ Pendukung di bawah Dewan Komisaris sehingga ilmu yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

a. Monitoring and Evaluation of the Performance of Regional Offices and/or Branches.

This activity aims to obtain information and fact finding as well as evaluate and discuss with the Board of Directors, Heads of Regional Offices, Heads of Branch Offices, Heads of Service Unit Offices, other officials, and Company employees regarding all actions that have been and will be carried out by Regional Offices and/ or Branch Offices and/or Service Unit Offices and problems encountered.

Reports on the results of performance monitoring and evaluation are used by the Board of Commissioners to be discussed in the Board of Commissioners' meetings and if necessary submitted to the Board of Directors for follow-up.

b. Seminars/workshops/training/comparative studies

This activity aims to increase the knowledge, insight, competence and/or refreshment for members of the Board of Commissioners and Supporting Organs under the Board of Commissioners so that the knowledge gained is expected to be taken into consideration by the Board of Commissioners in carrying out its monitoring and advisory functions on the management of the Company carried out by the Board of Directors.

Penilaian Kinerja Organ Pendukung dan Komite di Bawah Dewan Komisaris Berikut Dasar Penilaiannya

Penilaian Kinerja Komite Audit

Evaluasi kinerja Komite Audit, baik secara individu maupun kolektif, dilakukan melalui self-assessment yang menggunakan metode evaluasi berdasarkan sistem yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Setiap kegiatan atau aktivitas dalam Program Kerja Komite Audit dirumuskan dengan kuantitas tertentu dan diberikan bobot, yang kemudian dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Komite Audit secara keseluruhan.

Assessment of The Performance of Supporting Organs and Committees Under The Board of Commissioners and The Basis for The Assessment

Audit Committee Performance Assessment

Performance Assessment of the Audit Committee, both individually and collectively, is conducted through self-assessment using the method in a system determined by the Board of Commissioners. Each activity in the Audit Committee Work Program is formulated with a certain quantity and given a weight, which is then used as a benchmark to assess the overall performance of the Audit Committee.

Hasil Pengukuran Kinerja Komite Audit
Audit Committee Performance Measurement Results

INDIKATOR INDICATOR	RUMUSAN FORMULATION	TARGET 1 Thn TARGET IN 1 Year	BOBOT WEIGHT	REAL [^]	SKOR SCORE
Aspek Pengawasan & Pengarahan: Aspect of Monitoring and Guidance			60%		60
Menyelenggarakan Rapat Komite Organize Committee Meetings	Jumlah rapat Komite Total Number of Committee Meetings	12 kali 12 times	15%	12 kali 12 time(s)	15
Mengikuti Rapat Dekom Attend The Board of Commissioners Meetings	Jumlah rapat Dekom Total Number of Board of Commissioners Meetings	12 kali 12 times	15%	12 kali 12 time(s)	15
Evaluasi terhadap Auditor Eksternal Assessment of the External Auditor	Jumlah rapat/surat/laporan Total Number of Meetings/Letters /Reports	1 kali 1 time	15%	1 kali 1 time(s)	15
Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal Evaluation of the Internal Control System	Jumlah rapat/surat/laporan Total Number of Meetings/Letters /Reports	2 kali 2 times	15%	2 kali 2 time(s)	15

Hasil Pengukuran Kinerja Komite Audit Audit Committee Performance Measurement Results

INDIKATOR INDICATOR	RUMUSAN FORMULATION	TARGET 1 Thn TARGET IN 1 Year	BOBOT WEIGHT	REAL ^A	SKOR SCORE
Aspek Pelaporan: Reporting Aspects:			30%		30
Menyusun program kerja tahunan Develop an annual work program	Jumlah Program Kerja Komite Total Number of Committee Work Programs	1 kali 1 time	5%	1 kali 1 time(s)	5
Membantu menyusun laporan/pendapat/saran kepada Pemilik Modal/Pemegang Saham Assist in compiling reports/opinions/ suggestions to Capital Owners/Shareholders	Jumlah surat Tanggapan Dekom Total number of the Board of Commissioner' Response Letters	4 kali 4 letters	10%	4 kali 4 time(s)	10
Membantu Dekom menyusun laporan tugas pengawasan Assist the Board of Commissioners in compiling supervisory duty reports	Jumlah Laporan Tugas Pengawasan Total Number of Monitoring Reports	4 kali 4 reports	10%	4 kali 4 time(s)	10
Membantu Dekom menyusun balasan/tanggapan surat Direksi Assist the Board of Commissioners prepare replies/responses to the letters of the Board of Directors	% jumlah surat yang ditanggapi sesuai ketentuan Total percentage of letters responded to as required	100%	5%	100%	5
Aspek Dinamis/Lain-lain: Dynamic/Other Aspects:			10%		22,5
Mengikuti kegiatan kunjungan Dekom Participate in visiting activities of the Board of Commissioners	Jumlah kunjungan yang diikuti Total number of visits attended	2 kegiatan 2 visits	5%	5 kegiatan 5 visit(s)	12,5
Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan Participate in competency and knowledge improvement activities	Jumlah pelatihan/seminar/workshop/yang diikuti Total number of trainings/seminars/ workshops attended	1 kegiatan 1 activity	5%	3 kegiatan 3 activity	10
Jumlah Bobot Total Weight			100%		112,5

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi, baik secara individu maupun kolektif, dilakukan melalui *self-assessment* yang menggunakan metode evaluasi berdasarkan sistem yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Setiap kegiatan atau aktivitas dalam Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dirumuskan dengan kuantitas tertentu dan diberikan bobot, yang kemudian dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi secara keseluruhan.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko, baik secara individu maupun kolektif, dilakukan melalui *self-assessment* menggunakan metode evaluasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Setiap kegiatan atau aktivitas dalam Program Kerja Komite Pemantau Risiko dirumuskan dengan kuantitas yang jelas dan diberikan bobot tertentu, yang kemudian dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Komite Pemantau Risiko secara keseluruhan.

Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee, both individually and collectively, is conducted through self-assessment using the method in a system determined by the Board of Commissioners. Each activity in the Nomination and Remuneration Committee Work Program is formulated with a certain quantity and given weight, which is then used as a benchmark to assess the overall performance of the Nomination and Remuneration Committee.

Performance Assessment of Risk Monitoring Committee

Performance Assessment of the Risk Monitoring Committee, both individually and collectively, is conducted through self-assessment using the method in a system determined by the Board of Commissioners. Each activity in the Risk Monitoring Committee Work Program is formulated with a certain quantity and given weight, which is then used as a benchmark to assess the overall performance of the Risk Monitoring Committee.

Hasil Pengukuran Kinerja Pemantau Risiko
Performance Assessment of the Risk Monitoring Committee

INDIKATOR INDICATOR	RUMUSAN FORMULATION	TARGET 1 Thn TARGET IN 1 Year	BOBOT WEIGHT	REAL ^A	SKOR SCORE
Aspek Pengawasan & Pengarahan: Aspect of Monitoring and Guidance			60%		60%
Menyelenggarakan Rapat Komite Organized Committee Meetings	Jumlah rapat Komite Total Number of Committee meetings	12 kali 12 meetings	20%	12 kali 12 meetings	20%
Mengikuti Rapat Internal dengan Dewan Komisaris Participated in internal meetings with the Board of Commissioners	Jumlah rapat Dewan Komisaris Total number of Board of Commissioners meetings	12 kali 12 meetings	20%	12 kali 12 meetings	20%
Mengikuti Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Teknis Participated in the Board of Commissioners' Meeting with the Technical Director	Jumlah rapat Total Number of Meetings	12 kali 12 meetings	20%	12 kali 12 meetings	20%
Aspek Pelaporan: Reporting Aspects:			30%		30%
Menyusun program kerja tahunan Komite (RKA Komite) Prepared the Committee's annual work program (RKA Committee)	Jumlah Program Kerja Komite Total Number of Committee Work Programs	1 kali 1 time(s)	15%	1 kali 1 time(s)	15%
Menyusun Laporan triwulanan/laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Prepared quarterly reports/annual reports on the implementation of the Committee's duties	Jumlah Laporan Tugas Pengawasan Total Number of Monitoring Reports	4 kali 4 reports	10%	4 kali 4 reports	10%
Membantu Dewan menyusun balasan/ tanggapan surat Direksi. (Laporan Kinerja Investasi periodik setiap bulan) Assist the Board of Directors prepare replies/ responses to the Board of Directors' letters. (Periodic Investment Performance Report every month)	% jumlah surat yang ditanggapi sesuai ketentuan Total percentage of letters responded to as required	100%	5%	100%	5%
Aspek Pelaporan: Reporting Aspects:			10%		10,50%
Kunjungan kerja ke Kantor Cabang/ Perwakilan dalam rangka pengumpulan data dan evaluasi kinerja serta penerapan manajemen risiko Working visits to Branch/Representative Offices in order to collect data and evaluate performance and apply risk management	Jumlah kunjungan/Laporan Total number of visits/reports	2 kali 2 visits	5%	1 kali 1 visits	2,5%
Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan Participate in competency and knowledge improvement activities	Jumlah pelatihan/ seminar/workshop/ yang diikuti. Total number of trainings/seminars/ workshops attended.	1 kegiatan 1 activity	5%	4 kegiatan 4 activity	8%
Jumlah Bobot Total Weight			100%		100,5%

KOMISARIS INDEPENDEN

INDEPENDENT COMMISSIONER

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atau pemantauan atas pengelolaan Perusahaan.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, Komisaris Independen harus memenuhi beberapa kriteria utama. Kriteria tersebut mencakup kewajiban untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia serta berdomisili di wilayah Indonesia.

Selain itu, Komisaris Independen Lembaga Penjamin diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, meliputi:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; dan
4. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.

Komisaris Independen Jamkrindo dan Pernyataan Independensinya

Komposisi Komisaris Independen di Jamkrindo mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap prinsip tata kelola yang baik. Di tahun 2024, sebanyak 3 (tiga) orang menjabat sebagai Komisaris Independen, sebagaimana dijelaskan dalam bagian mengenai Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris. Jumlah ini setara dengan 60,00% dari total anggota Dewan Komisaris di tahun tersebut.

Independent Commissioner are members of the Board of Commissioners who has no financial, managerial, share ownership, and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently in accordance with GCG principles. Independent Commissioners are responsible for monitoring the management of the Company.

Criteria for Independent Members of the Board of Commissioners

In accordance with OJK Regulation No. 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, Independent Commissioners must meet several key criteria'. These criteria include the obligation to have an Indonesian citizenship and be domiciled in Indonesian territory

The Independent Commissioner of the Guarantee Institution is required to meet the following requirements:

1. Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or shareholders of the Guarantee Institution, in the same Guarantee Institution;
2. Has never been a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board, or held a position of 1 (one) level below the Board of Directors at the same Guarantee Institution or other business entity that has an affiliation with the Guarantee Institution within the last 6 (six) months;
3. Understand the laws and regulations in the field of Guarantee, Sharia Guarantee, Re-Guarantee, and/ or Sharia Re-Guarantee and other relevant laws and regulations; and
4. Has good knowledge of the financial condition of the Guarantee Institution of which the Independent Commissioner is serving.

Statement of Independence of Jamkrindo's Independent Commissioners

The composition of Independent Commissioners in Jamkrindo reflects the Company's commitment to good governance principles. In 2024, there were 3 (three) people served as Independent Commissioners, as explained in the Composition of the Board of Commissioners. This amount is equivalent to 60.00% of the total members of the Board of Commissioners of that year.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Statement of Independence of Independent Commissioners

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adhika Utama**

Tempat, Tanggal : **Jakarta, 22 Juli 2022**

Alamat : **Jl. H. Djalil Fatah, Cempin Baru, Kecamatan, Jakarta**

Pada : **PT. Jaminan Kredit Indonesia (PT. JKI)**

Sebagai **Komisaris Independen**

Menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
2. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
3. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
4. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
5. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
6. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
7. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
8. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
9. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
10. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.

Diketahui dan disetujui oleh saya yang bertanda tangan di atas pada tanggal 22 Juli 2022.

(Tanda Tangan)

Adhika Utama

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adhika Utama**

Tempat, Tanggal : **Jakarta, 22 Juli 2022**

Alamat : **Jl. H. Djalil Fatah, Cempin Baru, Kecamatan, Jakarta**

Pada : **PT. Jaminan Kredit Indonesia (PT. JKI)**

Sebagai **Komisaris Independen**

Menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
2. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
3. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
4. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
5. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
6. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
7. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
8. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
9. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
10. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.

Diketahui dan disetujui oleh saya yang bertanda tangan di atas pada tanggal 22 Juli 2022.

(Tanda Tangan)

Adhika Utama

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adhika Utama**

Tempat, Tanggal : **Jakarta, 22 Juli 2022**

Alamat : **Jl. H. Djalil Fatah, Cempin Baru, Kecamatan, Jakarta**

Pada : **PT. Jaminan Kredit Indonesia (PT. JKI)**

Sebagai **Komisaris Independen**

Menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
2. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
3. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
4. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
5. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
6. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
7. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
8. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
9. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.
10. Tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki saham mayoritas PT. JKI.

Diketahui dan disetujui oleh saya yang bertanda tangan di atas pada tanggal 22 Juli 2022.

(Tanda Tangan)

Adhika Utama

TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

INFORMATION DISCLOSURE REGARDING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Bidang usaha penjaminan memegang peran strategis dalam mendukung sektor ekonomi, terutama dengan fokus pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM). Sebagai salah satu pilar penting penggerak perekonomian nasional, sektor ini terus berkembang secara dinamis, sehingga menuntut Perusahaan untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi guna menghadapi perubahan dan tantangan pasar.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, Perusahaan memandang pentingnya membangun struktur manajemen yang tangguh, khususnya pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Keberagaman dalam susunan kepemimpinan ini dipandang krusial, meskipun belum sepenuhnya diatur dalam regulasi yang berlaku. Perusahaan meyakini bahwa perpaduan berbagai kualifikasi akademik, pengalaman, keahlian, dan representasi gender dapat memperkaya sudut pandang dalam pengambilan kebijakan strategis dan pengelolaan Perusahaan yang lebih efektif.

Untuk itu, prinsip keberagaman diterapkan secara nyata dalam tata kelola perusahaan. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi mencerminkan berbagai aspek penting seperti akademis, keterampilan, usia serta atas dasar prinsip anti diskriminasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas manajemen perusahaan dan keberlanjutan usaha.

Berikut ini adalah keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Hingga saat ini, Perusahaan belum menetapkan kebijakan khusus terkait keberagaman dalam susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman GCG yang ada menggarisbawahi bahwa pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui prosedur yang ditentukan oleh Menteri BUMN, dengan kriteria utama berupa keahlian dan pengalaman di sektor penjaminan.

Berikut disampaikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2024.

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The guarantee business plays a strategic role in supporting the economic sector, especially with Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). As one of the important pillars driving the national economy, this sector continues to develop dynamically, thus requiring the Company to have strong adaptability to face market changes and challenges.

In facing these dynamics, the Company recognized the importance of building a competent management structure, especially within the Board of Commissioners and the Board of Directors. Diversity in this leadership structure is seen as crucial, even though it is not yet fully regulated within the applicable regulations. The Company believes that the combination of various academic qualifications, experience, expertise, as well as gender representation can enrich perspectives in strategic policy making and lead to a more effective management of the Company.

Therefore, the principle of diversity is clearly applied in corporate governance. This measure aims to create an environment that advocates the active participation of all stakeholders, as well as ensuring that the composition of the Board reflects various important aspects such as academics, skills, age and on the basis of anti-discrimination principles. This approach is expected to make a positive contribution to the quality of company management and business sustainability.

The following is the diverse composition of each member of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Diversity Policy for the of the Board of Commissioners and the Board of Directors

To date, the Company has not established a specific policy regarding diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The existing GCG Guidelines highlights that the selection of the Board of Commissioners and Board of Directors is conducted by the Shareholders through procedures determined by the Minister of SOEs, with the main criteria being expertise and experience in the guarantee sector.

The following presents the diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2024.

Nama Name	Jabatan Position	Warga Negara Citizenship	Kualifikasi Akademik Academic Qualifications	Usia Age	Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Krisna Wijaya	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	Indonesia	Doctor Studi Antar Bidang (Ilmu Studi Kebijakan) Doctor of Interdisciplinary Studies (Policy Studies)	69	Laki-laki Male
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Doktor Program Studi Hukum Doctor of Law Study Program	52	Laki-laki Male
Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Magister Manajemen dan Magister Sains Master of Management and Master of Science	65	Perempuan Female
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	Indonesia	Magister <i>Public Management</i> Master of Public Management	58	Perempuan Female
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	48	Perempuan Female
Angger P. Yuwono	Komisaris Commissioner	Indonesia	Sarjana Matematika Bachelor of Mathematics	65	Laki-laki Male
Direksi Board of Directors					
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	Indonesia	Sarjana Ekonomi Bachelor of Economics	53	Laki-laki Male
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Business Guarantee	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	55	Laki-laki Male
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of Human Capital Management, General affairs, and Risk Management	Indonesia	Master of Business Administration Master of Business Administration	58	Laki-laki Male
Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	51	Laki-laki Male
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan & Layanan Director of Institutional & Services	Indonesia	Doctor Human Resource Management	48	Laki-laki Male
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	53	Perempuan Female

Penilaian Penerapan GCG Untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Di Tahun 2024, hasil penilaian *self assement* yang dilakukan terhadap Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris memperoleh nilai 26,35 dari skala 30,00. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris telah berjalan dengan SANGAT BAIK sesuai dengan assessmen penerapan governansi korporat untuk tahun buku 2024 yang dilakukan oleh tim asesor internal PT Jamkrindo berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 04/SP/1/1/2025 tanggal 14 Januari 2025

Assessment of GCG Implementation for Aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2024, the self-assessment of the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners resulted in a score of 26.35 out of a maximum of 30.00. This indicates that the execution of duties and responsibilities by the Board of Directors and the Board of Commissioners was VERY GOOD, and in accordance with the corporate governance assessment for the 2024 fiscal year. The assessment was conducted by the internal assessor team of PT Jamkrindo, based on Assignment Letter Number: 04/SP/1/1/2025 dated January 14, 2025.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 sebagaimana Risalah RUPS No 01/RUPS/DIR/I/2024, yang salah satu keputusannya adalah menyetujui serta menetapkan kontrak manajemen berupa *Key Performance Indicators* (KPI) antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Jamkrindo untuk tahun 2024. Penetapan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegal berdasarkan pencapaian KPI yang meliputi beberapa aspek berikut:

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Performance Assessment of the Board of Commissioners

The performance assessment of the Board of Commissioners is based on the Key Performance Indicators (KPI) that have been approved through the General Meeting of Shareholders (GMS) concerning the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) in 2024. As stated in the Minutes of GMS No. 01/RUPS/DIR/I/2024, which one of the resolutions is to approve and determine the management contract in the form of *Key Performance Indicators* (KPI) between the Board of Commissioners and Shareholders of PT Jamkrindo for 2024. The determination refers to the Regulation of the Minister of SOEs on the Implementation of Good Corporate Governance.

The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted collaboratively based on the achievements of the KPI, which covers the following aspects:

No.	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	KPI		Bobot Weight	TW IV Fourth Quarter		Bobot Weight
		Jumlah Total	Satuan Unit		Jumlah Total	Satuan Unit	
I	ASPEK PENGAWASAN dan PENGARAHAN MONITORING AND GUIDANCE ASPECT			60			60
1.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	12	Rapat Meetings	15,00	12	Rapat Meetings	15,00
2.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2024 General Meeting of Shareholders (GMS) concerning the 2024 Work Plan and Budget	1	Rapat Meetings	10,00	1	Rapat Meetings	10,00
3.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kinerja Perusahaan Tahun 2023 (Audited) General Meeting of Shareholders (GMS) concerning the Company's performance for 2023(Audited)	1	Rapat Meetings	10,00	1	Rapat Meetings	10,00
4.	Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan Provision of Advice and Input to the Board of Directors concerning the Management of the Company	12	Dokumen Document	10,00	17	Dokumen Document	16,50
5.	Evaluasi Terhadap Auditor Eksternal Assessment of the External Auditor	1	Rapat Meetings	5,00	1	Rapat Meetings	5,00
6.	Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal Assessment of the Internal Control System	1	Rapat Meetings	5,00	3	Rapat Meetings	5,50
	Sub Jumlah I Subtotal I			60,00			62,00
II	ASPEK PELAPORAN REPORTING ASPECTS			30			30
1.	Memberikan Tanggapan/Pendapat Terhadap Hal-Hal Yang Memerlukan Persetujuan dan/atau Rekomendasi Dewan Komisaris Sesuai Ketentuan Dalam Anggaran Dasar atau Peraturan Lainnya Provide Responses/Opinions on Matters Requiring Approval and/or Recommendations from the Board of Commissioners In Accordance with Provisions in the Articles of Association or Other Regulations	4	Dokumen Document	10,00	12	Dokumen Document	11,00
2.	Menyusun Laporan Berkala Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (Triwulanan) Tahun 2024 Prepare the 2024 Periodic Report of the Board of Commissioners' Monitoring Duties (Quarterly)	4	Dokumen Document	5,00	4	Dokumen Document	5,00

No.	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	KPI		Bobot Weight	TW IV Fourth Quarter		Bobot Weight
		Jumlah Total	Satuan Unit		Jumlah Total	Satuan Unit	
3.	Menyusun Tanggapan atas Laporan Berkala Hasil Evaluasi atas Kinerja Perusahaan Tahun 2024 (Triwulanan) Prepare Responses to Periodic Reports of the Evaluation Results concerning Company Performance in 2024 (Quarterly)	4	Dokumen Document	5,00	4	Dokumen Document	5,00
4.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025 Prepare the Board of Commissioners Work Plan and Budget for 2025	1	Dokumen Document	5,00	1	Dokumen Document	5,00
5.	Menyusun dan Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2025 Compile and Propose Performance Achievement Indicators for the Board of Commissioners in 2025	1	Dokumen Document	5,00	1	Dokumen Document	5,00
Sub Jumlah II Subtotal II				30,00			31,00
III	ASPEK DINAMIS DYNAMIC ASPECT			10			10
1.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan/atau Cabang Monitoring and Assessment of the Performance of Regional Offices and/or Branches	6	Kegiatan Activities	5,00	16	Kegiatan Activities	5,30
2.	Seminar/Workshop Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris Seminars/Workshops in the Context of Increasing the Competence of Members of the Board of Commissioners and Board of Commissioners' Organs	4	Kegiatan Activities	5,00	5	Kegiatan Activities	5,50
Sub Jumlah III Subtotal III				10,00			11,00
Jumlah Total				100,00			104,00

Sistem Penilaian:

1. Penilaian maksimal sesuai dengan bobot masing-masing indikator
2. Kriteria hasil penilaian:

Scoring System:

1. Maximum assessment according to the weight of each indicator
2. Criteria for assessment results:

No.	Realisasi Skor Score Realization	Kriteria Criteria
1.	≥ 95 (maksimal 100) More than 95 (100 maximum)	Sangat Baik Very Good
2.	> 80 s.d. 94 More than 80 up until 94	Baik Good
3.	> 65 s.d. 80 More than 65 up until 80	Cukup Moderate
4.	> 50 s.d. 65 More than 50 up until 65	Kurang Poor
5.	≤ 50 Less than 50	Sangat Kurang Bad

Sementara realisasi pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individual merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo No. KEP-02/DK-JAMKRINDO/IV/2023 yang diterbitkan pada 28 April 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2018 tentang Kebijakan Terkait Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Berikut ini adalah realisasi capaian kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris:

The realization of the measurement and assessment for the individual performance of the Board of Commissioners is based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo No. KEP-02/DK-JAMKRINDO/IV/2023, issued on 28 April 2023, which amends Decree No. KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2018 concerning Policies Related to the Performance Assessment of the Board of Commissioners. Below are the individual performance achievements of each member of the Board of Commissioners:

Nama Name	Bobot Persentase Capaian Skor KPI Dekom Weight Percentage of Board of Commissioners' KPI Score Achievement	Persentase Kehadiran Dewan Komisaris Percentage of the Attendance of the Board of Commissioners				Bobot Persentase Kehadiran Rapat Weight Percentage of Meeting Attendance	Total Persentase Capaian Kinerja Individu Total Percentage of Individual Performance Achievement
		Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors	Rapat Internal Internal Meeting	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	Total Kehadiran Rapat Total Meeting Attendance		
	1	2	3	4	5 = 2 +3 +4	6=5* 30%	7=1+6
Krisna Wijaya	72,8	40	40	20	100	30	102,8
M. Muchlas Rowi	72,8	40	40	20	100	30	102,8
Hernita Alius	72,8	40	40	20	100	30	102,8
Ari Wahyuni	72,8	40	40	20	100	30	102,8
Desty Arlaini	72,8	37	40	20	97	29,1	101,9
Angger P. Yuwono	72,8	40	40	20	100	30	102,8

Sistem Penilaian:

- Realisasi capaian total skor KPI Dewan Komisaris, bobot 70%
Perhitungan mencakup:
 - Aspek pengawasan dan pengarahan, bobot 60%.
 - Aspek pelaporan, bobot 30%.
 - Aspek dinamis, bobot 10%.
- Realisasi persentase kehadiran Dewan Komisaris (individual)
dalam rapat, bobot 30%.
Perhitungan bobot per jenis rapat, yaitu:
 - Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, bobot 40%.
 - Rapat Internal, bobot 40%.
 - Rapat Umum Pemegang Saham, bobot 20%.

Pengukuran kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui proses penilaian mandiri (self-assessment), yang kemudian dievaluasi untuk memberikan masukan yang dapat meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk Laporan Triwulanan mengenai Perkembangan Realisasi KPI dan Laporan Tahunan terkait Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan, yang merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia NOMOR PER - 11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen Dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan. Penilaian ini dilakukan oleh setiap unit kerja sesuai dengan perspektif atau indikator kinerja yang berlaku.

Scoring System:

- Realization of the total KPI score of the Board of Commissioners, weighted 70%
Calculations include:
 - Monitoring and Guidance Aspect, weighted 60%.
 - Reporting Aspect, weighted 30%.
 - Dynamic Aspect, weighted 10%.
- Realization of the attendance percentage of the Board of Commissioners (individual) in meetings, weighted 30%.
Calculations of weight for each meeting types, namely:
 - Board of Commissioners and Board of Directors Meetings, weighted 40%.
 - Internal Meeting, weighted 40%.
 - General Meeting of Shareholders, weighted 20%.

The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted through a self-assessment process. Which is then evaluated to provide input that can improve the performance of the Board of Commissioners in performing its monitoring duties. As well as provide advice to the Board of Directors. The results of the evaluation are then submitted to the Shareholders in the form of a Quarterly Report concerning the Progress of KPI Realization and an Annual Report regarding the Monitoring Duties of the Board of Commissioners.

Assessment of the Performance of the Board of Directors

The performance assessment of the Board of Directors is based on the Company's Key Performance Indicator (KPI). Which refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER - 11/MBU/11/2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts of the Board of Directors. As well as Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER- 10/MBU/2014 dated July 25, 2014 concerning Indicators for Assessing the Health Level of State-Owned Enterprises in Financial Services in the Field of Insurance Business and Guarantee Services. This assessment is conducted by each work unit in accordance with the applicable perspectives or performance indicators.

Terdapat lima perspektif atau indikator untuk mengukur kinerja Direksi dalam penilaian KPI Perusahaan, yaitu: Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Financial, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, serta Pengembangan Talenta. Secara umum, kinerja program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dinilai telah mencapai target, dengan pencapaian skor KPI (*Key Performance Indicator*) sebesar 85,35 yang dirinci sebagai berikut:

There are five perspectives or indicators that has been used to measure the performance of the Board of Directors in the Company's KPI assessment, namely: Economic and Social Value for Indonesia Financial, Business Model Innovation, Technology Leadership, Increased Investment, and Talent Development. Generally, the performance of work programs and activities conducted in 2024, can be assessed as having achieved the target. With the achievement of a KPI (*Key Performance Indicator*) score of 85.35 as described below:

Kategori Category	No.	KPI	ESG	Formula	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Nilai Score
FINANSIAL FINANCIAL	1	EBITDA (Konsolidasi) EBITDA (Consolidated)	G	Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture	Rp Miliar IDR Billion	Maximize	6	1.911	1.566,30	81,97%	4,92
	2	ROE (Konsolidasi) ROE (Consolidated)	C	Laba Bersih Tahun Berjalan / Average total Equity Net Profit for the Year / Average total Equity	%	Maximize	6	10,45%	8,49%	81,32%	4,88
	3	Cashflow from Operation	C	Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Net cash provided by (used in) operating activities	Rp Miliar IDR Billion	Maximize	6	2.829	-635,77	0,00%	0,00
NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA	4	Penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan audit tahun 2023 Completion and submission of the audited 2023 financial statements	G	Tanggal rilis laporan keuangan Affiliated Companies dari IFG (Audited) tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Release date of the 2023 audited financial statements of IFG's affiliated companies with an Unqualified Opinion.	Waktu Time	Minimize	6	28-Mar- 24 March 28, 2024	28-Mar-24 March 28, 2024	100,00%	6,00
	5	Combined Ratio (Konsolidasi) Combined Ratio (Consolidated)	C	Loss Ratio + Expense Ratio	%	Minimize	6	89,79%	89,55%	100,27%	6,02
	6	Gearing Ratio Produktif Productive Gearing Ratio	C	Outstanding Produktif Retensi Sendiri / Ekuitas Outstanding Productive Self-Retention / Equity	Kali Time(s)	Minimize	4	20	19,12	104,60%	4,18
	7	Jumlah Pendapatan Subrogasi Total Subrogation Income	C	Penerimaan pendapatan subrogasi yang diperoleh perusahaan Receipt of subrogation income earned by the Company	Rp Miliar IDR Billion	Maximize	7	1.187	1.940,17	163,47%	7,70
	8	Penyelesaian Piutang Long Outstanding Settlement of Long Outstanding Receivables	C	1 - (Piutang IJP di atas 180 hari di tahun 2024 / Piutang IJP di atas 180 hari di tahun 2023) Nilai Piutang adalah nilai gross 1 - (IJP Receivables Over 180 Days in 2024 / IJP Receivables Over 180 Days in 2023) Note: Receivable value is based on gross amount.	%	Maximize	6	5,00%	6,88%	137,60%	6,60
SOSIAL SOCIAL	9	Volume Penjaminan KUR KUR Guarantee Volume	C	Pemenuhan Market share 50% dari Volume penjaminan KUR yang ditargetkan oleh Pemerintah pada tahun 2024 Market share fulfillment of 50% of KUR guarantee volume targeted by the Government in 2023	%	Maximize	5	100%	53,88%	107,75%	5,39

Kategori Category	No.	KPI	ESG	Formula	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Nilai Score
INOVASI BISNIS MODEL BUSINESS MODEL INNOVATION	10	HUW dari Non Program yang berasal dari Seluruh Channel Distribusi HUW from Non-Program Sources Across All Distribution Channels	C	Pendapatan IJP produk Non-KUR Non-PEN dikurangi Beban Underwriting produk Non-KUR Non-PEN IJP revenue from Non-KUR Non-PEN products minus underwriting expenses for Non-KUR Non-PEN products	Rp Miliar IDR Billion	Maximize	6	1.745	-7,94	0,00%	0,00
	11	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of the Risk Management Enhancement Roadmap	C	Jumlah Program yang Dilaksanakan Tahun 2024 / Total Program Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Total Programs Implemented in 2024 / Total Programs in the Risk Management Implementation Improvement Roadmap.	%	Maximize	6	100%	100,00%	100,00%	6,00
KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI TECHNOLOGY LEADERSHIP	12	Integrasi MIS dengan Holding (Front End dan Back End) Integration of MIS with the Holding Company (Front End and Back End)	C	Progres penyelesaian: Implementasi ERP; (Bobot: 40%) Integrasi Data Finansial yang bersumber dari ERP dengan Holding; (Bobot: 30%) Implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi; (Bobot: 30%) Progress on Completion: a. Implementation of ERP; (Weight: 40%) b. Integration of Financial Data sourced from ERP with the Holding Company; (Weight: 30%) c. Implementation of Integrated Risk Management; (Weight: 30%)	%	Maximize	6	100%	100,00%	100,00%	6,00
PENINGKATAN INVESTASI INCREASING INVESTMENT	13	Yield on Investment (Yol) Konsolidasi Consolidated Yield on Investment (Yol)	C	Pendapatan Investasi / Rata-rata Geometric Total Investasi Investment Income / Average Geometric Total Investment	%	Maximize	6	6,16%	6,24%	101,34%	6,08
	14	Pencapaian KPI PMN PMN KPI Achievement	S	Realisasi Indikator KPI PMN (Pelaporan dan efektivitas penggunaan PMN (Gearing Ratio)) Realization of PMN KPI Indicators (Reporting and effective use of PMN (Gearing Ratio))	%	Maximize	4	100%	100,00%	100,00%	4,00
	15	Optimalisasi Kinerja Anak Perusahaan Optimization of Subsidiaries	C	Loss Ratio + Expense Ratio	%	Minimize	5	77,20%	72,85%	105,97%	5,30

Kategori Category	No.	KPI	ESG	Formula	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Nilai Score
PENGEMBANGAN TALENTA TALENT DEVELOPMENT	16	Rasio Talenta Perempuan dalam Nominated Selected Talent Female Talent Ratio in Nominated Selected Talent	S	Top Talent Perempuan / Jumlah Top Talent Top Female Talent / Total Top Talent	%	Maximize	3	30%	30,77%	102,56%	3,08
	17	Rasio Talenta Milenial (≤ 42 tahun) dalam Nominated Selected Talent Millennial Talent Ratio (under 42 years old) in Nominated Selected Talent	S	Top Talent Milenial / Jumlah Top Talent Millennial Top Talent / Total Top Talent	%	Maximize	3	20%	15,38%	76,92%	2,31
	18	Implementasi Talent Mobility (BOD-1 dan BOD-2) Implementation of Talent Mobility (BOD-1 and BOD-2)	S	Top Talent BOD-1 dan BOD-2 atau setara yang mengalami Talent Mobility / Jumlah Top Talent BOD-1 dan BOD-2 atau setara Top BOD-1 and BOD-2 Talent (or equivalents) who experienced Talent Mobility / Total Top BOD-1 and BOD-2 Talent (or equivalents)	%	Maximize	4	10%	3,57%	35,71%	1,43
	19	Rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko Risk management organ qualification fulfillment ratio	S	Jumlah Personil Organ Pengelola Risiko yang Memenuhi Kualifikasi / Jumlah Personil Organ Pengelola Risiko Total Qualified Risk Management Personnel / Total Number of Risk Management Personnel	%	Maximize	5	90%	98,55%	109,50%	5,48
Total							100				85,35

Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN No. PER04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan diusulkan dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan membahas pertimbangan usulan, hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi mengusulkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS, dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri dan kemampuan Perusahaan, untuk kemudian ditetapkan dalam RUPS.

Remuneration Governance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Proposal Procedures and Mechanisms Up to the Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Monitoring Board of SOEs. The remuneration of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is proposed beforehand in the Board of Commissioners Meeting. By discussing the consideration of proposals, survey results with similar industries and other sectors. While taking into account the Ministerial Regulations and the Company's ability, the Board of Commissioners and the Board of Directors made a proposal to the Shareholders through the GMS. Which is then determined at the GMS.



Faktor perhitungan atas usulan besaran remunerasi:

1. Pertimbangan usulan yang ada
2. Hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya
3. Kemampuan Perusahaan

Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada formula yang telah ditentukan oleh Pemegang Saham. Proses ini dilakukan setelah melalui kajian mendalam oleh Dewan Komisaris yang bekerja sama dengan Pemegang Saham. Keputusan akhir mengenai remunerasi tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021, komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

1. Remunerasi Dewan Komisaris
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas;
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja;
 - e. Pajak atas Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Remunerasi Direksi
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas;
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja;
 - e. Pajak atas Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.

Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan sebagai berikut:

Calculation factors for the proposed amount of remuneration:

1. Consideration of existing proposals
2. Survey results with similar industries and other sectors
3. Company Capabilities

The determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on a formula determined by the Shareholders. This process is conducted after an in-depth review by the Board of Commissioners in collaboration with the Shareholders. The final decision regarding remuneration is determined at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS).

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Based on the Minister of SOE Regulation No. PER-13/MBU/09/2021, the income components of the Board of Commissioners and the Board of Directors consists of:

1. Remuneration of the Board of Commissioners
 - a. Honorarium;
 - b. Allowances;
 - c. Facilities;
 - d. Bonuses/Performance Incentives;
 - e. Taxes on Honorariums, Allowances, and Facilities for the Board of Commissioners are borne and become the burden of the Company. Meanwhile, the tax on Bonuses/Performance Incentive for the Board of Commissioners shall be borne and become the burden of each member of the Board of Commissioners.
2. Remuneration for the Board of Directors
 - a. Salary;
 - b. Allowances;
 - c. Facilities;
 - d. Bonuses/Performance Incentives;
 - e. Taxes on Salaries, Allowances, and Facilities for the Board of Directors are borne and become the burden of the Company. Meanwhile, the tax on Bonuses/Performance Incentive for the Board of Directors shall be borne and become the burden of each member of the Board of Directors.

The remuneration structure and its components for the Board of Commissioners and the Board of Directors are presented below:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Structure of the Board of Commissioners

1. Honorarium Dewan Komisaris
Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama
 - b. Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama
1. Honorarium of the Board of Commissioners
Is a fixed income in the form of money received every month because of their position as a member of the Board of Commissioners of the Company, with the following provisions:
 - a. The calculation of the President Commissioner's salary amounts to 45% of the President Director's salary.
 - b. The calculation of the salary of the Board of Commissioners amounts to 90% of the President Commissioner's salary.

1. Tunjangan Dewan Komisaris
Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium, yang dapat berupa:
 - a. Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya.
 - b. Tunjangan Transportasi, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya sebesar 20% dari perhitungan gaji.
 - c. Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari honorarium per tahun.
1. The Allowance for the Board of Commissioners
Is income in the form of money or something equivalent, that is received at a certain time by members of the Board of Commissioners. Other than Honorariums, what is considered as Allowances are:
 - a. Religious Holiday Allowance (THR) is provided a maximum of 1 (one) time, each year, in addition to the fixed monthly income.
 - b. Transportation Allowance is provided 1 (one) time, every month, amounting to 20% of salary calculation.
 - c. Post-Employment Insurance is provided with the condition that the premium borne by the Company is at most 25% of the yearly honorarium.

1. Fasilitas Dewan Komisaris Adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk kepesertaan asuransi/penggantian biaya pengobatan.
- a. Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perusahaan.
1. The Facilities of the Board of Commissioners is income in the form of facilities and/or allowances and/or guarantees used/utilized by members of the Board of Commissioners; in the context of conducting their duties, authorities, obligations, and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of:
 - a. Health Facilities is provided in the form of insurance membership/reimbursement of medical expenses.
 - b. Legal Assistance Facility is provided if necessary, in the event of actions/acts for, and on behalf of his/her position relating to the Company.

Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure of the Board of Directors

1. Gaji Direksi Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Seri A.
 - b. Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama
1. The salary of the Board of Directors is a fixed income in the form of money received every month because of their position as a member of the Board of Directors of the Company, with the following provisions:
 - a. The President Director's salary is determined using internal guidelines stipulated by the Minister of SOEs as the proxy of the Series A Shareholders.
 - b. The calculation of salary of the other Directors amounts to 85% of the President Director's salary.

1. Tunjangan Direksi
Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa:
 - a. Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya.
 - b. Tunjangan Perumahan, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya.
 - c. Tunjangan Operasional, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya.
 - d. Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun.
1. The Allowance for the Board of Directors
Is income in the form of money or something equivalent, that is received at a certain time by members of the Board of Directors. Other than Salaries, what is considered as Allowances are:
 - a. Religious Holiday Allowance (THR) is provided a maximum of 1 (one) time, each year, in addition to the fixed monthly income.
 - b. Housing Allowance is provided 1 (one) time each month.
 - c. Operational Allowance is provided 1 (one) time each month.
 - d. Post-Employment Insurance is provided with the condition that the premium borne by the Company is at most 25% of the yearly salary.

1. Fasilitas Direksi Adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:
 - a. Fasilitas Kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai Faktor Jabatan.
 - b. Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk kepesertaan asuransi/penggantian biaya pengobatan.
 - c. Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perusahaan.
1. The Facilities of the Board of Directors is income in the form of facilities and/or allowances and/or guarantees used/utilized by members of the Board of Commissioners; in the context of conducting their duties, authorities, obligations, and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of:
 - a. Vehicle Facilities is given as much as 1 (one) official vehicle unit along with maintenance and operational costs with specifications and standards according to Position Factors.
 - b. Health Facilities is provided in the form of insurance membership/reimbursement of medical expenses.
 - c. Legal Assistance Facility is provided if necessary, in the event of actions/acts for, and on behalf of his/her position relating to the Company.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Structure of the Board of Commissioners	Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure of the Board of Directors
1. Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris a. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan Laporan Tahunan apabila Realisasi Pencapaian Key Performance Indicators melebihi 100%. b. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris. c. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: i) Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama sebesar 45% dari Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama. ii) Perhitungan Komisaris lainnya sebesar 90% dari Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama. 1. Bonuses/Performance Incentives for the Board of Commissioners a. Bonuses are an income that is also a reward given to members of the Board of Commissioners if they earn profits and do not experience accumulated losses. The Company may grant Bonuses to members of the Board of Commissioners based on the determination of the GMS in the approval of the Annual Report if the Realization of Key Performance Indicators Achievement exceeds 100%. b. Performance Incentive is an income that is also a reward given to members of the Board of Commissioners. c. The calculation of Bonuses/Performance Incentives for the Board of Commissioners is as follows: i) The calculation of Bonuses/Performance Incentives for the President Commissioner is 45% of the Bonuses/Performance Incentive of the President Director. ii) The calculation of other Commissioners is 90% of the Bonuses/Performance Incentive of the President Commissioner.	1. Tantiem/Insentif Kinerja Direksi a. Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Tantiem dapat diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI). Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan Laporan Tahunan apabila Realisasi Pencapaian Key Performance Indicators melebihi 100%. b. Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. c. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi adalah sebagai berikut: i) Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Seri A. ii) Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja Direktur lainnya sebesar 85% Tantiem/Insentif Kinerja gaji Direktur Utama. 1. Bonuses/Performance Incentives for the Board of Directors a. Bonuses are an income that is also a reward given to members of the Board of Director of SOEs if they earn profits and do not experience accumulated losses. Bonuses may be granted in addition to Long Term Incentives (LTI). The Company may grant Bonuses to members of the Board of Directors based on the determination of the GMS in the approval of the Annual Report if the Realization of Key Performance Indicators Achievement exceeds 100%. b. Performance Incentive is an income which is also a reward given to members of the Board of Directors if there is an increase in performance even though they are still experiencing accumulated losses. c. The calculation of Tantiem/Performance Incentive for the Board of Directors is as follows: i) The President Director's Bonuses/Performance Incentive is determined using internal guidelines stipulated by the Minister of SOEs as the proxy of the Series A Shareholders. ii) The calculation of Bonuses/Performance Incentives of members of the Board of Directors is 85% of the Bonuses/Performance Incentive of the President Director.
1. Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, dll.) 1. No other components (components such as non-performance bonuses, stock options, etc.)	1. Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, dll.) 1. No other components (components such as non-performance bonuses, stock options, etc.)

Kebijakan Dasar Terkait Indikator dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Dalam menyusun struktur dan menentukan besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kinerja Perusahaan;
3. Prestasi kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perusahaan;
5. Regulasi lain yang terkait dengan remunerasi, misalnya Upah Minimum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Basic Policies Regarding Indicators and Determination of Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2024

In preparing the structure and determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, it is necessary to consider the following matters:

1. Applicable laws and regulations;
2. Company Performance;
3. Work performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
4. Remuneration applicable in the industry in accordance with the business activities of the Company which has the same type and scale of business as the Company;
5. Other regulations related to remuneration, such as Minimum Wage and Labor Laws.

**Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
(Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021)**
Calculation of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors
(In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/09/2021)

Direktur Utama President Director	:	100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Utama/Pengendali) 100% (determined using internal guidelines stipulated by the Minister of SOEs as the proxy of the Majority/Controlling Shareholder)
Direktur Lainnya Other Directors	:	Sebesar 85% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 85% of the President Director's Salary/Bonuses/Performance Incentives
Komisaris Utama President Commissioner	:	Sebesar 45% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 45% of the President Director's Salary/Bonuses/Performance Incentives
Komisaris Lainnya Other Commissioners	:	Sebesar 90% dari Honorarium/Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama 90% of the President Commissioner's Honorarium/Bonuses/Performance Incentives of the President Commissioner

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Disclosure of the Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2024

The total remuneration received by the Board of Commissioners and the Board of Directors is explained below:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2024
Total Remuneration for the Board of Commissioners in 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Periode Menjabat Tenure	Perhitungan per Bulan Calculations for Each Month			Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Total Honorarium and Allowances for Each Month	Jumlah Honorarium dan Tunjangan Selama 1 Tahun Total Honorarium and Allowances for 1 Year	Tantiem Bonuses	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024
		Honorarium (Rp) (IDR)	Tunjangan Perumahan Housing Allowances (Rp) (IDR)	Tunjangan Transportasi Transportation Allowances (Rp) (IDR)						
Krisna Wijaya	Januari-Desember January-December	99.216.000	-	19.843.200	119.059.200	1.428.710.400	1.627.621.405	99.216.000	237.660.480	3.393.208.285
M. Muchlas Rowi	Januari-Desember January-December	89.294.400	-	17.858.880	107.153.280	1.285.839.360	1.464.859.264	89.294.400	211.484.280	3.051.477.304
Hernita Alius	Februari-Desember February-December	89.294.400	-	17.858.880	107.153.280	1.285.839.360	1.464.859.264	89.294.400	194.400.000	3.034.393.024
Ari Wahyuni	Januari-Desember January-December	89.294.400	-	17.858.880	107.153.280	1.285.839.360	1.464.859.264	89.294.400	213.894.432	3.053.887.456
Desty Arlaini	Januari-Desember January-December	89.294.400	-	17.858.880	107.153.280	1.285.839.360	1.464.859.264	89.294.400	197.475.024	3.037.468.048
Angger P. Yuwono	Januari-Desember January-December	89.294.400	-	17.858.880	107.153.280	1.285.839.360	122.071.605	89.294.400	213.894.432	1.711.099.797
Sub Jumlah (Rp) Subtotal (IDR)										17.281.533.916
Fasilitas Kesehatan (at cost) (Rp)										At Cost
Health facility (at cost) (IDR)										
Fasilitas Kepesertaan dan Perkumpulan Profesi (at cost) (Rp)										At Cost
Membership and Professional Association Facility (at cost) (IDR)										
Fasilitas Bantuan Hukum (at cost) Rp)										At Cost
Legal Aid Facility (at cost) (IDR)										

Jumlah Remunerasi Dewan Direksi Tahun 2024

Total Remuneration for the Board of Directors in 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Periode Menjabat Tenure	Perhitungan per Bulan Calculations for Each Month			Jumlah Gaji dan Tunjangan per Bulan Total Salaries and Allowances for Each Month	Jumlah Gaji dan Tunjangan Selama 1 Tahun Total Salaries and Allowances for 1 Year	Tantiem Bonuses	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024
		Gaji Salary (Rp) (IDR)	Tunjangan Perumahan Housing Allowances (Rp) (IDR)	Tunjangan Transportasi Transportation Allowances (Rp) (IDR)						
Akhmad Purwakajaya	Januari-Desember January-December	220.480.000	27.500.000	-	247.980.000	2.975.760.000	1.507.056.856	220.480.000	490.963.296	5.194.260.152
Henry Panjaitan	Januari-Desember January-December	187.408.000	27.500.000	-	214.908.000	2.578.896.000	3.074.395.987	187.408.000	446.504.088	6.287.204.075
Achmad Ivan S Soeparno	Januari-Desember January-December	187.408.000	27.500.000	-	214.908.000	2.578.896.000	3.074.395.987	187.408.000	446.504.088	6.287.204.075
Abdul Bari	Januari-Desember January-December	187.408.000	27.500.000	-	214.908.000	2.578.896.000	3.074.395.987	187.408.000	446.504.088	6.287.204.075
Suwasito	Januari-Desember January-December	187.408.000	27.500.000	-	214.908.000	2.578.896.000	3.074.395.987	187.408.000	416.974.656	6.257.674.643
Alia Nur Fitri	Januari-Desember January-December	187.408.000	27.500.000	-	214.908.000	2.578.896.000	1.280.998.328	187.408.000	416.974.656	4.464.276.984
Sub Jumlah (Rp) Subtotal (IDR)										17.281.533.916
Fasilitas Kendaraan (Rp) Transportation Facility (IDR)										
Fasilitas Kesehatan (at cost) (Rp) Health facility (at cost) (IDR)										At Cost
Fasilitas Bantuan Hukum (at cost) (Rp) Legal Aid Facility (at cost) (IDR)										
Fasilitas Perkumpulan Profesi (Rp) Professional Association Facilities (IDR)										At Cost
Fasilitas Biaya Representasi (Rp) Representation Fee Facility (IDR)										At Cost

Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Jamkrindo pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The remuneration received by Jamkrindo's Board of Commissioners and Board of Directors in 2023 is as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024

Total Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2024

	Jumlah/Total (Rp) Total (IDR)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	17.281.533.916
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors	34.777.824.004
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024 Total Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2024	52.059.357.920

Rasio Gaji

Salary Ratio

Perbandingan Ratio	2024	2023	2022
Direktur Utama terhadap Direktur President Director in comparison to other Directors	1 : 1,13	1 : 1,18	1 : 1,15
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director in comparison to the President Commissioner	1 : 2,14	1 : 2,22	1 : 2,13
Direktur Utama terhadap Komisaris President Director in comparison to other Commissioners	1 : 2,37	1 : 2,47	1 : 2,37
Direktur Utama terhadap Karyawan Tertinggi President Director in comparison to the Highest-Ranking Employee	1 : 2,53	1 : 2,53	1 : 2,51
Direktur Utama terhadap Karyawan Terendah President Director in comparison to the Lowest-Ranking Employee	1 : 39,85	1 : 39,85	1 : 39,3
Karyawan tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest-Ranking Employee in comparison to the Lowest-Ranking Employee	1 : 15,73	1 : 15,73	1 : 15,64
Karyawan terendah terhadap Upah Minimum Regional Lowest-Ranking Employee in comparison to the Regional Minimum Wage	1 : 1,05	1 : 1,09	1 : 1,14

Karyawan tertinggi yang dimaksud pada tabel di atas adalah Karyawan yang menduduki jabatan dengan penghasilan tetap (THP), sementara Karyawan terendah adalah Karyawan pelaksana dengan penghasilan (THP). Untuk perhitungan Upah Minimum Regional menggunakan wilayah DKI Jakarta.

The highest-ranking employees referred to in the table above are employees who hold positions with a fixed income. While the lowest-ranking employees are executive employees with income. The average income of the DKI Jakarta region is used for the calculations of the Regional Minimum Wage.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan untuk melakukan review terhadap analisis kinerja bulanan perusahaan, mengevaluasi perkembangan kondisi terkini, serta menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, rapat ini bertujuan memberikan nasihat atau saran kepada Direksi. Rapat Dewan Komisaris meliputi beberapa jenis pertemuan, yaitu Rapat Internal, Rapat dengan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam RUPS, Dewan Komisaris menyampaikan pendapat, tanggapan, dan masukan kepada pemegang saham, serta mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan membahas masalah-masalah penting lainnya. Selain itu, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat rutin setiap bulan, termasuk Rapat Internal yang dihadiri oleh Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Pemantau Risiko, serta Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Jika diperlukan, rapat insidental juga dapat dilaksanakan, baik dengan komite-komite maupun dengan Direksi.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali Rapat Internal, 12 (dua belas) kali Rapat dengan mengundang Direksi, dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Board of Commissioners Meeting

Board of Commissioners meetings are held to review the Company's monthly performance analysis, evaluate the latest developments, and address issues faced by the Company. Moreover, this meeting aims to provide advice or suggestions to the Board of Directors. Meetings of the Board of Commissioners include several types of meetings, namely Internal Meetings, Meetings with the Board of Directors, and the General Meeting of Shareholders (GMS).

In the GMS, the Board of Commissioners conveys opinions, responses, and inputs to the shareholders, as well as proposes the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and discusses other important matters. Moreover, the Board of Commissioners also holds regular meetings every month. These meeting include the Internal Meetings attended by the Audit Committee, Integrated Governance Committee, and Risk Monitoring Committee. As well as Board of Commissioners Meetings with the Board of Directors. If necessary, incidental meetings may also be held, both with committees and with the Board of Directors.

Throughout 2024, the Board of Commissioners has conducted a total of 12 (twelve) Internal Meetings, 12 (twelve) Meetings with the Board of Directors, and 2 (two) General Meeting of Shareholders (GMS).

Risalah Rapat Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi Minutes of the Board of Commissioners Meeting by Inviting the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda
1.	25 Januari 2024 January 25, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Desember 2023, oleh: 1. Komite Tata Kelola Terintegrasi 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Audit Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in December 2023, by: 1. Integrated Governance Committee 2. Risk Monitoring Committee 3. Audit Committee
2.	27 Februari 2024 February 27, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Januari 2024, oleh: 1. Komite Pemantau Risiko 2. Komite Tata Kelola Terintegrasi 3. Komite Audit Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in January 2024, by: 1. Risk Monitoring Committee 2. Integrated Governance Committee 3. Audit Committee
3.	26 Maret 2024 March 26, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Februari 2024, oleh: 1. Komite Tata Kelola Terintegrasi 2. Komite Audit 3. Komite Pemantau Risiko Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in February 2024, by: 1. Integrated Governance Committee 2. Audit Committee 3. Risk Monitoring Committee

Risalah Rapat Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi
Minutes of the Board of Commissioners Meeting by Inviting the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda
4.	23 April 2024 April 23, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Maret 2024, oleh: 1. Komite Pemantau Risiko 2. Komite Audit Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in March 2024, by: 1. Risk Monitoring Committee 2. Audit Committee
5.	28 Mei 2024 May 28, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan April 2024, oleh: 1. Komite Audit 2. Komite Tata Kelola Terintegrasi 3. Komite Pemantau Risiko Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in April 2024, by: 1. Audit Committee 2. Integrated Governance Committee 3. Risk Monitoring Committee
6.	25 Juni 2024 June 25, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Mei 2024, oleh: 1. Komite Pemantau Risiko 2. Komite Audit Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in May 2024, by: 1. Risk Monitoring Committee 2. Audit Committee
7.	23 Juli 2024 July 23, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Juni 2024, oleh: 1. Komite Tata Kelola Terintegrasi 2. Komite Audit 3. Komite Pemantau Risiko Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in June 2024, by: 1. Integrated Governance Committee 2. Audit Committee 3. Risk Monitoring Committee
8.	27 Agustus 2024 August 27, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Juli 2024, oleh: 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in July 2024, by: 1. Audit Committee 2. Risk Monitoring Committee
9.	25 September 2024 September 25, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Agustus 2024, oleh: 1. Komite Tata Kelola Terintegrasi 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Audit Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in August 2024, by: 1. Integrated Governance Committee 2. Risk Monitoring Committee 3. Audit Committee
10.	23 Oktober 2024 October 23, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan September 2024, oleh: 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in September 2024, by: 1. Audit Committee 2. Risk Monitoring Committee
11.	26 November 2024 November 26, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Oktober 2024, oleh: 1. Komite Pemantau Risiko 2. Komite Audit 3. Komite Tata Kelola Terintegrasi Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in October 2024, by: 1. Risk Monitoring Committee 2. Audit Committee 3. Integrated Governance Committee
12.	18 Desember 2024 December 18, 2024	Pembahasan hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan November 2024, oleh: 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko Discussion of the results from the Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in November 2024, by: 1. Audit Committee 2. Risk Monitoring Committee

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris

Recapitulation and Attendance Rate of the Board of Commissioners in Internal Meetings of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran Percentage of Attendance
Krisna Wijaya	Komisaris Utama/ Independen President/Independent Commissioner	12	12	0	100%
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	0	100%
Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	0	100%
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	12	12	0	100%
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	12	12	0	100%
Angger P. Yuwono	Komisaris Commissioner	12	12	0	100%
Rata-rata Average					100%

Risalah Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi

Minutes of the Board of Commissioners Meeting by Inviting the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda
1.	25 Januari 2024 January 25, 2024	- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Desember 2023. - Lain-lain. - Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in December 2023 - Others.
2.	27 Februari 2024 February 27, 2024	- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Januari 2024. - Progress Audit Laporan Tahunan PT Jamkrindo Tahun Buku 2023. - Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in January 2024. - Progress Audit of PT Jamkrindo's Annual Report for the 2023 Fiscal Year.
3.	26 Maret 2024 March 26, 2024	- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Februari 2024. - Progress Audit Laporan Tahunan PT Jamkrindo Tahun Buku 2023. - Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in February 2024. - Progress Audit of PT Jamkrindo's Annual Report for the 2023 Fiscal Year.
4.	23 April 2024 April 23, 2024	- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Maret 2024. - Progress Implementasi Struktur Organisasi baru. - Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in March 2024. - Progress on the Implementation of the new Organizational Structure.
5.	28 Mei 2024 May 28, 2024	- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan April 2024. - Monitoring Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal dan Internal Audit. - Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in April 2024. - Monitoring of Follow-up actions on External and Internal Audit Findings.
6.	25 Juni 2024 June 25, 2024	- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Mei 2024. - Pembahasan Rancangan RJPP PT Jamkrindo Tahun 2025-2029. - Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in April 2024. - Discussion on the Draft of PT Jamkrindo's Long-Term Plan (RJPP) for 2025-2029.
7.	23 Juli 2024 July 23, 2024	- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juni 2024. - Lain - lain. - Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in June 2024. - Others.
8.	27 Agustus 2024 August 27, 2024	- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juli 2024. - Lain - lain. - Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in July 2024. - Others.
9.	25 September 2024 September 25, 2024	- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Agustus 2024. - Lain-lain. - Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in August 2024. - Others.

Risalah Rapat Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi
Minutes of the Board of Commissioners Meeting by Inviting the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda
10.	23 Oktober 2024 October 23, 2024	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan September 2024. 2. Lain-lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in September 2024. 2. Others.
11.	26 November 2024 November 26, 2024	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Oktober 2024. 2. Lain-lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in October 2024. 2. Others.
12.	18 Desember 2024 December 18, 2024	1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan November 2024. 2. Lain – lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in November 2024. 2. Others.

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan
Recapitulation and Attendance Rate of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Joint Meetings

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran Percentage of Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Krisna Wijaya	12	12	0	100%
M. Muchlas Rowi	12	12	0	100%
Hernita Alius	12	12	0	100%
Ari Wahyuni	12	12	0	100%
Desty Arlaini	12	11	1	92%
Angger P. Yuwono	12	12	0	100%
Direksi Board of Directors				
Akhmad Purwakajaya	12	9	3	75%
Henry Panjaitan	12	11	1	92%
Achmad Ivan S Soeparno	12	8	4	66%
Abdul Bari	12	9	3	75%
Suwarsito	12	11	1	92%
Alia Nur Fitri	12	9	3	75%
Rata-rata Average				79%

Rapat/Pertemuan Lain

Selain Rapat Rutin Bulanan (Internal dan mengundang Direksi) dan RUPS, selama tahun 2023 Dewan Komisaris juga telah menyelenggarakan 16 (enam belas) kali Rapat dan/atau Diskusi Lain yang bersifat teknis (secara internal maupun dengan Direktur) serta dilaksanakan dalam rangka membahas permasalahan perusahaan secara spesifik dan lebih mendalam, antara lain:

Other Meetings/Discussions

Other than the Monthly Routine Meetings (Internal and inviting the Board of Directors) and the GMS, throughout 2023, the Board of Commissioners has also held a total of 16 (sixteen) Meetings and/or Other Discussions of a technical nature (internally or with the Directors) and held it in order to discuss specific and more in-depth company issues as listed below:

No.	Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda	Keterangan Information
1.	18 Januari 2024 January 18, 2024	- Updating Progress Teknologi Informasi - Progress Report Pelaksanaan Rencana Strategis Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) 2022-2024 - Highlight Transformasi Teknologi Informasi - Update on the Progress of Information Technology - Progress Report on the Implementation of the Information Technology Master Plan (MPTI) for 2 - Highlights of the Information Technology Transformation	Diskusi dengan SEVP Teknologi Informasi dan Divisi Pengembangan TI & Divisi Operasional TI Discussion with SEVP of Information Technology, the IT Development Division, & the IT Operations Division
2.	09 Januari 2024 January 09, 2024	- Tugas Pokok dan Fungsi Organ Pendukung Dewan Komisaris - Penambahan Indikator Dashboard atas Evaluasi Pencapaian Kinerja - Main Duties and Functions of the Supporting Organs of the Board of Commissioners - Addition of Dashboard Indicators for Evaluating Performance Achievements	Diskusi Internal Internal Discussions
3.	16 Februari 2024 February 16, 2024	Rapat Kerja Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Working Meeting of the Board of Commissioners and Supporting Organs	Rapat Internal Internal Meetings
4.	29 Februari 2024 – 01 Maret 2024 February 29, 2024 – March 01, 2024	Kegiatan Leaders Strategic Gateway IFG Tahun 2024 2024 IFG Strategic Gateway Leadership Activities	Rapat Kerja dengan PT BPUI (Persero) dan Anak-anak Perusahaan Working Meeting with PT BPUI (Persero) and its Subsidiaries
5.	14 Maret 2024 March 14, 2024	Bimbingan Teknis Penyampaian LHKPN di Lingkungan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Utama (Persero) Indonesia Financial Group Tahun 2024 Technical Guidance on LHPKN Submission within PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Utama (Persero) - Indonesia Financial Group, 2024	Rapat dengan KPK, PT BPUI (Persero), dan Anak-anak Perusahaan Meeting with KPK, PT BPUI (Persero), and its Subsidiaries
6.	18 Maret 2024 March 18, 2024	Progress Audit Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 Progress Audit of the Annual Financial Statement for the 2023 Fiscal Year	Rapat dengan PwC, Kementerian BUMN, PT BPUI (Persero), dan Direksi PT Jamkrindo Meeting with PwC, Ministry of SOEs, PT BPUI (Persero), and the Board of Directors of PT Jamkrindo
7.	17 Mei 2024 May 17, 2024	Kick Off Meeting Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Kick Off Meeting for Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	Rapat dengan PT BPUI (Persero), Komite Audit BPUI dan Perusahaan Afiliasi, Meeting with PT BPUI (Persero), the BPUI Audit Committee, and Affiliated Companies
8.	07 Juni 2024 June 07, 2024	Penyampaian Laporan Contingency Plan Submission of the Contingency Plan Report	Diskusi dengan RSM, dan Divisi Manajemen Risiko PT Jamkrindo Discussion with RSM, and PT Jamkrindo's Risk Management Division
9.	05 Juli 2024 July 05, 2024	Penyampaian Risk Maturity Assessment PT Jamkrindo Submission of the PT Jamkrindo Risk Maturity Assessment	Diskusi dengan Proxis dan Divisi Manajemen Risiko Discussion with Proxis and the Risk Management Division
10.	01 Agustus 2024 August 01, 2024	Pembahasan atas Usulan Revisi RKAP 2024 PT Jamkrindo Discussion on the Proposed Revision of PT Jamkrindo's 2024 RKAP	Rapat Internal Internal Meeting
11.	09 Agustus 2024 August 09, 2024	Executive Meeting Quarter II Tahun 2024 Executive Meeting for the Second Quarter of 2024	Rapat dengan PT BPUI (Persero) dan Anak-anak Perusahaan Meeting with PT BPUI (Persero) and its Subsidiaries

No.	Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda	Keterangan Information
12.	04 September 2024 September 04, 2024	Laporan Progress Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Progress Report on Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	Diskusi dengan Deloitte Discussion with Deloitte
13.	11 September 2024 September 11, 2024	Kick Off Meeting RKAP 2025 Kick Off Meeting for the 2025 RKAP	Rapat dengan PT BPUI (Persero) dan Anak-anak Perusahaan Meeting with PT BPUI (Persero) and its Subsidiaries
14.	14 November 2024 November 14, 2024	Studi Banding terkait Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Comparative Study on the Integrated Governance Committee (KTKT)	Rapat dengan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung serta manajemen PT Perkebunan Nusantara I (PTPN1) Meeting with the Board of Commissioners, Supporting Organs, and management of PT Perkebunan Nusantara I (PTPN1)
15.	14 November 2024 November 14, 2024	Kick Off Meeting General Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Kick Off Meeting for the General Audit of the Financial Statements for the 2024 Fiscal Year	Rapat dengan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) dan Manajemen PT Jamkrindo Meeting with KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) and the Management of PT Jamkrindo
16.	22 November 2024 November 22, 2024	Executive Meeting Quarter III Tahun 2024 Executive Meeting for the Third Quarter of 2024	Rapat dengan PT BPUI (Persero) dan Anak-anak Perusahaan Meeting with PT BPUI (Persero) and its Subsidiaries

Rapat Direksi

Berdasarkan peraturan Direksi No. 49/PerDir/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Rapat Direksi Jamkrindo, ketentuan mengenai Rapat Direksi Jamkrindo diatur sebagai berikut:

- Jadwal Rapat
 - Direksi menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan dalam Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, dan/atau permintaan tertulis seorang atau lebih Dewan Komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
 - Rapat yang bersifat segera dan strategis dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan level Direksi.
- Tempat Pelaksanaan Dilaksanakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi.
- Pimpinan Rapat
 - Rapat dipimpin oleh Direktur Utama.
 - Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama.
 - Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara Anggota Direksi yang ada.
 - Dalam hal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) tidak dilakukan, maka salah seorang Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan.

Board of Directors Meetings

In accordance with the regulation of the Board of Directors No. 49/PerDir/1/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning the the Jamkrindo Board of Directors Meeting Management Guidelines, the provisions regarding the Jamkrindo Board of Directors Meeting are regulated as follows:

- Meeting Schedule
 - The Board of Directors holds meetings as required. At least once a month in accordance with the plan determined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
 - Meetings of the Board of Directors may be held outside the regular schedule if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors. And/or the written request of one or more Board of Commissioners by stating the matters to be discussed.
 - Immediate and strategic meetings with an agenda of matters that require decision-making at the Board of Directors level.
- The Location of Implementation is Conducted either at the domicile of the Company, at the place of business of the Company, or at another place in the territory of the Republic of Indonesia determined by the Board of Directors.
- Chairman of the Meeting
 - The meeting was chaired by the President Director.
 - In the event that the President Director is absent or unavailable, the Board of Directors meeting is chaired by a director specially appointed for that purpose by the President Director.
 - In the event that the President Director does not make an appointment, then one of the Directors is appointed by and among the existing members of the Board of Directors.
 - In the event that the appointment as referred to in paragraph (c) is not made, then one of the Directors who has served the longest as a member of the Board of Directors of the Company.

- e. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi lebih dari satu orang. Maka Direktur yang tertua dalam usia yang berwenang memimpin Rapat Direksi.

Direksi mengadakan rapat rutin setiap sekali dalam setiap bulan, sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam penjelasan di atas. Di sepanjang 2023, Direksi melaksanakan 59 (lima puluh sembilan) kali Rapat Direksi. Di samping itu, Direksi menghadiri 12 kali Rapat dengan Dewan Komisaris. Tentang risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagian pembahasan Rapat Dewan Komisaris.

Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat.

- e. In the event that the Director who has served the longest as a Member of the Board of Directors is more than one person. Then, the Director who is the oldest in age has the authority to chair the Board of Directors Meeting.

The Board of Directors holds regular meetings once every month, as stipulated in the explanation above. Throughout 2023, the Board of Directors has conducted a total of 59 (fifty-nine) Board Meetings. Moreover, the Board of Directors attended 12 meetings with the Board of Commissioners. The minutes of the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings can be found in the discussion section of the Board of Commissioners Meeting.

The following are the minutes of the meeting as well as the attendance rate of the Board of Directors in the meeting.

Risalah Rapat Direksi Minutes of the Board of Directors Meeting

No.	Hari/Tanggal Day/Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
		Pembahasan Struktur Organisasi, Kewenangan Administrasi dan Deskripsi Pekerjaan 2024 Discussed the Organizational Structure, Administrative Authority, and Job Description in 2024
1	Rabu, 10 Januari 2024 Wednesday, January 10, 2024	1. Penetapan Perubahan Proses Penjaminan KCK 2. Relokasi KUP Cimahi Ke Kabupaten Garut dan menjadi KUP Garut 1. Determined the Changes to the Conventional Branch Office (KCK) Guarantee Process 2. Relocated the Cimahi Branch of the General Provisions and Tax Procedures (KUP) to Garut Regency to become the Garut Branch of the General Provisions and Tax Procedures (KUP)
		Pinjaman Bagi Hasil Profit Sharing Loan
2	Senin, 15 Januari 2024 Monday, January 15, 2024	Pembahasan Rencana Perpanjangan Kerjasama Reasuransi KUR dan Non KUR Tahun 2024 Discussed the Plan for the Extension of People's Business Credit (KUR) and Non-People's Business Credit Reinsurance Cooperation in 2024
3	Senin, 22 Januari 2024 Monday, January 22, 2024	Pembahasan Goal Setting KPI Unit Kerja Kantor Pusat 2024 Discussed about Setting the KPI Goals for the 2024 Head Office Work Units
4	Selasa, 23 Januari 2024 Tuesday, January 23, 2024	Pembahasan Formasi SDM PT Jamkrindo Discussed the HC Formation of PT Jamkrindo Pembahasan Lanjutan Goal Setting KPI Unit Kerja Kantor Pusat 2024 Followed-up Discussion Regarding Setting the 2024 KPI for the Work Units of the Head Office
5	Kamis, 01 Februari 2024 Thursday, February 1, 2024	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Wilayah (RKAW) Tahun 2024 Discussed the 2024 Regional Work Plan and Budget (RKAW)
6	Rabu, 7 Februari 2024 Wednesday, February 7, 2024	Pembahasan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan 2024 Discussed the Administrative Authority Delegation Policy and the 2024 Policy
7	Senin, 19 Februari 2024 Monday, February 19, 2024	Pembahasan Pengadaan Motor RM CAC dan Pengalihan Biaya Discussed the RM CAC Motor Procurement and Cost Shifting Pembahasan KPI Unit Kerja Tahun 2024 Discussed the 2024 KPI Work Units
8	Senin, 26 Februari 2024 Monday, February 26, 2024	Pembahasan Pelaksanaan Pengadaan Konsultan Reviu ICOFR sesuai APS Seri A Discussed the Procurement of ICOFR Review Consultant in accordance with Series A APS Pembahasan Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Eksternal (BPK, OJK, dan KAP PwC) Discussed the Follow-up on the Progress of Recommendations of External Audits (Audit Board of Indonesia (BPK), Financial Services Authority (OJK), and PwC Public Accounting Firm (KAP))
9	Senin, 04 Maret 2024 Monday, March 4, 2024	Pembahasan Gearing Ratio Discussed the Gearing Ratio

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meeting

No.	Hari/Tanggal Day/Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
10	Rabu, 06 Maret 2024 Wednesday, March 6, 2024	Pembahasan Lanjutan KPI 2024 Followed-Up Discussion regarding the 2024 KPI
11	Rabu, 13 Maret 2024 Wednesday, March 13, 2024	Kick-off RJPP 2025 – 2029 bersama Konsultan Held a Kick-Off Meeting for the 2025 - 2029 RJPP with Consultants Pembahasan KPI 2024 Unit Kerja Discussed the 2024 KPI Work Units
12	Senin, 18 Maret 2024 Monday, March 18, 2024	Penguatan Bisnis Penjaminan Melalui Ekosistem Perbankan, Ekosistem Pemerintahan/ Kementerian dan Ekosistem BUMN Strengthened the Guarantee Business through the Banking Ecosystem, Government/Ministry Ecosystem, and SOE Ecosystem
13	Senin, 25 Maret 2024 Monday, March 25, 2024	Penyampaian Profil Risiko Terintegrasi Triwulan IV Tahun 2023 Conveyed the Integrated Risk Profile for the Fourth Quarter of 2023 Pembahasan Terkait Klaim Produk Suretyship Discussed the Suretyship on Product Claims
14	Senin, 01 April 2024 Monday, April 1, 2024	Rapat Direksi IT Visioning Penyusunan Rencana Strategis TI/Masterplan TI 2025 – 2029 Held Board of Directors Meeting Regarding the 2025 - 2029 IT Visioning and Preparation of IT Strategic Plan/Masterplan Pembahasan Kebijakan Deskripsi Pekerjaan Tahun 2024 Discussed the 2024 Job Description Policy
15	Kamis, 18 April 2024 Thursday, April 18, 2024	Pembahasan Syarat dan Ketentuan Penjaminan PKS Kredit Usaha Rakyat (KUR) Discussed the Terms and Conditions of the Cooperation Agreement (PKS) Guarantee for People's Business Credit (KUR)
16	Senin, 22 April 2024 Monday, April 22, 2024	Pembahasan Gearing Ratio Discussed the Gearing Ratio
17	Senin, 29 April 2024 Monday, April 29, 2024	Pembahasan Draft Hasil Penilaian/ Evaluasi atas Penerapan Good Corporate Governance Tahun 2023 Discussed the Draft Results of the Assessment/Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in 2023
18	Selasa, 30 April 2024 Tuesday, April 30, 2024	Komite Penjaminan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Bank Garansi dengan BPD Solutgo Signed the Guarantee Committee Cooperation Agreement Regarding Bank Guarantee with Solutgo Regional Development Bank (BPD) Komite Penjaminan Perjanjian Kerja Sama Bank BTN dan Bank Bukopin Signed the Cooperation Agreement between the Guarantee Committee of Bank BTN and Bank Bukopin Komite Penjaminan Kredit Produktif PT Bank KB Bukopin Established the Productive Credit Guarantee Committee of PT Bank KB Bukopin
19	Kamis, 2 Mei 2024 Thursday, May 2, 2024	Pembahasan RKAP Unit Kerja Tahun 2024 dan KPI Unit Kerja Tahun 2023 Discussed the 2024 Company Work Plan and Unit (RKAP) Work Units as well as the 2023 KPI Work Units
20	Selasa, 21 Mei 2024 Tuesday, May 21, 2024	Pembahasan RJPP PT Jamkrindo Tahun Buku 2025-2029 Discussed the Company's Long Term Plan (RJPP) of PT Jamkrindo for the 2025-2029 Fiscal Year
21	Rabu, 19 Juni 2024 Wednesday, June 19, 2024	Business Performance Review (BPR) Periode Mei 2024 Held Business Performance Review (BPR) for the May 2024 Period
22	Senin, 24 Juni 2024 Monday, June 24, 2024	Pembahasan Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahatanganan Aset serta Progress Renovasi Gedung Kantor Dari Divisi Umum Discussed the Approval of the Write-Off and Transfer of Assets. As well as the Progress Regarding the Renovation of the Office Building for the General Affairs Division
23	Senin, 01 Juli 2024 Monday, July 1, 2024	Pembahasan Updating Progress Teknologi Informasi Discussed the Updating of the Progress of Information Technology
24	Senin, 15 Juli 2024 Monday, July 15, 2024	Business Performance Review (BPR) Periode Juni 2024 Held Business Performance Review (BPR) for the June 2024 Period
25	Senin, 22 Juli 2024 Monday, July 22, 2024	Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2024 Discussed the Revisions to the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) Pembahasan Kesiapan Jamkrindo dalam Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Discussed Jamkrindo's Readiness for the Financial Information Service System (SLIK) Reporting

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meeting

No.	Hari/Tanggal Day/Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
26	Selasa, 23 Juli 2024 Tuesday, July 23, 2024	Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Komite Investasi Holding Tentang Sinergi Investasi Dalam Bentuk Kontrak Pengelolaan Dana Followed up on Recommendations of the Holding Investment Committee Regarding Investment Synergy in the Form of Fund Management Contracts
27	Rabu, 03 Juli 2024 Wednesday, July 3, 2024	Penyampaian Laporan Risk Maturity Index (MRI) Tahun Buku 2023 dan Roadmap Manajemen Risiko Conveyed the Risk Maturity Index (RMI) Report for the 2023 Fiscal Year as well as the Risk Management Roadmap Pengajuan Penjaminan KBG Jaminan Uang Muka an PT Pacificagung Trijaya Conveyed the Counter Bank Guarantee (KGB) for Down Payment Guarantees to PT Pacificagung Trijaya
28	Senin, 15 Juli 2024 Monday, July 15, 2024	Business Performance Review (BPR) Periode Juni 2024 Business Performance Review (BPR) for the June 2024 Period
29	Senin, 22 Juli 2024 Monday, July 22, 2024	Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2024 Discussed the Revisions to the 2024 RKAP Pembahasan Kesiapan Jamkrindo dalam Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Discussed Jamkrindo's Readiness for Financial Information Service System (SLIK) Reporting Pembahasan Formasi SDM dan Talent Committee Discussed the HC Formation and Talent Committee
31	Selasa, 30 Juli 2024 Tuesday, July 30, 2024	Permohonan Penjaminan Kredit SCF (Sinergi BUMN) an PT Medquest Jaya Global nilai Rp 27.000.000.000 Applied for SCF (SOE Synergy) Credit Guarantee for PT Medquest Jaya Global with a value of IDR 27,000,000,000 Update Penjaminan Kupedes Rakyat & Kupedes Bank BRI dan Penjaminan Mekaar PT. Permodalan Nasional Madani Updated the People's Rural General Credit (Kupedes) & Bank BRI's Rural General Credit (Kupedes) Guarantee. As well as Mekaar Guarantee of PT. Permodalan Nasional Madani
32	Senin, 05 Agustus 2024 Monday, August 5, 2024	Penyampaian Profil Risiko Terintegrasi Triwulan II Tahun 2024 Conveyed the Integrated Risk Profile for the Second Quarter of 2024 Update Penjaminan Kupedes Rakyat & Kupedes Bank BRI dan Penjaminan Mekaar PT. Permodalan Nasional Madani Updated the People's Rural General Credit (Kupedes) & Bank BRI's Rural General Credit (Kupedes) Guarantee. As well as Mekaar Guarantee of PT. Permodalan Nasional Madani
33	Senin, 12 Agustus 2024 Monday, August 12, 2024	Pembahasan Komite ALMA Triwulan II 2024 Discussed the ALMA Committee of the Second Quarter of 2024
34	Rabu, 21 Agustus 2024 Wednesday, August 21, 2024	Komite Penjaminan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Bank Garansi dengan BPD Jatim Signed the Guarantee Committee Cooperation Agreement Regarding Bank Guarantee with Jatim Regional Development Bank (BPD) Laporan Kajian Kepatuhan atas Pemberlakuan POJK SLIK bagi PT Jamkrindo Completed Compliance Review Report on the Implementation of POJK SLIK for PT Jamkrindo
35	Senin, 2 September 2024 Monday, September 2, 2024	Laporan Kajian Kepatuhan atas Pemberlakuan POJK SLIK bagi PT Jamkrindo Completed Compliance Review Report on the Implementation of the POJK Financial Information Services System (SLIK) for PT Jamkrindo
36	Senin, 09 September 2024 Monday, September 9, 2024	Laporan Terkait Rencana Tindakanlanjut Subrogasi KUR PT BNI Conveyed PT BNI's People Business Credit (KUR) Subrogation Follow-up Plan
37	Rabu, 18 September 2024 Wednesday, September 18, 2024	Business Performance Review (BPR) Periode Agustus 2024 Held Business Performance Review (BPR) for the August 2024 Period Penyesuaian Informasi Terkait Penyesuaian Nilai Cadangan Perusahaan atas Pengaruh Nilai IJP Ditangguhkan Adjusted the Information Related to the Company's Reserve Value Adjustment. For the Impact of the Deferred Guarantee Service Fee Value
38	Senin, 23 September 2024 Monday, September 23, 2024	Reasuransi Produk Penjaminan Kredit Alsintan Tahun 2024 Reinsurance of Alsintan Credit Guarantee Products in 2024 Rencana Kerjasama Reasuransi Non Kredit Usaha Rakyat Tahun 2025 Collaboration Plan for the 2025 Non-People's Business Credit Reinsurance

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meeting

No.	Hari/Tanggal Day/Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
39	Senin, 30 September 2024 Monday, September 30, 2024	Pembahasan Progress SLIK OJK Discussed the Progress of the OJK's Financial Information Service System (SLIK)
40	Rabu, 2 Oktober 2024 Wednesday, October 2, 2024	Pembahasan Perjanjian Pelayanan Jasa National Pooling IFG Group Discussed the IFG Group's National Pooling Service Agreement Pembahasan RKAP 2025 Discussed the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP)
41	Senin, 7 Oktober 2024 Monday, October 7, 2024	Tindak lanjut atas Penanganan Piutang IJP KUR Gen 1 – Tahap I Followed up on Generation 1 Guarantee Service Fee (IJP) of People's Business Credit (KUR) Receivables Handling - Phase I
42	Senin, 14 Oktober 2024 Monday, October 14, 2024	Pembahasan RKAP Tahun 2025 Discussed the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP)
43	Rabu, 16 Oktober 2024 Wednesday, October 16, 2024	Business Performance Review (BPR) Periode September 2024 Business Performance Review (BPR) for the September 2024 Period
44	Senin, 21 Oktober 2024 Monday, October 21, 2024	Pemaparan Hasil Penyusunan Rencana Strategis TI 2025 – 2029 Presented the Results of the 2025 - 2029 IT Strategic Plan Penjaminan Plafond Guarantee an PT Teknologi Cipta Karya senilai Rp 50.000.000.000 Guaranteed the Plafond Guarantee for PT Teknologi Cipta Karya with a value of IDR 50.000.000.000
45	Rabu, 23 Oktober 2024 Wednesday, October 23, 2024	Pembahasan Improvement atas Peraturan Prosedur Plafond Guarantee Discussed the Improvement of the Regulation of the Plafond Guarantee Procedure
46	Kamis, 24 Oktober 2024 Thursday, October 24, 2024	Pembahasan Penjaminan Plafond Guarantee an PT Teknologi Cipta Karya senilai Rp 150.000.000.000 Discussed the Plafond Guarantee for PT Teknologi Cipta Karya with a value of IDR 150,000,000,000
47	Selasa, 29 Oktober 2024 Tuesday, October 29, 2024	Komite Perubahan pada PKS Bank BRI tentang Kupedes dan Turunannya Committee on Changes to Bank BRI's Cooperation Agreement (PKS) regarding Rural General Credit and its Derivatives
48	Senin, 04 November 2024 Monday, November 4, 2024	Komite ALMA Triwulan III ALMA Committee for the Third Quarter Pengelolaan Aplikasi PBK Managed the Overbooking Application
49	Selasa, 05 November 2024 Tuesday, November 5, 2024	Pembahasan Draft Usulan Struktur Organisasi 2025 Discussed the Proposed Draft of the 2025 Organizational Structure
50	Senin, 11 November 2024 Monday, November 11, 2024	Pembahasan Rencana MoU dan PKS dengan Lembaga Pemerintah Discussed the Memorandum of Understanding and Cooperation Agreement Plans with Government Institutions Mapping SDM Unit Kerja (Kanwil dan Kanca) Mapped the HC Work Units (Regional Office and Kanca)
51	Senin, 18 November 2024 Monday, November 18, 2024	Penyelesaian Business Performance Review (BPR) Periode Oktober 2024 Completed the Business Performance Review (BPR) for the October 2024 Period Analisa Evaluasi Kinerja KUP Performance Evaluation Analysis of the General Tax Provisions (KUP)
52	Selasa, 19 November 2024 Tuesday, November 19, 2024	Penyelesaian Terkait Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) Multiguna KOPEBI dan Penyelesaian Klaim Multiguna KOPEBI Settlement Related to the Issuance of Bank Indonesia Employee Cooperative (KOPEBI) Multipurpose Guarantee Certificate (SP) as well as Settlement of Bank Indonesia Employee Cooperative (KOPEBI) Multipurpose Claims
53	Senin, 02 Desember 2024 Monday, December 2, 2024	Pembahasan Tenaga Alih Daya (Karyawan Outsourcing) PT Jamkrindo Discussed the Outsourcing Employees of PT Jamkrindo
54	Selasa, 03 Desember 2024 Tuesday, December 3, 2024	Evaluasi Subrogasi FLPP BTN-Jamkrindo Subrogation Evaluation of the BTN-Jamkrindo Housing Financing Liquidity Facility

Risalah Rapat Direksi
Minutes of the Board of Directors Meeting

No.	Hari/Tanggal Day/Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
55	Senin, 9 Desember 2024 Monday, December 9, 2024	Pembahasan Penyesuaian Peraturan terkait Plafond Guarantee Discussed the Regulatory Adjustments related to Plafond Guarantee
56	Kamis, 12 Desember 2024 Thursday, December 12, 2024	Pembahasan Rencana Perpanjangan OWK Reindo Tahun 2014 Discussed Reindo's 2014 Mandatory Convertible Bonds (MCB) Extension Plan
57	Senin, 16 Desember 2024 Monday, December 16, 2024	Pembahasan Analisis Gearing Ratio, Peningkatan Porsi Reasuransi Discussed the Gearing Ratio Analysis regarding the Increase in Reinsurance Portion
58	Jumat, 20 Desember 2024 Friday, December 20, 2024	1. Business Performance Review (BPR) Periode November 2024 1. Held Business Performance Review (BPR) for the November 2024 Period
		2. Pembahasan Perubahan Ketentuan Pada Kantor Unit Pelayanan (KUP) 2. Discussed the Changes of Provisions at the Service Unit Office (KUP)
		3. Pembahasan Kebijakan Penjaminan Sinergi BUMN 3. Discussed the SOE Synergy Guarantee Policy
		4. Pembahasan Pedoman Bidang Kepatuhan dan Pengelolaan Kebijakan 4. Discussed the Guidelines for Compliance and Policy Management
59	Selasa, 31 Desember 2024 Tuesday, December 31, 2024	Pembahasan Ketetapan Direksi tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 46/Per-Dir/1/XII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sekretaris Perusahaan Discussed the Decree of the Board of Directors regarding the Amendment to the Board of Directors Regulation Number 46/Per-Dir/1/XII/2020 concerning Corporate Secretary Management Guidelines

Rekapitulasi dan Tingkat Direksi dalam Rapat Direksi
Recapitulation and Attendance Rate of Directors in the Board of Directors Meeting

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran Attendance Percentage
Akhmad Purwakajaya	59	53	6	89.8%
Henry Panjaitan	59	50	9	84.7%
Achmad Ivan S Soeparno	59	54	5	91.5%
Abdul Bari	59	50	9	84.7%
Suwarsito	59	57	2	96.6%
Alia Nur Fitri	59	56	3	94.9%

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

DISCLOSURE OF AFFILIATED RELATIONSHIPS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJORITY AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Transparansi Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Berikut ini disajikan hubungan usaha serta hubungan afiliasi yang ada antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham. Hubungan usaha mencakup hal-hal seperti hutang-piutang, kerja sama bisnis, dan lain-lain. Sementara itu, hubungan afiliasi lebih merujuk pada hubungan istimewa yang umumnya disebabkan oleh ikatan darah, seperti hubungan suami/istri, anak/orang tua, saudara kandung, ipar, dan sebagainya.

Disclosure of Business Relationships and Affiliated Relationships Between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Shareholders

The following presents the business relationships and affiliations that exist between the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders. Business relationships include matters such as accounts receivable and payable, business partnerships, and so on. Meanwhile, affiliations refer more to special relationships that are generally due to kinship, such as relationships between husband and wife, children and parents, siblings, in-laws, and others.

	Hubungan Afiliasi Dengan Affiliated Relationship With		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Mayoritas/Pemegang Saham Pengendali Majority/Controlling Shareholders
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Krisna Wijaya	x	x	X
M. Muchlas Rowi	x	x	X
Hernita Alius	x	x	X
Ari Wahyuni	x	x	V
Desty Arlaini	x	x	V
Angger P. Yuwono	x	x	X
Direksi Board of Directors			
Akhmad Purwakajaya	x	x	X
Henry Panjaitan	x	x	X
Achmad Ivan S Soeparno	x	x	X
Abdul Bari	x	x	X
Suwarsito	x	x	X
Alia Nur Fitri	x	x	X

v = ada / x = tidak ada
v = there is a relation / x = there is no relation

Adanya hubungan afiliasi antara sebagian Dewan Komisaris dengan Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali muncul dari jabatan yang diemban dalam Kementerian, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

The existence of affiliations between some of the Board of Commissioners and the Government of Indonesia as the Majority/Controlling Shareholder arises from the positions they held in the Ministry, as explained below.

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan mengenai rangkap jabatan antara anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam *Board Manual* Perusahaan, di mana Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Ketentuan mengenai rangkap jabatan antara anggota Direksi telah diatur dalam *Board Manual* Perusahaan, yang mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Komisaris pada Badan usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Direksi di perusahaan lain di luar Jamkrindo selama tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Transparency of the Concurrent Positions of Board of Commissioners and the Board of Directors

Provisions regarding concurrent positions between members of the Board of Commissioners have been regulated in the Company's Board Manual. It stated that members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Member of the Board of Directors at State-Owned Enterprises, Regionally-Owned Enterprises, Privately-Owned Enterprises;
2. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/or legislative candidates/members and/or candidates for Regional Head/ Deputy Regional Head; and/or
3. Other positions that may create a conflict of interest.

Provisions regarding concurrent positions between members of the Board of Directors have been regulated in the Company's Board Manual, which includes the following provisions:

1. Member of the Board of Directors at State-Owned Enterprises, Regionally-Owned Enterprises, Privately-Owned Enterprises;
2. Member of the Board of Commissioners/Board of Commissioners at a State-Owned Enterprise;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/or legislative candidates/members and/or candidates for Regional Head/ Deputy Regional Head; and/or
5. Other positions that may create a conflict of interest.

The management relationship of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in other companies outside Jamkrindo during 2024 is explained below:

Kepengurusan pada Perusahaan Lain/Jabatan Lainnya Management in Other Companies/Other Positions			
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As Member of the Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Positions
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Krisna Wijaya	v	X	v
M. Muchlas Rowi	v	X	v
Hernita Alius	x	X	x
Ari Wahyuni	x	X	v
Desty Arlaini	x	X	v
Angger P. Yuwono	x	X	x
Direksi Board of Directors			
Akhmad Purwakajaya	x	X	x
Henry Panjaitan	x	X	x
Achmad Ivan S Soeparno	x	X	x
Abdul Bari	x	X	x
Suwarsito	x	X	x
Alia Nur Fitri	x	X	x

Rangkap jabatan Dewan Komisaris di luar Perusahaan adalah sebagai berikut:

The concurrent positions of members of the Board of Commissioners outside the Company are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jabatan pada Perusahaan Lain Position at Other Companies
Krisna Wijaya	• Anggota Tim Penilai Klarifikasi/Presentasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bidang Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2022-Sekarang) • Komisaris Utama, PT Brilian Indah Gemilang (2018-Sekarang) • Komisaris Independen, PT Adira Finance (Tbk) (2016-Sekarang) • Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Adaro Membangun Negeri (2014-Sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah, PT Chub Syariah Insurance (2009-Sekarang) • Member of the Assessment Team for Clarification/Presentation of Fit and Proper Assessment for Banking at Financial Services Authority (OJK) (2022-Present) • President Commissioner at PT Brilian Indah Gemilang (2018-Present) • Independent Commissioner at PT Adira Finance (Tbk) (2016-Present) • Member of the Supervisory Board at Adaro Membangun Negeri Foundation (2014-Present) • Member of Sharia Supervisory Board at PT Chub Syariah Insurance (2009-present).
M. Muchlas Rowi	• Bendahara Badan Pembina Harian (BPH), Institut Bisnis Muhammadiyah (2019-Sekarang) • Pemilik Rosbuck Milk & Coffee (2018-Sekarang) • Pimpinan Umum Monday Media Group (2015-Sekarang) • Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014-Sekarang) • Treasurer of the Supervisory Board at Muhammadiyah Business Institute (2019-Present) • Owner of Rosbuck Milk & Coffee (2018-Present) • Director of General Affairs at Monday Media Group (2015-Present) • Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014-Present)
Ari Wahyuni	Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022-Sekarang) Head of Organization and Management Bureau, Secretariat General of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2022-Present)
Desty Arlaini	• Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2021-Sekarang) • Penata Kelola Perusahaan Negara Madya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2021-Sekarang) • Assistant Deputy of Logistics Services at the Ministry of State-Owned Enterprises (2021-Present) • Administrator of Small and Midsize State-Owned Enterprises at the Ministry of State-Owned Enterprises (2021-Present)

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris, baik rangkap jabatan sebagai Komisaris di perusahaan lain, maupun jabatan pada institusi negara, tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Concurrent positions held by the Board of Commissioners, both concurrent positions as Commissioners in other companies, as well as positions in state institutions, do not violate applicable laws and regulations.

Transparansi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik di Perusahaan maupun di perusahaan lain, secara rutin diungkapkan melalui daftar kepemilikan saham yang diperbarui secara berkala. Berikut ini disajikan informasi transparan mengenai kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta kepemilikan saham di perusahaan lain yang melebihi 5%. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi potensi benturan kepentingan yang mungkin memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Transparency of Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Share ownership by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Company and in other companies, is routinely conveyed through a regularly updated share ownership register. The following presents disclosed information regarding the Company's share ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as share ownership in other companies with more than 5%. This information is important to identify potential conflicts of interest that may affect the decision-making process.

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	Jamkrindo	Perusahaan Lain > 5% Other Companies with more than 5%
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Krisna Wijaya	Nil None	Nil None
M. Muchlas Rowi	Nil None	Nil None
Hernita Alius	Nil None	Nil None
Ari Wahyuni	Nil None	Nil None
Desty Arlaini	Nil None	Nil None
Angger P. Yuwono	Nil None	Nil None
Direksi Board of Directors		
Akhmad Purwakajaya	Nil None	Nil None
Henry Panjaitan	Nil None	Nil None
Achmad Ivan S Soeparno	Nil None	Nil None
Abdul Bari	Nil None	Nil None
Suwarsito	Nil None	Nil None
Alia Nur Fitri	Nil None	Nil None

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

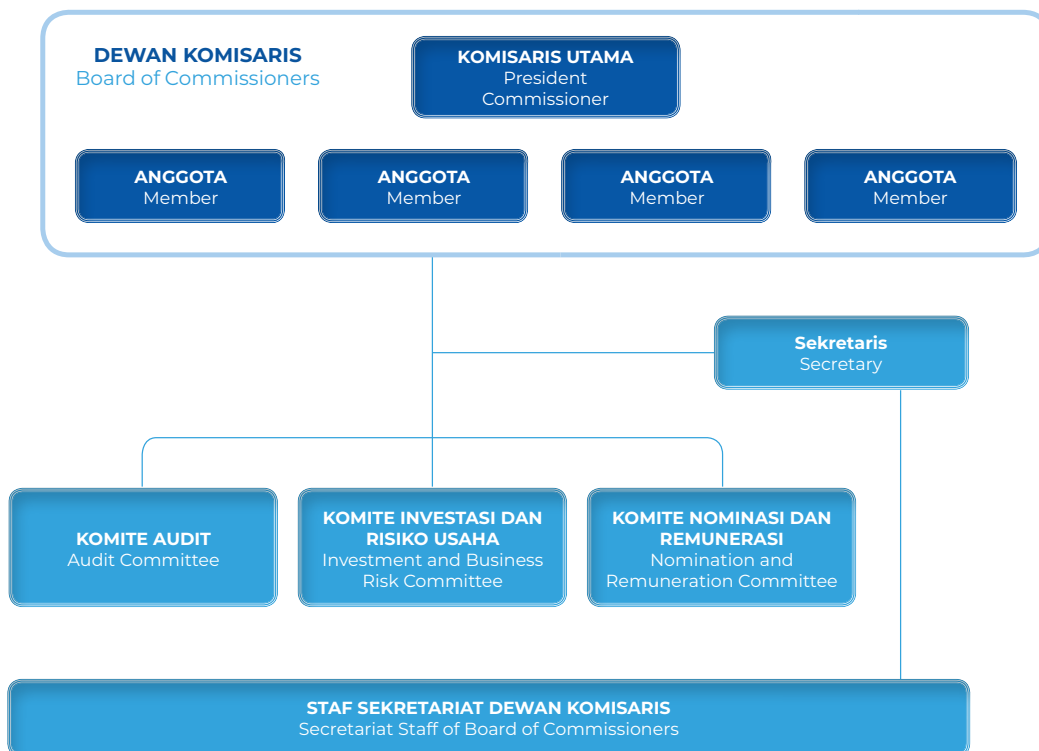
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Penerapan GCG membutuhkan struktur pendukung yang solid dan terorganisir dengan baik. Salah satu elemen kunci dalam hal ini adalah keberadaan organ pendukung di bawah Dewan Komisaris. Organ-organ ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris guna memastikan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, memberikan saran, serta menyampaikan rekomendasi, Dewan Komisaris didukung oleh sejumlah organ pendukung, di antaranya Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, serta Sekretaris Dewan Komisaris. Seluruh organ pendukung ini dirancang untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip GCG di setiap aspek operasional Perusahaan, sekaligus memastikan bahwa pengawasan dan pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

The implementation of GCG requires a solid and well-organized supporting structure. One of the key elements in this regard is the existence of supporting organs under the Board of Commissioners. These organs were established to improve the quality of monitoring and provide strategic input to the Board of Commissioners to ensure successful implementation of GCG principles.

In performing its monitoring functions, providing guidance, and recommendations, the Board of Commissioners is supported by various supporting organs. These organs include the Audit Committee, Integrated Governance Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee, and Secretary of the Board of Commissioners. All of these supporting organs are designed to strengthen the implementation of GCG principles in every aspect of the Company's operations. At the same time, ensuring that supervision and decision-making are conducted transparently, accountably, and with integrity.



Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki organ pendukung yang berperan penting dalam memastikan kelancaran tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu organ tersebut adalah Sekretaris Dewan Komisaris, yang berfungsi sebagai pengelola protokol dan kesekretariatan Perusahaan.

Secretary of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has supporting organs that play an important role in ensuring the successful execution of its duties and responsibilities. One of this organs is the Secretary of the Board of Commissioners, which serves as the Company's protocol and secretarial manager.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan Permen BUMN PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Tugas tersebut mencakup:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris sesuai perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Berdasarkan Surat Keputusan KEP03/DK-JAMKRINDO/II/2021 tertanggal 1 Februari 2021, mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo), posisi Sekretaris Dewan Komisaris diamanatkan kepada Setyo Puji Hartono. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Duties of the Secretary of the Board of Commissioners

The duties of the Secretary of the Board of Commissioners are conducted based on SOE Regulation PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Those duties include:

1. Prepare meetings, which includes preparing the meeting materials (briefing sheet) of the Board of Commissioners;
2. Prepare the minutes of the Board of Commissioners meetings in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
3. Administer the Board of Commissioners documents, which includes incoming letters, outgoing letters, minutes of the meetings, and other documents;
4. Draft the Board of Commissioners Work Plan and Budget;
5. Draft the Board of Commissioners Reports;
6. Execute other duties of the Board of Commissioners in accordance with the law.

In addition to conducting the above duties, the Secretary of the Board of Commissioners as the head of the Secretariat, execute other duties in the form of:

1. Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations when implementing GCG principles;
2. Providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. If necessary, coordinating Committee members to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
4. Acting as a liaison officer of the Board of Commissioners with other parties.

In accordance with Decree KEP03/DK-JAMKRINDO/II/2021 dated February 1, 2021, concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo). The position of Secretary of the Board of Commissioners is appointed to Setyo Puji Hartono. The appointment and dismissal of the Secretary of the Board of Commissioners is conducted by the Board of Commissioners.

Setyo Puji Hartono

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Periode Jabatan: 1 Februari 2021 - 1 Februari 2024, Periode ke-1

Tenure: February 1, 2021 - February 1, 2024, 1st Period

Warga negara

Citizenship

: Warga negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia

Age

: 53 tahun
53 years old

Kelahiran

Date of Birth

: Wonosobo, 9 Juni 1971
Wonosobo, June 9, 1971

Domisili

Domicile

: Jakarta

Pendidikan

Education

- Sarjana (S1) Manajemen dari Universitas Janabadra, Yogyakarta (1997)
- Pasca Sarjana (S2) Ekonomi dari Universitas Indonesia (2007)
- Bachelor's Degree in Management from Janabadra University, Yogyakarta (1997)
- Master's Degree in Economics from University of Indonesia (2007)

Riwayat Jabatan

Position History

Telah menjabat sebagai Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan IIB-1 (2015-2019), Sekretaris Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) (2017-2019), Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media IIB-2 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2019-2020), Penata Kelola Perusahaan Negara Muda sebagai Subkoordinator pada Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (2020-2021), Penata Kelola Perusahaan Negara Muda sebagai Subkoordinator pada Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik (2021 - sekarang).

Has served as Head of Subfield of Financial Services, Survey Services and Consultants IIB-1 (2015-2019). Secretary of the Board of Commissioners of PT Sarinah (Persero) (2017-2019). Head of Subfield of Mining, Strategic Industries and Media IIB-2 Ministry of State-Owned Enterprises (2019-2020). Administrator of New State-Owned Enterprises as a Subcoordinator to the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility (2020-2021). Administrator of New State-Owned Enterprises as a Subcoordinator to the Assistant Deputy for Logistics Services (2021 - present).

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Sepanjang tahun 2023, Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Berikut adalah rincian pelaksanaan tugas tersebut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris sesuai perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas yang telah disebutkan di atas, sekretaris Dewan Komisaris yang juga bertindak sebagai pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris, memiliki tanggung jawab tambahan berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Komisaris selama tahun 2024:

1. Mempersiapkan rapat internal maupun dengan Direksi, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;

Brief Report on the Implementation of the 2024 Duties

Throughout 2023, the Secretariat of the Board of Commissioners led by the Secretary of the Board of Commissioners has implemented various activities to support the Board of Commissioners in executing their duties in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The following are the details of the implementation of duties:

1. Prepare meetings, which includes preparing the briefing sheet of the Board of Commissioners;
2. Prepare the minutes of the Board of Commissioners meeting in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
3. Administer the Board of Commissioners documents, which includes incoming letters, outgoing letters, minutes of the meetings, and other documents;
4. Draft the work plan and budget for the Board of Commissioners;
5. Draft the reports of the Board of Commissioners; and
6. Execute other duties of the Board of Commissioners in accordance with the law.

In addition to executing the duties mentioned above, the secretary of the Board of Commissioners, who also acts as the head of the Secretariat of the Board of Commissioners has additional responsibilities such as:

1. Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations, as well as applies the principles of good corporate governance;
2. Providing information that is required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. If necessary, coordinating the committee members to ensure the successful execution of the duties of the Board of Commissioners; and
4. Acting as a liaison officer of the Board of Commissioners with other parties.

The following are the activities conducted by the Secretariat of the Board of Commissioners in 2024:

1. Prepared the internal and Board of Directors meetings, which includes preparing the briefing sheets for the Board of Commissioners;
2. Prepared the minutes of the Board of Commissioners meetings in accordance with the provisions of the Company's articles of association;

3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, surat keputusan, surat kuasa, surat undangan, surat tugas risalah rapat, maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2025;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris secara triwulanan maupun tahunan;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris, yang bertindak sebagai pimpinan Sekretariat, juga melaksanakan sejumlah tugas tambahan, antara lain:

1. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selaras dengan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Menyampaikan informasi mengenai di antaranya agenda kegiatan Dewan Komisaris baik secara internal maupun dengan eksternal seperti Holding, Kementerian BUMN, KAP audit tahunan, dan lainnya yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris;
3. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan anggota-anggota Komite dalam rangka memperlancar tugas pengawasan Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain baik internal seperti Direksi atau BOD-1 dan anak perusahaan, maupun pihak eksternal seperti seperti *Holding*, Kementerian BUMN, dan lainnya.

3. Administered the Board of Commissioners documents, which includes incoming letters, outgoing letters, decision letters, power of attorney, invitation letters, minutes of meetings, and other documents;
4. Drafted the 2025 Work Plan and Budget for the Board of Commissioners;
5. Drafted the Reports of the Board of Commissioners on a quarterly and annual basis;
6. Executed other duties from the Board of Commissioners.

As part of their responsibilities, the Secretary of the Board of Commissioners, who acts as the head of the Secretariat, also performs various additional duties, which include:

1. Ensure the monitoring duties of the Board of Commissioners is in line with the laws and regulations, while also adopting GCG principles;
2. Convey information regarding, among others, the agenda of the activities of the Board of Commissioners' both internally and with external parties such as to Holding, Ministry of SOEs, KAP annual audit, and others required by the Board of Commissioners;
3. Establish communication and coordination with Committee members to facilitate the monitoring duties of the Board of Commissioners;
4. As a liaison officer of the Board of Commissioners with other parties, both internal such as the Board of Directors or BOD-1 and subsidiaries. As well as external parties such as Holding, Ministry of SOEs, and others.

Kebijakan Remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris

Remuneration Policies for the Secretary of the Board of Commissioners

Nama Name	Honorarium per Bulan Honorarium for Each Month	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Total Honorarium and Allowance for Each Month	Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun Total Honorarium and Allowance for 1 Year	Tantiem Bonuses	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024
	(Rp) (IDR)	(Rp) (IDR)	(Rp) (IDR)	(Rp) (IDR)	(Rp) (IDR)	(Rp) (IDR)
Setyo Puji Hartono	33.072.000	6.614.400	39.686.400	476.236.800	352.000.000	828.236.800

Komite Audit

Komite Audit dibentuk sebagai upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Audit merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 mengenai Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Audit Committee

The Audit Committee was established as an effort to ensure disclosure and accountability in the management of SOEs. The legal basis for the establishment and implementation of the Audit Committee's duties refers to Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs. It also includes Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Sebagai organ pendukung yang bersifat independen, Komite Audit memiliki peran penting dalam membantu Dewan Komisaris mengawasi kinerja Unit Audit Internal dan Auditor Eksternal. Komite ini diberi wewenang untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan kedua pihak tersebut, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat.

Struktur, Keanggotaan, Integritas dan Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Struktur, keanggotaan, dan tugas Komite Audit Jamkrindo diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 mengenai Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, sementara 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit diharapkan memiliki integritas yang tinggi serta pengalaman kerja yang memadai dalam bidang pengawasan atau pemeriksaan. Selain itu, Komite Audit juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan, serta memahami industri bisnis Jamkrindo. Anggota Komite Audit Jamkrindo tidak memiliki potensi benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan dan Profil Anggota Komite Audit

Dalam mendukung optimalisasi tata kelola perusahaan yang baik, di tahun 2024 dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Komite Audit. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo No. KEP-02/DK-JAMKRINDO/IV/2024 yang tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Perubahan Anggota Komite Audit dengan mengangkat Dedit Satriyo Utomo. Dengan demikian, periode 31 Desember 2024 komposisi Komite Audit menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	SK Dewan Komisaris Board of Commissioners' Decree
1.	Hernita Alius	Ketua Chairperson	KEP-05/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-05/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022
2.	Desty Arlaini	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 KEP-08/DK-JAMKRINDO/VI/2021 dated June 23, 2021
3.	Angger P Yuwono	Anggota Member	KEP-06/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 KEP-06/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 dated August 1, 2023
4.	Sukamdani Eko Basuki	Anggota Member	KEP-02/DK-JAMKRINDO/X/2022 tgl 3 Oktober 2022 KEP-02/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 3, 2022
5.	Dedit Satriyo Utomo	Anggota Member	KEP-02/DK-JAMKRINDO/IV/2024 tgl 29 April 2024 KEP-02/DK-JAMKRINDO/IV/2024 dated April 29, 2024

As an independent supporting organ, the Audit Committee has an important role in assisting the Board of Commissioners in monitoring the performance of the Internal Audit Unit and the External Auditor. The Committee is authorized to establish effective communication with both parties, as well as submit monitoring reports to the Board of Commissioners. The resulting findings and recommendations can be an important reference in making more precise and accurate decisions.

Structure, Membership, Integrity and Expertise, as well as Independence of the Audit Committee

The structure, membership, and duties of the Audit Committee of Jamkrindo are regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Audit Committee is led by a chairman who is a member of the Board of Commissioners, while 2 (two) other members come from outside the Board of Commissioners. Audit Committee members are expected to have high integrity and sufficient work experience in the field of monitoring or examination. Moreover, the Audit Committee also has an educational background in accounting and finance, as well as understands Jamkrindo's business industry. Members of the Audit Committee of Jamkrindo must have no potential conflict of interest with the Company.

Term of Office

The term of office of members of the Audit Committee, who are not members of the Company's Board of Commissioners is 3 (three) years. It can be extended 1 (one) time for every 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Composition and Profile of Members of the Audit Committee

To support the optimization of good corporate governance, adjustments were made to the composition of the Audit Committee in 2024. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo No. KEP-02/DK-JAMKRINDO/IV/2024, dated April 29, 2024, concerning the Dismissal, Appointment, and Change of Audit Committee Members, by appointing Dedit Satriyo Utomo. Therefore, as of December 31, 2024, the composition of the Audit Committee will be as follows:

Hernita Alius

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil Ketua Komite Audit Hernita Alius dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.
The profile of the Chairperson of the Audit Committee, Hernita Alius, is available in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Desty Arlaini

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Profil anggota Komite Audit Desty Arlaini dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.
The profile of Audit Committee member, Desty Arlaini, is available in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.



Dedit Satriyo Utomo

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Periode Jabatan: 2024-2027, Periode Pertama
Term of Office: 2024-2027, 1st Period

Warga negara Citizenship	: Indonesia
Usia Age	: 65 tahun 65 years old
Kelahiran Date of Birth	: 22 Mei 1959 May 22,1959
Domisili Domicile	: Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	: D IV STAN (1987) S2 Magister Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana (2000)
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	: KEP-02/DK-JAMKRINDO/IV/2024
Riwayat Profesi Professional History	: • Anggota Komite Audit PT Jamkrindo, pernah menjadi Assistant Vice President – Executive Information System Head, Financial Control Group PT Bank Bumiputera Tbk. (2002-2005), Vice President - Risk Management Division • PT Mandiri Sekuritas (2005-2016), Anggota Komite Pemantau Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (2018-2013), serta Dosen Luar Biasa Universitas Gunadarma (2016-sekarang). • Member of the Audit Committee of PT Jamkrindo, with previous experience as Assistant Vice President – Head of Executive Information System, Financial Control Group at PT Bank Bumiputera Tbk. (2002-2005), Vice President - Risk Management Division at PT Mandiri Sekuritas (2005-2016), Member of the Business and Investment Risk Monitoring Committee of PT Pos Indonesia (2018-2013), and currently serving as an Extraordinary Lecturer at Gunadarma University (2016-present).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	: Dedit Satriyo Utomo tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. Dedit Satriyo Utomo has no affiliate relationship with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or the majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	: ERMCP



Sukamdani Eko Basuki

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Periode Jabatan: 2022-2025, Periode Pertama
Term of Office: 2022-2025, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	40 tahun 40 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Klaten, April 10, 1984
Domisili Domicile	:	Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	- D3 di STAN (2005) - S1 Akuntansi STIE YAI (2010) - Associate's Degree at State College of Accountancy (STAN) (2010) - Bachelor's Degree in Accounting at STIE YAI (2010)
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	:	KEP-02/DK-JAMKRINDO/X/2022 tgl 3 Oktober 2022 KEP-02/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 3, 2022
Riwayat Profesi Professional History	:	Bekerja menjadi PNS di Kementerian BUMN sejak Mei 2014 sebagai Analis Akuntabilitas Kinerja. Pada Oktober 2014 sampai dengan Januari 2019 menjabat sebagai Analis Keuangan, dan November 2018 sampai dengan Januari 2019 sebagai Kepala Subbagian TU Deputy Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Tahun 2019-2020 ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi, dan saat ini menjabat sebagai Analis Pengelola Keuangan APBN Muda. Memiliki pengalaman penugasan di BUMN, yaitu pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Sekretaris Dewan Komisaris (2017-2019), dan sebagai staf Dewan Komisaris di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2019-2022). Terhitung tanggal 3 Oktober 2022, bergabung dalam Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Jamkrindo sebagai Anggota Komite Audit. Has worked as a civil servant in the Ministry of SOEs since May 2014 as a Performance Accountability Analyst. Has served as a Financial Analyst from October 2014 to January 2019. And has served as Head of the Administration Subdivision of the Deputy for Construction Business and Transportation Facilities and Infrastructure from November 2018 to January 2019. Was assigned as Head of the Verification and Accounting Subdivision in 2019-2020, and is currently a Junior State Budget (APBN) Financial Management Analyst. Has assignment experience in SOEs, namely at PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) as Secretary of the Board of Commissioners (2017-2019). A Secretary of the Board of Commissioners and as staff of the Board of Commissioners at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2019-2022). As of October 3, 2022, has joined the Supporting Organ of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo as a Member of the Audit Committee.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	:	Sukamdani Eko Basuki tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. Sukamdani Eko Basuki has no affiliate relationship with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or with the majority shareholder.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	:	International Risk Management Standard – CRMS International Risk Management Standards - CRMS

Piagam Komite Audit

Komite Audit melaksanakan tugasnya berdasarkan Piagam Komite Audit yang disahkan oleh Dewan Komisaris pada 5 Juni 2023. Piagam tersebut mencakup beberapa ketentuan penting, antara lain:

1. Latar belakang, maksud dan tujuan Komite Audit;
2. Dasar pembentukan, organisasi, mencakup hal-hal tentang struktur organisasi, keanggotaan dan persyaratan keanggotaan, masa jabatan, dan evaluasi Komite Audit;
3. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan dan kode etik Komite Audit, meliputi hal-hal tentang tugas dan tanggung jawab, wewenang dan mekanisme kerja, kode etik Komite Audit;
4. Program kerja, rapat, pelaporan Komite Audit, mencakup hal-hal tentang rapat, pelaporan Komite Audit;
5. Penutup, mencakup masa berlaku dan evaluasi

Audit Committee Charter

The Audit Committee executes its duties based on the Audit Committee Charter approved by the Board of Commissioners on June 5, 2023. The Charter includes several important provisions, among others:

1. Background, purpose, and objectives of the Audit Committee;
2. The basis of formation and organization. It includes matters of organizational structure, membership and membership requirements, term of office, as well as evaluation of the Audit Committee;
3. The duties, responsibilities, authorities, and code of conduct of the Audit Committee including the duties and responsibilities, authorities, and work mechanisms, code of conduct of the Audit Committee;
4. Work program, meeting, reporting of the Audit Committee. Including matters concerning meetings, reporting of the Audit Committee;
5. Closure, including the validity period and evaluation

Independensi Anggota Komite Audit

Sebagaimana Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo No. KEP-03/DK-JAMKRINDO/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Perubahan Piagam Komite-Komite Dewan Komisaris, disebutkan pada bagian persyaratan keanggotaan bahwa Komite Audit mampu bertindak independen dan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negative dan benturan kepentingan terhadap perusahaan.

Aspek Independensi Independence Aspect	Hernita Alius	Desty Arlaini	Angger P Yuwono	Sukamdani Eko Basuki	Dedit Satriyo Utomo
Kepemilikan Saham Share Ownership	x	x	x	x	x
Hubungan Keluarga Familial Relationships	x	x	x	x	x
Hubungan Keuangan Financial Relationship	x	x	x	x	x
Rangkap Jabatan Concurrent Position	x	x	x	x	x

Sertifikasi Profesi Anggota Komite

Komite Audit terus berkomitmen dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi anggotanya melalui program pendidikan berkelanjutan. Pendidikan yang diselenggarakan meliputi pelatihan profesi dengan sertifikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut adalah daftar sertifikasi profesi yang telah diperoleh oleh anggota Komite Audit hingga tahun 2024.

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Sertifikasi Profesi Komite Audit Types of Professional Certifications of the Audit Committee
Hernita Alius	Ketua Chairperson	Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Profesional Certification Body
Desty Arlaini	Anggota Member	Qualified Risk Governance Profesional (QRGP)
Angger P Yuwono	Anggota Member	Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Profesional Certification Body
Sukamdani Eko Basuki	Anggota Member	ISO 31000 ERM Fundamentals
Dedit Satriyo Utomo	Anggota Member	Enterprise Risk Management Certified Profesional (ERMCP) ISO 31000 ERM Fundamentals

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Perusahaan bertugas secara kolektif untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam melaksanakan perannya, Komite Audit memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan Tugas Eksternal Auditor dan Internal Auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal;

Independence of Members of the Audit Committee

As the Audit Committee Charter established through the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo No. KEP-03/DK-JAMKRINDO/VI/2023 dated June 5, 2023, concerning Amendments to the Charter of the Committees of the Board of Commissioners, outlines in the membership requirements section that the Audit Committee must be independent, free from personal interests/relationships that could negatively impact the Company's interests or create conflicts of interest.

Professional Certification of Members of the Audit Committee

The Audit Committee is constantly committed to improving the qualifications and competencies of its members through ongoing education programs. The education provided includes professional training with certification, both nationally and internationally. The following is a list of professional certifications that Audit Committee members have obtained until 2024.

Functions, Duties, and Responsibilities of the Audit Committee

The Company's Audit Committee serves collectively to support the Board of Commissioners in conducting its obligations. In performing its role, the Audit Committee has a number of duties and responsibilities as described below:

1. Assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the Internal Control System and the effectiveness of the duties implementation of the External and Internal Auditors;
2. Assess the implementation and the results of audits conducted by the Internal Audit Unit and External Auditors;

3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Jamkrindo;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Komite Audit merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Jamkrindo untuk tahun buku 2024. Rekomendasi ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Pasal 13 Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
2. Ruang lingkup audit;
3. Imbalan jasa audit;
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
6. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung keberlanjutan dan keunggulan perusahaan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Khusus bagi Komite Audit, pengembangan ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan guna memperkuat peran Komite Audit dalam pengawasan dan pemberian masukan strategis kepada Dewan Komisaris. Berikut adalah rincian program peningkatan kompetensi Komite Audit sepanjang tahun 2024:

3. Provide recommendations regarding the improvement of the Management Control System and its implementation;
4. Ensure that there is a satisfactory review procedure for all information conveyed by Jamkrindo;
5. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

Responsibilities of the Audit Committee in Providing Recommendations on the Appointment and Dismissal of External Auditors

The Audit Committee recommends the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of PT Jamkrindo's annual historical financial information for the 2024 Fiscal Year. This recommendation is prepared based on the provisions of OJK Regulation Article 13 Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, by considering the following matters:

1. Independence of the Public Accountant (AP), Public Accounting Firm (KAP), and insiders from the Public Accounting Firm (KAP);
2. Scope of the Audit;
3. Fees for Audit services;
4. Expertise and experience of the Public Accountant (AP), Public Accounting Firm (KAP), and Audit Team from the Public Accounting Firm (KAP);
5. Audit methodologies, techniques, and tools used by the Public Accounting Firm (KAP);
6. The benefits of fresh eye perspective that will be obtained through the replacement of the Public Accountant (AP), Public Accounting Firm (KAP), and Audit Team from the Public Accounting Firm (KAP);
7. Potential risks of using audit services by the same Public Accounting Firm (KAP) consecutively for a long period of time; and/or
8. The evaluation results for the implementation of the audit services on annual historical financial information by the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm (KAP) in the previous period, if applicable.

Competency Development Program

Jamkrindo continues to improve the quality of its human capital as a means to support the Company's sustainability and excellence. One of the strategic measures taken is to implement a competency development program for all employees. For the Audit Committee specifically, this development aims to update knowledge in order to strengthen the role of the Audit Committee in monitoring and providing strategic input to the Board of Commissioners. The following are the details of the Audit Committee competency development program throughout 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Hernita Alius	Ketua Chairperson	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Data for Executive Decision Making	08-13 September 2024 September 8-13, 2024	University of Queensland
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	31 Desember 2024 December 31, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute
Desty Arlaini	Anggota Member	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Ujian Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (QRGP) Education and Training Program for Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Exam Preparation	08-09 Agustus 2024 August 8-9, 2024	CRMS x LPK MKS
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Manajemen Risiko : Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (QRGP) Risk Management: Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Institute - Mitra Kalyana Sejahtera
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
Angger P Yuwono	Anggota Member	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Sosialisasi CPD dan Diskusi Panel POJK 20/2023 CPD Dissemination and Panel Discussion regarding POJK 20/2023	06 Maret 2024 March 6, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	28 Maret 2024 March 28, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Semkain Berkah Pasca Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS) More Blessings After the Spin-Off of Sharia Business Unit (UUS)	08 Mei 2024 May 8, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Joint Regional Seminar 2024 2024 Joint Regional Seminar	28 Mei dan 5 Juni 2024 May 28 and June 5, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	7 th Indonesian Actuaries Summit 2024 “Actuaries, Now and Beyond”	20-22 Agustus 2024 August 20-22, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Sukamdani Eko Basuki	Anggota Member	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
Dedit Satriyo Utomo	Anggota Member	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI

Rapat Komite Audit

Komite Audit aktif mendukung tugas Dewan Komisaris melalui perannya dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Sebagai wujud komitmen tersebut, Komite Audit mengadakan 12 (dua belas) kali rapat sepanjang tahun 2024. Informasi mengenai risalah rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit disajikan dalam penjelasan berikut.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee actively supports the duties of the Board of Commissioners through its role in overseeing the management of the Company. As a manifestation of this commitment, the Audit Committee held a total of 12 (twelve) meetings throughout 2024. Information regarding the minutes of meetings and attendance of members of the Audit Committee is presented below.

Risalah Rapat Komite Audit Minutes of the Audit Committee Meetings

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
18 Januari 2024 January 18, 2024	Rencana Kerja Strategis dan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2024 Strategic Work Plan and Annual Audit Work Plan (RKAT) of the Internal Audit Unit (SPI) for 2024
21 Februari 2024 February 21, 2024	Pelaksanaan Reviu ICOFR dan Progres Audit PwC Implementation of ICOFR Review and PwC Progress Audit
15 Maret 2024 March 15, 2024	Progres Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Progress Audit of the Financial Statements for the 2023 Fiscal Year
22 April 2024 April 22, 2024	Format Laporan Manajemen Audited dan Parameter Tindak Lanjut Temuan Audit dalam Peraturan Prosedur Audit Format of the Audited Management Report and parameters for Follow-up on Audit Findings in the Audit Procedure Guidelines
21 Mei 2024 May 21, 2024	Kebijakan dan Langkah-langkah Perusahaan terhadap Klaim dan Hak/Tagihan Subrogasi The Company's Policy and Measures regarding Claims and Subrogation Rights
25 Juni 2024 June 25, 2024	Bisnis Penjaminan Guarantee Business
19 Juli 2024 July 19, 2024	Kinerja Kantor Wilayah dan Progres Tindak Lanjut Temuan Regional Office Performance and Progress on Follow-up Findings
20 Agustus 2024 August 20, 2024	Klaim dan Subrogasi Claims and Subrogation
17 September 2024 September 17, 2024	Kajian Konsultan McKinsey McKinsey Consulting Review
15 Oktober 2024 October 15, 2024	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities
19 November 2024 November 19, 2024	Mekanisme Pencadangan Backup Mechanism
10 Desember 2024 December 10, 2024	Progres Audit KAP Tahun Buku 2024 dan Realiasi RKAT SPI Tahun 2024 Progress of KAP Audit for the 2024 Fiscal Year and Realization of RKAT SPI for 2024

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Recapitulation and Attendance Rate of Audit Committee in the Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran Percentage of Attendance
Hernita Alius	12	12	0	100%
Desty Arlaini	12	12	0	100%
Angger P Yuwono	12	12	0	100%

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat

Recapitulation and Attendance Rate of Audit Committee in the Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran Percentage of Attendance
Safari Mirza*	4	4	0	100%
Sukamdani Eko Basuki	12	12	0	100%
Dedit Satriyo Utomo**	8	8	0	100%
Rata-rata Average				100%

*) Tidak lagi menjabat sejak tanggal 9 Mei 2024

**) Menjabat sejak tanggal 9 Mei 2024

*) No longer in office as of May 9, 2024

**) Serving since May 9, 2024

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit 2024

Komite Audit memiliki peran strategis dalam memastikan pengawasan dan kepatuhan yang efektif di dalam suatu badan usaha. Tugasnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam menilai dan mengawasi kinerja keuangan serta sistem pengendalian internal. Komite ini dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi yang objektif dan independen. Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, terdapat ketentuan yang mengatur struktur dan fungsi Komite Audit dalam menjalankan tugasnya, sebagai berikut:

- Komite Audit bertugas untuk:
 - Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
 - Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor Internal maupun auditor eksternal.
 - Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
 - Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
 - Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
 - Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- Selain tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan tambahan kepada Komite Audit sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah rincian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komite Audit sepanjang tahun 2024:
 - Mengadakan rapat rutin Komite setiap bulan, dengan pencapaian sebagai berikut:
 - Bulan Januari 2024: Tanggal 18 Januari 2024 membahas Rencana Kerja Strategis dan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2024;
 - Bulan Februari 2024: Tanggal 21 Februari 2024 membahas Pelaksanaan Reviu ICOFR dan Progres Audit PwC;

Brief Report on the Implementation of the 2024 Audit Committee Work Program

The Audit Committee has a strategic role in ensuring effective monitoring and compliance within a business entity. The duty of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in assessing and monitoring financial performance and internal control systems. This committee was established by the Board of Commissioners with the aim of providing objective and independent recommendations. According to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, there are provisions that regulate the structure and function of the Audit Committee in conducting its duties, as explained below:

- The Audit Committee has the duty to:
 - Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system as well as the effectiveness of the duties implementation of the external auditor and internal auditor.
 - Assess the implementation of activities and the results of audits conducted by internal and external auditors.
 - Provide recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation.
 - Ensure that there are satisfactory evaluation procedures in place for all information conveyed by the Company.
 - Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.
 - Perform duties related to risk management as stipulated in the legislation.
- In addition to the aforementioned duties, the Board of Commissioners may provide additional assignments to the Audit Committee in accordance with applicable laws. The following are details of the activities conducted by the Audit Committee throughout 2024:
 - Prepare regular Committee meetings every month, with the following goals:
 - January 2024: On January 18, 2024, discussions were held regarding the Strategic Work Plan and Annual Audit Work Plan (RKAT) for the Internal Audit Unit (SPI) for 2024;
 - February 2024: On February 21, 2024, discussions were held regarding the Implementation of ICOFR Review and PwC Progress Audit;

- 3) Bulan Maret 2024: Tanggal 15 Maret 2024 membahas Progres Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023;
- 4) Bulan April 2024: Tanggal 22 April 2024 membahas Format Laporan Manajemen Audited dan Parameter Tindak Lanjut Temuan Audit dalam Peraturan Prosedur Audit;
- 5) Bulan Mei 2024: Tanggal 21 Mei 2024 membahas Kebijakan dan Langkah-langkah Perusahaan terhadap Klaim dan Hak/Tagihan Subrogasi;
- 6) Bulan Juni 2024: Tanggal 25 Juni 2024 membahas Bisnis Penjaminan;
- 7) Bulan Juli 2024: Tanggal 19 Juli 2024 membahas Kinerja Kantor Wilayah dan Progres Tindak Lanjut Temuan;
- 8) Bulan Agustus 2024: Tanggal 20 Agustus 2024 membahas Klaim dan Subrogasi;
- 9) Bulan September 2024: Tanggal 17 September 2024 membahas Kajian Konsultan McKinsey;
- 10) Bulan Oktober 2024: Tanggal 15 Oktober 2024 membahas Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
- 11) Bulan November 2024: Tanggal 19 November 2024 membahas Mekanisme Pencadangan;
- 12) Bulan Desember 2024: Tanggal 10 Desember 2024 membahas Progres Audit KAP Tahun Buku 2024 dan Realisasi RKAT SPI Tahun 2024
3. Menyiapkan telaahan/analisa dan bahan terkait kinerja bulanan, perkembangan kondisi dan masalah aktual serta isu strategis yang terjadi pada perusahaan, serta mengikuti rapat Dewan Komisaris.
 - a. Bulan Januari 2024
Tanggal 25 Januari 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Desember 2023.
 - b. Bulan Februari 2024
 - 1) Tanggal 27 Februari 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Januari 2024.
 - 2) Tanggal 27 Februari 2024: Progress Audit Laporan Tahunan PT Jamkrindo Tahun Buku 2023.
 - c. Bulan Maret 2024
 - 1) Tanggal 26 Maret 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Februari 2024.
 - 2) Tanggal 18 Maret 2024: Rapat Progres Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 bersama Kementerian BUMN, PT BPUI (Persero), dan PwC.
 - d. Bulan April 2024
 - 1) Tanggal 23 April 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Maret 2024.
 - 2) Tanggal 23 April 2024: Progres Implementasi Struktur Organisasi baru.
 - e. Bulan Mei 2024
 - 1) Tanggal 28 Mei 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan April 2024.
 - 2) Tanggal 28 Mei 2024: Monitoring Tindak Lanjut atas Temuan Eksternal dan Internal Audit.
- 3) March 2024: On March 15, 2024, discussions were held regarding the Progress Audit of the Financial Statements for the 2023 Fiscal Year;
- 4) April 2024: On April 22, 2024, discussions were held regarding the Format of the Audited Management Report and parameters for Follow-up on Audit Findings in the Audit Procedure Guidelines;
- 5) May 2024: On May 21, 2024, discussions were held regarding the Company's Policy and Measures regarding Claims and Subrogation Rights;
- 6) June 2024: On June 25, 2024, discussions were held regarding the Guarantee Business;
- 7) July 2024: On July 19, 2024, discussions were held regarding the Regional Office Performance and Progress on Follow-up Findings;
- 8) August 2024: On August 20, 2024, discussions were held regarding Claims and Subrogation;
- 9) September 2024: On September 17, 2024, discussions were held regarding the McKinsey Consulting Review;
- 10) October 2024: On October 15, 2024, discussions were held regarding Cash Flow from Operating Activities;
- 11) November 2024: On November 19, 2024, discussions were held regarding the Backup Mechanism;
- 12) December 2024: On December 10, 2024, discussions were held regarding the Progress of KAP Audit for the 2024 Fiscal Year and Realization of RKAT SPI for 2024
3. Prepare reviews/analysis and materials related to monthly performance, development of conditions and actual problems as well as strategic issues that occur in the company. Also, attend Board of Commissioners meetings.
 - a. January 2024
January 25, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in December 2023.
 - b. February 2024
 - 1) February 27, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in January 2024.
 - 2) February 27, 2024: Progress Audit of PT Jamkrindo's Annual Report for the 2023 Fiscal Year.
 - c. March 2024
 - 1) March 26, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in February 2024.
 - 2) March 18, 2024: Meeting regarding the Progress Audit of the Financial Statements for the 2023 Fiscal Year with the Ministry of SOEs, PT BPUI (Persero), and PwC.
 - d. April 2024
 - 1) April 23, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in March 2024.
 - 2) April 23, 2024: Progress on the Implementation of the new Organizational Structure.
 - e. May 2024
 - 1) May 28, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in April 2024.
 - 2) May 28, 2024: Monitoring of Follow-up actions on External and Internal Audit Findings.

- f. Bulan Juni 2024
 - 1) Tanggal 25 Juni 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Mei 2024.
 - 2) Tanggal 25 Juni 2024: Pembahasan Rancangan RJPP PT Jamkrindo Tahun 2025 s.d. 2029.
 - g. Bulan Juli 2024

Tanggal 23 Juli 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juni 2024;
 - h. Bulan Agustus 2024
 - 1) Tanggal 1 Agustus 2024: Pembahasan Usulan Revisi RKAP PT Jamkrindo Tahun 2024.
 - 2) Tanggal 27 Agustus 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juli 2024.
 - i. Bulan September 2024
 - 1) Tanggal 4 September 2024: Pembahasan Laporan *Progress Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) bersama Konsultan Deloitte;
 - 2) Tanggal 25 September 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Agustus 2024.
 - j. Bulan Oktober 2024

Tanggal 23 Oktober 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan September 2024.
 - k. Bulan November 2024
 - i) Tanggal 14 November 2024: *Kick Off Meeting General Audit* atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.
 - 2) Tanggal 26 November 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Oktober 2024
 - l. Bulan Desember 2024

Tanggal 18 Desember 2024: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan November 2024.
 4. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Komisaris ke lapangan/unit kerja di daerah Sampai dengan periode akhir tahun 2024, Komite Audit telah mengikuti Kunjungan kerja Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Kantor Wilayah VII Denpasar dan Kantor Cabang Binaan pada tanggal 26 Januari 2024;
 - b. Kantor Wilayah IV Bandung dan Kantor Cabang Binaan pada tanggal 26 April 2024;
 - c. Kantor Wilayah V Semarang dan Kantor Cabang Binaan pada tanggal 31 Mei 2024;
 - d. Kantor Wilayah I Medan dan Kantor Cabang Binaan pada tanggal 30 Agustus 2024;
 - e. Kantor Wilayah II Palembang dan Kantor Cabang Binaan pada tanggal 24 Oktober 2024.
 5. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelaahan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) melalui pembahasan laporan keuangan dengan manajemen perusahaan ataupun auditor eksternal.
 - b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan. Penelaahan dan klarifikasi
- f. June 2024
 - 1) June 25, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in May 2024.
 - 2) June 25, 2024: Discussion on the Draft of PT Jamkrindo's Long-Term Plan (RJPP) for 2025-2029
 - g. July 2024

July 23, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in June 2024;
 - h. August 2024
 - 1) August 1, 2024: Discussion on the Proposed Revision of PT Jamkrindo's 2024 RKAP.
 - 2) August 27, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in July 2024.
 - i. September 2024
 - 1) September 4, 2024: Discussion of the Progress Report on Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) with Deloitte Consultant;
 - 2) September 25, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in August 2024.
 - j. October 2024

October 23, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in September 2024.
 - k. November 2024
 - 1) November 14, 2024: Kick Off Meeting for the General Audit of the Financial Statements for the 2024 Fiscal Year
 - 2) November 26, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in October 2024
 - l. December 2024

December 18, 2024: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievement in November 2024.
 4. Accompany the Board of Commissioners' visits to the field/work units in the area up until the end of the 2024 period. The Audit Committee has accompanied the Board of Commissioners in their work visits to:
 - a. Denpasar Regional Office VII and Assisted Branch Office on January 26, 2024;
 - b. Bandung Regional Office IV and Assisted Branch Office on April 26, 2024;
 - c. Semarang Regional Office V and Assisted Branch Office on May 31, 2024;
 - d. Medan Regional Office I and Assisted Branch Office on August 30, 2024;
 - e. Palembang Regional Office II and Assisted Branch Office on October 24, 2024.
 5. Evaluate the effectiveness of the implementation of the external auditor's duties, with the following details:
 - a. Reviewing the accounting policies and the preparation of the Company's financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK) through discussion of financial statements with the Company's management or external auditors.
 - b. Reviewing the financial information that will be released by the Company to the public and/or the authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information. Review and clarification to encourage that the financial

untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan akurat, handal, dan dapat dipercaya.

- c. Melakukan evaluasi dan penilaian atas kinerja auditor eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor eksternal (KAP, BPK, OJK, BPKP atau institusi lain).
 - e. Monitoring Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan oleh KAP Tahun Buku 2024.
 - f. Laporan Hasil Evaluasi Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2023.
 - g. Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukkan Kantor Akuntan Publik.
 - h. Monitoring Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan oleh KAP Tahun Buku 2024
6. Melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas internal auditor, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Telaah kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, serta hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan tingkat operasional/aktivitas.
 - b. Telaah *internal control report*, hasil audit internal, manajemen fungsi SPI, serta rencana kerja pengawasan SPI dan pelaksanaannya.
 - c. Telaah kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal, serta efektivitas pemantauan tindak lanjutnya.
 - d. Tanggapan atas Penyampaian Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2024.
 - e. Monitoring Realisasi Rencana Kerja 2023.
 - f. Monitoring realisasi rencana kerja triwulan I, II, III Tahun 2024.
 - g. Rapat Komite Audit dengan SPI
7. Menyusun serta menyelaraskan Program kerja dan anggaran tahunan Komite dengan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
8. Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan, diantaranya;
- a. Program *Executive Refreshment for Top Level Management* yang diselenggarakan oleh LPPI pada tanggal 26 Juli 2024 di Yogyakarta dan secara *online*.
 - b. Program *Executive Refreshment for Top Level Management* yang diselenggarakan oleh LPPI pada tanggal 13 September 2024 di Sentul, Kabupaten Bogor.
 - c. Pelatihan dan Sertifikasi ISO 31000 ERM Fundamental yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Desember 2024.
9. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*)
- a. Telaah atas laporan kegiatan dan keuangan triwulan IV tahun 2023 (audited) PT Jamkrindo

information to be published by the Company is accurate, reliable, and trustworthy.

- c. Evaluating and assessing the performance of external auditors in accordance with applicable regulations and standards.
 - d. Monitoring and evaluating follow-up actions taken in response to audit findings and recommendations issued by external auditors (KAP, BPK, OJK, BPKP, or other institutions).
 - e. Monitoring the Implementation of the Audit of the Financial Statement conducted by the KAP for the 2024 Fiscal Year.
 - f. Evaluation Report on the Public Accounting Firm for the 2023 Fiscal Year.
 - g. Audit Committee's Recommendation on the Appointment of the Public Accounting Firm.
 - h. Monitoring the Implementation of the Audit of the Financial Statement conducted by the KAP for the 2024 Fiscal Year.
6. Evaluate the effectiveness of the internal control system and the implementation of the internal auditor's duties, with the following details:
- a. Reviewing the policies/designs and implementation of the internal control system, as well as the results of the evaluation on the effectiveness of internal control at both the entity level and operational/activity level.
 - b. Reviewing internal control reports, internal audit results, management of the Internal Audit Unit (SPI), as well as the SPI's audit work plan and its implementation.
 - c. Reviewing the completeness of findings and the quality of recommendations provided from internal audits, as well as the effectiveness of monitoring on follow-up actions.
 - d. Giving response to the Submission of 2024 Annual Audit Work Plan (RKAT) of Internal Audit Unit (SPI).
 - e. Monitoring the 2023 Work Plan Realization.
 - f. Monitoring the realization of the work plan for the first, second and third quarters of 2024.
 - g. Audit Committee Meeting with the Internal Audit Unit (SPI)
7. Prepare and align the Committee's annual work program and budget with the Board of Commissioners' work plan and budget.
8. Participate in activities aimed at enhancing competencies and knowledge, including but not limited to;
- a. Executive Refreshment Program for Top Level Management organized by LPPI on July 26, 2024, in Yogyakarta and online.
 - b. Executive Refreshment Program for Top Level Management organized by LPPI on September 13, 2024 in Sentul, Bogor Regency.
 - c. ISO 31000 ERM Fundamentals Training and Certification held from December 2 to 4, 2024.
9. Implement the activities related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG)
- a. Reviewing the audited activity and financial reports for the fourth quarter of 2023 of PT Jamkrindo

- b. Telaah atas laporan kegiatan dan keuangan triwulan I tahun 2024 PT Jamkrindo
 - c. Telaah atas laporan kegiatan dan keuangan triwulan II tahun 2024 PT Jamkrindo
 - d. Telaah atas laporan kegiatan dan keuangan triwulan III tahun 2024 PT Jamkrindo
 - e. *Review* dan tanggapan atas laporan tugas pengawasan triwulanan
 - f. Evaluasi kinerja perusahaan sampai dengan Desember 2023
 - g. Evaluasi kinerja perusahaan sampai dengan Januari sampai dengan November 2024
10. Melakukan telaah atas hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi setiap bulan

- b. Reviewing the activity and financial reports for the first quarter of 2024 PT Jamkrindo
 - c. Reviewing the activity and financial reports for the second quarter of 2024 of PT Jamkrindo
 - d. Reviewing the activity and financial reports for the third quarter of 2024 of PT Jamkrindo
 - e. Reviewing and responding to quarterly monitoring task reports
 - f. Evaluating the Company's performance up to December 2023
 - g. Evaluating the Company's performance from January to November 2024
10. Review the results of the Board of Commissioners and Board of Directors meetings on a monthly basis.

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Audit

Remuneration Policies for the Audit Committee

Nama Name	Periode Menjabat Tenure	Honorarium per Bulan Honorarium for Each Month (Rp) (IDR)	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance (Rp) (IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Total Honorarium and Allowances for Each Month (Rp) (IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun Total Honorarium and Allowances for 1 Year (Rp) (IDR)	Tantiem Bonuses (Rp) (IDR)	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024 (Rp) (IDR)
Safari Mirza	Januari-April January-April	42.400.000	-	42.400.000	169.600.000	-	169.600.000
Sukamdani Eko Basuki	Januari- Desember January- December	42.400.000	-	42.400.000	508.800.000	-	508.800.000
Dedit Satriyo Utomo	Mei- Desember May- December	42.400.000	-	42.400.000	339.200.000	-	339.200.000

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris Jamkrindo membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan tujuan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris dalam merumuskan kebijakan nominasi dan remunerasi perusahaan. Komite Nominasi dan Remunerasi resmi dibentuk pada 7 April 2020.

Nomination and Remuneration Committee

Jamkrindo's Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee with the aim of supporting the duties of the Board of Commissioners in formulating the company's nomination and remuneration policies. The Nomination and Remuneration Committee was officially established on April 7, 2020.

Susunan dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Di tahun 2024 tidak terdapat perubahan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dengan demikian, susunan dan profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Composition and Profile of Members of the Nomination and Remuneration Committee

In 2024, there were no changes made in the membership of the Nomination and Remuneration Committee. Therefore, the composition and profile of members of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2024, are as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	SK Dewan Komisaris Board of Commissioners' Decree
1.	Muhammad Muchlas Rowi	Ketua Chairman	KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022
2.	Desty Arlaini	Anggota Member	KEP-09/DK-JAMKRINDO/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 KEP-09/DK-JAMKRINDO/VI/2021 dated June 23, 2021
3.	Ari Wahyuni	Anggota Member	KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022
4.	Hernita Alius	Anggota Member	KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022
5.	Angger P Yuwono	Anggota Member	KEP-07/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 KEP-07/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 dated August 01, 2023

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, termasuk Ketua, merupakan bagian dari Dewan Komisaris. Profil masing-masing Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris, yang terdapat dalam bab Profil Perusahaan.

All members of the Nomination and Remuneration Committee, which includes the Chairman, are part of the Board of Commissioners. The profile of each Chairman and Member of the Nomination and Remuneration Committee can be viewed in the Board of Commissioners Profile section, located in the Company Profile chapter.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugasnya berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah diperbarui, yang disahkan oleh Dewan Komisaris pada 23 Juni 2021. Piagam ini mencakup berbagai hal, antara lain:

1. Visi dan misi pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Struktur organisasi dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi;
5. Wewenang, hak dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;
7. Masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
8. Lainnya.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee performs its duties based on the updated Nomination and Remuneration Committee Charter, which was approved by the Board of Commissioners on June 23, 2021. The Charter covers a range of issues, including:

1. Vision and mission of the Nomination and Remuneration Committee;
2. Organizational structure and membership of the Nomination and Remuneration Committee;
3. Nomination and Remuneration Committee membership requirements;
4. Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee;
5. Authority, rights, and obligations of the Nomination and Remuneration Committee;
6. Nomination and Remuneration Committee Meeting;
7. Term of office of Members of the Nomination and Remuneration Committee;
8. Others.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Independence of Members of the Nomination and Remuneration Committee

Aspek Independens Independence Aspect	Muhammad Muchlas Rowi	Desty Arlaini	Ari Wahyuni	Hernita Alius	Angger P Yuwono
Kepemilikan Saham Share Ownership	x	x	x	x	x
Hubungan Keluarga Familial Relationship	x	x	x	x	x
Hubungan Keuangan Financial Relationship	x	x	x	x	x
Rangkap Jabatan Concurrent Position	x	x	x	x	x

v: ada
x: tidak ada
v: yes
x: no

Sertifikasi Profesi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi anggotanya melalui program pendidikan yang berkelanjutan. Program pendidikan ini mencakup pelatihan profesi yang disertai sertifikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di bawah ini adalah daftar sertifikasi profesi yang telah diraih oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi hingga tahun 2024.

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Sertifikasi Profesi Komite Nominasi dan Remunerasi Types of Professional Certification of the Nomination and Remuneration Committee
Muhammad Muchlas Rowi	Ketua Chairman	- Governance, Risk, and Compliance Certified Executive - Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan - Governance, Risk, and Compliance Certified Executive - Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision
Desty Arlaini	Anggota Member	Manajemen Risiko : Profesional Tata Kelola (QRGP) Risk Management : Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Ari Wahyuni	Anggota Member	-
Hernita Alius	Anggota Member	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision
Angger P Yuwono	Anggota Member	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 mengenai Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) yang disetujui pada 5 Juni 2023, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh KNR:

1. Terkait dengan fungsi nominasi :
 - a. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*talent managements*) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
 - c. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - e. Memberikan saran terkait dengan sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
 - f. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

Professional Certification of Members of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is committed to improving the qualifications and competencies of its members through ongoing education programs. The education program includes professional training and certification at both both national and international level. Below is a list of professional certifications that have been achieved by members of the Nomination and Remuneration Committee up until 2024.

Functions, Duties, and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, the Board of Commissioners is required to establish a Nomination and Remuneration Committee whose members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Based on the Nomination and Remuneration Committee (NRC) Charter approved on June 5, 2023, the following are the duties and responsibilities to be executed by the NRC:

1. Related to the nomination function:
 - a. Conduct periodic reviews of the company's Talent Management System as well as monitoring and evaluation of its implementation;
 - b. Evaluate the Company's Representative Candidates who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, before being submitted to the GMS/Minister;
 - c. Prepare a proposal for an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - d. Prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - e. Provide advice related to the system and procedures for the assessment, selection, and/or replacement of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Executive Officers of the Company to the Board of Commissioners;
 - f. Provide recommendations regarding candidates for members of the Board of Directors and/or candidates for members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be conveyed in the General Meeting of Shareholders;

- g. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - h. Mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 4) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 5) Calon yang memenuhi syarat sebagai calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Dewan Komisaris.
 - 6) Remunerasi dan Nominasi dan yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris.
 - 7) Hasil evaluasi secara berkala terhadap struktur organisasi, penerapan kebijakan nominasi dan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai.
2. Terkait dengan fungsi remunerasi:
- a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dapat berupa:
 - 1) Gaji;
 - 2) Honorarium;
 - 3) Insentif; dan/atau
 - 4) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable
 - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - 1) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha perusahaan;
 - 2) Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan;
- g. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - h. Evaluate the Committee's charter periodically in accordance with the developments of laws and regulations.
 - i. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - 1) Position composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - 2) Policies and criteria required in the the nomination process; and
 - 3) Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 - 4) Capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 - 5) Candidates who qualify as prospective members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. And Independent parties who will become members of the Board of Commissioners Committee.
 - 6) Remuneration and Nomination which require approval/response from the Board of Commissioners.
 - 7) Periodic evaluation of the organizational structure. Implementation of nomination and remuneration policies of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees.
2. Related to the remuneration function:
- a. Develop a Remuneration structure for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners which can be in the form of:
 - 1) Salary;
 - 2) Honorarium;
 - 3) Incentives; and/or
 - 4) Allowances that are fixed and/or variable in nature
 - b. Develop a policy regarding Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 - c. Decide on the amount of remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
 - d. The structure, policy, and amount of remuneration must be evaluated by the Nomination and Remuneration Committee at least 1 (one) time every 1 (one) year.
 - e. The preparation of the structure, policy and amount of remuneration must take into account:
 - 1) Remuneration applicable to the industry in accordance with the Company's business activities and business scale;
 - 2) The duties, responsibilities, and authorities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are related to the achievement of company objectives and performance;

- 3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel

- 3) Performance targets or the performance of each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
- 4) The balance between fixed allowance and variable allowance

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung keberlanjutan dan keunggulan Perusahaan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Khusus bagi Komite Nominasi dan Remunerasi, pengembangan ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan guna memperkuat peran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pengawasan dan pemberian masukan strategis kepada Dewan Komisaris. Berikut adalah rincian program peningkatan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2024:

Competency Development Program

Jamkrindo continues to improve the quality of its human capital in order to support the sustainability and excellence of the Company. One of the strategic measures taken is to implement a competency development program for all employees. For the Nomination and Remuneration Committee specifically, this development aims to update knowledge in order to strengthen the role of the Nomination and Remuneration Committee in monitoring and providing strategic input to the Board of Commissioners. The following are details of the competency improvement program of the Nomination and Remuneration Committee throughout 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Muhammad Muchlas Rowi	Ketua Chairman	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024 Economic and Financial Outlook in 2024	22 Februari 2024 February 22, 2024	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Artificial Intelligence Changes the Face of Financial Sector	07 Maret 2024 March 7, 2024	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Strategi Pengembangan SJK melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Conduct Financial Services Development Strategy through Strengthening Islamic Banking and Market Conduct	13 Maret 2024 March 13, 2024	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	15 Mei 2024 March 15, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	11 Juni 2024 June 11, 2024	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan The Role of Innovative Credit Scoring (ICS) in Improving Access to Funding	27 Juni 2024 June 27, 2024	27 Juni 2024 June 27, 2024
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Seminar	Seminar Ai4: "The Forefront of Artificial Intelligence Innovation" Ai4 Seminar: "The Forefront of Artificial Intelligence Innovation"	10-16 Agustus 2024 August 10-16, 2024	Fora Group
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Desty Arlaini	Anggota Member	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Ujian Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (QRGP) Education and Training Program for Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Exam Preparation	08-09 Agustus 2024 August 8-9, 2024	CRMS x LPK MKS
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Manajemen Risiko : Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (QRGP) Risk Management : Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Institute – Mitra Kalyana Sejahtera
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
Ari Wahyuni	Anggota Member	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Seminar	#RISK London 2024	09-10 Oktober 2024 October 9-10, 2024	GRC World Forum
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
Hernita Alius	Anggota Member	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	31 Desember 2024 December 31, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute
Angger P Yuwono	Anggota Member	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Sosialisasi CPD dan Diskusi Panel POJK 20/2023 CPD Dissemination and Panel Discussion regarding POJK 20/2023	06 Maret 2024 March 6, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	28 Maret 2024 March 28, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Semkain Berkah Pasca Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS) More Blessings After the Spin-Off of Sharia Business Unit (UUS)	08 Mei 2024 May 8, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Joint Regional Seminar 2024 2024 Joint Regional Seminar	28 Mei dan 5 Juni 2024 May 28 and June 5, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	7th Indonesian Actuaries Summit 2024 "Actuaries, Now and Beyond"	20-22 Agustus 2024 August 20-22, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat yang bertujuan untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan 5 (lima) kali rapat. Informasi mengenai risalah rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit disajikan dalam penjelasan berikut.

Nomination and Remuneration Committee Meetings

The Nomination and Remuneration Committee has held meetings aimed at supporting the Board of Commissioners in conducting its nomination and remuneration functions. Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee held a total of 5 (five) meetings. Information regarding the minutes of the meetings and attendance of members of the Audit Committee is presented below.

Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Minutes of the Nomination and Remuneration Committee Meetings

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
28 Mei 2024 May 28, 2024	Tanggapan atas usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2023. Response to the proposed Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Jamkrindo for the 2024 Fiscal Year and Bonuses based on the Performance of the 2023 Fiscal Year.
16 Juli 2024 July 16, 2024	Tanggapan atas penetapan Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo Response to the appointment of the Corporate Secretary of PT Jamkrindo
02 Agustus 2024 August 2, 2024	Tanggapan atas usulan penggantian Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Response to the proposed replacement of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
05 November 2024 November 5, 2024	Tanggapan atas penetapan Komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Response to the appointment of the President Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
09 Desember 2024 December 9, 2024	Update Talent Pool Kementerian BUMN dan Hasil Mapping Level Jabatan BOD-1 dan BOD-2 Tahun 2024 PT Jamkrindo Update on the Ministry of SOEs Talent Pool and Mapping Result for BOD-1 and BOD-2 Level Positions at PT Jamkrindo in 2024

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat

Recapitulation and Attendance of the Nomination and Remuneration Committee in Meetings

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran Percentage of Attendance
Muhammad Muchlas Rowi	5	5	0	100%
Desty Arlaini	5	5	0	100%
Ari Wahyuni	5	5	0	100%
Hernita Alius	5	5	0	100%
Angger P Yuwono	5	5	0	100%
Rata-rata Average				100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi 2024

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk mengevaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait sistem atau kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, dan karyawan, yang selanjutnya memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Menyampaikan tanggapan atas usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2023.

Brief Report on the Implementation of the 2024 Nomination and Remuneration Committee Work Program

The Nomination and Remuneration Committee is tasked with evaluating, preparing, providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the nomination and remuneration system or policy for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees. Which further requires approval from the Board of Commissioners.

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee has conducted its duties in accordance with applicable regulations. The duties are accomplished through the following activities:

1. Submit a response to the proposed Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Jamkrindo in 2024, and the Bonuses based on the Performance of the 2023 Fiscal Year.

2. Menyampaikan tanggapan atas penetapan Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo.
3. Menyampaikan tanggapan atas usulan penggantian Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
4. Menyampaikan tanggapan atas penetapan Komisaris Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
5. Menyampaikan *Update Talent Pool* Kementerian BUMN dan Hasil Mapping Level Jabatan BOD-1 dan BOD-2 Tahun 2024 PT Jamkrindo

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Nominasi dan Remunerasi

Menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, penghasilan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan sebesar 20% dari gaji Direktur Utama perusahaan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus berasal dari kalangan Dewan Komisaris, tanpa melibatkan pihak eksternal.

Kebijakan Mengenai Rencana Suksesi Direksi

Suksesi Direksi menjadi momentum membangun tradisi alih generasi dan role model bagi Jamkrindo, selain sebagai tantangan bagi Direksi terpilih dan segenap karyawan untuk menjawabnya dengan prestasi dan kinerja terbaik. Untuk memastikan Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang semestinya, Perusahaan melakukan proses suksesi Direksi di mana penetapan calon Direksi Jamkrindo ditetapkan berdasarkan pemenuhan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/ mBu/02/2015. Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian.

Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi, adalah sebagai berikut:

2. Submit a response to the appointment of the Corporate Secretary of PT Jamkrindo.
3. Submit a response to the proposed replacement of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
4. Submit a response to the appointment of the President Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.
5. Submit an Update on the Ministry of SOEs Talent Pool and Mapping Result for BOD-1 and BOD-2 Level Positions at PT Jamkrindo in 2024.

Remuneration Policy for Nomination and Remuneration Committee

According to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. The income for the Nomination and Remuneration Committee is determined at 20% of the salary of the President Director of the Company. This regulation also emphasizes how members of the Nomination and Remuneration Committee must come from among the Board of Commissioners, without involving external parties.

Policy on The Board of Directors' Succession Plan

The succession of the Board of Directors becomes a momentum to build a tradition of generation transfer and role model for Jamkrindo. As well as a challenge for the elected Board of Directors and all employees to answer it with the best achievement and performance. To ensure that the Company is managed by a management with appropriate expertise and competence, the Company conducts a Board of Directors succession process in which the determination of Jamkrindo's Board of Directors candidates is based on the fulfillment of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/ mBu/02/2015. The selection process of the Board of Directors is conducted by an Evaluation Team established by the Minister based on proposals from the relevant Echelon I and the Secretary of the Ministry.

The selection process by the Evaluation Team is described below:

Melakukan pemanggilan terhadap Calon Anggota Direksi yang termasuk dalam Daftar Calon yang telah disetujui oleh Menteri, untuk mengikuti UKK

Summon the candidates for the Board of Directors who are included in the list of candidates approved by the Minister, to participate in the Skills Competency Test (UKK).



Melakukan pengujian terhadap Calon Anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan Lembaga Profesional

Perform tests on prospective members of the Board of Directors, if the tests do not use professional institutions



Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian Lembaga Profesional, jika pengujian menggunakan Lembaga Profesional

Evaluate the test results of the Professional Institution, if the test uses a Professional Institution



Mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan
Make decisions and provide recommendations on the assessments being performed



Menetapkan hasil akhir evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Evaluasi, untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan penetapan
Determine the final results of the evaluation signed by the Chairman and Vice Chairman of the Evaluation Team, that is then submitted to the Minister for determination.



Melakukan pengujian terhadap Calon Anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan Lembaga Profesional
Perform tests on prospective members of the Board of Directors, if the tests do not use professional institutions



Melakukan pengujian terhadap Calon Anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan Lembaga Profesional
Perform tests on prospective members of the Board of Directors, if the tests do not use professional institutions

Tim Evaluasi menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk memilih calon yang paling tepat. Sementara itu, pembobotan dalam penilaian terhadap persyaratan materiil calon Direksi adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 35% dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 10%;
 - b. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
 - c. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 5%.
2. Kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 55% dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan diberikan bobot 5%;
 - b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan diberikan bobot 10%;
 - c. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga diberikan bobot 10%;
 - d. Kemampuan memimpin dan bekerja sama diberikan bobot 10%;

The Evaluation Team submits recommendations to the Minister to select the most appropriate candidate. Meanwhile, the weightage in the assessment of the material requirements of the candidates for the Board of Directors is as follows:

1. Integrity and morals are given an assessment weight of 35% with the following details:
 - a. Never involved in manipulative and deviant practices at the institution the candidate previously worked for before the nomination (dishonest behavior). Given a weight of 10%;
 - b. Never involved in a breach of promise that can be categorized as not fulfilling the commitments that have been agreed upon at the institution the candidate previously worked for before the nomination (bad behavior). Given a weight of 10%;
 - c. Never involved in acts that is categorized as being able to provide unlawful benefits to the candidate and/or other parties before the nomination (bad behavior). Given a weight of 10%;
 - d. Never involved in an act that can be categorized as a violation of the provisions relating to the principles of sound corporate management (bad behavior). Given a weight of 5%.
2. Technical competence/expertise is given an assessment weight of 55% with the following details:
 - a. Knowledge in the field of business of the SOE concerned is given a weight of 5%;
 - b. Understanding of management and corporate governance is given a weight of 10%;
 - c. Experience in the management of SOEs/Companies/ Institutions is given a weight of 10%;
 - d. Leadership and cooperation skills are given a weight of 10%;

- e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN diberikan bobot 20%.

3. Psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%.

Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan investasi, serta pengelolaan risiko usaha yang dijalankan oleh Direksi dan staf terkait. Komite ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Susunan dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Periode tahun 2024 tidak mencatat adanya perubahan dalam keanggotaan Komite Pemantau Risiko. Oleh karena itu, struktur dan profil anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	SK Dewan Komisaris Board of Commissioners' Decree
1.	Krisna Wijaya	Ketua Chairman	KEP-07/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-07/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022
2.	Ari Wahyuni	Anggota Member	KEP-07/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-07/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022
3.	M. Muchlas Rowi	Anggota Member	KEP-07/DP-JAMKRINDO/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 KEP-07/DP-JAMKRINDO/X/2019 dated October 21, 2019
4.	Angger P. Yuwono	Anggota Member	KEP-05/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 KEP-05/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 dated August 01, 2023
5.	Fahrul Ismaeni	Anggota Member	KEP-04/DK-JAMKRINDO/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 jo. KEP-03/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 KEP-04/DK-JAMKRINDO/X/2020 dated October 01, 2020 in conjunction with KEP-03/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 03, 2022
6.	Mas Dharmawan Suryadi	Anggota Member	KEP-01/DK-JAMKRINDO/IV/2023 tanggal 28 April 2023 KEP-01/DK-JAMKRINDO/IV/2023 dated April 28, 2023

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai anggota Komite Pemantau Risiko.

- e. The ability to formulate and implement strategic policies in the context of developing SOEs is given a weight of 20%.

3. Psychological is given an assessment weight of 10%.

Risk Monitoring Committee

The establishment of the Risk Monitoring Committee aims to strengthen the supervisory function conducted by the Board of Commissioners, especially in relation to investment policy and implementation. As well as business risk management conducted by the Board of Directors and related staff. The committee is also responsible for ensuring that the Company complies with applicable laws and regulations to realize the principles of good corporate governance.

Composition and Profile of Members of the Risk Monitoring Committee

The 2024 period saw no changes in the membership of the Risk Monitoring Committee. Therefore, the structure and profile of the members of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2024 are as follows:

Profile of Members of the Risk Monitoring Committee

The following is a brief overview of the members of the Risk Monitoring Committee.

Krisna Wijaya

Ketua Komite Pemantau Risiko

Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko Krisna Wijaya dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

The profile of the Chairman of the Risk Monitoring Committee, Krisna Wijaya, is available in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Ari Wahyuni

Anggota Komite Pemantau Risiko

Member of Risk Monitoring Committee

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko Ari Wahyuni dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

The profile of Risk Monitoring Committee Member, Ari Wahyuni, is available in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

M. Muchlas Rowi

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of Risk Monitoring Committee

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko M. Muchlas Rowi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.
The profile of Risk Monitoring Committee Member, M. Muchlas Rowi, is available in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Angger P. Yuwono

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of Risk Monitoring Committee

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko Angger P. Yuwono dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.
The profile of Risk Monitoring Committee Member, Angger P. Yuwono, is available in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.



Fahrul Ismaeni

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of Risk Monitoring Committee

Periode Jabatan: 2023-2025, Periode Pertama
Term of Office: 2023-2025, 1st Period

Warga negara
Citizenship

: Indonesia

Usia
Age

: 44 tahun
44 years old

Kelahiran
Date of Birth

: Surabaya, 22 Mei 1980
Surabaya, 22 Mei 1980

Domisili
Domicile

: Tangerang, Indonesia

Pendidikan
Education

- S1 Manajemen Keuangan, FEBUI (2003)
- S1 Hukum, Universitas Bung Karno (2007)
- S2 Magister Hukum Bisnis, FHUI (2006)
- Bachelor's Degree in Financial Management at Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEBUI) (2003)
- Bachelor's Degree in Law at Universitas Bung Karno (2007)
- Master's Degree in Business Law at Faculty of Law, University of Indonesia (FHUI) (2006)

Dasar Penunjukan
Basis of Appointment

: KEP-03/DK-JAMKRINDO/X/2022 jo. KEP-05/DK-JAMKRINDO/VIII/2023
KEP-03/DK-JAMKRINDO/X/2022 in conjunction with KEP-05/DK-JAMKRINDO/VIII/2023

Riwayat Profesi
Professional History

Memiliki pengalaman bekerja dan menjabat di beberapa perusahaan baik milik negara, swasta, maupun Lembaga Pendidikan seperti pada Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, PT Pertamina Tongkang (saat ini menjadi PT Pertamina Trans Kontinental), PT Sinar Petrindo Perkasa, British Council, dan Itacha Plantation. Tahun 2014-2020 pernah menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite GCG, dan Komite Audit PT Wijaya Karya (Persero). Sedangkan tahun 2012-2013 menjadi Komite Risiko Bisnis dan GCG PT Angkasa Pura I. Sejak Februari 2020, Fahrul juga menjabat sebagai Human Resource Manager Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit terhitung tanggal 1 Oktober 2020 dan dialihkan tugasnya menjadi Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha tanggal 3 Oktober 2022. Fahrul Ismaeni has experiences working and serving in several state-owned, private companies and educational institutions such as the Management Institute of the Faculty of Economics, University of Indonesia, PT Pertamina Tongkang (currently PT Pertamina Trans Continental), PT Sinar Petrindo Perkasa, British Council, and Itacha Plantation. Fahrul Ismaeni has also served as member of the Nomination and Remuneration Committee, GCG Committee, and Audit Committee of PT Wijaya Karya (Persero) (2014-2020). Served as member of the Business Risk and GCG Committee of PT Angkasa Pura I (2012-2013). Since February 2020, Fahrul Ismaeni has served as Human Resource Manager of the Faculty of Economics and Business in University of Indonesia. He was appointed as a Member of the Audit Committee as of October 1, 2020. He transferred his duties to become a Member of the Investment and Business Risk Committee on October 3, 2022.

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationships

: Fahrul Ismaeni tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.
Fahrul Ismaeni has no affiliate relationship with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or the majority shareholders.

Sertifikasi yang Dimiliki
Certifications

- Certification in Audit Committee Practices
- Certified Legal Auditor
- Certified Liquidator Indonesia
- Certified Government Procurement Expert.



Mas Dharmawan Suryadi

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of Risk Monitoring Committee

Periode Jabatan: 2023-2026, Periode Pertama
Term of Office: 2023-2026, 1st Period

Warga negara
Citizenship

: Indonesia

Usia
Age

: 58 tahun
58 years old

Kelahiran
Date of Birth

: Kuningan, 1 Desember 1966
Kuningan, December 1, 1966

Domisili
Domicile

: Bogor, Indonesia

Pendidikan
Education

- D IV (Akuntan), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1994)
- S2 Manajemen Keuangan, Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MBIPB) (2013)
- Diploma Degree (Accounting) at State College of Accountancy (STAN) (1994)
- Master's Degree in Financial Management, and Management and Business at Bogor Agricultural University (SB-IPB) (2013)

Dasar Penunjukan
Basis of Appointment

: KEP-01/DK-JAMKRINDO/IV/2023

Riwayat Profesi
Professional History

Berkarir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Auditor sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2002. Pada tahun 2002 melanjutkan karir di PT Sang Hyang Seri (Persero) dimulai sebagai Kepala Bagian pada Satuan Pengawasan Intern (SPI) hingga Direktur Perencanaan dan Transformasi pada tahun 2015. Dari tahun 2015 hingga tahun 2018 menjadi Associate Partner di KAP HMR. Pernah menjadi anggota Komite Audit pada Perum Perumnas periode 2016-2019 dan 2019-2021. Sejak tahun 2018 berkarir di PT Jakarta Propertindo (Persero)/Jakpro dimulai sebagai General Manager Keuangan dan Akuntansi hingga menjadi Direktur Keuangan PT Jakarta Utilitas Propertindo (salah satu anak usaha PT Jakpro) sampai dengan tahun 2022. Diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Jamkrindo terhitung sejak tanggal 28 April 2023. Mas Dharmawan Suryadi has worked at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as an Auditor from 1988 to 2002. In 2002, he continued his career at PT Sang Hyang Seri (Persero) starting as Head of Section at the Internal Audit Unit (SPI), and became the Director of Planning and Transformation in 2015. From 2015 to 2018, he became an Associate Partner at the Husni, Mucharam, and Rasidi (HMR) Public Accounting Firm (KAP). He was a member of the Audit Committee at Perum Perumnas for the 2016-2019 and 2019-2021 period. Since 2018, his career at PT Jakarta Propertindo (Persero)/Jakpro began as General Manager of Finance and Accounting until he was promoted to Finance Director of PT Jakarta Utilitas Propertindo (one of PT Jakpro's subsidiaries) until 2022. Appointed as Member of Risk Monitoring Committee of PT Jamkrindo effective as of April 28, 2023.

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationships

: Mas Dharmawan Suryadi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.
Mas Dharmawan Suryadi has no affiliate relationship with other any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or with the majority shareholders.

Sertifikasi yang Dimiliki
Certifications

: Certified Risk Management Professional

Piagam Komite Pemantau Risiko

Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR) resmi disahkan pada tanggal 5 Juni 2023. Piagam tersebut mencakup berbagai ketentuan, yang meliputi:

1. Latar belakang, maksud dan tujuan, dan Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko;
2. Organisasi mencakup hal-hal tentang struktur keanggotaan, keanggotaan, dan persyaratan keanggotaan, masa jabatan, dan evaluasi kinerja;
3. Tugas dan tanggung jawab, kewenangan dan Kode Etik, meliputi hal-hal tentang tugas dan tanggung jawab, wewenang dan mekanisme kerja, kode etik;
4. Program Kerja, Rapat Komite, dan Pelaporan, mencakup hal-hal tentang program kerja, pelaksanaan dan mekanisme rapat komite, dan pelaporan; dan
5. Penutup, mencakup masa berlaku dan evaluasi.

Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee Charter was officially ratified on June 5, 2023. The Charter covers various provisions, as outlined below:

1. Background, purpose and objectives, and basis for the establishment of the Risk Monitoring Committee;
2. Organization, which includes membership structure, membership and membership requirements, term of office, and performance evaluation;
3. Duties and responsibilities, authority and Code of Conduct, which includes duties and responsibilities, authority and working mechanism, as well as Code of Conduct;
4. Work Programs, Committee Meetings, and Reporting, including work programs, implementation and mechanism of committee meetings, as well as reporting; and
5. Closing, covering the validity period and evaluation.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi Independence Aspect	Krisna Wijaya	Muhammad Muchlas Rowi	Angger P Yuwono	Fahrul Ismaeni	Mas Dharmawan Suryadi
Kepemilikan Saham Share Ownership	x	x	x	x	x
Hubungan Keluarga Familial Relationship	x	x	x	x	x
Hubungan Keuangan Financial Relationship	x	x	x	x	x
Rangkap Jabatan Concurrent Position	x	x	x	x	x

Sertifikasi Profesi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko terus berupaya memperkuat kompetensi anggotanya melalui berbagai program pengembangan profesional. Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan dan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Berikut adalah daftar sertifikasi yang telah dicapai oleh anggota Komite Pemantau Risiko hingga tahun 2024.

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Sertifikasi Profesi Komite Pemantau Risiko Types of Professional Certifications of the Risk Monitoring Committee
Krisna Wijaya	Ketua Chairman	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision
Ari Wahyuni	Anggota Member	Enterprise Risk Management
M. Muchlas Rowi	Anggota Member	- Governance, Risk, and Compliance Certified Executive - Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan - Governance, Risk, and Compliance Certified Executive - Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision
Angger P. Yuwono	Anggota Member	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision
Fahrul Ismaeni	Anggota Member	Certification in Audit Committee Practices Certified Legal Auditor Certified Liquidator Indonesia Certified Government Procurement Expert. Governance, Risk, and Compliance Certified Executive Bank Risk Management
Mas Dharmawan Suryadi	Anggota Member	Certified Risk Management Professional

Tugas Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung Komite Pemantau Risiko yaitu:

1. Melakukan pemantauan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
2. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Perusahaan yang membidangi Manajemen Risiko;
3. Melakukan pengawasan kebijakan dan pemberitaan eksternal dalam rangka perlindungan konsumen;
4. Melakukan penelaahan dan memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada Dewan Komisaris dalam rangka memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan investasi, risiko usaha dan perlindungan konsumen;

Independence of Members of the Risk Monitoring Committee

Professional Certification for the Members of the Risk Monitoring Committee

The members of the Risk Monitoring Committee continues to improve their through various professional development programs. These programs include training and certification that are recognized both nationally and internationally. The following is a list of certifications that have been achieved by members of the Risk Monitoring Committee as of 2024.

Duties of the Risk Monitoring Committee

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are as follows:

1. Monitor investment policies and supervise the implementation of investment policies that have been determined;
2. Evaluate the alignment between risk management policies and their implementation, as well as monitor and evaluate the performance of the Company's Risk Management work unit;
3. Monitor policies and external news as a means of consumer protection;
4. Review and provide input on matters that require attention to the Board of Commissioners in order to advise the Board of Directors in matters related to investment, business risk, and consumer protection;

5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners in accordance with the provisions of laws and regulations.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung keberlanjutan dan keunggulan perusahaan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Khusus bagi Komite Pemantau Risiko, pengembangan ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan guna memperkuat peran Komite Pemantau Risiko dalam pengawasan dan pemberian masukan strategis kepada Dewan Komisaris. Berikut adalah rincian program peningkatan kompetensi Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2024:

Competency Development Program

Jamkrindo continues to improve the quality of its human capital as a means to support the Company's sustainability and excellence. One of the strategic measures taken is to implement a competency development program for all employees. Specifically for the Risk Monitoring Committee specifically, this development aims to update knowledge to strengthen the role of the Audit Committee in monitoring and providing strategic input to the Board of Commissioners. The following are the details of the Risk Monitoring Committee competency improvement program throughout 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Krisna Wijaya	Ketua Chairman	Seminar	Seminar Nasional Bertumbuh Dalam Pengaturan UU P2SK National Seminar: Growing Within the Regulation of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law)	06 Maret 2024 March 6, 2024	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Indonesian Finance Services Association (APPI)
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Riskhub International Webinar: ESG Integration in Risk Management: A Practical Exploration	13 Maret 2024 March 13, 2023	ERMA x IRMAPA x Marsh x CRMS x LSP MKS
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN RI Guna Optimalisasi Pengelolaan BUMN Synergy Between the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and the Ministry of State-Owned Enterprises to Optimize SOE Management	16 Mei 2024 May 16, 2024	Universitas Jenderal Soedirman Jenderal Soedirman University
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Riskhub International Webinar: Based on ISO 23894 & ISO 42001: Proactive Approaches for Sustainable Innovation	12 Juni 2024 June 12, 2024	ERMA x IRMAPA x Marsh x CRMS x LSP MKS
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Pelatihan (Benchmark) Training (Benchmark)	International Benchmarking Visit To United Kingdom	24 Oktober – 02 November 2024 October 24 – November 2, 2024	LPPI
		Seminar	Resilient Leadership: ESG, AI, and GRC in Modern Risk Governance	04 Desember 2024 December 4, 2024	ERMA x CRMS x LSP MKS
		Seminar	Risk Beyond 2024 : Sustainable Symphony: Echoes of Change	05-06 Desember 2024 December 5 – 6, 2024	ERMA
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
Ari Wahyuni	Anggota Member	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Seminar	#RISK London 2024	09-10 Oktober 2024 October 9 – 10, 2024	GRC World Forum

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
M. Muchlas Rowi	Anggota Member	Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024 Economic and Financial Outlook in 2024	22 Februari 2024 February 22, 2024	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Artificial Intelligence Changes the Face of Financial Sector	07 Maret 2024 March 7, 2024	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Strategi Pengembangan SJK melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Conduct Financial Services Development Strategy through Strengthening Islamic Banking and Market Conduct	13 Maret 2024 March 13, 2024	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	15 Mei 2024 May 15, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	11 Juni 2024 June 11, 2024	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan The Role of Innovative Credit Scoring (ICS) in Improving Access to Funding	27 Juni 2024 June 27, 2024	27 Juni 2024 June 27, 2024
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Seminar	Seminar Ai4: "The Forefront of Artificial Intelligence Innovation" Ai4 Seminar: "The Forefront of Artificial Intelligence Innovation"	10-16 Agustus 2024 August 10-16, 2024	Fora Group
Angger P. Yuwono	Anggota Member	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Sosialisasi CPD dan Diskusi Panel POJK 20/2023 CPD Dissemination and Panel Discussion regarding POJK 20/2023	06 Maret 2024 March 6, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	28 Maret 2024 March 28, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Semkain Berkah Pasca Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS) More Blessings After the Spin-Off of Sharia Business Unit (UUS)	08 Mei 2024 May 8, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Joint Regional Seminar 2024	28 Mei dan 5 Juni 2024 May 28 and June 5, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	7th Indonesian Actuaries Summit 2024 "Actuaries, Now and Beyond"	20-22 Agustus 2024 August 20-22, 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia Society of Actuaries of Indonesia
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Fahrul Ismaeni	Anggota Member	Seminar	How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 Mei 2024 May 16, 2024	OJK
		Seminar	Strategi Pemasaran Digital di Era Digital: Taktik dan Langkah Efektif Mencetak Profit Optimal Digital Marketing Strategy in the Digital Age: Effective Tactics and Measures to Make Optimal Profits	5 Juni 2024 June 5, 2024	OJK
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Program Of Training Scheme Material Bank Risk Management Qualification 4 Certification	10-11 Juli 2024 July 10 – 11, 2024	PT Efektifpro Knowledge Source
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Manajemen Risiko Perbankan Banking Risk Management	26 Agustus 2024 August 26, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan Banking Professional Certification Institute
Mas Dharmawan Suryadi	Anggota Member	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Certified Risk Management Professional	31 Oktober 2024 October 31, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Risk Management Professional Certification Institute

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 12 (dua belas) rapat yang bertujuan mendukung tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Informasi mengenai risalah rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit disajikan dalam penjelasan berikut.

Risk Monitoring Committee Meeting

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee has held a total of 12 (twelve) meetings aimed at supporting the duties of the Board of Commissioners in overseeing the Company's management. Information regarding the minutes of meetings and attendance of members of the Audit Committee is presented in the following section.

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko Minutes of the Risk Monitoring Committee Meetings

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
25 Januari 2024 January 25, 2024	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Laporan Dashboard Manajemen Risiko bulan Desember 2023 Monitoring and Evaluation of Performance Achievement and Risk Management Dashboard Report for December 2023
27 Februari 2024 February 27, 2024	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Laporan Dashboard Manajemen Risiko bulan Januari 2024 Monitoring and Evaluation of Performance Achievement and Risk Management Dashboard Report for January 2024
26 Maret 2024 March 26, 2024	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Laporan Dashboard Manajemen Risiko bulan Februari 2024 Monitoring and Evaluation of Performance Achievement and Risk Management Dashboard Report for February 2024
23 April 2024 April 23, 2024	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Laporan Dashboard Manajemen Risiko bulan Maret 2024 Monitoring and Evaluation of Performance Achievement and Risk Management Dashboard Report for March 2024
28 Mei 2024 May 28, 2024	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Laporan Dashboard Manajemen Risiko bulan April 2024 Monitoring and Evaluation of Performance Achievement and Risk Management Dashboard Report for April 2024
25 Juni 2024 June 25, 2024	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Laporan Dashboard Manajemen Risiko bulan Mei 2024 Monitoring and Evaluation of Performance Achievement and Risk Management Dashboard Report for May 2024
23 Juli 2024 July 23, 2024	Laporan Evaluasi Manajemen Risiko dan Laporan Kinerja Investasi Bulan Juni 2024 Risk Management Evaluation Report and Investment Performance Report for June 2024
27 Agustus 2024 August 27, 2024	Laporan Evaluasi Manajemen Risiko dan Laporan Kinerja Investasi bulan Juli 2024 Risk Management Evaluation Report and Investment Performance Report for July 2024

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko Minutes of the Risk Monitoring Committee Meetings

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
25 September 2024 September 25, 2024	Laporan Evaluasi Manajemen Risiko dan Laporan Kinerja Investasi bulan Agustus 2024 Risk Management Evaluation Report and Investment Performance Report for August 2024
23 Oktober 2024 October 23, 2024	Laporan Evaluasi Manajemen Risiko dan Laporan Kinerja Investasi Bulan September 2024 Risk Management Evaluation Report and Investment Performance Report for September 2024
26 November 2024 November 26, 2024	Laporan Evaluasi Manajemen Risiko dan Laporan Kinerja Investasi bulan Oktober 2024 Risk Management Evaluation Report and Investment Performance Report for October 2024
18 Desember 2024 December 18, 2024	Laporan Evaluasi Manajemen Risiko dan Laporan Kinerja Investasi bulan November 2024 Risk Management Evaluation Report and Investment Performance Report for November 2024

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Recapitulation and Attendance Rate of the Risk Monitoring Committee in Meetings

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Number of Absence	% Kehadiran Percentage of Attendance
Krisna Wijaya	12	12	12	100%
Ari Wahyuni	12	12	12	100%
M. Muchlas Rowi	12	12	12	100%
Angger P. Yuwono	12	12	12	100%
Fahrul Ismaeni	12	12	12	100%
Mas Dharmawan Suryadi	12	12	12	100%
Average				100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko 2024

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan berbagai kegiatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa aktivitas yang dilakukan antara lain:

- Menyiapkan telaahan/analisa dan bahan terkait kinerja bulanan, perkembangan kondisi dan masalah aktual serta isu strategis yang terjadi pada perusahaan, serta mengikuti rapat Dewan Komisaris
 - Januari 2024: membahas tentang Evaluasi Manajemen Risiko bulan Desember 2023 dan Laporan Kinerja Investasi Desember 2023.
 - Februari 2024: membahas tentang Evaluasi Manajemen Risiko bulan Januari 2024, dan Evaluasi Kinerja Investasi bulan Januari 2024.
 - Maret 2024: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Februari 2024, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Februari 2024.
 - April 2024: membahas tentang Evaluasi Manajemen Risiko bulan Maret 2024 dan dan Laporan Kinerja Investasi bulan Maret 2024.
 - Mei 2024: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan April 2024 dan dan Laporan Kinerja Investasi bulan April 2024

Brief Report on the Implementation of the 2024 Risk Monitoring Committee Work Program

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee has conducted various activities in accordance with the prevailing laws and regulations. Some of those activities are described below:

- Prepare reviews/analyses and related materials to monthly performance, developments in conditions and actual problems, as well as strategic issues occurring in the Company, as well as attending Board of Commissioners meetings.
 - January 2024: discussed the December 2023 Risk Management Evaluation, and the December 2023 Investment Performance Report.
 - February 2024: discussed the January 2024 Risk Management Evaluation, and the January 2024 Investment Performance Evaluation.
 - March 2024: discussed the February 2024 Risk Management Evaluation Report, and the February 2024 Investment Performance Report.
 - April 2024: discussed the March 2024 Risk Management Evaluation, and the March 2024 Investment Performance Report.
 - May 2024: discussed the April 2024 Risk Management Evaluation Report, and the April 2024 Investment Performance Report.

- f. Juni 2024: membahas tentang dashboard bulan Mei 2024 dan dan Laporan Kinerja Investasi bulan Mei 2024.
 - g. Juli 2024: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Juni 2024 dan Laporan Kinerja Investasi bulan Juni 2024.
 - h. Agustus 2024: membahas tentang tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Juli 2024, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Juli 2024.
 - i. September 2024: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Agustus 2024, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Agustus 2024.
 - j. Oktober 2024: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan September 2024, dan Laporan Kinerja Investasi Bulan September 2024.
 - k. November 2024: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Oktober 2024, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Oktober 2024.
 - l. Desember 2024: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan November 2024, dan Laporan Kinerja Investasi bulan November 2024.
2. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Komisaris ke lapangan/unit kerja di daerah.
Sampai dengan periode akhir tahun 2024, KPR telah mengikuti Kunjungan kerja Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Denpasar pada tanggal 26 Januari 2024.
 - b. Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Bandung pada tanggal 26 April 2024.
 - c. Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Semarang pada tanggal 31 Mei 2024.
 3. Melakukan telaahan atas Laporan Kegiatan dan Keuangan secara triwulanan.
 4. Melakukan telaah atas hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi setiap bulan.
 5. Melakukan telaahan atas pelaksanaan dan *review* atas laporan berkala manajemen risiko.

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Pemantau Risiko

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 yang mengatur Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara, penghasilan Komite Pemantau Risiko ditetapkan sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

Sebagai bagian dari upaya transparansi, berikut ini disampaikan informasi mengenai remunerasi Komite Pemantau Risiko di luar Dewan Komisaris untuk tahun 2024.

- f. June 2024: discussed the May 2024 dashboard, and the May 2024 Investment Performance Report.
 - g. July 2024: discussed the June 2024 Risk Management Evaluation Report, and the June 2024 Investment Performance Report.
 - h. August 2024: discussed the July 2024 Risk Management Evaluation Report, and the July 2024 Investment Performance Report.
 - i. September 2024: discussed the August 2024 Risk Management Evaluation Report, and the August 2024 Investment Performance Report.
 - j. October 2024: discussed the September 2024 Risk Management Evaluation Report, and the September 2024 Investment Performance Report.
 - k. November 2024: discussed the October 2024 Risk Management Evaluation Report, and the October 2024 Investment Performance Report.
 - l. December 2024: discussed the November 2024 Risk Management Evaluation Report, and the November 2024 Investment Performance Report.
2. Assist the Board of Commissioners' visit to the field/work units in the regions.
Until the end of 2024, RMC has participated in the Board of Commissioners working visit, namely to:
 - a. Denpasar Regional Office and Branch Office on January 26, 2024.
 - b. Bandung Regional Office and Branch Office on April 26, 2024.
 - c. Semarang Regional Office and Branch Office on May 31, 2024.
 3. Review the Activity and Financial Statements on a quarterly basis.
 4. Review the results of the Board of Commissioners and the Board of Directors meetings every month.
 5. Review the implementation and review of periodic risk management reports.

Remuneration Policy for the Risk Monitoring Committee

In accordance with the provisions in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the remuneration for the Risk Monitoring Committee is set at 20% of the President Director's salary.

As part of the Company's commitment to transparency, the following information is presented regarding the remuneration of the Risk Monitoring Committee who are not a part of the Board of Commissioners for the year 2024.

Nama Name	Periode Menjabat Tenure	Honorarium per Bulan Honorarium for Each Month (Rp) (IDR)	Tunjangan Transportasi Transportation Benefits (Rp) (IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Total Honorarium and Benefits for Each Month (Rp) (IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun Total Honorarium and Benefits for 1 Year (Rp) (IDR)	Tantiem Bonuses (Rp) (IDR)	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024 (Rp) (IDR)
Fahrul Ismaeni	Januari-Desember January-December	42.400.000	-	42.400.000	508.800.000	-	508.800.000
Mas Dharmawan Suryadi	Januari-Desember January-December	42.400.000	-	42.400.000	508.800.000	-	508.800.000

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sejalan dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrindo, yang menetapkan pengesahan RKAP tahun 2023, diketahui bahwa klasifikasi risiko untuk Jamkrindo berada pada kuadran Sistemik A. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, BUMN dengan klasifikasi sistemik A dan yang tergolong sebagai BUMN konglomerasi atau Anak Perusahaan BUMN Konglomerasi, diwajibkan memiliki organ pengelola risiko. Salah satunya adalah dengan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang sekaligus merangkap fungsi Komite Pemantau Risiko.

Susunan dan Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Integrated Governance Committee

In line with the resolution made at the General Meeting of Shareholders of PT Jamkrindo, which sets the ratification of the 2023 Company Work Plan and Budget, it is noted that the risk classification for Jamkrindo is in the Systemic A quadrant. Based on this classification and in accordance with Article 56 Paragraph (2) of the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning systemic A SOEs, companies classified as conglomerate SOEs or subsidiaries of conglomerate SOEs are required to establish a risk management organ. One of the measures taken to fulfill this requirement is the establishment of an Integrated Governance Committee, which also functions as the Risk Monitoring Committee.

Composition and Profile of the Members of the Integrated Governance Committee

The composition of the Integrated Governance Committee as of 31 December 2024, is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	SK Dewan Komisaris Board of Commissioners Decree
1.	Krisna Wijaya*	Ketua Chairman	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
2.	Muhammad Muchlas Rowi**	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
3.	Hernita Alius**	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
4.	Edy Utomo***	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
5.	Abdul Azim****	Anggota Member	KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023 dated October 13, 2023
6.	Fahrul Ismaeni	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
7.	Mas Dharmawan Suryadi	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
8.	Lando Simatupang	Anggota Member	KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023 dated October 13, 2023

*) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Jamkrindo

**) Komisaris Independen PT Jamkrindo

****) Komisaris Independen PT Jamsyar

*****) Dewan Pengawas Syariah PT Jamsyar

*) President Commissioner and also hold concurrent position of Independent Commissioner of PT Jamkrindo

**) Independent Commissioner of PT Jamkrindo

****) Independent Commissioner of PT Jamsyar

*****) Sharia Supervisory Board of PT Jamsyar

Krisna Wijaya

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

Chairman of the Integrated Governance Committee

Profil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Krisna Wijaya dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

The profile of the Chairman of the Integrated Corporate Governance Committee, Krisna Wijaya, is available in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

M. Muchlas Rowi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Member of the Integrated Governance Committee

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi M. Muchlas Rowi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

Profile of Member of the Integrated Governance Committee, M. Muchlas Rowi, is available in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Fahrul Ismaeni

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Member of the Integrated Governance Committee

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Fahrul Ismaeni dapat dilihat pada bagian Profil anggota Komite Pemantau Risiko, dalam bab Governansi Perusahaan.

The profile of Member of the Integrated Governance Committee, Fahrul Ismaeni, is available in the members of the Risk Monitoring Committee Profile section, in the Corporate Governance chapter.

Mas Dharmawan Suryadi

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Member of the Integrated Governance Committee

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Mas Dharmawan Suryadi dapat dilihat pada bagian Profil anggota Komite Pemantau Risiko, dalam bab Governansi Perusahaan.

The profile of Member of the Integrated Governance Committee, Mas Dharmawan Suryadi, is available in the members of the Risk Monitoring Committee Profile section, in the Corporate Governance chapter.



Lando Simatupang

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Integrated Governance Committee

Periode Jabatan: 2023-2025, Periode Pertama
Term of Office: 2023-2028, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	59 tahun 59 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Pematang Siantar, 15 Maret 1965 Pematang Siantar, March 15, 1965
Domisili Domicile	:	Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	- S1 jurusan uang dan bank, Universitas Sumatera Utara (1989) - S2 Magister Manajemen jurusan banking and finance, MBA ITB (2002) - Bachelor's degree in banking and finance, University of North Sumatra (1989) - Master's degree in banking and finance, MBA ITB (2002)
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	:	Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Nomor KEP-08/DKJAMKRINDO/IX/2023 The resolution of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo Number KEP-08/DKJAMKRINDO/IX/2023 Memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko dan menyelesaikan Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (SESPIBANK). Mengikuti berbagai training bidang leadership, enterprise risk management, bank risk management, good corporate governance, asset-liability management dan audit Sejak 1990–2021 sebagai fakulti dan konsultan di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), pernah menjadi Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Koordinator Fakulti dan Corporate Secretary. Bersamaan dengan itu, juga menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di Bank Finconesia, Bank Agris, Bank Ganesha, Bank UOB Indonesia dan Bank ICBC serta advisor Dewan Komisaris Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia. Saat ini sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank BNP Paribas Indonesia (sejak 2008) dan Bank Shinhan Indonesia (sejak 2016). Lando Simatupang has a certification in risk management, and completed the School of Bank Staff and Leadership (SESPIBANK). Participated in various trainings in the fields of leadership, enterprise risk management, bank risk management, good corporate governance, asset-liability management, and auditing. From 1990-2021 Lando Simatupang served as a part of the faculty and consultant at the Indonesian Banking Development Institute (LPPI), has served the Head of the Research and Development Division, Faculty Coordinator, and Corporate Secretary. At the same time, they are served as a member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee of Bank Finconesia, Bank Agris, Bank Ganesha, Bank UOB Indonesia, and Bank ICBC. He is also advisor to the Board of Commissioners of Reliance Indonesia Financing Business. He is currently a member of the Risk Monitoring Committee of Bank BNP Paribas Indonesia (since 2008), and Bank Shinhan Indonesia (since 2016).
Riwayat Profesi Professional History		
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	:	Lando Simatupang tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. Lando Simatupang has no affiliate relationship with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or the majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	:	- Certified Risk Professional in Public Sector (CRPP) - Certification in Audit Committee Practices (CACP) - Certified Risk Governance Professional (CRGP) - Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan - Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan - Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan - Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan - Certified Risk Professional in Public Sector (CRPP) - Certification in Audit Committee Practices (CACP) - Certified Risk Governance Professional (CRGP) - Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan - Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan - Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan - Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan



Edy Utomo

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Member of the Integrated Governance Committee

Periode Jabatan: 2023, Periode Pertama

Term of Office: 2023, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	60 tahun 60 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Lamongan, 3 Februari 1964 Lamongan, February 3, 1964
Domisili Domicile	:	Bekasi-Jawa Barat, Indonesia Bekasi-West Java, Indonesia
Pendidikan Education	:	- S1 Akuntansi, Universitas Brawijaya (1988) - S2 Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2002) - Bachelor's Degree in Accounting at Brawijaya University (1988) - Master's Degree in Agribusiness Management at Bogor Agricultural University (2002)
Dasar Penunjukan Basis of Appointment	:	Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Nomor KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 01 Agustus 2023 The resolution of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo Number KEP-08/DKJAMKRINDO/IX/2023 dated August 1, 2023
Riwayat Profesi Professional History	:	Tahun 2019-2020 menjabat sebagai Kepala Audit Intern Wilayah BRI Bandung. Pada tahun 2016-2019 menjabat sebagai Kepala Audit Intern Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Khusus dan Kantor Cabang Luar Negeri. Pada tahun 2012-2016 menjabat sebagai Kepala Divisi Sentra Operasi Bank Rakyat Indonesia. Saat ini sedang dalam proses Fit and Proper Test OJK untuk menjabat sebagai Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar). Edy Utomo has served as Head of Internal Audit of BRI Bandung Region from 2019-2020. They have served as Head of Internal Audit at Bank Rakyat Indonesia Head Office, Special Branch Offices, and Overseas Branch Offices from 2016-2019. He has served as Head of the Operations Center Division of Bank Rakyat Indonesia from 2012-2016. He is currently undergoing the OJK Fit and Proper Test process to serve as Independent Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships	:	Edy Utomo tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. Edy Utomo has no affiliate relationship with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or the majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	:	- Certified Risk Governance Professional (CRGP) - Sertifikat Kompetensi General Banking Level 3 (LSPP) - Sertifikat Kompetensi Guarantee Sub-Area of Management Division "Komisaris"(LSP Penjaminan) - Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 (LSPP) - Sertifikat Qualified Internal Auditor (QIA) - Sertifikat General Banking Level 3 – BNSP - Certified Risk Governance Professional (CRGP) - Level 3 General Banking Competency Certificate (LSPP) - Competency Certificate in the Guarantee Sub-Area of the Management Division – "Commissioner" (LSP Penjaminan) - Level 4 Banking Risk Management Competency Certificate (LSPP) - Qualified Internal Auditor (QIA) Certificate - Level 3 General Banking Certificate – BNSP



Abdul Aziem

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of the Integrated Governance Committee

Periode Jabatan: 2023, Periode Pertama
Term of Office: 2023, 1st/2nd Period

Warga negara
Citizenship

: Indonesia

Usia
Age

: 51 tahun
51 years old

Kelahiran
Date of Birth

: Jakarta, 31 Desember 1973
Jakarta, December 31, 1973

Domisili
Domicile

: Jakarta, Indonesia

Pendidikan
Education

- S1 Fakultas Hukum, Universitas Borobudur (1993-1997)
- S2 Pascasarjana Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (1999-2005)
- S2 Hukum Ekonomi Syariah Institut – Ilmu Al-Qur'an, Jakarta (2021-2024)
- S3 Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir, Institut PTIQ, Jakarta (2014-2020)
- Bachelor's Degree in Law at Borobudur University (1993 – 1997)
- Master's Degree in Educational Technology, Graduate School, at Jakarta State University (1999 – 2005)
- Master's Degree in Sharia Economic Law at Institute of Qur'anic Sciences (PTIQ), Jakarta (2021 – 2024)
- Doctoral Degree in Qur'anic Sciences and Tafsir, with a focus in Tafsir Studies, at Institute of Qur'anic Sciences (PTIQ), Jakarta (2014 – 2020)

Dasar Penunjukan
Basis of Appointment

: Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Nomor KEP-09/DKJAMKRINDO/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023
The resolution of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo Number KEP-09/DJAMKRINDO/X/2023 dated October 13, 2023

Riwayat Profesi
Professional History

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar) sejak 18 September 2019. Selain itu, saat ini aktif sebagai Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Islam Miftahul Huda sejak 2002, dan Ketua Dewan Pengarah LSP Beksya (Bisnis Ekonomi Keuangan Syariah) sejak 2023.
Abdul Aziem has served as a member of the Sharia Supervisory Board of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar) since September 18, 2019. Furthermore, he is the current Head of Education at Miftahul Huda Islamic College since 2002. He is the current Chairman of the Steering Board of LSP Beksya (Business Economics Sharia Finance) since 2023.

Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationships

: Abdul Aziem tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.
Abdul Aziem has no affiliate relationship with any other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or the majority shareholders.

Sertifikasi yang Dimiliki
Certifications

- Sertifikat Kompetensi Profesional Tata Kelola Bersertifikasi (LSP MKS, 2024)
- Sertifikat Kompetensi Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat (LSP Beksya, 2024)
- Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah - LSP DSN-MUI 2021
- Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah - LSP DSN-MUI 2018
- Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar – OJK 2016
- Certified Professional Governance Competency Certificate (LSP MKS, 2024)
- Qualification Level 3 Competency Certificate in Zakat Management (LSP Beksya, 2024)
- Sharia Supervisor Competency Certificate – LSP DSN-MUI (2021)
- Sharia Supervisor Competency Certificate – LSP DSN-MUI (2018)
- Basic Level Certification for the Sharia Guarantee Supervisory Board (DPS/Dewan Pengawas Syariah) – OJK (2016)

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi disahkan pada 5 Juni 2023, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan tata kelola organisasi. Piagam ini mencakup berbagai aspek penting, di antaranya:

1. Latar belakang, maksud dan tujuan, dan Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
2. Organisasi mencakup hal-hal tentang struktur keanggotaan, keanggotaan, dan persyaratan keanggotaan, masa jabatan, dan evaluasi kinerja;

Integrated Governance Committee Charter

The Integrated Governance Committee Charter was established on June 5, 2023, and serves as a guideline for managing the Organization's governance. The Charter covers several important aspects, as outlined below:

1. Background, purpose and objectives, and basis for the establishment of the Integrated Governance Committee;
2. Organization, which includes membership structure, membership and membership requirements, term of office, and performance evaluation;

3. Tugas dan tanggung jawab, kewenangan dan Kode Etik, meliputi hal-hal tentang tugas dan tanggung jawab, wewenang dan mekanisme kerja, kode etik;
4. Program Kerja, Rapat Komite, dan Pelaporan, mencakup hal-hal tentang program kerja, pelaksanaan dan mekanisme rapat komite, dan pelaporan; dan
5. Penutup, mencakup masa berlaku dan evaluasi.

Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi Independence Aspect	Krisna Wijaya	Muhammad Muchlas Rowi	Hernita Alius	Edy Utomo	Abdul Aziem	Fahrul Ismaeni	Mas Dharmawan Suryadi
Kepemilikan Saham Share Ownership	x	x	x	x	x	x	x
Hubungan Keluarga Familial Relationship	x	x	x	x	x	x	x
Hubungan Keuangan Financial Relationship	x	x	x	x	x	x	x
Rangkap Jabatan Concurrent Position	x	x	x	x	x	x	x

Sertifikasi Profesi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tata Kelola Terintegrasi terus berupaya memperkuat kompetensi anggotanya melalui berbagai program pengembangan profesional. Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan dan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Berikut adalah daftar sertifikasi yang telah dicapai oleh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hingga tahun 2024.

3. Duties and responsibilities, authority and Code of Conduct. Which covers matters relating to duties and responsibilities, authority and working mechanism, as well as Code of Conduct;
4. Work Programs, Committee Meetings, and Reporting. Which covers matters relating to work programs, implementation and mechanism of committee meetings, as well as reporting; and
5. Closing, covering the validity period and evaluation.

Independence of Members of the Integrated Governance Committee

Professional Certification of the Members of the Integrated Governance Committee

The Integrated Governance Committee continues to enhance the competence of its members through various professional development programs. These efforts are realized through training and certification that is recognized both nationally and internationally. The following is a list of certifications that have been achieved by members of the Integrated Governance Committee as of 2024.

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Sertifikasi Profesi Komite Tata Kelola Terintegrasi Types of Professional Certifications of the Integrated Governance Committee
Krisna Wijaya*	Ketua Chairman	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision
Muhammad Muchlas Rowi**	Anggota Member	- Governance, Risk, and Compliance Certified Executive - Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan - Governance, Risk, and Compliance Certified Executive - Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision
Hernita Alius**	Anggota Member	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision
Edy Utomo***	Anggota Member	Certified Risk Governance Professional (CRGP)
Abdul Aziem****	Anggota Member	Profesional Tata Kelola Bersertifikasi Certified Governance Professional
Fahrul Ismaeni	Anggota Member	Certification in Audit Committee Practices Certified Legal Auditor Certified Liquidator Indonesia Certified Government Procurement Expert. Governance, Risk, and Compliance Certified Executive Bank Risk Management
Mas Dharmawan Suryadi	Anggota Member	Certified Risk Management Professional

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Sertifikasi Profesi Komite Tata Kelola Terintegrasi Types of Professional Certifications of the Integrated Governance Committee
Lando Simatupang	Anggota Member	• Certified Risk Professional in Public Sector (CRPP) • Certified Risk Governance Professional (CRGP) • Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan • Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan • Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan • Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan • Certified Risk Professional in Public Sector (CRPP) • Certified Risk Governance Professional (CRGP) • Level 4 Qualification in Banking Risk Management • Level 5 Qualification in Banking Risk Management • Level 6 Qualification in Banking Risk Management • Level 7 Qualification in Banking Risk Management

*) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Jamkrindo

**) Komisaris Independen PT Jamkrindo

***) Komisaris Independen PT Jamsyar

****) Dewan Pengawas Syariah PT Jamsyar

*) President Commissioner and also hold concurrent position of Independent Commissioner of PT Jamkrindo

**) Independent Commissioner of PT Jamkrindo

***) Independent Commissioner of PT Jamsyar

****) Sharia Supervisory Board of PT Jamsyar

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2023, berikut tugas dan tanggung jawabnya:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki sistem pengendalian internal terintegrasi sesuai dengan praktik terbaik.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
4. Sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya Komite dapat melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi.
5. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.
6. Pengawasan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara terintegrasi Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian BUMN.
7. Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor eksternal.
8. Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas

Duties and Responsibilities of the Integrated Governance Committee

In accordance with the 2023 Integrated Governance Committee Charter, the duties and responsibilities of the Committee are as follows:

1. Evaluate the implementation of Integrated Governance, at minimum by assessing the adequacy of internal control and the implementation of integrated compliance function.
2. Evaluate whether the Company and its Subsidiaries have an integrated internal control system in accordance with best practices.
3. Monitor and evaluate the effectiveness of the implementation of integrated internal control by reviewing the Periodic Reports and Audit Reports issued by the Integrated Internal Audit Work Unit.
4. As needed, conduct meetings with the Integrated Internal Audit Work Unit and the Integrated Risk Management Work Unit to discuss matters related to the integrated internal control system and integrated risk management.
5. Monitor and evaluate the implementation of follow-up actions taken by the Board of Directors of the Company and Subsidiaries on the findings by the Integrated Internal Audit Work Unit, Public Accounting Firm, and the monitoring results of the Financial Services Authority related to the weaknesses in the system and implementation of the integrated internal control.
6. Monitor and evaluate in relation to the implementation of the integrated Compliance Function of the Company and its Subsidiaries with respect to applicable laws and regulations, including those issued by the Financial Services Authority and the Ministry of SOEs.
7. Review the periodic reports and audit reports related to compliance with internal and external regulations issued by the Integrated Compliance Work Unit and external auditors.
8. Conduct periodic meetings with the Integrated Compliance Work Unit and evaluate the follow-up actions taken by the Board of Directors of the Company and Subsidiaries on the findings issued by the Integrated Compliance Work Unit, Public Accounting Firm, and the Financial Services Authority

- Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM yang handal dan kompetitif. Salah satu langkah nyata dalam mewujudkan komitmen tersebut adalah melalui program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Bagi Komite Pemantau Tata Kelola Terintegrasi, pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam memberikan rekomendasi yang tepat kepada Dewan Komisaris terkait pengelolaan bisnis Perusahaan.

Berikut adalah rincian tentang program peningkatan kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024:

regarding weaknesses in the system and implementation of the integrated compliance function.

9. Execute other duties assigned by the Board of Commissioners in accordance with the provisions of laws and regulations.

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to continuously enhancing the quality of its human capital to ensure it remains reliable and competitive. One of the tangible measures in realizing this commitment is the implementation of a comprehensive competency development program for all employees. Specifically for the Integrated Governance Oversight Committee, the program aims to update their knowledge and skills in carrying out the oversight function - particularly in providing appropriate recommendations to the Board of Commissioners regarding the management of the Company's business.

The following are the details of the Integrated Governance Committee competency improvement program undertaken throughout 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
Krisna Wijaya	Ketua Chairman	Seminar	Seminar Nasional Bertumbuh Dalam Pengaturan UU P2SK National Seminar: Growing Within the Regulation of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law)	06 Maret 2024 March 6, 2024	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Indonesian Finance Services Association (APPI)
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	Riskhub International Webinar: ESG Integration in Risk Management: A Practical Exploration	13 Maret 2024 March 13, 2024	ERMA x IRMAPA x Marsh x CRMS x LSP MKS
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	Sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN RI Guna Optimalisasi Pengelolaan BUMN Synergy Between the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and the Ministry of State-Owned Enterprises to Optimize SOE Management	16 Mei 2024 March 16, 2024	Universitas Jenderal Soedirman Jenderal Soedirman University
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	Riskhub International Webinar: Based on ISO 23894 & ISO 42001: Proactive Approaches for Sustainable Innovation	12 Juni 2024 June 12, 2024	ERMA x IRMAPA x Marsh x CRMS x LSP MKS
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Pelatihan (Benchmark) Training (Benchmark)	International Benchmarking Visit To United Kingdom	24 Oktober – 02 November 2024 October 24 – November 2, 2024	LPPI
		Seminar	Resilient Leadership: ESG, AI, and GRC in Modern Risk Governance	04 Desember 2024 December 4, 2024	ERMA x CRMS x LSP MKS
		Seminar	Risk Beyond 2024 : Sustainable Symphony: Echoes of Change	05-06 Desember 2024 December 5 – 6, 2024	ERMA

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
Muhammad Muchlas Rowi	Anggota Member	Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024 Economic and Financial Outlook in 2024	22 Februari 2024 February 22, 2024	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	Artificial Intelligence Changes the Face of Financial Sector	07 Maret 2024 March 7, 2024	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/ Online Seminar	Strategi Pengembangan SJK melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Conduct Financial Services Development Strategy through Strengthening Islamic Banking and Market Conduct	13 Maret 2024 March 13, 2024	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	15 Mei 2024 May 15, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	11 Juni 2024 June 11, 2024	OJK Institute
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan The Role of Innovative Credit Scoring (ICS) in Improving Access to Funding	27 Juni 2024 June 27, 2024	27 Juni 2024 June 27, 2024
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Seminar	Seminar Ai4: "The Forefront of Artificial Intelligence Innovation" Ai4 Seminar: "The Forefront of Artificial Intelligence Innovation"	10-16 Agustus 2024 August 10-16, 2024	Fora Group
Hernita Alius	Anggota Member	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Data for Executive Decision Making	08-13 September 2024 September 8 - 13, 2024	University of Queensland
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
Edy Utomo	Anggota Member	Sertifikasi Profesi Professional Certification	Sertifikasi Penjaminan: Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Guarantee Certification: Guarantee Monitoring Subdivision	31 Desember 2024 December 31, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan Guarantee Professional Certification Institute
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	November 2024	Global Integrated Risk Management Association (GIRMA)

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
Abdul Aziem	Anggota Member	Pelatihan Training	Kajian Kitab Ramadhan 'Tafsir Ayat Ekonomi' Ramadan Book Study on 'Tafsir Ayat Ekonomi'	12 Maret 2024 – 6 April 2024 March 12, 2024 – April 6, 2024	Basyarnas MUI x Abqory Sharia
		Webinar/ Seminar Online Webinar/Online Seminar	Sharia Economic Webinar Series 31: "Eksistensi Basyarnas MUI Pasca UU P2SK dan POJK No. 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" Sharia Economic Webinar Series 31: "The Existence of Basyarnas MUI After the P2SK Law and POJK No. 61 of 2020 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector"	29 Maret 2024 March 29, 2024	DSN MUI x Abqory Sharia x ELSMIT
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Seminar	Seminar Nasional Kepailitan Syariah "Quo Vadis Kepailitan Ekonomi Syariah" National Seminar on Islamic Bankruptcy - "Quo Vadis Bankruptcy in Islamic Economics"	18 Oktober 2024 October 18, 2024	Himpunan Ilmuwan & Sarjana Syariah Indonesia (MPN-HISSI) Association of Sharia Scholars and Academics of Indonesia (MPN-HISSI)
		Seminar	Seminar Nasional "Kedudukan Manfaat Polis Asuransi Syariah Dalam Boedel Waris (Tirkah)" National Seminar regarding "The Position of Sharia Insurance Policy Benefits in the Inheritance Boedel (Tirkah)"	11 Oktober 2024 October 11, 2024	Himpunan Ilmuwan & Sarjana Syariah Indonesia (MPN-HISSI) Association of Sharia Scholars and Academics of Indonesia (MPN-HISSI)
		Pelatihan Training	Bimbingan Teknis Pengelolaan Zakat dengan Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat Technical Guidance on Zakat Management with Level 3 Qualification in Zakat Management Sector	23 Oktober 2024 October 23, 2024	Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) Association of Zakat Management Organizations (POROZ)
		Workshop	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah IX Tahun 2024 Pre-Ijtima' Sanawi Workshop of Sharia Supervisory Board IX of 2024	24 September 2024 September 24, 2024	Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Daily Executive Board of the national Sharia Council – Indonesian Ulema Council
		Seminar	Ijtima' Sanawi (annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah XX Tahun 2024 Ijtima' Sanawi (annual Meeting) of the Sharia Supervisory Board for 2024	29 Oktober 2024 October 29, 2024	Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Daily Executive Board of the national Sharia Council – Indonesian Ulema Council
		Pelatihan Training	Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Ujian Profesional Tata Kelola Bersertifikat Education and Training program for the Certified Governance Professional Exam Preparation	3-5 Desember 2024 December 3 – 5, 2024	PPA&K x LPK MKS

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
Fahrul Ismaeni	Anggota Member	Seminar	How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 Mei 2024 May 16, 2024	OJK
		Seminar	Strategi Pemasaran Digital di Era Digital: Taktik dan Langkah Efektif Mencetak Profit Optimal Digital Marketing Strategy in the Digital Age: Effective Tactics and Measures to Make Optimal Profits	5 Juni 2024 June 5, 2024	OJK
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Program Of Training Scheme Material Bank Risk Management Qualification 4 Certification	10-11 Juli 2024 July 10 – 11, 2024	PT Efektifpro Knowledge Source
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Manajemen Risiko Perbankan Banking Risk Management	26 Agustus 2024 August 26, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan Banking Professional Certification Institute
Mas Dharmawan Suryadi	Anggota Member	Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Certified Risk Management Professional	31 Oktober 2024 October 31, 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Risk Management Professional Certification Institute
Lando Simatupang	Anggota Member	Pelatihan Training	Pembekalan Sertifikasi Komite Audit Audit Committee Certification Debriefing	23-25 Januari 2024 January 23 – 25, 2024	IKAI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management	26 Juli 2024 July 26, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Peran Strategis Komite Audit Dalam Mewujudkan Ranah Siber Yang Aman The Strategic Role of Audit Committee in Realizing a Secure Cyberspace	1 Agustus 2024 August 1, 2024	IKAI
		Pelatihan Training	Executive Refreshment For Top Level Management (Series 2)	13 September 2024 September 13, 2024	LPPI
		Pelatihan Training	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 (J4) Level 4 (J4) Risk Management Certification Debriefing	3-4 Oktober 2024 October 3 – 4, 2024	Lentera Mulia Persada
		Pelatihan Training	Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 5 (J5) Level 5 (J5) Risk Management Certification Debriefing	7 Oktober 2024 October 7, 2024	Lentera Mulia Persada
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Certified Risk Professional in Public Sector (CRPP)	12 Januari 2024 January 12, 2024	BNSP
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Certification in Audit Committee Practices (CACP)	29 Februari 2024 February 29, 2024	IKAI
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	25 Nopember 2024 November 25, 2024	BNSP

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
Lando Simatupang	Anggota Member	Sertifikasi Profesi Professional Certification	Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 4 Qualification in Banking Risk Management	14 Oktober 2024 October 14, 2024	BNSP
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 5 Qualification in Banking Risk Management	28 Oktober 2024 October 28, 2024	BNSP
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 6 Qualification in Banking Risk Management	4 Nopember 2024 November 4, 2024	BNSP
		Sertifikasi Profesi Professional Certification	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 7 Qualification in Banking Risk Management	18 Nopember 2024 November 18, 2024	BNSP

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat untuk mendukung tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan. Sepanjang tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan 3 (tiga) rapat. Informasi mengenai risalah rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disajikan dalam penjelasan berikut.

Integrated Governance Committee Meetings

The Integrated Governance Committee held meetings to support the duties of the Board of Commissioners in overseeing the the Company's management. In 2024, the Integrated Governance Committee convened a total of 3 (three) meetings. Details of meeting minutes and attendance of Integrated Governance Committee members are presented in the following section.

Risalah Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Minutes of the Integrated Governance Committee Meetings

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
April 2024 April 2024	Laporan Triwulan dan Rencana Kerja Semester I Tahun 2024
Mei 2024 Mei 2024	Proses Bisnis Hubungan Kelembagaan dan dukungan mencapai RKAP
Oktober 2024 Oktober 2024	Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan September 2024; dan Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025 Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan September 2024; dan Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Rapat

Recapitulation and Attendance Rate of the Integrated Governance Committee in Meetings

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Number of Absence	% Kehadiran Percentage of Attendance
Krisna Wijaya	3	3	0	100%
Muhammad Muchlas Rowi	3	3	0	100%
Hernita Alius	3	3	0	100%
Edy Utomo	3	3	0	100%
Abdul Aziem	3	3	0	100%
Fahrul Ismaeni	3	3	0	100%
Mas Dharmawan Suryadi	3	3	0	100%
Lando Simatupang	3	3	0	100%
Rata-rata Average				100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi 2024

Sepanjang tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan berbagai tugas yang diamanahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan realisasi sebagai berikut:
 - a. Bulan April 2024: membahas tentang Laporan Triwulan dan Rencana Kerja Semester I Tahun 2024
 - b. Bulan Mei 2024: membahas tentang Proses Bisnis Hubungan Kelembagaan dan dukungan mencapai RKAP.
 - c. Bulan Oktober 2024: membahas tentang Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan September 2024; dan Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025
2. Menyiapkan telaahan/analisa dan bahan terkait kinerja bulanan, perkembangan kondisi dan masalah aktual serta isu strategis yang terjadi pada perusahaan, serta mengikuti rapat Dewan Komisaris
 - a. Januari 2024: membahas tentang Review Kebijakan/Peraturan Internal Perusahaan.
 - b. Februari 2024: membahas tentang Evaluasi Tingkat Kesehatan Korporasi dan Konsolidasi.
 - c. Maret 2024: membahas tentang Analisa Tingkat Kesehatan Korporasi.
 - d. Mei 2024: membahas tentang Kinerja dan Capaian RKAP serta Aspek Tata Kelola.
 - e. Juli 2024: membahas tentang Laporan Tata Kelola (Jamkrindo dan Jamkrindo Syariah) Tahun 2022-2023; Profil Risiko Konsolidasi per Juni 2024; Revisi RKAP, Tata Kelola, & Mitigasi Risiko Semester 2.
 - f. September 2024: membahas tentang Kinerja Keuangan dan KPI.
 - g. November 2024: membahas tentang Risiko, Tata Kelola, dan Tingkat Kesehatan.
3. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Komisaris ke lapangan/unit kerja di daerah. Sampai dengan periode akhir tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengikuti Kunjungan kerja Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Kantor Wilayah IV Bandung dan mitra bisnis Perbankan pada tanggal 26 April 2024.
 - b. Kantor Wilayah V Semarang dan mitra bisnis Perbankan pada tanggal 31 Mei 2024.
 - c. Kantor Wilayah Surabaya dan mitra bisnis Perbankan pada tanggal 15 November 2024.

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa komponen penghasilan bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan. Sebagai bagian dari upaya transparansi, berikut ini disampaikan informasi mengenai remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi di luar Dewan Komisaris untuk tahun 2024.

Brief Report on the Implementation of the 2024 Integrated Governance Committee Work Program

In 2023, the Integrated Governance Committee has performed various duties mandated by applicable regulations. The activities that have been carried out are listed below:

1. Holding Integrated Governance Committee meetings with the following realization:
 - a. April 2024: discussed the Quarterly Report and Work Plan for the 1st Semester of 2024
 - b. May 2024: discussed the Institutional Relationship Business Process and support to achieve RKAP targets
 - c. October 2024: discussed the Integrated Governance Committee until September 2024, and Integrated Governance Committee Work Plan for 2025.
2. Prepare reviews/analysis and related materials to monthly performance, developments in conditions and actual problems, as well as strategic issues occurring in the Company, as well as attending Board of Commissioners meetings.
 - a. January 2024: discussed the Review of the Company's Internal Policies/Regulations.
 - b. February 2024: discussed the Corporate Soundness Level Evaluation and Consolidation.
 - c. March 2024: discussed the Corporate Soundness Level Analysis.
 - d. May 2024: discussed the Performance and Achievement of RKAP and Governance Aspects.
 - e. July 2024: discussed the 2022-2023 Governance Report (Jamkrindo and Jamkrindo Syariah); Consolidated Risk Profile as of June 2024; Revised RKAP, Governance, & the 2nd Semester of Risk Mitigation.
 - f. September 2024: discussed Financial Performance and KPIs.
 - g. November 2024: discussed Risk, Governance, and Soundness Level.
3. Assist the Board of Commissioners' visit to the field/work units in the regions. Until the end of 2024, the Integrated Governance Committee has participated in the working visit of the Board of Commissioners, namely:
 - a. Bandung Region IV Office and Banking business partners on April 26, 2024.
 - b. Semarang Region V Office and Banking business partners on May 31, 2024.
 - c. Surabaya Regional Office and Banking business partners on November 15, 2024.

Remuneration Policy for the Integrated Governance Committee

In accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises, the remuneration of the Integrated Governance Committee is set at 20% of the salary of the President Director of the Company. As part of the Company's commitment to transparency, the following details outline the 2024 remuneration of the Integrated Governance Committee, not including the Board of Commissioners.

Nama Name	Periode Menjabat Tenure	Honorarium per Bulan Honorarium for Each Month (Rp) (IDR)	Tunjangan Transportasi Transportation Benefits (Rp) (IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Total Honorarium and Benefits for Each Month (Rp) (IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun Total Honorarium and Benefits for 1 Year (Rp) (IDR)	Tantiem Bonuses (Rp) (IDR)	Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024 (Rp) (IDR)
Edy Utomo	Januari-Desember January-December	42.400.000	-	42.400.000	508.800.000	-	508.800.000
Abdul Aziem	Januari-Desember January-December	42.400.000	-	42.400.000	508.800.000	-	508.800.000
Fahrul Ismaeni	Januari-Desember January-December	42.400.000	-	42.400.000	508.800.000	-	508.800.000

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Untuk mendukung kinerja Direksi dalam pengelolaan dan pengurusan Perusahaan, dibentuk sejumlah unit satuan kerja independen di luar struktur Direktorat. Pembentukan unit satuan kerja ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta dirancang untuk memberikan masukan strategis yang mendukung efektivitas Direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya.

To support the Board of Directors in managing the Company, several independent work units were established outside the Directorate structure. These units were formed in compliance with the applicable laws and regulations and are designed to provide strategic input, enhancing the Board's effectiveness in fulfilling its duties.



Komite Direksi

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan secara efektif, Direksi didukung oleh berbagai organ pendukung, baik dalam bentuk struktural maupun nonstruktural. Organ struktural meliputi Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, dan Fungsi Manajemen Risiko. Sementara itu, dukungan nonstruktural berasal dari komite-komite yang menangani bidang-bidang tertentu. Hingga 31 Desember 2024, terdapat 4 (empat) komite yang berperan sebagai pendukung kinerja Direksi, yaitu Komite Penjaminan, Klaim, dan Subrogasi; Komite ALMA; Komite Investasi; serta Komite Manajemen Risiko.

Komite Bisnis Penjaminan

Komite Bisnis Penjaminan dibentuk sesuai dengan Surat Edaran Nomor 17/SE/2/I/2022 mengenai Pengaturan Komite Penjaminan, Klaim, dan Subrogasi. Komite ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan kesesuaian, konsistensi, kepatuhan pada langkah-langkah yang ditentukan agar meminimalkan risiko terkait pelaksanaan komite penjaminan, klaim, dan subrogasi perusahaan berdasarkan regulasi dan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Menyediakan standar pelaksanaan komite penjaminan, klaim dan subrogasi perusahaan agar terjadi proses yang efektif dan efisien;
3. Mempermudah pengawasan atas pelaksanaan komite penjaminan, klaim dan subrogasi perusahaan.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Bisnis Penjaminan

Berikut ini adalah struktur dan susunan keanggotaan komite Bisnis Penjaminan:

The Board of Directors Committee

To ensure the effective implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by various structural and non-structural organs. Structural support organs include the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Risk Management Function. While the nonstructural supporting organs are provided through specialized committees. As of December 31, 2024, four committees support the Board of Directors: the Guarantee, Claims and Subrogation Committee; ALMA Committee; Investment Committee; and Risk Management Committee.

Guarantee Business Committee

The Guarantee Business Committee was established in accordance with Circular Letter No. 17/SE/2/I/2022 concerning the Arrangements of the Guarantee, Claims, and Subrogation Committee. This committee's objectives are:

1. To ensure alignment, consistency, and compliance with established measures to mitigate risks in the Company's guarantee, claims, and subrogation activities in accordance with the regulations and Good Corporate Governance principles;
2. To establish implementation standards for the Company's guarantee, claims, and subrogation processes to ensure effectiveness and efficiency;
3. To enable effective monitoring of the Company's guarantee, claims, and subrogation activities.

Membership Structure and Composition of the Guarantee Business Committee

The following is the membership structure and composition of the Guarantee Business Committee:

Posisi di Komite Position on the Committee	Jabatan di Perusahaan Position in the Company
Pemutus Decision-Maker	Direktur Utama President Director
Pemutus Decision-Maker	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business
Pemutus Decision-Maker	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network
Pemutus Decision-Maker	Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of Human Capital Management (HCM), General affairs, and Risk
Pemutus Decision-Maker	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment
Pemutus Decision-Maker	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional and Services
Pemrakarsa Initiator	Kepala Divisi Bisnis terkait Head of Relevant Business Division
Pemrakarsa Initiator	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division
Pemrakarsa Initiator	Pemimpin Wilayah / Pemimpin Kantor Cabang Khusus Jakarta Regional Head / Head of Special Branch Office in Jakarta
Pemrakarsa Initiator	Wakil Pemimpin Wilayah (Apabila Ada) Deputy Regional Leader (If Applicable)
Pemrakarsa Initiator	Kepala Bagian Bisnis Kantor Wilayah Head of the Regional Office Business Division
Pemrakarsa Initiator	Pemimpin Cabang Head of Branch
Pemrakarsa Initiator	Manajer Bisnis Cabang Branch Business Manager
Pemrakarsa Initiator	RM Kantor Cabang Branch Relationship Manager

Pedoman Kerja Komite Bisnis Penjaminan

Komite Bisnis Penjaminan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berlandaskan pada Peraturan Direksi nomor: 11/Per-Dir/5/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 Tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor 05/Per-Dir/5/III/2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Administrasi Dan Kebijakan dan Surat Edaran Direksi nomor: 28/SE/2/XI/2024 tanggal 04 November 2024 Tentang Prosedur Keputusan Penjaminan Case By Case Dan Perjanjian Penjaminan serta memiliki fungsi berupa Pemrakarsa dan Pemutus

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Bisnis Penjaminan

Mengacu pada Surat Edaran Direksi nomor: 28/SE/2/XI/2024 tanggal 04 November 2024 Tentang Prosedur Keputusan Penjaminan Case By Case Dan Perjanjian Penjaminan, berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Bisnis Penjaminan:

1. Tugas dan wewenang Pemrakarsa Bisnis
 - a. Menerima pengajuan Penjaminan tertulis dari calon Terjamin/Penerima Jaminan

Work Guidelines for the Guarantee Business Committee

The Guarantee Business Committee performs its duties and responsibilities in accordance with the Board of Directors Regulation No. 11/Per-Dir/5/VI/2024 dated June 21, 2024, which amends Regulation No. 05/Per-Dir/5/III/2024 regarding the Delegation of Administrative Authority, as well as the Board of Directors' Circular Letter No. 28/SE/2/XI/2024 dated November 4, 2024, concerning Procedures for Case-by-Case Guarantee Decisions and Guarantee Agreements. The Committee functions as both initiator and decision-maker in these processes.

Duties and Responsibilities of the Guarantee Business Committee

Referring to the Board of Directors' Circular Letter No. 28/SE/2/XI/2024 dated November 4, 2024, regarding Procedures for Case-by-Case Guarantee Decisions and Guarantee Agreements, the Guarantee Business Committee performs the following duties and responsibilities:

1. Duties and Authorities of the Business Initiator
 - a. Receiving written guarantee applications from prospective Guaranteed Parties/Guarantee Recipients

b. Melakukan analisa dan verifikasi pengajuan Penjaminan c. Menyusun dan menandatangani MAP d. Menyusun dan mengarsipkan PTP setelah ditandatangani oleh Pemutus bisnis dan Pemutus risiko e. Mengajukan pengajuan penyusunan MARP yang disertai dengan checklist dokumen Penjaminan, MAP, dan dokumen lainnya kepada Pemrakarsa Risiko apabila terdapat kenaikan tingkat kewenangan keputusan Penjaminan f. Menerima dan mengarsipkan MARP dari Pemrakarsa risiko g. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk komite keputusan penjaminan h. Meneruskan dokumen yang diperlukan apabila terdapat keputusan yang membutuhkan kewenangan naik tingkat keputusan Penjaminan i. Menjadwalkan dan menyampaikan agenda untuk komite keputusan Penjaminan j. Ikut serta dalam komite keputusan Penjaminan k. Menyusun dan menyerahkan SKP kepada Terjamin l. Menyusun dan menyerahkan Perjanjian Penjaminan kepada Terjamin m. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang telah dituangkan di dalam MAP berdasarkan dokumen penjaminan	b. Conducting analysis and verification of the guarantee application c. Preparing and signing the Guarantee Analysis Memorandum (MAP) d. Preparing and archiving the Technical Guarantee Request (PTP) after it has been signed by the Business Approver and Risk Approver e. Submitting a proposal for the preparation of the Initial Guarantee Risk Mitigation Plan (MARP) accompanied by a checklist of Guarantee documents, MAP, and other documents to the Risk Initiator in the event of an increase in the level of authority for Guarantee decisions f. Receiving and archiving the MARP from the Risk Initiator g. Preparing the necessary documents for the Guarantee Decision Committee h. Forwarding the necessary documents if a decision requires escalation to a higher level of Guarantee approval authority i. Scheduling and presenting the agenda for the Guarantee Decision Committee j. Participating in the Guarantee Decision Committee k. Preparing and submitting the Guarantee Decision Letter (SKP) to the Guaranteed Party l. Preparing and delivering the Guarantee Agreement to the Guaranteed Party m. Be responsible for the accuracy and validity of the data presented in the MAP based on the guarantee documents
-
2. Tugas dan wewenang Pemutus bisnis a. Bertindak sebagai pengarah komite keputusan Penjaminan b. Memutus komite sesuai dengan kewenangannya c. Menandatangani PTP	2. Duties and Authorities of the Business Decision-maker a. Act as the chairperson of the Guarantee Decision Committee b. Make decisions in the committee within their authority c. Sign the PTP

Rapat Komite Bisnis Penjaminan

Sepanjang tahun 2024, Komite Bisnis Penjaminan telah menggelar rapat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut

Guarantee Business Committee Meeting

Throughout 2024, the Guarantee Business Committee has held a total of 39 (thirty-nine) meetings with the following attendance rate and meeting agenda:

Risalah Rapat Komite Bisnis Penjaminan
Minutes of the Guarantee Business Committee Meetings

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
2 Feb 2024 February 2, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. Kasada Meta Terra Guarantee Decision Committee of PT. Kasada Meta Terra
12 Feb 2024 February 12, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Kilau Permata Guarantee Decision Committee of PT Kilau Permata
13 Feb 2024 February 13, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Puja Cahaya Sejati Guarantee Decision Committee of PT Puja Cahaya Sejati
16 Feb 2024 February 16, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. Maju Bersama Jaya Guarantee Decision Committee of PT. Maju Bersama Jaya
23 Feb 2024 February 23, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Rori Madaco Pratama Guarantee Decision Committee of PT Rori Madaco Pratama
27 Feb 2024 February 27, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Nagitec Guarantee Decision Committee of PT Nagitec
28 Feb 2024 February 28, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Karyasembada Ciptamandiri Guarantee Decision Committee of PT Karyasembada Ciptamandiri
6 Mar 2024 March 6, 2024	Komite Putusan Penjaminan an CV Sumber Lancar Guarantee Decision Committee of CV Sumber Lancar

Risalah Rapat Komite Bisnis Penjaminan

Minutes of the Guarantee Business Committee Meetings

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
21 Mar 2024 March 21, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. CITRATHIRZA ASTARIJAYA Guarantee Decision Committee of PT. CITRATHIRZA ASTARIJAYA
26 Mar 2024 March 26, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Satkomindo Mediyasa Guarantee Decision Committee of PT Satkomindo Mediyasa
26 Mar 2024 March 26, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Granada Indo Spekta Guarantee Decision Committee of PT Granada Indo Spekta
26 Mar 2024 March 26, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Oktopus Sari Logia Guarantee Decision Committee of PT Oktopus Sari Logia
27 Mar 2024 March 27, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. RIDHO AGUNG MITRA ABADI Guarantee Decision Committee of PT. RIDHO AGUNG MITRA ABADI
1 Apr 2024 April 1, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Satkomindo Mediyasa Guarantee Decision Committee of PT Satkomindo Mediyasa
22 Apr 2024 April 22, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. Citrathirza Astarijaya Guarantee Decision Committee of PT. Citrathirza Astarijaya
1 Apr 2024 April 1, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. JUWITA SAMUDRA KENCANA Guarantee Decision Committee of PT. JUWITA SAMUDRA KENCANA
1 Apr 2024 April 1, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. JATAYU PERKASA INDONESIA Guarantee Decision Committee of PT. JATAYU PERKASA INDONESIA
1 Apr 2024 April 1, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Abadi Prima Inti Karya Guarantee Decision Committee of PT Abadi Prima Inti Karya
16 Apr 2024 April 16, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Bina Kaili Guarantee Decision Committee of PT Bina Kaili
18 Apr 2024 April 18, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT KARYASEMBADA CIPTAMANDIRI Guarantee Decision Committee of PT KARYASEMBADA CIPTAMANDIRI
18 Apr 2024 April 18, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. Tabel Aero Pratama Guarantee Decision Committee of PT. Tabel Aero Pratama
22 Apr 2024 April 22, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT MULTI INDO SENTOSA Guarantee Decision Committee of PT MULTI INDO SENTOSA
18 Apr 2024 April 18, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT KIRANA CAKRA NANGGALA Guarantee Decision Committee of PT KIRANA CAKRA NANGGALA
22 Apr 2024 April 22, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. RIDHO AGUNG MITRA ABADI Guarantee Decision Committee of PT. RIDHO AGUNG MITRA ABADI
22 Apr 2024 April 22, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI Guarantee Decision Committee of PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI
26 Apr 2024 April 26, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. Kirana Cakra Nanggala Guarantee Decision Committee of PT. Kirana Cakra Nanggala
29 Apr 2024 April 29, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. Bhumi Phala Perkasa Guarantee Decision Committee of PT. Bhumi Phala Perkasa
8 May 2024 May 8, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. Kirana Cakra Nanggala Guarantee Decision Committee of PT. Kirana Cakra Nanggala
13 May 2024 May 13, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Agravana Nugraha Katara Guarantee Decision Committee of PT Agravana Nugraha Katara
16 May 2024 May 16, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Daha Cendana Asia Jaya Guarantee Decision Committee of PT Daha Cendana Asia Jaya
30 May 2024 May 30, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Pamitra Jaya Konstruksi Guarantee Decision Committee of PT Pamitra Jaya Konstruksi
17 May 2024 May 17, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. DAHA CENDANA ASIA JAYA Guarantee Decision Committee of PT. DAHA CENDANA ASIA JAYA
17 May 2024 May 17, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. DAHA CENDANA ASIA JAYA Guarantee Decision Committee of PT. DAHA CENDANA ASIA JAYA
28 May 2024 May 28, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Airkita Sejahtera Indonesia Guarantee Decision Committee of PT Airkita Sejahtera Indonesia
28 May 2024 May 28, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. Tirta Indo Sentosa Guarantee Decision Committee of PT. Tirta Indo Sentosa
19 Jun 2024 June 19, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT PANORAMA GRAHA TEKNOLOGI Guarantee Decision Committee of PT PANORAMA GRAHA TEKNOLOGI
28 Aug 202 August 28, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Duta Hita Jaya Guarantee Decision Committee of PT Duta Hita Jaya
18 Oct 2024 October 18, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT Duta Hita Jaya Guarantee Decision Committee of PT Duta Hita Jaya
24 Oct 2024 October 24, 2024	Komite Putusan Penjaminan an PT. TEKNOLOGY CIPTA KARYA Guarantee Decision Committee of PT. TEKNOLOGY CIPTA KARYA

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Bisnis Penjaminan dalam Rapat

Recapitulation and Attendance Rate of the Guarantee Business Committee in Meetings

Komite Bisnis Penjaminan Guarantee Business Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Number of Absence	% Kehadiran Percentage of Attendance
Seluruh Anggota Komite Bisnis Penjaminan All Members of the Guarantee Business Committee	39	39	0	100%

Laporan Singkat Tugas Pelaksanaan Komite Bisnis Penjaminan

Sepanjang tahun 2024, Komite Bisnis Penjaminan telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, antara lain:

- Melakukan analisa dan verifikasi pengajuan Penjaminan
- Menyusun dan menandatangani MAP
- Menyusun dan mengarsipkan PTP setelah ditandatangani oleh Pemutus bisnis dan Pemutus risiko
- Mengajukan pengajuan penyusunan MARP yang disertai dengan checklist dokumen Penjaminan, MAP, dan dokumen lainnya kepada Pemrakarsa Risiko apabila terdapat kenaikan tingkat kewenangan keputusan Penjaminan
- Menerima dan mengarsipkan MARP dari Pemrakarsa risiko
- Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk komite keputusan penjaminan
- Menjadwalkan dan menyampaikan agenda untuk komite keputusan Penjaminan
- Ikut serta dalam komite keputusan Penjaminan
- Bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang telah dituangkan di dalam MAP berdasarkan dokumen penjaminan
- Memberikan Putusan Komite Penjaminan
- Melakukan Monitoring atas Putusan Komite Penjaminan

Komite Aset dan Liabilitas Manajemen

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 33/Per-Dir/5/XII/2024, Komite Aset dan Liabilitas Manajemen (ALMA) dibentuk dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif dan efisien. Komite ini memiliki tanggung jawab utama, antara lain:

- Menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan aset, liabilitas, dan modal yang optimal dengan memperhatikan keuntungan, efisiensi biaya, dan tingkat risiko;
- Mengelola kesenjangan likuiditas serta kesenjangan jatuh tempo antara aset dan liabilitas, sehingga Perusahaan terhindar dari default;
- Mengevaluasi kinerja kegiatan bisnis penjaminan yang dilakukan oleh Perusahaan;
- Mengevaluasi profitabilitas produk penjaminan yang dilakukan oleh Perusahaan;
- Mengevaluasi pengelolaan portofolio investasi yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
- Menjaga tingkat kesehatan keuangan Perusahaan dengan mengelola rasio keuangan.

Brief Report on the Implementation of the Guarantee Business Committee Duties

Throughout 2024, the Guarantee Business Committee conducted various activities in accordance with its roles and responsibilities as detailed below:

- Conducting analysis and verification of the guarantee application
- Preparing and signing the MAP
- Preparing and archiving the PTP after it has been signed by the Business Approver and Risk Approver
- Submitting a proposal for the preparation of the MARP accompanied by a checklist of Guarantee documents, MAP, and other documents to the Risk Initiator in the event of an increase in the level of authority for Guarantee decisions
- Receiving and archive the MARP from the Risk Initiator
- Preparing the necessary documents for the Guarantee Decision Committee
- Scheduling and present the agenda for the Guarantee Decision Committee
- Participating in the Guarantee Decision Committee
- Be responsible for the accuracy and validity of the data presented in the MAP based on the guarantee documents
- Providing decisions on behalf of the Guarantee Committee
- Monitoring the Decisions of the Guarantee Committee

Asset and Liability Management Committee

In accordance with the Board of Directors Regulation Number 33/Per-Dir/5/XII/2024, the Asset and Liability Management Committee (ALMA) is established with the purpose of ensuring effective and efficient management of assets and liabilities. This committee has the primary responsibilities as detailed below:

- Establishing strategies and policies for optimal management of assets, liabilities, and capital by taking into account profitability, cost efficiency, and risk levels;
- Managing liquidity gaps and maturity mismatches between assets and liabilities to prevent the Company from defaulting;
- Evaluating the performance of the Company's guarantee business activities;
- Evaluating the profitability of the guarantee products offered by the Company;
- Evaluating the management of the Company's investment portfolio; and
- Maintaining the Company's financial soundness by managing financial ratios.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas Manajemen (ALMA)

Berikut ini adalah struktur dan susunan keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas Manajemen:

Composition of the Asset and Liability Management (ALMA) Committee

Structure and membership of the Asset and Liability Management Committee:

Posisi di Komite Position in the Committee	Jabatan di Perusahaan Position in the Company
Ketua Chairperson	Direktur Utama President Director
Wakil Ketua Deputy Chairperson	Direktur yang membidangi keuangan Director in charge of finance
Sekretaris ALMA ALMA Secretary	Kepala Divisi yang membidangi keuangan Head of Division in charge of finance
Anggota Member	Seluruh anggota Direksi All members of the Board of Directors
	Senior Executive Vice President (SEVP)
	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
	Kepala Divisi terkait sesuai dengan topik pembahasan Head of Division related to the topic of discussion
Satuan Kerja Komite ALMA ALMA Committee Working Unit	Divisi yang membidangi keuangan Division in charge of finance
	Divisi yang membidangi investasi Division in charge of investment
	Divisi yang membidangi teknik Division in charge of technical
	Divisi yang membidangi aktuarial Division in charge of actuarial
	Divisi yang membidangi akuntansi Division in charge of accounting
	Divisi yang membidangi portofolio penjaminan Division in charge of the guarantee portfolio
	Divisi yang membidangi analisis potensi produk penjaminan Division in charge of analyzing the potential of guarantee products
	Divisi yang membidangi klaim Division in charge of claims
	Divisi yang membidangi subrogasi Division in charge of subrogation
	Divisi yang membidangi strategi Perusahaan Division in charge of Corporate strategy

Pedoman Kerja Komite Aset dan Liabilitas Manajemen (ALMA)

Komite Aset dan Liabilitas Manajemen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berlandaskan pada Peraturan Direksi Nomor 33/Per-Dir/5/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Komite Aset dan Liabilitas Manajemen, serta memiliki fungsi utama berupa pengelolaan, monitoring, dan evaluasi aset dan liabilitas Perusahaan.

Work Guidelines of the Asset and Liability Management (ALMA) Committee

The Asset and Liability Management Committee fulfills its duties and responsibilities in compliance with the Board of Directors Regulation Number 33/Per-Dir/5/XII/2024 dated December 31, 2024, concerning the Asset and Liability Management Committee, which has the primary functions of managing, monitoring, and evaluating the Company's assets and liabilities.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Aset dan Liabilitas Manajemen (ALMA)

Berdasarkan pada Peraturan Direksi Nomor 33/Per-Dir/5/XII/2024, berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Aset dan Liabilitas Manajemen:

1. Menyusun kebijakan dan strategi pengembangan aset dan liabilitas manajemen;

Duties and Responsibilities of the Asset and Liability Management (ALMA) Committee

Based on Board Regulation Number 33/Per-Dir/5/XII/2024, the following are the duties and responsibilities entrusted to the Asset and Liability Management Committee:

1. Formulate policies and strategies for the development of asset and liability management;

2. Melakukan analisis tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan data rasio keuangan yang telah ditetapkan oleh regulator dan stakeholders;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan aset meliputi pertumbuhan, yield, nominal, komposisi dan maturity profile serta liquidity profile dengan memperhatikan target yang telah ditetapkan Perusahaan; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan liabilitas dengan memantau pertumbuhan, jatuh tempo kewajiban, komposisi kewajiban yang disesuaikan dengan kondisi permodalan dan target yang telah ditetapkan.

2. Analyze the Company's soundness level based on financial ratio data determined by regulators and stakeholders;
3. Monitor and evaluate asset management, including growth, yield, nominal value, composition, maturity profile, and liquidity profile, while considering the targets determined by the Company; and
4. Monitor and evaluate liability management by tracking growth, maturity of obligations, and the composition of liabilities in accordance with capital conditions and the targets that have been set.

Rapat Komite Aset dan Liabilitas Manajemen (ALMA)

Sepanjang tahun 2024, Komite Aset dan Liabilitas Manajemen telah menggelar rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Asset and Liability Management (ALMA) Committee Meeting

In 2024, the Asset and Liability Management Committee has held a total of 2 (two) meetings with the following attendance rate and meeting agenda:

Risalah Rapat Komite Aset dan Liabilitas Manajemen Meeting Minutes of Asset and Liability Management Committee

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
12 Agustus 2024 August 12, 2024	Pembahasan Komite ALMA Triwulan II Tahun 2024 ALMA Committee Discussions for the Second Quarter of 2024
04 November 2024 November 4, 2024	Pembahasan Komite ALMA Triwulan III Tahun 2024 ALMA Committee Discussions for the Third Quarter of 2024

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Aset dan Liabilitas Manajemen dalam Rapat Recapitulation and Attendance of Asset and Liability Management Committee in Meetings

Komite Aset dan Liabilitas Manajemen Asset and Liability Management Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Number of Absence	% Kehadiran Percentage of Attendance
Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite ALMA dan sekurang-kurangnya 4 (empat) Direktur At least 2/3 (two-thirds) of the ALMA Committee Members and at least four (4) Directors	14	14	0	100%

Laporan Singkat Tugas Pelaksanaan Komite Aset dan Liabilitas Manajemen (ALMA)

Sepanjang tahun 2024, Komite Aset dan Liabilitas Manajemen telah menjalankan berbagai inisiatif strategis yang mencerminkan tugas dan tanggung jawabnya, mencakup:

1. Menyampaikan rekomendasi atas evaluasi produk penjaminan yang memiliki kontribusi profit pada Perusahaan.
2. Menyusun langkah-langkah prioritas dalam pemenuhan kebutuhan cash flows Perusahaan.
3. Memberikan usulan dalam mengatasi masalah yang dihadapi atas proses pengelolaan kewajiban Perusahaan.
4. Memberikan usulan mengenai rencana pengelolaan aset untuk menjaga likuiditas Perusahaan.

Brief Report on the Implementation of the Asset and Liability Management Committee (ALMA)

Throughout 2024, the Asset and Liability Management Committee has conducted various strategic initiatives reflecting its duties and responsibilities as detailed below:

1. Providing recommendations on the evaluation of guarantee products that contribute to the Company's profitability.
2. Developing priority measures to meet the Company's cash flow needs.
3. Providing suggestions to address issues encountered in the management of the Company's liabilities.
4. Providing suggestions on asset management plans to maintain the Company's liquidity.

Komite Investasi

Komite Investasi merupakan sebuah komite yang dibentuk untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan strategis terkait investasi keuangan. Pembentukan Komite Investasi didasarkan pada Peraturan Direksi Nomor 06/Per-Dir/5/II/2023, dengan fokus pada optimalisasi pengelolaan dana dan pencapaian hasil investasi yang maksimal.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Investasi

Berikut ini adalah struktur dan susunan keanggotaan Komite Investasi:

Posisi di Komite Position on the Committee	Jabatan di Perusahaan Position in the Company
Ketua Chairman	Direktur yang membawahi pengelolaan investasi Director in charge of investment management
Sekretaris merangkap Anggota Secretary and concurrent Member	Kepala Unit Kerja yang membawahi pengelolaan investasi Head of Work Unit in charge of investment management
Anggota Member	Direksi yang membawahi Aktuaris Perusahaan Director in charge of the Company's Actuarial
	Kepala Unit Kerja yang membawahi Manajemen Risiko Head of Work Unit in charge of Risk Management
	Kepala Unit Kerja yang membawahi Kepatuhan Head of Work Unit in charge of Compliance
	Kepala Unit Kerja yang membawahi Akuntansi Head of Work Unit in charge of Accounting
	Kepala Unit Kerja yang membawahi Aktuaris Perusahaan/Tenaga Ahli Perusahaan Head of the Work Unit in charge of Company's Actuarial/The Company's Expert Staff

Pedoman Kerja Komite Investasi

Komite Investasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berlandaskan pada Peraturan Direksi Nomor 06/Per-Dir/5/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Komite Investasi, serta memiliki fungsi utama membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategi investasi keuangan dan mengoptimalkan hasil pengelolaan investasi keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 06/Per-Dir/5/II/2023, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Investasi:

1. Melakukan review kinerja investasi dan strategi penempatan serta kebijakan investasi untuk triwulanan;
2. Menyusun usulan risk appetite, strategi dan kebijakan investasi tahunan, serta mengusulkan kepada Direksi dan Komite Investasi Holding;
3. Menyiapkan rekomendasi atas transaksi strategis sesuai dengan permintaan Direktur Utama; dan
4. Melaporkan pertanggungjawaban Komite Investasi kepada Direksi dan Komite Investasi Holding.

Investment Committee

The Investment Committee serves as an advisory body to support management in making financial investments strategic decisions. Established pursuant to the Board of Directors Regulation Number 06/Per-Dir/5/II/2023, the Committee is committed to focus on optimizing fund management and achieving maximum investment returns.

Membership Structure and Composition of the Investment Committee

The following is the membership structure and composition of the Investment Committee:

Work Guidelines for the Investment Committee

The Investment Committee performs its duties and responsibilities based on Board Regulation Number 06/Per-Dir/5/II/2023 dated February 27, 2023, concerning the Investment Committee. Its primary function is to assist management in making financial investment strategy decisions and optimizing the results of financial investment management.

Duties and Responsibilities of the Investment Committee

Based on Board Regulation Number 06/Per-Dir/5/II/2023, the duties and responsibilities of the Investment Committee include:

1. Conducting quarterly reviews of investment performance, placement strategies, and investment policies;
2. Developing proposals for risk appetite, annual investment strategies and policies, and submit them to the Board of Directors and the Holding Investment Committee;
3. Preparing recommendations on strategic transactions as requested by the President Director; and
4. Reporting the Investment Committee's accountability to the Board of Directors and the Holding Investment Committee.

Rapat Komite Investasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Investasi telah menggelar rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Investment Committee Meeting

In 2024, the Investment Committee has conducted a total of 6 (six) meetings with the following attendance rate and meeting agenda:

Risalah Rapat Komite Investasi Minutes of the Investment Committee Meetings

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
25 Januari 2024 January 25, 2024	Rencana Strategis Investasi 2024 2024 Strategic Investment Plan
15 Februari 2024 February 15, 2024	Usulan Pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Proposal for the Purchase of Sustainable Green Bonds
03 April 2024 April 3, 2024	Usulan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) Proposal for the Purchase of Government Securities (SBN)
18 Juli 2024 July 18, 2024	Usulan Pembelian SBN atas Pokok PMN PEN Tahun 2024 Proposal for the Purchase of Government Securities (SBN) for the 2024 PMN PEN Principal
01 Agustus 2024 August 1, 2024	Usulan Pembelian SBN Semester 2 Tahun 2024 Proposal for the Purchase of Government Securities (SBN) for the Second Semester of 2024
31 Desember 2024 December 31, 2024	Rencana Strategis Investasi Tahun 2025 2025 Strategic Investment Plan

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Investasi dalam Rapat Recapitulation and Attendance Rate of the Investment Committee in Meetings

Komite Investasi Investment Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Number of Absence	% Kehadiran Percentage of Attendance
Lebih dari 75% anggota More than 75% of members	7	7	0	100%

Laporan Singkat Tugas Pelaksanaan Komite Investasi

Selama tahun 2024, Komite Investasi telah menjalankan beragam aktivitas yang sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk:

1. Menyusun rencana strategis investasi untuk periode tahun 2024;
2. Menyampaikan usulan dan meminta persetujuan kepada Direktur Utama atas penempatan pada aset investasi yang menggunakan dana pokok Penanaman Modal Negara (PMN);
3. Menyampaikan rekomendasi pembelian aset investasi yang bersifat strategis dengan kewenangan Direktur Utama; dan
4. Menyusun rencana strategis investasi untuk periode tahun 2025.

Brief Report on the Implementation of the Investment Committee Duties

Throughout 2024, the Investment Committee performed various activities in line with its duties and responsibilities, as listed below:

1. Developing a strategic investment plan for the 2024 period;
2. Submitting proposals and seeking approval from the President Director for placement in investment assets that use the principal funds of State Equity Participation (PMN);
3. Submitting recommendations for the purchase of strategic investment assets under the authority of the President Director; and
4. Developing the strategic investment plan for the 2025 period.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko didirikan sesuai Peraturan Direksi Nomor 12/Per-Dir/5/IX/2021, berperan sebagai Komite yang bertugas untuk:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya, termasuk risk appetite dan risk tolerance, serta rencana kontingensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;

Risk Management Committee

The Risk Management Committee was established in accordance with the Board of Directors Regulation Number 12/Per-Dir/5/IX/2021, and serves as the committee responsible for:

1. Developing policies, strategies, and guidelines for risk management implementation, including any revisions, risk appetite and risk tolerance, as well as contingency plans to anticipate abnormal conditions;

2. Melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko;
3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal; dan
4. Memberikan kajian dan rekomendasi atas hasil identifikasi, evaluasi dan analisis usulan transaksi yang disampaikan oleh Unit Kerja

2. Implementing improvements and/or adjustments to risk management execution based on the evaluation results of risk management implementation;
3. Establishing matters related to business decisions that deviate from normal procedures; and
4. Providing reviews and recommendations on the results of identification, evaluation, and analysis of proposed transactions submitted by the Work Unit.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Berikut adalah susunan dan komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko:

Membership Structure and Composition of the Risk Management Committee

The following is the membership structure and composition of the Risk Management Committee:

Posisi di Komite Position on the Committee	Jabatan di Perusahaan Position in the Company
Ketua Chairperson	Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management
Anggota Tetap Permanent Member	1. Direktur Manajemen SDM, Umum dan Kepatuhan 2. Direktur Operasional dan Jaringan 3. Kepala Divisi Manajemen Risiko 1. Director of Human Capital Management (HCM), General affairs, and Risk 2. Director of Operations and Network 3. Head of Risk Management Division
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	1. Direktur Bisnis Penjaminan 2. SEVP TI 3. Sekretaris Perusahaan 4. Satuan Pengawasan Intern 5. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 6. Kepala Divisi Bisnis I 7. Kepala Divisi Bisnis II 8. Kepala Divisi Bisnis III 9. Kepala Divisi Analisis Bisnis 10. Kepala Divisi Teknik 11. Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi 12. Kepala Divisi Jaringan dan Layanan 13. Kepala Divisi Aktuaria 14. Kepala Divisi MSDM 15. Kepala Divisi Umum 16. Kepala Divisi Kepatuhan 17. Kepala Divisi Pengembangan TI 18. Kepala Divisi Operasional TI 19. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi 20. Kepala Divisi Akuntansi 1. Director of Guarantee Business 2. IT SEVP 3. Corporate Secretary 4. Internal Monitoring Unit 5. Head of Strategic Planning Division 6. Head of Business Division I 7. Head of Business Division II 8. Head of Business Division III 9. Head of Business Analysis Division 10. Head of Technical Division 11. Head of Claims and Subrogation Division 12. Head of Network and Services Division 13. Head of Actuarial Division 14. Head of HCM 15. Head of General Affairs Division 16. Head of Compliance Division 17. Head of IT Development Division 18. Head of IT Operations Division 19. Head of Finance and Investment Division 20. Head of Accounting Division

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berlandaskan pada 12/Per-Dir/5/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Komite Manajemen Risiko, serta memiliki fungsi utama berupa Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Mengacu pada 12/Per-Dir/5/IX/2021 tanggal 21 September 2021, berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Manajemen Risiko:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya, termasuk risk appetite dan risk tolerance, serta rencana kontingensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko;
3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal; dan
4. Memberikan kajian dan rekomendasi atas hasil identifikasi, evaluasi dan analisis usulan transaksi yang disampaikan oleh Unit Kerja.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah menggelar rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Work Guidelines for the Risk Management Committee

The Risk Management Committee conducts its duties and responsibilities based on Regulation of the Board of Directors Number 12/Per-Dir/5/IX/2021 dated September 21, 2021, concerning the Risk Management Committee, and has the primary function of conducting evaluations and providing recommendations to the President Director regarding risk management.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

In accordance to 12/Per-Dir/5/IX/2021 dated September 21, 2021, the following are duties and responsibilities of the Risk Management Committee:

1. Formulating risk management policies, strategies, and implementation guidelines, including any revisions, risk appetite and risk tolerance, as well as contingency plans to anticipate abnormal conditions;
2. Implementing improvements and/or adjustments to risk management practices based on the results of risk management performance evaluations;
3. Determining matters related to business decisions that deviate from normal procedures; and
4. Providing assessments and recommendations on the results of identification, evaluation, and analysis of proposed transactions submitted by the Work Unit.

Risk Management Committee Meeting

Throughout 2024, the Risk Management Committee has held a total of 4 (four) meetings with the following attendance rate and meeting agenda:

Risalah Rapat Komite Manajemen Risiko Minutes of the Risk Management Committee Meetings

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
5 Maret 2024 March 5, 2024	Penyampaian Profil Risiko Terintegrasi Triwulan IV Tahun 2023 Submission of the Integrated Risk Profile for the Fourth Quarter of 2023
3 Juni 2024 June 3, 2024	Penyampaian Laporan Contingency Plan PT Jamkrindo Submission of the Contingency Plan Report of PT Jamkrindo
3 Juli 2024 July 3, 2024	Penyampaian Laporan Risk Maturity Index Tahun Buku 2023 dan Roadmap Manajemen Risiko Submission of the 2023 Fiscal Year Risk Maturity Index Report and the Risk Management Roadmap
5 Agustus 2024 August 5, 2024	Penyampaian Profil Risiko Terintegrasi Triwulan II Tahun 2024 Submission of the Integrated Risk Profile for the Second Quarter of 2024

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Manajemen Risiko dalam Rapat Recapitulation and Attendance Rate of the Risk Management Committee in Meetings

Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Jumlah Wajib Rapat Total Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Total Number of Absence	% Kehadiran Percentage of Attendance
Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko All members of the Risk Management Committee	4	4	0	100%

Laporan Singkat Tugas Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko

Di tahun 2024, Komite Manajemen Risiko aktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui beragam program dan kegiatan, meliputi:

1. Pada agenda penyampaian profil risiko terintegrasi triwulan IV Tahun 2023, komite membahas laporan berkala terkait kondisi risiko perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap tren risiko dan efektivitas pengendalian yang telah diterapkan. Serta membahas terkait 10 jenis risiko perusahaan.
2. Pada agenda Penyampaian Laporan Contingency Plan PT Jamkrindo, rapat difokuskan pada pembahasan rencana kontijensi perusahaan sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat atau gangguan operasional.
3. Pada agenda penyampaian Laporan Risk Maturity Index Tahun Buku 2023 dan Roadmap Manajemen Risiko, komite menerima laporan terkait penilaian tingkat kematangan manajemen risiko serta roadmap pengembangan sistem manajemen risiko untuk mendukung penguatan tata kelola; dan
4. Pada agenda penyampaian Profil Risiko Terintegrasi Triwulan II Tahun 2024, komite melakukan evaluasi atas profil risiko terkini perusahaan untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Serta membahas terkait 10 jenis risiko perusahaan.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memegang peran penting dalam mengelola komunikasi internal dan eksternal Perusahaan. Tugas utamanya mencakup perencanaan strategi komunikasi, pengaturan protokoler, serta manajemen kesekretariatan. Sekretaris Perusahaan berada langsung di bawah tanggung jawab Direksi.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Direksi memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 35/SKD/4/VII/2023, Aribowo telah ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan.

Brief Report on the Implementation of the Risk Management Committee Duties

In 2024, the Risk Management Committee actively performed its duties and responsibilities through the following programs and activities:

1. During the agenda for the submission of the Integrated Risk Profile for the fourth quarter of 2023, the committee discussed periodic reports related to the Company's risk conditions. Evaluations were conducted on risk trends and the effectiveness of implemented controls. Additionally, the committee reviewed the 10 types of risks faced by the Company.
2. During the agenda for the submission of PT Jamkrindo's Contingency Plan Report, the meeting focused on discussing the company's contingency plans as a form of preparedness to face emergencies or operational disruptions.
3. During the agenda for the submission of the Risk Maturity Index Report for the 2023 Fiscal Year and the Risk Management Roadmap, the committee received a report on the assessment of the risk management maturity level, along with a roadmap outlining the development of the risk management system to support governance strengthening; and
4. During the agenda for the submission of the Integrated Risk Profile for the second quarter of 2024, the committee evaluated the Company's current risk profile to ensure that risk management aligns with established strategies and policies. The discussion also covered the 10 types of risks faced by the Company.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary plays an important role in managing the Company's internal and external communications. Their main duties include communication strategy planning, protocol arrangements, and secretarial management. The Corporate Secretary reports directly to the Board of Directors.

Corporate Secretary Officer

The Board of Directors holds the authority to appoint and dismiss the Corporate Secretary. Aribowo has been appointed as Corporate Secretary in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 35/SKD/4/VII/2023.

Aribowo

Kepala Sekretaris Perusahaan
Head of Corporate Secretary

Menjabat Sejak: 12 Juli 2023
Has Served Since: July 12, 2023

Warga negara
Citizenship

: Indonesia

Usia
Age

: 59 tahun
59 years old

Kelahiran
Date of Birth

: Probolinggo, 6 Juni 1966
Probolinggo, June, 6 1966

Domisili
Domicile

: Jakarta, Indonesia

Pendidikan
Education

- 2000 - 2002 Universitas Andalas Magister Manajemen, Program Manajemen Keuangan
- 1985 - 1990 Universitas Airlangga Akuntansi
- (2000 - 2002) Master's Degree in Management, Financial Management Program at Andalas University
- (1985 - 1990) Accounting at Airlangga University

Riwayat Profesi
Professional History

- 12 Juli 2023 - sekarang PT Jamkrindo Sekretaris Perusahaan
- 2019 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Komisaris Utama
- 2017 - 2019 Perum Jamkrindo Kepala Divisi Keuangan dan Investasi
- 2016 Perum Jamkrindo Kepala Kantor Wilayah II Palembang
- 2015 - 2016 Perum Jamkrindo Kepala Kantor Wilayah I Jakarta
- 2014 - 2015 Perum Jamkrindo Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta
- 2014 Perum Jamkrindo Kepala Kantor Wilayah II Surabaya
- 2013 - 2014 Perum Jamkrindo Kepala Divisi Keuangan
- 2012 - 2013 Perum Jamkrindo Kepala Divisi SDM
- 2007 - 2012 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Kantor Cabang Surabaya
- 2005 - 2007 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Kantor Cabang Samarinda
- 2003 - 2005 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Divisi Keuangan
- 2002 - 2003 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Bagian Akuntansi
- 2000 - 2002 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Padang
- 1998 - 2000 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Surabaya
- 1991 - 1998 Perum PKK Penata Muda I Kantor Cabang Jawa Timur
- (July 12, 2023 - Current) Corporate Secretary at PT Jamkrindo
- (2019) President Commissioner at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- (2017 - 2019) Head of Finance and Investment Division at Perum Jamkrindo
- (2016) Head of Palembang Regional Office II at Perum Jamkrindo
- (2015 - 2016) Head of Jakarta Regional Office I at Perum Jamkrindo
- (2014 - 2015) Head of Jakarta Special Branch Office at Perum Jamkrindo
- (2014) Head of Surabaya Regional Office II at Perum Jamkrindo
- (2013 - 2014) Head of Finance Division at Perum Jamkrindo
- (2012 - 2013) Head of HC Division at Perum Jamkrindo
- (2007 - 2012) Head of Surabaya Branch Office at Perum Sarana Pengembangan Usaha
- (2005 - 2007) Head of Samarinda Branch Office at Perum Sarana Pengembangan Usaha
- (2003 - 2005) Head of Finance Division at Perum Sarana Pengembangan Usaha
- (2002 - 2003) Head of Accounting at Perum Sarana Pengembangan Usaha
- (2000 - 2002) Head of Operations at the Padang Branch Office at Perum Sarana Pengembangan Usaha
- (1998 - 2000) Head of Operations at the Surabaya Branch Office at Perum Sarana Pengembangan Usaha
- (1991 - 1998) Junior Officer I at the East Java Branch Office at Perum PKK

Sertifikasi yang Dimiliki
Certifications

- 17 Mei 2023 Badan Nasional Sertifikasi Profesi Sertifikat Manajemen Risiko Perbankan - Level 3
- 21 Desember 2021 Badan Nasional Sertifikasi Profesi Sertifikat Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi
- 22-29 July 2018 Certified Wealth Manager's Association Certificate of Continuing Professional Development (CPD)
- Mei 2018 Certified Wealth Manager's Association
- (May 17, 2023) National Professional Certification Agency Banking Risk Management Certificate - Level 3
- (December 21, 2021) National Professional Certification Agency Integrated Risk Governance Expert Certificate
- (July 22-29, 2018) Certified Wealth Manager's Association Certificate of Continuing Professional Development (CPD)

Struktur Organisasi dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

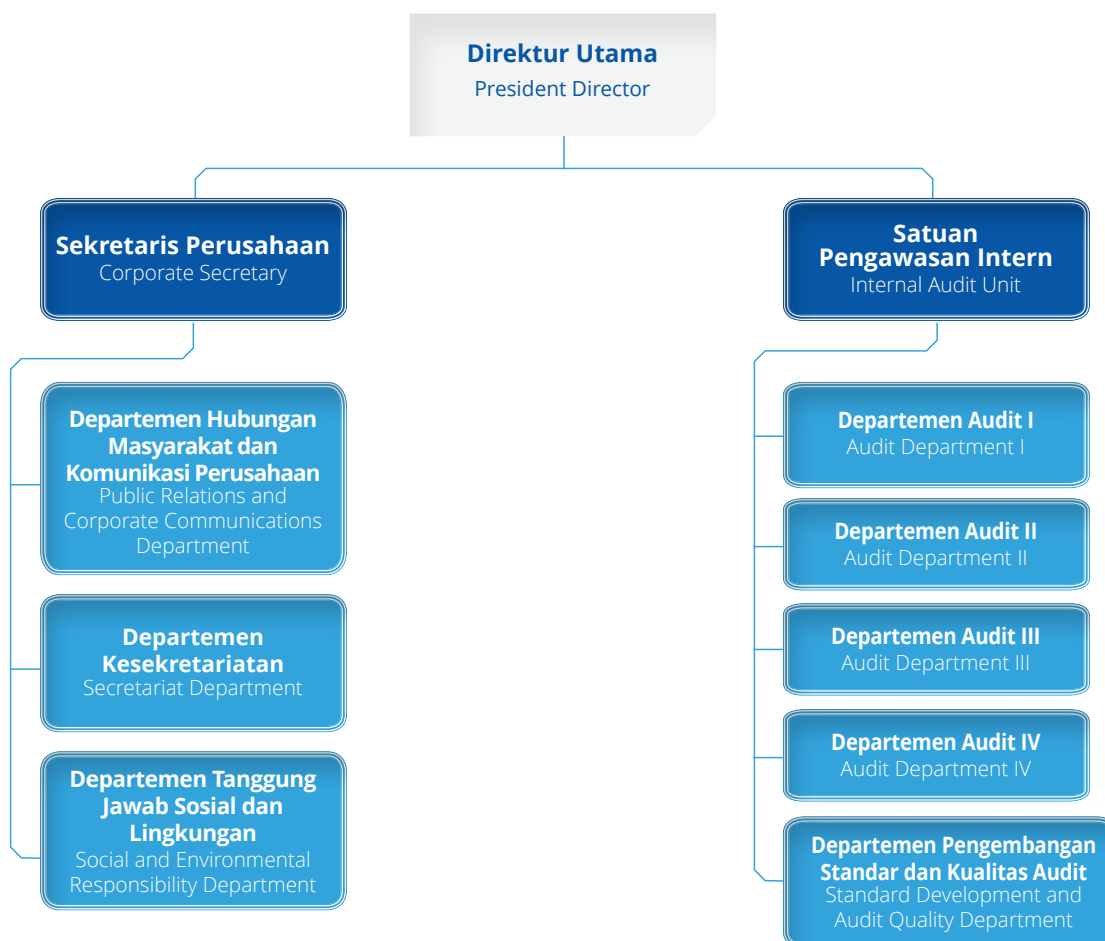
Sebagai bagian dari upaya transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan perusahaan, penting untuk memahami peran yang ada dalam Sekretaris Perusahaan. Berikut ini adalah gambaran mengenai struktur organisasi Sekretaris Perusahaan PT Jaminan Kredit Indonesia, yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor: 01/KD/5/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.

Organizational Structure and Position of the Corporate Secretary

As part of the Company's effort in transparency and effectiveness management, understanding the role of the Corporate Secretary is important. Below is an overview of the the Corporate Secretary's organizational structure at PT Jaminan Kredit Indonesia, as ratified by the Decree of the Board of Directors Number: 01/KD/5/I/2024 dated January 10, 2024.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan Jamkrindo

Organizational Structure of the Corporate Secretary of Jamkrindo



Hingga akhir Desember 2024, Sekretaris Perusahaan memiliki total 26 karyawan. Berikut adalah rincian distribusi jumlah karyawan tersebut:

As of the end of December 2024, the Corporate Secretary's office comprised a total of 26 employees. The following are the breakdown of the employee distribution:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (employees)
Kepala Sekretaris Perusahaan Head of Corporate Secretary	1
Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan Head of the Corporate Secretary Department	3
Fungsional Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Functions	2
Staff Departemen Sekretaris Perusahaan Staff of Corporate Secretary Department	9
Calon Karyawan Prospective Employees	2
KKWT ELH, Umum dan Prohire Specific Time Work Agreement for ELH (KKWT ELH), General Employees, and Prohire	9
Jumlah Total	26

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mencakup berbagai aspek berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2. Pengelolaan kegiatan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan.
3. Pengelolaan kegiatan kehumasan untuk internal di unit kerja.
4. Pengelolaan kegiatan kehumasan untuk eksternal.
5. Pengelolaan pembuatan dan penggunaan logo Perusahaan.
6. Pengelolaan publikasi laporan keuangan Perusahaan.
7. Pengelolaan kegiatan komunikasi pemasaran Perusahaan.
8. Pengelolaan kesekretariatan
9. Pengelolaan keprotokolan Direksi dan Dewan Komisaris
10. Pengelolaan persuratan dan tata kelola dokumen penting Perusahaan.
11. Pengelolaan kegiatan Perusahaan untuk internal dan eksternal.
12. Pengelolaan kegiatan pelayanan internal Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Pengelolaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
14. Pengelolaan kegiatan pemeringkatan dan pemberdayaan UMKMK.
15. Pengelolaan data scoring dari Lembaga eksternal.
16. Pengelolaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan.
17. Pengelolaan tugas sesuai tata laksana dan tata kelola perusahaan yang baik di unit kerja sebagai bagian dari pengendalian internal.
18. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di unit kerja.
19. Penerapan manajemen risiko di unit kerja.
20. Pengelolaan penyusunan dan penyampaian laporan Sekretaris Perusahaan.
21. Pengelolaan pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya.

Program Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka membangun sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif, Jamkrindo secara konsisten melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas bagi seluruh karyawan. Salah satu prioritasnya adalah penguatan kemampuan Sekretaris Perusahaan guna memastikan kesiapan dalam menjalankan tugas yang semakin dinamis. Berikut adalah program pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2024:

Tanggal Date	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Penyelenggara Organizers
21 Maret 2024 March 21, 2024	Soft Skill (SS)	Kick Off Meeting Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001 : 2016 PT Jamkrindo Tahun 2024 SMAP Certification Kick Off Meeting SNI ISO 37001 : 2016 PT Jamkrindo of 2024	Cevral Consulting
23 Februari 2024 February 23, 2024	Soft Skill (SS)	Training Risk Management & Wallet Sizing Risk Management & Wallet Sizing Training	LPPI LPPI/Indonesian Banking Development Institute

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary cover the following areas:

1. Preparation of Work Plan and Budget (RKA).
2. Management of Public Relations and Corporate Communication activities.
3. Management of public relations activities for internal work units.
4. Management of external public relations activities.
5. Management of the creation and use of the Company's logo.
6. Management of the publication of the Company's financial statements.
7. Management of the Company's marketing communication activities.
8. Secretarial management.
9. Management of protocols for the Board of Directors and Board of Commissioners.
10. Management of correspondence and governance of important Company documents.
11. Management of the Company's internal and external activities.
12. Management of internal service activities of the Board of Directors and Board of Commissioners.
13. Management of Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities.
14. Management of ranking and empowerment activities for Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK).
15. Management of scoring data from external institutions.
16. Management of activities to improve financial literacy and financial inclusion.
17. Management of duties in accordance with good corporate governance and governance in the work units as part of internal control.
18. Development of employee competencies in the work unit.
19. Application of risk management in work units.
20. Management of the preparation and submission of reports by the Corporate Secretary.
21. Management of the implementation of other tasks within the scope of their duties.

Competency Development Program

To develop competent and competitive human capital, Jamkrindo consistently implements various competency development programs for all employees. One of the Company's key priorities is to strengthen the capabilities of the Corporate Secretary to ensure readiness in executing increasingly dynamic responsibilities. The following are the competency development programs implemented by the Board of Directors of Jamkrindo throughout 2024:

Tanggal Date	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Penyelenggara Organizers
14 – 15 Mei 2024 May 14 - 15, 2024	Hard Skill (HS)	The International Conference on Neuromanagement and Leadership	IARF Conference
6 Maret 2024 March 6, 2024	Soft Skill (SS)	Pengelolaan Reputasi dan Optimalisasi Branding perusahaan Reputation Management and Optimization of Company Branding	PT Jamkrindo
6 Juni 2024 June 6, 2024	Soft Skill (SS)	Workshop Governance Risk Management, and Compliance dan Sosialisasi Anti Fraud dan Risiko Penyuapan Governance Risk Management and Compliance Workshop. Also, Anti Fraud and Bribery Risk Dissemination	PT Robere & Associates Indonesia
29 – 31 Mei 2024 May 29 - 31, 2024	Soft Skill (SS)	Pelatihan Onboarding Induction Fundamentals - Bela Negara Batch 1 Onboarding and Induction Fundamentals Training - Bela Negara Batch 1	Yayasan Raksa Bhumi Samudra Raksa Bhumi Samudra Foundation
3 - 5 Juni 2024 June 3 - 5, 2024	Soft Skill (SS)	Pelatihan Onboarding Induction Fundamentals - Core Business Competency Onboarding and Induction Fundamentals Training - Core Business Competency	PT Jamkrindo
6 - 8 Juni 2024 June 6 - 8, 2024	Soft Skill (SS)	Pelatihan Onboarding Induction Fundamentals - Professional Communication at Work Onboarding and Induction Fundamentals Training - Professional Communication at Work	PT Jamkrindo bersama smartpersonality PT Jamkrindo in collaboration with smartpersonality
20 – 21 Juni 2024 June 20 - 21, 2024	Soft Skill (SS)	In House Training Corporate Secretary IFG Corporate University Corporate Secretary In-House Training at IFG Corporate University	IFG Corporate University bekerjasama dengan PT Jasindo Bangun Insani IFG Corporate University in collaboration with PT Jasindo Bangun Insani
26 Juni 2024 June 26, 2024	Soft Skill (SS)	Workshop Busines Impact Analysis Business Impact Analysis Workshop	PT Robere Manajemen Indonesia
12 Juni 2024 June 12, 2024	Soft Skill (SS)	Onboarding and Induction Fundamentals: Professional Communication at Work - Mentoring 1	PT Jamkrindo
4 Juli 2024 July 4, 2024	Hard Skill (HS)	JURNAL : "Mid-Year Momentum : Boost Your Performance to Achieve Excellence"	PT Jamkrindo
5 Maret 2024 March 5, 2024	Soft Skill (SS)	Training dan Awareness Teknologi Informasi : Implikasi Artificial Intelligence di Lembaga Keuangan Information Technology Training and Awareness : Implications of Artificial Intelligence in Financial Institutions	PT Jamkrindo
29 – 30 Agustus 2024 August 29 - 30, 2024	Soft Skill (SS)	Pelatihan Pengelolaan Protokol Perusahaan Corporate Protocol Management Training	IFG Corporate University dan Mahaka Institute IFG Corporate University in collaboration with Mahaka Institute
10 – 14 September 2024 September 10 - 14, 2024	Soft Skill (SS)	End User Training Implementasi ERP Oracle EBS (JStream) Batch 1 Oracle ERP and EBS (JStream) End User Training Implementation - Batch 1	PT Jamkrindo
18 – 20 Juli 2024 July 18 - 20, 2024	Soft Skill (SS)	Workshop Influencer BUMN Jawa Barat West Java SOE Influencers Workshop	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
19 – 20 Juli 2024 July 19 - 20, 2024	Soft Skill (SS)	Workshop The 6 Critical Practices for Leading a Team (First Line Leader Development Program) The 6 Critical Practices for Leading a Team (First Line Leader Development Program) Workshop	PT Jamkrindo
11 September 2024 September 11, 2024	Hard Skill (HS)	JURNAL: "Refreshment Analisa Kredit" Part 1	PT Jamkrindo
22 Oktober 2024 October 22, 2024	Soft Skill (SS)	Leader SPARK (Sharing Perspectives and Resources for Key Insight) SPARK (Sharing Perspectives and Resources for Key Insight) Leadership	LPPI LPPI/Indonesian Banking Development Institute

Tanggal Date	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Penyelenggara Organizers
07 – 13 Oktober 2024 October 7 - 13, 2024	Soft Skill (SS)	Social Impact Bootcamp Vol.2	Social Impact.id
16 – 17 Oktober 2024 October 16 - 17, 2024	Soft Skill (SS)	Workshop SROI: Social Return On Investment Batch 2 SROI: Social Return On Investment Batch 2 Workshop	LPPI LPPI/Indonesian Banking Development Institute
02 – 04 Desember 2024 December 2 - 4, 2024	Soft Skill (SS)	Pemahaman ESG (Environment, Social, Governance) ESG (Environment, Social, Governance) dissemination	IFG Corporate University
26 November 2024 November 26, 2024	Soft Skill (SS)	Spark Leadership Series 2 : Core Values for Business Continuity and Accelerated Performance	LPPI LPPI/Indonesian Banking Development Institute
12 – 14 Desember 2024 December 12 - 14, 2024	Soft Skill (SS)	CSR Leader Bootcamp 2024 Smart Village 4.0 Platform	Sentul Innovation Centre

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Sekretaris perusahaan melapor langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan perannya, tugas-tugasnya terbagi ke dalam tiga bidang utama, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kesekretariatan

Tanggung Jawab Utama & Tugas Pokok:

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Kesekretariatan.
- Pengelolaan Kesekretariatan.
- Pengelolaan Keprotokolan Direksi dan Dewan Komisaris.
- Pengelolaan Persuratan dan Tata Kelola Dokumen Penting Perusahaan (Surat Menyurat Direksi, Surat Menyurat Perusahaan, Dokumen RUPS, Risalah Rapat, Notulen, Kepdir, SE, PKS, MoU, SK Direksi dan Dewan Komisaris).
- Pengelolaan Kegiatan Perusahaan (Di antaranya Focus Group Discussion (FGD), Workshop, Rakernas, Pengenalan Direksi dan Dewan Komisaris Baru, Rapat Direksi, RUPS) untuk Internal dan Eksternal Perusahaan.
- Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Internal Direksi dan Dewan Komisaris.
- Pengelolaan Tugas Sesuai Tata Laksana dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) di Bagian sebagai bagian dari pengendalian internal (Internal Control).
- Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di Bagian.
- Penerapan Manajemen Risiko di Bagian.
- Pengelolaan penyusunan dan penyampaian Laporan Bagian Kesekretariatan.
- Pengelolaan pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya.

Wewenang:

- Mengusulkan RKA Bagian Kesekretariatan ke Sekretaris Perusahaan
- Memutuskan penempatan dan peminjaman dokumen penting Perusahaan
- Mengusulkan kebijakan, peraturan, sistem, prosedur operasi baku dan metode kerja Bagian Kesekretariatan

Brief Report on the Implementation of the 2024 Corporate Secretary Duties

The corporate secretary reports directly to the President Director. In carrying out its role, its duties are divided into three main areas:

1. Secretariat

Main Responsibilities & Duties:

- Preparation of the Work Plan and Budget (RKA) for the Secretariat Division.
- Secretariat Management
- Management of protocols for the Board of Directors and Board of Commissioners.
- Management of Correspondence and Management of Important Company Documents (Correspondence of the Board of Directors, Company Correspondence, GMS Documents, Minutes of Meetings, Minutes, Presidential Decrees, SEs, MCCs, MoUs, Decrees of the Board of Directors and Board of Commissioners).
- Management of Company Activities (including Focus Group Discussion (FGD), Workshop, National Working Meeting (Rakernas), Introduction of New Board of Directors and Board of Commissioners, Board of Directors Meeting, GMS) for Internal and External Companies.
- Management of internal service activities of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
- Management of Duties in accordance with Good Corporate Governance (GCG) in the Division as part of the internal control.
- Competency development of employees who are in the Division.
- Application of risk management in the Division.
- Management of preparation and submission of the Reports of the Secretariat Division.
- Management of the implementation of other tasks within the scope of their duties.

Authorities:

- Propose the Work Plan and Budget (RKA) of the Secretariat Division to the Corporate Secretary
- Determine the placement and borrowing of important Company documents
- Propose policies, regulations, systems, standard operating procedures and work methods of the Secretariat Division

- berdasarkan regulasi dan ketentuan Perusahaan.
- d. Mengusulkan pemilihan dan penempatan personel sesuai dengan standar pengelolaan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bagian Kesekretariatan sesuai penugasan dari Sekretaris Perusahaan.

2. Hubungan Masyarakat & Komunikasi Perusahaan

Tanggung Jawab Utama & Tugas Pokok:

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Hubungan Masyarakat & Komunikasi Perusahaan.
- b. Pengelolaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan.
- c. Pengelolaan Kegiatan Kehumasan untuk Internal (PIC Hubungan Masyarakat) di Unit Kerja d. Pengelolaan Kegiatan Komunikasi Perusahaan untuk Eksternal (Pameran, Seminar, *Awarding*, *Conference*).
- d. Pengelolaan Pembuatan dan Penggunaan Logo Perusahaan.
- e. Pengelolaan Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan.
- f. Pengelolaan Kegiatan Komunikasi Pemasaran (*Marketing Communication*) Perusahaan.
- g. Pengelolaan Tata Sesuai Tata Laksana dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di Bagian sebagai bagian dari pengendalian internal (Internal Control).
- h. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di Bagian.
- i. Penerapan Manajemen Risiko di Bagian.
- j. Pengelolaan penyusunan dan penyampaian Laporan Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi.
- k. Pengelolaan pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya.

Wewenang:

- a. Mengusulkan RKA Bagian Hubungan Masyarakat & Komunikasi Perusahaan ke Sekretaris Perusahaan.
- b. Mengusulkan strategi hubungan masyarakat dan publikasi Perusahaan ke Sekretaris Perusahaan.
- c. Mengusulkan strategi komunikasi perusahaan ke Sekretaris Perusahaan.
- d. Mengusulkan strategi Komunikasi Pemasaran (*Marketing Communication*) Perusahaan ke Sekretaris Perusahaan.
- e. Mengusulkan pemilihan dan penempatan personel sesuai dengan standar pengelolaan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengusulkan kebijakan, peraturan, sistem, prosedur operasi baku dan metode kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan berdasarkan regulasi dan ketentuan Perusahaan.
- g. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan sesuai penugasan dari Sekretaris Perusahaan

based on Company regulations and provisions.

- d. Propose the selection and placement of personnel in accordance with management standards and applicable provisions.
- e. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the execution of duties related to the Secretariat Division as assigned by the Corporate Secretary.

2. Public Relations & Corporate Communications

Main Responsibilities & Duties:

- a. Preparation of the Work Plan and Budget (RKA) of the Public Relations & Corporate Communications Division.
- b. Management of Public Relations and Corporate Communication activities
- c. Management of Public Relations Activities for Internal (Public Relations PIC) in Work Units. Management of Corporate Communication Activities for External (Exhibition, Seminar, *Awarding*, *Conference*).
- d. Management of the Creation and Use of the Company's Logo.
- e. Management of the publication of the Company's financial statements.
- f. Management of the Company's Marketing Communication Activities.
- g. Management of Governance and Good Corporate Governance (GCG) in the Division as part of the internal control.
- h. Competency development of employees who are in the Division.
- i. Application of Risk Management in the Division.
- j. Management of the preparation and submission of the Reports of the Public Relations and Communication Division.
- k. Management of the implementation of other tasks within the scope of their duties.

Authorities:

- a. Propose the Work Plan and Budget (RKA) of the Public Relations & Corporate Communication Division to the Corporate Secretary.
- b. Propose the Company's public relations and publication strategy to the Corporate Secretary.
- c. Propose corporate communication strategies to the Corporate Secretary.
- d. Propose the Company's Marketing Communication strategy to the Corporate Secretary.
- e. Propose the selection and placement of personnel in accordance with management standards and applicable provisions.
- f. Propose policies, regulations, systems, standard operating procedures and work methods of the Public Relations and Corporate Communications Division in accordance with the Company's regulations and provisions.
- g. Represent PT Jamkrindo in forming relationships with third parties regarding the implementation of the duties of the Public Relations and Corporate Communication Division in accordance with the assignments of the Corporate Secretary.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Tanggung Jawab Utama & Tugas Pokok:

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Pemberdayaan UMKMK dan Lingkungan.
- Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
- Pengelolaan Kegiatan Peningkatan dan Pemberdayaan UMKMK.
- Pengelolaan Pemanfaatan Data Scoring dari Lembaga Eksternal.
- Pengelolaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
- Pengelolaan Tugas Sesuai Tata Laksana dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di Bagian sebagai bagian dari pengendalian internal (Internal Control).
- Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di Bagian.
- Penerapan Manajemen Risiko di Bagian.
- Pengelolaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Bagian Pemberdayaan UMKMK dan kebutuhan Lingkungan.
- Pengelolaan Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain dalam Lingkup Bidang Tugasnya.

Wewenang:

- Membuat usulan RKA Bagian Pemberdayaan UMKMK dan Lingkungan kepada Sekretaris Perusahaan.
- Mengusulkan strategi pengembangan Pemberdayaan UMKMK dan Lingkungan ke Sekretaris Perusahaan.
- Mengusulkan kebijakan, peraturan, sistem, prosedur operasi baku dan metode kerja Bagian Pemberdayaan UMKMK dan Lingkungan ke Sekretaris Perusahaan berdasarkan regulasi dan ketentuan Perusahaan.
- Mengusulkan pemilihan dan penempatan personel sesuai dengan standar pengelolaan dan ketentuan yang berlaku.
- Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bagian Pemberdayaan UMKMK dan Lingkungan sesuai penugasan dari Sekretaris Perusahaan.

Fungsi Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko menjadi elemen penting dalam meningkatkan akuntabilitas Direksi sekaligus mendukung efektivitas pengambilan keputusan strategis perusahaan. Sebagai bagian integral dari sistem manajemen, penerapan manajemen risiko didasarkan pada kebijakan dan prosedur yang dirancang sesuai dengan karakteristik dan kapabilitas perusahaan. Dalam

3. Social and Environmental Responsibility (TJSL)

Main Responsibilities & Duties:

- Preparation of the Work Plan and Budget (RKA) for the Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) and Environmental Empowerment Division.
- Management of Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities.
- Management of ranking and empowerment activities for Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK).
- Management of the Utilization of Data Scoring from External Agencies.
- Management of Activities to Improve Financial Literacy and Financial Inclusion.
- Management of Duties in accordance with Good Corporate Governance (GCG) in the Division as part of the internal control.
- Competency development of employees who are in the Division.
- Application of Risk Management in the Division.
- Management of the Preparation and Submission of the Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) Empowerment and Environmental needs Division Report.
- Management of the Execution of Other Tasks within the Scope of their Duties.

Authorities:

- Make Work Plan and Budget (RKA) proposal for the Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) Empowerment and Environment Division to the Corporate Secretary.
- Propose Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) Empowerment and Environment development strategies to the Corporate Secretary
- Propose policies, regulations, systems, standard operating procedures, and work methods of the Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) and Environment Empowerment Division in accordance with the Company's regulations and provisions.
- Propose the selection and placement of personnel in accordance with management standards and applicable provisions.
- Represent PT Jamkrindo in forming relationships with third parties in regards to the execution of the duties of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) and Environment Empowerment Division in accordance with the assignments of the Corporate Secretary.

Risk Management Function

Risk management is a key element in improving the accountability of the Board of Directors and supporting the effectiveness of the Company's strategic decision-making. As an integral part of the management system, the implementation of risk management is guided by policies and procedures designed in accordance with the characteristics and capabilities of the Company. In

practice, this approach refers to the international standard ISO 31000:2018, which has been adapted to effectively address the Company's unique needs.

Profile of the Head of the Risk Management Division

Boy Herwin Nur was officially appointed as Head of the Risk Management Division through Board of Directors Decree No. 121/SKD/4/XII/2022 dated 26 December 2022 concerning Appointment and Mutation of Officials. He assumed his new role with new responsibilities to support the sustainability of the Organization.

Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of the Risk Management Division

Menjabat Sejak: 12 Agustus 2024
Has Served Since: August 12, 2024

Struktur Organisasi dan Kedudukan Divisi Manajemen Risiko

Organizational Structure and Position of the Risk Management Division

To provide a clearer understanding of the various roles within the Risk Management Division, the following is the approved organizational structure as outlined in Decree 01/KD/5/1/2024 dated January 10, 2024 regarding the Organizational Structure.

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko Organizational Structure of the Risk Management Division



Hingga akhir tahun 2023, total karyawan yang tergabung dalam Divisi Manajemen Risiko berjumlah 26 orang, yang terbagi dalam beberapa kategori, sebagai berikut:

As of the end of 2023, the total number of employees in the Risk Management Division is 26 employees, who are categorized into several groups, as outlined below:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (employees)
Kepala Satuan Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division Unit	1
Kepala Departemen Pengelolaan Risiko Korporasi Head of Corporate Risk Management Department	1
Kepala Departemen Pengelolaan Risiko Penjaminan Head of Guarantee Risk Management Department	1
Fungsional Manajemen Risiko Risk Management Function	14
Staf Pengelolaan Risiko Korporasi Corporate Risk Management Staff	1
Staf Pengelolaan Risiko Penjaminan Guarantee Risk Management Staff	3
Admin Administration	2
Jumlah Total	3

Tugas Divisi Manajemen Risiko

Tugas Divisi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengelola penerapan dan pelaksanaan manajemen risiko korporasi dan penjaminan, diantaranya:
 - a. Melakukan penerapan manajemen risiko;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Divisi Manajemen Risiko;
 - c. Melakukan penyusunan kebijakan manajemen risiko;
 - d. Melakukan pelaksanaan *risk assessment*;

Duties of the Risk Management Division

The duties of the Risk Management Division are as follows:

1. Manage the implementation of corporate risk management and guarantees, which includes:
 - a. Implementation of risk management;
 - b. Preparation of the Work Plan and Budget (RKA) of the Risk Management Division,
 - c. Execution of the preparation of risk management policies;
 - d. Execution of the implementation of risk assessment;

- e. Melakukan identifikasi risiko dan penanganan risiko (mitigasi) secara korporasi dan penjaminan;
 - f. Pengelolaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Divisi Manajemen Risiko;
 - g. Pelaksanaan Penyusunan Profil Risiko;
 - h. Penetapan Profil Risiko;
 - i. Melakukan *monitoring* atas penerapan manajemen risiko; dan
 - j. Pengelolaan Kebijakan, Prosedur, dan Metodologi Manajemen Risiko.
2. Pengelolaan analisis data risiko industri dari Terjamin atau Mitra Terjamin.
 3. Pengelolaan Kerja Sama dengan Lembaga Penyedia Data dan pengolahan data yang diperoleh.
 4. Pengelolaan Penerapan 4 (empat) *Eyes Principle*.
 5. Pengelolaan tugas sesuai tata laksana dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di Unit Kerja sebagai bagian dari pengendalian internal (*Internal Control*).
 6. Pemberian Opini/Pendapat Manajemen Risiko.
 7. Mengelola *Business Continuity Management* dan pelaksanaan *BCM Maturity Assessment*.
 8. Melakukan pengembangan kompetensi karyawan terkait Manajemen Risiko.
- e. Conducting risk identification and risk handling (mitigation) on a corporate and guarantee basis;
 - f. Management of the Preparation and Submission of the Risk Management Division Reports.
 - g. Execution of the Preparation of the Risk Profile;
 - h. Determination of Risk Profile;
 - i. Monitoring the implementation of risk management; and
 - j. Management of the Risk Management Policies, Procedures, and Methodologies.
2. Management of industry risk data analysis from the Guaranteed or Guaranteed Partners.
 3. Management of Cooperation with Data Providers Institutions and processing of data obtained.
 4. Management of the Implementation of the 4 (four) Eyes Principle.
 5. Management of duties in accordance with Good Corporate Governance (GCG) in the Division as part of the internal control.
 6. Provision of Risk Management Opinions.
 7. Management of Business Continuity Management and implementation of BCM Maturity Assessment.
 8. Develop employee competencies related to Risk Management.

Sertifikasi Profesi Divisi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sertifikasi profesi memainkan peran krusial bagi auditor dalam memahami dinamika pengelolaan risiko, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi serta tren industri terkini. Berikut ini adalah daftar sertifikasi profesi yang dimiliki oleh karyawan Divisi Manajemen Risiko hingga akhir tahun 2024.

Risk Management Division Professional Certification

As part of the Company's efforts to improve the quality of human capital, professional certification plays a crucial role for auditors in understanding the dynamics of risk management, especially in regards to regulatory compliance and the latest industry trends. The following is a list of professional certifications held by the employees of the Risk Management Division as of the end of 2024.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Types of Risk Management Profession Certification
Bambang Suryo Atmojo	Penjaminan Skema Tenaga Ahli Penjaminan Guarantee Expert Scheme
Candra Haris Tua Lubis	- Manajemen Risiko Perbankan – 1 - Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Tenaga Ahli Penjaminan - Manajemen Risiko Jenjang 4 - Wakil Manajer Investasi - ERM <i>Fundamental with (ERMAP Certification)</i> - Banking Risk Management Level 1 - Occupational Safety and Health (OHS) Management System Auditor - Guarantee Expert - Level 4 Risk Management - Investment Manager Representative - ERM <i>Fundamental with (ERMAP Certification)</i>
Ahmad Sopyan	- Tenaga Ahli Penjaminan - Manajemen Risiko Jenjang 4 - Wakil Manajer Investasi <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> - Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) <i>Certified Governance Risk Compliance Professional</i> - Guarantee Expert - Level 4 Risk Management - Investment Manager Representative <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> - Occupational Safety and Health (OHS) Management System Auditor <i>Certified Governance Risk Compliance Professional</i>

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Types of Risk Management Profession Certification
Irma Hartati	- Manajemen Risiko Perbankan – 1 - Analisis Penjaminan - Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 - Analisis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi/CRMO - Banking Risk Management Level 1 - Guarantee Analyst - Level 4 Risk Management Certification - Certified Risk management Officer/CRMO
Willem Kristian	- Manajemen Risiko Perbankan – 1 - Analisis Penjaminan - Manajemen Risiko Jenjang 4 - Banking Risk Management Level 1 - Guarantee Analyst - Level 4 Risk Management
Muhammad Ridwan Harahap	- Analisis Penjaminan - Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 - Guarantee Analyst - Level 4 Risk Management Certification
Alfi Ridhoniah	- CRMO (<i>Certified Risk Management Officer</i>) - Manajemen Risiko Jenjang 4 - Manajemen Risiko Perbankan – 1 - Skema Analisis Penjaminan - CRMO (Certified Risk Management Officer) - Level 4 Risk Management Certification - Banking Risk Management Level 1 - Guarantee Analyst Scheme
Maria Annisa Primawestri	- Manajemen Risiko Perbankan – 1 - Analisis Penjaminan - Manajemen Risiko Jenjang 4 - Banking Risk Management Level 1 - Guarantee Analyst - Level 4 Risk Management Certification
Aulida Triana Adhayati	- Manajemen Risiko Perbankan – 1 - Analisis Penjaminan - Manajemen Risiko Jenjang 4 - Banking Risk Management Level 1 - Guarantee Analyst - Level 4 Risk Management Certification
Nur Rotunnafiah	<i>Certified Risk Management Professional</i> (CRMP) - CRMO - Analisis Penjaminan - Manajemen Risiko Jenjang 4 - Kemenaker Ahli K3 Umum <i>Certified Governance Risk Compliance Professional</i> - Certified Risk Management Professional (CRMP) - CRMO - Guarantee Analyst - Level 4 Risk Management Certification - Ministry of Manpower – General OHS Specialist - Certified Governance Risk Compliance Professional
Shofiyah Nada Rosidah	<i>Certified Risk Management Officer</i> - Analisis Penjaminan - Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Certified Securities Analyst</i> - Wakil Manajer Investasi - Kemenaker Ahli K3 Umum - Certified Risk Management Officer - Guarantee Analyst - Level 4 Risk Management - Certified Securities Analyst - Investment Manager Representative - Ministry of Manpower – General OHS Specialist
Danang Agus Wahyudi	<i>Certified Risk Management Officer</i> - Analisis Penjaminan - Manajemen Risiko Jenjang 4 - Kemenaker Ahli K3 Umum - Certified Risk Management Officer - Guarantee Analyst - Level 4 Risk Management - Ministry of Manpower – General OHS Specialist

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Types of Risk Management Profession Certification
Tyas Saraswati Nur Wiyastuty	• <i>Certified Risk Management Officer</i> • Analisis Penjaminan • Manajemen Risiko Jenjang 4 • Sertifikasi Kemenaker Ahli K3 Umum • Certified Risk Management Officer • Guarantee Analyst • Level 4 Risk Management • Ministry of Manpower – General OHS Specialist
Hilda Sinta Dewi	• Analisis Penjaminan • Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 • Analisis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi/CRMO • Guarantee Analyst • Level 4 Risk Management Certification • Certified Risk management Officer/CRMO
Abu Bakar	• Manajemen Risiko Perbankan – 1 • Analisis Penjaminan • Manajemen Risiko Jenjang 4 • Banking Risk Management Level 1 • b. Guarantee Analyst • c. Level 4 Risk Management Certification
Gandes Novia Wulansari	• Skema Analisis Penjaminan • Manajemen Risiko Perbankan – 1 • Manajemen Risiko Jenjang 4 • Guarantee Analyst Scheme • Banking Risk Management Level 1 • Level 4 Risk Management Certification
Rafida Aflah	• Analisis Penjaminan • Manajemen Risiko Jenjang 4 • Guarantee Analyst • Level 4 Risk Management Certification
Yanik Swandayani	• Manajemen Risiko Jenjang 4 • Manajemen Risiko Perbankan – 1 • Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 • Level 4 Risk Management Certification • Banking Risk Management Level 1 • Level 4 Risk Management Certification
Atha Fadillah Yuman	Digital Marketing

Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan kompetitif melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan risiko, Divisi Manajemen Risiko terus mengupdate pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Berikut adalah rincian program peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko pada tahun 2024:

Competency Development

Jamkrindo is committed to enhancing the quality of reliable and competitive human capital through various competency development programs. To ensure effective risk management, the Risk Management Division continuously updates relevant knowledge and skills. Below are the details of the competency improvement programs that have been attended by the Head of the Risk Management Division in 2024:

Tanggal Date	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Penyelenggara Organizers
26 Juni 2024 June 26, 2024	Workshop	Business Essential	Kementerian BUMN Ministry of SOEs
26 September 2024 September 26, 2024	Workshop	Understanding the Climate Landscape for Financial Institutions	OJK Institute
10 Oktober 2024 October 10, 2024	Workshop	Empowering Leadership	OJK Institute
17 Oktober 2024 October 17, 2024	Workshop	Carbon Trading and its Effect on Indonesia's Economy	OJK Institute
31 Oktober 2024 October 31, 2024	Workshop	EV Insurance, International Best Practice for Innovation	OJK Institute
21 November 2024 November 21, 2024	Workshop	Strengthening Financial Integrity	OJK Institute

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2024

Di tahun 2024, Divisi Manajemen Risiko merancang berbagai program strategis, meliputi:

1. Tersedianya Laporan Stress Test Risiko Likuiditas

Dalam menghadapi dunia bisnis yang dinamis dan penuh risiko, terutama dalam industri jasa keuangan, Perusahaan perlu memastikan bahwa pondasi keuangannya kokoh dan mampu bertahan bahkan dalam skenario stress yang jarang terjadi namun mungkin terjadi. Penting bagi Perusahaan dapat menghadapi tantangan eksternal yang mengancam stabilitas keuangan dan kelangsungan bisnis.

Pentingnya menentukan skenario stress yang "severe but plausible" secara spesifik untuk menggambarkan ketahanan Perusahaan terhadap situasi ekstrem yang mungkin mempengaruhi kesehatan keuangan. Dengan melibatkan skenario yang jarang terjadi namun mungkin terjadi, Perusahaan dapat memitigasi risiko yang tidak terduga, menjaga ketahanan modal dan memastikan bahwa Perusahaan dapat memberikan layanan penjaminan bahkan ditengah tekanan gejolak yang terjadi. PT Jamkrindo telah melakukan perhitungan atas stress testing risiko likuiditas dan menyampaikannya kepada Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko dan Divisi terkait setiap triwulannya.

2. Pengembangan Blueprint Manajemen Risiko

PT Jamkrindo telah menyusun blueprint manajemen risiko tahun 2024-2029. *Blueprint* tersebut berfungsi sebagai panduan bagi **PT Jamkrindo** dalam membangun dan mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk dapat mendukung tercapainya tujuan dari manajemen risiko terintegrasi, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan.

3. Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko

Untuk mencapai sasaran tersebut, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan program kerja tahun 2024 yang merupakan tindaklanjut atas roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko. Adapun Program Kerja Tahun 2024 berdasarkan Rekomendasi *Roadmap* Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut:

No	Rekomendasi Recommendation	Output	Status Progress
1	Perusahaan agar memiliki evaluasi secara berkala minimal 1 kali per tahun untuk mengukur peningkatan budaya risiko di Perusahaan antara lain melalui pengumpulan masukan dari para pegawai untuk pengembangan program budaya risiko (survey budaya risiko). The Company should have a periodic evaluation at least once per year to measure the improvement of risk culture in the Company, among others through collecting input from employees for the development of risk culture programs (risk culture survey).	Evaluasi Peningkatan Budaya Risiko Risk Culture Improvement Evaluation	Done
2	Penilaian RMI agar mencakup seluruh Dimensi (budaya dan kapabilitas Risiko, organisasi dan tata kelola Risiko, kerangka Risiko dan kepatuhan, proses dan kontrol Risiko, serta model, data, dan teknologi Risiko) RMI assessment should cover all Dimensions (Risk culture and capability, Risk organization and governance, Risk and compliance framework, Risk processes and controls, and Risk models, data, and technology).	Hasil Penilaian RMI versi SK 8 tahun 2023 RMI Assessment Result of SK 8 of 2023	Done

Brief Report on the Implementation of the 2024 Risk Management Division Duties

In 2024, the Risk Management Division designed various strategic programs, as listed below:

1. Availability of Liquidity Risk Stress Test Report

In the face of a dynamic and risky business world, especially in the financial services industry, the Company needs to ensure that its financial foundation is solid and able to withstand even the rare but possible stress scenarios. It is important that the Company is able to deal with external challenges that threaten its financial stability and business continuity.

The importance of determining specific "severe but plausible" stress scenarios to illustrate the Company's resilience to extreme situations that may affect its financial health. By involving rare but possible scenarios, the Company can mitigate unforeseen risks, maintain capital resilience and ensure that the Company shall provide underwriting services even under pressure. PT Jamkrindo has calculated the liquidity risk stress testing and submitted it to the Director of Human Resources, General, and Risk Management and related Divisions on a quarterly basis.

2. Development of Risk Management Blueprint

PT Jamkrindo has developed a risk management blueprint for 2024-2029. The blueprint serves as a guide for PT Jamkrindo in developing and managing all of its resources to support the achievement of integrated risk management objectives, which are in line with the Company's objectives.

3. Implementation of Roadmap for Improvement of Risk Management Implementation

To achieve this goal, the Risk Management Division has implemented a work program for 2024, which is a follow-up to the roadmap for improving risk management implementation. The 2024 Work Program based on the Risk Management Implementation Improvement Roadmap Recommendations is detailed below:

No	Rekomendasi Recommendation	Output	Status Progress
3	Tersedianya Pedoman Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) yang telah diharmonisasi Availability of an aligned Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) Guidelines	Pedoman Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) telah dicabut melalui Ketetapan Direksi Nomor 06/KD/4/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko. The Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) Guidelines have been revoked through Board of Directors Decree No. 06/KD/4/XII/2024 dated December 31, 2024 concerning Risk Management Guidelines.	Done
4	Tersedianya Pedoman, Prosedur, Petunjuk Pelaksanaan Internal Control Testing (ICT) Availability of Guidelines, Procedures, Implementation Instructions for Internal Control Testing (ICT)	1. Pedoman Internal Control Testing (ICT) 2. Prosedur Internal Control Testing (ICT) 3. Petunjuk Pelaksanaan Internal Control Testing (ICT) 1. Internal Control Testing (ICT) Guidelines 2. Internal Control Testing (ICT) Procedure 3. Internal Control Testing (ICT) Implementation Guidelines	Done
5	Harmonisasi Kebijakan dan Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) untuk melindungi informasi digital dari akses oleh pihak yang tidak berwenang, kerusakan data, atau pencurian data di seluruh siklus pengolahan data, yang mencakup setiap aspek keamanan informasi mulai dari keamanan fisik perangkat keras dan perangkat penyimpanan hingga aplikasi administrasi dan kontrol akses, kebijakan dan prosedur organisasi The alignment of Information Security Management System (ISMS) Policies and Procedures to protect digital information from access by unauthorized parties, data corruption, or data theft throughout the data processing cycle, covering every aspect of information security from physical security of hardware and storage devices to administrative applications and access controls, organizational policies and procedures.	1. Kebijakan Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) terakomodir pada Peraturan Direksi Nomor: 14/Per-Dir/3/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 2. Prosedur Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) terakomodir pada SE Direksi 20/SE/3/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi 1. The Information Security Management System (ISMS) Procedure Policy is accommodated in the Board of Directors Regulation Number: 14/Per-Dir/3/VIII/2024 dated August 20, 2024 concerning Information Security Management System Policy. 2. Information Security Management System (ISMS) Procedures are accommodated in Board of Directors Circular 20/SE/3/VIII/2024 dated August 20, 2024 concerning Information Security Management System Procedures.	Done
6	Tersedianya kertas kerja BCMS serta terlaksananya simulasi untuk seluruh proses bisnis kritikal di seluruh Unit Kerja Perusahaan The availability of BCMS working papers and the implementation of simulations for all critical business processes in all Company Work Units	1. Kertas Kerja BCMS 2. Laporan simulasi BCMS 1. BCMS Working Paper 2. BCMS simulation report	Done
7	Menyusun taksonomi risiko sesuai dengan ketentuan Regulator (BUMN) Develop a risk taxonomy in accordance with the provisions of the Regulator (BUMN)	Terdapat pemetaan taksonomi risiko (T1, T2, T3) sesuai dengan ketentuan BUMN Availability of a risk taxonomy mapping (T1, T2, T3) in accordance with SOE requirements.	Done
8	Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Stress Testing Availability of Stress Testing Implementation Guidelines	Petunjuk Pelaksanaan Stress Testing Stress Testing Implementation Guidelines	Done
9	Tersedianya panduan penggunaan sistem data risiko Availability of guidelines for using the risk data system	SE Divisi Nomor 05/SE-Div/MRP/XI/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Dashboard Analytical. SE Division Number 05/SE-Div/MRP/XI/2024 dated December 27, 2024 concerning Implementation Guidelines for Analytical Dashboard Applications.	Done
10	Internalisasi risk awareness Internalization of risk awareness	1. Sosialisasi <i>upside risk</i> 2. Workshop GRC 3. Updating Loss Event Database 4. Sosialisasi SMAP (Risiko Penyupaan) dan Anti Fraud 5. Sosialisasi RCSA 1. Dissemination of upside risk 2. GRC Workshop 3. Updating Loss Event Database 4. Dissemination of the Anti-Bribery Management System/SMAP (Bribery Risk) and Anti Fraud 5. Dissemination of RCSA	Done

No	Rekomendasi Recommendation	Output	Status Progress
11	Monitoring pencapaian kinerja Unit Kerja Monitoring Work Unit performance achievement	Laporan Evaluasi Unit Kerja Work Unit Evaluation Report	Done
12	Penarapan Four Eyes Principle Implementation of Four Eyes Principle	Laporan Evaluasi Four Eyes Principle Four Eyes Principle Evaluation Report	Done
13	Implementasi DR Plan Implementation of DR Plan	Berita Acara Uji Coba DR Plan Minutes of Meeting for the DR Plan Trial	Done
Progress			100%

Dapat dilaporkan bahwa Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan seluruh program kerja dari total 13 (tiga belas) program kerja rekomendasi *roadmap* manajemen risiko atau sebesar 100%.

This report shows that the Risk Management Division has implemented all work programs out of a total of 13 (thirteen) work programs recommended in the risk management roadmap or 100%.

4. Penyusunan Contingency Plan

Contingency plan adalah tindakan alternatif yang disiapkan ketika rencana utama tidak berjalan dengan baik atau terjadinya perubahan yang tidak terduga. Dalam konteks bisnis, perusahaan harus memiliki beberapa rencana cadangan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai meskipun menghadapi tantangan yang tidak terduga. Maka dari itu, PT Jamkrindo telah menyusun *contingency plan* sesuai dengan arahan Aspirasi Pemegang Saham dan sebagai langkah agar sasaran perusahaan tetap tercapai. Implementasi rencana *contingency plan* ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan responsibilitas Perusahaan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.

4. Preparation of Contingency Plan

Contingency plans are alternative actions that are prepared when the primary plan does not go well or unexpected changes occur. In the context of business, companies must have several backup plans to ensure that the goals they have set can still be achieved despite facing unforeseen challenges. Therefore, PT Jamkrindo has developed a contingency plan in accordance with the direction of Shareholders' Aspirations and as a step so that the Company's goals are still achieved. The implementation of this contingency plan is expected to increase the Company's readiness and responsiveness in dealing with unexpected situations.

5. Tersedianya Laporan Internal Control Testing (ICT)

Pentingnya peran manajemen risiko sebagai "*second line*" sangat penting dalam mengelola risiko di dalam Perusahaan. Peran garis pertahanan kedua (*second line*) adalah mendukung garis pertahanan pertama (*first line of model*) dengan memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan dengan baik, risiko diidentifikasi secara tepat, dan bahwa kontrol internal yang diterapkan sesuai dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan memastikan kontrol internal yang efektif, Perusahaan dapat mencapai tujuan dengan lebih baik. Pengujian kontrol internal terhadap RCSA (*Risk Control Self-Assessment*) adalah bagian penting dari proses manajemen risiko yang komprehensif di dalam Perusahaan.

5. Availability of Internal Control Testing (ICT) Report

The importance of the role of risk management as the "second line" is crucial in managing risks within the Company. The role of the second line of defense is to support the first line of defense by ensuring that the risk management process is sound, risks are appropriately identified, and that internal controls are implemented in accordance with established standards and policies. By ensuring effective internal controls, the Company can better achieve its goals. Internal control testing against RCSA (*Risk Control Self-Assessment*) is an important part of a comprehensive risk management process within the Company.

Divisi Manajemen Risiko telah melakukan penyusunan Laporan *Internal Control Testing* (ICT) dan menyampaikannya kepada Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko setiap triwulan sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham.

The Risk Management Division has prepared an Internal Control Testing (ICT) Report and submits it to the Board of Directors of Human Capital, General Affairs, and Risk Management on a quarterly basis in accordance with Shareholder Aspirations.

6. Risk Maturity Index (RMI)

Pengukuran RMI yang dilakukan di PT Jaminan Kredit Indonesia saat ini dilakukan mengacu dengan Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di lingkungan BUMN. Pengukuran RMI di PT Jaminan Kredit Indonesia bertujuan untuk melihat tingkat

6. Risk Maturity Index (RMI)

The RMI assesment conducted at PT Jaminan Kredit Indonesia is currently executed in reference to a copy of the Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia Number SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning Technical Guidelines for Assessing the Risk Maturity Index within SOEs. The RMI assessment at PT Jaminan Kredit Indonesia aims to see the maturity level

maturitas dan efektivitas dari penerapan manajemen risiko serta sebagai monitoring untuk melihat peningkatan dan perbaikan manajemen risiko secara berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh semua elemen di dalam PT Jaminan Kredit Indonesia. Adapun atas kinerja tahun 2023, diperoleh skor *Risk Maturity Index* tahun 2024 sebesar 3,03 (Fase Praktik Yang Baik).

7. **Surveillance Sertifikasi ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System (BCMS)**

Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian, keberlanjutan operasional menjadi faktor penting bagi kelangsungan usaha dan ketahanan Perusahaan. *Business Continuity Management System* (BCMS) dilakukan sebagai suatu pendekatan sistematis yang memastikan Perusahaan mampu merespons, memitigasi, dan memulihkan diri dari berbagai gangguan yang dapat menghambat operasional Perusahaan.

Sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*), pelaksanaan *surveillance audit* BCMS memiliki peran strategis dalam menjaga efektivitas sistem yang telah diterapkan. *Surveillance Audit* ISO 22301:2019 BCMS bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap standar yang berlaku, mengidentifikasi potensi risiko yang masih ada, serta memastikan bahwa mekanisme pengendalian dan mitigasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, *surveillance audit* juga menjadi sarana bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kesiapan dan responsibilitas dalam menghadapi insiden yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis.

Atas pelaksanaan *Surveillance Audit* dan Sertifikasi ISO 22301:2019 BCMS tanggal 14-18 Oktober 2024, diperoleh hasil yaitu PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) direkomendasikan untuk melanjutkan sertifikasi ISO 22301:2019 dengan *positive highlight* dan *opportunity of improvement* tanpa temuan major dan minor, diantaranya:

and effectiveness of risk management implementation as well as monitoring to see continuous improvement and improvement of risk management that can be conducted by all elements within PT Jaminan Kredit Indonesia. As for the Company's performance in 2023, the 2024 Risk Maturity Index scored a 3.03 (Good Practice Phase).

7. **ISO 22301:2019 Certification Surveillance – Business Continuity Management (BCMS)**

In an increasingly dynamic and uncertain business environment, operational sustainability is an important factor for the Company's business continuity and resilience. Business Continuity Management System (BCMS) is carried out as a systematic approach that ensures the Company is able to respond, mitigate, and recover from various disruptions that can hamper the Company's operations.

As part of the continual improvement cycle, the BCMS surveillance audit has a strategic role in maintaining the effectiveness of the system that has been implemented. Surveillance Audit ISO 22301:2019 BCMS aims to evaluate the Company's level of compliance with applicable standards, identify potential risks that still exist, and ensure that control and mitigation mechanisms are running in accordance with the established plan. In addition, the surveillance audit is also a means for the Company to continue to improve readiness and responsibility in dealing with incidents that can disrupt business continuity.

Based on the implementation of Surveillance Audit and Certification of ISO 22301:2019 BCMS dated October 14-18, 2024, the results obtained are PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) is recommended to continue ISO 22301:2019 certification with positive highlights and opportunities for improvement without major and minor findings, including:

No.	Opportunity for Improvement	Referensi Reference
1	Organisasi telah menyusun <i>Business Continuity Plan</i> untuk setiap kantor cabang dalam lingkup BCMS yang juga mencakup rencana evakuasi personel jika terjadi gangguan. Meskipun, BCP saat ini sangat bergantung pada personel aktivitas kantor dalam proses evakuasinya. The organization has developed a Business Continuity Plan for each branch office within the scope of BCMS that also includes a personnel evacuation plan in the event of a disruption. Although, the current BCP relies heavily on office activity personnel in the evacuation process.	8.4.4.1, 8.4.4.2
2	Kertas Kerja <i>Business Impact Analysis & Disruption Risk Assessment</i> sudah dibuat untuk Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Semarang. Improvement dapat dilakukan terkait dengan: - Kelengkapan penulisan referensi peraturan, persyaratan atau referensi yang dijadikan acuan dan interrelation document pada BIA-RA Kanwil & Kacab Semarang. - Kelengkapan identifikasi untuk <i>dependencies</i> terkait dengan <i>external provider</i> pada BIA-RA Kacab Semarang. Business Impact Analysis & Disruption Risk Assessment Working Papers have been created for the Regional Office and Semarang Branch Office. Improvements can be made related to: - Completeness of writing references to regulations, requirements or references that are used as references and interrelation documents at BIA-RA Regional Office & Branch Manager Semarang. - Completeness of identification for dependencies related to external providers at BIA-RA Kacab Semarang.	8.2

No.	Opportunity for Improvement	Referensi Reference
3	Pemeliharaan dan kelengkapan <i>resources</i> terkait fasilitas yang dibutuhkan untuk implementasi BCP dan kegiatan <i>Emergency Response</i> sudah memadai. Peningkatan dapat dilakukan terkait dengan: 1. Isi kotak P3K agar dipastikan tidak menyimpan obat telan. (Lokasi: First Aid Bag - lantai 1) - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008, Pasal 10. 2. Pemantauan suhu/kelembaban di ruangan router (Lokasi: lantai 2&3) 3. <i>Ceklist</i> inspeksi untuk <i>hydrant box</i>. (Lokasi: <i>All Area</i>) Maintenance and completeness of resources related to facilities required for BCP implementation and Emergency Response activities are adequate. Improvements can be made related to:: 1. Fill the first aid kit to ensure that it does not contain any ingestible drugs. (Location: First Aid Bag - 1st floor) - Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number PER.15/MEN/VIII/2008, Article 10. 2. Temperature/humidity monitoring in the router room (Location: 2nd&3rd floor) 3. Inspection checklist for hydrant box. (Location: All Area)	8.3.4.c
4	Pemeliharaan dan kelengkapan <i>resources</i> terkait fasilitas yang dibutuhkan untuk implementasi BCP dan kegiatan <i>Emergency Response</i> sudah memadai. Peningkatan dapat dilakukan terkait dengan: 1. Isi kotak P3K agar dipastikan tidak menyimpan obat telan. (Lokasi: First Aid Bag - lantai 1) - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008, Pasal 10. 2. <i>Housekeeping</i> di lemari tabung gas, ruang pos <i>security</i> belakang & ruang genset. (Lokasi: <i>Pantry</i> & Halaman Luar Gedung) Maintenance and completeness of resources related to facilities required for BCP implementation and Emergency Response activities are adequate. Improvements can be made related to: 1. Fill the first aid kit to ensure that it does not contain any ingestible drugs. (Location: First Aid Bag - 1st floor) - Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number PER.15/MEN/VIII/2008, Article 10. 2. Housekeeping in gas cylinder cabinet, rear security post room & generator room. (Location: <i>Pantry</i> & Outside Courtyard)	8.3.4.c

8. Tindaklanjut Audit Internal sesuai LHA

Sebagai langkah perbaikan, Divisi Manajemen Risiko telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA). Upaya ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan risiko serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal, sehingga selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan strategi mitigasi risiko perusahaan.

Dengan adanya tindak lanjut ini, diharapkan Divisi Manajemen Risiko dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kapabilitas manajemen risiko perusahaan serta memastikan tercapainya tujuan bisnis yang berkelanjutan.

8. Internal Audit Follow-up according to LHA

As a corrective measure, the Risk Management Division has followed up on the recommendations given based on the Audit Report (LHA). This effort is expected to strengthen the risk management system and improve the effectiveness of internal control, so that it is in line with the principles of good governance and the company's risk mitigation strategy.

With this follow-up, it is expected that the Risk Management Division can continue to contribute to improving the company's risk management capabilities and ensuring the achievement of sustainable business goals.

9. Integrasi MIS dengan Holding (Front End dan Back End)

Dalam upaya mencapai sasaran strategis perusahaan, Divisi Manajemen Risiko berkomitmen untuk melaksanakan **Integrasi MIS** bersama dengan *holding* sebagai kelanjutan dari proses integrasi yang telah dimulai pada tahun 2023. Integrasi ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan risiko secara menyeluruh, memastikan keselarasan dengan standar tata kelola yang baik, serta meningkatkan efektivitas sistem pemantauan dan mitigasi risiko di seluruh entitas dalam grup.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perusahaan telah mengintegrasikan **MIS** dengan *holding*, baik pada aspek **Front End** maupun **Back End**. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penyusunan *risk register* dalam **Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR)** menggunakan **tools Risk & Control Self-Assessment (RCSA)** untuk meningkatkan identifikasi dan pemantauan risiko
- b. Penambahan fitur **Key Risk Indicator (KRI)** guna memperkuat sistem pemantauan risiko secara proaktif
- c. Penyelesaian proses integrasi MIS yang ditandai dengan keberhasilan **Go Live** pada 29 November 2024

9. Integration of MIS with Holding (Front End and Back End)

In an effort to achieve the Company's strategic goals, the Risk Management Division is committed to implementing MIS Integration together with the holding as a continuation of the integration process that has begun in 2023. This integration aims to strengthen overall risk management, ensure alignment with good governance standards, and improve the effectiveness of risk monitoring and mitigation systems across all entities in the group.

As part of this effort, the Company has integrated the MIS with the holding, both on the Front End and Back End aspects. Some of the measures that have been taken include:

- a. Development of a risk register in the Risk Management Information System (SIMR) using Risk & Control Self-Assessment (RCSA) tools to improve risk identification and monitoring.
- b. Addition of Key Risk Indicator (KRI) feature to strengthen proactive risk monitoring system.
- c. Completion of the MIS integration process marked by successful Go Live on November 29, 2024.

Dengan adanya implementasi ini, diharapkan sistem manajemen risiko di perusahaan semakin terstruktur, responsif, dan terintegrasi dengan baik sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis risiko dan berorientasi pada keberlanjutan perusahaan.

10. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko
Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN Pasal 55, Organ Pengelola Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko terdiri dari:

- a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
- b. Direksi;
- c. Komite Audit;
- d. Komite Pemantau Risiko;
- e. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- f. Direktur yang membidangi pengelolaan risiko;
- g. Direktur yang membidangi pengelolaan Keuangan; dan
- h. SPI

Terkait hal tersebut perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kualifikasi organ pengelola risiko sebagaimana dimaksud di atas. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 disebutkan bahwa kualifikasi organ pengelola risiko dipenuhi melalui jumlah sertifikasi dan jam pelatihan yang wajib diikuti.

With this implementation, it is expected that the risk management system in the company will be more structured, responsive, and well integrated to provide added value in supporting more risk-based and sustainability-oriented decision making.

10. Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio
Based on the Regulation of the Minister of SOEs Number Per-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs Article 55, the Risk Management Organ in the implementation of Risk Management consists of:

- a. Board of Commissioners/Supervisory Board;
- b. Board of Directors;
- c. Audit Committee;
- d. Risk Monitoring Committee;
- e. Integrated Governance Committee;
- f. Director in charge of risk management;
- g. Director in charge of Financial management; and
- h. SPI

Related to this, the company is committed to meeting the qualifications of risk management organs as referred to above. In accordance with the Technical Guidelines for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within State-Owned Enterprises Number SK-3/DKU.MBU/05/2023, it is stated that the qualifications of risk management organs are met through the number of certifications and training hours that must be attended.

Rekapitulasi Kualifikasi Organ Pengelola Risiko
Recapitulation of Risk Management Organ Qualifications

Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (KPI) Qualification of Risk Management Organizations (KPI)	Jumlah Total	%
Total Organ Pengelola Risiko Total Risk Management Organs	69	
Terkualifikasi Pelatihan Qualified Training	69	100%
Terkualifikasi Sertifikasi Qualified Certification	68	99%
Terkualifikasi Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Training and Certification	68	98.55%

Sebanyak 98,55% Organ Pengelola Risiko telah terkualifikasi pelatihan dan sertifikasi per Desember 2024

A total of 98.55% of Risk Management Organs have qualified training and certification as of December 2024

11. Dashboard Manajemen Risiko
Sebagai bagian dari upaya terus menerus untuk memperkuat sistem pengelolaan risiko, Divisi Manajemen Risiko telah mengembangkan aplikasi **Dashboard Manajemen Risiko** yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengelolaan risiko secara lebih terstruktur dan transparan.

Fitur utama yang akan ditambahkan dalam aplikasi ini antara lain adalah parameter dampak atas seluruh jenis risiko, yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta ketentuan dalam **Prosedur Pengelolaan Risiko** perusahaan. Selain

11. Risk Management Dashboard
As part of its continuous efforts to strengthen the risk management system, the Risk Management Division has developed a **Risk Management Dashboard** application equipped with features tailored to the Company's needs. This development aims to improve the effectiveness of risk monitoring and management in a more structured and transparent manner.

The main features to be added in this application include impact parameters for all types of risks, which are tailored to the needs of the Company as well as the provisions in the company's **Risk Management Procedures**. In addition, the

itu, penambahan fitur **Key Risk Indicator (KRI)** juga telah dilakukan untuk mendukung pemantauan risiko secara lebih proaktif.

Keberhasilan pengembangan dan implementasi aplikasi ini akan ditandai dengan **Go Live** pada 13 Desember 2024. Aplikasi *Dashboard* Manajemen Risiko ini menjadi *tools* yang dapat membantu Manajemen melakukan pengambilan keputusan berbasis data risiko serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi dan mengelola berbagai tantangan yang ada.

12. Penyusunan Profiling Risiko Mitra Penerima Jaminan

Dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis risiko dan memperkuat pengelolaan risiko perusahaan, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan **Profiling Risiko Mitra Penerima Jaminan**.

Profiling risiko ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi risiko terkait dengan mitra penerima jaminan sehingga dapat mendukung keputusan dalam proses penjaminan.

Divisi Manajemen Risiko telah berkolaborasi dengan lembaga penyedia data. Hasil dari *profiling* risiko ini telah disampaikan kepada **Unit Kerja yang membidangi Bisnis dan Unit Kerja terkait lainnya** untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi ini diharapkan dapat memperkuat dasar pertimbangan dan membantu Unit Bisnis dalam mengelola risiko dengan lebih baik serta meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.

13. Peningkatan Budaya Sadar Risiko

Untuk mencapai tujuan tersebut, Divisi Manajemen Risiko melaksanakan serangkaian kegiatan yang berfokus pada **penanaman budaya risiko** serta **program sadar risiko**. Program-program ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko dalam setiap aspek operasional perusahaan.

14. Verifikasi ISO

Dapat dilaporkan bahwa Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan verifikasi ISO 31000:2018 Stage 1 Audit pada 16 Februari 2024 dan Stage 2 Audit pada 20-22 Maret 2024 dengan hasil bahwa Perusahaan memenuhi standar dan kriteria audit yang diidentifikasi dalam laporan audit dan PT Jamkrindo berhasil mendapatkan *Independent Opinion Statement* dari auditor yang menyatakan bahwa Penerapan Manajemen Risiko di PT Jamkrindo telah sesuai dan mengikuti ISO 31000:2018. Selanjutnya, Perusahaan dapat direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikasi (surat pengakuan) terhadap standar ISO 31000:2018.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Divisi Manajemen Risiko

Pencapaian kinerja Divisi Manajemen Risiko diukur melalui indikator KPI yang telah ditetapkan sebelumnya. Sepanjang tahun 2024, Divisi Manajemen Risiko berhasil melampaui target yang direncanakan. Berikut adalah rincian capaian KPI Divisi Manajemen Risiko:

addition of **Key Risk Indicator (KRI)** features has also been implemented to support more proactive risk monitoring.

The successful development and implementation of this application was marked by **Go Live** on December 13, 2024. The Risk Management Dashboard application is a tool that can help Management make risk data-based decisions and improve the company's ability to face and manage various challenges that exist.

12. Risk Profiling of Guarantee Recipient Partners

To support more risk-based decision making and strengthen enterprise risk management, the Risk Management Division has conducted **Risk Profiling of Guarantee Recipient Partners**.

This risk profiling aims to provide a comprehensive overview of the potential risks associated with the guarantee recipient partner so that it can support decisions in the guarantee process.

The Risk Management Division has collaborated with data providers. The results of this risk profiling have been submitted to the Work Unit in charge of Business and other related Work Units for consideration in the decision-making process. This information is expected to strengthen the basis for consideration and assist Business Units in managing risks better and improving the quality of decisions taken.

13. Improved Risk Awareness Culture

To achieve these objectives, the Risk Management Division conducted a series of activities that focus on **instilling a risk culture** as well as **risk awareness programs**. These programs aim to build awareness and understanding of the importance of risk management in every aspect of the Company's operations.

14. ISO Verification

It can be reported that the Risk Management Division has carried out the ISO 31000:2018 Stage 1 Audit verification on February 16, 2024 and Stage 2 Audit on March 20-22, 2024 with the result that the Company meets the standards and audit criteria identified in the audit report and PT Jamkrindo successfully obtained an Independent Opinion Statement from the auditor stating that the Implementation of Risk Management at PT Jamkrindo is in accordance and follows ISO 31000:2018. Furthermore, the Company can be recommended to obtain certification (letter of recognition) against the ISO 31000:2018 standards

Evaluation and Performance Assessment of the Risk Management Division

The performance assessment of the Risk Management Division is assessed through KPI indicators that were established in advanced. Throughout 2024, the Risk Management Division successfully exceeded its planned targets. The following is a breakdown of the Risk Management Division's KPI achievements:

Tabel KPI Divisi Manajemen Risiko 2024
2024 KPI Table of the Risk Management Division

No	KPI	Formula	Satuan Unit	Polraitas Polarity	Bobot Weight	Target	Realisasi per Desember Realization as of December	Pencapaian Achievement	Nilai iScore
1	Penyusunan Laporan Stress test Risiko Likuiditas Preparation of Liquidity Risk Stress Test Report	Tersedianya laporan stress test risiko likuiditas yang telah disetujui oleh Direktur yang membidangi Availability of a liquidity risk stress test report that has been approved by the Director in charge	waktu	Minimize	10	4	4	100%	10.00
2	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Roadmap for Improvement of Risk Management Implementation	Jumlah program yang dilaksanakan tahun 2024 / Total program roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko Number of programs implemented in 2024 / Total roadmap programs for improving risk management implementation	%	Maximize	9	100	100	100%	9.00
3	Penyusunan Contingency Plan Preparation of Contingency Plan	Tersedianya Laporan Contingency Plan PT Jamkrindo Availability of PT Jamkrindo Contingency Plan Report	%	Maximize	10	100	100	100%	10.00
4	Internal Control Testing (ICT)	Tersedianya Laporan Internal Control Testing Availability of Internal Control Testing Report	%	Maximize	11	100	100	100%	11.00
5	Pengembangan Blueprint Manajemen Risiko Development of Risk Management Blueprint	Tersedianya dokumen Blueprint Manajemen Risiko Availability of Risk Management Blueprint document	%	Maximize	13	100	100	100%	13.00
6	Risk Maturity Assessment	Tersedianya skor Risk Maturity Assessment berdasarkan Petunjuk Teknis Penilaian oleh KBUMN Availability of Risk Maturity Assessment score based on Technical Guidelines for Assessment by Ministry of SOEs	%	Maximize	9	100	100	100%	9.00
7	Surveillance Sertifikasi ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System (BCMS) ISO 22301:2019 Certification Surveillance – Business Continuity Management System (BCMS)	Sertifikasi ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System (BCMS) ISO 22301:2019 Certification – Business Continuity Management System (BCMS)	%	Maximize	12	100	100	100%	12.00
8	Audit Rating	Hasil Audit Rating (Satisfactory: 100% Acceptable: 75% Inadequate: 50% Unsatisfactory: 25%) Audit Rating Result (Satisfactory: 100% Acceptable: 75% Inadequate: 50% Unsatisfactory: 25%)	%	Maximize	8	100	50	50%	4.00

Tabel KPI Divisi Manajemen Risiko 2024
2024 KPI Table of the Risk Management Division

No	KPI	Formula	Satuan Unit	Polraitas Polarity	Bobot Weight	Target	Realisasi per Desember Realization as of December	Pencapaian Achievement	Nilai iScore
9	Integrasi MIS dengan Holding (Front Enda dan Back End) MIS Integration with Holding (Front End and Back End)	Progres penyelesaian: Implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi; (Bobot: 100%) Completion progress: Implementation of Integrated Risk Management; (Weight: 100%)	%	Maximize	8	100	100	100%	8.00
10	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio	Jumlah personil organ pengelola risiko yang memenuhi kualifikasi / jumlah personil organ pengelola risiko Number of qualified risk management organ personnel/number of risk management organ personnel	%	Maximize	10	90	98.55	109.50%	10.95
Jumlah Total					100				96.95

Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan adalah elemen kunci dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan bisnis suatu perusahaan. Fungsi Kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, prosedur, dan aktivitas operasional perusahaan selaras dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan otoritas yang berwenang. Selain itu, fungsi ini juga menjamin bahwa komitmen perusahaan terhadap regulator dan pihak berwenang terlaksana secara konsisten.

Sebagai bagian dari penerapan GCG, peran kepatuhan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aturan tetapi juga pada pembentukan budaya perusahaan yang mengutamakan integritas. Oleh karena itu, dukungan penuh dari seluruh elemen Perusahaan sangat diperlukan agar nilai-nilai kepatuhan dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari perilaku setiap individu di lingkungan kerja.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Nomor 121/SKD/4/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, PT Jaminan Kredit Indonesia menunjuk M. Natsir Rahmadi sebagai Kepala Divisi Kepatuhan. Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya Perusahaan dalam memperkuat tata kelola yang sesuai dengan peraturan.

Compliance Function

Compliance is a critical element in maintaining the credibility and sustainability of a company's operations. The Compliance function ensures that every policy, procedure, and operational activity of the Company aligns with the applicable laws, regulations, and provisions set by the relevant authorities. Additionally, this function ensures that the Company's commitments to regulators and authorities are consistently upheld.

As part of the Company's implementation of Good Corporate Governance (GCG), the role of compliance extends beyond adhering to the compliance of rules; it also involves fostering a corporate culture that prioritizes integrity. Therefore, full support from all elements of the Company is essential to ensure that compliance values become integral part of the behavior of every employee in the work environment.

Profile of the Head of Compliance Work Unit

PT Jaminan Kredit Indonesia appointed M. Natsir Rahmadi as Head of the Compliance Work Unit in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 121/SKD/4/XII/2022 dated December 26, 2022. This appointment is part of the Company's efforts to strengthen governance in accordance with applicable regulations.

M. Natsir Rahmadi

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Head of Compliance Work Unit

Menjabat Sejak: 1 Agustus 2016
Has Served Since: August 1, 2016

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	53 tahun 53 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Pasuruan, 25 Mei 1972 Pasuruan, May 25, 1972
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Pendidikan Education	:	• Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (1999) • Bachelor's Degree in Law at Brawijaya University (1999)
Riwayat Jabatan Position History	:	Berkarir di Jamkrindo sejak tahun 2003. Jabatan yang pernah dipercayakan adalah Sekretaris Perusahaan (2015-2016), Plt. Sekretaris Perusahaan (2014-2015), Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Lembaga Sekretaris Perusahaan (2014), Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Hukum dan Kepatuhan (2012-2014), dan Kepala Seksi Administrasi & Keuangan KAC Papua (2011-2012). M. Natsir Rahmadi has had a career with Jamkrindo since 2003. The positions that have been entrusted to M. Natsir Rahmadi are as follows: Corporate Secretary (2015-2016), Acting Corporate Secretary (2014-2015), Head of Legal and Institutional Relations Section of Corporate Secretary (2014), Head of Compliance Section of Legal and Compliance Division (2012-2014), and Head of Administration & Finance Section of KAC Papua (2011-2012).
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	:	• Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sertifikasi Manajemen Risiko Level I, Sertifikasi Manajemen Risiko Level II, dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level III • ISO 37001:2016 Certification for Anti-Bribery Management System, Level I Risk Management Certification, Level II Risk Management Certification, and Level III Risk Management Certification

Profil Wakil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 70/SKD/4/XI/2023 tanggal 1 November 2023 PT Jaminan Kredit Indonesia menunjuk Bambang Hajar Herwibowo sebagai Wakil Kepala Divisi Kepatuhan.

Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya Perusahaan dalam memperkuat tata kelola yang sesuai dengan peraturan.

Profile of the Deputy Head of the Compliance Work Unit

PT Jaminan Kredit Indonesia appointed Bambang Hajar Herwibowo as Deputy Head of the Compliance Division in accordance with Board of Directors Decree No. 70/SKD/4/XI/2023 dated November 1, 2023.

This appointment is part of the Company's efforts to strengthen governance in accordance with applicable regulations.

Bambang H. Herwibowo

Wakil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Deputy Head of the Compliance Work Unit

Menjabat Sejak: 1 Agustus 2016
Has Served Since: August 1, 2016

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	40 tahun 40 years old
Kelahiran Date of Birth	:	Semarang, 02 Mei 1984 Semarang, May 2, 1984
Domisili Domicile	:	Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Semarang, Central Java, Indonesia
Pendidikan Education	:	• Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2002) • Bachelor's Degree in Law at Diponegoro University (2002)

Riwayat Jabatan Position History	Berkarir di Jamkrindo sejak tahun 2008. Jabatan yang pernah dipercayakan adalah Pemimpin Cabang Semarang (2023-2024), Pemimpin Cabang Pekalongan (2022-2023), Kepala Bagian Hukum (2017 - 2022), Kepala Seksi Hukum (2015-2017), dan Kepala Unit Pelayanan Pakalongan (2014-2015). Bambang H. Herwibowo has had a career with Jamkrindo since 2008. The positions that have been entrusted to Bambang H. Herwibowo are as follows: Semarang Branch Manager (2023-2024), Pekalongan Branch Manager (2022-2023), Head of Legal Section (2017-2022), Head of Legal Section (2015-2017), and Head of Pakalongan Service Unit (2014-2015).
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	• Sertifikasi Advokat, Sertifikasi Manajemen Risiko Level I, Sertifikasi Manajemen Risiko Level II, dan Sertifikasi Arbitrase • Advocate Certification, Level I Risk Management Certification, Level II Risk Management Certification, and Arbitration Certification

Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan

Sebagai langkah untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam Satuan Kerja Kepatuhan, struktur organisasi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 01/KD/5/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Struktur Organisasi. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan fungsi yang ada di dalam unit kerja tersebut.

Organizational Structure and Position of the Compliance Work Unit

To clarify the roles and responsibilities within the Compliance Work Unit, the organizational structure has been established in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 01/KD/5/I/2024 dated January 10, 2024 concerning Organizational Structure. This structure aims to ensure clear delineation of functions within the division.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan PT Jamkrindo Organizational Structure of the Compliance Division of PT Jamkrindo



Hingga akhir tahun 2024, Satuan Kerja Kepatuhan memiliki jumlah karyawan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dengan rincian sebagai berikut:

Until the end of 2024, the Compliance Work Unit has a total of 25 (twenty five) employees, with the following details:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (employees)
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Head of Compliance Work Unit	1
Wakil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Deputy Chief of the Compliance Work Unit	1

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (employees)
Kepala Departemen Hukum Head of the Legal Department	1
Kepala Departemen Kepatuhan Head of the Compliance Department	1
Kepala Departemen Pengelolaan Kebijakan Head of the Policy Management Department	1
Fungsional Kepatuhan Compliance Function	7
Staf Departemen Hukum Staff of the Legal Department	3
Staf Departemen Kepatuhan Staff of the Compliance Department	2
Staf Departemen Pengelolaan Kebijakan Staff of the Policy Management Department	0
Calon Karyawan Prospective Employees	2
KKWT Specific Time Work Agreement	4
Prohire	1
Agendaris Clerical Staff	1
Total	25

Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas Divisi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Divisi Kepatuhan;
2. Pengelolaan Penyusunan *Legal Drafting/Legal Review* atas Dokumen:
 - a. Ketetapan Direksi/Peraturan Direksi/Surat Edaran Direksi/Surat Keputusan Direksi;
 - b. Perjanjian Kerja Sama/MoU/SP3 Induk;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Surat Kuasa Direksi;
 - e. Surat Pernyataan Direksi;
 - f. Pakta Integritas Direksi; dan
 - g. Surat Tugas Direksi dan lainnya.
3. Pengelolaan Penyusunan Kebijakan Internal Divisi Kepatuhan;
4. Pengelolaan Pengharmonisasian Kebijakan Internal dengan Regulasi Eksternal;
5. Pengelolaan Penyusunan Kajian Hukum (Legal Opinion);
6. Pengelolaan Pendampingan dan Pemberian Bantuan Hukum;
7. Pengelolaan Penyelesaian Masalah Hukum (Litigasi dan Non Litigasi);
8. Pengelolaan Penerapan 4 Eyes Principle;
9. Pengelolaan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Prosedur Kepatuhan Perusahaan;
10. Pengelolaan Penyusunan Ringkasan Regulasi/Kebijakan/Ketentuan Eksternal;
11. Pengelolaan Penyusunan Pendapat Kepatuhan (Opini Kepatuhan);
12. Pengelolaan Pemantauan terhadap Pemenuhan Komitmen Sesuai Regulasi;
13. Pengelolaan Penyusunan Board Manual;

Duties of the Compliance Work Unit

The duties of the compliance Division are as follows:

1. Preparation of the Work Plan and Budget (RKA) of the Compliance Work Unit;
2. Management of the Preparation of Legal Drafting/Legal Review of the following Documents:
 - a. Decree of the Board of Directors/Regulation of the Board of Directors/Circular Letter of the Board of Directors/Decree of the Board of Directors;
 - b. Main Cooperation Agreement/MoU/SP3;
 - c. Work Order (SPK);
 - d. The Board of Directors' Power of Attorney;
 - e. Statement Letter of the Board of Directors;
 - f. Integrity Pact of the Board of Directors; and
 - g. Letter of Assignment of the Board of Directors and others.
3. Management of Compliance Division Internal Policy Development;
4. Management of the Alignment of Internal Policy with External Regulations;
5. Management of the Preparation of Legal Opinion;
6. Management of Assistance and Provision of Legal Aid;
7. Management of Legal Problem Settlement (Litigation and Non-Litigation);
8. Management of the Implementation of the 4 Eyes Principle;
9. Management of the Preparation and Implementation of Company Compliance Policies and Procedures;
10. Management of the Preparation of Summary of External Regulations/Policies/Provisions;
11. Management of the Preparation of Compliance Opinion;
12. Management of the Monitoring of the Fulfillment of Regulatory Commitments;
13. Management of the Preparation of the Board Manual;

14. Pengelolaan Tugas sesuai Tata Laksana dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) di Unit Kerja Sebagai Bagian dari Pengendalian Internal (Internal Control);
15. Pengembangan Kompetensi Karyawan yang Berada di Unit Kerja;
16. Penerapan Manajemen Risiko di Unit Kerja;
17. Pengelolaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Divisi Kepatuhan; dan
18. Pengelolaan Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain dalam Lingkup Bidang Tugasnya

Sertifikasi Profesi Satuan Kerja Kepatuhan

Profesionalisme auditor dalam mendukung perkembangan Satuan Kerja Kepatuhan, khususnya di bidang Hukum dan Kepatuhan, sangat dipengaruhi oleh sertifikasi profesi. Berikut adalah rincian sertifikasi yang telah diperoleh oleh karyawan Satuan Kerja Kepatuhan hingga akhir tahun 2024.

14. Management of Duties in accordance with Good Corporate Governance (GCG) in Work Units as part of the internal control.
15. Competency Development for Employees in Work Units
16. Implementation of Risk Management in Work Units;
17. Management of the Preparation and Submission of Compliance Division Reports; and
18. Management of the Implementation of Other Tasks within the Scope of their Field of Duty

Professional Certification of the Compliance Work Unit

The professionalism of auditors in supporting the development of the Compliance Working Unit, especially in the areas of Law and Compliance, is significantly influenced by professional certifications. The following are the details regarding certifications that have been obtained by employees of the Compliance Working Unit until the end of 2024.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Types of Risk Management Profession Certification
Bambang H. Herwibowo	1. Advokat 2. Sertifikasi Arbitrase 1. Advocate 2. Arbitration Certificate
Risky Putra Dewa	1. Advokat 2. Certified Legal Auditor (CLA) 3. Certified Mediator 4. Certified Banking Legal Consultant 1. Advocate 2. Certified Legal Auditor (CLA) 3. Certified Mediator 4. Certified Banking Legal Consultant
Yusron	Certified Governance Risk Compliance Professional
M. Rizal Fikri	1. Advokat 2. Certified Compliance Profesional (CCP) 3. Certified Mediator 4. Certified Contract Drafting (CCD) 1. Advocate 2. Certified Compliance Profesional (CCP) 3. Certified Mediator 4. Certified Contract Drafting (CCD)
Anggi Putera	1. Certified Legal Auditor (CLA) 2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) 1. Certified Legal Auditor (CLA) 2. Special Education for the Advocate Profession (PKPA)
Gabby Chikita Putri	1. Certified Governance Risk Compliance Professional 2. Advokat 3. Pelatihan dan Sertifikasi Perancangan Kontrak 4. Pelatihan dan Sertifikasi Compliance Management Fundamentals 1. Certified Governance Risk Compliance Professional 2. Advocate 3. Contract Drafting Training and Certification 4. Compliance Management Fundamentals Training and Certification
Mega Nursihati	Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan Banking Law Consultant Training and Certification
Bayu Ramadhan	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Special Education for the Advocate Profession (PKPA)
Muchammad Fauzan Harris	Advokat Advocate
Muhammad Rasid	Advokat Advocate

Saat ini, sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 40% dari total karyawan di Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki sertifikasi profesi. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan tingkat sertifikasi profesi, baik untuk karyawan yang sudah bersertifikasi maupun bagi Satuan Kerja Kepatuhan yang belum memilikinya.

Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Menyadari pentingnya peningkatan kualitas SDM, Jamkrindo terus berfokus pada pengembangan kompetensi karyawan melalui berbagai program pelatihan. Dalam lingkup Satuan Kerja Kepatuhan, pengembangan ini bertujuan untuk memastikan karyawan memiliki pengetahuan terkini guna menunjang pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan secara optimal. Berikut adalah rincian program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh karyawan Satuan Kerja Kepatuhan sepanjang tahun 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Date	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Penyelenggara Organizers
Bambang H. Herwibowo	Wakil Kepala Divisi Kepatuhan Deputy Head of the Compliance Work Unit	30 Mei 2024 May 30, 2024	Leadership Development Program	Branch Manager Development Program (BMDP) - Graduation Program Igniting Future Visionaries	Duage Manajemen Duage Management
Yusrion	Kepala Departemen Kepatuhan Head of the Compliance Department	27 feb – 01 Maret 2024 February 27 - March 1, 2024	Pelatihan dan Sertifikasi Compliance Management Fundamentals Compliance Management Fundamentals Training and Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Compliance Management Fundamentals Compliance Management Fundamentals Training and Certification	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
Mega Nursihati	Staf Departemen Hukum Staff of the Legal Department	31-03 Agustus 2024 31 - August 03, 2024	Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan Banking Law Consultant Training and Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Perbankan Banking Law Consultant Training and Certification	justitia training center
Gabby Chikita Putri	Staf Departemen Kepatuhan Staff of the Compliance Department	27 Feb – 1 Maret 2024 February 27 - March 1, 2024	Pelatihan dan Sertifikasi Compliance Management Fundamentals Compliance Management Fundamentals Training and Certification	Pelatihan dan Sertifikasi Compliance Management Fundamentals Compliance Management Fundamentals Training and Certification	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2024

Pengendalian anggaran secara efisien dan efektif. Sasaran tersebut dilakukan melalui strategi monitoring dan pengendalian anggaran secara periodik dan menyampaikan tingkat pencapaian anggaran kepada unit kerja yang membutuhkan.

Langkah kebijakan demi mendukung pencapaian sasaran tersebut diantaranya adalah memastikan bahwa biaya-biaya yang direalisasikan telah direncanakan/dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Perusahaan.

Dapat dilaporkan bahwa saat ini kami telah menyampaikan pencapaian anggaran Kantor Pusat periode sampai dengan Triwulan IV 2024 kepada manajemen terkait biaya-biaya dan laporan manajemen setiap bulan yang mencakup realisasi program kerja, kerjaan rutinitas dan keuangan dengan tujuan sebagai bahan evaluasi kinerja yang digunakan oleh manajemen

Currently, a total of 10 (ten) employees, or 40% of the total employees in the Compliance Working Unit hold professional certifications. The Company remains committed to continuously improving the level of professional certification, both for employees who are already certified and for those working in the Compliance Work Unit who have yet to obtain the certification.

Competency Development of the Compliance Work Unit

Jamkrindo recognizes the importance of enhancing the quality of human capital and continues to focus on developing employee competencies through various training programs. Within the Compliance Work Unit, this efforts aim to ensure that employees possesses up-to-date knowledge to optimally support the implementation of their responsibilities. The following are details of competency development programs attended by employees of the Compliance Work Unit throughout 2024:

Brief Report on the Implementation of the 2024 Compliance Work Unit Duties

Efficient and effective budget control is achieved through regular monitoring and controlling the budget, along with communicating budget realization levels to the relevant work units.

Policy measures supporting the achievement of these goals include ensuring that incurred expenses are planned and budgeted in alignment with the Company's needs and objectives.

It is reported that, as of the fourth quarter of 2024, the Head Office budget performance has been submitted to management. This includes monthly costs and management reports covering the realization of work programs, routine activities and finances matters, all of which serves as a basis for performance evaluation material by management.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Satuan Kerja Kepatuhan

Pada tahun 2024, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan berbagai program kerja, mencakup berbagai inisiatif berikut:

1. Pengkinian dan penyelarasan pedstra. Kebijakan, prosedur, dan petunjuk teknis bidang hukum (APS B)
2. Penyelenggaraan Rapat Kerja Fungsi Hukum IFG Group
3. Kolaborasi Bidang Hukum IFG Group (IFG Legal Forum) APS
4. Review Aplikasi Jamkrindo Guarantee Agreement System (JAGAT)
5. Standardisasi Perjanjian Penjaminan (APS B)
6. Standardisasi Kontrak PBJ (SPK)
7. Review peraturan internal yang terdampak dari terbitnya PER-1/MBU/03/2023, PER-2/MBU/03/2023, dan PER-3/MBU/03/2023
8. Surveillance Audit dan Peningkatan *Awareness* Implementasi dan Pemahaman Sertifikasi SMAP
9. Utilisasi *i-Compliance* di Perusahaan untuk memperkuat pengelolaan tata kelola terintegrasi (APS Seri B)
10. Pelaksanaan Pemenuhan GAP Analysis dan Implementasi UU PDP disampaikan kepada Induk Holding
11. Self Assessment Kepatuhan
12. Implementasi Roadmap Kepatuhan PT Jamkrindo Tahun 2024
13. Utilisasi *i-Regulation* di Perusahaan untuk memperkuat pengelolaan tata kelola terintegrasi
14. Harmonisasi Peraturan Perusahaan Tahun 2024

Sebanyak 14 program kerja tersebut telah selesai dilakukan 100% pada tahun 2024.

Performance Evaluation and Assessment of the Compliance Work Unit

In 2024, the Compliance Work Unit has implemented various work programs, as listed below:

1. Pedstra update and alignment. Legal policies, procedures, and technical guidelines (APS B)
2. Organization of IFG Group Legal Function Work Meeting
3. IFG's APS Legal Forum Collaboration
4. Review of Jamkrindo Guarantee Agreement System (JAGAT) Application
5. Standardization of Guarantee Agreement (APS B)
6. Standardization of the Procurement of Goods and Services Contract (SPK/Work Order)
7. Review of internal regulations affected by the issuance of PER-1/MBU/03/2023, PER-2/MBU/03/2023, and PER-3/MBU/03/2023
8. Surveillance Audit, Implementation of Awareness Raising, and Dissemination of the SMAP Certification
9. Utilization of *i-Compliance* in the Company to strengthen integrated governance management (Series B APS)
10. Implementation of GAP Analysis Fulfillment and the Implementation of the PDP Law submitted to the Parent Holding
11. Compliance Self Assessment
12. Implementation of PT Jamkrindo's 2024 Compliance Roadmap
13. Utilization of *i-Regulation* in the Company to strengthen integrated governance management
14. Alignment of 2024 Company Regulations

A total of 14 work programs have been completed 100% by 2024.

Tabel KPI Divisi Kepatuhan 2024
2024 KPI Table of the Compliance Division

No.	KPI
1	Merevisi dan Melengkapi Kebijakan Pengelolaan Bidang Kepatuhan sesuai ISO 37301:2021 Revise and Complete Compliance Management Policy in accordance to ISO 37301:2021
2	Finalisasi Perjanjian Kerja Sama Bisnis dari Aspek Hukum dan Kepatuhan Finalization of Business Cooperation Agreement from Legal and Compliance Aspects
3	Standarisasi Dokumen Perjanjian pada Dokumen Suretybond Standardization of Agreement Documents on Suretybond Documents
4	Harmonisasi Peraturan dan Standard Operating Procedure (SOP) Perusahaan yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023, PER-2/MBU/03/2023 dan PER-3/MBU/03/2023 Alignment of Company Regulations with Standard Operating Procedures (SOP) required by the Minister of SOEs Regulations Number PER-1/MBU/03/2023, PER-2/MBU/03/2023 and PER-3/MBU/03/2023.
5	Penerapan Perlindungan Konsumen Perusahaan Implementation of the Company's Consumer Protection
6	Surveillance Sertifikasi SMAP SNI 37001:2016 Anti Bribery Management System SMAP SNI 37001:2016 Anti Bribery Management System Certification Surveillance
7	Audit Rating

Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern

Proses pengawasan terhadap operasional dan bisnis suatu perusahaan menjadi elemen krusial untuk memastikan keberlangsungan dan efisiensi organisasi. Di Jamkrindo, tanggung jawab ini dilaksanakan melalui Audit Internal yang berada di bawah kewenangan Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Internal Audit Unit

The process of monitoring a company's operations and business activities is a crucial element in ensuring the organization's sustainability and efficiency. At Jamkrindo, this responsibility is carried out by the Internal Audit, which operates under the authority of the Internal Audit Unit (SPI). SPI plays an important

SPI berperan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan yang independen dan objektif untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai standar.

Dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, SPI memiliki mandat utama untuk melakukan kegiatan *assurance* dan konsultasi. Kegiatan ini dirancang untuk menambah nilai dan memberikan perbaikan signifikan pada operasional perusahaan. Dengan pendekatan yang sistematis, SPI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan, sehingga mampu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Apabila Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal yang diatur dalam peraturan yang berlaku, atau dinilai gagal maupun tidak cakap dalam menjalankan tugasnya, Direktur Utama dapat memberhentikan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Mengacu pada Keputusan Direksi No. 57/SKD/4/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Jamkrindo, Andry Septianto ditunjuk sebagai Kepala SPI. Penunjukan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

role in providing independent and objective monitoring function to ensure that corporate governance is implemented in accordance with established standards.

Led by a Head of SPI who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, SPI has a primary mandate to perform assurance and consulting activities. These activities aim to add value and deliver significant improvements across the Company's operations. Through a systematic approach, SPI conducts comprehensive evaluations of the adequacy and effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance, with the goal of continuously enhancing organizational performance

The Party that Appoints/Dismisses the Head of the Internal Audit Unit

The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Should the Head of SPI no longer meets the qualifications prescribed by applicable regulations, or be deemed ineffective or be incapable of fulfilling their duties, the President Director may dismiss them with the Board of Commissioners' approval.

Profile of the Head of Internal Audit

Andry Septianto was appointed as Head of the Internal Audit in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 57/SKD/4/XII/2020 dated December 1, 2020 concerning the Appointment of Head of Internal Audit Unit of PT Jamkrindo. This appointment has been approved by the Board of Commissioners.

Andry Septianto

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head Of Internal Audit

Menjabat Sejak: 1 Desember 2020
Has Served Since: December 1, 2020

Warga negara Citizenship	: Indonesia
Usia Age	: 46 tahun 46 years old
Kelahiran Date of Birth	: Sawit Seberang, 22 September 1978 Sawit Seberang, September 22, 1978
Domisili Domicile	: Medan, Sumatera Utara, Indonesia Medan, North Sumatra, Indonesia
Pendidikan Education	: M.M, Manajemen, Universitas Gadjah Mada, 2004 Master's Degree in Management at Gadjah Mada University, 2004
Riwayat Jabatan Position History	: - Kepala Satuan Pengawasan Intern (1 Desember 2020-sekarang) - Wakil Kepala Satuan Pengawasan Intern (5 Oktober 2020-30 November 2020) - Pemimpin Cabang Bandung (31 Agustus 2018-4 Oktober 2020) - Kepala Kantor Cabang Kupang (3 Februari 2017-30 Agustus 2018) - Head of Internal Audit (December 1, 2020 - current) - Deputy Head of Internal Audit (October 5, 2020 - November 30, 2020) - Head of Bandung Branch Office (August 31, 2018-October 4, 2020) - Head of Kupang Branch Office (February 3, 2017-August 30, 2018)
Sertifikasi yang Dimiliki Certifications	: <i>Qualified Internal Audit (QIA)</i>

Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) Jamkrindo dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang pengangkatannya dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pemberhentian Kepala SPI oleh Direktur Utama juga harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, terutama apabila Kepala SPI dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, atau jika dinilai gagal maupun tidak kompeten dalam melaksanakan tugas.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai fungsi-fungsi dalam SPI, berikut ditampilkan struktur organisasi SPI yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi nomor 01/KD/5/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Struktur Organisasi.

Organizational Structure and Position of the Internal Audit Unit

Jamkrindo's Internal Audit Unit (SPI) is led by a Head who was appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Any dismissal of the Head of SPI by the President Director must also receive prior approval from the Board of Commissioners. The Head of SPI may be dismissed if they no longer meet the qualification required of an Internal Auditor as stipulated in applicable regulations, or if they are deemed to have failed or be incapable of performing their duties.

To provide a clearer understanding of the SPI's functions, the organizational structure—approved through the Decree of the Board of Directors No. 01/KD/5/I/2024 dated January 10, 2024—is presented below.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) Jamkrindo Organizational Structure of the Jamkrindo Internal Audit Unit (SPI)



Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam fungsi pengawasan, SPI memegang peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional. Oleh karena itu, kebutuhan akan jumlah dan kompetensi personel SPI terus dioptimalkan. Di tahun 2024, SPI diperkuat oleh 31 (tiga puluh satu) karyawan dengan komposisi sebagai berikut:

As the unit responsible for the monitoring function, SPI plays a strategic role in supporting the success of the Company's operations. Accordingly, efforts to optimize the number and competency of SPI personnel continue to be pursued. In 2024, SPI was strengthened by the addition of 31 employees, with the following composition:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (employees)
Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit	1
Kepala Departemen Audit Head of Audit Department	5
Fungsional Senior Specialist Senior Function Specialist	1
Fungsional Middle Specialist Middle Function Specialist	1
Fungsional Senior Analyst Senior Function Analyst	5
Fungsional Middle Analyst Middle Function Analyst	8
Fungsional Junior Analyst Junior Function Analyst	2
Staf Staff	6
Calon Karyawan Prospective Employees	2
KKWT Pro-Hire Specific Time Work Agreement Professional Hire	-
Jumlah Total	31

Piagam SPI (*Internal Audit Charter*)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) memiliki Audit Charter yang diatur melalui Ketetapan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor: 04/KD/1/XII/2023, tertanggal 29 Desember 2023, tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter). Selain itu, kebijakan terkait diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor: 34/Per-Dir/1/XII/2023, yang juga ditetapkan pada 29 Desember 2023, mengenai Kebijakan Audit Internal.

Internal Audit Charter ini disusun sebagai bentuk pemenuhan terhadap kepatuhan perusahaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023, tertanggal 24 Maret 2023, tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, penyusunan ini juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Visi dan Misi SPI

Visi Vision	
Menjadi strategic business partner yang independen, objektif, profesional, terpercaya, tanggap melalui kegiatan assurance dan consulting serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.	To become an independent, objective, professional, trustworthy, and responsive strategic business partner through assurance and consulting activities that add value to the Company.

Internal Audit Charter

The Internal Audit Unit (SPI) operates under an Audit Charter established through the Decree of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia Number: 04/KD/1/XII/2023 dated December 29, 2023 concerning the Internal Audit Charter. In addition, related policies are stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 34/Per-Dir/1/XII/2023, also dated December 29, 2023, concerning the Internal Audit Policy.

The Internal Audit Charter was developed as part of the Company's compliance efforts and aligns with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. It is also prepared in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.

SPI's Vision and Mission

Misi Mission	
1. Aktif melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas Perusahaan meliputi proses pengendalian manajemen, operasional, dan pengelolaan risiko dalam peningkatan kinerja Perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG. 2. Meningkatkan peran pemeriksaan intern dan kualitas hasil pengawasan melalui peningkatan kompetensi Auditor Internal dan pemanfaatan sistem informasi. 3. Mengupayakan pelayanan konsultasi untuk meningkatkan nilai-nilai Perusahaan dan sistem pendukungnya, memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas Perusahaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan, business best practice, dan prosedur serta kebijakan yang ditetapkan. 4. Memberikan nilai tambah yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, proaktif, antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar permasalahan, dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.	1. Actively monitor all Company activities, including management control processes, operations, and risk management to enhance performance through improved efficiency and effectiveness of activities, based on the principles of Good Corporate Governance (GCG). 2. Strengthen the role of internal audit and the quality of monitoring outcomes enhancing the competencies of Internal Auditor and leveraging information systems. 3. Provide consulting services that enhance the Company value and support systems, while ensuring that all activities comply with applicable regulations, business best practices, and established procedures and policies. 4. Deliver added value by focusing on business processes and customers satisfaction through proactive, enthusiastic and trustworthy engagement; effective communication; root cause identification; and optimal utilization of information technology systems.

Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) terkait dengan Pemeriksaan Internal Perusahaan

SPI Jamkrindo memiliki tugas dalam melaksanakan Pemeriksaan Internal pada Perusahaan, yang meliputi:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjalankan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan anggarannya;
3. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan pemeriksaan lainnya atas tugas sesuai arahan dan persetujuan Direktur Utama;
4. Melakukan review dan evaluasi penerapan GCG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan organisasi yang berlaku serta memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko dengan membantu Perusahaan mengidentifikasi besaran risiko yang signifikan;
5. Melakukan koordinasi kegiatan SPI dengan kegiatan unit kerja lainnya di lingkungan Perusahaan dan mengevaluasi kecukupan indikator pengukuran kinerja yang digunakan;
6. Menyusun dan menyempurnakan standar kerja audit internal dan pedoman audit internal dan mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan SPI;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada pihak-pihak terkait;
8. Melakukan monitoring dan pelaksanaan atas tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal serta memberikan jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya terkait dengan fungsi pengawasan;
9. Berkoordinasi dengan pihak eksternal berdasarkan penugasan dari Direktur Utama dalam kaitan dengan tugas-tugas pengawasan;
10. Meningkatkan kompetensi pemeriksaan intern melalui pendidikan dan pelatihan.

Duties of the Internal Audit Unit (SPI) related to the Company's Internal Audit

Jamkrindo's SPI is responsible for conducting internal audits within the Company, which includes the following duties:

1. Assist the President Director and the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties by planning, implementing, and monitoring of audit results;
2. Coordinate and integrate the preparation of the Annual Audit Work Program (PKAT) and its corresponding budget;
3. Conduct regular audits in accordance with the Annual Audit Work Program (PKAT), as well as special audits based on the direction and approval of the President Director;
4. Review and evaluate the implementation of GCG by providing assessments in line with applicable regulations and policies, and contribute to strengthening risk management process by assisting the Company in the identification of significant risks;
5. Coordinate SPI activities with other work units across Company and evaluate the adequacy of performance assessment indicators used;
6. Develop and refine the internal audit work standards and guidelines, and coordinate the preparation of SPI activity reports;
7. Submit the Audit Reports (LHA) to relevant stakeholders;
8. Monitor and ensure the implementation of follow-up actions on both internal and external audit findings, and provide objective consulting services to management and related work units;
9. Coordinate with external parties, as assigned by the President Director, in relation to monitoring functions;
10. Improve the competencies of internal audit through ongoing education and training programs.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, SPI bertanggung jawab untuk:

1. Menyelenggarakan program kerja pengawasan atas pelaksanaan semua kebijakan dan keputusan Direksi serta program kerja Perusahaan;
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada bidang Pengawasan Intern Perusahaan yang berkaitan dengan pemeriksaan kegiatan operasional dan administrasi & keuangan;
3. Melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran laporan atau informasi mengenai segala hal yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan;
4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama mengenai hasil audit, berikut saran perbaikannya;
5. Menilai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melakukan penilaian dan pemantauan atas semua sistem, prosedur, ketentuan dan operasional Perusahaan untuk mendorong efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/pengelolaan risiko usaha;
6. Menilai sistem pengendalian intern perusahaan;
7. Menilai kewajaran laporan keuangan dan menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional/non operasional perusahaan;
8. Memberikan pendapat, usulan dan saran perbaikan atas kegiatan operasional/non operasional;
9. Memotivasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh setiap unit kerja dan wajib melakukan penilaian dan pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut oleh semua Organ Perusahaan;
10. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit atas hasil audit SPI maupun auditor eksternal dan melaporkan hasil pantauan tersebut kepada Direktur Utama;
11. Menjadi mitra kerja auditor eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan ataupun pemeriksaan lainnya.

Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi Auditor Internal

SPI Jamkrindo merupakan anggota aktif dalam Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) Asuransi Negara dan Jasa Keuangan (Asgara Jaskeu Plus). Partisipasi SPI dalam forum ini berperan penting sebagai wadah berbagi pengetahuan dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan internal di antara sesama BUMN.

Sertifikasi Profesi Satuan Pengawasan Intern

Penguasaan sertifikasi profesi adalah langkah strategis bagi auditor untuk tetap relevan dalam menghadapi dinamika audit modern, termasuk dalam aspek kepatuhan dan perkembangan sektor industri. Berikut adalah sertifikasi profesi yang telah diraih oleh karyawan SPI hingga akhir tahun 2024.

To carry out its primary duties, SPI is responsible for:

1. Organizing monitoring programs related to the implementation of all policies, decisions made by the Board of Directors, and the Company's work programs;
2. Coordinating and overseeing activities within the Internal Audit function related to the inspection of operational, administrative, and financial activities.
3. Conducting research and verification on reports or information concerning matters that may result in any losses to the Company.
4. Preparing and submitting audit reports to the President Director, along with recommendations for improvement;
5. Assessing compliance with applicable regulations by evaluating and monitoring all of the Company systems, procedures, policies, and operations to ensure effective and compliant implementation, and providing recommendations to the Board of Directors on risk control and management;
6. Evaluating the effectiveness of the Company's internal control system;
7. Assessing the fairness of financial statements and evaluating the efficiency and effectiveness of both operating and non-operating activities;
8. Provide insights, suggestions, and recommendations for improvements related to operating and non-operating activities;
9. Promoting the implementation of GCG principles across all work units and conducting mandatory assessment and monitoring of GCG implementation by all Company Organs;
10. Monitor the implementation of follow-up actions on audit findings from both SPI and external auditors, and reporting the results to the President Director;
11. Acting as a partner to external auditors in the audit of financial statement and other examinations of the Company.

Participation in the Professional Association of Internal Auditors

Jamkrindo's Internal Audit Unit (SPI) is an active member of the Internal Audit Communication Forum (FKSPI) for State-Owned Enterprises in the Insurance and Financial Services sector (Asgara Jaskeu Plus). SPI's participation in this forum serves as an important platform for sharing knowledge and information related to the implementation of internal audit activities among fellow State-Owned Enterprises.

Internal Audit Unit Professional Certification

Obtaining professional certification is a strategic initiative to ensure that auditors remain relevant evolving audit practices, regulatory compliance demand, and industry developments. As of the end of 2024, the following professional certifications are held by SPI Personnel.

No.	Nama Name	Nama Sertifikasi Name of Certification	Bidang Field	Lembaga Sertifikasi Certification Body
1	Andry Septianto, M.M., QIA, CPIA, QGIA	Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Audit Forensik Forensic Audit	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
		Fraud Audit	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
		Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	Audit	LSP YPIA Professional Certification Institute of the Internal Audit Education Foundation (LSP YPIA)
		Qualified Government Internal Auditor (QGIA)	Audit	LSP YPIA Professional Certification Institute of the Internal Audit Education Foundation (LSP YPIA)
2	Bani Dwi Perdanawati, S.Psi., PIA, QIA, CPSP	Professional Internal Audit (PIA)	Audit	PPA&K Center for Supervision of Accountants and Appraisal Services (PPA&K)
		Sertifikasi Auditor Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) Auditor Certification	Manajemen Risiko Risk Management	BNSP National Professional Certification Agency (BNSP)
		Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 Risk Management Certification Level 2	Manajemen Risiko Risk Management	IBI-BCC Indonesian Bankers Association - Banking Competency Center (IBI-BCC)
		Sertifikasi pengadaan barang jasa/pemerintah Government Goods/Services Procurement Certification	Pengadaan Barang/ Jasa Procurement of Goods/Services	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah National Public Procurement Agency
3	Laurdes Sinurat, S.E., QIA, CPIA	Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	Audit	LSP YPIA Professional Certification Institute of the Internal Audit Education Foundation (LSP YPIA)
4	Agus Mirazul Fajar, S.E	Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)

No.	Nama Name	Nama Sertifikasi Name of Certification	Bidang Field	Lembaga Sertifikasi Certification Body
5	Rachmat Firdaus, S.Kom., M.T., QIA, CFrA, CIAE, CRMP	Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Audit Forensik Forensic Audit	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
		Fraud Auditing	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
		Certified Forensic Auditor (CFrA)	Audit	Lembaga Sertifikasi Profesi- Auditor Forensik (LSP-AF) Professional Certification Institute for Forensic Auditors (LSP-AF)
		Certified Risk Management Professional (CRMP)	Manajemen Risiko Risk Management	LSPMR Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)
		Certified Internal Audit Executive (CIAE)	Audit	BPKP Finance and Development Supervisory Agency (BPKP)
6	Arry Andru Palapi, S.E., QIA	Pelaksanaan Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP)	Manajemen Risiko Risk Management	BNSP National Professional Certification Agency (BNSP)
		Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Fraud Auditing	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
		Internal Control COSO -2013	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
7	Rinjani Yusni Maharjanti, S.P., MM., QIA, CRMO, SMK3	Ahli Penjaminan Guarantee Expert	Penjaminan Guarantee	LSP Professional Certification Institute (LSP)
		Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Certified Risk Management Officer (CRMO)	Manajemen Risiko Risk Management	LSPMR Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)
		Sertifikasi SMK3 Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Certification	Keselematan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety	BNSP National Professional Certification Agency (BNSP)

No.	Nama Name	Nama Sertifikasi Name of Certification	Bidang Field	Lembaga Sertifikasi Certification Body
8	Aldhy Haryono Fachrial, S.E., QIA	Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Audit Forensik Forensic Audit	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
		Fraud Auditing	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
9	Muhammad Ilham, S.E., Ak., QIA	Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
10	Andreas Theodorus Mokodaser, M.B.A., QIA, CFrA	Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Audit Forensik Forensic Audit	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
		Fraud Auditing	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
11	Arif Syachroni, S.E., QIA, SMK3	Certified Forensic Auditor (CFrA)	Audit	LSP-AF Professional Certification Institute for Forensic Auditors (LSP-AF)
		Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
12	Andik Sugiarto, S.E., QIA	Sertifikasi SMK3 Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Certification	Keselematan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety	BNSP National Professional Certification Agency (BNSP)
		Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
13	Laila Wijayanti, S.P.d., M.B.A., QIA	Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
13	Laila Wijayanti, S.P.d., M.B.A., QIA	Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board

No.	Nama Name	Nama Sertifikasi Name of Certification	Bidang Field	Lembaga Sertifikasi Certification Body
14	Emmerisa br. Sembiring, S.E., QIA	Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
15	Muhammad Leonard Gustav Qadhafi, S.A., QIA	Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
16	Andi Aldino Chandra, S.E., QIA, CFrA	Ahli Penjaminan – Analisa Kredit Guarantee Expert - Credit Analysis	Penjaminan Guarantee	LSP Professional Certification Institute (LSP)
		Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Audit Forensik Forensic Audit	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
		Fraud Auditing	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
		Certified Forensic Auditor (CFrA)	Audit	LSP-AF Professional Certification Institute for Forensic Auditors (LSP-AF)
17	Asep Ginanjar Cahya Gumilar, S.E., M.B.A., QIA	Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
18	Michael Ranap Simanjuntak, S.E., QIA, CFrA	Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Audit Forensik Forensic Audit	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
		Fraud Auditing	Audit	LPFA Fraud Auditing Development Institute (LPFA)
		Certified Forensic Auditor (CFrA)	Audit	LSP-AF Professional Certification Institute for Forensic Auditors (LSP-AF)

No.	Nama Name	Nama Sertifikasi Name of Certification	Bidang Field	Lembaga Sertifikasi Certification Body
19	Indra Budi Setiyawan, S.E., QIA	Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics		
		Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
20	Laode Salihi, SE., M.Acc., Ak., QIA	Ahli Penjaminan – Analisa Kredit Guarantee Expert - Credit Analysis	Penjaminan Guarantee	LSP Professional Certification Institute (LSP)
		Qualified Internal Audit (QIA)	Audit	Dewan Sertifikasi QIA QIA Certification Board
		Internal Control COSO -2013.	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
21	Andesa Putra, S.E., PGA, WPPE	Internal Auditing— Standar Audit dan Kode Etik Profesi	Audit	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Internal Auditing— Auditing Standards and Professional Code of Ethics		
21	Andesa Putra, S.E., PGA, WPPE	Ahli Penjaminan – Analisa Kredit Guarantee Expert - Credit Analysis	Penjaminan Guarantee	LSP Professional Certification Institute (LSP)

Dari total karyawan SPI, sebanyak 31 orang, atau 67,74%, telah memiliki sertifikasi profesi. Hal ini mencerminkan upaya perusahaan dalam mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Ke depannya, perusahaan bertekad untuk meningkatkan tingkat sertifikasi, baik bagi karyawan yang telah bersertifikat maupun yang belum memilikinya.

Pengembangan Sumber Daya Auditor

Dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif, Jamkrindo secara konsisten melaksanakan berbagai program pelatihan untuk pengembangan kompetensi karyawan. Salah satu fokus pengembangan ini adalah meningkatkan kemampuan profesional di bidang audit internal. Untuk mendukung tugas-tugas strategis tersebut, berikut adalah daftar pelatihan yang telah diikuti oleh SPI pada tahun 2024:

A total of 31 employees, or 67.74% of the total personnel in the Internal Audit Unit (SPI), have obtained professional certifications. This reflects the Company's commitment to encouraging the development of human capital competencies. Moving forward, the Company remains committed to increasing the certification rate among both certified and non-certified personnel.

Auditor Human Capital Development

To build a competent and competitive workforce, Jamkrindo consistently implements a variety of competency development programs for all employees. A key area of focus is enhancing professional internal audits capabilities. In support this strategic function, the following is a list of training programs attended by SPI personnel in 2024:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
1	Andry Septianto	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit	1. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			1. OJK Webinar - Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry			
			2. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			2. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			3. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			3. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" Webinar			
			4. Webinar "Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024"	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			4. "2024 Economic and Financial Outlook" Webinar			
			5. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			5. "Strategies for Preventing Cyber Attacks" Webinar			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
1	Andry Septianto	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit	6. Training dan Awareness Teknologi Informasi: Implikasi Artificial Intelligence di Lembaga Keuangan 6. Information Technology Training and Awareness: Implications of Artificial Intelligence in Financial Institutions	5 Maret 2024 March 5, 2024	2	Inhouse Jamkrindo
			7. Webinar Artificial Intelligence Changes The Face of The Financial Sector 7. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" Webinar	7 Maret 2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			8. Kegiatan Idea Talks Riset OJK Institute Volume 4 tahun 2024 untuk mendiseminasikan hasil riset OJK Institute 8. 2024 OJK Institute Idea Talks Event Volume 4 – Dissemination of the OJK Institute Research Findings	13 Maret 2024 March 13, 2024	3	OJK Institute
			9. Webinar OJK : Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia 9. OJK Webinar : Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			10. Webinar OJK "Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah" 10. OJK Webinar:"Strategies to Accelerate the Market Share of Sharia Finance"	21 Maret 2024 March 21, 2024	3	OJK Institute
			11. Kegiatan Idea Talks OJK Institute Volume 5 tahun 2024 11. 2024 OJK Institute Idea Talks Event Volume 5	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			12. Webinar OJK Peran Taksonomi untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia 12. OJK Webinar : "The Role of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Indonesia's Energy Transition Towards Net Zero Emission"	28 Maret 2024 March 28, 2024	3	OJK Institute
			13. Kegiatan Idea Talks Riset OJK Institute Volume 6 - Prospek Pengembangan SJK Melalui Open Finance dan NIM BOPO Perbankan 13. OJK Institute Idea Talks Event Volume 6 – Prospects for Developing the Financial Service Sector through Open Finance and NIM BOPO Banking	18 April 2024 April 18, 2024	3	OJK Institute
			14. Webinar dengan tema "Peluang dan Tantangan Open Finance di Indonesia" 14. "Opportunities and Challenges of Open Finance in Indonesia" Webinar	25 April 2024 April 25, 2024	3	OJK Institute
			15. Webinar dengan tema "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" 15. "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" Webinar.	02 Mei 2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
			16. Seminar Road to KAI 2024 dengan tema Global Internal Audit Standards (GIAS) with Local Perspectives a Deep Dive into Internal Audit Practices 16. "Road to KAI 2024" Seminar with the theme of "Global Internal Audit Standards (GIAS) with Local Perspectives a Deep Dive into Internal Audit Practices Seminar"	11 Mei 2024 May 11, 2024	4	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			17. Seminar Nasional: Sinergi Kejaksanaan RI dan KBUMN RI guna optimalisasi Pengelolaan BUMN 17. National Seminar: Synergy between the Attorney General's Office and the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) of Indonesia to Optimize SOE Governance	16 Mei 2024 May 16, 2024	4	IFG Corpu IFG Corporate University
			18. Webinar dengan tema "How to prevent greenwashing in sustainable finance" 18. Webinar with the theme "How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance"	16 Mei 2024 May 16, 2024	3	OJK Institute
			19. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern 2024 dgn Tema "Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah Untuk Kesenambungan Pmbangunan" (Undg BPKP) 19. National Coordination Meeting of the 2024 Internal Audit Unit: "Safeguarding the Completion of Medium-Term Development for Sustainable Progress" (hosted by BPKP)	22 Mei 2024 May 22, 2024	4	BPKP Finance and Development Supervisory Agency (BPKP)
			20. Webinar dengan tema "Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit" (Undg OJK) 20. Webinar with the theme "Opportunities for Credit Growth After the End of the Credit Restructuring Policy" (hosted by OJK)	22 Mei 2024 May 22, 2024	3	OJK Institute

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
1	Andry Septianto	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit	21. Webinar dengan tema "Strategi Pemasaran Digital di Era Digital: Taktik dan Langkah Efektif Mencetak Profit Optimal" (Undg OJK)	5-Jun-24	3	OJK Institute
			21. "Digital Marketing Strategies in the Digital Era: Effective Tactics and Measures to Maximize Profits" webinar (hosted by OJK).	June 5, 2024		
			22. Webinar dengan tema "Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management" (Undg OJK)	11-Jun-24	3	OJK Institute
			22. "Building Trust for the Insurance Industry Via Empathy in Claims Management" webinar (hosted by OJK).	June 11, 2024		
			23. Webinar dengan tema "Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan" (Undg OJK)	27-Jun-24	3	OJK Institute
			23. "The Role of Innovative Credit Scoring (ICS) in Improving Access in Funding" webinar (hosted by OJK).	June 27, 2024		
			24. Webinar dengan tema "Internal Auditor's Readiness in Facing Cyber Attacks"	06-Jul-24	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			24. "Internal Auditor's Readiness in Facing Cyber Attacks" webinar.	July 6, 2024		
			25. Webinar dengan tema "Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Praktik Akuntansi" (Undg OJK)	11-Jul-24	3	OJK Institute
			25. "The Role of Digital Technology in Enhancing Accounting Practices" webinar (hosted by OJK).	July 11, 2024		
			26. Workshop The Future of Finance Foresight for Sustainable Strategies	17 – 18 Agustus 2024	4	Prasmul-eli
			26. "The Future of Finance Foresight for Sustainable Strategies" workshop.	August 17 - 18, 2024		
			27. Webinar dengan tema "Membangun Kepemimpinan berbasis Spiritual: Pendekatan Holistik untuk Pertumbuhan dan keberlangsungan Bisnis "	22 Agustus 2024	3	OJK Institute
			27. "Building Spiritual-based Leadership: A Holistic Approach to Business Growth and Sustainability " webinar.	August 22, 2024		
2	Laurdes Sinurat	Kepala Departemen Audit I Head of Audit Department I	28. Pelatihan program Bisnis Essential Batch 3 - BUMN SCHOOL OF EXCELLENCE	31 Oktober 2024	6	KBUMN Ministry of State Owned Enterprises
			28. Training Program: Business Essentials Batch 3 - BUMN SCHOOL OF EXCELLENCE.	October 31, 2024		
			29. Series Leaders Spark : The Role Core Values in Ensuring Business Continuity and Accelerated Performance Transformation	22 Oktober 2024	6	LPPI
			29. Spark Leadership Series : The Role Core Values in Ensuring Business Continuity and Accelerated Performance Transformation.	October 22, 2024		
			30. Webinar EV Insurance, International Best Practices for Innovation of New Energy Products and Services	31 Oktober 2024	6	OJK Institute
			30. "EV Insurance - International Best Practices for Innovation of New Energy Products and Services" webinar.	October 31, 2024		
			31. Sertifikasi Qualified Government Internal Auditor (QGIA)	15 -16 November 2024	16	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			31. Qualified Government Internal Auditor (QGIA) Certification	November 15 - 16, 2024		
			1. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun	1 Februari 2024	3	OJK Institute
			1. OJK Webinar "Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry"	February 1, 2024		
			2. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			2. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	February 3, 2024		
			3. Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024	22 Februari 2024	3	OJK Institute
			3. 2024 Economic and Financial Outlook	February 22, 2024		
3	Bena Rahadiansyah	Kepala Departemen Audit II Head of Audit Department II	4. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29 Februari 2024	3	OJK Institute
			4. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.	February 29, 2024		
			5. Seminar Nasional "Sinergi Kejaksaa RI dan Kementerian BUMN guna Optimalisasi Pengelolaan BUMN"	16 Mei 2024	5	Universitas Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman University
			5. National Seminar titled "Synergy between the Attorney General's Office and the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) of Indonesia to Optimize SOE Governance"	May 16, 2024		
			6. How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 Mei 2024	3	OJK Institute
			7. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	22 s.d 23 Agustus 2024	7	Efektif Pro
			7. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification	August 22 - 23, 2024		
			1. Pelatihan Internal Control Testing	17 s.d 18 Sept 2024	16	CRMS Indonesia
			1. Internal Control Testing Training	September 17 - 18, 2024		
			2. Pelatihan & Sertifikasi QIA	4 -16 November 2024	80	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			2. QIA Training & Certification	November 4 - 16, 2024		

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
4	Agus Mirazul Fajar	Kepala Departemen Audit III Head of Audit Department III	1. Pelatihan COSO-2013 Internal Control Framework (COSO) 1. COSO-2013 Internal Control Framework (COSO) Training	1-2 Februari 2024 February 1 - 2, 2024	10	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			2. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun 2. OJK Webinar - Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			3. Training & Awareness TI: Implikasi Artificial Intelligence Di Lembaga Keuangan 3. IT Training & Awareness: The Implications of Artificial Intelligence in Financial Institutions	5 Maret 2024 March 5, 2024	3	Inhouse Jamkrindo
			4. Webinar "Artificial Intelligence Changes The Face of The Financial Sector Confirmation" 4. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector Confirmation" webinar.	5 Maret 2024 March 5, 2024	3	Inhouse Jamkrindo
			5. Idea Talks hasil riset OJK Institute Volume 4 tahun 2024 5. 2024 OJK Institute Idea Talks Event Volume 4 – Dissemination of the OJK Institute Reseach Findings			
			6. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 6. Strategy for Developing Indonesia's Sharia Banking	13 Maret 2024 March 13, 2024	3	OJK Institute
			7. Penguatan Market Conduct pada Industri Asuransi Jiwa 7. Strengthening the Market Conduct in the Life Insurance Industry			
			8. Webinar "Outlook Ekonomi dan keuangan di Tahun 2024" 8. "2024 Economic and Financial Outlook" webinar.	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			9. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber" 9. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			10. Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia 10. Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
5.	Rachmat Firdaus	Kepala Departemen Audit IV Head of Audit Department IV	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices" 1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			2. Traning Auditor Internal SMKI (ISO/IEC 27001:2022 2. Internal Auditors Training on SMKI (ISO/IEC 27001:2022)	6 Februari 2024 February 6, 2024	7	PT LEMTI UNINDO INOVASI
			3. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal" 3. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			4. Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024 4. 2024 Economic and Financial Outlook	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			5. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber" (Undg OJK) 5. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar (hosted by OJK).	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			6. Training dan Awareness Teknologi Informasi: Implikasi Artificial Intelligence di Lembaga Keuangan 6. Information Technology Training and Awareness: Implications of Artificial Intelligence in Financial Institutions	07 Maret 2024 March 7, 2024	3	PT Jamkrindo
			7. Webinar Artificial Intelligence Changes The Face of The Financia Sector 7. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" webinar.	13 Maret 2024 March 13, 2024	3	OJK Institute

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
5	Rachmat Firdaus	Kepala Departemen Audit IV Head of Audit Department IV	8. Kegiatan Idea Talks Riset OJK Institute Volume 4 tahun 2024 untuk mendiseminasikan hasil riset OJK Institute	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			8. 2024 OJK Institute Idea Talks Event Volume 4 - the Dissemination of the OJK Institute Research Findings			
			9. Webinar OJK: Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia	21 Maret 2024 March 21, 2024	3	OJK Institute
			9. OJK Webinar: Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets			
			10. Webinar OJK "Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah"	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			10. OJK Webinar titled "Strategies to Accelerate the Market Share of Sharia Finance"			
			11. Kegiatan Idea Talks OJK Institute Volume 5 tahun 2024 tentang Produk Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan bunga confirmation	28 Maret 2024 March 28, 2024	3	OJK Institute
			11. 2024 OJK Institute Idea Talks Event Volume 5 - Capital Market and Sharia Finance Products in the Context of Social Dynamics and Interest Rate Confirmation.			
			12. Peran Taksonomi untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia	23 April 2024 April 23, 2024	3	OJK Institute
			12. OJK Webinar: "The Role of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Indonesia's Energy Transition Towards Net Zero Emission"			
			13. Perkembangan dan isu terkini di sektor jasa keuangan berjalan begitu cepat. Yuk pahami bagaimana prospek pengembangan SJK melalui open finance dan NIM BOPO perbankan pada Webinar Idea Talks OJK Institute Volume 6	02 Mei 2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
			13. The current developments and issues in the financial services sector are fast-paced in nature. Let's understand how the prospect of developing the Financial Services Sector (SJK) through open finance and NIM BOPO banking in the OJK Institute Idea Talks Event Volume 6 Webinar.			
			14. Webinar dengan tema "How to Prevent Accounting Fraud In Financial Sector"	16 Mei 2024 May 16, 2024	3	OJK Institute
			14. "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" webinar.			
			15. Seminar Nasional : Sinergi Kejaksaan RI dan KBUMN RI guna optimalisasi Pengelolaan BUMN	16 Mei 2024 May 16, 2024	4	IFG Corpu IFG Corporate University
			15. National Seminar: Synergy between the Attorney General's Office and the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) of Indonesia to Optimize SOE Governance			
			16. Webinar dengan tema "How to prevent greenwashing in sustainable finance"	17 Mei 2024 May 17, 2024	3	OJK Institute
			16. "How to prevent greenwashing in sustainable finance" webinar.			
			17. Cyber Security Risk Management	17 Mei 2024 May 17, 2024	3	GIRMA
			18. Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit	22 Mei 2024 May 22, 2024	3	OJK Institute
			18. Opportunities for Credit Growth After the End of the Credit Restructuring Policy			
			19. Webinar dengan tema "Peluang dan Tantangan perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital"	30-May-24 May 30, 2024	3	OJK Institute
			19. "Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Age" webinar.			
			20. Webinar dengan tema "Strategi Pemasaran Digital di Era Digital: Taktik dan Langkah Efektif Mencetak Profit Optimal" (Undg OJK)	5-Jun-24 June 5, 2024	3	OJK Institute
			20. "Digital Marketing Strategies in the Digital Era: Effective Tactics and Measures to Maximize Profits" (hosted by OJK) webinar.			
			21. Workshop Governance Risk Management, and Compliance dan Sosialisasi Anti Fraud dan Risiko Penyusunan (undg Div MSDM)	6-Jun-24 June 6, 2024	4	PT Robere & Associates Indonesia (inhouse Jamkrindo)
			21. Workshop on Governance, Risk Management, and Compliance. And Anti Fraud and Bribery Risk Dissemination (hosted by the Human Capital Management Division)			
			22. Webinar dengan tema "Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management" (Undg OJK)	11-Jun-24 June 11, 2024	3	OJK Institute
			22. "Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management" (hosted by OJK) webinar.			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
5	Rachmat Firdaus	Kepala Departemen Audit IV Head of Audit Department IV	23. Webinar "Navigating The Half-Year: Roadmap To Success" (Undg OJKI) 23. "Navigating The Half-Year: Roadmap To Success" webinar (hosted by OJK).	20-Jun-24 June 20, 2024	3	OJK Institute
			24. Webinar dengan tema "Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan" (Undg OJK) 24. "The Role of Innovative Credit Scoring (ICS) in Improving Access to Funding" (hosted by OJK) webinar.	27-Jun-24 June 27, 2024	3	OJK Institute
			25. Webinar dengan tema "How to Mitigate Transition and Physical Risks in the Financial Sector" (Undg OJK) 25. "How to Mitigate Transition and Physical Risks in the Financial Sector" (hosted by OJK) webinar.	04-Jul-24 July 4, 2024	3	OJK Institute
			26. Webinar dengan tema "Internal Auditor's Readiness in Facing Cyber Attacks" 26. "Internal Auditor's Readiness in Facing Cyber Attacks" webinar.	06-Jul-24 July 6, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			27. Webinar dengan tema "Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Praktik Akuntansi" (Undg OJK) 27. "The Role of Digital Technology in Enhancing Accounting Practices" webinar (hosted by OJK).	11-Jul-24 July 11, 2024	3	OJK Institute
			28. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 28. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification	24 s.d 31 Agustus 2024 August 24 - 31, 2024	7	Efektif Pro
6	Bani Dwi Perdaniwati	Kepala Departemen Pengembangan Standar dan Kualitas Audit Head of the Audit Standard and Quality Development Department	1. Pelatihan COSO-2013 Internal Control Framework (COSO) 1. COSO-2013 Internal Control Framework (COSO) Training	1-2 Februari 2024 February 1 - 2, 2024	10	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			2. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun 2. OJK Webinar - Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			3. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices" 3. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			4. Training dan Workshop Business Continuity Management System (BCMS) Awareness 4. Training and Workshop on Business Continuity Management System (BCMS) Awareness	7 Februari 2024 February 7, 2024	3.5	Inhouse Jamkrindo
			5. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal" 5. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			6. Webinar "Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024" 6. "2024 Economic and Financial Outlook" webinar.	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			7. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber" (Undg OJK) 7. "Strategies to Prevent Cyber Attacks"(hosted by OJK) webinar.	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			8. Training dan Awareness Teknologi Informasi: Implikasi Artificial Intelligence di Lembaga Keuangan 8. Information Technology Training and Awareness: Implications of Artificial Intelligence in Financial Institutions	5 Maret 2024 March 5, 2024	2	Inhouse Jamkrindo
			9. Webinar Artificial Intelligence Changes The Face of The Financial Sector 9. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" webinar.	7 Maret 2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			10. Kegiatan Idea Talks Riset OJK Institute Volume 4 tahun 2024 untuk mendiseminasikan hasil riset OJK Institute 10. 2024 OJK Institute Idea Talks Event Volume 4 - Dissemination of the OJK Institute research findings	13 Maret 2024 March 13, 2024	3	OJK Institute
			11. Webinar OJK : Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia 11. OJK Webinar: Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
6.	Bani Dwi Perdaniwati	Kepala Departemen Pengembangan Standar dan Kualitas Audit Head of the Audit Standard and Quality Development Department	12. Webinar OJK "Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah"	21 Maret 2024 March 21, 2024	3	OJK Institute
			12. OJK Webinar titled "Strategies to Accelerate the Market Share of Sharia Finance"			
			13. Kegiatan Idea Talks OJK Institute Volume 5 tahun 2024	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			13. 2024 OJK Institute Idea Talks Event Volume 5			
			14. Webinar OJK Peran Taksonomi untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia	28 Maret 2024 March 28, 2024	3	OJK Institute
			14. OJK Webinar titled "The Role of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Indonesia's Energy Transition Towards Net Zero Emission"			
			15. Standards & Code of Ethics for Professional Internal Audit (SACEP).	18 s.d 19 -Apr-2024 April 18 - 19, 2024	12	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			16. Kegiatan Idea Talks Riset OJK Institute Volume 6 - Prospek Pengembangan SJK Melalui Open Finance dan NIM BOPO Perbankan	18 April 2024 April 18, 2024	3	OJK Institute
			16. OJK Institute Idea Talks Event Volume 6 - Prospects for Developing the Financial Services Sector through Open Finance and NIM BOPO Banking			
			17. Webinar dengan tema "Peluang dan Tantangan Open Finance di Indonesia"	25 April 2024 April 25, 2024	3	OJK Institute
			17. Webinar titled "Opportunities and Challenges of Open Finance in Indonesia"			
			18. Webinar dengan tema "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector"	02 Mei 2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
			18. "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" webinar.			
			19. Seminar Road to KAI 2024 dengan tema Global Internal Audit Standards (GIAS) with Local Perspectives a Deep Dive into Internal Audit Practices	11 Mei 2024 May 11, 2024	4	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			19. "Road to KAI 2024" Seminar titled "Global Internal Audit Standards (GIAS) with Local Perspectives a Deep Dive into Internal Audit Practices Seminar"			
			20. Sharing Session UU Pelindungan Data Pribadi "What Next To Do To Implement UU PDP for BUMN"	14 Mei 2024 May 14, 2024	3	Jasa Marga
			20. Sharing Session on the Personal Data Protection Law (UU PDP) titled "What To Do Next To Implement PDP Law for SOEs"			
			21. Seminar Nasional : Sinergi Kejaksaan RI dan KBUMN RI guna optimalisasi Pengelolaan BUMN	16 Mei 2024 May 16, 2024	4	IFG Corpu IFG Corporate University
			21. National Seminar : Synergy between the Attorney General's Office and the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) of Indonesia to Optimize SOE Governance			
			22. Webinar dengan tema "How to prevent greenwashing in sustainable finance"	16 Mei 2024 May 16, 2024	3	OJK Institute
			22. "How to prevent greenwashing in sustainable finance" webinar.			
			23. Webinar dengan tema "Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit"	22 Mei 2024 May 22, 2024	3	OJK Institute
			23. "Opportunities for Credit Growth After the End of the Credit Restructuring Policy" webinar.			
			24. Webinar dengan tema "Peluang dan Tantangan perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital"	30-May-2024 May 30, 2024	3	OJK Institute
			24. "Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era" webinar.			
			25. Webinar dengan tema "Strategi Pemasaran Digital di Era Digital: Taktik dan Langkah Efektif Mencetak Profit Optimal"	5-Jun-24 June 5, 2024	3	OJK Institute
			25. "Digital Marketing Strategies in the Digital Era: Effective Tactics and Measures to Maximize Profits" webinar.			
			26. Workshop Governance Risk Management, and Compliance dan Sosialisasi Anti Fraud dan Risiko Penyupaan (undg Div MSDM)	6-Jun-24 June 6, 2024	3	PT Robere & Associates Indonesia (inhouse Jamkrindo)
			26. Workshop on Governance, Risk Management, and Compliance. And Anti Fraud and Bribery Risk Dissemination (hosted by the Human Capital Management Division)			
			27. Webinar dengan tema "Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management" (Undg OJK)	11-Jun-24 June 11, 2024	3	OJK Institute
			27. "Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management" (hosted by OJK) webinar.			
			28. Webinar "Navigating The Half-Year: Roadmap To Success" (Undg OJKI)	20-Jun-24 June 20, 2024	3	OJK Institute
			28. "Navigating The Half-Year: Roadmap To Success" webinar (hosted by OJK).			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
6.	Bani Dwi Perdaniwati	Kepala Departemen Pengembangan Standar dan Kualitas Audit Head of the Audit Standard and Quality Development Department	29. Webinar dengan tema "Peran Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Meningkatkan Akses Pendanaan" (Undg OJK) 29. "The Role of Innovative Credit Scoring (ICS) in Improving Access to Funding" webinar (hosted by OJK).	27-Jun-24 June 27, 2024	3	OJK Institute
			30. Webinar dengan tema "How to Mitigate Transition and Physical Risks in the Financial Sector" (Undg OJK) 30. "How to Mitigate Transition and Physical Risks in the Financial Sector" (hosted by OJK) webinar.	04-Jul-24 July 4, 2024	3	OJK Institute
			31. Webinar dengan tema "Internal Auditor's Readiness in Facing Cyber Attacks" 31. "Internal Auditor's Readiness in Facing Cyber Attacks" webinar.	06-Jul-24 July 6, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			32. Webinar dengan tema "Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Praktik Akuntansi" (Undg OJK) 32. "The Role of Digital Technology in Enhancing Accounting Practices" webinar (hosted by OJK).	11-Jul-24 July 11, 2024	3	OJK Institute
			33. Workshop Internal Audit Business Continuity Management System (BCMS) 33. Workshop on Internal Audit of Business Continuity Management System (BCMS)	01 Agustus 2024 August 1, 2024	6	PT Robere Management Indonesia
			34. Webinar dengan tema "Membangun Kepemimpinan Berbasis Spiritual: Pendekatan Holistik untuk Pertumbuhan dan Keberlanjutan Bisnis" (Undg OJK) 34. "Building Spiritual-based Leadership: A Holistic Approach to Business Growth and Sustainability " webinar (hosted by OJK).	22 Agustus 2024 August 22, 2024	3	OJK Institute
			35. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 35. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification	7 & 14 September 2024 September 7 & 14, 2024	7	Efektif Pro
			1. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun 1. OJK Webinar - Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			2. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices" 2. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	OJK Institute
			3. Webinar OJK "How To Prevent Accounting Fraud In Financial Sektor". 3. OJK Webinar titled "How to Prevent Accounting Fraud in the Financial sector".	02-Mei-2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
7	Arry Andru Palapi	Senior Specialist Quality Assurance Senior Specialist in Quality Assurance	4. Sharing Session UU Pelindungan Data Pribadi "What Next To Do To Implement UU PDP for BUMN" 4. Sharing Session on the Personal Data Protection Law (UU PDP) with the theme "What To Do Next To Implement PDP Law for SOEs"	14 Mei 2024 May 14, 2024	3	Jasa Marga
			5. Seminar Nasional : Sinergi Kejaksaan RI dan KBUMN RI guna optimalisasi Pengelolaan BUMN 5. National Seminar: Synergy between the Attorney General's Office and the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) of Indonesia to Optimize SOE Governance	16 Mei 2024 May 16, 2024	4	IFG Corpu IFG Corporate University
			6. Webinar dengan tema "How to prevent greenwashing in sustainable finance" 6. "How to prevent greenwashing in sustainable finance" webinar.	16 Mei 2024 May 16, 2024	3	OJK Institute
			7. Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Skema Tenaga Ahli Penjaminan Batch 7. Training and Certification Examination for the Assurance Expert Scheme Batch	20 - 23 Mei 2024 May 20 - 23, 2024	16	PT Bintang Cahaya Gempita dan LSP PT Bintang Cahaya Gempita and Professional Certification Institute
			1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices" 1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			2. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal" 2. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			3. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber" (Undg OJK) 3. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar (by invitation OJK).	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
8	Hidjrah Istiqo Kumoro	Middle Specialist Audit TI, Quality Assurance Middle Specialist in IT Audit and Quality Assurance	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices" 1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			2. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal" 2. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			3. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber" (Undg OJK) 3. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar (by invitation OJK).	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
8	Hidjrah Istiqo Kumoro	Middle Specialist Audit TI, Quality Assurance Middle Specialist in IT Audit and Quality Assurance	4. Training dan Awareness Teknologi Informasi : Implikasi Artificial Intelligence di Lembaga Keuangan 4. Information Technology Training and Awareness : Implications of Artificial Intelligence in Financial Institutions	5 Maret 2024 March 5, 2024	2	Inhouse Jamkrindo
			5. Webinar Artificial Intelligence Changes The Face of The Financia Sector 5. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" webinar.	7 Maret 2024 March 7, 2024	1	OJK Institute
			6. Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia 6. Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets	14 Maret 2024 March 14, 2024	1	OJK Institute
			7. Peluang dan Tantangan Open Finance di Indonesia 7. Opportunities and Challenges of Open Finance in Indonesia	25 April 2024 April 25, 2024	3	OJK Institute
			8. Sinergi Kejaksanaan RI dan Kementerian BUMN RI Guna Optimalisasi Pengelolaan BUMN 8. Synergy between the Attorney General's Office and the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) of Indonesia to Optimize SOE Governance	16-May-24 May 16, 2024	4	OJK Institute
			9. How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16-May-24 May 16, 2024	3	Kejaksanaan RI dan Kementerian BUMN Attorney General's Office of Indonesia and the Ministry of SOEs
			10. Pelatihan Pembekalan Risk Management Jenjang 4 10. Risk Management Level 4 Training	13 -14 Mei May 13 -14	14	Efektif Pro
			11. Strategi Pemasaran Digital di Era Digital: Taktik dan Langkah Efektif Mencetak Profit Optimal 11. Digital Marketing Strategies in the Digital Era: Effective Tactics and Measures to Maximize Profits	5-Juni-2024 June 5, 2024	3	OJK Institute
			12. Workshop Governance Risk Management, Risk Management and Compliance (GRC) 12. Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) Workshop.	6-Juni-2024 June 6, 2024	3	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
			13. Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management 13. Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	11-Juni-2024 June 11, 2024	3	OJK Institute
			14. Pelatihan Fundamental IT Audit 14. IT Audit Fundamentals Training	21 - 22 Oktober 2024 October 21 - 22, 2024	16	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
9	Andi Aldino Chandra	Senior Analyst Departemen Audit I Senior Analyst of Audit Department I	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices" 1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			2. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber" 2. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			3. ISO 37001:2016 Awareness and Requirement Training	21 Maret 2024 March 21, 2024	7	Cevral Consulting
			4. How To Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 Mei 2024 May 16, 2024	4	OJK Institute
			5. Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restruturisasi Kredit 5. Opportunities for Credit Growth After the End of the Credit Restructuring Policy	22 Mei 2024 May 22, 2024	4	OJK Institute
			6. Awareness Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 6. Awareness of Personal Data Protection Law	22 Agustus 2024 August 22, 2024	4	TAALENTA
			7. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 7. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification	7 & 14 September 2024 September 7 & 14, 2024	7	Efektif Pro

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
10.	Michael Ranap Simanjuntak	Senior Analyst Departemen Audit II Senior Analyst of Audit Department II	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			2. How To Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 Mei 2024 May 16, 2024	4	OJK Institute
			3. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	2 mei 2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
			4. Webinar "Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia"	14 maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			4. "Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets " webinar			
			5. Webinar OJK "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29 februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			5. OJK Webinar titled "Strategies to Prevent Cyber Attacks"			
			6. Webinar OJK "Peran UU P2SK dalam memberikan efek jera bagi pelaku jasa keuangan ilegal"	15 februrari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			6. OJK Webinar titled "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors"			
11	Andik Sugiarto	Senior Analyst Departemen Audit III Senior Analyst Departemen Audit III	7. Sharing Session UU PDP bertemakan "What Next to Do to Implement UU PDP for BUMN"	14 mei 2024 May 14, 2024	3	kementrian BUMN Ministry of SOEs
			7. Sharing Session on the Personal Data Protection Law (UU PDP) with the theme "What To Do Next To Implement PDP Law for SOEs"			
			8. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	6-Juni-2024 June 6, 2024	3	MR Jamkrindo Risk Management of Jamkrindo
			8. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification			
			9. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	7 & 14 September 2024 September 7 & 14, 2024	7	Efektif Pro
			9. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification			
			1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3-Feb-24 February 3, 2024	3	OJK Institute
			1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			2. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal"	15-Feb-24 February 15, 2024	3	OJK Institute
			2. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.			
			3. Senior Analyst of Audit Department III	22-Feb-24 February 22, 2024	3	OJK Institute
			3. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29-Feb-24 February 29, 2024	3	OJK Institute
			4. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.			
			4. Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector	7-Mar-24 March 7, 2024	3	OJK Institute
			5. Strategi Pengembangan SJK Melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Conduct	13-Mar-24 March 13, 2024	3	OJK Institute
			6. Strategy for Developing the Financial Services Sector (SJK) through Strengthening Sharia Banking and Market Conduct			
			6. Peluang dan tantangan Aset Digital di Indonesia	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			7. Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets			
			7. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	02 Mei 2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
			8. How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 Mei 2024 May 16, 2024	3	OJK Institute
			9. Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit	22 Mei 2024 May 22, 2024	3	OJK Institute
			10. Opportunities for Credit Growth After the End of the Credit Restructuring Policy			
			10. Peluang dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital	30 Mei 2024 May 30, 2024	3	OJK Institute
			11. Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era			
			11. Strategi Pemasaran Digital di Era Digital : Taktik dan langkah Efektif Mencetak Profit Optimal	05 Juni 2024 June 5, 2024	3	OJK Institute
			12. Digital Marketing Strategies in the Digital Era: Effective Tactics and Measures to Maximize Profits			
			12. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	7 & 14 September 2024 September 7 & 14, 2024	7	Efektif Pro
			13. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
12	Andreas Theodorus Mokodaser	Senior Analyst Departemen Audit IV Senior Analyst of Audit Department IV	1. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun 1. OJK Webinar - Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			2. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices" 2. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			3. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber" 3. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			4. Webinar "peran taksonomi untuk keuangan berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam mendorong transisi energi menuju net zero emission Indonesia" 4. OJK Webinar titled "The Role of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Indonesia's Energy Transition Towards Net Zero Emission"	28 Maret 2024 March 28, 2024	3	OJK Institute
			5. Webinar "how to prevent accounting fraud in financial sector" 5. "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" webinar.	02 Mei 2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
			6. Webinar "how to prevent greenwashing in sustainable finance" 6. "How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance" webinar.	16 Mei 2024 May 16, 2024	3	OJK Institute
			7. Sinergitas Kementerian BUMN dan Kejaksaan RI dalam Penguatan Tata Kelola BUMN 7. Synergy between the Ministry of SOEs and the Attorney General's Office to Optimize SOE Governance	16 Mei 2024 May 16, 2024	5	OJK Institute
			8. Peluang dan tantangan perlindungan data pribadi dalam transaksi di Era Digital 8. Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era	30-May-2024 May 30, 2024	3	OJK Institute
13	Aldhy Haryono Fachrial	Senior Analyst Departemen Pengembangan Standar dan Kualitas Audit Senior Analyst of the Audit Standard and Quality Development Department	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices" 1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			2. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal" 2. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			3. Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024 3. 2024 Economic and Financial Outlook	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			4. Strategi Mencegah Serangan Siber 4. Strategies to Prevent Cyber Attacks	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			5. Webinar Artificial Intelligence Changes The Face of The Financial Sector 5. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" webinar.	7 Maret 2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			6. Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia 6. Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			7. Webinar OJK "Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah" 7. OJK Webinar with the theme "Strategies to Accelerate the Market Share of Sharia Finance"	21 Maret 2024 March 21, 2024	3	OJK Institute
			8. Kegiatan Idea Talks OJK Institute Volume 5 tahun 2024 8. 2024 OJK Institute Idea Talks Event Volume 5	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			9. Peran Taksonomi untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia 9. The Role of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Indonesia's Energy Transition Towards Net Zero Emission	28 Maret 2024 March 28, 2024	3	OJK Institute
			10. Perkembangan dan isu terkini di sektor jasa keuangan berjalan begitu cepat. Yuk pahami bagaimana prospek pengembangan SJK melalui open finance dan NIM BOPO perbankan pada Webinar Idea Talks OJK Institute Volume 6 10. Recent developments and issues in the financial services sector are progressing rapidly. Let's understand the prospects for Financial Services Sector (SJK) development through open finance and NIM BOPO banking in the OJK Institute Idea Talks Event Volume 6 Webinar.	23 April 2024 April 23, 2024	3	OJK Institute

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
13	Aldhy Haryono Fachrial	Senior Analyst Departemen Pengembangan Standar dan Kualitas Audit Senior Analyst of the Audit Standard and Quality Development Department	11. Sinergitas Kementerian BUMN dan Kejaksaan RI dalam Penguatan Tata Kelola BUMN 11. Synergy between the Attorney General's Office and the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) of Indonesia to optimize SOE Governance	16 Mei 2024 May 16, 2024	5	Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN Attorney General's Office of Indonesia and the Ministry of SOEs
			12. How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 Mei 2024 May 16, 2024	3	OJK Institute
			13. Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital 13. Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era	30 Mei 2024 May 30, 2024	3	OJK Institute
			14. Workshop Internal Audit Business Continuity Management System (BCMS) 14. Workshop on Internal Audit of Business Continuity Management System (BCMS)	01 Agustus 2024 August 1, 2024	6	PT Robere Management Indonesia
			15. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 15. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification	7 & 14 September 2024 September 7 & 14, 2024	7	Efektif Pro
			1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices" 1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
14	Muhammad Leonard Gustav Qhadafi	Middle Analyst Bagian Audit II Middle Analyst of Audit Department II	2. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal" 2. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			3. Strategi Pengelolaan Investasi industri perasuransian dan dana pensiun 3. Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund industry	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			4. Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024 4. 2024 Economic and Financial Outlook	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			5. Webinar OJK "Strategi Mencegah Serangan Siber" OJK Webinar titled "Strategies to Prevent Cyber Attacks"	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			6. Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia 6. Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			7. Strategi Pengembangan SJK Melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Conduct 7. Strategy for Developing the Financial Services Sector (SJK) through Strengthening Sharia Banking and Market Conduct	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			8. Tantangan Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga 8. Challenges in Capital Markets and Sharia Finance Amid Social Dynamics and Interest Rates	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			9. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector 9. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	2 Mei 2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
			10. Pelatihan dan Sertifikasi Skema Analis Penjaminan 10. Guarantee Analyst Scheme Training and Certification	2 s.d 4 Mei 2024 May 2 - 4, 2024	16	BCG & LSP BCG & Professional Certification Institute (LSP)
			11. Strategi Pemasaran Digital di Era Digital : Taktik dan Langkah efektif mencetak profil optimal 11. Digital Marketing Strategies in the Digital Era: Effective Tactics and Measures to Maximize Profits	5 juni 2024 June 5, 2024	3	OJK Institute
			12. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 12. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification	7 & 14 September 2024 September 7 & 14, 2024	7	Efektif Pro

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
15	Muhammad Ilham	Middle Analyst Bagian Audit IV Middle Analyst of Audit Department IV	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			2. Webinar OJK "Peran UU P2SK dalam memberikan efek jera bagi pelaku jasa keuangan ilegal"	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			2. OJK Webinar titled "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors"			
			3. Webinar OJK "Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024"	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			3. OJK Webinar titled "2024 Economic and Financial Outlook"			
			4. Webinar OJK "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			4. OJK Webinar titled "Strategies to Prevent Cyber Attacks"			
			5. Idea Talks 4 - Strategi Pengembangan SJK melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Cloud	13 Maret 2024 March 13, 2024	3	OJK Institute
			5. Idea Talks Event Volume 4 – Strategy for Developing the Financial Services Sector (SJK) through Strengthening Sharia Banking and Market Conduct			
			6. Webinar "Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia"	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			6. "Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets " webinar.			
			7. ISO 37001:2016 Awareness and Requirement Training	21 Maret 2024 March 21, 2024	7	Cevral Consulting
			7. ISO 37001:2016 Awareness and Requirement Training			
			8. Idea Talks Volume 5 - Tantangan Produk Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			8. Idea Talks Event Volume 5 - Challenges in Sharia Finance and Capital Market Products Amid Social Dynamics and Interest Rate			
			9. Peran Taksonomi untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia	28 Maret 2024 March 28, 2024	3	OJK Institute
			9. The Role of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Indonesia's Energy Transition Towards Net Zero Emission			
			10. Peluang dan Tantangan Open Finance di Indonesia	25 April 2024 April 25, 2024	3	OJK Institute
			10. Opportunities and Challenges of Open Finance in Indonesia			
			11. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	05 Februari 2024 February 5, 2024	3	OJK Institute
			12. Sinergitas Kementerian BUMN dan Kejaksaan RI dalam Penguatan Tata Kelola BUMN	16-May-24 May 16, 2024	5	Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN Attorney General's Office of Indonesia and the Ministry of SOEs
			12. Synergy between the Attorney General's Office and the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) of Indonesia to Optimize SOE Governance			
			13. How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16-May-24 May 16, 2024	3	OJK Institute
			14. Pelatihan Pembekalan Risk Management Jenjang 4	13 -14 Mei May 13 -14	14	Efektif Pro
			14. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification			
			15. Peluang dan Tantangan perlindungan data pribadi dalam transaksi di era digital	30-Mei-2024 May 30, 2024	3	OJK Institute
			15. Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era			
			16. Strategi pemasaran digital di era igital: Taktik dan langkah efektif mencetak profit optimal	5-Juni-2024 June 5, 2024	3	OJK Institute
			16. Digital Marketing Strategies in the Digital Era: Effective Tactics and Measures to Maximize Profits			
			17. "Building trust for insurance industry Via empathy in claims management"	11-Juni-2024 June 11, 2024	3	OJK Institute
			17. "Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management"			
			18. Pelatihan Fundamental IT Audit	21 – 22 Oktober 2024 October 21 - 22, 2024	16	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			18. IT Audit Fundamentals Training			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
16	Rinjani Yusni Maharjanti	Middle Analyst Bagian Pengembangan Standar dan Kualitas Audit Middle Analyst of the Audit Standard and Quality	1. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun 1. OJK Webinar - Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			2. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices" 2. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			3. Training dan Workshop Business Continuity Management System (BCMS) Awareness 3. Training and Workshop on Business Continuity Management System (BCMS) Awareness	6 Februari 2024 February 6, 2024	3.5	OJK Institute
			4. Webinar dengan topik "Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024" 4. "2024 Economic and Financial Outlook" webinar.	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			5. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber" (Undg OJK) 5. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar (hosted by OJK).	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			6. Webinar Artificial Intelligence Changes The Face of The Financia Sector 6. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" webinar.	7 Maret 2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			7. Pelatihan Risk Manajemen Index Kementerian BUMN Tahun 2024 7. The Ministry of SOEs' 2024 Risk Management Index Training	8 Maret 2024 March 8, 2024	7	KBUMN Ministry of State Owned Enterprises
			8. Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia 8. Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			9. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	2 Mei 2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
			10. Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital 10. Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era	30-May-24 May 30, 2024	3	OJK Institute
			11. Pelatihan Pembekalan Risk Management Jenjang 4 11. Risk Management Level 4 Training	13 -14 Mei May 13 -14	14	Efektif Pro
			12. Workshop Internal Audit Business Continuity Management System (BCMS) 12. Workshop on Internal Audit of Business Continuity Management System (BCMS)	01 Agustus 2024 August 1, 2024	6	PT Robere Management Indonesia
17	Arif Syachroni	Middle Analyst Bagian PSKA Middle Analyst of PSKA Department	1. Strategi Mencegah Serangan Siber 1. Strategies to Prevent Cyber Attacks	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			2. Webinar Artificial Intelligence Changes The Face of The Financia Sector 2. "Artificial Intelligence Changes the Face of Financial Sector" webinar.	7 Maret 2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			3. Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia 3. Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			4. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	2 Mei 2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
			5. Pelatihan Pembekalan Risk Management Jenjang 4 5. Risk Management Level 4 Training	13 -14 Mei May 13 -14	14	Efektif Pro
			6. Workshop Governance Risk Management, Risk Management and Compliance (GRC) 6. Workshop on Governance, Risk Management, and Compliance (GRC)	6-Juni-2024 June 6, 2024	3	Divisi MR - PT Jamkrindo Risk Management Division - PT Jamkrindo
			7. Workshop Internal Audit Business Continuity Management System (BCMS) 7. Workshop on Internal Audit of Business Continuity Management System (BCMS)	01 Agustus 2024 August 1, 2024	6	PT Robere Management Indonesia

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
18	Laila Wijayanti	Middle Analyst Bagian Pengembangan Standar dan Kualitas Audit Middle Analyst of the Audit Standards and Quality Development Department	1. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			1. OJK Webinar - Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry			
			2. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			2. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			3. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal"	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			3. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.			
			4. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			4. Webinar with the theme "Strategies to Prevent Cyber Attacks"			
			5. Training dan Awareness Teknologi Informasi : Implikasi Artificial Intelligence di Lembaga Keuangan	5 Maret 2024 March 5, 2024	3	Inhouse Jamkrindo
			5. Information Technology Training and Awareness : Implications of Artificial Intelligence in Financial Institutions			
			6. Idea Talks Volume 5 - Tantangan Produk Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
19	Emmerisa br. Sembriring	Middle Analyst Quality Assurance Middle Analyst of Quality Assurance	6. Idea Talks Event Volume 5 - Challenges in Sharia Finance and Capital Market Products Amid Social Dynamics and Interest Rate			
			7. Tantangan Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			7. The Challenges of Capital Markets and Sharia Finance Amid Social Dynamics and Interest Rates			
			8. Webinar dengan tema "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector"	02 Mei 2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
			8. "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" webinar.			
			9. Pelatihan Pembekalan Risk Management Jenjang 4	13 -14 Mei May 13 -14	14	Efektif Pro
			9. Risk Management Level 4 Training			
			10. Internal Auditors Readiness in Facing Cyber Attacks	6 Juli 2024 July 6, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			11. Workshop Internal Audit Business Continuity Management System (BCMS)	01 Agustus 2024 August 1, 2024	6	PT Robere Management Indonesia
			11. Workshop on Internal Audit of Business Continuity Management System (BCMS)			
			1. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
19	Emmerisa br. Sembriring	Middle Analyst Quality Assurance Middle Analyst of Quality Assurance	1. OJK Webinar - Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry			
			2. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 y 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			2. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			3. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal"	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			3. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.			
			4. Webinar dengan topik "Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024"	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			4. "2024 Economic and Financial Outlook" webinar.			
			5. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber" (Undg OJK)	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			5. "Strategies to Prevent Cyber Attacks"(hosted by OJK) webinar.			
			6. Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			6. Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets			
			7. Pelatihan Pembekalan Risk Management Jenjang 4	13 -14 Mei May 13 -14	14	Efektif Pro
			7. Risk Management Level 4 Training			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
20	Asep Ginanjari Cahya Gumilar	Middle Analyst Quality Assurance Middle Analyst of Quality Assurance	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			2. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal"	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			2. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.			
			3. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	02 April 2024 April 2, 2024	3	OJK Institute
21	Andesa Putra	Middle Analyst Quality Assurance Middle Analyst of Quality Assurance	3. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector			
			4. Pelatihan Pembekalan Risk Management Jenjang 4	13 -14 Mei May 13 -14	14	Efektif Pro
			4. Risk Management Level 4 Training			
			5. Internal Auditor Readiness in Facing Cyber Attacks	July 6, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			1. OJK Webinar - Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry			
			2. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	OJK Institute
			2. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			3. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			3. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.			
			4. ISO 37001:2016 Awareness and Requirement Training	21 Maret 2024 March 21, 2024	7	Cevral Consulting
			5. Webinar Peran Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam mendorong Transisi Energi menuju Net Zero Emission Indonesia	7 Maret 2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			5. "The Role of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Indonesia's Energy Transition Towards Net Zero Emission" webinar.			
			6. Webinar Artificial Intelligence Changes The Face of The Financial Sector	7 Maret 2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			6. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" webinar.			
			7. Webinar mengenai Tantangan Produk Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			7. "The Challenges in Capital Markets and Sharia Finance in Social and Interest Rates Dynamics" webinar.			
			8. Skema Analis Penjaminan	2 s.d 4 Mei 2024 May 2 - 4, 2024	16	BCG & LSP BCG & Professional Certification Institute
			8. Guarantee Analyst Scheme			
			9. Pelatihan & Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA)	14 s.d 26 Oktober 2024 October 14 - 26, 2024	80	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			9. Qualified Internal Audit (QIA) Training & Certification			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
22	Indra Budi Setiyawan	Junior Analyst Departemen Audit I Junior Analyst of Audit Department I	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			2. Webinar "Peluang dan Tantangan Aset Digital Indonesia"	14/03/2024 March 14, 2024	3	OJK
			2. "Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets" webinar.			
			3. Pelatihan dan Sertifikasi Skema Analis Penjaminan	2 s.d 4 Mei 2024 May 2 - 4, 2024	16	BCG & LSP BCG & Professional Certification Institute
			3. Guarantee Analyst Scheme Training and Certification			
			4. Sharing Session UU PDP bertemakan "What Next to Do to Implement UU PDP for BUMN"	14 Mei 2024 May 14, 2024	3	FORDIGI BUMN, Jasa Marga dan PGN
23	Windy Nadiasatri	Staf Audit I Audit Staff I	4. Sharing Session on the Personal Data Protection Law (UU PDP) with the theme "What To Do Next To Implement PDP Law for SOEs"			FORDIGI BUMN, Jasa Marga, and PGN
			5. Workshop Governance Risk Management, Risk Management and Compliance (GRC)	6-Juni-2024 June 6, 2024	3	Divisi MR - PT Jamkrindo Risk Management Division - PT Jamkrindo
			5. Workshop on Governance, Risk Management, and Compliance (GRC)			
			6. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	7 & 14 September 2024 September 7 & 14, 2024	7	Efektif Pro
			6. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification			
			7. Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	18 - 30 November 2024 November 18 - 30, 2024	80	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar "Artificial Intelligence Changes The Face of The Financial Sector Confirmation"	7/3/2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			1. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" webinar.			
			2. Webinar "strategi pengembangan SJK melalui penguatan perbankan syariah dan market conduct"	13/03/2024 March 13, 2024	3	OJK Institute
			2. Strategy for Developing the Financial Services Sectors through Strengthening the Sharia Banking and Market Conduct webinar.			
			3. Webinar "peluang dan tantangan aset digital indonesia"	14/03/2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			3. "Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets" webinar.			
			4. Webinar "Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah"	21/03/2024 March 21, 2024	3	OJK Institute
			4. "Strategies to Accelerate the Market Share of Sharia Finance" webinar.			
			5. ISO 37001:2016 Awareness and Requirement Training	21/03/2024 March 21, 2024	7	Cevral Consulting
			6. Peran Taksonomi untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia	28/03/2024 March 28, 2024	3	OJK Institute
			6. The Role of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Indonesia's Energy Transition Towards Net Zero Emission			
			7. Peran Innovative Credit Scoring (ICS) Dalam Meningkatkan Akses Pendanaan	27/06/2024 June 27, 2024	3	OJK Institute
			7. The Role of Innovative Credit Scoring (ICS) in Improving Access to Funding			
			8. Pelatihan & Sertifikasi QIA	4-16 November 2024 November 4 - 16, 2024	80	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			8. QIA Training & Workshop			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
24	Olga Osmelia	Staf Audit I Audit Staff I	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			2. Webinar "Idea Talks hasil riset OJK Institute Volume 4 tahun 2024"	13 Maret 2024 March 13, 2024	3	OJK Institute
			2. "2024 OJK Institute Idea Talks Event Volume 4 – Dissemination of the OJK Institute research findings" webinar.			
			3. Pemaparan dan diskusi/tanya jawab terkait riset dengan judul: Briefing and Discussion/Q&A Session on the research titled:			
			4. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia Strategy for the Development of Indonesia's Sharia Banking	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			5. Penguatan Market Conduct pada Industri Asuransi Jiwa Strengthening the Market Conduct on the Life Insurance Industry			
			6. Webinar "Peluang dan Tantangan Aset Digital Indonesia"	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			6. "Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets" webinar.			
			7. Tantangan Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga The Challenges in Capital Markets and Sharia Finance Amid Social Dynamics and Interest Rates	22 Agustus 2024 August 22, 2024	3	TAALENTA
25	Alya Awalia Fikriyan	Staf Audit II Audit Staff II	8. Awareness Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Awareness of Personal Data Protection Law	7 & 14 September 2024 September 7 & 14, 2024	7	Efektif Pro
			9. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification			
			10. Pelatihan & Sertifikasi QIA QIA Training & Workshop	4-16 November 2024 November 4 - 16, 2024	80	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			10. QIA Training & Workshop			
			1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			2. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun OJK Webinar - Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			3. Webinar OJK - Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal (undangan OJK) OJK Webinar titled "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" (hosted by OJK)			
			4. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber" "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			5. Webinar "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" webinar.			
25	Alya Awalia Fikriyan	Staf Audit II Audit Staff II	6. Webinar "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" webinar.	2-May-24 May 2, 2024	3	OJK Institute
			7. Strategi Pemasaran Digital di Era Digital: Taktik dan Langkah Efektif Mencetak Profit Optimal Digital Marketing Strategies in the Digital Era: Effective Tactics and Measures to Maximize Profits			
			7. Strategi Pemasaran Digital di Era Digital: Taktik dan Langkah Efektif Mencetak Profit Optimal Digital Marketing Strategies in the Digital Era: Effective Tactics and Measures to Maximize Profits	5-Jun-24 June 5, 2024	3	OJK Institute
			8. Workshop Governance, Risk Management and Compliance dan Sosialisasi Anti Fraud dan Risiko Penyuapan Workshop on Governance, Risk Management, and Compliance. And Anti Fraud and Bribery Risk Dissemination			
			8. Workshop Governance, Risk Management and Compliance dan Sosialisasi Anti Fraud dan Risiko Penyuapan Workshop on Governance, Risk Management, and Compliance. And Anti Fraud and Bribery Risk Dissemination	6-Jun-24 June 6, 2024	3	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
			9. Seminar "Analisis Kinerja BUMN 2024 dan Prospek BUMN Masa Depan" Seminar on "Analysis of the 2024 SOE Performance and Future Prospects of SOEs"			
			10. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification	11-Jun-24 June 11, 2024	4	BUMN Research Centre (BRG) LMFEBUI
			10. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification			
			11. Pelatihan & Sertifikasi QIA QIA Training & Certification	7 & 14 September 2024 September 7 & 14, 2024	7	Efektif Pro
			11. QIA Training & Certification			
25	Alya Awalia Fikriyan	Staf Audit II Audit Staff II	11. Pelatihan & Sertifikasi QIA QIA Training & Certification	4-16 November 2024 November 4 - 16, 2024	80	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			11. QIA Training & Certification			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
26	Aulia Vantie Fajriani	Staf Audit II Audit Staff II	1. Webinar OJK - Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun 1. OJK Webinar - Investment Management Strategies for the Insurance and Retirement Fund Industry	1 Februari 2024 February 1, 2024	3	OJK Institute
			2. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices" 2. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			3. Webinar OJK - Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal (undangan OJK) 3. OJK Webinar titled "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" (OJK invitation)	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			4. Webinar OJK - Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024 4. OJK Webinar titled "2024 Economic and Financial Outlook"	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			5. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber" 5. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			6. Webinar "Idea Talks hasil riset OJK Institute Volume 4 tahun 2024" 6. "Idea Talks Event Volume 4 - Dissemination of the OJK Institute research findings" webinar.			
			7. Pemaparan dan diskusi/tanya jawab terkait riset dengan: judul: 7. Briefing and Discussion/Q&A Session on the research titled:	13 Maret 2024 March 13, 2024	3	OJK Institute
			8. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 8. Strategy for Developing Indonesia's Sharia Banking			
			9. Penguatan Market Conduct pada Industri Asuransi Jiwa 9. Strengthening the Market Conduct on the Life Insurance Industry			
			10. Webinar "Peluang dan Tantangan Aset Digital Indonesia" 10. Webinar with the theme "Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets"	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			11. Webinar Idea Talks Volume 5 dengan Topik "Tantangan Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga" 11. Idea Talks Volume 5 - Challenges in Sharia Finance and Capital Market Products Amid Social Dynamics and Interest Rate	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			12. Webinar dengan tema "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" 12. "How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector" webinar.	02 Mei 2024 May 2, 2024	3	OJK Institute
			13. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 13. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification	7 & 14 September 2024 September 7 & 14, 2024	7	Efektif Pro
			14. Pelatihan & Sertifikasi QIA 14. QIA Training & Certification	4 -16 November 2024 November 4 - 16, 2024	80	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
27	Laode Shalihi Ismail	Junior Analyst Departemen Audit III Junior Analyst of Audit Department III	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			2. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal"	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			2. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.			
			3. Webinar "Outlook Ekonomi dan keuangan di Tahun 2024"	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			3. "2024 Economic and Financial Outlook" webinar.			
			4. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			4. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.			
			5. Webinar "Artificial Intelligence Changes The Face of The Financial Sector Confirmation"	07 Maret 2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			5. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" webinar.			
			6. Webinar "Idea Talks hasil riset OJK Institute Volume 4 tahun 2024"			
			6. "2024 Idea Talks Event - Dissemination of the OJK Institute research findings" webinar.			
			7. Pemaparan dan diskusi/tanya jawab terkait riset dengan judul:	13 Maret 2024 March 13, 2024	3	OJK Institute
			7. Briefing and Discussion/Q&A Session on the research titled:			
			8. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia			
			8. Strategy for Developing Indonesia's Sharia Banking			
			9. Penguatan Market Conduct pada Industri Asuransi Jiwa			
			9. Strengthening the Market Conduct on the Life Insurance Industry			
			10. Webinar "Peluang dan Tantangan Aset Digital Indonesia"	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			10. "Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets" webinar.			
			11. Webinar "Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah"	21 Maret 2024 March 21, 2024	3	OJK Institute
			11. Webinar with the theme "Strategies to Accelerate the Market Share of Sharia Finance"			
			12. Webinar "Perhitungan Pajak Pemotongan Penghasilan Perseorangan dengan Tarif Efektif Rata	20 Maret 2024 March 20, 2024	2	OJK Institute
			12. "Calculation of Individual Income tax Withholding Using the Average Effective rate" webinar.			
			13. ISO 37001:2016 Awareness and Requirement Training	21 Maret 2024 March 21, 2024	3	Cevral Consulting
			14. Webinar "Eksplorasi Industri Keuangan & Perbankan syariah: Peluang Baru Ekonomi Modern"	22 Maret 2024 March 22, 2024	3	OJK Institute
			14. "Exploration of the Sharia Finance & Banking Industry: New Opportunities for the Modern Economy" webinar.			
			15. Webinar Belajar Fundamental Quality Assurance	26 Maret 2024 March 26, 2024	2	OJK Institute
			15. "Learning the Fundamentals of Quality Assurance" webinar.			
			16. Webinar Peran Taksonomi untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia	28 Maret 2024 March 28, 2024	3	OJK Institute
			16. "The Role of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Indonesia's Energy Transition Towards Net Zero Emission" webinar.			
			17. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	22 s.d 23 Agustus 2024 August 22 - 23, 2024	7	Efektif Pro
			17. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
28	Tsany Ainur Rizki	Staf Audit III Audit Staff III	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			2. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			2. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.			
			3. Training & Awareness TI : Implikasi Artificial Intelligence Di Lembaga Keuangan	5 Maret 2024 March 5, 2024	3	Inhouse Jamkrindo
			3. IT Training & Awareness: The Implications of Artificial Intelligence in Financial Institutions			
			4. Webinar "Artificial Intelligence Changes The Face of The Financial Sector Confirmation"	07 Maret 2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			4. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" webinar.			
			5. Idea Talks hasil riset OJK Institute Volume 4 tahun 2024			
			2024 Idea Talks Event Volume 4 –Dissemination of the OJK Institute research findings			
			6. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia	13 Maret 2024 March 13, 2024	3	OJK Institute
			6. Strategy for Developing Indonesia's Sharia Banking			
			7. Penguatan Market Conduct pada Industri Asuransi Jiwa			
			7. Strengthening the Market Conduct on the Life Insurance Industry			
29	Silvia Aprilia K	Staf Audit III Audit Staff III	8. Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			8. Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets			
			9. Global Internal Audit Standard (GIAS)	11 Mei 2025 May 11, 2025	3	OJK Institute
			10. Seminar Nasional Sinergo Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN RI Guna Optimalisasi Pengelolaan BUMN	16 Mei 2023 May 16, 2023	3	OJK Institute
			10. Synergy between the Attorney General's Office and the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) of Indonesia to Optimize SOE Governance			
			11. Peluang dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi di Era Digital	30 Mei 2025 May 30, 2025	3	OJK Institute
			11. Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era			
			12. Workshop Governance Risk Management, and Compliance dan Sosialisasi Anti Fraud dan Risiko	06 Juni 2024 June 6, 2024	3	OJK Institute
			12. Workshop on Governance, Risk Management, and Compliance. And Anti Fraud and Bribery Risk Dissemination			
			13. Analisis Kinerja BUMN 2024 dan Prospek BUMN Masa Depan	11 Juni 2023 June 11, 2023	4	OJK Institute
			13. Analysis of the 2024 SOE Performance and Future Prospects for SOEs			
			14. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	22 s.d 23 Agustus 2024 August 22 - 23, 2024	7	Efektif Pro
			14. Preparation and Examination for Level 4 Risk Management Certification			
29	Silvia Aprilia K	Staf Audit III Audit Staff III	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			2. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			2. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.			
			3. Webinar "Artificial Intelligence Changes The Face of The Financial Sector" (Undg OJK)	7 Maret 2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			3. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" webinar (hosted by OJK).			
			4. Idea Talks hasil riset OJK Institute Volume 4 tahun 2024 (Undgn OJK)			
			2024 Idea Talks Event Volume 4 – Dissemination of the OJK Institute research findings (hosted by OJK)			
			5. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia	13 Maret 2024 March 13, 2024	3	OJK Institute
			5. Strategy for Developing Indonesia's Sharia Banking			
			6. Penguatan Market Conduct pada Industri Asuransi Jiwa			
			6. Strengthening the Market Conduct on the Life Insurance Industry			
			7. Webinar dengan tema "Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia" (Undg OJK)	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			7. "Opportunities and Challenges of Open Finance in Indonesia" webinar (hosted by OJK).			
			8. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	05 Februari 2024 February 5, 2024	3	OJK Institute
			8. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector			
29	Silvia Aprilia K	Staf Audit III Audit Staff III	9. Internal Auditors Readiness in Facing Cyber Attacks	6 Juli 2024 July 6, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			9. Internal Auditors Readiness in Facing Cyber Attacks			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
30	Annisa Yuni S	Staf Audit IV Audit Staff IV	1. Webinar Goes to Konferensi Auditor Internal dengan tema "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"	3 Februari 2024 February 3, 2024	3	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			1. Webinar Goes to Internal Audit Conference titled "Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive into Internal Audit Practices"			
			2. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal"	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			2. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.			
			3. Webinar "Outlook Ekonomi dan keuangan di Tahun 2024"	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			3. "2024 Economic and Financial Outlook" webinar.			
			4. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			4. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.			
			5. Idea Talks 4 - Strategi Pengembangan SJK melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Cloud	13 Maret 2024 March 13, 2024	3	OJK Institute
			5. Idea Talks Event Volume 4 - Strategy for Developing Financial Services through Strengthening Sharia Banking and Market Conduct			
			6. Webinar "Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia"	14 Maret 2024 March 14, 2024	3	OJK Institute
			6. "Opportunities and Challenges of Indonesia's Digital Assets " webinar.			
			7. Idea Talks Volume 5 - Tantangan Produk Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga Confirmation	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			7. Idea Talks Event Volume 5 - Challenges in Sharia Finance and Capital Market Products Amid Social Dynamics and Interest Rate			
			8. Peran Taksonomi untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia	28 Maret 2024 March 28, 2024	3	OJK Institute
			8. The Role of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Indonesia's Energy Transition Towards Net Zero Emission			
			9. Peluang dan Tantangan Open Finance di Indonesia	25 April 2024 April 25, 2024	3	OJK Institute
			9. Opportunities and Challenges of Open Finance in Indonesia			
			10. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	05 Februari 2024 February 5, 2024	3	OJK Institute
			11. Seminar Nasional Sinergo Kejaksanaan RI dan Kementerian BUMN RI Guna Optimalisasi Pengelolaan BUMN	16 Mei 2023 May 16, 2023	3	OJK Institute
			11. National Seminar on the Synergy between the Attorney General's Office and the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) of Indonesia to Optimize SOE Governance			
			12. Strategi Pemasaran Digital di Era Digital: Taktik dan Langkah Efektif Mencetak Profit Optimal	5-Jun-24 June 5, 2024	3	OJK Institute
			12. Digital Marketing Strategies in the Digital Era: Effective Tactics and Measures to Maximize Profits			
			13. Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	11-Jun-24 June 11, 2024	3	OJK Institute
			14. Pelatihan Fundamental IT Audit	21 – 22 Oktober 2024 October 21 - 22, 2024	16	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			14. IT Audit Fundamentals Training			

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Name of Certification/Training/Workshop/Seminar/etc.	Tanggal Sertifikasi / Pelatihan/ Workshop/ Seminar/ dll Date of Certification/ Training/Workshop/ Seminar/etc.	Jumlah Jam pelatihan Total Training Hours	Penyelenggara Organizers
31	Aktinaria Nastiti Widhyanti	Staf Audit IV Audit Staff IV	1. Webinar "Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal"	15 Februari 2024 February 15, 2024	3	OJK Institute
			1. "The Role of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) in Deterring Illegal Financial Services Actors" webinar.			
			2. Webinar "Outlook Ekonomi dan keuangan di Tahun 2024"	22 Februari 2024 February 22, 2024	3	OJK Institute
			2. "2024 Economic and Financial Outlook" webinar.			
			3. Webinar "Strategi Mencegah Serangan Siber"	29 Februari 2024 February 29, 2024	3	OJK Institute
			3. "Strategies to Prevent Cyber Attacks" webinar.			
			4. Webinar "Artificial Intelligence Changes The Face of The Financial Sector"	7 Maret 2024 March 7, 2024	3	OJK Institute
			4. "Artificial Intelligence Changes the Face of The Financial Sector" webinar.			
			5. Idea Talks Volume 5 - Tantangan Produk Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga	26 Maret 2024 March 26, 2024	3	OJK Institute
			5. Idea Talks Event Volume 5 - Challenges in Sharia Finance and Capital Market Products Amid Social Dynamics and Interest Rate			
			6. Peran Taksonomi untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi Menuju Net Zero Emission Indonesia	28 Maret 2024 March 28, 2024	3	OJK Institute
			6. The Role of Indonesia's Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Indonesia's Energy Transition Towards Net Zero Emission			
			7. Peluang dan Tantangan Open Finance di Indonesia	25 April 2024 April 25, 2024	3	OJK Institute
			7. Opportunities and Challenges of Open Finance in Indonesia			
			8. How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector	2 Mei 2025 May 2, 2025	3	OJK Institute
			8. How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance	16 Mei 2023 May 16, 2023	3	OJK Institute
			10. Seminar Nasional Sinergo Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN RI Guna Optimalisasi Pengelolaan BUMN	16-May-23 May 16, 2023	3	Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN Attorney General's Office of Indonesia and the Ministry of SOEs
			10. National Seminar on the Synergy between the Attorney General's Office and the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) of Indonesia to Optimize SOE Governance			
			11. Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital	30-May-25 May 30, 2025	3	OJK Institute
			11. Opportunities and Challenges of Personal Data Protection in Transactions in the Digital Era			
			12. Building Trust for Insurance Industry Via Empathy in Claims Management	11 Juni 2024 June 11, 2024	3	OJK Institute
			13. Pelatihan Fundamental IT Audit	21 - 22 Oktober 2024 October 21 - 22, 2024	16	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			13. IT Audit Fundamentals Training			
			14. Pelatihan & Sertifikasi QIA	4 -16 November 2024 November 4 - 16, 2024	80	YPIA Internal Audit Education Foundation (YPIA)
			14. QIA Training & Workshop			

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2024

Melalui Disposisi Direktur Utama pada tanggal 08 Januari 2024 terhadap memorandum Satuan Pengawasan Intern No. 44/INT/ PKA/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) Satuan Pengawasan Intern tahun 2024, bahwa pada pelaksanaan audit tahun 2024, SPI akan melaksanakan audit pada 19 (sembilan belas) Divisi, 9 (sembilan) Kantor Wilayah dan 54 (lima puluh empat) Kantor Cabang/Kantor Cabang Khusus.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Satuan Pengawasan Intern

Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 2.897 dari 3.211 rekomendasi telah ditindaklanjuti, mencapai tingkat penyelesaian sebesar 90,22%. Sementara itu, 314 rekomendasi lainnya, atau 9,78 %, masih dalam batas waktu tindak lanjut sesuai jadwal audit.

Brief Report on the Implementation of the 2024 SPI Duties

Based on the President Director's Disposition dated January 08, 2024, in response to the Internal Audit Unit's memorandum No. 44/INT/PKA/I/2024 of the same date concerning the Submission of the 2024 Annual Audit Work Plan (RKAT), the Internal Audit Unit (SPI) is scheduled to conduct audits on 19 Divisions, 9 Regional Offices, and 54 Branch Offices/Special Branch Offices throughout 2024.

Performance Evaluation and Assessment of the Internal Audit Unit

By the end of 2024, 2,897 out of 3,211 audit recommendations had been followed up, achieving a completion rate of 90.22%. Whereas 314 recommendations, or 9.78%, are still within the designated follow-up period in accordance with the audit schedule.

Tabel KPI Divisi SPI 2024
2024 KPI Table of the SPI Division

No.	KPI	Formula	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization
1	Penyelesaian dan penyampaian Laporan Keuangan Audit Tahun 2023 Completion and submission of the 2023 Audited Financial Statements	Tanggal rilis laporan keuangan Affiliated Companies dari IFG (Audited) tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Release Date of the 2023 Audited Financial Statements of IFG Affiliated Companies complete with an Unqualified Opinion	time	Minimize	9	28 Maret 2024 March 28, 2024	100%
2	Implementasi Pedoman Strategis Audit Internal di Level SOP Implementation of the Internal Audit Strategic Guidelines at the SOP Level	Terbit SOP Audit Internal sesuai PerMen BUMN nomor 2/2023 Issuance of the Internal Audit SOP in accordance with the Regulation of SOEs number 2/2023	%	Maximize	9	100	100%
3	Monitoring Tindak Lanjut atas Audit Eksternal dan Internal Monitoring the Follow-up on External and Internal Audits	Pelaporan monitoring TL atas Audit Eksternal dan Internal kepada BoD, BoC, dan SKAI BPUI Reporting of follow-up monitoring on External and Internal Audits to the BoD, BoC, and SKAI of BPUI	%	Maximize	9	100	100%
4	Melaksanakan Audit Tematik Klaim Conduct Thematic Claim Audits	Laporan Hasil Audit Tematik Klaim Thematic Claim Audit Report	%	Maximize	9	100	100%
5	Melaksanakan Audit Tematik Kas dan Investasi Conduct Thematic Audit on Cash and Investments	Laporan Hasil Audit Tematik Kas dan Investasi Thematic Audit on Cash and Investments Report	%	Maximize	9	100	100%
6	Melaksanakan Audit Tematik Penerapan MR dan TI (POJK No 4 2021) Conduct Thematic Audit on the Implementation of Risk Management and Information Technology (POJK No. 4 of 2021)	Laporan Hasil Audit Tematik Penerapan MR dan TI Thematic Audit Report on the Implementation of Risk Management and Information Technology	%	Maximize	9	100	100%
7	Pelaksanaan Program Kerja Audit tahun 2024 Implementation of the 2024 Audit Work Program	Laporan Hasil Audit seluruh unit kerja (82 LHA) Audit Reports for All Work Units (82 Audit Reports)	%	Maximize	10	100	118,29%
8	Melaksanakan reviu ICOFR yang dilakukan bersama dengan konsultan independen Tahun 2024 Conduct a review of ICOFR in collaboration with an independent consultant in 2024	Tersedianya Laporan Hasil Review ICOFR Availability of the ICOFR Review Report	%	Maximize	9	100	100%
9	Melakukan pembenahan data governance blueprint 1. Assessment IACM 2. Self assessment Internal Control Maturity Level (ICML) 3. Review Laporan Keuangan 4. Review Risk Maturity Level Improve the Data Governance Blueprint 1. IACM Assessment 2. Self-Assessment of Internal Control Maturity Level (ICML) 3. Review of Financial Statement 4. Review of Risk Maturity Level	Tersedianya laporan hasil review/assessment kepada Direksi Availability of Review/ Assessment Reports submitted to the Board of Directors	%	Maximize	9	100	100%
10	Assessment GCG GCG Assessment	Terbitnya Laporan Assessment GCG sesuai POJK Issuance of GCG Assessment Report in accordance with POJK	time	Minimize	9	April 2024	100%
11	Pengembangan dan Integrasi Internal Audit Tools Development and Integration of Internal Audit Tools	Tools audit (sistem AMS) yang terintegrasi Integrated Audit Tools (AMS system)	%	Maximize	9	100	100%

Sistem Pengendalian Internal

Kepatuhan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan

Jamkrindo memastikan bahwa seluruh operasional bisnis dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup peraturan pemerintah, ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kebijakan dan prosedur internal perusahaan, dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. Tersedianya Informasi Keuangan dan Manajemen yang Lengkap, Akurat, Tepat Guna, dan Tepat Waktu atau Tujuan Informasi (Tujuan Informasi);
2. Dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Efektivitas dan Efisiensi dalam Kegiatan Usaha (Tujuan Operasional);
4. Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Perusahaan dari Risiko kerugian;
5. Meningkatkan Efektivitas Budaya Risiko (*Risk Culture*) pada Organisasi Perusahaan Secara Menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko);
6. Dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Perusahaan secara berkesinambungan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sebagai bagian dari upaya menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih baik dan bertanggung jawab, Jamkrindo mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern yang menjadi landasan dalam setiap kegiatan operasional. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan dengan sehat, terkendali, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern ini berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan kinerja yang optimal, meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan, mengurangi risiko kerugian, serta menjaga agar seluruh kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Sebagai acuan utama, Jamkrindo mengadopsi kerangka kerja COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – Internal Control Integrated Framework. Pendekatan ini memastikan bahwa pengendalian operasional dan finansial, pelaporan keuangan, serta efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan dapat terjaga dengan baik, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku.

Internal Control System

Compliance with Laws and Regulations

Jamkrindo is committed to ensuring that all business operations comply with the applicable laws and regulations, including those issued by the government, the Financial Services Authority (OJK), and the Company's internal policies and procedures. This commitment is aimed at achieving the following key objectives:

1. To ensure the availability of complete, accurate, effective, and timely Financial and Management Information or the Information Purpose;
2. To ensure the availability of complete, accurate, appropriate and timely reports required in appropriate and accountable decision making.
3. Effectiveness and Efficiency in Business Activities (Operational Objectives);
4. To increase the effective and efficient use of assets and other resources in order to protect the Company from any risk of loss;
5. Improving the Effectiveness of Risk Culture in the Company Organization as a Whole (Objectives of Risk Culture);
6. To immediately identify weaknesses, assess irregularities, and regularly reassess the fairness of Company's existing policies and procedures.

Review of the Effectiveness of the Internal Control System

As part of its commitment to strengthening corporate governance, Jamkrindo implements an Internal Control System that serves as the foundation for all operations. This system is designed to ensure that business activities are conducted in a sound, controlled manner and in compliance with applicable regulations.

This Internal Control System plays a vital role in achieving optimal performance objectives enhancing stakeholders value, mitigating the risk of losses, and ensuring compliance with applicable legal regulations.

Jamkrindo adopts the COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) framework - Internal Control Integrated Framework as its primary reference. This framework supports sound governance by promoting operational and financial integrity, reliable financial reporting, and overall efficiency and effectiveness, while ensuring compliance with all relevant regulations.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien, Dewan Komisaris dan Direksi Jamkrindo menilai bahwa perusahaan telah menetapkan standar acuan kerja yang jelas untuk setiap divisi dan fungsi yang ada. Standar ini memberikan panduan bagi semua pihak dalam menjalankan tugas masing-masing, khususnya dalam mengelola pengendalian internal dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Jamkrindo telah mengacu pada COSO Framework, yang melibatkan seluruh elemen perusahaan, mulai dari karyawan, pejabat, hingga Direksi dan Dewan Komisaris. Pengendalian internal ini bertujuan untuk memastikan tercapainya beberapa sasaran, yaitu tujuan operasional yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi operasional, tujuan pelaporan yang mencakup keandalan laporan keuangan yang transparan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan regulator, serta tujuan kepatuhan yang menekankan pada pemenuhan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Statement from the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the Adequacy of the Internal Control System

In order to ensure effective and efficient governance, Jamkrindo's Board of Commissioners and Board of Directors assess that the Company has established clear work reference standards for each division and function. These standards serve as a guideline for all parties in carrying out their respective duties, particularly in managing internal controls within daily operations.

Jamkrindo's internal control system refers to the COSO Framework and involves all levels of the Company--from employees and officers, to the Board of Directors and Board of Commissioners. This system aims to support the achievement of several objectives: operational objectives that focus on the effectiveness and efficiency of operations, reporting objectives that emphasize the reliability of transparent and timely financial reporting in accordance with regulatory requirements, and compliance objectives that highlight adherence to applicable laws and regulations.

AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT

Audit eksternal memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Akuntan Publik, sebagai pihak independen, bertugas memeriksa laporan keuangan untuk memberikan opini objektif terkait kewajaran, kepatuhan, dan kesesuaian laporan tersebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia serta peraturan yang berlaku.

Agar hasil audit tetap independen, Akuntan Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, maupun pihak berkepentingan lainnya di perusahaan. Perusahaan juga diwajibkan menyediakan seluruh catatan akuntansi dan data pendukung yang diperlukan untuk memastikan auditor dapat memberikan penilaian yang tepat dan objektif sesuai standar yang berlaku.

Proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan dilakukan melalui RUPS, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Untuk menjaga independensi dan kualitas audit, auditor yang dipilih tidak diperbolehkan memiliki konflik kepentingan dengan pihak manapun di dalam perusahaan.

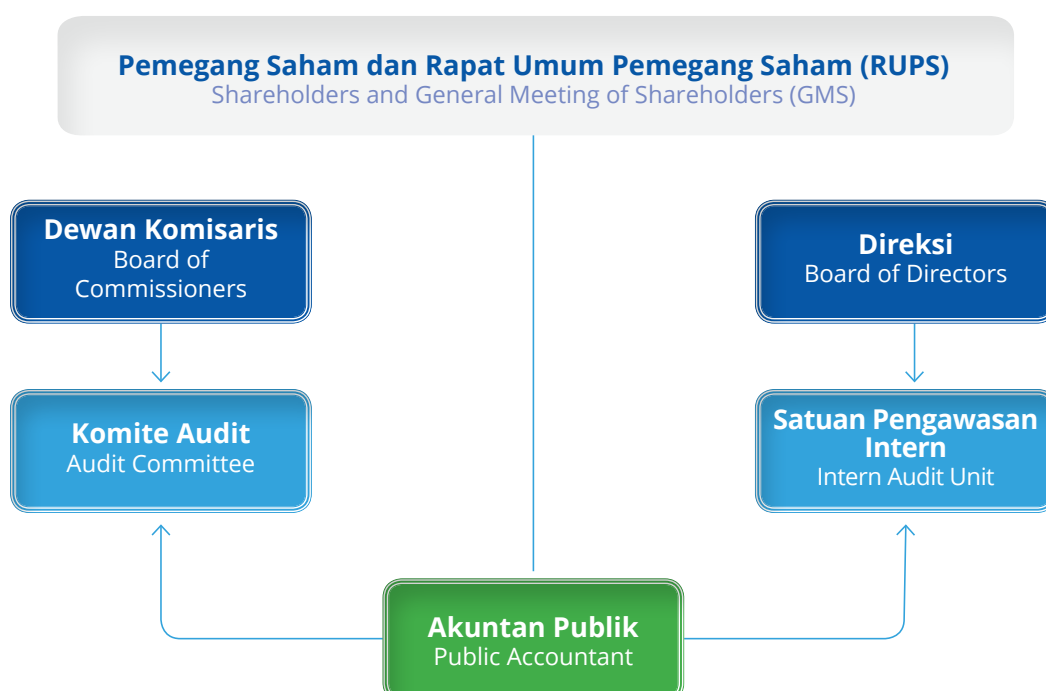
Berikut adalah skema sederhana yang menggambarkan hubungan antara organ internal GCG dan Akuntan Publik sebagai organ eksternal, seperti yang terlihat di bawah ini.

External audits play a crucial role in ensuring the transparency and accountability of the Company's financial statements. As independent parties, Public accountants are responsible for auditing the financial statements and providing an objective opinion regarding their fairness, compliance, and conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and applicable regulations.

To maintain the independence of audit results, public accountants must remain free from the influence of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and any other parties with vested interests within the Company. The Company is also obligated to provide complete accounting records and supporting data to enable the auditor to deliver an accurate and objective assessment in accordance with prevailing standards.

The appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's financial statements is carried out through the General Meeting of Shareholders (GMS), based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. To ensure the independence and quality of audits, the appointed auditor must not have any conflicts of interest with any parties within the Company.

The following is a simplified diagram that illustrates the relationship between the Company's internal GCG organs and the Public Accountant as an external organ, as explained below.



Pemegang Saham memiliki kewenangan melalui RUPS untuk menetapkan Auditor Eksternal yang bertugas melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan. Dalam menjalankan fungsi audit independennya, Auditor Eksternal berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di bawah Direksi, serta Komite Audit di bawah Dewan Komisaris.

Penunjukan Auditor Publik dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang disahkan dalam RUPS. Mengacu pada PP 20/2015, Akuntan Publik hanya dapat memberikan jasa audit kepada perusahaan yang sama selama maksimal 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Setelah itu, Auditor Publik dapat kembali memberikan jasa audit kepada perusahaan tersebut apabila telah melewati periode jeda selama 2 (dua) tahun buku berturut-turut tanpa memberikan jasa audit.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyusun Laporan Keuangan Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mencakup berbagai prosedur audit yang relevan dengan kondisi yang ada. Proses audit melibatkan pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, serta pemeriksaan atas dasar pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Selain itu, audit mencakup penilaian terhadap prinsip akuntansi yang digunakan, estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, dan penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga mengadakan diskusi dengan manajemen terkait pernyataan-pernyataan yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Shareholders, through the General Meeting of Shareholders (GMS), holds the authority to appoint the External Auditor responsible for auditing the Company's financial statements. In carrying out its independent audit function, the External Auditor coordinates with the Internal Audit Unit (SPI) under the Board of Directors, as well as with the Audit Committee under the Board of Commissioners.

The appointment of a Public Auditor is conducted in accordance with Government Regulation No. 20 of 2015 concerning Public Accountant Practices, based on recommendations from the Board of Commissioners as ratified in the General Meeting of Shareholders (GMS). In line with the provisions of Government Regulation No. 20/2015, a Public Accountant may only provide audit services to the same company for a maximum of five consecutive fiscal years. After this period, the Public Auditor may resume providing audit services to the Company only after a (2) fiscal years cooling-off period, during which no audit services were provided to the Company.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

The management is responsible for the preparation of the Company's Financial Statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) set by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

External Audit Procedures and Auditing Standards

The audit of the Company's Financial Statements is conducted in accordance with the Public Accountants' Professional Standards (SPAP), which is a range of audit procedures tailored to the prevailing conditions. The audit process involves testing and evaluating the internal control system, as well as performing substantive procedure to examine the evidence supporting the figures and disclosures presented in the Financial Statements.

In addition, the audit involves assessing the accounting principles applied, the significant estimates made by management, and the overall presentation of the Financial Statements in accordance with the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also engages in discussions with management regarding the statements presented in the Financial Statements.

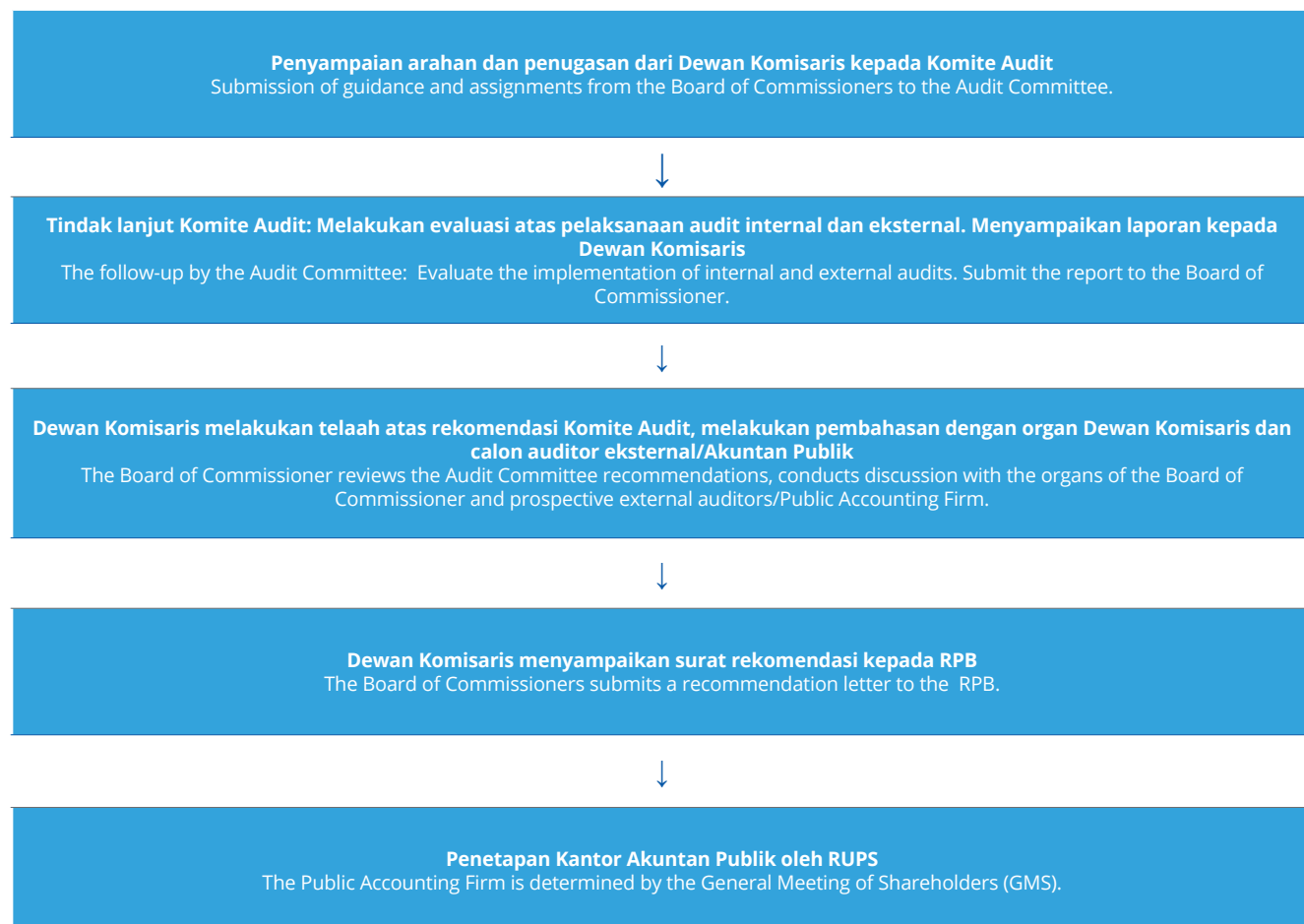
Audit memiliki risiko inheren, termasuk kemungkinan adanya kesalahan atau ketidakberesan yang material. Jika ditemukan hal tersebut, KAP akan menyampaikan temuan tersebut kepada manajemen. Kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh KAP disetujui oleh manajemen untuk dapat direview oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dalam hal terdapat bantuan keuangan dari Pemerintah Republik Indonesia, audit juga dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Audit inherently involve risks, including the risk of material misstatements or irregularities. Should such issues be identified, the Public Accounting Firm (KAP) will communicate the findings to management. The audit working papers prepared by the Public Accounting Firm (KAP) will be approved by management and made available for review by the relevant bodies or authorities.

The audit is conducted in accordance with the Professional Standards of Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). In cases where the Company receives financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, the audit is also conducted in accordance with the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Audit Board (BPK) of Indonesia.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik Mechanism for the Appointment and Determination of a Public Accountant



Melalui Surat PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 486/DPU/BPUI/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Penunjukan Penyedia Pengadaan Bersama Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Umum Tahun 2024 dan Audit *Opening Balances* Atas Implementasi PSAK 117 - PT Jaminan Kredit Indonesia, pemegang saham menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (AAJ) untuk melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2024. Akuntan yang ditunjuk untuk melaksanakan audit independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2024 adalah Bimo Iman Santoso. Audit ini dilakukan oleh KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (AAJ).

Through PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Letter No. 486/DPU/BPUI/X/2024 dated October 29, 2024, regarding the Appointment of a Joint Procurement Provider for Public Accounting Firm Services for the 2024 General Audit and Opening Balances Audit on the Implementation of PSAK 117 – PT Jaminan Kredit Indonesia, the shareholders approved the appointment of the RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (AAJ) Public Accounting Firm (KAP) to conduct the independent audit of the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year. Bimo Iman Santoso was designated as the accountant responsible for carrying out the independent. This audit is conducted by the RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (AAJ) Public Accounting Firm (KAP).

Akuntan Publik Tahun 2024

Public Accountant in 2024

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	:	RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (AAJ)
No. Izin KAP Public Accounting Firm (KAP) License Number.	:	STTD.KAP-00013/PM.22/2017
Tahun Audit Year of the Audit	:	Tahun Buku 2024 2024 Fiscal Year
Periode Penugasan Assignment Period	:	01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 January 1, 2024 - December 31, 2024
Periode Penugasan Assignment Period	:	01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 January 1, 2024 - December 31, 2024
Jasa Service	:	Akuntan Publik – Jasa Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Konsolidasian Anak serta Cucu Perusahaan untuk Tahun Buku 2024 PT Jaminan Kredit Indonesia Public Accountant – General Audit Services for the Consolidated Financial Statements of the Company's Subsidiaries and Affiliated Companies for PT Jaminan Kredit Indonesia's 2023 Fiscal Year
Jasa Lainnya Other Services	:	-
Biaya Cost	:	Rp 4.662.000.000

Daftar Akuntan Publik

Untuk memastikan transparansi, berikut disajikan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Auditor Publik selama 6 (enam) tahun berturut-turut, mencakup tahun buku 2019 hingga 2024, sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

List of Public Accountants

To ensure transparency, the Company's financial statements audited by a Public Accountant over a period of six (6) consecutive fiscal years, from 2019 to 2024, are presented in the table below.

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Opini Opinion	Biaya Jasa Audit (Rp-ribu) Audit Fee (IDR- Thousand)
2024	Bimo Iman Santoso (STTD.AP-63/NB.122/2019)	KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (AAJ) RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (AAJ) Public Accounting Firm (KAP)	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" "Present fairly, in all material respects"	4.662.000
2023	Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA (STTD.AP.-49/NB.122/2018)	KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC) No. Izin: STTD.KAP-04/PM.22/2018 Tanudiredja Wibisana Rintis and Rekan (PWC) Public Accounting Firm (KAP) with License Number: STTD. KAP-04/PM.22/2018	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" "Present fairly, in all material respects"	4.700.000
2022	Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA (STTD.AP.-49/NB.122/2018)	KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC) No. Izin: STTD.KAP-04/PM.22/2018 Tanudiredja Wibisana Rintis and Rekan (PWC) Public Accounting Firm (KAP) with License Number: STTD. KAP-04/PM.22/2018	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" "Present fairly, in all material respects"	5.665.000
2021	Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA (STTD.AP.-49/NB.122/2018)	KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC) No. Izin: STTD.KAP-04/PM.22/2018 Tanudiredja Wibisana Rintis and Rekan (PWC) Public Accounting Firm (KAP) with License Number: STTD. KAP-04/PM.22/2018	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" "Present fairly, in all material respects"	3.917.455
2020	Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA (STTD.AP.-49/NB.122/2018)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. Izin: STTD. KAP-04/PM.22/2018 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with License Number: STTD.KAP-04/PM.22/2018	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" "Present fairly, in all material respects"	6.600.000
2019	Bambang Karunawan, SE, Ak, CPA (STTD.AP-413/PM.22/2018)	Hertanto, Grace, Karunawan No. Izin: STTD.KAP-00006/PM.22/2017 Hertanto, Grace, Karunawan License Number: STTD.KAP-00006/PM.22/2017	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" "Present fairly, in all material respects"	458.850

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Gambaran Umum & Pelaksanaan sistem Manajemen Risiko di Jamkrindo

Penerapan Manajemen Risiko adalah langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas Direksi dalam memastikan pengambilan keputusan yang efektif dan kinerja perusahaan yang optimal. Dalam praktiknya, Manajemen Risiko terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan melalui Kebijakan dan Prosedur yang dirancang berdasarkan konteks dan kapasitas organisasi. Pendekatan ini mengacu pada standar ISO 31000:2018 untuk memastikan relevansi dan keberlanjutannya terhadap kebutuhan Perusahaan.

Operational Risk Management

Untuk mengurangi potensi kerugian akibat aktivitas operasional, Jamkrindo telah mengintegrasikan risiko tersebut ke dalam kerangka Manajemen Risiko Perusahaan. Berdasarkan kebijakan yang diatur oleh Direksi Jamkrindo, risiko operasional mencakup segala hal yang timbul dari kelemahan atau kegagalan dalam proses internal, kesalahan manusia, malfungsi sistem, serta pengaruh faktor eksternal terhadap kegiatan operasional.

Faktor-faktor yang dapat memicu risiko operasional di antaranya meliputi kegagalan sistem/downtime & teknologi, kesalahan manusia (*human error*), peralatan (*mechanical and technical*), pihak *external*, *fraud*, kegagalan proses internal, organisasi & SDM, *Counterpart*, HSE (*Health, Safety and Environment*), dan Teknologi Informasi.

Untuk menerapkan Manajemen Risiko Operasional, Jamkrindo telah melaksanakan pengisian *Risk and Control Self Assessment* (RC SA). Proses RC SA ini dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*, di mana identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh Kepala Bagian/Manajer di Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan KUP. Penetapan level pelaksana identifikasi dan penilaian risiko didasarkan pada pertimbangan bahwa level tersebut merupakan pejabat terendah di unit kerjanya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan teknis dan kaitannya dengan pencapaian tujuan Perusahaan.

Blue-Print Manajemen Risiko Jamkrindo

Jamkrindo telah merancang Blue-Print Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai pedoman utama untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara menyeluruh. *Blue-Print* ini berfungsi sebagai cetak biru pengembangan *Enterprise Risk Management* (ERM). Secara garis besar, *Blue-Print* ERM Jamkrindo terdiri dari empat komponen utama, yaitu: infrastruktur, kapabilitas, integrasi, dan budaya. Masing-masing komponen tersebut mencakup berbagai elemen penting sebagai bagian integralnya. Gambaran lengkap dari model Blue-Print ERM Jamkrindo dapat dilihat dalam ilustrasi di bawah ini.

Overview & Implementation of the Risk Management System at Jamkrindo

The implementation of Risk Management is a strategic measure to enhance the accountability of the Board of Directors in ensuring effective decision-making and optimal Company performance. In practice, Risk Management is integrated with the Company's management system through Policies and Procedures that are designed based on the organization's context and capacity. This approach refers to based on the ISO 31000:2018 standard to ensure its relevance and sustainability in meeting the Company's needs.

Operational Risk Management

To mitigate potential losses arising from operational activities, Jamkrindo has integrated these risks into the Company's Risk Management Framework. Based on the policy established by Jamkrindo's Board of Directors, operational risk encompasses all issues resulting from weaknesses or failures in internal processes, human errors, system malfunctions, as well as the impact of external factors on operational activities.

Factors that may trigger operational risks include system failures or downtime & technology issues, human error, equipment (mechanical and technical), external parties, fraud, internal process failures, organization & human capital issues, counterparties, Health, Safety and Environment (HSE), and Information Technology concerns.

To implement Operational Risk Management, Jamkrindo has conducted the Risk and Control Self-Assessment (RC SA). This process uses a bottom-up approach, where risk identification and assessment are carried out by Section Heads/Managers at the Head Office Work Units, Regional Offices, Branch Offices, and Service Unit Office (KUP). This level is chosen for implementarion because these individuals represents the lowest-ranking official in their respective work unit with a thorough understanding of technical issues and their relevance to the achievement of the Company's objectives.

Jamkrindo's Risk Management Blue-Print

Jamkrindo has developed an Integrated Risk Management Blueprint as the primary guideline for implementing a comprehensive risk management. This Blueprint serves as a roadmap for the development of Enterprise Risk Management (ERM). In general, Jamkrindo's ERM Blueprint comprises of four main components: infrastructure, capability, integration, and culture. Each of these components includes various essential elements as its integral parts. A comprehensive overview of the Jamkrindo ERM Blue-Print model is illustrated in the figure below.

Model Blue-Print Manajemen Risiko Terintegrasi Jamkrindo Jamkrindo's Integrated Risk Management Blue-Print Model

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

ROADMAP MILESTONE PENERAPAN ERM

ROADMAP MILESTONE PENERAPAN ERM

FRAMEWORK AND PROCESS STANDARDIZATION

ERM FRAMEWORK

1. Meningkatkan Efektivitas Risk Governance Structure:
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Manajemen Risiko
2. Risk Culture & Awareness:
 - Program peningkatan keahlian risiko, Sertifikasi MR sesuai regulasi (2025)
 - Internalisasi, evakuasi dan improve Program Budaya Risiko (2024)
 - Coaching Clinic dan challenge session penerapan MR
3. Develop Risk Appetite: (2025)
 - Dev. Juklak Risk Appetite
 - Dev. Risk Appetite Statement
 - Review Risk Criterias
4. Develop Risk Maturitas Index Assesmen
 - Penilaian RMI mencakup aspek Dimensi dan Kinerja (2024)
 - Tindak lanjut perbaikan atas hasil penilaian RMI (2024)

ERM PROCESS

1. Enhance Risk Context Report (Risk Taxonomy 2024, ESG Risk 2025)
2. Enhance Juklak Risiko Utama (2025)
3. Enhance Penyusunan Risiko Utama (2025)
4. Review Risk Criteria Report (Risk Taxonomy 2024, ESG Risk 2025)
5. Review Risk Assessment Metode (2025)
6. Enhance Risk Prioritization Metode (2025)
7. Enhance Risk Profile Report (Risk Taxonomy 2024, ESG Risk 2025)
8. Initiation KRI (Corp. wide & Risk Owner)
9. Enhance Juklak Stress testing (2024)
10. Enhance Simulation for Business Continuity Management System (2024)
11. Enhance Panduan Dashboard MR (2024)

ERM FRAMEWORK

1. Improving the Effectiveness of Risk Governance Structure:
 - Risk Monitoring Committee
 - Risk Management Committee
2. Risk Culture & Awareness:
 - Risk expertise enhancement program, MR certification as per regulation (2025)
 - Internalization, evacuation and improvement of Risk Culture Program (2024)
 - Coaching Clinic and challenge session for MR implementation
3. Develop Risk Appetite: (2025)
 - Dev. Risk Appetite Guidelines
 - Dev. Risk Appetite Statement
 - Review Risk Criterias
4. Develop Risk Maturity Index Assessment
 - RMI assessment covers Dimension and Performance aspects (2024)
 - Follow-up improvement on RMI assessment results (2024)

ERM PROCESS

1. Enhance Risk Context Report (Risk Taxonomy 2024, ESG Risk 2025)
2. Enhance Key Risk Guidelines (2025)
3. Enhance the Compilation of Key Risks (2025)
4. Review Risk Criteria Report (2024 Risk Taxonomy, 2025 ESG Risk)
5. Review Risk Assessment Methods (2025)
6. Refine the Risk Prioritization Method (2025)
7. Refine the Risk Profile Report (Risk Taxonomy 2024, ESG Risk 2025)
8. Initiate KRI (Company wide & Risk Owner)
9. Refine Stress testing guidelines (2024)
10. Refine Simulation for Business Continuity Management System (2024)
11. Refining the MR Dashboard Guidelines (2024)

ENHANCE ERM CAPABILITIES

ERM FRAMEWORK

1. Kebijakan, pedoman dan prosedur konsisten diterapkan dan di reviu berkala.
2. Penerapan structure governance secara konsisten mengacu pada three lines model.
3. Mengembangkan strategi, rencana bisnis dan kinerja manajemen yang selaras risk appetite perusahaan.
4. Implementasi program budaya risiko yang sistematis, menyeluruh dan konsisten.
5. Implementasi risk appetite berbasis trade off antara risk and return.
6. Mengembangkan Dashboard MR.
7. Cont's improvement terhadap elemen MR berbasis evaluasi dan rekomendasi dari penilaian risk maturity.

ERM PROCESS

1. Penerapan Risiko Utama telah terintegrasi dengan risiko satuan kerja.
2. Penerapan proses MR yang terintegrasi dengan berbasis TI.
3. Keputusan bisnis yang strategis dan signifikan berbasis Manajemen Risiko.
4. Penerapan KRI secara corp. wide maupun risk owner.
5. Penerapan Back Testing terhadap akurasi model.

ERM FRAMEWORK

1. Policies, guidelines and procedures are consistently applied and reviewed regularly.
2. Implementation of governance structure consistently refers to the three lines model.
3. Developing strategies, business plans and performance management that are aligned with the company's risk appetite.
4. Implementation of a systematic risk culture program, thorough and consistent.
5. Implementation of risk appetite based on trade off between risk and return.
6. Develop MR Dashboard.
7. Cont's improvement on MR elements based on evaluation and recommendations from risk maturity assessment.

ERM PROCESS

1. Implementation of Principal Risks has been integrated with of the work unit.
2. Implementation of MR processes that are integrated with IT-based.
3. Strategic and significant business decisions based on Risk Management.
4. Implementation of KRI corp. wide and risk owner.
5. Implementation of Back Testing on model accuracy

2024-2025

2026

ERM INTEGRATION WITH STRATEGY

ERM FRAMEWORK

1. Mengintegrasikan MR pada tata Kelola, strategi, kinerja manajemen dan internal control.
2. Mengembangkan strategi dan bisnis yang selaras dengan target profil risikonya.
3. Implementasi risk appetite pada level risk owner.
4. Cont's improvement elemen MR berbasis evaluasi dan rekomendasi dari penilaian risk maturity.
5. Sistem pelaporan risiko yang terintegrasi.

ERM PROCESS

1. MR mengintegrasikan dengan strategi dan tujuan bisnis secara komprehensif.
2. MR memberikan simulasi dan rekomendasi terhadap dampak dari eksekusi strategi.
3. Penerapan MR yang fokus untuk mengurangi variabilitas kinerja.
4. Pertimbangan Opsi perlakuan risiko yang komprehensif.
5. Tersedia data dan laporan yang akurat untuk pengambilan Keputusan bagi risk owner.

ERM FRAMEWORK

1. Integrate MR into governance, strategy, performance management and internal control.
2. Develop strategies and businesses that are aligned with the target risk profile.
3. Implementation of risk appetite at the risk owner level.
4. Cont's improvement of MR elements based on evaluation and recommendations from risk maturity assessment.
5. Integrated risk reporting system.

ERM PROCESS

1. MR integrates with business strategy and objectives in a comprehensive manner.
2. MR provides simulations and recommendations on the impact of strategy execution.
3. MR implementation focuses on reducing performance variability.
4. Consideration of comprehensive risk treatment options.
5. Accurate data and reports are available for decision making for risk owners.

IMPROVING PERFORMANCE

ERM FRAMEWORK

1. MR terintegrasi ke dalam nilai-nilai profesionalitas, budaya perusahaan dan proses bisnis yang fokus pada inovasi & Cont's improvement.
2. Implementasi risk appetite terintegrasi dengan operasional dan bisnis.
3. Kapabilitas SDM yang selalu ditingkatkan.
4. Cont's improvement elemen MR berbasis penilaian risk maturity.
5. Early warning system secara real time.

ERM PROCESS

1. Penerapan ERM yang fokus untuk peningkatan kinerja.
2. Penerapan ERM dengan berbasis AI dan Analisa scenario "What if".
3. Kuantifikasi dan Analisa risiko terintegrasi dengan sistem pengambilan Keputusan.
4. Pengukuran risiko yang terintegrasi dengan KPI.

ERM FRAMEWORK

1. MR is integrated into professional values, corporate culture and business processes that focus on innovation & Cont's improvement.
2. Implementation of risk appetite integrated with operations and business.
3. Human resource capability that is always improved.
4. Cont's improvement of MR elements based on risk maturity assessment.
5. Early warning system in real time.

ERM PROCESS

1. ERM implementation that focuses on improving performance.
2. AI-based ERM implementation and "What if" scenario analysis.
3. Quantification and risk analysis integrated with decision-making system.
4. Risk measurement integrated with KPI.

ENTERPRISE RESILIENCE

ERM FRAMEWORK

1. MR terintegrasi ke dalam nilai-nilai profesionalitas & budaya perusahaan yang fokus pada inovasi & Cont's improvement.
2. Pemimpin sebagai role model, mempertahankan dan berkomitmen terhadap kapabilitas MR.
3. Cont's improvement elemen MR berbasis penilaian risk maturity.

ERM PROCESS

1. Proses MR sepenuhnya terintegrasi ke dalam strategi dan kinerja, memanfaatkan big data dan AI oleh sistem aplikasi yang mengacu pada praktik terbaik.
2. Data dan pelaporan yang terstruktur dengan analisis data tingkat lanjut dan tervisualisasi yang akan membantu dalam memahami risiko.
3. Biaya pengendalian risiko yang semakin efisien dan memberikan manfaat optimal.

ERM FRAMEWORK

1. MR is integrated into professional values & corporate culture that focus on innovation & Cont's improvement.
2. Leaders as role models, maintain and commit to MR capabilities.
3. Cont's improvement of MR elements based on risk maturity assessment.

ERM PROCESS

1. MR processes are fully integrated into strategy and performance, utilizing big data and AI by application systems that refer to best practices.
2. Structured data and reporting with advanced and visualized data analysis that will assist in understanding risks.
3. Increasingly efficient risk control costs and delivering optimal benefits.

2027

2028

2029

Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dilakukan melalui dua jenis kegiatan, yaitu secara periodik dan insidental. Kegiatan periodik mencakup proses manajemen risiko yang terdiri atas empat tahapan utama: identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko, serta monitoring dan evaluasi risiko. Pada tahap awal, dilakukan Identifikasi dan Penilaian Risiko Inherent. Hasil dari proses identifikasi dan penilaian tersebut kemudian dievaluasi untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko.

Sementara itu, kegiatan insidental dilaksanakan pada tahapan tertentu sesuai dengan ketentuan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko. Selain itu, kegiatan ini mencakup pemberian opini terhadap isu-isu yang membutuhkan pendapat dari Divisi Manajemen Risiko. Opini tersebut diberikan untuk hal-hal strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan, seperti pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/software baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Pemberian opini insidental dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 126/SE/5/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang SOP Pendapat (Opini) Manajemen Risiko. Opini ini diberikan untuk mendukung berbagai hal strategis yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan, seperti pengembangan produk atau aktivitas baru, pelaksanaan transaksi dengan nilai tertentu, penetapan kebijakan penghapusan piutang, penyusunan SOP, RJPP, dan RKAP, implementasi aplikasi atau perangkat lunak baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, serta kebijakan strategis lainnya.

Kelengkapan Manajemen Risiko

Dalam rangka menjalankan manajemen risiko secara menyeluruh, diperlukan berbagai perangkat pendukung yang mampu memastikan pelaksanaannya berjalan efektif. Sebagai langkah konkret, Jamkrindo telah menyiapkan sejumlah elemen pendukung, di antaranya:

1. Ketetapan Direksi Pedoman Strategis Manajemen Risiko, dengan nomor 02/KD/4/IX/2023 tanggal 20 September 2023, merupakan peraturan yang memberikan sarana untuk melakukan peninjauan ulang terhadap proses penerapan manajemen risiko yang telah dilaksanakan sebelumnya, memberikan panduan pengelolaan risiko yang lebih efektif dengan adanya pengukuran risiko secara menyeluruh, meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan, dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan.
2. Organisasi Manajemen Risiko Jamkrindo secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat Divisi Manajemen Risiko. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat *ad hoc*, yaitu Komite Manajemen Risiko Jamkrindo. Komite Manajemen Risiko (KMR) adalah komite yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang berkaitan

Risk Management Implementation

Risk Management is carried out through two types of activities: periodic and incidental. Periodic activities include the risk management process, which consists of four main stages: risk identification, risk assessment, risk treatment, as well as risk monitoring and evaluation. At the initial stage, Inherent Risk Identification and Assessment is conducted. The results of the identification and assessment process are then evaluated to enhance the quality of risk management.

On the other hand, incidental activities are conducted at specific stages, following the provisions outlined in the risk-based business process SOP. These activities also include providing opinions on matters that require input from the Risk Management Division. Such opinions are essential for strategic matters that significantly affect the Company's sustainability, such as the development of new products or activities, transactions involving specific value thresholds, policies on the write-off of company receivables, the development of SOPs, RJP, Annual Work and Budget Plans (RKAP), the implementation of new applications or software, the selection of new banks for deposit placements and investments, and other policies of a strategic nature.

The issuance of incidental opinions is governed by the Circular Letter of the Board of Directors No. 126/SE/5/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning the SOP for Risk Management Opinions. These opinions are intended to support various strategic processes that play a significant role in ensuring the Company's sustainability, such as the development of new products or activities, the execution of transactions with certain values, the establishment of bad debt write-off policies, the preparation of SOPs, RJPP and the Corporate Budget Work Plan (RKAP), the implementation of new applications or software, the selection of new banks for deposit placement and investments, as well as other strategic policies.

Completeness of Risk Management

In carrying out effective comprehensive risk management, various supporting tools are required. As a concrete measure, Jamkrindo has prepared several supporting elements, as listed below:

1. The Decree of the Board of Directors concerning the Strategic Risk Management Guidelines, number 02/KD/4/IX/2023 dated September 20, 2023, is a regulation that facilitates a review of the previously implemented risk management processes. It provides guidance for more effective risk management through comprehensive risk measurement, increasing business capacity and capital, and the realization of a stable financial system that grows in sustainable manner.
2. Jamkrindo's Risk Management Organization is structurally established by the Board of Directors, which has defined an organizational structure that includes a dedicated Risk Management Division. In addition to the structural organization, there is also an *ad hoc* body known as the Jamkrindo Risk Management Committee. The Risk Management Committee (KMR) consisting of the Board of Directors and the relevant Division Heads, plays a

dengan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan. Komite Manajemen Risiko berperan untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi risiko usaha, jenis, dan dampaknya terhadap kegiatan Perusahaan, menetapkan risk appetite dan *risk tolerance* Perusahaan, dan memberikan laporan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

3. Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) atau yang disebut sebagai Koordinator *Risk Owner*, yang bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, *Risk Officer* berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Divisi Manajemen Risiko.
4. Prosedur Pengelolaan Risiko sebagaimana Surat Edaran No. 24/SE/4/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Prosedur Pengelolaan Risiko. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai panduan teknis penerapan Manajemen Risiko di Jamkrindo. Panduan teknis penerapan Manajemen Risiko tersebut secara garis besar adalah:
 - a. Penetapan Konteks dan Kriteria;
 - b. Identifikasi Risiko;
 - c. Analisis Risiko;
 - d. Evaluasi Risiko;
 - e. Penanganan Risiko;
 - f. Monitoring Risiko;
 - g. Komunikasi dan Konsultasi Risiko;
 - h. Pencatatan dan Pelaporan Risiko;
 - i. Toleransi Risiko.
5. SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait di dalam proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam *risk register* dan pengendalian risiko yang diperlukan telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis, sementara untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari Divisi Manajemen Risiko sebagai *second opinion* dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap oleh setiap pemilik proses bisnis.
6. Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi telah ada sejak tahun 2011, perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk data base yang terstruktur.

Jenis dan Pengelolaan Risiko Selama Tahun 2024

Di tahun 2024, Jamkrindo berfokus pada pengawasan terhadap risiko utama yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan, dengan mempertimbangkan risiko-risiko berikut:

1. Risiko Strategis
 - a. Potensi penurunan kinerja dan kesehatan keuangan Perusahaan. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:

role in conducting periodic assessments and providing recommendations regarding business risks, their types, and impacts on the Company's operations. The Committee also determines the Company's risk appetite and risk tolerance and submits reports on the implementation of the Risk Management to the Board of Commissioners.

3. To ensure the successful implementation of risk management process, each work unit appoints a Person in Charge (PIC), also referred to as a Risk Owner Coordinator. This individual is responsible for coordinating the risk management process within their respective unit. In carrying out their duties, the Risk Officer coordinates and consults with the Risk Management Division.
4. Risk Management Procedures are regulated under Circular Letter No. 24/SE/4/X/2023 dated October 9, 2023, concerning Risk Management Procedures. The Technical Guidelines outlined in this document explain the implementation of Risk Management at Jamkrindo and include the following stages:
 - a. Determination of Context and Criteria;
 - b. Risk Identification;
 - c. Risk Analysis;
 - d. Risk Evaluation;
 - e. Risk Management;
 - f. Risk Monitoring;
 - g. Risk Communication and Consultation;
 - h. Risk Recording and Reporting;
 - i. Risk Tolerance.
5. The SOP for Risk-Based Business Processes outlines business that take into account the risks involved. This SOP ensures that the risks listed in the risk register and their corresponding risk controls considered during the execution of business processes. Additionally, any newly emerging risks must receive input from the Risk Management Division, which serves as a second opinion in decision-making. Considering the diversity of activities withing Jamkrindo, the risk-based business process SOP is prepared in stages by each business process owner.
6. Since 2011, the company has developed an Integrated Risk Management Support System in the form of a Risk Management Information System Application. This facilitates the identification, risk assessment, and follow-up of risk management activities. It also enables the storage of risk data in a structured database.

Types and Risk Management in 2024

In 2024, Jamkrindo focused on monitoring key risks that have the potential to affect the achievement of objectives, whilst taking into account the following risks:

1. Strategic Risk
 - a. Potential decline in the Company's performance and financial health. Some mitigations that can be done include:

- 1) Melakukan pemantauan realisasi volume penjaminan atas masing-masing produk, Penerima Jaminan, dan Unit Kerja terhadap target yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan pemantauan *market share* atas masing-masing produk, Penerima Jaminan, dan Unit Kerja terhadap target yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan pemantauan proses penetapan peraturan pelaksanaan UU No.4/2023 dalam penetapan kriteria Piutang Macet UMKM yang dapat dihapustagihkan secara jelas dan dapat mengakomodir kepentingan PT Jamkrindo.
- 4) PT Jamkrindo menyampaikan usulan kepada regulator terkait penyesuaian *term and condition* (t/c) atas produk Penjaminan Kredit Program
- b. Potensi *Gearing Ratio* Produktif melebihi ketentuan regulator. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1) Optimalisasi pencapaian laba perusahaan.
 - 2) Optimalisasi laba ditahan untuk penguatan modal/ ekuitas.
 - 3) Optimalisasi kinerja Anak Perusahaan.
2. Risiko Likuiditas
 - a. Potensi terganggunya likuiditas Perusahaan akibat tidak tercapainya pendapatan subrogasi perusahaan. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1) Optimalisasi pencapaian laba perusahaan.
 - 2) Optimalisasi laba ditahan untuk penguatan modal/ ekuitas.
 - 3) Optimalisasi kinerja Anak Perusahaan.
3. Risiko Pasar
 - a. Potensi tidak optimalnya pengelolaan dana oleh Manajer Investasi Perusahaan. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1) Melakukan manajemen *portfolio* yang *prudent* dan memastikan bahwa pembelian setiap instrument investasi dapat memenuhi capaian target investasi yang sudah ditetapkan.
 - 2) Menetapkan strategi *exit policy* yang konkrit dan dapat diterapkan guna mengurangi eksposur risiko yang mungkin terjadi.
4. Risiko Operasional
 - a. Potensi terganggunya operasional Perusahaan. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1) Melakukan evaluasi keamanan *cyber*.
 - 2) Penggunaan *firewall* dan antivirus pada perangkat lunak yang dimiliki oleh Perusahaan.
 - 3) Melakukan monitoring atas *network traffic* secara berkala.
 - 4) Membangun *Disaster Recovery Plan* (Plan) yang memadai dan mampu diterapkan saat insiden terjadi.
 - 5) Membangun budaya sadar risiko keamanan TI bagi seluruh karyawan.
5. Risiko Penjaminan
 - a. Potensi peningkatan rasio klaim. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi dan penyempurnaan TC PKS saat ini untuk produk yang kurang *profitable* dan pembaharuan kerjasama KUR terkait dampak Covid-19.
- 1) Monitoring the realization of guarantee volume for each product, Guarantee Recipient, and Work Unit against the predetermined target.
- 2) Monitoring the market share of each product, beneficiary, and work unit against set targets.
- 3) Monitoring the process of determining the implementing regulations of Law No.4/2023 in determining the criteria for MSME Bad Debts/ uncollectible receivables that can be written off clearly and can accommodate the interests of PT Jamkrindo.
- 4) PT Jamkrindo submitted a proposal to the regulator regarding the adjustment of the terms and conditions (t/c) of the Credit Guarantee Program product.
- b. Potential Productive Gearing Ratio exceeds regulatory requirements. Some mitigations that can be done include:
 - 1) Optimization of the Company's profit achievement.
 - 2) Optimization of retained earnings to strengthen capital/equity.
 - 3) Optimization of Subsidiary's performance.
2. Liquidity Risk
 - a. Potential disruption of the Company's liquidity due to non-achievement of subrogation income. Some mitigations that can be done include:
 - 1) Optimization of the Company's profit achievement.
 - 2) Optimization of retained earnings to strengthen capital/equity.
 - 3) Optimization of Subsidiary's performance.
3. Market Risk
 - a. Potential for non-optimal fund management by the Company's Investment Manager. Some mitigations that can be done include:
 - 1) Conduct prudent portfolio management and ensure that the purchase of each investment instrument can meet the achievement of predetermined investment targets.
 - 2) Establish a concrete and capable of being implemented exit policy strategy to reduce the risk exposure that may occur.
4. Operational Risk
 - a. Potential disruption of the Company's operations. Some mitigations that can be done include:
 - 1) Conduct cyber security evaluation.
 - 2) Use of firewalls and antivirus on software owned by the Company.
 - 3) Monitor network traffic on a regular basis.
 - 4) Build a Disaster Recovery Plan that is adequate and capable of being implemented when an incident occurs.
 - 5) Build a culture of IT security risk awareness for all employees.
5. Guarantee Risk
 - a. Potential increase in claims ratio. Mitigation that can be done is to evaluate and improve the current TC PKS for less profitable products and renewal of KUR cooperation related to the impact of Covid-19.

- b. Potensi meningkatnya piutang klaim reasuransi. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1) Optimalisasi retensi sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - 2) Melakukan rekonsiliasi dan penagihan piutang klaim secara berkala.
 6. Risiko Kredit
 - a. Potensi Penurunan rating *counterparty*. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1) Melakukan monitoring portofolio investasi secara berkala.
 - 2) Agar menetapkan strategi *exit policy* yang konkrit dan dapat diterapkan guna mengurangi eksposur risiko yang mungkin terjadi.
 - 3) Agar melakukan manajemen portofolio yang *prudent* dan memastikan bahwa pembelian setiap *instrument* investasi dapat memenuhi capaian target investasi yang sudah ditetapkan.
 7. Risiko Hukum
 - a. Potensi meningkatnya kasus hukum/gugatan pada tahun 2024. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1) Tinjauan secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara perusahaan dengan mitra.
 - 2) Unit Kerja rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi pada klausula-klausula yang terdapat pada seluruh Ketentuan Perusahaan maupun Perjanjian Kerjasama dengan pihak bank/mitra dan agar selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut.
 - 3) Divisi Kepatuhan melakukan sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan gratifikasi kepada seluruh unit Kerja dan seluruh Unit Kerja rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pemahaman mengenai SMAP dan gratifikasi.
 8. Risiko Kepatuhan
 - a. Potensi adanya keterlambatan penyelesaian Audit Tahun Buku 2023. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1) Melakukan rekonsiliasi data dari seluruh Unit Kerja kepada Kantor Pusat dan dilakukan secara tertib.
 - 2) Memilih tim *Counterpart* audit yang kompeten.
 - 3) Dukungan sistem TI dalam hal pemenuhan data.
 9. Risiko Reputasi
 - a. Potensi adanya keterlambatan penyelesaian Audit Tahun Buku 2023. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
 - 1) Melakukan rekonsiliasi data dari seluruh Unit Kerja kepada Kantor Pusat dan dilakukan secara tertib.
 - 2) Memilih tim *Counterpart* audit yang kompeten.
 - 3) Dukungan sistem TI dalam hal pemenuhan data.
 - b. Potential increase in reinsurance claims receivable. Some mitigations that can be done include:
 - 1) Optimization of own retention while still referring to the applicable provisions.
 - 2) Perform reconciliation and collection of claims receivables on a regular basis.
 6. Credit Risk
 - a. Potential counterparty rating downgrade. Some mitigations that can be done include:
 - 1) Conduct regular monitoring of the investment portfolio.
 - 2) To establish a concrete and capable of being implemented exit policy strategy to reduce the risk exposure that may occur.
 - 3) To conduct prudent portfolio management and ensure that the purchase of each investment instrument can meet the achievement of predetermined investment targets.
 7. Legal Risk
 - a. Potential increase in legal cases/lawsuits in 2024. Some mitigations that can be done include:
 - 1) Periodic review of contracts and agreements between the Company and its partners.
 - 2) The Work Unit routinely conducts socialization activities to all its staff to provide understanding and common perception on the clauses contained in all Company Provisions and Cooperation Agreements with banks/partners and to always be guided by these provisions.
 - 3) The Compliance Division conducts dissemination of the Anti-Bribery Management System (SMAP) and gratuities to all Work Units and all Work Units routinely conduct dissemination activities to all their staff to provide an understanding of SMAP and gratuities.
 8. Compliance Risk
 - a. Potential delays in the completion of the 2023 Fiscal Year Audit. Some mitigations that can be done include:
 - 1) Reconcile data from all Work Units to the Head Office and conduct it in an orderly manner.
 - 2) Select a competent Counterpart audit team.
 - 3) IT system support in terms of data fulfillment.
 9. Reputation Risk
 - a. Potential delays in the completion of the 2023 Fiscal Year Audit. Some mitigations that can be done include:
 - 1) Reconcile data from all Work Units to the Head Office and conduct it in an orderly manner.
 - 2) Select a competent Counterpart audit team.
 - 3) IT system support in terms of data fulfillment.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan melalui pengukuran Risk Maturity Index (RMI). RMI berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana sistem Manajemen Risiko dirancang dan diterapkan secara efektif guna melindungi serta meningkatkan nilai di BUMN. Proses penilaian ini merujuk pada Juknis Nomor SK-8/DKU. MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko di Lingkungan BUMN.

Tujuan utama dari penilaian RMI adalah mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan Manajemen Risiko sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan. Penilaian mencakup dua aspek utama, yaitu dimensi dan kinerja, yang masing-masing memberikan gambaran menyeluruh terhadap kematangan dan efektivitas sistem tersebut.

Aspek Dimensi dalam penilaian RMI terdiri dari:

1. Budaya dan Kapabilitas Risiko;
2. Organisasi dan Tata Kelola Risiko;
3. Kerangka Risiko dan Kepatuhan;
4. Proses dan Kontrol Risiko; dan
5. Model, Data, dan Teknologi Risiko.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Jamkrindo terus berupaya meningkatkan kualitas sistem manajemen risiko. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan rencana strategis perusahaan, termasuk melalui:

1. Melakukan addendum kebijakan risk appetite untuk menyesuaikan dengan kondisi bisnis terkini.
2. Melakukan *review* atas implementasi manajemen risiko
3. Melakukan *review* atas implementasi manajemen risiko pasar dan likuiditas.
4. Melakukan *review* kebijakan pengelolaan permodalan.

Untuk memperkuat kualitas penerapan manajemen risiko, perusahaan secara konsisten memaksimalkan kinerja Komite Audit guna memastikan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi berjalan efektif.

Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System

The effectiveness of the Risk Management system is evaluated through the Risk Maturity Index (RMI) assessment. The RMI functions as an evaluation tool to assess the extent to which the Risk Management system is effectively designed and implemented to protect and enhance value within State-Owned Enterprises (SOE). This assessment process is carried out in accordance with the Technical Guidelines Number SK-8/DKU. MBU/12/2023 concerning the Technical Guidelines for Risk Maturity Index Assessment within State-Owned Enterprises (SOE).

The primary objective of the RMI assessment is to identify weaknesses in the implementation of Risk Management and to formulate improvement measures. The assessment covers two main aspects: dimensional and performance, each providing a comprehensive overview of the maturity and effectiveness of the system.

The dimensional aspects in the RMI assessment consist of:

1. Risk Culture and Capability;
2. Organization and Risk Governance;
3. Risk and Compliance Framework
4. Risk Process and Control; and
5. Risk Models, Data and Technology.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee regarding the Adequacy of the Risk Management System

Jamkrindo continues to strive to improve the quality of its risk management system as a vital effort to support the implementation of the Company's strategic plans. This commitment is reflected through the following initiatives:

1. Conducting an addendum to Risk Appetite Policy to ensure alignment with current business conditions.
2. Reviewing the implementation of risk management.
3. Evaluating the management of market and liquidity risk.
4. Reviewing the Company's capital management policies.

To further strengthen the quality of Risk Management implementation, the Company consistently maximizes the roles and performance of the Audit Committee. This ensure the effective execution and oversight duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

PERKARA PENTING DAN PERMASALAHAN HUKUM

IMPORTANT CASES AND LEGAL ISSUES

Permasalahan Hukum

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang melibatkan Perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Permasalahan hukum Legal Issues	2024		2023		2022	
	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases
Jamkrindo						
Selesai dan Telah memiliki kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	6	Nihil None	7	Nihil None	2	Nihil None
Dalam proses penyelesaian In the settlement process	4	Nihil None	2	Nihil None	8	Nihil None
Jumlah Total	10	Nihil None	9	Nihil None	10	Nihil None
Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Commissioners and the Board of Directors						
Selesai dan Telah memiliki kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dalam proses penyelesaian In the settlement process	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jumlah Total	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Entitas Anak Subsidiary						
Selesai dan Telah memiliki kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	11	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dalam proses penyelesaian In the settlement process	5	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Jumlah Total	16	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Legal Issues

Throughout 2024 and 2023, the following legal issues and/or cases involved the Company, its subsidiaries, as well as members of the Board of Commissioners and Board of Directors:

Sanksi Administrasi

Di tahun 2024, Perusahaan tidak menerima sanksi administrasi dari regulator maupun pihak terkait lainnya. Perusahaan senantiasa melakukan langkah mitigasi yang tepat telah diambil untuk menghindari sanksi yang ada.

Administrative Sanctions

In 2024, the Company did not receive any administrative sanctions from regulators or other relevant parties. The Company has consistently taken appropriate mitigation measures to avoid potential sanctions.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Jamkrindo memanfaatkan beragam saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada berbagai pihak terkait, baik melalui media digital, cetak, maupun acara langsung. Dalam prosesnya, akses terhadap informasi perusahaan dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

Jamkrindo utilizes various communication channels to disseminate information to relevant stakeholders, including through digital media, print publications, and live events. In doing so, access to Company information is categorized into two (2) types, namely:

No.	Akses Informasi Information Access	Jenis Types
1	Komunikasi Internal Internal Communications	Surat Edaran Circular Letter Jamkrindo Menggunakan Surat Edaran Untuk Mengkomunikasikan Kebijakan Dan Peraturan Terbaru Di Dalam Internal Perusahaan. Informasi Yang Disebarkan Umumnya Berisi Tentang Sosialisasi Kebijakan Direksi. Jamkrindo Uses Circular Letters to Communicate The Latest Internal Policies and Regulations Within The Company. Information Distributed Generally Contain Dissemination of the Board of Directors' Policies.
		ICPR (Integrated Corporate Performance Reporting) Jamkrindo Juga Menggunakan Sarana Teknologi Informasi Yang Berbasis Web Yaitu ICPR Yang Telah Diterapkan di Lingkungan Jamkrindo. Web-Based Information Technology Facilities in the form of ICPR is utilized in the Jamkrindo Environment.
		E-mail Jamkrindo juga telah memiliki <i>e-mail system</i> sendiri untuk mengelola komunikasi internal perusahaan antar unit kerja. Company E-Mail System is operated to Manage The Company's Internal Communications between Work Units.
		Quarterly Evaluation and Action Plan. Untuk sarana komunikasi antara Direksi dengan Kepala Divisi dan Pimpinan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang dalam menyampaikan target dan rencana bisnis Perusahaan, Jamkrindo secara rutin tiga bulan atau triwulanan menyelenggarakan rapat evaluasi dan <i>action plan</i> . Dalam rapat evaluasi dan <i>action plan</i> ini, Direksi Jamkrindo melakukan evaluasi terhadap kinerja triwulanan berjalan dan membahas serta mengkomunikasikan rencana bisnis Jamkrindo untuk triwulan-an kedepan kepada para Kepala Divisi, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor Anak Cabang untuk meneruskan target dan rencana bisnis tahunan yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan. As a mean of communication between the Board of Directors, Division Heads, and Heads of Branch Offices or Sub-Branch Offices in conveying the Company's targets and business plans, Jamkrindo routinely holds three months or quarterly evaluation meetings and action plans. In this meeting, the Board of Directors of Jamkrindo reviews the Company's quarterly performance, outline business plan for the next quarterly with the Heads of Division, Heads of Branch Offices, and Heads of Subsidiary Offices to continue the targets and annual business plans that have been stipulated in the current year's Work Plan and Budget (RKAP).

No.	Akses Informasi Information Access	Jenis Types
2	Komunikasi Eksternal External Communications	Alamat Perusahaan Company Address
		Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat Telepon: +62216540335 Faksimili : +62 21 6540344/48 Jamkrindo Building Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Central Jakarta Telephone: +62216540335 Fax : +62 21 6540344 / 48
		Website
		Untuk memudahkan mitra kerja, masyarakat yang berkepentingan lainnya atau stakeholders dalam mendapatkan informasi Jamkrindo menyediakan akses dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang handal melalui website www.jamkrindo.com . For easy information access by work partners, vested communities, or stakeholders, Company's website – www.jamkrindo.com – serves as a reliable information support.
		Press Release
		Jamkrindo juga pada saat diperlukan melakukan publikasi dari setiap kegiatan perusahaan yang dilakukan melalui <i>press release</i> . When needed, Jamkrindo also publishes every Company activity through press releases
		Public Expose
		Sekali dalam setahun perusahaan wajib menyelenggarakan <i>public expose</i> atau paparan publik mengenai kinerja perusahaan. Once a year the Company is required to hold a public exposure regarding the Company's performance.
		Advertisement
		Iklan digunakan sebagai alat untuk mengelola citra dan meningkatkan <i>awareness</i> terhadap Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan menggunakan media untuk menyebarkan iklan di masyarakat, antara lain adalah surat kabar, majalah, dan media lainnya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target audiences agar iklan dapat berfungsi dengan efektif. Advertising serves as a tool to manage image and increase awareness of Jamkrindo and its products. This is achieved through advertisements via various media channels, such as newspapers, magazines and other platforms. Prior to dissemination, media and target audiences analyses are conducted to ensure advertising effectiveness.
		Exhibition
		Jamkrindo juga selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pameran untuk mengelola citra dan meningkatkan <i>awareness</i> terhadap Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target audiences agar iklan dapat berfungsi dengan efektif. Jamkrindo also always participates in every exhibition activity to manage its image and increase awareness of Jamkrindo and its products, by first analyzing the media and target audiences so that advertising can function effectively.

Korespondensi dan Laporan Berkala

Perusahaan telah menyusun dan melaporkan informasi keuangan serta non-keuangan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, dan lembaga terkait yang diwajibkan. Laporan informasi tersebut disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dengan penyajian yang lengkap, akurat, terkini, dan memadai. Penyampaian informasi dilakukan

Correspondence and Periodic Reports

The Company has prepared and reported both financial and non-financial information in a transparent manner to shareholders, stakeholders, and relevant mandated institutions. The information reports are delivered according to the predetermined schedule and are presented in a complete, accurate, up-to-date, and adequate manner. The

sesuai dengan prosedur, jenis, dan cakupan yang diatur dalam ketentuan mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk laporan yang mencakup:

1. Laporan Triwulan;
2. Penjelasan dan klarifikasi atas pemberitaan di media massa;
3. Keterbukaan informasi melalui *public expose*;
4. Laporan administrasi kepada Pemegang Saham;
5. Laporan Tahunan.

Berikut ini adalah korespondensi antara Perusahaan dan Kementerian BUMN yang terjadi sepanjang tahun 2024.

dissemination of information is conducted in accordance with the procedures, types, and scope stipulated in the provisions regarding Transparency of the Company's Financial Condition. The information is presented in the form of reports that include:

1. Quarterly Reports;
2. Explanation and clarification of news coverage in the mass media;
3. Disclosure of information through public expose;
4. Administrative reports to Shareholders;
5. Annual report.

The following is the correspondence between the Company and the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) throughout 2024.

Korespondensi dengan Kementerian BUMN

The Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	Frekuensi (kali) Frequency (times)	Perihal Regarding
Letters	1x setahun Once a year	Laporan Asesmen dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Assessment and Evaluation Report on the Implementation of Good Corporate Governance
Aplikasi Dashboard Control Tower PDN BUMN Dashboard Control Tower Application for the SOE National Data Center (PDN BUMN)	Setiap bulan Every month	Laporan Bulanan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Monthly Report on the Realization of Domestic Product Expenditure
Letters	1x setahun Once a year	Laporan Tahunan Dipublikasi (Annual Report) Publication of the Annual Report
Letters	1x setahun Once a year	Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit Audited Annual Financial Statements
Letters	1x setahun Once a year	Laporan Pelaksanaan Pengumuman Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perusahaan pada surat kabar Report on the Publication of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement in Newspapers
Letters	Setiap bulan Every month	Laporan Pengelolaan Investasi Investment Management Report
Letters	Triwulan Quarterly	Pelaporan Penggunaan Tambahan PMN Report on the Utilization of Additional State Capital Injection (PMN)

Situs Web

Situs web memainkan peran penting dalam mendukung tata kelola keterbukaan informasi. Dengan adanya pengungkapan dan ketersediaan informasi melalui situs web Perusahaan, manfaat bagi publik dan pemangku kepentingan dapat terwujud. Hal ini memungkinkan penyampaian informasi secara cepat, tepat, dan murah tanpa batasan. Perusahaan telah memiliki situs web resmi yang dapat diakses melalui alamat www.jamkrindo.co.id. Situs web ini menyajikan konten yang lengkap dan informatif mengenai Perusahaan, yang berguna bagi publik dan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi.

Hubungan Media

Agar informasi dapat disampaikan secara komprehensif, perusahaan menjalin hubungan dengan media melalui pengiriman Rilis Media kepada berbagai media, baik nasional maupun lokal. Berikut ini adalah Rilis Media yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024.

Website

The website plays an important role in supporting good governance through information transparency. By disclosing and providing access to information through the Company's website, benefits for the public and stakeholders can be realized. This allows for the rapid, accurate, and cost-effectively delivery of information without limitations. The Company's official website can be accessed at www.jamkrindo.co.id. This website provides comprehensive and informative content about the Company, serving as a valuable resource for the public and stakeholders to access relevant information.

Media Relations

To ensure information is conveyed in a comprehensively, the Company maintains relationships with the media by distributing media releases to various national and local media outlets. The following are the Media Releases issued throughout 2024.

Rilis Jamkrindo Tahun 2024

Jamkrindo Press Releases in 2024

No.	Foto Peristiwa Photo of Event	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title
1		27 Desember 2024 December 27, 2024	Jamkrindo Rilis Program Pemberdayaan untuk Warga Binaan di Lapas Tangerang Jamkrindo Launches Empowerment Program for Inmates at Tangerang Prison
2		27 Desember 2024 December 27, 2024	Jamkrindo Beri Bantuan Beasiswa untuk Putra Putri TNI dan Polri Jamkrindo Provides Scholarships for Children of TNI and Police Personnel
3		22 Oktober 2024 October 22, 2024	Jamkrindo Selenggarakan Workshop Literasi Keuangan Digital di 10 Kota Jamkrindo Holds Digital Financial Literacy Workshop in 10 Cities
4		16 Oktober 2024 October 16, 2024	Jamkrindo Selenggarakan Workshop Literasi Keuangan Digital di 10 Kota Jamkrindo Holds Digital Financial Literacy Workshop in 10 Cities

Rilis Jamkrindo Tahun 2024

Jamkrindo Press Releases in 2024

No.	Foto Peristiwa Photo of Event	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title
5		8 Oktober 2024 October 8, 2024	Jamkrindo Dorong Industri Kreatif Tanah Air Jamkrindo Encourages the Growth of the National Creative Industry
6		31 Agustus 2024 August 31, 2024	Jamkrindo Sebarkan Semangat Nasionalisme di Kolong Jalan Tol Rawamangun Jamkrindo Spreads the Spirit of Nationalism Under the Rawamangun Toll Road
7		27 Agustus 2024 August 27, 2024	Dukung Peta Jalan Industri Penjaminan, Jamkrindo Tanda Tangan MoU dengan Seluruh Jamkrida Supporting the Roadmap for the Guarantee Industry, Jamkrindo Signs MoU with All Regional Guarantee Companies (Jamkrida)
8		23 Agustus 2024 August 23, 2024	Jamkrindo Jamin 3,89 Juta UMKM Jamkrindo Guarantees 3.89 Million MSMEs

Rilis Jamkrindo Tahun 2024

Jamkrindo Press Releases in 2024

No.	Foto Peristiwa Photo of Event	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title
9		23 Juli 2024 July 23, 2024	Hari Anak Nasional, Jamkrindo Gelar Edukasi Kesehatan Mental National Children's Day, Jamkrindo Held Mental Health Education Program
10		11 Juli 2024 July 11, 2024	Jamkrindo Teken Nota Kesepahaman Jasa Surety Bond dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang Jamkrindo Signs Memorandum of Understanding for Surety Bond Services with the Government of Pinrang Regency
11		10 Juli 2024 July 10, 2024	Jamkrindo Berbagi Pengalaman Penjaminan kepada Asosiasi Keuangan Malaysia Jamkrindo Shares Guarantee Experience with Malaysian Finance Association
12		5 Juli 2024 July 5, 2024	Jamkrindo Berbagi Pengalaman dengan Perusahaan Penjaminan Kamboja Jamkrindo Shares Experience with Cambodian Guarantee Company

Rilis Jamkrindo Tahun 2024
Jamkrindo Press Releases in 2024

No.	Foto Peristiwa Photo of Event	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title
13		1 Juli 2024 July 1, 2024	HUT ke-54, Jamkrindo Berkomitmen Tingkatkan Kontribusi kepada Negara On Its 54th Anniversary, Jamkrindo Commits to Increasing Its Contribution to the Nation
14		27 Juni 2024 June 27, 2024	Jamkrindo Dorong Digitalisasi dan Transformasi Bisnis UMKM di Sumbawa Jamkrindo Promotes Digitalization and Business Transformation of MSMEs in Sumbawa
15		22 Juni 2024 June 22, 2024	Jamkrindo Dorong Peningkatan Kualitas Pelajar Indramayu Jamkrindo Promotes Quality Improvement of Students in Indramayu
16		20 Juni 2024 June 20, 2024	Perkuat Pelayanan, Jamkrindo Resmikan Tiga Gedung Kantor Baru To Strengthen Services, Jamkrindo Inaugurates Three New Office Buildings

Rilis Jamkrindo Tahun 2024

Jamkrindo Press Releases in 2024

No.	Foto Peristiwa Photo of Event	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title
17		31 Mei 2024 May 31, 2024	Sambut Perayaan HUT, Jamkrindo Lakukan Berbagai Kegiatan Sosial In Celebration of Its Anniversary, Jamkrindo Conducts Various Social Activities
18		23 Mei 2024 May 23, 2024	Jamkrindo Lanjutkan Edukasi Anti Perundungan dan Kekerasan Seksual Kepada Ribuan Pelajar SD Jamkrindo Continues Anti-Bullying and Sexual Violence Education for Thousands of Elementary School Students
19		16 Mei 2024 May 16, 2024	Jamkrindo Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Bencana Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat Jamkrindo Distributes Emergency Relief Aid for Cold Lava Flood Disaster in West Sumatra
20		16 Mei 2024 May 16, 2024	Jamkrindo Teken Nota Kesepahaman Kolaborasi BUMN dengan Perum LKBN Antara Jamkrindo Signs Memorandum of Understanding on SOE Collaboration with Perum LKBN Antara

Rilis Jamkrindo Tahun 2024

Jamkrindo Press Releases in 2024

No.	Foto Peristiwa Photo of Event	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title
21		2 Mei 2024 May 2, 2024	Jamkrindo Kerja Sama Penjaminan Bank Garansi dengan Bank SulutGo Jamkrindo Partners with Bank SulutGo on Bank Guarantees
22		23 April 2024 April 23, 2024	Transformasi Berkelanjutan Dorong Kinerja Positif Jamkrindo Sustainable Transformation Drives Positive Performance at Jamkrindo
23		3 April 2024 April 3, 2024	Jamkrindo Kolaborasi Program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 Jamkrindo Collaborates for the "Mudik Asyik" Program with SOEs in 2024
24		4 April 2024 April 4, 2024	Gelar Safari Ramadan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Purwakarta Jamkrindo Held Ramadan Safari and Conducts Social Activities in Purwakarta

Rilis Jamkrindo Tahun 2024

Jamkrindo Press Releases in 2024

No.	Foto Peristiwa Photo of Event	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title
25		21 Maret 2024 March 21, 2024	Jamkrindo Teken Kerja Sama Penjaminan KUR dengan Bank Nobu Jamkrindo Signs Cooperation Agreement for KUR Guarantee with Bank Nobu
26		22 Maret 2024 March 22, 2024	Gelar Safari Ramadhan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Solo Jamkrindo Held Ramadan Safari and Conducts Social Activities in Solo
27		21 Maret 2024 March 21, 2024	Gelar Safari Ramadhan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Tangerang Jamkrindo Held Ramadan Safari and Conducts Social Activities in Tangerang
28		19 Maret 2024 March 19, 2024	Gelar Safari Ramadhan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Ternate Jamkrindo Held Ramadan Safari and Conducts Social Activities in Ternate

Rilis Jamkrindo Tahun 2024
Jamkrindo Press Releases in 2024

No.	Foto Peristiwa Photo of Event	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title
29		19 Maret 2024 March 19, 2024	Gelar Safari Ramadhan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Pekanbaru Jamkrindo Held Ramadan Safari and Conducted Social Activities in Pekanbaru
30		18 Maret 2024 March 18, 2024	Gelar Safari Ramadhan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Pekanbaru Jamkrindo Held Ramadan Safari and Conducted Social Activities in Pekanbaru
31		7 Maret 2024 March 7, 2024	Cegah Perundungan di Sekolah, Jamkrindo Raih Penghargaan di Ajang BCOMSS Jamkrindo Receives Award at BCOMSS for Preventing Bullying in Schools
32		28 Februari 2024 February 28, 2024	Presiden Joko Widodo Kunjungi Booth Jamkrindo di Pameran INACRAFT President Joko Widodo Visits Jamkrindo Booth at INACRAFT Exhibition

Rilis Jamkrindo Tahun 2024

Jamkrindo Press Releases in 2024

No.	Foto Peristiwa Photo of Event	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title
33		22 Februari 2024 February 22, 2024	Dorong UMKM Naik Kelas, Jamkrindo Gelar Workshop Literasi Keuangan Bagi UMKM To Elevate MSMEs, Jamkrindo Holds Financial Literacy Workshop for MSMEs
34		21 Februari 2024 February 21, 2024	Jamkrindo Dorong Keterlibatan Karyawan Dalam Penerapan Prinsip ESG Jamkrindo Encourages Employee Involvement in Implementing ESG Principles
35		31 Januari 2024 January 31, 2024	Digitalisasi Proses Penjaminan, Jamkrindo Meluncurkan Aplikasi J@De Jamkrindo Launches J@De Application to Digitalize Guarantee Processes
36		27 Januari 2024 January 27, 2024	Jamkrindo Teken Kerja Sama Penjaminan KUR dengan BCA Jamkrindo Signs Cooperation Agreement for KUR Guarantee with BCA

Rilis Jamkrindo Tahun 2024
Jamkrindo Press Releases in 2024

No.	Foto Peristiwa Photo of Event	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Title
37		22 Januari 2024 January 22, 2024	Prospek Stabil, Jamkrindo Kembali Raih Peringkat idAA+ dari Pefindo Stable Prospects, Jamkrindo Obtains idAA+ Rating from Pefindo
38		8 Januari 2024 January 8, 2024	Perkuat Pelayanan, Jamkrindo Resmikan Gedung Kantor Baru di Cirebon To Strengthen Services, Jamkrindo Inaugurates New Office Building in Cirebon
39		6 Januari 2024 January 6, 2024	Jamin Kredit Alsintan, Jamkrindo Tekan Perjanjian Kerja Sama dengan 4 Bank Daerah To Guarantee Agricultural Machinery Loans, Jamkrindo Signs Cooperation Agreement with Four Regional Banks
40		5 Januari 2024 January 5, 2024	Perkuat Pelayanan, Jamkrindo Resmikan Gedung Kantor Baru di Padang To Strengthen Services, Jamkrindo Inaugurates New Office Building in Padang

Aktivitas Hubungan Media Tahun 2024

Media Relations Activities in 2024

No.	Tanggal Date	Bentuk Hubungan Media Forms of Media Relations
1	22- 23 Agustus August 22 - 23	Media Gathering
2	28 Juni 2024 June 28, 2024	Media Visit UMKM Binaan di Jawa Tengah Media Visit to Jamkrindo-Assisted MSMEs in Central Java
3	17 Desember 2024 December 17, 2024	Media Visit UMKM Binaan di Bali Media Visit to Jamkrindo-Assisted MSMEs in Bali
4	20 Maret 2024 March 20, 2024	Media Gathering Buka Bersama Redaksi Media NasionalMedia Gathering and Iftar with National Media Editors

Akses Publik dan Konsumen

Perusahaan memberikan akses yang terbuka kepada publik dan konsumen melalui jalur informasi yang telah disediakan, sebagaimana tercantum di bawah ini.

Public and Consumer Access

The Company provides open access to the public and consumers through the information channels listed below.

Situs Web
Website

www.jamkrindo.co.id

Media Sosial
Social Media

 @pt_jamkrindo
  @pt_jamkrindo
 jamkrindo
  PT Jamkrindo

Ragam Media Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Berikut adalah tabel yang menggambarkan berbagai media komunikasi yang digunakan oleh Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi mengenai aktivitas operasional, proses usaha, serta capaian kinerja yang telah diraih.

Various Communication Media to Shareholders and Stakeholders

The following table illustrates the various communication media used by the Company to convey data and information related to operational activities, business processes, and performance achievements.

Kepada To	Bentuk-bentuk Media Media forms
Regulator	Surat dan <i>email</i> Letter and email
Pemegang Saham Shareholders	Surat dan <i>email</i> Letter and email
Lembaga Publik Public Institutions	Surat dan <i>email</i> Letter and email
Konsumen Consumers	Surat dan <i>email</i> Letter and email
Karyawan Employees	Memorandum dan <i>email</i> Memorandum and email
Perusahaan Sejenis Lainnya Similar Companies	Surat dan <i>email</i> Letter and email
Mitra Kerja dan Rekanan Partners	Surat dan <i>email</i> Letter and email
Organisasi Profesi Professional Organizations	Surat dan <i>email</i> Letter and email
Masyarakat/Umum Public/People	Surat dan <i>email</i> Letter and email

* Situs Web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.

* The Company's website is not included in the variety of media above, because it is open, unlimited and can be accessed by anyone

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Dalam upaya terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, Jamkrindo fokus pada pengembangan Infrastruktur dan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) yang mendukung efisiensi operasional dan pencapaian visi serta misi perusahaan. Sebagai bagian dari upaya ini, Jamkrindo merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023 yang mengatur Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan untuk Badan Usaha Milik Negara.

Perusahaan menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi membawa berbagai tantangan, baik dalam aspek operasional maupun kebutuhan strategis jangka panjang. Tantangan tersebut meliputi aspek aplikasi, pengelolaan data, keamanan, pengembangan sumber daya manusia, dan sistem tata kelola TI. Untuk menjawab tantangan ini, Jamkrindo telah melaksanakan Transformasi Teknologi Informasi yang diyakini dapat membawa dampak positif, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong pertumbuhan bisnis Perusahaan.

Jamkrindo juga berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan TI dalam setiap aspek operasional, tidak hanya dalam hal penghematan biaya, tetapi juga untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas kinerja serta mendukung sistem respons cepat dalam proses bisnis. Penerapan tata kelola TI ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berlangsung dengan lebih efisien, akurat, dan responsif.

Beberapa tujuan utama penerapan tata kelola TI di Jamkrindo adalah:

1. Meningkatkan nilai bisnis:
 - a. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis, mencakup peningkatan efisiensi operasional, pengembangan produk dan layanan baru, peningkatan kepuasan pelanggan, dan inisiatif lainnya.
 - b. Menjajin kepatuhan dan keamanan Menjaga kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan kebijakan yang relevan, serta melindungi keamanan dan kerahasiaan informasi. Hal ini mencakup perlindungan data, pencegahan akses yang tidak sah, deteksi dan respons terhadap ancaman keamanan, dan manajemen risiko secara keseluruhan.
2. Meningkatkan kualitas layanan TI.

Memberikan layanan TI yang berkualitas kepada pengguna dan pelanggan. Hal ini mencakup dukungan teknis yang baik, pemecahan masalah yang efisien, dan peningkatan pengalaman pengguna secara keseluruhan.
3. Meningkatkan kinerja dan pengukuran.

Pengukuran dan pemantauan kinerja TI untuk mengevaluasi keberhasilan inisiatif dan proyek TI. Hal ini juga melibatkan identifikasi area perbaikan, dan pelaporan yang tepat waktu kepada pemangku kepentingan.

In its ongoing efforts to innovate and enhance service quality, Jamkrindo focuses on developing Information Technology (IT) Infrastructure and Governance that support operational efficiency and the achievement of the Company's vision and mission. As part of this effort, Jamkrindo refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Number Per-2/MBU/03/2023, which governs the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises.

The Company recognizes that the development of information technology presents various challenges, both in terms of operational aspects and long-term strategic needs. These challenges include application management, data governance, security, human capital development, and IT governance systems. To address these issues, Jamkrindo has implemented an Information Technology Transformation initiative that is expected to generate positive impacts, enhance operational efficiency, and drive the Company's business growth.

Jamkrindo is also committed to optimizing the use of IT in every aspect of its operations—not only to reduce costs, but also to accelerate processes, improve performance quality, and support a responsive operational system. The implementation of IT governance aims to ensure that the Company's operations are conducted more efficiently, accurately, and responsively.

The objectives of implementing IT governance within the Company include:

1. Increase business value:
 - a. Optimize the use of information technology to achieve business goals, including increasing operational efficiency, developing new products and services, increasing customer satisfaction, and other initiatives.
 - b. Ensure compliance and security, maintain compliance with relevant regulations, standards and policies, and protect the security and confidentiality of information. This includes data protection, prevention of unauthorized access, detection and response to security threats, and overall risk management.
2. Improve the quality of IT services.

Provide quality IT services to users and customers. This includes good technical support, efficient troubleshooting, and improved overall user experience.
3. Improve performance and assessment.

IT performance assessment and monitoring to evaluate the success of IT initiatives and projects. This also involves identifying areas of improvement, and timely reporting to stakeholders.

4. Mendorong inovasi dan transformasi.
Mendorong inovasi dan transformasi melalui pemanfaatan teknologi. Hal ini termasuk manajemen perubahan yang diperlukan untuk adaptasi perkembangan bisnis dan teknologi.
5. Meningkatkan kepemimpinan dan kemampuan TI
Pengembangan kepemimpinan TI yang efektif, pengembangan keterampilan dan kompetensi TI dalam organisasi, serta peningkatan pemahaman terhadap nilai dan peran strategis TI dalam bisnis.

Visi dan Misi Teknologi Informasi Jamkrindo

Berlandaskan pada Master Plan TI Jamkrindo, Visi dan Misi TI menjadi pijakan utama dalam merancang Kapabilitas TI yang berorientasi pada masa depan, dengan hasil akhir berupa Implikasi TI yang terarah dan strategis.

Visi TI

"Menjadi Strategic Partner penyediaan layanan penjaminan digital yang berorientasi pelanggan, berbasis ekosistem dan peningkatan kematangan tata kelola"

Misi TI

1. Menjadi Strategic Partner untuk mendukung transformasi bisnis perusahaan.
2. Melakukan penyediaan layanan penjaminan digital yang bermanfaat bagi customer dan Perusahaan
3. Melakukan pengembangan yang terus berorientasi pada pelanggan dan berbasis ekosistem.
4. Terus melakukan peningkatan kematangan dan kapabilitas Tata Kelola TI.

Strategi TI

1. Digitalisasi Layanan Penjaminan.
2. Manajemen Perencanaan Portofolio TI sesuai manfaat.
3. Peningkatan Proses Bisnis berbasis Data.
4. Organisasi TI yang Inovatif dan Cekatan.

Kebijakan Strategis TI di tahun 2024

Pada tahun 2024, PT Jamkrindo terus memperkuat perannya dalam menghadapi tantangan era digital dengan menetapkan kebijakan strategis teknologi informasi (TI) yang berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, keamanan data, serta transformasi layanan berbasis teknologi. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan melalui optimalisasi infrastruktur digital dan peningkatan kapabilitas TI yang lebih adaptif terhadap dinamika industri keuangan.

4. Encourage innovation and transformation.
Encourage innovation and transformation through the use of technology. This includes change management required to adapt to business and technological developments.
5. Improve leadership and IT capabilities.
Develop effective IT leadership, developing IT skills and competencies in the organization, as well as increasing understanding of the value and strategic role of IT in business.

Vision and Mission of Jamkrindo's Information Technology

Based on Jamkrindo's IT Master Plan, the IT Vision and Mission serve as the main foundation in designing future-oriented IT Capabilities, with the ultimate goal of delivering targeted and strategic IT Implications.

IT Vision

"To become a Strategic Partner in providing customer oriented and ecosystem-based digital guarantee services. And increasing governance maturity."

IT Mission

1. To become a Strategic Partner to support the Company's business transformation.
2. Provide digital guarantee services that are beneficial to customers and the Company
3. Conduct development that continues to be customer oriented and ecosystem-based
4. Continue to increase the maturity and capability of IT Governance.

IT Strategy

1. Digitalization of Guarantee Services.
2. IT Portfolio Planning Management according to benefits.
3. Data-based Business Process Improvement.
4. Innovative and Agile IT Organization.

Strategic IT Policies in 2024

In 2024, PT Jamkrindo continues to strengthen its role in facing the challenges of the digital era by establishing a strategic information technology (IT) policy that focuses on improving operational efficiency, data security, and technology-based service transformation. This initiative aims to support the Company's sustainable growth through optimizing digital infrastructure and improving IT capabilities that are more adaptive to the dynamics of the financial industry.

Dalam penyusunan dan implementasi kebijakan strategis TI, PT Jamkrindo mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku guna memastikan kepatuhan serta penerapan tata kelola TI yang optimal, di antaranya (namun tidak terbatas pada):

1. Peraturan Menteri BUMN Per-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang menegaskan pentingnya tata kelola TI yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.
2. POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang menggarisbawahi perlunya mitigasi risiko dalam implementasi teknologi di sektor keuangan.
3. SE OJK Nomor 22/SEOJK.05/2021, yang memberikan panduan lebih lanjut terkait penerapan manajemen risiko dalam pemanfaatan TI guna memastikan keamanan dan keandalan sistem yang digunakan oleh lembaga jasa keuangan non-bank.

Sebagai bagian dari transformasi digital, PT Jamkrindo mengembangkan berbagai inisiatif strategis TI, termasuk penguatan *core system*, implementasi ERP (*Enterprise Resource Planning*), modernisasi *data warehouse*, peningkatan kualitas data, serta optimalisasi keamanan dan infrastruktur TI. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem informasi yang lebih handal, mendukung layanan berbasis teknologi yang inovatif, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selain itu, penerapan sistem TI yang lebih terintegrasi juga bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan pengalaman pengguna, baik di lingkungan internal maupun bagi mitra bisnis perusahaan.

Dalam upaya menciptakan tata kelola TI yang lebih terstruktur dan sesuai dengan standar internasional, PT Jamkrindo mengadopsi kerangka kerja COBIT 2019 sebagai pedoman dalam tata kelola dan manajemen teknologi informasi, memastikan layanan TI dikelola sesuai dengan standar ISO 20000-1 untuk manajemen layanan TI, serta menerapkan ISO 27001 untuk meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Dengan standar – standar tersebut, PT Jamkrindo memastikan bahwa pengelolaan risiko TI dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek identifikasi, mitigasi, dan pengendalian risiko dalam setiap proses bisnis berbasis teknologi.

Ke depan, PT Jamkrindo akan terus menyempurnakan kebijakan strategis TI dengan mengedepankan inovasi, peningkatan kapabilitas SDM TI, serta penerapan teknologi yang mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Dengan tata kelola TI yang baik dan transformasi digital yang terarah, perusahaan optimis dapat menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks serta memperkuat posisinya sebagai pemimpin di sektor penjaminan kredit.

In the preparation and implementation of IT strategic policies, PT Jamkrindo refers to various applicable regulations to ensure compliance and optimal implementation of IT governance, including (but not limited to):

1. Regulation of the Minister of SOEs Per-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which emphasizes the importance of integrated IT governance in the company's strategic decision-making.
2. POJK Number 4/POJK.05/2021 on the Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions, which highlights the need for risk mitigation in the implementation of technology in the financial sector.
3. OJK Circular 22/SEOJK.05/2021, which provides further guidance on the implementation of risk management in IT utilization to ensure the security and reliability of systems used by non-bank financial services institutions.

As part of the digital transformation, PT Jamkrindo developed various IT strategic initiatives, including core system strengthening, ERP (*Enterprise Resource Planning*) implementation, data warehouse modernization, data quality improvement, and IT security and infrastructure optimization. This measure is taken to ensure a more reliable information system, support innovative technology-based services, and improve overall operational efficiency. Furthermore, the implementation of a more integrated IT system also aims to accelerate data-driven decision-making and improve user experience, both internally and for the Company's business partners.

In an effort to create a more structured IT governance that complies with international standards, PT Jamkrindo adopts the COBIT 2019 framework as a guideline in information technology governance and management, ensures IT services are managed in accordance with the ISO 20000-1 standard for IT service management, and implements ISO 27001 to improve the information security management system. With these standards, PT Jamkrindo ensures that IT risk management is conducted comprehensively, covering aspects of risk identification, mitigation, and control in every technology-based business process.

Moving forward, PT Jamkrindo will continue to refine its IT strategic policy by prioritizing innovation, improving IT HC capabilities, and implementing technology that supports sustainable business growth. With good IT governance and directed digital transformation, the Company is optimistic that it can face increasingly complex industry challenges and strengthen its position as a leader in the credit guarantee sector.

Inovasi Teknologi Informasi Tahun 2024

1. Jamkrindo Guarantee System (JaGuarS) – Inovasi Digital dalam Layanan Penjaminan

Dalam rangka mendukung visi PT Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan yang adaptif dan inovatif, Jamkrindo Guarantee System (JaGuarS) hadir sebagai sistem informasi penjaminan terintegrasi pertama di Indonesia. Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses penjaminan, sekaligus memastikan bahwa seluruh layanan dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan aman.

JaGuarS dirancang dengan arsitektur berbasis *microservices*, yang memungkinkan sistem memiliki skalabilitas tinggi, fleksibilitas dalam pengembangan, serta keandalan yang optimal. Dengan pendekatan ini, setiap layanan dalam sistem dapat dikembangkan, dikelola, dan diperbarui secara independen tanpa mengganggu operasional keseluruhan. Arsitektur ini juga memungkinkan integrasi yang lebih *seamless* dengan berbagai sistem internal maupun eksternal, termasuk platform perbankan, fintech, dan ekosistem digital lainnya.

Sebagai platform yang mendukung digitalisasi proses penjaminan, JaGuarS menggabungkan seluruh fungsi penjaminan dalam satu sistem yang terpusat. Hal ini memungkinkan setiap tahapan, mulai dari permohonan penjaminan, analisis risiko, penerbitan sertifikat, hingga monitoring dan klaim, dapat dikelola secara lebih efisien. Dengan digitalisasi ini, PT Jamkrindo dapat mempercepat waktu pemrosesan penjaminan, mengurangi ketergantungan pada proses manual, serta meningkatkan akurasi dalam verifikasi dan analisis data. Keunggulan utama JaGuarS terletak pada berbagai manfaat yang dimilikinya, antara lain:

- a. Efisiensi Operasional – Mempercepat proses penjaminan dengan mengurangi waktu dan biaya operasional.
- b. Akurasi Data – Mengeliminasi kesalahan manual melalui otomatisasi proses, meningkatkan keandalan dan konsistensi data dalam setiap transaksi.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas – Memungkinkan pemantauan proses secara real-time, memberikan visibilitas yang lebih baik bagi manajemen dan regulator.
- d. Keamanan Informasi – Dibangun dengan standar keamanan siber terkini guna memastikan perlindungan maksimal terhadap data dan transaksi penjaminan.

Selain itu, JaGuarS dilengkapi dengan antarmuka yang user-friendly, sehingga memudahkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan internal, mitra bisnis, dan customer, dalam mengakses serta mengelola layanan penjaminan dengan lebih efisien. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan modern, PT Jamkrindo dapat meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan bisnis, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, PT Jamkrindo

Innovations in Information Technology in 2024

1. Jamkrindo Guarantee System (JaGuarS) - Digital Innovation in Guarantee Services

To support PT Jamkrindo's vision as an adaptive and innovative guarantee company, Jamkrindo Guarantee System (JaGuarS) is present as the first integrated guarantee information system in Indonesia. This system was developed to improve efficiency, accuracy, and transparency in the guarantee process, while ensuring that all services can be accessed more easily, quickly, and safely.

JaGuarS is designed with a microservices-based architecture, which enables the system to have high scalability, flexibility in development, as well as optimal reliability. With this approach, each service in the system can be developed, managed and updated independently without disrupting overall operations. This architecture also enables more seamless integration with various internal and external systems, including banking platforms, fintech, and other digital ecosystems.

As a platform that supports the digitization of the underwriting process, JaGuarS combines all underwriting functions in one centralized system. This allows every stage, from guarantee application, risk analysis, certificate issuance, to monitoring and claims, to be managed more efficiently. With this digitization, PT Jamkrindo can speed up guarantee processing time, reduce dependence on manual processes, and improve accuracy in data verification and analysis. The main advantage of JaGuarS lies in its various benefits, as listed below:

- a. Operational Efficiency - Speed up the underwriting process by reducing operational time and costs.
- b. Data Accuracy - Eliminate human errors through process automation, improving data reliability and consistency in every transaction
- c. Transparency and Accountability - Enables real-time monitoring of processes, providing better visibility for management and regulators.
- d. Information Security - Built to the latest cybersecurity standards to ensure maximum protection of underwriting data and transactions.

In addition, JaGuarS is equipped with a user-friendly interface, making it easier for various stakeholders, including internal employees, business partners, and customers, to access and manage guarantee services more efficiently. With a more integrated and modern system, PT Jamkrindo can improve service quality, expand business reach, and ensure compliance with applicable regulations. As part of its long-term strategy, PT Jamkrindo continues

terus berkomitmen untuk menyempurnakan JaGuaS guna memastikan layanan penjaminan yang semakin cepat, transparan, dan akurat. Implementasi JaGuaS bukan hanya menjadi bagian dari upaya peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi digital yang lebih kokoh untuk masa depan industri penjaminan di Indonesia.

2. Jamkrindo Performance, Reporting, and Insights Management Engine (J-Prime) - Solusi Data Terintegrasi untuk Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat, Tepat, dan Akurat

Dalam era digital yang terus berkembang, J-PRIME hadir sebagai solusi komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengakses, mengelola, dan menganalisis data secara akurat dan efisien. Sebagai sistem yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi di PT Jamkrindo, J-PRIME memainkan peran strategis dalam mendukung operasional bisnis serta pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini memiliki dua fitur utama yang saling melengkapi yaitu fitur Reporting untuk menyajikan data secara rinci dan mendalam, memungkinkan analisis yang lebih terperinci guna mendukung strategi bisnis, serta fitur Dashboard untuk menampilkan data dalam format agregat yang mudah dipantau secara visual dan *real-time*, sehingga memudahkan monitoring kinerja harian.

J-PRIME hadir dengan tujuan utama untuk memberikan akses yang cepat, akurat, dan holistik terhadap informasi yang dibutuhkan, baik di tingkat operasional maupun strategis. Dengan sistem ini, manajemen PT Jamkrindo dapat mengandalkan data yang lebih valid dan terkini untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis fakta.

Sebagai bagian dari upaya transformasi digital, J-PRIME mengadopsi teknologi *Business Intelligence* (BI) guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan data. Dengan BI, sistem ini mampu mengolah data dalam jumlah besar, mengidentifikasi tren bisnis, serta menyediakan wawasan yang lebih mendalam melalui analisis prediktif dan visualisasi data yang interaktif. Implementasi BI memungkinkan PT Jamkrindo untuk melakukan pemantauan kinerja secara lebih proaktif, mengoptimalkan strategi bisnis, serta meningkatkan daya saing perusahaan di industri penjaminan.

Lebih dari sekadar alat pelaporan, J-PRIME berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan layanan di setiap kantor cabang, memastikan bahwa seluruh unit kerja dapat beroperasi dengan informasi yang seragam dan terintegrasi. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemutakhiran data secara terpusat, yang memastikan konsistensi dan keakuratan informasi di seluruh organisasi. Dengan pendekatan berbasis data yang lebih matang dan terarah, J-PRIME mendukung PT Jamkrindo dalam mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri penjaminan di Indonesia.

to be committed to improving JaGuaS to ensure faster, more transparent and accurate underwriting services. The implementation of JaGuaS is not only part of efforts to improve operational efficiency, but also a strategic step in building a stronger digital foundation for the future of the guarantee industry in Indonesia.

2. Jamkrindo Performance, Reporting, and Insights Management Engine (J-Prime) - Integrated Data Solution for Faster, More Precise, and Accurate Decision Making

In the ever-evolving digital era, J-PRIME comes as a comprehensive solution to meet users' needs in accessing, managing, and analyzing data accurately and efficiently. As a system designed to improve the quality of information management at PT Jamkrindo, J-PRIME plays a strategic role in supporting business operations and data-driven decision making. The system has two main features that complement each other, namely the Reporting feature to present data in detail and in-depth, enabling more detailed analysis to support business strategies, and the Dashboard feature to display data in an aggregate format that is easy to monitor visually and in real-time, thus facilitating daily performance monitoring.

J-PRIME is founded with the main goal of providing fast, accurate, and holistic access to information needed at both operational and strategic levels. With this system, PT Jamkrindo's management can rely on more valid and up-to-date data to make faster, more precise, and fact-based decisions.

As part of its digital transformation efforts, J-PRIME adopted Business Intelligence (BI) technology to improve effectiveness in data management and utilization. With BI, the system is able to process large amounts of data, identify business trends, and provide deeper insights through predictive analysis and interactive data visualization. The implementation of BI enables PT Jamkrindo to conduct more proactive performance monitoring, optimize business strategies, and improve the Company's competitiveness in the guarantee industry.

J-PRIME is more than just a reporting tool, it contributes to improving operational and service efficiency in each branch office, ensuring that all work units can operate with uniform and integrated information. In addition, the system allows for centralized data updates, ensuring consistency and accuracy of information across the organization. With a more mature and targeted data-driven approach, J-PRIME supports PT Jamkrindo in developing more effective business strategies, improving competitiveness, and strengthening its position as a leader in the Indonesian guarantee industry.

3. Jamkrindo System for Transformational Resource Execution and Administration Module (J-Stream) – Transformasi Digital dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Keuangan Perusahaan

Dalam menghadapi dinamika industri yang semakin kompleks, PT Jamkrindo terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya dan keuangan perusahaan. Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah implementasi J-Stream (ERP Oracle), sebuah sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform digital yang terpusat.

J-Stream hadir sebagai solusi yang memungkinkan otomatisasi dan penyelarasan proses bisnis, sehingga perusahaan dapat bekerja dengan lebih efisien, mengurangi kesalahan manual, serta memastikan keakuratan data dalam pengambilan keputusan. Dengan sistem ini, setiap unit kerja dapat beroperasi secara lebih terkoordinasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses bisnis yang sebelumnya memerlukan banyak intervensi manual. Melalui J-Stream, PT Jamkrindo dapat mengelola berbagai aspek penting dalam operasional perusahaan, di antaranya:

- a. Keuangan – Memfasilitasi pengelolaan keuangan secara lebih sistematis, mulai dari pencatatan akuntansi, pengelolaan anggaran, pembayaran, hingga penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Dengan J-Stream, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam perencanaan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan yang berlaku.
- b. Supply Chain Management – Mengoptimalkan manajemen rantai pasok dengan memungkinkan perusahaan mengelola informasi logistik dari berbagai supplier/vendor secara real-time. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan kontrol terhadap persediaan, mempercepat proses pengadaan, serta memastikan kelancaran operasional yang lebih baik.
- c. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) – Memudahkan pengelolaan data karyawan, termasuk pencatatan kehadiran, penggajian, benefit, serta aspek kepersonaliaan lainnya. Dengan adanya sistem yang terpusat, administrasi SDM dapat berjalan lebih transparan dan akurat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data dalam pengelolaan tenaga kerja.

Keunggulan utama J-Stream (ERP Oracle) terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai fungsi kerja dalam satu ekosistem digital (seperti integrasi dengan aplikasi internal *e-Procurement* dan aplikasi Manajemen Investasi), yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan data dan ketidaksesuaian informasi antar unit kerja. Implementasi fase kedua dari J-Stream akan membawa peningkatan lebih lanjut dengan integrasi langsung ke berbagai aplikasi lain, termasuk sistem pelaporan dan analisis data yang lebih komprehensif. Hal ini memungkinkan PT Jamkrindo untuk mendapatkan wawasan bisnis yang lebih dalam, mempercepat proses pelaporan keuangan, serta mendukung perencanaan strategis yang lebih tepat sasaran.

3. Jamkrindo System for Transformational Resource Execution and Administration Module (J-Stream)- Digital Transformation in Resource Management and Corporate Finance

In the face of increasingly complex industry dynamics, PT Jamkrindo continues to innovate in improving the quality of the Company's resources and financial management. One of the strategic steps implemented is the implementation of J-Stream (Oracle ERP), an Enterprise Resource Planning (ERP) system that aims to integrate various business functions in one centralized digital platform.

J-Stream comes as a solution that enables automation and alignment of business processes, so that companies can work more efficiently, reduce manual errors, and ensure data accuracy in decision making. With this system, each work unit can operate in a more coordinated manner, increase transparency, and speed up business processes that previously required a lot of manual intervention. Through J-Stream, PT Jamkrindo can manage various important aspects of the company's operations, including:

- a. Finance - Facilitate more systematic financial management, from accounting records, budget management, payments, to the preparation of faster and more accurate financial reports. With J-Stream, companies can improve efficiency in financial planning and ensure compliance with applicable reporting standards.
- b. Supply Chain Management - Optimizes supply chain management by enabling companies to manage logistics information from various suppliers/vendors in real-time. With an integrated system, companies can improve inventory control, speed up the procurement process, and ensure better operational smoothness.
- c. Human Capital Management (HC) - Facilitate employee data management, including attendance recording, payroll, benefits, and other personnel aspects. With a centralized system, HC administration can run more transparently and accurately, supporting more data-driven decision-making in workforce management.

The main advantage of J-Stream (Oracle's ERP) lies in its ability to integrate various work functions in one digital ecosystem (such as integration with internal *e-Procurement* applications and Investment Management applications), which not only improves operational efficiency but also minimizes the risk of data errors and information mismatches between work units. The implementation of the second phase of J-Stream will bring further improvements with direct integration to various other applications, including a more comprehensive reporting and data analysis system. This allows PT Jamkrindo to gain deeper business insights, accelerate the financial reporting process, and support more targeted strategic planning.

Dengan hadirnya J-Stream (ERP Oracle), PT Jamkrindo semakin siap menghadapi tantangan industri dengan sistem pengelolaan sumber daya dan keuangan yang lebih modern, *agile*, dan berbasis teknologi. Transformasi digital ini tidak hanya memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang lebih berkelanjutan, transparan, dan kompetitif di era digital.

4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMRT)

Dalam upaya memperkuat tata kelola risiko yang lebih efektif dan terintegrasi, PT Jamkrindo mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMRT) sebagai platform digital yang mendukung identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko secara menyeluruh. Aplikasi ini memungkinkan perusahaan mendeteksi risiko lebih dini, mengelola dampaknya dengan lebih baik, serta meningkatkan ketahanan operasional dalam menghadapi tantangan bisnis.

Terintegrasi dengan Induk Holding IFG (*Indonesia Financial Group*), SIMRT memastikan pemetaan risiko yang lebih akurat, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi di sektor keuangan dan penjaminan. Aplikasi ini mencakup beberapa modul utama, seperti *Risk Control Self Assessment* (RCSA) yang memungkinkan unit kerja menilai dan mengelola risiko dalam proses bisnis mereka, *Loss Event Database* (LED) untuk pencatatan dan analisis insiden risiko yang telah terjadi, serta *Key Risk Indicator* (KRI) yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini guna mencegah risiko berkembang menjadi permasalahan besar.

Dengan kemampuan akses data *real-time*, SIMRT meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam proses pelaporan risiko, memungkinkan respons yang lebih cepat dan akurat. Digitalisasi proses ini tidak hanya mendukung efisiensi operasional tetapi juga memperkuat *governance, risk, and compliance* (GRC) di lingkungan perusahaan. Selain itu, sistem ini dirancang agar dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika industri keuangan yang semakin kompleks.

Sebagai bagian dari strategi transformasi digital PT Jamkrindo, SIMRT berperan penting dalam menciptakan manajemen risiko yang lebih proaktif, terukur, dan berbasis data. Implementasi sistem ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar dan regulasi yang terus berkembang. Dengan komitmen terhadap inovasi dan tata kelola yang lebih baik, PT Jamkrindo memastikan keberlanjutan operasional serta pertumbuhan bisnis yang lebih tangguh di masa depan.

5. Implementasi Aplikasi Sunfish – Digitalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di PT Jamkrindo

Sebagai bagian dari upaya transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia, PT Jamkrindo mengimplementasikan Aplikasi Sunfish, sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola data karyawan secara

With the presence of J-Stream (Oracle ERP), PT Jamkrindo is increasingly ready to face industry challenges with a more modern, agile, and technology-based resource and financial management system. This digital transformation not only provides benefits in improving operational efficiency, but also contributes to more sustainable, transparent, and competitive business growth in the digital era.

4. Integrated Risk Management Information System (SIMRT) Application Development

In an effort to strengthen more effective and integrated risk governance, PT Jamkrindo developed the Integrated Risk Management Information System (SIMRT) as a digital platform that supports comprehensive risk identification, monitoring, and mitigation. This application enables the company to detect risks earlier, manage their impact better, and increase operational resilience in the face of business challenges.

Integrated with the Parent Holding IFG (*Indonesia Financial Group*), SIMRT ensures more accurate risk mapping, accelerates data-driven decision-making, and improves regulatory compliance in the financial and guarantee sectors. The application includes several key modules, such as *Risk Control Self Assessment* (RCSA) that enables work units to assess and manage risks in their business processes, *Loss Event Database* (LED) for recording and analyzing risk incidents that have occurred, and *Key Risk Indicator* (KRI) that serves as an early warning system to prevent risks from developing into major problems.

With real-time data access capabilities, SIMRT increases visibility and transparency in the risk reporting process, enabling faster and more accurate responses. The digitization of this process not only supports operational efficiency but also strengthens governance, risk, and compliance (GRC) within the company. Furthermore, the system is designed to be continuously scalable and adaptable to the increasingly complex dynamics of the financial industry.

As part of PT Jamkrindo's digital transformation strategy, SIMRT plays an important role in creating a more proactive, measurable, and data-driven risk management. The implementation of this system not only improves the effectiveness of risk management, but also strengthens the Company's competitiveness in the face of market changes and evolving regulations. With a commitment to innovation and better governance, PT Jamkrindo ensures operational sustainability and more resilient business growth in the future.

5. Implementation of Sunfish Application - Digitalization of Human Capital Management at PT Jamkrindo

As part of the digital transformation effort in human resource management, PT Jamkrindo implemented Sunfish Application, a system designed to manage employee data in a centralized and integrated manner. This application

terpusat dan terintegrasi. Aplikasi ini mencakup pengelolaan data karyawan dari berbagai status kepegawaian, mulai dari Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT), Calon Karyawan (Cakar), Karyawan Tetap (Kartap), hingga Direksi, sehingga memungkinkan pencatatan dan pemantauan data secara akurat sepanjang siklus kerja karyawan, dari awal bergabung hingga masa pensiun.

Aplikasi Sunfish menyediakan fitur pengelolaan data personal karyawan, termasuk tanggal lahir, riwayat pendidikan, data keluarga, informasi gaji, tunjangan, saldo cuti, serta benefit lainnya. Dengan adanya sistem ini, seluruh data karyawan dapat tersimpan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan pengelolaan administratif serta meningkatkan transparansi dalam manajemen SDM.

Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan modul klaim (*reimbursement*) yang memungkinkan karyawan untuk mengajukan permohonan klaim, memantau status persetujuan, hingga melihat saldo sisa klaim mereka secara real-time. Proses ini tidak hanya mempercepat persetujuan dan pencairan klaim, tetapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi terkait benefit karyawan terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Salah satu fitur unggulan lainnya dalam aplikasi Sunfish adalah modul Talent Management, yang berfungsi untuk melakukan appraisal dan menyimpan data *Key Performance Indicator* (KPI) perusahaan, baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, hingga individu karyawan. Modul ini memungkinkan perusahaan untuk memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan potensi SDM secara lebih terukur dan objektif, guna mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan organisasi.

Dengan implementasi Aplikasi Sunfish, PT Jamkrindo dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia secara lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi. Digitalisasi sistem ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan keamanan data karyawan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan SDM, guna memastikan bahwa seluruh karyawan dapat berkembang secara profesional serta memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan.

6. Pengembangan Jamkrindo Marketing Activity (JMA) – Digitalisasi Pemasaran untuk Efektivitas Bisnis

Sebagai bagian dari transformasi digital dan penguatan strategi pemasaran, Jamkrindo *Marketing Activity* (JMA) dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas *Relationship Manager* (RM) bisnis dalam menjalin hubungan dengan mitra. Aplikasi ini memungkinkan digitalisasi dan otomatisasi proses penjadwalan kunjungan, pelaporan hasil pertemuan, serta monitoring aktivitas pemasaran, sehingga mempermudah pencatatan dan analisis kinerja pemasaran secara *real-time*.

Dengan JMA, RM dapat dengan mudah merencanakan dan mengatur jadwal kunjungan, memastikan setiap interaksi dengan mitra berjalan sesuai strategi bisnis. Setelah

includes the management of employee data from various employment statuses, ranging from Specified Time Contract Employees (KKWT), Prospective Employees (Cakar), Permanent Employees (Kartap), to Directors, thus enabling accurate recording and monitoring of data throughout the employee's work cycle, from the beginning of joining until retirement.

The Sunfish app provides features for managing employees' personal data, including date of birth, education history, family data, salary information, allowances, leave balances, and other benefits. With this system, all employee data can be stored in a structured and well-documented manner, making administrative management easier and increasing transparency in HC management.

In addition, the app is also equipped with a claims (reimbursement) module that allows employees to submit claim requests, monitor approval status, and view the remaining balance of their claims in real-time. This process not only speeds up the approval and disbursement of claims, but also ensures that all transactions related to employee benefits are well-documented and in accordance with the Company's policies.

One of the other excellent features in the Sunfish application is the Talent Management module, which functions to conduct appraisals and store company Key Performance Indicator (KPI) data, both at the Head Office, Regional Office, Branch Office, and individual employee levels. This module allows companies to monitor, evaluate, and develop HC potential in a more measurable and objective manner, to support organizational growth and sustainability.

With the implementation of Sunfish Application, PT Jamkrindo can optimize human capital management more effectively, efficiently, and technology-based. The digitalization of this system not only improves the accuracy and security of employee data, but also supports strategic decision-making in HC management, to ensure that all employees can develop professionally and make maximum contributions to the Company.

6. Development of Jamkrindo Marketing Activity (JMA) - Marketing Digitalization for Business Effectiveness

As part of digital transformation and strengthening marketing strategy, Jamkrindo Marketing Activity (JMA) was developed to improve the effectiveness and efficiency of business Relationship Manager (RM) activities in establishing relationships with partners. This application enables digitization and automation of the process of scheduling visits, reporting meeting results, and monitoring marketing activities, making it easier to record and analyze marketing performance in real-time.

With JMA, RMs can easily plan and organize visit schedules, ensuring every interaction with partners is in line with the business strategy. After the meeting, the RM can

pertemuan, RM dapat langsung menginput hasil diskusi, peluang bisnis, serta tindak lanjut yang diperlukan, sehingga seluruh aktivitas terdokumentasi secara sistematis dan dapat diakses oleh manajemen kapan saja. Selain itu, fitur monitoring aktivitas pemasaran dalam JMA memberikan visibilitas yang lebih baik bagi perusahaan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Keunggulan JMA terletak pada kemampuannya dalam mendukung *Customer Relationship Management* (CRM) yang lebih terarah, membantu PT Jamkrindo memahami kebutuhan mitra bisnis dengan lebih baik, serta merespons peluang pasar secara lebih cepat dan tepat. Dengan sistem yang terdokumentasi secara rapi, perusahaan dapat meningkatkan koordinasi antar tim pemasaran, memastikan pencatatan kegiatan lebih akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

Ke depan, PT Jamkrindo berkomitmen untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan JMA dengan berbagai fitur inovatif guna meningkatkan kualitas layanan bagi mitra bisnis. Implementasi aplikasi ini semakin memperkuat posisi PT Jamkrindo dalam menghadapi dinamika industri dengan strategi pemasaran yang lebih modern, efektif, dan berbasis teknologi.

7. Enhancement Implementasi E-Materai – Digitalisasi Pelaporan Bea Meterai yang Lebih Efisien

Sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, PT Jamkrindo mengimplementasikan aplikasi E-Materai, sebuah sistem digital yang mendukung proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bea meterai secara lebih mudah dan akurat. Dengan adanya aplikasi ini, PT Jamkrindo sebagai Pemungut Bea Meterai dapat mengelola dan melaporkan transaksi bea meterai secara lebih terstruktur, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penerapan Aplikasi E-Materai bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan keandalan dalam proses administrasi bea meterai, dengan manfaat utama sebagai berikut:

- Fasilitas Pembelian E-Materai – PT Jamkrindo kini memiliki sistem yang memungkinkan pembelian e-materai secara langsung melalui website Pajakku, baik untuk kebutuhan satu dokumen (*single*) maupun dalam jumlah besar (*bulk/massal*). Dengan fitur ini, perusahaan dapat memastikan ketersediaan e-materai secara tepat waktu untuk keperluan operasionalnya.
- Pelaporan Bea Meterai yang Lebih Mudah – Aplikasi ini mendukung PT Jamkrindo dalam melakukan pelaporan bea meterai melalui platform e-Materai Pajakku, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan.

Dengan *enhancement* ini, PT Jamkrindo semakin terotomatisasi dan terdigitalisasi dalam mengelola bea meterai, sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi beban kerja manual, serta memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Implementasi ini

immediately input the results of the discussion, business opportunities, and necessary follow-up, so that all activities are systematically documented and can be accessed by management at any time. In addition, the marketing activity monitoring feature in JMA provides better visibility for the company to assess the effectiveness of the strategies implemented and make necessary adjustments.

JMA's strength lies in its ability to support more targeted Customer Relationship Management (CRM), helping PT Jamkrindo better understand the needs of business partners and respond more quickly and appropriately to market opportunities. With a well-documented system, the Company can improve coordination between marketing teams, ensure more accurate recording of activities, and support data-driven decision-making.

Going forward, PT Jamkrindo is committed to continue developing and enhancing JMA with various innovative features to improve service quality for business partners. The implementation of this application further strengthens PT Jamkrindo's position in facing industry dynamics with a more modern, effective, and technology-based marketing strategy.

7. Enhancement of E-Stamp Implementation - More Efficient Digitization of Stamp Duty Reporting

As part of the effort to increase efficiency in fulfilling tax obligations, PT Jamkrindo implemented the E-Materai application, a digital system that supports the process of reporting stamp duty Annual Tax Return (SPT) more easily and accurately. With this application, PT Jamkrindo as a Stamp Duty Collector can manage and report stamp duty transactions in a more structured manner, in accordance with applicable regulations.

The implementation of the E-Materai Application aims to improve convenience and reliability in the stamp duty administration process, with the following main benefits:

- E-Stamp Purchasing Facility - PT Jamkrindo now has a system that allows the purchase of e-stamps directly through the Pajakku website, both for the needs of one document (*single*) and in large quantities (*bulk*). With this feature, the company can ensure the timely availability of e-stamps for its operational needs.
- Simpler Stamp Duty Reporting - This application supports PT Jamkrindo in reporting stamp duty through the e-Materai Pajakku platform, ensuring compliance with tax regulations and minimizing the risk of errors in reporting.

With this enhancement, PT Jamkrindo is increasingly automated and digitized in managing stamp duty, thus increasing administrative efficiency, reducing manual workload, and ensuring better tax compliance. This implementation is also a strategic measure in strengthening

juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak perusahaan. Ke depan, PT Jamkrindo akan terus melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi E-Materai agar semakin terintegrasi dengan sistem internal perusahaan, mendukung proses bisnis yang lebih efisien, cepat, dan sesuai dengan regulasi perpajakan digital di Indonesia.

8. Pengembangan Dashboard Analytical – Monitoring Risiko Proses Penjaminan

PT Jamkrindo mengembangkan *Dashboard Analytical* sebagai alat pemantauan risiko yang terintegrasi dalam proses penjaminan. Aplikasi ini dirancang untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan memitigasi risiko secara *real-time*, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko perusahaan.

Dengan fitur visualisasi data yang interaktif, sistem ini memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, *Dashboard Analytical* juga mempermudah pelaporan dan dokumentasi risiko, sehingga memperkuat transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi.

Implementasi aplikasi ini menjadi bagian dari strategi PT Jamkrindo dalam mengoptimalkan tata kelola risiko berbasis teknologi, memastikan proses penjaminan yang lebih aman, efisien, dan terukur.

9. Optimalisasi Platform UMKM Layak – Mendorong Akses Pembiayaan dan Meminimalkan Risiko Penjaminan

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PT Jamkrindo mengembangkan Aplikasi UMKM Layak, sebuah platform digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Platform ini dirancang untuk mempertemukan UMKM, lembaga keuangan (baik bank maupun nonbank), serta PT Jamkrindo sebagai lembaga penjamin kredit/pembiayaan, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi dalam proses pengajuan dan penjaminan kredit. Dengan adanya Aplikasi UMKM Layak, pelaku usaha kini memiliki akses yang lebih mudah dalam memperoleh informasi, mengajukan pembiayaan, serta mendapatkan layanan penjaminan secara lebih transparan dan efisien.

Platform ini hadir sebagai solusi dalam menjawab tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM, yaitu keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan dan jaminan kredit yang sering kali menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Melalui Aplikasi UMKM Layak, UMKM dapat secara langsung terhubung dengan berbagai lembaga keuangan yang menyediakan produk kredit atau pembiayaan, serta memperoleh dukungan penjaminan dari PT Jamkrindo. Dengan proses yang lebih terdigitalisasi, sistem ini juga memungkinkan penilaian kelayakan usaha secara lebih cepat dan akurat, sehingga meminimalkan risiko kredit bagi lembaga keuangan serta memastikan bahwa UMKM yang memperoleh pembiayaan benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

transparency and accountability in corporate tax management. Going forward, PT Jamkrindo will continue to make improvements to the E-Materai application to make it more integrated with the company's internal system, supporting business processes that are more efficient, faster, and in accordance with digital tax regulations in Indonesia.

8. Analytical Dashboard Development - Guarantee Process Risk Monitoring

PT Jamkrindo developed Analytical Dashboard as an integrated risk monitoring tool in the guarantee process. This application is designed to analyze, identify, and mitigate risks in real-time, thus increasing the effectiveness of the Company's risk management.

With interactive data visualization features, the system enables more accurate monitoring and supports data-driven decision-making. In addition, the Analytical Dashboard also facilitates risk reporting and documentation, thereby strengthening transparency and regulatory compliance.

The implementation of this application is part of PT Jamkrindo's strategy in optimizing technology-based risk governance, ensuring a safer, more efficient, and measurable underwriting process.

9. Optimizing the MSME Platform - Encouraging Access to Financing and Minimizing Guarantee Risks

As a form of commitment in supporting the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), PT Jamkrindo developed the MSME Eligible Application, a digital platform that can be accessed anytime and anywhere. This platform is designed to bring together MSMEs, financial institutions (both banks and non-banks), and PT Jamkrindo as a credit/financing guarantor institution, thus creating a more integrated ecosystem in the process of applying for and guaranteeing credit. With the UMKM Layak Application, businesses now have easier access to information, apply for financing, and get guarantee services in a more transparent and efficient manner.

This platform comes as a solution to the main challenges faced by MSMEs, namely limited access to financing sources and credit guarantees that often become obstacles in business development. Through the MSME App, MSMEs can directly connect with various financial institutions that provide credit or financing products, as well as obtain guarantee support from PT Jamkrindo. With a more digitized process, this system also enables faster and more accurate business feasibility assessments, thus minimizing credit risk for financial institutions and ensuring that MSMEs that obtain financing actually meet the predetermined criteria.

Selain memberikan manfaat bagi UMKM, platform ini juga memberikan dampak positif bagi PT Jamkrindo dengan meningkatkan efisiensi dalam proses penjaminan serta mengurangi potensi risiko kredit. Dengan tersedianya data yang lebih terstruktur dan terdokumentasi secara digital, PT Jamkrindo dapat melakukan analisis risiko yang lebih komprehensif, sehingga memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Optimalisasi Aplikasi UMKM Layak menjadi langkah strategis dalam upaya digitalisasi layanan penjaminan, sejalan dengan visi PT Jamkrindo untuk terus mendorong inklusi keuangan serta memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional.

10. Pengembangan Website serta Direktori PPID – Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, PT Jamkrindo mengembangkan Website dan Direktori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang relevan.

Melalui Website PPID, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan, layanan, dan aktivitas PT Jamkrindo secara terbuka. Informasi yang tersedia dikategorikan sesuai dengan UU KIP, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Dengan adanya platform digital ini, PT Jamkrindo memastikan bahwa seluruh proses penyediaan informasi dilakukan secara efisien, sistematis, dan sesuai dengan standar keterbukaan informasi publik.

Selain itu, pengembangan Direktori PPID memungkinkan sistem pengelolaan informasi yang lebih terstruktur, di mana masyarakat dapat dengan mudah mencari dan memperoleh data yang dibutuhkan berdasarkan kategori informasi yang telah ditetapkan. Direktori ini membantu mempermudah pencarian dan akses terhadap informasi yang tersedia, sehingga masyarakat dapat memperoleh data secara lebih sistematis dan terstruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU KIP. Dengan adanya sistem ini, PT Jamkrindo memastikan bahwa informasi yang disediakan tetap terorganisir dengan baik dan dapat diakses sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

Dengan penerapan sistem ini, PT Jamkrindo tidak hanya memenuhi kewajiban hukum berdasarkan UU KIP, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan transparansi, serta memastikan tata kelola informasi yang lebih baik dan profesional. Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam mendorong keterbukaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam operasional perusahaan.

In addition to providing benefits to MSMEs, this platform also has a positive impact on PT Jamkrindo by increasing efficiency in the guarantee process and reducing potential credit risks. With the availability of more structured and digitally documented data, PT Jamkrindo can conduct more comprehensive risk analysis, thus ensuring the sustainability of the Company's business while supporting the growth of MSMEs in Indonesia. The optimization of the MSME App is a strategic step in the effort to digitize guarantee services, in line with PT Jamkrindo's vision to continue to encourage financial inclusion and strengthen its role in supporting the growth of the MSME sector as the main pillar of the national economy.

10. Development of PPID Website and Directory - Implementation of the Public Information Disclosure Act

As a commitment to transparency and accountability, PT Jamkrindo developed a Website and Directory of Information and Documentation Management Officials (PPID) as an implementation of Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure (UU KIP). This law requires every public body to provide information that is accurate, easily accessible, and in accordance with applicable regulations, in order to guarantee the public's right to obtain relevant information.

Through the PPID Website, the public can easily access information related to PT Jamkrindo's policies, services, and activities openly. The available information is categorized in accordance with the UU KIP, namely information that must be announced periodically, information that must be available at any time, and information that must be announced immediately. With this digital platform, PT Jamkrindo ensures that the entire process of providing information is conducted efficiently, systematically, and in accordance with public information disclosure standards.

Moreover, the development of the PPID Directory enables a more structured information management system, where the public can easily search for and obtain the data needed based on the established information categories. This directory helps facilitate the search and access to available information, so that the public can obtain data in a more systematic and structured manner in accordance with the applicable provisions in the UU KIP. With this system, PT Jamkrindo ensures that the information provided remains well organized and accessible in accordance with the principle of information disclosure.

With the implementation of this system, PT Jamkrindo not only fulfills its legal obligations under UU KIP, but also strengthens public trust, increases transparency, and ensures better and more professional information governance. This is in line with the Company's efforts to encourage openness, increase public participation, and strengthen the principles of good corporate governance (GCG) within the Company's operations.

11. Implementasi Jamkrindo Assets Lease Management System for Transaction and Reporting (JAMSTAR) – PSAK 116

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset sewa, PT Jamkrindo mengembangkan Jamkrindo *Assets Lease Management System for Transaction and Reporting* (JAMSTAR). Aplikasi ini dirancang untuk mengelola data dan informasi terkait proses bisnis penyewaan barang dan jasa, seperti sewa gedung, kendaraan, jasa renovasi, perangkat IT, dan aset lainnya yang digunakan oleh perusahaan.

JAMSTAR memungkinkan pencatatan dan pemantauan seluruh transaksi penyewaan dengan lebih sistematis. Sistem ini mencakup penginputan data penyewaan yang mencakup detail aset atau jasa yang disewa, kontrak penyewaan, informasi vendor (*lessor*), durasi penyewaan, serta nilai sewa. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur perhitungan amortisasi aset yang disewa, yang secara otomatis menghitung penyusutan nilai aset berdasarkan standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 116.

Selain sebagai alat pengelolaan aset sewa, JAMSTAR juga berfungsi dalam aspek pelaporan keuangan dengan pencatatan jurnal akuntansi secara otomatis untuk setiap transaksi yang meng-trigger penjurnalan. Hal ini memastikan bahwa seluruh transaksi sewa dicatat secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga mendukung kepatuhan regulasi dan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan efisien. Dengan implementasi JAMSTAR, PT Jamkrindo dapat mengoptimalkan pengelolaan aset sewa, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan keuangan, sejalan dengan standar akuntansi yang diterapkan dalam industri keuangan dan perbankan.

12. Enhancement Aplikasi Helpdesk – Optimalisasi Layanan Internal

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas komunikasi dan penyelesaian pengaduan di lingkungan internal, PT Jamkrindo melakukan enhancement (peningkatan) terhadap Aplikasi Helpdesk. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana permintaan informasi serta penyampaian dan penanganan pengaduan dari/oleh unit kerja internal, sehingga memungkinkan proses eskalasi dan penyelesaian masalah yang lebih cepat dan transparan.

Dengan pengembangan ini, proses penanganan pengaduan menjadi lebih terstruktur dan termonitor dengan baik. Setiap permintaan atau keluhan yang masuk dapat dicatat, dikategorikan, dan dipantau status penyelesaiannya secara *real-time*. Selain itu, fitur pencatatan historis memungkinkan analisis terhadap pola permasalahan yang sering terjadi, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan operasional perusahaan.

11. Implementation of Jamkrindo Assets Lease Management System for Transaction and Reporting (JAMSTAR) – PSAK 116

As part of the effort to improve efficiency and transparency in the management of lease assets, PT Jamkrindo developed Jamkrindo *Assets Lease Management System for Transaction and Reporting* (JAMSTAR). This application is designed to manage data and information related to the business process of leasing goods and services, such as building leases, vehicles, renovation services, IT equipment, and other assets used by the Company.

JAMSTAR enables more systematic recording and monitoring of all rental transactions. The system includes inputting rental data that includes details of the asset or service being rented, the rental contract, vendor (*lessor*) information, rental duration, and rental value. In addition, the application is equipped with an amortization calculation feature for leased assets, which automatically calculates the depreciation of asset value based on the standard Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 116.

Other than being a rental asset management tool, JAMSTAR also functions in the aspect of financial reporting by automatically recording accounting journals for each transaction that triggers journaling. This ensures that all lease transactions are recorded accurately and in accordance with applicable accounting standards, thus supporting regulatory compliance and the preparation of more accurate and efficient financial statements. With the implementation of JAMSTAR, PT Jamkrindo can optimize the management of rental assets, improve operational efficiency, and strengthen transparency and accountability in financial recording, in line with accounting standards applied in the financial and banking industry.

12. Helpdesk Application Enhancement - Internal Service Optimization

As part of the effort to improve the effectiveness of communication and complaint resolution in the internal environment, PT Jamkrindo made enhancements to the Helpdesk Application. This application serves as a means of requesting information as well as submitting and handling complaints from/by internal work units, thus enabling a faster and more transparent escalation and problem solving process.

With this development, the complaint handling process becomes more structured and well monitored. Every incoming request or complaint can be recorded, categorized, and monitored for real-time resolution status. Furthermore, the historical recording feature allows analysis of patterns of problems that often occur, so that they can be used to improve the quality of service and the Company's operations.

Peningkatan ini juga mendukung efisiensi kerja dengan mengurangi komunikasi manual dan memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensi dan prioritasnya. Dengan demikian, Aplikasi Helpdesk tidak hanya menjadi alat komunikasi internal tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas serta efektivitas operasional PT Jamkrindo secara keseluruhan.

13. Enhancement Aplikasi Jamkrindo *Network Information* (JAMNATION) – Optimalisasi Pengelolaan Jaringan Kantor

Sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan jaringan kantor, PT Jamkrindo melakukan enhancement (peningkatan) terhadap Aplikasi Jamkrindo *Network Information* (JAMNATION). Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber dan menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami, sehingga mempermudah pemantauan serta analisis terhadap data umum, sumber daya manusia (SDM), dan kinerja jaringan kantor di seluruh wilayah operasional perusahaan.

Dengan adanya pengembangan ini, JAMNATION semakin efektif dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, mengurangi potensi kekeliruan dalam pengelolaan informasi, serta meningkatkan transparansi antarunit kerja. Fitur visualisasi data yang lebih komprehensif memungkinkan pemantauan jaringan kantor secara lebih real-time, akurat, dan terpusat dalam satu platform.

Melalui optimalisasi JAMNATION, PT Jamkrindo dapat memastikan bahwa seluruh informasi jaringan kantor terorganisir dengan baik, mudah diakses, dan dapat digunakan sebagai dasar analisis yang lebih akurat. Hal ini mendukung efisiensi operasional dan memperkuat pengelolaan jaringan kantor secara menyeluruh, sejalan dengan strategi digitalisasi dan modernisasi sistem informasi perusahaan.

14. Enhancement Aplikasi E-Audit – Digitalisasi Pengelolaan Audit Internal

PT Jamkrindo terus meningkatkan efektivitas dan transparansi pengawasan melalui enhancement Aplikasi E-Audit. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola seluruh proses audit internal secara terstruktur, efisien, dan terdokumentasi, mendukung tim auditor dalam memastikan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan fitur unggahan dokumen, akses *real-time* terhadap hasil audit, serta pemantauan tindak lanjut audit yang terintegrasi sesuai struktur organisasi, aplikasi ini memungkinkan setiap unit kerja memenuhi permintaan data audit dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, tim auditor dapat melakukan verifikasi data dan pemantauan tindak lanjut secara sistematis guna memastikan penyelesaian temuan audit secara efektif.

These improvements also support work efficiency by reducing manual communication and ensuring that each complaint is handled by the appropriate authorities according to its level of urgency and priority. Thus, the Helpdesk App is not only an internal communication tool but also contributes to improving PT Jamkrindo's overall productivity and operational effectiveness.

13. Jamkrindo *Network Information* (JAMNATION) Application Enhancement - Optimization of Office Network Management

As a strategic measure in improving the efficiency and transparency of office network management, PT Jamkrindo enhances the Jamkrindo *Network Information* (JAMNATION) application. This application is designed to integrate information from various sources and present data visually to make it easier to understand, thus facilitating monitoring and analysis of general data, human capital (HC), and office network performance throughout the Company's operational areas.

With this development, JAMNATION is more effective in supporting data-based decision making, reducing the potential for errors in information management, and increasing transparency between work units. More comprehensive data visualization features allow for more real-time, accurate, and centralized monitoring of the office network in one platform.

Through the optimization of JAMNATION, PT Jamkrindo can ensure that all office network information is well organized, easily accessible, and can be used as the basis for more accurate analysis. This supports operational efficiency and strengthens the overall management of the office network, in line with the Company's digitalization and information system modernization strategy.

14. E-Audit Application Enhancement - Digitalization of Internal Audit Management

PT Jamkrindo continues to improve the effectiveness and transparency of supervision through the enhancement of E-Audit Application. This application is designed to manage the entire internal audit process in a structured, efficient, and documented manner, supporting the auditor team in ensuring compliance and good corporate governance.

With features such as document upload, real-time access to audit results, and integrated audit follow-up monitoring according to organizational structure, this application allows each work unit to fulfill audit data requests more quickly and accurately. Moreover, the auditor team can systematically verify data and monitor follow-up to ensure effective resolution of audit findings.

Implementasi enhancement E-Audit memperkuat sistem pengawasan internal PT Jamkrindo melalui transformasi digital, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap standar tata kelola yang baik guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

15. Implementasi Aplikasi JaDE (Jamkrindo Digital Environment) – Transformasi Digital dalam Layanan Penjaminan

Sebagai bagian dari strategi digitalisasi dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan efisiensi layanan, PT Jamkrindo mengembangkan JaDE (Jamkrindo Digital Environment) sebagai *e-channel marketing* yang inovatif. Aplikasi ini dirancang untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan aksesibilitas layanan penjaminan, sehingga memungkinkan Calon Konsumen, Calon Terjamin, maupun Terjamin untuk memperoleh layanan penjaminan secara lebih mudah dan efisien.

JaDE hadir dalam bentuk aplikasi berbasis *web* dan *mobile*, yang tidak hanya berfungsi sebagai platform interaktif bagi *customer* dalam mendapatkan layanan penjaminan, tetapi juga sebagai alat komunikasi langsung dengan PT Jamkrindo. Dengan fitur unggulan seperti Layanan Chat dan Monitoring Unit Kerja serta Kantor Pusat, aplikasi ini memungkinkan pemantauan respons layanan dari setiap unit kerja secara *real-time*, sehingga memastikan waktu respons maksimal dalam 1x24 jam terhadap setiap permintaan pengguna.

Selain itu, JaDE juga dilengkapi dengan sistem pemantauan performa layanan, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja unit kerja secara lebih terukur dan berbasis data. Dengan adanya platform digital ini, PT Jamkrindo tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam operasional penjaminan.

Melalui implementasi JaDE, PT Jamkrindo terus berkomitmen dalam meningkatkan pengalaman pengguna, mempercepat proses penjaminan, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

16. Implementation Network and Security Operating Center (NSOC).

Penerapan *Network and security Operating Center* (NSOC) merupakan hal mutlak yang diperlukan oleh Perusahaan dan solusi praktis yang terdiri dari tim dan instrument *tools* management *Network* dan *Security*.

Manfaat yang diperoleh ialah adanya pemantauan 24/7 terhadap keseluruhan infrastruktur IT dan bertindak responsif dan preventif terhadap potensi risiko siber yang mengancam sistem Perusahaan.

Tim khusus NSOC melaksanakan analisis terhadap setiap event yang terjadi pada aset Perusahaan, menetapkan langkah pencegahan dan eksekusi secara prudent agar tidak berdampak pada kegagalan services sistem informasi Perusahaan.

The implementation of E-Audit enhancement strengthens PT Jamkrindo's internal control system through digital transformation, improves operational efficiency, and ensures compliance with good governance standards to support sustainable business growth.

15. Implementation of JaDE (Jamkrindo Digital Environment) Application - Digital Transformation in Guarantee Services

As part of its digitalization strategy to support business growth and improve service efficiency, PT Jamkrindo developed JaDE (Jamkrindo Digital Environment) as an innovative e-channel marketing. JaDE is an application designed to expand the marketing network and increase the accessibility of guarantee services, thus enabling prospective consumers, prospective guarantees, and guarantees to obtain guarantee services more easily and efficiently.

JaDE comes in the form of web-based and mobile applications, which not only serves as an interactive platform for customers in obtaining guarantee services, but also as a direct communication tool with PT Jamkrindo. With excellent features such as Chat Service and Monitoring of Work Units and Head Office, this application allows real-time monitoring of service responses from each work unit, thus ensuring maximum response time within 1x24 hours to each user request.

In addition, JaDE is also equipped with a service performance monitoring system, which allows companies to evaluate work unit performance in a more measurable and data-driven manner. With this digital platform, PT Jamkrindo not only improves service quality, but also strengthens transparency, accountability, and effectiveness in guarantee operations.

Through the implementation of JaDE, PT Jamkrindo continues to be committed to improving user experience, accelerating the guarantee process, and supporting business growth that is more innovative and adaptive to digital technology developments.

16. Implementation of Network and Security Operating Center (NSOC)

The implementation of the Network and security Operating Center (NSOC) is an absolute necessity for the Company and a practical solution consisting of a team and instrument tools for Network and Security management.

The benefits of using this includes 24/7 monitoring of the entire IT infrastructure and acting responsively and preventively against potential cyber risks that threaten the Company's systems.

NSOC's specialized team analyzes every event that occurs on the Company's assets, establishes preventive measures and prudent execution so as not to impact the failure of the Company's information system services.

Selain itu, implementasi NSOC di Jamkrindo bertujuan untuk memastikan bahwa aset data dan informasi Perusahaan tetap aman dari ancaman internal maupun eksternal. Keamanan data menjadi faktor krusial, di mana kebocoran informasi dapat berdampak serius terhadap reputasi dan kepercayaan mitra dan stakeholder terkait. Dengan adanya NSOC, perusahaan dapat menjaga integritas dan kerahasiaan data yang dimilikinya.

IT Disruption

Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang baru sekaligus tantangan bagi berbagai sektor, termasuk industri jasa keuangan. Di tengah perubahan ini, adaptasi menjadi keharusan agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Transformasi digital, yang ditandai dengan munculnya inovasi seperti *big data*, *machine learning*, *Internet of Things* (IoT), dan tren *Bring Your Own Device* (BYOD), telah merombak cara Perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi teknologi yang digunakan, tetapi juga mengharuskan penyesuaian dalam strategi bisnis dan struktur organisasi.

Disrupsi digital umumnya muncul sebagai dampak dari inovasi-inovasi seperti *big data*, *machine learning*, *Internet of Things*, dan tren BYOD (*Bring Your Own Device*). Inovasi ini tidak hanya memengaruhi teknologi yang digunakan oleh unit bisnis, tetapi juga mengubah cara mereka berinteraksi dengan pelanggan serta mengelola operasional. Dampak signifikan dari disrupsi digital mencakup perubahan pada harapan dan kebutuhan pelanggan terhadap layanan yang cepat dan instan, dorongan bagi perusahaan untuk melakukan transformasi bisnis dan model operasional, peningkatan efisiensi layanan, pengembangan inovasi produk dan layanan, serta perubahan budaya kerja dan struktur organisasi.

Mitra bisnis Jamkrindo, yang terdiri dari lembaga keuangan Bank dan Non-Bank, senantiasa melakukan inovasi dan penyesuaian strategi bisnis untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menjaga daya saing perusahaan. Sebagai salah satu contoh, sistem layanan transaksi keuangan kini telah memanfaatkan metode BYOD, di mana setiap individu dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile tanpa memerlukan layanan tambahan dari pihak Bank. Selain itu, layanan kredit perbankan juga telah menerapkan sistem ini. Calon kreditur dapat mengajukan pembiayaan melalui aplikasi digital, memungkinkan proses persetujuan kredit dilakukan tanpa tatap muka dan menggunakan dokumen digital.

Evolusi ini didorong oleh disrupsi teknologi informasi (IT disruption). Jika perbankan tidak mampu beradaptasi, maka risiko degradasi terhadap eksistensi bank menjadi sangat nyata. Oleh karena itu, perusahaan harus terus beradaptasi dan mengikuti perubahan, sambil tetap fokus pada tujuan utama, yaitu menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan.

Furthermore, the implementation of NSOC at Jamkrindo aims to ensure that the Company's data and information assets remain safe from internal and external threats. Data security is a crucial factor, where information leaks can have a serious impact on the reputation and trust of partners and related stakeholders. With NSOC, the Company can maintain the integrity and confidentiality of its data.

IT Disruption

Advancements in information technology have brought both opportunities and challenges across sectors, including the financial services industry. In the face of these changes, adaptation has become essential to remain relevant to market needs. Digital transformation-- driven by innovations such as big data, machine learning, the Internet of Things (IoT), and the Bring Your Own Device (BYOD) trend-- has reshaped the way companies operate and interact with customers. This shifts affects not only the technology utilized but also requires adjustments in business strategies and organizational structures.

Digital disruption typically arises from these innovations such as big data, machine learning, the Internet of Things, and the BYOD (Bring Your Own Device) trend. These innovations not only affect the technology used by business units but also change the way they interact with customers and manage operations. The significant impact of digital disruption includes changes in customer expectations and needs for fast and instant services, the drive for companies to transform business operations and models, increased service efficiency, the development of product and service innovations, as well as changes in work culture and organizational structure.

Jamkrindo's business partners, consisting of both Bank and Non-Bank financial institutions, continue to innovate and adapt their business strategies to meet customer demands and maintain competitiveness. As an example, the financial transaction service system now utilizes the BYOD method, allowing individuals to perform transactions anytime and anywhere via mobile devices without needing additional services from the bank. Moreover, banking credit services have also implemented this system. Potential borrowers can apply for financing through a digital application, allowing the credit approval process remotely using digital documents.

This evolution is driven by information technology. Financial institutions that fail to adapt risk becoming obsolete. Therefore, Jamkrindo must continuously evolve and stay ahead with the changing times, while remaining focused on its main goal: to become the top choice for businesses in guarantee services.

Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan terus mengutamakan adaptasi dan inovasi untuk menjawab tantangan era digital. Sejak tahun 2022, langkah strategis telah dilakukan dengan menetapkan transformasi digital sebagai prioritas utama. Di tahun 2023, layanan digital kepada UMKMK semakin diperkuat melalui aplikasi berbasis layanan, mendukung pemasaran digital, serta mengoptimalkan sistem layanan terpusat. Transformasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan tetapi juga menjadikan teknologi informasi sebagai inti dari layanan penjaminan kepada mitra bisnis.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Jamkrindo tidak hanya memandang disrupsi digital sebagai tantangan, tetapi sebagai peluang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan menjadikan teknologi sebagai fondasi utama, Jamkrindo berkomitmen untuk tetap menjadi mitra pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar.

Cyber Security

Setelah era pandemi Covid-19 usai, pola hidup manusia dan dinamika teknologi mengalami perubahan yang signifikan. Digitalisasi tidak lagi hanya menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi elemen utama dalam hampir setiap aspek kehidupan, terutama dalam dunia kerja dan komunikasi. Di tengah percepatan transformasi ini, kebutuhan akan akses yang mudah, cepat, dan aman menjadi semakin vital, termasuk dalam lingkungan bisnis seperti Jamkrindo. Digitalisasi telah memungkinkan efisiensi dalam berbagai proses, mulai dari pertukaran data hingga operasional perusahaan, yang sebelumnya memerlukan waktu dan biaya lebih besar.

Namun, digitalisasi bukan tanpa risiko. Ancaman seperti serangan siber, pencurian data, dan manipulasi informasi menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Menyadari pentingnya keamanan, Jamkrindo telah mengambil langkah strategis dengan memperbarui kebijakan sistem manajemen keamanan informasi yang mengacu pada ketentuan Pemerintah Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, peraturan regulator Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 4/POJK.05/2021 dan SE Nomor 22/SEOJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan standar internasional seperti ISO 27001:2022. Pembaruan kebijakan ini diiringi dengan penerapan protokol keamanan yang mencakup aspek aplikasi, data, jaringan, dan manajemen aset TI secara terpusat. Hasil positif yang terlihat jelas adalah kemampuan perusahaan pada tahun 2023 untuk menangkal berbagai serangan siber. Selain itu, sebagai langkah perlindungan informasi dari berbagai ancaman dan risiko yang mungkin muncul, Jamkrindo telah menerapkan Information Security Management System (ISMS) sejak tahun 2019, yang tersertifikasi ISO 27001:2013. Pada tahun 2023, sertifikasi tersebut telah diperbarui menjadi ISO 27001:2022 untuk menyesuaikan dengan standar terbaru.

As a guarantee company, Jamkrindo remains committed to innovation and adaptation in response to the the digital-era challenges. Since 2022, digital transformation has been a strategic priority. In 2023, Jamkrindo further strengthen its digital services for MSMEs through service-based applications, support for digital marketing, and the optimization of centralized service systems. This transformation is aimed not only at enhancing the Company's competitiveness but also at positioning information technology as the backbone of guarantee services provided to business partners.

Through these various initiatives, Jamkrindo views digital disruption not merely as a challenge but also as an opportunity for continuous improvement. By making technology the main foundation, Jamkrindo is committed to remaining the preferred partner for businesses in guarantee services, in line with the changing times and market needs.

Cyber Security

After the COVID-19 pandemic ended, lifestyles and technological dynamics experienced significant changes. Digitalization is no longer just an addition; it has become a key element in almost every aspect of life, especially in the world of work and communication. Amid this rapid transformation, the need for easy, fast, and secure access has become increasingly vital, including in business environments like Jamkrindo. Digitalization has enabled efficiency in various processes, starting from data exchange and all the way up to company operations, which previously required more time and higher costs.

However, digitalization is not without risks. Threats such as cyberattacks, data theft, and information manipulation are major challenges that need to be addressed. Jamkrindo recognizes the importance of security and has taken various strategic measures by updating its Information Security Management System (ISMS) policy. This policy refers to the Government Regulation No. Per-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Activities of State-Owned Enterprises as well as regulations from the Financial Services Authority (OJK) of the Republic of Indonesia, namely Regulation No. 4/POJK.05/2021 and the Circular Letter No. 22/SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions. It also aligns with the international standards such as ISO 27001:2022. This policy update is accompanied by the implementation of security protocols covering applications, data, networks, and centralized IT asset management. A clear positive outcome is the Company's demonstrated ability in 2023 to fend off various cyberattacks. Furthermore, as a measure to protect information from various potential threats and risks, Jamkrindo has implemented an Information Security Management System (ISMS) since 2019, initially certified under ISO 27001:2013. In 2023, the certification was updated to ISO 27001:2022 to align with the latest standards.

Tidak hanya mengandalkan teknologi, Jamkrindo juga berkomitmen meningkatkan kesadaran karyawan terhadap ancaman siber melalui pelatihan dan edukasi berkelanjutan. Upaya ini diiringi dengan evaluasi rutin untuk memastikan setiap potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Dengan langkah ini, Jamkrindo bukan hanya melindungi operasional bisnis, tetapi juga menunjukkan bahwa keamanan siber adalah prioritas yang harus terintegrasi dalam setiap lini perusahaan.

Disaster Recovery

Disaster Recovery adalah strategi pemulihan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengembalikan operasional setelah bencana atau peristiwa yang mengganggu kelancaran operasi. Beberapa area pemulihan harus diprioritaskan dalam situasi seperti ini, salah satunya adalah layanan teknologi informasi (*IT Services*). Dengan semakin bergantungnya perusahaan pada *platform* digital untuk menjamin layanan, peran TI menjadi sangat krusial dalam mendukung kelancaran operasional bisnis. Untuk memastikan kesiapan menghadapi bencana, perusahaan secara rutin melakukan uji coba berbagai skenario bencana, seperti kebakaran dan gempa bumi, dengan tujuan untuk:

1. Untuk memastikan seluruh Pegawai telah memahami prosedur penanganan gangguan saat terjadi gangguan TI.
2. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) Pegawai terhadap pentingnya koordinasi dan pembagian peran dan tanggung jawab penanganan bencana.
3. Mengukur kesiapan Pegawai dalam penanganan gangguan TI, mengukur waktu respon gangguan serta perpindahan menggunakan *Disaster Recovery Center*.
4. Mengidentifikasi sarana-prasarana pendukung, termasuk dokumen-dokumen penting yang perlu disiapkan dan diselamatkan dalam menjalankan aktivitas yang diprioritaskan sesaat setelah gangguan terjadi.
5. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menghambat penanganan gangguan yang berpotensi terjadi.

Perusahaan merancang rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, regulator, serta praktik terbaik yang berlaku secara umum. Selain itu, standar yang diterapkan oleh unit usaha sejenis di lingkungan BUMN juga menjadi acuan penting. Beberapa referensi yang digunakan dalam penyusunan rencana ini antara lain:

1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 – Perlindungan Data Pribadi 2.
2. Perpres No. 82 Tahun 2022 – Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Jamkrindo is not only relying on technology, but is also committed to raising employee awareness of cyber threats through ongoing training and education. This effort is accompanied by regular evaluations to ensure that every potential risk can be properly identified and addressed. Through this approach, Jamkrindo not only safeguards its business operations but also demonstrates that cybersecurity is a priority that must be integrated into every part of the organization.

Disaster Recovery

Disaster Recovery is a recovery strategy implemented by the Company to restore operations following a disaster or any event that disrupts business continuity. In such situation, several recovery areas must be prioritized, with information technology (IT) services as being one of the most critical. As the Company becomes increasingly reliant on digital platforms to provide its services, the role of IT becomes even more crucial in supporting successful business operations. To ensure disaster preparedness, the company routinely conducts tests simulating various disaster scenarios, such as fires and earthquakes, with the aim of:

1. To ensure that all employees understand the procedures for handling disruptions when an IT disruption occurs.
2. Increase employee awareness of the importance of coordination and the division of roles and responsibilities in disaster management.
3. Measure employee readiness in handling IT disruptions, assess response time to incidents, and evaluate the transition using the Disaster Recovery Center.
4. Identify supporting infrastructure and facilities, including essential documents that need to be prepared and secured to execute prioritized activities immediately after a disruption occurs.
5. Identify factors that have the potential to hinder the handling of potential disorders.

The Company designs its disaster recovery plan by adhering to guidelines established by the government, regulators, and generally accepted best practices. In addition, the standards implemented by similar business units within the State-Owned Enterprises (BUMN) environment also serve as important references. Some of the references used in the preparation of this plan are listed below:

1. Law No. 27 of 2022 – Personal Data Protection 2.
2. Presidential Decree No. 82 of 2022 – Protection of Vital Information Infrastructure.
3. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 82 of 2012 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions.

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 – Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) No. 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) No. 10 Tahun 2020 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber.
8. POJK No. 04/05/2021 – Penerapan Manajemen Risiko TI oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
9. SEOJK No. 14/07/2014 – Kerahasiaan dan Keamanan Data.
10. SEOJK No. 22/05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
11. ISO 27001:2022 *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*.
12. NIST *Cybersecurity Framework*.
13. ISO 22301:2019 *Societal and Resilience-Business Continuity Management Systems – Requirements*.
14. ISO 22313:2020 *Security and Resilience – Business Continuity Management Systems – Guidance on the use of ISO 22301*.
15. Uji coba pemulihan bencana dilakukan secara menyeluruh dari tingkat BOD hingga unit kerja di kantor cabang. Dengan demikian, seluruh pegawai memiliki pemahaman akan peran dan tanggung jawab mereka saat terjadi bencana, serta mampu melaksanakan pemulihan layanan setelah bencana.

Road Map TI ke Depan

Dalam menghadapi dinamika dan kemajuan teknologi yang terus berkembang, Jamkrindo memahami pentingnya strategi Teknologi Informasi yang tangguh dan terarah. Oleh karena itu, Jamkrindo telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategi Teknologi Informasi tahun 2025 – 2029, yang telah dilakukan penyesuaian dengan IT Objective dan IT Strategy dari TI Holding IFG, yang kemudian diturunkan menjadi menjadi 6 (enam) IT Sub-Strategy. Hal ini digunakan untuk menjadi strategi yang lebih spesifik bagi Jamkrindo dalam memperjelas langkah – langkah yang diperlukan untuk menjalankan strategi utama yang telah disesuaikan dengan kemampuan operasional TI Jamkrindo.

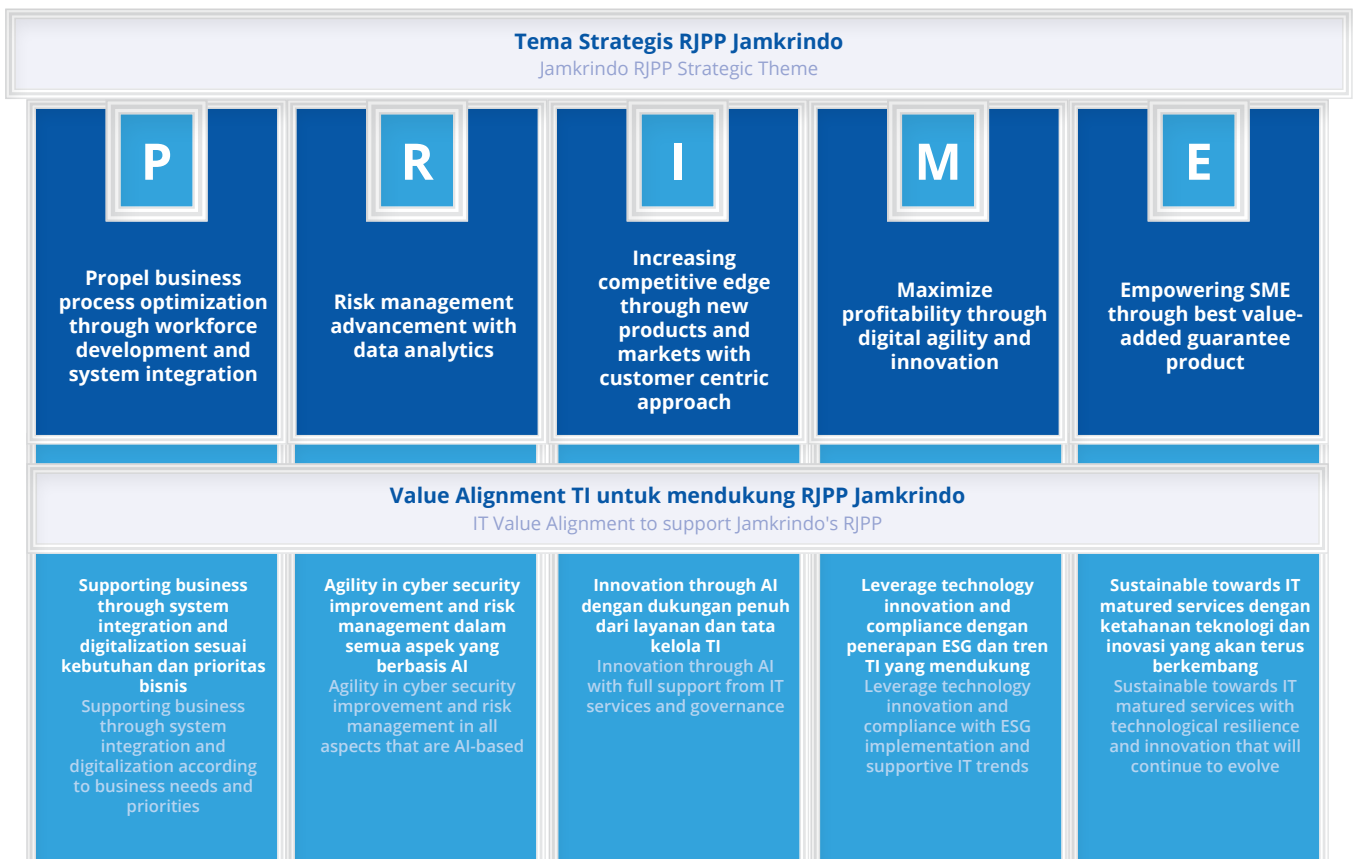
IT Road Map

To navigate the dynamics and rapid technological advancements, Jamkrindo recognizes the importance of a strong and well-structured Information Technology strategy. In response, Jamkrindo has formulated and established the Information Technology Strategy Plan for 2025-2029, which has been aligned with the IT Objectives and IT Strategy of IFG IT Holding. This strategic plan is further broken down into 6 (six) IT Sub-Strategies, providing a more specific and actionable framework tailored to Jamkrindo's operational IT capabilities. These sub-strategies serve as a roadmap to effectively implement the main strategy and ensure alignment with the Company's long-term technological goals.



Dalam upaya untuk memastikan keselarasan yang optimal antara inisiatif teknologi informasi dan strategi Perusahaan, tema strategi dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Jamkrindo periode 2025 – 2029 yang bertema **'PRIME'** diturunkan menjadi *value alignment* TI untuk mendukung tujuan strategis RJPP Jamkrindo setiap tahunnya.

To ensure optimal alignment between information technology initiatives and the Company's strategic direction, Jamkrindo has translated the strategic theme of its 2025–2029 Long-Term Plan (RJPP), titled **'PRIME'**, into a corresponding IT value alignment framework. This framework is designed to support the achievement of Jamkrindo's annual strategic objectives by ensuring that IT programs and investments directly contribute to the broader goals set out in the RJPP.

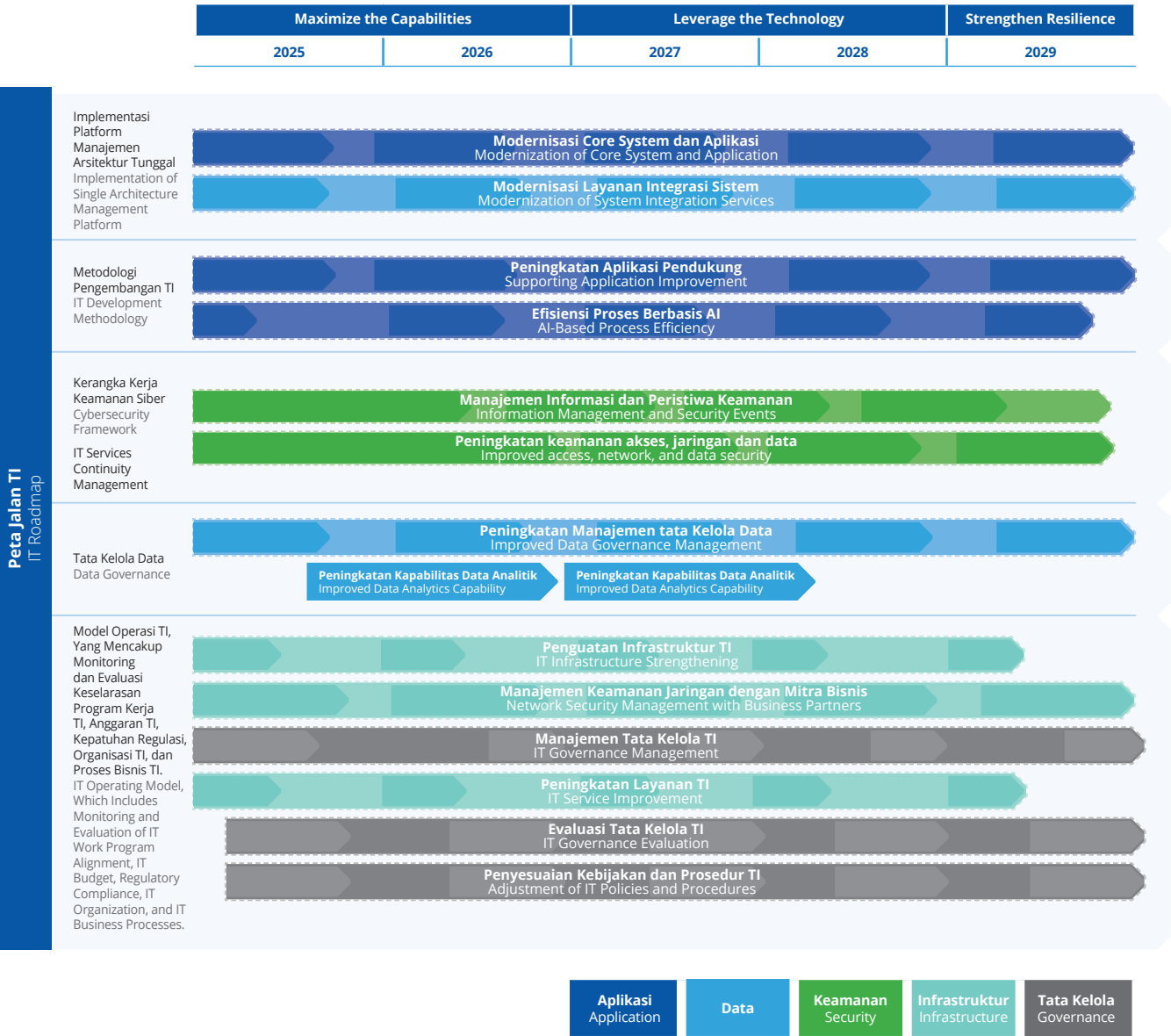


Untuk mendukung Rencana Strategis TI dan terus mendukung transformasi Jamkrindo, maka berikut Roadmap Program Kerja TI sesuai dengan Rencana Strategis TI 2025 – 2029.

To support the IT Strategic Plan and drive Jamkrindo's ongoing transformation, the following IT Work Program Roadmap has been formulated in alignment with the 2025–2029 IT Strategic Plan.

Peta Jalan TI
IT Roadmap

Roadmap Program Kerja RSTI Jamkrindo tahun 2025-2029
Jamkrindo RSTI Work Program Roadmap for 2025–2029



Berdasarkan value alignment TI dan roadmap program kerja pada Rencana Strategis TI 2025 – 2029 di atas diketahui bahwa pada tahun 2025 Unit Kerja TI memiliki fokus kerja **"Supporting business through system integration and digitalization sesuai kebutuhan dan prioritas bisnis"** dan tema kerja **"Maximize the Capabilities"**, yang berfokus pada pengembangan TI di Jamkrindo yang akan diarahkan pada realisasi dan kelanjutan dari program – program strategis yang telah dimulai pada tahun sebelumnya, seperti kelanjutan pengembangan program JaGuarS, J-Stream, J-Prime sekaligus implementasi inisiatif baru yang penting bagi Perusahaan. Adapun diantaranya pada tahun 2025, TI Jamkrindo akan menjalankan peningkatan Aplikasi Marketing Toolkit dan Sales berbasis CRM, serta implementasi Aplikasi POJK SLIK yang akan menjadi prioritas untuk memperkuat kapabilitas bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengembangan keamanan akses dan proteksi serta privasi data akan diutamakan untuk menjaga keandalan sistem dan kepercayaan pelanggan. Peningkatan security awareness secara berkelanjutan juga akan dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat budaya keamanan di seluruh organisasi.

Sebagai bagian dari Rencana Strategis TI dan implementasi program strategis perusahaan, tahun 2025 juga akan fokus pada evaluasi kesiapan penerapan *Generative AI* (Gen-AI) dan mekanisme perlindungan data berbasis teknologi, guna memastikan bahwa Jamkrindo siap mengadopsi teknologi *cutting-edge* dengan keamanan optimal. Selain itu, pembentukan Tim IFG Task Force untuk kesiapan IT Shared Service dan pembenahan struktur organisasi TI akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan koordinasi lintas fungsi. Proyek - proyek ini, baik yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya maupun inisiatif baru, dirancang untuk mendukung implementasi program strategis yang berkesinambungan, dengan tujuan akhir memperkuat posisi kompetitif Jamkrindo di pasar.

Based on the IT value alignment and work program roadmap in the IT Strategic Plan 2025 - 2029 above, it is known that in 2025 the IT Work Unit has a work focus of **"Supporting business through system integration and digitalization according to business needs and priorities"** and a work theme of **"Maximize the Capabilities"**, which focuses on IT development in Jamkrindo which will be directed at the realization and continuation of strategic programs that have been started in the previous year, such as the continued development of the JaGuarS, J-Stream, J-Prime programs as well as the implementation of new initiatives that are important to the Company. As for 2025, Jamkrindo's IT will implement the enhancement of CRM-based Marketing Toolkit and Sales Application, as well as the implementation of POJK SLIK Application which will be a priority to strengthen business capabilities and ensure regulatory compliance. Furthermore, the development of access security and data protection and privacy will be prioritized to maintain system reliability and customer trust. Continuous improvement of security awareness will also be carried out as an effort to strengthen the security culture throughout the organization.

As part of the IT Strategic Plan and implementation of the Company's strategic programs, 2025 will also focus on evaluating the readiness of Generative AI (Gen-AI) implementation and technology-based data protection mechanisms, to ensure that Jamkrindo is ready to adopt cutting-edge technology with optimal security. Furthermore, the establishment of the IFG Task Force Team for IT Shared Service readiness and revamping the IT organizational structure will be important steps in improving operational efficiency and cross-functional coordination. These projects, both continuations from the previous year and new initiatives, are designed to support the implementation of sustainable strategic programs, with the ultimate goal of strengthening Jamkrindo's competitive position in the market.

KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

Pedoman Perilaku atau Code of Conduct merupakan prinsip yang dirancang untuk mencerminkan budaya dan nilai-nilai utama Perusahaan. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan perilaku bagi seluruh individu yang mewakili Perusahaan, termasuk entitas anak, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, Code of Conduct juga menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menjalin kerja sama dan transaksi bisnis dengan Perusahaan, sehingga memastikan keselarasan dengan standar etika yang telah ditetapkan. Adapun penerapan Kode Etik bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika usaha dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Jamkrindo yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak;
2. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Jamkrindo;
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Jamkrindo;
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Jamkrindo terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.
5. Kode etik Perusahaan diberlakukan untuk seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta karyawan, tanpa memandang jenjang jabatan maupun parameter lainnya.

Visi dan Misi Perusahaan sebagai Landasan Utama

Sebagai pilar utama dalam menciptakan keselarasan di lingkungan kerja, penerapan kode etik perusahaan menjadi landasan yang mempersatukan seluruh elemen organisasi. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan setiap langkah yang diambil sejalan dengan visi, misi, dan budaya perusahaan. Dengan internalisasi nilai-nilai tersebut, setiap individu di Jamkrindo dapat bergerak bersama menuju tujuan bersama, menciptakan perilaku kerja yang konsisten dan berintegritas.

The Code of Conduct is a set of principles designed to reflect the Company's culture and core values. It serves as a behavioral guide for all individuals representing the Company, including its subsidiaries, in their daily activities. Furthermore, the Code of Conduct also serves as a reference for stakeholders in establishing partnerships and conducting business transactions with the Company, ensuring alignment with the established ethical standards. The implementation of the Code of Ethics aims to:

1. Serve as a guidebook containing standards for business ethics and code of conduct for all Jamkrindo personnel must adhere in daily interactions with all parties;
2. Provide an ethical basis for thinking and making decisions related to Jamkrindo;
3. Foster and support a healthy, positive work environment and promotes ethical behaviors from all Jamkrindo personnel;
4. Increase the awareness of the Company and its personnel regarding business ethics values through the development of discussions and discourses on ethics.
5. The Company's code of ethics applies to all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees, regardless of rank or other parameters.

Company Vision and Missions as the Main Foundation

As a fundamental pillar in fostering workplace harmony, the implementation of the Company's code of Ethics forms the foundation that unites all elements of the organization. The code of ethics serves as a guide to ensure that every action taken aligns with the Company's vision, mission, and culture. Through the internalization of these values, every individual at Jamkrindo can move together toward a common goal, fostering consistent and integrity-driven work behaviors.

Visi Vision

"Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional"
"To become the first choice of business actors in guarantee services to support growth and equity of the national economy."

Misi Mission

Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.
Improving the financial accessibility of MSMEs and Cooperatives through the provision of innovative, competitive guarantees with professional, effective and efficient services on a sustainable basis.

Budaya Perusahaan dan Internalisasi Budaya AKHLAK

Corporate Culture and the Internalization of AKHLAK Values

Budaya Perusahaan Corporate Culture

AKHLAK

Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

Trusted

Uphold the given trust

Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Competent

Continuously learn and develop capabilities

Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

Harmonious

Care to each other and respect differences

Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Loyal

Prioritize dedication for Nation and Country

Adaptif

Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Adaptive

Continuously innovate to respond and make change

Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis

Collaborative

Build strategic alliance

Dalam rangka mengintegrasikan nilai-nilai AKHLAK ke dalam budaya kerja Perusahaan, pada 10 Agustus 2020, Perusahaan secara resmi membentuk Tim Budaya melalui Surat Perintah Tugas No. 069/SPT/4/VIII/2020. Tim ini terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu Tim Executive, Tim Khusus, dan Tim Implementasi. Masing-masing tim memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Peran dan tanggung jawab *Executive*, antara lain:

1. Mendemonstrasikan komitmen dan leadership pada implementasi core values AKHLAK sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya;
2. Menetapkan Kebijakan dan strategi budaya AKHLAK;
3. Memberikan dukungan penuh dalam setiap tahapan dan pelaksanaan kerangka kerja budaya AKHLAK;
4. Memberikan arahan dan pengawasan untuk menjamin implementasi culture AKHLAK yang efektif sesuai dengan target yang ditetapkan;

In order to integrate AKHLAK values into the Company's work culture, on August 10, 2020, the Company officially established a Culture Team through Assignment Letter No. 069/SPT/4/VIII/2020. This team is composed of three main groups: the Executive Team, the Special Team, and the Implementation Team. Each team has designated roles and responsibilities as outlined below:

The roles and responsibilities of the Executive Team include:

1. Demonstrating commitment and leadership in the implementation of AKHLAK's core values according to their roles and responsibilities;
2. Establishing AKHLAK cultural policies and strategies;
3. Providing full support in every stage and implementation of the AKHLAK cultural framework;
4. Providing guidance and supervision to ensure the implementation of an effective AKHLAK culture in accordance with the targets set;

5. Menetapkan Ketua, Wakil Ketua (Ketua Alternatif), Anggota *Executive*, dan Tim yang dibentuk terkait dengan implementasi *core values* AKHLAK;
6. Memastikan bahwa kebijakan dan tujuan *culture* AKHLAK yang tersedia sejalan dengan tujuan strategis Perusahaan dan bisnis Perusahaan;
7. Mengkomunikasikan pentingnya *culture* AKHLAK yang efektif sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
8. Mengarahkan dan mendukung Karyawan untuk berkontribusi pada implementasi Kebijakan *culture* AKHLAK yang efektif.

Peran dan tanggung jawab Team Khusus, antara lain:

1. Merumuskan implementasi *core values* AKHLAK melalui program Employee Engagement;
2. Berkoordinasi dengan *counterpart expertise* budaya dan *Employee Engagement*;
3. Mengkomunikasikan program-program implementasi budaya AKHLAK kepada *executive*;
4. Memastikan pelaksanaan program implementasi berjalan sesuai program kerja;
5. Evaluasi, mentoring dan pelaporan program implementasi kepada *executive*.

Peran dan tanggung jawab Tim Implementasi, antara lain:

1. Leader
 - a. Memberikan *awareness* bagi tim tentang *core value* AKHLAK;
 - b. Memastikan *core values* AKHLAK menjadi perilaku tim;
 - c. Memberikan *coaching/mentoring/feedback* terhadap perilaku yang belum sesuai dengan *core values* AKHLAK;
 - d. Memastikan tim telah melakukan pengisian *dashboard* perilaku AKHLAK sebagai wujud implementasi *core values* AKHLAK;
 - e. Evaluasi dan *monitoring*;
 - f. Menjadi *role model core values* AKHLAK.
2. PIC
 - a. Memimpin koordinasi antara unit kerjanya dengan tim khusus;
 - b. Menjadi motor/penggerak perubahan perilaku yang sesuai dengan *core values* AKHLAK.
3. Captain
 - a. Memberikan motivasi agar karyawan lain berpartisipasi dan mengimplementasikan perilaku AKHLAK menjadi perilaku baru dan *belief (personal value)* yang melekat pada diri masing-masing karyawan;
 - b. Memberikan contoh perubahan perilaku AKHLAK kepada seluruh Insan Jamkrindo di Unit Kerja masing-masing;
 - c. Berkoordinasi dan memberikan *feedback* kepada tim khusus terkait implementasi *Culture* AKHLAK di unit kerja masing-masing;
 - d. Memberikan laporan baik lisan maupun tulisan kepada Divisi MSDM terkait implementasi perilaku AKHLAK di masing-masing Unit Kerja dan usulan koreksinya untuk perbaikan baik pada tingkat unit kerja maupun pada tingkat korporasi.

5. Appointing the Chairman, Deputy Chair (Alternative Chairman), Executive Members, and the Team formed related to the implementation of AKHLAK's core values;
6. Ensuring that available AKHLAK culture policies and objectives are in line with the Company's strategic objectives and business;
7. Communicating the importance of an effective AKHLAK culture according to the needs of the Company;
8. Directing and supporting employees to contribute to the implementation of an effective AKHLAK culture policy.

The roles and responsibilities of the Special Team include:

1. Formulating the AKHLAK's core values implementation through the Employee Engagement program;
2. Coordinating with cultural counterpart experts and Employee Engagement;
3. Communicating AKHLAK cultural implementation programs to the executive team;
4. Ensuring the success implementation program based on the work program;
5. Evaluating, mentoring, and reporting program implementation to the executive team.

The roles and responsibilities of the the Implementation Team include:

1. Leader
 - a. Building the team's awareness regarding AKHLAK's core values;
 - b. Ensuring the transformation of AKHLAK's core values into the team behavior;
 - c. Providing coaching /mentoring/feedback on behavior inaligned with AKHLAK's core values;
 - d. Ensure that the team completes the AKHLAK behavior dashboard as a part of the implementation of AKHLAK's core values;
 - e. Evaluating and monitoring;
 - f. Become a role model for AKHLAK's core values.
2. PIC
 - a. Lead the coordination between their respective work units and special teams;
 - b. Become the driving force behind the behavior changes in accordance with AKHLAK's core values.
3. Captain
 - a. Providing motivation for employees so that they can participate and implement AKHLAK behavior as new behaviors and beliefs (personal value) attaching to each other;
 - b. Provide examples of changes in AKHLAK behavior to all Jamkrindo personnel within their respective work units;
 - c. Coordinate with and provide feedback to special teams regarding the implementation of AKHLAK in their respective work units;
 - d. Provide oral and written reports to the HCM Division regarding the implementation of AKHLAK behavior in each Work Unit, along with suggestions for improvement at both the work unit and at the corporate level

Pedoman Perilaku Jamkrindo

Perusahaan senantiasa berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berintegritas melalui penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kemandirian, Perusahaan berkomitmen untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sebagai bagian dari kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Komitmen tersebut tercermin dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Jamkrindo No. 02/SKB/1/XII/2020 dan Kep-09/DK-JAMKRINDO/XII/2020 pada 30 Desember 2020. Standar perilaku yang diterapkan mencakup transparansi, pengungkapan informasi, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan sebagai landasan etika dalam menjalankan kegiatan usaha.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama;
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi);
4. Memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra;
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik.

Isi Pedoman Perilaku atau Code of Conduct Perusahaan antara lain adalah:

Jamkrindo Code of Conduct

The Company consistently strives to create a healthy and integrity-driven business environment through the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. By prioritizing transparency, accountability, fairness, and independence, the Company is committed to supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and cooperatives as part of its contribution to the national economy.

This commitment is reflected in the Code of Conduct that was ratified through the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of Jamkrindo No. 02/SKB/1/XII/2020 and Kep-09/DK-JAMKRINDO/XII/2020 on December 30, 2020. The behavior standards implemented include transparency, information disclosure, accountability, independence, and fairness as the ethical foundation for conducting business activities.

Through the implementation of these principles, the Company is committed to:

1. Placing customer satisfaction as the top priority;
2. Implementing Ethical Standards in all business activities based on the principles of Good Corporate Governance;
3. Always proportionately providing high quality services to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives);
4. Treating all stakeholders as partners;
5. Companies must serve and try to anticipate the needs of stakeholders properly.

The contents of the Company's Code of Conduct include:

Etika Perusahaan Corporate Ethics

Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan

1. Perusahaan harus memperlakukan stakeholder secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak stakeholder.
2. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi stakeholder.
3. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data.
4. Perusahaan harus mematikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada stakeholder.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan stakeholder dengan baik.

Corporate Ethics with Stakeholders

1. The Company must treat stakeholders with fairness and respect by fulfilling stakeholder rights.
2. The Company is committed to improving performance and maintain a positive image in order to increase value for stakeholders.
3. The Company is obliged to protect the confidentiality of information and data.
4. The Company must refrain from providing misleading information to stakeholders.
5. The Company must proactively serve stakeholders and anticipate their needs effectively.

Etika Perusahaan Corporate Ethics

Etika Perusahaan dengan Karyawan

1. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.
2. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Karyawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.
4. Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan.
5. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif.
6. Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
7. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan mengizinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.

Corporate Ethics with Employees

1. Company must prioritize health, work safety, quality improvement and employee welfare by fulfilling employee rights proportionally, ensuring employees are motivated to demonstrate maximum performance.
2. The Company provides equal employment opportunities to all employees regardless of background, ethnicity, religion, gender, age, disability, or other special circumstances protected by laws and regulations.
3. The Company offers equal opportunities for employee self-development.
4. The Company awards recognition based on employee competence and performance.
5. The Company fosters a conducive and productive work environment, promoting effective communication, and strong working relationship with superiors, subordinates and colleagues.
6. The Company must respect human dignity, without regard to differences in ethnicity, religion, gender, age, disability, or other special conditions protected by laws and regulations.
7. The Company must uphold the general principles of humanity, rights, and obligations, based on applicable laws and regulations.
8. The Company permits employees to external activities for social causes, professional membership, associations, or similar groups.

Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa

1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa (supplier) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.
4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Corporate Ethics with Goods and Service Providers

1. The Company treats goods or service providers (suppliers) fairly and impartially, adhering to sound business principles and applicable regulations throughout the procurement process.
2. The Company conducts the procurement process transparently and accountably, in accordance with the applicable regulations, and by adhering to the principles of effectiveness, efficiency and economy.
3. The Company engages goods and services providers based on written agreements.
4. The Company maintains the confidentiality of information and documents related to the procurement of goods and services in compliance with applicable laws and regulations.
5. The Company refrains from engaging in corruption, collusion and nepotism in the procurement of goods and services.

Etika Perusahaan Corporate Ethics

Etika Perusahaan dengan Pesaing

1. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.
2. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.
3. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi.
4. Perusahaan tidak melakukan kerja sama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.

Corporate Ethics with Competitors

1. The Company must engage in fair business competition, prioritizing product excellence and service quality.
2. The Company must avoid misleading behavior and dishonest practices.
3. The Company opposes agreements that are anti-competitive in nature.
4. The Company refrains from cooperating without acceptable and reasonable justification.

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

1. Perusahaan wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
3. Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Corporate Ethics with the Government

1. The Company must comply with the applicable laws and regulations.
2. The Company must maintain positive relations and open communication with the government.
3. The Company must support government programs in accordance with applicable laws and regulations.

Etika Perusahaan dengan Masyarakat

1. Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak asasi manusia.
3. Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
4. Perusahaan mengoptimalkan penyaluran program-program tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).
5. Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Corporate Ethics with Society

1. The Company maintains a clean and healthy environment.
2. The Company supports social, cultural, traditional, religious, and human rights activities.
3. The Company participates in empowering the local community's economy.
4. The Company optimizes the distribution of its social responsibility programs to the community (Partnership and Community Development Program).
5. The Company refrains from actions that lead to discrimination based on ethnicity, religion, race, and social groups.

Etika Perusahaan dengan Media Massa

1. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.
2. Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerja sama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.
3. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.

Corporate Ethics with Mass Media

1. The Company must provide relevant information.
2. The Company treats the mass media a partner, fostering a cooperative relationship based on mutual respect and mutual benefit.
3. The Company welcomes and responds proportionally to constructive criticism submitted through the mass media.

Standar Perilaku Insan Jamkrindo Jamkrindo Personnel Standard of Behavior

Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi

1. Seluruh Insan Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian.
2. Seluruh Insan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Seluruh Insan Perusahaan harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Personal and Professional Responsibility

1. All Company personnel must comply with the regulations governing employment within the Company.
2. All Company personnel must understand and adhere to all provisions issued by the Company and regulators, in accordance with their duties and responsibilities.
3. All Company personnel must demonstrate dedication, loyalty, proactivity, and conscientious in their work, while continually striving to enhance their knowledge and skills for the successful execution of their duties.
4. All Company personnel must prioritize the interests of the Company over personal or group interests.

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif

1. Seluruh Insan Perusahaan harus bersikap santun dalam berkomunikasi.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status.
5. Seluruh Insan Perusahaan dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor):
 - a. Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkoba atau obat-obatan terlarang.
 - b. Mengonsumsi minuman beralkohol.
 - c. Melakukan semua bentuk perjudian.
 - d. Melakukan semua bentuk tindakan kriminal.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib memelihara lingkungan yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespon bunyi telepon atau tanda panggilan pada kesempatan pertama.

Creating a Conducive Work Environment

1. All Company personnel must communicate politely at all times.
2. All Company personnel must uphold ethical values in their working relationships with superiors, subordinates and colleagues.
3. All Company personnel must avoid actions or speech that involve harassment, humiliation, ridicule, slander, and condescension.
4. All Company personnel are prohibited from engaging extramarital affairs and acts of sexual harassment, whether verbal, visual, or physical, including violations of privacy and status.
5. All Company personnel are prohibited (both in the office and outside the office) from:
 - a. Using, possessing, distributing or selling narcotics or illegal drugs.
 - b. Consuming alcoholic beverages.
 - c. Engaging all forms of gambling.
 - d. Committing any forms of criminal acts.
6. All Company personnel must maintain a healthy environment.
7. All Company personnel strive to use the telephone efficiently and effectively, avoid excessive personal use, and respond promptly to calls or alerts.

Standar Perilaku Insan Jamkrindo

Jamkrindo Personnel Standard of Behavior

Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak Jujur

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan.
3. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperjanjikan keuntungan pribadi dengan pihak lain.
5. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya.
6. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.
8. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan mark up harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
9. Seluruh Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.

Avoid All Conflicts of Interest and Their Potential to Trigger Unhealthy and Dishonest Behavior

1. All Company personnel must dedicate their energy, thoughts, and abilities to the interests of the Company. Work or activities outside of office hours are permitted, provided they do not exploit the Company's name or interests.
2. All Company personnel who are no longer active or have resigned are prohibited from using any form of copyright, intellectual property, Company data, or information, and from and carrying out activities on behalf of the Company.
3. All Company personnel may not invest Company funds for personal or groups interest.
4. All Company personnel may not invest Company funds in arrangements that promise personal benefits with other parties.
5. All Company personnel may not accept bribes or payments in any form from parties directly or indirectly related to their position or duties.
6. All Company personnel may not accept or offer gifts of any kind that could reasonably be suspected of influencing sound business decisions.
7. All Company personnel are prohibited from acting as goods and service providers, directly or indirectly selling goods, rights or services to the Company.
8. All Company personnel are prohibited from inflating sales or purchase prices for personal or third-party benefit.
9. All Company personnel are prohibited from abusing their position to grant preferential treatment to any parties.

Standar Perilaku Insan Jamkrindo Jamkrindo Personnel Standard of Behavior

Menjaga Aset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan aset sesuai wewenangnya masing-masing.
3. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga data dan informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan manapun.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Safeguarding Assets, Property and Information for the Interests of the Company

1. All Company personnel must use Company assets solely for the benefit of the Company and are prohibited from using them for personal or group interests.
2. All Company personnel are responsible for protecting the Company's assets from theft, embezzlement, and misuse, in accordance with their respective authorities.
3. All Company personnel must safeguard data, information, and related devices with their authority to prevent misuse, damage, theft, or unauthorized access by irresponsible parties.
4. All Company personnel are prohibited from using the name, logo, copyright and other Company-owned accessories for personal gain.
5. All Company personnel must maintain the confidentiality of the Company's internal information and must not use it for personal, familial, groups, or any other interests.
6. All Company personnel are required to prepare and present reports and data correctly and honestly to the relevant parties in accordance with applicable laws and regulations.

Mematuhi Hukum dan Perundang-Undangan

1. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan insider trading guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan atau praktik yang bersifat pencucian uang (money laundering).
3. Seluruh Insan Perusahaan dilarang membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat:
 - a. Tidak mengatasnamakan Perusahaan.
 - b. Tidak menggunakan aset Perusahaan dalam aktivitas politiknya.
 - c. Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan.
 - d. Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Compliance with Laws and Regulations

1. All Company personnel are prohibited from engaging in insider trading activities for personal gain or acting as brokers, prospectors or other intermediaries for personal or group interests in transactions involving the Company.
2. All Company personnel are prohibited from engaging in or becoming involved in investments activities or money laundering practices.
3. All Company personnel are prohibited from making agreements or statements, either directly or indirectly, that suggest the Company has an affiliation with a political party. However, the Company to the right of all personnel to exercise their political aspirations with the following conditions:
 - a. They must not act on behalf of the Company
 - b. They must not use Company assets in its political activities.
 - c. They must not make any contribution on behalf of the Company.
 - d. Holding a position in a political party or becoming a legislative candidate/member is regarded as a resignation from the Company.
4. All Company personnel are strictly prohibited from engaging in acts of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).

Internalisasi dan Penegakan Code of Conduct

Pemahaman dan penerapan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dirancang untuk membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai integritas dan profesionalisme di lingkungan Perusahaan. Upaya ini dilakukan melalui program sosialisasi yang menyentuh seluruh lapisan organisasi, memastikan setiap individu memiliki akses penuh terhadap informasi terkait pedoman tersebut.

Penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dilakukan melalui mekanisme di mana setiap individu di Perusahaan diwajibkan menandatangani surat Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan seluruh insan Perusahaan wajib mengerti, memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

1. Saluran pengaduan
 - a. Apabila ditemui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk segera melaporkan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor kepada Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. Permasalahan perilaku Dewan Komisaris dan Direksi, penanganannya dilakukan oleh Menteri;
 - c. Permasalahan perilaku pegawai, penanganannya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku;
 - d. Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungannya dengan masyarakat, penanganannya tetap mengacu kepada ketentuan kepegawaian yang berlaku dalam Perusahaan;
 - e. Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM) berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional.
2. Mekanisme Penanganan atas Laporan Pelanggaran Pedoman Perilaku
 - a. Atasan langsung atau unit kerja yang ditunjuk untuk mengelola penanganan atas laporan pelanggaran berdasarkan laporan yang diterima melakukan identifikasi permasalahan analisis, mengumpulkan informasi tambahan yang relevan serta merahasiakan identitas pelapor;
 - b. Hasil analisis tersebut apabila dipandang perlu dapat dilaporkan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Penyebarluasan Etika Perusahaan
Upaya sosialisasi dan penyebarluasan Etika Perusahaan secara merata kepada seluruh elemen Perusahaan dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:
 - a. Pemberian sosialisasi, training dan seminar bagi karyawan;
 - b. Pemasangan banner maupun spanduk;
 - c. Rapat evaluasi kinerja;
 - d. Sosialisasi saat proses perekrutan

Internalization and Enforcement of the Code of Conduct

Understanding and implementing the Code of Conduct is intended to foster a work culture rooted in the values of integrity and professionalism within the Company. This effort is conducted through outreach programs that reach all levels of the organization, ensuring that every individual has full access to information related to the code of conduct.

The enforcement of the Code of Conduct is carried out through a mechanism where every individual in the Company is required to sign a Statement of Commitment to Adhere to the Code of Conduct. All members of the Company are also obliged to understand, internalize, and implement the Code of Conduct in their daily activities.

1. Complaint channels
 - a. If a violation of the Code of Conduct is found within the Company, every employee is required to immediately report in writing, stating the identity of the complainant, to the Division in charge of Human Resources (HR);
 - b. Behavioural issues involving the Board of Commissioners and Board of Directors are handled by the Minister;
 - c. Behavioural issues involving employees are addressed by the immediate superior, following the applicable mechanism;
 - d. Violations of the Code of Conduct related to the community are handled with reference to the Company's employment regulations;
 - e. The Human Resources (HR) Division is responsible for responding promptly and proportionally to every question, notification, and report it receives.
2. Mechanism for Handling Reports of Violation of the Code of Conduct
 - a. The direct supervisor or work unit appointed to handle reports of violations must identify and analyze the problems, collect additional relevant information, and maintain the confidentiality of the complainant's identity;
 - b. If deemed necessary, the results of the analysis may be reported to the Board of Directors for further action according to the applicable procedures.
3. Dissemination of Corporate Ethics
Efforts to socialize and promote the Company's Ethics across all levels of the organization are carried out through various strategies, as follows:
 - a. Providing dissemination activities, training sessions, and seminars for employees;
 - b. Installing banners;
 - c. Carrying out performance evaluation meetings;
 - d. Disseminating information during the recruitment process.

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN KARYAWAN PT JAMKRINDO

Bersa yang beranda tanggal di bawah ini :

Nama _____
NPP _____
Jabatan _____
Unit Kerja _____
Status Kepegawaian _____

Mendeklarasikan bahwa, saya :

1. Telah menerima dan memahami Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) sebagai bagian dari Sistem Manajemen Anti Penyalahgunaan, Pengendalian Kualitas dan Strategi Anti-Fraud.
2. Telah membaca dan memahami isi dari Peraturan Perusahaan Perilaku Etika (Code of Conduct), Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyalahgunaan, Pengendalian Kualitas dan Strategi Anti-Fraud.
3. Berencana mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan Perusahaan sebagaimana terdapat dalam Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) sebagai bagian dari Sistem Manajemen Anti Penyalahgunaan, Pengendalian Kualitas dan Strategi Anti-Fraud.
4. Saya menerima konsekuensi dan sanksi dari Perusahaan apabila melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct), Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyalahgunaan, Pengendalian Kualitas dan Strategi Anti-Fraud.
5. Akan segera mengkomunikasikan dan/atau melaporkan kepada Dirusi yang berwenang dengan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bukti yang telah diterima untuk memastikan penerapan Good Corporate Governance (GCG) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, apabila menerima pemantauan dan/atau pelanggaran ketentuan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) sebagai bagian dari Sistem Manajemen Anti Penyalahgunaan, Pengendalian Kualitas dan Strategi Anti-Fraud.

Dengan pernyataan ini saya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan tanpa paksaan dari siapapun.

Pernyataan, tanggal (bulan) tahun

Nama
NPP

Pengenalan dan pemahaman *Code of Conduct* bertujuan untuk memastikan setiap Insan Perusahaan mampu menjalankan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam aktivitas kerja sehari-hari, sehingga dapat meminimalkan potensi perilaku yang tidak sesuai. Sepanjang tahun 2024, kegiatan edukasi mengenai Kode Etik dan penerapan prinsip GCG telah dilaksanakan di beberapa kantor cabang, yaitu:

The introduction and understanding of the Code of Conduct aim to ensure that every individual within the Company consistently applies the principles of Good Corporate Governance (GCG) in their daily work activities, thereby minimizing the potential for inappropriate behavior. Throughout 2024, educational activities regarding the Code of Conduct and the implementation of GCG principles have been implemented at several branch offices, namely:

No.	Kantor Cabang Branch Office	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1.	Kantor Cabang Bandar Lampung Bandar Lampung Branch Office	22 Mei 2024 May 22, 2024
2.	Kantor Cabang Jakarta Jakarta Branch Office	22 Mei 2024 May 22, 2024
3.	Kantor Cabang Bandung Bandung Branch Office	22 Mei 2024 May 22, 2024
4.	Kantor Cabang Semarang Semarang Branch Office	22 Mei 2024 May 22, 2024
5.	Kantor Cabang Yogyakarta Yogyakarta Branch Office	22 Mei 2024 May 22, 2024

4. Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Etika Perusahaan
Adanya sanksi terhadap pelanggaran etika Perusahaan berfungsi untuk menjamin tegaknya aturan yang dibuat demi terciptanya kedisiplinan dan profesionalisme bagi seluruh Insan Perusahaan. penegakan dan pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali. Adapun sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.

4. Enforcement and Sanctions for Violation of Corporate Ethics
The enforcement of sanctions for violations of corporate ethics aims to ensure the consistent application of rules designed to foster discipline and professionalism for all Company personnel. Sanctions are applied uniformly without exception. The sanction imposed for violations is in the form of a warning letter.

5. Sanksi Administrasi

Setiap karyawan wajib:

- mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi Pegawai BUMN;
- mentaati semua peraturan perusahaan, baik berupa perintah maupun larangan secara tertulis atau secara lisan dalam batas pengertian yang layak dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan; dan
- menunaikan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan penugasan oleh Direksi dan atasan masing-masing pegawai dengan mementingkan kepentingan Perusahaan.

Sanksi administrasi bagi karyawan Jamkrindo diberikan berdasarkan Peraturan Direksi No. 36/Per-Dir/4/XII/2020 tentang Sanksi Pelanggaran Peraturan Perusahaan. Sanksi ini diberlakukan untuk karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin. Sebagai upaya untuk menegakkan Pedoman Perilaku, berikut adalah rincian sanksi yang diterapkan terkait penegakan Kode Etik selama tiga (3) tahun terakhir:

5. Administrative Sanctions

Every employee must:

- comply with all rules and regulations set by the Government for SOE's Employees;
- comply with all Company regulations, including written and verbal instructions, provided they are properly understood and not contrary to the norms of decency; and
- carry out their duties and responsibilities to the best of their ability, based on their assignments from the Board of Directors and immediate supervisors, while prioritizing the interests of the Company.

Administrative sanctions for Jamkrindo employees refer to the Board of Directors Regulation No. 36/Per-Dir/4/XII/2020 concerning Sanctions for Violations of Company Regulations. These sanctions are imposed on employees who commit disciplinary violations. As part of the Company's effort to uphold the Code of Conduct, the following outlines the sanctions applied related to the enforcement of the Code of Conduct for the last 3 (three) years:

Jenis Sanksi Type of Sanction	2024	2023	2022
Teguran Reprimand	-	1	5
Peringatan 1 Warning Letter 1	1	3	3
Peringatan 2 Warning Letter 2	-	1	5
Peringatan 3 Warning Letter 3	-	1	-
Pengunduran Diri Resignation	1	-	-
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Termination of Employment	-	-	-

KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA

PERFORMANCE-BASED LONG-TERM COMPENSATION

Jamkrindo adalah bagian dari Indonesia Financial Group (IFG), yang merupakan *holding* yang bergerak di bidang Asuransi, Penjaminan, dan Investasi. Perusahaan ini juga tidak terlibat dalam perdagangan saham di bursa efek manapun. Oleh karena itu, tidak ada informasi mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP) dan/atau manajemen (MSOP) yang dapat disertakan dalam Laporan Tahunan ini.

Jamkrindo is a member of the Indonesia Financial Group (IFG), a holding company engaged in the fields of Insurance, Guarantee, and Investment. The Company is also not involved in stock trading on any stock exchange. Therefore, there is no information regarding employee stock ownership programs (ESOP) and/or management stock ownership programs (MSOP) to be included in this Annual Report

KOMITMEN TERHADAP ANTI KORUPSI

COMMITMENT TO ANTI-CORRUPTION

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan berkomitmen untuk mencegah konflik kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. Sebagai bagian dari upaya ini, Perusahaan telah menetapkan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi melalui Peraturan Direksi 31/Per-Dir/4/XII/2024 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.

Pengendalian gratifikasi sangat penting dalam pelaksanaan Kode Etik, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena berkaitan langsung dengan pembatasan yang jelas antara gratifikasi, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain, yang dapat memicu penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan juga mengatur secara tegas mengenai pengkategorian gratifikasi yang terkait dengan kedinasan, serta memisahkan antara gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan.

Melalui kebijakan ini, Perusahaan tidak hanya berupaya menerapkan prinsip GCG yang mendukung pengelolaan korporasi yang sehat, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi setiap individu di Jamkrindo untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta menjauhkan diri dari potensi praktik korupsi.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Jamkrindo terus berkomitmen untuk melakukan inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam upaya mendukung tercapainya pelayanan prima, Jamkrindo menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan SNI ISO 37001:2016, yang menjadi pedoman bagi seluruh karyawan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus penyuapan. Sebagai bagian dari implementasinya, perusahaan telah menetapkan Peraturan Direksi No. 30/Per-Dir/4/XII/2024 yang mengatur Kebijakan Penerapan SMAP.

Tujuan utama dari penerapan manajemen anti penyuapan ini adalah untuk membantu manajemen operasional dalam mencari solusi terbaik menghadapi potensi kecurangan (*fraud*). Selain itu, hal ini mendorong seluruh insan Jamkrindo agar membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan mengedepankan nilai moral yang tinggi serta mematuhi peraturan yang berlaku. Kebijakan ini bertujuan menciptakan budaya kepatuhan yang dapat mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi potensi

Gratification Control Policy

As part of its commitment to good corporate governance, the Company is dedicated to preventing conflicts of interest and the abuse of authority and position by implementing gratification control policy. As part of this effort, the Company has established the Gratification Control Policy through the Board of Directors Regulation 31/Per-Dir/4/XII/2024.

Gratification control plays a vital role in enforcing the Code of Conduct, as it establishes clear boundaries regarding gifts, gratuities, or any form of giving from third parties, that could potentially lead to the misuse of authority and position. The Company's Gratification Control Policy sets strictly guidelines for categorizing gratifications related to official duties and distinguishes between those that must be reported and those that do not require reporting.

Through the implementation of this policy, the Company not only reinforces the principles of GCG in support of sound corporate management but also provides a strong foundation for all individuals at Jamkrindo to avoid the abuse of power and and prevent potential corruption practices.

Anti-Bribery Management System (SMAP)

Jamkrindo remains committed to driving innovation and delivering the best services to the community. To support the achievement of exceptional service, the Company implements an Anti-Bribery Management System (SMAP) based on SNI ISO 37001:2016, which serves as a guideline for all employees. The Anti-Bribery Management System is designed to prevent, detect, and address bribery cases. In line with this, the Company has established the Board of Directors Regulation No. 30/Per-Dir/4/XII/2024, which outlines the Policy on the Implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP).

The primary goal of implementing this system is to assist operational management in identifying the best solutions to address potential fraud. It also encourages all Jamkrindo personnel to make decisions and take actions grounded in strong moral values while adhering with applicable regulations. This policy aims to foster a culture of compliance that can consistently and efficiently identify, prevent, and address potential fraud without compromising performance. The anti-bribery policy

kecurangan secara konsisten dan efisien, tanpa mengurangi kinerja. Kebijakan anti penyuapan ini berlaku untuk seluruh insan Jamkrindo, dan perusahaan akan memastikan bahwa kebijakan ini diinformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), agar mereka memahami dan melaksanakan pedoman SMAP Jamkrindo sebagai bagian dari standar kerja perusahaan.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Untuk memastikan karyawan tetap berkomitmen pada penerapan kebijakan anti korupsi, Jamkrindo secara aktif melaksanakan berbagai program sosialisasi dan pelatihan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan tindak kecurangan, penyuapan, dan korupsi. Adapun program yang diselenggarakan meliputi *In-House training* dan sosialisasi terkait Anti Korupsi, yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Nama Pelatihan/Sosialisasi Name of Training/Dissemination Program	Tanggal Date	Materi Kegiatan Training Materials	Jumlah Peserta Number of Participants
Sosialisasi Peraturan Divisi Kepatuhan Dissemination of Compliance Division Regulation	Jumat, 17 Januari 2025 Friday, January 17, 2025	Sosialisasi Peraturan Divisi Kepatuhan Dissemination of Compliance Division Regulation	85 Peserta 85 Attendees
Awareness & Requirement Training Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001:2016 Tahun 2024 Awareness & Requirement Training for SMAP SNI ISO 37001:2016 Certification of 2024	Kamis, 21 Maret 2024 Thursday, March 21, 2024	Awareness & Requirement Training Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001:2016 Awareness & Requirements Training for SMAP SNI ISO 37001:2016 Certification	100 Peserta 100 Attendees
Pelatihan Internal Audit ISO 37001 SMAP Tahun 2024 Internal Audit Training for ISO 37001 SMAP of 2024	Jumat, 31 Mei 2024 Friday, May 31, 2024	Pelatihan Internal Audit ISO 37001 SMAP Tahun 2024 Internal Audit Training for ISO 37001 SMAP of 2024	87 Peserta 87 Attendees
Undangan Workshop Governance, Risk Management and Compliance dan Sosialisasi Anti Fraud dan Risiko Penyuapan Invitation for Governance, Risk Management, and Compliance Workshop. And Anti Fraud and Bribery Risk Dissemination	Kamis 6 Juni 2024 Thursday, June 6, 2024	Undangan Workshop Governance, Risk Management and Compliance dan Sosialisasi Anti Fraud dan Risiko Penyuapan Invitation for Governance, Risk Management, and Compliance Workshop. And Anti Fraud and Bribery Risk Dissemination	143 Peserta 143 Attendees
Sosialisasi Dalam Rangka Refreshment Kebijakan Dissemination for Policy Refreshment	15 Juni 2024 June 15, 2024	Sosialisasi Dalam Rangka Refreshment Kebijakan Dissemination for Policy Refreshment	152 Karyawan 152 Employees

applies to all Jamkrindo personnel, and the Company ensures that this policy is communicated to all relevant stakeholders, ensuring they understand and implement Jamkrindo's Anti-Bribery Management System (SMAP) as an integral part of the Company's work standards.

Anti-Corruption Training/ Dissemination for Employees

To ensure employees remain committed to the implementation of the anti-corruption policy, Jamkrindo actively conducts various awareness programs and training sessions. These initiatives are designed to enhance employees' understanding of the importance of preventing fraud, bribery, and corruption. The programs include in-house training and awareness sessions on Anti-Corruption, which are further detailed as follows:

KEBIJAKAN TERKAIT INSIDER TRADING

POLICIES RELATED TO INSIDER TRADING

Hingga saat ini, Perusahaan tidak memiliki kebijakan mengenai *insider trading* dikarenakan Jamkrindo bukanlah perusahaan terbuka (emiten) yang sahamnya diperdagangkan di pasar publik. Kebijakan *insider trading* pada umumnya merupakan aturan yang mengatur perdagangan saham perusahaan oleh direktur, komisaris, dan orang dalam untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, dari informasi yang belum atau tidak tersedia di pasar. Oleh karena itu, penjelasan mengenai kebijakan insider trading tidak dapat disampaikan.

As of now, the Company does not have a policy on insider trading because Jamkrindo is not a publicly listed company (issuer) with shares traded on the public market. Insider trading policies generally govern the trading of company shares by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and insiders to ensure that no party benefits—either directly or indirectly—from information that has not yet been made available to the public. Therefore, an explanation regarding the insider trading policy cannot be provided.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah mekanisme yang dirancang untuk memungkinkan individu melaporkan potensi pelanggaran yang terjadi dalam sebuah organisasi. Laporan yang diajukan harus didasarkan pada bukti yang sah dan disertai dengan itikad baik demi kepentingan organisasi. Sejak diterbitkannya Peraturan Direksi No. 31/Per-Dir/1/XII/2020 mengenai *Whistleblowing System*, SPI telah melaksanakan sosialisasi WBS kepada para *auditee* selama pelaksanaan audit umum. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk:

1. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif;
2. Menciptakan iklim yang kondusif dengan memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan dalam rangka menjaga serta melindungi aset/kepentingan perusahaan;
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif dalam penyelesaian laporan-laporan pelanggaran secara internal maupun eksternal melalui jalur hukum (bila dianggap perlu), melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut;
4. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk perlindungan pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal;
5. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat satu pelanggaran dan mengurangi potensi kerugian bagi perusahaan;
6. Memberikan masukan untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal serta untuk merancang Tindakan perbaikan yang diperlukan;
7. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
8. Meningkatkan budaya kepatuhan bagi semua insan Jamkrindo;
9. Meningkatkan reputasi Perusahaan;
10. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

The Whistleblowing System (WBS) is a critical mechanism designed to allow individuals to report potential violations occurring within an organization. Reports submitted must be based on valid evidence and accompanied by good intentions for the benefit of the organization. Since the issuance of the Board of Directors Regulation No. 31/Per-Dir/1/XII/2020 concerning the Whistleblowing System, the Internal Audit Unit (SPI) has actively disseminated information about the WBS to auditees during the general audit. The purpose of implementing this system is to:

1. Ensure the implementation of an effective violation complaint resolution mechanism;
2. Creating a conducive climate to safeguard and protect the Company's assets/interests by strengthening the monitoring environment and encourage employees to report matters that may cause financial and non-financial losses to the Company, including matters that may damage its image ;
3. Facilitating management to quickly and effectively resolve both internal and external violations through legal channels (if deemed necessary), protect the confidentiality of the reporter's identity, and maintain the confidentiality and security of the information;
4. Building a policy and infrastructure to protect whistleblowers from any harmful actions or retributions, both internally and externally;
5. Providing an early warning system for potential problems that may arise from a violation, and avoiding any potential losses to the Company;
6. Providing feedback of future critical areas and work processes that may have internal control weaknesses, guiding the design the necessary corrective actions;
7. Ensuring that important and critical information can be securely conveyed to the appropriate parties for swift resolution.
8. Enhancing the culture of compliance for all Jamkrindo personnel;
9. Enhancing the Company's reputation;
10. Serve as an effort disclose issues that violate the Company's ethical standards.

Berdasarkan Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) pada holding IFG, kebijakan WBS Terintegrasi "IFG Integritas" telah diperbarui. Selain itu, dilakukan harmonisasi dan diterbitkan ketentuan Direksi PT Jamkrindo Nomor 35/Per-Dir/4/XII/2023 yang berlaku sejak 29 Desember 2023. Ketentuan tersebut mengatur tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Terintegrasi.

Komitmen Jamkrindo dan Karyawan

Jamkrindo berkomitmen penuh untuk menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau WBS, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Setiap karyawan diharapkan tidak hanya memahami, tetapi juga aktif dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi. Sebagai bentuk dukungan terhadap integritas pelapor, perusahaan telah menetapkan kebijakan perlindungan yang jelas, menjamin bahwa pelapor tidak akan mendapatkan perlakuan yang merugikan. Pelaksanaan sistem WBS berada langsung di bawah tanggung jawab Direksi, dengan pengawasan dari Dewan Komisaris untuk memastikan kelancaran dan efektivitas sistem ini.

Lingkup WBS Jamkrindo

Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) akan menindaklanjuti pengaduan yang mencakup pelanggaran dalam berbagai aspek berikut:

1. Tindakan kecurangan (Fraud);
2. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang untuk kepentingan pribadi/diluar kepentingan Perusahaan;
3. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
4. Penyelewengan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan;
5. Benturan Kepentingan;
6. Pelanggaran peraturan dan Kode Etik Perusahaan;
7. Perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.

Sarana Pelaporan WBS

Perusahaan memberikan fasilitas untuk menyampaikan pengaduan terkait pelanggaran melalui beberapa saluran yang telah disediakan berikut ini:

1. Surat Tertulis : PO BOX 107123 JKP 10610
2. SMS dan Whatsapp : 08111717123
3. Email : wbs@jamkrindo.co.id

Based on the management of the Whistle Blowing System (WBS) at the IFG holding, the "IFG Integrity" integrated WBS policy has been updated. In addition, alignment has been conducted, and the Board of Directors Regulation of PT Jamkrindo Number 35/Per-Dir/4/XII/2023 was issued, effective as of December 29, 2023. The regulation governs the Integrated Whistleblowing System (WBS) Policy.

Jamkrindo and Its Employees' Commitment

Jamkrindo is fully committed to implementing the Whistleblowing System (WBS) to foster a transparent and accountable work environment. Every employee is expected to understand and to actively report any form of. To support whistleblower integrity, the Company has a clear protection policy against any negative repercussions. The Board of Director is responsible directly for the implementation of the Whistleblowing System (WBS), with the Board of Commissioners providing oversight for its smooth and effective operation.

Scope of Jamkrindo's WBS

The Whistleblowing System (WBS) will follow up on complaints that involve violations in the following aspects:

1. Acts of fraud;
2. Abuse of position/authority for personal gain/outside the interests of the Company;
3. Acceptance and/or giving of Gratification;
4. Misappropriation and/or misuse of Company assets;
5. Conflict of interest;
6. Violation of regulations and the Company's Code of Ethics;
7. Acts that violate the laws and regulations.

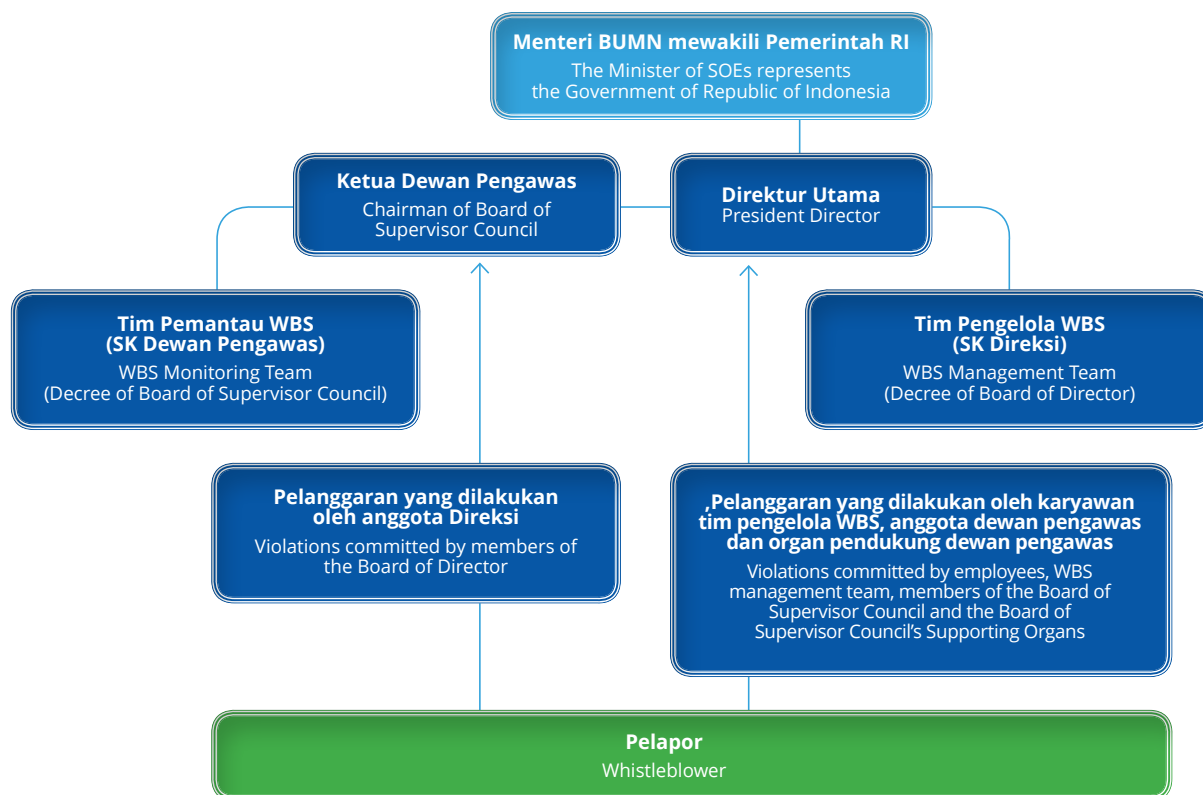
WBS Reporting Facility

The Company provides facilities for submitting complaints related to violations through the following available channels:

1. Written Letter : PO BOX 107123 JKP 10610
2. SMS and Whatsapp : 08111717123
3. Email: wbs@jamkrindo.co.id

Bagan Mekanisme Pengaduan dan Tindak Lanjut

Complaint Mechanism and Follow Up Chart



Perlindungan Bagi Pelapor

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan identitas pelapor dengan tidak membagikan informasi tersebut kepada pihak manapun, baik itu internal maupun eksternal. Informasi yang dilaporkan akan dirahasiakan dan hanya digunakan sebagai bahan awal dalam proses investigasi, tanpa mengungkapkan identitas pelapor. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi pelapor internal, perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan tidak hanya terbatas pada pelapor, tetapi juga dapat mencakup anggota keluarganya dari segala bentuk tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, kehilangan harta benda, hingga ancaman tindakan fisik.

Protection for Whistleblowers

The Company is committed to protecting the confidentiality of the whistleblower's identity by ensuring that this information is not disclosed to any party, whether internal or external. The reported information will be kept confidential and only used as initial material in the investigation process, without revealing the whistleblower's identity. Any violation of this confidentiality principle will be subject to sanctions in accordance with the applicable regulations.

For internal reporters, the protection provided by the Company extends not only to the whistleblowers but may also cover their family members, safeguarding them from any form of pressure, promotion delays, dismissal, legal lawsuits, loss of property, or threats of physical harm.

Pelaporan Pelanggaran Tahun 2024 dan Tindak Lanjut

Berikut ini disampaikan jumlah pelaporan yang diterima beserta tindak lanjut yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Media Penyampaian Communication Media	2024	2023
Surat Letters	-	-
Email Email	-	-
Situs Web Website	4	1
SMS SMS	-	-
Lain-lain Others	-	-
Jumlah Total	4	1

Status Laporan Report Status	2024	2023
Laporan Dalam Proses Reports in Process	0	-
Laporan yang Selesai Ditindaklanjuti Reports Resolved		
Laporan Tidak Terbukti Reports Not Substantiated	-	-
Laporan Selesai dengan Tindak Lanjut Reports Resolved and Followed up	4	1
Jumlah Total	4	1

2024 Whistleblowing Reporting and Follow Up

The following is the number of reports received and their follow-up during 2024.

REPORT OF ASSETS OF STATE ADMINISTRATORS

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan tanggung jawabnya sebagai Badan Usaha Milik Negara, Jamkrindo telah menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan pedoman kepatuhan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN adalah daftar yang mencatat seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 yang mengatur Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman LHKPN.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa KPK memiliki wewenang untuk melaksanakan pencegahan korupsi, termasuk melalui pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengamanatkan agar setiap penyelenggara negara melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan, serta bersedia untuk diperiksa kekayaannya dalam periode tersebut. Pada pasal 2 (7) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 beserta penjelasannya, mengatur bahwa pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), wajib untuk melaporkan LHKPN mereka.

Tujuan pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK adalah untuk memastikan bahwa penyelenggara negara mematuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindakan tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara diharapkan untuk melaporkan kekayaannya dengan mengisi formulir LHKPN yang telah disediakan KPK secara jujur, benar, dan lengkap, agar KPK dapat melakukan analisis, evaluasi, serta penilaian atas seluruh jumlah, jenis, dan nilai harta kekayaan yang dilaporkan dengan cara yang tepat, akurat, cepat, dan bertanggung jawab.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam penerapan LHKPN, perusahaan mempertimbangkan beberapa dasar hukum dan peraturan yang menjadi landasan dalam mengimplementasikan LHKPN di lingkungan perusahaan. Dasar hukum yang dimaksud antara lain:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Basic Principles of State Administrators' Wealth Reports

As a part of its commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) and fulfilling its responsibilities as a State-Owned Enterprise, Jamkrindo has developed, established, and implemented a compliance guideline related to the State Administrators' Wealth Report (LHKPN). The LHKPN is a record of all assets of State Administrators, documented using a form prescribed by the Corruption Eradication Commission (KPK), in accordance with KPK Decree No. KEP 07/KPK/02/2005, which regulates the Procedures for Registration, Examination, and Announcement of the State Administrators' Asset Report (LHKPN).

Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission affirms the KPK's authority to implement corruption prevention measures, including the registration and examination of the State Administrators' Asset Report (LHKPN). Furthermore, Law No. 28 of 1999 concerning the Clean and Corruption, Collusion, and Nepotism-Free State Administration mandates that every state administrator must report and disclose their assets before and after holding office, and must be willing to have their assets audited during that period. In Article 2 (7) of Law No. 28 of 1999, along with its explanation, stipulates that administrators who hold strategic functions in the administration of the state—including members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other structural officials within State-Owned Enterprises (BUMN) and Region-Owned Enterprises (BUMD)—are required to submit their LHKPN.

The purpose of the LHKPN examination submitted to the Corruption Eradication Commission (KPK) is to ensure that state administrators comply with the general principles of governance that are free from corruption, collusion, nepotism, and other other forms of misconduct. Every state administrator is expected to report their assets by filling out the LHKPN form provided by the KPK truthfully, correctly, and completely, enabling the KPK to analyze, evaluate, and assess the total amount, type, and value of the reported assets appropriately, accurately, promptly, and properly.

Legal and Regulatory Basis for Implementing LHKPN in Companies

In implementing LHKPN, the Company considers several legal and regulatory bases as the basis for the perspective of implementing LHKPN within the Company. The legal foundations referred to include:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020;
 4. Surat Edaran Nomor SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan BUMN;
 5. Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-341/MBU/10/2021 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-01/MBU/2009 tentang Penyelenggara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan BUMN;
 6. Peraturan Direksi Nomor : 48/Per-Dir/4/XII/2022 tentang Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Di Lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan;
 7. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya;
 8. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.
3. Corruption Eradication Commission Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Administrators' Assets as lastly amended through Corruption Eradication Commission Regulation of the Republic of Indonesia Number 02 of 2020;
 4. Circular Letter Number SE-12/MBU/10/2021 concerning Obligation to Submit State Administrators Wealth Reports (LHKPN) for Officials within SOEs;
 5. The Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-341/MBU/10/2021 concerning the Revocation of the Instruction of the Minister of State-Owned Enterprises Number INS-01/MBU/2009 concerning Administrators who are Required to Submit the State Administrators' Wealth Report (LHKPN) within State-Owned Enterprises (BUMN).
 6. Board of Directors Regulation Number : 48/Per-Dir/4/XII/2022 concerning Provisions for Obligation to Submit State Administrators Wealth Reports (LHKPN) for Administrators within the Company and Subsidiaries;
 7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/BUMN/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and its amendments.
 8. Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good GCG Implementation

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2024

Berikut ini adalah informasi mengenai transparansi penyampaian LHKPN pejabat perusahaan untuk tahun 2024.

LHKPN Transparency of Company Officials in 2024

Below is the information regarding the transparency of company officials LHKPN for 2024.

Pejabat Officials	Jumlah Wajib Laporan Total Number of Mandatory Reports	Jumlah yang Telah Melaporkan Total Number of Reported	
		Jumlah Total	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	6	6	100%
Dewan Direksi Board of Directors	6	6	100%
Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners	0	0	0
Dewan Komisaris Anak Perusahaan Board of Commissioners of Subsidiaries	2	2	100%
Dewan Direksi Anak Perusahaan Board of Directors of Subsidiaries	2	2	100%
Manajer atau Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi Managers or Officials One Level Below the Board of Directors	89	89	100%
Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi Anak Perusahaan Officials One Level Below the Board of Directors of Subsidiaries	11	11	100%
Jumlah Total	116	116	100%

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

TRANSPARENCY OF BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

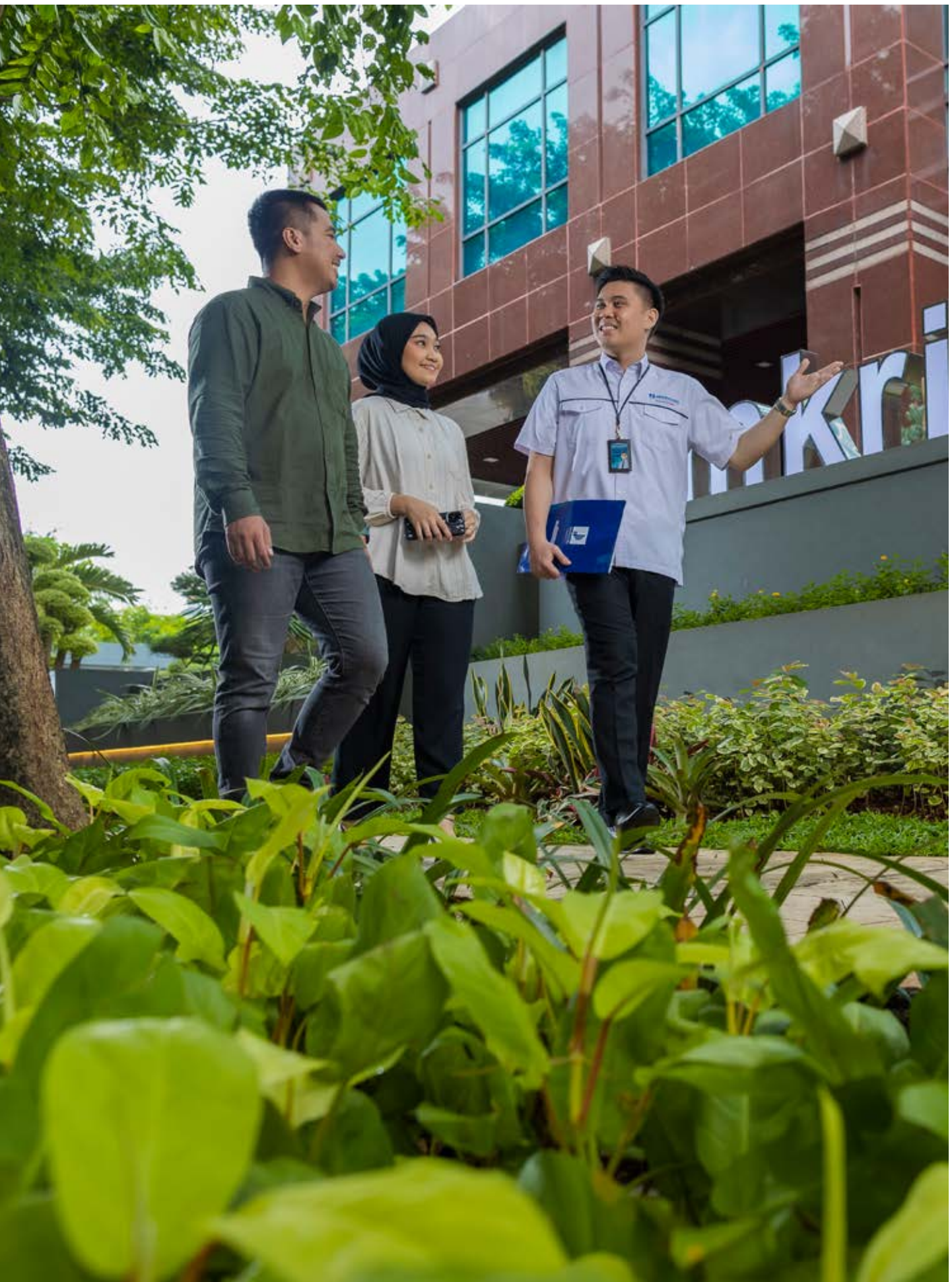
Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam menerapkan GCG, berikut ini adalah pengungkapan terkait tindakan yang berhubungan dengan praktik *Bad Corporate Governance*:

In accordance with the Company's commitment to implementing GCG, the following is a disclosure of actions related to Bad Corporate Governance practices:

Transparansi Praktik *Bad Corporate Governance* Tahun 2022-2024 Transparency of Bad Corporate Governance Practices in 2022-2024

No.	Praktik Practice	Tahun Year		
		2024	2023	2022
1	Aktivitas perdagangan orang dalam (insider trading) yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan Insider trading activities involving directors/commissioners, management and employees	x	x	x
2	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun Non-compliance in disclosing the fulfillment of tax obligations including guilty verdicts from the highest tax court regarding any tax issues	x	x	x
3	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Discrepancies in the presentation of the Annual Audit Report and Financial Statements with applicable regulations and SAK	x	x	x
4	Kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material Cases of non-compliance with laws, rules, and regulations relating to significant or material related party transactions	x	x	x
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan There is no disclosure of operating segments in the Financial Statements.	x	x	x
6	Pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan Violations of any law relating to labor/employment/consumer/bankruptcy/commercial/competition, or environmental issues.	x	x	x
7	Sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting Sanctions from regulators for not making announcements within the stipulated timeframe for important events	x	x	x
8	Bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan Evidence that the Company has not complied with any listing rules and regulations during the past year apart from disclosure rules.	x	x	x

V = ada | X = tidak ada
V = there is | x = there is not

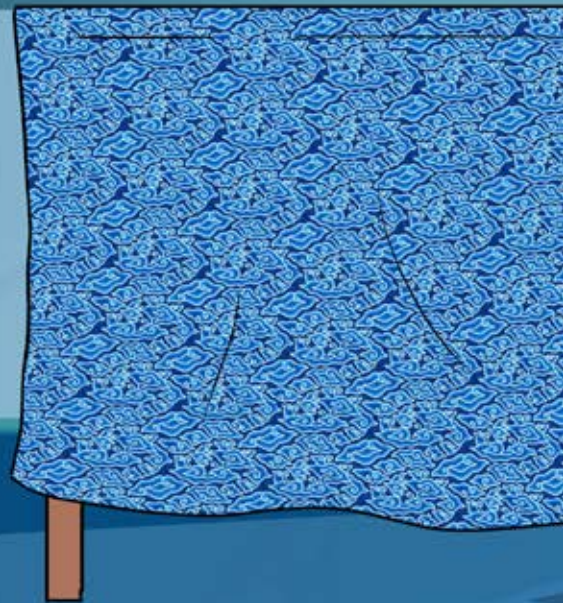


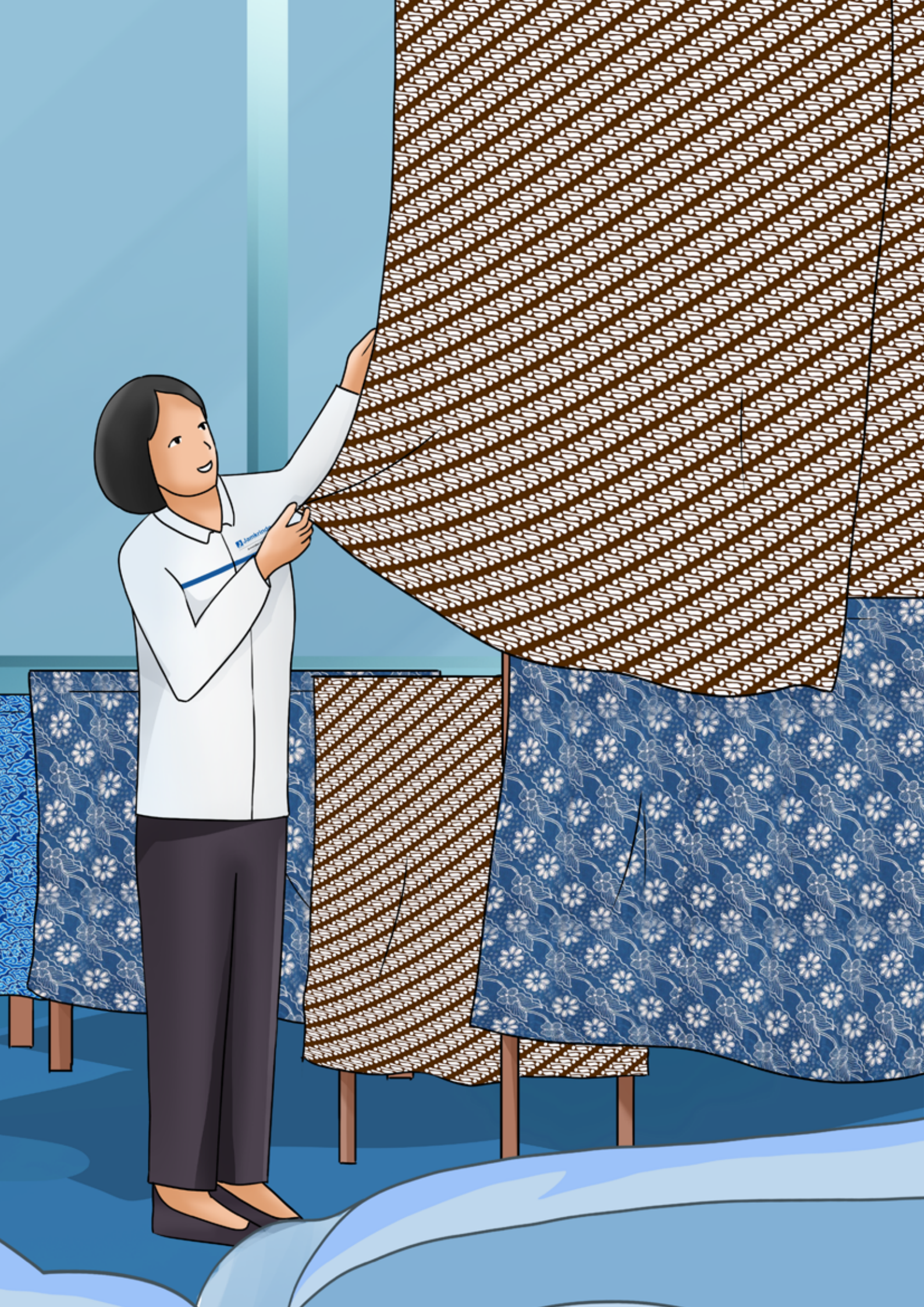
06

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Jamkrindo konsisten menjalankan program yang menyentuh 3 (tiga) aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, guna mendukung perkembangan masyarakat dan menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan.

Jamkrindo consistently runs programs that touch on 3 (three) main aspects, namely economic, social, and environmental, in order to support community development and create environmentally sound development.





TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

GOVERNANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Jamkrindo memiliki tugas yang diberikan oleh Pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional dan ekonomi. Selain menjalankan fungsi utama, Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kewajiban ini tidak hanya menjadi pemenuhan regulasi, tetapi juga bagian dari komitmen Jamkrindo dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Jamkrindo menyelaraskan program TJSL/CSR dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), sekaligus mendukung bisnis inti perusahaan. Pelaksanaan TJSL/CSR menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup dengan menjaga keberlanjutan sumber daya alam; hak asasi manusia melalui pengelolaan hubungan kerja yang harmonis dan penghormatan terhadap hak karyawan; keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi prioritas utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman; dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan mendorong pengembangan komunitas setempat dan perluasan lapangan kerja.

As a State-Owned Enterprise (SOE) in the form of a Limited Liability Company (PT), Jamkrindo has a duty assigned by the Government to support the national and economic development. Other than executing its main functions, the Company also has an obligation to implement Social and Environmental Responsibility (TJSL) or Corporate Social Responsibility (CSR) programs. This obligation is not only a fulfillment of regulations, but also a part of Jamkrindo's commitment in supporting sustainable development that is oriented towards achieving balance in economic, social, and environmental aspects.

Jamkrindo aligns its TJSL/CSR programs with the Sustainable Development Goals (SDGs), while also supporting the Company's core business. The implementation of TJSL/CSR is a tangible manifestation of the Company's concern for the environment by maintaining the sustainability of natural resources; human rights through the management of harmonious working relationships and respect for employee rights; occupational safety and health which is a top priority in creating a safe working environment; and local economic empowerment by encouraging the development of local communities and expanding employment opportunities.

Jamkrindo konsisten menjalankan program yang menyentuh 3 (tiga) aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, guna mendukung perkembangan masyarakat dan menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan.

Sebagai bagian dari BUMN, Jamkrindo juga berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, termasuk:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang mengatur kewajiban perusahaan dalam menyisihkan laba untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/3/2023, yang menjadi panduan pelaksanaan program TJSL dan penugasan khusus bagi BUMN.

Dengan landasan tersebut, Jamkrindo memastikan pelaksanaan program TJSL berkontribusi pada pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan usaha, dan pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah operasional.

Jamkrindo merancang program TJSL/CSR untuk:

1. Mendukung perekonomian nasional melalui aktivitas usaha penjaminan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dampak nyata pada kualitas hidup komunitas lokal.
3. Memperbaiki lingkungan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.
4. Membangun citra positif perusahaan, baik di mata masyarakat maupun pemangku kepentingan.
5. Meningkatkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar area operasional.

Pelaksanaan program TJSL juga menjadi sarana untuk memperkuat penerapan nilai-nilai budaya perusahaan sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Di sisi lain, melalui implementasi TJSL/CSR yang menyentuh berbagai aspek, Jamkrindo menunjukkan partisipasi aktif dalam mendukung TPB/SDGs. Prinsip keberlanjutan, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi dasar dalam merancang dan menjalankan setiap program.

Jamkrindo berharap, melalui dedikasi dan langkah nyata yang dilakukan Perusahaan melalui program TJSL/CSR tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi juga berdampak positif pada keberlanjutan bisnis perusahaan. Dengan demikian, keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan kontribusi sosial dapat tercapai secara optimal.

Jamkrindo consistently implements programs that touch on 3 (three) main aspects, namely economic, social, and environmental to support community development and create environmentally sound development.

As part of a state-owned enterprise, Jamkrindo also adheres to laws and regulations as listed below:

1. Law No. 19 of 2003 concerning SOEs, which regulates the Company's obligation to set aside profits to support the growth of the people's economy.
2. Minister of SOEs Regulation No. PER-1/MBU/3/2023, which guides the implementation of TJSL programs and the special assignments for SOEs.

With this law as the foundation, Jamkrindo ensures that the implementation of the TJSL program contributes to equitable development, expansion of business opportunities, and community empowerment in all operational areas.

Jamkrindo designed the TJSL/CSR program as a means of:

1. Supporting the national economy through inclusive and sustainable guarantee business activities.
2. Improving people's well-being by making a tangible impact on the quality of life for local communities.
3. Improving the environment with sustainability in mind.
4. Building a positive image of the Company, both in the eyes of the community and stakeholders.
5. Improving the harmonious relationship between the Company and the community surrounding the operational area.

The implementation of the TJSL program is also a means to strengthen the application of corporate culture values in accordance with the principles of Good Corporate Governance. On the other hand, through the implementation of TJSL/CSR that touches on various aspects, Jamkrindo shows active participation in supporting SDGs. The principles of sustainability, transparency, and community participation are the basis for designing and implementing each program.

Jamkrindo hopes that the dedication and concrete measures taken by the Company through the TJSL/CSR program will not only provide direct benefits to the community and the surrounding environment. But also have a positive impact on the sustainability of the Company's business. Therefore, the balance between business growth and social contribution can be optimally achieved.

Prinsip Korporasi yang Sehat

Sebagai perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai entitas pemilik akhir, Jamkrindo memiliki tanggung jawab besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Tanggung Jawab Sosial ke dalam seluruh aspek operasionalnya. Sebagai bagian dari BUMN yang berperan sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*), Jamkrindo berkomitmen menjalankan pengelolaan usaha yang tidak hanya sehat secara korporasi, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Pengelolaan perusahaan yang sehat menjadi landasan utama bagi Jamkrindo untuk memastikan keberlanjutan usaha yang akuntabel dan transparan. Prinsip ini meliputi pengelolaan usaha yang berorientasi laba guna mendukung pertumbuhan ekonomi perusahaan dan kontribusi terhadap pembangunan nasional serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Salah satu kredo perusahaan, yaitu "*Sehat dalam Tata Kelola Perusahaan*", menjadi pedoman utama dalam menjalankan operasional yang berlandaskan kepatuhan terhadap regulasi, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan hak-hak karyawan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan ini, Jamkrindo terus memperkuat posisinya dalam mencapai visi perusahaan, yaitu menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

Melalui pelaksanaan program TJSL/CSR, Jamkrindo tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban terhadap pemegang saham tetapi juga pada kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Dengan menjalin hubungan yang saling menguntungkan, Jamkrindo memastikan bahwa Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dapat tumbuh bersama secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, Jamkrindo menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan. Dalam hal ini, berbagai inisiatif strategis telah dirancang dan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, di mana perusahaan dan masyarakat dapat saling menopang satu sama lain.

Jamkrindo juga percaya bahwa keseimbangan antara pertumbuhan perusahaan dan manfaat sosial adalah kunci untuk menciptakan keberlanjutan yang kokoh. Oleh karena itu, program TJSL/CSR dirancang tidak hanya untuk memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang yang inklusif dan berdaya guna.

Principles of a Healthy Corporation

As a company with the Government of the Republic of Indonesia as the ultimate owner entity, Jamkrindo has a great responsibility to integrate Social Responsibility values into all aspects of its operations. As part of a state-owned enterprise that acts as an Agent of Development, Jamkrindo is committed to conducting a business management that is not only corporately sound, but also able to have a positive impact on society and the environment.

Healthy company management is the main foundation for Jamkrindo to ensure accountable and transparent business sustainability. These principles include profit-oriented business management to support the Company's economic growth. And contribution to national development as well as the implementation of Good Corporate Governance based on the principles of accountability, transparency, responsibility, independence, and fairness.

One of the Company's credos, namely "Sound Corporate Governance" is the main guideline used in executing operations based on compliance with regulations, development of Human Capital (HC) competencies, fulfillment of employee rights, and community empowerment. Jamkrindo continues to strengthen its position in achieving the Company's vision: which is to become the main choice of business actors in guarantee services to support the growth and equitable distribution of the national economy.

Through the implementation of the TJSL/CSR program, Jamkrindo focuses on fulfilling its obligations to the shareholders, and on the needs and expectations of the stakeholders. By establishing a mutually beneficial relationships, Jamkrindo ensures that the Company and all stakeholders will grow together in a sustainable manner.

To accomplish these common goals, Jamkrindo creates conditions that enable the active participation from stakeholders. In this regard, various strategic initiatives have been designed and implemented to support an integrated economic, social, and environmental development. These initiatives aim to create a sustainable ecosystem, where companies and communities can support each other.

Jamkrindo also believes that the balance between corporate growth and social benefits is key to creating solid sustainability. Therefore, TJSL/CSR programs are designed not only to provide short-term benefits, but also to promote long-term growth that is inclusive and empowering.

PRINSIP DAN LANDASAN HUKUM TJSL DI PERUSAHAAN

PRINCIPLES AND LEGAL FOUNDATIONS OF TJSL IN THE COMPANY

Prinsip TJSL

Kementerian BUMN terus mendorong seluruh perusahaan di bawah naungannya untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui tiga bidang prioritas utama: pendidikan, lingkungan, dan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). Fokus pada ketiga bidang ini diharapkan mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pelaksanaan program TJSL oleh BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi, pencapaian keberhasilan program, serta pengelolaan dampak yang dihasilkan. Program ini dirancang agar sesuai dengan prioritas nasional dan bertujuan mencapai keberlanjutan melalui rencana kerja yang terstruktur dan terukur. Adapun Program TJSL BUMN memiliki 4 (empat) pilar utama dengan 17 (tujuh belas) poin TPB, yaitu:

1. Sosial
Tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pilar Sosial mencakup tujuan berikut:
 - a. Mengentaskan Kemiskinan (TPB 1).
 - b. Mengakhiri Kelaparan (TPB 2).
 - c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3).
 - d. Pendidikan Berkualitas (TPB 4).
 - e. Kesenjaraan Gender (TPB 5).
2. Lingkungan
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagai penopang utama kehidupan. Pilar Lingkungan mencakup tujuan berikut:
 - a. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6).
 - b. Pembangunan Kota dan Pemukiman yang Layak (TPB 11).
 - c. Proses Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab (TPB 12).
 - d. Penanganan Perubahan Iklim (TPB 13).
 - e. Menjaga Ekosistem Lautan (TPB 14).
 - f. Menjaga Ekosistem Daratan (TPB 15).
3. Ekonomi
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri yang inklusif, infrastruktur yang memadai, energi bersih yang terjangkau, serta didukung oleh kemitraan. Pilar Ekonomi mencakup tujuan berikut:
 - a. Penggunaan Energi Bersih dan Terjangkau (TPB 7).
 - b. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (TPB 8).
 - c. Industri, Ekonomi dan Infrastruktur (TPB 9).
 - d. Mengurangi Kesenjangan (TPB 10).
 - e. Melakukan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (TPB 17).

TJSL Principles

The Ministry of SOEs continues to encourage all companies under its care to make a tangible contribution to society through three main priority areas: education, environment, and Micro and Small Enterprise Funding (PUMK). The focus on these three areas is expected to create an ongoing impact, while supporting economic, social, and environmental development.

The implementation of TJSL programs by SOEs is executed in a systematic and integrated manner. This aims to ensure successful implementation, achieve the accomplishment of the program, and impact management. The program is designed to align with national priorities and aims to achieve sustainability through a structured and measurable work plan. The TJSL Programs of SOEs has 4 (four) main pillars with 17 (seventeen) SDG points, namely:

1. Social
Achieving the quality fulfillment of basic human rights fairly and equally to improve welfare for the entire community. The Social Pillar includes the following objectives:
 - a. No Poverty (SDG 1).
 - b. Zero Hunger (SDG 2).
 - c. Good Health and Well-Being (SDG 3).
 - d. Quality Education (SDG 4).
 - e. Gender equality (SDG 5).
2. Environmental
Sustainable management of natural resources and the environment as a support for all life. The Environmental Pillar includes the following objectives:
 - a. Clean Water and Sanitation (SDG 6).
 - b. Sustainable Cities and Communities (SDG 11).
 - c. Responsible Consumption and Production (SDG 12).
 - d. Climate Action (SDG 13).
 - e. Life Below Water (SDG 14).
 - f. Life on Land (SDG 15).
3. Economic
Achieving the quality economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy, and supported by partnerships. The Economic Pillar includes the following objectives:
 - a. Affordable and Clean Energy (SDG 7).
 - b. Decent Work and Economic Growth (SDG 8).
 - c. Industry, Innovation, and Infrastructure (SDG 9).
 - d. Reduced Inequalities (SDG 10).
 - e. Partnerships for the Goals (SDG 17).

4. Hukum dan Tata Kelola

Terciptanya kepastian hukum serta tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan negara yang berlandaskan hukum. Pilar Hukum dan Tata Kelola mencakup tujuan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (TPB 16).

Dasar Hukum

Pelaksanaan Program TJSL di Jamkrindo berpedoman pada sejumlah landasan hukum yang menjadi acuan utama, antara lain:

1. UU Indonesia No. 40/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. UU Indonesia No. 19/2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51 Tahun 2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik;
4. Perpres Indonesia No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
6. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja sama Program PUMK");
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/09/2022 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Presiden Indonesia No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri BUMN RI Indonesia No. PER-1/MBU/3/2023 tanggal 3 Indonesia Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial BUMN;
10. Kerja sama ISO 26000 dan Metadata Indikator SDGs;
11. Risalah Rapat No. RIS-55/DSI.MBU.B/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Program Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023;
12. Peraturan Direksi No. 44/Per-Dir/1/XI/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Indonesia PT Jaminan Kredit Indonesia;
13. Keputusan Direksi Nomor: 01/KD/5/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Struktur Organisasi Indonesia PT Jaminan Kredit Indonesia.

4. Law and Governance

The creation of the rule of law as well as effective, transparent, accountable and participatory governance to realize security and state stability based on the rule of law. The Law and Governance pillar includes the goals of Peace, Justice and Strong Institutions (SDG 16).

Legal Basis

The legal basis for implementing the TJSL program at Jamkrindo is:

1. Law No. 40/2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law No. 19/2003 dated June 19, 2003 concerning State-Owned Enterprises;
3. Financial Services Authority (POJK) Regulations No. 51/2017 concerning the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies;
4. Presidential Regulation No. 59/2017 concerning Implementation of Achieving Sustainable Development Goals;
5. Minister of National Development Planning Regulation No. 7 of 2018 concerning Coordination, Planning, Monitoring, Evaluation, and Reporting on the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs);
6. Letter of the Minister of Indonesian State-Owned Enterprises No. S-721/MBU/11/2022 dated 10 November 2022 on the Cooperation of Micro and Small Enterprise Funding Program ("PUMK Program Cooperation");
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-06/MBU/09/2022 concerning Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises;
8. Presidential Regulation No. 111 of 2022 concerning the Implementation of Achieving Sustainable Development Goals;
9. Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/3/2023 dated March 3, 2023 concerning Special Assignments and Environmental and Social Responsibility Programs of SOEs;
10. ISO 26000 Guidance and SDGs Indicator Metadata
11. Minutes of the Meeting No. RIS-55/DSI.MBU.B/01/2023 dated January 19, 2023 concerning the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program for 2023;
12. Regulation of the Board of Directors No. 44/Per-Dir/1/XI/2022 dated November 30, 2022 concerning Management Guidelines for the Social and Environmental Responsibility Programs of PT Jaminan Kredit Indonesia.
13. Decree of the Board of Directors. No. 01/KD/5/I/2024 dated January 10, 2024 concerning the Organizational Structure of PT Jaminan Kredit Indonesia.

STRUKTUR ORGANISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

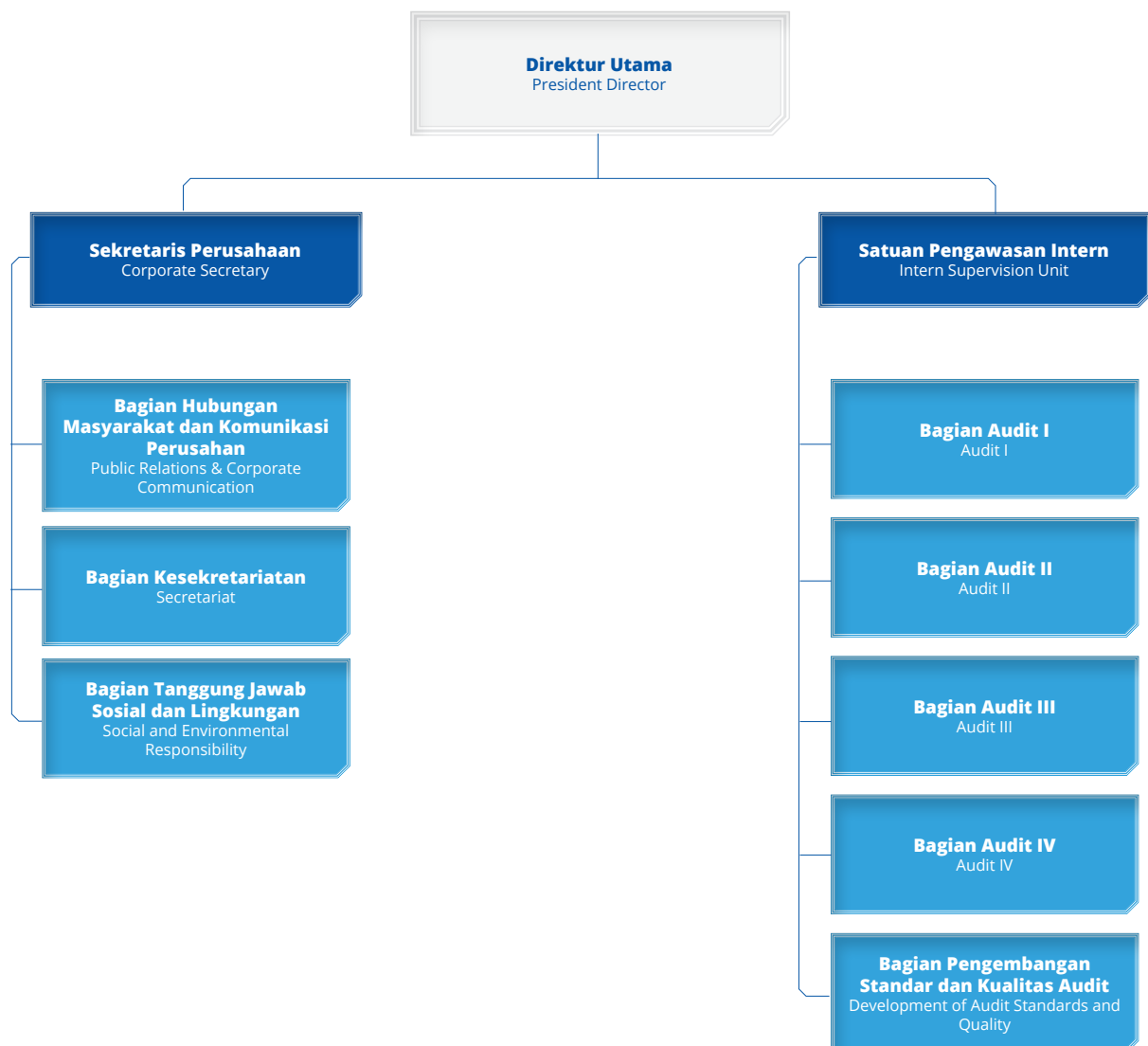
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Jamkrindo menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan TJSL, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola program TJSL, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugasnya dengan mengacu pada arahan Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Jamkrindo appoints the Corporate Secretary as the party responsible for the implementation of all TJSL activities, including economic, environmental, and social aspects. In their capacity as the manager of the TJSL program, the Corporate Secretary executes his/her duties with reference from the guidance of the Board of Directors and is directly responsible to the President Director.

Hingga 31 Desember 2024, struktur organisasi TJSL Jamkrindo ditetapkan berdasarkan Ketetapan Direksi No. 01/KD/1/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Struktur Organisasi PT Jaminan Kredit Indonesia adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the organizational structure of Jamkrindo's TJSL is determined based on the Decree of the Board of Directors No. 01/KD/1/XII/2022 dated December 21, 2022 concerning the Organizational Structure of PT Jaminan Kredit Indonesia, as follow:



VISI DAN MISI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

VISION AND MISSION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Program TJSL BUMN dirancang dengan sejumlah tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat di sekitar perusahaan;
4. Mendukung misi strategis inisiatif perusahaan.

The TJSL programs of SOEs are designed with various key objectives to be achieved, namely:

1. Providing benefits for economic development, social development, environmental development, and legal and governance development for the Company;
2. Contributing to the creation of added value for the Company with principles that are integrated, directed, and measurable in impact as well as being accountable;
3. Fostering micro and small enterprise to be more resilient and independent along with communities surrounding the Company;
4. Supporting the strategic mission of the Company's initiatives.



REALISASI DANA DAN PROGRAM KEGIATAN TJSL 2024

REALIZATION OF THE 2024 TJSL PROGRAM FUNDS AND ACTIVITIES

Target dan Rencana Program TJSL

Pelaksanaan program TJSL/CSR di Jamkrindo dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan program disusun berdasarkan pemetaan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan operasional dan bisnis Jamkrindo. Hal ini kemudian dituangkan dalam rencana kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kemampuan Perusahaan.

Dalam aspek ekonomi, Jamkrindo sebagai entitas usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan kinerja ekonomi yang berkelanjutan, bebas dari praktik korupsi, serta memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan. Pada aspek lingkungan, Perusahaan secara konsisten melakukan kajian risiko lingkungan untuk mengidentifikasi dampak operasional dan langkah pengendalian yang diperlukan. Sedangkan pada aspek sosial, perhatian Perusahaan tidak hanya ditujukan kepada pemangku kepentingan internal tetapi juga eksternal.

Program TJSL/CSR dilaksanakan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, pencapaian keberhasilan, serta pengelolaan dampak sesuai prioritas dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program ini berpedoman pada rencana kerja yang dirancang dengan mengidentifikasi dan mengkaji dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan.

Jamkrindo juga secara rutin melakukan *due diligence* atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas Perusahaan melalui *monitoring*, evaluasi, serta perencanaan program kerja yang dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSL Tahun 2024, yang tercantum dalam Risalah Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2024, mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024, poin-poin terkait pelaksanaan TJSL adalah sebagai berikut:

Targets and Plans of the TJSL Program

The implementation of the TJSL/CSR program in Jamkrindo is executed thoroughly, starting from the planning stage up to the evaluation. Program planning is based on the mapping of social, economic, and environmental impacts of Jamkrindo's operational and business activities. This is then translated into a plan for the real needs of stakeholders while taking into account the Company's capabilities.

In the economic aspect, Jamkrindo as a business entity has the responsibility to ensure sustainable economic performance, free from corrupt practices, and provide tangible benefits to stakeholders. In the environmental aspect, the Company consistently conducts environmental risk assessments to identify operational impacts and necessary control measures. As for the social aspect, the Company's attention is directed to both internal and external stakeholders.

TJSL/CSR programs are implemented in a systematic and integrated manner to ensure the effectiveness of implementation, achievement of success, and management of impacts in accordance with predetermined priorities and objectives. The implementation of this program is guided by a work plan designed by identifying and assessing the economic, social, and environmental impacts of each business activity that has been implemented.

Jamkrindo also routinely conducts due diligence on the economic, social, and environmental impacts of the Company's activities through monitoring, evaluation, and work program planning designed to provide added value to stakeholders.

Based on the results of the discussion of the Work Plan and Budget of the 2024 TJSL Program, which are listed in the Minutes of the Meeting of the Work Plan and Budget of the Social and Environmental Responsibility Program for 2024, regarding the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP). The points related to the implementation of TJSL are as follows:

Tabel RKA Program TJSL Tahun 2024
Budget Work Plan (RKA) Table for the 2024 TJSL Program

No.	Program	RKA 2024 (Rp) 2024 Budget Work Plan (IDR)
1	Penyaluran Program TJSL Non PUMK (CID) Distribution of MSE Non-Funding TJSL Programs (CID)	15.500.000.000
2	Penyaluran Program TJSL Non PUMK (Non CID) Distribution of MSE Non-Funding TJSL Programs (Non CID)	875.000.000
3	Penyaluran Pendanaan UMK Mandiri Distribution of Independent MSE Funding	-
4	Penyaluran Pendanaan UMK Kolaborasi "BRI" Distribution of Collaborative MSE Funding "BRI"	3.900.000.000
Total		20.275.000.000

Realisasi Program dan Kegiatan 2024

Pada tahun 2024, Jamkrindo terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program dan kegiatan TJSL yang selaras dengan visi perusahaan menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Seluruh inisiatif yang dilakukan dirancang untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian, dengan fokus pada pemberdayaan komunitas, peningkatan kualitas hidup, serta pelestarian lingkungan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, program-program ini diimplementasikan secara terarah dan terpadu untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Jamkrindo sebagai agen pembangunan yang tangguh dan terpercaya. Adapun program yang telah dilakukan Jamkrindo di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Realization of 2024 Programs and Activities

In 2024, Jamkrindo demonstrated its commitment in implementing TJSL programs and activities that are in line with the Company's vision as a become the main choice of business actors in guarantee services to support the growth and equitable distribution of the national economy. All programs are designed to make a tangible contribution to the community, the environment, and the economy. The programs focused on community empowerment, quality of life improvement, and environmental conservation. With the spirit of collaboration and innovation, these programs were implemented in a targeted and integrated manner to ensure a sustainable positive impact, while strengthening Jamkrindo's role as a strong and trusted development agent. The programs that Jamkrindo has implemented in 2024 are as follows:

No	TPB SDGs	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget	Realisasi TW IV 2024 Realization in Q4 of 2024	Capaian Achievement
1	2	3	4	5=4:3
A	PILAR SOSIAL SOCIAL PILLAR	8.450.000.000	7.470.085.152	88,40%
1	TPB 1 Tanpa Kemiskinan SDG 1 No Poverty	250.000.000	452.814.000	181,13%
2	TPB 2 Tanpa Kelaparan SDG 2 Zero Hunger	3.700.000.000	2.776.300.745	75,04%
3	TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera SDG 3 Good Health and Well-Being	50.000.000	180.000.000	360,00%
4	TPB 4 Pendidikan Berkualitas SDG 4 Quality Education	4.450.000.000	4.060.970.407	91,26%
5	TBP 5 Kesenjangan Gender SDG 5 Gender Equality	-	-	0,00%
B	PILAR EKONOMI ECONOMIC PILLAR	5,625,000,000	4.998.290.309	88,86%
1	TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau SDG 7 Affordable and Clean Energy	-	-	-
2	TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi SDG 8 Decent Work and Economic Growth	5,625,000,000	4.998.290.309	88,86%
3	TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure	-	-	-
4	TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan SDG 10 Reduced Inequalities	-	-	-
5	TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan SDG 17 Partnership for the Goals	-	-	-

No	TPB SDGs	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget	Realisasi TW IV 2024 Realization in Q4 of 2024	Capaian Achievement
1	2	3	4	5=4:3
C	PILAR LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PILLAR	6.000.000.000	5.764.305.692	96,07%
1	TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak SDG 6 Clean Water and Sanitation	1.350.000.000	1.420.000.000	105,19%
2	TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan SDG 11 Sustainable Cities and Communities	3.250.000.000	3.177.191.900	97,76%
3	TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab SDG 12 Responsible consumption and production	800.000.000	865.880.485	108,24%
4	TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim SDG 13 Climate Action	150.000.000	95.963.307	63,98%
5	TPB 14 Ekosistem Lautan SDG 14 Life Below Water	200.000.000	50.000.000	25,00%
6	TPB 15 Ekosistem Daratan SDG 15 Life on Land	250.000.000	155.270.000	62,11%
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA LAW AND GOVERNANCE PILLAR	200.000.000	415.610.000	207,81%
1	TPB 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions	200.000.000	415.610.000	207,81%
TOTAL		20.250.000.000	18.648.291.153	91,98%

Program Creating Share Value (CSV) PT Jamkrindo

Sebagaimana tercantum dalam RKA TJSL Tahun 2024, realisasi program CSV hingga Desember 2024 mencapai Rp.735.120.526.- atau 122,52% dari target yang ditetapkan dalam RKA 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Creating Share Value (CSV) Programs of PT Jamkrindo

As stated in the 2024 TJSL Work Plan and Budget (RKA), the realization of the CSV program as of December 2024 amounted to IDR 735,120,526 or 122.52% of the target set in the 2024 Work Plan and Budget (RKA), with the following details:

No.	Program CSV CSV Program	TPB SDG	Uraian Program Program Description	Manfaat Untuk Perusahaan dan Nilai Sosial Benefits to the Company and Social Value	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget	Realisasi Triwulan IV 2024 Realization in Q4 2024	Capaian Achievement
1	2	3			4	5	6=5:4
1	Kelompok Usaha Bersama Microbusiness Lanjutan Advanced Microbusiness Joint Venture Group	8	PT Jaminan Kredit Indonesia akan mengadakan program pelatihan untuk mendukung penguatan ekonomi UMKM, meliputi peningkatan usaha, legalitas, dan laporan keuangan digital. Program ini bertujuan memberikan pengetahuan kewirausahaan yang komprehensif, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang UMKM mengakses pembiayaan yang relevan. PT Jaminan Kredit Indonesia will provide a training program to support the economic strengthening of MSMEs, including business improvement, legality, and digital financial reporting. The program aims to deliver comprehensive entrepreneurial knowledge, improve competitiveness, and open up opportunities for MSMEs to access relevant financing.	Dapat mendukung para UMKM dari sisi ekonomi untuk dapat mengembangkan usahanya agar dapat bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan Jamkrindo mendukung program ini untuk dapat memajukan UMKM serta memberikan pembiayaan KUR kepada UMKM serta menjamin KUR tersebut. It can support MSMEs from the economic side to develop their business so that they can compete in accordance with the times. Jamkrindo's goal in supporting this program is to be able to advance MSMEs and provide KUR financing to MSMEs and guarantee the KUR.	200.000.000	246.000.000	123,00%

No.	Program CSV CSV Program	TPB SDG	Uraian Program Program Description	Manfaat Untuk Perusahaan dan Nilai Sosial Benefits to the Company and Social Value	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget	Realisasi Triwulan IV 2024 Realization in Q4 2024	Capaian Achievement
1	2	3			4	5	6=5:4
2	Pendampingan UMKM Garut MSME Assistance in Garut	8	Garut memiliki modal sosial yang mendukung dinamika perekonomian sehari-hari. PT Jaminan Kredit Indonesia berperan menginspirasi masyarakat untuk menciptakan nilai tambah bagi pembangunan berkelanjutan. Potensi yang dapat dikembangkan meliputi kampanye anti-sampah plastik, pendirian bank sampah, pelatihan usaha di sektor perkebunan, edutrip, pengolahan makanan, dan pertanian. Program ini bertujuan mendampingi UMKM agar naik kelas dan mengakses pembiayaan KUR. Garut has social capital that supports the dynamics of the daily economy. PT Jaminan Kredit Indonesia plays a role in inspiring the community to create added value for sustainable development. Potentials that may be developed include anti-plastic waste campaigns, establishment of waste banks, business training in the plantation, edutrip, food processing, and agriculture sectors. The program aims to assist MSMEs to upgrade and access KUR financing.	Program Pendampingan UMKM Garut memberikan manfaat sosial berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM lokal, pengembangan keterampilan usaha, dan akses pembiayaan yang lebih luas. Bagi PT Jamkrindo, program ini memperkuat citra sebagai mitra pembangunan berkelanjutan, memperluas jaringan dengan pelaku usaha lokal melalui kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. The Garut MSME Assistance Program provides social benefits in the form of improving community welfare through empowering local MSMEs, developing business skills, and broader access to financing. For PT Jamkrindo, this program strengthens its image as a sustainable development partner, expanding its network with local businesses through real contributions in community economic empowerment.	250.000.000	234.120.526	93,65%

No.	Program CSV CSV Program	TPB SDG	Uraian Program Program Description	Manfaat Untuk Perusahaan dan Nilai Sosial Benefits to the Company and Social Value	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget	Realisasi Triwulan IV 2024 Realization in Q4 2024	Capaian Achievement
1	2	3			4	5	6=5:4
3	Pemberdayaan Masyarakat Ciletuh Community Empowerment	8	Tujuan Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Geopark Ciletuh yaitu : 1. Menyelesaikan permasalahan ekonomi yang akan berdampak positif pada kualitas hidup Masyarakat Ciletuh, kemandirian pada ekonomi dan kehidupan yang Sejahtera; 2. 2025 ciletuh palabuhanratu bebas sampah plastik; 3. Pendidikan yang berkualitas sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul. The objectives of the Ciletuh Geopark Community Economic Improvement Program are: 1. Resolving economic problems that will have a positive impact on the quality of life of the Ciletuh Community, economic independence and a prosperous life; 2. 2025 ciletuh palabuhanratu free of plastic waste; 3. Quality education to create excellent human resources.	Program Pemberdayaan Masyarakat Ciletuh memberikan manfaat sosial berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan sektor pariwisata lokal, dan pelestarian lingkungan. Bagi Jamkrindo, program ini memperkuat citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan dampak positif yang relevan dengan tujuan CSR. The Ciletuh Community Empowerment Program provides social benefits in the form of improving the quality of life of the community through skills training, development of the local tourism sector, and environmental preservation. For Jamkrindo, this program strengthens its image as a company that cares about sustainable development, and creates positive impacts that are relevant to CSR objectives.	150.000.000	255.000.000	170,00%
Total					600.000.000	735.120.526	122,52%

Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial

Realisasi penyaluran dana program prioritas TJSL Jamkrindo tahun 2024 mencapai Rp.10.937.772.022,- atau 105,17% dari RKA Program Prioritas tahun 2024, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Social Responsibility Priority Program

The realization of the distribution of Jamkrindo's TJSL priority program funds in 2024 reached IDR 10,937,772,022 or 105.17% of the 2024 Priority Program Work Plan and Budget (RKA), with the following details:

No.	Program Program	Program di Bidang Pendidikan Program in Education Field	TPB SDG	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget	Realisasi Triwulan IV 2024 Realization in Q4 2024	Capaian Achievement	Target Output Output Target
1	2	3	4	5	6	7=6:5	8
1		Edukasi Membangun Kesehatan Mental dalam Keluarga (Best Practice Parenting Program) Education on Building Mental Health in the Family (Best Practice Parenting Program)	4	150.000.000	199.206.150	132,80%	Pendidikan pertama anak berada dalam keluarga, atas dasar tersebut dengan semangat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas maka Jamkrindo akan memberikan edukasi tersebut kepada orang tua siswa/i di 21 Sekolah Dasar DKI Jakarta. The first education of a child is within the family, on this basis with hopes of creating the next generation of a qualified nation, Jamkrindo will provide education to parents of students in 21 DKI Jakarta Elementary Schools.
2		Edukasi Berjenjang Berkelanjutan pada 5.400 Siswa/i SMP (Usia sekolah jangan dulu nikah!) Multi-Tiered Education to 5,400 Junior High School Students (No marriage at school age!)	4	350.000.000	401.982.308	114,85%	Maraknya kasus anak usia sekolah yang menikah dini menjadi dasar pembuatan program ini, menindaklanjuti dari program anti bullying dan kekerasan seksual di DKI Jakarta pada tahun 2023 maka kami melanjutkan program tersebut dengan melebarkan titik edukasi ke wilayah Banten & Jawa Barat, Indonesia dengan issue anak sekolah di wilayah Banten dan sebagian wilayah Jawa Barat menikah diusia yang sangat dini. Kegiatan ini akan diberikan kepada 5.400 Siswa/i SD di Wilayah Banten. The rise of cases of school-age children who marry early is the basis for making this program. Following up on the anti-bullying and sexual violence program in DKI Jakarta in 2023, we continue the program by expanding the education point to the Banten & West Java regions, Indonesia with the issue of school children in the Banten region and parts of West Java marrying at a very young age. This activity will be provided to 5,400 elementary school students in the Banten region.
3	Pendidikan Education	Edukasi Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Berkualitas kepada 540 Tenaga Pendidik DKI Jakarta (Guru Berkualitas Anak Indonesia Cerdas) Education of Quality Elementary School Educators to 540 DKI Jakarta Educators (Quality Teachers for Smart Indonesian Children)	4	150.000.000	159.430.000	106,29%	Berangkat dari Program anti bullying dan kekerasan seksual di DKI Jakarta yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, PT Jamkrindo melihat terdapat masalah pada tenaga pendidik di sekolah atas dasar tersebut sebagai upaya perbaikan tenaga pendidik maka dibuatkan program edukasi untuk tenaga pendidik. Kegiatan ini akan diberikan kepada 540 Tenaga Pendidik di DKI Jakarta di 21 Sekolah Dasar. Following the anti-bullying and sexual violence program in DKI Jakarta that has been implemented in 2023, PT Jamkrindo found issues with school educators and as an effort to improve educators, an education program for educators was created. This activity will be provided to 540 educators in DKI Jakarta in 21 elementary schools.
4		5.400 Tas Sekolah Kepada Siswa/i di Wilayah Seluruh Indonesia 5,400 School Bags to Students in Regions Across Indonesia	4	700.000.000	611.070.353	87,30%	Memberikan 5.400 paket tas sekolah beserta perlengkapan belajar seperti buku dan alat tulis dalam rangka HUT Jamkrindo ke-54 kepada 5.400 Siswa/i SD di Seluruh Indonesia. Providing 5,400 school bag sets along with learning supplies such as books and stationery in the framework of Jamkrindo's 54th Anniversary to 5,400 elementary school students throughout Indonesia.
5		Renovasi Fasilitas Pendidikan Wilayah Seluruh Indonesia Renovation of Education Facilities throughout Indonesia	4	500.000.000	1.545.232.355	309,05%	Program renovasi fasilitas pendidikan wilayah 3T merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan oleh PT Jamkrindo program ini dibentuk untuk mendukung pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia kepada 20 Sekolah dengan prioritas daerah 3T. The 3T region education facility renovation program is an annual routine program implemented by PT Jamkrindo. This program was established to support the equitable distribution of education facilities in Indonesia to 20 schools with priority in 3T areas.

No.	Program Program	Program di Bidang Pendidikan Program in Education Field	TPB SDG	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget	Realisasi Triwulan IV 2024 Realization in Q4 2024	Capaian Achievement	Target Output Output Target
1	2	3	4	5	6	7=6:5	8
6	Pendidikan Education	Program Edukasi Literasi Keuangan bagi Keluarga Prasejahtera dan Pengentasan Stunting. Financial Literacy Education Program for Underprivileged Families and Stunting Alleviation.	4	250.000.000	388.970.288	155,59%	Edukasi kepada keluarga prasejahtera dalam mencari sumber mata pencaharian yang layak sekaligus program pengentasan Stunting kepada 250 Keluarga di wilayah 3T. Education for underprivileged families in finding a decent source of livelihood as well as a stunting alleviation program for 250 families in the 3T area.
7		Beasiswa Siswa Berprestasi Scholarship for Outstanding Students	4	200.000.000	298.218.400	149,11%	Program beasiswa siswa berprestasi merupakan program rutin tahunan untuk membantu siswa/i yang memiliki perekonomian kurang beruntung namun memiliki prestasi dan motivasi tinggi untuk tetap dapat bersekolah. Bantuan tersebut akan diberikan kepada : 10 Mahasiswa S2 dan 30 Siswa/i SD. The outstanding student scholarship program is an annual routine program to help students who are economically disadvantaged but have high achievement and motivation to stay in school. The scholarship will be offered to: 10 graduate students and 30 elementary school students.
8		Program <i>Mandatory</i> KBUMN Mandatory Program of the Ministry of SOEs	4	1.550.000.000	0	0,00%	Program <i>Mandatory</i> Mandatory Program
9		Bantuan Sarana Digital Jaringan Internet untuk Sekolah di Wilayah Timur Indonesia. Assistance for Digital Internet Network Facilities for Schools in the Eastern Region of Indonesia.	4	250.000.000	20.000.000	8,00%	Bantuan 2 (dua) paket digital jaringan internet untuk 2 (dua) Sekolah wilayah 3T. Assistance for 2 digital internet network packages for 2 schools in the 3T area.
10		Pameran Karya Seni Siswa/i Disabilitas. Disabled Students Artwork Exhibition.	4	100.000.000	0	0,00%	Pameran karya seni yang akan melibatkan 200 Siswa/i Disabilitas. Art exhibition that will involve 200 students with disabilities.
Total Program Pendidikan Total Education Program				4.200.000.000	3.624.109.854	86,29%	
1	Lingkungan Environmental	Desa Binaan dengan Sumber Energi Terbarukan. Fostered Villages with Renewable Energy Sources.	11	200.000.000	35.000.000	17,50%	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mendukung energi terbarukan seperti penggunaan sumber daya air dan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari melalui rumah-rumah masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan 1 (Satu) Desa di wilayah 3T. Conducting community development to support renewable energy such as the use of water resources and sunlight in daily life through community homes. The activity involved 1 village in the 3T region.
2		Optimalisasi Pengelolaan Sampah. Waste Management Optimization	12	600.000.000	805.880.485	134,31%	Pengembangan sistem optimalisasi pengelolaan sampah dengan <i>eco enzym</i> dari sampah sisa buah dan sayur yang dapat dijadikan produk kebersihan. Bantuan dilaksanakan oleh 8 (delapan) organisasi penggerak pengelolaan sampah. Development of a waste management optimization system with <i>eco enzymes</i> from fruit and vegetable waste that can be used as hygiene products. Assistance is implemented by 8 organizations promoting waste management.
3		Program Sanitasi Sekolah di Wilayah Seluruh Indonesia Pada 54 Sekolah. School Sanitation Program across Indonesia in 54 Schools.	6	1.350.000.000	1.420.000.000	105,19%	Pembangunan sarpras sanitasi layak di wilayah 3T untuk 54 sekolah. Construction of proper sanitation infrastructure in 3T areas for 54 schools.
4		Adopsi pohon Tree adoption	15	250.000.000	155.270.000	62,11%	Pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon dan tanaman buah sebagai bentuk pelestarian hutan, dan kebun hijau. Bantuan telah diberikan kepada 2 (dua) kelompok penggerak kebun gizi. Environmental conservation by planting trees and fruit plants as a form of forest conservation, and green gardens. Assistance has been provided to 2 groups of nutrition garden activists.
5		Drop box program untuk limbah tekstil. Drop box program for textile waste.	12	200.000.000	0	0,00%	Melakukan pengadaan <i>drop box</i> bagi pakaian-pakaian yang masih layak pakai maupun tidak layak pakai di kota-kota besar untuk dilakukan daur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mengurangi limbah plastik yang merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Providing drop boxes for clothes that are still suitable for use and not suitable for use in big cities to be recycled into something useful to reduce plastic waste which is one of the causes of global warming.

No.	Program Program	Program di Bidang Pendidikan Program in Education Field	TPB SDG	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget	Realisasi Triwulan IV 2024 Realization in Q4 2024	Capaian Achievement	Target Output Output Target
1	2	3	4	5	6	7=6:5	8
6		Perbaikan Fasilitas Umum Masyarakat. Community Public Facility Improvement.	11	750.000.000	1.055.322.500	140,71%	Program perbaikan fasilitas umum untuk masyarakat untuk mendukung TPB 11 Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan kepada 8 (delapan) kelompok masyarakat dan yayasan yang membutuhkan. Public facility improvement program for the community to support SDG 11 Sustainable Cities and Communities to 8 community groups and foundations in need.
7		Program Renovasi Rumah Ibadah. House of Worship Renovation Program.	11	1.500.000.000	1.392.869.400	92,86%	Program renovasi rumah ibadah merupakan program rutin tahunan kepada 18 (delapan belas) rumah ibadah. The house of worship renovation program is an annual routine program for 18 houses of worship.
8	Lingkungan Environmental	Tanalino III Kolaborasi dengan Garuda Indonesia. Tanalino III Collaboration with Garuda Indonesia.	11	100.000.000	60.000.000	60,00%	Program tanalino III merupakan program berkelanjutan sampai dengan tahun 2025, pada tahun 2023 telah dilaksanakan program Tana Lino Lestari II, memberikan bantuan di wilayah Pulau Komodo, Labuan Bajo, NTT berupa : 1. Revitalisasi Sarana Pendidikan SDN Pulau Komodo; 2. Revitalisasi Jaringan Internet SDN Pulau Komodo; 3. Bantuan Alat Laboratorium SMPN Pulau Komodo; 4. Tanan Tematik SDN Pulau Komodo; 5. Pembangunan Ruang Guru SDN Pulau Komodo; 6. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Tanalino III program is an ongoing program until 2025, in 2023 the Tana Lino Lestari II program was implemented, providing assistance in the Komodo Island area, Labuan Bajo, NTT in the form of: 1. Revitalization of SDN Komodo Island Education Facilities; 2. Revitalization of Internet Network of SDN Komodo Island; 3. Laboratory Equipment Assistance for SMPN Komodo Island; 4. Thematic Garden of SDN Komodo Island; 5. Construction of SDN Komodo Island Teacher's Room; 6. Fishermen Community Empowerment.
9		Safari Ramadhan 2024 Ramadan Safari 2024	11	250.000.000	294.000.000	117,60%	Pemberian Alqur'an, alat TPQ beserta alat sholat dan Santunan di 10 titik wilayah kerja Jamkrindo seluruh Indonesia. Providing Qurans, equipment needed for Quranic Education Level (TPQ) as well as prayer kits and donations in 10 points of Jamkrindo's working areas throughout Indonesia.
Total Program Lingkungan Total Environmental Program				5.200.000.000	5.218.342.385	100,35%	

No.	Program Program	Program di Bidang Pendidikan Program in Education Field	TPB SDG	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget	Realisasi Triwulan IV 2024 Realization in Q4 2024	Capaian Achievement	Target Output Output Target
1	2	3	4	5	6	7=6:5	8
1	Pengembangan UMK MSEs Development	MamaPreneur di Wilayah Timur MamaPreneur in the Eastern Region	8	200.000.000	490.360.043	245,18%	Pembinaan kepada UMKM Perempuan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia dengan tujuan menciptakan UMKM perempuan yang mandiri. Bantuan diberikan pada 4 (empat) kegiatan yang melibatkan UMKM perempuan. Mentoring for women MSMEs in several regions in Indonesia with the aim of creating independent women MSMEs. The assistance was provided to 4 activities that involving women-owned MSMEs
2		Kampung Binaan Jamkrindo di Wilayah Timur Indonesia. Jamkrindo Fostered Villages in the Eastern Region of Indonesia.	8	200.000.000	362.191.532	181,10%	Menciptakan 1 (satu) kampung binaan Jamkrindo di wilayah Indonesia bagian timur. Creating 1 Jamkrindo-assisted village in eastern Indonesia.
3		Bantuan alat pertanian kepada petani Millenial di Wilayah Jawa Tengah. Agricultural equipment assistance to Millennial farmers in the Central Java Region.	8	150.000.000	265.000.000	176,67%	3 (tiga) Paket alat pertanian untuk petani Millenial di Jawa Tengah. 3 packages of agricultural equipment for Millennial farmers in Central Java.
4		Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Keuangan Bagi Pengrajin Souvenir Khas Daerah. Marketing and Financial Management Training for Regional Souvenir Craftsmen.	8	150.000.000	431.431.182	287,62%	Program bantuan dukungan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan produktivitas bagi 5 (lima) kelompok pengrajin dalam 4 (empat) kegiatan pembinaan. Training and coaching support program to increase productivity for 5 groups of craftsmen in 4 coaching activities.
5		Pemberian Bibit Kopi Unggul Untuk Kelompok Petani Kopi. Provision of Superior Coffee Seedlings for Coffee Farmer Groups.	8	150.000.000	249.590.070	166,39%	Pemberian bantuan bibit kopi unggul kepada petani kopi untuk peningkatkan produktivitas kopi untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi kepada 1 kelompok petani. Provision of superior coffee seedlings to coffee farmers to increase coffee productivity to support Sustainable Development Goals on Decent Work & Economic Growth to 1 group of farmers.
6		Pelatihan Pengolahan dan Penyimpanan Rumput Laut di Wilayah Sulawesi Selatan. Seaweed Processing and Storage Training in South Sulawesi Region.	8	150.000.000	296.746.956	197,83%	Pelatihan Pelatihan Pengolahan dan Penyimpanan Rumput Laut di Wilayah Sulawesi Selatan untuk 50 Petani. Training on Seaweed Processing and Storage in South Sulawesi Region for 50 Farmers.
Total Program Pengembangan UMK Total MSEs Development Program				1.000.000.000	2.095.319.783	209,53%	
Grand Total				10.400.000.000	10.937.772.022	105,17%	

PENDANAAN USAHA MIKRO & USAHA KECIL (PUMK)

MICRO & SMALL ENTERPRISE FUNDING (PUMK)

1. Penyaluran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK)

Dana yang disalurkan oleh Jamkrindo untuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) pada tahun 2024 mencapai Rp2.075.000.000 atau 53,21% dari RKA Penyaluran Pendanaan UMK Kolaborasi dengan BRI tahun 2024. Sesuai dengan arahan Kementerian BUMN yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PT Jaminan Kredit Indonesia memiliki rencana untuk menyalurkan Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil sebesar 100% melalui kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") pada tahun 2024. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Surat Arahan dari Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 ("S-721") tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang merekomendasikan BRI kepada BUMN dan perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas sebagai pengelola kerjasama Program PUMK.

Berikut adalah realisasi penyaluran Program PUMK PT Jaminan Kredit Indonesia hingga Desember 2024:

1. Distribution of Funds for the Micro and Small Enterprise Funding (PUMK) Program

The funds disbursed by Jamkrindo for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) in 2024 reached IDR 2,075,000,000 or 53.21% of the Work Plan and Budget for the Distribution of MSE Funding in Collaboration with BRI in 2024. In accordance with the direction of the Ministry of SOEs stated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS), PT Jaminan Kredit Indonesia has a plan to distribute 100% of Micro and Small Business Funding through collaboration with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") in 2024. This is supported by the issuance of a Directive Letter from the Minister of SOEs No. S-721/MBU/11/2022 dated 10 November 2022 ("S-721") concerning Cooperation of Micro and Small Business Funding Program, which recommends BRI to SOEs and companies with minority state ownership as the cooperative manager of the PUMK Program.

The following is the realization of the distribution of the PT Jaminan Kredit Indonesia's PUMK Program as of December 2024:

Tabel Realisasi Program PUMK sampai dengan Triwulan IV 2024
Table of the Realization of the PUMK Program up to the Fourth Quarter of 2024

Program	RKA 2024 2024 Work Plan and Budget	Real Triwulan IV 2024 Real of the Fourth Quarter of 2024	Capaian Realization
1	2	3	4=3: 2
Penyaluran PUMK Mandiri Distribution of Independent Non-Funding MSE	-	-	0,00%
Penyaluran PUMK Kolaborasi Distribution of Collaborative Non- Funding MSE	3.900.000.000	2.075.000.000	53,21%
Total	3.900.000.000	2.075.000.000	53,21%

2. Kualitas Piutang

2. Quality of Receivables

Tabel Rincian Kualitas Piutang
Table of the Details of the Quality of Receivables

No	Status	RKA 2024 2024 Work Plan & Budget			Realisasi Triwulan IV 2024 Realization in Q4 2024		
		Saldo Piutang Receivable Balance	Bobot Weight	Rata-rata Tertimbang Piutang Weighted Average Receivables	Saldo Piutang Receivable Balance	Bobot Weight	Rata-rata Tertimbang Piutang Weighted Average Receivables
1	2	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5
1	Lancar Current	4.905.976.319	100%	4.905.976.319	4.476.684.370	100%	4.476.684.370
2	Kurang Lancar Substandard	5.356.233	75%	4.017.175	1.086.552.968	75%	814.914.726
3	Diragukan Doubtful	35.000.118	25%	8.750.029	235.413.672	25%	58.853.418
4	Macet Loss	5.473.627.771	0%	-	7.887.305.177	0%	-
Total		10.419.960.442		4.918.743.524	13.685.956.187		5.350.452.514

Piutang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) merupakan penyaluran secara mandiri dan penyaluran kerjasama melalui Perjanjian kerjasama antara PT Jamkrindo dengan BRI tentang Pelaksanaan Program PUMK Nomor BRI : B.57-MBD/PDT/12/2022 – Nomor Jamkrindo : 30/PKS/NON-OP/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 dengan total saldo piutang sebesar Rp. 13.685.956.187,- dengan total rata-rata tertimbang sebesar Rp.5.350.452.514,-

Receivables from the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) are independent distribution and cooperation distribution through a cooperation agreement between PT Jamkrindo and BRI regarding the Implementation of the PUMK Program Number BRI: B.57-MBD/PDT/12/2022 - Jamkrindo Number: 30/PKS/NON-OP/XII/2022 dated December 27, 2022 with a total receivable balance of IDR 13,685,956,187, with a total weighted average of IDR 5,350,452,514.

PENGAWASAN DAN PUBLIKASI PROGRAM TJSL

MONITORING AND PUBLICATION OF THE TJSL PROGRAM

Selama tahun 2024, Jamkrindo telah melaksanakan pengawasan dan publikasi program TJSL sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/2022 Pasal 22 mengenai Pengawasan dan Pelaporan, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/2021 Pasal 27 yang mengatur tentang Publikasi Pelaksanaan Program TJSL BUMN.

Throughout 2024, Jamkrindo has conducted monitoring and publication of the TJSL program in accordance with the provisions stated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-6/2022 Article 22 concerning Monitoring and Reporting, as well as Minister of SOEs Regulation No. PER-05/2021 Article 27 which regulates the Publication of the Implementation of TJSL Programs of SOEs.



07

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS





**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

***PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023***

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2024 and 2023</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Tambahan		<i>Additional Information</i>
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	I	<i>Statements of Financial Position (Parent Entity)</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	II	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)</i>
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	III	<i>Statements of Changes in Equity (Parent Entity)</i>
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	IV	<i>Statements of Cash Flows (Parent Entity)</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Akhmad Purwakajaya
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat, 10610
2. Nama : Alia Nur Fitri
Jabatan : Direktur Keuangan dan Investasi
Alamat Kantor : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat, 10610

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Maret/March 2025

Atas nama dan mewakili Direksi/For and Behalf of the Directors: 

Akhmad Purwakajaya
Direktur Utama/
President Director



We, the undersigned:

1. Name : Akhmad Purwakajaya
Title : President Director
Office Address : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat, 10610
2. Name : Alia Nur Fitri
Title : Finance, and Investment Director
Office Address : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat, 10610

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary;
2. The consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or facts;
4. We are responsible for PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary internal control system.

Thus this statement is made truthfully.

Alia Nur Fitri

Direktur Keuangan dan Investasi/
Finance, and Investment Director

Kantor Pusat

Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa B-9 Kav.6 Kemayoran Jakarta Pusat, 10610
Tel. (62-21) 654 0335, Fax.(62-21) 654 0344/48
www.jamkrindo.co.id

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00297/2.1030/AU.1/08/1298-1/1/III/2025

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340
F +62 215140 1350

www.rsm.id

PT Jaminan Kredit Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including information of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal-hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Jaminan Kredit Indonesia (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan tahun 2024, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan tahun 2024 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Other Matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia as of December 31, 2024 and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Jaminan Kredit Indonesia (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2024 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

The consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiaries as of and for the year ended December 31, 2023 were audited by other independent auditor whose report dated March 28, 2024 expressed an unmodified opinion on those financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information contained in the 2024 annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The 2024 annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.



Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan tahun 2024, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian Grup.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the 2024 annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations or Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's consolidated financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of audit of the Group's consolidated financial statement. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Bimo Iman Santoso
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1298/
Public Accountant License Number: AP.1298

Jakarta, 14 Maret 2025/March 14, 2025



**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Million Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023*) Rp	
ASET				ASSETS
Kas dan kas di bank - bersih	4, 41	235,074	185,130	Cash and cash in banks - net
Deposito wajib dan berjangka - bersih	5, 41	3,960,252	7,233,120	Statutory and time deposits - net
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu - bersih	6, 41	1,542,272	1,552,271	Time deposits for certain purposes - net
Efek-efek - bersih				Marketable securities - net
- Efek utang	7a, 41	12,254,595	8,412,675	Debt securities -
- Sukuk	7b, 41	3,933,647	4,685,254	Sukuk -
- Reksadana	7c, 41	1,427,037	1,459,975	Mutual funds -
- Saham	7d, 41	175,740	184,154	Shares -
- Efek beragun aset	7e, 41	628	3,063	Security (Asset underlying) -
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	8, 41	1,820,100	2,737,976	Guarantee fee receivables - net
Piutang penjaminan ulang - bersih	9, 41	572,966	582,178	Re-guarantee receivables - net
Piutang hasil investasi - bersih	10, 41	256,978	224,895	Investment income receivables - net
Pajak dibayar dimuka	20a	119,514	50,415	Prepaid Tax
Biaya dibayar dimuka		46,589	65,385	Prepaid expenses
Aset tetap - bersih	11	721,504	626,808	Fixed assets - net
Aset takberwujud - bersih		101,268	68,202	Intangible assets - net
Penjaminan ulang dibayar dimuka	12	1,497,582	936,226	Prepaid re-guarantee
Aset pengembalian - bersih	13	1,414,594	791,644	Reimbursement assets - net
Biaya akuisisi tangguhan	14	117,558	147,381	Deferred acquisition cost
Aset penjaminan ulang - bersih	15	321,817	354,324	Re-guarantee assets - net
Aset pajak tangguhan - bersih	20d	1,833,252	1,925,862	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain - bersih	16	5,361	4,282	Other assets - net
JUMLAH ASET		32,358,328	32,231,220	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang klaim	17, 41	299,226	81,372	Claim payables
Utang penjaminan ulang	18, 41	1,005,112	633,300	Re-guarantee payables
Akrual dan utang lain-lain	19	1,408,359	1,535,414	Accruals and other payables
Utang pajak	20b	6,352	129,408	Taxes payables
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	21	14,939,747	15,211,466	Liabilities for financial guarantee contracts
Pendapatan komisi ditangguhkan	22	246,352	159,158	Deferred commission income
Estimasi liabilitas klaim	23	307,561	358,504	Estimated claim liabilities
Imbal jasa <i>kafalah</i> ditangguhkan	24	719,826	686,139	Unearned kafalah fees
Liabilitas imbalan kerja	25	81,558	82,437	Employee benefits liabilities
JUMLAH LIABILITAS		19,014,093	18,877,198	TOTAL LIABILITIES

*) reklasifikasi, lihat Catatan 45

*) reclassification, see Notes 45

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements from an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Million Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023*) Rp	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to equity holders of the parent entity
Modal saham:				Share capital:
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp1.365.160 (nilai penuh) per lembar saham				Class A Dwiwarna - nominal amount Rp1,365,160 (full amount) at par per share
- Seri B - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham				Class B - nominal amount Rp1,000,000 (full amount) at par per share
Modal dasar:				Authorized capital:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham				Class A Dwiwarna - 1 share
- Seri B - 30.000.000 saham				Class B - 30,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				Issued and fully paid:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham				Class A Dwiwarna - 1 share
- Seri B - 10.638.732 saham	26	10,638,733	10,638,733	Class B - 10,638,732 shares
Pengukuran kembali imbalan pascakerja		(17,396)	(19,859)	Remeasurement of post- employment benefits
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		(360,984)	(265,002)	Unrealised losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya		1,921,543	1,562,455	Appropriated retained earnings
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya		1,161,456	1,436,849	Unappropriated retained earnings
		13,343,352	13,353,176	
Kepentingan non-pengendali	27	883	846	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		13,344,235	13,354,022	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		32,358,328	32,231,220	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) reklasifikasi, lihat Catatan 45

*) reclassification, see Notes 45

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements from an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Million Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023*) Rp	
PENDAPATAN PENJAMINAN				GUARANTEE INCOME
Imbal jasa penjaminan bruto	28	7,733,031	6,738,700	Gross guarantee fee income
Imbal jasa <i>kafalah</i> bruto	29, 41	368,277	408,035	Gross <i>kafalah</i> fees
Penurunan imbal jasa <i>kafalah</i> yang belum merupakan pendapatan	31	(22,205)	(24,212)	Decrease in unearned <i>kafalah</i> fees
Premi penjaminan ulang	30	(1,157,054)	(767,795)	Re-guarantee premiums
Jumlah pendapatan penjaminan - bersih		6,922,049	6,354,728	Total guarantee income - net
BEBAN PENJAMINAN				GUARANTEE EXPENSES
Beban klaim bruto	32, 41	9,129,657	5,957,023	Gross claim expenses
Klaim penjaminan ulang	34, 41	(1,068,761)	(788,483)	Re-guarantee claims
Beban <i>ujrah</i>		11,364	15,386	<i>Ujrah</i> expenses
Biaya <i>kafalah</i> lainnya		--	762	Other <i>kafalah</i> expenses
Penurunan cadangan klaim	33	(1,101,458)	(529,220)	Decrease in claim reserves
Pendapatan subrogasi - bersih	37, 41	(1,940,167)	(1,059,417)	Subrogation income - net
Pendapatan <i>ujrah</i> penjaminan ulang		(11,244)	(18,719)	Re-guarantee <i>ujrah</i> income
Jumlah beban penjaminan - bersih		5,019,391	3,577,332	Total guarantee expenses - net
Pendapatan penjaminan bersih		1,902,658	2,777,396	Net guarantee income
Pendapatan komisi	35, 41	154,271	92,651	Commission income
Beban komisi	36, 41	(26,954)	(31,338)	Commission expenses
Pendapatan investasi - bersih	38, 41	1,458,916	1,204,178	Investment income - net
Beban usaha	39	(2,041,533)	(2,266,001)	Operating expenses
Pendapatan lain-lain - bersih	40	7,566	15,099	Other income - net
Beban pajak final		(167,873)	(153,023)	Final tax expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1,287,051	1,638,962	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	20c, 20d	(125,557)	(202,113)	Income tax expenses
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		1,161,494	1,436,849	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	25	3,158	(670)	Remeasurement of employee benefits liabilities
Efek pajak terkait	20d	(695)	135	Related tax effect
Kerugian yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(8,413)	(9,473)	Unrealized losses on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
		(5,950)	(10,008)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
(Kerugian) pendapatan yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(88,673)	67,368	Unrealized (losses) gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Efek pajak terkait	20d	1,104	157	Related tax effect
		(87,569)	67,525	
(Kerugian)/ pendapatan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		(93,519)	57,517	Other comprehensive (loss)/ income for the year, net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,067,975	1,494,366	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1,161,456	1,437,013	Owner of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		38	(164)	Non-controlling interest
		1,161,494	1,436,849	
LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA:				COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1,067,938	1,494,520	Owner of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		37	(154)	Non-controlling interest
		1,067,975	1,494,366	

*) reklasifikasi, lihat Catatan 45

*) reclassification, see Notes 45

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements from an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY

CONSOLIDATED STATEMENTS CHANGES IN OF EQUITY

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Pengukuran kembali liabilitas setelah pajak/ Remeasurement of employee benefit liabilities, net of tax	(Kerugian)/ keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ Unrealised (losses)/gain on marketable securities on fair value through other comprehensive income, net of tax	Saldo laba/ Retained earnings		Kepentingan non- pengendali/ Non- controlling interest	Jumlah/ Total	Jumlah ekuitas/ Total equity
				Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings			
				1,242,333	1,279,835		12,818,533	12,819,533
Saldo 31 Desember 2022	10,638,733	(19,324)	(323,044)	1,279,835	(1,279,835)	--	--	--
Cadangan umum	--	--	--	1,279,835	(1,279,835)	--	--	--
Dividen	--	--	--	(959,877)	--	--	(959,877)	(959,877)
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	1,437,013	(164)	1,437,013	1,436,849
Perubahan ekuitas Entitas Anak	--	--	--	164	--	--	--	--
Penghasilan komprehensif lain:	--	--	--	--	--	--	--	--
Penghasilan melalui penghasilan	--	--	--	--	--	--	--	--
komprehensif lain	--	--	--	--	--	--	--	--
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	--	--	--
imbalan pascakerja	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo 31 Desember 2023	10,638,733	(19,859)	(265,002)	1,562,455	1,436,849	846	13,353,176	13,354,022
Cadangan umum	--	--	--	1,436,849	(1,436,849)	--	--	--
Dividen	--	--	--	(1,077,761)	--	--	(1,077,761)	(1,077,761)
Laba bersih tahun berjalan	--	--	--	--	1,161,456	38	1,161,456	1,161,494
Penghasilan komprehensif lain:	--	--	--	--	--	--	--	--
Nilai wajar melalui penghasilan	--	--	--	--	--	--	--	--
komprehensif lain	--	--	--	--	--	--	--	--
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	--	--	--
imbalan pascakerja	--	2,463	--	--	--	--	2,463	2,463
Saldo 31 Desember 2024	10,638,733	(17,396)	(360,984)	1,921,543	1,161,456	883	13,343,352	13,344,235

Balance as at 31 December 2022

General reserves
Dividend
Net profit for the year
Adjustment to Subsidiary's equity
Other comprehensive income
Fair value through other
comprehensive income
Remeasurement of post-
employment benefits

Balance as at 31 December 2023

General reserves
Dividend
Net profit for the year
Other comprehensive income
Fair value through other
comprehensive income
Remeasurement of post-
employment benefits

Balance as at 31 December 2024

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements from an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Million Rupiah,
unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023*) Rp	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan imbal jasa penjaminan	7,940,891	11,111,588	Receipt from guarantee fees
Penerimaan dari mitra penjaminan ulang	935,923	515,596	Receipt from re-guarantee partners
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya	2,236,508	1,109,244	Receipt from other operating activities
Pembayaran premi penjaminan ulang	(1,151,478)	(628,122)	Payment of re-guarantee premiums
Pembayaran klaim	(8,811,483)	(5,933,725)	Payment of claims
Pembayaran beban usaha	(783,578)	(684,996)	Payment of operating expenses
Pembayaran kepada karyawan	(822,238)	(585,647)	Payment to employee
Pembayaran pajak penghasilan	(180,316)	(666,381)	Payment of income tax
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas operasi	(635,771)	4,237,557	Net cash flows (used in)/ provided by operating activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan hasil investasi	1,321,289	1,135,360	Receipt from investment income
Penempatan investasi	(5,399,646)	(5,667,989)	Purchase of investments
Penjualan investasi	4,703,617	1,007,694	Sale of investments
Pembelian aset tetap	(126,243)	(97,457)	Acquisition of fixed assets
Penjualan aset tetap	1,068	--	Sale of fixed assets
Pembelian aset takberwujud	(37,395)	(2,643)	Acquisition of intangible assets
Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi	462,690	(3,625,035)	Net cash flows provided by/ (used in) investing activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran sewa	(55,528)	(45,693)	Lease payments
Dividen	(1,077,761)	(959,877)	Dividend
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1,133,289)	(1,005,570)	Net cash flows used in financing activities
Penurunan pada kas dan setara kas	(1,306,370)	(393,048)	Decrease in cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	6,052,920	6,445,968	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4,746,550	6,052,920	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:
Kas dan kas di bank	235,074	185,130	Cash and cash in banks
Deposito wajib dan berjangka (dibawah tiga bulan)	3,725,343	5,071,657	Statutory and time deposits (below 3 months)
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	786,133	796,133	Time deposits for certain purposes
	4,746,550	6,052,920	

Lihat Catatan 46 atas laporan keuangan konsolidasian untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas

See notes 46 to the consolidated financial statements for the supplemental disclosure of cash flows information

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements from an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. Umum

a. Pendirian

PT Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1981 dengan nama Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, yang sebelumnya merupakan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi ("LJKK") yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1981, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1985, selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018, Perum Sarana Pengembangan Usaha diubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, bentuk badan hukum Perum Jaminan Kredit Indonesia diubah perseroan terbatas bernama PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau PT Jamkrindo (Persero) berdasarkan Akta Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., No. 25 tanggal 24 Februari 2020. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 9 April 2020 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU.0028854.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 9 April 2020, Saham Seri B dari Pemerintah Republik Indonesia dialihkan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), sehingga bentuk badan hukum PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menjadi PT Jaminan Kredit Indonesia.

1. General

a. Establishment

PT Jaminan Kredit Indonesia (the "Company") was established based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 51 Year 1981 under the name Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, previously named Lembaga Jaminan Kredit Koperasi ("LJKK") which is formed by 1970. Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 51 Year 1981, which is renewed by the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 27 Year 1985, here in after by the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 95 Year 2000 dated 7 November 2000, Perum Pengembangan Keuangan Koperasi was changed to Perum Sarana Pengembangan Usaha. Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 41 Year 2008, which was updated with Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 35 Year 2018, Perum Sarana Pengembangan Usaha was changed to Perum Jaminan Kredit Indonesia. Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 11 Year 2020, legal form of Perum Jaminan Kredit Indonesia change to limited liability company namely PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) or PT Jamkrindo (Persero) by Notarial Deed No. 25 by Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., dated 24 February 2020. Based on the Deed of Resolution of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia regarding change of Articles of Association No. 2 dated 9 April 2020 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU.0028854.AH.01.02. Year 2020 dated 9 April 2020, Series B Shares from the Government of Republic of Indonesia is transferred to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), which resulting in form of a legal entity of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) becoming PT Jaminan Kredit Indonesia.

1. Umum (lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada 7 Oktober 2022, terdapat perubahan terakhir Anggaran Dasar perseroan terbatas dengan Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.KN., No. 7 mengenai Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2022 melalui surat keputusan No. AHU-0075624.AH.01.02 tahun 2022.

Kantor pusat Grup terletak di Jalan Angkasa Blok 9- Kay.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, DKI Jakarta dan mempunyai 9 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 53 Kantor Cabang, dan 16 Kantor Unit Pelayanan ("KUP") yang tersebar di seluruh Indonesia (tidak diaudit).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 07 tanggal 7 Oktober 2022, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah melakukan penjaminan kredit baik bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi ("UMKM"), Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

The Company's Articles of Association have been amended several times. On October 7, 2022, the latest amendment to the Articles of Association of the limited liability company was made through Notarial Deed No. 7 by Notary Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.KN., concerning the Circular Decision Statement of The Shareholders. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-0075624.AH.01.02 Year 2022 dated 19 October 2022.

The Group's head office located at Jalan Angkasa Blok 9-Kay.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, DKI Jakarta and have 9 Regional Offices, 1 Special Branch Office, 53 Branch Offices, and 16 Unit Service Offices ("KUP") which is spread over in all Indonesia (unaudited).

In accordance with the Deed of Decision Statement of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 07 dated 7 October 2022, the Company's main business activities are providing credit guarantees for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives ("UMKM"), Guarantees for State- Owned Enterprises, Guarantee for Warehouse Receipt Systems, and other guarantees as well as optimizing the utilization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance.

As at 31 December 2024 and 2023, the composition of the Board of Commissioners, Directors, and Audit Committee is as follows:

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

	2024	2023	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama / Komisaris			President Commissioner/
Independen	Krisna Wijaya	Krisna Wijaya	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Hernita Alius	Hernita Alius	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Muhammad Muchlas Rowi	Muhammad Muchlas Rowi	Independent Commissioner
Komisaris	Desty Arlaini	Desty Arlaini	Commissioner
Komisaris	Ari Wahyuni	Ari Wahyuni	Commissioner
Komisaris	Angger P Yuwono	Angger P Yuwono	Commissioner
Direksi			Directors
Direktur Utama	Akhmad Purwakajaya	Akhmad Purwakajaya	President Director
Direktur Bisnis Penjaminan	Henry Panjaitan	Henry Panjaitan	Business Guarantee Director
Direktur Operasional dan Jaringan	Suwarnito	Suwarnito	Operational and Network Director
Direktur Kelembagaan dan Layanan	Abdul Bari	Abdul Bari	Director of Institutional and Service
Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko	Achmad Ivan Sutrisna	Achmad Ivan Sutrisna	Director of SDM Management, General Affair, and Risk Management
Direktur Keuangan dan Investasi	Alia Nur Fitri	Alia Nur Fitri	Director of Finance and Investment
Komite Audit			Audit Committee
Ketua	Hernita Alius	Hernita Alius	Chairman
Anggota	Desty Arlaini	Desty Arlaini	Member
Anggota	Angger P Yuwono	Angger P Yuwono	Member
Anggota	Sukamdani Eko Basuki	Sukamdani Eko Basuki	Member
Anggota	Dedit Satriyo Utomo ¹⁾	Safari Mirza ²⁾	Member

1) diangkat tanggal 29 April 2024

2) diberhentikan tanggal 29 April 2024

appointed on 29 April 2024 1)

dismissed on 29 April 2024 2)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah karyawan Grup dan Entitas Anak masing-masing adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

As at 31 December 2024 and 2023, the number of employees of the Group and Subsidiary are as follows (unaudited):

	2024	2023	
Grup	1,150	1,075	The Group
Entitas Anak	328	315	Subsidiary
	1,478	1,390	

Entitas Anak yang dikonsolidasikan

Berikut ini adalah Entitas Anak yang dikonsolidasi oleh Grup karena mempunyai kepemilikan mayoritas atau hak untuk mengendalikan operasi:

Consolidated Subsidiary

The following is the list of the Group's consolidated Subsidiary in which it has majority ownership or the right to control the operation:

Entitas Anak/ Name of subsidiary	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Type of business	Dimulainya kegiatan komersial/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage 31 Desember/ December 31		Jumlah aset (Sebelum eliminasi)/ Total assets (Before eliminations) 31 Desember/ December 31	
				2024 Rp	2023 Rp	2024 Rp	2023 Rp
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jakarta	Penjaminan syariah/ Sharia guarantee	2014	99.929%	99.929%	2,408,935	2,452,095

Entitas induk langsung dan entitas induk utama Grup adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

The Group's immediate and ultimate parent is PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), incorporated and domiciled in Indonesia.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

2. Significant Accounting Policies

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak (bersama-sama disebut "Grup") disusun dan diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 14 Maret 2025.

The consolidated financial statements of the Company and Subsidiary (together called "Group") were prepared and authorized by the Directors to be issued on March 14, 2025.

Kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini:

The material accounting policies adopted in the preparation of these consolidated financial statements are set out below:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("IAI") and the Sharia Accounting Standards Board of IAI.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan harga perolehan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dimana diukur pada nilai wajar. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention except for financial assets measured at fair value through other comprehensive income and at fair value through profit or loss which have been measured at fair value. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan kas di bank mencakup kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flow on the basis of operating, investing, and financing activities. For the purpose of statement of cash flow, cash and cash in banks, time deposits with original maturities of three months or less, which are not restricted and not pledged as collaterals for borrowings.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Figures in the consolidated financial statements are expressed in million Rupiah, unless otherwise stated.

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Grup beroperasi (mata uang fungsional). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Terms included in the consolidated financial statements of the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the Group operates (the functional currency). The functional currency of the Group is Rupiah.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontingensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Direksi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula (lihat Catatan 3).

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Berikut amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Implementasi amendemen standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2. Significant Accounting Policies (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The preparation of the consolidated financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based on the Director's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates (refer to Note 3).

b. Changes to the statements of financial accounting standards effective in the current year

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs has been changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The following amendment to standards which are relevant to the Company, are effective from January 1, 2024, but do not result in significant impact to the financial statements are as follows:

- Amendments PSAK 116: Lease regarding Lease Liability in a Sale and Leaseback;
- Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Current or Noncurrent;
- Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;
- Amendments PSAK 207: Statement of Cash Flows and PSAK 107: Financial Instrument: Disclosure regarding Supplier Finance Arrangements; and
- Revision PSAK 409: Accounting for Zakat, Infaq, and Sadaqah and Revision PSAK 401: Presentation of Sharia Financial Statements.

The implementation of the above amendment to standards had no material on the amounts reported for the current period or prior financial year.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

c. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 2.a.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset, dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

c. Principle of consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 2.a.

A subsidiary is an entity controlled by the Company, i.e the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets, and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses, and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- (a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

c. Principle of consolidation (continued)

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- (a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- (b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- (c) Recognizes the fair value of the consideration received, (if any), from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- (e) Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and*
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

d. Financial assets and financial liabilities

Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"), aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Grup berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut, serta berdasarkan dengan PSAK 109 "Instrumen Keuangan".

Financial assets

The Group classifies its financial assets in categories financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL"), financial assets measured at amortized cost, and financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The following table presents the classification of the Group's financial instruments based on the characteristics of these financial instruments, as well as in accordance with SFAS 109 "Financial Instruments".

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ Category as defined by SFAS 109		Golongan (ditentukan oleh Grup)/ Class (as determined by Group)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")	Efek- efek/ Marketable securities	Reksadana/ Mutual funds Obligasi/ Bonds
	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortized cost	Kas dan kas di bank/ Cash on hand and cash in banks	
		Efek- efek/ Marketable securities	Obligasi/ Bonds Deposito berjangka/ Time deposits
		Piutang imbal jasa penjaminan/ Guarantee fee receivables	
		Piutang penjaminan ulang/ Re-guarantee receivables	
		Piutang hasil investasi/ Investment income receivables	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI")	Aset lain-lain/ Other assets	Uang Jaminan/ Security deposits Lain-lain/ Others - net
		Efek- efek/ Marketable securities	Obligasi/ Bonds Saham/ Shares
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	Utang klaim/ Claim payables Liabilitas kontrak jaminan keuangan/ Financial guarantee contracts Utang penjaminan ulang/ Re-guarantee payables Akrual dan utang lain-lain/ Accruals and other payables	

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan tersebut masuk ke dalam klasifikasian yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how Groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets are measured at fair value through profit or loss except business model test and contractual cash flow test show that financial assets are included in the classification that are measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laba/rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain" dan "Pendapatan investasi - bersih". Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam Grup diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebagai "Pendapatan bunga".

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

**d. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

Financial instruments classified into this category are recognized at fair value at initial recognition; transaction costs (if any) are recognized directly in the profit or loss.

Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial instruments are recognized in the profit or loss and are recorded as "Unrealized gain/(losses) on financial assets at fair value through other comprehensive income" and "Investment income - net". Interest income from financial instruments in the Group measured at fair value through profit or loss is recorded as "Interest income".

Financial assets are measured at amortized cost

Financial assets are measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *the financial assets is held within a business model whose objective is to hold the financial asset to collect contractual cash flows; and*
- *its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

Financial instruments measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

- *financial assets are managed in a business model whose objectives will be met by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and*
- *contractual requirements of financial assets meet the SPPI criteria.*

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

Aset dapat dijual dari portofolio *hold-to-collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

Saat pengakuan awal, entitas dapat membuat pilihan yang tak terbatalan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan selanjutnya pada nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup. Pernyataan ini dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan maupun imbalan kontingen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Grup mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

**d. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

Assets may be sold out of *hold-to-collect* portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Unrealized gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognized.

Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces accounting mismatch.

At initial recognition, an entity may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value of an investment in an equity instrument within the scope. This statement and is neither held for trading nor contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial assets on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Group considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Group considers:

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

- Kejadian kontingensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Grup atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Grup. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi dimana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Grup menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat *desk* yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan

**d. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Early redemption and extension terms;*
- *Terms that limit the Group's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Group. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where Groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Group assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates/objectives within a business line, at a product business line or more granular desk level (i.e. subportfolios or sub-business lines).

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 109 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to management;*
- *the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Grup dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Grup untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 109 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi, diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**d. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

- how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Group reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Group did not reasonably expect to prevail when the assets were recognized, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

The targeting operating model for SFAS 109 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

The Group can reclassified all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

Financial liabilities

The Group classified its financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortized cost.

Financial liabilities measured at amortized Costs

Financial liabilities measured at amortized cost are initially recognized at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Group measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

**d. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

Pengukuran awal

Pengakuan Grup menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian transaksi untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

Initial recognition

The Group uses trade date accounting for regular contracts when recording financial assets transactions.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Grup melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Derecognition

Financial assets are derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Group evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognized when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Off-setting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amount and there is an intention to settle on a net basis or realize the assets and settle the liability simultaneously.

Hak yang berkekuatan hukum harus tidak bersifat kontingensi atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

The legally enforceable rights must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at the date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

**d. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri, badan pengawas, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry Group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid offer spread or significant increase in the bid offer spread and there are few recent transactions.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar yang aktif ditentukan berdasarkan kuotasi pasar aktif dari sumber yang dapat dipercaya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kuotasi pasar aktif ini termasuk yang berasal dari *Interdealer Market Association* ("IDMA"), Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), atau harga kuotasi broker untuk obligasi, harga saham dari indeks harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk saham, dan nilai aset bersih untuk reksadana dan *exchange traded funds*.

Fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the consolidated statement of financial position date from credible sources. This includes IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices, IBPA's (Indonesia Bond Pricing Agency) quoted price or broker's quoted price for bonds, shares price from shares prices indexes at Indonesia Stock Exchange for shares and net assets value for mutual funds and exchange traded funds.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar, estimasi yang wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar terkini instrumen keuangan lain yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama atau dihitung berdasarkan estimasi arus kas terhadap aset bersih dari instrumen keuangan tersebut.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bukti terbaik dari nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksinya (nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima), kecuali nilai wajar dari instrumen tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan transaksi untuk instrumen yang sama di pasar terkini yang dapat diobservasi (yaitu yang tanpa modifikasi atau *repackaging*) atau berdasarkan teknik penilaian dimana variabelnya hanya data dari pasar yang dapat diobservasi.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") dengan menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis perkiraan masa depan.

Perusahaan menilai dengan basis perkiraan masa depan kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur aset keuangan dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi dan dapat didukung, yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**d. Financial assets and financial liabilities
(continued)**

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair value are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using available inputs at the dates of the consolidated statement of financial position.

The best evidence of fair value at initial recognition is the transaction price (the fair value of the consideration given or received), unless the fair value of that instrument is proved by comparison with other observable current market transactions for the same instrument (that is, without modification or repackaging) or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets.

Impairment of financial assets

The Company applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss ("ECL") using a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis.

The Company assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortized cost. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. At each reporting date, the Company assesses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial assets based on reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future macroeconomic factors, and that is indicative of credit risk having significantly increased since initial recognition.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

e. Cash and cash equivalent

Cash and cash equivalent include cash on hand and cash in banks which are not restricted and not pledged as collateral for borrowings.

f. Deposito wajib dan berjangka

Deposito wajib dan berjangka mencakup penempatan dana Grup ke suatu lembaga keuangan. Deposito wajib dan deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal.

f. Statutory and time deposits

Statutory and time deposits include the placement of Group funds in a financial institution. Statutory deposits and time deposits are stated at nominal value.

g. Investasi

Efek-efek

Efek-efek terdiri dari saham, obligasi, reksadana, dan efek beragun aset. Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi klasifikasi aset keuangan.

g. Investments

Marketable securities

Marketable securities consist of shares, bonds, mutual funds, and asset-backed securities. They are classified as financial assets at fair value through profit or loss, financial assets are measured at amortized cost, fair value through profit and loss and fair value through other comprehensive income. Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets classification.

Investasi pada sukuk

Investasi sukuk diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Grup berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laba rugi tahun berjalan.
- Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Investment in sukuk

Investment in sukuk are classified based on business model defined by the Group in accordance with SFAS 410 on "Accounting for Sukuk" as follows:

- At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.
- At fair value through profit or loss securities are stated at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year consolidated profit or loss.
- At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in current year other comprehensive income.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

h. Kontrak jaminan keuangan

Grup menerapkan kontrak jaminan keuangan. Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

Imbal jasa penjaminan dan pendapatan ditangguhkan

Imbal jasa penjaminan diakui ketika terbitnya Sertifikat Penjaminan ("SP") dan ulang tahun akad/realisasi kredit/pembiayaan dengan mempertimbangkan mekanisme pembayaran imbal jasa penjaminan oleh penerima jaminan.

Imbal jasa penjaminan diakui sebesar pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan ("SP").

Pendapatan ditangguhkan merupakan bagian dari imbal jasa penjaminan yang berkaitan dengan persyaratan belum berakhirnya cakupan penjaminan. Pendapatan ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan ("SP").

Pendapatan ditangguhkan merupakan imbal penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari terjamin kepada Grup yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Piutang imbal jasa penjaminan disajikan secara neto setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Pendapatan imbal jasa penjaminan ditangguhkan disajikan sebesar sisa imbal jasa penjaminan pada tanggal laporan yang belum diamortisasi sebagai pendapatan sampai dengan masa penjaminan.

h. Financial guarantee contract

The Group implement financial guarantee contract. Financial guarantee contract is contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.

Guarantee fee income and deferred income

Guarantee fee income is recognized when the Guarantee Certificate ("SP") is issued and the anniversary of the contract/ realization of credit/ financing by considering the payment mechanism for guarantee services by the recipient of the guarantee.

Guarantee fee income is recognized amounted deferred revenue and amortized over the period upon inception of Guarantee Certificate ("SP").

Deferred income represents portion of the guarantee fee income relating to the unexpired terms of coverage guarantee. Deferred income will be recognized as income during the remaining period of guarantee and allocated based on the issuance month of Guarantee Certificate ("SP").

Deferred guarantee is a guarantee fee income for current year and previous years from the guaranteed to the Group which will become income in the coming years.

Receivables from guarantee services are presented on a net basis after deducting the allowance for impairment losses. Income from deferred guarantee services is presented at the remaining guarantee fees at the reporting date which has not been amortized as income up to the guarantee period.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

h. Kontrak jaminan keuangan (lanjutan)

h. Financial guarantee contract (continued)

Premi penjaminan ulang dan penjaminan ulang
dibayar di muka

Premi penjaminan ulang merupakan beban atas premi yang dibayarkan kepada mitra penjaminan ulang guna mengalihkan risiko klaim. Besaran premi penjaminan ulang yang menjadi hak mitra penjaminan ulang ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Re-guarantee premiums and prepaid re-Guarantee

Re-guarantee premiums are premium expenses paid to re-guarantee company to transfer the claim risk. Amount of re-guarantee premium is defined based on type of product guarantee.

Beban klaim

Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Claim expenses

Claims are recognized as expenses when incurred. Re-guarantee claims received from re-guarantee companies are recognized as deduction from claim expenses in the same period as the recognition of claim expenses. Subrogation rights are recognized as deduction from claim expenses upon realization.

Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi konsolidasian menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim penjaminan ulang, dan kenaikan/penurunan cadangan klaim.

Claim expenses in the consolidated statement of profit or loss represent gross claims, re-guarantee claims and increase/decrease in claim reserves.

Liabilitas kontrak jaminan keuangan

Kontrak jaminan keuangan mensyaratkan Grup untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti penerima jaminan atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

Liabilities for financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts require the Group to make certain payments to reimburse the recipient for losses incurred because certain debtors fail to make payments when due in accordance with the original terms or the modified terms of a debt instrument.

Cadangan klaim atas kontrak penjaminan keuangan merupakan estimasi klaim atas kontrak penjaminan keuangan yang akan menjadi tanggungan Grup, yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal laporan. Kontrak jaminan keuangan selanjutnya diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

Claims reserve on financial guarantee contracts are estimated claims on financial guarantee contracts that will be borne by the Group, the amount of which is recognized and recorded at the report date. Financial guarantees are subsequently measured at the higher of:

- jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan; dan
- jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dan penghasilan yang diakui.

- the amount of the loss allowance determined; and
- the amount initially recognized less, when appropriate, the cumulative amount of income recognized.

Grup disyaratkan untuk melakukan pembayaran hanya pada peristiwa gagal bayar dengan debitur/terjamin sesuai dengan persyaratan instrumen yang dijamin.

The Group is required to make payments only in the event of default with the debtor/guaranteed in accordance with the terms of the guaranteed instrument.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

h. Kontrak jaminan keuangan (lanjutan)

Kerugian ekspektasian atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai aset pengembalian dan diukur secara sistematis sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara jumlah saldo kerugian ekspektasian - bruto dan jumlah saldo kerugian ekspektasian - bersih.

Jangka waktu periode estimasi cadangan klaim atas kontrak penjaminan adalah periode kontraktual maksimum dimana Grup memiliki kewajiban kontraktual kini untuk melakukan penjaminan.

Grup telah membentuk cadangan klaim sesuai dengan PSAK 109 terkait kontrak penjaminan. Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 109, yang mensyaratkan kerugian ekspektasian sepanjang umur periode kontrak penjaminan diakui sejak pengakuan awal.

Grup telah mengimplementasikan metode perhitungan statistik dengan menggunakan persamaan regresi untuk melihat ketertarikan variabel makroekonomi dengan tingkat pertumbuhan klaim yang terjadi pada Grup selama masa periode observasi. Grup menambahkan elemen *Forward Looking* yang merupakan hasil regresi dan model peramalan, dari variabel dependen (PC) dan independen (variabel makroekonomi).

i. Piutang penjaminan ulang

Piutang penjaminan ulang merupakan piutang atas pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra penjaminan ulang.

j. Aset tetap

Berdasarkan PSAK 216, Grup memilih menggunakan metode biaya.

h. Financial guarantee contract (continued)

Expected loss for risks that have been transferred to guarantor are recognized as reimbursement assets and are measured systematically according to the pattern of claim reserve measurement based on the variance between the total expected loss - gross and the total expected loss - net.

The estimated period of the reserve for claims under the guarantee contract is the maximum contractual period during which the Group has a current contractual obligation to provide guarantees.

The Group has established a claim reserve in accordance with SFAS 109 related to guarantee contracts. From 1 January 2020, the Group applies the simplified approach permitted by SFAS 109, which requires expected lifetime losses of guarantee contract period to be recognized from initial recognition.

The Group has implemented a statistical calculation method using a regression equation to see the interest of macroeconomic variables with the growth rate of claims that occurred in the Group during the observation period. The Group adds Forward Looking element that is the result of regression and forecasting models, from the dependent (PC) and independent variables (macroeconomic variable).

i. Re-guarantee receivables

Re-guarantee receivables represent receivables for the claim payment to the recipient of the guarantee which is the responsibility of the re-guarantee partners.

j. Fixed assets

Under SFAS 216, the Group has chosen the cost model.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

j. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap diukur menggunakan model harga perolehan. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya akuisisi meliputi semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset tersebut.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dan komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Aset tetap didepresiasi menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap tersebut sebagai berikut:

Jenis aset	Masa manfaat (tahun)/ Usefull life (year)	Penyusutan per tahun (%)/ Depreciation per year (%)	Asset type
Bangunan kantor	30	3.33	Office buildings
Perumahan dinas	20	5	Houses
Inventaris kantor	2-10	50-10	Office equipment
Inventaris rumah dinas	2-10	50-10	Houses equipment
Kendaraan bermotor	5	20	Motor vehicles

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian di tahun yang sama pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan.

Apabila aset tetap dihentikan penggunaannya atau dijual, harga perolehan dan akumulasi depresiasi yang terkait dengan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai.

j. Fixed assets (continued)

Fixed asset measured using cost model. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Acquisition cost covers expenditures that is directly attributable to the acquisitions of the assets.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced part is derecognized. Repairs and maintenance costs are charged to the consolidated profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Fixed assets are depreciated using the straight line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Repair and maintenance expenses are charged to the consolidated profit or loss in the year which they are incurred. Expenditure which extends the useful lives of the assets or provides further economic benefits are capitalized and depreciated.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and any resulting gains or losses are recognized in profit or loss.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined based on the higher of net selling price or value in use.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

j. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian ("ADP") merupakan akumulasi biaya konstruksi bangunan, biaya material, dan biaya lainnya dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Beban renovasi gedung sewa diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari aset takberwujud yang berasal dari peranti lunak yang dimiliki Grup. Aset takberwujud diakui jika Grup kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dan aset takberwujud tersebut dan biaya aset takberwujud tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus dengan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 (empat) tahun.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program peranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk peranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

j. Fixed assets (continued)

Assets in progress ("ADP") is an accumulated costs of the construction of buildings, material costs and other costs are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Renovation expense of rental building amortized as per useful life.

k. Intangible assets

Intangible assets consist of intangible asset from the Group's software. Intangible assets are recognized if the Group have high possibility to get economical benefits in the future from those intangible assets and the cost could be measured reliably.

Intangible assets are recorded based on acquisition cost deducted by accumulated amortization and impairment if there's any impairment. Intangible assets are amortized based on the estimated useful life. Group estimated the value that can be recovered from intangible assets. If value of intangible assets exceed the recovered estimated value, then the amount that recorded in the asset should be lowered at the recoverable estimated value.

Intangible assets are amortized using straight line method with an estimated economic useful life for 4 (four) years.

Costs associated with maintenance of computer software programs are recognized as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognized as intangible assets.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

k. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laba rugi.

k. Intangible assets (continued)

Intangible assets are derecognized when the assets are released or have no future economic benefit. The difference between carrying amount of the asset and net value of its disposal is recognized in the profit or loss.

l. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

l. Leases

The determination of whether an agreement constitutes, or contains, a lease is made based on the substance of the agreement itself and an assessment of whether fulfillment of the agreement depends on the use of a particular asset or assets, and whether the agreement provides the right to use the asset.

Aset hak-guna kemudian didepresiasi menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using straight line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek.

The Group as a lessee

At the inception date of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognize the right-of-use asset and lease liabilities for short-term lease.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi;
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, dan;

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the identified assets;*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined, and;*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

I. Sewa (lanjutan)

- i. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
- ii. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

I. Leases (continued)

- i. The Group has the right to operate the asset; and
- ii. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used throughout its useful life.

At the lease commencement date, the Group recognized right-of-use asset and lease liabilities. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liabilities adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Lease liabilities are initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liabilities comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

I. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "aset tetap - bersih" dan liabilitas sewa sebagian dari "akrual dan utang lain-lain" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jika penyewa atau pemberi sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

I. Leases (continued)

Lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to the profit or loss over the lease period in order to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "fixed assets - net" and lease liabilities as part of "accruals and other payables" in the consolidated statement of financial position.

If the lessee atau lessor transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Short-term leases

The Group has not recognized right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight line basis over the lease term.

Lease modification

The Group account for a lease modification as a separate lease if:

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

l. Sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga efektif Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan kemungkinan penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai tersebut. Nilai aset yang dapat diperoleh kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau harga jual neto, mana yang lebih tinggi.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Di lain pihak, pembalikan penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan/ (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban/(pendapatan) pada laba rugi tahun berjalan.

l. Leases (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease;*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's effective interest rate at the effective date of the modification;*
- *decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

m. Impairment of non-financial assets

The Group examines whether there is any indication of impairment of the non-financial assets on the consolidated statement of financial position date and the possible adjustments to the recoverable value if there are circumstances that indicate such impairment. The value of assets that can be recovered is calculated based on the value in use or net selling price, whichever is higher.

Impairment loss is recognized if the carrying amount of the asset exceeds its recoverable value. On the other hand, a reversal of impairment is recognized when there is an indication that the impairment is no longer the case. Impairment/(recovery) on the value of the asset is recognized as an expense/(income) in the current year profit or loss.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

n. Pajak penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a. pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis, pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

n. Income tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a. the initial recognition of goodwill; or*
- b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination, at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

n. Pajak penghasilan (lanjutan)

n. Income Tax (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax regulations) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

- a. *The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b. *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities related to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend to recover current tax assets and liabilities with a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Utang klaim

Utang klaim merupakan kewajiban Grup kepada pemberi pinjaman yang pinjamannya dijamin oleh Grup. Utang klaim yang tercatat merupakan pengajuan klaim yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar oleh Grup. Utang klaim dinyatakan sebesar baki debit saat timbulnya hak klaim dikalikan dengan persentase penjaminan.

Beban klaim dicatat pada saat klaim telah disetujui oleh Komite Klaim. Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

p. Akad penjaminan syariah

Akad yang digunakan dalam penjaminan syariah adalah akad *kafalah*.

Imbal jasa *kafalah* (IJK)

Imbal jasa *kafalah* dari terjamin dicatat sebesar nilai bersih, setelah diskonto, sesuai dengan ketentuan pada kontrak.

Pembentukan imbal jasa *kafalah* ditangguhkan dihitung berdasarkan IJK neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan sertifikat *kafalah* berakhir (proporsional harian).

Kenaikan/(penurunan) atas imbal jasa *kafalah* yang belum merupakan pendapatan adalah selisih antara IJK belum menjadi hak periode berjalan dan periode lalu.

Penyajian imbal jasa *kafalah* dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah imbal jasa bruto.

Pendapatan *ujrah* penjaminan ulang

Pendapatan *ujrah* penjaminan ulang merupakan *ujrah* yang diterima dari mitra penjaminan ulang dengan persentase tertentu dari jumlah premi yang dibayar ke mitra penjaminan ulang.

Ujrah penjaminan ulang dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu penjaminan.

o. Claim payables

Claim payables represents liability of the Group to the lender which loan are guaranteed by the Group. Claim payables are claims that have been processed and approved but not yet paid by the Group. Claim payables is stated at the outstanding balance when the right to claim arises multiplied by the guarantee percentage.

Claim expenses is recorded when the claim has been approved by the Claim Committee. Changes in the amount of claim payables, as a result of further review and the difference between the amount of the claim debt and the claim paid, are recognized in the statement of profit or loss in the year of the change.

p. Sharia guarantee contract

The contract used for sharia guarantee contract is kafalah contract.

Kafalah fees

Kafalah fees from guarantee are accounted for, net of any discounts, in accordance with the terms of contracts.

Unearned kafalah fees are determined and calculated based on net kafalah fees in proportion to the number of days until the kafalah certificate expires (daily proportional).

Increase/(decrease) in unearned kafalah fees represent the difference between the balance of unearned kafalah fees for current and prior period.

Presentation of kafalah fees in the profit or loss statement represents gross fees.

*Re-guarantee *ujrah* income*

*Re-guarantee *ujrah* income is *ujrah* receipt from re-guarantee partner with certain percentage of premium paid to re-guarantee partner.*

*Re-guarantee *ujrah* is recorded as unearned revenue and amortized over the period of the guarantee.*

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

p. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

p. Sharia guarantee contract (continued)

Jika terdapat pelunasan dipercepat atau terjadi klaim atas pembiayaan yang dijaminan, jumlah pendapatan imbalan jasa *kafalah* dan pendapatan *ujrah* penjaminan ulang yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laba rugi tahun berjalan.

If there is an accelerated repayment or there is a claim of the guarantee fee receivables, the amount of kafalah fees and deferred re-guarantee ujah income are entirely recognized to profit or loss for the current year.

Pendapatan jasa administrasi *kafalah*

Pendapatan jasa administrasi *kafalah* diakui seluruhnya saat sertifikat *kafalah* ("SK") diterbitkan.

Kafalah administrative service income

Kafalah administrative service income is fully recognized when kafalah certificates ("SK") were issued.

Beban *ujrah*

Ujrah diberikan kepada agen dan penerima jaminan sehubungan dengan penutupan pertanggungan. Beban *ujrah* besarnya dinyatakan sebagai persentase tertentu dari IJK. Beban *ujrah* dicatat sebagai biaya dibayar di muka dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan.

Ujrah expenses

Ujrah given to agents and recipient of the guarantee related to insurance coverage. Ujrah expenses are expressed as a certain percentage of the IJK. Ujrah expenses are recorded as prepaid expenses and amortized over the guarantee period.

Premi penjaminan ulang

Premi penjaminan ulang merupakan beban atas premi yang dibayarkan kepada mitra penjaminan ulang guna mengalihkan risiko klaim. Besaran premi penjaminan ulang yang menjadi hak mitra penjaminan ulang ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Re-guarantee premiums

Re-guarantee premiums are premium expenses paid to re-guarantee company to transfer the claim risk. Amount of re-guarantee premium is defined based on type of product guarantee.

Premi penjaminan ulang dicatat sebagai aset penjaminan ulang dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan ulang.

Re-guarantee premiums are recorded as re-guarantee assets and amortized over the period of re-guarantee.

Klaim

Estimasi klaim adalah jumlah yang menjadi tanggungan entitas anak sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan penelaahan secara teknis asuransi.

Claims

Estimated claims represent outstanding claims and the subsidiary's estimate of claims already incurred but not yet reported. This account is stated in the statement of financial position based on the insurance technical review.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

p. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

p. Sharia guarantee contract (continued)

Klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian, termasuk estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR"), dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Claims consist of settled claims, outstanding claims, including claims incurred but not yet reported ("IBNR"), and claim settlement expenses. Claims are recognized as expenses when incurred. Re-guarantee claims received from re-guarantee companies are recognized as deduction from claim expenses in the same period as the recognition of claim expenses. Subrogated rights are recognized as deduction from claim expenses upon realization.

Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim penjaminan ulang, dan kenaikan/penurunan estimasi klaim. Klaim penjaminan ulang disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

Claim expenses in the statement of profit or loss represent gross claims, re-guarantee claims and increase/decrease in estimated claims. Re-guarantee claims are presented as deduction from gross claims,

Cadangan atas estimasi klaim bruto dibuat berdasarkan taksiran beban klaim yang akan dibayar sesuai dengan klaim yang diterima Entitas Anak sampai dengan tanggal laporan. Pemulihan klaim dari reasuradur untuk cadangan atas estimasi klaim bruto dicatat sebagai estimasi klaim penjaminan ulang pada aset penjaminan ulang.

Provision for estimated gross claims is made for the full estimated costs of claims to be paid in respect of claims notified to the Subsidiary until the date of the reporting period. Re-guarantee recoveries of the provision for estimated gross claims is recorded as estimated re-guarantee claims in re-guarantee assets.

Entitas Anak menetapkan cadangan berdasarkan lini usaha ("LOB"). Terdapat dua kategori cadangan: cadangan untuk klaim yang sudah dilaporkan dan cadangan untuk klaim IBNR.

The Subsidiary establishes its reserves by line of business ("LOB"). There are two categories of reserve: reserves for reported losses and reserves IBNR losses.

Cadangan Entitas Anak untuk klaim yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan klaim yang sudah dilaporkan. Entitas Anak membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan.

The Subsidiary's reserves for reported losses are based on estimates of future payments to settle reported claims. The Subsidiary bases such estimates on the facts available at the time the reserves are established.

Entitas anak membentuk cadangan IBNR dengan menggunakan metode triangulasi dan metode gabungan (seperti Bornhuetter-Ferguson), termasuk asumsi tingkat diskonto, rasio klaim, dan rasio biaya.

The subsidiary establishes IBNR reserves using triangulation method and hybrid methods (such as, Bornhuetter-Ferguson), include discount rate assumptions, claim ratio, and expense ratio.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

p. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

Perubahan jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

p. Sharia guarantee contract (continued)

Changes in the amount of estimated total claim liabilities as a result of further review and differences between estimated claims and claims paid are recognized in the profit or loss statement in the period when the changes occur.

q. Imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pascakerja, seperti pensiun, uang pisah, uang penghargaan, dan imbalan lainnya dihitung berdasarkan peraturan Grup dan Undang-Undang No. 6/2023 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 ("UUCK").

q. Employee benefits

Long-term and post-employment benefits liabilities, such as pension, severance payments, service payments, and other benefits are calculated in accordance with the Group's Regulation and Indonesian Law No. 6/2023 and Government Regulation No. 35/2021 ("UUCK").

Grup telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu program asuransi kesejahteraan karyawan dan program kesejahteraan karyawan melalui dana pensiun lembaga keuangan ("DPLK") dan pendanaan hari tua ("PHT"). Selain program pensiun, Grup juga membukukan imbalan pascakerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan UUCK, sedangkan entitas anak menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.

The Group has registered their employees into pension plan, that is the pension insurance program held by the pension funds of financial institutions ("DPLK") and provident fund ("PHT"). Besides pension plan, the Group also recognized defined benefit post-employment benefit according to the UUCK, whilst the Subsidiary conduct defined benefits pension plans.

Selain program pensiun imbalan pasti, Grup juga memiliki program iuran pasti dimana Grup membayar iuran yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laba rugi pada saat terutang.

In addition to the defined benefit pension plan, the Group also has defined contribution plans in which the Group pays fees calculated based on a certain percentage of the employee's basic salary to the pension insurance program held by the pension funds of financial institutions. Contributions are charged to the income statement when due.

Liabilitas imbalan pascakerja merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

The post-employment benefit liabilities represent the present value of the defined benefit liabilities at the end of the reporting period less the fair value of the plan assets and adjustments to past services costs not yet recognized. The defined benefit liabilities are calculated annually by the independent actuary using the projected unit credit method.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

q. Imbalan kerja (lanjutan)

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pascakerja yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu seluruhnya diakui secara langsung dalam laba rugi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mensyaratkan karyawan untuk bekerja selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, biaya jasa lalu akan diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode tersebut.

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dan diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah/gaji, upah lembur, iuran jaminan sosial dan hari tua, iuran asuransi jiwa dan penggantian biaya perawatan dan pengobatan, cuti jangka pendek, tunjangan hari raya dan bonus diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Liabilitas imbalan pascakerja

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti melalui Grup asuransi yang pesertanya adalah karyawan tetap Grup. Iuran pasti dan manfaat pasti kepada Grup asuransi adalah sebesar persentase tertentu dari gaji karyawan yang menjadi peserta program iuran pasti dan manfaat pasti Grup.

q. Employee benefits (continued)

The present value of the defined benefit liabilities are determined by discounting the estimated future cash flows using the interest rate on long-term government bonds at the end of the reporting period, expressed in Rupiah, in accordance with the currency in which the benefits will be paid and the short-term ones corresponding to the post-employment benefits liabilities in question.

All past service costs are recognized directly in the profit or loss, except for changes towards pension programs that impose conditions on the employees to work during a specified period of time. In this case, past service costs will be amortized using the straight line method over that period.

Actuarial gains and losses may arise from adjustments made based on experience and changes in actuarial assumptions and recognized in other comprehensive income.

Short-term employee benefits liabilities

Short-term work benefits such as wages/salaries, overtime pay, social security contributions and old age, life insurance contributions and reimbursement for treatment and medical expenses, short-term leave, holiday allowances and bonuses are recognized over the period of service provided. Short-term benefits are calculated at the undiscounted amount.

Post-employment benefits liabilities

The Group provides defined contribution pension plans and defined benefit pension plans through insurance companies whose participants are permanent employees of the Group. The defined contribution and defined benefit contributions to insurance companies are a certain percentage of the salaries of employees who are participants in the Group's defined contribution and defined benefit plans.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

q. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan penghargaan tanda jasa dan cuti besar kepada karyawan yang memiliki masa kerja tertentu sesuai ketentuan Grup. Perkiraan biaya imbalan ini dicadangkan sepanjang masa kerja karyawan. Liabilitas ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

r. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup yang memenuhi persyaratan berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan Grup adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

q. Employee benefits (continued)

Other long-term employee benefits

The Group provides awards for service and long leave to employees who have a certain period of service in accordance with the Group regulations. The estimated cost of these benefits is reserved over the employee's tenure. This liability is assessed annually by an independent actuary.

r. Transactions with related parties

The Group entered into transactions with related parties as defined in PSAK 224 "Related Party Disclosures". This transaction is based on the terms agreed by both parties, where these requirements may not be the same as other transactions conducted with unrelated parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

A related party is an individual or entity related with the Group that meets the following requirements:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or a parent entity of the reporting entity.
- b. An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:
 - i. the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary are related to each others);
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

**r. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

r. Transactions with related parties (continued)

- iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dan pihak ketiga yang sama;
- iv. suatu entitas adalah ventura bersama dan entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang menyelenggarakan program, tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
- viii. entitas atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- iii. both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);
- viii. the entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Definisi pihak-pihak berelasi untuk Grup adalah sebagai berikut:

- Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor; dan
- entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.

Pemerintah yang dimaksud oleh Grup sebagai pihak berelasi adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Milik Negara yang dimiliki langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan anak perusahaan namun tidak termasuk Perusahaan Milik Pemerintah Daerah.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 41.

The definition of related parties for the Group is as follows:

- The Government that has control of, or joint control, or significant influence over, the reporting entity; and
- other entity that is a related party because it is controlled or jointly controlled, or significantly influenced by the same government over the reporting entity and the other entity.

The Government referred to by the Group as a related party is the Government of the Republic of Indonesia and State-Owned Companies which are directly owned by the Government of Indonesia and their subsidiaries but do not include Local Government-Owned Companies.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 41.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

s. Dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen telah disetujui oleh para pemegang saham.

s. Dividend

Dividend distribution to the Group's shareholder is recognized as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which dividend are approved by the shareholders.

t. Kepentingan non-pengendali

Kepentingan non-pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dan tidak langsung pada entitas anak.

t. Non-controlling interests

Non-controlling interest is the equity of the Subsidiary not attributable directly and indirectly in Subsidiary.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Non-controlling interests are presented in equity in the consolidated financial statements, separately from the equity owners of the parent.

u. Piutang hasil investasi

Piutang hasil investasi merupakan piutang atas bunga dari penempatan investasi oleh Grup yang diakui secara akrual basis.

u. Investment income receivables

Investment income receivable represents interest receivable from investment placement by the Group which are recognized on an accrual basis.

v. Aset pengembalian

Aset pengembalian adalah aset perusahaan penjaminan yang dapat dipulihkan dari perusahaan penjaminan ulang untuk porsi estimasi klaim.

v. Reimbursement assets

Recoverable assets are assets of the insurance company that can be recovered from the reguarantee company for the portion of the estimated claim.

Aset pengembalian terbentuk atas perhitungan cadangan klaim. Aset pengembalian merupakan kerugian ekspektasian atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang dan diukur secara sistematis sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara jumlah saldo kerugian ekspektasian bruto dan jumlah saldo kerugian ekspektasian bersih.

Reimbursement assets are based on the calculation of claims reserves. Reimbursement assets represent expected losses on risks that have been transferred to re-guarantee and are measured systematically in accordance with the claims reserve measurement pattern based on the difference between the gross expected loss balance and the net expected loss balance.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

w. Penjaminan ulang dibayar di muka

Penjaminan ulang dibayar di muka terdiri dari beban imbal jasa *co-guarantee* dibayar di muka, beban premi *co-insurance* dibayar di muka, beban premi reasuransi dibayar di muka, dan beban imbal jasa penjaminan *loss limit* dibayar di muka.

Atas akun diatas diakui sebagai penjaminan ulang dibayar di muka dan diamortisasi bulanan secara proporsional sesuai dengan periode penjaminan ulang atau mengikuti pola pengakuan pendapatan imbal jasa penjaminan sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan ("SP"), kecuali produk penjaminan tertentu memperhatikan mekanisme pembayaran imbal jasa penjaminan secara tahunan.

x. Biaya akuisisi tangguhan

Biaya akuisisi tangguhan terdiri dari *fee* agen dibayar di muka, beban *fee* broker dibayar di muka, dan beban *fee based* dibayar di muka.

Atas akun diatas diakui sebagai biaya akuisisi di muka dan diamortisasi bulanan secara proporsional sesuai dengan periode penjaminan ulang atau mengikuti pola pengakuan pendapatan imbal jasa penjaminan sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan ("SP"), kecuali produk penjaminan tertentu memperhatikan mekanisme pembayaran imbal jasa penjaminan secara tahunan.

Biaya akuisisi tangguhan diakui ketika terbit Sertifikat Penjaminan ("SP") dan diterimanya tagihan dari mitra penerima jaminan/mitra agen penjaminan/mitra broker.

Biaya akuisisi tangguhan disajikan sebesar nilai nominal yang sesuai dengan persentase tertentu dari imbal jasa penjaminan yang disepakati sebagaimana diatur dalam perjanjian penjaminan kredit/perjanjian dengan mitra agen penjaminan/mitra broker.

w. Prepaid re-guarantee

Prepaid re-guarantee consists of prepaid co-guarantee fees, prepaid co-insurance premium, prepaid re-insurance premium, and prepaid loss limit guarantee fee.

The above accounts are recognized as prepaid re-guarantee and amortized monthly in proportion to the re-guarantee period or following the pattern of recognition of guarantee fee income in accordance with the validity period of the Guarantee Certificate ("SP"), unless certain guarantee products pay attention to the mechanism of paying guarantee fees on an annual basis.

x. Deferred acquisition cost

Deferred acquisition costs consist of prepaid agent fees, prepaid broker fees, and prepaid fee-based expenses.

The above accounts are recognized as deferred acquisition costs and amortized monthly in proportion to the re-guarantee period or following the pattern of recognition of guarantee fee income in accordance with the validity period of the Guarantee Certificate ("SP"), except for certain guarantee products that pay guarantee fees on an annual basis.

Deferred acquisition costs are recognized when a Guarantee Certificate ("SP") is issued and an invoice is received from the guarantee recipient partner/guarantee agent partner/broker partner.

Deferred acquisition costs are presented at a nominal value that corresponds to a certain percentage of the agreed guarantee fee as regulated in the credit guarantee agreement/agreement with the guarantee agent/broker partner.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

2. Significant Accounting Policies (continued)

y. Utang penjaminan ulang

Utang penjaminan ulang merupakan kewajiban yang harus dibayar Grup kepada mitra penjaminan ulang untuk mengalihkan risiko klaim. Utang penjaminan ulang diakui ketika terbit Sertifikat Penjaminan.

y. Re-guarantee payables

Re-guarantee payables represent obligations that the Group must pay to the re-guarantor to transfer the risk of claims. Re-guarantee payables is recognized when the Guarantee Certificate is issued.

z. Pendapatan komisi ditangguhkan

Pendapatan komisi ditangguhkan terdiri dari pendapatan komisi *co-guarantee* ditangguhkan, pendapatan komisi *co-insurance* ditangguhkan, pendapatan komisi reasuransi ditangguhkan, pendapatan *fee based co-insurance* ditangguhkan.

z. Deferred commission income

Deferred commission income consists of deferred co-guarantee commission income, deferred co-insurance commission income, deferred re-guarantee commission income, and deferred co-insurance fee based income.

Pendapatan komisi ditangguhkan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan ("SP").

Deferred commission income is recognized as deferred income and amortized over the remaining guarantee period and allocated in accordance with the validity period of the Guarantee Certificate ("SP").

aa. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

aa. Share capital

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

Grup mengklasifikasikan instrumen modal sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi ketentuan kontrak dari instrumen. Saham Grup diklasifikasikan sebagai ekuitas ketika tidak ada liabilitas kontrak untuk mentransfer kas atau aset keuangan lainnya.

The Group classifies capital instruments as financial liabilities or equity instruments in accordance with the substance of the contractual terms of the instruments. The Group's shares are classified as equity when there is no contractual obligation to transfer cash or other financial assets.

bb. Komisi (pendapatan)/beban

Pendapatan komisi merupakan pendapatan komisi yang diberikan oleh mitra penjaminan ulang atas transaksi penjaminan ulang. Beban komisi merupakan beban komisi penjaminan yang diberikan kepada penerima jaminan dan agen penjaminan sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan.

bb. Commission (income)/expenses

Commission income is commission income provided by re-guarantee partners for re-guarantee transactions. Commission expenses represent guarantee commission expenses given to guarantee recipients and guarantee agents in connection with guarantee business activities.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
(lanjutan)**

bb. Komisi (pendapatan)/beban (lanjutan)

Pendapatan komisi merupakan pendapatan komisi yang diberikan oleh mitra penjaminan ulang atas transaksi penjaminan ulang. Beban komisi merupakan beban komisi penjaminan yang diberikan kepada penerima jaminan dan agen penjaminan sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan.

Pendapatan komisi diakui sebagai pendapatan terkait penjaminan kredit diterima di muka dan diamortisasi selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan ("SP"). Beban komisi diakui sebesar imbal jasa yang diberikan kepada penerima jaminan dan agen penjaminan.

cc. Beban usaha

Beban operasional diakui pada saat terjadinya dan berdasarkan basis akrual.

3. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh standar adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

2. Significant Accounting Policies (continued)

bb. Commission (income)/expenses (continued)

Commission income is commission income provided by re-guarantee partners for re-guarantee transactions. Commission expenses represent guarantee commission expenses given to guarantee recipients and guarantee agents in connection with guarantee business activities.

Commission income is recognized as income related to unearned credit guarantees and is amortized over the remaining guarantee period and allocated based on the month the Guarantee Certificate ("SP") is issued. Commission expenses are recognized in the amount of fees for services provided to guarantee recipients and guarantee agents.

cc. Operating expenses

Operating expenses is recognized as incurred and on an accrual basis.

3. Critical Accounting Estimates and Judgements

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with standard are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

3. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Liabilitas kontrak jaminan keuangan

Liabilitas kontrak jaminan keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan terjamin dan nilai realisasi bersih dari setiap subrogasi.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, asumsi dibuat untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

Keakuratan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan terjamin tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

b. Estimasi klaim

Estimasi klaim entitas anak dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial. Entitas anak menggunakan teknik permodelan dan asumsi berdasarkan risiko pemburukan dari *experienced studies* secara historis yang dianggap mempengaruhi perhitungan cadangan klaim. Realisasi estimasi dicatat pada perubahan estimasi cadangan klaim. Termasuk dalam cadangan teknis entitas anak adalah estimasi liabilitas klaim dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan (lihat Catatan 2p).

3. Critical Accounting Estimates and Judgements (continued)

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from initial estimates.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Liabilities for financial guarantee contracts

Liabilities for financial guarantee contracts are evaluated individually and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the guaranteed's financial situation and the net realizable value of any underlying subrogation.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

The accuracy of the allowances depends on how well the estimation of future cash flows for specific guaranteed allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

b. Estimated claims

Estimated claims in subsidiary are calculated based on actuarial calculations using actuarial assumptions. Subsidiary is using technical modeling and assumptions based on the risk of deterioration from historically experienced studies which are considered to affect the calculation of claims reserves. Estimated realization is recorded in the change in the estimated reserves for claims. Subsidiary's technical reserves are included in the estimated claims liabilities and reserves for premiums that have not yet been earned (see Note 2p).

**3. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang
Penting (lanjutan)**

**3. Critical Accounting Estimates and
Judgements (continued)**

c. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaris. Perhitungan aktuaris menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

c. Employee benefits liabilities

Employee benefits liabilities are determined based on actuarial valuation. The actuary valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate, and others. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan *forward-looking* untuk piutang usaha dihitung menggunakan metode *discounted cash flow* dengan skenario optimis dan pesimis. Sedangkan, secara kolektif untuk investasi menggunakan eksternal *rating* terhadap *investment grade* dengan menggunakan 3 (tiga) skenario yaitu normal, optimis dan pesimis.

d. Allowance for impairment losses

The Group applies a simplified approach to measuring the allowance for impairment losses on a forward-looking basis for trade receivables calculated using the discounted cash flow method with optimistic and pessimistic scenarios. However, collectively for investment using an external rating of investment grade using 3 (three) scenarios, namely normal, optimistic and pessimistic.

Secara khusus, pertimbangan oleh manajemen diperlukan dalam mengestimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

In particular, judgement by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss.

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin akan berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai di masa mendatang.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may be different, resulting in future changes to the allowance.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, asumsi dibuat untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

The accuracy of the allowance depends on how well the estimation of future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

**3. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang
Penting (lanjutan)**

**3. Critical Accounting Estimates and
Judgements (continued)**

e. Nilai wajar dari instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk menggunakan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Dalam mengestimasi arus kas, Grup melakukan penilaian tentang kondisi keuangan terjamin dan nilai realisasi bersih dari agunan.

f. Aset pengembalian

Aset yang timbul dari kontrak penjaminan ulang sebagai pemulihan cadangan klaim dihitung dengan menggunakan pendekatan *gross* dan *netting-off* pemulihan klaim ekspektasian setelah dikurangi ekspektasi pemulihan aset. Pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor seperti *counterparty* dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui dimana terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak dapat menerima jumlah yang terutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal.

g. Estimasi pengakuan imbal jasa penjaminan dan imbal jasa *kafalah*

Grup memperkirakan pengakuan imbal jasa penjaminan dan imbal jasa *kafalah* dengan mempertimbangkan kontrak-kontrak penjaminan yang belum dicatat pada akhir tahun. Perkiraan ini didasarkan pada pengalaman tahun sebelumnya, volume usaha tahun ini serta perkiraan usaha masa datang. Grup mencatat perkiraan imbal jasa penjaminan ini sebagai imbal jasa penjaminan dan imbal jasa *kafalah* yang diperkirakan, dan juga mengevaluasi cadangan premi yang belum diterima terkait dengan imbal jasa tersebut.

e. Fair value of financial instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the financial position statements cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgement is required to establish fair values. In estimating these cash flows, the Group makes judgement about the borrower's financial condition and the net realizable value of collateral.

f. Reimbursement assets

Assets arising from re-guarantee contracts as recovery of reserves for claims are calculated using the gross and netting-off approaches of the expected recovery of claims after deducting expected recovery of assets. The recoverability of these assets is assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflecting the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognized where there is objective evidence that the Group may not received amounts due to it and these amounts can be reliably measured.

g. Estimated guarantee fees and kafalah fees recognition

The Group estimates the recognition of guarantee fees and kafalah fees by considering the guarantee contracts that have not been recorded at the end of the year. This estimation is based on the previous year's experience, the current year's business volume, and future business projections. The Group records these estimated service fees as estimated guarantee fees and kafalah fees and also evaluates the provision for unearned premiums associated with these fees.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. Kas dan Kas di Bank - Bersih

4. Cash and Cash in Banks - Net

	2024 Rp	2023 Rp	
Kas	1,464	1,228	Cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 41)	131,541	139,766	Related parties (Note 41)
Pihak ketiga:			Third parties:
Berbagai Bank			Various Regional
Pembangunan Daerah	88,185	37,154	Development Banks
PT Bank Sinarmas Tbk	3,713	210	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2,747	--	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Ina Perdana	2,254	1,215	PT Bank Ina Perdana
PT Bank Nationalnobu Tbk	2,003	--	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	800	227	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank KB Bukopin Syariah	678	202	PT Bank KB Bukopin Syariah
PT Bank Artha Graha			PT Bank Artha Graha
Internasional Tbk	524	352	Internasional Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	249	249	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	172	1,493	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	153	1,769	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	124	609	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk -			PT Bank Sinarmas Tbk -
Unit Syariah	12	365	Sharia Unit
Lainnya	468	295	Others
Jumlah	102,082	44,140	Total
	235,087	185,134	
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(13)	(4)	Allowance for impairment losses
Jumlah	235,074	185,130	Total
Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah:			Movement for impairment losses are as follows:
	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	4	13	Beginning balance
Penambahan	9	--	Additional
Pembalikan	--	(9)	Reversal
Saldo akhir	13	4	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai kas dan kas di bank.

The management believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of cash and cash in banks.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. Deposito Wajib dan Berjangka - Bersih

5. Statutory and Time Deposits – Net

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	3,397,390	6,499,226	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga:			Third parties:
Berbagai Bank			Various Regional
Pembangunan Daerah	532,125	674,182	Development Banks
PT Bank Mega Syariah	11,240	--	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	11,112	53,300	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	5,000	--	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank KB Bukopin Syariah	3,476	3,476	PT Bank KB Bukopin Syariah
PT Bank Nano Syariah	--	2,113	PT Bank Nano Syariah
PT Bank Maybank Indonesia - Unit Syariah	--	1,000	PT Bank Maybank Indonesia - Sharia Unit
Jumlah	562,953	734,071	Total
	3,960,343	7,233,297	
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(91)	(177)	Allowance for impairment losses
Jumlah	3,960,252	7,233,120	Total

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah: *Movement for impairment losses are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	177	27	Beginning balance
Penambahan	--	150	Additional
Pembalikan	(86)	--	Reversal
Saldo akhir	91	177	Ending balance

Deposito wajib dan berjangka berdasarkan umur adalah: *Aging statutory and time deposit are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Sampai dengan 3 bulan	3,725,343	3,000,357	Up to 3 months
Lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	235,000	4,232,940	More than 3 months to 6 months
Jumlah	3,960,343	7,233,297	Total

**5. Deposito Wajib dan Berjangka - Bersih
(lanjutan)**

Deposito berjangka memperoleh suku bunga tahunan berkisar 2,00% - 7,00% untuk tahun 2024 (2023: 2,00% - 7,00%).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai deposito wajib dan berjangka.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

**5. Statutory and Time Deposits – Net
(continued)**

Time deposit earned annual interest at ranging of 2.00% - 7.00% in 2024 (2023: 2.00% - 7.00%).

The management believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of statutory and time deposits.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

6. Deposito Berjangka untuk Tujuan Tertentu - Bersih

6. Time Deposits for Certain Purposes - Net

	2024 Rp	2023 Rp	
Tidak dibatasi penggunaannya	786,133	796,133	Unrestricted
Dibatasi penggunaannya	756,140	756,140	Restricted
Jumlah	1,542,273	1,552,273	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	(2)	Allowance for impairment losses
Jumlah	1,542,272	1,552,271	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, deposito berjangka untuk tujuan tertentu Grup ditempatkan pada Bank Mitra sebagai berikut:

As at 31 December 2024 and 2023, the Group's time deposits for certain purposes placed in the Bank's Partner is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	1,494,373	1,504,373	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga:			Third parties:
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Syariah	20,500	20,500	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Syariah
PT Bank Kalimantan Barat Syariah	17,400	17,400	PT Bank Kalimantan Barat Syariah
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	10,000	10,000	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Jumlah	1,542,273	1,552,273	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	(2)	Allowance for impairment losses
Jumlah	1,542,272	1,552,271	Total

6. Deposito Berjangka untuk Tujuan Tertentu – Bersih (lanjutan)

6. Time Deposits for Certain Purposes – Net (continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Changes in allowance for impairment are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	2	6	Opening balance
Pemulihan	(1)	(4)	Recovery
Saldo akhir	1	2	Ending balance

Atas deposito yang dibatasi penggunaannya disajikan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati dengan mitra, Grup wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk deposito berjangka yang akan dipergunakan sebagai pelengkap persyaratan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Grup dapat menentukan jangka waktu penempatan deposito.

Restricted time deposit in accordance with the cooperation agreement with partners, the Group are required to allocate certain amount of fund in the form of time deposits which will be utilised as the fulfillment of requirement on the related cooperation agreement. The Group could determine the period of time deposits placement.

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai deposito di bank yang dibatasi penggunaannya.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of Time deposits for certain purposes.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

7. Efek-Efek - Bersih

7. Marketable Securities – Net

a. Efek utang

a. Debt securities

	2024 Rp	2023 Rp	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1,524,511	576,589	At fair value through profit or loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4,898,169	4,769,590	At fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi - bersih	5,831,915	3,066,496	At amortised cost - net
Jumlah	12,254,595	8,412,675	Total

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek – Bersih (lanjutan)

7. Marketable Securities – Net (continued)

a. Efek utang (lanjutan)

Efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi terdiri dari:

a. Debt securities (continued)

Debt securities at fair value through profit or
loss consist of the followings:

2024					Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)	
	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ At Cost	Nilai Wajar/ Fair value		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						At fair value through profit or loss
Pihak berelasi (Catatan 41)						Related parties (Notes 41)
Efek utang - Pemerintah	Pemerintah/ Government	242,769	251,893	244,885	(7,008)	Debt securities - Government
Efek utang - Korporasi	idB-idAAA	706,728	712,457	695,723	(16,734)	Debt securities - Corporate
Jumlah pihak berelasi		949,497	964,350	940,608	(23,742)	Total related parties
Pihak ketiga						Third parties
Obligasi Terkait Keberlanjutan I						Obligasi Terkait Keberlanjutan I
SPINDO Tahun 2024 Seri B	idAAA	81,000	81,058	80,712	(346)	SPINDO Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV						Obligasi Berkelanjutan IV
Bank Panin Tahap II Tahun 2024	idAA	60,000	60,000	59,966	(34)	Bank Panin Tahap II Tahun 2024
Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri B	idAA	58,000	57,912	57,051	(861)	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri B	idAA	50,000	50,000	50,846	846	Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri B
Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023	idAA	50,000	50,000	50,573	573	Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023
Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 Seri B	idAAA(cg)	50,000	50,000	49,595	(405)	Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C	idAA	47,000	46,968	46,953	(15)	Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C
Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024 Seri A	idAA	37,000	37,000	36,035	(965)	Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024 Seri A
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Seri B	AA(idn)	32,000	31,918	31,786	(132)	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	25,000	24,693	24,686	(7)	Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024 Seri A	idAA	20,000	20,000	20,224	224	Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap I Tahun 2024 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 Seri A	idAAA	20,000	20,000	19,827	(173)	Obligasi Berkelanjutan II Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2024 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B	AA(idn)	15,000	15,000	14,851	(149)	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 Seri D	idAAA	10,000	11,175	11,011	(164)	Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 Seri D
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B	idAA	10,000	9,990	9,997	7	Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAA	10,000	9,945	9,987	42	Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I Bank SolutGo Tahap I Tahun 2021	A(idn)	10,000	10,000	9,803	(197)	Obligasi Berkelanjutan I Bank SolutGo Tahap I Tahun 2021
Jumlah pihak ketiga		585,000	585,659	583,903	(1,756)	Total third parties
Jumlah		1,534,497	1,550,009	1,524,511	(25,498)	Total

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek - Bersih (lanjutan)

a. Efek utang (lanjutan)

Efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari: (lanjutan)

2023				
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ At Cost	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Pihak berelasi (Catatan 41)				
Pemerintah/ Government	229,000	236,871	237,995	1,124
Efek utang - Pemerintah				
Efek utang - Korporasi	323,728	323,728	310,076	(13,652)
Jumlah pihak berelasi	552,728	560,599	548,071	(12,528)
Pihak ketiga				
Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	10,000	10,000	9,773 (227)
Obligasi Berkelanjutan I Bank SulutGo Tahap I Tahun 2021	A(idn)	10,000	10,000	9,722 (278)
Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A	idAA-	9,000	9,000	9,023 23
Jumlah pihak ketiga	29,000	29,000	28,518	(483)
Jumlah	581,728	589,599	576,589	(13,011)

Efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari:

2024				
Peringkat/ Rating	Nilai perolehan/ Cost Value	Amortisasi/ Amortized	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Pihak berelasi (Catatan 41)				
Pemerintah/ Government	4,399,767	(11,226)	4,325,014	(63,527)
Efek utang - Pemerintah				
Efek utang - Korporasi	402,423	--	369,846	(15,257)
Jumlah pihak berelasi	4,802,190	(11,226)	4,694,860	(78,784)
Pihak ketiga				
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 Seri B	AAA	50,000	--	49,153 (847)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 Seri A	idA+	50,000	--	46,708 (3,292)
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAA-	25,000	--	24,950 (50)
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	idAAA	25,000	--	24,552 (448)
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 Seri C	AAA	25,000	--	24,155 (845)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+	25,000	--	23,900 (1,100)
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2023	AAA	10,000	--	9,891 (109)
Jumlah pihak ketiga	210,000	--	203,309	(6,691)
Jumlah	5,012,190	(11,226)	4,898,169	(85,475)

7. Marketable Securities - Net (continued)

a. Debt securities (continued)

Debt securities at fair value through profit or loss consist of the followings: (continued)

2023				
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ At Cost	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)
At fair value through profit or loss				
Related parties (Notes 41)				
Pemerintah/ Government	229,000	236,871	237,995	1,124
Debt securities - Government				
Efek utang - Korporasi	323,728	323,728	310,076	(13,652)
Debt securities - Corporate				
Jumlah pihak berelasi	552,728	560,599	548,071	(12,528)
Total related parties				
Third parties				
Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAA	10,000	10,000	9,773 (227)
Obligasi Berkelanjutan I Bank SulutGo Tahap I Tahun 2021	A(idn)	10,000	10,000	9,722 (278)
Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A	idAA-	9,000	9,000	9,023 23
Total third parties	29,000	29,000	28,518	(483)
Total	581,728	589,599	576,589	(13,011)

Debt securities at fair value through other comprehensive income consist of the followings:

2024				
Peringkat/ Rating	Nilai perolehan/ Cost Value	Amortisasi/ Amortized	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)
At fair value through other comprehensive income				
Related parties (Notes 41)				
Pemerintah/ Government	4,399,767	(11,226)	4,325,014	(63,527)
Debt securities - Government				
Efek utang - Korporasi	402,423	--	369,846	(15,257)
Debt securities - Corporate				
Jumlah pihak berelasi	4,802,190	(11,226)	4,694,860	(78,784)
Total related parties				
Third parties				
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 Seri B	AAA	50,000	--	49,153 (847)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024 Seri A	idA+	50,000	--	46,708 (3,292)
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAA-	25,000	--	24,950 (50)
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	idAAA	25,000	--	24,552 (448)
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 Seri C	AAA	25,000	--	24,155 (845)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+	25,000	--	23,900 (1,100)
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2023	AAA	10,000	--	9,891 (109)
Total third parties	210,000	--	203,309	(6,691)
Total	5,012,190	(11,226)	4,898,169	(85,475)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek - Bersih (lanjutan)

a. Efek utang (lanjutan)

Efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari:
(lanjutan)

	2023			
	Peringkat/ Rating	Nilai perolehan/ Cost Value	Amortisasi/ Amortized	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Pihak berelasi (Catatan 41)				
Efek utang - Pemerintah	Pemerintah/ Government	4,104,179	(9,349)	4,125,103
Efek utang - Korporasi	idB-idAAA	472,421	--	443,357
Jumlah pihak berelasi		4,576,600	(9,349)	4,568,460
Pihak ketiga				
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 Seri B	AAA(idn)	50,000	--	48,811
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B	idA+	25,000	--	25,284
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	idAAA	25,000	--	24,866
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	25,000	--	24,355
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 Seri C	AAA(idn)	25,000	--	24,104
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+	25,000	--	23,716
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	idAA	20,000	--	20,127
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2023	idAAA	10,000	--	9,867
Jumlah		4,781,600	(9,349)	4,769,590

Mutasi penghasilan komprehensif lain atas efek utang adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo awal tahun	(2,661)	(44,826)
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	(99,710)	43,151
Jumlah yang direalisasi ke laba rugi	16,895	(986)
Saldo akhir tahun	(85,475)	(2,661)

7. Marketable Securities - Net (continued)

a. Debt securities (continued)

Debt securities at fair value through other comprehensive income consist of the followings: (continued)

At fair value through other comprehensive income
Related parties (Notes 41)
Debt securities - Government
Debt securities - Corporate
Total related parties
Third parties
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 Seri B
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 Seri C
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 Seri B
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2023
Total

Changes in other comprehensive income in debt securities are as follows:

Balance at beginning of year
Unrealized (losses) gain
recognized in equity
Realized gain
recognized in profit or loss
Ending balance

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek - Bersih (lanjutan)

a. Efek utang (lanjutan)

Efek utang yang diukur pada biaya amortisasi terdiri dari:

2024			
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai perolehan diamortisasi/ Amortised cost	
Diukur pada biaya diamortisasi			
Pihak berelasi (Catatan 41)			
Pemerintah/ Government	4,496,410	4,541,920	
Efek utang - Korporasi idBBB-idAAA	1,042,000	1,042,000	
Jumlah pihak berelasi	5,538,410	5,583,920	
Pihak ketiga			
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024 Seri B	idAAA	100,000	100,000
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idAAA	100,000	100,000
Obligasi Berkelanjutan III Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA+	22,000	22,000
Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAAA	12,000	12,000
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	10,000	10,000
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	5,000	5,000
Total pihak ketiga	249,000	249,000	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(1,005)	
Jumlah efek utang diukur pada biaya diamortisasi - bersih		5,831,915	

7. Marketable Securities - Net (continued)

a. Debt securities (continued)

Debt securities at amortized cost consist of the followings:

2024			
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai perolehan diamortisasi/ Amortised cost	
At amortised cost Related parties (Notes 41)			
<i>Debt securities - Government</i>			
<i>Debt securities - Corporate</i>			
<i>Total related parties</i>			
Third parties			
<i>Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024 Seri B</i>			
<i>Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri B</i>			
<i>Obligasi Berkelanjutan III Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2021 Seri B</i>			
<i>Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B</i>			
<i>Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B</i>			
<i>Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 Seri B</i>			
<i>Total third parties</i>			
<i>Less: Allowance for impairment losses</i>			
Total debt securities at amortize cost - net			

2023			
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai perolehan diamortisasi/ Amortised cost	
Diukur pada biaya diamortisasi			
Pihak berelasi (Catatan 41)			
Pemerintah/ Government	2,177,293	2,188,887	
Efek utang - Korporasi idBBB-idAAA	830,000	830,000	
Jumlah pihak berelasi	3,007,293	3,018,887	
Pihak ketiga			
Obligasi Berkelanjutan III Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA+	22,000	22,000
Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAAA(Idn)	12,000	12,000
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	10,000	10,000
Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	5,000	5,000
Jumlah pihak ketiga	49,000	49,000	
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(1,391)	
Jumlah efek utang diukur pada biaya diamortisasi - bersih		3,066,496	

2023			
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai perolehan diamortisasi/ Amortised cost	
At amortised cost Related parties (Notes 41)			
<i>Debt securities - Government</i>			
<i>Debt securities - Corporate</i>			
<i>Total related parties</i>			
Third parties			
<i>Obligasi Berkelanjutan III Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2021 Seri B</i>			
<i>Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B</i>			
<i>Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B</i>			
<i>Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2022 Seri B</i>			
<i>Total third parties</i>			
<i>Less: Allowance for impairment losses</i>			
Total debt securities at amortize cost - net			

7. Efek-Efek - Bersih (lanjutan)

7. Marketable Securities - Net (continued)

b. Sukuk

b. Sukuk

	2024 Rp	2023 Rp	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	113,765	33,146	At fair value through profit or loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,357,489	2,508,431	At fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi - bersih	1,462,393	2,143,677	At amortised cost - net
Jumlah	3,933,647	4,685,254	Total

Sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari:

Sukuk at fair value through profit or loss consist of the followings:

2024						
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ At Cost	Nilai wajar/ Fair value	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain (loss)		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					At fair value through profit or loss	
Pihak berelasi (Catatan 41)					Related parties (Notes 41)	
Sukuk - Korporasi	idAA-idAAA	115,000	114,916	113,765	(1,151)	Sukuk - Corporate
Total		115,000	114,916	113,765	(1,151)	Subtotal
2023						
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ At Cost	Nilai wajar/ Fair value	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain (loss)		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					At fair value through profit or loss	
Pihak berelasi (Catatan 41)					Related parties (Notes 41)	
	Pemerintah/ Government	20,000	22,724	23,052	328	Sukuk - Government
Jumlah pihak berelasi		20,000	22,724	23,052	328	Total realted parties
Pihak ketiga						Third parties
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata						Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata
Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA(Idn)	10,000	10,000	10,094	94	Tahap I Tahun 2022 Seri B
Jumlah pihak ketiga		10,000	10,000	10,094	94	Total third parties
Jumlah		30,000	32,724	33,146	422	Total

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek - Bersih (lanjutan)

7. Marketable Securities - Net (continued)

b. Sukuk (lanjutan)

Sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari:

b. Sukuk (continued)

Sukuk at fair value through other comprehensive income consist of the followings:

2024					
		Nilai perolehan/ Cost Value	Amortisasi/ Amortized	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)
Peringkat/ Rating					
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Pihak berelasi (Catatan 41)					At fair value through other comprehensive income Related parties (Notes 41)
	Pemerintah/ Government				
Sukuk - Pemerintah		2,150,730	(1,074)	2,131,348	(18,308)
Sukuk - Korporasi	idAA-idAAA	215,000	-	213,157	(1,843)
Jumlah pihak berelasi		2,365,730	(1,074)	2,344,505	(20,151)
Pihak ketiga					Third parties
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A					Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A
	idAA	13,000	--	12,984	(16)
Jumlah pihak ketiga		13,000	--	12,984	(16)
Jumlah		2,378,730	(1,074)	2,357,489	(20,167)
2023					
		Nilai perolehan/ Cost Value	Amortisasi/ Amortized	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)
Peringkat/ Rating					
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Pihak berelasi (Catatan 41)					At fair value through other comprehensive income Related parties (Notes 41)
	Pemerintah/ Government				
Sukuk - Pemerintah		2,294,718	21	2,282,895	(11,844)
Sukuk - Korporasi	idAA-idAAA	215,000	--	212,660	(2,340)
		2,509,718	21	2,495,555	(14,184)
Pihak ketiga					Third parties
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A					Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A
	idAA-	13,000	--	12,876	(124)
		13,000	--	12,876	(124)
Jumlah		2,522,718	21	2,508,431	(14,308)

Mutasi penghasilan komprehensif lain atas sukuk adalah sebagai berikut:

Changes in other comprehensive income in sukuk are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal tahun	(14,308)	(39,668)	Balance at beginning of year
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	(4,278)	24,965	Unrealized (losses) gain recognized in equity
Jumlah yang direalisasi			Realized gain
ke laba rugi	(1,581)	238	recognized in profit or loss
Efek pajak terkait	1,104	157	Related tax effect
Saldo akhir tahun	(19,063)	(14,308)	Ending balance

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek - Bersih (lanjutan)

7. Marketable Securities - Net (continued)

b. Sukuk (lanjutan)

b. Sukuk (continued)

Sukuk yang diukur pada biaya amortisasi terdiri dari:

Sukuk at amortized cost consist of the followings:

2024			
		Nilai perolehan diamortisasi/	
Peringkat/ Rating	Nominal value	Amortised cost	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			At amortised cost
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Notes 41)
	Pemerintah/ Government		
Sukuk - Pemerintah	1,447,673	1,448,393	Sukuk - Government
Sukuk Korporasi	idAAA 14,000	14,000	Sukuk - Corporate
Jumlah	1,461,673	1,462,393	Total
2023			
		Nilai perolehan diamortisasi/	
Peringkat/ Rating	Nominal value	Amortised cost	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			At amortised cost
Pihak berelasi (Catatan 41)			Related parties (Notes 41)
	Pemerintah/ Government		
Sukuk - Pemerintah	2,128,607	2,129,677	Sukuk - Government
Sukuk - Korporasi	idAAA 14,000	14,000	Sukuk - Corporate
Jumlah	2,142,607	2,143,677	Total

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek - Bersih (lanjutan)

c. Reksadana

Reksadana yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari:

2024				Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain/(loss)
Jumlah unit/ Total units*)	Biaya perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Fair value		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Pihak berelasi (Catatan 41)				
Reksadana - Pihak berelasi	715,540,282	962,451	1,005,337	42,886
Jumlah pihak berelasi		962,451	1,005,337	42,886
Pihak ketiga				
Insight Green (I-Green)	63,139,244	80,000	67,297	(12,703)
Insight Terproteksi 5	34,496,986	34,497	36,732	2,235
Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds	60,000,000	24,387	30,543	6,156
Sucorinvest Flexi Fund	4,980,626	30,000	29,177	(823)
Principal Islamic Equity Growth Syariah	24,658,750	45,000	28,486	(16,514)
Syailendra Pendapatan Tetap Premium	15,405,436	25,000	27,834	2,834
Panin Gebyar Indonesia II	9,639,662	20,000	27,389	7,389
Panin Dana Unggulan	2,954,342	25,000	25,452	452
Panin Dana Pendapatan Utama	16,235,252	20,000	21,569	1,569
Cipta Proteksi XXII	20,000,000	20,000	20,108	108
Allianz Fixed Income Fund 2	12,439,895	15,000	19,488	4,488
Principal Indo Domestic Equity Fund	19,223,930	20,000	13,988	(6,012)
Ashmore Dana Obligasi				
Unggulan Nusantara	13,656,973	15,000	13,987	(1,013)
Sucorinvest Bond Fund	8,643,446	10,000	13,115	3,115
Syailendra Fixed Income Fund	4,798,649	10,000	12,279	2,279
Avrist Proteksi Spirit 15	10,000,000	10,000	10,191	191
Sam Syariah Berimbang	4,973,778	10,000	7,153	(2,847)
Panin Dana Maksima	66,488	5,000	5,610	610
Simas Syariah Unggulan	8,750,301	10,000	5,329	(4,671)
Manulife Saham SMC Plus	5,008,113	5,000	3,081	(1,919)
Sam Sharia Equity Fund	3,683,144	5,000	2,892	(2,108)
Jumlah pihak ketiga		438,884	421,700	(17,184)
Jumlah		1,401,335	1,427,037	25,702

*) Disajikan dalam angka penuh/Presensed in full number of units

7. Marketable Securities - Net (continued)

c. Mutual Funds

Mutual funds at fair value through profit or loss consist of the followings:

2024				
Jumlah unit/ Total units*)	Biaya perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Fair value	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain/(loss)	
At fair value through profit or loss				
Related parties (Notes 41)				
Reksadana - Related parties				
Total related parties				
Third parties				
Insight Green (I-Green)				
Insight Terproteksi 5				
Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds				
Sucorinvest Flexi Fund				
Principal Islamic Equity Growth Syariah				
Syailendra Pendapatan Tetap Premium				
Panin Gebyar Indonesia II				
Panin Dana Unggulan				
Panin Dana Pendapatan Utama				
Cipta Proteksi XXII				
Allianz Fixed Income Fund 2				
Principal Indo Domestic Equity Fund				
Ashmore Dana Obligasi				
Unggulan Nusantara				
Sucorinvest Bond Fund				
Syailendra Fixed Income Fund				
Avrist Proteksi Spirit 15				
Sam Syariah Berimbang				
Panin Dana Maksima				
Simas Syariah Unggulan				
Manulife Saham SMC Plus				
Sam Sharia Equity Fund				
Total third parties				
Total				

*) Disajikan dalam angka penuh/Presensed in full number of units

2023				
	Jumlah unit/ Total units*)	Biaya perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Fair value	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain/(loss)
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Pihak berelasi (Catatan 41)				
Reksadana - Pihak berelasi	740,981,623	1,023,345	1,041,223	17,876
Jumlah pihak berelasi		1,023,345	1,041,223	17,876
Pihak ketiga				
Insight Green (I-Green)	63,139,244	80,000	66,571	(13,429)
Insight Terproteksi 5	34,496,986	34,497	36,389	1,892
Sucorinvest Flexi Fund	4,980,626	30,000	30,365	365
Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds	60,000,000	24,387	29,933	5,546
Principal Islamic Equity Growth Syariah	24,658,750	45,000	28,761	(16,239)
Panin Dana Unggulan	2,954,342	25,000	27,277	2,277
Panin Gebyar Indonesia II	9,639,662	20,000	27,020	7,020
Syailendra Pendapatan Tetap Premium	15,405,436	25,000	26,760	1,760
Cipta Proteksi XXII	20,000,000	20,000	20,810	810
Allianz Fixed Income Fund 2	12,439,895	15,000	19,029	4,029
Panin Dana Pendapatan Utama	12,471,712	15,000	15,869	869
Principal Indo Domestic Equity Fund	19,223,930	20,000	15,088	(4,912)
Ashmore Dana Obligasi				
Unggulan Nusantara	13,656,973	15,000	14,224	(776)
Sucorinvest Bond Fund	8,643,446	10,000	13,315	3,315
Syailendra Fixed Income Fund	4,798,649	10,000	12,077	2,077
Avrist Proteksi Spirit 15	10,000,000	10,000	10,494	494
Sam Syariah Berimbang	4,973,778	10,000	7,454	(2,546)
Panin Dana Maksima	66,488	5,000	5,540	540
Simas Syariah Unggulan	8,750,301	10,000	5,435	(4,565)
Manulife Saham SMC Plus	5,008,113	5,000	3,349	(1,651)
Sam Sharia Equity Fund	3,683,144	5,000	2,992	(2,008)
		433,884	418,752	(15,132)
Jumlah		1,457,229	1,459,975	2,744

*) Disajikan dalam angka penuh/Presensed in full number of units

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. Efek-Efek - Bersih (lanjutan)

7. Marketable Securities - Net (continued)

d. Saham

Saham yang diukur pada nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain terdiri dari:

d. Shares

Shares at fair value through other
comprehensive income consist of the
followings:

2024			
Jumlah unit/ Total units*)	Biaya perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Fair value	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain/ (loss)
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			
Pihak berelasi (Catatan 41)			
Saham - Pihak berelasi	285,514,700	280,280	126,940
Jumlah pihak berelasi	285,514,700	280,280	126,940
Pihak ketiga			
PT Astra International Indonesia Tbk	2,400,000	19,576	11,736
PT United Tractors Tbk	415,000	13,265	10,686
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1,300,000	10,173	10,010
PT Bank Central Asia Tbk	800,000	4,927	7,740
PT AKR Corporindo Tbk	5,000,000	5,973	5,575
PT Bumi Serpong Damai Tbk	2,500,000	4,672	2,363
PT Unilever Indonesia Tbk	375,000	3,320	690
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	163,636,300	90,000	--
Jumlah pihak ketiga	176,426,300	151,906	48,800
Jumlah	461,941,000	432,186	175,740

*At fair value through other
comprehensive income
Related parties (Notes 41)*
Shares - Related Parties
Total related parties

Third parties
PT Astra International Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT AKR Corporindo Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Total third parties
Total

2023			
Jumlah unit/ Total units*)	Biaya perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Fair value	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain/ (loss)
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			
Pihak berelasi (Catatan 41)			
Saham - Pihak berelasi	285,514,700	280,280	134,062
Jumlah pihak berelasi	285,514,700	280,280	134,062
Pihak ketiga			
PT Astra International Indonesia Tbk	2,400,000	19,576	13,500
PT United Tractors Tbk	415,000	13,265	9,379
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1,300,000	10,173	8,353
PT Bank Central Asia Tbk	800,000	4,927	7,500
PT AKR Corporindo Tbk	5,000,000	5,973	7,350
PT Bumi Serpong Damai Tbk	2,500,000	4,672	2,688
PT Unilever Indonesia Tbk	375,000	3,320	1,322
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	163,636,300	90,000	--
Jumlah pihak ketiga	176,426,300	151,906	50,092
Jumlah	461,941,000	432,186	184,154

*At fair value through other
comprehensive income
Related parties (Notes 41)*
Shares - Related Parties
Total related parties

Third parties
PT Astra International Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT AKR Corporindo Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Total third parties
Total

Mutasi penghasilan komprehensif lain atas
saham adalah sebagai berikut:

Changes in other comprehensive income in
shares are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo awal tahun	(248,032)	(238,559)
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi yang diakui di ekuitas	(8,413)	(9,473)
Saldo akhir tahun	(256,445)	(248,032)

*Balance at beginning of year
Unrealized (losses) gain
recognized in equity
Ending Balance*

7. Efek-Efek - Bersih (lanjutan)

7. Marketable Securities - Net (continued)

e. Efek beragun aset

e. Asset-backed securities

Efek beragun aset yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari:

Asset-backed securities at fair value through laba rugi consist of the followings:

2024						
					Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain (loss)	
Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value			
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						At fair value through other profit or loss
Pihak berelasi (Catatan 41)						Related parties (Notes 41)
EBA-SP SMF-BTN 04- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	07 Mei/ May 2029	idAAA	341	341	0	EBA-SP SMF-BTN 04- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2
EBA-SP SMF-BTN 03- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	07 Juli/ July 2029	idAAA	286	287	0	EBA-SP SMF-BTN 03- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2
Jumlah		627	628	1		Total
2023						
					Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain (loss)	
Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value			
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						At fair value through other profit or loss
Pihak berelasi (Catatan 41)						Related parties (Notes 41)
EBA-SP SMF-BTN 04- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	07 Mei/ May 2029	idAAA	1,769	1,775	5	EBA-SP SMF-BTN 04- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2
EBA-SP SMF-BTN 03- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	07 Juli/ July 2029	idAAA	1,284	1,289	4	EBA-SP SMF-BTN 03- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2
Jumlah		3,054	3,063	10		Total

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat efek-efek yang dijadikan dana jaminan.

As at 31 December 2024 and 2023, there were no marketable securities pledged as statutory funds.

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai efek-efek.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of marketable securities.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

8. Piutang Imbal Jasa Penjaminan - Bersih

8. Guarantee Fee Receivables - Net

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	3,802,629	4,366,393	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga:			Third parties:
Berbagai Bank			Various Regional
Pembangunan Daerah	327,647	234,956	Development Banks
Berbagai Bank Swasta	32,456	31,587	Various Private Banks
Lainnya	23,209	131,765	Others
Jumlah	4,185,941	4,764,701	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,365,841)	(2,026,725)	Allowance for impairment losses
Jumlah	1,820,100	2,737,976	Total

Piutang imbal jasa penjaminan berdasarkan umur adalah:

Aging guarantee fee receivables are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
1 tahun	1,335,982	1,421,146	1 year
2 tahun	473,641	821,878	2 year
3 tahun	404,908	494,220	3 year
4 tahun	377,840	449,941	4 year
5 tahun	307,429	204,386	5 year
Lebih dari 5 tahun	1,286,141	1,373,130	More than 5 years
Total	4,185,941	4,764,701	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,365,841)	(2,026,725)	Allowance for impairment losses
Neto	1,820,100	2,737,976	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Changes in allowance for impairment are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	2,026,725	1,204,515	Opening balance
Penambahan	339,116	822,210	Additional
Saldo akhir	2,365,841	2,026,725	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang imbal jasa penjaminan.

The management believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible guarantee fee receivables.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. Piutang Penjaminan Ulang - Bersih

9. Re-guarantee Receivables - Net

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	798,293	762,624	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Asuransi Syariah Mubarakah	72,705	72,705	PT Asuransi Syariah Mubarakah
PT Heksa Solution Insurance	13,305	16,456	PT Heksa Solution Insurance
Jumlah	884,303	851,785	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(311,337)	(269,607)	Allowance for impairment losses
Jumlah	572,966	582,178	Total

Piutang penjaminan ulang berdasarkan umur
adalah:

*Aging guarantee fee receivables are as
follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
1 tahun	562,427	592,836	1 year
2 tahun	70,858	45,113	2 year
3 tahun	43,252	51,384	3 year
4 tahun	49,572	47,360	4 year
5 tahun	46,748	21,085	5 year
Lebih dari 5 tahun	111,446	94,007	More than 5 years
Jumlah	884,303	851,785	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(311,337)	(269,607)	Allowance for impairment losses
Neto	572,966	582,178	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

*Changes in allowance for impairment are as
follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	269,607	188,981	Opening balance
Penambahan	41,730	80,626	Additional
Saldo akhir	311,337	269,607	Ending balance

**9. Piutang Penjaminan Ulang - Bersih
(lanjutan)**

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang penjaminan ulang.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

9. Re-guarantee Receivables - Net (continued)

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible re-guarantee receivables.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

10. Piutang Hasil Investasi - Bersih

10. Investment Income Receivables - Net

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	234,949	221,477	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga:			Third parties:
Obligasi	20,962	2,174	Bonds
Sukuk	296	236	Sukuk
Deposito berjangka	771	1,089	Time deposits
Jumlah	256,978	224,976	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(81)	Allowance for impairment losses
Jumlah	256,978	224,895	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Changes in allowance for impairment are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	81	14	Opening balance
Penambahan	--	67	Additional
Pembalikan	(81)	--	Reversal
Saldo akhir	--	81	Ending balance

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang hasil investasi.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible investment income receivables.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. Piutang Hasil Investasi - Bersih (Lanjutan)

**10. Investment Income Receivables – Net
(Continued)**

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

11. Aset Tetap - Bersih

11. Fixed Assets – Net

	2024				
	Saldo awal Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transferred	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan:					Acquisition cost:
Kepemilikan langsung					Direct ownership
Tanah	256,758	30,742	--	--	Land
Bangunan kantor	254,379	47,898	--	21,146	Office buildings
Perumahan dinas	10,028	--	--	1,197	Houses
Inventaris kantor	209,098	28,372	(1,890)	(156)	Office equipment
Inventaris rumah dinas	6,052	994	(74)	163	Houses equipment
Kendaraan bermotor	36,475	430	(2,337)	(10)	Motor vehicles
Aset dalam penyelesaian	19,167	17,807	--	(22,340)	Assets in progress
	791,957	126,243	(4,301)	--	913,898
Aset hak-guna					Right-of-use assets
Bangunan kantor	61,745	22,710	(20,932)	(249)	Office buildings
Kendaraan bermotor	72,665	27,458	(11,857)	249	Motor vehicles
Inventaris kantor	159	--	--	--	Office equipment
	134,569	50,168	(32,789)	--	151,948
	926,526	176,411	(37,089)	--	1,065,846
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung					Direct ownership
Bangunan kantor	(50,492)	(8,377)	--	--	Office buildings
Perumahan dinas	(3,657)	(504)	--	--	Houses
Inventaris kantor	(138,911)	(24,459)	1,890	158	Office equipment
Inventaris rumah dinas	(4,510)	(661)	74	(158)	Houses equipment
Kendaraan bermotor	(36,272)	(124)	2,337	--	Motor vehicles
	(233,842)	(34,125)	4,301	--	(263,665)
Aset hak-guna					Right-of-use assets
Bangunan kantor	(37,444)	(18,975)	21,242	35	Office buildings
Kendaraan bermotor	(28,315)	(29,192)	12,154	(35)	Motor vehicles
Inventaris kantor	(117)	(30)	--	--	Office equipment
	(65,876)	(48,197)	33,396	--	(80,677)
	(299,718)	(82,322)	37,697	--	(344,342)
Nilai buku bersih	626,808				Net book value
					721,504

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. Aset Tetap - Bersih (lanjutan)

11. Fixed Assets - Net (continued)

	2023					
	Saldo awal Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transferred	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan:						Acquisition cost:
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	217,273	35,072	--	4,413	256,758	Land
Bangunan kantor	226,877	18,677	--	8,825	254,379	Office buildings
Perumahan dinas	8,648	744	--	636	10,028	Houses
Inventaris kantor	176,556	32,339	(142)	345	209,098	Office equipment
Inventaris rumah dinas	5,199	845	--	8	6,052	Houses equipment
Kendaraan bermotor	36,383	121	(29)	--	36,475	Motor vehicles
Aset dalam penyelesaian	--	33,394	--	(14,227)	19,167	Assets in progress
	670,936	121,192	(171)	--	791,957	
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Bangunan kantor	61,152	16,984	(16,391)	--	61,745	Office buildings
Kendaraan bermotor	57,304	44,545	(29,184)	--	72,665	Motor vehicles
Inventaris kantor	159	--	--	--	159	Office equipment
	118,615	61,529	(45,575)	--	134,569	
	789,551	182,721	(45,746)	--	926,526	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan kantor	(43,851)	(6,641)	--	--	(50,492)	Office buildings
Perumahan dinas	(3,263)	(394)	--	--	(3,657)	Houses
Inventaris kantor	(116,710)	(22,343)	142	--	(138,911)	Office equipment
Inventaris rumah dinas	(3,854)	(656)	--	--	(4,510)	Houses equipment
Kendaraan bermotor	(36,205)	(96)	29	--	(36,272)	Motor vehicles
	(203,883)	(30,130)	171	--	(233,842)	
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Bangunan kantor	(36,540)	(17,295)	16,391	--	(37,444)	Office buildings
Kendaraan bermotor	(35,681)	(21,818)	29,184	--	(28,315)	Motor vehicles
Inventaris kantor	(88)	(29)	--	--	(117)	Office equipment
	(72,309)	(39,142)	45,575	--	(65,876)	
	(276,192)	(69,272)	45,746	--	(299,718)	
Nilai buku bersih	513,359				626,808	Net book value

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya. Direksi berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As at 31 December 2024, fixed assets are covered by insurance against losses of fire and other risks. The Directors believe that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Berdasarkan evaluasi Direksi, tidak terdapat kejadian - kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024.

Based on the Directors' assessment, there had been no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of fixed assets as at 31 December 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024 tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan.

As at 31 December 2024 there were no fixed assets pledged as collateral.

Aset hak guna

Right of use of assets

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The profit or loss shows the following amounts related to leases:

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban umum dan administrasi			General and administrative expenses
Depresiasi aset hak-guna	48,198	39,142	Depreciation of right-of-use assets
Beban bunga	5,077	4,056	Interest expense

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. Aset Tetap - Bersih (lanjutan)

11. Fixed Assets - Net (continued)

Rincian penjualan aset tetap pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

The details of the sale of property and equipment on December 31, 2024 and December 31, 2023, are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Harga jual	1,068	--	Proceeds from sale of asset
Nilai buku neto	--	--	Net book value
Keuntungan penjualan aset tetap	1,068	--	Gain on sale of asset

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp55.528 dan Rp45.425.

The total cash outflow for leases for the year ended December 31, 2024 and 2023 is amounting to Rp55,528 and Rp45,425 respectively.

	2024	2023	
Saldo awal	48,713	29,129	Beginning balance
Arus kas	(55,528)	(45,425)	Cash Flow
Perubahan non kas			Non-cash movement
Beban bunga (Catatan 39)	5,074	657	Interest expense (Notes 39)
Penambahan	48,019	62,154	Additions
Pelepasan	270	2,199	Disposals
Saldo akhir (Catatan 19)	46,548	48,713	Ending balance (Notes 19)

12. Penjaminan Ulang Dibayar Dimuka

12. Prepaid Re-Guarantee

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit Usaha Rakyat	488,655	258,785	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	756,917	357,271	Productive
PEN	--	20,569	PEN
Konsumtif	244,504	286,869	Consumptive
Suretyship	7,506	12,732	Suretyship
Jumlah	1,497,582	936,226	Total

13. Aset Pengembalian

13. Reimbursement Assets

	2024 Rp	2023 Rp	
Kredit Usaha Rakyat	1,266,525	627,458	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	181,502	63,675	Productive
Konsumtif	825	111,719	Consumptive
Suretyship	2,374	(11,208)	Suretyship
Jumlah	1,451,226	791,644	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(36,632)	--	Allowance for impairment losses
Jumlah	1,414,594	791,644	Total

14. Biaya Akuisisi Tangguhan

14. Deferred Acquisition Cost

	2024 Rp	2023 Rp	
Produktif	8,052	9,725	Productive
Konsumtif	108,803	135,661	Consumptive
Suretyship	703	1,995	Suretyship
Jumlah	117,558	147,381	Total

15. Aset Penjaminan Ulang

15. Re-Guarantee Assets

	2024 Rp	2023 Rp	
Entitas anak			Subsidiary
Imbal jasa <i>kafalah</i> ditangguhkan	204,667	193,192	Unearned <i>kafalah</i> fees
Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	118,649	118,483	Claims incurred but not yet reported
Klaim dalam proses	48,293	42,649	Claims in process
Sub jumlah	371,609	354,324	Sub total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai aset penjaminan ulang atas cadangan klaim	(9,601)	--	Reserves for impairment losses on re-guarantee assets of estimated claims
Cadangan kerugian penurunan nilai aset penjaminan ulang atas cadangan premi	(40,191)	--	Reserves for impairment losses on re-guarantee assets of premium reserves
Jumlah	321,817	354,324	Total

16. Aset Lain-Lain - Bersih

16. Other Assets - Net

	2024 Rp	2023 Rp	
Klaim dalam proses	56,038	56,442	Claims in process
Pinjaman	17,348	17,110	Loans
Piutang atas investasi yang telah jatuh tempo	9,428	9,428	Receivables from matured investment
Lainnya	9,392	7,319	Others
Jumlah	92,206	90,299	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(86,845)	(86,017)	Allowance for impairment losses
Jumlah	5,361	4,282	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Changes in allowance for impairment are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal	86,017	90,894	Opening balance
Penambahan provisi	828	--	Additional provision
Pembalikan provisi	--	(4,877)	Reversal provision
Saldo akhir	86,845	86,017	Ending balance

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai aset lain-lain.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of other assets.

17. Utang Klaim

17. Claim Payables

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	299,226	79,975	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga:			Third parties:
Lainnya	--	1,397	Others
Jumlah	299,226	81,372	Total

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

18. Utang Penjaminan Ulang

18. Re-Guarantee Payables

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	1,005,112	633,300	Related Parties (Notes 41)
Jumlah	1,005,112	633,300	Total

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

19. Akruai dan Utang Lain-Lain

19. Accruals and Other Payables

	2024 Rp	2023 Rp	
Subrogasi belum teridentifikasi			Unidentified subrogation income
Lainnya	807,690	69,146	Others
Beban pegawai yang masih harus dibayar	331,297	306,409	Accrued employee expenses
IJP belum teridentifikasi dan dikembalikan	75,895	936,002	Unidentified and refundable guarantee fees
Beban administrasi dan umum yang masih harus dibayar	66,877	83,035	Accrued administrative and general expenses
Beban sistem dan teknologi yang masih harus dibayar	62,815	67,226	Accrued system and technology expenses
Liabilitas sewa (Catatan 11)	46,548	48,713	Lease liabilities (Note 11)
Fee bank	11,587	13,477	Bank fees
Beban operasi yang masih harus dibayar	5,650	11,406	Accrued operational expenses
Jumlah	1,408,359	1,535,414	Total

20. Perpajakan

20. Taxation

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	2024 Rp	2023 Rp	
Pajak dibayar dimuka:			Prepaid taxes:
Perusahaan			The Company
PPH Pasal 28A	55,302	--	Article 28A
Entitas Anak			Subsidiary
PPH Pasal 28A	13,797	50,415	Article 28A
Estimasi klaim atas pengembalian pajak	50,415	--	Estimate claim for taxes refund
Jumlah	119,514	50,415	Total

b. Utang pajak

b. Taxes payables

	2024 Rp	2023 Rp	
Pajak penghasilan badan:			Corporate income tax:
Perusahaan			The Company
PPH Pasal 29	--	94,078	Article 29
Entitas Anak			Subsidiary
PPH Pasal 29	--	--	Article 29
Jumlah	--	94,078	Total
Pajak lain-lain:			Other taxes:
Perusahaan			The Company
Pajak Pertambahan Nilai	3,439	1,838	Value Added Tax
PPH Pasal 23	1,491	1,053	Article 23
PPH Pasal 4 (2)	568	132	Article 4 (2)
PPH Pasal 21	295	10,946	Article 21
PPH Pasal 22	35	46	Article 22
PPH Pasal 25	--	16,808	Article 25
Jumlah	5,828	30,823	Total
Entitas Anak			Subsidiary
PPH Pasal 21	445	543	Article 21
PPH Pasal 23	55	61	Article 23
PPH Pasal 4 (2)	24	116	Article 4 (2)
PPH Pasal 25	--	3,787	Article 25
Jumlah	524	4,507	Total
	6,352	35,330	
Jumlah	6,352	129,408	Total

20. Perpajakan (lanjutan)

20. Taxation (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expenses

	2024 Rp	2023 Rp	
Perusahaan			The Company
Kini	30,936	296,283	Current
Tangguhan	95,952	(87,595)	Deferred
Jumlah	126,888	208,688	Total
Entitas Anak			Subsidiary
Kini	1,602	--	Current
Tangguhan	(2,933)	(6,575)	Deferred
Jumlah	(1,331)	(6,575)	Total
Konsolidasian			Consolidated
Kini	32,538	296,283	Current
Tangguhan	93,019	(94,170)	Deferred
Jumlah	125,557	202,113	Total

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense and the theoretical amount of income tax expense is calculated based on profit before income tax at the tax rates that apply is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	1,287,051	1,638,962	Consolidated profit before income tax
Laba sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak	(52,780)	(27,314)	Profit before income tax - Subsidiary
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	1,234,271	1,611,648	Profit before income tax - Company
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku 22%	271,540	354,563	Taxes calculated at the applicable tax rate of 22%
Dampak pajak atas koreksi beda tetap	(144,652)	(145,875)	Tax impact on the correction of permanent differences
Beban pajak penghasilan Perusahaan	126,888	208,688	The Company's income tax expense

Pajak penghasilan badan dihitung untuk masing - masing entitas sebagai bagian yang terpisah secara hukum.

The corporate income tax is calculated for each entity as a separate legal entity.

20. Perpajakan (lanjutan)

20. Taxation (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Taksiran laba kena pajak Grup, dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	1,287,051	1,638,962
Rugi sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak	(52,780)	(27,314)
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	1,234,271	1,611,648
Perbedaan waktu:		
Penurunan cadangan klaim Akrua	(1,044,705)	(541,971)
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	545,662	883,046
Imbalan kerja jangka panjang	1,240	(10,167)
Liabilitas sewa	(5,976)	46,097
Penyusutan	4,265	(33,149)
Jumlah	(253,429)	398,160
Perbedaan tetap:		
Pendapatan yang dikenakan pajak final dan pendapatan yang tidak dikenakan pajak	(1,384,863)	(1,135,473)
Beban terkait pendapatan yang dikenakan pajak final - <i>joint cost</i>	22,815	20,553
Beban terkait pendapatan yang dikenakan pajak final	19,734	27,780
Penghapusan piutang	173,211	79,632
Beban pajak final	167,873	139,635
Beban yang tidak diperkenankan	161,007	204,803
Jumlah	(840,223)	(663,070)
Laba kena pajak	140,619	1,346,738
Perusahaan:		
Beban pajak penghasilan - kini	30,936	296,283
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:		
Pasal 23	--	(12,469)
Pasal 25	(86,238)	(189,736)
(Lebih)/ utang pajak penghasilan	(55,302)	94,078
Entitas Anak:		
Beban pajak penghasilan - kini	1,602	--

c. Income tax expenses (continued)

The Group's estimated taxable income, and income taxes for the year ended 31 December 2024 and 2023 are as follows:

Consolidated profit before income tax
Loss before income tax - Subsidiary
Profit before income tax - Company
Temporary differences:
Decrease in claim reserves
Accruals
Allowance for impairment losses
Long-term employee benefits
Lease liabilities
Depreciation
Total
Permanent differences:
Income subject to final tax and non-taxable income
Expenses subject to final tax - joint cost
Expenses subject to final tax
Receivables write-off
Final tax expenses
Non-deductible expenses
Total
Taxable income
The Company:
Income tax expenses - current
Less prepaid income taxes:
Article 23
Article 25
(Prepaid)/ Corporate income tax payable
Subsidiary:
Income tax expenses - current

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. Perpajakan (lanjutan)

20. Taxation (continued)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Grup menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajaknya.

The corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2024 is an estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Group lodges its Annual Corporate Tax Return ("SPT").

d. Aset pajak tangguhan - bersih

d. Deferred tax assets - net

	2024					
	1 Januari/ January 2024	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/Credited/ (charged) to the profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/(charged) to other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember/ December 31, 2024	
Perusahaan						The Company
Cadangan kerugian penurunan nilai	520,802	120,046	--	(40,196)	600,652	Allowances for impairment losses
Kenaikan cadangan klaim	1,240,603	(229,835)	--	--	1,010,768	Increase in claim reserves
Liabilitas imbalan kerja	16,786	273	(489)	--	16,570	Employee benefit liabilities
Depresiasi aset tetap dan aset hak-guna	(12,938)	936	--	--	(12,002)	Fixed asset and right-of-use assets depreciation
Liabilitas sewa	10,142	(1,315)	--	--	8,827	Lease liabilities
Akrual	98,930	54,139	--	--	153,069	Accruals
Sub - Jumlah	1,874,325	(55,756)	(489)	(40,196)	1,777,884	Sub - Total
Entitas Anak						Subsidiary
Depresiasi aset tetap dan aset hak-guna	(661)	(1,307)	--	--	(1,968)	Fixed asset and right-of-use assets depreciation
Liabilitas sewa	575	838	--	--	1,413	Lease liabilities
Estimasi klaim	43,421	(12,486)	--	--	30,935	Estimated claims
Liabilitas imbalan kerja	1,350	229	(206)	--	1,373	Employee benefit liabilities
Nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual	--	--	1,104	--	1,104	Fair value on financial asset available for sale
Cadangan bonus	3,175	679	--	--	3,854	Provision for bonus
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjaminan ulang dan piutang imbal jasa kafalah	3,677	14,980	--	--	18,657	Allowance for impairment losses for re-guarantee receivables and kafalah receivables
Sub - Jumlah	51,537	2,933	898	--	55,368	Sub - Total
Jumlah	1,925,862	(52,823)	409	(40,196)	1,833,252	Total

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. Perpajakan (lanjutan)

20. Taxation (continued)

e. Aset pajak tangguhan - bersih (lanjutan)

e. Deferred tax assets - net (continued)

	2023				
	1 Januari/ January 2023	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/Credited/ (charged) to the profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/(charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2023	
Perusahaan					The Company
Cadangan kerugian penurunan nilai	326,532	194,270	—	520,802	Allowances for impairment losses
Kenaikan cadangan klaim	1,359,837	(119,234)	—	1,240,603	Increase in claim reserves
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(4,034)	—	4,034	—	Unrealised gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Liabilitas imbalan kerja	18,621	(2,237)	402	16,786	Employee benefit liabilities
Depresiasi aset tetap dan aset hak-guna	(5,645)	(7,293)	—	(12,938)	Fixed asset and right-of-use assets depreciation
Liabilitas sewa	—	10,142	—	10,142	Lease liabilities
Akrual	86,983	11,947	—	98,930	Accruals
	1,782,294	87,595	4,436	1,874,325	
Entitas Anak					Subsidiary
Depresiasi aset tetap dan aset hak-guna	143	(804)	—	(661)	Fixed asset and right-of-use assets depreciation
Liabilitas sewa	—	575	—	575	Lease liabilities
Estimasi klaim	40,616	2,805	—	43,421	Estimated claims
Liabilitas imbalan kerja	1,373	231	(254)	1,350	Employee benefit liabilities
Nilai wajar aural berharga tersedia untuk dijual	3,931	—	(3,931)	—	Fair value on financial asset available for sale
Cadangan bonus	3,084	91	—	3,175	Provision for bonus
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjaminan ulang dan piutang imbal jasa kafalah	—	3,677	—	3,677	Allowance for impairment losses for re-guarantee receivables and kafalah receivables
	49,147	6,575	(4,185)	51,537	
	1,831,441	94,170	251	1,925,862	

Direksi berkeyakinan bahwa saldo aset pajak tangguhan di atas dapat digunakan di masa yang akan datang.

Director believes that the deferred tax assets balance above can be recovered.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Grup menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang pajak.

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Group submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Tax ("DJP") may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

21. Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan

**21. Liabilities For Financial Guarantee
Contracts**

	2024	2023	
	Rp	Rp	
Kredit Usaha Rakyat	8,616,594	8,944,482	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	5,588,472	4,527,198	Productive
PEN	147,711	482,352	PEN
Konsumtif	549,626	1,236,876	Consumptive
Suretyship	37,344	20,558	Suretyship
Jumlah	14,939,747	15,211,466	Total

22. Pendapatan Komisi Ditangguhkan

22. Deferred Commission Income

	2024	2023	
	Rp	Rp	
Kredit Usaha Rakyat	82,308	45,395	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	114,182	54,663	Productive
PEN	--	162	PEN
Konsumtif	47,763	55,131	Consumptive
Suretyship	2,099	3,807	Suretyship
Jumlah	246,352	159,158	Total

23. Estimasi Liabilitas Klaim

23. Estimated Claim Liabilities

	2024	2023	
	Rp	Rp	
Entitas Anak			Subsidiary
Kredit Usaha Rakyat	112,866	56,019	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	98,798	52,673	Productive
PEN	71,935	16,336	PEN
Konsumtif	22,664	44,153	Consumptive
Suretyship	1,298	189,323	Suretyship
Jumlah	307,561	358,504	Total

Estimasi liabilitas klaim pada Entitas Anak merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

The estimated claim liabilities of the Subsidiary is the reserve of claims that might occur in the coming years onto the guarantee that has not matured yet.

Estimasi liabilitas klaim dicatat di laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan asumsi aktuaria. Termasuk dalam estimasi liabilitas klaim adalah klaim dalam proses dan IBNR (*Incurring But Not Reported*).

Estimated claim liabilities are recorded in the statement of financial position based on actuarial calculations using actuarial assumptions. Included in the estimated claim liabilities are claims in process and IBNR (Incurring But Not Reported).

Pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk dalam estimasi klaim adalah estimasi liabilitas klaim yang terjadi, namun belum dilaporkan - bersih sebesar Rp43.807 (2023: Rp 112.808).

As at 31 December 2024, included in estimated claims is estimated claim liabilities incurred but not yet reported - net amounting to Rp43,807 (2023: Rp112,808).

24. Imbal Jasa Kafalah Ditangguhkan

24. Unearned Kafalah Fees

	2024	2023	
	Rp	Rp	
Entitas Anak			Subsidiary
Kredit Usaha Rakyat	365,047	265,561	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	18,175	22,754	Productive
PEN	1	4,022	PEN
Konsumtif	303,201	351,582	Consumptive
Suretyship	33,402	42,220	Suretyship
Jumlah	719,826	686,139	Total

25. Liabilitas Imbalan Kerja

25. Employee Benefits Liabilities

	2024	2023	
	Rp	Rp	
Imbalan pascakerja	61,117	51,775	Post-employment benefit
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	20,441	30,662	Other long-term employee benefits
Jumlah	81,558	82,437	Total

Imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk program penghargaan pengabdian gaji dan cuti besar.

Other long-term employee benefits in the form of dedication rewards program and annual leave.

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh aktuaris independen, KKA Riana & Rekan (dahulu PT Padma Radya Aktuaria) dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", sedangkan untuk Entitas Anak, liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh aktuaris independen KKA Nandi dan Utama, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

The liability for employee benefits as at 31 December 2024 and 2023 are calculated by an independent actuary, KKA Riana & Rekan (formerly PT Padma Radya Aktuaria) using the "Projected Unit Credit" method, whilst for Subsidiary, the liability for employee benefits as at 31 December 2024 and 2023 are calculated by an independent actuary, KKA Nandi dan Utama, using the "Projected Unit Credit" method.

25. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

25. Employee Benefits Liabilities (continued)

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2024 Rp	2023 Rp	
Asumsi finansial:			Financial assumptions:
Usia pensiun normal	56 tahun	55 tahun	Normal retirement age
Tingkat diskonto per tahun			Annual discount rate
Program imbalan pascakerja	7.13%	6.75%	Post-employment benefit
Program imbalan kerja jangka panjang lainnya	7.13%	6.75%	Other long-term employee benefit
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6.00%	6.00%	Salary incremental rates
Tingkat mortalitas	100% TNAI IV 2019	100% TNAI IV 2019	Mortality rate
Tingkat cacat	5.00% TMI IV 2019	5.00% TMI IV 2019	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	3.00% per tahun sampai dengan usia 35 tahun kemudian menurun linier hingga 0.00% pada usia 56 tahun/ 3.00% per annum up to age 35 then decrease linearly to 0.00% at age 56	3.00% per tahun sampai dengan usia 35 tahun kemudian menurun linier hingga 0.00% pada usia 55 tahun/ 3.00% per annum up to age 35 then decrease linearly to 0.00% at age 55	Turnover rate
Usia pensiun normal	56 tahun	55 tahun	Normal retirement age
Metode penilaian aktuarial	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Actuarial valuation method

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of post-employment benefits liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal tahun	51,775	63,484	Beginning balance
Biaya jasa kini	6,591	5,485	Current service cost
Biaya jasa lalu	3,009	(20,188)	Past service cost
Beban bunga	3,495	3,050	Interest expense
Pengukuran kembali:			Remeasurement:
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(3,158)	670	Experience adjustment - on obligation
- Imbalan yang dibayar	(595)	(726)	Benefit paid -
Jumlah	61,117	51,775	Total

25. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

25. Employee Benefits Liabilities (continued)

Imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The post-employment benefits recognised in the consolidated statement of profit or loss are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya jasa kini	6,591	5,485	Current service cost
Biaya jasa lalu	3,009	(20,188)	Past service cost
Biaya bunga	3,495	3,050	Interest expense
Jumlah	13,095	(11,653)	Total

Jumlah yang diakui pada laba rugi komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in other comprehensive income are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Perubahan asumsi keuangan	--	1,852	Change in financial assumption
Penyesuaian pengalaman kewajiban	(3,158)	(1,182)	Experience adjustment on obligation
Jumlah	(3,158)	670	Total

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 15,72 (2023: 13,22).

The weighted average duration of the defined post-employment benefit liabilities at 31 December 2024 are 15.72 (2023: 13.22).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Dalam 1 tahun	9,579	1,157	Within 1 year
Antara 2 sampai 5 tahun	53,176	29,622	Between 2 and 5 years
Antara 6 sampai 10 tahun	64,264	34,371	Between 6 and 10 years
Lebih dari 10 tahun	787,792	266,316	More than 10 years

Sensitivitas liabilitas imbalan pascakerja untuk perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The sensitivity of the post-employment benefit liabilities to changes in the significant actuarial assumptions are as follows (unaudited):

31 Desember/December 31, 2024			
Dampak atas liabilitas imbalan pascakerja/ Impact on post-employment benefit liabilities			
Perubahan asumsi/ Changes in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(3,807)	4,314
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	4,660	(4,176)

Discount rate
Future salary
increment rate

25. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

25. Employee Benefits Liabilities (continued)

31 Desember/December 31, 2023				
Dampak atas liabilitas imbalan pascakerja/ Impact on post-employment benefit liabilities				
Perubahan asumsi/ Changes in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(3,807)	4,314	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	4,660	(4,176)	Future salary increment rate

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefit

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of other long-term employee benefit liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo awal tahun	30,662	27,398	Beginning balance
Biaya jasa kini	2,041	4,141	Current service cost
Beban bunga	2,070	1,789	Interest expense
Pengukuran kembali:			Remeasurement:
- Perubahan asumsi keuangan	--	848	Change in financial assumption -
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(4,922)	(290)	Experience adjustment -
Imbalan yang dibayar	(9,409)	(3,224)	on obligation Benefit paid
Jumlah	20,442	30,662	Total

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian terdiri dari:

Other long-term employee benefit liabilities erusahaan in the consolidated statement of profit or loss comprised of:

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya jasa kini	2,041	4,141	Current services cost
Biaya bunga	2,070	1,789	Interest expense
Pengakuan kembali yang diakui selama tahun berjalan	(4,922)	558	Remeasurements recognised during the year
Jumlah	(811)	6,488	Total

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 15,72 (2023:10,43)

The weighted average duration of the other long-term employee benefit liabilities at December 31, 2024 are 15.72 (2023:10.43)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan kerja jangka panjang lainnya yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long-term employee benefit is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Dalam 1 tahun	16,788	8,155	Within 1 year
Antara 2 sampai 5 tahun	15,605	11,722	Between 2 and 5 years
Antara 6 sampai 10 tahun	6,785	30,814	Between 6 and 10 years
Lebih dari 10 tahun	1,936	101,780	More than 10 years

25. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

31 Desember/December 31, 2024 Dampak atas liabilitas imbalan pascakerja/ Impact on post-employment benefit liabilities			
Perubahan asumsi/ Changes in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(2,366)	2,715
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	2,862	(2,548)

Discount rate
Future salary
increment rate

31 Desember/December 31, 2023 Dampak atas liabilitas imbalan pascakerja/ Impact on post-employment benefit liabilities			
Perubahan asumsi/ Changes in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(2,366)	2,715
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	2,862	(2,548)

Discount rate
Future salary
increment rate

25. Employee Benefits Liabilities (continued)

The sensitivity of the other long-term employee benefit liabilities to changes in the weighted principal assumption is as follows (unaudited):

26. Ekuitas

Berikut ini rincian modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	Jenis saham/ Type of shares	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount
Pemerintah Republik Indonesia	Seri A Dwiwarna/ Series A Dwiwarna	1	0.000009%	1
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Seri B/Series B	10,638,732	99.999991%	10,638,732
		10,638,733	100%	10,638,733

The Government of the
Republic of Indonesia
PT Bahana Pembinaan
Usaha Indonesia
(Persero)

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero) Nomor 25 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjarwo, S.H., M.H., tanggal 24 Februari 2020, badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo berubah menjadi Perseroan Terbatas dan telah mendapatkan pengesahan pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0011484.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero).

Based on the Deed of Establishment of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero) No. 25 made before Notary Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjarwo, S.H., M.H., dated 24 February 2020, the legal public entity Jaminan Kredit Indonesia or Jamkrindo was changed to a Limited Company and has been agreed by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0011484.AH.01.01 Year 2020 dated 24 February 2020 regarding Ratification of the Establishment of a Limited Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero).

26. Equity

Below are the details of issued and fully paid capital as at 31 December 2024 and 2023:

26. Ekuitas (lanjutan)

Perubahan ini mengakibatkan susunan saham dari yang sebelumnya tidak terbagi atas saham menjadi sebagai berikut:

- i. Sebanyak 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna bernominal Rp1.365.160 (jumlah penuh) (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
- ii. Sebanyak 7.638.732 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar Saham Seri B dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp7.638.732.000.000 (tujuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjarwo, S.H., M.H., terjadi pengalihan saham Seri B dari yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia menjadi dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sehingga terjadi perubahan badan hukum dari Persero menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- 0028854.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0181758 tanggal 9 April 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0181759 tanggal 9 April 2020. Perubahan ini mengakibatkan susunan saham menjadi sebagai berikut:

- i. Sebanyak 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna bernominal Rp1.365.160 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;

26. Equity (continued)

This change resulted in the composition of the shares from previously not divided into shares to become as follows:

- i. Amounted to 1 (one) Series A Dwiwarna share with a nominal value of Rp1,365,160 (full amount) (one million three hundred sixty five thousand one hundred and sixty Rupiah) is owned by the Republic of Indonesia;*
- ii. Amounted to 7,638,732 (seven million six hundred thirty eight thousand seven hundred and thirty two) Series B Shares with each share having a nominal value of Rp1,000,000 (one million Rupiah) therefore the total is Rp7,638,732,000,000 (seven trillion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty two million Rupiah) owned by the Republic of Indonesia.*

Based on the Deed of Resolution of the Shareholders of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia regarding the Amendment to the Articles of Association No. 2 dated 9 April 2020 which was made before Notary Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjarwo, S.H., M.H., there was a transfer of Series B shares from those previously owned by the Republic of Indonesia to be owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) resulting in a change of legal entity from (Persero) to Limited Company. This amendment has been agreed for amendments to the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights through the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU- 0028854.AH.01.02. Year 2020 dated 9 April 2020 regarding Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Company and Letter of Acceptance of Notification of Amendments to Articles of Association Number AHU-AH.01.03- 0181758 dated 9 April 2020 and Letter of Acceptance of Notification of Changes in Company Data Number AHU-AH.01.03-0181759 dated 9 April 2020. This change resulted in the composition of the shares to become as follows:

- i. Amounted to 1 (one) Series A Dwiwarna Share with a nominal value of Rp1,365,160 (one million three hundred sixty five thousand one hundred and sixty Rupiah) is owned by the Republic of Indonesia;*

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. Ekuitas (lanjutan)

- ii. Sebanyak 7.638.732 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar Saham Seri B dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp7.638.732.000.000 (tujuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Setoran modal

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham No. S-101/MBU102/2021 dan No. 002/BPUI/01/2021 yang dinotarisasi dengan Akta Notaris Hadijah, S.H., M.P.A., Nomor 10 tanggal 08 Maret 2021, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan Perusahaan sebesar 3.000.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp3.000.000. Saham baru sebanyak 3.000.000 lembar saham ini telah diterbitkan dan dibayar penuh oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-051492 tertanggal 09 Maret 2021. Perubahan ini mengakibatkan susunan saham menjadi sebagai berikut:

- i. Sebanyak 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna bernominal Rp1.365.160 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
- ii. Sebanyak 10.638.732 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar Saham Seri B dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp10.638.732.000.000 (sepuluh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

26. Equity (continued)

- ii. Amounted to 7,638,732 (seven million six hundred thirty eight thousand seven hundred and thirty two) Series B Shares with each share having a nominal value of Rp1,000,000 (one million Rupiah), therefore the total is Rp7,638,732,000,000 (seven trillion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty two million Rupiah) is owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Paid-in capital

Based on Resolution of Shareholders No. S-101/MBU/02/2021 and No. 002/BPUI/01/2021 which erusahaa by Notarial Deed of Hadijah, S.H., M.P.A., No. 10 dated 08 March 2021, the shareholders approved the increase of the Company's share capital of 3,000,000 shares with the nominal value of Rp3,000,000. The issuance of 3,000,000 new shares has been issued and fully paid by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-AH.01.03-051492 dated 09 March 2021. This change resulted in the composition of the shares to be as follows:

- i. Amounted to 1 (one) Series A Dwiwarna Share with a nominal value of Rp1,365,160 (one million three hundred sixty five thousand one hundred and sixty Rupiah) is owned by the Republic of Indonesia;
- ii. Amounted to 10,638,732 (ten million six hundred thirty eight thousand seven hundred and thirty two) Series B Shares with each share having a nominal value of Rp1,000,000 (one million Rupiah), therefore the total is Rp10,638,732,000,000 (ten trillion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty two million Rupiah) is owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

26. Ekuitas (lanjutan)

Pembagian dividen

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2023 nomor B.1368/EKT/DIRUT/RUPS/VI/2023 tentang "Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022", pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp959.876.206.648 (nilai penuh) yang berasal dari hasil operasi tahun 2022. Dividen tersebut telah dibayar pada tanggal 14 Agustus 2023.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 8 Juli 2024 nomor 02/RUPS/DIR/VII/2024 tentang "Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023", pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp1.077.760.310.578 (nilai penuh) yang berasal dari hasil operasi tahun 2023.

26. Equity (continued)

Dividend distribution

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder on 27 June 2023 No. B.1368/EKT/DIRUT/RUPS/VI/2023 regarding "Approval of Annual Report and Ratification of Consolidated Financial Statements PT Jamkrindo Year 2022", the shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp959,876,206,648 (full amount) from 2022 operating result. The dividend was paid on 14 August 2023.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder on July 8, 2024 No. 02/RUPS/DIR/VII/2024 regarding "Approval of Annual Report and Ratification of Consolidated Financial Statements PT Jamkrindo Year 2023", the shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp1,077,760,310,578 (full amount) from 2023 operating result.

27. Kepentingan Non-Pengendali

Perubahan kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo awal	846	1,000
Laba bersih tahun berjalan	38	(164)
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(1)	10
Saldo akhir	883	846

27. Non-Controlling Interest

Movements in the non-controlling interests' share in the net assets of the Subsidiary are as follows:

Beginning balance
Net profit for the year
Unrealised losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax
Ending balance

28. Imbal Jasa Penjaminan Bruto

	2024 Rp	2023 Rp
Kredit Usaha Rakyat Produktif	4,639,364	4,214,420
PEN	2,461,334	1,407,622
Konsumsi	315,572	798,201
Suretyship	200,759	209,409
	116,002	109,048
Jumlah	7,733,031	6,738,700

28. Gross Guarantee Fee Income

Kredit Usaha Rakyat Productive PEN Consumptive Suretyship
Total

29. Imbal Jasa Kafalah Bruto

29. Gross Kafalah Fees

	2024 Rp	2023 Rp	
Entitas Anak			Subsidiary
Pihak berelasi (Catatan 41)	4,021	17,909	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga	364,256	390,126	Third parties
Jumlah	368,277	408,035	Total
	2024 Rp	2023 Rp	
Berdasarkan produk:			By Product:
Kredit Usaha Rakyat	269,764	226,590	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	14,754	19,433	Productive
PEN	--	17,909	PEN
Konsumtif	40,330	22,755	Consumptive
Suretyship	43,429	121,348	Suretyship
Jumlah	368,277	408,035	Total

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

30. Premi Penjaminan Ulang

30. Re-Guarantee Premiums

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	1,135,553	740,166	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga	21,501	27,629	Third parties
Jumlah	1,157,054	767,795	Total
	2024 Rp	2023 Rp	
Berdasarkan produk:			By Product:
Kredit Usaha Rakyat	766,271	483,551	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	264,010	94,207	Productive
PEN	18,879	80,694	PEN
Konsumtif	72,186	73,604	Consumptive
Suretyship	35,708	35,739	Suretyship
Jumlah	1,157,054	767,795	Total

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. Penurunan Imbal Jasa Kafalah yang Belum Merupakan Pendapatan

31. Decrease in Unearned Kafalah Fees

	2024 Rp	2023 Rp	
Entitas Anak			Subsidiary
Berdasarkan produk:			By Product:
Kredit Usaha Rakyat	(62,379)	(110,494)	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	2,806	(30)	Productive
PEN	3,119	44,561	PEN
Konsumtif	28,203	26,356	Consumptive
Suretyship	6,046	15,395	Suretyship
Jumlah	(22,205)	(24,212)	Total

32. Beban Klaim Bruto

32. Gross Claim Expenses

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	8,556,010	5,370,958	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga	573,647	586,065	Third parties
Jumlah	9,129,657	5,957,023	Total

	2024 Rp	2023 Rp	
Berdasarkan produk:			By Product:
Kredit Usaha Rakyat	5,152,758	4,731,429	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	3,296,141	336,954	Productive
PEN	286,341	304,915	PEN
Konsumtif	297,004	245,505	Consumptive
Suretyship	97,413	338,220	Suretyship
Jumlah	9,129,657	5,957,023	Total

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

33. Penurunan Cadangan Klaim

33. Decrease in Claim Reserves

	2024 Rp	2023 Rp	
Berdasarkan produk:			By Product:
Kredit Usaha Rakyat	(889,783)	166,276	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	421,508	(675,596)	Productive
PEN	(170,036)	511,467	PEN
Konsumtif	(419,205)	(496,477)	Consumptive
Suretyship	(43,942)	(34,890)	Suretyship
Jumlah	(1,101,458)	(529,220)	Total

34. Klaim Penjaminan Ulang

34. Re-Guarantee Claims

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	(1,068,761)	(787,839)	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga	--	(644)	Third parties
Jumlah	(1,068,761)	(788,483)	Total
	2024 Rp	2023 Rp	
Berdasarkan produk:			By Product:
Kredit Usaha Rakyat	(548,729)	(476,250)	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	(368,159)	(64,542)	Productive
PEN	(4,439)	(3,690)	PEN
Konsumtif	(121,619)	(117,829)	Consumptive
Suretyship	(25,815)	(126,172)	Suretyship
Jumlah	(1,068,761)	(788,483)	Total

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

35. Pendapatan Komisi

35. Commission Income

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	154,038	92,030	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga	233	621	Third parties
Jumlah	154,271	92,651	Total
	2024 Rp	2023 Rp	
Berdasarkan produk:			By Product:
Kredit Usaha Rakyat	104,238	68,679	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	39,083	13,741	Productive
Konsumtif	6,998	7,099	Consumptive
Suretyship	3,952	3,132	Suretyship
Jumlah	154,271	92,651	Total

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

36. Beban Komisi

36. Commission Expenses

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	10,336	2,893	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga	16,618	28,445	Third parties
Jumlah	26,954	31,338	Total
	2024 Rp	2023 Rp	
Berdasarkan produk:			By Product:
Produktif	8,487	8,781	Productive
Konsumtif	18,080	22,071	Consumptive
Suretyship	387	486	Suretyship
Jumlah	26,954	31,338	Total

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. Pendapatan Subrogasi – Bersih

37. Subrogation Income – Net

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 41)	1,838,400	967,267	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga	101,767	92,150	Third parties
Jumlah	1,940,167	1,059,417	Total
	2024 Rp	2023 Rp	
Berdasarkan produk:			By Product:
Kredit Usaha Rakyat	1,246,874	879,695	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	474,691	99,880	Productive
PEN	127,757	29,778	PEN
Konsumsi	52,041	17,466	Consumptive
Suretyship	38,804	32,598	Suretyship
Jumlah	1,940,167	1,059,417	Total

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

38. Pendapatan Investasi – Bersih

38. Investment Income – Net

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan investasi			Investment income
Pihak berelasi (Catatan 41)	1,411,242	1,109,240	Related parties (Notes 41)
Pihak ketiga:			Third parties:
Bunga obligasi	23,645	19,016	Bonds interest
Bunga deposito	34,677	59,315	Time deposits interest
Pendapatan sukuk	882	873	Sukuk income
Pendapatan reksadana	3,552	12,186	Mutual fund income
Pendapatan <i>capital gain</i>	--	1,905	Income on capital gain
Dividen	3,287	5,730	Dividend
Jumlah	1,477,285	1,208,265	Total
Beban investasi			Investment expense
Beban amortisasi	(18,369)	(4,087)	Amortization expenses
Jumlah	(18,369)	(4,087)	Total
Jumlah	1,458,916	1,204,178	Total

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

39. Beban Usaha

39. Operating Expenses

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban pegawai	646,721	647,384	Employee expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	613,447	898,640	Provision for impairment losses
Umum dan administrasi	225,463	272,887	General and administrative
Pemasaran	151,340	131,470	Marketing
Depresiasi	82,322	69,272	Depreciation
<i>Outsourcing</i>	88,534	84,018	<i>Outsourcing</i>
Teknologi, sistem dan pengembangan usaha	74,502	64,553	Technology, system and development
Perjalanan dinas	62,524	39,703	Business travel
Kendaraan	22,946	21,654	Transportation
Sosialisasi dan rekonsiliasi	20,577	14,792	Socialization and reconciliation
Sewa	19,136	18,830	Rent
Beban bunga (Catatan 11)	5,074	657	Interest expenses (Notes 11)
Lainnya	28,947	2,141	Others
Jumlah	2,041,533	2,266,001	Total

40. Pendapatan Lain-Lain – Bersih

40. Other Income – Net

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan jasa administrasi penjaminan	6,381	7,153	Administration guarantee income
Pendapatan jasa giro (Beban)/pendapatan non-operasional	7,009	6,838	Interest income
	(5,824)	1,108	Non-operating (expenses)/income
Jumlah	7,566	15,099	Total

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi

41. Transactions with Related Parties

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The details of significant balances with related parties as at December 31, 2024 and 2023 were as follows:

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) adalah pemegang saham Grup. PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah entitas yang dimiliki dan dikendalikan secara tidak langsung oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Grup memiliki transaksi penjaminan ulang dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia.

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) is the shareholder of the Group. PT Reasuransi Nasional Indonesia is an entity which indirectly owned and controlled by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). The Group has re-guarantee transaction with PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama Grup dan Badan Usaha Milik Negara dan Anak perusahaan. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,

State-Owned Enterprises

Government of Republic of Indonesia is the ultimate shareholder of the Group and State-Owned Enterprises and Subsidiaries. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,
PT Bank Syariah Indonesia Tbk,
PT Bank Tabungan Negara Syariah,
PT Pegadaian, PT Reasuransi Indonesia
Utama (Persero), PT Reasuransi Syariah
Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia,
PT BRI Asuransi Indonesia, Perum Perumahan
Nasional (Persero), PT Bank Raya Indonesia
Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Asuransi
Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Binagriya
Upakara, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk,
PT Pegadaian – Unit Syariah, PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya
(Persero) Tbk, PT Angkasa Pura Indonesia,
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk,
PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Rajawali
Nusantara Indonesia (Persero),
PT Permodalan Nasional Madani, PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Gresik
(Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk,
PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita
Beton Precast Tbk, PT Bukit Asam Tbk,
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk,
PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT PP
(Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk,
PT Semen Indonesia (Persero), PT Pupuk
Kujang, PT Mandiri Tunas Finance, PT BNI
Multifinance, PT AXA Mandiri Financial
Service, Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera,
PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero),
PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero),
PT Pembangunan Perumahan (Persero),
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
PT Asuransi Tugu Pratama Tbk,
PT Bank Mandiri Taspen, PT Istaka Karya
(Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero),
PT Bahana TCW Investment Management,
PT Danareksa (Persero), PT PNM Investment
Management, PT Danareksa Investment
Management, PT PP Presisi Tbk, PT BNI Asset
Management, PT Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero), PT Mandiri Manajemen Investasi,
PT Perkebunan Nusantara, PT Pupuk
Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya Beton
Tbk, PT Propernas Griya Utama, Koperasi
Warga Semen Gresik, PT Propernas Griya
Utama dan PT Barata Indonesia (Persero),
PT Elnusa Tbk, PT BRI Multifinance,

41. Transactions with Related Parties (continued)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,
PT Bank Syariah Indonesia Tbk,
PT Bank Tabungan Negara Syariah,
PT Pegadaian, PT Reasuransi Indonesia
Utama (Persero), PT Reasuransi Syariah
Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia,
PT BRI Asuransi Indonesia, Perum
Perumahan Nasional (Persero), PT Bank Raya
Indonesia Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk,
PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi
Binagriya Upakara, PT Aneka Tambang
(Persero) Tbk, PT Pegadaian — Sharia Unit,
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero),
PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Angkasa
Pura Indonesia, PT Telkom Indonesia
(Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero)
Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero), PT Permodalan Nasional Madani,
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,
PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk, PT Jasa Marga
(Persero) Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk,
PT Bukit Asam Tbk, PT Perusahaan Gas
Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api
Indonesia (Persero), PT PP (Persero),
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Semen
Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang,
PT Mandiri Tunas Finance, PT BNI
Multifinance, PT AXA Mandiri Financial
Service, Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera,
PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk,
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero),
PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero),
PT Pembangunan Perumahan (Persero),
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
PT Asuransi Tugu Pratama Tbk, PT Bank
Mandiri Taspen, PT Istaka Karya (Persero),
PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bahana
TCW Investment Management, PT Danareksa
(Persero), PT PNM Investment Management,
PT Danareksa Investment Management,
PT PP Presisi Tbk, PT BNI Asset
Management, PT Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero), PT Mandiri Manajemen Investasi,
PT Perkebunan Nusantara, PT Pupuk
Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya Beton
Tbk, PT Propernas Griya Utama, Koperasi
Warga Semen Gresik, PT Propernas Griya
Utama and PT Barata Indonesia (Persero),
PT Elnusa Tbk, PT BRI Multifinance,

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

PT Adhi Commuter Properti adalah entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Grup memiliki rekening giro, deposito wajib dan berjangka, surat berharga, deposito berjangka untuk tujuan tertentu, piutang penjaminan, piutang penjaminan ulang, piutang hasil investasi, utang reasuransi, utang klaim, imbal jasa *kafalah* bruto, premi penjaminan ulang bruto, beban klaim, klaim penjaminan ulang, beban komisi, pendapatan komisi, pendapatan *ujrah* penjaminan ulang, beban *ujrah*, pendapatan subrogasi, pendapatan investasi dan beban investasi di entitas-entitas tersebut. Grup memiliki obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Grup juga memiliki transaksi investasi pada efek-efek, piutang penjaminan, piutang hasil investasi, utang reasuransi, imbal jasa *kafalah* bruto, premi penjaminan ulang bruto dan pendapatan investasi dengan Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan.

Manajemen kunci

Manajemen kunci termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp51.576 (31 Desember 2023: Rp61.983).

41. Transactions with Related Parties (continued)

PT Adhi Commuter Properti are entities which is owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia. The Group has bank accounts, statutory and time deposits, marketable securities, time deposits for certain purposes, guarantee fee receivables, re-guarantee receivables, investment income receivables, claim payables, gross *kafalah* fees, gross re-guarantee premiums, gross claims, re-guarantee claims, commission expense, commission income, re-guarantee commission income, *ujrah* expense, subrogation income, investment income, and investment expense in those entities. The Group also hold bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia. The Group also has transactions in marketable securities, guarantee fee receivables, investment receivables, re-guarantee payables, gross *kafalah* fees, re-guarantee expenses, gross re-guarantee premiums, investment income with the State-Owned Enterprises and Subsidiaries.

Key management

Key management includes Board of Commissioners and Board of Director. Total compensation to the Group's Board of Commissioners and Board of Director for the year ended 31 December 2024 amounted to Rp51,576 (31 December 2023: Rp61,983).

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut:

*Balances and transactions with related parties
are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp
Aset:		
Kas di bank (Catatan 4)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	65,532	83,625
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	43,078	23,170
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17,046	18,617
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2,942	9,769
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,435	2,813
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	1,420	717
PT Bank Raya Indonesia Tbk	88	1,053
PT Bank Mandiri Taspen	--	2
Jumlah	131,541	139,766
Deposito wajib dan berjangka (Catatan 5)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,638,100	2,362,662
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	975,500	2,318,230
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	427,480	1,145,695
PT Bank Raya Indonesia Tbk	145,000	197,000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100,210	46,139
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100,000	414,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11,100	15,500
Jumlah	3,397,390	6,499,226
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu (Catatan 6)		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	745,139	755,139
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	421,000	421,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200,000	200,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	125,140	125,140
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	3,094	3,094
Jumlah	1,494,373	1,504,373

Assets:
Cash in banks (Note 4)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit
PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Taspen
Total
Statutory and time deposits (Note 5)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit
PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total
Time deposits for certain purposes (Note 6)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit
Total

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)*

Efek utang

Debt securities

2024							
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ At Cost	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)			
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						At fair value through profit or loss	
Pihak berelasi (Catatan 7a)						Related parties (Notes 7a)	
Efek utang - Korporasi						Debt securities- Corporate	
Obligasi Wajib Konversi Reindo						Obligasi Wajib Konversi Reindo	
Tahun 2014	idA-	300,000	300,000	300,000	--	Tahun 2014	
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I						Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I	
Sarana Multigriya Finansial Tahap III						Sarana Multigriya Finansial Tahap III	
Tahun 2024	idAAA	60,000	60,000	59,245	(755)	Tahun 2024	
Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas						Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas	
Finance Tahap III Tahun						Finance Tahap III Tahun	
2024 Seri A	idAAA	50,000	50,000	49,725	(275)	2024 Seri A	
Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas						Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas	
Finance Tahap III Tahun						Finance Tahap III Tahun	
2024 Seri B	idAAA	45,000	45,000	44,641	(359)	2024 Seri B	
Obligasi III Adhi Commuter						Obligasi III Adhi Commuter	
Properti Tahun						Properti Tahun	
2023 Seri B	idAAA	35,000	35,007	36,026	1,019	2023 Seri B	
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I						Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I	
Sarana Multigriya Finansial						Sarana Multigriya Finansial	
Tahap II Tahun 2024	idAAA	35,000	35,000	34,161	(839)	Tahap II Tahun 2024	
Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia						Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia	
Tahap I Tahun						Tahap I Tahun	
2024 Seri B	idAAA	30,000	30,000	29,718	(282)	2024 Seri B	
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia						Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia	
Tahap II Tahun						Tahap II Tahun	
2024 Seri C	idAAA	23,000	23,000	22,600	(400)	2024 Seri C	
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia						Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia	
Tahap II Tahun						Tahap II Tahun	
2024 Seri B	idAAA	20,000	20,000	19,783	(217)	2024 Seri B	
Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia						Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia	
Tahap I Tahun						Tahap I Tahun	
2024 Seri C	idAAA	20,000	20,000	19,740	(260)	2024 Seri C	
Obligasi Berkelanjutan I Telkom						Obligasi Berkelanjutan I Telkom	
Tahap I Tahun						Tahap I Tahun	
2015 Seri D	idAAA	13,000	17,388	16,850	(538)	2015 Seri D	
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia						Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia	
Tahap I Tahun						Tahap I Tahun	
2022 Seri B	idAAA	15,000	15,478	15,428	(50)	2022 Seri B	
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya						Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya	
Finansial Tahap V Tahun						Finansial Tahap V Tahun	
2024 Seri B	idAAA	15,000	15,000	14,846	(154)	2024 Seri B	
Obligasi I Pelindo IV						Obligasi I Pelindo IV	
Tahun 2018						Tahun 2018	
Seri C	idAAA	10,000	10,640	10,616	(24)	Seri C	
Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I						Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I	
Tahap I Tahun						Tahap I Tahun	
2021 Seri C	idAAA	10,000	10,000	10,205	205	2021 Seri C	
Obligasi I Angkasa Pura II						Obligasi I Angkasa Pura II	
Tahun 2016						Tahun 2016	
Seri C	idAAA	9,000	9,290	9,213	(77)	Seri C	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)

Efek utang (lanjutan)

Debt securities (continued)

2024						
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ At Cost	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan (/kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)					At fair value through profit or loss (continued)	
Pihak berelasi (Catatan 7a)					Related parties (Notes 7a)	
Obligasi Berkelanjutan IV PNM					Obligasi Berkelanjutan IV PNM	
Tahap I Tahun					Tahap I Tahun	
2021 Seri C	idAA+	3,000	2,926	2,926	--	2021 Seri C
Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023					Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023	
	idB	13,728	13,728	--	(13,728)	
Jumlah efek utang - Korporasi		706,728	712,457	695,723	(16,734)	Total debt securities - Government
Efek utang - Pemerintah					Debt securities - Government	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	Pemerintah/ Government	35,000	36,107	35,120	(987)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	Pemerintah/ Government	31,769	32,703	31,905	(798)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	Pemerintah/ Government	30,000	29,630	28,925	(705)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	Pemerintah/ Government	28,000	27,945	27,434	(511)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	Pemerintah/ Government	20,000	22,886	21,708	(1,178)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	Pemerintah/ Government	20,000	20,318	19,980	(338)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090	Pemerintah/ Government	20,000	19,960	19,233	(727)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0102	Pemerintah/ Government	15,000	15,023	14,625	(398)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0102
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	Pemerintah/ Government	11,000	12,466	12,186	(280)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	Pemerintah/ Government	10,000	11,223	10,877	(346)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	Pemerintah/ Government	10,000	11,015	10,464	(551)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	Pemerintah/ Government	10,000	10,488	10,366	(122)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	Pemerintah/ Government	2,000	2,129	2,062	(67)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075
Jumlah efek utang - Pemerintah		242,769	251,893	244,885	(7,008)	Total debt securities - Government

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)*

Efek utang (lanjutan)

Debt securities (continued)

2023											
		Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ At Cost	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)					
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi							At fair value through profit or loss				
Pihak berelasi (Catatan 7a)							Related parties (Notes 7a)				
Efek utang - Korporasi							Debt securities- Corporate				
Obligasi Wajib Konversi Reindo							Obligasi Wajib Konversi Reindo				
Tahun 2014						--	Tahun 2014				
Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I							Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I				
Tahap I Tahun							Tahap I Tahun				
2021 Seri C						76	2021 Seri C				
Obligasi Wajib Konversi Waskita							Obligasi Wajib Konversi Waskita				
Beton Precast I							Beton Precast I				
Tahun 2023						(13,728)	Tahun 2023				
Jumlah efek utang - Korporasi						(13,652)	Total debt securities - Government				
Efek utang - Pemerintah							Debt securities - Government				
Obligasi Negara Republik Indonesia							Obligasi Negara Republik Indonesia				
Seri FR0091						210	Seri FR0091				
Obligasi Negara Republik Indonesia							Obligasi Negara Republik Indonesia				
Seri FR0096						918	Seri FR0096				
Obligasi Negara Republik Indonesia							Obligasi Negara Republik Indonesia				
Seri FR0072						(389)	Seri FR0072				
Obligasi Negara Republik Indonesia							Obligasi Negara Republik Indonesia				
Seri FR0087						576	Seri FR0087				
Obligasi Negara Republik Indonesia							Obligasi Negara Republik Indonesia				
Seri FR0090						(629)	Seri FR0090				
Obligasi Negara Republik Indonesia							Obligasi Negara Republik Indonesia				
Seri FR0097						(150)	Seri FR0097				
Obligasi Negara Republik Indonesia							Obligasi Negara Republik Indonesia				
Seri FR0079						194	Seri FR0079				
Obligasi Negara Republik Indonesia							Obligasi Negara Republik Indonesia				
Seri FR0068						97	Seri FR0068				
Obligasi Negara Republik Indonesia							Obligasi Negara Republik Indonesia				
Seri FR0078						(226)	Seri FR0078				
Obligasi Negara Republik Indonesia							Obligasi Negara Republik Indonesia				
Seri FR0083						227	Seri FR0083				
Obligasi Negara Republik Indonesia							Obligasi Negara Republik Indonesia				
Seri FR0074						296	Seri FR0074				
Jumlah efek utang - Pemerintah						1,124	Total debt securities - Government				

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)*

Efek utang (lanjutan)

Debt securities (continued)

2024						
		Nilai perolehan/ Cost Value	Amortisasi/ Amortized	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)	
Peringkat/ Rating						
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						At fair value through other comprehensive income
Pihak berelasi (Catatan 7a)						Related parties (Notes 7a)
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 Seri C	idAAA	150,000	--	148,562	(1,438)	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 Seri C
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri B	idAAA	100,000	--	99,534	(466)	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023 Seri B	idAAA	50,000	--	49,116	(884)	Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023 Seri B
Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023	idAA	50,000	--	47,874	(2,126)	Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023	idAAA	15,000	--	14,930	(70)	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023
Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 Seri B	idAA	10,000	--	9,830	(170)	Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 Seri B
Obligasi III Waskita Tahap II Tahun 2018 Seri B	idB	25,000	--	--	(9,771)	Obligasi III Waskita Tahap II Tahun 2018 Seri B
Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022	idB	2,423	--	--	(332)	Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022
Jumlah efek utang - Korporasi		402,423	--	369,846	(15,257)	Total debt securities - Government
Efek utang - Pemerintah						Debt securities - Government
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090	Pemerintah/ Government	772,292	4,132	750,080	(26,344)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	Pemerintah/ Government	632,044	2,404	621,703	(12,745)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	Pemerintah/ Government	596,031	(1,815)	581,418	(12,798)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0095	Pemerintah/ Government	485,452	1,183	479,598	(7,037)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0095
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	Pemerintah/ Government	402,022	(3,255)	390,705	(8,062)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	Pemerintah/ Government	256,796	(4,689)	252,896	789	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086	Pemerintah/ Government	176,030	(728)	171,988	(3,314)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0093	Pemerintah/ Government	165,707	1,000	166,267	(440)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0093
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	Pemerintah/ Government	168,747	215	165,649	(3,313)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101	Pemerintah/ Government	148,653	155	149,322	514	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	Pemerintah/ Government	113,000	(4,747)	104,645	(3,608)	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	Pemerintah/ Government	74,035	(1,291)	76,140	3,396	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	Pemerintah/ Government	74,053	(153)	75,644	1,744	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FRSDG001	Pemerintah/ Government	49,780	(106)	50,249	575	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FRSDG001
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	Pemerintah/ Government	47,931	100	48,706	675	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)

Debt securities (continued)

2024											
Peringkat/ Rating	Nilai perolehan/ Cost Value	Amortisasi/ Amortized	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)							
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)						At fair value through other comprehensive income (continued)					
Pihak berelasi (Catatan 7a)						Related parties (Notes 7a)					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	Pemerintah/ Government	42,715	764	43,800	321	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	Pemerintah/ Government	43,145	(1,360)	43,498	1,713	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	Pemerintah/ Government	32,854	191	34,209	1,164	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	Pemerintah/ Government	29,507	94	30,932	1,331	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076	Pemerintah/ Government	25,672	31	26,684	981	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	Pemerintah/ Government	24,855	85	24,966	26	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	Pemerintah/ Government	11,750	(814)	11,631	695	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	Pemerintah/ Government	12,000	(1,247)	10,871	118	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0042	Pemerintah/ Government	12,205	(1,493)	10,753	41	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0042					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	Pemerintah/ Government	2,491	118	2,660	51	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059					
Jumlah efek utang - Pemerintah		4,399,767	(11,226)	4,325,014	(63,527)	Total debt securities - Government					
2023											
Peringkat/ Rating	Nilai perolehan/ Cost Value	Amortisasi/ Amortized	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)							
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						At fair value through other comprehensive income					
Pihak berelasi (Catatan 7a)						Related parties (Notes 7a)					
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 Seri C	idAAA	150,000	--	153,277	3,277	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 Seri C					
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri B	idAAA	100,000	--	99,209	(791)	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri B					
Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri A	idAA+	50,000	--	49,837	(163)	Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri A					
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023 Seri B	idAAA	50,000	--	48,754	(1,246)	Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023 Seri B					
Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023	idAA	50,000	--	47,054	(2,946)	Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023					
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023	idAAA	15,000	--	15,340	340	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023					
Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B	idAAA	10,000	--	10,113	113	Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B					
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Seri C	idAAA	10,000	--	10,063	63	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Seri C					

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)*

Efek utang (lanjutan)

Debt securities (continued)

2023					
		Nilai perolehan/ Cost Value	Amortisasi/ Amortized	Nilai Wajar/ Fair value	Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)
Peringkat/ Rating					
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)					
Pihak berelasi (Catatan 7a)					
Obligasi II BRI Finance Tahun 2023					
Seri B	idAA	10,000	--	9,710	(290)
Obligasi III Waskita Tahap II					
Tahun 2018 Seri B	idB	25,000	--	--	(25,000)
Obligasi Waskita Beton Precast I					
Tahun 2022	idB	2,421	--	--	(2,421)
Jumlah efek utang - Korporasi		472,421	--	443,357	(29,064)
Efek utang - Pemerintah					
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0090	Government	772,292	2,706	753,917	(21,081)
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0091	Government	632,044	1,365	639,105	5,696
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0096	Government	596,031	(707)	603,669	8,345
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0095	Government	485,452	608	488,203	2,143
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0082	Government	352,122	(2,143)	349,747	(232)
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0072	Government	256,796	(3,872)	262,998	10,074
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0086	Government	176,030	(507)	172,029	(3,494)
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0093	Government	165,707	602	171,681	5,372
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0087	Government	144,497	112	144,741	132
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0078	Government	113,000	(3,144)	107,892	(1,964)
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0068	Government	74,035	(1,091)	79,238	6,294
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0075	Government	74,053	(128)	78,605	4,680
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FRSDG001	Government	49,780	(15)	50,830	1,065
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0065	Government	42,715	636	45,391	2,040
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0073	Government	43,145	(1,151)	44,912	2,918
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0074	Government	32,854	160	35,398	2,384
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0080	Government	29,507	71	32,064	2,486
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0076	Government	25,672	26	27,498	1,800
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0052	Government	11,750	(689)	12,115	1,054
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0047	Government	12,000	(1,039)	11,198	237
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0042	Government	12,205	(1,245)	11,166	206
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/				
Seri FR0059	Government	2,492	96	2,706	118
Jumlah efek utang - Pemerintah		4,104,179	(9,349)	4,125,103	30,273

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)*

Efek utang (lanjutan)

Debt securities (continued)

2024							
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai perolehan diamortisasi/ Amortised cost					
Diukur pada biaya diamortisasi				At amortised cost			
Pihak berelasi (Catatan 7a)				Related parties (Notes 7a)			
Efek utang - Korporasi				Debt securities - Corporate			
MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)				MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)			
Tahun 2022	idAAA	200,000	200,000	Tahun 2022			
MTN Perum Perumnas III Tahun 2018 Seri A				MTN Perum Perumnas III Tahun 2018 Seri A			
	idBBB-	25,000	25,000				
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri B				Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri B			
	idAAA	200,000	200,000				
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri B				Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri B			
	idAAA	120,000	120,000				
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2022				Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2022			
	idAAA	100,000	100,000				
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri A				Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri A			
	AA+(idn)	90,000	90,000				
Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023 Seri B				Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023 Seri B			
	idAA	57,000	57,000				
Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2020 Seri B				Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2020 Seri B			
	idAAA	50,000	50,000				
Obligasi Berwawasan Lingkungan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022 Seri B				Obligasi Berwawasan Lingkungan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022 Seri B			
	idAAA	43,000	43,000				
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B				Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B			
	idAAA	27,000	27,000				
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B				Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B			
	idAA+	25,000	25,000				
Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri B				Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri B			
	AA-(idn)	25,000	25,000				
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri B				Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri B			
	idAAA	25,000	25,000				
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 Seri A				Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 Seri A			
	idAAA	25,000	25,000				
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021 Seri B				Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021 Seri B			
	AA(idn)	20,000	20,000				
Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A				Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A			
	idAAA	10,000	10,000				
Jumlah efek utang - Korporasi		1,042,000	1,042,000	Total debt securities - Corporate			

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

*Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)*

Debt securities (continued)

2024			
			Nilai perolehan diamortisasi/ <i>Amortised</i>
	Peringkat/ <i>Rating</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	<i>cost</i>
Diukur pada biaya diamortisasi (lanjutan)			<i>At amortised cost (continued)</i>
Pihak berelasi (Catatan 7a)			<i>Related parties (Notes 7a)</i>
Efek utang - Pemerintah			<i>Debt securities - Government</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0101	<i>Government</i>	1,003,354	1,005,198 <i>Seri FR0101</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0096	<i>Government</i>	650,000	666,055 <i>Seri FR0096</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0082	<i>Government</i>	521,699	527,662 <i>Seri FR0082</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0093	<i>Government</i>	400,000	390,606 <i>Seri FR0093</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0091	<i>Government</i>	375,000	378,530 <i>Seri FR0091</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0074	<i>Government</i>	305,000	318,345 <i>Seri FR0074</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0090	<i>Government</i>	285,986	284,739 <i>Seri FR0090</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0095	<i>Government</i>	200,000	199,198 <i>Seri FR0095</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0056	<i>Government</i>	175,980	181,239 <i>Seri FR0056</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0078	<i>Government</i>	155,000	163,797 <i>Seri FR0078</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0100	<i>Government</i>	120,000	117,433 <i>Seri FR0100</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0059	<i>Government</i>	104,391	105,711 <i>Seri FR0059</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FRSDG001	<i>Government</i>	100,000	102,655 <i>Seri FRSDG001</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0068	<i>Government</i>	40,000	40,085 <i>Seri FR0068</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0071	<i>Government</i>	20,000	20,441 <i>Seri FR0071</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0073	<i>Government</i>	20,000	20,088 <i>Seri FR0073</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0072	<i>Government</i>	10,000	10,345 <i>Seri FR0072</i>
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/		<i>Obligasi Negara Republik Indonesia</i>
Seri FR0058	<i>Government</i>	10,000	9,793 <i>Seri FR0058</i>
Jumlah efek utang - Pemerintah		4,496,410	4,541,920
			<i>Total debt securities - Government</i>

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)*

Efek utang (lanjutan)

Debt securities (continued)

2023							
				Nilai perolehan diamortisasi/ Amortised			
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value						
Diukur pada biaya diamortisasi				At amortised cost			
Pihak berelasi (Catatan 7a)				Related parties (Notes 7a)			
Efek utang - Korporasi				Debt securities - Corporate			
MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)				MTN I PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)			
Tahun 2022	idAAA	200,000	200,000	Tahun 2022			
MTN Perum Perumnas III				MTN Perum Perumnas III			
Tahun 2018 Seri A	idBBB-	25,000	25,000	Tahun 2018 Seri A			
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III				Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III			
Tahun 2024 Seri B	idAAA	120,000	120,000	Tahun 2024 Seri B			
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II				Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II			
Tahun 2022	idAAA	100,000	100,000	Tahun 2022			
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II				Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II			
Tahun 2022 Seri A	idAA+(Idn)	90,000	90,000	Tahun 2022 Seri A			
Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial				Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial			
Tahap III Tahun 2020 Seri B	idAAA	50,000	50,000	Tahap III Tahun 2020 Seri B			
Obligasi Berwawasan Lingkungan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				Obligasi Berwawasan Lingkungan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
Tahun 2022 Seri B	idAAA	43,000	43,000	Tahun 2022 Seri B			
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B				Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B			
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 Seri A				Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 Seri A			
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B				Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B			
Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri B				Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri B			
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri B				Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri B			
Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 Seri B				Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 Seri B			
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021 Seri B				Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021 Seri B			
Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2019 Seri C				Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2019 Seri C			
Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A				Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A			
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri A				Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri A			
Jumlah efek utang - Korporasi		830,000	830,000	Total debt securities - Corporate			

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)*

Efek utang (lanjutan)

Debt securities (continued)

2023				
			Nilai perolehan diamortisasi/ Amortised cost	
Diukur pada biaya diamortisasi (lanjutan)				At amortised cost (continued)
Pihak berelasi (Catatan 7a)				Related parties (Notes 7a)
Efek utang - Pemerintah				Debt securities - Government
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0096	Government	650,000	667,519	Seri FR0096
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0093	Government	400,000	390,152	Seri FR0093
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0091	Government	375,000	378,913	Seri FR0091
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0090	Government	285,986	284,271	Seri FR0090
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0095	Government	200,000	199,008	Seri FR0095
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0056	Government	50,000	52,236	Seri FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0068	Government	40,000	40,091	Seri FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0077	Government	39,608	39,557	Seri FR0077
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0082	Government	36,699	36,262	Seri FR0082
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0070	Government	30,000	29,983	Seri FR0070
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0071	Government	20,000	20,525	Seri FR0071
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0073	Government	20,000	20,098	Seri FR0073
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0072	Government	10,000	10,363	Seri FR0072
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0044	Government	10,000	10,136	Seri FR0044
Obligasi Negara Republik Indonesia	Pemerintah/			Obligasi Negara Republik Indonesia
Seri FR0058	Government	10,000	9,773	Seri FR0058
Jumlah efek utang - Pemerintah		2,177,293	2,188,887	Total debt securities - Government

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)

Sukuk

Sukuk

2024						
					Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain (loss)	
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ At Cost	Nilai wajar/ Fair value			
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						At fair value through profit or loss
Pihak berelasi (Catatan 7b)						Related parties (Notes 7b)
Sukuk - Korporasi						Sukuk - Corporate
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I						Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
PNM Tahap II						PNM Tahap II
Tahun 2023 Seri B	idAA+	40,000	39,680	39,502	(178)	Tahun 2023 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I						Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Kereta Api Indonesia Tahap II						Kereta Api Indonesia Tahap II
Tahun 2024 Seri C	idAAA	22,000	22,000	21,618	(382)	Tahun 2024 Seri C
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I						Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Kereta Api Indonesia Tahap II						Kereta Api Indonesia Tahap II
Tahun 2024 Seri B	idAAA	18,000	18,000	17,824	(176)	Tahun 2024 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I						Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Elnusa Tahap I						Elnusa Tahap I
Tahun 2020	idAA	10,000	10,212	10,109	(103)	Tahun 2020
Sukuk Mudharabah Subordinasi						Sukuk Mudharabah Subordinasi
Jangka Menengah PT Bank						Jangka Menengah PT Bank
Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023	idAA	5,000	5,024	5,001	(23)	Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II						Sukuk Ijarah Berkelanjutan II
Kereta Api Indonesia Tahap I						Kereta Api Indonesia Tahap I
Tahun 2024 Seri B	idAAA	20,000	20,000	19,711	(289)	Tahun 2024 Seri B
Jumlah sukuk - Korporasi		115,000	114,916	113,765	(1,151)	Total sukuk - Corporate
2023						
					Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain (loss)	
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ At Cost	Nilai wajar/ Fair value			
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						At fair value through profit or loss
Pihak berelasi (Catatan 7b)						Related parties (Notes 7b)
Sukuk - Pemerintah						Sukuk - Government
Pemerintah/ Government						
SBSN Seri PBS022		20,000	22,724	23,052	328	SBSN Seri PBS022
Jumlah sukuk - Pemerintah		20,000	22,724	23,052	328	Total sukuk - Government

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)*

Sukuk (lanjutan)

Sukuk (continued)

2024					Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)	
Peringkat/ Rating	Nilai perolehan/ Cost Value	Amortisasi/ Amortized	Nilai Wajar/ Fair value			
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						At fair value through other comprehensive income
Pihak berelasi (Catatan 7b)						Related parties (Notes 7b)
Sukuk - Korporasi						Sukuk - Corporate
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I						Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
PNM Tahap II						PNM Tahap II
Tahun 2023 Seri B	idAA+	150,000	--	148,134	(1,866)	Tahun 2023 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I						Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Angkasa Pura I Tahap I						Angkasa Pura I Tahap I
Tahun 2021 Seri B	idAAA	45,000	--	44,933	(67)	Tahun 2021 Seri B
Sukuk Mudharabah I Waskita Karya						Sukuk Mudharabah I Waskita Karya
Tahun 2022 Seri B	idAAA	20,000	--	20,090	90	Tahun 2022 Seri B
Jumlah sukuk - Korporasi		215,000	--	213,157	(1,843)	Total sukuk - Corporate
Sukuk - Pemerintah						Sukuk - Government
Pemerintah/						
SBSN Seri PBSG001	Government	486,389	(731)	482,157	(3,501)	SBSN Seri PBSG001
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS032	Government	337,386	2,404	330,343	(9,447)	SBSN Seri PBS032
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS030	Government	300,503	(289)	290,139	(10,075)	SBSN Seri PBS030
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS029	Government	252,981	2,473	252,095	(3,359)	SBSN Seri PBS029
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS017	Government	102,608	(2,087)	99,224	(1,297)	SBSN Seri PBS017
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS003	Government	144,207	458	142,296	(2,369)	SBSN Seri PBS003
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS028	Government	97,638	(1,203)	98,106	1,671	SBSN Seri PBS028
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS033	Government	93,929	(1,457)	91,938	(534)	SBSN Seri PBS033
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS012	Government	64,860	(2,336)	66,138	3,614	SBSN Seri PBS012
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS036	Government	62,411	1,037	63,170	(278)	SBSN Seri PBS036
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS037	Government	73,743	121	75,152	1,288	SBSN Seri PBS037
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS022	Government	46,875	(623)	50,641	4,389	SBSN Seri PBS022
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS004	Government	34,912	1,369	38,719	2,438	SBSN Seri PBS004
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS034	Government	38,969	42	37,833	(1,178)	SBSN Seri PBS034
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS023	Government	7,447	(124)	7,530	207	SBSN Seri PBS023
Pemerintah/						
SBSN Seri PBS025	Government	5,872	(128)	5,867	123	SBSN Seri PBS025
Jumlah sukuk - Pemerintah		2,150,730	(1,074)	2,131,348	(18,308)	Total sukuk - Government

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)*

Sukuk (lanjutan)

Sukuk (continued)

2023					
				Keuntungan /(kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain/(loss)	
	Peringkat/ Rating	Nilai perolehan/ Cost Value	Amortisasi/ Amortized	Nilai Wajar/ Fair value	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					At fair value through other comprehensive income
Pihak berelasi (Catatan 7b)					Related parties (Notes 7b)
Sukuk - Korporasi					Sukuk - Corporate
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I					Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
PNM Tahap II					PNM Tahap II
Tahun 2023 Seri B	idAA+	150,000	--	147,813	(2,187)
Tahun 2023 Seri B					Tahun 2023 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I					Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Angkasa Pura I Tahap I					Angkasa Pura I Tahap I
Tahun 2021 Seri B	idAA+	45,000	--	44,559	(441)
Tahun 2021 Seri B					Tahun 2021 Seri B
Sukuk Mudharabah I Waskita Karya					Sukuk Mudharabah I Waskita Karya
Tahun 2022 Seri B	idAAA	20,000	--	20,288	288
Tahun 2022 Seri B					Tahun 2022 Seri B
Jumlah sukuk - Korporasi		215,000	--	212,660	(2,340)
Jumlah sukuk - Korporasi					Total sukuk - Corporate
Sukuk - Pemerintah					Sukuk - Government
Pemerintah/					
SBSN Seri PBSG001	Government	486,389	(257)	484,298	(1,834)
SBSN Seri PBSG001					SBSN Seri PBSG001
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS032	Government	337,386	1,554	327,662	(11,278)
SBSN Seri PBS032					SBSN Seri PBS032
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS030	Government	300,503	(191)	293,207	(7,105)
SBSN Seri PBS030					SBSN Seri PBS030
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS029	Government	252,981	547	251,627	(1,901)
SBSN Seri PBS029					SBSN Seri PBS029
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS031	Government	143,989	1,399	143,807	(1,581)
SBSN Seri PBS031					SBSN Seri PBS031
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS003	Government	144,207	225	142,973	(1,459)
SBSN Seri PBS003					SBSN Seri PBS003
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS028	Government	97,638	(894)	99,506	2,762
SBSN Seri PBS028					SBSN Seri PBS028
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS017	Government	102,608	(1,460)	99,125	(2,023)
SBSN Seri PBS017					SBSN Seri PBS017
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS033	Government	93,929	16	93,641	(304)
SBSN Seri PBS033					SBSN Seri PBS033
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS037	Government	73,743	52	75,751	1,956
SBSN Seri PBS037					SBSN Seri PBS037
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS012	Government	64,860	(1,960)	66,782	3,882
SBSN Seri PBS012					SBSN Seri PBS012
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS036	Government	62,411	483	62,710	(184)
SBSN Seri PBS036					SBSN Seri PBS036
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS022	Government	46,875	(464)	50,715	4,304
SBSN Seri PBS022					SBSN Seri PBS022
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS004	Government	34,912	1,133	39,035	2,990
SBSN Seri PBS004					SBSN Seri PBS004
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS034	Government	38,969	26	38,487	(508)
SBSN Seri PBS034					SBSN Seri PBS034
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS023	Government	7,447	(93)	7,618	264
SBSN Seri PBS023					SBSN Seri PBS023
Pemerintah/					
SBSN Seri PBS025	Government	5,871	(95)	5,951	175
SBSN Seri PBS025					SBSN Seri PBS025
Jumlah sukuk - Pemerintah		2,294,718	21	2,282,895	(11,844)
Jumlah sukuk - Pemerintah					Total sukuk - Government

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)*

Sukuk (lanjutan)

Sukuk (continued)

2024			
		Nilai perolehan diamortisasi/ <i>Amortised</i>	
Peringkat/ <i>Rating</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	<i>cost</i>	
Biaya perolehan diamortisasi			At amortised cost
Pihak berelasi (Catatan 7b)			Related parties (Notes 7b)
Sukuk - Korporasi			Sukuk - Corporate
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II			Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II
Pegadaian Tahap I			Pegadaian Tahap I
Tahun 2022 Seri B	idAAA	14,000	Tahun 2022 Seri B
Jumlah sukuk - Korporasi		14,000	Total sukuk - Corporate
Sukuk - Pemerintah			Sukuk - Government
	Pemerintah/ <i>Government</i>		
SBSN Seri PBS032		500,000	SBSN Seri PBS032
	Pemerintah/ <i>Government</i>		
SBSN Seri PBS017		400,000	SBSN Seri PBS017
	Pemerintah/ <i>Government</i>		
SBSN Seri PBS001		275,000	SBSN Seri PBS001
	Pemerintah/ <i>Government</i>		
SBSN Seri PBS003		99,000	SBSN Seri PBS003
	Pemerintah/ <i>Government</i>		
SBSN Seri PBS029		50,000	SBSN Seri PBS029
	Pemerintah/ <i>Government</i>		
SBSN Seri PBS030		50,000	SBSN Seri PBS030
	Pemerintah/ <i>Government</i>		
SBSN Seri PBS036		40,000	SBSN Seri PBS036
	Pemerintah/ <i>Government</i>		
SBSN Seri PBS028		25,000	SBSN Seri PBS028
	Pemerintah/ <i>Government</i>		
SBSN Seri PBS012		8,673	SBSN Seri PBS012
	Government	9,095	
Jumlah sukuk - Pemerintah		1,447,673	Total sukuk - Corporate
		1,448,393	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sukuk (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)

Sukuk (continued)

2023			
		Nilai perolehan diamortisasi/ Amortised cost	
Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value		
Biaya perolehan diamortisasi			At amortised cost
Pihak berelasi (Catatan 7b)			Related parties (Notes 7b)
Sukuk - Korporasi			Sukuk - Corporate
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II			Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II
Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B	idAAA	14,000	Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B
Jumlah sukuk - Korporasi		14,000	Total sukuk - Corporate
Sukuk - Pemerintah			Sukuk - Government
	Pemerintah/ Government		
SBSN Seri PBS031		949,954	SBSN Seri PBS031
	Pemerintah/ Government		
SBSN Seri PBS032		500,000	SBSN Seri PBS032
	Pemerintah/ Government		
SBSN Seri PBS017		400,000	SBSN Seri PBS017
	Pemerintah/ Government		
SBSN Seri PBS003		99,000	SBSN Seri PBS003
	Pemerintah/ Government		
SBSN Seri PBS029		50,000	SBSN Seri PBS029
	Pemerintah/ Government		
SBSN Seri PBS030		50,000	SBSN Seri PBS030
	Pemerintah/ Government		
SBSN Seri PBS036		40,000	SBSN Seri PBS036
	Pemerintah/ Government		
SBSN Seri PBS028		25,000	SBSN Seri PBS028
	Pemerintah/ Government		
SBSN Seri PBS012		8,673	SBSN Seri PBS012
	Pemerintah/ Government		
SBSN Seri PBS026		5,980	SBSN Seri PBS026
Jumlah sukuk - Pemerintah		2,128,607	Total sukuk - Corporate

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Balances and transactions with related parties
are as follows: (continued)

Reksadana

Mutual funds

2024				
				Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain/(loss)
	Jumlah unit/ Total units*)	Biaya perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Fair value	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				At fair value through profit or loss
Pihak berelasi (Catatan 7c)				Related parties (Notes 7c)
Reksadana - Korporasi				Reksadana - Korporasi
Bahana TCW Investment Management	346,837,048	576,999	659,132	82,133 Bahana TCW Investment Management
PNM Investment Management	205,272,237	213,058	206,057	(7,001) PNM Investment Management
BNI Asset Management	97,200,334	96,963	76,402	(20,561) BNI Asset Management
BRI Asset Management	59,636,986	65,431	58,444	(6,987) BRI Asset Management
Mandiri Manajemen Investasi	6,593,677	10,000	5,302	(4,698) Mandiri Manajemen Investasi
Jumlah pihak berelasi		962,451	1,005,337	42,886 Total Third parties

2023				
				Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain/(loss)
	Jumlah unit/ Total units*)	Biaya perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Fair value	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				At fair value through profit or loss
Pihak berelasi (Catatan 7c)				Related parties (Notes 7c)
Reksadana - Korporasi				Reksadana - Korporasi
Bahana TCW Investment Management	328,333,851	592,001	609,567	17,566 Bahana TCW Investment Management
PNM Investment Management	242,768,346	252,497	253,506	1,009 PNM Investment Management
BNI Asset Management	71,565,035	71,333	77,163	5,829 BNI Asset Management
BRI Asset Management	91,720,714	97,514	95,494	(2,021) BRI Asset Management
Mandiri Manajemen Investasi	6,593,677	10,000	5,493	(4,507) Mandiri Manajemen Investasi
Jumlah pihak berelasi		1,023,345	1,041,223	17,876 Total Third parties

*) Disajikan dalam angka penuh/Presented in full number of units

Saham

Shares

	2024			Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain/ (loss)
	Jumlah unit/ Total units*)	Biaya perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Fair value	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Pihak berelasi (Catatan 7d)				
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6,000,000	24,483	16,440	(8,043)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,700,000	10,944	15,390	4,446
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk	5,000,000	2,550	13,650	11,100
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	5,000,000	21,365	13,550	(7,815)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2,800,000	13,275	12,180	(1,095)
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	10,388,000	19,997	10,700	(9,297)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2,000,000	12,162	8,660	(3,502)
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	161,050,000	64,420	7,385	(57,035)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,500,700	5,894	6,123	229
PT Antam Tbk	3,500,000	3,194	5,320	2,126
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,200,000	10,836	4,767	(6,069)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2,500,000	8,160	3,975	(4,185)
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	1,190,000	19,911	3,915	(15,996)
PT PP Presisi Tbk	23,600,000	10,136	1,756	(8,380)
PT PP (Persero) Tbk	3,500,000	11,418	1,169	(10,249)
PT Wika Gedung Tbk	15,000,000	4,350	945	(3,405)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	3,000,000	6,802	636	(6,166)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1,900,000	4,534	379	(4,155)
PT Waskita Beton Precast Tbk	21,000,000	10,303	--	(10,303)
PT Waskita Karya Tbk	9,686,000	15,546	--	(15,546)
Jumlah pihak berelasi	285,514,700	280,280	126,940	(153,340)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Saham (lanjutan)

	2023			
	Jumlah unit/ Total units*)	Biaya perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Fair value	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealised gain/ (loss)
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Pihak berelasi (Catatan 7d)				
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	5,000,000	21,365	19,750	(1,615)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,700,000	10,944	16,268	5,324
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2,800,000	13,275	14,980	1,705
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6,000,000	24,483	14,640	(9,843)
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	10,388,000	19,997	10,544	(9,453)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2,000,000	12,162	9,740	(2,422)
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk	5,000,000	2,550	8,675	6,125
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,500,700	5,894	8,554	2,660
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	1,190,000	19,911	7,586	(12,325)
PT Antam Tbk	3,500,000	3,194	5,968	2,774
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,200,000	10,836	5,229	(5,607)
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	161,050,000	64,420	3,382	(61,038)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2,500,000	8,160	2,813	(5,347)
PT PP Presisi Tbk	23,600,000	10,136	1,864	(8,272)
PT PP (Persero) Tbk	3,500,000	11,418	1,498	(9,920)
PT Wika Gedung Tbk	15,000,000	4,350	1,185	(3,165)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	3,000,000	6,802	930	(5,872)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1,900,000	4,534	456	(4,078)
PT Waskita Beton Precast Tbk	21,000,000	10,303	--	(10,303)
PT Waskita Karya Tbk	9,686,000	15,546	--	(15,546)
Jumlah	285,514,700	280,280	134,062	(146,218)

At fair value through other
comprehensive income
Related parties (Notes 7d)

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	
PT Antam Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	
PT PP Presisi Tbk	
PT PP (Persero) Tbk	
PT Wika Gedung Tbk	
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	
PT Waskita Beton Precast Tbk	
PT Waskita Karya Tbk	
Total	

Efek beragun aset

Security (Assets underlying)

2024				
Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain (loss)
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Pihak berelasi (Catatan 7e)				
EBA-SP SMF-BTN 04- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	07 Mei/ May 2029	idAAA 341	341	0
EBA-SP SMF-BTN 03- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	07 Juli/ July 2029	idAAA 286	287	1
Jumlah		627	628	1

At fair value through other
profit or loss
Related parties (Notes 7e)

EBA-SP SMF-BTN 04- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	
EBA-SP SMF-BTN 03- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	
Total	

2023				
Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized gain (loss)
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi				
Pihak berelasi (Catatan 7e)				
EBA-SP SMF-BTN 04- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	07 Mei/ May 2029	idAAA 1,770	1,774	4
EBA-SP SMF-BTN 03- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	07 Juli/ July 2029	idAAA 1,284	1,289	5
Jumlah		3,054	3,063	9

At fair value through other
profit or loss
Related parties (Notes 7e)

EBA-SP SMF-BTN 04- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	
EBA-SP SMF-BTN 03- KPR Kelas A tahun 2017 Seri A2	
Total	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

41. Transactions with Related Parties (continued)

	2024 Rp	2023 Rp
Piutang imbal jasa penjaminan (Catatan 8)		
Pemerintah Republik Indonesia	1,528,861	1,663,631
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,017,358	1,382,499
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	877,411	751,421
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	361,200	553,208
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	17,799	15,634
Jumlah	3,802,629	4,366,393
Piutang penjaminan ulang (Catatan 9)		
PT Reasuransi Nasional Indonesia	451,040	453,973
PT Reasuransi Indonesia Utama	233,514	209,319
PT Reasuransi Syariah Indonesia	106,094	88,063
PT BRI Asuransi Indonesia	6,355	6,355
PT Asuransi Jiwa IFG	1,290	4,914
Jumlah	798,293	762,624
Piutang hasil investasi (Catatan 10)		
Pemerintah Republik Indonesia	210,237	191,341
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6,167	6,796
PT Permodalan Nasional Madani	2,834	2,288
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	2,565	2,655
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2,248	2,259
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,084	3,029
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2,021	2,059
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1,437	--
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1,159	1,167
PT Danareksa (Persero)	911	--
PT Mandiri Tunas Finance	541	392
PT Pegadaian	505	524
PT Pengelolaan Aset (Persero)	410	405
PT Bank Mandiri Taspen	232	225
PT Angkasa Pura Indonesia	220	420
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	201	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	194	261
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	194	185
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	184	187
PT Adhi Commuter Properti	159	--
Perum Pembangunan Rumah Nasional	141	134
PT Elnusa Tbk	110	--
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	--	4,725
PT Bank Tabungan Negara Syariah	--	1,422
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	606
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	--	154
Lainnya	195	243
Jumlah	234,949	221,477
Jumlah aset dengan pihak berelasi	26,132,129	27,469,909
Persentase terhadap jumlah aset	80.76%	85.23%
Liabilitas:		
Utang penjaminan ulang (Catatan 18)		
PT Reasuransi Nasional Indonesia	1,005,075	625,497
PT Reasuransi Syariah Indonesia	37	6,102
Pemerintah Republik Indonesia	--	1,701
Jumlah	1,005,112	633,300
Utang klaim (Catatan 17)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	285,540	67,013
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,116	5,112
PT Adhi Karya Tbk	--	4,963
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,676	2,855
PT Pegadaian Syariah	1,530	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	364	--
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	--
Lainnya	--	32
Jumlah	299,226	79,975
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi	713,275	713,275
Persentase terhadap jumlah liabilitas	3.75%	3.78%

Guarantee fee receivables (Note 8)
Government of Republic of Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Total
Re-guarantee receivables (Note 9)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT BRI Asuransi Indonesia
PT Asuransi Jiwa IFG
Total
Investment income receivables (Note 10)
Government of Republic of Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Permodalan Nasional Madani
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Danareksa (Persero)
PT Mandiri Tunas Finance
PT Pegadaian
PT Pengelolaan Aset (Persero)
PT Bank Mandiri Taspen
PT Angkasa Pura Indonesia
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Adhi Commuter Properti
Perum Pembangunan Rumah Nasional
PT Elnusa Tbk
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Others
Total
Total assets with related parties
Percentage of total assets
Liabilities:
Re-guarantee payables (Note 18)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
Government of Republic of Indonesia
Total
Claim payables (Note 17)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Adhi Karya Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pegadaian Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Others
Total
Total liabilities with related parties
Percentage of total liabilities

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**41. Transaksi dengan Pihak Berelasi
(lanjutan)**

**41. Transactions with Related Parties
(continued)**

	2024 Rp	2023 Rp
Pendapatan <i>kafalah</i> :		
Imbal jasa <i>kafalah</i> bruto (Catatan 29)		
Pemerintah Republik Indonesia	4,021	17,909
Persentase terhadap jumlah imbal jasa <i>kafalah</i> bruto	1.20%	4.40%
Premi penjaminan ulang (Catatan 30)		
PT Reasuransi Nasional Indonesia	1,105,958	642,887
Pemerintah Republik Indonesia	18,879	76,693
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	6,547	11,611
PT Asuransi Binagriya Upakara	2,928	2,945
PT Asuransi Jiwa IFG Life	1,042	1,427
PT Reasuransi Syariah Indonesia	197	4,376
PT BRI Asuransi Indonesia	2	227
Jumlah	1,135,553	740,166
Persentase terhadap jumlah premi penjaminan ulang	98.14%	96.40%
Beban klaim bruto (Catatan 32)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,032,060	4,130,804
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	645,103	468,572
(Persero) Tbk	570,381	458,759
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	98,405	96,987
PT Permodalan Nasional Madani	71,224	84,787
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	61,885	36,404
PT Pegadaian	61,505	13,944
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Unit Syariah	6,956	7,156
Bank Indonesia	4,050	7,470
PT Bank Raya Indonesia Tbk	3,986	7,461
PT Bank Tabungan Negara		
Koperasi Warga Semen Gresik	455	272
Koperasi Pegawai	--	329
PT Mandiri Tunas Finance	--	43,620
PT Pegadaian - Unit Syariah	--	14,393
Jumlah	8,556,010	5,370,958
Persentase terhadap jumlah beban klaim	93.72%	90.16%
Klaim penjaminan ulang (Catatan 34)		
PT Reasuransi Nasional Indonesia	986,656	697,497
PT Reasuransi Syariah Indonesia	53,868	61,930
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	28,188	27,964
PT Asuransi Jiwa IFG Life	49	388
PT BRI Insurance Indonesia	--	60
Jumlah	1,068,761	787,839
Persentase terhadap jumlah klaim penjaminan ulang	100.00%	98.98%

Kafalah income:
Gross kafalah fees (Note 29)
Government of the
Republic of Indonesia

Percentage of total gross kafalah fees

Re-guarantee premiums (Note 30)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
Government of Republic of Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Asuransi Binagriya Upakara
PT Asuransi Jiwa IFG Life
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT BRI Asuransi Indonesia

Total

Percentage of total re-guarantee premiums

Gross claim expenses (Note 32)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Permodalan Nasional Madani
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Pegadaian
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sharia Unit
Bank Indonesia
PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara
Koperasi Warga Semen Gresik
Koperasi Pegawai
PT Mandiri Tunas Finance
PT Pegadaian - Sharia Unit

Total

Percentage of total claim expenses

Re-guarantee claims (Note 34)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT BRI Insurance Indonesia

Total

Percentage of total re-guarantee claim expense

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**41. Transaksi dengan Pihak Berelasi
(lanjutan)**

**41. Transactions with Related Parties
(continued)**

	2024 Rp	2023 Rp
Beban komisi (Catatan 36)		
PT Permodalan Nasional Madani	7,005	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,437	2,444
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	439	1
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	269	244
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	178	204
PT Bank Raya Indonesia Tbk	8	--
Jumlah	10,336	2,893
Persentase terhadap jumlah beban komisi	38.35%	9.23%
Pendapatan komisi (Catatan 35)		
PT Reasuransi Nasional Indonesia	152,495	89,692
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	1,121	1,898
PT Binagriya Upakara	422	440
Jumlah	154,038	92,030
Persentase terhadap jumlah pendapatan komisi	99.85%	99.33%
Pendapatan subrogasi - bersih (Catatan 37)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,514,082	748,581
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	122,054	85,589
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	110,579	62,841
PT Mandiri Tunas Finance	37,125	2,976
PT Pegadaian - Unit Syariah	12,690	1,921
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	11,689	9,906
PT Pegadaian	11,322	23,383
PT Permodalan Nasional Madani	9,556	42,657
PT Bank Raya Indonesia Tbk	9,037	301
PT Bank Tabungan Negara Syariah	175	323
PT Bank Syariah Indonesia	--	1,753
PT Reasuransi Nasional Indonesia	--	(13,075)
Lainnya	91	111
Jumlah	1,838,400	967,267
Persentase terhadap jumlah pendapatan subrogasi - bersih	94.75%	91.10%

Commission expenses (Note 36)
PT Permodalan Nasional Madani
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Total
Percentage of total commission expenses
Commission income (Note 35)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Binagriya Upakara
Total
Percentage of total commission income
Subrogation income - net (Note 37)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Mandiri Tunas Finance
PT Pegadaian - Sharia Unit
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Pegadaian
PT Permodalan Nasional Madani
PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Syariah Indonesia
PT Reasuransi Nasional Indonesia
Others
Total
Percentage of total subrogation income - net

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**41. Transaksi dengan Pihak Berelasi
(lanjutan)**

**41. Transactions with Related Parties
(continued)**

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan investasi (Catatan 38)			Investment income (Note 38)
Pemerintah Republik Indonesia	821,364	647,670	Government of Republic of Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	196,979	119,653	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	118,751	113,585	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	45,922	--	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT PNM Investment Management	36,753	26,681	PT PNM Investment Management
PT Bahana TCW Investment Management	31,591	16,230	PT Bahana TCW Investment Management
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25,710	21,113	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	23,036	22,713	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	17,900	18,000	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	17,788	14,510	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11,635	4,211	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Permodalan Nasional Madani	11,327	9,210	PT Permodalan Nasional Madani
PT Bank Raya Indonesia Tbk	11,965	9,101	PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	6,420	6,445	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Angkasa Pura Indonesia	5,535	7,345	PT Angkasa Pura Indonesia
PT Danareksa Investment Management	4,014	(7,819)	PT Danareksa Investment Management
PT Pegadaian	3,611	6,050	PT Pegadaian
PT Waskita Karya (Persero)	3,127	1,514	PT Waskita Karya (Persero)
Perum Perumahan Nasional (Persero)	2,970	2,848	Perum Perumahan Nasional (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	2,405	1,950	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	2,386	6,564	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1,810	3,720	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Bank Mandiri Taspen	1,458	1,450	PT Bank Mandiri Taspen
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	1,280	671	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
PT Adhi Commuter Properti Tbk	1,019	--	PT Adhi Commuter Properti Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	893	838	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
PT Semen Indonesia	817	1,012	PT Semen Indonesia
PT BNI Asset Management	811	4,670	PT BNI Asset Management
PT BRI Manajemen Investasi	793	--	PT BRI Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance	712	2,375	PT Mandiri Tunas Finance
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	653	55,444	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	448	278	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	371	353	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	274	890	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	76	151	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk	48	(10,732)	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Wijaya Karya Gedung Tbk	15	--	PT Wijaya Karya Gedung Tbk
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	(1,322)	825	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Elnusa Tbk	(103)	--	PT Elnusa Tbk
Lainnya	--	36	Others
PT Mandiri Manajemen Investasi	--	(315)	PT Mandiri Manajemen Investasi
Jumlah	1,411,242	1,109,240	Total
Persentase terhadap jumlah pendapatan investasi	95.44%	93.67%	Percentage of total investment income

42. Risiko Penjaminan Keuangan

Risiko utama yang dihadapi Grup dengan kontrak penjaminan adalah kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default risk* dan tingkat *non-performing financing* ("NPF") kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi. Selain itu, terdapat risiko atas perbedaan antara klaim aktual, pembayaran manfaat, dan tanggal klaim dari yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, besarnya nilai klaim, nilai klaim yang dibayarkan, dan perkembangan klaim jangka panjang selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan Grup adalah untuk memastikan bahwa cadangan cukup dibuat untuk menutupi kewajiban tersebut.

Eksposur risiko yang berkaitan dengan kontrak penjaminan diminimalisir dengan diversifikasi portofolio penjaminan kontrak dan wilayah geografis. Variabilitas risiko juga ditingkatkan dengan risiko seleksi yang bijak dan implementasi pedoman strategi *underwriting*, serta pengaturan program penjaminan ulang.

Operasional Grup didiversifikasi berdasarkan lini bisnis dan penyebaran geografis risiko. Pendekatan global untuk manajemen risiko memungkinkan Grup melakukan proses identifikasi dan seleksi risiko dalam menjamin kredit dengan eksposur risiko yg besar.

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, dan *Personality* dan 5C (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* dan *Collateral*) yang harus diperhatikan. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait. Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan.

Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P dan 5C. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing terjamin atau sekelompok terjamin, atau suatu produk baru.

42. Financial Guarantee Risk

The principal risk the Group faces under guarantee contracts is the guarantee's failure to fulfill its obligations. This risk can be seen in the amount of default risk and the level of guarantee's non-performing financing ("NPF"), as well as the rate of return on subrogation receivables. In addition, there is a risk from the difference between actual claims, benefit payments, and claim dates from the one predicted previously. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid, and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Group is to ensure that sufficient reserves are made to cover those liabilities.

The risk exposure related to guarantee contracts is mitigated by diversification of guarantee contracts portfolio and geographical areas. The variability of risks is also improved by prudent risks selection and implementation of underwriting strategy guidelines, as well as re-guarantee program arrangements.

The Group's operations are diversified by line of business and the geographic spread of risk. A global approach to risk management allows the Group to underwrite and accept large guarantee accounts.

To minimise the risk of the guarantee, in the credit guarantee process, risk identification is carried out using the 4P, which are Prospect, Productivity, Payment, and Personality and 5C (Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral). The items that must be considered for each of these aspects are adjusted to the characteristics of the credit to be guaranteed, and are described in the related guarantee system and procedures. The results of the risk identification process are then followed up with the determination of the guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk.

In its implementation, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for each aspect of the 4P and 5C. Quantitative prediction is done with a scoring system. Based on the score determined the risk prediction of each guaranteed or a Group of guaranteed, or a new product.

42. Risiko Penjaminan Keuangan (lanjutan)

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan pengambilan keputusan dapat meminimalkan potensi risiko karena kesalahan. Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Proses bisnis penjaminan ulang yang dilakukan terkoordinasi oleh Kantor Pusat dilakukan sebagai bentuk *transfer risk*. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan beban penjaminan ulang. Penjaminan ulang yang digunakan oleh Grup harus memenuhi persyaratan pengalaman di bidang keuangan tertentu dan yang dimasukkan melalui proses peninjauan keuangan yang ketat agar mendapat persetujuan dari senior manajemen. Akibatnya penjaminan ulang hanya ditempatkan pada kelompok terpilih hanya dari Grup yang secara finansial paling aman dan berpengalaman dalam industri penjaminan ulang. Pembayaran klaim yang konsisten dan sesuai juga harus dipastikan. Selain kontrol internal, unit operasional Grup dan bidang fungsional akan ditinjau oleh tim audit Grup yang secara teratur melakukan audit operasional.

Eksposur Grup terhadap risiko konsentrasi penjaminan ini diatasi dengan beragam portofolio bisnis di berbagai lokasi dan industri.

42. Financial Guarantee Risk (continued)

Furthermore, to make a decision on whether a guarantee application can be approved or not, a committee meeting will be carried out. In accordance with the principle of prudence, the committee members consist of officials directly related to the guarantee activity (risk taker unit) and officials directly related to the cost consequences of potential risks (risk financing unit). With a decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected that decisions will be more objective and potential risk because decision-making errors can be minimised. Apart from being used to assist the guarantee decision-making process, the results of the risk analysis that have been carried out are also used as a basis for consideration in monitoring ongoing credit. For high-risk credit, credit monitoring is conducted more intensively.

The re-guarantee business process, which is carried out and coordinate by the head office, is implemented as a form transfer risk. In addition, this also aims for effectiveness and efficiency in the use of the re-guarantee burden. Reinsurers utilised by the Group must fulfill certain financial experience requirements and are put through a stringent financial review process in order to be approved by senior management personnel. As a result of these controls, re-guarantee is placed with a select Group of only the most financially secure and experienced companies in the re-guarantee industry. A consistent approach to reserving practices and the settlement of claims are also ensured. In addition to these internal controls, the Group's operating units and functional areas are subject to review by the corporate audit team that regularly carries out operational audits.

The Group's exposure to a concentration of guarantee risk is mitigated by a diverse portfolio of business written across a broad range of locations and industries.

42. Risiko Penjaminan Keuangan (lanjutan)

42. Financial Guarantee Risk (continued)

Analisa Eksposur

Pada tahun 2024 dan 2023, risiko penjaminan yang dihadapi oleh Grup diklasifikasikan berdasarkan *line of business* sebagai berikut:

Exposure Analysis

In 2024 and 2023, the Group's guarantee risks classified based on the class of businesses are as follows:

2024					
	Beban klaim bruto/ <i>Gross claims</i>	Klaim penjaminan ulang/ <i>Re-guarantee claims</i>	Penurunan cadangan klaim/ <i>Decrease in claim reserves</i>	Beban klaim - bersih/ <i>Claim expenses - net</i>	
Kredit Usaha Rakyat	5,152,758	(548,729)	(889,783)	3,714,246	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	3,296,141	(368,159)	421,508	3,349,490	Productive
PEN	286,341	(4,439)	(170,036)	111,866	PEN
Konsumtif	297,004	(121,619)	(419,205)	(243,820)	Consumptive
<i>Suretyship</i>	97,413	(25,815)	(43,942)	27,656	<i>Suretyship</i>
Jumlah	9,129,657	(1,068,761)	(1,101,458)	6,959,438	Total
2023					
	Beban klaim bruto/ <i>Gross claims</i>	Klaim penjaminan ulang/ <i>Re-guarantee claims</i>	Penurunan cadangan klaim/ <i>Decrease in claim reserves</i>	Beban klaim - bersih/ <i>Claim expenses - net</i>	
Kredit Usaha Rakyat	4,731,429	(476,250)	166,276	4,421,455	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	336,954	(3,690)	511,467	844,731	Productive
PEN	304,915	(117,829)	(496,477)	(309,391)	PEN
Konsumtif	245,505	(64,542)	(675,596)	(494,633)	Consumptive
<i>Suretyship</i>	338,220	(126,172)	(34,890)	177,158	<i>Suretyship</i>
Jumlah	5,957,023	(788,483)	(529,220)	4,639,320	Total

43. Manajemen Risiko Keuangan

43. Financial Risk Management

Manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan antara lain risiko kredit dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko tersebut, mengelola posisi risiko, dan menentukan alokasi modal. Grup secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Tujuan Grup adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Grup. Grup mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Financial risk management

The Group's activities expose it to a variety of financial risks: credit risk and liquidity risk. The core functions of The Group's risk management are to identify all key risks for The Group, measure these risks, manage the risk positions, and determine capital allocations. The Group regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in the market, products, and best market practice.

The Group's aim is to achieve an appropriate balance between risk and return and minimise potential adverse effects on The Group's financial performance. The Group defines risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal and external factors.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Manajemen risiko dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Direksi memberikan kebijakan tertulis atas manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk kebijakan tertulis yang mencakup area khusus, seperti risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, dan pemanfaatan instrumen keuangan. Risiko yang berasal dari instrumen keuangan yang dihadapi oleh Grup mengandung risiko keuangan, termasuk juga risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Risiko pasar

Grup menghadapi eksposur risiko pasar, yaitu risiko akibat dari menurunnya nilai suatu investasi karena kondisi pasar misalnya suku bunga. Risiko pasar berasal dari posisi terbuka yang terkait dengan produk suku bunga dan ekuitas, yang seluruhnya dipengaruhi oleh pergerakan pasar baik secara spesifik maupun umum, dan perubahan volatilitas tingkat suku bunga pasar atau harga seperti suku bunga, dan produk ekuitas.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar.

Grup tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Grup dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak terhadap laba rugi setelah pajak Grup untuk tahun berjalan.

Risiko tingkat bunga

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai suku bunga wajar adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

43. Financial Risk Management (continued)

Financial risk management (continued)

Risk management is carried out under policies approved by Directors. The Directors provides written principles for overall risk management, as well as written policies covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, and use of the financial instruments. The risk arising from financial instruments to which the Group is exposed are financial risks, which include market risk, credit risk, and liquidity risk.

Market risk

The Group takes on exposure to market risks exposure, which is the risk resulting from a decrease in the value of an investment due to market conditions, such as interest rates. Market risk arise from open positions in interest rate, and equity products, all of which are exposed to the general and specific market movements and changes in the level of volatility or market rates or prices such as interest rates, and equity products.

Foreign exchange risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

The Group has no significant foreign exchange risks since the Group's transactions are performed using the Group's functional currency. As at 31 December 2024 and 2023, the Group has no financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Group's functional currency will not impact to the Group's current year profit or loss after tax.

Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Fair value interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

43. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Grup menghadapi dampak dari fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas. Margin suku bunga bisa meningkat sebagai hasil dari perubahan tersebut, namun juga dapat mengurangi kerugian ketika terdapat pergerakan yang tidak diharapkan. Direksi menetapkan batas atas tingkat ketidaksesuaian dari suku bunga *repricing* dan *value at risk* yang bisa dilakukan, yang dimonitor secara harian oleh divisi yang membidangi investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup tidak memiliki risiko tingkat suku bunga yang signifikan. Sebagian besar aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup tidak dikenakan bunga atau berbunga tetap sehingga tidak memiliki Eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian finansial akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Grup. Grup juga menghadapi risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada efek utang dan reksadana.

Risiko kredit merupakan salah satu risiko terbesar bagi Grup sehingga manajemen melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati. Manajemen dan pengendalian atas risiko kredit dipusatkan pada tim manajemen risiko kredit yang bertanggung jawab kepada Direksi. Penilaian risiko kredit atas suatu portofolio aset memerlukan estimasi-estimasi seperti kemungkinan terjadinya wanprestasi, rasio kerugian, dan korelasi wanprestasi antara lawan transaksi.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan (jika ada) hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti objektif atas penurunan nilai).

43. Financial Risk Management (continued)

Financial risk management (continued)

The Group takes on exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on both its fair value and cash flow risks. Interest margins may increase as a result of such changes, but may reduce losses in the event that unexpected movements arise. The Directors set limits on the level of mismatch of interest rate repricing and value at risk that may be undertaken, which is monitored daily by the investment division.

As at December 31, 2024 and 2023, the Group has no significant interest rate risk. Most of the Group's financial assets and financial liabilities are non-interest bearing or fixed interest rate thus no significant exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on both fair value and cash flow risks.

Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Group's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Group. The Group is also exposed to other credit risks arising from investments in debt securities and mutual funds.

Credit risk is the one of the largest risk for the Group's business, therefore management carefully manages its exposure to credit risk. The credit risk management and control are centralised in a credit risk management team which reports to the Directors. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails estimations as to the likelihood of defaults occurring of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties.

Impairment allowances (if any) are recognized for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statement of financial position (based on objective evidence of impairment).

43. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

43. Financial Risk Management (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

Konsentrasi risiko instrumen keuangan dengan
eksposur risiko kredit

Concentration of risks of financial instruments
with credit risk exposure

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum
Grup terhadap risiko kredit untuk aset
keuangan:

The following table presents the Group's
maximum exposure to credit risk of financial
assets:

	2024 Rp	2023 Rp	
Kas di bank - bersih	233,610	183,902	Cash in banks - net
Deposito wajib dan berjangka - bersih	3,960,252	7,233,120	Statutory and time deposits - net
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu - bersih	1,542,272	1,552,271	Time deposits for certain purposes - net
Efek-efek - bersih	17,791,647	14,745,121	Marketable securities - net
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	1,820,100	2,737,976	Guarantee fee receivables - net
Piutang penjaminan ulang - bersih	572,966	582,178	Re-guarantee payables - net
Piutang hasil investasi - bersih	256,978	224,895	Investment income receivables - net
Aset lain-lain - bersih	5,361	4,282	Other assets - net
Jumlah	26,183,186	27,263,745	Total

a) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian
eksposur kredit maksimum Grup pada nilai
tercatat, yang dikategorikan berdasarkan
sektor industri.

a) Industry sectors

The following table breaks down the
Group's maximum credit exposure at
carrying amounts, as categorised by the
industry sectors.

	2024			
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total
Kas di bank	--	233,623	--	233,623
Deposito wajib dan berjangka	--	3,960,343	--	3,960,343
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	--	1,542,273	--	1,542,273
Efek-efek	12,089,876	4,457,091	1,245,684	17,792,651
Piutang imbal jasa penjaminan	--	4,185,941	--	4,185,941
Piutang penjaminan uang	--	884,303	--	884,303
Piutang hasil investasi	256,978	--	--	256,978
Aset lain-lain	--	91,907	300	92,207
	12,346,854	15,355,481	1,245,984	28,948,319
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	--	(2,765,131)
Jumlah				26,183,188

Allowance for
impairment losses

Total

43. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

43. Financial Risk Management (continued)

a) Sektor industri (lanjutan)

a) Industry sectors (continued)

2023				
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institution	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total
Kas di bank	--	183,906	--	183,906
Deposito wajib dan berjangka	--	7,233,297	--	7,233,297
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	--	1,552,273	--	1,552,273
Efek-efek	11,004,947	2,921,321	820,244	14,746,512
Piutang imbal jasa penjaminan	1,663,631	3,101,070	--	4,764,701
Piutang penjaminan uang	--	851,785	--	851,785
Piutang hasil investasi	191,422	30,161	3,393	224,976
Aset lain-lain	--	56,442	33,857	90,299
	12,860,000	15,930,255	857,494	29,647,749
Cadangan kerugian penurunan nilai				(2,384,004)
Jumlah				27,263,745

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Direksi yakin akan kemampuan untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum.

The table above represents the maximum exposure of credit risk to the Group as at 31 December 2024 and 2023. The Directors are confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk.

b) Kualitas kredit dari aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

b) Credit quality of financial assets

As at 31 December 2024 and 2023, credit risk exposure relating to financial assets are divided as follows:

2024				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total
Kas di bank	233,623	--	--	233,623
Deposito wajib dan berjangka	3,960,343	--	--	3,960,343
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	1,542,273	--	--	1,542,273
Efek-efek	16,993,404	--	799,248	17,792,652
Piutang imbal jasa penjaminan	2,467,272	864,796	853,873	4,185,941
Piutang penjaminan ulang	451,040	--	433,263	884,303
Piutang hasil investasi	256,978	--	--	256,978
Aset lain-lain	--	--	92,207	92,207
	25,904,933	864,796	2,178,591	28,948,320
Cadangan kerugian penurunan nilai				(2,765,131)
Jumlah				26,183,189

43. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

43. Financial Risk Management (continued)

b) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

b) Credit quality of financial assets (continued)

	2023				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas di bank	183,906	--	--	183,906	Cash in banks
Deposito wajib dan berjangka	7,233,297	--	--	7,233,297	Statutory and time deposits
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	1,552,273	--	--	1,552,273	Time deposits for certain purposes
Efek-efek	13,707,350	--	1,039,162	14,746,512	Marketable securities
Piutang imbal jasa penjaminan	22,615	3,900,095	841,991	4,764,701	Guarantee fee receivables
Piutang penjaminan ulang	337,046	--	514,739	851,785	Re-guarantee receivables
Piutang hasil investasi	224,976	--	--	224,976	Investment income receivables
Aset lain-lain	--	--	90,299	90,299	Other assets
	23,261,463	3,900,095	2,486,191	29,647,749	
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	--	(2,384,004)	Allowance for impairment losses
Jumlah				27,263,745	Total

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat dari ketidakmampuan Grup memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Ketidakmampuan Grup memenuhi kewajibannya diakibatkan karena pembayaran manfaat klaim pemegang sertifikat penjaminan, kebutuhan kas dari komitmen kontraktual atau arus keluar kas lainnya, seperti utang yang telah jatuh tempo. Arus kas keluar ini akan menghabiskan sumber daya kas yang tersedia untuk aktivitas operasional, perdagangan dan investasi. Dalam suatu keadaan yang ekstrim, kekurangan likuiditas dapat mengarah pada penurunan posisi keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian dan penjualan aset atau ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen kepada pemegang sertifikat penjaminan.

Risiko ini melekat pada semua operasi penjaminan dan bisa dipengaruhi oleh kejadian spesifik secara institusional dan pasar secara luas termasuk, namun tidak terbatas pada, transaksi kredit, aktivitas merger dan akuisisi, guncangan sistemik dan bencana alam. Grup melakukan evaluasi dan menelaah struktur laporan posisi keuangan dan melakukan analisis serta pengukuran risiko likuiditas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet its obligations when due as a result of policyholder benefit/claim payment, cash requirements from contractual commitments or other cash outflows, such as debt maturities. Such outflows would deplete available cash resources for operational, trading and investment activities. In extreme circumstances, lack of liquidity could result in reductions in the consolidated financial statement of financial position and sales of assets or inability to fulfill policyholder commitment.

The risk is inherent in all insurance operations and can be affected by a range of institution-specific and market-wide events including, but not limited to, credit events, merger and acquisition activity, systemic shocks and natural disasters. The Group evaluates and reviews its statements of financial position structure, by analysing and measuring liquidity risk based on its Risk Management Guideline Standard.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

43. Financial Risk Management (continued)

d) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

d) Credit quality of financial assets (continued)

Profil jatuh tempo ini didasarkan pada jangka waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Selain itu, jika terdapat kebutuhan akan likuiditas, efek-efek dan aset lancar dapat dijual. Kebijakan Grup sehubungan dengan *maturity gap* antara aset dan liabilitas moneter adalah menetapkan *gap limit* yang disesuaikan dengan kemampuan Grup untuk memperoleh likuiditas.

This maturity profile is based on the remaining period to the contractual maturity date. In addition, if the Group encounters liquidity needs, marketable securities and current assets could be liquidated. The Group's policy with regards to the maturity gap between the monetary assets and liabilities is to determine a gap limit which is adjusted to the Group ability to obtain immediate liquidity.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pada *undiscounted cash flows*.

The tables below show the remaining contractual maturities of the Group's financial liabilities based on undiscounted cash flows.

2024					
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>Over 1 year</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	
Utang klaim	289,447	9,779	--	299,226	Claim payables
Utang penjaminan ulang	1,005,112	--	--	1,005,112	Re-guarantee payables
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	3,248,336	11,691,411	--	14,939,747	Liabilities for financial guarantee contract
Akrual dan utang lain-lain	1,386,118	--	--	1,386,118	Accruals and other payables
Jumlah	5,929,013	11,701,190	--	17,630,203	Total
2023					
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>Over 1 year</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	
Utang klaim	81,372	--	--	81,372	Claim payables
Utang penjaminan ulang	633,300	--	--	633,300	Re-guarantee payables
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	2,792,093	--	12,419,373	15,211,466	Liabilities for financial guarantee contract
Akrual dan utang lain-lain	1,486,701	48,713	--	1,535,414	Accruals and other payables
Jumlah	4,993,466	48,713	12,419,373	17,461,552	Total

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, semua liabilitas Grup tidak mengandung tingkat suku bunga sehingga tidak ada perhitungan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

As at 31 December 2024 and 2023, all the Group's liabilities did not consist of interest rate therefore no disclosure on contractual undiscounted cash flows.

43. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Manajemen risiko permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholder* lainnya, dan memelihara struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya operasional.

Grup telah memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Semua aset keuangan yang diklasifikasikan dalam pinjaman yang diberikan, piutang, atau liabilitas keuangan, diukur dengan amortisasi. Aset tersebut mempunyai jatuh tempo jangka pendek sehingga nilai tercatatnya dapat menjadi perkiraan yang layak atas nilai wajarnya. Oleh karena itu, nilai wajar untuk aset dan liabilitas yang diukur melalui laporan laba rugi adalah sama dengan nilai tercatatnya.

Grup menyajikan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

Tingkat 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas;

Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*unobservable inputs*).

43. Financial Risk Management (continued)

Capital risk management

The Group's objectives when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

The Group has fulfilled the requirements outline in the regulation.

Fair value of Financial assets and liabilities

All financial assets classified as loans, receivables or financial liabilities are measured by amortization. These assets have short term maturities so their carrying amount is a reasonable approximation of their fair value. Therefore, the fair value of the assets and liabilities measured through profit and loss is the same as their carrying amount.

The Group presents the fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:

Level 1

Quoted prices (unadjusted) in active markets for associated assets or liabilities;

Level 2

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and

Level 3

Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

43. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

43. Financial Risk Management (continued)

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar

Tabel berikut menyajikan aset keuangan Grup yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Financial instruments measured at fair value

The following tables show the Group's financial assets that are measured at fair value as at 31 December 2024 and 2023:

2024					
	Nilai tercatat Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset					Assets
Efek-efek	9,911,249	9,247,872	650,235	13,142	9,911,249
					Marketable securities
2023					
	Nilai tercatat Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset					Assets
Efek-efek	8,898,584	180,772	8,783,190	570,986	9,534,948
					Marketable securities

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Tabel berikut menyajikan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar yang dimiliki oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Financial instruments not measured at fair value

The table below summarises the Group's financial assets and liabilities that are not measured at fair value as at 31 December 2024 and 2023.

2024		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan		Financial assets
Kas di bank - bersih	233,610	233,610
Deposito wajib dan		Cash in banks - net
deposito berjangka - bersih	3,960,252	3,960,252
Deposito berjangka untuk		Statutory deposits and
tujuan tertentu - bersih	1,542,272	time deposits - net
Efek-efek bersih	7,880,398	Time deposits for
Piutang imbal jasa		certain purposes - net
penjaminan - bersih	1,820,100	Marketable securities - net
Piutang penjaminan ulang -		Guarantee fee receivables - net
bersih	572,967	Re-guarantee receivables - net
Piutang hasil investasi - bersih	256,978	Investment income receivables - net
Aset lain-lain - bersih	5,361	Other assets - net
Jumlah	16,271,938	Total
Liabilitas keuangan		Financial liabilities
Utang klaim	299,226	Claim payables
Utang penjaminan ulang	1,005,112	Re-guarantee payables
Liabilitas kontrak jaminan		Liabilities for financial
keuangan	14,939,747	guarantee contracts
Akrual dan utang lain-lain	1,346,010	Accruals and other payables
Jumlah	17,590,095	Total

43. Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

43. Financial Risk Management (continued)

	2023		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas di bank - bersih	183,902	183,902	Cash in banks - net
Deposito wajib dan deposito berjangka - bersih	7,233,120	7,233,120	Statutory deposits and time deposits - net
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu - bersih	1,552,271	1,552,271	Time deposits for certain purposes - net
Efek-efek bersih	5,220,337	5,220,337	Marketable securities - net
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	2,737,976	2,737,976	Guarantee fee receivables - net
Piutang penjaminan ulang - bersih	582,178	582,178	Re-guarantee receivables - net
Piutang hasil investasi - bersih	224,895	224,895	Investment income receivables - net
Aset lain-lain — bersih	4,282	4,282	Other assets - net
Jumlah	17,738,961	17,738,961	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang klaim	81,372	81,372	Claim payables
Utang penjaminan ulang	633,300	633,300	Re-guarantee payables
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	15,211,466	15,211,466	Liabilities for financial guarantee contracts
Akrual dan utang lain-lain	1,535,414	1,535,414	Accruals and other payables
Jumlah	17,461,552	17,461,552	Total

Semua aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan pinjaman yang diberikan dan piutang serta liabilitas keuangan yang diukur melalui biaya yang diamortisasi mempunyai jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset yang bukan merupakan aset keuangan mempunyai jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan yang bervariasi sesuai dengan jatuh tempo aset tersebut.

All financial assets classified as financial assets at fair value through profit or loss, financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and loans and receivables and financial liabilities at amortized cost have maturities of less than or equals 12 months. Financial assets classified into held-to-maturity financial assets and assets which are not financial assets have maturities of more than 12 months which vary according to the maturity of the asset.

44. Informasi tambahan yang tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia (Tidak Audit)

44. Additional information that is not required by Indonesia Accounting Standards (Unaudited)

Risiko manajemen modal

Tujuan Grup dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholders* lainnya, dan memelihara struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya operasional.

Capital management risk

The Group's objective in managing its capital is to safeguard the Group's going concern ability in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

**44. Informasi tambahan yang tidak
dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi
Indonesia (Tidak Diaudit) (lanjutan)**

**44. Additional information that is not required
by Indonesia Accounting Standards
(Unaudited) (continued)**

Risiko manajemen modal (lanjutan)

Capital management risk (continued)

Grup memonitor *gearing ratio* yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.2/POJK.05/2017 tertanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. *Gearing ratio* adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.

The Group monitors the *gearing ratio* which is calculated in accordance with Financial Services of Authority of the Republic of Indonesia Decree No. 2/POJK.05/2017 dated 11 January 2017 regarding The Business Operation of Guarantor Institution. *Gearing ratio* is the ratio between the total outstanding value of the Guarantee that is borne by itself with the net capital of the Guarantor at a certain time.

Gearing ratio penjaminan untuk usaha produktif ditetapkan paling tinggi 20 (dua puluh) kali dari ekuitas Grup dan *gearing ratio* total ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali dari ekuitas Grup.

The *gearing ratio* for guarantees for productive businesses is set at a maximum of 20 (twenty) times the equity of the Group and the total *gearing ratio* is set at no higher than 40 (forty) times the equity of the Group.

Gearing ratio per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 2.44 dan 2.37. Grup telah memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut (tidak diaudit).

Gearing ratio December 31, 2024 and 2023 is amounting to 2,44 and 2,37 respectively. The Group has fulfilled the requirements outlined in the regulation (unaudited).

45. Reklasifikasi

45. Reclassification

31 Desember 2023/December 31, 2023				
	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Setelah reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN:				CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION:
Aset				Assets
Pajak dibayar dimuka	--	50.415	50.415	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	115.800	(50.415)	65.385	Prepaid expenses
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN:				CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Beban usaha				Operating expenses
Umum dan administrasi	262.224	10.663	272.887	
Pendapatan investasi				Investment income
Beban investasi	10.663	(10.663)	--	Investment expense
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN:				CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS:
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flow from investing activities
Pembelian aset tetap	100.100	(2.643)	97.457	Acquisition of fixed assets
Pembelian aset tak berwujud	--	2.643	2.643	Acquisition of intangible assets

46. Informasi Tambahan Arus Kas

46. Supplementary Information for Cash Flows

2024					
	31 Des/ Dec 31, 2023	Arus Kas/ Cash Flow	Perubahan non kas/ Non cash changes	31 Des/ Dec 31, 2024	
Liabilitas sewa	48,713	(55,528)	53,363	46,548	Lease liabilities
Jumlah	<u>48,713</u>	<u>(55,528)</u>	<u>53,363</u>	<u>46,548</u>	Total
2023					
	31 Des/ Dec 31, 2022	Arus Kas/ Cash Flow	Perubahan non kas/ Non cash changes	31 Des/ Dec 31, 2023	
Liabilitas sewa	29,129	(45,425)	65,009	48,713	Lease liabilities
Jumlah	<u>29,129</u>	<u>(45,425)</u>	<u>65,009</u>	<u>48,713</u>	Total

47. Standar Baru dan Amendemen atas Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

47. Standard and Amendment to Standards which has been Issued but Not Yet Effective

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran;
- PSAK 117: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;

New Standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability;
- PSAK 117: Insurance Contract; and
- Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 103: Business Combinations;
- PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
- PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;
- PSAK 109: Financial Instruments;
- PSAK 115: Income from Contracts with Customers;
- PSAK 201: Presentation of Financial Statements;
- PSAK 207: Statement of Cash Flows;
- PSAK 216: Fixed Assets;
- PSAK 219: Employee Benefits;
- PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;

**47. Standar Baru dan Amendemen atas Standar
yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku
Efektif (lanjutan)**

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen atas standar tersebut.

**47. Standard and Amendment to Standards
which has been Issued but Not Yet Effective
(continued)**

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;
- PSAK 236 Impairment of Asset;
- PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;
- PSAK 238: Intangible Assets; and
- PSAK 240: Investment Property.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the implementation those new standard and amendments to standards.

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Million Rupiah,
unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp
ASET		
Kas dan kas di bank - bersih	224,067	159,253
Deposito wajib dan berjangka - bersih	3,655,409	7,009,990
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu - bersih	756,139	756,138
Efek-efek - bersih		
- Efek utang	15,248,244	12,250,631
- Sukuk	353,906	255,610
- Reksadana	1,396,008	1,449,810
- Saham	175,740	184,154
- Efek beragun aset	628	3,063
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	1,803,608	2,728,574
Piutang penjaminan ulang - bersih	491,277	395,794
Piutang hasil investasi - bersih	246,701	214,853
Pajak dibayar dimuka	55,303	--
Biaya dibayar dimuka	46,098	61,831
Aset tetap - bersih	631,999	543,312
Aset takberwujud - bersih	97,981	67,862
Penjaminan ulang dibayar dimuka	1,497,582	936,226
Aset pengembalian -bersih	1,414,594	791,644
Biaya akuisisi tangguhan	72,127	91,850
Investasi pada entitas anak	705,121	705,121
Aset pajak tangguhan - bersih	1,777,887	1,874,325
Aset lain-lain - bersih	4,098	4,202
JUMLAH ASET	30,654,517	30,484,244
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Utang klaim	297,696	76,262
Utang penjaminan ulang	988,195	579,443
Akrual dan utang lain-lain	1,325,474	1,422,264
Utang pajak	5,829	124,902
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	14,939,747	15,211,466
Pendapatan komisi ditangguhkan	218,411	128,585
Liabilitas imbalan kerja	75,316	76,299
JUMLAH LIABILITAS	17,850,668	17,619,221

ASSETS
Cash and cash in banks - net
Statutory and time deposits - net
Time deposits for certain purposes - net
Marketable securities - net
Debt securities -
Sukuk -
Mutual funds -
Shares -
Security (Asset underlying) -
Guarantee fee receivables - net
Re-guarantee receivables - net
Investment income receivables - net
Prepaid tax
Prepaid expenses
Fixed assets - net
Intangible assets - net
Prepaid re-guarantee
Reimbursement assets - net
Deferred acquisition cost
Investment in subsidiary
Deferred tax assets - net
Other assets - net
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Claim payables
Re-guarantee payables
Accruals and other payables
Taxes payables
Liabilities for financial guarantee contracts
Deferred commission income
Employee benefits liabilities
TOTAL LIABILITIES

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
 December 31, 2024 and 2023
 (Expressed in Million Rupiah,
 unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
EKUITAS			EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			Equity attributable to equity holders of the parent entity
Modal saham:			Share capital:
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp1.365.160 (nilai penuh) per lembar saham			Class A Dwiwarna - nominal amount - Rp1,365,160 (full amount) at par per share
- Seri B - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham			Class B - nominal amount - Rp1,000,000 (full amount) at par per share
Modal dasar:			Authorized capital:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			Class A Dwiwarna - 1 share -
- Seri B - 30.000.000 saham			Class B - 30,000,000 shares -
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			Issued and fully paid:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			Class A Dwiwarna - 1 share -
- Seri B - 10.638.732 saham	10,638,733	10,638,733	Class B - 10,638,732 shares -
Pengukuran kembali imbangan pascakerja	(18,575)	(20,311)	Remeasurement of post- employment benefits
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(357,068)	(264,533)	Unrealized losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	1,433,373	1,108,174	Appropriated retained earnings
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	1,107,386	1,402,960	Unappropriated retained earnings
JUMLAH EKUITAS	12,803,849	12,865,023	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	30,654,517	30,484,244	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Million Rupiah,
unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN PENJAMINAN		
Imbal jasa penjaminan bruto	7,733,031	6,738,700
Premi penjaminan ulang	(1,065,168)	(717,410)
Jumlah pendapatan penjaminan - bersih	6,667,863	6,021,290
BEBAN PENJAMINAN		
Beban klaim bruto	8,827,602	5,476,738
Klaim penjaminan ulang	(968,440)	(594,121)
Penurunan cadangan klaim	(1,044,705)	(541,970)
Pendapatan subrogasi - bersih	(1,882,186)	(1,016,532)
Jumlah beban penjaminan - bersih	4,932,271	3,324,116
Pendapatan penjaminan - bersih	1,735,592	2,697,175
Pendapatan komisi	154,271	92,651
Beban komisi	(26,954)	(31,338)
Pendapatan investasi - bersih	1,365,129	1,107,693
Beban usaha	(1,839,342)	(2,127,080)
Pendapatan lain-lain - bersih	13,448	12,182
Beban pajak final	(167,873)	(139,635)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,234,271	1,611,648
Beban pajak penghasilan	(126,885)	(208,688)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1,107,386	1,402,960
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2,225	(1,828)
Efek pajak terkait	(489)	402
Kerugian yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(8,413)	(9,473)
	(6,677)	(10,899)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian)/pendapatan yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(84,122)	49,974
Efek pajak terkait	--	4,033
	(84,122)	54,007
(Kerugian)/pendapatan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(90,799)	43,108
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,016,587	1,446,069

GUARANTEE INCOME
Gross guarantee fee income
Re-guarantee premiums
Total guarantee income - net
GUARANTEE EXPENSES
Gross claim expenses
Re-guarantee claims
Decrease in claim reserves
Subrogation income - net
Total guarantee expenses - net
Net guarantee income
Commission income
Commission expenses
Investment income - net
Operating expenses
Other income - net
Final tax expenses
PROFIT BEFORE INCOME TAX
Income tax expenses
NET PROFIT FOR THE YEAR
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Items that will not be reclassified to profit or loss:
Remeasurement of employee benefits liabilities
Related tax effect
Unrealized losses on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Items that will be reclassified to profit or loss:
Unrealized (losses)/gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Related tax effect
Other comprehensive (loss)/income for the year, net of tax
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY**

STATEMENTS CHANGES IN OF EQUITY

For the Years Ended

December 31, 2024 and 2023

(Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak/ Remeasurement of employee benefit liabilities, net of tax	(Kerugian)/ keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ Unrealized (losses)/gain on marketable securities on fair value through other comprehensive income, net of tax	Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Jumlah/ Total
Saldo 31 Desember 2022		10,638,733	(18,885)	(309,067)	977,523	1,090,528	12,378,832
Cadangan umum		--	--	--	1,090,528	(1,090,528)	--
Dividen	26	--	--	--	(959,877)	--	(959,877)
Laba bersih tahun berjalan		--	--	--	--	1,402,960	1,402,960
Penghasilan komprehensif lain:							
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		--	--	--	--	--	--
Pengukuran kembali imbalan pascakerja		--	--	44,534	--	--	44,534
Saldo 31 Desember 2023		10,638,733	(20,311)	(264,533)	1,108,174	1,402,960	12,865,023
Cadangan umum		--	--	--	1,402,960	(1,402,960)	--
Dividen	26	--	--	--	(1,077,761)	--	(1,077,761)
Laba bersih tahun berjalan		--	--	--	--	1,107,386	1,107,386
Penghasilan komprehensif lain:							
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		--	--	(92,535)	--	--	--
Pengukuran kembali imbalan pascakerja		--	1,736	--	--	--	(92,535)
Saldo 31 Desember 2024		10,638,733	(18,575)	(357,068)	1,433,373	1,107,386	12,803,849

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
PARENT ENTITY
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Million Rupiah,
unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp
ARUS KAS DARI		
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan imbal jasa penjaminan	7,237,797	10,721,455
Penerimaan dari mitra penjaminan ulang	849,094	424,619
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya	2,117,752	1,057,873
Pembayaran premi penjaminan ulang	(1,031,262)	(583,278)
Pembayaran klaim	(8,606,169)	(5,453,094)
Pembayaran beban usaha	(538,225)	(531,564)
Pembayaran kepada karyawan	(822,238)	(525,201)
Pembayaran pajak penghasilan	(180,316)	(750,567)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas operasi	(973,567)	4,360,243
ARUS KAS DARI		
AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan hasil investasi	1,568,691	1,051,412
Penempatan investasi	(5,360,534)	(5,551,356)
Penjualan investasi	4,679,773	997,429
Pembelian aset tetap	(120,281)	(86,616)
Penjualan aset tetap	1,068	--
Pembelian aset takberwujud	(35,826)	--
Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi	732,891	(3,589,131)
ARUS KAS DARI		
AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran sewa	(44,778)	(40,202)
Dividen	(1,077,759)	(959,877)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1,122,537)	(1,000,079)
Penurunan pada kas dan setara kas	(1,363,213)	(228,967)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	5,007,780	5,236,747
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3,644,567	5,007,780
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:		
Kas dan kas di bank	224,067	159,253
Deposito wajib dan berjangka (dibawah tiga bulan)	3,420,500	4,848,527
	3,644,567	5,007,780

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Receipt from guarantee fees
Receipt from re-guarantee partners
Receipt from other operating activities
Payment of re-guarantee premiums
Payment of claims
Payment of operating expenses
Payment to employee
Payment of income tax
Net cash flows (used to)/ provided from operating activities

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Receipt from investment income
Purchase of investments
Sale of investments
Acquisition of fixed assets
Sale of fixed assets
Acquisition of intangible assets
Net cash flows provided from/ (used to) investing activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Lease payments
Dividend
Net cash flows used in financing activities
Decrease in cash and cash equivalents

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:
Cash and cash in banks
Statutory and time deposits (below 3 months)

MEMPERKOKOH FONDASI SEBAGAI PREFERENSI UTAMA AKSESIBILITAS FINANSIAL UMKM

STRENGTHENING THE FOUNDATION AS THE PREFERRED
FINANCIAL ACCESSIBILITY FOR MSMEs



A member of **IFG**

PT Jaminan Kredit Indonesia

Gedung Jamkrindo. Jl. Angkasa B-9
Kavling 6 Kota Baru Bandar - Kemayoran,
Jakarta Pusat, 10610

Telp : (021) 6540335
Email : contact@jamkrindo.co.id

